



United Nations
Educational, Scientific and
Cultural Organization



World
Heritage
Convention



GEOPARK
SAWAHLUNTO

Ombilin Coal Mining Heritage Of Sawahlunto
inscribed on the World Heritage List in 2019

PERATURAN WALIKOTA SAWAHLUNTO NOMOR 40 TAHUN 2020 TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2021



Deri Asta, SH
Walikota Sawahlunto



H. Zohirin Sayuti, SE
Wakil Walikota Sawahlunto

R K P D

KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2021



BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

**KOTA SAWAHLUNTO
TAHUN 2020**



**BARENITBANGDA
KOTA SAWAHLUNTO**



WALIKOTA SAWAHLUNTO
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA SAWAHLUNTO
NOMOR 40 TAHUN 2020

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SAWAHLUNTO,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

1

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Republik Indonesia Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1990 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sawahlunto, Kabupaten Daerah Tingkat II Sawahlunto/Sijunjung dan Kabupaten Daerah Tingkat II Solok (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3423);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);



13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021;
19. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7);
20. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 126), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Provinsi

f b

Sumatera Barat Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 144);

21. Peraturan Gubernur Nomor 41 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021;
22. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 8 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Sawahlunto Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2012 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 7);
23. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 16 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2013 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 21);
24. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2015 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 42);
25. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 11 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2016 Nomor 11);
26. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2016 Nomor 14);
27. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 85);
28. Peraturan Walikota Nomor 31 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kota Sawahlunto (Berita Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2016 Nomor 31), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 41 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 31 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kota Sawahlunto.

f b

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2021

Pasal 1

- (1) Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 yang selanjutnya disingkat RKPD merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang memuat kebijakan pembangunan yang didanai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Kebijakan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk mendorong partisipasi masyarakat dan dunia usaha.
- (3) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan memperhatikan Rencana Kerja Pemerintah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Sawahlunto.

Pasal 2

- (1) RKPD disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

BAB III : KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

BAB IV : SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

BAB V : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

BAB VI : KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

BAB VII : PENUTUP

- (2) Rumusan materi dan uraian program serta kegiatan RKPD sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 3

Organisasi Perangkat Daerah harus mempedomani RKPD ini dalam penyusunan rencana kerja tahun 2021 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sesuai dengan tugasnya masing-masing.

Pasal 4

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sawahlunto.

Ditetapkan di Sawahlunto
pada tanggal **13** Juli 2020

WALIKOTA SAWAHLUNTO,

ttd

DERI ASTA

Diundangkan di Sawahlunto
pada tanggal **13** Juli 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA SAWAHLUNTO,

ttd

AMBUN KADRI

BERITA DAERAH KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2020 NOMOR **40**

13 JUL 2020

Salinan sesuai dengan aslinya
PL. KEPALA BAGIAN HUKUM DAN MAN



INDRA MULYONO, SH
NIP. 19820411 201301 1 014



LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA SAWAHLUNTO
NOMOR : 40 TAHUN 2020
TANGGAL : 13 JULI 2020
TENTANG : RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH
KOTA SAWAHLUNTO
TAHUN 2021

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu. Perencanaan Pembangunan Daerah disusun melalui 4 Pendekatan yaitu Politik (penjabaran dari agenda-agenda pembangunan yang ditawarkan KDH terpilih), Teknokratik (menggunakan metoda dan kerangka pikir ilmiah), Partisipatif (melibatkan semua pemangku kepentingan) dan *Top down & Bottom Up* (diselaraskan melalui musyawarah Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Desa).

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) yang terdiri dari RKPD, Kebijakan Umum APBD dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Sebagaimana maksud dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, RKPD memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Sejak awal tahun hingga bulan Mei tahun 2020, hampir seluruh wilayah Indonesia, termasuk Provinsi Sumatera Barat, telah terjangkit penyebaran pandemi Covid-19. Pandemi Covid-19 telah menimbulkan disrupsi pada kehidupan manusia, menyebabkan terhentinya aktivitas ekonomi negara dan berakibat terjadinya resesi di dunia. Dampak yang dirasakan Kota Sawahlunto juga cukup besar dengan terputusnya mata-rantai pasokan barang dan jasa, terganggunya mobilitas



masyarakat, dan terhentinya kegiatan ekonomi khususnya pada sektor industri dan pariwisata yang berdampak pada meningkatnya angka-angka pengangguran dan kemiskinan serta pada akhirnya menimbulkan kontraksi pada pertumbuhan ekonomi daerah dan nasional. Keadaan ini tentu harus dikendalikan, maka menjadi keharusan bagi Pemerintah Pusat dan Daerah untuk melakukan orientasi baru dalam perencanaan pembangunan pada tahun 2021.

Dengan demikian perencanaan pembangunan pada tahun 2021 akan difokuskan pada pemulihan kehidupan masyarakat dan roda perekonomian untuk dapat kembali berjalan lancar, yaitu yang terkait dengan sektor-sektor industri, pariwisata dan investasi. Juga direncanakan untuk melakukan peningkatan sistem kesehatan, memperkuat sistem ketahanan pangan, membangun sistem perlindungan sosial secara terpadu, serta lebih mengefektifkan sistem ketahanan bencana, untuk bencana alam maupun bukan-alam.

Selain itu, acuan dalam penyusunan RKPD Tahun 2021 adalah Prioritas Pembangunan Nasional, Prioritas Pembangunan Propinsi dan hasil evaluasi Pelaksanaan RKPD tahun lalu. Dari kedua prioritas tersebut disusun prioritas pembangunan daerah Tahun 2021 berdasarkan pada permasalahan daerah yang dihadapi tahun sebelumnya dan kemungkinan tantangan yang akan dihadapi daerah pada Tahun 2021. Berdasarkan prioritas pembangunan daerah tersebut dijabarkan sasaran, arah kebijakan, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2021. Oleh karena itu, dengan memperhatikan hasil evaluasi tersebut dan kondisi Indonesia pada tahun 2020 maka tema RKPD 2021, ***“Melanjutkan Pembangunan Infrastruktur yang Adil dan Merata dalam Mewujudkan Wisata Tambang yang Berbudaya dan Pengembangan Ekonomi Lokal”***.

1.2 DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Dalam penyusunan RKPD peraturan/perundangan yang digunakan sebagai dasar hukum adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia



- Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Republik Indonesia Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1990 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sawahlunto, Kabupaten Daerah Tingkat II Sawahlunto/Sijunjung dan Kabupaten Daerah Tingkat II Solok (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3423);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

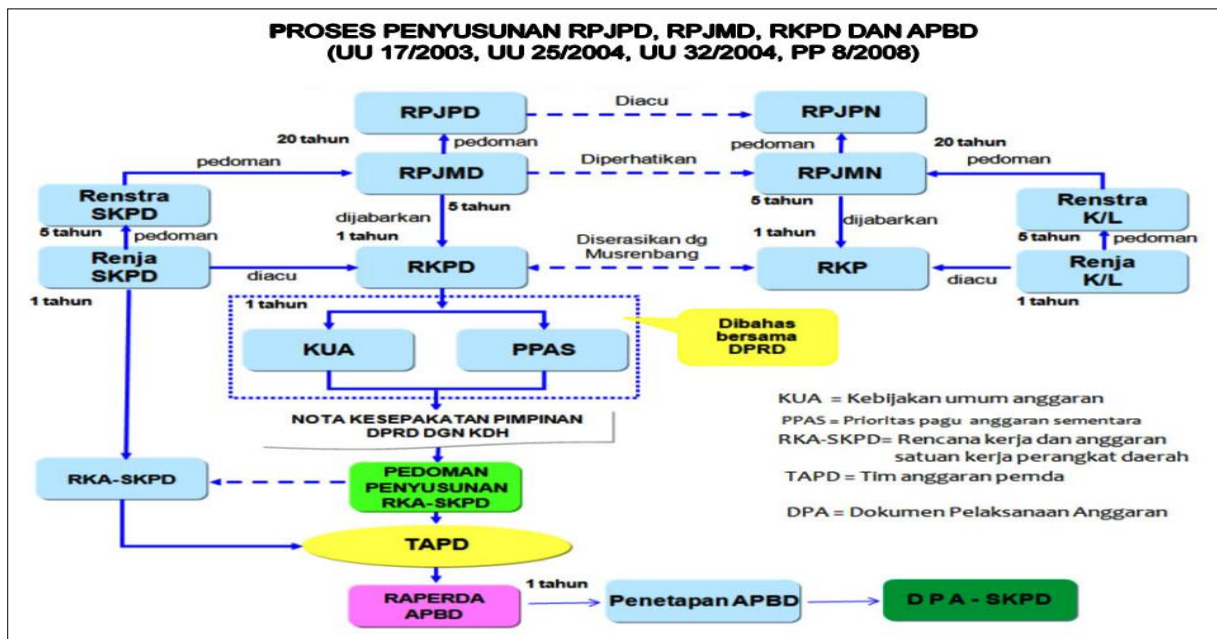


18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021;
20. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7);
21. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 126), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 144);
22. Peraturan Gubernur Nomor 41 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021;
23. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 8 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Sawahlunto Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2012 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 7);
24. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 16 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2013 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 21);
25. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 11 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2016 Nomor 11);
26. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2016 Nomor 14);
27. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 85);
28. Peraturan Walikota Nomor 31 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kota Sawahlunto (Berita Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2016 Nomor 31), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 41 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 31 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kota Sawahlunto.

1.3 HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN

Dalam penyusunan RKPD 2021 berpedoman pada dokumen perencanaan pembangunan lainnya, seperti rencana tata ruang, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana pembangunan jangka menengah provinsi serta memperhatikan RPJP dan RPJM Nasional. Di samping itu, RKPD Kota Sawahlunto ini disusun dengan memperhatikan sumber daya dan potensi yang dimiliki, faktor-faktor keberhasilan, evaluasi kinerja pembangunan tahun sebelumnya serta isu-isu strategis yang berkembang, seperti Pandemi Covid-19.

Dokumen RKPD ini tidak dapat dipisahkan dengan dokumen perencanaan lainnya berdasarkan kerangka waktu, yaitu (1) Rencana Jangka Panjang Daerah (20 tahun), (2) Rencana Jangka Menengah Daerah (5 tahun). Secara substansi, keberadaan RKPD membentuk keterkaitan secara hierarki dengan RPJP Nasional 2005-2025, RPJM Nasional 2015-2019, RPJPD Provinsi Sumatera Barat 2005-2025, RPJPD Kota Sawahlunto 2005-2025, RPJMD Provinsi Sumatera 2016-2021 dan RPJMD Kota Sawahlunto 2018-2023. Perencanaan pembangunan daerah juga mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah. Hubungan Dokumen tersebut dapat dilihat pada gambar sebagai berikut:



**Gambar 1.1. Hubungan Antar Dokumen
(UU 17/2003; UU 25/2004; PP 8/2008)**

**Tahapan Penyusunan RKP Kota Sawahlunto Tahun 2021**

| NO | URAIAN KEGIATAN | REALISASI JADWAL/ WAKTU |
|----|--|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| I | Persiapan Penyusunan RKP Persiapan Penyusunan RKP, meliputi : 1. Penyusunan rancangan keputusan KADA tentang pembentukan tim penyusun RKP; 2. Orientasi mengenai RKP; 3. Penyusunan agenda kerja tim penyusun RKP; 4. Penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan SIPD. | Desember 2019 |
| II | Penyusunan Rancangan Awal RKP 1. Penyusunan rancangan awal RKP Kota Sawahlunto Tahun 2021 berpedoman pada (RPJMD Kota + rancangan awal RKP provinsi + RKP + program strategis nasional + pedoman penyusunan RKP). Berpedoman pada RKP dan program strategis nasional , yaitu penyesuaian prioritas pembangunan Daerah, program serta kegiatan tahunan Daerah dengan tema, agenda pembangunan dan sasaran pengembangan wilayah dalam RKP serta program strategis nasional lainnya. Berpedoman pada rancangan awal RKP provinsi dilakukan melalui penyesuaian sasaran dan prioritas pembangunan Daerah serta program dan kegiatan pembangunan Daerah kota dengan sasaran dan prioritas pembangunan provinsi serta program dan kegiatan pembangunan Daerah provinsi. Penyusunan Rancangan Awal RKP mencakup: 1. Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah; 2. Analisis Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah; 3. Analisis Kapasitas Riil Keuangan Daerah; 4. Penelaahan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah; 5. Perumusan Permasalahan Pembangunan Daerah; 6. Penelaahan Terhadap Sasaran RPJMD; 7. Penelaahan Terhadap Arah Kebijakan RPJMD; 8. Penelaahan Terhadap Kebijakan Pemerintah pada RKP dan program strategis nasional; 9. Penelaahan Pokok-Pokok Pikiran DPRD; <i>Pokok-pokok pikiran DPRD:</i> <ul style="list-style-type: none">• adalah saran dan pendapat berdasarkan hasil <i>reses/penjaringan aspirasi masyarakat</i>• sebagai bahan perumusan kegiatan, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran yang selaras dengan pencapaian sasaran pembangunan dalam Perda tentang RPJMD.• <i>Saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran DPRD disampaikan secara tertulis kepada Kepala Bappeda. (psl .78 ayat (3) permendagri 86/2017)</i> 10. Perumusan Prioritas Pembangunan Daerah; 11. Perumusan Rencana Kerja Program dan Pendanaan. | Januari 2020 |



| NO | URAIAN KEGIATAN | REALISASI JADWAL/ WAKTU |
|----|--|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| | Sistematika Hasil Perumusan Rancangan Awal RKPD : 1. Pendahuluan 2. Gambaran Umum Kondisi Daerah; 3. Kerangka Ekonomi Dan Keuangan Daerah; 4. Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah; 5. Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah; 6. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 7. Inovasi Daerah 8. Penutup. | |
| 2. | Barenlitbangda menyelenggarakan Forum Konsultasi Publik (FKP) untuk memperoleh masukan dan saran terhadap Rancangan Awal RKPD/ Rancangan RKPD. Masukan dan saran hasil Forum Konsultasi Publik (FKP) dirumuskan dalam Berita Acara Kesepakatan yang ditandatangani oleh Kepala Barenlitbangda dan Kepala Perangkat Daerah serta perwakilan pemangku kepentingan yang hadir. | 9 Maret 2020 |
| 3. | Barenlitbangda menyempurnakan Rancangan Awal RKPD berdasarkan Berita Acara Kesepakatan . | Maret 2020 |
| 4. | Barenlitbangda mengajukan rancangan awal RKPD yang disempurnakan kepada KADA melalui Sekda untuk memperoleh persetujuan sebagai bahan penyempurnaan . Pengajuan rancangan awal Renja Perangkat Daerah, dilengkapi dengan : <ul style="list-style-type: none">• net konsep surat edaran KADA tentang pedoman penyempurnaan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah;• rancangan awal RKPD. | Minggu I Februari 2020 |
| 5. | Barenlitbangda menyampaikan Surat Edaran KADA kepada Kepala Perangkat Daerah. Surat Edaran KADA memuat : <ul style="list-style-type: none">• agenda penyusunan RKPD;• pelaksanaan Forum Perangkat Daerah / Lintas Perangkat Daerah;• Musrenbang RKPD;• batas waktu penyampaian rancangan awal Renja Perangkat Daerah kepada Bappeda untuk diverifikasi. Surat Edaran KADA dilengkapi dengan lampiran: a. Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah; b. Program dan Kegiatan Perangkat Daerah disertai indikator dan target kinerja serta pagu indikatif. | Minggu II Februari 2020 |
| 6. | Kepala Perangkat Daerah menyempurnakan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah. Berdasarkan Surat Edaran KADA tentang pedoman penyempurnaan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah. | Minggu III Februari 2020 |
| 7. | Forum Perangkat Daerah / Lintas Perangkat Daerah <ul style="list-style-type: none">• Diselenggarakan oleh Perangkat Daerah untuk membahas Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah yang telah disempurnakan | Minggu III Februari 2020 |



| NO | URAIAN KEGIATAN | REALISASI JADWAL/ WAKTU |
|-----|---|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| | <ul style="list-style-type: none">Pembahasan dilakukan dengan pemangku kepentingan untuk memperoleh saran dan pertimbangan. | |
| 8. | Perangkat Daerah menyempurnakan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah berdasarkan hasil Forum Perangkat Daerah / Lintas Perangkat Daerah. | Minggu IV Februari 2019 |
| 9. | Kepala Perangkat Daerah menyampaikan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah yang telah disempurnakan kepada Barenlitbangda untuk diverifikasi. Verifikasi dilakukan untuk memastikan kesesuaian Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah dengan Rancangan Awal RKPD | Minggu I Maret 2020 |
| III | Penyusunan Rancangan RKPD | |
| 1. | Gubernur menyampaikan Surat Edaran tentang rancangan RKPD provinsi kepada bupati/wali kota . Surat Edaran memuat : <ul style="list-style-type: none">Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah;Arah kebijakan pembangunan kewilayahan kab./kota lingkup provinsi. Surat Edaran dilengkapi dengan lampiran : <ol style="list-style-type: none">Jadwal Pelaksanaan Musrenbang Provinsi;Rancangan RKPD provinsi | Minggu IV Februari 2020 |
| 2. | Penyusunan Rancangan RKPD adalah proses penyempurnaan rancangan awal RKPD berdasarkan : <ol style="list-style-type: none">Rancangan awal Renja seluruh OPD yang telah diverifikasi Bappeda;Hasil penelaahan terhadap rancangan RKPD provinsi, RKP dan program strategis nasional. | Minggu I-III Maret 2019 |
| 3. | Barenlitbangda mengajukan rancangan RKPD kepada KADA melalui Sekda dalam rangka memperoleh persetujuan terhadap : <ol style="list-style-type: none">rancangan RKPD kab./kota;pelaksanaan Musrenbang RKPD kab./kota | Minggu IV Maret 2020 |
| IV | Musrenbang RKPD Kota Sawahlunto <ul style="list-style-type: none">Musrenbang RKPD Kota Sawahlunto dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh Bappeda kab./kotaMusrenbang RKPD dihadiri oleh para pemangku kepentingan. Musrenbang RKPD Kota Sawahlunto bertujuan untuk membahas rancangan RKPD Kota Sawahlunto dalam rangka: <ol style="list-style-type: none">Menyepakati permasalahan pembangunan Daerah;Menyepakati prioritas pembangunan Daerah;Menyepakati program, kegiatan, pagu indikatif, indikator dan target kinerja serta lokasi;Penyelarasan program dan kegiatan pembangunan Daerah kab./kota dengan sasaran dan prioritas pembangunan provinsi melalui APBD Provinsi; (untuk dibahas dan disepakati dalam Musrenbang RKPD Kota Sawahlunto) | 14 April 2020 |



| NO | URAIAN KEGIATAN | REALISASI JADWAL/ WAKTU |
|----------|---|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| | <p>e. Klarifikasi program dan kegiatan yang merupakan kewenangan Daerah kab./kota dengan program dan kegiatan desa yang diusulkan berdasarkan hasil Musrenbang kecamatan.</p> <p>Hasil Musrenbang RKPD Kota Sawahlunto dirumuskan dalam Berita Acara Kesepakatan yang ditandatangani oleh unsur yang mewakili pemangku kepentingan yang hadir.</p> | |
| V | Perumusan Rancangan Akhir RKPD | Minggu III April 2020 |
| 1. | Perumusan Rancangan Akhir RKPD merupakan proses penyempurnaan Rancangan RKPD Kota Sawahlunto menjadi Rancangan Akhir RKPD Kota Sawahlunto berdasarkan Berita Acara Kesepakatan Musrenbang kab./kota. | |
| 2. | Rancangan Akhir RKPD Kota Sawahlunto disampaikan kepada Sekda untuk dibahas oleh seluruh kepala Perangkat Daerah untuk memastikan program dan kegiatan PD telah diakomodir. | Minggu II Mei 2020 |
| 3. | Penyelesaian Rancangan Akhir RKPD Kota Sawahlunto berdasarkan hasil pembahasan. Rancangan Akhir RKPD Kota Sawahlunto dijadikan bahan penyusunan rancangan Perkada tentang RKPD. | Minggu III Mei 2020 |
| 4. | Reviu APIP terhadap Rancangan Perkada tentang RKPD Kota Sawahlunto | Minggu I Juni 2020 |
| 5. | KADA menyampaikan rancangan Perkada tentang RKPD Kota Sawahlunto (+dokumen lengkap) kepada Gubernur melalui kepala Bappeda provinsi untuk difasilitasi . Dokumen yang diajukan kepada Gubernur : a. Surat Permohonan Fasilitasi dari Walikota kepada Gubernur melalui kepala Bappeda provinsi; b. Rancangan Perkada RKPD Tahun 2021 c. Rancangan Akhir RKPD Tahun 2021; d. Berita Acara Kesepakatan Musrenbang RKPD Tahun 2021; e. Hasil Pengendalian dan Evaluasi Perumusan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Tahunan; f. Reviu APIP atas Rancangan Akhir RKPD Tahun 2021. | Minggu IV Juni 2020 |
| 6. | Fasilitasi oleh Gubernur . Fasilitasi berpedoman pada Permen mengenai pembentukan produk hukum Daerah. Hasil fasilitasi disampaikan dalam bentuk surat gubernur melalui Bappeda provinsi sebagai bahan penyempurnaan rancangan Perkada tentang RKPD Kota Sawahlunto. | Minggu I Juli 2020 |
| 7. | Kepala Bappeda menyampaikan Rancangan Perkada tentang RKPD Kota Sawahlunto yang telah disempurnakan kepada KADA melalui Sekda untuk persetujuan untuk penetapan dan pengundangan. | Minggu I Juli 2020 |



| NO | URAIAN KEGIATAN | REALISASI JADWAL/ WAKTU |
|----|--|---|
| 1 | 2 | 3 |
| VI | Penetapan RKPD Kota Sawahlunto oleh Wali Kota Perkada tentang RKPD kab./kota dijadikan sebagai : a. Pedoman perumusan penyempurnaan rancangan akhir Renja PD kab./kota b. Pedoman penyusunan rancangan Kebijakan Umum APBD kab./kota serta Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara kab./kota (KUA-PPAS) | Minggu II Juli 2020 (8 Juli 2020) |

1.4 MAKSUD DAN TUJUAN

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Sawahlunto Tahun 2021 disusun dengan maksud untuk mengintegrasikan program-program pembangunan daerah pada Tahun 2021 dalam rangka melaksanakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2018-2023 tahun ketiga. Dengan melihat muatan yang ada pada RKPD, maka program-program pembangunan daerah yang tertuang dalam RKPD merupakan upaya - upaya yang harus dilakukan dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan misi pembangunan daerah sebagaimana RPJMD Kota Sawahlunto Tahun 2018-2023.

Adapun tujuan penyusunan RKPD Tahun 2021 adalah:

1. Sebagai bahan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah tahun 2019.
2. Mewujudkan sinkronisasi rencana kegiatan antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) maupun masyarakat dalam rangka mencapai tujuan pembangunan daerah.
3. Menyediakan rujukan utama atau acuan dalam penyusunan rancangan APBD (KUA-PPAS).
4. Mewujudkan sinkronisasi antara perencanaan, pelaksanaan dan penganggaran kegiatan pembangunan daerah tahunan.

1.5 SISTEMATIKA DOKUMEN RKPD

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2021 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Memuat gambaran umum tentang penyusunan RKPD yang meliputi latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan serta sistematika dokumen RKPD.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Memuat gambaran umum kondisi daerah dan evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu menguraikan tentang hasil evaluasi RKPD tahun lalu, selain itu juga memperhatikan dokumen RPJMD dan dokumen RKPD tahun berjalan sebagai bahan acuan, sedangkan capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan menguraikan tentang kondisi geografi, demografi, pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan permasalahan pembangunan.

BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

Memuat penjelasan tentang kondisi ekonomi tahun lalu dan perkiraan tahun berjalan, yang antara lain mencakup indikator pertumbuhan ekonomi daerah,



sumber-sumber pendapatan dan kebijakan pemerintah daerah yang diperlukan dalam pembangunan perekonomian daerah meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Mengemukakan secara eksplisit perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah berdasarkan hasil analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD, identifikasi permasalahan ditingkat daerah dan nasional, rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan.

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Memuat tentang rencana program dan kegiatan serta pendanaan daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana (RKPD) dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD.

BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Memuat tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Daerah (IKD).

BAB VII PENUTUP

Memuat harapan dukungan dari seluruh pemangku kepentingan guna terlaksananya kegiatan pembangunan daerah tahun 2021.



BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Gambaran umum Kota Sawahlunto memberikan gambaran awal tentang kondisi daerah dan capaian pembangunan Kota Sawahlunto secara umum. Gambaran umum menjadi pijakan awal penyusunan rencana pembangunan Tahun 2021 melalui pemetaan secara objektif kondisi daerah dari aspek geografi dan demografi, kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing daerah.

Kondisi daerah Kota Sawahlunto merupakan salah satu Kota di Provinsi Sumatera Barat yang terletak ± 95 km sebelah timur laut kota Padang ini, dikelilingi oleh 3 kabupaten di Sumatera Barat, yaitu kabupaten Tanah Datar, kabupaten Solok, dan kabupaten Sijunjung. Kota Sawahlunto dikenal dengan Kota Tambang Batubara, dan hampir menjadi kota mati setelah terhentinya pertambangan batubara, namun saat ini kota Sawahlunto berkembang menjadi kota wisata tua yang multi etnik, sehingga menjadi salah satu kota tua terbaik di Indonesia. Di kota yang didirikan pada tahun 1888 ini, banyak berdiri bangunan-bangunan tua peninggalan Belanda. Sebagian telah ditetapkan sebagai cagar budaya oleh pemerintah setempat dalam rangka mendorong pariwisata dan mencanangkan Sawahlunto menjadi "Kota Wisata Tambang yang Berbudaya".

2.1. ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI

2.1.1. KONDISI GEOGRAFI DAERAH

1. Letak, Luas Dan Batas Wilayah

Kondisi Geografis Kota Sawahlunto berada pada gugusan perbukitan bukit barisan dimana posisi koordinat antara 100°41'00" - 100°49'60" Bujur Timur dan 00°33'40"-00°48'33' Lintang Selatan, dibagian Propinsi Sumatera Barat, sedangkan batasan wilayah Kota Sawahlunto dilihat dari letak administrasi berbatasan dengan:

- ❖ Sebelah Utara : dengan Kabupaten Tanah Datar
- ❖ Sebelah Selatan : dengan Kabupaten Solok
- ❖ Sebelah Timur : dengan Kabupaten Sijunjung
- ❖ Sebelah Barat : dengan Kabupaten Solok.

Kota Sawahlunto dikenal sebagai kota tambang memiliki luas wilayah 27.345 Ha (273.45 Km²) atau sekitar 0,65% dari luas Propinsi Sumatera Barat, secara administrasi terdiri dari 4 Kecamatan, 10 Kelurahan dan 27 Desa. Kecamatan terkecil adalah Kecamatan Silungkang dengan luas 32.93 km² atau sebesar 12.04% sedangkan kecamatan terluas adalah Kecamatan Talawi dengan luas 99.39 km². atau sekitar 36.35% untuk lebih jelasnya mengenai jumlah RT, RW, Dusun, dan luas wilayah administrasi Kota Sawahlunto dapat dilihat pada tabel 2.1 sedangkan peta wilayah administrasi Kota Sawahlunto dapat dilihat pada gambar 2.1:

Tabel 2.1
Jumlah RT, RW, Dusun, dan Luas Wilayah Desa serta Kecamatan

| No | Kecamatan Desa/Kelurahan | RT | RW | Dusun | Luas Wilayah (KM ²) |
|------------|-----------------------------|-----------|-----------|-----------|------------------------------------|
| (1) | Kecamatan Barangin | 32 | 13 | 25 | 88,55 |
| 01 | Desa Lumindai | - | - | 5 | 20,10 |
| 02 | Desa Balai Batu Sandaran | - | - | 3 | 12,95 |
| 03 | Kel. Saringan | 11 | 5 | - | 0,81 |
| 04 | Kel. Lubang Panjang | 7 | 2 | - | 1,00 |
| 05 | Kel. Durian I | 6 | 2 | - | 1,17 |
| 06 | Kel. Durian II | 8 | 4 | - | 1,25 |
| 07 | Desa Talago Gunung | - | - | 4 | 17,30 |



| No | Kecamatan Desa/Kelurahan | RT | RW | Dusun | Luas Wilayah (KM ²) |
|---------------|-----------------------------------|-----------|-----------|------------|------------------------------------|
| 08 | Desa Santur | - | - | 5 | 8,69 |
| 09 | Desa Kolok Mudiak | - | - | 3 | 8,52 |
| 10 | Desa Kolok Nan Tuo | - | - | 5 | 16,76 |
| (2) | Kecamatan Lembah Segar | 32 | 14 | 22 | 52,58 |
| 01 | Desa Lunto Barat | - | - | 4 | 5,11 |
| 02 | Desa Lunto Timur | - | - | 4 | 4,89 |
| 03 | Desa Pasar Kubang | - | - | 3 | 9,32 |
| 04 | Desa Kubang Tengah | - | - | 5 | 20,15 |
| 05 | Desa Kubang Utara Sikabu | - | - | 6 | 11,56 |
| 06 | Kel. Pasar | 6 | 3 | - | 0,50 |
| 07 | Kel. Kubang Sirakuk Utara | 8 | 2 | - | 0,28 |
| 08 | Kel. Kubang Sirakuk Selatan | 4 | 2 | - | 0,27 |
| 09 | Kel. Aur Mulyo | 6 | 3 | - | 0,20 |
| 10 | Kel. Tanah Lapang | 4 | 2 | - | 0,16 |
| 11 | Kel. Air Dingin | 4 | 2 | - | 0,14 |
| (3) | Kecamatan Silungkang | - | - | 21 | 32,93 |
| 01 | Desa Silungkang Oso | - | - | 4 | 6,57 |
| 02 | Desa Taratak Bancah | - | - | 3 | 8,43 |
| 03 | Desa Muaro Kalaban | - | - | 6 | 8,58 |
| 04 | Desa Silungkang Tigo | - | - | 5 | 5,13 |
| 05 | Desa Silungkang Duo | - | - | 3 | 4,22 |
| (4) | Kecamatan Talawi | - | - | 39 | 99,39 |
| 01 | Desa Sikalang | - | - | 4 | 6,59 |
| 02 | Desa Rantih | - | - | 2 | 6,22 |
| 03 | Desa Salak | - | - | 3 | 6,60 |
| 04 | Desa Sijantang Koto | - | - | 3 | 6,40 |
| 05 | Desa Talawi Hilir | - | - | 4 | 10,21 |
| 06 | Desa Talawi Mudik | - | - | 4 | 8,76 |
| 07 | Desa Bukik Gadang | - | - | 3 | 7,74 |
| 08 | Desa Batu Tanjung | - | - | 4 | 15,90 |
| 09 | Desa Kumbayau | - | - | 4 | 8,36 |
| 10 | Desa Data Mansiang | - | - | 2 | 6,29 |
| 11 | Desa Tumpuak Tengah | - | - | 6 | 16,32 |
| Jumlah | | 64 | 27 | 107 | 273,45 |

Sumber : Sawahlunto Dalam Angka Tahun 2019

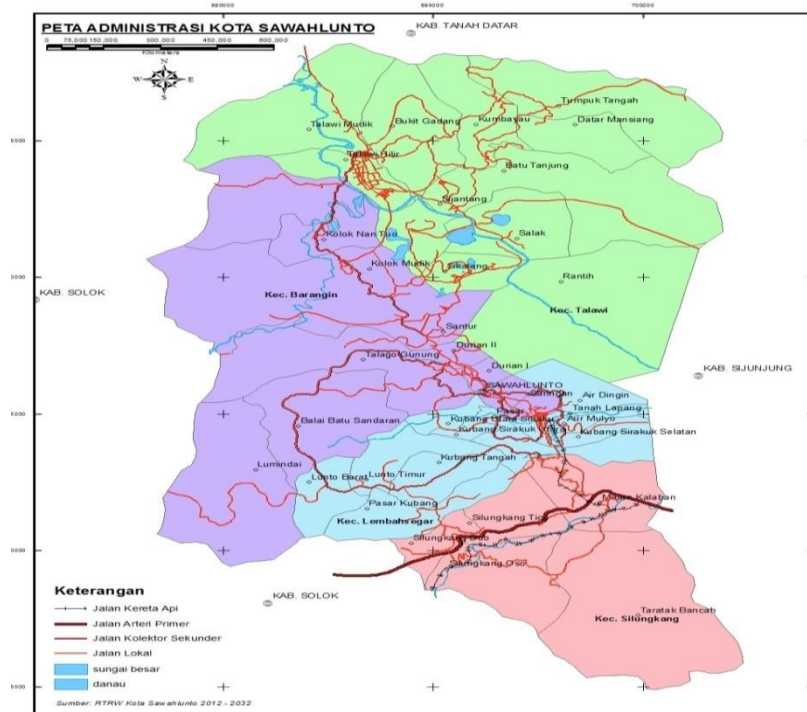
Dari tabel diatas diketahui, bahwa Kota Sawahlunto mempunyai keunikan sebagai sebuah Kota di Sumatera Barat khususnya, atau pun di Indonesia. Sebagai salah satu Kota, ternyata Kota Sawahlunto juga dan bahkan didominasi oleh Desa yang merupakan karakter sebuah Kabupaten. Hal ini menyebabkan Sawahlunto juga memperoleh Dana pembangunan untuk pemerintah terendah yaitu Dana Desa. Hal ini menjadi sebuah kekuatan bagi Sawahlunto untuk dapat membangun daerahnya, dengan anggaran dana Desa yang mendekatkan pelaku pembangunan dan objek pembangunan itu sendiri. Daerah yng mempunyai keragaman Pemerintah Terendah ini adalah Kecamatan Barangin dan Kecamatan Lembah Segar.

Untuk kategori Desa, Desa Lumindai yang terletak di Kecamatan Barangin adalah Desa yang terluas dengan Luas 20,10 KM². Sedangkan desa terkecil menurut luasannya adalah Desa Silungkang Duo yang terletak di Kecamatan



Silungkang dengan Luas Daerah Administratif 4,22 KM². Sedangkan untuk Kelurahan Terluas adalah Kelurahan Durian II yang juga terletak di Kecamatan Barangin dengan Luas 1,25 Km², dan Kelurahan terkecil adalah Kelurahan Air Dingin yang terletak di Kecamatan Lembah Segar dengan Luas Daerah Administratif hanya 0,14 Km².

Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat pada Peta Adminstratif Kota Sawahlunto di bawah ini :



Gambar 2.1 Peta Administrasi Kota Sawahlunto

2. Topografi

Secara topografi wilayah Kota Sawahlunto terletak di perbukitan dengan ketinggian antara 250-650 meter dari permukaan laut, terbentang dari Utara ke Selatan. Bagian Timur dan Selatan memiliki topografi yang relatif curam dengan kemiringan lebih dari 40%, yang keseluruhan luasnya mencapai 28,52% dari luas wilayah kota, sedangkan bagian Utara bergelombang dan relatif datar, temperatur udara berkisar antara 22°C - 30°C. Kawasan berpenduduk banyak berada pada kawasan dengan ketinggian 100-500m di atas permukaan laut. Kemiringan dan keterjaln bentang alam ini telah menjadi kendala atau faktor pembatas pengembangan wilayah Kota Sawahlunto. Perbukitan yang terjal merupakan bentang alam yang dominan dalam daerah administrasi Kota Sawahlunto. Perbukitan ini dicirikan oleh bukit-bukit yang membulat dengan lereng bukit curam sampai terjal.

Kemiringan dan keterjaln bentang alam ini telah menjadi kendala dalam pengembangan wilayah Kota Sawahlunto. Bentang alam yang landai terletak hampir di tengah daerah Kota Sawahlunto, tetapi umumnya merupakan jalur-jalur sempit sehingga dirasa sulit untuk dikembangkan menjadi permukiman perkotaan. Posisinya memanjang sepanjang Sesar Sawahlunto, memisahkan perbukitan terjal yang terletak dikedua sisinya. Dataran yang relatif landai sehingga memungkinkan berkembangnya permukiman perkotaan hanya dijumpai di Kecamatan Talawi, Pusat Kota Lama dan sebagian wilayah Kecamatan Barangin, yang wilayahnya relatif datar dengan total luas 18% dari luas wilayah. Selengkapnnya kelerengn lahan di Kota Sawahlunto dapat dilihat pada tabel berikut:



Tabel 2.2
Kelerengan Lahan Kota Sawahlunto

| Kecamatan | Luas Lahan Dengan Kelerengan (Ha) | | | | | Jumlah |
|---------------|-----------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| | 0 – 2% | 2 – 15% | 15 – 5% | 25 –40% | > 40% | |
| Talawi | 991 | 1.420 | 2.680 | 3.195 | 1.653 | 9.939 |
| Barangin | 343 | 1.514 | 1.432 | 3.450 | 2.136 | 8.855 |
| Lb. Segar | 240 | 358 | 694 | 1.836 | 2.110 | 5.258 |
| Silungkang | 29 | 288 | 735 | 340 | 1.901 | 3.293 |
| Jumlah | 1.603 | 3.580 | 5.541 | 8.821 | 7.800 | 27.345 |

Sumber: RTRW Kota Sawahlunto Tahun 2012 – 2032

Berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM), wilayah yang layak huni berada pada kemiringan < 15%. Jika dikonversikan, maka untuk Kota Sawahlunto, wilayah yang bisa dibudidayakan hanya seluas 5.183 Ha.

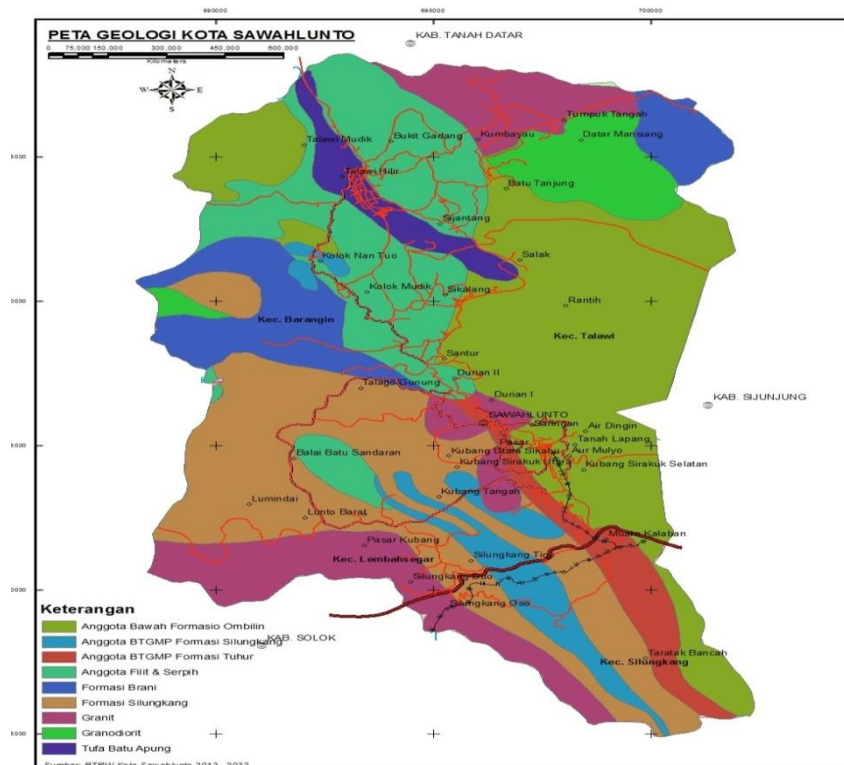
Tabel 2.3
Ketinggian Lahan Kota Sawahlunto

| Kecamatan | Tinggi Kecamatan (m dpl) | Ibu Kecamatan |
|------------|--------------------------|---------------|
| Talawi | 650 | Talawi Mudik |
| Barangin | 650 | Santua |
| Lb. Segar | 785 | Aur Mulyo |
| Silungkang | 548 | Muaro Kalaban |

Sumber : SDA Tahun 2019

3. Geologi

Kota Sawahlunto terletak di atas Formasi Sawahlunto, batuan yang terbentuk pada zaman yang diberi istilah kala (epoch) *Eocen* sekitar 40–60 juta tahun yang lalu, serta berada di cekungan *pra-tersier* Ombilin yang berbentuk belah ketupat panjang dengan ujung bulat, selebar 22,50 km dan Panjang 47,00 km. Dalam cekungan ini diperkirakan 2,00 km, diisi oleh lapisan yang muda yang disebut dengan Formasi Brani, Formasi Sangkarewang, Formasi Sawahlunto, Formasi Sawah Tambang dan Formasi Ombilin. Formasi Ombilin merupakan lapisan paling muda menurut kategori zaman *tersier* atau berumur sekitar 2 juta tahun.



Gambar 2.2. Peta Geologi



4. Iklim dan Meteorologi

Secara umum suhu rata-rata di Sumatera Barat tercatat antara 22°-30°C sedangkan perbedaan antar temperatur siang dan malam antara 5°-7°C, kondisi ini tidak jauh berbeda dengan kondisi yang ada di Kota Sawahlunto berkisar antara 22°-30°C.

Peta Curah Hujan Indonesia memberikan gambaran bahwa Kota Sawahlunto berada di dalam *isohyat* (garis curah hujan) antara 1.500 – 2.000 mm per tahun dengan rata-rata curah hujan per tahunnya sebesar 1.716,37 mm dengan rata-rata hari hujan 130 hari. Sepanjang tahun terdapat dua musim yaitu musim hujan pada bulan November sampai Juni dan musim kemarau pada bulan Juli sampai Oktober.

5. Hidrologi dan Sumber Daya Air

Kota Sawahlunto dilalui oleh Daerah Aliran Sungai (DAS) Indragiri yang terdiri dari 5 (lima) buah sungai utama yaitu:

a. Batang Ombilin

Sungai Ombilin merupakan sungai terbesar yang mengalir dari utara ke selatan dari Desa Talawi Mudik ke Desa Rantih Kecamatan Talawi. Sungai ini berhulu dari Danau Singkarak dan bermuara di Batang Kuantan Riau, dengan debit sungai di daerah Sikalang-Rantih lebih dari 10 m³/detik.

b. Batang Malakutan

Sungai ini mengalir dari Barat yang berhulu di Desa Siberambang, Kecamatan X Koto Diatas, Kabupaten Solok ke Timur melewati Desa Kolok Mudiak dan Desa Kolok Nan Tuo di Kecamatan Barangin yang akhirnya bertemu dengan Batang Ombilin.

c. Batang Lunto

Sungai ini berhulu di Desa Lumindai, Kecamatan Barangin dan mengalir dari arah Barat menuju Timur dan membelah kota dan bermuara di Batang Ombilin.

d. Batang Sumpahan

Sungai ini berhulu di Kubang Utara Sikabu di Kecamatan Lembah Segar kemudian bertemu dengan Batang Lunto di Kelurahan Pasar dan akhirnya bermuara di Batang Ombilin.

e. Batang Lasi

Sungai ini berhulu di Kecamatan IX Koto Sungai Lasi, Kabupaten Solok yang mengalir menyusuri jalan Nasional Solok ke Sijunjung di Kecamatan Silungkang, dan keluar di perbatasan Kota Sawahlunto – Sijunjung. Sungai ini kemudian bertemu juga dengan Batang Ombilin di Sungai Kuantan atau Indragiri.

Keberadaan air tanah terbatas pada kedalaman dibawah 400 m sementara celahan batuan pasir penyusun Formasi Sawah Tambang dan Formasi Sawahlunto kurang mengindikasikan adanya lapisan pembawa air sehingga potensi air tanah sangat kecil. Kecilnya potensi ini menyebabkan air tanah tidak dapat diandalkan sebagai salah satu sumber air baku.

Mata air muncul pada lereng bukit, dimana debit kurang dari 2 lt/detik terdapat di Sikalang, yang mengalir sepanjang tahun, sumber mata air ini umumnya jernih dan digunakan sebagai salah satu sumber air bersih penduduk setempat dan PDAM. Mata air lain dijumpai ke arah tenggara Sawahlunto di Bukit Sibantar Desa Sikalang, sementara itu sumber mata air dengan debit cukup besar yaitu lebih 5 lt/detik dan mengalir sepanjang musim terdapat di Desa Balai Batu Sandaran. Mata air tersebut muncul pada kontak antara batu gamping dan lapisan tufa yang ditampung pada kolam permanen dan dialirkan melalui pipa besi sebagai salah satu sumber air bersih Kota Sawahlunto, tetapi pada musim kemarau semua potensi sumber air baku dari mata air tidak mengalir sehingga



terdapat masalah sumber air baku untuk wilayah Kota Sawahlunto perlu solusi yang komprehensif.

6. Penggunaan Lahan

Penggunaan lahan di Kota Sawahlunto didominasi oleh lahan pertanian bukan sawah sebesar 17.080 Ha. Pertanian lahan sawah sebesar 1.680 Ha dan lahan bukan pertanian (jalan, pemukiman, perkantoran, sungai dll) sebesar 8.585 Ha, dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2.4
Penggunaan Lahan Tahun 2015–2019 (Ha)

| Penggunaan Lahan | Tahun | | | | |
|----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Kampung/ pemukiman | 3,080.00 | 3,080.00 | 3,080.00 | 3,080.00 | 3,080.00 |
| Kantor/ Industri | 975.00 | 975.00 | 975.00 | 975.00 | 975.00 |
| Sawah | 2,094.00 | 2,094.00 | 2,094.00 | 2,094.00 | 2,094.00 |
| Tegal/Kebun/ Ladang/ Huma | 283.00 | 283.00 | 283.00 | 283.00 | 283.00 |
| Kebun Campuran | 10,069.00 | 10,061.00 | 10,061.00 | 10,061.00 | 10,061.00 |
| Perkebunan | 2,123.00 | 2,123.00 | 2,123.00 | 2,123.00 | 2,123.00 |
| Hutan | 4,298.00 | 4,298.00 | 4,298.00 | 4,298.00 | 4,298.00 |
| Semak/Alang-Alang | 3,884.00 | 3,884.00 | 3,884.00 | 3,884.00 | 3,884.00 |
| Kolam/Tebat/ Empang/ Danau | 29.00 | 29.00 | 29.00 | 29.00 | 29.00 |
| Tanah terbuka/tandus Rusak | 415.00 | 415.00 | 415.00 | 415.00 | 415.00 |
| Taman Rekreasi/ <i>Olah Raga</i> | 54.00 | 54.00 | 54.00 | 54.00 | 54.00 |
| Lain-lain | 49.00 | 49.00 | 49.00 | 49.00 | 49.00 |
| Jumlah | 27,345 | 27,345 | 27,345 | 27,345 | 27,345 |

Sumber : BPS Kota Sawahlunto Tahun 2020

2.1.2. Potensi Pengembangan Wilayah

Kota Sawahlunto di dalam rencana sistem pusat kegiatan Provinsi Sumatera Barat ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) bersama dengan Kota Bukittinggi, Kota Pariaman, Kota Solok, dan Kota Siberut.

Berdasarkan RTRW Kota Sawahlunto 2012–2032 dalam rangka pelaksanaan kebijakan strategis operasionalisasi rencana tata ruang wilayah dan rencana tata ruang kawasan strategis ditetapkan kawasan strategis di Kota Sawahlunto, meliputi:

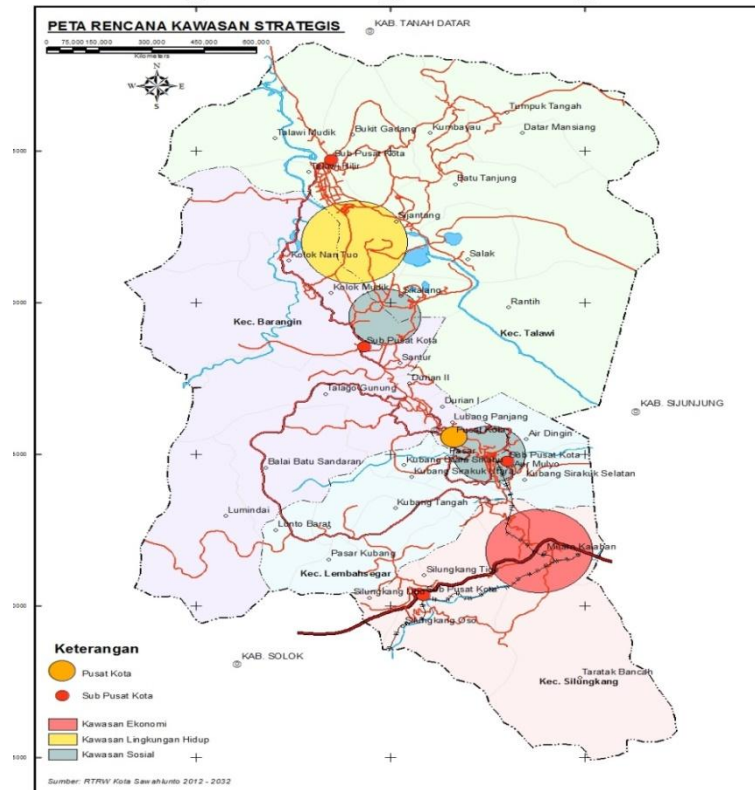
1. **Kawasan Strategis Dari Sudut Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi** ditetapkan di Desa Muara Kalaban, Kecamatan Silungkang. Desa Muara Kalaban telah ditetapkan sebagai pusat kegiatan perdagangan dan jasa skala regional didukung oleh pengembangan terminal Tipe B dan terminal bongkar muat barang.
2. **Kawasan Strategis Dari Sudut Kepentingan Sosial Budaya** terdiri dari; Kota Lama, Kecamatan Lembah Segar sebagai kawasan pelestarian budaya atau cagar budaya; dan Kawasan rencana pusat pemerintahan di Kolok dan



Sijantang, kecamatan Barangin dan Kecamatan Talawi guna peningkatan pelayanan pemerintahan kota dan identitas kota.

3. **Kawasan Strategis Dari Sudut Kepentingan Fungsi Dan Daya Dukung Lingkungan Hidup** ditetapkan di Kandih, Kecamatan Barangin dan Kecamatan Talawi untuk pengembangan wisata

Berikut disajikan Peta pengembangan Wilayah Kota Sawahlunto yang telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah.



Gambar 2.3. Rencana Kawasan Strategis Wilayah Kota Sawahlunto

2.1.3. Wilayah Rawan Bencana

Bencana pada umumnya dipengaruhi oleh faktor-faktor geologi, litologi, struktur geologi (patahan) kemiringan lereng, geomorfologi, air tanah dan daya dukung tanah. Berdasarkan data yang diperoleh bahwa bencana alam yang sering terjadi berupa tanah longsor dan patahan (sesar).

Potensi tingkat bahaya bencana gempa bumi dan longsor dapat dipengaruhi dengan kondisi morfologi dan kemiringan lereng suatu wilayah. Pertambangan batubara yang dilakukan oleh PT. Bukit Asam dan perusahaan lainnya di daerah Sawahlunto dan sekitarnya, berperan cukup besar dalam pembentukan bentang alam atau morfologi saat ini sehingga sewaktu waktu bentang alam tersebut berubah setiap saat terutama dalam kemiringan lerengnya.

1. Struktur Geologi (Patahan)

Pada Kota Sawahlunto terdapat dua buah sesar geser yaitu sesar geser Sawahlunto dan sesar geser Batu Tajam berarah Barat Laut - Tenggara, mengikuti arah sesar besar Sumatera, jalur kedua sesar tersebut berada di daerah pebukitan sebelah Barat Daya jalan raya Sawahlunto-Santur.

Secara regional struktur geologi yang berkembang di cekungan Ombilin berarah Barat Laut-Tenggara dan Timur Laut - Barat Daya, baik itu berupa sesar/patahan maupun lipatan. Cekungan Ombilin ini terbagi menjadi dua bagian oleh sesar normal Tanjung Ampalu/sesar Pamuatan yaitu bagian timur merupakan blok yang turun (mengarah kebawah) sedangkan bagian Barat yaitu daerah Sawahlunto dan sekitarnya merupakan blok yang relatif naik.



Sesar turun Ombilin terlihat pada kontrol arah aliran Sungai Ombilin yaitu Barat Laut-Tenggara, sedangkan sesar turun lainnya yaitu sesar Padang Malintang, sesar Batukunit, sesar Sugar, sesar Salak dan sesar Sipang berarah Timur Laut-Barat Daya.

Berdasarkan analisa struktur mikro yaitu dengan pengamatan langsung dilapangan menunjukkan adanya bidang sesar (gores garis) dan arah kekar/retakan yang dapat memberikan petunjuk arah umum dan jenis patahan. Sedangkan identifikasi adanya seretan (drag fold) akibat patahan dengan skala kecil, terlihat pada pemotongan tebing-tebing jalan raya propinsi, jalan raya kota dan jalan desa, serta dalam skala besar seretan pebukitan.

Beberapa sesar geser (thrust fault) diantaranya adalah sesar Sawahlunto merupakan sesar utama (orde pertama) yang berarah barat laut-tenggara dan sesar Sugar berarah Utara Selatan telah mempengaruhi pola aliran sungai Batang Lunto, sedangkan sesar Padang Malintang dan sesar Parambahan telah mempengaruhi pola aliran Sungai Batang Ombilin dan anak-anak sungainya yang membentuk pola aliran Sungai Menangga (trellis).

2. Gempa Bumi

Kota Sawahlunto memiliki potensi kebencanaan yang kemungkinan akan terjadi yaitu gempa bumi, sedangkan longsoran dan bidang lemah patahan akan cenderung menjadi faktor kendala dalam pengembangan wilayah. Kegempaan di Daerah Cekungan Ombilin berdasarkan catatan episenter (pusat gempa) dengan radius 400 km dari Kota Sawahlunto dari tahun 1973 sampai tahun 1999 telah terjadi sebanyak 420 kali kejadian gempa bumi. Dari catatan gempa bumi tersebut menunjukkan bahwa daerah Sawahlunto dan sekitarnya banyak terjadi gempa bumi dangkal yang rata-rata mempunyai kedalaman 33 km, dengan intensitas antara 4,5 sampai 5,5.

Kerusakan yang ditimbulkan oleh kegempabumian, dalam banyak hal dipengaruhi oleh karakteristik tanah dan batuan setempat, di samping karakteristik guncangan (ground shaking) yang dihasilkan oleh suatu besaran kegempabumian (magnitude). Untuk memprediksi terjadinya gempa bumi di wilayah Sawahlunto secara makro didasarkan atas Peta Zonasi gempa-gempa yang bersifat merusak di Indonesia, menunjukkan posisi wilayah Ombilin atau Sawahlunto berada pada zone 3 dan 4 dengan besaran intensitas berkisar antara 0,13 - 0,25 g. Bencana alam geologi merupakan peristiwa alam dimana proses terjadinya merupakan bagian dari dinamika bumi baik itu kaitannya secara langsung yaitu berupa pergerakan patahan/sesar maupun gempabumi, sedangkan yang tidak langsung berupa gerakan tanah/longsoran.

3. Banjir

Banjir merupakan suatu peristiwa ketika aliran air yang berlebihan merendam daratan. Banjir dapat mengakibatkan kerusakan dan menimbulkan korban jiwa, harta benda fasilitas umum dan fasilitas kristis seperti rumah, pertokoan, jalan, jembatan, pasar dan sebagainya. Hal ini dapat dilihat pada pengkajian resiko bencana yang dilakukan berdasarkan dokumen kajian resiko bencana di Kota Sawahlunto.

Parameter yang digunakan untuk menghitung indeks bahaya bencana banjir adalah gemorfologi, persentase luas DAS, landuse (tutupan vegetasi), jenis tanah, intensitas hujan tahunan sehingga menghasilkan skor bahaya. Perhitungan untuk mendapatkan kelas indeks bahaya dari luas kawasan terpapar dilaksanakan dalam pengkajian resiko bencana pada Dokumen Kajian Resiko Bencana Kota Sawahlunto. Dari hasil analisa kajian resiko bencana didapatkan bahwa indeks ancaman bencana banjir adalah tinggi, pada tahun indeks penduduk terpapar tinggi dengan jumlah jiwa yang terancam karena bencana ini sebanyak **20.564 jiwa** yang tinggal/beraktifitas



di kawasan terancam, maka tingkat ancaman bencana banjir di kota Sawahlunto adalah **TINGGI**.

4. Tanah Longsor

Tanah longsor adalah perpindahan material pembentuk lereng berupa batuan, bahan rombakan, tanah, atau material campuran tersebut, bergerak kebawah atau keluar lereng. Proses terjadinya tanah longsor dapat diterangkan sebagai berikut : air yang meresap ke dalam tanah akan menambah bobot tanah. Jika air tersebut sampai tanah kedap air yang berperan sebagai bidang gelincir, maka tanah menjadi licin dan tanah pelapukan di atasnya akan bergerak mengikuti lereng dan keluar lereng. Dampak dari bencana ini bukan hanya pada fisik (kerugian harta benda, fasilitas umum dan fasilitas kritis) namun juga pada dampak nonfisik (korban jiwa).

Berdasarkan Pedoman Nasional Pengkajian Resiko Bencana ada beberapa perhitungan untuk mengukur parameter indeks ancaman tanah longsor. Parameter yang dilihat untuk perhitungan indeks ancaman bencana tanah longsor adalah geomorfologi, tutupan vegetasi, jarak sesar/patahan, dan persentase kemiringan sehingga menghasilkan skor bahaya. Perhitungan untuk mendapatkan kelas ancaman dari luas kawasan terpapar dilaksanakan dalam pengkajian resiko bencana pada Dokumen Kajian Resiko Bencana Kota Sawahlunto.

Dari hasil analisa kajian resiko bencana Kota Sawahlunto didapatkan bahwa indeks ancaman bencana tanah longsor adalah tinggi, dan indeks penduduk terpapar adalah tinggi. Jumlah jiwa terpapar yang terancam karena bencana ini ada sebanyak **23.366 jiwa** yang tinggal/beraktifitas di kawasan terancam. Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa tingkat ancaman bencana tanah longsor di Kota Sawahlunto adalah **TINGGI**.

5. Cuaca Ekstrem

Cuaca Ekstrem (angin puting beliung) adalah fenomena meteorologi yang ekstrem dalam sejarah (distribusi), khususnya fenomena cuaca yang mempunyai potensi menimbulkan bencana, menghancurkan tatanan kehidupan sosial, atau yang menimbulkan korban jiwa manusia. Pada umumnya cuaca ekstrem didasarkan pada distribusi klimatologi, dimana kejadian ekstrem lebih kecil sama dengan 5 % distribusi. Tipenya sangat bergantung pada lintang tempat, ketinggian, topografi dan kondisi atmosfer.

Berdasarkan Pedoman Nasional Pengkajian Resiko Bencana ada beberapa perhitungan untuk mengukur parameter indeks ancaman cuaca ekstrim. Parameter yang dilihat untuk perhitungan indeks ancaman bencana cuaca ekstrim adalah keterbukaan lahan, kemiringan lereng, curah hujan tahunan sehingga menghasilkan skor bahaya. Perhitungan untuk mendapatkan kelas indeks ancaman dari luas kawasan terpapar dilaksanakan dalam pengkajian resiko bencana pada Dokumen Kajian Resiko Bencana Kota Sawahlunto.

Dari hasil analisa kajian resiko bencana Kota Sawahlunto didapatkan bahwa indeks ancaman bencana cuaca ekstrim adalah sedang, dan indeks penduduk terpapar adalah tinggi. Jumlah jiwa yang terancam karena bencana ini ada sebanyak 23.366 jiwa yang tinggal dan beraktifitas di kawasan terancam. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa maka tingkat ancaman bencana cuaca ekstrim di Kota Sawahlunto adalah **SEDANG**.

2.1.4. Demografi

Pertumbuhan penduduk Kota Sawahlunto secara umum di pengaruhi oleh dua komponen yaitu kelahiran dan kematian. Kebijakan pemerintah dalam upaya menekan laju pertumbuhan penduduk berorientasi pada penurunan tingkat kelahiran dan kematian serta meningkatkan mobilitas penduduk. Upaya untuk menekan tingkat kelahiran antara lain dengan mendorong kegiatan, seperti penundaan usia perkawinan, penggunaan alat kontrasepsi dan mengerakan



program KB. Sementara upaya untuk menurunkan kematian dengan meningkatkan derajat kesejahteraan masyarakat. Laju pertumbuhan penduduk adalah perubahan jumlah penduduk di suatu wilayah tertentu setiap tahunnya, yang berguna untuk memprediksi jumlah penduduk suatu wilayah di masa yang akan datang, rata-rata laju pertumbuhan penduduk kota Sawahlunto dapat dilihat pada tabel dibawah ini

Tabel 2.5
Jumlah Penduduk dan laju Pertumbuhan Penduduk Kota Sawahlunto
Tahun 2015 – 2019

| Kecamatan | Jumlah Penduduk (orang) | | | | | Rata-rata Laju Pertumbuhan (%) |
|---------------|-------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------------------------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
| 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | -9 |
| Silungkang | 10,962 | 11,117 | 11,280 | 11,324 | 11,359 | 0,18 |
| Lembah Segar | 12,143 | 12,123 | 12,106 | 12,495 | 13,039 | 0,20 |
| Barangin | 18,161 | 18,391 | 18,631 | 18,673 | 18,701 | 0,29 |
| Talawi | 18,920 | 19,147 | 19,381 | 19,406 | 19,425 | 0,31 |
| Jumlah | 59,608 | 60,186 | 60,778 | 61,898 | 62,524 | 1.00 |

Sumber : BPS Kota Sawahlunto 2020

Berdasarkan data diatas kecamatan Silungkang mempunyai rata-rata laju pertumbuhan yaitu 0,2 persen sebanyak 544 orang dalam satu tahun sedangkan Laju Pertumbuhan penduduk yang sedikit mengalami pertumbuhan adalah kecamatan Talawi 0,31 persen yaitu sebanyak 19 orang pada tahun 2019 dalam satu tahun. Ini berarti di Kecamatan Lembah Segar angka kelahiran penduduknya cukup tinggi dari kecamatan lainnya sehingga sangat berpengaruh terhadap laju pertumbuhan penduduk. Namun secara keseluruhan kota Sawahlunto mempunyai rata-rata laju pertumbuhan 1,00 persen, jadi setiap tahunnya dari tahun 2015-2019 jumlah penduduk di Kota Sawahlunto meningkat 1,00 persen. Laju pertumbuhan penduduk ini berpengaruh terhadap kepadatan penduduk suatu daerah, di Kota Sawahlunto kepadatan penduduknya dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 2.6
Kepadatan Penduduk Kota Sawahlunto Tahun 2015 – 2019 (jiwa/Km²)

| Kecamatan | Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km ²) | | | | |
|---------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Silungkang | 327,82 | 332,43 | 337,59 | 343,88 | 344,94 |
| Lembah Segar | 232,29 | 232,59 | 230,56 | 237,64 | 247,98 |
| Barangin | 202,34 | 204,40 | 207,69 | 210,88 | 211,19 |
| Talawi | 187,96 | 190,26 | 192,65 | 195,25 | 195,44 |
| Jumlah | 217,99 | 220,10 | 220,10 | 226,36 | 228,65 |

Sumber : BPS Kota Sawahlunto 2020

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa kecamatan yang paling padat penduduknya adalah kecamatan Silungkang. Seiring dengan hal tersebut, Kecamatan yang paling jarang penduduknya adalah kecamatan Talawi, hal ini dikarenakan wilayah Kecamatan Talawi yang luas dari kecamatan lainnya. Namun secara keseluruhan Kepadatan penduduk Kota Sawahlunto meningkat dari tahun 2015-2019 seiring dengan meningkatnya laju pertumbuhan penduduk di Kota Sawahlunto.



Penduduk dapat dikelompokkan yang menggambarkan susunan penduduk menurut karakteristik tertentu, salah satunya pengelompokkan penduduk berdasarkan umur dan jenis kelamin. Pengelompokkan penduduk berdasarkan kelompok umur untuk tahun 2018-2019 dapat dirinci sebagai berikut :

Tabel 2.7
Jumlah Penduduk berdasarkan kelompok Umur dan Jenis Kelamin Kota Sawahlunto Tahun 2018 – 2019

| Kelompok Umur | Jenis Kelamin 2018 | | Jumlah | Jenis Kelamin 2019 | | Jumlah |
|---------------|--------------------|---------------|---------------|--------------------|---------------|---------------|
| | Laki-laki | Perempuan | | Laki-laki | Perempuan | |
| 0 – 4 | 3.075 | 3.008 | 6.083 | 3.052 | 2.988 | 6.040 |
| 5 – 9 | 3.082 | 2.897 | 5.979 | 3.085 | 2.906 | 5.991 |
| 10 - 14 | 2.668 | 2.712 | 5.380 | 2.695 | 2.745 | 5.440 |
| 15 - 19 | 2.507 | 2.344 | 4.851 | 2.519 | 2.348 | 4.867 |
| 20 - 24 | 2.076 | 1.945 | 4.021 | 2.103 | 1.961 | 4.064 |
| 25 - 29 | 2.320 | 2.361 | 4.681 | 2.314 | 2.357 | 4.671 |
| 30 - 34 | 2.371 | 2.330 | 4.701 | 2.404 | 2.352 | 4.756 |
| 35 - 39 | 2.191 | 2.304 | 4.495 | 2.211 | 2.314 | 4.525 |
| 40 - 44 | 2.215 | 2.239 | 4.454 | 2.217 | 2.261 | 4.478 |
| 45 - 49 | 2.190 | 2.069 | 4.259 | 2.234 | 2.106 | 4.340 |
| 50 - 54 | 1.706 | 1.750 | 3.456 | 1.735 | 1.775 | 3.510 |
| 55 - 59 | 1.470 | 1.616 | 3.086 | 1.486 | 1.636 | 3.122 |
| 60 - 64 | 1.071 | 1.243 | 2.314 | 1.105 | 1.299 | 2.404 |
| 65 - 69 | 904 | 986 | 1.890 | 968 | 1.053 | 2.021 |
| 70 - 74 | 480 | 571 | 1.051 | 498 | 582 | 1.080 |
| 75 + | 494 | 703 | 1.197 | 503 | 712 | 1.215 |
| Jumlah | 30.820 | 31.078 | 61.898 | 31.129 | 13.395 | 62.524 |

Sumber : BPS Kota Sawahlunto 2020

Berdasarkan tabel diatas di Tahun 2018 dan tahun 2019 kelompok umur 0-4 tahun mendominasi dari kelompok umur lainnya. Sedangkan komposisi yang paling sedikit adalah yang berumur 70-74 tahun. Perbandingan jumlah penduduk yang produktif (usia 15-65) dengan penduduk usia tidak produktif (usia 0-14 dan 65+) untuk Tahun 2018 adalah 186,51 persen ini berarti dari 100 jumlah penduduk yang berusia produktif mempunyai tanggungan sebanyak 186 -187 penduduk yang tidak produktif. Angka ketergantungan ini sangat tinggi , karena penduduk yang tidak produktif lebih dominan dari pada penduduk yang produktif.

2.2. ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

2.2.1. FOKUS KESEJAHTERAAN DAN PEMERATAAN EKONOMI

2.2.1.1. Pertumbuhan PDRB

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menggambarkan kemampuan suatu wilayah untuk menciptakan nilai tambah pada suatu waktu tertentu. PDRB disajikan dalam 2 (dua) versi penilaian, yaitu atas dasar harga berlaku (ADHB) dan atas dasar harga konstan (ADHK). PDRB ADHB dikenal dengan PDRB nominal dihitung berdasarkan harga yang berlaku pada periode penghitungan dan bertujuan untuk melihat struktur perekonomian. Sedangkan PDRB ADHK dihitung berdasarkan harga pada tahun dasar tertentu (tahun 2010) dan bertujuan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi.

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan sebagai pendekatan untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah dapat diukur melalui laju pertumbuhan PDRB ADHK di wilayah tersebut. Laju pertumbuhan PDRB ADHK diperoleh dengan cara mengurangi nilai PDRB ADHK tahun ke n dengan nilai PDRB ADHK



tahun sebelumnya (tahun ke n-1), dibagi dengan nilai PDRB ADHK tahun ke n-1, dikali dengan 100 persen.

Nilai PDRB ADHK (tahun dasar 2010) Kota Sawahlunto pada tahun 2019 sebesar 2.797,94 miliar rupiah. Nilai PDRB tersebut mengalami pertumbuhan sebesar 5,34 % atau meningkat sebesar 141,75 miliar rupiah dari tahun sebelumnya. Selama rentang tahun 2015-2019, nilai PDRB ADHK Kota Sawahlunto secara konsisten menunjukkan peningkatan dengan rata-rata pertumbuhan mencapai 5,67 % dengan persentase pertumbuhan PDRB ADHK yang fluktuatif. Hal ini berarti pertumbuhan ekonomi Kota Sawahlunto selalu positif. Meskipun pertumbuhan ekonomi Kota Sawahlunto selalu positif namun pada tahun 2019 laju pertumbuhan ekonomi Kota Sawahlunto mengalami perlambatan sebesar 0,18 poin dibandingkan laju pertumbuhan ekonomi Kota Sawahlunto tahun 2018 yang tumbuh sebesar 5,52 % setelah mengalami perlambatan 0,22 poin dari tahun 2017.

Tabel 2.8
PDRB Kota Sawahlunto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (Miliar Rupiah) Tahun 2015 – 2019

| NO | Lapangan Usaha | Nilai PDRB ADHK (Dalam Milliar Rupiah) | | | | | Rerata |
|----|--|--|--------|--------|--------|--------|--------|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
| 1 | Pertanian, Kehutanan dan Perikanan | 198,65 | 203,19 | 207,65 | 211,63 | 218,12 | 207,85 |
| 2 | Pertambangan dan Penggalian | 189,31 | 174,57 | 161,37 | 169,66 | 188,59 | 176,70 |
| 3 | Industri Pengolahan | 279,55 | 301,30 | 318,90 | 323,34 | 313,28 | 307,27 |
| 4 | Pengadaan Listrik dan Gas | 40,97 | 45,30 | 50,11 | 54,65 | 57,97 | 49,80 |
| 5 | Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang | 7,84 | 8,38 | 8,94 | 9,64 | 10,33 | 9,03 |
| 6 | Konstruksi | 230,09 | 245,42 | 266,15 | 283,34 | 302,28 | 265,46 |
| 7 | Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor | 347,87 | 370,23 | 397,07 | 420,39 | 443,47 | 395,81 |
| 8 | Transportasi dan Pergudangan | 192,40 | 207,74 | 226,21 | 241,85 | 262,70 | 226,18 |
| 9 | Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum | 36,82 | 41,31 | 43,41 | 47,11 | 50,85 | 43,90 |
| 10 | Informasi dan Komunikasi | 168,77 | 185,43 | 203,09 | 223,86 | 242,49 | 204,73 |
| 11 | Jasa Keuangan dan Asuransi | 75,70 | 81,67 | 82,93 | 83,74 | 85,91 | 81,99 |
| 12 | Real Estat | 38,59 | 40,09 | 41,58 | 44,66 | 47,28 | 42,44 |
| 13 | Jasa Perusahaan | 2,89 | 3,07 | 3,27 | 3,44 | 3,65 | 3,26 |
| 14 | Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib | 266,95 | 280,56 | 296,52 | 313,73 | 326,62 | 296,88 |
| 15 | Jasa Pendidikan | 58,28 | 63,42 | 69,65 | 74,01 | 80,70 | 69,21 |
| 16 | Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial | 23,27 | 25,16 | 27,68 | 29,46 | 31,11 | 27,34 |
| 17 | Jasa Lainnya | 93,82 | 103,68 | 112,62 | 121,67 | 132,58 | 112,87 |



| | | | | | | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| PDRB ADHK Kota Sawahlunto | 2.251,78 | 2.380,52 | 2.517,15 | 2.656,19 | 2.797,94 | 2.520,72 |
| PDRB ADHK Provinsi Sumatera Barat | 140.719,47 | 148.134,24 | 155.984,36 | 164.033,66 | 172.320,50 | 156.238,45 |

Sumber : Kota Sawahlunto Dalam Angka 2020; Provinsi Sumatera Barat Dalam Angka 2020

Melambatnya laju pertumbuhan ekonomi Kota Sawahlunto dua tahun terakhir (2018-2019) seiring dengan menciutnya pertumbuhan sektor Industri Pengolahan sebagai penyumbang kedua terbesar terhadap pertumbuhan ekonomi Kota Sawahlunto setelah sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor. Laju pertumbuhan sektor Industri Pengolahan tahun 2019 sebesar -3,11 % atau turun sebesar 4,5 poin dibandingkan laju pertumbuhan sektor Industri Pengolahan tahun 2018 yang tumbuh sebesar 1,39 % setelah mengalami penurunan -4,45 poin dari tahun 2017 yang tumbuh sebesar 5,84 %. Menurunnya pertumbuhan sektor Industri Pengolahan Kota Sawahlunto ini sejalan dengan turunnya industri batubara dan pengkilangan migas nasional yang mengalami kontraksi pertumbuhan -1,1% dibandingkan tahun 2018.

Disamping sektor Industri Pengolahan, sektor lain yang mengalami pertumbuhan yang melambat di Kota Sawahlunto pada tahun 2019 adalah sektor Pengadaan Listrik dan Gas, sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang, sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, sektor Informasi dan Komunikasi, sektor Real Estate, sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib, sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial.

Tabel 2.9
Laju Pertumbuhan PDRB Kota Sawahlunto Atas Dasar Harga Konstan 2010
Menurut Lapangan Usaha (%) Tahun 2015 - 2019

| NO | Lapangan Usaha | Pertumbuhan PDRB ADHK (%) | | | | | Rerata |
|----|---|---------------------------|-------|-------|-------|-------|--------|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
| 1 | Pertanian, Kehutanan dan Perikanan | 4,66 | 2,29 | 2,20 | 1,91 | 3,07 | 2,83 |
| 2 | Pertambangan dan Penggalian | 4,27 | -7,79 | -7,56 | 5,14 | 11,16 | 1,04 |
| 3 | Industri Pengolahan | 3,76 | 7,78 | 5,84 | 1,39 | -3,11 | 3,13 |
| 4 | Pengadaan Listrik dan Gas | 3,85 | 10,57 | 10,60 | 9,07 | 6,07 | 8,03 |
| 5 | Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang | 5,84 | 6,96 | 6,69 | 7,83 | 7,14 | 6,89 |
| 6 | Konstruksi | 7,32 | 6,66 | 8,45 | 6,46 | 6,68 | 7,11 |
| 7 | Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor | 5,22 | 6,43 | 7,25 | 5,87 | 5,49 | 6,05 |
| 8 | Transportasi dan Pergudangan | 8,18 | 7,97 | 8,89 | 6,91 | 8,62 | 8,12 |
| 9 | Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum | 7,24 | 12,17 | 5,09 | 8,53 | 7,95 | 8,19 |
| 10 | Informasi dan Komunikasi | 8,70 | 9,87 | 9,53 | 10,23 | 8,32 | 9,33 |
| 11 | Jasa Keuangan dan Asuransi | 5,26 | 7,89 | 1,53 | 0,98 | 2,59 | 3,65 |
| 12 | Real Estat | 5,92 | 3,90 | 3,70 | 7,42 | 5,87 | 5,36 |
| 13 | Jasa Perusahaan | 6,52 | 6,16 | 6,66 | 5,13 | 6,10 | 6,12 |



| | | | | | | | |
|----|--|-------|-------|------|------|------|------|
| 14 | Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib | 5,65 | 5,10 | 5,69 | 5,80 | 4,11 | 5,27 |
| 15 | Jasa Pendidikan | 9,28 | 8,81 | 9,83 | 6,26 | 9,03 | 8,64 |
| 16 | Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial | 8,98 | 8,13 | 9,99 | 6,44 | 5,62 | 7,83 |
| 17 | Jasa Lainnya | 10,22 | 10,51 | 8,63 | 8,04 | 8,97 | 9,27 |
| | Laju Pertumbuhan PDRB ADHK Kota Sawahlunto | 6,03 | 5,72 | 5,74 | 5,52 | 5,34 | 5,67 |
| | Laju Pertumbuhan PDRB ADHK Provinsi Sumatera Barat | 5,53 | 5,27 | 5,30 | 5,16 | 5,05 | 5,26 |
| | Laju Pertumbuhan PDRB ADHK Nasional (Indonesia) | 4,88 | 5,03 | 5,07 | 5,17 | 5,02 | 5,03 |

Sumber : Kota Sawahlunto Dalam Angka 2020; Provinsi Sumatera Barat Dalam Angka 2020

Selanjutnya, pada tahun 2019 berdasarkan pertumbuhan sektoral, sektor dalam PDRB ADHK Kota Sawahlunto yang memiliki pertumbuhan paling tinggi adalah sektor Pertambangan dan Penggalian yaitu sebesar 11,16 % sedangkan pertumbuhan yang paling rendah adalah sektor Industri Pengolahan dengan laju pertumbuhan sebesar -3,11 %. Sektor dengan rata-rata pertumbuhan tertinggi periode 2015-2019 yaitu sektor Informasi dan Komunikasi, yaitu sebesar 9,33 %. Sebaliknya, sektor dengan rata-rata pertumbuhan terendah periode 2015-2019 yaitu sektor Pertambangan dan Penggalian, yaitu sebesar 1,04 % meskipun pertumbuhan sektor Pertambangan dan Penggalian ini cenderung meningkat pada rentang tahun 2018-2019. Sedangkan tiga sektor yang berkontribusi terbesar terhadap PDRB ADHB Kota Sawahlunto tahun 2019 memiliki rata-rata pertumbuhan sedang, yaitu sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor memiliki rata-rata pertumbuhan 6,05 % per tahun, disusul oleh sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib (5,27 % per tahun), dan sektor Konstruksi (7,11 per tahun).

Tabel 2.10
PDRB Kota Sawahlunto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Miliar Rupiah) Tahun 2015 - 2019

| NO | Lapangan Usaha | Nilai PDRB ADHB (Dalam Milliar Rupiah) | | | | | Rerata |
|----|---|--|--------|--------|--------|--------|--------|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
| 1 | Pertanian, Kehutanan dan Perikanan | 273,46 | 292,80 | 303,12 | 312,07 | 325,56 | 301,40 |
| 2 | Pertambangan dan Penggalian | 210,01 | 170,60 | 163,46 | 171,10 | 198,82 | 182,80 |
| 3 | Industri Pengolahan | 343,94 | 380,77 | 404,96 | 415,94 | 392,43 | 387,61 |
| 4 | Pengadaan Listrik dan Gas | 44,80 | 51,50 | 58,17 | 63,65 | 72,29 | 58,08 |
| 5 | Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang | 9,48 | 10,78 | 11,65 | 12,97 | 14,34 | 11,84 |
| 6 | Konstruksi | 294,62 | 323,53 | 351,91 | 381,74 | 415,70 | 353,50 |
| 7 | Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor | 395,24 | 435,56 | 468,02 | 510,54 | 553,97 | 472,67 |
| 8 | Transportasi dan Pergudangan | 211,66 | 243,82 | 268,81 | 295,45 | 327,28 | 269,40 |
| 9 | Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum | 53,00 | 64,05 | 67,26 | 73,95 | 82,41 | 68,13 |
| 10 | Informasi dan | 172,28 | 191,51 | 213,02 | 241,65 | 275,12 | 218,72 |



| | | | | | | | |
|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Komunikasi | | | | | | |
| 11 | Jasa Keuangan dan Asuransi | 98,86 | 109,72 | 111,52 | 115,37 | 121,20 | 111,33 |
| 12 | Real Estat | 50,67 | 54,58 | 56,71 | 61,19 | 64,83 | 57,60 |
| 13 | Jasa Perusahaan | 3,80 | 4,19 | 4,52 | 4,88 | 5,36 | 4,55 |
| 14 | Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib | 321,99 | 342,42 | 377,88 | 404,36 | 444,20 | 378,17 |
| 15 | Jasa Pendidikan | 75,64 | 86,44 | 96,30 | 105,34 | 120,75 | 96,89 |
| 16 | Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial | 29,94 | 33,45 | 36,13 | 39,26 | 43,36 | 36,43 |
| 17 | Jasa Lainnya | 125,63 | 142,23 | 171,79 | 195,70 | 224,05 | 171,88 |
| PDRB ADHB Kota Sawahlunto | | 2.715,01 | 2.937,95 | 3.165,21 | 3.405,16 | 3.681,65 | 3.181,00 |
| PDRB ADHB Provinsi Sumatera Barat | | 179.951,98 | 196.099,18 | 213.893,47 | 230.571,99 | 246.422,72 | 213.387,87 |

Sumber : Kota Sawahlunto Dalam Angka 2020; Provinsi Sumatera Barat Dalam Angka 2020

Berdasarkan nilai PDRB ADHB Kota Sawahlunto tahun 2019, sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib, sektor Konstruksi merupakan tiga sektor dengan nilai PDRB ADHB terbesar dibandingkan sektor lainnya dalam perekonomian Kota Sawahlunto. Nilai PDRB sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor adalah yang terbesar, yaitu mencapai 553,97 miliar rupiah atau sebesar 15,05 % dari total PDRB Kota Sawahlunto. Di posisi kedua, sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib berkontribusi sebesar 12,07 % atau 444,20 miliar rupiah. Selanjutnya, sektor Konstruksi menghasilkan PDRB sebesar 415,70 miliar rupiah atau 11,29 % dari total PDRB. Dengan demikian, secara keseluruhan struktur perekonomian Kota Sawahlunto tahun 2015-2019 didominasi **sektor-sektor sekunder** (sektor Industri Pengolahan, sektor Pengadaan Listrik dan Gas, sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang, sektor Konstruksi) dan **tersier** (sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, sektor Transportasi dan Pergudangan, sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, sektor Informasi dan Komunikasi, sektor Jasa Keuangan dan Asuransi, dan sektor jasa-jasa lainnya). Sebaliknya, sektor primer (sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan dan sektor Pertambangan dan Pengalihan) memiliki kontribusi yang kecil, yaitu sebesar 524,38 miliar atau 14,24 % dari nilai total PDRB ADHB Kota Sawahlunto di tahun 2019.

Tabel 2.11

Perkembangan Distribusi Sektor Terhadap PDRB Kota Sawahlunto Atas Dasar Harga Berlaku (Hb) Dan Atas Dasar Harga Konstan (Hk) Menurut Lapangan Usaha (%) Tahun 2015 - 2019

| NO | Lapangan Usaha | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|----|--|--------|--------|--------|--------|--------|
| | | Hb (%) | Hb (%) | Hb (%) | Hb (%) | Hb (%) |
| 1 | Pertanian, Kehutanan dan Perikanan | 10,07 | 9,97 | 9,58 | 9,16 | 8,84 |
| 2 | Pertambangan dan Pengalihan | 7,74 | 5,81 | 5,16 | 5,02 | 5,40 |
| 3 | Industri Pengolahan | 12,67 | 12,96 | 12,79 | 12,21 | 10,66 |
| 4 | Pengadaan Listrik dan Gas | 1,65 | 1,75 | 1,84 | 1,87 | 1,96 |
| 5 | Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang | 0,35 | 0,37 | 0,37 | 0,38 | 0,39 |
| 6 | Konstruksi | 10,85 | 11,01 | 11,12 | 11,21 | 11,29 |



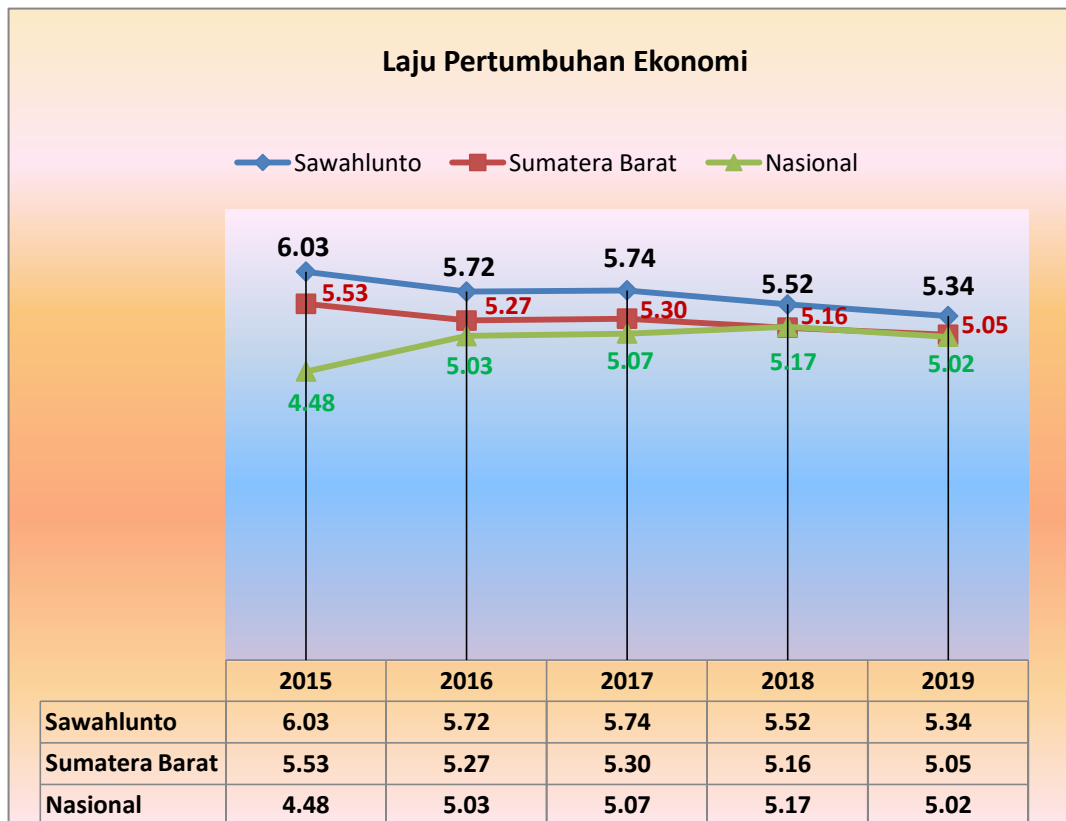
| | | | | | | |
|----------------------------------|--|------------|------------|------------|------------|------------|
| 7 | Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor | 14,56 | 14,83 | 14,79 | 14,99 | 15,05 |
| 8 | Transportasi dan Pergudangan | 7,80 | 8,30 | 8,49 | 8,68 | 8,89 |
| 9 | Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum | 1,95 | 2,18 | 2,13 | 2,17 | 2,24 |
| 10 | Informasi dan Komunikasi | 6,35 | 6,52 | 6,73 | 7,10 | 7,47 |
| 11 | Jasa Keuangan dan Asuransi | 3,64 | 3,73 | 3,52 | 3,39 | 3,29 |
| 12 | Real Estat | 1,87 | 1,86 | 1,79 | 1,80 | 1,76 |
| 13 | Jasa Perusahaan | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,15 |
| 14 | Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib | 11,86 | 11,66 | 11,94 | 11,87 | 12,07 |
| 15 | Jasa Pendidikan | 2,79 | 2,94 | 3,04 | 3,09 | 3,28 |
| 16 | Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial | 1,10 | 1,14 | 1,14 | 1,15 | 1,18 |
| 17 | Jasa Lainnya | 4,63 | 4,84 | 5,43 | 5,75 | 6,09 |
| PDRB ADHK Kota Sawahlunto | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Sumber : Kota Sawahlunto Dalam Angka 2020; Data Diolah 2020

Tahun 2019, laju pertumbuhan ekonomi Kota Sawahlunto ditargetkan tumbuh mencapai 5,8 persen, namun baru tercapai sebesar 5,34 persen. Hal ini disebabkan melambatnya laju pertumbuhan sektor-sektor yang memberikan kontribusi terbesar terhadap perekonomian Kota Sawahlunto. Namun jika dibandingkan dengan laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Barat, laju pertumbuhan ekonomi Kota Sawahlunto masih selalu di atas capaian pertumbuhan Provinsi Sumatera Barat dan Nasional.

Grafik 2.1

Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat Dan Nasional Tahun 2015-2019



Sumber : Kota Sawahlunto Dalam Angka 2020; Provinsi Sumatera Barat Dalam Angka 2020



Secara keseluruhan, PDRB Kota Sawahlunto di tahun 2019 menyumbang sekitar 1,49 % terhadap PDRB Provinsi Sumatera Barat. PDRB Kota Sawahlunto adalah pemberi kontribusi terendah kedua terhadap PDRB Provinsi Sumatera Barat setelah Kota Padang Panjang (1,41 %). Kontribusi terbesar terhadap PDRB Provinsi Sumatera Barat disumbangkan oleh Kota Padang sebesar 25,35 %, sedangkan 74,65 % sisanya disumbangkan oleh 18 kabupaten/kota lain di Provinsi Sumatera Barat dengan rentang kontribusi antara 1,41 % hingga 8,64 %.

Pertumbuhan rata-rata nilai PDRB Kota Sawahlunto dari tahun 2015-2019 adalah sebesar 5,67 % per tahun. Pertumbuhan rata-rata PDRB Kota Sawahlunto tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan rata-rata nilai PDRB Provinsi Sumatera Barat, yaitu sebesar 5,26 % per tahun dan pertumbuhan rata-rata nilai PDRB Nasional (5,03 % per tahun).

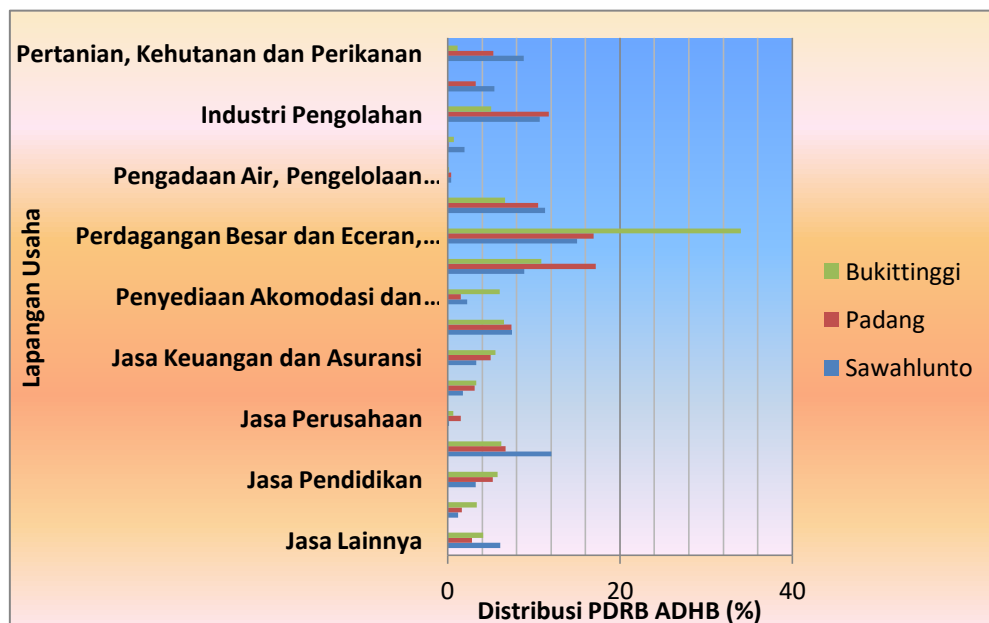
2.2.1.2. Laju Inflasi Kota

Inflasi merupakan suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus menerus yang berdampak menurunnya tingkat kemakmuran masyarakat (terutama bagi yang berpenghasilan tetap) dan memperlambat pertumbuhan ekonomi. Inflasi dapat dihitung dengan menggunakan Indeks Harga Konsumen (IHK) dan GNP atau PDB (PDRB) Deflator. PDRB Deflator diperoleh dengan membandingkan PDRB yang dihitung berdasarkan harga berlaku terhadap PDRB yang dihitung berdasarkan harga konstan (PDRB ADHB/PDRB ADHK) dengan rumus :

$$\text{Inflasi} = \frac{\text{Deflator PDRB } n - \text{Deflator PDRB } n-1}{\text{Deflator PDRB } n-1} \times 100\%$$

Untuk mengukur laju inflasi Kota Sawahlunto digunakan PDRB Deflator. Hal ini disebabkan perhitungan inflasi untuk Provinsi Sumatera Barat, hanya pada 2 (dua) kota, yaitu Kota Padang dan Kota Bukittinggi. Jika inflasi Kota Sawahlunto merujuk ke salah satu dari kedua kota tersebut, dikuatirkan terjadi bias, karena struktur perekonomian Kota Sawahlunto berbeda dengan kedua kota tersebut. Berikut perbedaan struktur perekonomian Kota Sawahlunto, Kota Padang dan Kota Bukittinggi yang ditunjukkan oleh besarnya kontribusi atau distribusi masing-masing sektor terhadap PDRB ADHB tahun 2019 pada ketiga kota tersebut.

Grafik 2.2
Perbandingan Struktur Perekonomian Kota Sawahlunto, Kota Padang dan Kota Bukittinggi Tahun 2019

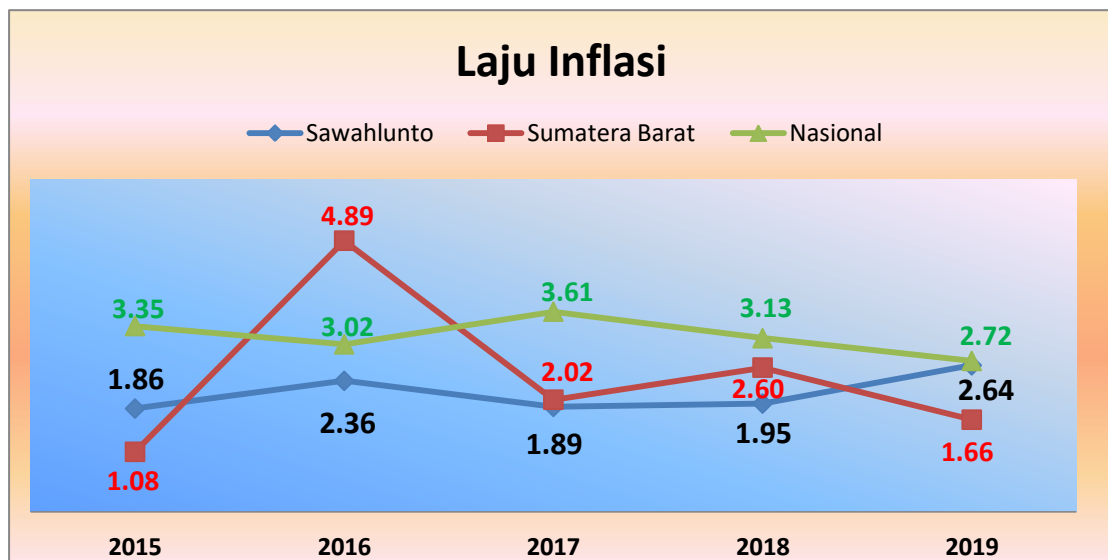


Sumber : BPS, Kota Sawahlunto dalam Angka 2020, Kota Bukittinggi dalam Angka 2020, Kota Padang dalam Angka 2020



Berdasarkan grafik di atas terlihat bahwa distribusi PDRB ADHB Kota Sawahlunto yang menggambarkan struktur perekonomian Kota Sawahlunto tahun 2019 didominasi oleh sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (15,05 %) dan sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib (12,07 %). Sedangkan Kota Bukittinggi didominasi oleh sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (34,03 %) dan sektor Transportasi dan Pergudangan (10,86 %), sedangkan Kota Padang didominasi oleh sektor Transportasi dan Pergudangan (17,17 %) dan sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (16,94 %). Dengan kondisi yang demikian, jika Kota Sawahlunto merujuk inflasi ke Kota Bukittinggi, angka inflasi tersebut akan bias karena kontribusi sektor perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor Kota Bukittinggi 34 % dari PDRBnya, sedangkan kontribusi sektor perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor Kota Sawahlunto hanya 15 %. Seandainya merujuk pada inflasi Kota Padang, struktur perekonomiannya berbeda dengan Kota Sawahlunto karena sektor yang dominan berkontribusi terhadap PDRBnya berbeda.

Grafik 2.3
Laju Inflasi Kota Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat Dan Nasional
Tahun 2015 -2019



Sumber : BPS, Povinsi Sumatera Barat dalam Angka 2016-2020, Buletin Statistik Bulanan, Indikator Ekonomi 2020, Data Diolah Tahun 2020

Berdasarkan grafik di atas, pada periode tahun 2015 - 2019, laju inflasi di Kota Sawahlunto berfluktuasi dengan kecenderungan meningkat. Inflasi tertinggi di Kota Sawahlunto terjadi pada tahun 2019, yaitu sebesar 2,64 % dan inflasi terendah terjadi pada tahun 2015, yaitu 1,86 %. Dari grafik terlihat bahwa laju inflasi Kota Sawahlunto tidak selalu sejalan dengan laju inflasi Provinsi Sumatera Barat dan Nasional. Dan yang mengembirakan, laju inflasi Kota Sawahlunto lebih rendah dari laju inflasi Nasional dan inflasi Provinsi Sumatera Barat kecuali tahun 2015 dan 2019, laju inflasi Kota Sawahlunto berada di atas laju inflasi Provinsi Sumatera Barat.

Tabel 2.12
Perhitungan Laju Inflasi Kota Sawahlunto Dengan Menggunakan PDRB Deflator
Tahun 2015 – 2019

| Tahun | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| PDRB ADHB Kota Sawahlunto | 2.715,01 | 2.937,95 | 3.165,21 | 3.405,16 | 3.681,65 |
| PDRB ADHK Kota Sawahlunto | 2.251,78 | 2.380,52 | 2.517,15 | 2.656,19 | 2.797,94 |
| PDRB Deflator (Df) | 1,20572 | 1,23416 | 1,25746 | 1,28197 | 1,31584 |



| | | | | | |
|---|---------|---------|---------|---------|---------|
| Deflator PDRB (n - {n-1}) | 0,02202 | 0,02845 | 0,02329 | 0,02451 | 0,03387 |
| $\frac{\text{Deflator PDRB (n - \{n-1\})}}{\text{Deflator PDRB n-1}}$ | 0,01861 | 0,02359 | 0,01887 | 0,01949 | 0,02642 |
| Inflasi Kota Sawahlunto | 1,86 | 2,36 | 1,89 | 1,95 | 2,64 |
| Selisih Laju Pertumbuhan (PDRB nominal - PDRB riil) Kota Sawahlunto | 1,97 | 2,49 | 2,00 | 2,06 | 2,78 |

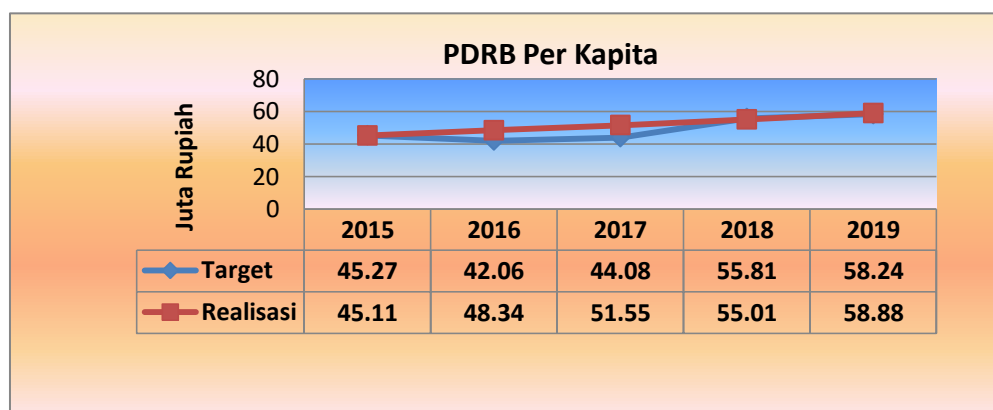
Sumber : BPS, Kota Sawahlunto dalam Angka 2019-2020, Data Diolah tahun 2020

Laju inflasi Kota Sawahlunto dengan menggunakan metode PDRB Deflator tidak terlalu jauh berbeda dengan selisih laju pertumbuhan PDRB ADHB (nominal) dengan laju pertumbuhan PDRB ADHK (riil), yang mana perbedaan kedua metode ini terletak pada perhitungan harga, PDRB ADHB menggunakan harga pada periode perhitungan, sedangkan PDRB ADHK menggunakan harga tahun dasar, selisih kedua angka ini secara ekonomi juga dinamakan inflasi. Meskipun demikian, metode perhitungan inflasi yang digunakan pada dokumen ini adalah metode PDRB Deflator.

2.2.1.3. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Per Kapita

PDRB per Kapita adalah nilai PDRB dibagi dengan jumlah penduduk pada suatu wilayah per periode tertentu. PDRB per Kapita dibedakan atas PDRB per Kapita atas dasar harga konstan dan PDRB per Kapita atas dasar harga berlaku. PDRB per Kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk pada suatu wilayah pada periode tertentu. Sedangkan PDRB per Kapita atas dasar harga konstan untuk mengetahui apakah penduduk suatu wilayah lebih sejahtera/miskin dari waktu ke waktu. Dalam dokumen ini, PDRB per Kapita yang dimaksud adalah PDRB per kapita atas dasar harga berlaku sesuai dengan yang tercantum dalam RPJMD Kota Sawahlunto 2018-2023. Untuk melihat capaian realisasi PDRB per Kapita dengan target PDRB per kapita yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan dalam hal ini adalah RPJMD Kota Sawahlunto dari tahun 2015 hingga tahun 2019 dapat dilihat pada grafik berikut :

Grafik 2.4
Target dan Realisasi PDRB per Kapita Kota Sawahlunto Tahun 2015 - 2019



Sumber : BPS, Provinsi Sumatera Barat Dalam Angka 2016-2020, RPJMD Perubahan Kota Sawahlunto 2013-2018, RPJMD Kota Sawahlunto 2018-2023

Berdasarkan grafik di atas terlihat bahwa perkembangan PDRB Per Kapita Kota Sawahlunto lima tahun terakhir memiliki pertumbuhan yang positif atau secara konsisten menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Disamping trend peningkatan yang konsisten, terdapat juga perbedaan yang cukup besar antara target dan realisasinya, dengan kata lain realisasi PDRB Per Kapita Kota Sawahlunto lebih tinggi dari target yang ditetapkan, kecuali tahun 2015 dan 2018. Tingginya PDRB per kapita Kota Sawahlunto didukung oleh karakteristik wilayah Kota Sawahlunto sebagai



kota tambang batubara tertua di Asia Tenggara. Karena PDRB per Kapita terbentuk dari PDRB ADHB dengan jumlah penduduk, berikut kami sajikan perkembangan kedua variabel tersebut dari tahun 2015-2019 sebagai berikut :

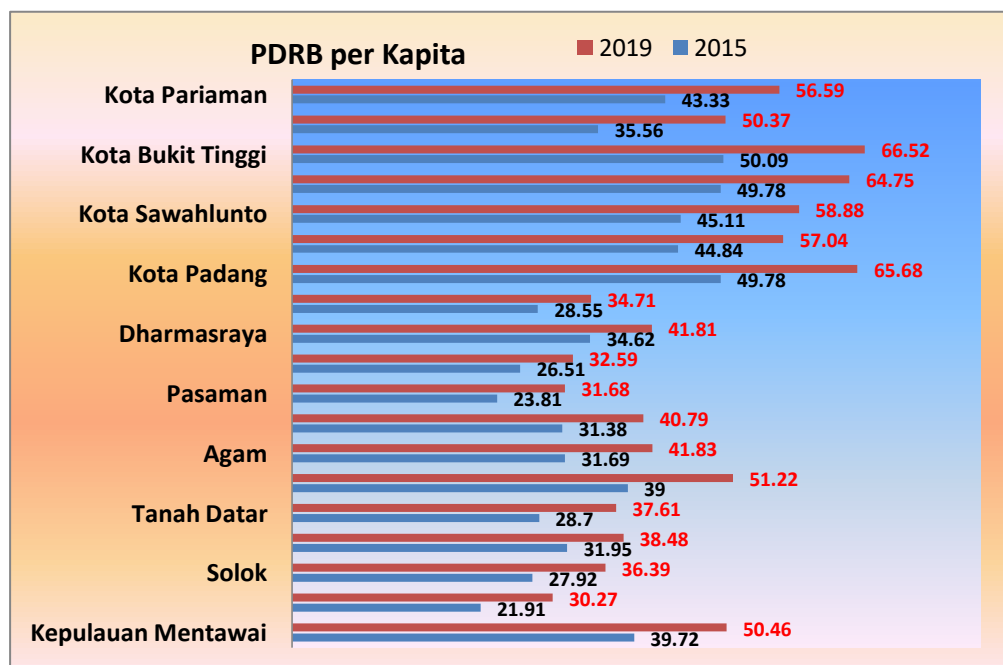
Tabel 2.13
Perkembangan PDRB per Kapita Kota Sawahlunto Dengan Variabel Pembentuknya Tahun 2015 – 2019

| Uraian | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|--------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| PDRB ADHB (Rp. Juta) | 2.715.005 | 2.937.950 | 3.165.210 | 3.405.160 | 3.681.650 |
| Laju Pertumbuhan PDRB ADHB (%) | 8,01% | 8,21% | 7,74% | 7,58% | 8,12% |
| Jumlah Penduduk (Jiwa) | 60.186 | 60.778 | 61.398 | 61.898 | 62.524 |
| Laju Pertumbuhan Penduduk (%) | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 0,8% | 1,0% |
| PDRB per Kapita (Rp.Juta/Jiwa) | 45,11 | 48,34 | 51,55 | 55,01 | 58,88 |
| Laju Pertumbuhan PDRB per Kapita (%) | 7,0% | 7,2% | 6,6% | 6,7% | 7,0% |

Sumber : BPS, Sawahlunto Dalam Angka Tahun 2016-2020

Dari tabel di atas terlihat bahwa meningkatnya PDRB per kapita Kota Sawahlunto disebabkan oleh membaiknya perekonomian dan meningkatnya kesejahteraan masyarakat Kota Sawahlunto, karena penduduk Kota Sawahlunto dari tahun ke tahun juga meningkat dengan rata-rata 1 % per tahun, sedangkan PDRB ADHB meningkat dengan rata-rata 8 % per tahun, sehingga PDRB per kapita meningkat dengan rata-rata 7 % per tahun. Walaupun Kota Sawahlunto terletak di lembah sempit di Pegunungan Bukit Barisan Sumatera Barat, namun kesejahteraan masyarakatnya berada pada level atas jika dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di Sumatera Barat. Hal ini dapat dilihat pada grafik berikut :

Grafik 2.5
PDRB Per Kapita Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015 dan 2019

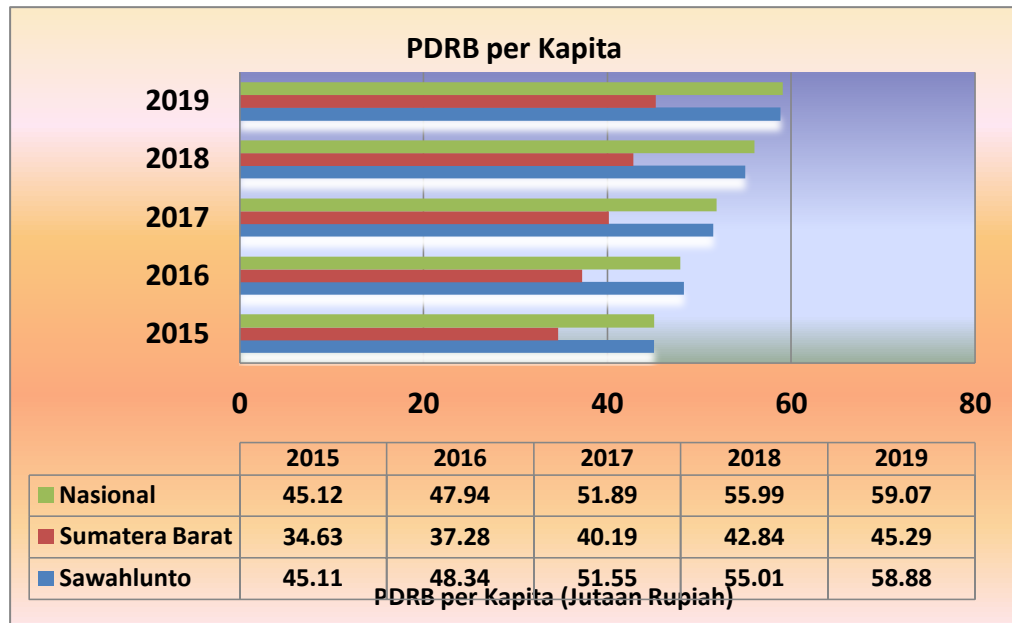


Sumber : BPS, Povinsi Sumatera Barat dalam Angka 2020



Dari grafik di atas terlihat bahwa PDRB per kapita Kota Sawahlunto baik pada tahun 2015 dan 2019 berada di posisi keempat setelah Kota Bukittinggi, Kota Padang dan Kota Padang Panjang. Sedangkan untuk membandingkan perkembangan PDRB per Kapita Kota Sawahlunto dengan PDRB per Kapita Provinsi Sumatera Barat dan Nasional, dapat dilihat pada grafik berikut :

Grafik 2.6
Perbandingan PDRB Per Kapita Kota Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2015-2019



Sumber : BPS, Kota Sawahlunto Dalam Angka Tahun 2020, Statistik Indonesia Tahun 2020

Dari grafik di atas terlihat bahwa PDRB per Kapita Kota Sawahlunto tahun 2015-2019 **berada di atas** PDRB per Kapita Provinsi Sumatera Barat namun berada dibawah PDB per Kapita Nasional kecuali tahun 2016, PDRB per Kapita Kota Sawahlunto berada di atas PDRB per Kapita Provinsi Sumatera Barat dan PDB per Kapita Nasional.

2.2.1.4. Indeks Gini

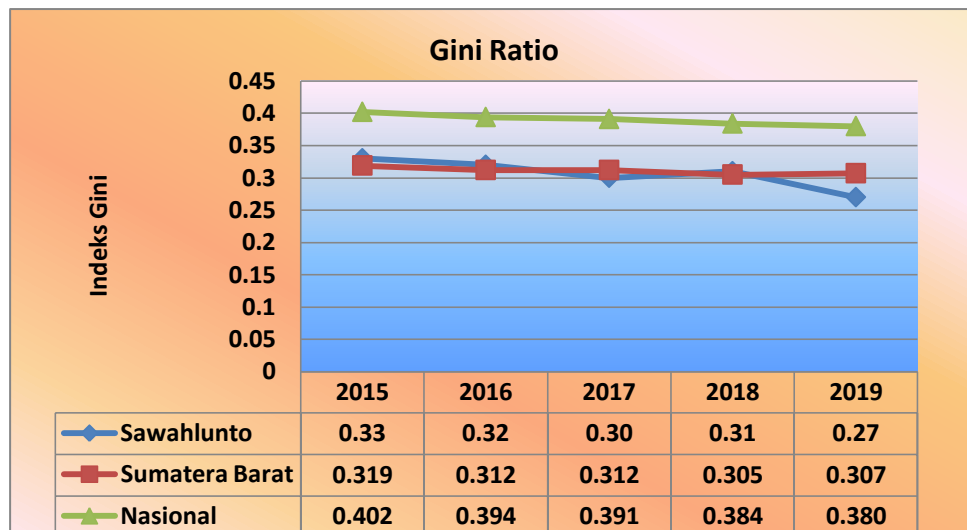
Tingkat pemerataan distribusi pendapatan sering diukur dengan Gini Rasio atau Indeks Gini. Rentang angka Indeks Gini adalah 1 – 0. Jika Indeks Gini mendekati angka 1, maka diartikan bahwa ketimpangan pendapatan di dalam masyarakat semakin besar. Sebaliknya, apabila Indeks Gini mendekati 0, maka diartikan bahwa pemerataan pendapatan semakin baik. Berikut adalah klasifikasi ketimpangan pendapatan :

1. Indeks Gini < 0,3, tergolong ketimpangan rendah
2. Indeks Gini \geq 0,3 dan \leq 0,5 tergolong ketimpangan moderat atau sedang
3. Indeks Gini > 0,5, tergolong ketimpangan tinggi

Secara umum, Indeks Gini Kota Sawahlunto selama kurun waktu 2015-2019 berfluktuasi dan cenderung menurun dan kondisi ini menunjukkan bahwa semakin menurunnya ketimpangan pendapatan antar masyarakat di Kota Sawahlunto. Tahun 2019, Indeks Gini Kota Sawahlunto sebesar 0,27 dan masuk kategori **“rendah”**, sebagaimana karakteristik kota dengan penduduknya yang memiliki profesi beragam yang menyebabkan ketimpangan pendapatan dapat terjadi. Namun demikian, Indeks Gini Kota Sawahlunto masih berada di bawah Indeks Gini Provinsi Sumatera Barat (0,307) dan Indeks Gini Nasional (0,380). Perkembangan Indeks Gini Kota Sawahlunto, Indeks Gini Provinsi Sumatera Barat dan Indeks Gini Nasional kurun waktu 2015 - 2019 disajikan secara lengkap pada grafik berikut.



Grafik 2.7
Indeks Gini Kota Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat Dan Nasional
Tahun 2015- 2019



Sumber : BPS, Berita Resmi Statistik, Gini Rasio Penduduk Sumatera Barat September 2019, 7 Februari 2020, BPS, Berita Resmi Statistik, Gini Rasio Menurut Provinsi, September 2019, 15 Januari 2020

2.2.1.5. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau Human Development Index (HDI) merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, dan pendidikan, dan IPM dapat menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah. Bagi Indonesia, IPM merupakan data strategis karena selain sebagai ukuran kinerja Pemerintah, IPM juga digunakan sebagai salah satu alokator penentuan Dana Alokasi Umum (DAU).

IPM dibentuk oleh tiga dimensi dasar, yaitu umur panjang dan hidup sehat (*a long and healthy life*), pengetahuan (*knowledge*), dan standard hidup layak (*decent standard of living*). Umur panjang dan hidup sehat digambarkan oleh Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH) yaitu jumlah tahun yang diharapkan dapat dicapai oleh bayi yang baru lahir untuk hidup, dengan asumsi bahwa pola angka kematian menurut umur pada saat kelahiran sama sepanjang usia bayi. Pengetahuan diukur melalui indikator Rata-rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah. Rata-rata Lama Sekolah (RLS) adalah rata-rata lamanya (tahun) penduduk usia 25 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal. Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya (tahun) sekolah formal yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Standar hidup yang layak digambarkan oleh pengeluaran per kapita disesuaikan, yang ditentukan dari nilai pengeluaran per kapita dan paritas daya beli (*purchasing power parity*). Oleh karena itu, peningkatan capaian IPM tidak terlepas dari peningkatan setiap komponennya. Seiring dengan meningkatnya angka IPM, indeks masing-masing komponen IPM juga menunjukkan kenaikan dari tahun ke tahun.

Capaian pembangunan manusia di suatu wilayah pada waktu tertentu dapat dikelompokkan ke dalam empat kelompok. Pengelompokan ini bertujuan untuk mengorganisasikan wilayah-wilayah menjadi kelompok-kelompok yang sama dalam hal pembangunan manusia. Empat kelompok yang dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Kelompok “sangat tinggi”: $IPM \geq 80$
2. Kelompok “tinggi”: $70 \leq IPM < 80$
3. Kelompok “sedang”: $60 \leq IPM < 70$
4. Kelompok “rendah”: $IPM < 60$



Secara umum, pembangunan manusia Kota Sawahlunto terus mengalami peningkatan selama periode 2015 hingga 2019. IPM Kota Sawahlunto meningkat dari 69,87 tahun 2015 menjadi 72,39 tahun 2019. Selama periode tersebut, IPM Kota Sawahlunto rata-rata tumbuh sebesar 0,89 persen per tahun dan meningkat dari level “sedang” menjadi “tinggi” mulai tahun 2016. Peningkatan IPM Kota Sawahlunto periode 2015 hingga 2019 ini sejalan dengan perbaikan angka harapan hidup, kualitas pendidikan, dan serta daya beli masyarakat Berikut adalah tabel perkembangan indikator dan Indeks Pembangunan Manusia di Kota Sawahlunto tahun 2015-2019.

Tabel 2.14
Indeks Pembangunan Manusia Kota Sawahlunto Tahun 2015 - 2019

| Indikator | Satuan | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Pertumbuhan Rata-Rata (% Tahun) |
|------------------------------------|-------------|-------|-------|-------|-------|--------|---------------------------------|
| UHH | Tahun | 69,27 | 69,33 | 69,39 | 69,59 | 69,87 | 0,22 |
| HLS | Tahun | 12,69 | 13,05 | 13,14 | 13,15 | 13,16 | 0,92 |
| RLS | Tahun | 9,66 | 9,92 | 9,93 | 9,94 | 9,97 | 0,80 |
| Pengeluaran per kapita disesuaikan | Ribu Rupiah | 8.931 | 9.051 | 9.343 | 9.765 | 10.238 | 3,48 |
| IPM | | 69,87 | 70,67 | 71,13 | 71,72 | 72,39 | 0,89 |

Sumber : BPS, Berita Resmi Statistik, Indek Pembangunan Manusia (IPM), 2 Maret 2020, Hasil Olahan, 2020

Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH) yang merepresentasikan dimensi umur panjang dan hidup sehat. Selama periode 2015 hingga 2019, Kota Sawahlunto telah berhasil meningkatkan Umur Harapan Hidup saat lahir sebesar 0,6 tahun atau tumbuh sebesar 0,22 persen per tahun. Pada tahun 2015, Umur Harapan Hidup saat lahir di Kota Sawahlunto sebesar 69,27 tahun, dan pada tahun 2019 telah mencapai 69,87 tahun. Angka UHH ini menunjukkan bayi yang lahir tahun 2019 memiliki angka harapan hidup 69,87 tahun, lebih lama 0,28 tahun dibandingkan dari tahun sebelumnya yang hanya 69,59 tahun. Hal ini menunjukkan semakin membaiknya pelayanan kesehatan untuk masyarakat, dan didukung meningkatnya kesadaran masyarakat akan kesehatan. Umur Harapan Hidup Kota Sawahlunto selama kurun waktu 2015-2019 cenderung lebih tinggi dari Umur Harapan Hidup Provinsi Sumatera Barat, namun lebih rendah dari Umur Harapan Hidup Nasional.

Tabel 2.15
Perbandingan Umur Harapan Hidup Kota Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2015 - 2019 (Satuan Dalam Tahun)

| Indikator | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|----------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| UHH Kota Sawahlunto | 69,27 | 69,33 | 69,39 | 69,59 | 69,87 |
| UHH Provinsi Sumaera Barat | 68,66 | 68,73 | 68,78 | 69,01 | 69,31 |
| UHH Nasional | 70,78 | 70,90 | 71,06 | 71,20 | 71,34 |

Sumber: BPS, Berita Resmi Statistik, Indek Pembangunan Manusia (IPM), 2 Maret 2020, Umur Harapan Hidup Menurut Provinsi 2010-2019

Dimensi pengetahuan pada IPM dibentuk oleh dua indikator, yaitu Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah. Kedua indikator ini terus meningkat dari tahun ke tahun. Selama periode 2015 hingga 2019, Harapan Lama Sekolah di Kota Sawahlunto telah meningkat sebesar 0,47 tahun, sementara Rata-rata Lama Sekolah meningkat 0,31 tahun.



Selama periode 2015 hingga 2019, Harapan Lama Sekolah secara rata-rata tumbuh sebesar 0,92 persen per tahun. Meningkatnya Harapan Lama Sekolah menjadi sinyal positif bahwa semakin banyak penduduk yang bersekolah. Pada tahun 2019, Harapan Lama Sekolah di Kota Sawahlunto telah mencapai 13,16 tahun, meningkat dari tahun sebelumnya sebesar 13,15 tahun. Ini berarti, anak-anak yang berusia tujuh tahun pada tahun 2019, memiliki harapan dapat menikmati pendidikan selama 13,16 tahun atau minimal menamatkan pendidikan mereka hingga lulus jenjang Diploma I. Harapan Lama Sekolah Kota Sawahlunto selama kurun waktu 2015-2019 cenderung lebih rendah dari Harapan Lama Sekolah Provinsi Sumatera Barat, namun lebih tinggi dari Harapan Lama Sekolah Nasional.

Tabel 2.16
Perbandingan Harapan Lama Sekolah Kota Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2015 – 2019 (Satuan Dalam Tahun)

| Indikator | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|-----------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| HLS Kota Sawahlunto | 12,69 | 13,05 | 13,14 | 13,15 | 13,16 |
| HLS Provinsi Sumatera Barat | 13,60 | 13,79 | 13,94 | 13,95 | 14,01 |
| HLS Nasional | 12,55 | 12,72 | 12,85 | 12,91 | 12,95 |

Sumber: BPS, Berita Resmi Statistik, Indek Pembangunan Manusia (IPM), 2 Maret 2020, Harapan Lama Sekolah Menurut Provinsi 2010-2019

Sementara itu, Rata-rata Lama Sekolah penduduk usia 25 tahun ke atas di Kota Sawahlunto tumbuh 0,80 persen per tahun selama periode 2015 hingga 2019. Pertumbuhan yang positif ini merupakan modal penting dalam membangun kualitas manusia Kota Sawahlunto yang lebih baik. Pada tahun 2019, secara rata-rata penduduk Indonesia usia 25 tahun ke atas secara rata-rata telah menempuh pendidikan selama 9,97 tahun, atau telah menyelesaikan pendidikan hingga kelas IX (tamat SMP/ sederajat). Rata-rata Lama Sekolah Kota Sawahlunto selama kurun waktu 2015-2019 cenderung lebih tinggi dari Rata-rata Lama Sekolah Provinsi Sumatera Barat dan Rata-rata Lama Sekolah Nasional.

Tabel 2.17
Perbandingan Rata-Rata Lama Sekolah Kota Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2015 – 2019 (Satuan Dalam Tahun)

| Indikator | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|-----------------------------|------|------|------|------|------|
| RLS Kota Sawahlunto | 9,66 | 9,92 | 9,93 | 9,94 | 9,97 |
| RLS Provinsi Sumatera Barat | 8,42 | 8,59 | 8,72 | 8,76 | 8,92 |
| RLS Nasional | 7,84 | 7,95 | 8,10 | 8,17 | 8,34 |

Sumber: BPS, Berita Resmi Statistik, Indek Pembangunan Manusia (IPM), 2 Maret 2020, Harapan Lama Sekolah Menurut Provinsi 2010-2019

Dimensi terakhir yang mewakili kualitas hidup manusia adalah standar hidup layak, direpresentasikan oleh pengeluaran per kapita. Pada tahun 2019, pengeluaran per kapita masyarakat Kota Sawahlunto mencapai Rp10,238 juta per tahun. Selama lima tahun terakhir, pengeluaran per kapita meningkat sebesar Rp. 1,307 juta atau tumbuh sebesar 3,48 persen per tahun. Jika dibandingkan dengan kota-kota lain di Provinsi Sumatera Barat, pengeluaran per kapita Kota Sawahlunto adalah yang terendah. Pengeluaran per Kapita Kota Sawahlunto selama kurun waktu 2015-2019 cenderung lebih rendah dari Pengeluaran per Kapita Provinsi Sumatera Barat dan Pengeluaran per Kapita Nasional.



Tabel 2.18
Perbandingan Pengeluaran per Kapita Disesuaikan Kota Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2015 – 2019 (Satuan Dalam Tahun)

| Indikator | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Pengeluaran per Kapita Disesuaikan Kota Sawahlunto | 8.931 | 9.051 | 9.343 | 9.765 | 10.238 |
| Pengeluaran per Kapita Disesuaikan Provinsi Sumatera Barat | 9.804 | 10.126 | 10.306 | 10.638 | 10.925 |
| Pengeluaran per Kapita Disesuaikan Nasional | 10.150 | 10.420 | 10.664 | 11.059 | 11.299 |

Sumber: BPS, Berita Resmi Statistik, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), 2 Maret 2020, Pengeluaran per Kapita Disesuaikan Menurut Provinsi 2010-2019

Penggunaan pendekatan **Pengeluaran per kapita disesuaikan** kurang tepat untuk menggambarkan **Standar hidup yang layak** suatu wilayah. Standar hidup layak digambarkan oleh Pendapatan Nasional Bruto (PNB) sebagaimana yang digunakan oleh UNDP sebagai pelopor. Namun data Pendapatan Nasional Bruto (PNB) untuk tingkat provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia tidak tersedia, oleh sebab itu BPS menggunakan pendekatan pengeluaran per kapita disesuaikan. Pendekatan ini memiliki kelemahan karena tidak semua pendapatan digunakan untuk pengeluaran, sehingga bias jika digunakan untuk menggambarkan standar hidup layak.

Rendahnya Pengeluaran per Kapita Disesuaikan Kota Sawahlunto dibandingkan kota-kota lain di Provinsi Sumatera Barat tidaklah menunjukkan perekonomian Kota Sawahlunto yang buruk, justru kondisi ini merupakan sesuatu hal yang positif bagi Kota Sawahlunto karena menunjukkan bahwa biaya hidup layak di Kota Sawahlunto lebih rendah dibandingkan kota-kota lain di Provinsi Sumatera Barat, sehingga masyarakat dapat menggunakan sebagian besar pendapatannya untuk kegiatan investasi dan kegiatan lain yang tidak bersifat konsumtif, seperti untuk pendidikan, penambahan barang modal. Hal ini merujuk pada Pendapatan (PDRB) per kapita Kota Sawahlunto adalah tertinggi keempat di Provinsi Sumatera Barat, setelah Kota Bukittinggi, Padang dan Padang Panjang. Dengan demikian, rendahnya Pengeluaran per Kapita Disesuaikan Kota Sawahlunto lebih disebabkan karakteristik daerahnya yang sebagian besar adalah desa (73 %) dengan ciri khas pertanian, perkebunan dan peternakan, sehingga kebutuhan pangan masyarakat dapat dipenuhi sendiri, dan hal ini tentu saja mengurangi pengeluaran per kapita, karena sebagian besar dari 27 komoditi kebutuhan pokok yang dihitung oleh BPS sebagai dasar perhitungan daya beli diproduksi sendiri oleh masyarakat sehingga tidak dihitung dalam pengeluaran masyarakat.

Pengeluaran per Kapita Kota Sawahlunto dan Kota Padang Panjang memiliki rasio terendah terhadap pendapatan atau PDRB-nya jika dibandingkan dengan kota-kota lain di Sumatera Barat, sedangkan untuk tingkat Provinsi Sumatera Barat, rasio terendah pengeluaran per kapita terhadap pendapatan atau PDRB-nya adalah Kepulauan Mentawai. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut :



Tabel 2.19
Perbandingan Pengeluaran Per Kapita, PDRB Per Kapita, Rasio Pengeluaran PerKapita Terhadap PDRB Per Kapita Kabupaten /Kota Se-Sumatera Barat Tahun 2015 dan 2019

| Kabupaten / Kota | Pengeluaran Per Kapita (Juta Rp./Orang) | | PDRB Per Kapita (Juta Rp./Orang) | | Rasio Pengeluaran / PDRB | |
|------------------------|---|---------------|----------------------------------|--------------|--------------------------|------------|
| | 2015 | 2019 | 2015 | 2019 | 2015 | 2019 |
| Kepulauan Mentawai | 5,684 | 6,429 | 39,72 | 50,46 | 14% | 13% |
| Pesisir Selatan | 8,412 | 9,444 | 21,91 | 30,27 | 38% | 31% |
| Solok | 9,334 | 10,309 | 27,92 | 36,39 | 33% | 28% |
| Sijunjung | 9,796 | 10,395 | 31,95 | 38,48 | 31% | 27% |
| Tanah Datar | 10,103 | 10,709 | 28,70 | 37,61 | 35% | 28% |
| Padang Pariaman | 10,260 | 11,158 | 39,00 | 51,22 | 26% | 22% |
| Agam | 8,859 | 9,780 | 31,69 | 41,83 | 28% | 23% |
| Lima Puluh Kota | 8,774 | 9,842 | 31,38 | 40,79 | 28% | 24% |
| Pasaman | 7,340 | 8,599 | 23,81 | 31,68 | 31% | 27% |
| Solok Selatan | 9,653 | 10,505 | 26,51 | 32,59 | 36% | 32% |
| Dharmas Raya | 10,713 | 11,431 | 34,62 | 41,81 | 31% | 27% |
| Pasaman Barat | 8,109 | 9,180 | 28,55 | 34,71 | 28% | 26% |
| Kota Padang | 13,522 | 14,728 | 49,78 | 65,68 | 27% | 22% |
| Kota Solok | 11,350 | 12,337 | 44,84 | 57,04 | 25% | 22% |
| Kota Sawahlunto | 8,931 | 10,238 | 45,11 | 58,88 | 20% | 17% |
| Kota Padang Panjang | 9,670 | 11,013 | 49,78 | 64,75 | 19% | 17% |
| Kota Bukit Tinggi | 12,330 | 13,586 | 50,09 | 66,52 | 25% | 20% |
| Kota Payakumbuh | 12,622 | 13,464 | 35,56 | 50,37 | 35% | 27% |
| Kota Pariaman | 11,814 | 12,958 | 43,33 | 56,59 | 27% | 23% |

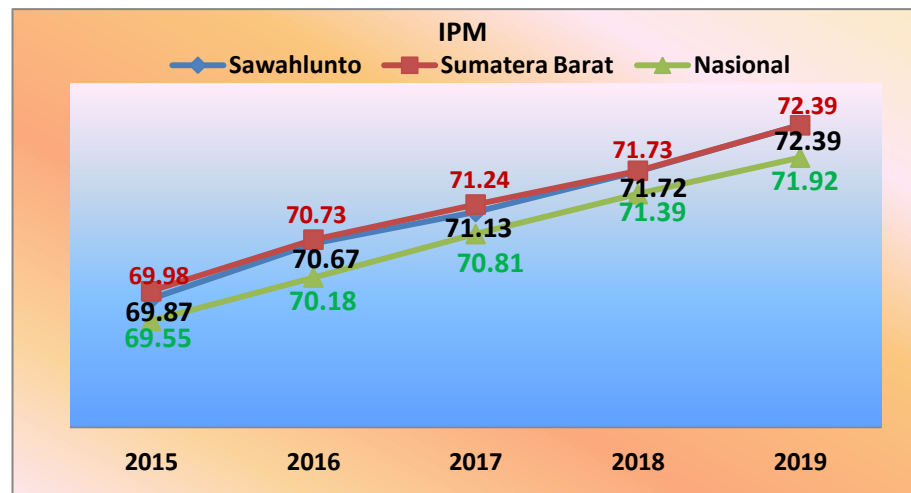
Sumber : BPS, Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan Menurut Provinsi 2010-2019

IPM Kota Sawahlunto meskipun secara konsisten meningkat dari tahun ke tahun selama kurun waktu 2015-2019 dengan tingkat rata-rata pertumbuhan per tahun 0,89 %, namun Pemerintah Kota Sawahluno masih punya tugas untuk mempersempit disparitas dengan kota-kota lain di Provinsi Sumatera Barat yang masih lebar, karena IPM Kota Sawahlunto dibandingkan kota-kota lain di Provinsi Sumatera Barat adalah yang terendah. Sedangkan jika IPM kabupaten/kota di Sumatera Barat disandingkan, Kota Padang memiliki IPM paling tinggi dengan angka sebesar 82,68, sementara IPM terendah dimiliki kabupaten Kepulauan Mentawai dengan angka sebesar 61,26.

IPM Kota Sawahlunto selama kurun waktu 2015-2019 cenderung lebih tinggi dari IPM Nasional, namun lebih rendah dibandingkan dengan nilai IPM Provinsi Sumatera Barat, kecuali tahun 2019, IPM Kota Sawahlunto sudah dapat menyamai nilai IPM Provinsi Sumatera Barat dengan nilai 72,39. Berdasarkan kategori yang dikeluarkan BPS, nilai IPM di Kota Sawahlunto ini masuk kategori tinggi ($70 \leq \text{IPM} < 80$). Apabila dilihat lebih detil pada unsur yang menyusun IPM, setiap indikator juga terus mengalami peningkatan bila dilihat dari tahun 2015-2019. Hal ini tentunya merupakan buah dari berbagai upaya yang sudah dilakukan oleh Pemerintah Kota Sawahlunto dalam upayanya untuk meningkatkan kualitas hidup manusia masyarakatnya.



Grafik 2.8
Perbandingan IPM Kota Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat dan Indonesia
Tahun 2015 – 2019



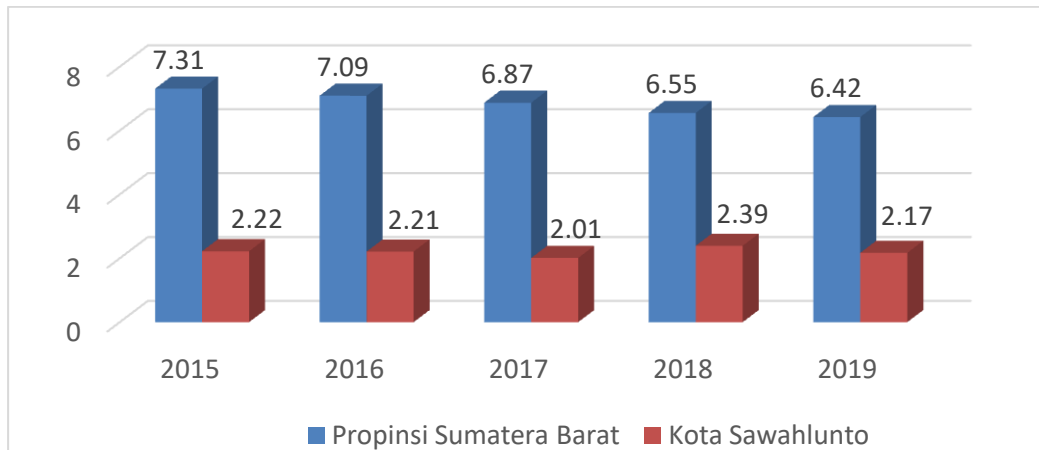
Sumber : BPS, Provinsi Sumatera Barat Dalam Angka 2020, Hasil Olahan 2020

2.2.1.6. Persentase Tingkat Kemiskinan

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Sawahlunto Tahun 2018 – 2023, Pemerintah Daerah telah menetapkan tingkat kemiskinan sebagai target kinerja daerah yang mana pada akhir RPJMD atau tahun 2023 tingkat kemiskinan turun menjadi 2,02 persen. Untuk menurunkan tingkat kemiskinan tersebut diperlukan koordinasi dan kerjasama dari semua stakeholder terkait supaya mendapatkan hasil yang optimal. Tahun 2019 ditargetkan untuk menurunkan tingkat kemiskinan menjadi 2,27 persen namun realisasinya 2,17 persen, ini berarti program/kegiatan yang mendukung untuk penanggulangan kemiskinan baik dari pusat maupun daerah sudah berjalan baik. Untuk Program/kegiatan pusat yang menjadi prioritas pada Basis Data Terpadu (BDT) berjumlah 915 rumah tangga miskin yang mendapatkan bantuan berupa Program Keluarga Harapan (PKH), Program Bantuan Pangan (Rastha dan bantuan pangan Non Tunai) dan Program Indonesia Pintar (PIP). Sedangkan untuk program/kegiatan Daerah terdapat pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis yang bersifat pemberdayaan dan bantuan, seperti pelatihan-pelatihan, pemberian bibit, sarana prasarana usaha, bantuan rumah layak huni dan sebagainya. Dengan banyaknya program/kegiatan untuk penanggulangan kemiskinan ini harus diiringi dengan monitoring dan evaluasi, pada tahun 2019 monitoring dan evaluasi ini sudah berjalan namun belum optimal sehingga belum terkendalinya program/kegiatan penanggulangan kemiskinan yang berjalan di Kota Sawahlunto. Selain rumah tangga miskin yang menjadi prioritas, yang harus diwaspadai juga yaitu rumah tangga yang rentan miskin, yang mana berada diambang batas miskin. Ini dapat dilihat dari pendapatan/kapita/bulan yang menjadi garis kemiskinan, Kota Sawahlunto pada tahun 2019 garis kemiskinan adalah Rp. 374.615,-/kapita/bulan. Untuk itu diperlukan kebijakan penanggulangan kemiskinan dengan mengurangi beban pengeluaran masyarakat yang dapat mendorong peningkatan pendapatan. Untuk tahun 2020 ini akan pemerintah daerah telah mengeluarkan edaran walikota sawahlunto tentang pemberdayaan bagi rumah tangga miskin yang dilaksanakan oleh Desa/Kelurahan dan OPD teknis terkait. Adapun penurunan tingkat kemiskinan kota sawahlunto yang dibandingkan dengan Propinsi Sumatera Barat dapat dilihat pada grafik dibawah ini:



Grafik 2.9
Perbandingan Tingkat Kemiskinan Propinsi Sumatera Barat dengan Kota Sawahlunto

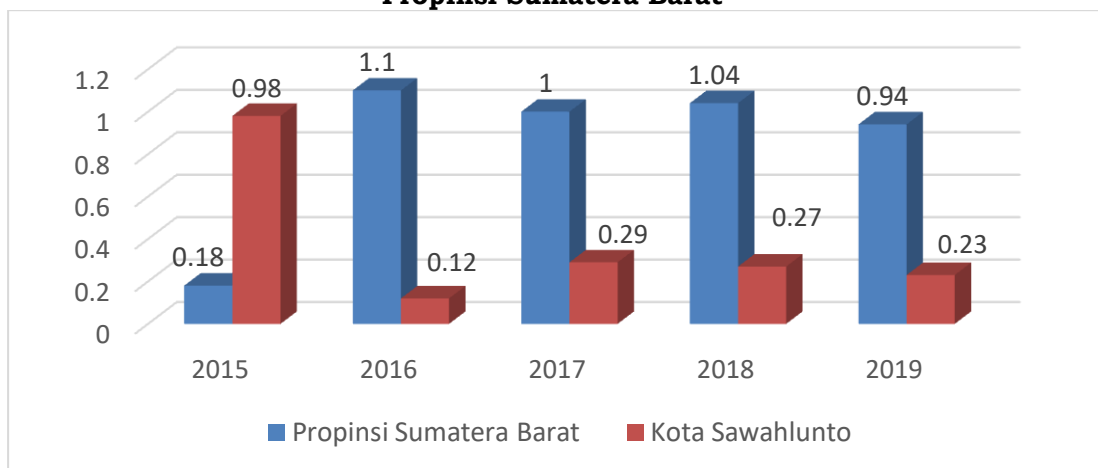


Sumber : BPS Kota Sawahlunto

2.2.1.7. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kota Sawahlunto

Indeks Kedalaman Kemiskinan ini menggambarkan seberapa jauh kesenjangan pendapatan penduduk miskin dengan Garis kemiskinan yang telah ditetapkan. Ukuran indeks ini merupakan rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin jika diambil tolok ukurnya dari garis kemiskinan. Kriteria penilaian indeks ini adalah semakin besar nilai indeks, maka kedalaman kemiskinan makin jauh. Artinya jarak antara garis kemiskinan dengan pengeluaran penduduk miskin semakin besar. Berikut disajikan data indeks P1 Propinsi Sumatera Barat yang disandingkan dengan Kota Sawahlunto

Grafik 2.10
Perbandingan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kota Sawahlunto Dengan Propinsi Sumatera Barat



Sumber : BPS Kota Sawahlunto

Dari grafik diatas, dapat dijelaskan bahwa dari lima tahun terakhir indek kedalaman kemiskinan (P1) mengalami penurunan, untuk tahun 2019 indeks kedalaman kemiskinan 0,23 ini menyatakan bahwa jarak antara garis kemiskinan dengan pengeluaran penduduk miskin cukup dekat, ini menguntungkan bagi Kota Sawahlunto karena nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) yang rendah ini berarti penduduk miskin di Kota Sawahlunto mempunyai pendapatan yang mendekati garis kemiskinan, sehingga lebih cepat proses untuk mengeluarkan dari kemiskinan. Ini membuktikan bahwa program/kegiatan pemberdayaan dalam meningkatkan pendapatan penduduk miskin di Kota Sawahlunto, salah satunya dengan pemberian pelatihan-pelatihan, pemberian ternak, bibit tanaman dan

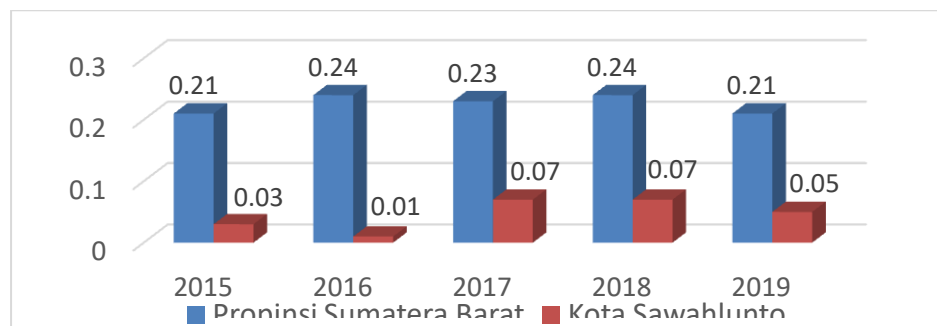


sebagainya sudah dapat meningkatkan pendapatan penduduk miskin di Kota Sawahlunto.

2.2.1.8. Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kota Sawahlunto

Indikator Kemiskinan dengan ukuran Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) ini memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran antara Penduduk Miskin. Indeks Keparahan Kemiskinan ini merupakan nilai rata-rata jarak masing-masing pengeluaran penduduk miskin sesuai dengan bobot masing-masing pengeluaran penduduk miskin. Kriteria penilaiannya, semakin tinggi nilai indeks, maka ketimpangan pengeluaran antar penduduk miskin juga semakin tinggi. Berikut disajikan data Grafik Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) di Kota Sawahlunto dari tahun 2015-2019 dan disandingkan dengan Indeks P2 Provinsi Sumatera Barat dengan tahun yang sama.

Grafik 2.11
Perbandingan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Propinsi Sumatera Barat Dengan Kota Sawahlunto



Sumber : BPS Kota Sawahlunto

Dari grafik diatas, terlihat bahwa nilai Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) di Kota Sawahlunto dari tahun 2015 mengalami penurunan pada tahun 2019 yaitu menjadi 0,05. Ini berarti rata-rata pengeluaran penduduk miskin di Kota Sawahlunto hampir sama. Ini berarti seluruh penduduk miskin di Kota Sawahlunto mendapatkan program/kegiatan penanggulangan kemiskinan secara merata sehingga pendapatan penduduk miskin di Kota Sawahlunto mempunyai rata-rata hamper sama. Untuk itu perlu meningkatkan pendapatan penduduk miskin, melalui program/kegiatan penanggulangan kemiskinan yang bersifat pemberdayaan masyarakat.

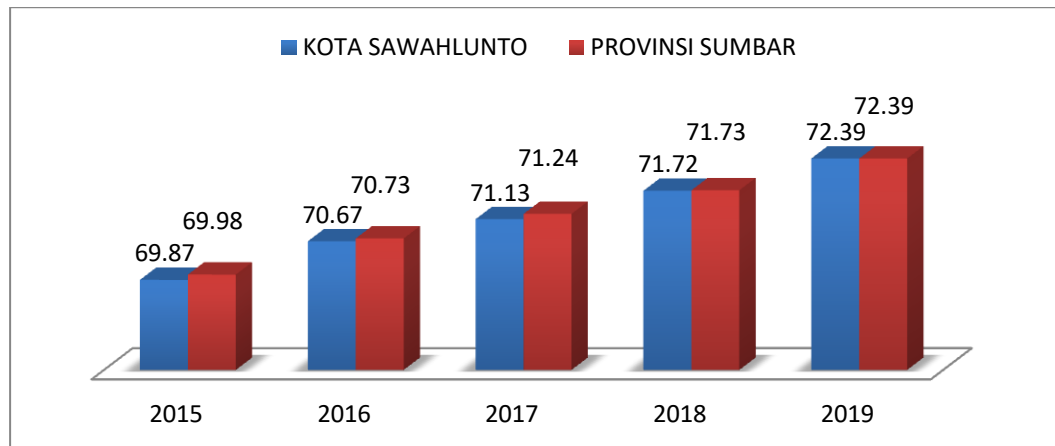
2.2.2. FOKUS KESEJAHTERAAN SOSIAL

2.2.2.1. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan dan sebagainya. IPM ini merupakan indikator penting dalam mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. Indeks Pembangunan Manusia diubah metode perhitungannya kalau dulu dibentuk berdasarkan empat indikator yaitu Angka Harapan Hidup (AHH), Angka Melek Huruf (AMH), Angka Rata-Rata Lama Sekolah (ARLS) dan Kemampuan daya beli. Sedangkan metode perhitungan yang baru menggunakan Indikator Angka Harapan Hidup saat lahir merepresentasikan dimensi umur panjang dan hidup sehat. Selanjutnya, Rata-Rata Lama Sekolah dan Angka Harapan Lama Sekolah mencerminkan output dari dimensi pengetahuan. Adapun indikator pengeluaran Perkapita digunakan untuk mengukur dimensi hidup layak. Perkembangan Angka IPM Kota Sawahlunto dapat dilihat sebagai berikut :



Grafik 2.12
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Sawahlunto Tahun 2015 – 2019



Sumber: BPS Kota Sawahlunto Tahun 2019

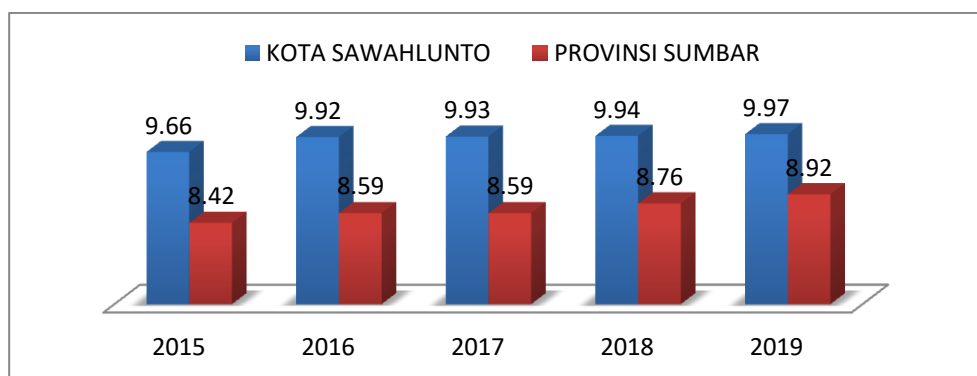
Perkembangan IPM Kota Sawahlunto 2015-2019 memperlihatkan peningkatan yang sangat baik dan hal ini tidak terlepas dari peningkatan semua komponen pembentuk IPM. Pada tahun 2014 angka IPM di Kota Sawahlunto baru mencapai 69,61 dan mengalami peningkatan setiap tahunnya hingga pada tahun 2018 yaitu 71,72. Status IPM Kota Sawahlunto pada tahun 2015-2019 adalah sedang dan pada tahun 2017-2019 naik statusnya menjadi tinggi.

Jika dilihat dari perbandingan dengan Kabupaten/Kota di Sumatera Barat, IPM Kota Sawahlunto ada di peringkat ke 7 di Propinsi Sumatera Barat dari 19 Kabupaten/Kota yang ada. Tetapi untuk cakupan Kota, Kota Sawahlunto menduduki peringkat terendah, yaitu ke 7 dari 7 kota yang ada. Hal ini disebabkan karena faktor pendukung dari IPM ini masih rendah bila dibandingkan dengan pencapaian kota-kota lain di Propinsi Sumatera Barat.

2.2.2.2. Angka Rata-Rata Lama Sekolah (ARLS)

Angka Rata-rata Lama Sekolah adalah jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk usia 15 tahun keatas dalam menjalani pendidikan formal yang mengindikasikan makin tingginya pendidikan yang dicapai oleh masyarakat di suatu daerah. Perkembangan Angka Rata-rata Lama Sekolah di Kota Sawahlunto dari tahun 2015 sampai 2019 seperti terlihat pada grafik di bawah ini :

Grafik 2.13
Angka Rata-Rata Lama Sekolah (ARLS) Kota Sawahlunto Tahun 2015 – 2019



Sumber : BPS Kota Sawahlunto Tahun 2019

Dari grafik diatas dapat dilihat Angka Rata-rata Lama Sekolah di Kota Sawahlunto dari tahun 2014-2018 mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2015 Angka Rata Rata Lama Sekolah 9.66 Tahun dan pada tahun 2019 meningkat menjadi 9,97 Tahun. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata pendidikan warga Kota Sawahlunto adalah telah sampai duduk di bangku kelas I SLTA, artinya wajib belajar 9 tahun telah tuntas di Kota Sawahlunto. Dalam perkembangannya Kota Sawahlunto menduduki peringkat ke 7 dari



Kabupaten/Kota di Propinsi Sumatera Barat dan untuk tingkat Kota, Kota Sawahlunto menduduki peringkat terakhir dari kota yang ada di Provinsi Sumatera Barat. Sebagaimana yang bisa kita lihat pada tabel berikut ini:

Ada beberapa indikator yang mempengaruhi ARLS ini, yaitu Angka Partisipasi Kasar (APK), Angka Partisipasi Murni (APM), angka kelulusan siswa, mutu tenaga pendidik, nilai ujian, sarana prasarana sekolah dan sebagainya.

2.2.2.3. Angka Partisipasi Kasar

Angka Partisipasi Kasar (APK) merupakan persentase jumlah penduduk yang sedang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan, terhadap jumlah penduduk usia sekolah yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut.

Jika Angka Partisipasi Kasar (APK) pada suatu jenjang pendidikan tertentu melebihi 100% berarti bahwa jumlah seluruh siswa yang sedang bersekolah pada jenjang pendidikan tertentu melebihi jumlah penduduk yang berusia sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut, demikian juga sebaliknya jika APK kurang dari 100%. Jumlah siswa yang tidak sama dengan jumlah penduduk berusia sesuai dengan jenjang pendidikan ini dapat disebabkan oleh adanya siswa yang berusia kurang dari yang seharusnya atau yang berusia melebihi yang seharusnya serta pengaruh penduduk yang bersekolah di luar daerah dan siswa yang berasal dari luar daerah, serta adanya penduduk usia sekolah yang tidak bersekolah. Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) dapat dilihat dalam tabel di bawah ini :

Tabel 2.21
Angka Partisipasi Kasar Menurut Jenjang Pendidikan Di Kota Sawahlunto Tahun 2015- 2019

| No | Tahun | SD/MI/ Paket A (%) | SMP/MTs/ Paket B (%) | SMA/SMK/MA/ Paket C (%) |
|----|-------|-----------------------|-------------------------|----------------------------|
| 1. | 2015 | 110,73 | 86,46 | 95,25 |
| 2. | 2016 | 112,94 | 108,25 | 93,28 |
| 3. | 2017 | 105,93 | 95,21 | 100,20 |
| 4. | 2018 | 111,33 | 96,68 | 88,85 |
| 5 | 2019 | 100,96 | 92,57 | 94,75 |

Sumber : BPS Kota Sawahlunto 2019

Dilihat dari tabel di atas APK pada jenjang pendidikan SD sederajat selalu berada diatas 100 % setiap tahun. APK Jenjang pendidikan SD sederajat melebihi 100% yang berarti jumlah siswa SD sederajat lebih besar dari jumlah penduduk usia 7-12 tahun. Sedangkan untuk jenjang pendidikan SMP sederajat, nilai APK selalu berada dibawah 100 %, kecuali tahun 2016, sebesar 108,25%. Pada Tahun 2019, nilai APK tingkat SMP ini mengalami penurunan dari 96,68% menjadi 92,57%. Hal ini mengindikasikan jumlah siswa yang lulus ditingkat SMP untuk melanjutkan ke tingkat SMA pada tahun 2016, usianya rata-rata lebih dari 15 Tahun. Hal ini yang menyebabkan penurunan yang signifikan tingkat SMP pada tahun berikutnya, dan jenjang pendidikan SMA sederajat mengalami peningkatan untuk tahun yang sama. Untuk jenjang pendidikan SMA sederajat, Nilai APK pada tahun 2019 mengalami kenaikan dari 88,85% menjadi 94,75%. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah siswa SD sederajat dan SMA sederajat lebih besar dari jumlah penduduk usia 13-15 tahun dan 16-18 tahun.

2.2.2.4. Angka Partisipasi Murni

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah perbandingan antara jumlah siswa kelompok usia sekolah pada jenjang pendidikan tertentu dengan penduduk usia sekolah pada jenjang pendidikan tertentu.



Tabel 2.22
Angka Partisipasi Murni Menurut Jenjang Pendidikan Di Kota Sawahlunto
Tahun 2015 – 2019

| No | Tahun | SD/MI/ Paket A (%) | SMP/MTs/ Paket B (%) | SMA/SMK/MA/ Paket C (%) |
|----|-------|--------------------|----------------------|-------------------------|
| 1. | 2015 | 96,39 | 76,98 | 82,47 |
| 2. | 2016 | 100,00 | 100,00 | 87,04 |
| 3. | 2017 | 99,70 | 86,83 | 72,26 |
| 4. | 2018 | 99,70 | 86,83 | 72,26 |
| 5. | 2019 | 96,66 | 82,94 | 70,86 |

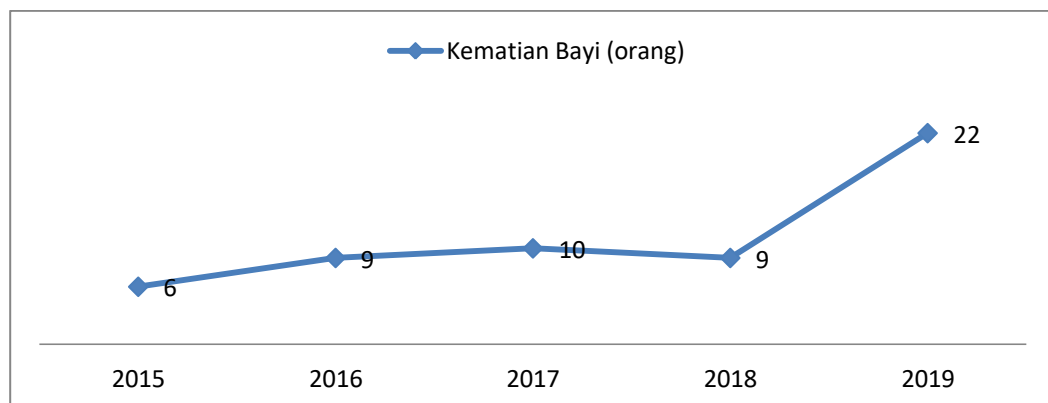
Sumber : Dinas Pendidikan Tahun 2019

Pada tabel diatas, terlihat bahwa Nilai APM tingkat SD cenderung lebih tinggi dibanding Tingkat SMP dan SMA sederajat. Hal ini berarti, antusiasme bersekolah masyarakat pada usia SD (7-12 Tahun) masih tinggi. Seiring peningkatan jenjang pendidikan, nilai APM ini cenderung mengalami penurunan. Selain itu, factor tinggal kelas juga akan mempengaruhi nilai APM ini. Pada tahun 2016, nilai APM ini mempunyai nilai tertinggi dibanding tahun-tahun sebelumnya untuk semua jenjang pendidikan. Bahkan nilai ini mencapai 100%. Artinya, semua siswa dijenjang Pendidikan SD dan SMP sederajat, memang betul-betul berusia 7-12 tahun dan 13-15 tahun seluruhnya.

2.2.2.5. Angka Kelangsungan Hidup bayi

Angka Kelangsungan Hidup Bayi (AKHB) adalah probabilitas bayi hidup sampai dengan usia 1 tahun. Angka kelangsungan hidup bayi = (1 - Angka Kematian Bayi). Angka Kematian Bayi dihitung dengan jumlah kematian bayi usia dibawah 1 tahun dalam kurun waktu setahun per jumlah kelahiran hidup pada tahun tersebut dikali 1.000 kelahiran hidup pada tahun yang sama. Angka Kematian Bayi di Kota Sawahlunto dapat dilihat pada grafik berikut:

Grafik 2.14
Angka Kematian Bayi Kota Sawahlunto Tahun 2015 – 2019



Sumber : Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB Tahun 2019

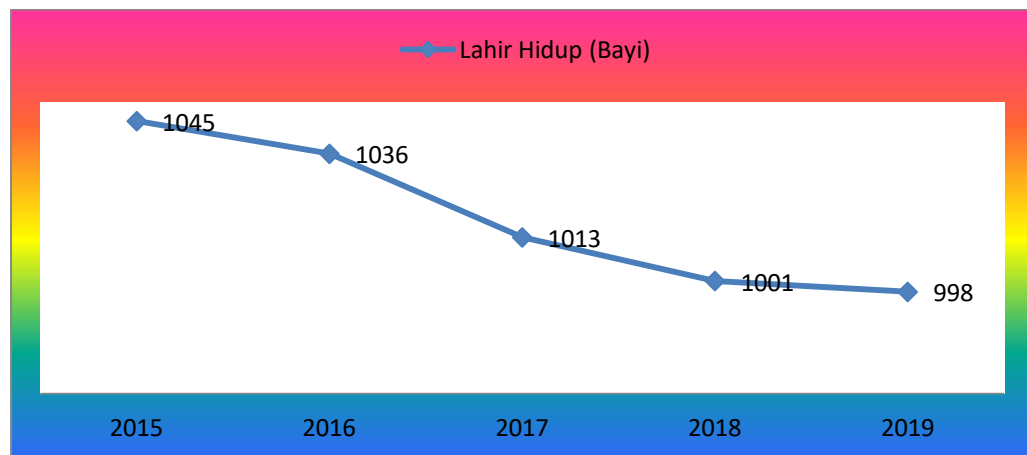
Pada grafik diatas, terlihat bahwa angka kematian bayi di Kota Sawahlunto mengalami kecenderungan penurunan setiap tahunnya. Angka terendah terjadi pada tahun 2015, yaitu sebesar 6 bayi, sedangkan pada tahun 2017, terjadi sedikit peningkatan menjadi 10 bayi kemudian turun lagi menjadi 9 bayi pada tahun 2018, terjadi kenaikan yang signifikan sebesar 22 bayi pada tahun 2019. Secara umum, angka ini sudah menunjukkan bahwa penanganan kesehatan ibu dan anak bayi mengalami perbaikan setiap tahun. Usia bayi merupakan suatu kondisi yang sangat rentan terhadap kesakitan dan kematian dan hal ini juga dipengaruhi banyak hal. Beberapa upaya telah dan tetap akan dilaksanakan dalam penurunan Angka Kematian Bayi ini baik melalui promosi kesehatan (penyuluhan-penyuluhan dan konseling tentang kesehatan ibu dan anak), melalui program P4K, kelas ibu hamil serta kemitraan bidan dan dukun melahirkan.



Diharapkan kegiatan-kegiatan ini mempunyai daya ungkit yang besar dalam upaya penurunan angka kematian bayi ini. Bila dilihat dari grafik diatas dalam lima tahun terakhir Angka Kematian Bayi di Kota Sawahlunto telah mengalami penurunan yang cukup signifikan.

Dari data diatas juga dapat kita ketahui Angka Kelangsungan Hidup Bayi di Kota Sawahlunto dari tahun 2015-2019 adalah sebagai berikut:

Grafik 2.15
Angka Kelangsungan Hidup Bayi Kota Sawahlunto Tahun 2015 – 2019



Sumber : BPS Kota Sawahlunto Tahun 2019

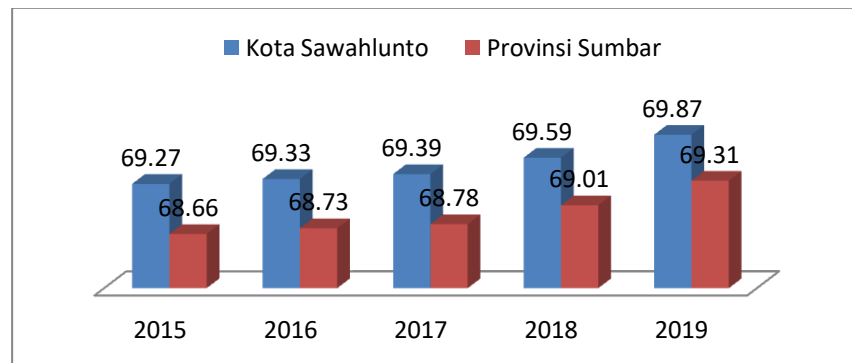
Angka kelangsungan hidup bayi di Kota Sawahlunto selalu mengalami peningkatan dari tahun 2015 sampai 2019. Hal ini menunjukkan bahwa derajat kesehatan masyarakat Kota Sawahlunto secara umum sudah makin membaik/meningkat, khususnya untuk indikator keselamatan ibu melahirkan dan bayinya. Peningkatan kelangsungan hidup bayi ini dipengaruhi oleh beberapa factor, diantaranya frekuensi pemeriksaan antenatal, berat badan lahir, waktu pemberian ASI, pertolongan persalinan, nomor urut lahir dan lain lain. Oleh karena itu upaya meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap kesehatan ibu dan bayi serta pentingnya mendapatkan pelayanan kesehatan di sarana pelayanan kesehatan selalu dilakukan dan diintensifkan. Disamping itu program desa/kelurahan siaga, Gerakan Sayang Ibu (GSI), PHBS dan program lainnya, baik itu yang diprakarsai oleh OPD maupun Tim Penggerak PKK yang menunjang program kesehatan juga tetap dijalankan dan lebih diintensifkan sampai terwujud derajat kesehatan masyarakat yang optimal ditandai dengan AKI dan AKB yang makin menurun.

2.2.2.6. Angka Usia Harapan Hidup

Angka Usia Harapan Hidup merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk menilai derajat kesehatan masyarakat. Angka Usia Harapan Hidup adalah angka perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur. Angka ini mencerminkan rata-rata tahun hidup yang masih akan dijalani oleh seseorang sejak lahir. Angka Harapan Hidup ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu faktor social, ekonomi, kesehatan dan pendidikan. Karena itu untuk mempertahankan dan meningkatkan Angka Harapan Hidup, faktor-faktor yang mempengaruhinya harus dikendalikan melalui dukungan program kegiatan di OPD terkait.



Grafik 2.16
Angka Harapan Hidup Kota Sawahlunto pada Tahun 2015-2019



Sumber : BPS Kota Sawahlunto Tahun 2019

Dari grafik diatas dapat terlihat bahwa Angka Usia Harapan Hidup masyarakat Kota Sawahlunto sejak tahun 2015–2019 selalu mengalami peningkatan, hal ini menggambarkan meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat seiring dengan membaiknya tingkat pendapatan dan pendidikan masyarakat.

2.2.2.7. Jumlah Kematian Ibu

Kematian ibu menurut defenisi WHO adalah kematian selama kehamilan atau dalam periode 42 hari setelah berakhirnya kehamilan akibat semua sebab yang terkait dengan atau diperberat oleh kehamilan atau penanganannya tetapi bukan disebabkan kecelakaan atau cedera. Pada tahun 2019 tidak terjadi kematian ibu di Kota Sawahlunto, hal ini jauh menurun dibandingkan dengan tahun 2016 yang kematiannya sebanyak 3 orang. Adapun upaya yang dilakukan adalah meningkatkan kemitraan bidan dengan dukun, meningkatkan superfisi, monitoring dan evaluasi kegiatan program KIA dan Kespro, Pelaksanaan Review Maternal dan Parinatal (RMP) serta peningkatan sosialisai tentang kelas ibu dan program P4K.

Tabel 2.23
Angka Kematian Ibu di Kota Sawahlunto Tahun 2015–2019

| NO | URAIAN | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|----|----------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 1 | JUMLAH KEMATIAN IBU | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| | -KEMATIAN IBU NIFAS | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| | -KEMATIAN IBU HAMIL | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |

Sumber : Dinas Kesehatan dan Pengendalian Penduduk Kota Sawahlunto

Dari tabel diatas kematian pada ibu terjadi pada ibu nifas dan ibu hamil dengan penyebab 2 orang disebabkan deman dan 1 orang Suspek Syok septik pada pendarahan post SCTPP atas indikasi HAP ex plasenta previa +bekas SC 1x+DM tipe III.

2.2.2.8. Jumlah Kasus Penyakit TB Paru

TBC adalah penyakit yang sangat menular dan mempunyai angka kematian yang sangat tinggi, ditularkan oleh organism Mycobacterium Tuberculosis complek. TBC bukan merupakan penyakit turunan atau guna-guna. Kebanyakan TBC menyerang paru paru tetapi dapat juga menyerang bagian tubuh lainnya seperti kelenjer getah bening, selaput otak, kulit, tulang dan bagian tubuh lainnya. Seseorang dicurigai menderita TBC bila menunjukkan gejala batuk berdahak selama 2 minggu atau lebih, kadang kadang dahaknya bercampur darah, sesak nafas, nyeri dada, berkeringat pada malam hari, badan lemah, demam meriang lebih dari sebulan dan lain lain. Pada tahun 2019 dari jumlah



penduduk 66.853 orang yang diperiksa maka jumlah kasus TB semua type ditemukan 101 orang.

Tabel 2.24
Jumlah Kasus TBC di Kota Sawahlunto Tahun 2015 – 2019

| NO | URAIAN | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|----|------------------|------|------|------|------|------|
| 1 | JUMLAH KASUS TBC | 59 | 97 | 92 | 84 | 101 |
| | | | | | | |

Sumber : BPS Kota Sawahlunto Tahun 2019

2.2.2.9. Jumlah kasus penyakit HIV AIDS

HIV (Human Immunodeficiency Virus) adalah virus yang menyebabkan penyakit AIDS yang termasuk kelompok retrovirus. Seseorang yang terinfeksi HIV akan mengalami infeksi seumur hidup. AIDS (Acquired Immune Deficiency Syndrom) merupakan sekumpulan gejala penyakit yang timbul karena turunya kekebalan tubuh. AIDS disebabkan oleh virus HIV yang hidup didalam 4 cairan tubuh manusia yaitu cairan darah, sperma, vagina dan air susu ibu.

Untuk kasus HIV/AIDS di Kota Sawahlunto dari tahun 2015 s/d 2019 ditemukan sebanyak 14 kasus. Untuk kedepannya kasus ini perlu ditekan dengan memperbanyak kegiatan sosialisasi, membentuk tim komisi penanggulangan, melakukan pengawasan dan monitoring terhadap kelompok resiko tinggi, pengawasan minum obat bagi penderita dan lain sebagainya.

Tabel 2.25
Jumlah Kasus HIV AIDS di Kota Sawahlunto Tahun 2015 – 2019

| NO | URAIAN | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|----|-----------------------|------|------|------|------|------|
| 1 | JUMLAH KASUS HIV AIDS | 1 | 1 | 2 | 1 | 9 |
| | | | | | | |

Sumber : BPS Kota Sawahlunto Tahun 2019

2.2.2.10. Jumlah Kasus Penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD)

Demam Berdarah Dengue (DBD) ditularkan oleh nyamuk Aedes Aegyti yang tempat perindukannya pada air tergenang yang tidak kontak langsung dengan tanah, dibak mandi, tempayan, pot bunga yang berisi air, baju yang bergantung dan lain-lain serta kebiasaan menggigit pada pagi dan sore hari. Demam Berdarah Dengue ditandai dengan demam mendadak yang diikuti rash kemerahan, dan menunjukkan tanda tanda perdarahan, trombositopenia <100.000 iu dan

Hematokrit yang meningkat tajam lebih dari 20 %. Kasus DBD ditahun 2019 di Kota Sawahlunto meningkat sangat significant. Pada tahun 2018 sebanyak 37 kasus dan pada tahun 2019 ini menjadi 121 kasus, ini menunjukkan adanya peningkatan kasus lebih dari 50%. Untuk mencegah kasus KLB dilakukan pengasapan atau fogging. Sawahlunto tidak termasuk endemis DBD karena tahun 2019 tidak terjadi kematian dan semua tertangani dengan baik.

Tabel 2.26
Jumlah Kasus DBD di Kota Sawahlunto Tahun 2015 – 2019

| NO | URAIAN | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|----|------------------|------|------|------|------|------|
| 1 | Jumlah Kasus DBD | 170 | 205 | 180 | 37 | 121 |
| | | | | | | |

Sumber : BPS Kota Sawahlunto Tahun 2019

2.2.2.11. Jumlah Kasus Stanting Balita di Kota Sawahlunto Tahun 2015 - 2019)

Prosetasi kasus Stanting balita di Kota Sawahlunto pada tahun 2015 berjumlah 18,1 persen ini disebabkan oleh kurangnya intake gizi pada Balita, kurangnya Pola asuh, factor Prilaku, factor ekonomi keluarga, serta kurangnya pengetahuan Masyarakat tentang pola hidup sehat, untuk itu telah dilakukan



upaya-upaya oleh Dinas Teknis yaitu dengan memberikan motivasi dan konsling kepada keluarga, memberikan makan tambahan, melakukan pemantauan kepada balita serta membentuk pos-pos gizi di tingkat desa kelurahan, maka untuk tahun 2019 prosentasi kasus stunting di Kota Sawahlunto mengalami penurunan berjumlah 11,1 persen

Tabel 2.27
Prosentase Kasus Stunting Balita di Kota Sawahlunto Tahun 2015 - 2019

| NO | PUSKESMAS | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|----|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 1 | Talawi | 18,9 | 20,7 | 20,2 | 18,6 | 6,6 |
| 2 | Kolok | 18,5 | 17,4 | 11,1 | 33,0 | 19,7 |
| 3 | Sungai Durian | 13,5 | 19,0 | 3,0 | 1,7 | 7,2 |
| 4 | Kampung Teleng | 8,0 | 21,0 | 8,8 | 20,7 | 3,3 |
| 5 | Lunto | 23,2 | 17,9 | 15,5 | 17,2 | 16,0 |
| 6 | Silungkang | 23,1 | 24,8 | 21,4 | 26,7 | 21,7 |
| | KOTA | 18,1 | 20,8 | 14,5 | 18,5 | 11,1 |

Sumber : Dinas Kesehatan dan Pengendalian Penduduk Kota Sawahlunto

2.2.2.12. Cakupan Rumah Tangga dengan Sanitasi Baik

a. Jamban

Jamban sehat adalah pembuangan tinja yang efektif untuk memutus mata rantai penular penyakit, sekurang kurangnya untuk mengurangi kontaminasi tinja terhadap lingkungan yang mana kotoran diletakan pada suatu tempat atau jamban. Untuk meningkatkan derajat kesehatan dimasyarakat selalu dipengaruhi oleh beberapa factor seperti lingkungan, prilaku, pelayanan kesehatan dan keturunan. Kurangnya kesadaran, pengetahuan dan rasa memiliki jamban sehat akan menjadi masalah untuk memutus mata rantai penyebaran penyakit dan menciptakan lingkungan yang bersih.

Tabel 2.28
Persentase RT Yang Memenuhi Syarat

| No | Uraian | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|----|---|--------|--------|--------|--------|--------|
| 1 | Jumlah rumah | 13.255 | 13.488 | 13.607 | 13.607 | 14.257 |
| 2 | Jumlah rumah yang diperiksa | 13.255 | 13.488 | 13.607 | 13.607 | 14.257 |
| 3 | Jumlah rumah dengan jamban | 12.160 | 13.073 | 12.702 | 12.702 | 13.352 |
| 4 | Jumlah rumah dengan jamban yang memenuhi syarat | 10.470 | 10.842 | 11.496 | 11.496 | 11.752 |
| 5 | Persentase yang memenuhi syarat | 86,10 | 82,93 | 90,50 | 90,50 | 88,02 |

Sumber : Dinas Kesehatan dan Pengendalian Penduduk Kota Sawahlunto

Dalam tujuh tahun terakhir ini dikota Sawahlunto Pemerintah Daerah telah memberikan bantuan bahan bangunan untuk pembuatan jamban keluarga bagi keluarga miskin sehingga rumah yang selama ini tidak sehat dikarenakan tidak mempunyai jamban sehat menjadi sehat, hal ini dibuktikan bahwa tahun 2019 ini capaian rumah tangga yang mempunyai jamban sehat sudah 88,02 %.Disamping itu melalui kerja sama lintas sector program PNPM mandiri dilakukan kegiatan perbaikan rumah yang tidak layak huni berserta jambannya. Dilihat dari hasil cakupan rumah tangga tentang penggunaan jamban dari tahun ketahun ada peningkatan, hal ini menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat akan pentingnya jamban sudah dirasakan sehingga penularan penyakit menular dapat ditekan. Penyuluhan harus terus menerus disampaikan kemasyarakat agar



masyarakat sadar akan manfaat jamban serta menghindarkan diri dari penyakit diare, cacangan dan lainnya.

b. Sarana Air Bersih

Air adalah kebutuhan pokok manusia dan sangat penting bagi kesehatan. Untuk menjamin kualitas air yang akan digunakan untuk konsumsi air minum, masak, mandi, cucian dan lain lain perlu adanya suatu pengawasan terhadap penyediaan air tersebut guna mengkaji dan menjamin keamanan, kenyamanan air yang akan didistribusikan dan digunakan masyarakat sehingga terlindung dari kontaminasi bahan yang membahayakan kesehatan. Rendahnya cakupan air bersih yang tidak memenuhi syarat kesehatan akan berhubungan dengan penyakit berbasis lingkungan seperti tingginya kejadian penyakit diare, tifus, kolera dan lain lain. Agar masyarakat terhindar dari berbagai macam penyakit yang akan timbul maka perlu diadakan monitoring dan surveilen terhadap penyedia air minum (Depot air minum isi ulang, PDAM, sumur gali, PAH dan lain lain) dalam pengawasan berbentuk sanitasi, pengambilan sampel air, pengujian kualitas air, pencemaran, analisa hasil pemeriksaan laboratorium, pemberian rekomendasi. Syarat air bersih secara fisik, kimia dan mikrobiologi adalah air tersebut bersih dan tidak keruh, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbau, tidak mengandung zat kimiawi dan tidak mengandung kuman penyakit.

Tabel. 2.29
Persentase RT dengan SAB yang Memenuhi Syarat

| No | Uraian | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|----|--|--------|--------|--------|--------|--------|
| 1 | Jumlah rumah | 13.255 | 13.488 | 13.607 | 13.607 | 14.257 |
| 2 | Jumlah rumah yang diperiksa | 13.255 | 13.488 | 13.607 | 13.607 | 14.257 |
| 3 | Jumlah rumah dengan SAB | 12.002 | 12.197 | 13.190 | 13.190 | 13.626 |
| 4 | Jumlah rumah dengan SAB yang memenuhi syarat | 10.903 | 10.954 | 11.557 | 11.557 | 12.335 |
| 5 | Persentase yang memenuhi syarat | 90,84 | 89,90 | 87,61 | 87,61 | 90,53 |

Sumber : Dinas Kesehatan dan Pengendalian Penduduk Kota Sawahlunto

Sesuai dari hasil capaian program dari table diatas untuk kota Sawahlunto rumah tangga yang menggunakan sarana air bersih cukup tinggi rata rata 90,63% dan hal ini perlu terus dikembangkan. Hal ini perlu terus ditingkatkan agar masyarakat benar benar dapat memenuhi kebutuhan air sesuai standar kesehatan.

c. Sarana Pembuangan Air Limbah

Air Limbah adalah air bekas dari kamar mandi, dapur atau cucian yang dapat mengotori sumur, sungai dan lainnya yang dapat mengganggu masyarakat berupa pemandangan yang tidak nyaman, menjadi sarang penyakit, bau busuk dan mencemari air bersih karena tidak meresap kedalam tanah atau tergenang dan tidak mengalir. Ada factor ekonomi, kebiasaan dan kualitas pendidikan yang berpengaruh besar terhadap pola hidup masyarakat dalam memenuhi syarat kesehatannya. Penyuluhan harus terus dilakukan agar masyarakat dapat membuat pengelolaan air limbah yang sesuai dengan syarat kesehatan baik berupa septic tank, sumur resapan, got dan lainnya.

Tabel 2.30
Persentase RT dengan SPAL yang Memenuhi Syarat

| No | Uraian | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|----|-----------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 1 | Jumlah rumah | 13.255 | 13.488 | 13.607 | 13.607 | 14.257 |
| 2 | Jumlah rumah yang diperiksa | 13.255 | 13.488 | 13.607 | 13.607 | 14.257 |



| No | Uraian | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|----|---|--------|--------|--------|--------|--------|
| 3 | Jumlah rumah dengan SPAL | 12.706 | 13.017 | 13.148 | 13.148 | 13.983 |
| 4 | Jumlah rumah dengan SPAL yang memenuhi syarat | 10.484 | 10.320 | 10.386 | 10.386 | 11.363 |
| 5 | Persentase yang memenuhi syarat | 82,51 | 79,288 | 78,99 | 78,99 | 81,26 |

Sumber : Dinas Kesehatan dan Pengendalian Penduduk Kota Sawahlunto

Di Kota Sawahlunto sesuai dengan hasil capaian cakupan SPAL di rumah tangga rata rata sudah mencapai 81,26%. Diharapkan hal ini terus ditingkatkan melalui penyuluhan dan pendekatan keluarga sehingga pemahaman akan fungsi dan manfaat SPAL dapat tercapai sesuai harapan serta angka penyakit berbasis lingkungan dapat ditekan.

2.2.2.13. Opini BPK

Opini Badan Pemeriksa Keuangan (disingkat Opini BPK) merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (adequate disclosures), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern.

Untuk pertama kalinya pada **Tahun 2016** Pemerintah Kota Sawahlunto memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian terhadap Laporan Keuangan **Tahun 2015**. Dimana sebelumnya hanya memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian. **Dan secara berturut-turut tahun 2017, 2018 dan 2019 memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian.** Atas prestasi tersebut Pemerintah Kota Sawahlunto memperoleh reward dari pemerintah pusat berupa penambahan anggaran.

2.2.3. FOKUS ADAT, SENI BUDAYA DAN OLAHRAGA

2.2.3.1. Kesenian dan Kebudayaan

1. Jumlah Grup Kesenian

Kebudayaan menurut Koentjaraningrat adalah keseluruhan sistem, gagasan, tindakan dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik dari manusia dengan cara belajar. Budaya merupakan kristalisasi nilai pola hidup yang dianut suatu komunitas dan diwariskan dari generasi ke generasi. Budaya tiap komunitas tumbuh dan berkembang secara unik, karena perbedaan pola hidup komunitas dan karya-karya manusia dalam usaha mempertahankan hidup dan memenuhi kebutuhan hidupnya.

Kota Sawahlunto selama ini telah dikenal sebagai Kota Seni dan Budaya yang mempunyai peranan penting dalam pembangunan, karena masyarakatnya yang heterogen dan multikultural sehingga melahirkan berbagai karakter dan budaya yang tumbuh dan berkembang ditengah-tengah masyarakat.

Faktor-faktor yang menyebabkan perkembangan tersebut antara lain keterbukaan wilayah dan komunikasi bagi pendatang untuk bermukim tetap dalam wilayah Kota Sawahlunto. Kesadaran akan pentingnya peran seni dan budaya daerah dalam pembangunan muncul dikalangan masyarakat dan Pemerintah Kota Sawahlunto. Hal ini terbukti dengan dicanangkannya Kota Sawahlunto sebagai Kota Wisata Tambang yang Berbudaya, dan ditetapkannya Geopark Sawahlunto sebagai Geopark Nasional karena sudah memenuhi persyaratan Administrasi dan Teknis sebagai Geopark Nasional Indonesia dan berkomitmen untuk mengembangkan Kawasan Geopark berdasarkan prinsip Konservasi, Edukasi dan Pemberdayaan Sosial Ekonomi Masyarakat yang diberikan di Jakarta tanggal 29 November 2018 dan berlaku sampai bulan



November 2022 serta dengan masuknya Kota Sawahlunto sebagai “*Ombilin Coal Mining Heritage Of Sawahlunto*” (Warisan Tambang Batubara Ombilin Sawahlunto) dalam Sidang Komite Warisan Dunia ke 43 di Baku, Azerbaijan tanggal 06 juli 2019.

Pembangunan Kebudayaan di Kota Sawahlunto ditujukan untuk melestarikan dan mengembangkan kebudayaan daerah serta mempertahankan jati diri dan nilai-nilai budaya daerah di tengah semakin derasnya arus informasi dan teknologi serta pengaruh negatif budaya luar. Perkembangan seni dan budaya Kota Sawahlunto dapat dilihat pada tabel 2.28

Tabel 2.37
Jumlah Group Kesenian Kota Sawahlunto Tahun 2015-2019

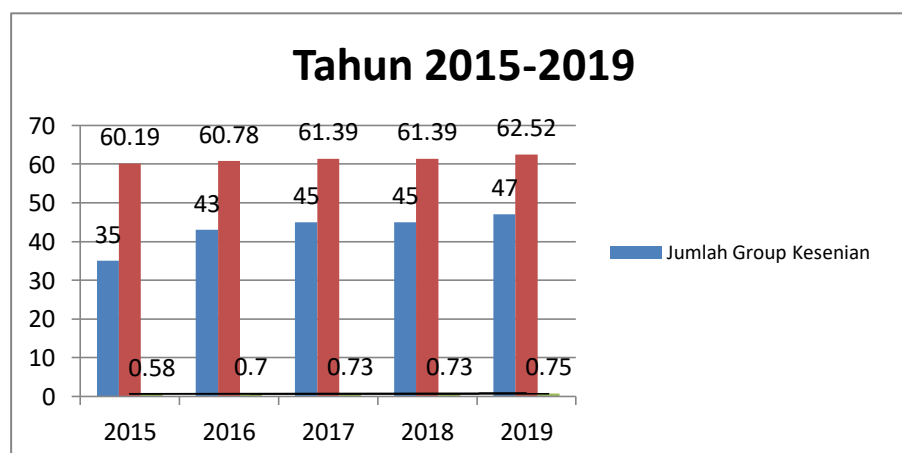
| No | Indikator | Satuan | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|----|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 1. | Jumlah Grup Kesenian | Unit | 35 | 43 | 45 | 45 | 47 |
| 2. | Jumlah penduduk/10.000 | Jiwa | 60,19 | 60,78 | 61,39 | 61,39 | 62,52 |
| 3. | Jumlah grup kesenian per 10.000 penduduk | Unit | 0,58 | 0,70 | 0,73 | 0,73 | 0,75 |

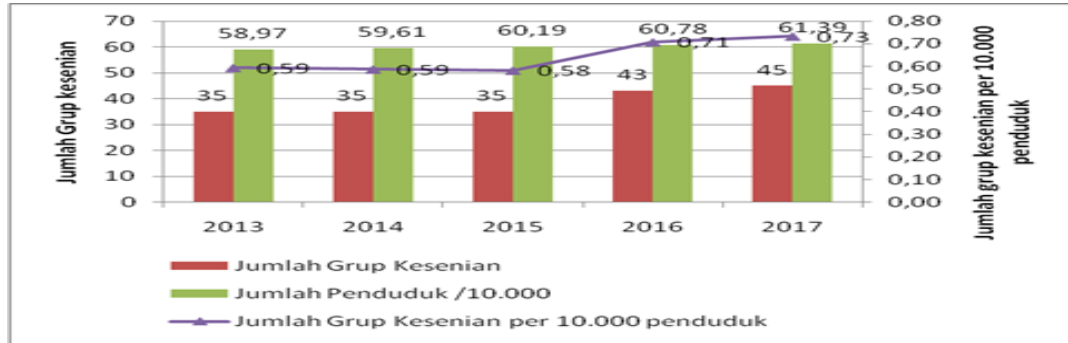
Sumber :

1. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, 2015-2019.
2. Dinas Kebudayaan dan Peninggalan Bersejarah dan Permuseuman Kota Sawahlunto, 2019.
3. Hasil Olahan, 2019

Jumlah Grup kesenian yang ada di Kota Sawahlunto tahun 2015 berjumlah 35 grup kesenian, di tahun 2016 terjadi penambahan sebanyak 8 group sehingga menjadi 43 grup dan di tahun 2017 mengalami penambahan sebanyak 2 grup kesenian lagi, sehingga berjumlah sebanyak 45 grup, tetapi pada tahun 2018 tidak ada lagi penambahan group kesenian. Tahun 2019 terjadi lagi penambahan group kesenian sebanyak 2 group lagi sehingga menjadi 47 group. Dari 47 group kesenian, yang aktif hanya sebanyak 34 grup dan 13 group kesenian tidak aktif, sedangkan 25 grup diantaranya sudah berbadan hukum. Perkembangan kesenian di Kota Sawahlunto mengalami peningkatan dengan adanya kegiatan randai pada anak Sekolah Dasar (SD), Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA). Kegiatan ini menjadi event tahunan di Kota Sawahlunto yaitu Sawahlunto Randai Festival.

Grafik 2.19
Jumlah Grup Kesenian di Kota Sawahlunto Tahun 2015-2019





Sumber: Hasil Olahan, 2019

2. Jumlah Gedung Kesenian

Untuk mewujudkan Visi Misi Kota Sawahlunto sebagai Kota Wisata Tambang yang Berbudaya, sangat perlu melestarikan seni dan budaya yang ada dan berkembang di tengah masyarakat, maka keberadaan gedung kesenian merupakan hal yang sangat penting sebagai wadah untuk mengembangkan minat dan bakat anak bangsa, disisi lain pembangunan bidang seni sangat erat kaitannya dengan kualitas hidup manusia dan masyarakat suatu daerah. Salah satu bentuk pembangunan bidang seni dan budaya ditunjukkan dengan adanya gedung kesenian dalam rangka mendukung berkembangnya kesenian suatu daerah, Tabel berikut ini menunjukkan data jumlah gedung kesenian di Kota Sawahlunto.

Tabel 2.38
Jumlah Gedung Kesenian di Kota Sawahlunto Tahun 2015-2019

| No | Indikator | Satuan | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|----|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 1. | Jumlah Gedung Kesenian | Unit | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 |
| 2. | Jumlah penduduk/10.000 | Jiwa | 60,19 | 60,78 | 61,39 | 61,39 | 62,52 |
| 3. | Jumlah Gedung Kesenian Per 10.000 penduduk | Unit | 0,17 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,19 |

Sumber :

1. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, 2015-2019
2. Dinas Kebudayaan dan Peninggalan Bersejarah dan Permuseuman Kota Sawahlunto, 2019
3. Hasil Olahan, 2019

Pemerintah Kota Sawahlunto belum memiliki gedung pertunjukan kesenian yang representatif dan memenuhi standar sebuah gedung pertunjukan kesenian. Sehingga pelaku-pelaku seni Kota Sawahlunto masih memanfaatkan aula/ruang pertemuan gedung perkantoran dan sekolah serta ruang-ruang terbuka yang sering digunakan masyarakat untuk berkumpul atau bersosialisasi dalam melakukan aktivitas seni. Adapun jumlah tempat pertunjukan kesenian yang sering digunakan oleh pelaku seni di Kota Sawahlunto berjumlah 18lokasi yang terdiri dari dalam ruangan (indoor) sebanyak 12 tempat dan luar ruangan (outdoor) 8 tempat.

Namun secara kenyataanya Kota Sawahlunto hanya memiliki 1 Gedung Kesenian yaitu Gedung Pusat Kebudayaan (GPK) yang merupakan bangunan tua peninggalan Belanda yang dulunya merupakan Gedung Pertemuan Masyarakat, dan berfungsi sebagai tempat hiburan bagi para kolonial Belanda. Penyelenggaraan pertunjukkan kesenian tidak harus diadakan didalam gedung kesenian, dapat juga di ruang terbuka publik yang digunakan sebagai tempat berekspresi bagi para seniman. Ruang terbuka publik yang sering digunakan bagi para seniman Kota Sawahlunto untuk menampilkan karya seni dan pertunjukan kesenian lainnya adalah Lapangan



Segitiga atau lebih dikenal dengan LapSeg, dan panggung terminal di Kota Sawahlunto dan di terminal di Talawi. Hal ini menjadi penyebab selama lima tahun terakhir tidak terdapat penambahan jumlah gedung kesenian. Saat ini Gedung Pusat Kebudayaan (GPK) dikelola oleh Pemerintah Kota Sawahlunto.

3. Museum

Kalau dilihat dari data jumlah kunjungan objek wisata museum goedang ransum pada tabel 2.30 terjadi peningkatan dari tahun ke tahun, namun kalau di lihat pada objek museum kereta api terjadi fluktuasi, hal ini merupakan tugas pemerintah daerah bagaimana meningkatkan jumlah kunjungan pada objek Museum Kereta Api dengan Iconnya “Mak Itam”. Saat ini kondisi lokomotif Mak Itam memang tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya, namun Pemerintah dapat membuat duplikat Mak Itam sehingga para pengunjung dapat merasakan berwisata dengan Duplikat kereta api Mak Itam namun suasana yang dirasakan seperti zaman dahulu.

Tabel 2.39

Data Jumlah Kunjungan Ke Objek Wisata Museum Tahun 2015-2019

| NO | URAIAN | TAHUN | | | | |
|----|---------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 | Museum Goedang Ransum | 20.943 | 22.288 | 18.851 | 14.139 | 15.309 |
| 2 | Lubang Tambang Mbah Soero | 12.938 | 10.905 | 10.653 | 8.151 | 8.492 |
| 3 | Museum Kereta Api | 6.556 | 6.423 | 12.220 | 7.977 | 6.503 |
| | Jumlah | 40.437 | 39.616 | 41.724 | 30.267 | 30.304 |

Sumber : Dinas Kebudayaan, Peninggalan Bersejarah dan Permuseuman Kota Sawahlunto

2.2.3.2. Fokus Pengamalan Ajaran Agama

Penduduk Kota Sawahlunto memiliki keberagaman multietnis dengan beberapa agama yang dianut, dan pembangunandisektor agama didorong untuk menciptakan kondisi terbaik dalam pengamalan nilai-nilai agama dilingkungan komunitas rancangan terkecil yaitu keluarga dan tidak terlepas dari perkembangan lingkungan. Komposisi penduduk menurut agama yang dianutnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.40

Jumlah Penduduk Menurut Agama Di Kota Sawahlunto Tahun 2015–2019

| No | Agama | Tahun | | | | |
|----|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1. | Islam | 61.273 | 61.764 | 63.747 | 63.922 | 67.885 |
| 2. | Khatolik | 122 | 108 | 112 | 115 | 251 |
| 3. | Protestan | 260 | 240 | 247 | 262 | 78 |
| 4. | Hindu | - | - | - | - | - |
| 5. | Budha | - | - | - | - | - |
| 6. | Konghucu | - | - | - | - | - |
| | TOTAL | 58.068 | 59.001 | 64.106 | 64.299 | 68.214 |

Sumber : Data Profil Kota Sawahlunto Tahun 2019

Pemeluk agama Islam dari tahun 2015 sebanyak 58.068 orang, selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya hingga pada tahun 2019 menjadi 68.214 orang, hal ini disebabkan oleh pertumbuhan secara alami penduduk yang mayoritas Islam.

**1. Jumlah Penyuluh Agama dan Mubaligh**

Selain tempat pendidikan agama, peranan mubaligh dan penyuluh agama sangat berpengaruh terhadap pengamalan ajaran agama bagi masyarakat, di mana perkembangan jumlah mubaligh dan penyuluh agama dapat dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 2.41
Jumlah Mubaligh Dan Penyuluh Agama Di Kota Sawahlunto
Tahun 2015 – 2019

| No | Uraian | Tahun | | | | |
|----|-----------------------|-------|------|------|------|------|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1. | Jumlah Mubaligh | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 |
| 2. | Jumlah Penyuluh Agama | 106 | 104 | 104 | 104 | 104 |

Sumber: BPS Kota Sawahlunto Tahun 2019

Jumlah mubaligh mengalami stagnan dari tahun 2015 sampai tahun 2019. Begitupun juga Jumlah Penyuluh Agama tidak mengalami peningkatan dari tahun 2015-2019.

2. Jumlah Tempat Ibadah

Agama mayoritas penduduk Kota Sawahlunto adalah Agama Islam, agama lain yang dianut sebagian penduduk Kota Sawahlunto adalah Kristen Protestan dan Kristen Katolik. Perkembangan kehidupan beragama sangat ditentukan oleh pemahaman dan pengamalan ajaran agama oleh penganutnya serta tidak terlepas dari keberadaan sarana ibadah sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel 2.42
Jumlah Tempat Ibadah Di Kota Sawahlunto Tahun 2015 – 2019

| No | Tempat Ibadah | Tahun | | | | |
|----|------------------|-------|------|------|------|------|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1. | Mesjid | 48 | 48 | 48 | 49 | 49 |
| 2. | Mushalla/Langgar | 342 | 272 | 275 | 275 | 275 |
| 3. | Gereja | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |

Sumber : BPS Kota Sawahlunto Tahun 2019

Dilihat dari jumlah tempat ibadah di Kota Sawahlunto, untuk agama yang mayoritas yaitu Islam, jumlah mesjid pada tahun 2019 tidak mengalami penambahan mesjid, begitu pula Untuk mushalla jumlahnya tetap dari tahun sebelumnya begitu juga dengan jumlah gereja yang masih tetap dari tahun sebelumnya.

3. Tempat Pendidikan Agama

Agama Islam mempunyai tempat pendidikan agama Islam untuk meningkatkan pengetahuan tentang agama Islam itu sendiri, di Kota Sawahlunto ada beberapa tempat pendidikan agama sebagaimana dijelaskan pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.43
Jumlah Tempat Pendidikan Agama Islam Di Kota Sawahlunto Tahun 2015 – 2019

| No | Tempat Pendidikan Agama | Tahun | | | | |
|----|-------------------------|-------|------|------|------|------|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1. | TPQ | 177 | 177 | 179 | 179 | 179 |
| 2. | TPSQ | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 3. | MDA | 13 | 13 | 9 | 9 | 9 |
| 4. | Pondok Taman Al-quran | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 5. | Pondok Pesantren | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |

Sumber : BPS Kota Sawahlunto Tahun 2019



Jumlah tempat pendidikan agama dari tahun 2017 masih sama dengan tahun 2019, meliputi jumlah TPQ, TPSQ, MDA, Pondok Taman Al-quran dan Pondok pesantren.

4. Jumlah Pondok Tahfidz Dan Santrinya

Tabel 2.44
Jumlah Pondok Tahfidz Dan Santrinya di Kota Sawahlunto Tahun 2015-2019

| Tahun | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|--------------------------------|------|------|------|------|------|
| Jumlah Pondok Tahfidz : | | | | | |
| - Kec. Silungkang | - | - | - | - | - |
| - Kec. Lembah Segar | - | - | 1 | 1 | 1 |
| - Kec. Barangin | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
| - Kec. Talawi | - | - | - | - | - |
| Jumlah Santri Pondok Tahfidz : | | | | | |
| - Kec. Silungkang | - | - | - | - | - |
| - Kec. Lembah Segar | - | - | 25 | 25 | 25 |
| - Kec. Barangin | - | 30 | 60 | 60 | 60 |
| - Kec. Talawi | - | - | - | - | - |

Sumber : Bag. Kesra Setdako

Dalam usaha melahirkan generasi penghafal al-Qur'an maka masyarakat bersama guru-guru TPQ berusaha menumbuhkan pondok-pondok tahfidz yang khusus untuk membina anak-anak yang mempunyai bakat dan kemauan untuk menghafal al-Qur'an. Dengan didirikannya pondok-pondok tahfidz ini, semakin meningkatkan minat masyarakat untuk menjadikan anak-anaknya seorang Hafidz al-Qur'an

2.3. ASPEK PELAYANAN UMUM

2.3.1. URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB PELAYANAN DASAR

2.3.1.1. Urusan Pendidikan

Sektor pendidikan mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam menentukan tingkat kualitas Sumber Daya Manusia yang diharapkan yaitu, yang mampu melakukan inovasi, kreasi serta memiliki karakter dan budi pekerti.

a. Angka Partisipasi Sekolah

Angka Partisipasi Sekolah ini memperlihatkan seberapa besar anak usia sekolah menurut tingkat pendidikan tertentu berada dalam lingkup pendidikan dan penyerapan dunia pendidikan formal terhadap penduduk usia sekolah. APS digunakan untuk mengetahui cakupan pelayanan pendidikan untuk setiap kelompok usia sekolah dan menggambarkan jumlah anak kelompok usia tertentu yang sedang sekolah tanpa membedakan jenjang pendidikan yang ditempuh. APS anak usia 7-12 tahun adalah persentase anak usia 7-12 tahun yang sedang bersekolah ditingkat SD dan MI serta yang telah bersekolah di SLTP dan MTS dibagi jumlah penduduk usia 7-12 tahun dikalikan 100 persen. Penurunan dan kenaikan nilai APS sangat dipengaruhi oleh banyaknya jumlah murid usia sekolah. Pada tabel berikut dapat dilihat Perkembangan APS Kota Sawahlunto berdasarkan jenjang pendidikan dari tahun 2015-2019:



Tabel 2.45
Angka Partisipasi Sekolah Menurut Jenjang Pendidikan di Kota Sawahlunto Tahun 2015–2019

| No | Tahun | Kelompok Umur | | |
|----|-------|---------------|-------------|-------------|
| | | 7-12 tahun | 13-15 tahun | 16-18 tahun |
| 1. | 2015 | 98,17 | 64,68 | 69,04 |
| 2. | 2016 | 101,45 | 67,86 | 84,54 |
| 3. | 2017 | 99,56 | 74,13 | 84,54 |
| 4. | 2018 | 100 | 98,90 | 83,02 |
| 5. | 2019 | 99,66 | 97,95 | 81,79 |

Sumber: BPS Kota Sawahlunto Tahun 2019

Dilihat dari perkembangan Angka Partisipasi Sekolah Kota Sawahlunto dari tahun 2015-2019 mengalami peningkatan dan penurunan pada setiap kelompok umur. Namun pada tahun 2016 terjadi peningkatan angka partisipasi sekolah di setiap kelompok umurnya. Pada kelompok umur 7 - 12 tahun dari 98,17 % menjadi 101,45%. Pada kelompok umur 13-15 tahun dari 64,68% menjadi 67,86 % dan pada kelompok umur 16-18 dari 84.54 % menjadi 83.02 %.

b. Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk usia sekolah

Rasio ketersediaan sekolah adalah jumlah sekolah berdasarkan tingkat pendidikan per jumlah penduduk usia pendidikan. Rasio ini mengindikasikan kemampuan untuk menampung semua penduduk usia pendidikan.

Tabel 2.46
Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah Kota Sawahlunto Tahun 2015 – 2019

| NO | JENJANG PENDIDIKAN | Tahun | | | | |
|----------|--|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 | TK | | | | | |
| 1.1 | Jumlah Sekolah | 124 | 123 | 123 | 123 | 125 |
| 1.2 | Jumlah Penduduk Kelompok Usia 5-7 | 3.678 | 3.499 | 3.390 | 3.390 | 3.360 |
| 1.3 | Perbandingan Jumlah Sekolah Dengan Jumlah Penduduk Kelompok Usia 5-7 | 1:29,66 | 1:28,44 | 1:27,56 | 1:27,56 | 1:26,85 |
| 2 | SD/MI/SDLB | | | | | |
| 1.1 | Jumlah Sekolah | 65 | 65 | 65 | 64 | 64 |
| 1.2 | Jumlah Penduduk Kelompok Usia 7-12 | 8.106 | 7.305 | 6.977 | 6.994 | 7.222 |
| 1.3 | Perbandingan Jumlah Sekolah Dengan Jumlah Penduduk Kelompok Usia 7-12 | 1:124,70 | 1:123,69 | 1:118,61 | 1:109,28 | 1:112,84 |
| 3 | SMP/MTs/SMPLB | | | | | |
| 2.1 | Jumlah Sekolah | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 |
| 2.2 | Jumlah Penduduk Kelompok Usia 13-15 | 3430 | 3809 | 3.562 | 3.506 | 3.532 |
| 2.3 | Perbandingan Jumlah Sekolah Dengan Jumlah Penduduk Kelompok Usia 13-15 | 1 : 245 | 1 : 394 | 1:345,36 | 1:399 | 1:252,2 |

Sumber : Dinas Pendidikan Tahun 2019

Dari tabel diatas dapat di jelaskan bahwa tahun 2015 rasio ketersediaan sekolah disetiap tingkatan pendidikan mengalami penurunan. Penurunan ini disebabkan pertumbuhan penduduk kelompok usia tidak disertai dengan peningkatan jumlah sekolah. Secara data ketersediaan sekolah untuk penduduk di Kota Sawahlunto telah memenuhi kebutuhan.

**c. Rasio Guru dan Murid**

Rasio guru terhadap murid adalah jumlah guru berdasarkan tingkat pendidikan per jumlah murid berdasarkan tingkat pendidikan. Rasio ini mengindikasikan ketersediaan tenaga pengajar juga mengukur jumlah ideal murid untuk satu guru agar tercapai mutu pengajaran.

Tabel 2.47
Rasio Jumlah Guru Terhadap Jumlah Murid Kota Sawahlunto
Tahun 2015 – 2019

| NO. | JENJANG PENDIDIKAN | TAHUN | | | | |
|----------|--|-----------|----------|---------|----------|---------|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 | TK | | | | | |
| 1.1 | Jumlah Guru | 161 | 186 | 183 | 172 | 123 |
| 1.2 | Jumlah Murid | 1294 | 1556 | 1488 | 1543 | 1200 |
| 1.3 | Perbandingan Jlh Guru Terhadap Jlh Murid | 1 : 8,04 | 1 : 8,36 | 1 : 8 | 1 : 8,97 | 1:9,75 |
| 2 | SD/MI | | | | | |
| 2.1 | Jumlah Guru | 672 | 611 | 605 | 603 | 428 |
| 2.2 | Jumlah Murid | 7340 | 7136 | 6772 | 6691 | 7247 |
| 3.3 | Perbandingan Jmlh Guru Terhadap Jumlah Murid | 1 : 10,92 | 1:11,67 | 1:11,08 | 1:11.02 | 1:16,93 |
| 3 | SMP/MTs | | | | | |
| 3.1 | Jumlah Guru | 341 | 305 | 287 | 285 | 322 |
| 3.2 | Jumlah Murid | 2790 | 2681 | 2667 | 2615 | 3338 |
| 3.3 | Perbandingan Jmlh Guru Terhadap Jmlh Murid | 1 : 8,18 | 1 : 8,79 | 1:9,29 | 1 : 8,27 | 1:10,36 |

Sumber : Dinas Pendidikan Tahun 2019

Selama kurun waktu 2015–2019 rasio ketersediaan guru di Kota Sawahlunto mengalami peningkatan untuk setiap jenjang pendidikan. Pada tahun 2015 kondisi ketersediaan guru terhadap murid untuk jenjang pendidikan TK adalah untuk 1 guru melayani 9 murid TK, untuk tingkat SD/MI 1 guru melayani 12 murid SD, untuk SMP 1 guru melayani 9 murid SMP/MTs. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, angka ini mengalami sedikit peningkatan pada tingkat TK dan mengalami sedikit penurunan pada tingkat SD dan SMP. Jumlah ini telah memenuhi untuk kondisi idealnya, dimana untuk jenjang pendidikan TK 1 orang guru idealnya melayani 15 murid.

d. Rasio Murid Dan Kelas

Rasio Muriddan kelas sangat penting untuk menentukan ketersediaan kelas terhadap murid yang ada. Pada tabel berikut dapat dilihat perkembangan rasio murid terhadap kelas di Kota Sawahlunto.

Tabel 2.48
Rasio Jumlah Murid Terhadap Jumlah Kelas Kota Sawahlunto
Tahun 2015 – 2019

| No. | Jenjang Pendidikan | Tahun | | | | |
|-----------|---|-----------|-----------|-----------|----------|---------|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1. | TK | | | | | |
| 1.1 | Jumlah Murid | 1294 | 1556 | 1488 | 1543 | 1200 |
| 1.2 | Jumlah Kelas | 102 | 104 | 109 | 100 | 99 |
| 1.3 | Perbandingan Jumlah Murid Terhadap Jumlah Kelas | 12,69 : 1 | 14,96 : 1 | 13,65 : 1 | 15,43:1 | 12,12:1 |
| 2 | SD/MI | | | | | |
| 2.1 | Jumlah Murid | 7661 | 7340 | 6772 | 6727 | 7247 |
| 2.2 | Jumlah Kelas | 362 | 376 | 374 | 378 | 400 |
| 2.3 | Perbandingan Jumlah Murid Terhadap Jumlah | 21,16 :1 | 20,22 :1 | 18,10 :1 | 17,79 :1 | 18,11:1 |



| No. | Jenjang Pendidikan | Tahun | | | | |
|----------|---|----------|----------|----------|----------|---------|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| | Kelas | | | | | |
| 3 | SMP/MTs | | | | | |
| 3.1 | Jumlah Murid | 2834 | 2790 | 2667 | 2359 | 2930 |
| 3.2 | Jumlah Kelas | 113 | 107 | 109 | 107 | 130 |
| 3.3 | Perbandingan Jumlah Murid Terhadap Jumlah Kelas | 25,07 :1 | 24,05 :1 | 24,46 :1 | 22,04 :1 | 22,53:1 |

Sumber : Dinas Pendidikan Tahun 2019

Dilihat dari tabel diatas pada tahun 2019 Kota Sawahlunto mengalami penurunan jumlah murid pada jenjang pendidikan TK, kecuali pada jenjang pendidikan SD dan SMP mengalami kenaikan. Dapat dilihat dari tabel tersebut bahwa perbandingan jumlah kelas dengan murid untuk tingkat TK satu kelas berisi rata-rata 12 siswa, untuk tingkat SD satu kelas berisi rata-rata 18 siswa dan untuk tingkat SMP berisi rata-rata 22 orang siswa.

Jika dibandingkan dengan roombel yang diatur dalam Permendikbud No. 17 Tahun 2018, sebagaimana yang dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.49
Rasio Jumlah Murid terhadap Jumlah Kelas Tahun 2019

| No | JENJANG PENDIDIKAN | JUMLAH MURID/KELAS NASIONAL | JUMLAH MURID/ KELAS KOTA SAWAHLUNTO |
|----|--------------------|-----------------------------|-------------------------------------|
| 1 | SD | 28 | 1 : 18 - 28 |
| 2 | SMP | 32 | 1 : 20 - 32 |
| 3 | SMA | 36 | 1 : 20 - 36 |
| 4 | SMK | 36 | 1 : 15 - 36 |

Sumber : Dinas Pendidikan Tahun 2019

Dapat dilihat bahwa rasio jumlah murid terhadap jumlah kelas untuk setiap jenjang pendidikan di Kota Sawahlunto telah memenuhi kondisi ideal yang telah ditetapkan secara Nasional. Secara kuantitas, jumlah guru telah dapat melayani jumlah murid sesuai dengan kondisi idealnya. Jenjang pendidikan SD dengan rasio satu kelas berisi 18 orang murid dan jenjang pendidikan SMP satu kelas dengan 23 orang murid telah sesuai dengan batasan yang ditetapkan Permendikbud. Tetapi ada kasus di beberapa sekolah yang jumlah muridnya tidak sesuai dengan kondisi ideal dan tidak memenuhi kuota untuk roombelnya. Hal ini disebabkan karena faktor topografi Kota Sawahlunto yang menjadikan jarak rumah penduduk ke sekolah sangat jauh. Sehingga jumlah murid di sekolah tersebut hanya sedikit dan tidak memenuhi untuk kondisi idealnya.

e. Angka Putus Sekolah

Angka Putus Sekolah mencerminkan anak-anak usia sekolah yang sudah tidak bersekolah lagi atau tidak menamatkan suatu jenjang pendidikan tertentu. Hal ini sering digunakan sebagai salah satu indikator berhasil atau tidaknya pembangunan dibidang pendidikan.



Tabel 2.50
Angka Putus Sekolah Kota Sawahlunto Tahun 2015-2019

| NO | JENJANG PENDIDIKAN | Tahun | | | | |
|----------|-------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 | SD/MI | | | | | |
| 1.1 | Jumlah Putus Sekolah | 0 | 0 | 2 | 4 | 11 |
| 1.2 | Jumlah Murid | 7.386 | 7.136 | 6.772 | 6.727 | 7.247 |
| 1.3 | Angka Putus sekolah (%) | 0 | 0 | 0,03 | 0,06 | 0,03 |
| 2 | SMP/MTs | | | | | |
| 2.1 | Jumlah Putus Sekolah | 32 | 12 | 12 | 11 | 5 |
| 2.2 | Jumlah Murid | 2.790 | 2.681 | 2.667 | 2.359 | 3.338 |
| 2.3 | Angka Putus sekolah (%) | 0,44 | 0,44 | 0,49 | 0,46 | 0,15 |

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Sawahlunto

Pada tahun 2019 untuk tingkat SD/MI angka putus sekolah mengalami peningkatan dari tahun 2018 dari 4 orang menjadi 11 orang dan tingkat SMP/MTs mengalami sedikit penurunan sebanyak 6 orang dari tahun sebelumnya. Angka putus sekolah ini dipengaruhi oleh banyak faktor baik internal dan eksternal. Adapun faktor internal yang menyebabkan mereka putus sekolah adalah kebanyakan dari mereka berasal dari keluarga *broken home*, sehingga mereka kurang perhatian dari orang tua, selain itu juga tidak adanya kemauan dari mereka sendiri untuk ke sekolah karena adanya pengaruh dari orang lain. Jika kita lihat, faktor ekonomi bukanlah menjadi faktor utama alasan mereka putus sekolah. Karena untuk uang sekolah di sekolah negeri tidak dikenakan biaya. Faktor lingkungan juga sangat berpengaruh besar terhadap kemauan belajar mereka. Salah pergaulan adalah salah satu bentuk pengaruh lingkungan yang buruk yang dapat memicu kemauan mereka untuk bersekolah.

f. Angka Kelulusan Siswa

Angka kelulusan siswa pada berbagai jenjang pendidikan setiap tahun mencerminkan kemampuan dan penguasaan siswa atas materi pelajaran yang disampaikan serta kemampuan dalam menghadapi evaluasi belajar. Angka kelulusan siswa perjenjang pendidikan di Kota Sawahlunto dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.51
Angka Kelulusan Siswa Berdasarkan Jenjang Pendidikan Kota Sawahlunto Tahun 2015 - 2019

| No | Uraian | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|----|----------------|-------|-------|-------|-------|------|
| 1. | SD | | | | | |
| | Ikut Ujian | 1.136 | 1.093 | 1.179 | 1.217 | 1139 |
| | Lulus Ujian | 1.136 | 1.093 | 1.179 | 1.217 | 1139 |
| | Persentase (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2. | MI | | | | | |
| | Ikut Ujian | 65 | 51 | 62 | 69 | 80 |
| | Lulus Ujian | 65 | 51 | 62 | 69 | 80 |
| | Persentase (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3. | SMP | | | | | |
| | Ikut Ujian | 749 | 775 | 832 | 841 | 851 |
| | Lulus Ujian | 747 | 774 | 830 | 838 | 851 |
| | Persentase (%) | 99,73 | 99,87 | 99,75 | 99,69 | 100 |
| 4. | MTs | | | | | |
| | Ikut Ujian | 81 | 122 | 141 | 120 | 192 |
| | Lulus Ujian | 81 | 121 | 141 | 120 | 192 |
| | Persentase (%) | 100 | 99,18 | 100 | 100 | 100 |

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Sawahlunto



Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa dari tahun 2015 sampai 2019 tingkat SD/MI di Kota Sawahlunto kelulusan siswa sudah mencapai 100%. Tingkat SMP kelulusan siswa tahun 2019 naik dari tahun sebelumnya menjadi 100% dan untuk tingkat MTsn tetap diangka 100%. Untuk nilai rata-rata Ujian Nasional (UN) Kota Sawahlunto dapat dilihat pada tabel berikut ini :

2.3.1.2. Urusan Kesehatan

a. Sarana Kesehatan dan Tenaga Kesehatan

Untuk mendukung pelayanan kesehatan di Kota Sawahlunto, sudah dilengkapi dengan beberapa sarana penunjang seperti tertera pada tabel berikut:

Tabel 2.52

Sarana Kesehatan Kota Sawahlunto Tahun 2015- 2019

| No | Nama Sarana | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|----|-----------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 1 | Polindes | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 |
| 2 | Poskesdes | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 |
| 3 | Puskesmas | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 4 | Pustu | 23 | 23 | 23 | 26 | 26 |
| 5 | Puskesmas Keliling | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 6 | Rumah Sakit Umum Daerah (Kelas C) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 7 | Klinik/Praktek Dokter | 29 | 29 | 29 | 48 | 48 |
| 8 | Bidan Praktek | 27 | 27 | 27 | 25 | 25 |
| 9 | Klinik KB/Faskes KB | 13 | 13 | 7 | 7 | 7 |
| 10 | Gudang Farmasi | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | TOTAL | 111 | 111 | 104 | 122 | 122 |

Sumber : Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB Tahun 2019

Ketersediaan dan keterjangkauan sarana pelayanan kesehatan merupakan salah satu factor penentu utama dalam pelayanan kesehatan. Dari empat kecamatan yang ada sudah didukung dengan keberadaan 6 Puskesmas induk, 26 Puskesmas Pembantu, 6 Polindes dan 1 Poskesdes/Poskeskel serta 1 Rumah Sakit Umum Daerah. Sarana ini ditujukan untuk mendekatkan akses pelayanan kesehatan kepada masyarakat sehingga diharapkan tidak ada lagi masyarakat yang tidak mendapatkan pelayanan kesehatan karena terkendala jarak. Dari sisi kualitas, dilakukan perbaikan dan pengadaan sarana prasarana pendukung serta akreditasi guna menjamin bahwa pelayanan kesehatan yang diberikan sudah sesuai standar.

Selain dari sarana pelayanan kesehatan, tenaga kesehatan sebagai sumber daya manusia harus cukup, baik dari sisi jumlah maupun dari sisi jenis/profesi yang dibutuhkan, disamping itu tenaga kesehatan juga harus sebanding dengan kepadatan dan persebaran penduduk didalam penempatannya sehingga derajat kesehatan yang optimal di masyarakat dapat tercapai. Adapun jumlah tenaga kesehatan yang ada di Kota Sawahlunto pada tahun 2019 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.53

Tenaga Kesehatan Kota Sawahlunto Tahun 2015- 2019

| No | Tenaga Kesehatan | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|----|------------------------------|------|------|------|------|------|
| 1 | Dokter umum | 30 | 10 | 23 | 23 | 19 |
| 2 | Dokter gigi | 9 | 6 | 7 | 7 | 9 |
| 3 | Perawat | 203 | 152 | 214 | 214 | 127 |
| 4 | Bidan | 112 | 58 | 136 | 136 | 75 |
| 5 | Sarjana Kesehatan Masyarakat | 33 | 10 | 29 | 29 | 31 |
| 6 | Ahli Gizi | 23 | 17 | 24 | 24 | 18 |
| 7 | Analisis Laboratorium | 20 | 14 | 18 | 18 | 17 |



| No | Tenaga Kesehatan | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|----|----------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 8 | Perawat Gigi | 14 | 10 | 12 | 12 | 10 |
| 9 | Ahli Penyehatan Lingkungan | 14 | 12 | 16 | 16 | 13 |
| 10 | Tenaga Teknis Kefarmasian | 30 | 23 | 30 | 30 | 40 |
| 11 | Teknisi Elektromedis | 3 | 1 | 4 | 4 | 1 |
| 12 | Apoteker | 7 | 3 | 10 | 10 | 9 |
| 13 | Rekam Medis | 21 | 8 | 22 | 22 | 7 |
| 14 | Tenaga Keterampilan Fisik | 6 | 2 | 7 | 5 | 3 |
| 15 | Refraksionis Optisien | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 16 | Teknisi Transfusi Darah | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| | Jumlah | 526 | 332 | 558 | 555 | 384 |

Sumber : Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB Tahun 2019

Dalam upaya pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan dari sisi jumlah dan jenis keahlian/profesi, dilakukan pengangkatan tenaga honor/kontrak dan sukarela. Disamping itu juga dilakukan perhitungan kebutuhan tenaga untuk diusulkan pada formasi kebutuhan tenaga dalam pengangkatan CPNS daerah. Dengan ketersediaan tenaga sesuai kebutuhan, diharapkan semua program dapat berjalan optimal, permasalahan kesehatan terpetakan dan terselesaikan sesuai SOP dan derajat kesehatan masyarakat dapat ditingkatkan.

b. Rasio Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) per satuan balita

Posyandu merupakan salah satu bentuk Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh dan untuk masyarakat. sehingga dalam pembangunan kesehatan peranan dan pemberdayaan masyarakat itu sangat penting guna memberikan kemudahann kepada masyarakat dalam hal memperoleh pelayanan kesehatan dasar, untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi.

Tabel 2.54

Rasio Posyandu dan Balita Kota Sawahlunto Tahun 2015 - 2019

| No | Uraian | Satuan | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|----|------------------------------|---------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1. | Jumlah Posyandu | Unit | 102 | 102 | 103 | 103 | 103 |
| 2. | Jumlah Balita | Anak | 6.230 | 6.184 | 6.138 | 6.138 | 6.040 |
| 3. | RasioPosyandu/ Jml Balita | Per 1.000 balita | 16,37 | 16,49 | 16,79 | 16,79 | 17,05 |

Sumber : BPS Kota Sawahlunto Tahun 2019

Jumlah Posyandu dari Tahun 2015-2019 mengalami peningkatan. Rasio Posyandu per jumlah balita pada Tahun 2019 yaitu 17,05 ini berarti bahwa setiap Posyandu pada Tahun 2019 rata-rata melayani 59 sampai 60 orang. Hal ini memperlihatkan kecenderungan meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2015, angka ini sedikit mengalami penurunan diakibatkan tingginya jumlah baita di Kota Sawahlunto, dengan tanpa diringi jumlah Posyandu yang ada. Aka tetapi secara umum, rasio posyandu per satuan balita di Kota Sawahlunto tidak mengalami masalah yang berarti.

Disamping itu hal yang penting untuk melihat keberhasilan kegiatan program Posyandu dan peran serta masyarakat adanya peningkatan N/D dan D/S. Diharapkan juga adanya peningkatan untuk mencapai strata diPosyandu mulai dari Posyandu Pratama (Merah), Madya (Kuning), Purnama (Hijau) dan Mandiri (Biru) oleh masyarakat sebagai pengelola dan pemilik posyandu yang didukung oleh Desa / Kelurahan, LPM, PKK dan OPD terkait. Berikut disajikan persentase D/S dan N/D di Kot Sawahlunto.



c. Rasio Puskesmas, Praktek Dokter dan Puskesmas Pembantu (Pustu) per satuan Penduduk

Pembangunan kesehatan diarahkan untuk meningkatkan pemerataan dan keterjangkauan pelayanan kesehatan, meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan, meningkatkan upaya pencegahan dan pemberantasan penyakit, meningkatkan keadaan status gizi masyarakat, PHBS dan sebagainya dilaksanakan melalui jumlah sarana puskesmas, puskesmas pembantu dan jumlah penempatan tenaga medis dan paramedis dimasyarakat. Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan praktek dokter merupakan salah satu sarana penunjang kesehatan dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan dimasyarakat, semakin banyak jumlah ketersediaannya, maka semakin memudahkan masyarakat untuk menjangkau pelayanan kesehatan tersebut.

Tabel 2.55
Rasio Puskesmas, Praktek Dokter dan Pustu Kota Sawahlunto
Tahun 2015 s/d 2019

| No | Uraian | Satuan | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|----|--|------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 1 | Jumlah Puskesmas | Unit | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 2 | Jumlah Praktek Dokter | Unit | 29 | 29 | 29 | 29 | 48 |
| 3 | Jumlah Pustu | Unit | 23 | 23 | 23 | 23 | 26 |
| 4 | Jumlah Total Puskesmas, Praktek Dokter dan Pustu | Unit | 58 | 58 | 58 | 58 | 80 |
| 4 | Jumlah Penduduk | Jiwa | 60.186 | 60.778 | 61.398 | 61.898 | 66.853 |
| 6 | Rasio Puskesmas, Praktek Dokter dan Pustu persatuan Penduduk | 1.000 jiwa | 0,96 | 0,95 | 0,94 | 0,95 | 0,119 |

Sumber : Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Sawahlunto Tahun 2019

Pada tabel diatas, terlihat rasio puskesmas, praktek dokter dan Pustu per satuan penduduk yang ada di Kota Sawahlunto memperlihatkan trend penurunan. Hal ini sebabkan oleh meningkatnya jumlah penduduk setiap tahun yang tidak diiringi penambahan jumlah Puskesmas, tetapi pada tahun 2019 Praktek Dokter bertambah menjadi 48 di Kota Sawahlunto. Pada tahun diatas, terlihat jumlah Puskesmas, Praktek Dokter dan Pustu di Kota Sawahlunto. Yang ada di Kota Sawahlunto tetap dan tidak berubah, akan tetapi jumlah penduduk selalu bertambah setiap tahun

d. Rasio Rumah Sakit per satuan Penduduk

Berikut ini disajikan rasio Rumah sakit persatuan penduduk di Kota Sawahlunto :

Tabel 2.56
Rasio Rumah Sakit Persatuan Penduduk Di Kota Sawahlunto

| No | Uraian | Satuan | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|----|-------------------------------|------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 1 | Jumlah Rumah Sakit | Unit | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Jumlah Penduduk | Jiwa | 60.186 | 60.778 | 61.398 | 61.898 | 66.853 |
| | Rasio RSUD persatuan Penduduk | 1.000 jiwa | 0,0166 | 0,0165 | 0,0163 | 0,0165 | 0,0149 |

Sumber : Data Olahan Barenlitbangda

Di Kota Sawahlunto, seperti yang terlihat pada tabel terdapat satu Rumah Sakit umum daerah. Rumah sakit dengan Tipe C ini merupakan milik Pemerintah retangga untuk berobat.



Tabel 2.57
Cakupan Desa Siaga Aktif Tahun 2015 S/D 2019

| No | Uraian | Pencapaian | | | | |
|----|-------------------------|------------|------|------|------|------|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 | Jumlah desa siaga aktif | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
| | a. Tingkat pratama | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | b. Tingkat madya | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
| | c. Tingkat purnama | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | d. Tingkat mandiri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Sumber : Profil Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2019

Desa dan Kelurahan Siaga Aktif adalah bentuk pengembangan desa dan kelurahandimana penduduknya memiliki kesiapan sumber daya dan kemampuan untuk dapat mengembangkan Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat untuk melaksanakan survailans, kedaruratan kesehatan, penanggulangan bencana dan penyehatan lingkungan serta penerapkan Prilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).

Diharapkan desa/kelurahan nantinya peduli, tanggap dan mampu mengenali, mencegah dan mengatasi masalah kesehatan yang dihadapinya secara mandiri sehingga derajat kesehatan masyarakat dapat meningkat tiap tahunnya. Sehubungan dengan table diatas pengembangan Desa dan Kelurahan Siaga Aktif sejak Tahun 2013 belum ada peningkatan pengembangannya sesuai yang diharapkan dalam Standar Pelayanan Minimal (indicator) dan SDGs (goals 3).

2.3.1.3. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

a. Proporsi Panjang Jalan Dalam Kondisi Baik

Jalan merupakan salah satu sarana transportasi pendukung pembangunan di Kota Sawahlunto. Menurut status jalan di Sawahlunto terdiri dari 3 (tiga) status jalan yaitu jalan Nasional, jalan Provinsi dan jalan Kota. Status jalan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Sawahlunto adalah jalan Kota dengan panjang jalan 454,87 Km. Sesuai dengan Permen PU Nomor 01/PRT/M/2014 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pekerjaan umum dan Penetaan Ruang disebutkan bahwa proporsi panjang jalan dalam kondisi baik adalah kondisi jalan baik di bagi dengan panjang jalan kota. Berikut secara lengkap persentase kualitas sarana dan prasarana jalan Kota Sawahlunto selama periode 2015-2019.

Tabel 2.58
Proporsi Panjang Jalan Dalam Kondisi Baik Kota Sawahlunto
Tahun 2015- 2019

| NO | JENIS DATA | SATUAN | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|----|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Kondisi Jalan Baik (Km) | Km- | 324,15 | 287,35 | 298.15 | 298.15 | 310.75 |
| 2 | Panjang Jalan Kota (Km) | Km- | 454,52 | 454,87 | 454.87 | 454.87 | 454.87 |
| 3 | Proporsi Panjang Jalan Dalam Kondisi Baik | % | 71.3 | 63.1 | 65.5 | 65.5 | 68.3 |

Sumber : DPUPR Kota Sawahlunto Tahun 2019

Sesuai Tabel di atas Tahun 2015 hingga Tahun 2016 Proporsi jalan dalam kondisi baik belum stabil masih terjadi peningkatan dan penurunan. pada Tahun 2017 hingga 2019 proporsi jalan dalam kondisi baik mengalami peningkatan yang cukup baik, ini merupakan salah satu upaya Pemerintah Kota Sawahlunto dalam mendukung pembangunan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat.



Langkah untuk meningkatkan proporsi jalan dalam kondisi baik kedepannya adalah pemeliharaan bangunan pelengkap seperti bahu jalan dan drainase. Salah satu yang membuat jalan cepat rusak adalah drainase dan bahu jalan yang tidak berfungsi dengan baik.

Indikator proporsi panjang jalan dalam kondisi baik ini bertujuan untuk meningkatkan proporsi jalan yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan dalam wilayah kota (aksesibilitas) menjadi 100 persen. Tujuan proporsi panjang jalan dalam kondisi baik adalah memberikan rasa aman dan nyaman bagi pengguna jalan sehingga dapat berkendara dengan selamat sampai tujuan.

b. Rasio Panjang Jalan Dengan Jumlah Penduduk

Indikator rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk adalah merupakan jumlah panjang jalan di bagi jumlah penduduk. Indikator ini di hitung untuk melihat kemudahan akses ke semua bagian kota dengan mudah.

Tabel 2.59
Rasio Panjang Jalan Dengan Jumlah Penduduk Kota Sawahlunto
Tahun 2015 – 2019

| NO | JENIS DATA | SATUAN | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|----|--|---------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Jumlah Panjang Jalan (Km) | Km | 454,52 | 454,87 | 454.87 | 454.87 | 454.87 |
| 2 | Jumlah Penduduk | Orang | 60,186 | 60,778 | 61,398 | 61.898 | 62.524 |
| 3 | Rasio Panjang Jalan Dengan Jumlah Penduduk | KM/ Org | 0.0075 | 0.0075 | 0.0074 | 0.0074 | 0.0073 |

Sumber : BPS Kota Sawahlunto Tahun 2020

Dilihat dari tabel diatas rasio panjang jalan per satuan penduduk di kota Sawahlunto dalam kurun waktu tahun 2015 hingga tahun 2019 memiliki nilai yang fluktuatif dengan kecenderungan menurun. Faktor yang mempengaruhinya adalah semakin bertambahnya jumlah penduduk namun panjang jalan tetap atau tidak bertambah. Agar nilai indicator rasio panjang jalan per satuan penduduk tidak menurun dapat diantisipasi dengan meningkatkan kualitas penggunaan kendaraan umum dibandingkan dengan kendaraan pribadi agar tidak terjadi penumpukan kendaraan di ruas-ruas jalan yang menyebabkan akses jalan ke bagian kota semakin padat.

Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk di Sawahlunto sudah ada standar pelayanan minimal yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal panjang jalan 0.74 Km/100 penduduk. Dari data rasio panjang jalan dengan Jumlah penduduk tahun 2019 adalah 0,0073 Km/orang atau 0,73/100 orang, nilai rasio ini terhadap standar pelayan minimal masih Menyikapi hal tersebut perlu Pembangunan atau pembukaan jalan baru lebih pertimbangan sehingga standar pelayanan minimal panjang jalan tercapai.

c. Panjang Dan Kondisi Trotoar

Trotoar adalah jalur pejalan kaki yang terletak di daerah manfaat jalan, diberi lapis permukaan diberi lebih tinggi dari permukaan jalan. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54/2010 menyebutkan bahwa Indikator yang digunakan untuk menghitung panjang jalan yang memiliki trotoar di bagi dengan panjang jalan seluruh jalan kota dikalikan dengan 100.



Tabel 2.60
Persentase Jalan Yang Memiliki Trotoar Kota Sawahlunto
Tahun 2015 – 2019

| NO | JENIS DATA | SATUAN | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|----|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Panjang Jalan Yang Ada Trotoar (Km) | Km | 8.300 | 8.300 | 8.300 | 8.300 | 8.300 |
| 2 | Panjang Seluruh Jalan Kota (Km) | Km | 454,52 | 454,87 | 454.87 | 454.87 | 454.87 |
| 3 | Persentase Jalan Yang Memiliki Trotoar | KM/Org | 1.826 | 1.824 | 1.824 | 1.824 | 1.824 |

Sumber : DPUPR Kota Sawahlunto Tahun 2019

Jalan yang memiliki trotoar di Kota Sawahlunto masih terlalu sedikit dibanding panjang jalan yang ada, persentasenya hanya 1,824 % dari panjang jalan. Dari Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2019 panjang trotoar di kota Sawahlunto tidak mengalami peningkatan.

d. Drainase Dalam Kondisi Baik/Pembuangan Aliran Air Tidak Tersumbat

Menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 01/PRT/M/2014 tersedianya system drainase adalah ukuran pencapaian kegiatan kebutuhan masyarakat akan penyediaan system drainase di wilayahnya. Guna menjamin kualitas ketersediaan system drainase dilakukan perhitungan panjang drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat yang dihitung dengan formula panjang drainase tersumbat pembuangan aliran air dibagi dengan panjang seluruh drainase kota.

Tabel 2.61
Drainase Dalam Kondisi Baik/Pembuangan Aliran Air Tidak Tersumbat
Di Kota Sawahlunto Tahun 2015 – 2019

| NO | JENIS DATA | SATUAN | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|----|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Panjang Drainase Dalam Kondisi Baik (Km) | Km | 8.300 | 8.300 | 8.300 | 8.300 | 10.300 |
| 2 | Panjang Seluruh Drainase (Km) | Km | 454,52 | 454,87 | 454.87 | 454.87 | 454.87 |
| 3 | Drainase Dalam Kondisi Baik/ Pembuangan aliran air tidak tersumbat. | Persen | 1.826 | 1.824 | 1.824 | 1.824 | 2.264 |

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Sawahlunto 2019

Drainase dalam kondisi baik Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2018 mengalami penurunan dan tidak ada peningkatan, hal ini dipengaruhi oleh terjadinya bencana alam yang membuat drainase tersumbat sehingga pemeliharaan dan kerusakan seimbang. Pada Tahun 2019 terjadi peningkatan persentase drainase dalam kondisi baik sebesar 0,44 %, hal ini merupakan upaya Pemerintah Kota Sawahlunto Melalui OPD terkait mulai mengarah terhadap pemeliharaan drainase.

e. Persentase Irigasi Dalam Kondisi Baik

Indikator rasio jaringan irigasi adalah panjang saluran irigasi dalam kondisi baik dibagi dengan panjang jaringan irigasi keseluruhan di kali 100 persen. Irigasi di kota Sawahlunto adalah termasuk kategori irigasi desa karena luas hamparannya di bawah 100 Ha.



Tabel 2.62
Persentase Irigasi Dalam Kondisi Baik Di Kota Sawahlunto Tahun 2015-2019

| NO | JENIS DATA | SATUAN | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|----|---|--------|--------|---------|--------|--------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Panjang Saluran Irigasi (Km) | Km | 97,379 | 149,458 | 76,875 | 84,273 | 91,854 |
| 2 | Pajang Irigasi Dalam Kondisi Baik (Km) | Km | 29,368 | 29,369 | 33,869 | 35,721 | 40,721 |
| 3 | Persentase Saluran Irigasi Dalam Kondisi Baik | % | 30,15 | 19,65 | 44,06 | 42,38 | 44,33 |

Sumber : Profil DPU PR Kota Sawahlunto 2019

Panjang saluran irigasi dalam kondisi baik dari tahun 2015 sampai 2019 mengalami peningkatan hal ini disebabkan karena adanya pembangunan dan pemeliharaan terhadap saluran irigasi tersebut. Dampak dari saluran irigasi yang baik adalah meningkatnya hasil pertanian dari masyarakat yang dapat meningkatkan perekonomian.

f. Persentase Luas Lahan Terairi Irigasi

Indikator persentase irigasi dalam kondisi baik adalah luas lahan pertanian yang terairi irigasi dibagi jumlah luas lahan pertanian seluruhnya di kali 100 persen.

Status irigasi di kota Sawahlunto adalah termasuk kategori irigasi desa karena luas hamparannya di bawah 100 Ha. Sesuai dengan Keputusan menteri Pekerjaan Umum Nomor 147 Tahun 2001. Sumber air baku irigasi produktif berasal dari sungai dan anak sungai, dimana lahan persawahan telah dapat diusahakan dua kali musim tanam dalam satu tahun. Kota Sawahlunto memiliki sebanyak 96 daerah irigasi dengan luas potensial 1.680 Ha.

Tabel 2.63
Persentase Luas Lahan Pertanian yang terairi Irigasi Di Kota Sawahlunto Tahun 2015-2019

| NO | JENIS DATA | SATUAN | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|----|---------------------------------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Luas Lahan Terairi Irigasi (Ha) | Ha | 762 | 762 | 762 | 762 | 762 |
| 2 | Luas Lahan Budi Daya(Ha) | Ha | 1.680 | 1.680 | 1.680 | 1.680 | 1.680 |
| 3 | Persentase Luas Lahan Terairi Irigasi | Persen | 45,35 | 45,35 | 45,35 | 45,35 | 45,35 |

Sumber : DPUPR Kota Sawahlunto tahun 2019

Perkembangan persentase irigasi dalam kondisi baik dari tahun 2015 sampai 2019 memiliki nilai kecendrungan tetap hal ini disebabkan beberapa hal, yaitu kondisi jaringan irigasi dan kondisi air yang kurang memadai, adanya perubahan lahan pertanian.

g. Rasio Jaringan Irigasi

Indikator rasio jaringan irigasi adalah panjang saluran irigasi dibagi luas lahan budi daya pertanian. Status irigasi di kota Sawahlunto adalah termasuk kategori irigasi desa karena luas hamparannya di bawah 100 Ha. Sesuai dengan Keputusan menteri Pekerjaan Umum Nomor 147 Tahun 2001. Sumber air baku irigasi produktif berasal dari sungai dan anak sungai, dimana lahan persawahan



telah dapat diusahakan dua kali musim tanam dalam satu tahun. Kota Sawahlunto memiliki sebanyak 96 daerah irigasi dengan luas potensial 1.840 Ha.

Tabel 2.64
Persentase Irigasi Dalam Kondisi Baik Di Kota Sawahlunto
Tahun 2015-2019

| NO | JENIS DATA | SATUAN | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|----|-------------------------------------|--------|--------|---------|--------|--------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Panjang Saluran Irigasi (Km) | Km | 97,379 | 149,458 | 76,875 | 91,039 | 91,854 |
| 2 | Luas Lahan Budi Daya Pertanian (Ha) | Ha | 1.680 | 1.680 | 1.680 | 1.680 | 1.680 |
| 3 | Rasio Jaringan Irigasi | Km/Ha | 0,0580 | 0,0890 | 0,0458 | 0,0542 | 0,0547 |

Sumber : Dinas Pekerjaan umum dan Penataan Ruang Kota Sawahlunto 2019

Rasio jaringan irigasi dari Tahun 2015 – 2019 selalu berubah setiap tahun. Hal ini disebabkan oleh perubahan panjang saluran irigasi. Semakin panjang saluran irigasi maka rasio jaringan irigasi akan meningkat.

h. Penataan Ruang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 dan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010, bahwa RTRW dapat dilakukan peninjauan kembali 1 kali dalam 5 tahun. Peninjauan kembali tidak diartikan untuk melakukan pemutihan penyimpangan pelaksanaan pemanfaatan ruang. Oleh karena itu, kegiatan peninjauan kembali harus secara utuh melihat keseluruhan kinerja penataan ruang dan menghasilkan substansi RTRW, namun tidak menyusun rencana yang baru. Peninjauan kembali ini merupakan bagian dari proses perencanaan tata ruang, sebagai proses untuk memperbaiki rencana tata ruang yang ada, bukan berarti penyusunan yang baru secara totalitas.

Kegiatan penyusunan rencana tata ruang bukan hanya suatu rencana yang memperhatikan kondisi internal kawasan, namun merupakan suatu rencana yang dipengaruhi oleh kebijakan, rencana, kondisi dan perkembangan eksternal kawasan perencanaan. Dalam penyusunan rencana sebagai dasar pemanfaatan ruang dapat terjadi berbagai kemungkinan perubahan yang diakibatkan oleh:

1. Perubahan faktor eksternal terhadap wilayah seperti perkembangan ekonomi nasional dan global, perubahan wilayah sektor dan tata ruang wilayah nasional,
2. Perubahan kondisi-kondisi eksternal seperti keinginan daerah, perkembangan yang sangat pesat dari suatu sektor atau kawasan dalam satu wilayah,
3. Kekurang tepatan menggunakan rencana dan pengendalian sehingga terjadi penyimpangan.

Kota Sawahlunto pada tahun Anggaran 2017, telah melaksanakan Peninjauan kembali RTRW Kota Sawahlunto 2012-2032. Hasil dari kegiatan Peninjauan kembali RTRW Kota Sawahlunto 2012-2032 menyatakan bahwa RTRW Kota Sawahlunto 2012-2032 memerlukan beberapa revisi untuk beberapa aspek perencanaan, diantaranya:

1. Kebijakan dan isu eksternal dan internal yang berkembang dalam kurun waktu 5 tahun terakhir dan perlu diakomodir dalam rencana tata ruang Kota Sawahlunto,
2. Belum terealisasinya rencana dan program yang telah direncanakan untuk 5 tahun pertama, sehingga perlu adanya penyesuaian kembali arahan dan tahapan pelaksanaannya
3. Perlu penyesuaian rencana yang ada dengan kondisi di lapangan dan data dan peta terbaru



4. Update peta dasar Kota Sawahlunto sesuai dengan aturan perundangan yang berlaku
5. Adanya perubahan batas wilayah, sehingga peta pada dokumen rencana perlu disesuaikan.

Selain itu Untuk pelaksanaan Undang –Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) bahwa Pemerintah daerah dalam penyusunan RTRW wajib membuat KLHS untuk memastikan bahwa prinsip Pembangunan Berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau Kebijakan, Rencana, dan/atau Program.

Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Sawahlunto 2012-2032 bertujuan untuk menghasilkan suatu wujud keterpaduan, keterkaitan dan keseimbangan antar sektor yang ada di dalam ruang dimana RTRW akan menjadi pedoman dalam pembangunan wilayah kota yang sudah dilegalkan dalam bentuk Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012.

Berkembangnya kegiatan perekonomian dan aktifitas perkotaan mengharuskan adanya upaya pengaturan dan pengendalian pemanfaatan ruang kota yang cukup ekstra. Adapun beberapa persoalan perkembangan pemanfaatan ruang kota yang perlu ditangani yaitu persoalan transportasi, kesesuaian penggunaan lahan, pengendalian bangunan, PKL serta persoalan perkotaan lainnya.

Dinamika pembangunan perkotaan perlu diantisipasi melalui penyiapan kebijakan tata ruang yang komprehensif dan sesuai perkembangan kota. Rencana tata ruang harus dapat memberikan arahan yang jelas dan tegas terhadap setiap pemanfaatan ruang di Kota Sawahlunto.

Tujuan penataan ruang wilayah kota merupakan arahan perwujudan ruang wilayah kota yang ingin dicapai pada masa yang akan datang Tujuan penataan ruang wilayah kota dirumuskan berdasarkan:

1. Visi dan misi pembangunan wilayah kota;
2. Karakteristik wilayah kota; dan
3. Isu strategis dan kondisi objektif yang diinginkan.

Berdasarkan hasil analisis, Core Bussiness Kota Sawahlunto adalah ;

1. Pengembangan Pariwisata berbasis budaya, tambang, dan rekreasi.
2. Pertambangan
3. Perkebunan rakyat yang akan dikembangkan menjadi Agrobisnis
4. Kegiatan Industri kecil dan kerajinan

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Tujuan Penataan Ruang Kota Sawahlunto adalah :

“Mewujudkan kota wisata yang berbasis kegiatan kepariwisataan, pertambangan, pertanian dan industri kecil dengan di dukung oleh sumber daya manusia, infrastruktur yang handal dan pemanfaatan ruang yang berwawasan lingkungan serta berbasis mitigasi bencana”

Komponen utama rencana tata ruang wilayah Kota Sawahlunto meliputi: rencana struktur ruang wilayah, rencana pola ruang wilayah, dan penetapan kawasan strategis kota (KSK), maka arahan pemanfaatan ruang wilayah ini akan meliputi indikasi program perwujudan ketiga komponen utama tersebut. Selaras dengan tujuan, kebijakan dan strategi penataan ruang yang mendasari rencana tata ruang tersebut, maka bentuk atau klasifikasi program yang ditetapkan dalam indikasi program ini diselaraskan dengan corak kebijakan dan strategi yang dituangkan dalam substansi rencana, yaitu menurut corak:



- pemecahan masalah (*problem solving*),
- melanjutkan dan memodifikasi kecenderungan yang ada (*trend modifying*),
- mencari peluang berdasarkan kecenderungan (*opportunity seeking*), dan
- pengembangan dengan tujuan tertentu (*goal oriented*).

Atas dasar corak tersebut, maka secara garis besar indikasi program akan berkarakter:

- revitalisasi, terkait terutama dengan pemecahan masalah;
- pemantapan, terkait dengan melanjutkan kecenderungan perkembangan;
- peningkatan, terkait dengan mencari atau memanfaatkan peluang, dan melanjutkan kecenderungan perkembangan;
- pengembangan, terkait dengan penetapan tujuan baru, memanfaatkan peluang, dan melanjutkan kecenderungan perkembangan.

Dengan demikian untuk masing-masing komponen rencana tersebut perlu diberikan penjelasan mengenai prinsip penting arahan pemanfaatan ruangnya.

Arahan Pemanfaatan Ruang Untuk Perwujudan Struktur Ruang Wilayah

Arahan pemanfaatan ruang untuk perwujudan struktur ruang wilayah berisi program utama yang berkaitan dengan perwujudan sistem pusat kegiatan dan perwujudan sistem prasarana.

1. Perwujudan Sistem Pusat Kegiatan

Perwujudan sistem pusat kegiatan meliputi sistem pusat pelayanan kota, sub pusat pelayanan kota, dan pusat lingkungan.

- 1) Pusat Pelayanan Kota, yaitu terdiri atas:
 - a. Kelurahan Aur Mulyo; dan
 - b. Kelurahan Talawi Mudik.
- 2) Sub Pusat Pelayanan Kota, yaitu terdiri atas:
 - a. Kelurahan Kolok Nan Tuo, dan
 - b. Desa Muaro Kalaban.
- 3) Pusat Lingkungan, yaitu terdiri atas:
 - a. Taratak Bancah
 - b. Silungkang Oso
 - c. Silungkang Tigo
 - d. Silungkang Duo
 - e. Pasar Kubang
 - f. Pasar
 - g. Air Dingin
 - h. Kubang Tengah
 - i. Kubang Utara Sikabu
 - j. Kubang Sirakuk Selatan
 - k. Kubang Sirakuk Utara
 - l. Tanah Lapang
 - m. Saringan
 - n. Durian I
 - o. Durian II
 - p. Lumindai
 - q. Balai Batu Sandaran
 - r. Lubang Panjang Durian
 - s. Santur
 - t. Talago Gunung
 - u. Sikalang
 - v. Kolok Mudiak
 - w. Salak
 - x. Rantih
 - y. Kumbayau
 - z. Datar Mansiang
 - aa. Sijantang



- bb. Batu Tanjung
- cc. Talawi Mudik
- dd. Bukit Gadang

2. Perwujudan Sistem Prasarana

- 1) Sistem Jaringan Transportasi
 - a. Jaringan transportasi jalan dan lalu lintas angkutan jalan terdiri atas jaringan jalan, jaringan prasarana lalu lintas angkutan jalan, dan jaringan pelayanan lalu lintas angkutan jalan
 - b. Sistem Terminal
 - c. Jaringan Kereta Api
- 2) Sistem Jaringan Energi/Ketenagalistrikan, meliputi:
 - a. Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU),
 - b. Gardu Induk,
 - c. Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT)
- 3) Sistem Jaringan Telekomunikasi, meliputi:
 - a. Jaringan telekomunikasi tetap (kabel); dan
 - b. Jaringan telekomunikasi bergerak (nirkabel).
- 4) Sistem Jaringan Sumber Daya Air, meliputi:
 - a. Sumber Mata Air, dan
 - b. Jaringan Irigasi.
- 5) Sistem Infrastruktur Perkotaan
 - a. Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)
 - b. Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL)
 - c. Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);
 - d. Sistem Jaringan Persampahan
 - e. Sistem Jaringan Evakuasi Bencana
 - f. Sistem Jaringan Drainase

Arahan Pemanfaatan Ruang Untuk Perwujudan Pola Ruang Wilayah Kota

Arahan pemanfaatan ruang untuk perwujudan pola ruang wilayah berisi program utama yang meliputi perwujudan kawasan lindung dan perwujudan kawasan budidaya.

Perwujudan Kawasan Lindung

1. Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya

- a. Hutan Lindung
- b. Kawasan Resapan Air

2. Kawasan Perlindungan Setempat

- a. Sempadan Sungai
- b. Sempadan Danau
- c. Sempadan Rel Kreta Api
- d. Sempadan SUTT

3. Kawasan Lindung Geologi

- a. Kawasan Keunikan Geologi Batu Runciang
- b. Kawasan Keunikan Geologi Batu Hitam

4. Kawasan Rawan Bencana

- a. Rawan Bencana Gerakan Tanah
- b. Rawan Bencana Sempadan Patahan Aktif

5. Kawasan Cagar Budaya

6. Ruang Terbuka Hijau

- a. Hutan Kota
- b. Ruang Terbuka Hijau Taman
- c. Ruang Terbuka Hijau Pemakaman

Perwujudan Kawasan Budidaya

1. Kawasan Hutan Produksi

- a. Hutan Produksi Terbatas



- b. Hutan Produksi Tetap
- c. Hutan Produksi Konversi
- 2. Kawasan Pertanian**
 - a. Pertanian Pangan
 - b. Pertanian Hortikultura
 - c. Pertanian Perkebunan
- 3. Kawasan Pertambangan**
 - a. Kawasan Pertambangan Mineral Logam
 - b. Kawasan Pertambangan Mineral Bukan Logam
 - c. Kawasan Pertambangan Batubara
- 4. Kawasan Sentral Industri Kecil Menengah**
- 5. Kawasan Pariwisata**
 - a. Kawasan Pariwisata Kandih
 - b. Kawasan Pariwisata Puncak Cemara
 - c. Kawasan Pariwisata Puncak poland
- 6. Kawasan Pembangkitan Listrik**
- 7. Kawasan Permukiman**
 - a. Kawasan Perumahan
 - b. Kawasan Perdagangan Dan Jasa
 - c. Kawasan Perkantoran
 - d. Tempat Evakuasi

Rencana pola ruang kawasan budidaya di Kota Sawahlunto terdiri dari Kawasan Hutan Produksi, kawasan pertanian, kawasan pertambangan dan energi, kawasan peruntukan industri kecil dan menengah, kawasan pariwisata, kawasan pembangkit tenaga listrik dan kawasan permukiman.

Peningkatan kebutuhan ruang semakin bertambah sejalan dengan pertumbuhan ekonomi penduduk dan aktivitas penduduk, sementara itu keberadaan lahan di Kota Sawahlunto tetap dan terbatas. Akibatnya terdapat konflik kepentingan lahan untuk mengakomodasi berbagai kebutuhan ruang penduduk. Oleh karena itu, diperlukan upaya penataan pada ruang yang tetap dan terbatas agar dapat mengakomodasi kebutuhan pembangunan yang ada secara serasi antara untuk kepentingan kawasan lindung dan kawasan budidaya serta efisiensi dalam alokasi investasi.

Disamping itu, penataan ruang merupakan isu strategis dalam pembangunan wilayah dikarenakan semua kegiatan pembangunan khususnya yang memanfaatkan ruang harus mengacu pada rencana tata ruang dan menjadi salah satu jawaban dari persoalan wilayah kota yang semakin kompleks baik ekonomi maupun lingkungan. Melalui penataan ruang, pembangunan di daerah diharapkan dapat diselenggarakan secara terpadu baik lintas sektor, lintas wilayah, maupun lintas pemangku kepentingan agar terwujud ruang yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan. Penataan ruang ini merupakan suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang. Urusan penataan ruang daerah menjadi salah satu urusan wajib dan penting dilakukan Pemerintah daerah untuk menata ruang-ruang yang ada secara cerdas dan peduli terhadap penataan ruang. Adapun persentase ketaatan ruang selama lima tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.67
Persentase Ketaatan Terhadap RTRW Tahun 2015–2019 Kota Sawahlunto

| No | Uraian | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|----|-------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1 | Realisasi RTRW | 14 | 16 | 17 | 17 | 17 |
| 2 | Rencana Peruntukan RTRW | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 3 | Persentase | 70,00 | 80,00 | 85,00 | 85,00 | 85,00 |

Sumber : Evaluasi RPJMD 2013 – 2018



Berdasarkan RTRW Kota Sawahlunto 2012–2032 untuk tahun 2015–2019 terdapat 20 komponen rencana pola ruang dan rencana struktur ruang. Untuk realisasi hingga tahun 2019 baru 17 dokumen rencana yang terealisasi sehingga baru 85% dari rencana pada tahap I RTRW di RPJMD tahun 2013 – 2018.

2.3.1.4. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Pengertian perumahan sering dikaitkan dengan pembangunan sejumlah rumah oleh berbagai instansi baik pemerintah atau swasta dengan disain unit-unit rumah yang sama atau hampir sama. Jumlah rumah dan kelompok perumahan ini tidak tertentu, dapat terdiri dari dua atau tiga rumah atau dapat juga sampai ratusan rumah. Bentuknya pun tidak terbatas hanya pada bangunan satu lantai saja, yang berderet secara horizontal, melainkan dapat juga merupakan bangunan bertingkat yaitu merupakan rumah susun UU Nomor 1 Tahun 2011 tentang Kawasan Perumahan dan Permukiman bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan bathin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, yang merupakan kebutuhan dasar manusia dan yang mempunyai peran yang sangat strategis dalam pembentukan watak serta kepribadian bangsa sebagai salah satu upaya membangun manusia indonesia seutuhnya, berjati diri, mandiri, dan produktif.

Secara fisik perumahan merupakan sebuah lingkungan yang terdiri dari kumpulan unit-unit rumah tinggal dimana dimungkinkan terjadinya interaksi sosial diantara penghuninya, serta dilengkapi prasarana sosial, ekonomi, budaya, dan pelayanan yang merupakan subsistem dari kota secara keseluruhan. Lingkungan ini biasanya mempunyai aturan-aturan, kebiasaan-kebiasaan serta sistem nilai yang berlaku bagi warganya. Berikut ini adalah data penanganan perumahan dari berbagai sumber pembiayaan, yaitu:

Tabel 2.68
Data Jumlah KK Yang Memiliki Rumah Di Kota Sawahlunto 2017 - 2019

| NO | DESA/KELURAHAN | 2017 | 2018 | 2019 |
|-----------|-------------------------------|------|------|------|
| I | KECAMATAN SILUNGKANG | | | |
| 1 | Muara Kalaban | 1059 | 1164 | 721 |
| 2 | Silungkang Duo | 247 | 271 | 194 |
| 3 | Siulungkang Oso | 308 | 338 | 271 |
| 4 | Silungkang Tigo | 438 | 481 | 207 |
| 5 | Taratak Bancah | 127 | 139 | 127 |
| II | KECAMATAN LEMBAH SEGAR | | | |
| 6 | Air Dingin | 226 | 248 | 225 |
| 7 | Aur Mulyo | 222 | 244 | 223 |
| 8 | Kubang Sirakuk Selatan | 213 | 234 | 141 |
| 9 | Kubang Sirakuk Utara | 194 | 213 | 194 |
| 10 | Kubang Tengah | 317 | 348 | 265 |
| 11 | Kubang Utara Sikabu | 239 | 262 | 239 |
| 12 | Lunto Barat | 285 | 313 | 286 |
| 13 | Lunto Timur | 284 | 312 | 284 |
| 14 | Pasar | 293 | 322 | 293 |
| 15 | Pasar Kubang | 210 | 231 | 208 |
| 16 | Tanah Lapang | 322 | 354 | 308 |
| 17 | Balai Batu Sandaran | 165 | 181 | 165 |
| II | KECAMATAN BARANGIN | | | |
| 18 | Durian I | 513 | 564 | 513 |



| NO | DESA/KELURAHAN | 2017 | 2018 | 2019 |
|-----------|-------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 19 | Durian II | 465 | 511 | 465 |
| 20 | Kolok Mudiak | 261 | 287 | 261 |
| 21 | Kolok Nan Tuo | 263 | 289 | 263 |
| 22 | Lubang Panjang | 281 | 309 | 281 |
| 23 | Lumindai | 534 | 587 | 534 |
| 24 | Santur | 752 | 827 | 752 |
| 25 | Saringan | 369 | 405 | 369 |
| 26 | Talago Gunuang | 371 | 408 | 371 |
| IV | KECAMATAN TALAWI | | | |
| 27 | Batu Tanjung | 449 | 493 | 449 |
| 28 | Bukik Gadang | 282 | 310 | 282 |
| 29 | Datar Mansiang | 38 | 41 | 38 |
| 30 | Kumbayau | 358 | 393 | 358 |
| 31 | Rantih | 139 | 152 | 139 |
| 32 | Salak | 248 | 272 | 248 |
| 33 | Sijantang Koto | 233 | 256 | 233 |
| 34 | Sikalang | 393 | 432 | 393 |
| 35 | Talawi Hilia | 792 | 871 | 783 |
| 36 | Talawi Mudiak | 540 | 594 | 540 |
| 37 | Tumpuak Tengah | 461 | 507 | 461 |
| | Jumlah | 12.891 | 14.163 | 12.088 |

Sumber : DPKP2LH Kota Sawahlunto Tahun 2019

Dilihat dari data diatas untuk data KK yang memiliki rumah di Kota Sawahlunto tahun 2017 hingga Tahun 2018 mengalami kenaikan dari 12,891 KK menjadi sebanyak 14.163 KK, Pada tahun 2019 terjadi penurunan KK yang memiliki rumah di Kota Sawahlunto, ini disebabkan adanya pemutakhiran data KK yang memiliki rumah oleh tim Bidang Perkim sebanyak 12.088 KK

Pemerintah Daerah di Kota Sawahlunto Tahun 2019 telah melakukan penanganan rumah tidak layak huni dengan memberikan bantuan fasilitasi bahan bangunan bagikeluarga kurang mampu sebanyak 60 orang (15 orang berupa pembangunan baru dan 45 orang berupa peningkatan kualitas) yang tersebar di 4 Kecamatan sesuai dengan Keputusan Walikota Sawahlunto Nomor : 188.45/226/Wako-Swl/2019 tanggal 1 Agustus 2019 tentang Perubahan Atas Keputusan Walikota Sawahlunto Nomor : 188.45/171/Wako-Swl/2019 Tentang Penetapan Penerima Bantuan Rumah Swadaya Berupa Bahan Bangunan Untuk Rumah Tidak Layak Huni Di Kota Sawahlunto Tahun 2019.

Tabel 2.69
Data Rumah Tidak Layak Huni Tahun 2017 - 2019

| NO | URAIAN | 2017 | 2018 | 2019 |
|----|------------------------|------------|------------|------------|
| 1 | Kecamatan Silungkang | 231 | 151 | 29 |
| 2 | Kecamatan Barangin | 245 | 182 | 60 |
| 3 | Kecamatan Talawi | 154 | 116 | 110 |
| 4 | Kecamatan Lembah Segar | 301 | 221 | 99 |
| | Total | 931 | 670 | 298 |

Sumber : DPKP2LH Kota Sawahlunto Tahun 2019



Dilihat dari tabel diatas bahwa pada tahun 2017 – 2019 terjadi penurunan jumlah Rumah Tidak layak Huni (RTLH) di Kota Sawahlunto yang tersebar di 4 kecamatan, dengan jumlah Rumah Tidak layak Huni (RTLH) pada tahun 2019 sebesar 298 unit rumah . Dengan penurunan jumlah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang cukup besar merupakan bukti Pemerintah Kota Sawahlunto serius mengatasi kemiskinan melalui Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.

Pada Tahun 2019 Kota Sawahlunto telah melakukan kegiatan Peningkatan Kualitas untuk Rumah Tangga Layak huni sebanyak 473 unit rumah dengan rincian 250 unit rumah dari dana BSPS dan 163 rumah dari dana DAK. Melalui dana APBD Kota Sawahlunto sebanyak 60 unit rumah dengan rincian 45 unit dari Peningkatan Kualitas untuk Rumah Tangga Layak huni dan 15 unit dari Pembangunan Kualitas untuk Rumah Tangga Layak huni sehingga berkurang menjadi 768 unit rumah. Jumlah rumah tidak layak huni sebanyak 768 unit rumah nantinya akan di verifikasi untuk mendapatkan bantuan rumah tidak layak huni dari dana BSPS.

Peningkatan Kualitas RTLH sebesar 17,5 juta bagi masing-masing rumah dengan rincian 15 Juta untuk material Pembangunan Rumah dan 2.5 juta untuk upah. Sedangkan Pembangunan RTLH sebesar 30 Juta dengan rincian 25 Juta untuk material Pembangunan Rumah dan 5 juta untuk upah.

Tabel 2.70**Surat Keputusan Walikota Sawahlunto Nomor: 188.45/208/WAKo-SWL/2019 Tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh Kota Sawahlunto**

| NO | KECAMATAN | KELURAHAN/DESA | LUAS KUMUH KELURAHAN | LUAS KUMUH FLAG 1 | LUAS KUMUH FLAG 2 |
|---------------|--------------|----------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Lembah Segar | Air Dingin | 1,2 | 0,20 | 1,00 |
| 2 | Lembah Segar | Aur Mulyo | 2,73 | 2,03 | 0,70 |
| 3 | Lembah Segar | Kubang Sirakuk Utara | 4,92 | 0,12 | 4,80 |
| 4 | Talawi | Bukik Gadang | 50,40 | | 50,40 |
| 5 | Talawi | Datar Mansiang | 36,20 | | 36,20 |
| 6 | Talawi | Kumbayau | 10,70 | | 10,70 |
| 7 | Talawi | Tumpuak Tengah | 56,00 | | 56,00 |
| 8 | Talawi | Talawi Hilir | 24,20 | | 24,20 |
| 9 | Talawi | Sikalang | 0,60 | | 0,60 |
| 10 | Barangin | Durian II | 23,20 | | 23,20 |
| 11 | Barangin | Kolok Nan Tuo | 13,60 | | 13,60 |
| 12 | Barangin | Lumindai | 15,40 | | 15,40 |
| 13 | Barangin | Talago Gunung | 15,00 | | 15,00 |
| 14 | Silungkang | Silungkang Tigo | 9,00 | | 9,00 |
| JUMLAH | | | 263,05 | 2,35 | 260,70 |

Program KOTAKU tahun 2019 yang dilaksanakan di 37 desa/kelurahan yang terdiri dari 13 Lokasi penanganan Kawasan kumuh permukiman dan 24 lokasi pencegahan Kawasan kumuh sesuai SK Walikota Sawahlunto Nomor : 188.45/249/Wako-Swl/201 5 tanggal 1 November 2015 tentang Penetapan Lokasi Kawasan Kumuh Kota Sawahlunto.

Pada tahun 2019 telah dikeluarkan Surat Keputusan Walikota Sawahlunto Nomor : 188.45/208/WAKO-SWL/2019 tentang, perubahan kedua atas Keputusan Walikota Sawahlunto Nomor 189.2/WAKO-SWL/2014 tentang Penetapan Lokasi



Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Kota Sawahlunto pada tanggal 16 Juli 2019.

2.3.1.5. **Urusan Ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat**

Pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat adalah upaya mengkondisikan lingkungan yang kondusif dan demokratis sehingga tercipta kehidupan strata sosial yang interaktif. Untuk memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat ini berdasarkan Permendagri Nomor 62 tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten/Kota jenis pelayanan dasar pemeliharaan tramtibmas dengan indikator K3 (Ketentraman, Ketertiban dan Keindahan) serta Linmas.

Dalam rangka pemeliharaan tramtibmas, Linmas (Perlindungan Masyarakat) merupakan satuan yang memiliki tugas umum pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat. Satuan ini memiliki peran penting dalam ketertiban masyarakat secara luas. Untuk di Kota Sawahlunto cakupan linmas adalah sebagai berikut :

Tabel 2.71
Jumlah Linmas di Kota Sawahlunto Tahun 2015 – 2019

| Uraian | Tahun | | | | |
|---|-------|------|------|------|------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Jumlah Linmas | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 |
| Jumlah Wilayah kerja Kabupaten/Kota (=lokasi Tempat Pemungutan Suara) | 252 | 0 | 0 | 262 | 402 |
| Jumlah Linmas per TPS | 126 | 0 | 0 | 131 | 201 |

Sumber : KPU Kota Sawahlunto dan Sawahlunto Dalam Angka tahun 2019

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa jumlah Linmas di Kota Sawahlunto dari tahun 2015 sampai tahun 2019 tidak mengalami perbedaan, yakni terdapat 370 orang jumlah Linmas se-Kota Sawahlunto dimana ada 10 orang Linmas untuk masing-masing Desa/Kelurahan.

Untuk wilayah kerja seperti lokasi Tempat Pemungutan Suara (TPS) dari tahun ke tahun terdapat perbedaan signifikan mengenai jumlah TPS di Kota Sawahlunto. Hal ini dikarenakan keadaan politik pada tahun tersebut apakah ada melaksanakan pesta demokrasi atau tidak.

Pada tahun 2015 pada pelaksanaan Pemilihan Gubernur Provinsi Sumatera Barat, terdapat 252 TPS dengan 126 orang Linmas, yang pada masing-masing TPS sebanyak 2 orang. Pada tahun 2016 dan 2017 tidak ada pesta demokrasi sehingga tidak ada Linmas untuk mengamankan TPS. Sedangkan pada tahun 2018 dan 2019 ada pelaksanaan Pilkada Walikota Sawahlunto dan Pemilihan Legislatif yang diamankan oleh sebanyak 131 dan 201 Linmas di Kota Sawahlunto. Sepanjang pelaksanaan pesta demokrasi dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 tidak ada keributan dan kericuhan yang terjadi sehingga pesta demokrasi di Kota Sawahlunto bisa dikatakan tertib, aman dan lancar.

Selain pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat oleh petugas perlindungan masyarakat urusan Ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat (angka kriminalitas) juga dipengaruhi oleh Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan). Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan) di Kabupaten/Kota adalah upaya mengkondisikan lingkungan kehidupan masyarakat yang kondusif dan demokratis sesuai Peraturan Daerah yang telah ditetapkan. Hal ini untuk mewujudkan pemenuhan hak masyarakat untuk hidup tertib, tenteram serta menjaga keindahan. Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan salah satu yang mempengaruhinya yaitu tingkat keamanan suatu daerah kabupaten/kota, ini



dapat dilihat dari angka kriminalitas yang pada daerah tersebut. Di kota Sawahlunto angka kriminalitas dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 2.72
Angka kriminalitas di Kota Sawahlunto Tahun 2015 – 2019

| Jenis Kriminalitas | Tahun | | | | |
|----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Curat (pencurian dan pemberatan) | 29 | 30 | 17 | 19 | 21 |
| Penggelapan | 15 | 6 | 6 | 3 | 2 |
| KDRT | 10 | 2 | 4 | 3 | 3 |
| Penipuan | 7 | 9 | 8 | 19 | 3 |
| Pengrusakan | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 |
| Curanmor | 10 | 19 | 24 | 23 | 6 |
| Pembakaran | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
| Anirat/Penganiayaan Pemberatan | 1 | 2 | - | - | 1 |
| Perkosaan | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 |
| Pembunuhan | - | - | - | - | - |
| Jumlah kriminal | 79 | 77 | 67 | 75 | 47 |
| Jumlah penduduk | 59.608 | 60.186 | 60.778 | 61.898 | 62.524 |
| Angka kriminalitas (%) | 0,132 | 0,127 | 0,110 | 0,121 | 0,075 |

Sumber : Sawahlunto Dalam Angka tahun 2019

Dilihat dari tabel di atas angka kriminalitas Kota Sawahlunto dari tahun 2015-2019 secara umum mengalami penurunan kecuali untuk tahun 2018 yang mengalami sedikit peningkatan dari tahun sebelumnya. Dari tahun 2018 ke tahun 2019 angka kriminalitas di Kota Sawahlunto mengalami penurunan yang signifikan yaitu dari 0,121% menjadi 0,075%. Ini bisa dikatakan secara umum bahwa Kota Sawahlunto adalah kota kecil yang aman dari tindakan kejahatan.

Secara data, kasus pencurian dan pemberatan, pengrusakan, penganiayaan berat dan perkosaan mengalami penambahan kasus dari tahun sebelumnya. Penambahan tersebut dikarenakan faktor ekonomi, faktor sosial dan pergaulan yang tidak sesuai dengan norma yang ada. Sehingga menyebabkan perilaku tidak terkontrol dan mudah saja untuk melakukan hal-hal yang merusak. Sementara itu, kasus penggelapan, penipuan dan curanmor mengalami penurunan jumlah. Hal ini dikarenakan kewaspadaan, kehati-hatian dan kepedulian masyarakat Kota Sawahlunto atas keadaan lingkungan yang ada. Sehingga kasus-kasus tersebut dapat ditekan jumlahnya.

Dalam rangka pemberantasan tindak kriminalitas di Kota Sawahlunto, upaya pembinaan kepada masyarakat selalu dilakukan oleh Pemerintah Kota Sawahlunto yang bekerjasama dengan Kepolisian Resor Sawahlunto. Hal ini adalah sebagai salah satu bentuk pencegahan guna memberantas tindak kriminalitas dalam upaya menciptakan Kota Sawahlunto yang aman dan jauh dari kejahatan kriminalitas.

2.3.1.6. Urusan Perhubungan

Sektor transportasi di Kota Sawahlunto hanya berupa transportasi darat dan perkeretaapian. Transportasi darat sebagai penghubung wilayah untuk menunjang, mendorong dan menggerakkan pembangunan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Sedangkan perkeretaapian merupakan sarana penunjang kepariwisataan kota tua Sawahlunto dan tidak lagi dijadikan sarana penghubung antar daerah, hal ini dikarenakan banyak hal penunjang yang tidak lagi memadai.

Melihat kondisi wilayah Kota Sawahlunto terkait dengan urusan transportasi dapat dilihat dari indikator kinerja sebagai berikut :

**a. Sarana Transportasi**

Dalam mendukung kelancaran lalu lintas dan keselamatan pengguna jalan, dipasang berbagai sarana perlengkapan jalan berupa rambu-rambu lalu lintas, kaca tikungan, warning light dan sarana lainnya. Penyediaan sarana pendukung ini masih perlu ditingkatkan, khususnya pada ruas-ruas jalan utama, pada jalur padat dan ramai aktivitasnya dan pada daerah rawan kecelakaan. Ketersediaan sarana pendukung lalu lintas sangat diperlukan dengan semakin bertambahnya jumlah kendaraan dan tingginya tuntutan kebutuhan sarana transportasi.

Untuk mendukung Visi Misi Walikota Sawahlunto dan mendukung pencapaian Misi ke 7 RPJMD 2018-2023 “Tersedianya Infrastruktur Publik yang Merata dan Memadai”, maka Dinas Perhubungan menetapkan arah kebijakan dalam hal meningkatkan manajemen transportasi, meningkatkan pelayanan moda transportasi dan mendukung pembangunan sarana transportasi yang tertuang dalam rencana pengembangan kereta api.

Dalam pencapaiannya Dinas Perhubungan menerapkan standar pelayanan minimal bidang perhubungan seperti pemeriksaan surat-surat kendaraan di terminal dan di jalan Kota Sawahlunto. Selain itu juga melakukan pemeliharaan rutin terhadap rambu-rambu lalu lintas dan marka jalan. Pengadaan alat uji type C juga sudah diadakan dan untuk tahapan selanjutnya direncanakan pengadaan alat uji kendaraan type B pada tahun 2021.

Tabel 2.73
Jenis dan Jumlah Sarana Transportasi di Kota Sawahlunto
Tahun 2017 – 2019

| No | Jenis Sarana Transportasi | Tahun 2017 | Tahun 2019 | Satuan |
|----|--|------------|------------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Angkutan Jalan | | | |
| | a. Kendaraan Roda Empat | 2.964 | 3.132 | Unit |
| | b. Kendaraan lebih dari roda empat | 574 | 563 | Unit |
| 2 | Terminal | | | |
| | a. Kelas A | | | Unit |
| | b. Kelas B | 1 | | Unit |
| | c. Kelas C | | 1 | Unit |
| | d. Shelter | | - | Unit |
| | e. Halte | 4 | 4 | Unit |
| | f. Bus (AKAP) | | - | |
| | g. Jumlah Jembatan Timbang | | - | |
| | h. Stasiun Kereta Api | 3 | - | Unit |
| 3 | Sarana dan Prasarana Transportasi | | | |
| | 1) Terminal Penumpang | | | |
| | a. Terbangun | 1 | 1 | Buah |
| | b. Kebutuhan | 2 | 2 | Buah |
| | 2) Shelter | | | |
| | a. Terbangun | | - | |
| | b. Kebutuhan | | - | |
| | 3) Rasio Ijin Trayek | | | |
| | a. Kondisi pada tahun x | 5 | 10 | Buah |
| | b. Kebutuhan | 5 | 10 | Buah |
| 4 | Jumlah Orang/Barang yang terangkut angkutan umum | | | |
| | a. Jumlah (angkot +AKDP) | 75.737 | 149.474 | Orang |
| | b. Jumlah barang | | - | Unit |



| No | Jenis Sarana Transportasi | Tahun 2017 | Tahun 2019 | Satuan |
|----|--|------------|------------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 5 | Uji KIR Angkutan Umum | | | |
| | 1) Jumlah Mobil Penumpang Umum | | | |
| | a. Jumlah Mobil Penumpang Umum | 39 | 16 | Buah |
| | b. Jumlah KIR | 28 | 11 | Buah |
| | c. Persentase | 71,79 | 34 | % |
| | 2) Mobil Bus | | | |
| | a. Jumlah Bus | 80 | 60 | Buah |
| | b. Jumlah KIR | 63 | 43 | Buah |
| | c. Persentase | 78,75 | 78 | % |
| | 3) Mobil barang | | | |
| | a. Jumlah Mobil Barang | 1.708 | 1.407 | Buah |
| | b. Jumlah KIR | 1.298 | 927 | Buah |
| | c. Persentase | 76 | 66 | % |
| 6 | Jumlah Uji Kir Angkutan Umum 1 Tahun | 91 | 54 | Buah |
| 7 | Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum | 8 | 8 | Buah |
| 8 | Rasio Izin Trayek | | | |
| | a. Izin Trayek Perkotaan | 1 | 4 | Buah |
| | b. Izin Trayek Pedesaan | 4 | - | |
| | c. Total Jumlah Izin Trayek | 5 | 4 | |
| | d. Rasio Izin Trayek | 100 | 100 | % |
| 9 | Kepemilikan KIR Angkutan Umum | | | |
| | a. Jumlah Angkutan Umum Yang Memiliki KIR Pada Tahun Ini | 91 | 54 | Buah |
| | b. Jumlah Angkutan Umum Pada Tahun Ini | 119 | 76 | Buah |
| | c. Rasio | 01:01,3 | 01:01,4 | % |
| 10 | Lama Pengujian KIR | 20 | 25 | Menit |
| 11 | Biaya Pengujian Kelayakan Angkutan Umum | | | |
| | a. Mobil Penumpang | 51.000 | 51.000 | RP |
| | b. Mobil Barang | 61.000 | 61.000 | RP |
| | C. Mobil Bus | 61.000 | 61.000 | RP |
| 12 | Angkutan Darat | | | |
| | a. Truck | 409 | 497 | Unit |
| | b. Light Truck | 471 | 337 | Unit |
| | c. Angkot | 39 | 16 | Unit |
| | d. Pick Up | 642 | 573 | Unit |
| | e. Mobilbus | 80 | 59 | Unit |
| | f. Microbus | 43 | 25 | Unit |
| | g. Mini bus/ST Wagon | 1.978 | 2031 | Unit |
| | h. Sedan | 216 | 216 | Unit |
| | i. Jeep | 184 | 184 | Unit |
| | j. Kereta Api | - | - | Unit |
| | k. Travel biro | 5 | 5 | Unit |
| | l. Sepeda Motor (ojek) | 22.670 | 11.980 | Unit |
| | j. Sepeda Motor (Roda Tiga) | 28 | 28 | Unit |
| | m. Bus Pariwisata | 7 | 7 | Unit |



| No | Jenis Sarana Transportasi | Tahun 2017 | Tahun 2019 | Satuan |
|----|-----------------------------------|------------|------------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | n. Bajaj | - | - | Unit |
| | o. Bendi/Delman | - | - | Unit |
| | p. Becak Motor | 4 | 4 | Unit |
| 13 | Sarana Lalu Lintas Angkutan Jalan | | | |
| | a. Kaca Tikungan | 78 | 82 | Unit |
| | b. Warningh Light | 6 | 6 | Unit |
| | c. Traffic Light | 1 | 1 | Unit |
| | d. Rambu-rambu | 559 | 559 | Unit |
| | e. Guadril | 146 | 147 | Unit |
| | f. Diliniatur | 100 | 100 | Unit |
| | g. Trapikun | 100 | 100 | Unit |
| | h. Marka Jalan | 107.456 | 113.885 | M' |
| | i. Jembatan Penyebrangan | - | - | Buah |
| | j. Papan Penunjuk Arah | 46 | 46 | Buah |
| | k. Papan Informasi lalu Lintas | - | - | Buah |
| | l. Zebra cross | 676 | 724 | Unit |
| | m. Trotoar | 8.300 | 8.300 | M' |
| | n. RPPJ | 10 | 10 | M' |

Sumber: Profil Daerah Kota Sawahlunto 2019

Dari tabel di atas dapat dilihat perubahan signifikan dari tahun 2017 sampai tahun 2019 mengenai jumlah kendaraan yang ada di Kota Sawahlunto. Perubahan jumlah juga terjadi pada jumlah KIR, jumlah orang yang diangkut dan jumlah sarana lalu lintas. Untuk kendaraan roda 4 mengalami penambahan jumlah dikarenakan peningkatan kebutuhan masyarakat Kota Sawahlunto akan kepemilikan kendaraan roda 4 dan untuk kendaraan roda 4 lebih mengalami penurunan jumlah, dikarenakan berkurangnya fungsi transpor muatan batubara dan lainnya ke daerah lain.

Sementara itu jumlah KIR angkutan umum berkurang dari tahun sebelumnya disebabkan karena berkurang juga jumlah angkutan umum yang ada di Kota Sawahlunto. Untuk lamanya pengujian KIR hanya butuh waktu sekitar 20-25 menit dan biaya pengujian Kelayakan Angkutan Umum dari tahun 2017 sampai tahun 2019 tidak mengalami kenaikan.

Untuk jumlah sarana lalu lintas angkutan jalan mengalami penambahan jumlah pada beberapa item. Kaca tikungan, guadril, marka jalan dan zebra cross menangani penambahan jumlah dari pengadaan kegiatan dan melalui DAK Pusat.

a. Jumlah Orang/Barang Yang Terangkut Angkutan Umum

Yang dimaksud dengan angkutan orang/barang umum ialah angkutan orang/barang pada umumnya. Mengenai jumlah beban angkutan barang antar kota yang harus dapat izin, diatur berdasarkan ketentuan Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2014 tentang angkutan jalan. Berikut data mengenai jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum, dapat dilihat pada tabel berikut :



Tabel 2.74
Jumlah Orang/Barang Yang Terangkut Angkutan Umum Kota Sawahlunto

| NO | URAIAN | Tahun 2017 | Tahun 2019 |
|----|----------------------|------------|------------|
| 1 | Jumlah orang (orang) | 75.737 | 149.474 |

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Sawahlunto tahun 2019

Dari data di atas dapat dijelaskan bahwa jumlah orang yang terangkut angkutan umum pada tahun 2017 sampai tahun 2019 mengalami peningkatan. Pada tahun 2017 sebanyak 75.737 orang yang terangkut angkutan umum, dan pada tahun 2019 terdapat 149.474 orang. Peningkatan selama dua tahun sebanyak 73.737 orang.

Peningkatan jumlah orang yang terangkut angkutan umum dari tahun 2017 sampai tahun 2019 sangat signifikan, dikarenakan pada tahun 2017 adalah penghitungan jumlah orang yang terangkut angkutan umum yang hanya di Kota Sawahlunto, sementara pada tahun 2019 jumlah tersebut dihitung dari jumlah orang yang terangkut angkutan umum yang ada di Kota Sawahlunto dan ditambah dengan jumlah orang yang terangkut angkutan umum yang melewati Muaro Kalaban atau jalan lintas Sumatera.

Akses Penerangan Jalan Umum (PJU)

Penerangan Jalan Umum (PJU) merupakan akses penting dalam pelayanan publik. Secara sederhana PJU diartikan sebagai lampu penerangan jalan yang dipasang untuk kepentingan masyarakat umum agar memudahkan masyarakat pengguna jalan melaksanakan aktivitas dengan aman dan nyaman pada malam hari.

PJU di Kota Sawahlunto bersumber dari Listrik dan Solar Cell. Bersumber dari listrik yaitu arus yang berasal dari listrik PLN, dan bersumber dari *Solar Cell* yaitu yang memanfaatkan energi matahari. Disimpan dalam sebuah baterai, yang kemudian akan dimanfaatkan secara otomatis pada malam hari untuk membangkitkan lampu.

Kota Sawahlunto mempunyai 1900 titik penerangan jalan umum yang bersumber dari listrik PLN dengan pembayaran tagihan sebesar ± 2,5 Milyar setiap tahunnya. Dengan besarnya anggaran tersebut, maka Pemerintah Kota Sawahlunto berupaya menekan biaya dan menghemat APBD Kota Sawahlunto dengan mencari alternatif pengadaan Penerangan Jalan Umum (PJU) tenaga surya (*solar cell*) melalui program dari Kementerian Energi Sumber Daya dan Mineral Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi.

Tabel 2.75
Jumlah PJU tenaga surya (solar cell) dan Retrofit di Kota Sawahlunto
Tahun 2016 - 2019

| No | Tahun | Solar cell | Retrofit |
|----|--------|------------|-----------|
| 1 | 2016 | 120 titik | 200 titik |
| 2 | 2018 | 200 titik | - |
| 3 | 2019 | 25 titik | - |
| | Jumlah | 345 titik | 200 titik |
| | Total | 545 titik | |

Sumber : Barenlitbangda Kota Sawahlunto tahun 2019

Bantuan Penerangan Jalan Umum (PJU) Tenaga Surya disebar di 4 Kecamatan yang ada di Kota Sawahlunto. Jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan pada masing-masing Desa/Kelurahan di Kecamatan. Dengan adanya PJU tenaga surya (*solar cell*) yang dinikmati oleh seluruh masyarakat Kota



Sawahlunto diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mendukung pengembangan kawasan Pariwisata di Kota Sawahlunto, mendukung pengembangan pusat pemerintahan, perdagangan dan jasa serta menghidupkan kembali Kota Sawahlunto yang dahulunya sebagai kota tambang yang saat ini sudah beralih menjadi Kota Wisata.

Jumlah Rumah Tangga Yang Menggunakan Listrik

Listrik sudah menjadi kebutuhan dasar pada saat ini. Tidak hanya bagi kebutuhan rumah tangga dan industri, tetapi merupakan bagian dari gaya hidup. Sedemikian pentingnya peran listrik juga terlihat dari pertumbuhan konsumsi di tingkat rumah tangga khususnya di Kota Sawahlunto yang mengalami kenaikan dari tahun ke tahunnya.

Tabel 2.76
Jumlah Pelanggan Listrik Menurut Jenis Pelanggan di Kota Sawahlunto tahun 2015 – 2019

| No | Jenis Pelanggan | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|----|-----------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 1 | Rumah Tangga | 9.969 | 10.212 | 10.619 | 11.128 | 15.076 |
| 2 | Bisnis | 1.425 | 1.540 | 1.652 | 1.730 | 2.232 |
| 3 | Sosial | 343 | 354 | 368 | 385 | 543 |
| 4 | Industri | 8 | 9 | 11 | 9 | 12 |
| 5 | Umum | 110 | 115 | 122 | 119 | 185 |
| 6 | Pemerintah | 164 | 171 | 172 | 179 | 188 |
| | Jumlah | 12.019 | 12.401 | 12.944 | 13.550 | 18.236 |

Sumber : Kota Sawahlunto Dalam Angka Tahun 2019

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa rata-rata untuk semua jenis pelanggan listrik mengalami peningkatan setiap tahunnya, yang dikarenakan kebutuhan dasar akan pemenuhan daya listrik. Jika dilihat dari pelanggan rumah tangga, dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 mengalami peningkatan yang signifikan, apalagi dari tahun 2018 ke 2019 dengan penambahan sebanyak 3.948 rumah tangga.

Untuk tahun 2019, jumlah rumah tangga yang menggunakan listrik di Kota Sawahlunto tercatat sebanyak 15.076 dari 15.434 rumah tangga yang ada di Kota Sawahlunto (Kota Sawahlunto Dalam Angka tahun 2020). Hal ini berarti sudah 97,68% rumah tangga di Kota Sawahlunto menggunakan listrik sebagai sumber energi. Namun masih ada sebanyak 2,32% lagi yang belum menggunakan energi listrik.

Perusahaan Listrik Negara (PLN) sebagai pengelola energi listrik mempunyai program agar semua masyarakat dapat menikmati listrik yang ada. Namun karena biaya operasional pemasangan listrik dirasa cukup tinggi, maka tidak semua masyarakat dapat menyanggupinya. Sehingga masih ada masyarakat yang rumahnya tidak dialiri listrik. Ini harusnya menjadi perhatian pemerintah Kota Sawahlunto bagaimana agar semua masyarakat Kota Sawahlunto dapat terlayani dan menikmati energi listrik yang ada.

Persentase Masyarakat Yang Menggunakan Telepon/HP

Perkembangan zaman menuntut masyarakat menjadi pintar dalam teknologi. Seiring perkembangan arus informasi yang mengalir deras, masyarakat juga membutuhkan media atau sarana yang dapat menunjang aktivitas sehari-hari. Banyak media yang memberikan akses teknologi dan informasi kepada masyarakat, seperti telepon selular/Handpone (HP) dan komputer/laptop. Telepon selular/Handpone (HP) adalah salah satu produk dari perkembangan teknologi



modern yang paling banyak digemari. Handpone menjadi barang wajib bagi setiap orang saat ini.

Tabel 2.77
Persentase Rumah Tangga yang Mempunyai Akses Teknologi Informasi Menurut Alat Komunikasi dan Informasi tahun 2017- 2019

| NO | Alat Komunikasi dan Informasi | 2017 | 2018 | 2019 |
|----|-------------------------------|-------|-------|-------|
| 1 | Telepon Selular | 67,53 | 72,28 | 83,28 |
| 2 | Komputer/Laptop | 27,73 | 27,63 | 30,36 |
| 3 | Akses Internet | 34,11 | 40,72 | 49,38 |

Sumber : Indikator Kesejahteraan Rakyat Kota Sawahlunto 2018
Statistik Kesejahteraan Rakyat Kota Sawahlunto 2019

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa persentase rumah tangga di Kota Sawahlunto yang memiliki akses teknologi informasi menurut alat komunikasi dan informasi secara umum mengalami peningkatan dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2019, baik itu pada kepemilikan telepon seluler, komputer/laptop dan akses internet. Hal ini terjadi karena kebutuhan masyarakat Kota Sawahlunto akan tuntutan pekerjaan dan informasi yang memang sangat dibutuhkan dan aksesnya hanya didapat dengan cepat di alat komunikasi seperti tabel di atas.

Dari tiga alat komunikasi dan informasi tersebut yang mengalami kenaikan signifikan yaitu pada kepemilikan telepon selular (HP). Dari data tahun 2018 mengalami penambahan jumlah sebesar 11% ke tahun 2019. Selanjutnya pada kepemilikan akses internet dengan penambahan sebesar 8,66% dan kemudian pada kepemilikan komputer/laptop sebesar 2,73%. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Kota Sawahlunto lebih banyak membeli telepon selular (HP) dibanding akses internet dan komputer/laptop sebagai akses teknologi dan informasi pada saat ini

2.3.1.7. Urusan Sosial

Selain ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan Masyarakat dalam penunjang iklim berinvestasi, Urusan Sosial mempunyai pengaruh dalam mendukung berinvestsi. Berikut ini ditampilkan data tabel sosial

Tabel 2.78
Penyandang Cacat di Kota Sawahlunto Tahun 2015-2019

| No | Penyandang Cacat | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|----|-------------------------------|------|------|------|------|------|
| 1 | Penyandang Tuna Netra | 31 | 31 | 31 | 29 | 29 |
| 2 | Penyandang Tuna Rungu | 22 | 22 | 22 | 23 | 23 |
| 3 | Penyandang Tuna Wicara | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
| 4 | Penyandang Tuna Daksa | 28 | 28 | 28 | 25 | 25 |
| 5 | Penyandang Tuna Grahita | 193 | 193 | 193 | 187 | 187 |
| 6 | Cacat Fisik dan Mental | 148 | 148 | 148 | 176 | 176 |
| 7 | Cacat Lainnya/Mental Psikotik | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |

Sumber : Data Dinsos Kota Sawahlunto, 2019

Sementara itu ada penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya antara lain :

1. Anak jalanan berjumlah : 10 orang
2. Penderita sakit jiwa berjumlah : 5 orang
3. Fakir miskin berjumlah : 6887 orang



4. Bayi terlantar berjumlah : 20 orang.
5. Anak terlantar berjumlah : 53 orang
6. Lanjut usia terlantar berjumlah : 676 Orang

Data sosial atau penyandang cacat tahun 2016 dengan 2018 tidak terdapat perubahan. Namun pada tahun 2019 ada sedikit perubahan.

Tabel 2.79
Data Klasifikasi Penduduk Miskin Di Kota Sawahlunto Tahun 2019

| URAIAN | L. SEGAR | BARANGIN | SILUNGKANG | TALAWI | JUMLAH |
|--------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| JUMLAH PENDUDUK MISKIN | 708 ORANG | 1313 ORANG | 1074 ORANG | 3792 ORANG | 6887 ORANG |
| JUMLAH RUMAH TANGGA MISKIN | 284 RUMAH TANGGA | 558 RUMAH TANGGA | 449 RUMAH TANGGA | 291 RUMAH TANGGA | 1582 RUMAH TANGGA |
| JUMLAH KEPALA KELUARGA MISKIN | 284 KEPALA KELUARGA | 558 KEPALA KELUARGA | 449 KEPALA KELUARGA | 291 KEPALA KELUARGA | 1582 KEPALA KELUARGA |

Sumber : Data Dinas Sosial PMDPPA

Tabel 2.80
Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Di Daerah Propinsi dan Kabupaten/Kota

| No | Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar Di Dalam Panti | Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar Di Dalam Panti | Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar Di Dalam Panti | Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan pengemis Terlantar Di Dalam Panti |
|----|---|---|--|---|
| 1 | Penyediaan Permakanan | Pengasuhan | Penyediaan Permakanan | Penyediaan Permakanan |
| 2 | Penyediaan Sandang | Penyediaan Permakanan | Penyediaan Sandang | Penyediaan Sandang |
| 3 | Penyediaan asrama yang mudah akses | Penyediaan Sandang | Penyediaan asrama yang mudah akses | Penyediaan asrama yang mudah akses |
| 4 | Penyediaan Alat Bantu | Penyediaan asrama yang mudah akses | Penyediaan Alat Bantu | Penyediaan Perbekalan kesehatan didalam panti |
| 5 | Penyediaan perbekalan kesehatan di dalam panti | Penyediaan Perbekalan kesehatan didalam panti | Penyediaan perbekalan kesehatan di dalam panti | Pemberian bimbingan fisik, mental spiritual dan social |
| 6 | Pemberian bimbingan fisik, mental spiritual dan sosial | Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial | Pemberian bimbingan fisik, mental spiritual dan sosial | Pemberian bimbingan keterampilan hidup sehari-hari |
| 7 | Pemberian bimbingan aktivitas hidup sehari-hari | Pemberian bimbingan Aktivitas hidup sehari-hari | Pemberian bimbingan aktivitas hidup sehari-hari | Pemberian bimbingan Keterampilan dasar |



| No | Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar Di Dalam Panti | Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar Di Dalam Panti | Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar Di Dalam Panti | Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan pengemis Terlantar Di Dalam Panti |
|----|---|--|--|---|
| 8 | Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan | Fasilitasi Pembuatan akta kelahiran, nomor induk kependudukan dan kartu identitas anak | Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan | Fasilitasi pembuatan nomr induk kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, akta kelahiran. Surat nikah dan atau kartu identitas anak |
| 9 | Akses ke layanan Pendidikan dan kesehatan dasar | Akses ke layanan Pendidikan dan kesehatan dasar | Akses ke layanan Pendidikan dan kesehatan dasar | Akses layanan Pendidikan kesehatan |
| 10 | Pemberian pelayanan Penelusuran keluarga | Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga | Pemberian pelayanan Penelusuran keluarga | Pemulangan ke daerah asal |
| 11 | Pemberian Pelayanan reunifikasi keluarga | Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga | Pemberian Pelayanan reunifikasi keluarga | |
| 12 | | Akses layanan pengasuhan kepada keluarga pengganti | Pemulasaraan | |

Sumber : Permensos Nomor 9 tahun 2018

Dari Standar Pelayanan Minimal di atas, untuk Kota Sawahlunto Pemerintah Daerah memberikan fasilitas untuk panti YPAY Mudik air dan panti penyandang cacat waringin Lubang Panjang yaitu biaya permakanaan anak panti, transport ke sekolah, paket lebaran dan honor pengasuh. Jadi masih ada pelayanan -pelayanan yang belum terpenuhi dari SPM permensos tersebut, untuk itu harus menjadi perhatian dari Pemerintah Kota Sawahlunto karena ini menyangkut pelayanan dasar.

Tabel 2.81
Penyandang Disabilitas (Usia diatas 18 Tahun) di Kota Sawahlunto Tahun 2015-2019

| URAIAN | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|------|------|------|------|------|
| Jumlah Penyandang Disabilitas | 409 | 403 | 431 | 375 | 392 |
| Jumlah Penyandang Disabilitas yang terbantu | 13 | 19 | 20 | 28 | 25 |
| Persen (%) | 3.18 | 2.23 | 4.64 | 7.47 | 6,37 |

Sumber : Dinas Sosial PMDPPA

Data yang ditampilkan diatas tentang Penyandang cacat baik dari segi jumlah, yang telah terbantu dan terfasilitasi adalah jumlah keseluruhan yang ada dikota Sawahlunto, dari jumlah Penyandang Disabilitas semenjak tahun 2014 sampai dengan tahun 2019 terus bertambah seperti yang tertulis pada tabel diatas, namun karena belum terpenuhinya anggaran untuk membantu penyandang Disabilitas secara sempurna maka setiap tahun itu jumlah yang terbantu kadang meningkat dan ada juga yang menurun itu pun didasarkan



kepada kebutuhan yang mendesak dan yang sangat urgen sekali, sehingga dari segi persentase juga terlihat turun naik.

Tabel 2.82
Jumlah Anak Berkebutuhan khusus (Usia 0 s/d 18 Tahun)
di Kota Sawahlunto Tahun 2015-2019

| Uraian | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|-------|-------|-------|-------|-------|
| Jumlah Anak Berkebutuhan khusus | 120 | 120 | 114 | 188 | 161 |
| Jumlah Anak berkebutuhan khusus yang terbantu | 33 | 55 | 51 | 43 | 122 |
| Persen (%) | 27.50 | 45.83 | 44.74 | 22.87 | 75,77 |

Sumber : Dinas Sosial PMDPPA

Pada data yang ditampilkan tentang Anak yang Berkebutuhan Khusus (ABK) dari segi jumlah, maupun yang telah terbantu dan terfasilitasi seperti yang tergambar pada table diatas adalah jumlah keseluruhan yang ada dikota Sawahlunto, dari jumlah Penyandang Disabilitas semenjak tahun 2013 sampai dengan tahun 2018 kadang bertambah dan ada juga yang berkurang hal itu disebabkan oleh ada diantara ABK tersebut yang pindah domisili keluar daerah dan ada yang sudah meninggal dunia seperti yang tertulis pada tabel diatas, dan juga disebabkan karena belum terpenuhinya anggaran untuk membantu secara sempurna untuk seluruh ABK , maka setiap tahun itu jumlah yang terbantu kadang meningkat dan kadang , dan juga itu pun didasarkan kepada kebutuhan yang mendesak dan yang sangat urgen sekali, sehingga dari segi persentase juga terlihat turun naik.

Tabel 2.83
Jumlah Penderita Gangguan Jiwa/Psikotik di Kota Sawahlunto
Tahun 2015-2019

| Uraian | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Jumlah Penyandang gangguan jiwa | 86 | 88 | 92 | 97 | 134 |
| Jumlah Penyandang gangguan jiwa/ Psikotik yang terbantu | 14 | 7 | 5 | 3 | 2 |
| Persen (%) | 16.28 | 7.95 | 5.43 | 3.09 | 1,49 |

Sumber : Dinas Sosial PMDPPA

Selanjutnya khusus untuk penyandang jiwa/psikotik dari segi jumlah setiap tahun bertambah, Seperti yang terlihat dari tabel diatas, namun dalam hal yang sudah terbantu pada setiap tahunnya belum terfasilitasi semuanya, hal ini karena menurut kepentingan yang paling mendesak atau berkaitan tingkat kefatalan dari penderita gangguan jiwa/psikotik itu sendiri. Begitu juga dari segi persentasenya juga demikian.

Untuk 5 tahun kedepan kita akan berupaya memberikan bantuan pada penyandang gangguan jiwa/psikotik ini secara keseluruhan sehingga bisa menekan angka masyarakat Sawahlunto yang mengalami gangguan jiwa tersebut paling tidak bisa mendekati 60 %. Sesuai dengan target yang dicanangkan.



Tabel 2.84
Jumlah Lanjut Usia Terlantar di Kota Sawahlunto Tahun 2015-2019

| Uraian | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|--|-------|-------|-------|-------|-------|
| Jumlah Lanjut Usia Terlantar | 685 | 697 | 775 | 769 | 769 |
| Jumlah Lanjut Usia terlantar yang terbantu | 177 | 170 | 153 | 148 | 148 |
| Persen (%) | 25.84 | 24.39 | 19.74 | 19.25 | 19.25 |

Sumber : Dinas Sosial PMDPPA (data 2019 : Estimasi)

Dari tabel diatas gambaran tentang Lanjut Usia Terlantar (LANSIA) pada tahun 2015 berjumlah 685, untuk dua tahun kemudian terjadi kenaikan karena sudah ada yang meninggal dunia, kemudian pada tahun 2017-2019 terjadi sedikit peningkatan ini dikarenakan pada waktu pendataan awal ada yang tertinggal pendataanya oleh pemerintahan desa , dari segi bantuan yang disalurkan belum semuanya terbantu secara sempurna hal itu terlihat dari persentase pada tabel diatas.

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah korban bencana terbesar pada tahun 2018 yaitu sampai 63 KK. Menurut Undang-Undang nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan bencana pasal 6 bahwa pemerintah bertanggung jawab dalam penyelenggaraan Penanggulangan bencana terutama penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana secara adil dan sesuai dengan standar pelayanan minimal.

2.3.2. URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR

2.3.2.1. Urusan Tenaga Kerja

2.3.2.1.1. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah suatu indikator ketenagakerjaan yang memberikan gambaran tentang penduduk yang aktif secara ekonomi dalam kegiatan sehari-hari merujuk pada suatu waktu dalam periode survei. Dalam suatu wilayah peranan Sumber Daya Manusia (SDM) memiliki komponen yang penting. Individu berperan dalam partisipasi mereka sebagai tenaga kerja untuk menggerakkan perekonomian suatu daerah. Sehingga dengan membaiknya perekonomian maka akan berdampak pada membaiknya pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Keterlibatan penduduk dalam kegiatan ekonomi diukur dengan porsi penduduk yang masuk ke dalam pasar kerja (bekerja atau mencari pekerjaan).

Tabel. 2.86
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kota Sawahlunto Tahun 2015-2019

| Indikator | Satuan | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Angkatan Kerja 15 tahun ke atas | Jiwa | 30.018 | 30.018 | 31.049 | 30.320 | 31.249 |
| Jumlah Penduduk usia 15 tahun ke atas | Jiwa | 42.938 | 42.938 | 44.077 | 44.456 | 45.157 |
| Angka Partisipasi Angkatan Kerja | Jiwa | 69,91 | 69,91 | 70,44 | 68.20 | 69,20 |

Sumber : Sawahlunto Dalam Angka Kota Sawahlunto 2020, Data diolah

Tingkat partisipasi angkatan kerja dihitung berdasarkan perbandingan antara angkatan kerja (penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja) dan penduduk usia kerja (penduduk usia 15 tahun ke atas). Kedua komponen ini masing-masing mengalami perubahan seiring dinamika penduduk. Selama



rentang tahun 2015-2019, tingkat partisipasi angkatan kerja Kota Sawahlunto berfluktuatif. Pada tahun 2015 dan 2016 tingkat partisipasi angkatan kerja di Kota Sawahlunto adalah sebesar 69,91%, pada tahun 2017 meningkat menjadi 70,44%, sedangkan pada tahun 2018 mengalami penurunan menjadi 68,20%, dan pada tahun 2019 angka ini meningkat kembali menjadi 69.20%. Semakin meningkatnya tingkat partisipasi angkatan kerja tersebut menunjukkan bahwa semakin besar proporsi penduduk usia kerja yang sedang bekerja.

2.3.2.1.2. Pencari Kerja yang Ditempatkan

Pencari Kerja adalah individu yang berada dalam masa produktif yaitu umur 15-64 tahun dimana masih mencari pekerjaan. Indikator pencari kerja yang ditempatkan merupakan perbandingan antara jumlah pencari kerja yang ditempatkan terhadap jumlah pencari kerja yang mendaftar. Dari tahun 2015-2019, persentase pencari kerja yang ditempatkan cenderung naik. Pada tahun 2015 jumlah pencari kerja yang ditempatkan adalah sebesar 10,86%, dan naik menjadi 23,74% pada tahun 2019.

Tabel 2.87
Pencari Kerja yang Ditempatkan di Kota Sawahlunto Tahun 2015 – 2019

| No | Indikator | Satuan | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|----|--|---------------|--------------|--------------|-------------|--------------|--------------|
| 1 | Jumlah pencari kerja yang ditempatkan | Jiwa | 75 | 75 | 19 | 109 | 109 |
| 2 | Jumlah Pencari kerja yang mendaftar | Jiwa | 690 | 690 | 547 | 942 | 459 |
| 3 | Persentase Pencari Kerja yang Ditempatkan | Persen | 10,86 | 10,86 | 3,47 | 11,57 | 23,74 |

Sumber : BPS Kota Sawahlunto Tahun 2020

Persentase pencari kerja yang ditempatkan ini termasuk rendah karena tidak sampai 25%, hal ini disebabkan oleh jumlah pencari kerja yang tidak sebanding dengan jumlah lapangan pekerjaan yang tersedia, tidak adanya pencaker yang melapor/mengembalikan kartu pencari kerja (kartu AK-1) ke DPMPSPNaker saat mereka sudah diterima bekerja. Faktor lain yang menyebabkan pencari kerja sulit mendapatkan pekerjaan adalah sebagai berikut:

1. Persaingan dunia kerja
Banyaknya persaingan dalam dunia kerja dapat menyulitkan pencari kerja untuk bisa mendapatkan pekerjaan impiannya.
2. Kemampuan dan pendidikan
Kemampuan dan pendidikan seseorang juga termasuk faktor penyebab sulitnya mendapatkan pekerjaan.
3. Mudah putus asa
Rasa putus asa adalah penyebab utama sulitnya pencari kerja untuk menemukan pekerjaannya.
4. Pengalaman
Pengalaman juga menentukan apakah seseorang layak bekerja untuk perusahaan tersebut atau tidak. Orang yang berpengalaman adalah orang yang terbiasa dengan dunia kerja dan memahami kemampuan yang dimilikinya.
5. Minim informasi pekerjaan/networking

2.3.2.1.3. Lapangan Usaha Penduduk yang bekerja

Lapangan Usaha adalah bidang kegiatan dari pekerjaan/tempat bekerja dimana seseorang bekerja. Pada tahun 2015 di Kota Sawahlunto penduduk yang bekerja terbesar di lapangan usaha jasa kemasyarakatan, sosial dan perorangan yaitu sebanyak 7.696 orang, disusul perdagangan besar dan eceran, rumah makan dan hotel sebanyak 6.559 orang. Pada tahun 2017 adanya perubahan yaitu jumlah penduduk yang bekerja paling banyak adalah pada lapangan usaha lainnya (pertambangan dan penggalian, listrik, gas dan air, bangunan, angkutan, pergudangan, komunikasi, keuangan, asuransi, usaha persewaan bangunan,



tanah dan jasa perusahaan) yaitu sebanyak 7.688 orang, sedangkan pada tahun 2018 sama dengan tahun 2017 dimana penduduk yang bekerja paling banyak juga pada lapangan usaha lainnya (pertambangan dan penggalian, listrik, gas dan air, bangunan, angkutan, pergudangan, komunikasi, keuangan, asuransi, usaha persewaan bangunan, tanah dan jasa perusahaan) yaitu meningkat menjadi sebanyak 8.298 orang yang bisa dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.88
Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas Yang Bekerja Selama Seminggu Yang Lalu Menurut Lapangan Usaha Di Kota Sawahlunto Tahun 2015-2018

| No | Menurut Lapangan Usaha | Tahun 2015 | Tahun 2016 | Tahun 2017 | Tahun 2018 |
|--------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1 | Pertanian | 4.627 | 4.627 | 4.889 | 4.991 |
| 2 | Industri Pengolahan | 2.467 | 2.467 | 3.553 | 4.227 |
| 3 | Perdagangan Besar, Eceran, Rumah Makan dan Hotel | 6.559 | 6.559 | 5.990 | 5.588 |
| 4 | Jasa Kemasyarakatan, Sosial dan Perorangan | 7.696 | 7.696 | 7.007 | 7.216 |
| 5 | Lainnya (Pertambangan dan Penggalian, Listrik, Gas dan Air, Bangunan, Angkutan, Pergudangan, Komunikasi, Keuangan, Asuransi, Usaha Persewaan Bangunan, Tanah dan Jasa Perusahaan) | 6.513 | 6.513 | 7.688 | 8.298 |
| Total | | 27.862 | 27.862 | 29.127 | 30.320 |

Sumber : BPS Kota Sawahlunto Tahun 2019

Sedangkan pada tahun 2020 terjadi perubahan penyajian data dari Badan Pusat Statistik (BPS), yang mana lapangan usaha dibagi menjadi tiga kategori saja yaitu pertanian, manufaktur dan jasa seperti dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.89
Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas Yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan dan Jenis Kelamin di Kota Sawahlunto Tahun 2019

| No | Lapangan Usaha Tiga Kategori | Laki-laki | Perempuan | Jumlah |
|--------------|------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 1 | Pertanian | 2.658 | 1.369 | 4.027 |
| 2 | Manufaktur | 6.350 | 2.017 | 8.367 |
| 3 | Jasa | 7.930 | 8.793 | 16.723 |
| Total | | 16.938 | 12.179 | 29.117 |

Sumber : Sawahlunto Dalam Angka Kota Sawahlunto, 2020

Berdasarkan tabel diatas pada tahun 2019 di Kota Sawahlunto penduduk yang bekerja terbanyak ada pada lapangan usaha Jasa yaitu berjumlah 16.723 orang (laki-laki sebanyak 7.930 orang dan perempuan sebanyak 8.793 orang).

2.3.2.1.4. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Pengangguran disebabkan oleh jumlah pencari kerja yang tidak sebanding dengan lapangan pekerjaan yang tersedia. Oleh karena itu, keberadaan pengangguran mencerminkan terbatasnya kesempatan kerja yang tersedia dibandingkan dengan potensi tenaga kerja yang tersedia. Pengangguran adalah orang yang termasuk dalam angkatan kerja (15 sampai 64 tahun) namun belum/tidak bekerja. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dihitung berdasarkan jumlah orang yang tidak bekerja dibandingkan dengan jumlah penduduk angkatan kerja. Tingkat Pengangguran Terbuka selama 5 tahun terakhir berfluktuatif, pada tahun 2015-2016 yaitu sebanyak 7,18%, tahun 2017 mengalami penurunan menjadi 6,19%, tahun 2018 mengalami penurunan



kembali menjadi 5,75% dan pada tahun 2019 mengalami kenaikan menjadi 6,82% yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.90
Tingkat Pengangguran Terbuka di Kota Sawahlunto Tahun 2015 – 2019

| No | Indikator | Satuan | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|----|-------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 1 | Jumlah pengangguran Terbuka | Jiwa | 2.156 | 2.156 | 1.922 | 1.742 | 2.132 |
| 2 | Jumlah Penduduk Angkatan Kerja | Jiwa | 30.018 | 30.018 | 31.049 | 30.320 | 31.249 |
| 3 | Tingkat Pengangguran Terbuka | Persen | 7,18 | 7,18 | 6,19 | 5,75 | 6,82 |

Sumber : Sawahlunto Dalam Angka Kota Sawahlunto, 2020

Faktor penyebab meningkatnya angka pengangguran terbuka pada tahun 2019 antara lain adalah :

1. Ketidakseimbangan antara pekerjaan dan jumlah tenaga kerja/tidak seimbang antara lapangan kerja dengan jumlah angkatan kerja
Penyebab pengangguran di Kota Sawahlunto dan alasannya yang pertama adalah adanya ketidakseimbangan antara pekerjaan dan jumlah tenaga kerja yang meningkat setiap tahunnya. Adanya persaingan ketat di antara para *fresh graduate* maupun yang sudah berpengalaman membuat fenomena baru bahwa ketidakseimbangan tersebut telah terjadi. Mahasiswa dan lulusan *magister* pun semakin kesulitan memiliki pekerjaan karena jumlah pekerjaan yang tersedia sedikit dan tidak diiringi dengan kemampuan dari para individu tersebut.
2. Kemampuan para pencari kerja yang tidak sesuai
Penyebab pengangguran di Kota Sawahlunto dan alasannya yang selanjutnya adalah banyaknya kriteria para pencari kerja yang tidak sesuai dengan permintaan perusahaan. Perusahaan akan membutuhkan karyawan yang sesuai dengan kriteria kebutuhan pada posisi yang akan ditempati oleh para calon karyawan. Hal tersebut menjadi kendala pada saat perusahaan membutuhkan karyawan dengan keterampilan tinggi. Secara otomatis, akan hanya ada beberapa pelamar saja yang memiliki kesempatan untuk diterima.
3. Kurangnya pendidikan dan keterampilan
Kurangnya tingkatan pendidikan dan keterampilan akan menyebabkan seseorang menjadi sulit untuk dijadikan sebagai tenaga kerja. Akibatnya kebanyakan orang yang tidak memiliki latar belakang pendidikan tinggi biasanya hanya menjadi buruh kasar. Jika pekerjaan kasar tidak ada dan tidak adanya jiwa seorang pengusaha, maka seseorang dapat menjadi pengangguran permanen. Selain itu, keterampilan juga penting untuk melatih kemampuan mereka untuk memasuki dunia kerja.
4. Adanya PHK
Adanya PHK oleh perusahaan juga menyebabkan bertambahnya pengangguran baik PHK karena berakhirnya kontrak kerja maupun PHK karena pengurangan tenaga kerja.
5. Kesulitan bertemu pencari kerja dan lowongan pekerjaan
Kekosongan yang tersedia di perusahaan terkadang tidak diumumkan dengan baik. Beberapa orang yang potensial dapat mengisi lowongan pekerjaan tersebut terkadang kehilangan informasi tentang lowongan itu sendiri. Sebaliknya, para pencari kerja biasanya juga kebanyakan tidak cukup aktif untuk menggali informasi tentang lowongan yang tersedia.



6. Kurangnya minat dan motivasi para pencari kerja Kota Sawahlunto untuk bekerja di luar daerah karena lowongan kerja dan perusahaan yang ada di Kota Sawahlunto terbatas.

2.3.2.1.5. Rasio Penduduk yang Bekerja

Rasio penduduk yang bekerja adalah perbandingan jumlah penduduk yang bekerja terhadap jumlah angkatan kerja. Semakin tinggi rasio menggambarkan bahwa penduduk di suatu wilayah sudah banyak yang terserap dalam dunia kerja. Rasio penduduk yang bekerja di Kota Sawahlunto tahun 2015-2019 disajikan pada tabel berikut :

Tabel 2.91
Rasio Penduduk yang Bekerja di Kota Sawahlunto Tahun 2015 – 2019

| No | Indikator | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|----|-----------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 1 | Penduduk yang bekerja | 27.862 | 27.862 | 29.127 | 30.320 | 29.117 |
| 2 | Angkatan Kerja | 30.018 | 30.018 | 31.049 | 32.171 | 31.249 |
| 3 | Rasio penduduk yang bekerja | 92,82 | 92,82 | 93,81 | 94,24 | 93,18 |

Sumber : BPS Kota Sawahlunto Tahun 2020

Jumlah penduduk yang bekerja, jumlah angkatan kerja, maupun rasio penduduk yang bekerja di Kota Sawahlunto menunjukkan tren fluktuasi. Besarnya rasio penduduk yang bekerja menunjukkan bahwa serapan tenaga kerja di Kota Sawahlunto tergolong baik, yaitu lebih dari 90 persen. Rasio penduduk yang bekerja di Kota Sawahlunto pada periode 2015-2019 terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2015, rasio penduduk yang bekerja sebesar 92,82, naik menjadi 93,81 pada tahun 2017 dan meningkat kembali menjadi 94,24 pada tahun 2018. Pada tahun 2019 rasio penduduk yang bekerja di Kota Sawahlunto mengalami penurunan menjadi 93,18.

2.3.2.2. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak salah satunya dapat dilihat dari pencegahan tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) menimbulkan kesengsaraan atau penderitaan baik secara fisik, seksual, psikologis dan penelantaran di dalam kehidupan berumah tangga. Data tentang Rasio Kekerasan Dalam Rumah Tangga dari tahun 2015 s/d tahun 2019 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.92
Jumlah KDRT Di Kota Sawahlunto Tahun 2015 – 2019

| No | Uraian | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|----|---------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 1. | Jumlah KDRT | 0 | 3 | 10 | 6 | 7 |
| 2. | Jumlah Rumah Tangga | 14.864 | 15.010 | 14.452 | 19.394 | 19.394 |
| 3. | Rasio KDRT | 0,00 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,03 |

Sumber : Data Dinsospmdppa Tahun 2019

Ada kasus kejadian KDRT di Kota Sawahlunto pada tahun 2019. Angka ini berkurang dari tahun 2017 yang ada 10 kasus menjadi 7 KDRT dengan rasio 0,03.

Fenomena KDRT ibarat fenomena gunung es, kasus yang dilaporkan dengan fakta yang ada di masyarakat berbeda. Meskipun dari data pada Tabel I di atas rasio KDRT mengalami penurunan setiap tahunnya. Pemerintah Sawahlunto



harus tetap waspada dengan semakin meningkatnya kesadaran masyarakat dan terbukanya akses bagian korban KDRT untuk mengadu ke berbagai layanan yang ada di masyarakat di antaranya adalah P2TP2A.

Kepedulian Pemerintah Kota Sawahlunto dalam menangani kasus tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak dapat digambarkan dalam indikator jumlah penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak. Tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak umumnya adalah tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), non KDRT dan penelantaran. Untuk rekap data penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 2.93
Data Kasus Penyelesaiannya Dibantu Oleh P2TP2A Kota Arang Berdasarkan Perempuan dan Anak sebagai Korban Tahun 2019

| NO | Jenis Kasus | Tahun 2019 | |
|---------------------------|---------------------------|-----------------|-----------|
| | | Perempuan | Anak |
| 1 | Kekerasan Fisik | 0 | 0 |
| 2 | Kekerasan Seksual | 0 | 26 |
| 3 | Kekerasan Psikis | 3 | 0 |
| 4 | Penelantaran Rumah Tangga | 3 | 0 |
| 5 | Eksplorasi | 0 | 0 |
| 6 | Trafficking | 0 | 0 |
| 7 | Lainnya | 1 | 0 |
| Jumlah Jenis Kasus | | 7 | 26 |
| Total 2019 | | 33 kasus | |

Sumber : Dinas Sosial, PMD dan PPA Kota Sawahlunto

Pemerintah Kota Sawahlunto telah memfasilitasi terhadap semua kasus tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak. Penanganan atas tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak tersebut dilakukan dengan tindakan konseling, medis berupa rujukan ke pusat pelayanan terpadu/rumah sakit, hukum berupa konsultasi hukum serta pendampingan ke Polisi, Kejaksaan maupun Pengadilan Negeri (PN), Psikososial meliputi identifikasi kasus, konseling, *home visit*, *outreach*, sosialisasi serta reintegrasi (pelatihan keterampilan) dan pemberdayaan lainnya.

Dalam hal pengarusutamaan gender dan perlindungan terhadap anak Pemerintah Kota Sawahlunto berupaya untuk mewujudkan pembangunan yang berbasis Hak Anak dan pembangunan yang Responsif Gender. Pada Tahun 2017 sudah ada sebanyak 19 Desa/Kelurahan Ramah Anak Kota Sawahlunto.

Dari keseluruhan upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota dalam bidang Pengarusutamaan Gender maka Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kota Sawahlunto dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 2.94
Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kota Sawahlunto Tahun 2019

| No | Uraian | 2019 |
|----|----------------------------------|--------|
| 1 | Indeks Pembangunan Gender (IPG) | 95,68% |
| 2 | Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) | 65,33% |

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Barat, 2019

Yang dimaksud dengan Indeks Pembangunan Gender (IPG) adalah : pemilihan laki-laki dan perempuan sementara yang dimaksud dengan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) adalah keberperanan perempuan dalam komposisi strategis seperti di jabatan struktural atau keterwakilan perempuan di legislatif. Partisipasi Anak dalam Pembangunan, Pembangunan anak dilakukan sesuai dengan Pasal 28B ayat (2) UUD 1945, dengan menggunakan prinsip-prinsip pemenuhan hak dan perlindungan anak sebagaimana tercantum pada Konvensi



Hak Anak (KHA), yaitu: non-Diskriminasi, hak untuk hidup, tumbuh dan berkembang, mempertimbangkan kepentingan terbaik anak dan menghargai partisipasi anak. Partisipasi dalam proses perencanaan pembangunan sudah dilibatkan baik di tingkat Kota, Kecamatan maupun tingkat Desa/Kelurahan dalam wadah Forum Anak.

Tabel 2.95
Jumlah Forum Anak Kota Sawahlunto Tahun 2015 – 2019

| No | Uraian | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|----|----------------------------|------|------|------|------|------|
| 1 | Forum Anak Kota Sawahlunto | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Forum Anak Kecamatan | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| 3 | Forum Anak Desa/Kelurahan | 1 | 14 | 23 | 23 | 37 |

Sumber : Dinas Sosial dan PM Kota Sawahlunto

Forum Anak dibina oleh Pemerintah secara berjenjang dalam rangka memenuhi hak partisipasi anak. Hal ini secara tegas telah diatur dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2011 tentang Kebijakan Partisipasi Anak dalam Pembangunan.

a. Kasus Kenakalan Remaja Yang Tertangani Di Kota Sawahlunto

Tabel 2.96
Kasus Kenakalan Remaja 5 Tahun Terakhir Tahun 2015 – 2019

| Uraian | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---------|---------|---------|---------|---------|
| Jumlah Kenakalan Remaja | 8 orang | 3 Orang | 7 orang | 9 orang | 3 orang |
| Kasus Kenakalan Remaja yang terselesaikan | 8 kasus | 3 kasus | 7 kasus | 9 kasus | 3 orang |
| Persentase (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Sumber : Dinas Sosial PMDPPA

Data kenakalan remaja yang ditampilkan diatas merupakan data kenakalan remaja yang diselesaikan oleh bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada dinas sosial Kota Sawahlunto, dan setiap kasus tersebut adalah berdasarkan laporan yang di terima melalui masyarakat dan di bantu penyelesaian nya oleh P2TP2A sehingga bisa normal kembali. Namun dalam hal ini belum termasuk data kenakalan remaja yang terdapat pada sekolah-sekolah yang ada karena antara Dinas Sosial PMDPPA belum melakukan kerja sama dengan pihak sekolah yang ada di kota Sawahlunto dan dinas Pendidikan Kota Sawahlunto, namun untuk tahun-tahun kedepannya akan di upayakan kerja sama dengan Instansi terkait sehingga keseluruhan data kenakalan Remaja akan bisa terpantau dan terselesaikan dengan sempurna.

b. Predikat Kota Layak Anak Di Kota Sawahlunto

Tabel 2.97
Prediket kota Layak Anak Kota Sawahlunto Tahun 2015- 2019

| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---------------------|-------|---------------------|-------|--------|--------|
| Tidak ada penilaian | Madya | Tidak ada Penilaian | Madya | Nindya | Nindya |

Sumber : Dinas Sosial dan PMDPPA



Dalam perwujudan pemenuhan dan perlindungan hak anak yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sementara di Kota Sawahlunto diatur dalam Perda Nomor 14 Tahun 2014 tentang perlindungan Perempuan dan Anak, maka dikembangkan Program Kota Layak anak yang terdiri dari Kelembagaan dan 5 Klaster pemenuhan hak anak, yaitu : 1. Hak sipil dan Kebebasan, 2. Lingkungan Keluarga dan pengasuhan alternatif, 3. kesehatan dasar dan kesejahteraan, 4. Pendidikan, 5. Pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya serta perlindungan khusus. Dalam penilaian KLA terdiri dari prediket pratama, Madya, Nindya, Utama, khusus untuk kota Sawahlunto baru mencapai pada tingkatan Nindya, seperti yang tergambar dalam tabel di atas.

2.3.2.3. Urusan Pangan

Pangan merupakan kebutuhan dasar utama bagi manusia yang mempunyai arti yang sangat penting bagi kehidupan suatu bangsa dan harus dipenuhi setiap saat. Pemenuhan kebutuhan pangan yang cukup dan terjangkau oleh seluruh penduduk dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan telah menjadi salah satu tujuan utama pembangunan nasional. Dalam mewujudkan ketahanan pangan ini dapat dilihat dari nilai pola pangan harapan (PPH) di suatu daerah. Pola Pangan Harapan (PPH) merupakan instrument untuk mengukur pemenuhan keberagaman dan keseimbangan konsumsi pangan. Semakin tinggi skor PPH suatu daerah, maka konsumsi pangan semakin beragam dan bergizi seimbang (maksimal 100).

Keragaman dan keseimbangan konsumsi pangan pada tingkat keluarga akan menentukan kualitas konsumsi pada tingkat wilayah baik kabupaten/kota, propinsi dan nasional. Kualitas konsumsi pangan penduduk ditingkat wilayah (makro) ini dicerminkan dengan skor Pola Pangan Harapan (PPH), sedangkan ditingkat keluarga dan individu, asupan makanan sesuai prinsip konsumsi pangan Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA) untuk memenuhi kebutuhan zat gizi dapat diketahui dengan melakukan penilaian konsumsi pangan, melalui pendekatan penghitungan porsi. Dalam pasal 60 UU No. 18 tahun 2012 disebutkan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban mewujudkan penganekaragaman konsumsi pangan untuk memenuhi kebutuhan gizi masyarakat. Untuk Kota Sawahlunto konsumsi, keberagaman pangan dan pola pangan harapan berdasarkan hasil survei seperti pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.98
Konsumsi, Keragaman Pangan dan Pola Pangan Harapan Hasil Survei Tahun 2018 dan 2019

| No | Kelompok Pangan | Survei Analisis Konsumsi Pangan Tahun | | | | | |
|----|---------------------|---------------------------------------|-------|--------------|-------|-------------|-------------|
| | | kkal/kap/hari | | gr/kap/hari | | skor PPH | |
| | | 2018 | 2019 | 2018 | 2019 | 2018 | 2019 |
| 1. | Padi-padian | 907,7 | 870,2 | 252,0 | 241,8 | 22,7 | 20,2 |
| 2. | Umbi-umbian | 66,2 | 35,9 | 76,4 | 40,6 | 1,7 | 0,8 |
| 3. | Pangan hewani | 290,0 | 231,1 | 236,4 | 174,9 | 24 | 21,5 |
| 4. | Minyak dan Lemak | 279,9 | 350,8 | 31,0 | 40,3 | 5 | 5,0 |
| 5. | Buah/Biji Berminyak | 36,3 | 49,6 | 19,0 | 137,1 | 0,9 | 1,0 |
| 6. | Kacang-kacangan | 98,5 | 80,6 | 29,8 | 23,2 | 9,9 | 7,5 |
| 7. | Gula | 24,1 | 39,4 | 6,6 | 10,8 | 0,6 | 0,9 |
| 8. | Sayur dan Buah | 90,3 | 126,8 | 266,0 | 331,1 | 22,6 | 29,5 |
| 9. | Lain-lain | 9,3 | 9,6 | 3,1 | 3,2 | 0,0 | 0,0 |
| | Total | 1802,2 | | 920,3 | | 87,3 | 86,5 |

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan

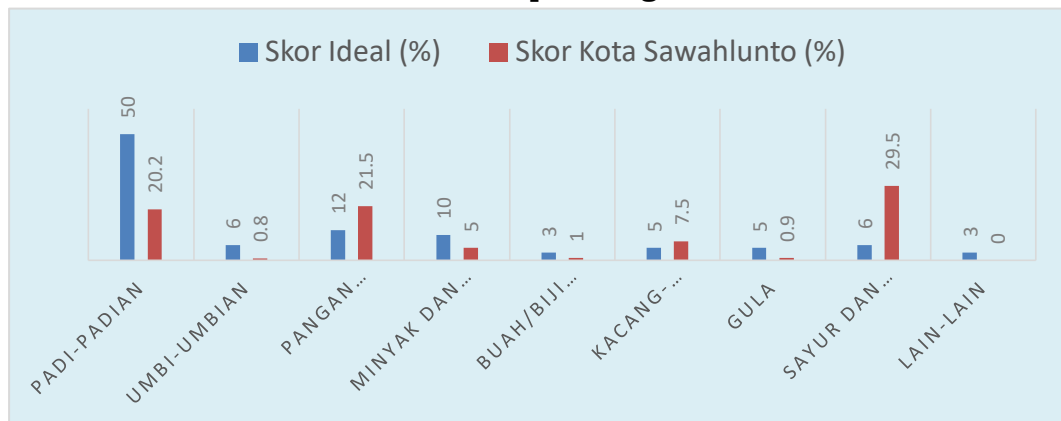
Dilihat dari tabel diatas berdasarkan hasil survey analisa konsumsi pangan skor PPH untuk tahun 2019 mengalami penurunan, dimana di tahun 2019 skor PPH Kota Sawahlunto 86,5. Penurunan ini terjadi pada setiap kelompok pangan kecuali pada sayur dan buah, gula dan buah/biji berminyak. Proporsi keseimbangan energi dari berbagai kelompok pangan untuk memenuhi kebutuhan



gizi sangat berpengaruh terhadap skor PPH suatu daerah, sehingga untuk mencapai skor PPH yang ideal, masyarakat harus dapat melakukan diversifikasi konsumsi pangan, caranya dengan meningkatkan konsumsi pangan khususnya umbi-umbian sumber protein, kacang-kacangan, sayur dan biji melalui penerapan pola konsumsi pangan yang beragam Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA). Selain itu juga telah dilakukan pemanfaatan pekarangan melalui Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) untuk pengembangan pangan lokal sebagai sumber karbohidrat non beras dan edukasi kepada masyarakat untuk mendorong terwujudnya konsumsi pangan masyarakat yang beragam bergizi seimbang dan aman. Untuk meningkatkan kesadaran dalam penerapan konsumsi pangan yang beragam dan seimbang berbasis pangan lokal secara rutin telah diselenggarakan lomba cipta menu berbasis bahan pangan lokal. Lomba cipta menu kedepannya lebih diarahkan pada olahan pangan lokal bernilai komersil sehingga produksinya dapat lebih dikembangkan. Melalui berbagai program/kegiatan yang dilaksanakan diharapkan dapat merubah mindset masyarakat dalam mengkonsumsi pangan yang lebih beragam bergizi seimbang sesuai kebutuhan pangan dan aman.

Penilaian terhadap konsumsi pangan penduduk secara kuantitas dapat ditunjukkan melalui volume konsumsi pangan penduduk (gram/kap/hari dan kg/kap/hari), konsumsi energi penduduk (kcal/kap/hari) dan konsumsi protein penduduk (gram/kap/hari). Adapun perbandingan untuk penilaian terhadap konsumsi pangan secara kuantitas Kota Sawahlunto dengan skor idealnya adalah sebagai berikut :

Grafik 2.20
Perbandingan Konsumsi dan Keragaman Pangan Pola Harapan Ideal
Berdasarkan Kelompok Pangan Tahun 2019



Sumber : Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan

Dilihat dari grafik diatas untuk kelompok pangan hewan, kacang-kacangan dan sayur dan buah berada diatas kondisi idealnya sedangkan untuk kelompok pangan padi-padian, umbi-umbian, minyak dan lemak, buah/biji, gula dan lain-lain masih dibawah skor idealnya. Ini berarti yang menjadi permasalahan pada konsumsi pangan di Kota Sawahlunto adalah kelompok-kelompok pangan yang jauh dari skor idealnya, sehingga sangat perlu usaha-usaha melalui program/kegiatan dalam meningkatkan konsumsi masing-masing kelompok pangan tersebut. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi konsumsi pangan tersebut adalah :

1. Besar anggota keluarga, semua program masyarakat perlu menekan pentingnya keluarga berencana dalam pembatasan penduduk, sehingga dapat menekan cukup pangan guna menyediakan zat gizi yang diperlukan untuk pertumbuhan kesehatan keluarga. Bila Keluarga Berencana terwujud maka ketersediaan konsumsi pangan akan terpenuhi sehingga status gizi akan lebih baik sehinggadapat ditunjukkan untuk meningkatkan skor PPH.
2. Pengetahuan Gizi
3. Tingkat Pendidikan
4. Pengeluaran pangan rumah tangga
5. Pantangan makan



2.3.2.4. Urusan Pertanahan

Program Kegiatan Pertanahan yang dilaksanakan disusun sebagai upaya yang strategis pemerintah Kota Sawahlunto dalam mengendalikan tata administrasi pertanahan dan tata batas wilayah dengan tetap memperhatikan prinsip yang efektif dan efisien serta tetap menjaga stabilitas dan kondisi yang aman dan nyaman dalam penguasaan status hak atas tanah dengan meminimalisir timbulnya konflik dan masalah pertanahan dan tapal batas wilayah Kota Sawahlunto.

Secara nasional isu pemberitaan bidang pertanahan terfokus pada pengelolaan hutan, alih fungsi hutan dan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Di Kota Sawahlunto, selain isu nasional tersebut, masih terdapat beberapa isu lainnya yang meliputi;

- a. Isu adanya 25 (dua puluh lima) dari 37 (tiga puluh tujuh) Desa/Kelurahan yang berada di Kota Sawahlunto seluas \pm 8.970,37 Ha lahan atau 3,62 % dari Luas Kota Sawahlunto berada dalam kawasan hutan, hal ini mendatangkan persoalan khusus yang harus dihadapi karena sebagian besar berada di pusat-pusat pemukiman dan sentra ekonomi masyarakat, hal ini dibutuhkan pemikiran dan kebijakan khusus serta program inovasi dalam penataan lahan dan untuk memperoleh kepastian hukum hak atas tanah di atasnya.
- b. Isu adanya penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah (P4T) Tanah Ulayat Nagari dan Kaum dari 10 (Sepuluh) Nagari yang ada di Kota Sawahlunto, belum pernah dilakukan inventarisasi dan identifikasi, saat ini baru diperoleh data awal penguasaan tanah ulayat dan kaum sebanyak 1500 persil tanah dari 2 (dua) Nagari, sementara 8 (delapan) Nagari lainnya belum diketahui sampai saat ini. Hal ini perlu dilakukan inventarisasi khusus.
- c. Isu penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah (P4T) Tanah Pasca Tambang yang masih belum jelas penyelesaian status haknya, munculnya isu ini dipicu dengan akan berakhirnya IUP PT.BA Pertambangan Ombilin di Kota Sawahlunto pada tahun 2019 sehingga isu ini sangat berpotensi sebagai bom waktu yang sangat serius terutama adanya kepentingan-kepentingan banyak pihak, baik PT.BA, Pemerintah Daerah, Ulayat Nagari dan masyarakat banyak yang selama ini memanfaatkan dan menguasai tanah pasca tambang tersebut melalui SIPT dan sewa pakai dari PT.BA (Persero) UPO.Tbk. Kondisi ini tentu tidak bisa dibiarkan, dan harus diantisipasi dengan melakukan dialog-dialog dan sosialisasi yang intensif, terutama dengan masyarakat adat, dan dilakukan kebijakan-kebijakan yang inovatif dengan menjalin komunikasi dan kerja sama dengan pihak PT.BA dalam pemanfaatan aset-aset pasca tambang yang saling menguntungkan semua pihak tanpa menerobos regulasi dan aturan hukum yang telah ada.
- d. Isu adanya persoalan-persoalan penyerahan P3D khususnya yang menyangkut tanah Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi ke Pemerintah Propinsi maupun sebaliknya terkait dengan diundangkannya PP No. 44 tahun 1990 tentang perluasan wilayah daerah.
- e. Isu adanya persoalan-persoalan tapal batas pasca diundangkannya PP No 44 tahun 1990 Tentang Perluasan Wilayah Daerah Kota Sawahlunto pada 27 tahun yang silam tanah pemda yang sudah dibebaskan tetapi belum dimanfaatkan, adanya tanah pemda yang dipakai oleh Instansi vertikal dan masyarakat umum.
- f. Isu adanya kebutuhan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum dan pembangunan infrastruktur daerah
- g. Isu banyaknya tanah yang telah dikuasai tidak terpelihara dan termanfaat (Penatagunaan Tanah) sementara karena belum adanya kepastian hukum.

**2.3.2.5. Urusan Lingkungan Hidup****2.3.2.5.1. Perencanaan Tata Kelola Lingkungan**

Perencanaan Tata Kelola Lingkungan diperlukan untuk memetakan potensi, masalah lingkungan hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu. Dokumen Rencana tata kelola Lingkungan Antara lain Daya Dukung daya Tampung Lingkungan Hidup (DDDTLH), Rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (RPPLH), Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dan dokumen lingkungan lainnya yang disusun oleh pemerintah di tingkat nasional, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota.

2.3.2.5.2. Persentase penanganan sampah.

Mobilisasi sampah dari tingkat *user interface* menuju TPA Kayu Gadang, sepenuhnya di kelola oleh Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Pertanahan dan Lingkungan Hidup (DPKP2LH). Sedangkan sampah pasar Silungkang dan pasar Talawi pemungutan retribusinya dilakukan oleh KAN setempat sementara pengumpulan dan pembuangannya tetap oleh DPKP2LH. Cakupan pelayanannya adalah:

- 1) Sudah dilayani : 68% atau 24 desa/kelurahan
- 2) Belum terlayani : 32% atau 13 desa/kelurahan

Berdasarkan kemampuan operasional sarana angkutan yang ada, sampah yang terangkut ke TPA Kayu Gadang sebanyak 25-30 m³/hari, sementara timbulansampah per harisekitar 45 m³/hari (± 45.235. Kg/hari). Berikut adalah volume timbulan sampah dan yang dikelola di TPA, yaitu:

Tabel 2.105
Pengelolaan Persampahan Kota Sawahlunto Tahun 2014-2018

| Pengelolaan | Jumlah | | | | |
|--|--------|--------|--------|--------|--------|
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| Timbulansampahkota (M ³ /hari) | 149,02 | 150,47 | 151,95 | 153,50 | 153,50 |
| Rata-rata Timbulan (M ³ /hari) | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| Jumlah sampha terolah TPA dan TPST (M ³) | 42 | 42 | 46 | 81 | 81 |
| Persentase Sampah Terolah dengan Timbulan Sampah (%) | 28,18 | 27,91 | 30,27 | 52,77 | 52,77 |

Sumber : DPKP2LH Kota Sawahlunto

Timbulan Sampah Kota Sawahlunto pada tahun 2014 sebanyak 149.02 M³/hari, sedangkan tahun 2018 terjadi peningkatan, dengan jumlah 153,50 M³/hari. Sedangkan yang sampah yang terolah di TPA dan TPST pada tahun 2017 meningkat dari 42 M³/hari menjadi 81 M³/hari sehingga sampah yang tidak terangkut pada umumnya menumpuk di Tempat Penampungan Sementara yang ada baik di desa – desa maupun dipinggiran perkotaan yang belum terjangkau pelayanan. Tingkat pelayanan sampah yang terolah meningkat dari 28,18% menjadi 52,77% di tahun 2018.

Salah satu upaya yang perludilakukan adalah dengan membentuk Kader Pengomposan Sampah desa yang mampu mengolah sampah di lokasinya sendiri. Dalam mengelola sampah tersebut sarana prasarana operasional yang sepenuhnya dikelola DPKP2LH adalah berupa:

Tabel 2.106
Sarana Dan Prasarana Persampahan Tahun 2014-2018

| NO. | JENIS SARANA | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Ket |
|-----|--------------------------|------|-------|------|------|------|-------------|
| 1 | TPA Lontiek Maloweh (Ha) | 2 | 2 | 2 | - | - | Tidak aktif |
| 2 | TPA Kolok Nan Tuo (Ha) | 1,50 | 1,50a | 1,50 | 1,50 | 1,50 | Tidak aktif |



| NO. | JENIS SARANA | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Ket |
|-----|-------------------------|----------|---------|---------|---------|---------|-----------------------------|
| 3 | TPA KayuGadang (Ha) | 5 | 5 | 5 | 9,7 | 9,7 | Dijadikan Sanitary Landfill |
| 4 | TPST (unit) | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | |
| 5 | TPS | | | | | | |
| 6 | Truck Sampah | | | | | | |
| a | Arm Roll Truck (unit) | 3 unit | 3 unit | 3 unit | 3 unit | 3 unit | |
| b | Dump Sampah (unit) | 4 unit | 4 unit | 4 unit | 4 Unit | 4 Unit | |
| 7 | Container (unit) | 24 unit | 17 unit | 17 unit | 17 Unit | 17 Unit | |
| 8 | BakSampah (buah) | 14 buah | 14 buah | 14 buah | 30 Buah | 30 Buah | |
| 9 | Drum/Tong Sampah (buah) | 344 buah | | | | | |
| 10 | GerobakSampah (unit) | 7 unit | 10 unit | 10 unit | 10 unit | 10 unit | |
| 12 | Becak Motor (unit) | 13 unit | 11 unit | 18 unit | 22 Unit | 22 Unit | |
| 13 | Petugas K3 (orang) | 48 | 48 | 152 | | | |
| 14 | Bulldozer | 1 unit | 2 unit | 2 unit | 1 unit | 1 unit | |
| 15 | Incenerator | 2 unit | 2 unit | 3 unit | 4 unit | 4 unit | 2 rusak 2 baik |
| 16 | MesinKompos | 1unit | 1 unit | 5 unit | 5 unit | 5 unit | |
| 18 | Excavator | 1 unit | 2 unit | 2 unit | 2 unit | 2 unit | |

Sumber : Profil Daerah Kota Sawahlunto

Kondisi sarana dan prasarana persampahan di Kota Sawahlunto ini sudah perlu ditingkatkan terutama pengadaan Truck Sampah dan armroll truk karena sudah berusia tua. Saat ini TPA Kayu Gadang telah ditingkatkan metode pemusnahan sampah dari sistim control landfield menjadi sanitary landfield melalui dana APBN tahun 2014 dan 2015.

Salah satu masalah persampahan yang cukup rumit adalah pengadaan dan pengelolaan fasilitas Tempat Penampungan Sampah Sementara (TPSS) yang layak secara teknis. Keberadaan TPSS selain dapat menampung timbulan sampah yang dihasilkan juga harus dapat meminimalisasi bahaya yang mungkin timbul akibat penimbunan sampah secara tidak beraturan.

2.3.2.5.3. Rasio Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPSS)

Sebelum sampah diangkut/dibuang ke TPA, terlebih dahulu sampah dikumpulkan di beberapa lokasi TPSS yang sudah ditentukan. Rasio Jumlah TPSS di Kota Sawahlunto dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.107
Rasio Jumlah TPSS Di Kota Sawahlunto Tahun 2014-2018

| No | Uraian | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|----|---|--------|--------|--------|--------|--------|
| 1 | Jumlah TPSS (unit) | 112 | 344 | 344 | 344 | 344 |
| 2 | Jumlah Daya Tampung TPSS (m ³) | 48,70 | 147,92 | 147,92 | 147,92 | 147,92 |
| 3 | Jumlah Penduduk (jiwa) | 59.608 | 62.112 | 63.560 | 63.560 | 63.560 |
| 4 | Rasio Daya Tampung TPSS thd Jumlah penduduk (m ³ /1000 jiwa) | 0,87 | 2,38 | 2,32 | 2,32 | 2,32 |

Sumber : DPKP2LH, 2019



Jumlah TPSS di Kota Sawahlunto tahun 2014 sebanyak 112 unit dengan daya tampung 48.70 m³, pada tahun 2018 naik menjadi 344 dengan daya tampung 147.92 m.

2.3.2.6. Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

2.3.2.6.1. Penduduk Yang Sudah Terdaftar Dalam Catatan Sipil

Pada tahun 2019 jumlah penduduk yang sudah memiliki KTP-el sebanyak 45.865 orang. Sedangkan yang belum mempunyai KTP-el pada tahun 2019 hanya 1.789 orang. Penduduk yang sudah memiliki KK pada tahun 2019 yaitu dari 19.818 KK. Jumlah penduduk yang belum memiliki akta lahir pada tahun 2019 29.378 orang, Penduduk yang memiliki Akte perkawinan pada tahun 2019 25.773, yang tidak memiliki Akte Perkawinan sebanyak 4.548, Penduduk yang memiliki Akte kematian adalah sebanyak 417 dan yang tidak memiliki akte kematian 0 sebagaimana yang tertera pada table berikut ini :



PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO

Tabel 2.108
Data Kepemilikan Kartu Keluarga Tahun 2019

| No | Kecamatan | Jumlah kepala keluarga | | | Jumlah penduduk memiliki kartu keluarga | | | Jumlah penduduk tidak memiliki kartu keluarga | | |
|----|------------------|------------------------|--------------|---------------|---|--------------|---------------|---|-----------|----------|
| | | Laki-laki | Perempuan | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | Jumlah |
| 1 | Lembah segar | 3,352 | 870 | 4,222 | 3,352 | 870 | 4,222 | - | - | |
| 2 | Barangin | 4,993 | 1,146 | 5,139 | 4,993 | 1,146 | 5,139 | - | - | |
| 3 | Silungkang | 2,716 | 748 | 3,464 | 2,716 | 748 | 3,464 | - | - | - |
| 4 | Talawi | 4,990 | 1,003 | 5,993 | 4,990 | 1,003 | 5,993 | - | - | - |
| | T o t a l | 16,051 | 3,767 | 19,818 | 16,051 | 3,767 | 19,818 | - | - | - |

Sumber : Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Sawahlunto 2019

Tabel 2.109
Data Kepemilikan KTP-Elektronik di Kota Sawahlunto Tahun 2019

| No | Kecamatan | Jumlah Wajib KTP | | | Jumlah Penduduk Memiliki KTP -E1 | | | Jumlah Penduduk Tidak Memiliki KTP-E1 | | |
|----|------------------|------------------|---------------|---------------|----------------------------------|---------------|---------------|---------------------------------------|------------|--------------|
| | | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
| 1 | Lembah Segar | 5,049 | 5,206 | 10,255 | 4,864 | 5,051 | 9,915 | 185 | 155 | 340 |
| 2 | Barangin | 7,211 | 7,350 | 14,561 | 6,887 | 7,078 | 13,965 | 324 | 272 | 596 |
| 3 | Silungkang | 4,132 | 4,143 | 8,275 | 3,907 | 3,992 | 7,899 | 225 | 151 | 376 |
| 4 | Talawi | 7,255 | 7,308 | 14,563 | 7,002 | 7,084 | 14,086 | 253 | 224 | 477 |
| | T O T A L | 23,647 | 24,007 | 47,654 | 22,660 | 23,205 | 45,865 | 987 | 802 | 1,789 |

Sumber : Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Sawahlunto 2019



PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO

Tabel 2.110
Data Kepemilikan Akta Kelahiran Tahun 2019

| No | Kecamatan | Jumlah Penduduk | | | Jumlah Penduduk Memiliki Akta Kelahiran | | | Jumlah Penduduk Tidak Memiliki Akta Kelahiran | | |
|----|--------------|-----------------|---------------|---------------|---|---------------|---------------|---|---------------|---------------|
| | | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
| 1 | LEMBAH SEGAR | 7,070 | 7,073 | 14,143 | 3,965 | 3,945 | 7,910 | 3,105 | 3,128 | 6,233 |
| 2 | BARANGIN | 10,266 | 10,208 | 20,474 | 5,979 | 5,963 | 11,942 | 4,287 | 4,245 | 8,532 |
| 3 | SILUNGKANG | 5,979 | 5,841 | 11,820 | 3,167 | 2,996 | 6,163 | 2,812 | 2,845 | 5,657 |
| 4 | TALAWI | 10,323 | 10,093 | 20,416 | 5,830 | 5,630 | 11,460 | 4,493 | 4,463 | 8,956 |
| | TOTAL | 33,638 | 33,215 | 66,853 | 18,941 | 18,534 | 37,475 | 14,697 | 14,681 | 29,378 |

Sumber : Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Sawahlunto 2019

Tabel 2.111
Data Kepemilikan Akta Perkawinan Di Kota Sawahlunto Tahun 2019

| No | Kecamatan | Jumlah Penduduk Status Kawin | | | Jumlah Penduduk Memiliki Akta Perkawinan | | | Jumlah Penduduk Tidak Memiliki Akta Perkawinan | | |
|----|--------------|------------------------------|---------------|---------------|--|---------------|---------------|--|--------------|--------------|
| | | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
| 1 | LEMBAH SEGAR | 3,109 | 3,146 | 6,255 | 3.130 | 2,110 | 5.240 | 312 | 703 | 1.015 |
| 2 | BARANGIN | 4,691 | 4,689 | 9,380 | 4.373 | 3.425 | 7.798 | 747 | 835 | 1.582 |
| 3 | SILUNGKANG | 2,536 | 2,553 | 5,089 | 2.266 | 2.120 | 4.386 | 245 | 453 | 703 |
| 4 | TALAWI | 4,771 | 4,826 | 9,597 | 4.224 | 4.125 | 8.349 | 790 | 458 | 1.248 |
| | TOTAL | 14,571 | 14,868 | 30.321 | 15.046 | 11.975 | 25.773 | 3,209 | 4,060 | 4.548 |

Sumber : Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Sawahlunto 2019



Tabel 2.112
Data Kepemilikan Akta Kematian Tahun 2019

| No | Kecamatan | Jumlah Penduduk Mati | Jumlah Penduduk Memiliki Akta Kematian | Jumlah Penduduk Tidak Memiliki Akta Kematian |
|--------------|--------------|----------------------|--|--|
| 1 | LEMBAH SEGAR | 103 | 103 | 0 |
| 2 | BARANGIN | 138 | 138 | 0 |
| 3 | SILUNGKANG | 78 | 78 | 0 |
| 4 | TALAWI | 98 | 98 | 0 |
| TOTAL | | 417 | 417 | 0 |

Sumber : Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Sawahlunto 2019

Dari tabel tersebut dapat kita lihat bahwa kesadaran penduduk Kota Sawahlunto akan pentingnya administrasi kependudukan dan catatan sipil sudah baik, hal ini juga tidak terlepas dari usaha pemerintah dalam mensosialisasikan dan menghimbau seluruh penduduk Kota Sawahlunto untuk melengkapi administrasi kependudukannya.

2.3.2.7. Urusan Komunikasi & Informatika

Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) merupakan suatu kebutuhan bagi suatu organisasi, dalam mendukung kegiatan-kegiatan organisasi dalam pencapaian tujuannya, termasuk juga tentunya dalam lingkungan Pemerintahan. Banyak peluang dan nilai tambah yang bisa diperoleh khususnya berkaitan dengan peningkatan mutu proses kerja di bidang pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Selain untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas, penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi juga merupakan suatu langkah penting untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas organisasi. *Good governance* di lingkungan pemerintahan harus dimulai dengan penataan sistem manajemen dan proses kerja yang terpadu atau modernisasi di bidang administrasi Pemerintah Daerah agar dapat mengaplikasikan telekomunikasi, multimedia dan informatika yang tepat guna pada akhirnya diharapkan dapat mencapai tujuan utama, yaitu peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Berikut ini Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan komunikasi dan informatika dapat dilihat dari tabel berikut:



Tabel 2.113
Jumlah Layanan Komunikasi Dan Informasi Tahun 2019

| NO | URAIAN | 2019 |
|----|--------------------------------|-------|
| 1 | Jumlah Kantor Pos (unit) | 4 |
| 2 | Jumlah Sambungan Telepon (SST) | 1.426 |
| 3 | Jumlah Warnet(unit) | 29 |

Sumber : BPS Kota Sawahlunto

Dari tabel tersebut dapat dirinci bahwa Kantor Pos cabang sebanyak 2 unit dan Kantor Pos Pembantu sebanyak 2 unit, sementara jumlah Warnet pada tahun 2019 yakni 29 unit. Hal ini disebabkan karena banyaknya masyarakat Kota Sawahlunto yang telah menggunakan layanan internet di rumah masing-masing sehingga tidak perlu lagi ke warnet untuk menggunakan Internet sedangkan sambungan telepon (SST) juga tidak mengalami kenaikan dan penurunan dari tahun 2015-2019 yaitu 1.426 unit.

Pada tahun 2017 telah dilaksanakan Penyusunan Grand Design Smart City Kota Sawahlunto yang dilaksanakan oleh Konsultan PT. Pilar Cipta Solusi Integratika, pada penyusunan tersebut telah dilakukan survey kondisi eksisting: jaringan internet, Local Area Network (LAN), ketersediaan komputer dan perangkat pendukung, spesifikasi hardware (perangkat keras), sistem informasi eksisting, kondisi sumber daya manusia, anggaran TIK, kondisi ideal dan GAP analisis.

Dari hasil survey tersebut disusunlah konsep smart city Kota Sawahlunto yang mencakup arah pengembangan smart city, blue print pengembangan infrastruktur TIK, blue print pengembangan aplikasi dan integrasi, blue print pengembangan sumber daya manusia, blue print tata kelola TIK, blue print pemeliharaan sistem dan perencanaan anggaran untuk 5 tahun ke depan. Untuk penerapannya telah disusun Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penerapan Grand Design Smart City Kota Sawahlunto.

Teknologi informasi dan komunikasi yang saat ini berkembang sangat pesat menuntut kesiapan pengguna dalam hal ini Pemerintah Daerah dalam memberikan layanan informasi yang mutakhir. Terbatasnya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia dalam pengelolaan teknologi informasi menjadikan kurang efektifnya pemanfaatan sarana dan prasarana teknologi informatika. Selain itu perlunya peningkatan kerja sama informasi dengan berbagai media massa baik cetak maupun elektronik dalam menyampaikan program dan kebijakan pemerintah sehingga dapat terwujud komunikasi dua arah antara pemerintah dengan masyarakat secara intens untuk mendukung pembangunan daerah.



Tabel 2.114
OPD Yang Sudah Memiliki Website

| Tahun | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|----------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Jumlah OPD Yang Memiliki Website | 6 | 8 | 9 | 10 | 10 |
| % | 21,43% | 28,57% | 32,14% | 38,46% | 38,46% |

Sumber : Bag. Humas Setdako Kota Sawahlunto

Web Pemerintah Daerah merupakan salah satu media informasi dan komunikasi dari suatu Pemerintah Daerah kepada masyarakat/publik mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan pemerintahan. Bentuk penyajian informasi memanfaatkan perkembangan teknologi informasi komunikasi, yaitu perubahan dari bentuk buku (publikasi konvensional) ke bentuk publikasi elektronik (media baru) melalui internet. Dilihat dari tahun ke tahun perangkat daerah dilingkungan Pemerintah Kota Sawahlunto mengalami kenaikan yang sudah memiliki website.

Tabel 2.115
Data Desa/Kel Yang Terkoneksi Internet di Kota Sawahlunto

| Tahun | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|--------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Jumlah Desa Yang Terkoneksi Internet | 14 | 20 | 21 | 21 | 21 |
| Jumlah Desa | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
| % | 37,83 | 54,05 | 56,75 | 56,75 | 56,75 |

Sumber : Bag. Humas Setdako Kota Sawahlunto

Internet sebagai salah satu sumber informasi bukan lagi menjadi sesuatu yang hanya dikenal di masyarakat perkotaan, namun masyarakat pedesaan pun telah mulai mengenal dan menggunakan internet itu sendiri. Penggunaan fasilitas internet di desa masih sangat terbatas, tidak seperti di perkotaan yang sudah maju. Hal ini disebabkan kurangnya infrastruktur telekomunikasi di desa. Sehingga untuk mengatasi hal ini, secara perlahan peran serta pemerintah menjadi sangat penting dalam rangka memberikan fasilitas internet di desa. Dapat dilihat pada tabel diatas peningkatan desa yang terkoneksi internet di Kota Sawahlunto sudah mencakup 21 desa/kel dari 37 desa/Kel yang ada di Kota Sawahlunto.

Tabel 2.116
Data OPD Yang Sudah Memiliki Aplikasi

| Tahun | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|-----------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Jumlah OPD Yang Memiliki Aplikasi | 4 | 5 | 7 | 11 | 11 |
| % | 14,29 | 17,86 | 25,00 | 42,31 | 42,31 |

Sumber : Bag. Humas Setdako Kota Sawahlunto

Sistem Informasi (Aplikasi) yang dikembangkan dalam pemerintahan membuat masyarakat semakin mudah dalam mengakses kebijakan pemerintah



sehingga program yang dirancang pemerintah dapat berjalan dengan lancar. Sistem Informasi (Aplikasi) juga dapat mendukung pengelolaan pemerintahan yang lebih efisien, dan bisa meningkatkan komunikasi antara pemerintah dengan berbagai sektor. Disamping itu juga masyarakat dapat memberi masukan mengenai kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah sehingga dapat memperbaiki kinerja pemerintah. Dilihat dari tahun ke tahun perangkat daerah dilingkungan Pemerintah Kota Sawahlunto mengalami kenaikan yang sudah memiliki Sistem Informasi (Aplikasi).

Tabel 2.117
Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

| Tahun | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|--------|------|------|------|------|------|
| Indeks | N/A | N/A | N/A | 2,02 | 2,02 |

Sumber : Bag. Humas Setdako Kota Sawahlunto

Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, yang selanjutnya disingkat SPBE, di Pemerintah Daerah ditujukan untuk mewujudkan proses kerja yang efisien, efektif, transparan dan akuntabel serta meningkatkan kualitas pelayanan publik. Agar pelaksanaan SPBE dapat berjalan untuk mencapai tujuannya, maka perlu dilakukan evaluasi secara berkala untuk mengetahui sejauh mana kemajuan dari pelaksanaan SPBE tersebut. Pelaksanaan SPBE baru dimulai pada tahun 2018 dengan mengevaluasi pelaksanaan SPBE tahun 2017.

2.3.2.8. Urusan Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah

Perkembangan usaha koperasi didasarkan pada peran aktif anggota didalam koperasi bukan hanya bertumpu pada pengurus koperasi, selain itu juga peranan pemerintah dan masyarakat juga sangat berpengaruh terhadap perkembangan usaha koperasi, dimana koperasi merupakan salah satu sarana utama perekonomian yang difungsikan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Perkembangan koperasi salah satunya dapat dilihat dari keaktifan koperasi tersebut. Adapun perkembangan koperasi yang aktif dan tidak aktif di Kota Sawahlunto dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.118
Persentase Koperasi Aktif Kota Sawahlunto

| NO | URAIAN | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|----|------------------------------|------|-------|-------|------|------|
| 1 | Jumlah koperasi aktif (unit) | 66 | 66 | 60 | 56 | 53 |
| 2 | Jumlah koperasi (unit) | 80 | 81 | 68 | 68 | 68 |
| 3 | Persentase koperasi aktif | 82,5 | 81,48 | 88,24 | 82,4 | 77,9 |

Sumber : Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan

Dari Tahun 2015-2019 persentase koperasi yang aktif mengalami penurunan dari tahun ke tahun, terakhir di tahun 2019 sebesar 77,9 persen. Penurunan yang terjadi di tahun 2019 ini sangat signifikan dari tahun-tahun sebelumnya, ini disebabkan antara lain berubahnya indikator koperasi aktif yang ditetapkan Kementerian Koperasi dan UKM RI, yaitu apabila koperasi tidak



melaksanakan RAT 2 tahun berturut-turut, maka dianggap koperasi tersebut tidak aktif. Ini perlu kerja keras pemerintah daerah dalam mengaktifkan koperasi yang ada. Koperasi yang tidak RAT diupayakan pembenahan agar dapat menjalankan aktifitas usaha kembali namun apabila tidak bisa diaktifkan lagi akan dibubarkan oleh kementerian Koperasi dan UKM RI. Pembinaan dan pendampingan sangat diperlukan oleh koperasi dalam melaksanakan aktivitasnya. Secara modal dan keanggotaan koperasi dapat dilihat perkembangan seperti pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.119
Perkembangan Koperasi dan Permodalan Kota Sawahlunto

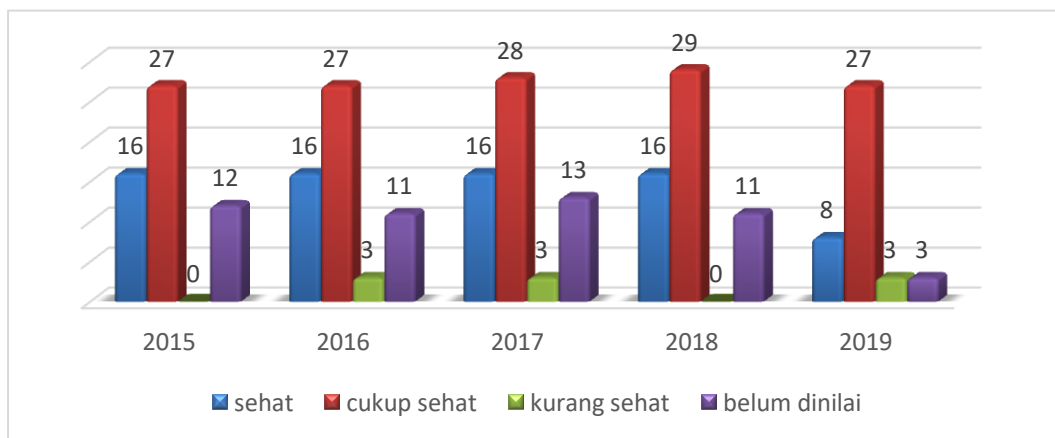
| NO | URAIAN | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|----|-----------------------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|-----------------|
| 1 | Jumlah Koperasi (unit) | 80 | 81 | 68 | 68 | 68 |
| 2 | Jumlah Koperasi Aktif | 66 | 66 | 60 | 56 | 53 |
| 3 | Jumlah Koperasi Tidak Aktif | 14 | 15 | 8 | 12 | 15 |
| 4 | Jumlah Koperasi RAT | 49 | 49 | 49 | 48 | 50 |
| 4 | Jumlah Anggota orang) | 9.128 | 10.099 | 9.377 | 9.352 | 8.972 |
| 5 | Jumlah Tenaga Kerja | 271 | 271 | 113 | 113 | |
| 3 | Volume Usaha (Rp) | 111.702.420.393 | 112.571.756.401 | 99.820.465.300 | 94.078.447.603 | 103.589.617.000 |
| 4 | Modal Sendiri (Rp) | 35.146.505.339 | 35.146.505.339 | 39.986.291.391 | 43.567.601.878 | 46.255.521.000 |
| 5 | Modal Luar (Rp) | 38.909.707.203 | 38.909.707.203 | 36.933.732.577 | 32.997.713.250 | 33.295.190.000 |
| 6 | Asset (Rp) | 79.328.495.127 | 79.328.495.127 | 76.810.551.799 | 76.565.315.128 | 79.550.711.000 |
| 7 | SHU (Rp) | 3.813.074.400 | 4.393.942.021 | 3.314.674.427 | 4.137.934.098 | 4.510.185.000 |

Sumber : Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa selama lima tahun terakhir untuk jumlah koperasi yang aktif memang mengalami penurunan yang cukup signifikan namun dilihat dari perkembangan volume usaha, modal, asset dan Sisa Hasil Usaha (SHU) mengalami kemajuan yang cukup besar di tahun 2019, ini berarti koperasi yang aktif di kota Sawahlunto rata-rata sudah memperlihatkan perkembangannya sebagaimana data terlampir pada tabel diatas. Untuk modal sendiri mengalami peningkatan di tahun 2019 yang menandakan tingginya keinginan dan kesadaran anggota dalam mengembangkan koperasi tersebut. Selain permodalan yang tidak kalah penting adalah faktor sumber daya manusia yang berkompeten dalam mengurus koperasi. Untuk itu fasilitasi Pemerintah Daerah dan kerjasama dengan dunia usaha dinilai perlu ditempuh untuk mengoptimalkan potensi koperasi dan UKM yang telah ada. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia melakukan penilaian terhadap koperasi khususnya koperasi simpan pinjam sesuai dengan Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia nomor : 6/Per/Dep.6/IV/2016 tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam Dan Unit Simpan Pinjam Koperasi. Perkembangan koperasi sehat ini dari tahun 2015 – 2019 dapat dilihat pada grafik dibawah ini:



Grafik 2.21
Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kota Sawahlunto
Tahun 2015 dan 2019 (koperasi)



Sumber : Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan

Dari grafik diatas dapat dijelaskan bahwa untuk koperasi sehat yang ada di kota Sawahlunto mengalami penurunan di tahun 2019 dan kondisi koperasi secara keseluruhan yang ada di Kota Sawahlunto dari tahun 2015-2019 rata-rata masih dalam kondisi cukup sehat, ini berarti sangat perlu peningkatan pengawasan terhadap koperasi. Berdasarkan peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia nomor : 17/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang pengawasan koperasi bahwa yang melaksanakan pengawasan koperasi ini adalah Walikota. Adapun sasaran dari pengawasan koperasi ini adalah:

- terwujudnya peningkatan kepatuhan koperasi terhadap peraturan perundang-undangan;
- terbentuknya koperasi yang kuat, sehat, mandiri dan tangguh;
- terwujudnya koperasi yang akuntabel

dengan ketiga sasaran dari pengawasan tersebut, maka akan tercipta koperasi yang sehat. Untuk itu sangat perlu peningkatan pengawasan untuk koperasi di Kota Sawahlunto dalam mewujudkan koperasi yang sehat.

Selain koperasi simpan pinjam, pada tahun 2019 telah dibentuk BLUD/UPTD Dana bergulir yang kegiatannya mengelola dana bergulir yang disalurkan kepada masyarakat Kota Sawahlunto dalam rangka penguatan modal usaha mikro kecil dan koperasi dalam memajukan usahanya sehingga dapat meningkatkan ekonomi masyarakat yang ada di Kota Sawahlunto. Untuk tahun 2019 dana yang sudah dimanfaatkan masyarakat sebanyak Rp. 385.000.000,- dari Rp. 441.000.000,- yang telah dicairkan dari kas daerah, dengan jumlah nasabah sebanyak 25 orang, selain dana yang dipinjamkan melalui BLUD/UPTD, selain itu Dinas Koperindag juga masih melakukan penagihan terhadap pinjam dana kemitraan/BDC dan Dana Bergulir. Dalam UPTD BLUD ini juga sangat perlu pengawasan dari pemerintah daerah dalam pelaksanaan kegiatannya, sehingga peningkatan ekonomi yang diharapkan dari UPTD ini dapat tercapai.



2.3.2.9. Urusan Penanaman modal

Keberhasilan pembangunan bidang penanaman modal dapat ditunjukkan melalui capaian realisasi investasi di Kota Sawahlunto melalui kebijakan menciptakan iklim usaha yang kondusif dan meningkatkan peran kinerja dan daya saing BUMD dalam pengokohan ekonomi Kota Sawahlunto. Keberhasilan tersebut dapat ditunjukkan melalui capaian realisasi investasi dibawah ini.

2.3.2.9.1. Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA)

Penanaman modal merupakan salah satu sumber biaya pembangunan yang potensial di suatu wilayah. Dengan adanya penanaman modal berskala nasional, baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri diharapkan mampu memaksimalkan potensi-potensi perekonomian wilayah dan mampu menstimulasi perkembangan pada sektor-sektor lainnya.

Tabel 2.121
Jumlah Perusahaan Yang Berinvestasi Di Kota Sawahlunto
Tahun 2015-2019

| No | Uraian | Tahun | | | | | Ket |
|----|------------------------------|-------|------|------|------|------|-----|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
| 1 | Jumlah Perusahaan (PMDN/PMA) | 66 | 185 | 168 | 158 | 19 | |

Sumber : DPMPTSPNaker, 2020

Dari data diatas dapat terlihat bahwa perkembangan jumlah perusahaan yang berusaha di Kota Sawahlunto menunjukkan perkembangan yang berfluktuatif dan pada tahun 2019 mengalami penurunan yang sangat signifikan. Hal ini disebabkan oleh mulai diberlakukannya Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission (OSS) versi 1.1 pada tanggal 4 November 2019 pukul 00.00 WIB yang menggantikan OSS versi 1.0 yang mulai aktif pada tanggal 21 Juni 2018. Yang mana perusahaan yang tidak melakukan migrasi data dari OSS versi 1.0 ke OSS versi 1.1 maka data-data perusahaannya tidak akan terbaca/tidak keluar/tidak tampil di OSS versi 1.1. Karena salah satu perbedaan mencolok antara OSS Versi 1.0 dengan OSS Versi 1.1 adalah nilai total investasi. Pada sistem OSS Versi 1.0 total investasi perusahaan dihitung per KBLI 2 digit sehingga pelaku usaha tidak mengisi nilai investasi dalam KBLI 5 digitnya. Sedangkan pada sistem OSS Versi 1.1, total investasi dihitung per KBLI 5 digit. Penggunaan KBLI 5 digit untuk menyesuaikan dengan Daftar Negatif Investasi (DNI) serta demi kepentingan penyusunan laporan realisasi investasi per bidang usaha KBLI 5 digit. Maka dari itu pada tahun 2019 hanya 19 perusahaan yang terbaca/melakukan migrasi data di sistem OSS versi 1.1 yang melakukan investasi di Kota Sawahlunto.

2.3.2.9.2. Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)

Nilai investasi di Kota Sawahlunto sebagian besar adalah investasi dari Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan nilai investasinya dari tahun 2015 s/d 2019 mengalami penurunan hal ini disebabkan oleh mulai menurunnya usaha pertambangan di Kota Sawahlunto dan kebijakan kota yang merubah perencanaan pembangunan ke sektor pariwisata dan ekonomi kreatif.



Sedangkan peningkatan investasi pada tahun 2017 disebabkan oleh investasi pada sektor perumahan. Pada tahun 2018 mengalami penurunan lagi menjadi 86,377 milyar, sedangkan pada tahun 2019 mengalami kenaikan menjadi 200.440 milyar.

Tabel 2.122
Data Nilai Investasi Tahun 2019

| No | Nama Perusahaan | Alamat | Nilai Investasi (Rp.) |
|------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|------------------------|
| 1 | Tri Dharma Bakti | Dusun Siambalau Desa Talawi Hilie | 745.000.000 |
| 2 | CV. Fajusya Berkah | Desa Talawi Hilie | 620.000.000 |
| 3 | CV. Mutiara Hitam | Desa Salak | 505.000.000 |
| 4 | Toko Umi 2 | Desa Talawi Hilie | 500.000.000 |
| 5 | Toko Mak Ijal | Desa Kolok Mudik | 720.000.000 |
| 6 | PT. Umega Sembilan Berlian | Desa Muarokalaban | 1.000.000.000 |
| 7 | PT. Pati Buana Semesta | Desa Kubang Tengah | 100.000.000.000 |
| 8 | PT. Cahaya Energi Bumi Andalas | Desa Talawi Mudiak | 803.000.000 |
| 9 | PT. Allied Indo Coal | Tangerang Selatan | 700.000.000 |
| 10 | CV. Poly Teknik | Kel. Pasar | 500.000.000 |
| 11 | CV. Bukti Karya Sandi | Desa Sikalang | 650.000.000 |
| 12 | SRC. Azham | Desa Kubang Utara Sikabu | 620.000.000 |
| 13 | Usaha Ferdi Faisal Ramadhan | Desa Kolok Nan Tuo | 750.000.000 |
| 14 | PT. Dasrat Sarana Arang Sejati | Desa Talawi Hilie | 2.000.000.000 |
| 15 | Three Dhe Celluler | Desa Talawi Hilie | 725.000.000 |
| 16 | PT. Amro Aca Pratama | Jakarta | 61.449.505.400 |
| 17 | An Nabat Amalul Ummah | Desa Talawi Mudiak | 22.000.000.000 |
| 18 | PT. Graha Amanah Selaras | Desa Talawi Hilie | 5.600.000.000 |
| 19 | Ardhan Motor | Desa Santur | 553.000.000 |
| Total Investasi | | | 200.440.505.400 |

Tabel 2.123
Jumlah Realisasi Investasi di Kota Sawahlunto Tahun 2015-2019

| No | Jenis | Tahun/Rp. Juta | | | | |
|----|-------|----------------|---------|---------|--------|---------|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 | PMDN | 504.794 | 376.648 | 587.975 | 86.377 | 200.440 |
| 2 | PMA | - | - | - | - | - |

Sumber : DPMPSTPNaker, 2020

Target Indikator Kinerja Daerah Nilai Penanaman Modal Asing (PMA) tidak tercapai karena persoalan internal dan eksternal. Kendala eksternal antara lain adalah : 1) kesulitan perusahaan mendapatkan lahan atau lokasi proyek yang sesuai, 2) kesulitan dalam memperoleh bahan baku atau mentah yang harus diproduksi, dan 3) kesulitan dana atau pembiayaan proyek. Sedangkan kendala internal diantaranya, yaitu : 1) faktor lingkungan bisnis, baik nasional, regional ataupun secara global yang tidak mendukung serta kurang menariknya insentif atau fasilitas investasi yang diberikan pemerintah; dan 2) adanya peraturan yang tidak konsisten dengan peraturan yang lebih tinggi, seperti Peraturan Daerah, ataupun peraturan lainnya yang mendistorsi peraturan mengenai penanaman modal. Rekomendasi mendorong investasi di



Kota Sawahlunto melalui pemberian insentif atau fasilitas investasi yang menarik, dan meningkatkan konsistensi peraturan tentang penanaman modal pada setiap jenjang pemerintahan.

2.3.2.10. Urusan Kebudayaan

2.3.2.10.1. Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya

Kota Sawahlunto sebagai Kota yang memiliki keragaman seni dan budaya serta memiliki banyak seniman-seniman yang berpotensi dibidangnya. Sebagai Kota yang telah mendeklarasikan sebagai Kota Wisata Tambang yang Berbudaya, Kota Sawahlunto sering menyelenggarakan pertunjukan kesenian dan event-event di bidang seni dan budaya. Budaya-budaya yang ada berkembang menjadi kelompok-kelompok seni dan komunitas budaya. Komunitas budaya adalah kesatuan sosial yang masih memegang tradisi budaya dan mempunyai ikatan geneologis, kesadaran wilayah sebagai kesatuan daerah teritorial, dan identitas sosial dalam berinteraksi berdasarkan nilai, norma, aturan dan adat istiadat serta memiliki berbagai aktivitas sosial menurut pola tertentu. Berikut ini data komunitas budaya yang ada dan berkembang, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.124
Komunitas Budaya yang ada di Kota Sawahlunto

| No | Nama Komunitas | Jumlah |
|-------------------------------|---|-----------|
| 1. | Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) | 1 |
| 2. | Bundo Kandung Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau | 1 |
| 3. | Kerapatan Adat Nagari (KAN) | 10 |
| 4. | Bundo Kandung Kerapat Adat nagari | 10 |
| 5. | Paguyuban Jawa | 1 |
| 6. | Paguyuban Batak | 1 |
| 7. | Paguyuban Sunda | 1 |
| Total Komunitas Budaya | | 25 |

Sumber : Dinas Kebudayaan, Peninggalan Bersejarah dan Permuseuman Kota Sawahlunto, 2019

Berdasarkan informasi dari Dinas Kebudayaan, Peninggalan bersejarah dan Permuseuman, dari 25 komunitas budaya yang ada, 11 komunitas budaya yang telah aktif melaksanakan kegiatan, baik berupa acara adat dan tradisi maupun pagelaran seni dengan persentase sebesar 44%, sementara masih ada 14 komunitas budaya lagi yang belum aktif atau sebesar 56%, artinya masih banyak komunitas budaya yang belum mampu menggali dan mengembangkan serta melestarikan nilai-nilai dan seni budaya daerah yang akan menjadi karakter bagi masyarakat Kota Sawahlunto.

2.3.2.10.2. Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan

Kota Sawahlunto di samping memiliki kekayaan kesenian yang multietnis juga memiliki Warisan Budaya Tambang Batu Bara Ombilin Sawahlunto atau disebut WBTBOS, yang merupakan bukti dampak revolusi industri dunia Barat di wilayah Hindia Belanda. Walaupun operasi penambangan batu bara telah berhenti, namun jejak-jejak Kota tambang dengan segala tinggalannya masih terjaga dengan asri dan menjadi daya tarik tersendiri yang dimiliki Kota Sawahlunto.



Kebudayaan merupakan salah satu kekayaan daerah yang harus dijaga dan dilestarikan, sekaligus sebagai salah satu asset pusaka yang memiliki nilai-nilai kearifan lokal. Sebagai kota yang telah eksis sejak zaman Belanda, Sawahlunto memiliki banyak benda cagar budaya yang perlu dikelola dengan baik dan dijadikan sebagai salah satu keunggulan lokal yang dimiliki.

Pemerintah Kota Sawahlunto telah melakukan berbagai upaya agar bukti-bukti peninggalan tersebut tetap terawat dengan baik dan dilestarikan serta dengan ditetapkannya Geopark Sawahlunto sebagai Geopark Nasional karena sudah memenuhi persyaratan Administrasi dan Teknis sebagai Geopark Nasional Indonesia dan berkomitmen untuk mengembangkan Kawasan Geopark berdasarkan prinsip Konservasi, Edukasi dan Pemberdayaan Sosial Ekonomi Masyarakat yang diberikan di Jakarta tanggal 29 November 2018 dan berlaku sampai bulan November 2022. Sebagai komitmen, Pemerintah Daerah telah menetapkan Benda, Bangunan, Struktur dan Situs peninggalan tersebut sebagai Cagar Budaya. Adapun Benda, Bangunan, Struktur dan Situs Cagar Budaya di Kota Sawahlunto dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.125
Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya Di Kota Sawahlunto
Tahun 2015-2019

| No | Uraian | Satuan | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|----|---|--------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1. | Jumlah sarana Penyelenggaraan kesenian | Set | 7 | 7 | 9 | 9 | 20 |
| 2. | Jumlah Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang di lestarikan | Unit | 68 | 68 | 69 | 69 | 73 |
| 3. | Jumlah Total Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya Daerah | Unit | 74 | 74 | 119 | 119 | 130 |
| 4. | Persentase jumlah Benda Cagar Budaya, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang di lestarikan | Persen | 91,89 | 91,89 | 57,98 | 57,98 | 56,15 |
| 5. | Jumlah Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dikelola | Unit | 17 | 17 | 21 | 21 | 21 |
| 6. | Jumlah Total Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya Daerah | Unit | 74 | 74 | 119 | 119 | 130 |
| 7. | Persentase jumlah Benda Cagar Budaya, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dikelola | Persen | 22,97 | 22,97 | 17,65 | 17,65 | 16,15 |

Sumber : Profil Daerah Kota Sawahlunto

Tahun 2019 ada penambahan penetapan benda, bangunan, struktur dan situs serta kawasan cagar budaya sebanyak 11 cagar budaya, sehingga keseluruhan berjumlah 130 cagar budaya, yang sudah dilestarikan sebanyak 73 cagar budaya sementara yang belum dilestarikan sebanyak 50 cagar budaya lagi sehingga Persentase jumlah benda cagar budaya, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan sebesar 56,15%. Kalau dilihat dari data persentase tahun sebelumnya terjadi penurunan, hal ini disebabkan karena jumlah benda, bangunan, struktur dan situs terjadi penambahan di tahun 2019.

Berdasarkan data di atas, dalam rangka pelestarian benda cagar budaya salah satu langkah yang dilaksanakan pemerintah daerah adalah revitalisasi



PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO

kawasan cagar budaya. Dalam konteks pelestarian budaya, Pemerintah kota juga telah memelihara Benda Cagar Budaya (BCB) seperti bangunan tua dengan arsitektur Eropa peninggalan Belanda yang direhabilitasi dengan mempertahankan keaslian bentuknya dan dijadikan sebagai objek wisata. Kota Sawahlunto tidak hanya melestarikan benda cagar budaya (tangible), tetapi juga akan melestarikan budaya tak benda (intangible). Untuk data awal, ada 10 (sepuluh) objek pemajuan kebudayaan yang ada di Kota Sawahlunto sebagai Budaya Tak Benda (intangible). Berikut ini data warisan budaya tak benda (intangible) di Kota Sawahlunto berdasarkan Data Objek Pemajuan Kebudayaan.

Tabel 2.126
Jumlah Warisan Budaya Tak Benda (Intangible) di Kota Sawahlunto

| No | Objek Pemajuan Kebudayaan | Jumlah |
|--|---------------------------|------------|
| 1. | Manuskrip | 5 |
| 2. | Tradisi Lisan | 46 |
| 3. | Adat Istiadat | 40 |
| 4. | Ritus | 12 |
| 5. | Pengetahuan Tradisional | 18 |
| 6. | Teknologi Tradisional | 27 |
| 7. | Seni | 38 |
| 8. | Bahasa | 2 |
| 9. | Permainan Rakyat | 35 |
| 10. | Olahraga Tradisional | 2 |
| Total Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK) | | 225 |

Sumber : Dinas Kebudayaan, Peninggalan Bersejarah dan Permuseuman Kota Sawahlunto, 2019

Dari tabel di atas, dapat di lihat total objek pemajuan kebudayaan (OPK) yang ada di Kota Sawahlunto berjumlah sebanyak 225 OPK, yang merupakan warisan budaya tak benda (intangible), namun ada dua (2) buah warisan budaya tak benda (intangible) yang sudah masuk ke dalam Warisan Budaya Tak Benda Indonesia (WBTBI) yaitu Songket Silungkang yang termasuk kedalam Pengetahuan Tradisional dan Bahasa Tangsi yang termasuk kedalam Bahasa. Pemerintah Kota Sawahlunto berkewajiban menjaga dan mempertahankan serta melestarikannya sebagai warisan budaya tak benda agar dapat dilihat dan dirasakan oleh generasi yang akan datang.

**2.3.3. LAYANAN URUSAN PILIHAN****2.3.3.1. Urusan Kelautan dan Perikanan**

Dengan kondisi geografis Kota Sawahlunto yang berada 250 – 785 meter ketinggian dari laut, sehingga untuk produksi perikanan di Kota Sawahlunto terfokus pada produksi ikan darat. Untuk produksi ikan darat dan konsumsi ikan di Kota Sawahlunto dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.127
Produksi dan Konsumsi Ikan Tahun 2015-2019

| Ikan Darat | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Produksi Ikan darat (Ton) | 164,83 | 214,70 | 214,98 | 216,05 | 217,26 |
| Jumlah konsumsi ikan (kg/kapita/tahun) | 38,145 | 18 | 19,1 | 32,77 | 28,55 |

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan

Dilihat dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa ikan darat di Kota Sawahlunto dari tahun 2015 sampai 2019 untuk produksi mengalami peningkatan setiap tahunnya walaupun tidak begitu signifikan. Dengan target yang ditetapkan dalam RPJMD Tahun 2018-2023 untuk produksi ikan darat adalah 216 ton dengan realisasi yang dicapai pada tahun 2019 sebesar 217,26 ton, ini berarti kinerja yang dilaksanakan dalam meningkatkan produksi ikan di Kota Sawahlunto sudah cukup baik walupun ada juga beberapa hal yang harus diperbaiki dan ditingkatkan lagi. Adapun yang mempengaruhi produksi dari perikanan ini adalah kualitas dan kuantitas benih, luas lahan budidaya ikan serta kualitas dan kuantitas makanan ikan. Untuk meningkatkan produksi ikan sudah dilaksanakan kegiatan pembinaan dan pengembangan perikanan yang mana dilaksanakan pembinaan terhadap 10 kelompok tani ikan dalam hal budidaya perikanan selain itu juga ada Balai Benih Ikan pada tahun 2019 memproduksi 152.145 ekor benih ikan yang di bagikan kepada kelompok petani ikan yang ada. Dalam memproduksi ikan di Kota Sawahlunto mempunyai budidaya perikanan darat kolam dan perikanan perairan umum (rawa, danau dan sungai), adapun perkembangan dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.128
Luas Areal Budidaya Perikanan Darat (Ha)

| Jenis | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|----------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| Sungai/perairan umum | 164,97 | 164,97 | 96 | 195,97 | 195,97 |
| Kolam | 58,20 | 58,20 | 52,77 | 62,621 | 62,62 |
| Sawah | 123 | 123 | - | - | - |
| Total | 238,15 | 238,15 | 148,77 | 258,591 | 258,591 |

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan

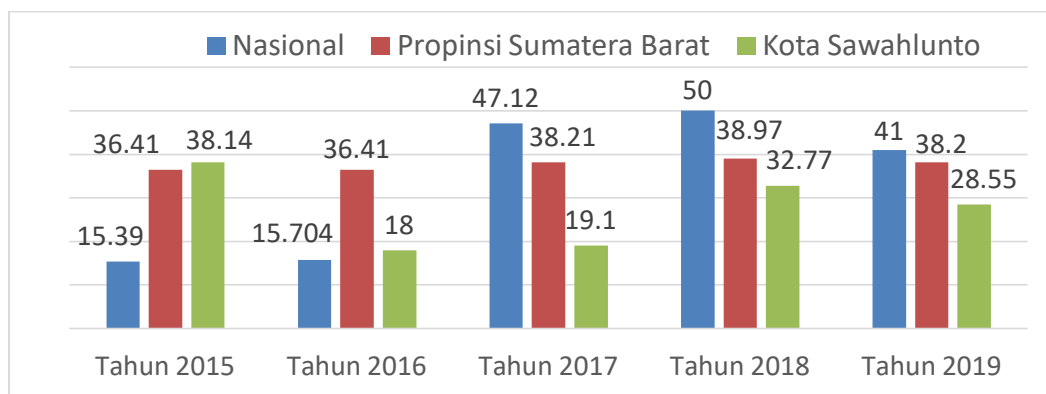
Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa peningkatan luas area budidaya perikanan darat mengalami peningkatan pada tahun 2018 dan konstan pada tahun 2019. Dengan konstannya luas area budidaya perikanan



ini sehingga sangat berpengaruh terhadap produksi perikanan dimana pada tahun 2019 mengalami peningkatan yang tidak begitu signifikan dari tahun sebelumnya. Tahun 2019 untuk produksi ikan budidaya sungai/peraian umum adalah 33,5 ton dan untuk budidaya kolam menghasilkan 183,91 ton. Untuk itu sangat perlu dilakukan perluasan untuk budidaya perikanan di Kota Sawahlunto dalam meningkatkan produksi ikan. Upaya peningkatan luas areal budidaya perikanan darat diantaranya melalui salah satunya pelaksanaan fasilitasi pada kelompok tani untuk pembangunan kolam terpal dan permanen beserta bibit ikan yang diiringi pembinaan langsung dari penyuluh, selain itu juga memanfaatkan aliran sungai untuk budidaya ikan. Dengan fasilitas tersebut diharapkan dapat membantu usaha masyarakat dalam meningkatkan pendapatannya. Kegiatan-kegiatan seperti ini perlu menjadi perhatian pemerintah daerah dalam mencukupi konsumsi masyarakat akan ikan.

Untuk perkembangan konsumsi ikan di Kota Sawahlunto dan perbandingan dengan propinsi dan nasional dapat dilihat pada grafik berikut ini:

Grafik 2.22
Perbandingan konsumsi perkapita Ikan tingkat Nasional,
Propinsi Sumatera Barat dan Kota Sawahlunto
Tahun 2015-2019 (Kg/kapita/tahun)



Sumber data : Data Profil

Dibandingkan dengan Rata-rata konsumsi ikan nasional dan rata-rata konsumsi propinsi Sumbar (termasuk ikan laut dan udang segar), rata-rata konsumsi ikan Kota Sawahlunto lebih rendah, begitu juga untuk konsumsi ikan secara keseluruhan baik ikan darat maupun ikan laut kota Sawahlunto di tahun 2019 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yaitu menjadi 28,55 kg/kapita/tahun. Ini berarti perlunya ditingkatkan sosialisasi gemar makan ikan yang merupakan salah satu kegiatan untuk meningkatkan konsumsi ikan di kota Sawahlunto, yang merupakan juga amanat dari kementerian Kelautan dan Perikanan yaitu Anak Indonesia Suka Makan Ikan, karena ikan sangat penting bagi pertumbuhan anak. Selain itu juga perlu peningkatan untuk diversifikasi produk ikan dalam meningkatkan kemauan untuk mengonsumsi ikan.

**2.3.3.2. Urusan Pariwisata****2.3.3.2.1. Jumlah Kunjungan**

Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan Daya Tarik Wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.

Pariwisata merupakan salah satu sektor penting dalam perekonomian Kota Sawahlunto. Pariwisata Kota Sawahlunto memiliki spesifik dibandingkan dengan pariwisata di kabupaten/kota lain di Sumatera Barat. Pariwisata Kota Sawahlunto selain memiliki wisata alam, wisata buatan dan wisata religius, juga memiliki wisata sejarah dengan icon Kawasan Kota Lama dengan gedung-gedung dan bangunan peninggalan zaman kolonial Belanda. Data kunjungan objek pariwisata di Kota Sawahlunto dari tahun 2015-2019 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.129
Jumlah Pengunjung Objek Wisata di Kota Sawahlunto Tahun 2015-2019
(Berdasarkan Tiket Masuk)

| Objek Wisata | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Museum Gudang Ransum | 20.943 | 22.287 | 19.619 | 14.143 | 15.309 |
| Museum Kereta Api | 6.557 | 6.423 | 12.220 | 7.964 | 6.503 |
| Water Boom | 101.063 | 114.003 | 93.446 | 76.274 | 68.709 |
| Taman Satwa Kandi | 115.845 | 110.289 | 89.927 | 66.166 | 57.715 |
| Lubang Tambang Mbah Soero | 12.938 | 10.965 | 10.653 | 8.663 | 8.492 |
| Desa Wisata Rantih | 6.583 | 4.513 | 2.171 | 5.619 | 5.599 |
| Kelok 16 | 2.687 | 2.743 | 7.326 | - | - |
| Puncak Cemara | 45.611 | 101.149 | 65.227 | 52.079 | 44.627 |
| Taman Buah | - | 9.834 | 12.339 | 9.545 | 4.897 |
| Camping Ground Kandi | - | 7.300 | 18.555 | 18.578 | 9.611 |
| Total | 312.227 | 389.506 | 331.483 | 259.031 | 221.462 |

Sumber : 1. Dinas Kebudayaan, Peninggalan Bersejarah dan Permuseuman Kota Sawahlunto, 2019.

2. Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, 2019

Kalau di lihat dari tabel di atas, jumlah pengunjung pada objek wisata berdasarkan tiket masuk pada masing-masing objek terjadi penurunan dan kenaikan, seperti Museum Gudang Ransum terjadi kenaikan dari tahun 2018 ke tahun 2019. Adanya penambahan atraksi baru pada Camping Ground dan Puncak Cemara pada tahun 2019 diharapkan meningkatkan jumlah kunjungan pada masing-masing objek wisata, sehingga secara keseluruhan akan berdampak terhadap jumlah pengunjung wisata di Kota Sawahlunto yang tentunya akan memiliki dampak positif terhadap ekonomi masyarakat di Kota Sawahlunto, baik dari sisi industri pariwisata maupun kelembagaan pariwisata.

Ditetapkannya Geopark Sawahlunto sebagai Geopark Nasional karena sudah memenuhi persyaratan Administrasi dan Teknis sebagai Geopark Nasional Indonesia dan berkomitmen untuk mengembangkan Kawasan Geopark berdasarkan prinsip Konservasi, Edukasi dan Pemberdayaan Sosial Ekonomi



PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO

Masyarakat yang diberikan di Jakarta tanggal 29 November 2018 dan berlaku sampai bulan November 2022, Terkait dengan itu destinasi pariwisata sejak tahun 2015 s/d 2019 dapat disampaikan bahwa dari target 9 Destinasi pariwisata yang dikembangkan telah terealisasi sebanyak 3 destinasi baru, sedangkan objek wisata baru yang dibangun adalah kelok 16 dan batu runcing (geopark). Terkait keikutsertaan pihak swasta dalam pembangunan dan pengelolaan objek wisata baru terlihat dari gerakan PT.WWS yang mengelola Waterboom dan Bioskop 4 Dimensi. Potensi objek wisata yang terdata sampai 2019 tercatat sebanyak 28 Geosite yang sudah termasuk kedalam Geopark Nasional.



Tabel 2.130
Data Pengembangan Potensi/Destinasai Wisata (Geosite) Kota Sawahlunto Tahun 2015-2019

| No | Destinasai | Alamat/ Lokasi | Potensi Wisata | | Objek Wisata Unggulan | | | | |
|----|---------------------------|----------------|--------------------|--------------------|-----------------------|------|------|------|------|
| | | | Sudah Dikembangkan | Belum Dikembangkan | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 | Taman Satwa Kandi | Barangin | √ | | √ | √ | √ | √ | √ |
| 2 | Camping Ground Wisata | Barangin | √ | | | √ | √ | √ | √ |
| 3 | Taman Buah | Barangin | √ | | √ | √ | √ | √ | √ |
| 4 | Batu Tanjung/Paralayang | Talawi | √ | | | √ | √ | √ | √ |
| 5 | Hutan Kota | Talawi | √ | | | √ | √ | √ | √ |
| 6 | Desa Wisata Rantih | Talawi | √ | | √ | √ | √ | √ | √ |
| 7 | Makam M.Yamin | Talawi | √ | | √ | √ | √ | √ | √ |
| 8 | Makam Syeh Kolok | Talawi | √ | | √ | √ | √ | √ | √ |
| 9 | Kuburan Keramat | Talawi | | √ | | | | | |
| 10 | Waterboom | Silungkang | √ | | √ | √ | √ | √ | √ |
| 11 | Goa Lakuak Kuali | Silungkang | | √ | | | | √ | √ |
| 12 | Kawasan Tenun Silungkang | Silungkang | √ | | √ | √ | √ | √ | √ |
| 13 | Kawasan Kota Lama | Lembah Segar | √ | | √ | √ | √ | √ | √ |
| 14 | Museum Gudang Ransum | Lembah Segar | √ | | √ | √ | √ | √ | √ |
| 15 | Lubang Tambang Mbah Soero | Lembah Segar | √ | | √ | √ | √ | √ | √ |
| 16 | Museum Kereta Api | Lembah Segar | √ | | √ | √ | √ | √ | √ |
| 17 | Kelok 16 | Lembah Segar | √ | | √ | √ | √ | √ | √ |
| 18 | Puncak Polan | Lembah Segar | √ | | √ | √ | √ | √ | √ |
| 19 | Puncak Cemara | Barangin | √ | | √ | √ | √ | √ | √ |
| 20 | Panorama Bukik Gadang | Talawi | | √ | | | | | |



| No | Destinasi | Alamat/ Lokasi | Potensi Wisata | | Objek Wisata Unggulan | | | | |
|---------------|---------------------------|----------------|--------------------|----------------------|-----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | | Sudah Dikembangkan | Belum Dikembangkan | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 21 | Panorama Guguk Bungo | Barangin | | √ | | | | | |
| 22 | Goa Slamet | Barangin | | √ | | | | | |
| 23 | Goa Bunian | Talawi | | √ | | | | | |
| 24 | Panorama Sundak Langik | Talawi | | √ | | | | | |
| 25 | Kawasan Kebun Serai Wangi | Barangin | √ | | | | | | |
| 26 | Wisata Batu Runcing | Silungkang | | Rencana Pengembangan | | | | | |
| 27 | Wisata Batu Hitam | Lumindai | | Rencana Pengembangan | | | | | |
| 28 | Danau Biru | Talawi | | Rencana Pengembangan | | | | | |
| 29 | Goa Janjian | Talago gunuang | | | | | | | √ |
| 30 | Puncak Sati | Saringan | | | | | | | √ |
| JUMLAH | | | | | 11 | 14 | 17 | 17 | 18 |

Sumber : Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, 2019



Dari tabel di atas, dapat dilihat jumlah objek wisata yang sudah dikembangkan sebanyak 18 objek, dan 7 objek wisata yang belum dikembangkan dan 3 objek wisata dalam tahap rencana pengembangan. Untuk objek wisata yang sudah dikembangkan ada peningkatan dari tahun ke tahun sejak tahun 2015 sampai tahun 2019.

Tabel 2.131
Data Jenis Usaha Pariwisata di Kota Sawahlunto Tahun 2015-2019

| NO | SEKTOR USAHA | JUMLAH | | | | |
|----|---|--------|------|------|------|------|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 | Usaha Hotel | | | | | |
| | -Bintang 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | -Bintang 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | -Non Bintang/Melati | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 2 | Usaha Perjalanan Wisata | | | | | |
| | -Agen Perjalanan Wisata | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 |
| 3 | Jasa Transportasi (termasuk penyewaan kendaraan) | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| 4 | Usaha Pondok Wisata | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 5 | Usaha Cafe | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 |
| 6 | Rumah Makan | 50 | 50 | 50 | 50 | 58 |
| 7 | Toilet Umum Berfungsi dan Bersih | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 |
| 8 | Usaha Karaoke | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 9 | Usaha Kawasan Pariwisata | 4 | 4 | 4 | 7 | 7 |
| 10 | Usaha Jasa Informasi Pariwisata | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 11 | Usaha Taman Rekreasi | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 12 | Usaha Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif dan Pameran/Fasilitas Meeting (termasuk dalam hotel) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 13 | Usaha Pentas Pertunjukan Seni Terbuka | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 14 | Usaha Lapangan Tenis | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 15 | Usaha Sanggar Seni | 42 | 42 | 42 | 43 | 43 |
| 16 | Usaha Bumi Perkemahan | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 17 | Usaha Pusat Penjualan Makan/Cinderamata | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 |

Sumber : Profil Daerah

Dari tabel di atas terlihat bahwa jenis usaha pariwisata dari tahun 2015-2019 tidak berkembang, hanya ada beberapa jenis usaha yang ada peningkatan namun tidak signifikan. Hal ini disebabkan karena terjadi fluktuasi jumlah kunjungan wisatawan dari tahun 2015 sampai tahun 2019, dan kurangnya promosi pariwisata Kota Sawahlunto sehingga objek wisata yang ada tidak terlalu dikenal oleh masyarakat luar. Di samping itu Kota Sawahlunto merupakan kota wisata minat khusus, karena objek-objek wisata yang berada di kawasan kota lama merupakan bangunan tua peninggalan zaman kolonial Belanda, sehingga pengunjung umumnya memiliki minat khusus untuk melihat objek-objek bekas tambang tersebut.

Sementara itu, agar masyarakat ikut menjaga dan memelihara objek-objek wisata yang berada di lokasi tempat tinggalnya, Pemerintah Kota Sawahlunto mendorong pemberdayaan masyarakat, sehingga muncul berbagai



lembaga seperti Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) pada masing-masing objek wisata yang berkembang. Adapun data kelembagaan pariwisata Kota Sawahlunto Tahun 2015 – 2019 dapat di lihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.132
Jumlah Kelembagaan Pariwisata Kota Sawahlunto Tahun 2015 – 2019

| No | Nama Pokdarwis/Lembaga Desa/Asosiasi Homestay | Tahun | | | | |
|-----|---|-------|------|------|------|------|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1. | Lembaga Desa Wisata Rantih | V | V | V | V | V |
| 2. | Asosiasi Homestay | V | V | V | V | V |
| 3. | Objek Wisata Muaro Kalaban | | | V | | |
| 4. | Meranti | | | V | | |
| 5. | Desa Kolok Nan Tuo | | | | V | V |
| 6. | Desa Silungkang Tigo | | | | V | V |
| 7. | Silungkang Oso | | | | V | V |
| 8. | Kampung Hijau dan Seni | | | | V | V |
| 9. | Muaro Kalaban | | | | V | V |
| 10. | Batu Ponjong Dusun Sionsek | | | | | |
| 11. | Objek Wisata Batu Runcing | | | | | |
| 12. | Lembah Sajonang | | | | | V |
| 13. | Puncak Asti | | | | | |
| 14. | Lunto Barat | | | | | |

Sumber : Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, 2019

Dari tahun 2014 sampai tahun 2015, jumlah kelembagaan yang ada dan berkembang di Kota Sawahlunto hanya 2 (dua) lembaga yang aktif, namun tahun 2016 dan 2017 terjadi peningkatan jumlah kelembagaan pariwisata atau kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) di masing-masing desa, karena masyarakat mengakui dengan adanya objek wisata yang berada di lokasi desanya, yang dikembangkan menjadi objek wisata yang nantinya akan mendatangkan wisatawan untuk berkunjung ke daerah tersebut, tentu akan berdampak terhadap pendapatan bagi masyarakat sekitar objek wisata.

2.3.3.2.2. Kepemudaan dan Olahraga

Organisasi kepemudaan dan olahraga adalah hal penting yang ada dalam suatu daerah. Kota Sawahlunto sangat memperhatikan dan sangat mendukung seluruh organisasi kepemudaan dan olahraga yang ada di Kota Sawahlunto.

Tabel 2.133
Jumlah Organisasi Kepemudaan Kota Sawahlunto Tahun 2019

| No | Nama Organisasi | Alamat | Badan Hukum | | Status | |
|----|---------------------|------------|-------------|-------|--------|-------|
| | | | Ada | Belum | Aktif | Tidak |
| 1. | HIPMI | Santur | V | | V | |
| 2. | AMPI | Ps. Remaja | V | | V | |
| 3. | Fatayat NU | Lb. Segar | V | | V | |
| 4. | Pemuda Muhammadiyah | Lb. Segar | V | | V | |



| No | Nama Organisasi | Alamat | Badan Hukum | | Status | |
|-----|------------------------|---------------|-------------|-------|--------|-------|
| | | | Ada | Belum | Aktif | Tidak |
| 5. | BM PAN | Santur | V | | V | |
| 6. | Gema Kosgoro | Talawi | V | | V | |
| 7. | GM Kosgoro | Talawi | V | | V | |
| 8. | GP Anshor | Kec. Barangin | V | | V | |
| 9. | BKPRMI | Lb. Segar | V | | V | |
| 10. | Garda Keadilan | Lb. Segar | V | | V | |
| 11. | Nasyatul Assiyah | Lb. Segar | V | | V | |
| 12. | IPTI | Talawi | V | | V | |
| 13. | KNPI Sawahlunto | Kec. Barangin | V | | V | |
| 14. | KNPI Kec. Talawi | Talawi | V | | V | |
| 15. | KNPI Kec. Barangin | Kec. Barangin | V | | V | |
| 16. | KNPI Kec. Lembah Segar | Lb. Segar | V | | V | |
| 17. | KNPI Kec. Silungkang | Silungkang | V | | V | |

Sumber : Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, 2019

Tabel 2.134
Data Tentang Olahraga Kota Sawahlunto Tahun 2019

| No | Cabang/Sarana/Klub dan Gedung Olahraga | Tahun | | | | |
|----|--|-------|------|------|------|------|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1. | Cabang Olahraga | 25 | 29 | 30 | 32 | 34 |
| 2. | Sarana Olahraga Standar | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 3. | Jumlah Klub Olahraga | 60 | 65 | 70 | 70 | 75 |
| 4. | Jumlah Gedung Olahraga | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |

Sumber : Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, 2019

2.3.3.3. PAD Sektor Pariwisata

Kontribusi pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor pariwisata selama ini ditinjau dari pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, retribusi tempat rekreasi dan olahraga dan bagian laba hotel parai. Dari Tahun 2015-2019 PAD sektor pariwisata mengalami fluktuasi, dapat di lihat pada tabel berikut ini.



Tabel 2.135
Sumbangan Sektor Pariwisata Terhadap PAD Kota Sawahlunto Tahun 2015-2019

| No | NAMA PENDAPATAN | TAHUN | | | | |
|----|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 | Pajak Hotel | 132.853.612 | 135.881.333 | 142.353.702 | 164.733.362 | 94.965.756 |
| 2 | Pajak Restoran | 622.356.181 | 524.826.887 | 640.309.687 | 638.615.093 | 532.945.719 |
| 3 | Pajak Hiburan | 474.215.800 | 422.777.300 | 462.892.300 | 394.309.900 | 109.485.500 |
| 4 | Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga | 141.983.000 | 186.125.000 | 227.593.000 | 411.150.000 | 682.737.000 |
| 5 | PT.WWS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Bagian Laba Hotel Parai | 9.555.527 | 12.206.267 | 0 | 0 | 0 |
| | PAD Sektor Pariwisata | 1.380.964.120 | 1.281.816.787 | 1.473.148.689 | 1.608.808.355 | 1.420.133.975 |
| | Total PAD | 48.580.391.650,27 | 52.268.500.528,19 | 53.399.735.599,54 | 62.406.850.149,37 | 57.171.093.865,09 |
| | Persentase PAD Sektor Pariwisata | 2,843 | 2,452 | 2,759 | 2,578 | 2,484 |

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Sawahlunto, 2019

**2.3.3.4. Urusan Pertanian****2.3.3.4.1. Pertanian**

Urusan pertanian meliputi Tanaman pangan, Tanaman hortikultura, Tanaman perkebunan, Peternakan dan Jasa pertanian. Salah satu faktor yang dapat menentukan keberhasilan suatu wilayah terhadap sektor pertanian dilihat dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sektor pertanian. PDRB sektor pertanian ini menunjukkan kemampuan suatu wilayah dalam menciptakan nilai tambah untuk lapangan usaha pertanian. Adapun perkembangan PDRB sektor pertanian dan kontribusinya terhadap PDRB Kota Sawahlunto dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

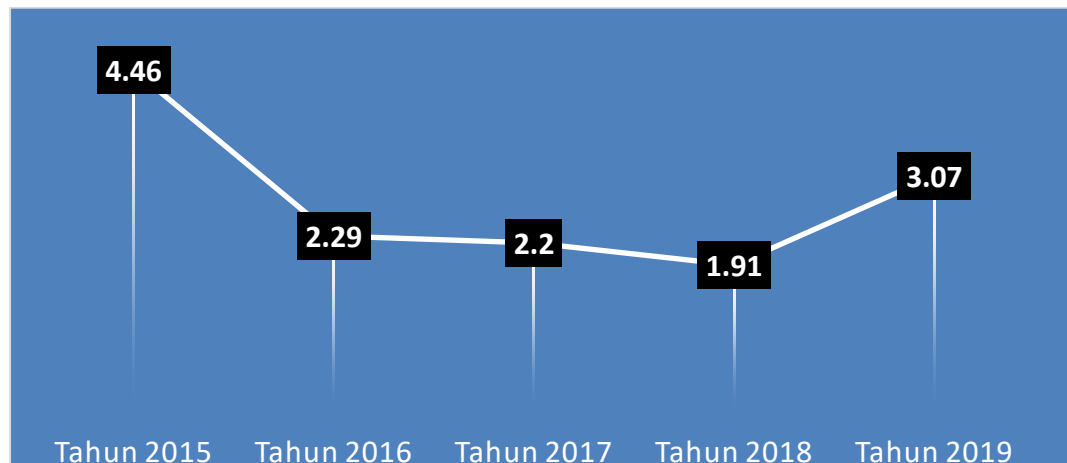
Tabel 2.136
Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Terhadap PDRB
Tahun 2015-2019

| KONTRIBUSI | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|-----------------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Atas Dasar Harga Berlaku (Milyar) | 273,46 | 292,80 | 303,12 | 312,07 | 325,56 |
| Total PDRB (Milyar) | 2.715,01 | 2.937,95 | 3.165,21 | 3.405,16 | 3.681,65 |
| Kontribusi (%) | 10,11 | 9,97 | 9,57 | 9.35 | 8,84 |

Sumber : Sawahlunto Dalam Angka 2019

Dilihat dari tabel diatas Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB cenderung mengalami peningkatan walaupun tidak begitu signifikan dari tahun 2015 sampai tahun 2018, namun untuk tahun 2019 menurun dari tahun sebelumnya dengan begitu signifikan. Secara nilai PDRB sektor pertanian di tahun 2019 meningkat dari tahun sebelumnya, ini berarti tetap terjadi penambahan nilai di sektor pertanian walaupun pengaruh terhadap PDRB kota menurun, dimana sektor pertanian menjadi urutan ke-6 dalam kontribusi terhadap PDRB kota. Meskipun kontribusi sektor pertanian menurun, pertumbuhan ekonomi sektor pertanian meningkat jauh dapat dilihat pada grafik dibawah ini :

Grafik 2.23
Pertumbuhan sektor pertanian Tahun 2015 -2019 (persen)



Sumber : Sawahlunto Dalam Angka Tahun 2019

Dari grafik diatas tergambar bahwa pada tahun 2019 semua kegiatan-kegiatan yang mendukung sektor pertanian berjalan positif dalam mendukung nilai tambah ekonomi Kota Sawahlunto. Ini terlihat pada realisasi kinerja Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan yang melampaui target yang direncanakan, seperti pada tabel dibawah ini :



Tabel.137
Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama Dinas Ketahanan Pangan
Pertanian dan Perikanan tahun 2019

| No | Indikator Kinerja Utama | target | realisasi |
|----|---|--------|-----------|
| 1. | Produktifitas panen padi (ton/ha) | 4,75 | 5,16 |
| 2. | Produktifitas panen karet (ton/ha) | 1,26 | 1,28 |
| 3. | Produktifitas panen kakao (ton/ha) | 1,07 | 1,08 |
| 4. | Persentase Daging yang ASUH (Aman, Sehat, Utuh dan Halal) (%) | 100 | 100 |
| 5. | Produktifitas Kolam Budidaya (kg/m2) | 0,32 | 0,34 |
| 6. | Index Penanaman (IP) | 2,24 | 2,14 |
| 7. | Petani dan Petugas yang berprestasi | 7 | 14 |
| 8. | Score Aktual Pola Pangan Harapan (PPH) | 92,72 | 86,5 |

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan

Dari tabel diatas ada beberapa yang perlu menjadi perhatian untuk kedepannya seperti PPH, indeks penanaman dan perkebunan. Untuk itu perlupeningkatan pelaksanaan program/kegiatan kedepannya untuk beberapa hal tersebut.

2.3.3.4.2. Tanaman Pangan

Untuk tanaman pangan ini diwakilkan pada perkembangan tanaman padi yang merupakan bahan pangan utama di Kota Sawahlunto sebagaimana terlihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.138
Produktifitas Padi Tahun 2015-2019

| Uraian | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|-----------------------------|--------|---------|---------|----------|--------|
| Produksi tanaman padi (Ton) | 16.651 | 15.055 | 14.274 | 16.108 | 17.926 |
| Luas panen (ha) | 3.332 | 2.985,9 | 2.650,2 | 3.433,46 | 3.476 |
| Produktifitas (ton/ha) | 4 ,99 | 5,04 | 5,38 | 4,69 | 5,16 |

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan

Dilihat dari tabel di atas perkembangan produksi dan produktifitas tanaman padi di Kota Sawahlunto pada tahun 2015-2019 rata-rata mengalami peningkatan. Meningkatnya produktifitas padi dari 4,69 ton/ha menjadi 5,16 ton/ha, inilah salah satu yang mempengaruhi laju pertumbuhan sektor pertanian di Kota Sawahlunto mengalami peningkatan. Selain luas panen, faktor-faktor yang mempengaruhi produksi tanaman padi adalah kuantitas dan kualitas benih, pemeliharaan (pupuk, pengendalian hama, dan lainnya), alsintan, sarana dan prasarana produksi. Untuk realisasi tahun 2019 jumlah produksi benih padi sudah melampau target yaitu 1.750 kg dimana Kota Sawahlunto sudah melepas varietas gadang rumpun yang telah di akui negara dengan SK Mentan Nomor: 825/Kpts/TP.010/12/2017 tanggal 18 Desember 2017 dan benih ini telah tersebar di 4 kecamatan yaitu 240 ha. Untuk pengolahan lahan dengan hand tractor 76,43% seiring dengan peningkatan jumlah hand tractor yaitu 23 unit dan penambahan sawah berigrasi 13,1 ha juga seiring dengan penambahan irigasi tersier 99,83 ha. Sedangkan dari segi kapasitas petani terdapat 19 kelompok tani yang naik kelas dan kelompok tani yang meningkat pengetahuannya 263 kelompok tani. Walaupun dalam realisasi setiap sektor mengalami peningkatan atau diatas target, kedepannya perlu lebih ditingkatkan lagi dalam menjadi ketersediaan pangan utama di Kota



Sawahlunto. Untuk varietas padi gadang rumpun perlu diperluas pengenalan di luar Kota Sawahlunto untuk menambah pendapatan petani dalam memproduksi benih. Untuk pelaksanaan program/kegiatan yang berhubungan peningkatan produktifitas tanaman padi perlu lebih ditingkatkan lagi.

2.3.3.4.3. Tanaman Perkebunan

Tanaman perkebunan adalah tanaman semusim dan atau tanaman tahunan. Tanaman perkebunan yang dominan di Kota Sawahlunto adalah tanaman karet dan kakao. Perkebunan karet dan kakao menjadi mata pencaharian utama masyarakat Kota Sawahlunto terutama pada daerah yang tidak mempunyai lahan persawahan.

1. Perkebunan karet

Karet merupakan salah satu komoditi perkebunan yang memberikan kontribusi yang besar terhadap perekonomian masyarakat. Untuk itu Perkembangan perkebunan karet di Kota Sawahlunto dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.139
Produktivitas Tanaman Perkebunan Karet Tahun 2015-2019

| Uraian | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Luas areal tanam (ha) | 2.477,67 | 2.471,52 | 2.457,11 | 2.451,86 | 2.446,23 |
| Produksi (ton) | 960,13 | 960,502 | 1.240,85 | 1.262,63 | 1.540,16 |
| Produktivitas (ton/ha) | 1,02 | 1,03 | 1,25 | 1,26 | 1,28 |

Sumber : Sawahlunto Dalam Angka

Dapat dilihat perkembangan perkebunan karet dari Tahun 2015-2019 relatif mengalami peningkatan baik produksi maupun produktifitas. Namun pada tahun 2019 produksi meningkat tetapi luas areal tanam mengalami penurunan yang tidak begitu signifikan, untuk itu perlu revitalisasi terhadap komoditas karet dalam menambah luas area tanam untuk karet. Selain itu terdapat 1.184,38 ha untuk tanaman karet yang belum menghasilkan, yang perlu perhatian lebih dimulai dari pemeliharaan dan pengendalian hama penyakit. Pada pemeliharaan ini sangat diperlukan perhatian dari penyuluh pertanian dalam membimbing petani dalam rangka meningkatkan produksi tanaman karet. Selain itu secara teknis yang mempengaruhi produktivitas karet adalah mutu bahan tanam (benih), Pemeliharaan tanaman, proses panen.

2. Perkebunan Kakao

Selain tanaman karet, tanaman kakao juga merupakan salah satu tanaman perkebunan yang utama di Kota Sawahlunto. Perkebunan kakao yang ada masih perkebunan rakyat, adapun perkembangan perkebunan kakao dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.140
Produktivitas Tanaman Perkebunan Kakao Tahun 2015- 2019

| Uraian | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|------------------------|--------|---------|--------|--------|--------|
| Luas areal tanam (ha) | 601,40 | 601,40 | 596,35 | 597,52 | 596,22 |
| Produksi (ton) | 415,6 | 468,626 | 519,74 | 542,01 | 565,73 |
| Produktivitas (ton/ha) | 0,90 | 0,95 | 1,02 | 1,02 | 1,08 |

Sumber : SDA Kota Sawahlunto

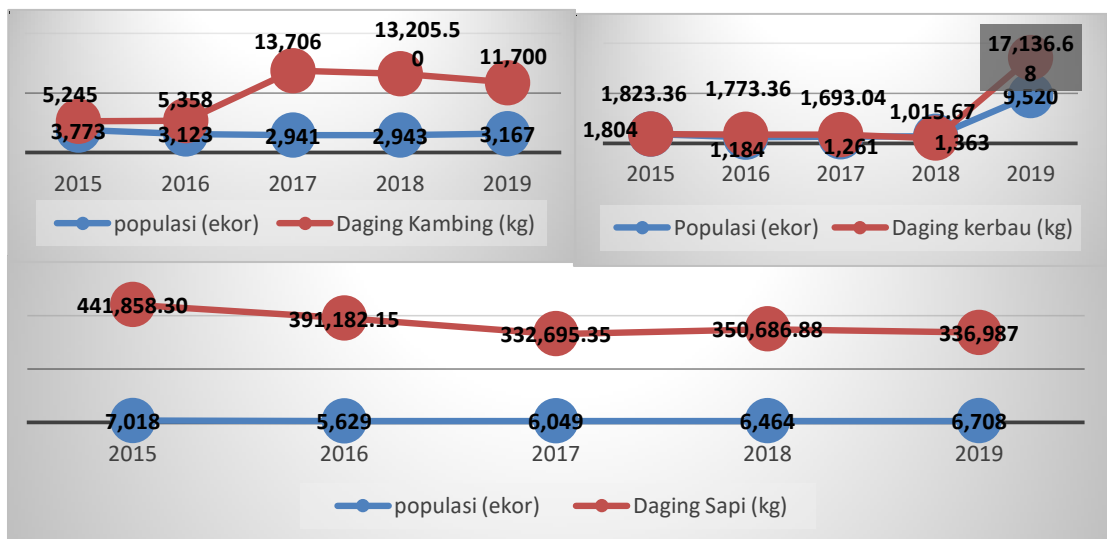


Dilihat dari tabel diatas terlihat bahwa perkembangan tanaman kakao dari Tahun 2015-2019, dari luas areal tanam untuk perkebunan kakao di Kota Sawahlunto cenderung mengalami penurunan, namun untuk produksi dan produktifitas tanaman kakao terus mengalami peningkatan. Gerakan Masyarakat (Germas) untuk pemangkasan dan pemupukan dilaksanakan di empat kecamatan dalam mendukung produksi tanaman kakao. peUpaya peningkatan produksi dan produktifitas masih perlu dilakukan, karena idealnya produktivitas kakao antara 1,5 – 2 ton/ha, meskipun secara target sudah melebihi target yang ditetapkan. Ini berarti produktivitas kakao Sawahlunto masih jauh dari standar, untuk itu sangat perlu perhatian pemerintah dalam meningkatkan produktivitas kakao ini.

2.3.3.4.4. **Peternakan**

Pembangunan sub sektor peternakan menjadi salah satu prioritas dalam peningkatan nilai tambah bagi pendapatan petani ternak di Kota Sawahlunto. Adapun yang menjadi target dari sektor peternakan adalah produksi daging dan produksi telur. Adapun perkembangan produksi daging seperti pada grafik di bawah ini :

Grafik 2.24
Perkembangan populasi (ekor) dan produksi daging (kg) dari Tahun 2015-2019



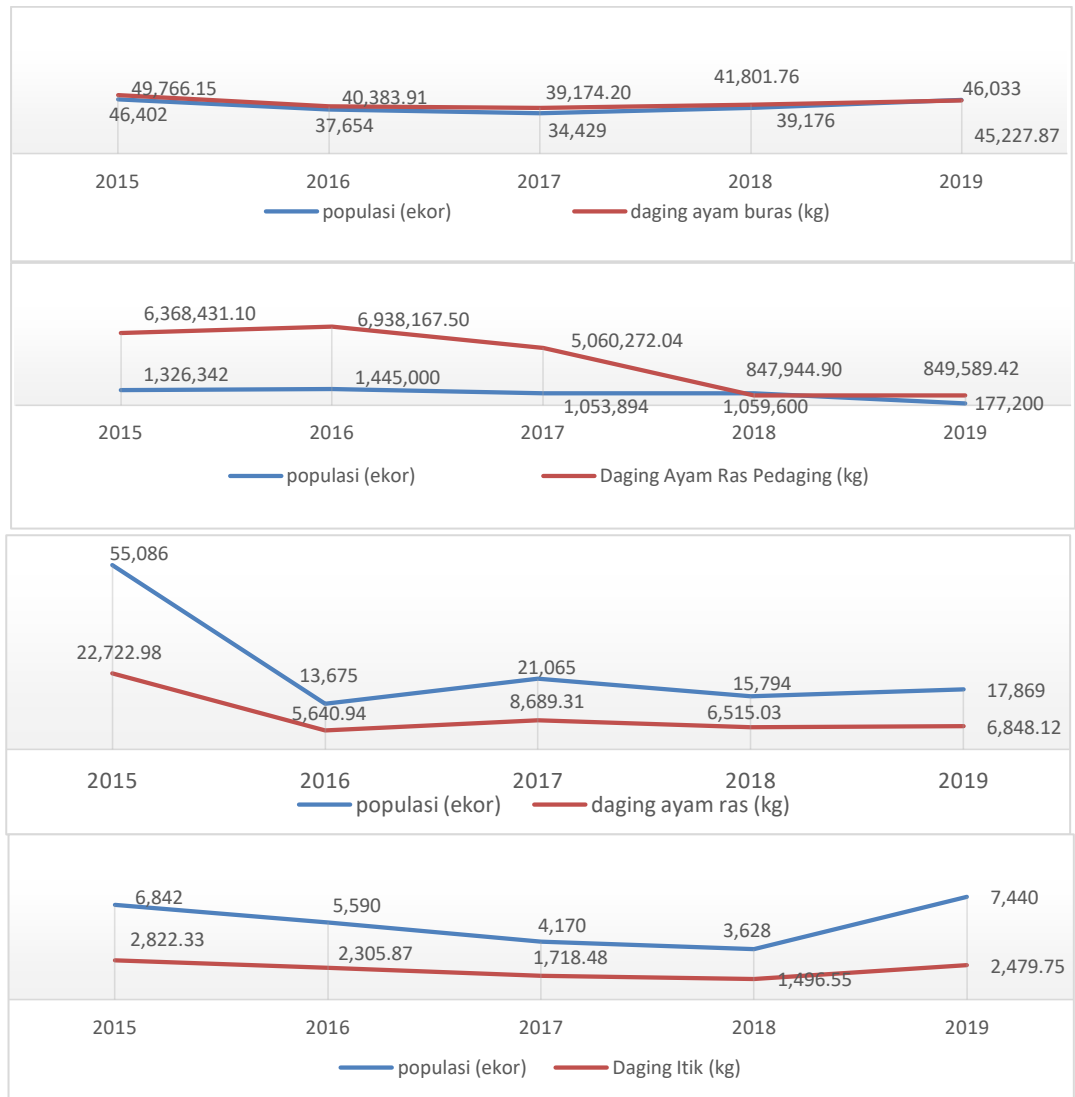
Sumber data : Sawahlunto Dalam Angka

Dari grafik diatas dapat dijelaskan bahwa tahun 2019 produksi daging kerbau mengalami peningkatan yang cukup signifikan seiring dengan meningkatnya populasi ternak kerbau, sedangkan untuk produksi daging sapi dan kambing mengalami penurunan ditahun 2019 dengan populasi kedua ternak tersebut juga menurun. Untuk meningkatkan populasi ternak tersebut Pemerintah daerah tahun 2019 sudah merealisasikan pemberian bantuan ternak kambing untuk 20 Kepala Keluarga (KK) yang mana masing-masing KK mendapat 3 ekor kambing. Namun dalam pelaksanaannya sangat diperlukan bimbingan dan binaan dari OPD teknis yaitu Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan melalui penyuluh pertanian yang ada di Desa/Kelurahan setempat. Sedangkan untuk ternak sapi untuk meningkatkan populasi telah dilaksanakan kegiatan pengembangan Inseminasi Buatan (IB) yang mana pada tahun 2019 dengan realisasi jumlah kelahiran sapi dari IB 993 ekor yang tersebar di empat kecamatan di Kota Sawahlunto dengan total yang di IB sebanyak 1.619 ekor, jadi tingkat keberhasilan untuk IB 61,33 persen. Dilihat dari tingkat keberhasilan IB ini sangat perlu perhatian lebih dalam penanganan IB di Kota Sawahlunto untuk mendukung peningkatan populasi ternak sapi di Kota Sawahlunto.



Selain ternak sapi, kerbau dan kambing Kota Sawahlunto juga ada produksi daging dan telur unggas yang sangat berpengaruh terhadap perekonomian di Kota Sawahlunto. Adapun perkembangan populasi dan produksi daging ternak dapat dilihat pada grafik berikut :

Grafik 2.25
Perkembangan ternak unggas populasi ternak (ekor) produksi daging (kg)
Tahun 2015-2019



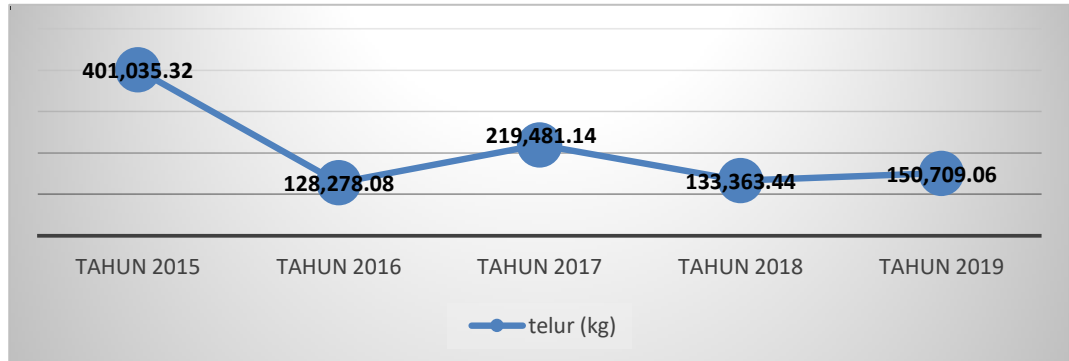
Sumber data : Sawahlunto Dalam Angka

Dilihat dari grafik diatas perkembangan ternak unggas di Kota Sawahlunto dari tahun 2015-2019, untuk ayam rata-rata tidak mengalami peningkatan maupun penurunan yang begitu signifikan baik dilihat dari segi populasi maupun produksi daging, namun ternak itik pada tahun 2019 mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari segi populasi dan produksi dagingnya. Dalam meningkatkan populasi ternak unggas ini di tahun 2019 pemerintah daerah melalui Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan telah membagikan ternak unggas beserta makanannya, ternak ayam untuk 40 Kepala Keluarga (KK) yang mana satu KK mendapat 20 ekor ayam, sedangkan itik dibagikan untuk 60 KK yang mana satu KK mendapat 20 ekor itik. Ternak yang dibagikan disertai dengan makanan ternak. Dalam pemeliharaan masyarakat mendapat bimbingan dari penyuluh peternakan yang ada di desa/kelurahan. Karena besarnya peranan penyuluh, maka Dinas sudah menyediakan kegiatan untuk peningkatan SDM penyuluh melalui pelatihan dan bimbingan teknis. Selain



produksi daging, unggas juga menghasilkan telur, adapun perkembangan produksi telur di Kota Sawahlunto dapat dilihat pada grafik dibawah ini :

Grafik 2.26
Perkembangan produksi telur ternak unggas (kg) Tahun 2015-2019



Sumber data : Sawahlunto Dalam Angka

Dari tahun 2015-2019 untuk produksi telur unggas rata-rata mengalami peningkatan yang tidak begitu signifikan. Telur merupakan salah satu bahan pangan yang mengandung protein hewani yang cukup tinggi yaitu sebesar 13 – 14 persen sehingga kebutuhan akan telur cukup tinggi dimasyarakat, sehingga telur merupakan suatu komoditas yang penting untuk dikembangkan. Adapun populasi peternak telur di Kota Sawahlunto rata-rata berasal dari pelaku usaha komanditer dan hanya sebagian kecil yang merupakan usaha peternakan peseorangan/mandiri. Tahun 2019 produksi telur unggas mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, untuk itu sangat perlu pendampingan dari dinas teknis dalam pemeliharaan unggas petelur ini, dan mendorong masyarakat untuk berusaha telur unggas, karena usaha telur ini sangat menjanjikan untuk menambah pendapatan masyarakat. Sosialisasi dan pendampingan budidaya telur unggas sangat penting dilakukan dalam meningkatkan pengetahuan dan keyakinan masyarakat untuk menjadi petani telur unggas.

2.3.1.1 Urusan Perdagangan

Sektor perdagangan merupakan sektor yang sangat berpengaruh terhadap, aktivitas perekonomian di Kota Sawahlunto. Sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor di Kota Sawahlunto sangat berperan penting dalam peningkatan pendapatan masyarakat, penyerapan tenaga kerja lokal dan mengembangkan usaha kecil, mikro dan koperasi.. Ini dapat dilihat dari perkembangan nilai PDRB sektor perdagangan, besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor terhadap PDRB di Kota Sawahlunto sebagaimana terlampir pada tabel berikut:

Tabel 2.141
Kontribusi Sektor Perdagangan, Besar Dan Eceran, Reparasi Mobil Dan Sepeda Motor Terhadap PDRB Tahun 2015-2019

| KONTRIBUSI | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|--|---------|---------|---------|---------|---------|
| Atas Dasar Harga Berlaku (Milyar rupiah) | 395,24 | 435,56 | 468,02 | 510,54 | 553,97 |
| Atas Dasar Harga Berlaku (Milyar rupiah) | 2715,01 | 2937,95 | 3165,21 | 3405,16 | 3681,65 |
| Kontribusi (%) | 14,56 | 14,83 | 14,79 | 14,99 | 15,05 |

Sumber : Sawahlunto Dalam Angka



Dari Tahun 2015-2019 kontribusi sektor perdagangan besar, eceran, reparasi mobil dan sepeda motor merupakan pemberi kontribusi terbesar terhadap PDRB kota Sawahlunto. Untuk tahun 2019 kontribusinya terhadap PDRB atas dasar harga berlaku sebesar 15,05 persen dengan nilai rupiahnya Rp. 553,97 milyar. Meningkatnya sektor perdagangan ini seiring dengan peningkatan daya beli masyarakat kota Sawahlunto yang mana pada tahun 2019 adalah 10,238 ribu rupiah dengan target RPJMD sebesar 9,746 ribu rupiah. Peningkatan sub sektor perdagangan dan daya beli ini didukung oleh penataan (delapan) pasar tradisional dan pembangunan pasar songket Silungkang yang dapat meningkatkan pangsa pasar sehingga memberikan kontribusi terhadap sektor perdagangan besar, eceran, reparasi mobil dan sepeda motor, yang mana pasar merupakan tempat aktivitas perekonomian di kota Sawahlunto. Selain itu Kota Sawahlunto juga mempunyai 12 mini market dan 1.523 toko/warung/kios yang juga mempengaruhi proses perdagangan di Kota Sawahlunto. Untuk itu dapat dilihat perkembangan jumlah pedagang pasar yang ada di Kota Sawahlunto tahun 2015-2019 sebagai berikut :

Tabel 2.142
Jumlah Pedagang Pasar Tetap Di Kota Sawahlunto Tahun 2015-2019

| No | Nama Pasar | Pedagang Yang Menempati Kedai (Orang) | | | | |
|----|----------------------|---------------------------------------|------|------|------|------|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1. | Pasar Sawahlunto | 643 | 779 | 779 | 779 | 779 |
| 2. | Pasar Silungkang | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
| 3. | Pasar Talawi | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| 4. | Pasar Sapan | 32 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 5. | Pasar Tak Bancah | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 6. | Pasar Tumpuak Tengah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Pasar Lumindai | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 8. | Pasar Kolok Mudik | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 9. | Pasar Songket | | | 75 | 75 | 0 |

Sumber : Dinas Koperindag 2019

Dilihat dari tabel diatas jumlah pedagang tetap yang ada di setiap pasar yang ada di Kota Sawahlunto tidak mengalami pertambahan kecuali di Pasar Sawahlunto dan Pasar sapan yang mana pada tahun 2016 dan 2017 mengalami penambahan, ini seiring dengan peningkatan penataan pasar yang dilakukan pada tahun 2016 dan 2017. Dengan ini diharapkan dapat berpengaruh terhadap peningkatan usaha perdagangan di Kota Sawahlunto. Selain pedagang tetap, yang berpengaruh terhadap jual beli di pasar adalah pedagang kaki lima, untuk itu dapat dilihat perkembangan pedagang kaki lima di masing-masing pasar sebagai berikut :

Tabel 2.143
Jumlah Pedagang Kaki lima di Kota Sawahlunto Tahun 2014-2018

| No | Nama Pasar | Pedagang kaki lima | | | | | | | | | |
|----|------------------|--------------------|------|------|------|------|-----------------|------|------|------|------|
| | | Asli Sawahlunto | | | | | Luar Sawahlunto | | | | |
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1. | Pasar Sawahlunto | 135 | 139 | 145 | 154 | 160 | 176 | 189 | 189 | 200 | 213 |
| 2. | Pasar Silungkang | 98 | 101 | 101 | 102 | 105 | 31 | 30 | 30 | 29 | 32 |
| 3. | Pasar Talawi | 94 | 95 | 95 | 96 | 98 | 119 | 211 | 213 | 213 | 221 |
| 4. | Pasar Sapan | 27 | 36 | 36 | 38 | 41 | 5 | 8 | 8 | 11 | 18 |



| No | Nama Pasar | Pedagang kaki lima | | | | | | | | | |
|----|--------------------|--------------------|------|------|------|------|-----------------|------|------|------|------|
| | | Asli Sawahlunto | | | | | Luar Sawahlunto | | | | |
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 5. | Pasar Tak Bancah | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 6. | Psr Tumpuak Tengah | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 7. | Pasar Lumindai | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
| 8. | Pasar Kolok Mudik | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 9. | Pasar Songket | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Jumlah | 383 | 401 | 407 | 420 | 434 | 341 | 448 | 451 | 464 | 495 |

Sumber : Dinas Koperindag

Dilihat dari tabel diatas secara keseluruhan terjadi peningkatan yang cukup signifikan terhadap jumlah pedagang kaki lima yang berasal dari luar Sawahlunto, terutama di Pasar Talawi dan Pasar Sawahlunto. Kedua pasar tersebut mudah untuk diakses, transportasi lancar dan mempunyai konsumen yang banyak dari pasar lainnya, terutama pasar Sawahlunto yang merupakan pusat dari seluruh pasar yang ada di Kota Sawahlunto. Kedua pasar diatas berjalan 2 kali dalam seminggu, namun untuk kebutuhan pokok masih tetap ada setiap harinya. Pedagang yang berasal dari luar Sawahlunto ini pada umumnya menjual sayur sayuran, ikan dan bahan lainnya yang mana produksi dari Kota Sawahlunto sendiri tidak mencukupi untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat Kota Sawahlunto seperti, ikan air tawar masih ada pedagang dari tanah datar begitu juga dengan pedaganga cabe merah, sayuran, daun bawang dan lainnya juga masih ada yang berasal luar sawahlunto, seperti tanah datar dan solok. Adanya pedagang luar ini sangat membantu dalam pemenuhan kebutuhan akan sayuran, ikan dan lainnya di Kota Sawahlunto. Sebenarnya apabila pedagang kaki lima ini dapat dikelola dengan baik maka akan menjadi kekuatan ekonomi rakyat jika semakin banyaknya jumlah pedagang kaki lima dari luar Kota akan berpengaruh terhadap lapangan usaha bagi masyarakat kota, untuk itu perlu adanya peran pemerintah daerah dalam mengorganisir pedagang kaki lima dalam kota sehingga menjadi sumber daya baru bagi peningkatan ekonomi kota, sebagai katub pengaman dari pengangguran dan sarana pemenuhan kebutuhan konsumen dari golongan ekonomi lemah.

Untuk melindungi konsumen di pasar maka diwajibkan untuk setiap pasar untuk melaksanakan tera ulang. UU Nomor 23 tahun 2014 tentang kewenangan daerah, kegiatan Tera Ulang UTTP ini merupakan kewenangan daerah, dimana tahun tahun sebelumnya daerah hanya memfasilitasi pelaksanaan kegiatan ini dan yang melakukan tera ulang di datangkan dari propinsi. Dengan telah diberlakukanya UU ini pada tahun 2017,2018 dan 2019 Dinas Koperindag tidak melakukan kegiatan Tera Ulang UTTP Karena sarana dan prasarana serta tenaga tera ulang di Kota Sawahlunto belum ada. Pada akhir tahun 2019 Kota Sawahlunto mendapatkan bantuan dari Kementerian Perdagangan untuk kegiatan Tera Ulang UTTP berupa sarana dan prasarana untuk pelaksanaan Tera Ulang UTTP.

Secara teoritis yang diharapkan dari pasar ini adalah bagaimana berfungsinya pasar bagi pemenuhan kebutuhan masyarakat, untuk itu salah satunya dapat kita lihat dari jumlah pendapatan/omset suatu pasar dalam menjalankan fungsinya tersebut. Rendah tingginya pendapatan/omset pasar inilah yang bisa menjadi salah satu yang mempengaruhi kemajuan suatu pasar dan bagaimana tingkat daya beli masyarakat dipasar tersebut. Kenyamanan dan keamanan konsumen juga sangat diperlukan dalam meningkatkan jual beli di pasar. Tahun 2019 omset pasar-pasar Sawahlunto



totalnya Rp. 23.900 juta, dimana ini masih dibawah target RPJMD, untuk itu pemerintah daerah telah melaksanakan kegiatan rehab dan pemeliharaan terhadap sarana dan prasarana pasar untuk menjaga keamanan dan kenyamanan konsumen sehingga menarik masyarakat untuk berbelanja di pasar. Selain itu monitoring dan evaluasi terhadap pasar terutama dalam pendapatan pasar perlu dilakukan untuk melihat keberhasilan pasar dalam menjalankan fungsinya.

2.3.1.2 Urusan Perindustrian

Sektor industri pengolahan di Kota Sawahlunto merupakan salah satu sektor yang sangat dipertimbangkan dalam kontribusi terhadap Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota. Besarnya nilai kontribusi sangat dipengaruhi pada beberapa hal, diantaranya kebijakan pemerintah di sektor industri, tingkat inflasi, serta standar kualitas produk industri sehingga memiliki daya saing. Pembangunan industri ini diarahkan untuk mencapai struktur ekonomi yang lebih kuat dan seimbang, adapun perkembangan kontribusi sektor industri dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.144
Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Terhadap PDRB Tahun 2015-2019

| KONTRIBUSI | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|--|---------|---------|---------|---------|---------|
| Atas Dasar Harga Berlaku (Milyar rupiah) | 343,94 | 380,77 | 404,96 | 415,94 | 392,43 |
| Total PDRB (Milyar Rupiah) | 2715,01 | 2937,95 | 3165,21 | 3405,16 | 3681,65 |
| Kontribusi (%) | 12,67 | 12,96 | 12,79 | 12,12 | 10,66 |

Sumber : Sawahlunto Dalam Angka

Dari tabel diatas terlihat perkembangan kontribusi atas dasar harga berlaku dari sektor industri pengolahan dari tahun 2015-2018 mengalami peningkatan walaupun naik secara melambat, namun pada tahun 2019 mengalami penurunan seiring dengan penurunan tingkat pertumbuhan ekonomi propinsi dan Nasional. Tahun 2019 kontribusi terhadap PDRB sebesar 10,66 persen dengan nilai rupiah Rp. 392,43 milyar. Perkembangan industri dilihat dari PDRB sektor industri dari tahun 2015-2019 tidak mengalami peningkatan yang signifikan hanya rata-rata meningkat secara konstan, karena itu sangat perlu ada kebijakan dari pemerintah daerah dalam mendorong industri pengolahan untuk meningkatkan produksinya. Dengan meningkatkan pembinaan terhadap industri kecil dan industri rumah tangga Kota Sawahlunto, karena industri kecil dan industri rumah tangga memegang peranan penting dalam pembangunan. Meningkatkan peranan industri kecil dan industri rumah tangga dalam rangka keseimbangan dan pemerataan keikutsertaan masyarakat dalam kegiatan industri serta memperluas lapangan kerja. Seperti melaksanakan pembinaan dan pelatihan terhadap industri kecil dan industri rumah tangga. Perkembangan potensi industri kecil, menengah dan rumah tangga dapat dilihat pada tabel berikut:



Tabel 2.145
Perkembangan Potensi Industri di Kota Sawahlunto Tahun 2015 s/d 2019

| NO | JENIS USAHA | JUMLAH USAHA | | | | | JUMLAH TENAGA KERJA | | | | | NILAI PRODUKSI (Rp) | | | | | BAHAN BAKU (Rp) | | | | |
|----|------------------------|--------------|------|------|------|------|---------------------|------|------|------|------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 | Pertununan / Songket | 786 | 796 | 877 | 914 | 920 | 786 | 796 | 877 | 914 | 950 | Rp11.584.440.000 | Rp 19.909.440.000 | Rp224.024.960.000 | Rp 25.506.582.000 | Rp 26.103.245.000 | Rp 6.175.206.000 | Rp 8.006.904.000 | Rp 9.091.824.000 | Rp 9.546.400.000 | Rp 9.821.835.000 |
| 2 | Kerupuk Ubi | 158 | 148 | 138 | 160 | 169 | 415 | 353 | 350 | 350 | 349 | Rp 2.745.420.000 | Rp 2.924.556.000 | Rp2.924.556.000 | Rp 3.114.652.000 | Rp 2.924.556.000 | Rp 1.368.420.000 | Rp 1.396.200.000 | Rp 1.408.510.000 | Rp 1.493.200.000 | Rp 1.388.510.000 |
| 3 | Tahu Tempe | 35 | 35 | 37 | 38 | 52 | 70 | 70 | 69 | 69 | 69 | Rp 1.922.395.000 | Rp 1.922.350.000 | Rp1.921.630.000 | Rp 2.075.361.000 | Rp 1.964.630.000 | Rp 1.145.385.000 | Rp 1.145.276.000 | Rp 1.144.107.000 | Rp 1.201.300.000 | Rp 1.144.107.000 |
| 4 | Kue dan Makanan Ringan | 56 | 56 | 54 | 56 | 70 | 195 | 191 | 156 | 156 | 137 | Rp 5.498.584.000 | Rp 5.658.000.000 | Rp5.815.800.000 | Rp 6.164.748.000 | Rp 6.272.700.000 | Rp 3.079.750.000 | Rp 2.948.260.000 | Rp 3.429.230.000 | Rp 3.630.980.000 | Rp 3.921.250.000 |
| 5 | Batu Bata | 59 | 36 | 35 | 35 | 42 | 87 | 92 | 92 | 92 | 105 | Rp 4.429.500.000 | Rp 4.579.200.000 | Rp4.579.200.000 | Rp 4.716.576.000 | Rp 4.854.200.000 | Rp 1.105.000.000 | Rp1.183.000.000 | Rp 1.201.000.000 | Rp 1.261.100.000 | Rp 1.320.000.000 |
| 6 | Perabot | 25 | 25 | 28 | 36 | 36 | 46 | 39 | 59 | 59 | 59 | Rp 1.908.696.000 | Rp 1.969.746.000 | Rp2.521.796.000 | Rp 2.647.886.000 | Rp 2.421.799.000 | Rp 1.073.573.000 | Rp 1.082.169.000 | Rp 1.146.185.000 | Rp 1.214.970.000 | Rp 1.146.185.000 |
| 7 | Anyaman Bambu | 7 | 28 | 30 | 20 | 22 | 28 | 28 | 38 | 38 | 38 | Rp 44.000.000 | Rp 51.200.000 | Rp 54.840.000 | Rp 59.227.000 | Rp 75.540.000 | Rp 23.000.000 | Rp 28.750.000 | Rp 38.850.000 | Rp 45.000.000 | Rp 42.500.000 |
| 8 | Minyak Kelapa | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | Rp 368.400.000 | Rp 399.200.000 | Rp 296.400.000 | Rp 326.040.000 | Rp 350.000.000 | Rp 132.200.000 | Rp 174.800.000 | Rp 110.930.000 | Rp 115.367.000 | Rp 135.000.000 |
| 9 | Bubuk Kopi | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | Rp 1.092.000.000 | Rp 1.092.000.000 | Rp1.092.000.000 | Rp 1.146.600.000 | Rp 1.354.200.000 | Rp 628.000.000 | Rp 628.000.000 | Rp 628.000.000 | Rp 671.960.000 | Rp 705.240.000 |
| 10 | Minyak Atsiri | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | Rp 33.600.000 | Rp 33.600.000 | Rp 33.600.000 | Rp 46.368.000 | Rp 50.450.000 | Rp 29.829.000 | Rp 29.829.000 | Rp 29.829.000 | Rp 32.500.000 | Rp 33.650.000 |
| 11 | Rendo | 11 | 10 | 10 | 10 | 18 | 11 | 11 | 11 | 11 | 18 | Rp 103.680.000 | Rp 103.680.000 | Rp 103.680.000 | Rp 112.129.000 | Rp 150.375.000 | Rp 98.074.000 | Rp 98.074.000 | Rp 98.074.000 | Rp 102.978.000 | Rp 109.850.000 |
| 12 | Sapu Ijuk | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 13 | 13 | 13 | 13 | Rp 35.450.000 | Rp 36.100.000 | Rp 40.200.000 | Rp 43.416.000 | Rp 45.650.000 | Rp 22.500.000 | Rp 24.200.000 | Rp 28.140.000 | Rp 31.250.000 | Rp 32.650.000 |
| 13 | Apar Besi | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 6 | 2 | 3 | 3 | 3 | Rp 39.500.000 | Rp 27.100.000 | Rp 14.940.000 | Rp 15.890.000 | Rp 16.750.000 | Rp 17.100.000 | Rp 13.550.000 | Rp 4.980.000 | Rp 5.200.000 | Rp 5.466.000 |
| 14 | Batako | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | Rp 807.160.000 | Rp 809.460.000 | Rp 816.360.000 | Rp 881.668.000 | Rp 1.054.520.000 | Rp 458.600.000 | Rp 459.750.000 | Rp 414.700.000 | Rp 435.436.000 | Rp 540.650.000 |



PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO

| NO | JENIS USAHA | JUMLAH USAHA | | | | | JUMLAH TENAGA KERJA | | | | | NILAI PRODUKSI (Rp) | | | | | BAHAN BAKU (Rp) | | | | |
|---------------|------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 15 | Batu Aji | 9 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | 2 | 2 | 2 | Rp 13.500.000 | Rp 20.175.000 | Rp 31.000.000 | Rp 42.000.000 | Rp 45.000.000 | Rp 4.010.000 | Rp 5.043.000 | Rp 7.750.000 | Rp 8.550.000 | Rp 9.000.000 |
| 16 | Kerajinan dan Batubara | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | Rp 1.428.000 | Rp 187.100.000 | Rp 307.800.000 | Rp 329.346.000 | Rp 350.875.000 | Rp 455.000 | Rp 46.775.000 | Rp 76.950.000 | Rp 85.400.000 | Rp 88.650.000 |
| 17 | Bengkel | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 15 | 18 | 18 | 18 | 18 | Rp 22.676.000 | Rp 334.600.000 | Rp 744.650.000 | Rp 781.882.000 | Rp 800.950.000 | Rp 8.393.000 | Rp 111.876.000 | Rp 248.625.000 | Rp 261.058.000 | Rp 287.500.000 |
| 18 | Payung Kertas | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Rp 15.080.000 | Rp 15.205.000 | Rp 15.625.000 | Rp 21.800.000 | Rp 23.250.000 | Rp 9.375.000 | Rp 9.375.000 | Rp 9.375.000 | Rp 12.000.000 | Rp 13.500.000 |
| 19 | Konveksi | 1 | 3 | 3 | 3 | 5 | 12 | 14 | 14 | 14 | 25 | Rp 384.375.000 | Rp 398.775.000 | Rp 398.775.000 | Rp 418.714.000 | Rp 646.520.000 | Rp 192.200.000 | Rp 203.732.000 | Rp 203.732.000 | Rp 217.900.000 | Rp 347.850.000 |
| 20 | Keramik | 1 | 1 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Rp 20.000.000 | Rp 20.000.000 | Rp 15.000.000 | Rp 17.500.000 | Rp 18.000.000 | Rp 6.000.000 | Rp 6.000.000 | Rp 7.000.000 | Rp 8.500.000 | Rp 8.750.000 |
| 21 | Pengecoran Logam | 1 | 1 | | | | 1 | 1 | | | | Rp 225.500.000 | Rp 225.500.000 | - | - | - | Rp 112.000.000 | Rp 112.000.000 | - | - | - |
| 22 | Percetakan | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | Rp 1.245.000.000 | Rp 1.245.000.000 | Rp 1.840.000.000 | Rp 1.932.000.000 | Rp 2.050.000.000 | Rp 525.000.000 | Rp 525.000.000 | Rp 1.135.000.000 | Rp 1.214.500.000 | Rp 1.540.000.000 |
| 23 | Sepatu | 1 | | | | | 1 | | | | | Rp 432.000.000 | - | - | - | - | Rp 168.000.000 | - | - | - | - |
| 24 | Depot Air Minum | | | | | 55 | | | | | 165 | - | - | - | - | Rp 7.920.600.000 | - | - | - | - | Rp 120.000.000 |
| JUMLAH | | 1192 | 1190 | 1254 | 1314 | 1432 | 1748 | 1713 | 1773 | 1810 | 2022 | Rp 32.972.384.000 | Rp 41.954.518.000 | Rp 47.592.812.000 | Rp 50.480.385.000 | Rp 59.493.210.000 | Rp 16.382.070.000 | Rp 18.238.563.000 | Rp 20.462.791.000 | Rp 21.595.549.000 | Rp 22.762.143.000 |

Sumber : Profil Daerah Kota Sawahlunto

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa perkembangan industri di Kota Sawahlunto sejak tahun 2015-2019 mempunyai kecenderungan konstan sehingga nilai PDRB sektor industri pun terlihat konstan dan cenderung tidak ada peningkatan, malahan di tahun 2019 mengalami penurunan yang cukup signifikan. Dari 24 jenis usaha yang ada di Kota Sawahlunto dilihat dari aspek jumlah usaha, jumlah tenaga kerja, nilai produksi dan bahan baku yang menunjukkan peningkatan hanya di usaha pertenunan/songket dan usaha konveksi, sedangkan yang lainnya hanya berjalan seperti biasa tidak ada peningkatan. Dari permasalahan tersebut Pemerintah Kota harus bekerja keras dalam percepatan perkembangan industri-industri yang ada melalui kegiatan-kegiatan yang dijalankan oleh Dinas Perindagkopnaker, mulai dari fasilitasi kemasan produk, pengembangan industri kerajinan, pelatihan dan workshop untuk industri kecil dan rumah tangga dan sebagainya. Upaya pengembangan dan perluasan kegiatan industri perlu ditingkatkan dengan pembinaan yang didorong melalui penciptaan iklim yang lebih merangsang bagi penanaman modal. Pengembangan industri juga didukung dengan mengupayakan peningkatan sarana dan prasarana sehingga tercipta kondisi yang baik dalam pengembangan kegiatan industri.

2.3.4. LAYANAN URUSAN PENUNJANG

2.3.4.1. Urusan Perencanaan Pembangunan

Dokumen perencanaan pembangunan daerah yang menjadi pedoman dalam perencanaan pembangunan terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka 5 tahun, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk jangka 1 tahun serta Rencana Tata Ruang Wilayah untuk jangka 20 tahun. Ketersediaan masing-masing dokumen tersebut dapat dilihat pada tabel:

Tabel 2.146

Ketersediaan Dokumen Perencanaan Kota Sawahlunto Tahun 2015-2019

| No. | Uraian | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 1. | Dokumen RPJPD yang telah Ditetapkan dengan PERDA | ada | ada | ada | ada | ada |
| 2. | Dokumen RPJMD yang telah Ditetapkan dengan PERDA/PERKADA | ada | ada | ada | ada | ada |
| 3. | Dokumen RKPD yang telah Ditetapkan dengan PERKADA | ada | ada | ada | ada | ada |
| 4. | Dokumen RTRW yang telah Ditetapkan dengan PERDA | ada | ada | ada | ada | ada |

Sumber : Barenlitbangda Kota Sawahlunto

Jika dilihat dari aspek ketersediaan maka dokumen perencanaan pembangunan sudah tersedia sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Namun demikian yang perlu mendapat perhatian terkait dengan dokumen perencanaan tersebut adalah masih rendahnya kualitas dokumen perencanaan tersebut. Hal tersebut dapat dilihat dari belum terlihatnya permasalahan dan isu strategis yang konkrit sehingga arah kebijakan dan program serta kegiatan pembangunan belum terfokus sesuai permasalahan dan isu strategis yang ada. Sehingga program dan kegiatan pembangunan yang telah dijalankan belum memperlihatkan perbaikan terhadap indikator pembangunan secara signifikan. Oleh karena itu upaya agar program dan kegiatan yang telah dijalankan memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat maka kegiatan pembangunan harus focus sesuai dengan permasalahan yang dihadapi.

**2.3.4.2. Urusan Keuangan**

Di dalam Undang-Undang yang mengatur Keuangan Negara, terdapat penegasan di bidang pengelolaan keuangan, yaitu bahwa kekuasaan pengelolaan keuangan negara adalah sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan; dan kekuasaan pengelolaan keuangan negara dari presiden sebagian diserahkan kepada gubernur/bupati/wali kota selaku kepala pemerintah daerah untuk mengelola keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Ketentuan tersebut berimplikasi pada pengaturan pengelolaan keuangan daerah, yaitu bahwa Kepala daerah (gubernur/bupati/wali kota) adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dan bertanggungjawab atas pengelolaan keuangan daerah sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan daerah. Dalam melaksanakan kekuasaannya, kepala daerah melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaan keuangan daerah kepada para pejabat perangkat daerah. Dengan demikian pengaturan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah melekat dan menjadi satu dengan pengaturan pemerintahan daerah, yaitu dalam Undang-Undang mengenai Pemerintahan Daerah.

Anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah. APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Kepala daerah mengajukan rancangan Perda tentang APBD disertai penjelasan dan dokumen-dokumen pendukungnya kepada DPRD untuk memperoleh persetujuan bersama. Rancangan Perda kabupaten/kota tentang APBD yang telah disetujui bersama dan rancangan Peraturan Bupati/Wali kota tentang Penjabaran APBD sebelum ditetapkan oleh Bupati/Wali kota paling lama 3 (tiga) hari disampaikan kepada Gubernur untuk dievaluasi.

Tahun Anggaran 2017 realisasi APBD Kota Sawahlunto dapat dijabarkan sebagai berikut: Pendapatan Rp. 585.387.335.481,37 sedangkan Belanja Rp. 579.276.476.215,19 Pembiayaan Rp. 8.394.077.299,69 sehingga Silpa menjadi Rp. 14.504.936.565,87.

Realisasi APBD Tahun Anggaran 2016 sebagai berikut : Pendapatan Rp. 588.749.624.048,54 Belanja Rp. 602.138.436.500,12 Pembiayaan Rp. 29.045.393.752,93 Silpa Rp. 15.656.581.301,35. Selanjutnya Realisasi APBD Kota Sawahlunto Tahun Anggaran 2015, Pendapatan Rp. 537.483.538.214,19 Belanja Rp. 549.999.794.211,56 Pembiayaan Rp. 59.856.975.378,63 Silpa Rp. 47.340.719.381,26

Realisasi APBD Tahun Anggaran 2014, Pendapatan Rp. 488.505.317.004,27 Belanja Rp. 472.392.963.810,74 Pembiayaan Rp. 57.194.793.261,10 Silpa Rp. 73.307.146.454,63. Terakhir realisasi APBD Tahun Anggaran 2013, Pendapatan Rp. 428.681.501.793,92 Belanja Rp. 415.971.618.343,89 Pembiayaan Rp. 40.916.216.940,07 dan Silpa Rp. 53.625.100.390,10. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.147
Realisasi APBD Kota Sawahlunto

| URAIAN | REALISASI | | | |
|------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| Pendapatan | 537.483.538.214,19 | 588.749.624.048,54 | 585.387.335.481,37 | 613.224.123.938 |
| Belanja | 549.999.794.211,56 | 602.138.436.500,12 | 579.276.476.215,19 | 667.200.573.371,35 |
| Pembiayaan | 59.856.975.378,63 | 29.045.393.752,93 | 8.394.077.299,69 | 6.946.009.591,87 |
| Silpa | 47.340.719.381,26 | 15.686.581.301,35 | 14.504.936.565,87 | 4.848.420.336,05 |

Sumber : BPKAD Sawahlunto

**2.3.4.3. Urusan Pengawasan**

Untuk pemeriksaan dilakukan secara internal dan eksternal. Untuk internal yang dilakukan oleh Inspektorat, dan untuk eksternal dilaksanakan oleh BPKP.

Tabel 2.148
Jumlah Auditor di Kota Sawahlunto Tahun 2014-2018

| No | Uraian Jabatan Fungsional | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Ket |
|----|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----|
| 1 | Auditor | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| | Utama | - | | | - | - | |
| | Madya | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| | Muda | - | 2 | 2 | 3 | 3 | |
| | Pertama | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
| | Pelaksana | 1 | - | - | - | - | |
| | Pelaksana Lanjutan | - | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 2 | P2UPD (Pejabat Pengawas Urusan Perangkat Daerah) | 7 | 7 | 5 | 4 | 4 | |
| | Madya | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | |
| | Muda | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | |
| | Utama | | | | | | |
| 3 | Auditor Kepegawaian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Total | 12 | 15 | 13 | 12 | 12 | |

Sumber : Inspektorat Kota Sawahlunto

Dari data di atas kita lihat jumlah pejabat fungsional di Inspektorat Kota Sawahlunto jumlahnya mengalami fluktuasi. Pada tahun 2014 jumlah pejabat fungsional adalah 12 orang meningkat pada tahun 2015 menjadi 15 orang, dan menurun kembali menjadi 12 orang pada tahun 2017 dan tidak mengalami perubahan pada tahun 2018, Hal ini disebabkan adanya pegawai yang meninggal dan pindah tugas. Sedangkan untuk auditor kepegawaian di Kota Sawahlunto belum ada.

Nilai pencapaian SAKIP/ LAKIP yang juga menjadi IKU Kota Sawahlunto pada RPJMD tahun 2014 - 2018 tidak mencapai target, dari yang ditargetkan mendapat nilai B pada tahun 2016. Pencapaian nilai SAKIP/ LAKIP pada tahun 2016 adalah CC. kendala yang ditemukan sehingga nilai SAKIP/ LAKIP tidak mencapai target adalah sebagai berikut.

Hasil evaluasi LAKIP Kota, dimana capaian realisasinya 0%, dan masalah yang dihadapi adalah:

1. Masih rendahnya tingkat efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran pembangunan Kota Sawahlunto dibandingkan dengan capaian kinerjanya.
2. Dokumen perencanaan kinerja di level satuan kerja belum sepenuhnya merupakan penjabaran / cascade dari tujuan dan sasaran pemerintah daerah, belum dilengkapi dengan indicator kinerja yang relevan dan terukur, serta target-target yang memadai.
3. Prosedur penganggaran satuan kerja belum sepenuhnya selaras dengan rencana strategis dalam merencanakan kegiatan yang benar-benar akan menghasilkan outcome yang terukur.
4. Perjanjian kinerja belum sepenuhnya dilengkapi dengan rencana aksi yang menguraikan secara rinci berbagai aktifitas yang akan dilakukan serta anggaran yang digunakan.
5. Sistem monitoring belum dilaksanakan secara konsisten untuk menjamin pencapaian kinerja sesuai dengan rencana aksi dan target-target yang ingin dicapai.

6. Sistem evaluasi masih sebatas pada evaluasi pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran, belum menyentuh pada evaluasi keberhasilan pelaksanaan program, sehingga belum mampu memberikan umpan balik bagi perbaikan kinerja.

Tabel 2.149**Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) 5 Tahun Terakhir**

| Tahun | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|-----------|-------|-------|------|-------|-------|
| Peringkat | C | CC | B | B | B |
| Nilai | 42,77 | 50,11 | | 60,22 | 60,06 |

Sumber : Bagian Organisasi Setdako Sawahlunto

2.3.4.4. Urusan Sekretariat Dewan

- Adanya tersedianya rencana kerja tahunan pada setiap kelengkapan alat-alat DPRD Kota
- Tersusun dan terintegrasinya program-program kerja DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, fungsi pembentukan perda dan fungsi anggaran dalam dokumen kerja Lima Tahunan (RPJM) maupun dokumen Tahunan (RKPD)
- Terintegrasi program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan perda dan anggaran kedalam dokumen perencanaan

Untuk penetapan PERDA tepat waktu yang diukur adalah PERDA APBD dan APBD Perubahan. Untuk penetapan APBD dilakukan tepat waktu, sedangkan APBD Perubahan penetapannya tidak pada waktu yang ditentukan.

Tabel 2.150**Penetapan Perda Tepat Waktu 5 Tahun Terakhir**

| No | Tahun | Angka Pencapaian |
|----|-------|------------------|
| 1 | 2015 | 50 % |
| 2 | 2016 | 50 % |
| 3 | 2017 | 50 % |
| 4 | 2018 | 50 % |
| 5 | 2019 | 50 % |

Sumber : Bagian Hukum SETDAKO

2.4. ASPEK DAYA SAING DAERAH

Aspek daya saing daerah terdiri dari fokus kemampuan ekonomi daerah, fokus fasilitas wilayah atau infrastruktur, fokus iklim berinvestasi dan fokus sumber daya manusia.

2.4.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

Analisis kinerja atas aspek kemampuan ekonomi daerah dilakukan terhadap indikator pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita, pengeluaran konsumsi non pangan per kapita, produktivitas total daerah, dan nilai tukar petani.

a. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita

Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga merupakan salah satu dari tujuh komponen pembentuk Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Menurut Pengeluaran (*demand side*). Komponen lainnya adalah Pengeluaran Konsumsi



LNPRT, Pengeluaran Konsumsi Pemerintah, Pembentukan Modal Tetap Bruto, Perubahan Inventori, Ekspor dan Impor.

Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga merupakan pengeluaran atas barang dan jasa oleh rumah tangga untuk tujuan konsumsi. Rumah tangga didefinisikan sebagai individu atau kelompok individu yang tinggal bersama dalam suatu bangunan tempat tinggal. Mereka mengumpulkan pendapatan, memiliki harta dan kewajiban, serta mengkonsumsi barang dan jasa secara bersama-sama, utamanya kelompok makanan dan perumahan.

Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga mencakup pengeluaran atas barang dan jasa oleh rumah tangga residen, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar wilayah domestik suatu region. Jenis barang dan jasa tersebut dapat diklasifikasikan sebagai berikut : 1) Makanan, Minuman, dan Rokok; 2) Pakaian dan Alas Kaki; 3) Perumahan, Perkakas, Perengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga; 4) Kesehatan dan Pendidikan; 5) Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya; 6) Hotel dan Restoran, dan 7) Lainnya.

Nilai PDRB ADHB Kota Sawahlunto Menurut Pengeluaran selama tahun 2015-2019 tetap didominasi oleh Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga. Tahun 2015, Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Kota Sawahlunto sebesar 1.507,97 miliar rupiah, ini berarti proporsi Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga terhadap total PDRB ADHB tahun 2015 sebesar 55,54 persen. Kemudian proporsi ini terus meningkat dari tahun ke tahun. Dan pada tahun 2019 proporsi Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga terhadap total PDRB ADHB meningkat menjadi sebesar 56,28 persen. Dominannya Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga terhadap PDRB juga terjadi pada tingkat Provinsi Sumatera Barat dan Nasional. Proporsi Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Provinsi Sumatera Barat terhadap total PDRB ADHB per tahun berkisar antara 52,69 – 53,95 persen. Sedangkan untuk tingkat nasional, proporsi Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga terhadap total PDRB ADHB per tahun berkisar antara 55,66 – 56,66 persen.

Tabel 2.151
Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Kota Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat, Nasional Tahun 2015 – 2019

| Uraian | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Pengeluaran Konsumsi RT ADHB Kota Sawahlunto (Miliar Rupiah) | 1.507,97 | 1.629,90 | 1.751,99 | 1.897,42 | 2.071,92 |
| Pengeluaran Konsumsi RT ADHB Provinsi Sumatera Barat (Miliar Rupiah) | 96.531,83 | 103.844,97 | 112.706,03 | 122.170,28 | 132.935,24 |
| Pengeluaran Konsumsi RT ADHB Nasional (Miliar Rupiah) | 6.490.929,70 | 7.027.023,50 | 7.623.056,10 | 8.274.211,70 | 8.965.837,10 |
| Proporsi Pengeluaran Konsumsi RT terhadap PDRB ADHB Kota Sawahlunto (%) | 55,54% | 55,48% | 55,35% | 55,72% | 56,28% |
| Proporsi Pengeluaran Konsumsi RT terhadap PDRB ADHB Provinsi Sumatera Barat (%) | 53,64% | 52,96% | 52,69% | 52,99% | 53,95% |
| Proporsi Pengeluaran Konsumsi RT terhadap PDRB ADHB Nasional (%) | 56,31% | 56,66% | 56,09% | 55,76% | 56,62% |
| Jumlah Penduduk Kota Sawahlunto (Jiwa) | 60.186 | 60.778 | 61.398 | 61.898 | 62.524 |
| Jumlah Penduduk Provinsi Sumatera Barat (Jiwa) | 5.196.289 | 5.259.528 | 5.321.489 | 5.382.077 | 5.441.197 |



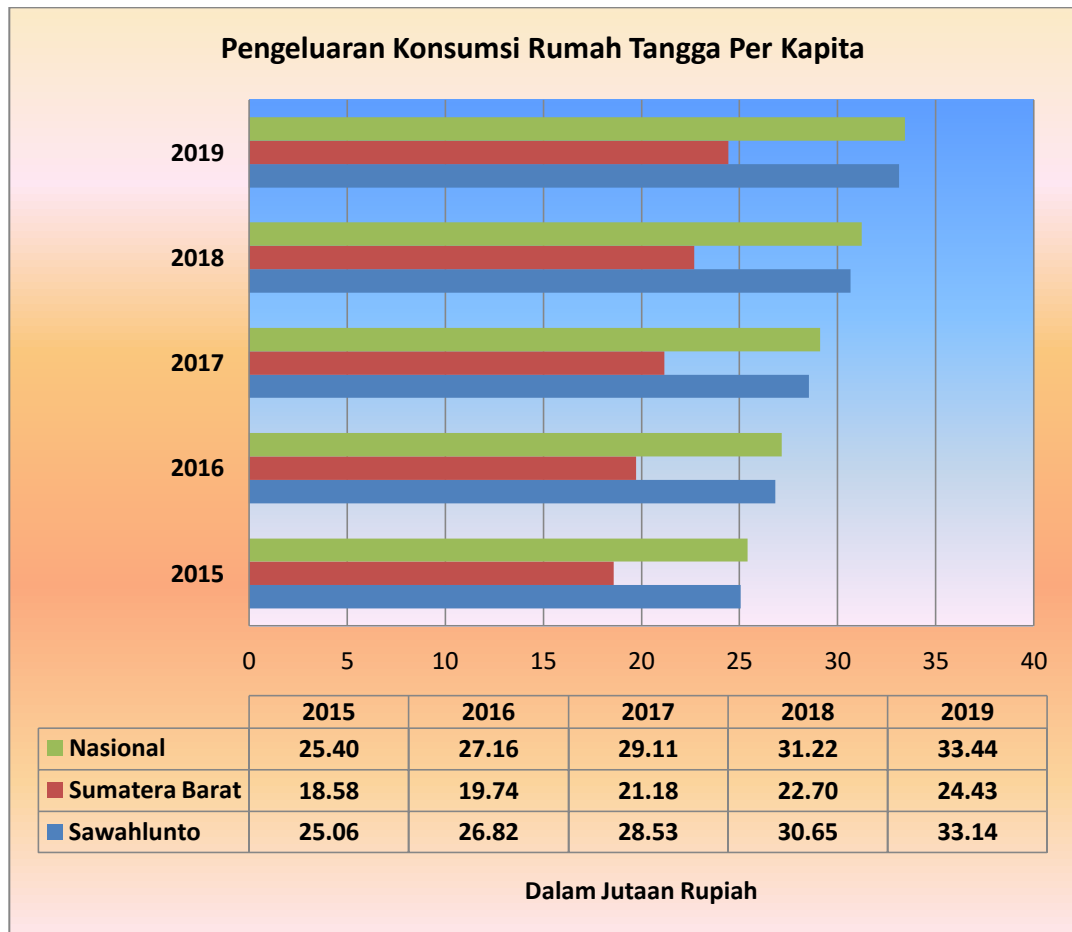
| | | | | | |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Jumlah Penduduk Nasional (Jiwa) | 255.500.000 | 258.700.000 | 261.900.000 | 265.000.000 | 268.100.000 |
| Laju Pertumbuhan Pengeluaran Konsumsi RT per Kapita Kota Sawahlunto (%) | 9,28% | 7,03% | 6,41% | 7,43% | 8,10% |
| Laju Pertumbuhan Pengeluaran Konsumsi RT per Kapita Provinsi Sumatera Barat (%) | N/A | 6,28% | 7,27% | 7,8% | 7,63% |
| Laju Pertumbuhan Pengeluaran Konsumsi RT per Kapita Nasional (%) | N/A | 6,92% | 7,16% | 7,27% | 7,11% |

Sumber : BPS, PDRB Kota Sawahlunto Menurut Pengeluaran 2010-2019, Provinsi Sumatera Barat Dalam Angka 2020 Statistik Indonesia 2020

Seiring dengan meningkatnya Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga dan jumlah penduduk Kota Sawahlunto periode 2015-2019, **Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga per Kapita** juga **mengalami peningkatan**. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga per Kapita tertinggi terjadi pada tahun 2019 sebesar 33,14 juta rupiah dengan laju pertumbuhan 8,10 % dari tahun sebelumnya dan terendah pada tahun 2015 sebesar 25,06 juta rupiah dengan laju pertumbuhan 9,28 %.

Grafik 2.27

Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita Kota Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat, Nasional Tahun 2015 – 2019



Sumber : BPS, PDRB Kota Sawahlunto Menurut Pengeluaran 2010-2019, Provinsi Sumatera Barat Dalam Angka 2020 Statistik Indonesia 2020

Demikian juga dengan Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga per Kapita Provinsi Sumatera Barat dan nasional, mengalami peningkatan yang signifikan dari

tahun ke tahun. Tahun 2015, Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga per Kapita Provinsi Sumatera Barat sebesar 18,58 juta rupiah dan Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga per Kapita Nasional sebesar 25,40 juta rupiah. Dan Tahun 2019, dan Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga per Kapita Provinsi Sumatera Barat sebesar 24,43 juta rupiah dengan laju pertumbuhan 7,63%, sedangkan Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga per Kapita Nasional sebesar 33,44 juta rupiah dengan laju pertumbuhan 7,11%. Berdasarkan grafik tersebut di atas, Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga per Kapita Kota Sawahlunto lebih tinggi dari Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga per Kapita Provinsi Sumatera Barat, namun lebih rendah dari Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga per Kapita Nasional.

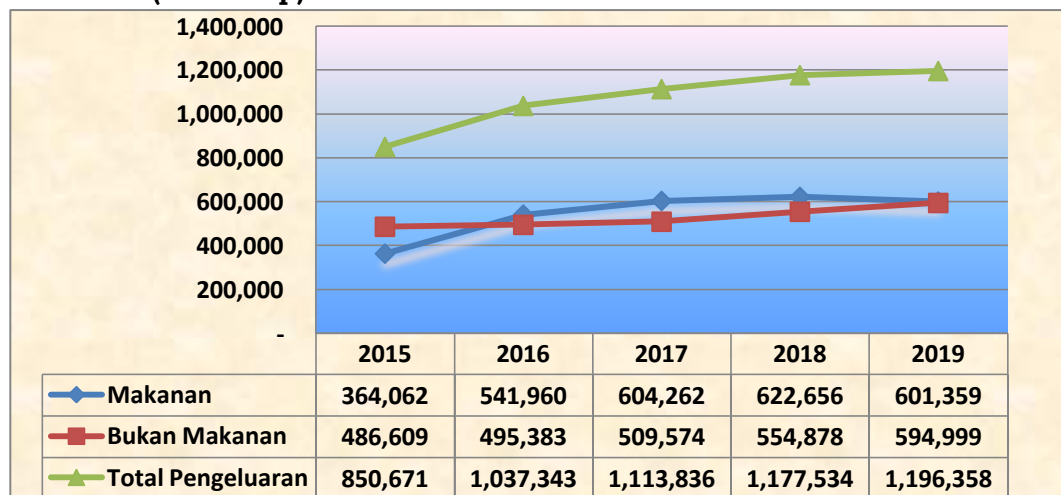
b. Pengeluaran Konsumsi Non Pangan Per Kapita

Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga berkaitan erat dengan kemampuan konsumsi dan daya beli masyarakat pada skala rumah tangga. Semakin tinggi angka konsumsi rumah tangga, semakin tinggi kemampuan ekonomi masyarakat, dan hal ini mengindikasikan perkembangan ekonomi yang positif. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga dikelompokkan dalam : Pengeluaran Konsumsi untuk Makanan dan Pengeluaran Konsumsi Non Makanan. Dengan adanya pengelompokan pengeluaran tersebut, maka dapat diidentifikasi perkembangan karakteristik pengeluaran masyarakat selama ini.

Selama rentang waktu tahun 2015-2019, kelompok pengeluaran konsumsi makanan mendominasi pengeluaran konsumsi rumah tangga di Kota Sawahlunto, kecuali tahun 2015, kelompok pengeluaran konsumsi non makanan lebih tinggi dari pengeluaran konsumsi non makanan.

Grafik 2.28

Rata-Rata Pengeluaran Konsumsi Per Kapita Sebulan Makanan dan Bukan Makanan (Dalam Rp) Kota Sawahlunto Tahun 2015 - 2019



Sumber : BPS, Sawahlunto Dalam Angka 2016-2018, Provinsi Sumatera Barat Dalam Angka 2020

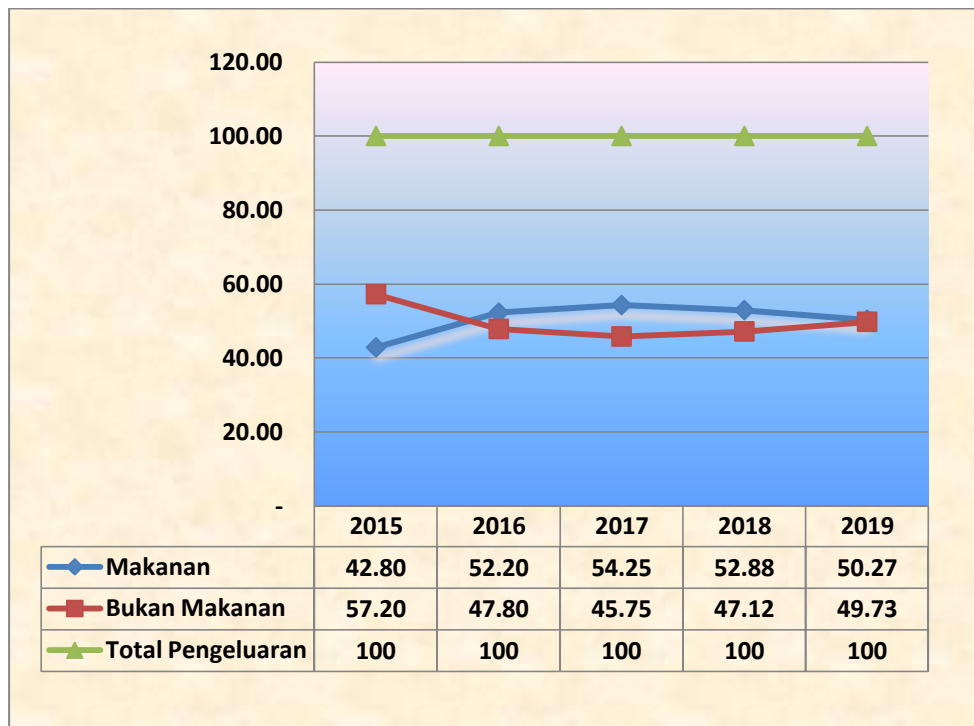
Pada Tahun 2019, pengeluaran konsumsi per kapita per bulan untuk kebutuhan makanan di Kota Sawahlunto sebesar Rp. 601.359 atau 50,27%. Sedangkan untuk konsumsi non makanan, pengeluaran konsumsi per kapita per bulan di Kota Sawahlunto adalah Rp. 594.999 atau 49,73%, dengan pengeluaran konsumsi terbesar untuk perumahan dan fasilitas rumah tangga. Dengan demikian pada tahun 2019, distribusi pengeluaran konsumsi per kapita per bulan untuk non makanan di Kota Sawahlunto lebih kecil dari pengeluaran konsumsi per kapita per bulan untuk makanan (49,73 % < 50,27%).

Hal ini bertolak belakang dengan kondisi tahun 2015, dimana konsumsi per kapita per bulan untuk kebutuhan non makanan Kota Sawahlunto adalah Rp. 486.609,62 atau 57,2 %, sedangkan pengeluaran konsumsi per kapita

perbulan untuk kebutuhan makanan di Kota Sawahlunto sebesar Rp. 364.061,73 atau 42,8 %. Dengan demikian pada tahun 2015, proporsi pengeluaran konsumsi per kapita per bulan non makanan lebih besar dari pengeluaran konsumsi untuk makanan (57,2 % > 42,8 %).

Berdasarkan data tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa kondisi ekonomi masyarakat Kota Sawahlunto pada tahun 2015 lebih baik atau lebih sejahtera dari pada tahun setelahnya. Karena proporsi pengeluaran konsumsi non makanan lebih besar dari pengeluaran konsumsi untuk makanan. Hal ini sejalan dengan teori dari ekonomi modern / maju menurut Walt Whitman Rostow, salah satu ciri perekonomian yang paling modern adalah jika tujuan utama konsumsi masyarakatnya adalah untuk meningkatkan arti hidup, sehingga masyarakat lebih cenderung untuk memenuhi kebutuhan tersier dibanding kebutuhan primer dan sekunder. Dengan demikian semakin tinggi perekonomian masyarakat, maka konsumsi untuk kebutuhan non makanan semakin tinggi.

Grafik 2.29
Persentase Pengeluaran Konsumsi Per Kapita Sebulan Makanan dan Bukan Makanan Kota Sawahlunto Tahun 2015 – 2019



Sumber : BPS, Sawahlunto Dalam Angka 2015-2019, Provinsi Sumatera Barat Dalam Angka 2020

Penyebab kondisi ekonomi masyarakat Kota Sawahlunto pada tahun 2015 lebih baik atau lebih sejahtera dari pada tahun-tahun adalah karena turunnya laju inflasi/penurunan harga pada kelompok bahan makanan dan kelompok transportasi, komunikasi dan jasa keuangan pada beberapa bulan di awal tahun 2015. Penurunan harga pada sub kelompok bahan makanan disebabkan oleh penurunan drastis harga cabe merah dan juga karena adanya penurunan harga Bahan Bakar Minyak (Sumber : Indeks Harga Konsumen Kota Padang 2007 – 2016 dan Kota Bukittinggi 2013 – 2016, hal. 14).

c. Produktivitas Total Daerah

Produktivitas total daerah merupakan indikator daya saing daerah yang dihitung dengan cara membagi PDRB Atas Dasar Harga Konstan dengan total tenaga kerja. Produktivitas Total Daerah menggambarkan efektifitas tenaga kerja dalam menambah jumlah produksi barang dan jasa di suatu wilayah, dengan



kata lain indikator ini menggambarkan besaran produktivitas tenaga kerja. Perkembangan Produktivitas Total Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2015 – 2019 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.152
Produktivitas Total Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2015 - 2019

| NO | Uraian | Tahun | | | | |
|----|---|----------|---------------------|----------|----------|----------|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1. | PDRB Atas Dasar Harga Konstan (Miliar Rupiah) | 2.251,78 | 2.380,52 | 2.517,15 | 2.656,19 | 2.797,94 |
| 2 | Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas Yang Bekerja (Jiwa) | 27.862 | Data Tidak Tersedia | 29.127 | 30.320 | 29.117 |
| 3 | Produktivitas Total Daerah (Juta /Jiwa) | 80,82 | - | 86,42 | 87,605 | 96,093 |

Sumber: BPS, Sawahlunto Dalam Angka 2016-2020, Data diolah 2020

Berdasarkan tabel di atas, produktivitas tenaga kerja di Kota Sawahlunto selama tahun 2015-2019 menunjukkan angka yang cenderung meningkat. Pada tahun 2015, produktivitas tenaga kerja Kota Sawahlunto sebesar 80,82 juta rupiah/jiwa, meningkat menjadi 86,42 juta rupiah/jiwa di tahun 2017, meningkat lagi menjadi 87,605 juta rupiah/jiwa di tahun 2018 dan 96,093 juta rupiah/jiwa di tahun 2019, sedangkan data tahun 2016 tidak tersedia karena pada tahun tersebut penghitungan sampel oleh BPS hanya sampai tingkat provinsi untuk penghematan dana.

Produktivitas total daerah juga dapat dihitung menurut lapangan usaha dengan tujuan untuk mengidentifikasi kinerja sektor-sektor perekonomian secara lebih spesifik dengan didasarkan pada nilai kontribusi serta serapan tenaga kerjanya. Produktivitas total daerah menurut lapangan usaha diperoleh dari jumlah penduduk yang bekerja pada lapangan usaha utama dengan PDRB yang dihasilkan oleh lapangan usaha utama tersebut.

Tabel 2.153
Produktivitas Total Daerah Kota Sawahlunto Berdasarkan Lapangan Usaha Tahun 2015 - 2019

| PDRB Atas Dasar Harga Konstan (Milliar Rupiah) | | | | |
|---|--------|---------|---------|---------|
| Sektor | 2015 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Pertanian | 198,65 | 207,65 | 211,63 | 218,12 |
| Industri Pengolahan | 279,55 | 318,90 | 323,34 | |
| Perdagangan Besar, Eceran, Rumah Makan dan Hotel | 384,69 | 440,48 | 467,5 | |
| Jasa Kemasyarakatan, Sosial dan Perorangan | 442,32 | 506,47 | 538,87 | |
| Lainnya | 946,56 | 1043,65 | 1114,84 | |
| Manufaktur | | | | 872,45 |
| Jasa | | | | 1707,36 |
| Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas Yang Bekerja (Jiwa) | | | | |
| Sektor | 2015 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Pertanian | 4.627 | 4.889 | 4.991 | 4.027 |
| Industri Pengolahan | 2.467 | 3.553 | 4.227 | |
| Perdagangan Besar, Eceran, Rumah Makan dan Hotel | 6.559 | 5.990 | 5.588 | |
| Jasa Kemasyarakatan, Sosial dan Perorangan | 7.696 | 7.007 | 7.216 | |
| Lainnya | 6.513 | 7.688 | 8.298 | |
| Manufaktur | | | | 8.367 |



| PDRB Atas Dasar Harga Konstan (Milliar Rupiah) | | | | |
|---|---------|---------|---------|---------|
| Sektor | 2015 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Jasa | | | | 16.723 |
| Produktivitas Total Daerah (Jutaan Rupiah / Jiwa) | | | | |
| Sektor | 2015 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Pertanian | 42,933 | 42,473 | 42,402 | 54,164 |
| Industri Pengolahan | 113,316 | 89,755 | 76,494 | |
| Perdagangan Besar, Eceran, Rumah Makan dan Hotel | 58,651 | 73,536 | 83,661 | |
| Jasa Kemasyarakatan, Sosial dan Perorangan | 57,474 | 72,281 | 74,677 | |
| Lainnya | 145,334 | 135,751 | 134,350 | |
| Manufaktur | | | | 104,273 |
| Jasa | | | | 102,097 |

Sumber: BPS, Sawahlunto Dalam Angka 2016-2020, Data diolah 2020
Data tahun 2016 tidak tersedia

Pada tahun 2015-2018, kelompok lapangan usaha di Kota Sawahlunto terdiri dari lima sektor besar, yaitu : Pertanian; Industri Pengolahan; Perdagangan Besar, Eceran, Rumah Makan dan Hotel; Jasa Kemasyarakatan, Sosial dan Perorangan; dan Lainnya. Sektor *lainnya* terdiri dari Pertambangan dan Penggalian; Listrik, Gas dan Air; Kontruksi; Angkutan; Pergudangan; Komunikasi; Keuangan; Asuransi; Real Estate; dan Jasa Perusahaan.

Sedangkan pada tahun 2019 kelompok lapangan usaha terdiri dari tiga sektor besar, yaitu : Pertanian; Manufaktur; dan Jasa. Sektor *Pertanian* terdiri dari sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan. Sektor *Manufaktur* terdiri dari sektor pertambangan dan penggalian; industri pengolahan; pengadaan listrik dan gas; pengadaan air, pengelolaan sampah, dan daur ulang; serta konstruksi. Sedangkan sektor *Jasa* terdiri dari sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor; transportasi dan pergudangan, penyediaan akomodasi dan Makan Minum; Pergudangan dan transportasi; informasi dan komunikasi; jasa keuangan dan asuransi; *real estate*; serta jasa-jasa lainnya.

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa lapangan usaha yang *paling produktif di Kota Sawahlunto pada tahun 2019* adalah sektor *Manufaktur* yang menghasilkan produktivitas sebesar 104,273 juta rupiah/jiwa, dengan jumlah tenaga kerja sebanyak 8.367 orang menghasilkan PDRB sebesar 872,45 milyar rupiah. Sedangkan jumlah tenaga kerja paling banyak terserap ada di sektor Jasa, yakni sebanyak 16.723 orang dan menghasilkan PDRB sebesar 1707,36 milyar rupiah. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun sektor jasa merupakan sektor terbesar dalam struktur perekonomian Kota Sawahlunto, akan tetapi apabila dilihat dari segi produktivitasnya masih relatif lebih rendah bila dibandingkan dengan sektor Manufaktur.

Sedangkan pada *periode 2015-2018*, lapangan usaha yang *paling produktif di Kota Sawahlunto* adalah sektor *Lainnya* (Pertambangan, dll). Meskipun sektor ini adalah yang paling produktif, namun produktivitas tenaga kerjanya dari tahun ke tahun semakin menurun. Sedangkan sektor yang produktivitasnya meningkat dari tahun ke tahun adalah lapangan usaha Perdagangan Besar, Eceran, Rumah Makan dan Hotel dan lapangan usaha Jasa Kemasyarakatan, Sosial dan Perorangan. Pada tahun 2015 sektor *Lainnya* menghasilkan produktivitas sebesar 145,33 juta rupiah/jiwa, dengan jumlah tenaga kerja sebanyak 6.513 orang menghasilkan PDRB sebesar 946,56 milyar rupiah. Sedangkan sektor yang paling banyak menyerap tenaga kerja adalah sektor Jasa Kemasyarakatan, Sosial dan Perorangan, yakni sejumlah 7.696 orang dan menghasilkan PDRB sebesar 442,32 miliar rupiah dengan produktivitas 57,474 juta/jiwa. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun sektor *Lainnya* merupakan sektor terbesar dalam struktur



perekonomian Kota Sawahlunto tahun 2015, akan tetapi apabila dilihat dari serapannya terhadap tenaga kerja masih relatif lebih rendah bila dibandingkan dengan sektor Jasa Kemasyarakatan, Sosial dan Perorangan. Sedangkan sektor yang paling rendah produktivitasnya adalah sektor Pertanian dengan produktivitas sebesar 42,93 juta/orang. Produktivitas total daerah tahun 2019 tidak bisa dibandingkan dengan produktivitas total daerah periode 2015-2018, karena lapangan usaha pada sektor *Lainnya* yang digunakan pada periode 2015-2018, pada tahun 2019 terbagi pada sektor manufaktur dan sektor jasa.

d. Nilai Tukar Petani

Nilai tukar petani (NTP) adalah *rasio* antara indeks harga yang diterima petani (*IT*) dengan indeks harga yang dibayar petani (*IB*) yang dinyatakan dalam persentase. Nilai tukar petani merupakan salah satu indikator dalam menentukan tingkat kesejahteraan petani. Pengumpulan data dan perhitungan NTP di Indonesia dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dan hanya menghitung Nilai Tukar Petani sampai tingkat Provinsi. Dengan demikian Nilai Tukar Petani Kota Sawahlunto merujuk pada Nilai Tukar Petani Provinsi Sumatera Barat.

Indeks harga yang diterima petani (IT) adalah indeks harga yang menunjukkan perkembangan harga produsen atas hasil produksi petani. Dari nilai IT ini dapat dilihat fluktuasi harga barang-barang yang dihasilkan petani. IT ini digunakan juga sebagai data penunjang dalam penghitungan pendapatan sektor pertanian. IT dihitung berdasarkan nilai jual hasil pertanian yang dihasilkan oleh petani, mencakup sektor padi, palawija, hasil peternakan, perkebunan rakyat, sayuran, buah, dan hasil perikanan (perikanan tangkap maupun budidaya).

Indeks harga yang dibayar petani (IB) adalah indeks harga yang menunjukkan perkembangan harga kebutuhan rumah tangga petani, baik kebutuhan untuk konsumsi rumah tangga maupun kebutuhan untuk proses produksi pertanian. Dari IB ini dapat dilihat fluktuasi harga barang-barang yang dikonsumsi oleh petani yang merupakan bagian terbesar dari masyarakat di pedesaan, serta fluktuasi harga barang yang diperlukan untuk memproduksi hasil pertanian. Perkembangan IB juga dapat menggambarkan perkembangan inflasi di pedesaan. IB dihitung berdasarkan indeks harga yang harus dibayarkan oleh petani dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dan penambahan barang modal dan biaya produksi, yang dibagi lagi menjadi sektor makanan dan barang/jasa non makanan.

Secara umum Nilai tukar petani (NTP) menunjukkan tiga kondisi :

1. $NTP > 100$ atau $IT > IB$

Ini berarti nilai jual hasil pertanian yang diproduksi petani *lebih besar* dari nilai yang harus dibayarkan oleh petani dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dan penambahan barang modal dan biaya produksi. Dengan kata lain petani mengalami *surplus*.

2. $NTP = 100$ atau $IT = IB$

Ini berarti nilai jual hasil pertanian yang diproduksi petani *sama besar* dari nilai yang harus dibayarkan oleh petani dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dan penambahan barang modal dan biaya produksi. Dengan kata lain petani mengalami *titik impas*.

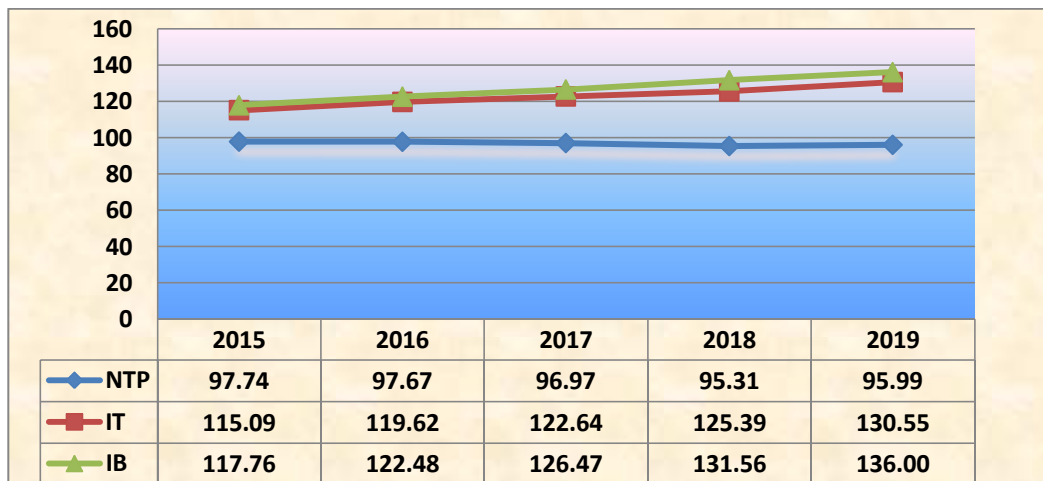
3. $NTP < 100$ atau $IT < IB$

Ini berarti nilai jual hasil pertanian yang diproduksi petani *lebih kecil* dari nilai yang harus dibayarkan oleh petani dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dan penambahan barang modal dan biaya produksi. Dengan kata lain petani mengalami *defisit*.



Berdasarkan data yang diperoleh, terlihat bahwa Nilai Tukar Petani dari tahun 2015 hingga tahun 2018 cenderung terus menurun, dan 2019 mulai merangkak naik, namun masih berada dibawah 100 atau $NTP < 100$. Hal ini berarti nilai jual hasil pertanian yang diproduksi petani (IT) *lebih kecil* dari nilai yang harus dibayarkan oleh petani dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dan penambahan barang modal dan biaya produksi (IB). Dengan kata lain petani selama 5 (lima) tahun terakhir ini terus menerus mengalami *defisit atau tingkat kesejahteraan petani dari tahun ke tahun semakin rendah*. Berikut ini disajikan perkembangan Nilai Tukar Petani Periode Januari Tahun 2015 – 2019.

Tabel 2.154
Perkembangan Nilai Tukar Petani Tahun 2015 – 2019

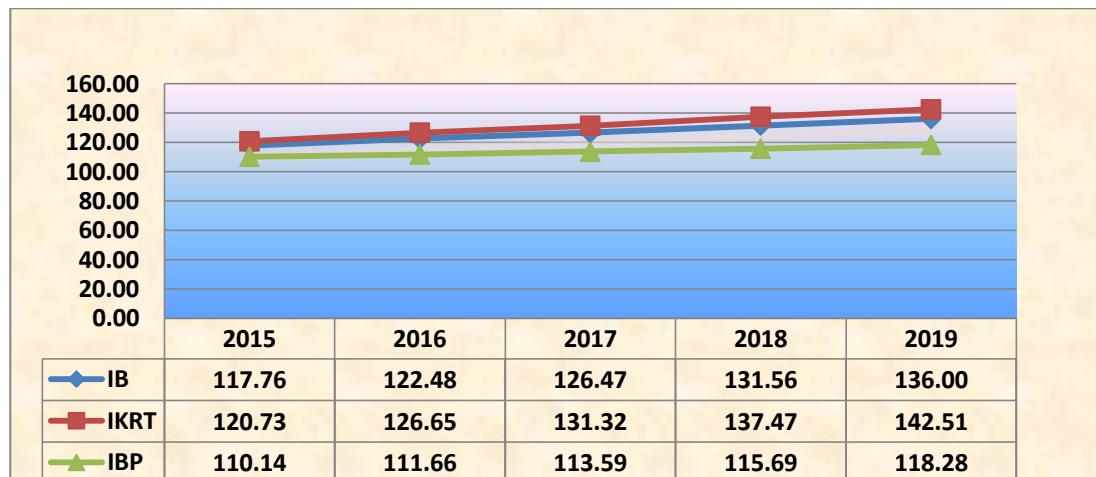


Sumber : BPS, Provinsi Sumatera Barat Dalam Angka 2020

Dari grafik di atas terlihat bahwa *Indeks harga yang diterima petani (IT) atau pendapatan petani* dari tahun 2015 sampai dengan 2019 *terus menerus mengalami peningkatan*. Namun peningkatan *pendapatan petani* tersebut diiringi juga oleh peningkatan *Indeks harga yang dibayar petani (IB) dengan indeks yang lebih tinggi*. Akibatnya Nilai Tukar Petani (NTP) menjadi lebih kecil dari 100 ($NTP < 100$) atau *defisit*.

Indeks harga yang dibayar petani (IB) meliputi indeks harga kebutuhan rumah tangga petani, baik kebutuhan untuk konsumsi rumah tangga (Indeks Konsumsi Rumah Tangga/IKRT) maupun kebutuhan untuk proses produksi pertanian (Indeks Biaya Produksi dan Penambahan Barang Modal/IBP), namun yang lebih dominan adalah *indeks konsumsi rumah tangga*. Artinya para petani belum dapat memenuhi kebutuhan rumah tangganya secara **layak**. Berikut disajikan perkembangan Indeks harga yang dibayar petani (IB) periode 2015 – 2019.

Grafik 2.30
Perkembangan Indeks Harga Yang Dibayar Petani (IB) Tahun 2015 – 2019



Sumber : BPS, Provinsi Sumatera Barat Dalam Angka 2020

Dari grafik di atas terlihat bahwa dari tahun ke tahun Indeks Konsumsi Rumah Tangga (IKRT) lebih tinggi dari Indeks Biaya Produksi dan Penambahan Barang Modal (IBP). Ini berarti para petani sudah dapat menutupi biaya produksi dan penambahan barang modal, namun belum dapat memenuhi kebutuhan rumah tangganya. Oleh sebab itu perlu campur pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan petani melalui pelatihan untuk meningkatkan produktivitas hasil pertanian dan meningkatkan nilai tambah hasil pertanian melalui pengendalian harga hasil pertanian, dimana pengalaman selama ini menunjukkan bahwa harga barang-barang pertanian cenderung rendah dan petani adalah sebagai **price taker** (penerima harga).

2.4.2 FOKUS FASILITAS WILAYAH/INFRASTRUKTUR

2.4.2.1 Ketaatan Terhadap RTRW

Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan tata ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang. Hal tersebut merupakan ruang lingkup penataan ruang sebagai objek Hukum Administrasi Negara. Jadi, hukum penataan ruang menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 yaitu hukum yang berwujud struktur ruang (ialah susunan pusat-pusat pemukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan).

Kebijakan penataan ruang kota tersebut meliputi :

a. Kebijakan Pengembangan Struktur Ruang Kota

- 1) Pengembangan pusat-pusat pelayanan regional untuk menunjang Kota Sawahlunto sebagai Kota Wisata dan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW);
- 2) Pengembangan pusat-pusat kegiatan pelayanan perkotaan sebagai satu kesatuan sistem secara terpadu, berhirarki, dan saling berhubungan untuk mendukung fungsi-fungsi kegiatan kota; dan
- 3) Pengembangan sistem jaringan prasarana wilayah, yang meliputi sistem jaringan transportasi, jaringan energi, jaringan telekomunikasi, infrastruktur perkotaan, dan sistem jaringan sumber daya air.

b. Kebijakan Pengembangan Pola Ruang Kota Sawahlunto

- 1) Kebijakan pengembangan Kawasan Lindung meliputi:
 - a. Pelestarian, perlindungan, rehabilitasi, pengelolaan dan pengendalian kawasan lindung untuk mewujudkan pemanfaatan ruang yang berwawasan lingkungan; dan
 - b. Pengembangan RTH kota untuk menunjang fungsi lindung.



- 2) Kebijakan Pengembangan Kawasan Budi Daya Meliputi:
- Pengembangan kegiatan budi daya secara seimbang dan serasi sesuai potensi dan daya dukung wilayah
 - Pengendalian perkembangan kegiatan budi daya agar sesuai fungsi dan tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan;
 - Pengelolaan kawasan kehutanan, pertanian dan perkebunan agar dapat berfungsi sebagai resapan air dan RTH kota;
 - Pengembangan kawasan perumahan yang layak huni;
 - Pengembangan kawasan pusat pemerintahan yang memadai dan berwawasan lingkungan;
 - Pengembangan fasilitas pelayanan umum yang memadai sesuai dengan tingkat perkembangan kota;
 - Perwujudan dan peningkatan keterpaduan dan keterkaitan antarkegiatan budi daya;
 - Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara

Dari kebijakan pengembangan pola ruang kota yang meliputi pengembangan kawasan lindung dan kawasan budi daya, luas pola ruang yang ada saat ini dapat terlihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.155
Luas Pola Ruang Di Kota Sawahlunto

| NO | POLA RUANG | LUAS (Ha) | PERSEN (%) |
|-----------|--|------------------|---------------|
| I | KAWASAN LINDUNG | 2,234.68 | 8.17 |
| 1 | Daerah Hijau (Sempadan Sungai, Danau Dan Kereta Api) | 936.66 | 3.43 |
| 2 | Danau (Kolam Bekas Galian Tambang) | 28.98 | 0.11 |
| 3 | Hutan Lindung | 72.71 | 0.27 |
| 4 | Taman | 14.49 | 0.05 |
| 6 | RTH Taman | 37.06 | 0.14 |
| 7 | Hutan Kota Kolok | 70.00 | 0.26 |
| 8 | Hutan Kota | 1,074.79 | 3.93 |
| II | KAWASAN BUDIDAYA | 25,110.32 | 91.83 |
| 7 | Sawah | 2,097.16 | 7.67 |
| 8 | Tambang | 2,024.08 | 7.40 |
| 9 | Hutan Produksi | 6,802.48 | 24.88 |
| 10 | Hutan Produksi Konversi | 4,113.18 | 15.04 |
| 11 | Pemukiman | 3,461.90 | 12.66 |
| 12 | Pendidikan Tinggi | 19.14 | 0.07 |
| 13 | Perkantoran | 127.48 | 0.47 |
| 14 | Pertanian Lahan Kering | 6,039.36 | 22.09 |
| 15 | Wisata Kandih | 400.00 | 1.46 |
| 16 | TPA | 25.54 | 0.09 |
| | TOTAL | 27,345.00 | 100.00 |

Sumber : RTRW Kota Sawahlunto Tahun 2012-2032

Dari luas pola ruang tersebut terlihat bahwa tutupan lahan untuk pertanian lahan kering, hutan produksi konversi dan hutan produksi masih mendominasi kawasan budi daya dengan total luas 16.955,02 ha atau 62,01%.

Sedangkan pada kawasan lindung daerah hijau dan hutan kota memiliki porsi yang lebih luas yaitu 2.011,45 ha atau 7,36%.

2.4.2.2 Persentase Ruang Terbuka Hijau

Berdasarkan amanat UU 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Ruang Terbuka Hijau kawasan Perkotaan adalah bagian dari ruang terbuka suatu kawasan perkotaan yang diisi oleh tumbuhan dan tanaman guna mendukung manfaat ekologi, sosial, budaya, ekonomi dan estetika. Kebutuhan luas RTH pada wilayah kota paling sedikit 30 (tiga puluh) persen dari luas wilayah kota. Terdiri dari 20 (dua puluh) persen ruang terbuka hijau publik dan 10 (sepuluh) persen ruang terbuka hijau privat, sehingga kebutuhan RTH direncanakan seluas 8.203 ha meliputi RTH privat adalah 2.734 ha, dan RTH publik seluas 5.469 ha Perkembangan RTH Kota Sawahlunto sejak 2014-2018 dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 2.156
Rasio RTH Per Satuan Luas Di Kota Sawahlunto Tahun 2014-2018

| No | Uraian | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|----|-------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 1 | Luas Ruang Terbuka Hijau (ha) | 3.501 | 4.327 | 4.327 | 4.338 | 4.338 |
| 2 | Luas Wilayah (ha) | 27.345 | 27.345 | 27.345 | 27.345 | 27.345 |
| 3 | Persentase (%) | 12.80 | 15.82 | 15.82 | 15.86 | 15.86 |

Sumber : Profil Daerah

Luas RTH di Kota Sawahlunto tahun dari tahun 2014-2018 mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2014 Luas Ruang Terbuka Hijau seluas 3.501 ha atau sebesar 12,80% dari luas wilayah kota dan terus meningkat hingga pada tahun 2015 menjadi seluas keseluruhan 4.327 ha atau sebesar 15,82 %, namun pada tahun 2016 ini penambahan RTH tidak ada, sehingga masih membutuhkan tambahan RTH minimal seluas 14,18% dari luas wilayah kota yang diupayakan melalui berbagai program pembangunan seperti pembuatan taman kota, hutan kota, penghijauan lahan kritis dan reklamasi lahan bekas tambang. Namun pada tahun 2017 mengalami peningkatan kembali dengan Luas Ruang Terbuka Hijau seluas 4.338 Ha atau sebesar 15,86% dari luas wilayah kota.

Langkah-langkah strategi yang dapat dilakukan untuk menuju RTH 30%, diantaranya:

- Menetapkan kawasan yang tidak boleh dibangun.
- Membangun lahan hijau (hub) baru,
- Mengembangkan koridor ruang hijau kota.
- Mengakuisisi RTH privat, menjadikan bagian RTH kota.
- Peningkatan kualitas RTH kota melalui refungsi RTH eksisting.
- Menghijaukan bangunan (green roof / green wall).
- Menyusun kebijakan hijau.
- Memberdayakan komunitas hijau.

2.4.2.3 Luas Wilayah Produktif

Luas wilayah produktif di kota Sawahlunto sejak tahun 2012 tidaklah mengalami banyak perubahan sampai tahun 2016 pada kisaran 15.330. Hal ini dipengaruhi oleh topografi wilayah yang bergelombang dan berbukit, dimana wilayah produktif hanya \pm 18% dari luas wilayah kota atau seluas 4.922,10 Ha.

2.4.2.4 Luas Wilayah Industri

Luas wilayah industri di kota Sawahlunto sejak tahun 2015 tidaklah mengalami banyak perubahan sampai tahun 2019 pada kisaran 70 Ha, seperti tabel berikut:

Tabel 2.157
Luas Wilayah Industri Tahun 2015-2019

| Tahun | Luas Wilayah Industri (ha) |
|-------|----------------------------|
| 2015 | 39.84 |
| 2016 | 39.84 |
| 2017 | 39.84 |
| 2018 | 39.84 |
| 2019 | 39.84 |

Sumber : Profil Daerah Kota Sawahlunto 2019

2.4.2.5 Luas Wilayah Kebanjiran

Topografi wilayah kota yang ada dengan tingkat kemiringan rata-rata diatas 15 %, tidak memungkinkan terjadi banjir di suatu kawasan karena kecepatan aliran air sangat tinggi sampai ke muara. Hanya saja terdapat beberapa kawasan yang tergenang disebabkan luapan sungai yang ada disekitar kawasan antara lain seperti sepanjang aliran sungai Batang Lasi di Silungkang Duo dan Silungkang Tigo, sepanjang aliran batang Malakutan kenagarian Kolok, sepanjang aliran batang Ombilin di TaLawi Hilir dan Sijantang, dengan tinggi genangan antara 0,10-050 m yang berlangsung selama 1-3 jam

2.4.2.6 Luas Wilayah Kekeringan

Wilayah kekeringan umumnya terdapat di daerah perbukitan Kecamatan Silungkang (Silungkang Oso), Kecamatan Barangin (Talago Gunung) serta di daerah yang tidak memiliki sumber air permukaan di Kecamatan Talawi seperti di Bukit Gadang, Batu Tanjung, Tumpuk Tengah, Datar Mansiang dan Kumbayau.

2.4.2.7 Luas Wilayah Perkotaan

Wilayah perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan social, dan kegiatan ekonomi.

2.4.2.8 Jenis Dan Jumlah Bank Dan Cabang

Bank dan asuransi merupakan lembaga intermediasi keuangan untuk menampung surplus pendapatan rumah tangga setelah konsumsi. Lembaga ini (terutama Bank) berperan dalam penciptaan modal yang akan digunakan untuk kebutuhan investasi dan modal kerja pihak swasta dan pada gilirannya akan ikut membantu proses pembangunan ekonomi sebuah daerah.

Bank adalah lembaga intermediasi keuangan yang bertugas menghimpun dan menyalurkan dana di masyarakat untuk meningkatkan taraf hidup rakyat.

Asuransi merupakan alat untuk menanggulangi risiko nasabah dengan cara menanggung bersama kerugian yang mungkin terjadi dengan pihak perusahaan asuransi. Usaha asuransi adalah usaha jasa keuangan yang menghimpun dana masyarakat melalui pengumpulan premi asuransi guna memberikan perlindungan kepada anggota masyarakat pemakai jasa asuransi terhadap kemungkinan timbulnya kerugian karena suatu peristiwa yang tidak pasti. Berikut adalah data jumlah bank dan asuransi yang ada di Kota Sawahlunto :



Tabel 2.158
Jumlah Bank dan Asuransi Tahun 2015-2019

| No | Bank dan Asuransi | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|----|-----------------------------------|------|------|------|------|------|
| 1. | Jumlah Bank (unit) | 8 | 8 | 9 | 9 | 15 |
| 2. | Jumlah Perusahaan Asuransi (unit) | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 |

Sumber : DPMPTSPNaker, 2020

Daftar nama Bank yang ada di Kota Sawahlunto tahun 2019 :

1. Bank BRI KCP Unit Sawahlunto
2. Bank BRI KCP Unit Talawi
3. Bank BRI KCP Unit Sapan
4. Bank BRI KCP Unit Silungkang
5. Bank Nagari Cabang Sawahlunto
6. Bank Nagari KCP Pembantu Talawi
7. Bank Mandiri Sawahlunto
8. Bank Syariah Mandiri
9. Bank BNI Sawahlunto
10. Bank BTPN KCP Sawahlunto
11. Bank BTN Kantor Kas Sawahlunto
12. BPR LPN Talawi Sakato
13. BPR LPN Pasar Baru Durian
14. BPR LPN Kubang
15. BPR Gajahtongga Kotopiliang

Daftar nama Asuransi yang ada di Kota Sawahlunto tahun 2019 :

1. BPJS Kesehatan
2. BPJS Ketenagakerjaan

2.4.2.9 Jumlah Demonstrasi

Demonstrasi atau unjuk rasa merupakan suatu peristiwa biasa yang merupakan sebuah gerakan protes yang dilakukan sekumpulan orang untuk menyatakan pendapat kelompok tersebut atau menentang kebijakan yang dilaksanakan oleh pihak lain. Aksi demonstrasi yang terjadi umumnya dilakukan oleh mahasiswa yang menentang kebijakan pemerintah atau oleh buruh yang tidak puas dengan perlakuan majikannya. Demonstrasi baru akan merugikan banyak pihak apabila dilakukan secara anarkis dan berlebihan bahkan kerugian yang ditimbulkan dapat merugikan masyarakat secara luas.

Di Kota Sawahlunto dalam periode waktu 2015-2019 tidak ada terjadi aksi demonstrasi alias nihil (*sumber data : DPMPTSPNaker*).

2.4.2.10 Jumlah dan Macam Pajak dan Retribusi Daerah

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) adalah pungutan oleh daerah yang merupakan salah satu hak daerah dalam menyelenggarakan otonomi daerah dan merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting untuk membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah. Pajak Kabupaten/Kota terdiri atas pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB P2), serta bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB).

Retribusi daerah terbagi menjadi tiga golongan yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha dan retribusi perizinan tertentu. Retribusi jasa umum terdiri dari pelayanan kesehatan, retribusi persampahan/kebersihan, retribusi KTP dan akte catatan sipil, retribusi pemakaman/penguburan mayat,



retribusi parkir di tepi jalan umum, pelayanan pasar, retribusi pengujian kendaraan bermotor, retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran, retribusi penggantian biaya cetak peta, retribusi pelayanan tera/tera ulang, retribusi penyedotan kakus, retribusi pengolahan limbah cair, retribusi pelayanan pendidikan, dan retribusi pengendalian menara komunikasi. Retribusi jasa usaha terdiri dari pemakaian kekayaan daerah, retribusi pasar grosir/pertokoan, retribusi tempat pelelangan, retribusi terminal, retribusi tempat khusus parkir, retribusi tempat penginapan/pesanggrahan/vila, retribusi rumah potong hewan, retribusi pelayanan kepelabuhanan, retribusi tempat rekreasi dan olahraga, retribusi penyebrangan di air, serta retribusi penjualan produksi usaha daerah. Retribusi perizinan tertentu terdiri dari retribusi izin mendirikan bangunan, retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol, retribusi izin gangguan, retribusi izin trayek, dan retribusi izin usaha perikanan.

Tabel 2.159
Realisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Sawahlunto
periode 2015-2019

| No | Uraian | Tahun 2015 | Tahun 2016 | Tahun 2017 | Tahun 2018 | Tahun 2019 |
|-----------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| I | Pajak Daerah | 4.101.043.541 | 4.686.318.341 | 5.337.144.416 | 5.546.092.124 | 5.502.689.718 |
| 1 | Pajak Hotel | 135.881.333 | 142.353.702 | 164.733.362 | 132.597.836 | 94.965.756 |
| 2 | Pajak Restoran | 524.826.887 | 640.309.687 | 638.615.093 | 529.988.908 | 532.945.719 |
| 3 | Pajak Hiburan | 422.777.300 | 462.942.300 | 394.309.900 | 283.599.800 | 109.485.500 |
| 4 | Pajak Reklame | 46.769.998 | 47.909.354 | 34.597.079 | 47.786.507 | 47.810.243 |
| 5 | Pajak Penerangan Jalan | 2.016.665.979 | 2.109.997.610 | 2.857.339.658 | 3.189.233.765 | 3.339.015.131 |
| 6 | Pajak Parkir | - | - | 3.000.000 | 4.500.000 | - |
| 7 | Pajak Mineral Bukan Logam | - | 7.865.600 | 17.905.600 | 16.382.400 | 12.979.400 |
| 8 | PBB-P2 | 788.845.509 | 934.942.738 | 975.816.873 | 937.788.713 | 958.272.261 |
| 9 | BPHTB | 165.276.535 | 339.997.350 | 250.826.851 | 404.214.195 | 407.215.708 |
| | | | | | | |
| II | Retribusi Daerah | 2.540.177.543 | 2.701.515.584 | 3.954.648.882 | 3.533.959.570 | 3.624.747.865 |
| A. | Retribusi Jasa Umum | | | | | |
| 1 | Retribusi Pelayanan Kesehatan | 323.992.500 | 437.105.000 | 1.375.996.000 | 919.339.000 | 518.014.000 |
| 2 | Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan | 66.092.000 | 66.850.000 | 56.371.000 | 62.770.000 | 85.986.000 |
| 3 | Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum | 121.264.000 | 104.500.000 | 135.400.000 | 146.020.000 | 166.750.000 |
| 4 | Retribusi Pelayanan Pasar | 627.301.500 | 516.786.000 | 475.960.000 | 446.051.000 | 494.482.500 |
| 5 | Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor | 101.008.530 | 113.952.750 | 107.959.199 | 124.817.160 | 119.509.740 |
| 6 | Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta | 1.000.000 | - | - | - | - |
| 7 | Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus | 44.880.000 | 54.390.000 | 45.365.000 | 54.550.000 | 32.150.000 |
| 8 | Retribusi Pengendalian | 65.096.815 | - | - | - | - |



| No | Uraian | Tahun 2015 | Tahun 2016 | Tahun 2017 | Tahun 2018 | Tahun 2019 |
|---------------------------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | Menara Telekomunikasi | | | | | |
| B Retribusi Jasa Usaha | | | | | | |
| 1 | Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah | 846.497.548 | 1.060.868.394 | 1.178.019.905 | 1.022.463.010 | 1.359.739.525 |
| 2 | Retribusi Terminal | 12.000.000 | 11.513.000 | - | - | - |
| 3 | Retribusi Rumah Potong Hewan | 43.665.000 | 41.352.500 | 46.040.000 | 57.255.000 | 59.927.500 |
| 4 | Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga | 186.125.000 | 227.593.000 | 411.150.000 | 557.373.000 | 682.737.000 |
| C Retribusi Perizinan Tertentu | | | | | | |
| 1 | Retribusi IMB | 82.771.700 | 43.273.700 | 114.823.078 | 143.201.400 | 105.131.600 |
| 2 | Retribusi Izin Gangguan | 17.802.950 | 22.891.240 | 7.244.700 | - | - |
| 3 | Retribusi Izin Trayek | 680.000 | 440.000 | 320.000 | 120.000 | 320.000 |
| | JUMLAH TOTAL | 6.641.221.084 | 7.387.833.925 | 9.291.793.298 | 9.080.051.694 | 9.127.437.583 |

Realisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) di Kota Sawahlun selama 5 tahun terakhir berfluktuatif, pada tahun 2015 yaitu sebesar Rp. 6.641.221.084, tahun 2016 mengalami kenaikan menjadi sebesar Rp. 7.387.833.925, tahun 2017 mengalami kenaikan kembali menjadi Rp. 9.291.793.298, tahun 2018 mengalami penurunan menjadi Rp. 9.080.051.694 dan pada tahun 2019 mengalami peningkatan kembali menjadi Rp. 9.127.437.583.

Pajak Daerah dari tahun 2015 - 2019 selalu menunjukkan trend positif, yaitu meningkat dari Rp. 4.101.043.541 menjadi Rp. 5.502.689.718 pada tahun 2019. Pajak daerah yang menjadi kontributor terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Sawahlunto yang terbesar adalah pajak penerangan jalan, disusul oleh pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB P2), sedangkan pajak daerah yang memberikan kontribusi paling rendah terhadap PAD Kota Sawahlunto adalah pajak parkir, bahkan pada tahun 2019 pajak parkir tidak ada memberikan kontribusi sama sekali alias nihil.

Pendapatan yang diperoleh dari Retribusi Daerah dari tahun 2015 - 2019 berfluktuatif. Retribusi jasa umum yang memberikan kontribusi paling besar untuk PAD Kota Sawahlunto adalah retribusi pelayanan kesehatan, sedangkan retribusi jasa umum yang memberikan kontribusi paling rendah terhadap PAD adalah retribusi penggantian biaya cetak peta, yang mana dalam periode 4 tahun terakhir retribusi penggantian biaya cetak peta tidak ada memberikan kontribusi sama sekali. Retribusi jasa usaha yang memberikan kontribusi paling besar terhadap PAD Kota Sawahlunto adalah retribusi pemakaian kekayaan daerah, sedangkan retribusi jasa usaha yang memberikan kontribusi paling rendah terhadap PAD adalah retribusi terminal, bahkan dalam kurun waktu 3 tahun terakhir retribusi terminal tidak ada memberikan kontribusi sama sekali terhadap PAD. Untuk retribusi perizinan tertentu yang memberikan kontribusi paling besar terhadap PAD Kota Sawahlunto adalah retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB), sedangkan retribusi perizinan tertentu yang memberikan kontribusi paling rendah terhadap PAD adalah retribusi izin trayek.

2.4.2.11 Persentase Rumah Tangga (RT) Yang Menggunakan Air Bersih

Air Bersih adalah salah satu jenis sumber daya berbasis air yang bermutu baik dan biasa dimanfaatkan oleh manusia untuk dikonsumsi atau dalam melakukan aktivitas mereka sehari-hari termasuk diantaranya adalah sanitasi. Untuk konsumsi air minum menurut departemen kesehatan syarat-

syarat air minum adalah tidak berasa, tidak berbau, tidak berwarna dan tidak mengandung logam berat. Walaupun air dari sumber alam dapat diminum oleh manusia terdapat resiko bahwa air ini telah tercemar oleh bakteri atau zat-zat yang berbahaya. Walaupun bakteri dapat dibunuh dengan memasak air hingga 100 C banyak zat berbahaya, terutama logam, tidak dapat dihilangkan.

Dalam memenuhi kebutuhan akan air bersih, masyarakat memiliki keragaman akses terhadap sumber air sesuai dengan kemampuan aksesibilitasnya dan ketersediaan sarana dan prasarannya. Sistem penyediaan air minum yang digunakan rumah tangga dapat dibedakan menjadi sistem perpipaan (unit air baku, unit produksi, transmisi, dan distribusi) dan sistem non-perpipaan (sumur dangkal, sumur pompa tangan, bak penampungan air hujan, terminal air, mobil tangki air instalasi air kemasan, atau bangunan perlindungan mata air). Selengkapnya cakupan rumah tangga yang memiliki akses air minum baik dengan sistem perpipaan maupun non perpipaan adalah sebagai berikut:

Tabel 2.160
Persentase Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Air Minum
Tahun 2015-2019

| NO | URAIAN | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|----|--------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 1 | Jumlah Rumah Tangga | 16.542 | 16.542 | 16.542 | 16.542 | 16.542 |
| 2 | Rumah Tangga dengan Akses Air Bersih | 14.319 | 14.379 | 14.379 | 14.379 | 14.379 |
| 3 | Persentase | 86.56 | 86.92 | 86.92 | 86.92 | 86.92 |

Sumber : Profil Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2019

Untuk kondisi rumah tangga yang menggunakan air bersih pada tahun 2014 sampai tahun 2019 cenderung tetap, diharapkan komitmen Pemerintah daerah untuk dapat meningkatkan akses pelayanan terhadap air bersih di kota Sawahlunto serta sosialisasi manfaat kegunaan air bersih untuk meningkatkan kesehatan.

2.4.3 FOKUS IKLIM BERINVESTASI

2.4.3.1 Perda yang Mendukung Iklim Usaha

Untuk menumbuhkan iklim investasi perlu *goodwill* dan *political will* pemerintah yang secara umum diwujudkan ke dalam Perda. Dengan adanya perda yang mengatur tentang investasi, maka ada dasar hukum yang kuat untuk mendorong masyarakat melakukan investasi. Peraturan Daerah (Perda) merupakan sebuah instrumen kebijakan daerah yang sifatnya formal, melalui Perda inilah dapat diindikasikan ada atau tidaknya insentif maupun disinsentif sebuah kebijakan di daerah terhadap aktivitas perekonomian. Perda yang mendukung iklim usaha dibatasi yaitu Perda terkait dengan perizinan, Perda terkait dengan lalu lintas barang dan jasa, serta Perda terkait dengan ketenagakerjaan.

Tabel 2.161
Jumlah Perda yang Mendukung Iklim Usaha di Kota Sawahlunto
Tahun 2015 - 2019

| Indikator | Satuan | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|--------|------|------|------|------|------|
| Jumlah Perda yang Mendukung Iklim Usaha | Buah | 13 | 10 | 9 | 1 | - |

Sumber : Bagian Hukum Setdako, 2020

Dari data di atas dapat dilihat jumlah perda yang mendukung iklim usaha dari tahun 2015-2019 mengalami penurunan. Pada tahun 2015 jumlah perda yang mendukung iklim usaha adalah 13 perda sedangkan pada tahun 2019 tidak ada satu perda pun yang dikeluarkan. Peraturan Daerah ini diperlukan untuk mendukung iklim usaha di Kota Sawahlunto. Dengan adanya perda maka dapat meningkatkan usaha di Kota Sawahlunto yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

2.4.3.2 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya. Indeks Kepuasan Masyarakat Kota Sawahlunto dilakukan hanya pada tahun 2015, bekerjasama dengan STIA LPPN Padang, tahun anggaran lainnya/selanjutnya sampai dengan tahun 2019 hanya dilakukan pembinaan saja. Pengukuran dilakukan pada sepuluh (10) OPD unit pelayanan publik di lingkungan Pemko Sawahlunto dengan nilai indeks nya sebagaimana terlihat pada tabel dibawah ini

Tabel 2.162
Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Tahun 2015

| No | NAMA OPD | NILAI | MUTU PELAYANAN | KINERJA |
|----|---|-------|----------------|---------|
| 1 | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH | 73,25 | B | BAIK |
| 2 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 74,25 | B | BAIK |
| 3 | KANTOR ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH | 74,25 | B | BAIK |
| 4 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | 71,50 | B | BAIK |
| 5 | KANTOR PERHUBUNGAN/ KOMUNIKASI DAN INFORMASI | 71 | B | BAIK |
| 6 | KANTOR PENINGGALAN SEJARAN DAN PERMUSEUMAN | 75 | B | BAIK |
| 7 | DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA | 68,25 | B | BAIK |
| 8 | DINAS KESEHATAN DAN SOSIAL | 73,50 | B | BAIK |
| 9 | DINAS PERTAMBANGAN, PERDAGANGAN KOPERASI DAN TENAGA KERJA | 73,50 | B | BAIK |
| 10 | KANTOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN PENANAMAN MODAL | 64,50 | B | BAIK |

Sumber : Laporan Hasil Survey IKM Tahun 2015

2.4.3.3 Lama Proses Perijinan

Prosedur perijinan yang kompleks, lama, dan relatif mahal menjadi salah satu kendala bagi tumbuhnya iklim investasi. Menyadari kondisi yang demikian berbagai upaya telah dilakukan supaya proses perijinan dapat ditempuh dengan prosedur yang lebih sederhana, dengan waktu yang terukur dan murah. Selain prosedur perijinan yang mudah, ketersediaan informasi yang memadai mengenai peluang investasi juga dibutuhkan calon investor



dalam merencanakan investasi sesuai dengan peluang yang ada sudah dipermudah dengan adanya Sistem Informasi Pelayanan Perijinan dan Administrasi Pemerintah.

Proses pelayanan perizinan dan non perizinan dalam berinvestasi dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja (DPMPTSPNaker). Penerbitan dokumen izin dan non izin usaha bagi investor dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan publik. Investasi yang akan masuk ke suatu wilayah/daerah bergantung kepada daya saing investasi yang dimiliki oleh wilayah/daerah yang bersangkutan. Pembentukan daya saing investasi berlangsung secara terus-menerus dari waktu ke waktu dan dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya adalah memberikan kemudahan pelayanan perizinan dan non perizinan. Kemudahan pelayanan perizinan dan non perizinan suatu wilayah/daerah sangat menunjang dalam pembuatan proses administrasi suatu investasi. Lamanya proses pelayanan perizinan dan non perizinan dilaksanakan berdasarkan Perwako No. 42 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 21 Tahun 2017 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Sawahlunto.

Berdasarkan Perwako Sawahlunto Nomor 43 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Perwako Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan kepada DPMPTSPNaker Kota Sawahlunto terdapat 138 perizinan dan non perizinan antara lain adalah sebagai berikut :

1. Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
2. Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)
3. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
4. Tanda Daftar Industri (TDI)
5. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
6. Tanda Daftar Gudang (TDG)
7. Izin Mendirikan Rumah Sakit
8. Izin Apotek
9. Izin Toko Obat
10. Izin Optik
11. Surat Tanda Daftar Penyehat Tradisional (STPT)
12. Izin Praktek Dokter
13. Izin Praktek Apoteker
14. Izin Praktek Perawat
15. Izin Praktek Bidan
16. Izin Usaha Angkutan
17. Izin Trayek
18. Izin Pendirian Warnet
19. Pendaftaran Penanaman Modal
20. Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal
21. Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal
22. Izin Usaha Perluasan Penanaman Modal
23. Izin Usaha Perubahan Penanaman Modal
24. Izin Lingkungan
25. Izin Pembuangan Limbah Cair
26. Izin Penyimpanan Sementara Limbah B.3
27. Izin Pengumpulan Limbah B.3 Skala Kota
28. Izin Kerja Apoteker
29. Izin Kerja Tenaga Teknis Kefarmasian
30. Izin Kerja Refraksionis Optisien
31. Izin Praktek Tenaga Laboratorium Kesehatan
32. Izin Kerja Tenaga Laboratorium Kesehatan



33. Izin Kerja Tenaga Sanitarian
34. Izin Kerja Tenaga Gizi
35. Izin Kerja Tenaga Epidemiolog Kesehatan
36. Izin Kerja Tenaga Entomolog Kesehatan
37. Izin Kerja Penyuluh Kesehatan
38. Izin Usaha Depot Air Minum
39. Izin Klinik
40. Izin Operasional Puskesmas
41. Izin Kerja Perekam Medis
42. Izin Tukang Gigi
43. Izin Praktek Tenaga Gizi
44. Izin Elektromedis
45. Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daya Tarik Wisata
46. Tanda Daftar Usaha Pariwisata Kawasan Pariwisata
47. Tanda Daftar Usaha Pariwisata Jasa Transportasi Pariwisata
48. Tanda Daftar Usaha Pariwisata Jasa Penjualan Wisata
49. Tanda Daftar Usaha Pariwisata Jasa Makanan dan Minuman
50. Tanda Daftar Usaha Pariwisata Penyediaan Akomodasi
51. Tanda Daftar Usaha Pariwisata Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi
52. Tanda Daftar Usaha Pariwisata Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi dan Pameran
53. Tanda Daftar Usaha Pariwisata Jasa Informasi Pariwisata
54. Tanda Daftar Usaha Pariwisata Jasa Konsultasi Pariwisata
55. Tanda Daftar Usaha Pariwisata Wisata Tirta
56. Tanda Daftar Usaha Pariwisata Spa
57. Tanda Daftar Usaha Pariwisata Jasa Pramuwisata
58. Izin Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah
59. Izin Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal (PNF)
60. Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
61. Rekomendasi Pemanfaatan Ruang
62. Pelayanan Sertifikat Benih
63. Rekomendasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) Ketahanan Pangan dan Energi (KPE)
64. Surat Keterangan Kesehatan Hewan
65. Izin Praktek Dokter Hewan
66. Izin Rumah Potong Hewan
67. Izin Usaha Obat Hewan di Tingkat Toko, Kios dan Pengecer
68. Surat Keterangan Pengawasan Kesehatan Masyarakat Veteriner
69. Surat Izin Pemakaian Tanah (SIPT)
70. Izin Pemasangan Iklan/Reklame
71. Rekomendasi Izin Penelitian
72. Rekomendasi Izin Keramaian
73. Izin Lokasi
74. Izin Pemakaian Alat Berat
75. Izin Pemakaian Dump Truck
76. Izin Usaha Simpan Pinjam
77. Izin Praktek Fisioterapis
78. Izin Kerja Fisioterapis
79. Rekomendasi Pupuk Bersubsidi
80. Rekomendasi Pembelian BBM
81. Izin Usaha Industri
82. Kartu Pencari Kerja (AK-1)
83. Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)
84. Izin Operasional Rumah Sakit
85. Izin Lembaga Penggunaan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS)



86. Izin Bursa Kerja Khusus (BKK)
87. Rekomendasi Izin Pendirian Lembaga Pelatihan Kerja (LPK)
88. Rekomendasi BPJS Tenaga Kerja
89. Wajib Lapor Ketenagakerjaan (WLK)
90. Pelaporan dan Pendaftaran Pemborongan Kerja
91. Rekomendasi Pembuatan Paspor Calon Tenaga Kerja Indonesia
92. Surat Tanda Pendaftaran Orsos dan Operasional Panti Sosial
93. Rekomendasi Pengangkatan Anak (Adopsi)
94. Izin Kuliah Kerja Nyata (KKN) Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (PPM) Perguruan Tinggi
95. Izin Praktek Kerja Lapangan (PKL) Perguruan Tinggi
96. Izin Operasional TV Kabel
97. Pendaftaran Perjanjian Kerja dan Peraturan Perusahaan
98. Surat Izin Praktik Psikolog Klinis (SIPPK)
99. Surat Izin Praktik Terapis Gigi dan Mulut (SIPTGM)
100. Surat Izin Praktik Penata Anestesi (SIPPA)
101. Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT)
102. Penerbitan Izin Usaha Mikro Obat Tradisional
103. Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung
104. Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan
105. Rekomendasi Pembangunan Perumahan untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)
106. Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman
107. Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah/Kota
108. Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota
109. Penerbitan Izin Membuka Tanah
110. Penerbitan Izin Pendaurlangan Sampah/Pengelolaan Sampah, Pengangkutan Sampah dan Pemrosesan Akhir Sampah yang Diselenggarakan oleh Swasta
111. Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir
112. Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam daerah Kabupaten/Kota
113. Penerbitan Izin Membawa Cagar Budaya ke Luar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 Daerah Provinsi
114. Rekomendasi Membawa Benda Koleksi Museum ke Luar Kota Sawahlunto
115. Rekomendasi Sanggar Seni dan Komunitas Budaya
116. Penerbitan Izin Usaha Perikanan (IUP) dibidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota
117. Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya Dalam Daerah Kabupaten/Kota
118. Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan
119. Fasilitas Pemeliharaan Hewan/Pasar Hewan
120. Penerbitan Izin Usaha Pengecer (toko, retail, Sub Distributor) obat Hewan
121. Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Izin Usaha Toko Swalayan
122. Penerbitan Tanda Daftar Gudang, dan Surat Keterangan Penyimpanan Barang (SKPB)
123. Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk : 1) Penerima Waralaba dari Waralaba Dalam Negeri, 2) Penerima Waralaba Lanjutan dari Waralaba Dalam Negeri, dan 3) Penerima Waralaba Lanjutan dari Waralaba Luar Negeri.
124. Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk pengecer dan penjual langsung minum ditempat



125. Rekomendasi Penempatan PKAPT dan Pelaporan Rekapitulasi Perdagangan Kayu atau Pulau
126. Penerbitan Surat Keterangan Asal (bagi Daerah Kab/Kota yang telah ditetapkan sebagai instansi penerbit surat keterangan asal)
127. Penerbitan IPUI bagi Industri Kecil dan Menengah
128. Penerbitan IUKI dan IPKI yang lokasinya di Daerah Kab/Kota
129. Surat Izin Praktik Radiology
130. Surat Izin Praktek Dokter Hewan (SIP DRH)
131. Surat Izin Paramedik Veteriner Pelayanan Kesehatan Hewan (SIPP Keswan)
132. Surat Izin Paramedik Veteriner Pelayanan Inseminator (SIPP Inseminator)
133. Surat Izin Paramedik Veteriner Pelayanan Pemeriksaan Kebuntingan (SIPP PKb)
134. Surat Izin Paramedik Veteriner Pelayanan Teknik Reproduksi (SIPP ATR)
135. Surat Izin Usaha Veteriner Lain (SIVET)
136. Izin Pemakaian Terminal
137. Izin Pemakaian Badan Jalan
138. Izin Insidentil AKDP

Realisasi pelayanan perizinan dan non perizinan Kota Sawahlunto dari tahun 2015 sampai 2019 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.163
Realisasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kota Sawahlunto Tahun 2015 – 2019

| No | Tahun | Jumlah Izin yang diterbitkan | Ket |
|----|-------|------------------------------|-----|
| 1 | 2015 | 672 | |
| 2 | 2016 | 842 | |
| 3 | 2017 | 1093 | |
| 4 | 2018 | 1901 | |
| 5 | 2019 | 1567 | |

Sumber : Dinas PM, PTSP dan Tenaga Kerja Tahun 2020

Berdasarkan tabel diatas dalam 5 tahun terakhir terlihat bahwa jumlah izin dan non izin yang diterbitkan mengalami peningkatan setiap tahunnya. Jumlah izin dan non izin yang diterbitkan tahun 2015 adalah 672, pada tahun 2016 adalah 842, tahun 2017 adalah 1.093 dan pada tahun 2018 meningkat menjadi 1.901 dan pada tahun 2019 mengalami penurunan menjadi 1.567. Peningkatan jumlah perizinan dan non perizinan yang dilayani oleh DPMPPTSPNaker pada tahun 2018 karena kebijakan tentang pelayanan publik harus di tangani oleh dinas yang menangani pelayanan terpadu satu pintu, sebagaimana yang diamanatkan dalam Permendagri Nomor 138 Tahun 2017 tentang penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah.

Untuk mendukung tugas pokok dan fungsi maka harus didukung oleh Sumber Daya Manusia yang memadai sehingga pelayanan perizinan dan non perizinan serta ketenagakerjaan yang dilaksanakan dapat secara maksimal sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

Tabel 2.164
Jumlah Sumber Daya Manusia dalam Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan DPMPPTSPNaker Kota Sawahlunto

| No | OPD | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|----|-------------------|----------|----------|----------|----------|
| 1 | Dinas PMPTSPNaker | 6 orang | 6 orang | 10 orang | 9 orang |
| 2 | Dinas Teknis | 10 orang | 11 orang | 29 orang | 35 orang |
| | Jumlah | 16 orang | 17 orang | 39 orang | 44 orang |

Sumber : DPMPPTSPNaker Kota Sawahlunto Tahun 2020



Sebagaimana terlihat pada tabel diatas bahwa tenaga yang terlibat dalam pelayanan perizinan dan non perizinan di Kota Sawahlunto sebagian besar tenaganya adalah pegawai yang berada diluar DPMPSTPNaker, sehingga dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sangat tergantung kepada Dinas Teknis.

2.5 EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RKPd SAMPAI TAHUN BERJALAN DAN REALISASI RPJMD

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 merupakan tahun Kedua pelaksanaan RPJMD Kota Sawahlunto Tahun 2018-2023. Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Perencanaan Daerah Sampai Dengan Tahun 2019 dapat dilihat pada tabel berikut:



Tabel 2.165
Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Perencanaan Daerah Sampai Dengan Tahun Berjalan
Kota Sawahlunto

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output) | Target Capaian Kinerja Program RPJMD Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (2019) | | Target Kinerja RKPd Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (Tahun 2020) | | Realisasi Capaian Kinerja RKPd Yang Dievaluasi (s/d TW I Tahun 2020) | | Tingkat Capaian Kinerja RKPd Pada TW I Tahun 2020 | | Realisasi Kinerja RKPd s/d TW I Tahun 2020 | | Tingkat Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun 2020 | | OPD Penanggung Jawab | Ket |
|------------|--|---|---|-------------------|--|-------------------|---|-------------------|--|------------------|---|--------------|--|-------------------|--|---------------|----------------------|-----|
| | | | K | Rp. (Juta) | K | Rp. (Juta) | K | Rp. (Juta) | K | Rp. (Juta) | K | Rp. (Juta) | K | Rp. (Juta) | K | Rp. (Juta) | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 = 7/6 x 100 % | | 9 = 5 + 7 | | 10 = 9/4 x 100 % | | 11 | 12 |
| A | URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR | | | 984,269.76 | | 166,364.68 | | 160,881.51 | | 11,137.26 | | 6.92% | | 177,501.94 | | 18% | | |
| A.1 | Urusan Pendidikan | | | 93,166.92 | | 22,668.98 | | 17,224.43 | | 55.61 | | 0.32% | | 22,724.59 | | 24.39% | | |
| A.1.1 | Program Pendidikan anak usia Dini (PD) | APK TK | 101.30 | 6,079.40 | 98.10 | 775.5 | 99.7 | 135.2 | 0 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 98.1 | 775.50 | 96.84% | 12.76% | Dinas Pendidikan | |
| A.1.2 | Program Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar (SD dan SMP) (PD) | Persentase SD yang memiliki sarana prasarana sesuai Standar (%) | 90% | 16,458.12 | 73% | 7,657.49 | 83 | 11,632.88 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.73 | 7,657.49 | 81.11% | 46.53% | Dinas Pendidikan | |
| | | Persentase SMP yang memiliki sarana prasarana sesuai Standar (%) | 95% | | 92% | | 85 | | 0 | | 0.00% | | 0.92 | | 96.84% | | Dinas Pendidikan | |
| | | APM SD | 97.1 | | 96.86 | | 96.7 | | 0 | | 0.00% | | 96.86 | | 99.75% | | Dinas Pendidikan | |
| | | APM SMP | 80.29 | | 82.96 | | 79.39 | | 0 | | 0.00% | | 82.96 | | 103.33 % | | Dinas Pendidikan | |
| | | Persentase Siswa Baru dari Keluarga kurang mampu yang diberikan sarana pendidikan (%) | 100% | | 94% | | 100 | | 0 | | 0.00% | | 0.94 | | 94.00% | | Dinas Pendidikan | |
| A.1.3 | Program Pendidikan Non Formal (PD) | Persentase Anak Putus Sekolah yang melanjutkan pendidikan di sekolah non formal | 95% | 3,975.74 | 82% | 1,321.37 | 89 | 252.28 | 0 | 8 | 0.00% | 3.17% | 0.82 | 1,329.37 | 86.32% | 33.44% | Dinas Pendidikan | |
| A.1.4 | Program pendidikan wajib belajar sembilan tahun (PD) | Angka Partisipasi Kasar SD (%) | 110.5 | 9,583.00 | 100.28 | 0 | 109.65 | 1,730.31 | 0 | 44.61 | 0.00% | 2.58% | 100.28 | 44.61 | 90.75% | 0.47% | Dinas Pendidikan | |
| | | Angka Partisipasi Kasar SMP (%) | 105.5 | | 94.45 | | 104.6 | | 0 | | 0.00% | | 94.45 | | 89.53% | | Dinas Pendidikan | |



| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output) | Target Capaian Kinerja Program RPJMD Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (2019) | | Target Kinerja RKPd Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (Tahun 2020) | | Realisasi Capaian Kinerja RKPd Yang Dievaluasi (s/d TW I Tahun 2020) | | Tingkat Capaian Kinerja RKPd Pada TW I Tahun 2020 | | Realisasi Kinerja RKPd s/d TW I Tahun 2020 | | Tingkat Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun 2020 | | OPD Penanggung Jawab | Ket |
|------------|---|---|---|-------------------|--|------------------|---|------------------|--|------------------|---|---------------|--|------------------|--|---------------|----------------------------|-----|
| | | | K | Rp. (Juta) | K | Rp. (Juta) | K | Rp. (Juta) | K | Rp. (Juta) | K | Rp. (Juta) | K | Rp. (Juta) | K | Rp. (Juta) | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 = 7/6 x 100 % | | 9 = 5 + 7 | | 10 = 9/4 x 100 % | | 11 | 12 |
| A.1.5 | Program Manajemen Pelayanan Pendidikan (PD) | persentase sekolah yang memperoleh akreditasi A | 70.4 | 38,653.96 | 60.27 | 9,830.90 | 60.56 | 337.03 | 0 | 3 | 0.00% | 0.89% | 60.27 | 9,833.90 | 85.61% | 25.44% | Dinas Pendidikan | |
| A.1.6 | Program Pendidikan berkarakter (PD) | Kasus Kenakalan Remaja | 2 | 1,575.00 | 7.34 | 120.98 | 104.68 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 120.98 | 0.00% | 7.68% | Dinas Pendidikan | |
| | | Persentase Lulusan SD hafidz al-Quran minimal juz 30 | 50 | | | | | | | | | | 7.34 | | 14.68% | | Dinas Pendidikan | |
| | | Persentase Sekolah yang melaksanakan pendidikan berkarakter (%) | 100 | | | | | | | | | | 100 | | 100.00 % | | Dinas Pendidikan | |
| A.1.7 | Program Program Peningkatan Kompetensi dan Kreativitas Siswa (PD) | Jumlah Siswa yang menerima Reward | 2,910 | 5,646.87 | 139 | 1,788.30 | 482 | 2,695.65 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 139 | 1,788.30 | 4.78% | 31.67% | Dinas Pendidikan | |
| | | Jumlah Mahasiswa yang menerima Reward | 2,800 | | 1077 | | 550 | | 0 | | 0.00% | | 1077 | | 38.46% | | Dinas Pendidikan | |
| A.1.8 | Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PD) | Persentase guru yang bersertifikat pendidik | 90.3 | 8,932.70 | 57.4 | 800.07 | 84.2 | 336.41 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 57.4 | 800.07 | 63.57% | 8.96% | Dinas Pendidikan | |
| | | Persentase guru yang berkualifikasi min S1 | 100 | | 82.85 | | 94.95 | | 0 | | 0.00% | | 82.85 | | 82.85% | | Dinas Pendidikan | |
| A.1.9 | Program peningkatan mutu pendidikan dasar (SD dan SMP) | Angka rata-rata nilai USBN SD (skala 0-100) | 79.4 | 2,262.13 | 75.00 | 374.37 | 78.6 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 75 | 374.37 | 94.46% | 16.55% | Dinas Pendidikan | |
| | | Angka rata-rata nilai UN SMP (skala 0-100) | 56.3 | | 49.75 | | 55.5 | | 0 | | 0.00% | | 49.75 | | 88.37% | | Dinas Pendidikan | |
| A.2 | Urusan Kesehatan | | | 376,192.31 | | 64,590.29 | | 87,080.81 | | 10,250.59 | | 11.77% | | 74,840.88 | | 19.89% | | |
| A.2.1 | Program Promosi kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat (PD) | Persentase UKBM yang aktif | 90 | 4,234.45 | 78 | 396.34 | 81 | 260.10 | | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 78 | 396.34 | 86.67% | 9.36% | Dinas Kesehatan Dan Dalduk | |
| A.2.2 | Program Peningkatan Kesehatan ibu melahirkan dan Anak (PD) | Angka kematian balita per 1.000 | 1.75 | 2,325.01 | 0 | 0 | 2.17 | 0 | | 0 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | Dinas Kesehatan Dan Dalduk | |
| | | Jumlah kematian ibu | 0 | | 0 | | 0 | | | | 0.00% | | 0 | | 0.00% | | Dinas Kesehatan Dan Dalduk | |



| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output) | Target Capaian Kinerja Program RPJMD Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RKKPD s/d Tahun Lalu (2019) | | Target Kinerja RKKPD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (Tahun 2020) | | Realisasi Capaian Kinerja RKKPD Yang Dievaluasi (s/d TW I Tahun 2020) | | Tingkat Capaian Kinerja RKKPD Pada TW I Tahun 2020 | | Realisasi Kinerja RKKPD s/d TW I Tahun 2020 | | Tingkat Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun 2020 | | OPD Penanggung Jawab | Ket |
|-------|--|---|---|------------|---|------------|--|------------|---|------------|--|------------|---|------------|--|------------|----------------------------|-----|
| | | | K | Rp. (Juta) | K | Rp. (Juta) | K | Rp. (Juta) | K | Rp. (Juta) | K | Rp. (Juta) | K | Rp. (Juta) | K | Rp. (Juta) | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 = 7/6 x 100 % | | 9 = 5 + 7 | | 10 = 9/4 x 100 % | | 11 | 12 |
| A.2.3 | Program Perbaikan Gizi Masyarakat (PD) | Cakupan Balita Gizi buruk mendapat perawatan | 100 | 50.58 | 100 | 4.67 | 100 | 19.25 | | 19.15 | 0.00% | 99.45% | 100 | 23.82 | 100.00 % | 47.08% | Dinas Kesehatan Dan Dalduk | |
| A.2.4 | Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular (PD) | Persentase Penderita TBC yang mendapat pelayanan TBC sesuai Standar | 100 | 1,289.34 | 100 | 205.35 | 100 | 313.29 | | 23.41 | 0.00% | 7.47% | 100 | 228.76 | 100.00 % | 17.74% | Dinas Kesehatan Dan Dalduk | |
| | | Persentase Penderita DBD yang mendapat pelayanan DBD sesuai Standar | 100 | | 100 | | 100 | | | | 0.00% | | 100 | | 100.00 % | | Dinas Kesehatan Dan Dalduk | |
| | | Persentase Penderita HIV yang mendapat pelayanan HIV sesuai Standar | 100 | | 100 | | 100 | | | | 0.00% | | 100 | | 100.00 % | | Dinas Kesehatan Dan Dalduk | |
| A.2.5 | Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular (PD) | Persentase Penderita Diabetes yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai Standar | 100 | 662.67 | 100 | 45.87 | 100 | 90.33 | | 10.96 | 0.00% | 12.13% | 100 | 56.83 | 100.00 % | 8.58% | Dinas Kesehatan Dan Dalduk | |
| | | Persentase pasien gangguan jiwa (ODGJ) berat yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai Standar | 100 | | 100 | | 100 | | | | 0.00% | | 100 | | 100.00 % | | Dinas Kesehatan Dan Dalduk | |
| | | Persentase Penderita hipertensi yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai Standar | 100 | | 100 | | 100 | | | | 0.00% | | 100 | | 100.00 % | | Dinas Kesehatan Dan Dalduk | |
| A.2.6 | Program Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana Rumah Sakit/ Rumah Sakit Jiwa/ Rumah Sakit Paru/ Rumah Sakit Mata (PD) | Persentase Sarana dan Prasarana RS sesuai Standar | 85 | 57,537.00 | 77.8 | 10,784.15 | 79 | 14,772.32 | | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 77.8 | 10,784.15 | 91.53% | 18.74% | Dinas Kesehatan dan RSUD | |
| A.2.7 | Program Standarisasi | Akreditasi Rumah Sakit | paripurna | 2,961.02 | utama | 402.43 | utama | 647.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 402.43 | | 13.59% | RSUD | | |



| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output) | Target Capaian Kinerja Program RPJMD Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (2019) | | Target Kinerja RKPd Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (Tahun 2020) | | Realisasi Capaian Kinerja RKPd Yang Dievaluasi (s/d TW I Tahun 2020) | | Tingkat Capaian Kinerja RKPd Pada TW I Tahun 2020 | | Realisasi Kinerja RKPd s/d TW I Tahun 2020 | | Tingkat Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun 2020 | | OPD Penanggung Jawab | Ket |
|--------|---|---|---|------------|--|------------|---|------------|--|------------|---|------------|--|------------|--|------------|-------------------------------------|-----|
| | | | K | Rp. (Juta) | K | Rp. (Juta) | K | Rp. (Juta) | K | Rp. (Juta) | K | Rp. (Juta) | K | Rp. (Juta) | K | Rp. (Juta) | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 = 7/6 x 100 % | | 9 = 5 + 7 | | 10 = 9/4 x 100 % | | 11 | 12 |
| | Pelayanan Kesehatan (PD) | Persentase puskesmas yang terakreditasi | 100 | | 100 | | 100 | | 0.00 | | 0.00% | | 100 | | 100.00 % | | Dinas Kesehatan Dan Dalduk | |
| A.2.8 | Program Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana, Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan Jaringannya (PD) | Persentase Sarana dan Prasarana, Puskesmas, dan Puskesmas Pembantu sesuai Standar | 80 | 50,108.53 | 73 | 5,358.42 | 75 | 22,947.93 | | 28.97 | 0.00% | 0.13% | 73 | 5,387.39 | 91.25% | #VALUE ! | Dinas Kesehatan dan RSUD | |
| A.2.9 | Program Peningkatan Kualitas SDM Pelayanan Kesehatan (PD) | Persentase Ketersediaan tenaga kesehatan dan tenaga medis sesuai standar | 96 | 620.63 | 94 | 0 | 93 | 115.36 | | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 94 | 0.00 | 97.92% | 0.00% | Dinas Kesehatan dan RSUD | |
| A.2.10 | Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan (PD) | % Penduduk yang memiliki jaminan kesehatan | 99 | 15,006.98 | 95 | 18.8 | 96 | 12,257.36 | | 1,153.13 | 0.00% | 9.41% | 95 | 1,171.93 | 95.96% | 7.81% | Dinas Kesehatan dan RSUD | |
| | | Persentase rujukan pasien yang terlaksana | 100 | | 100 | | | | | | 100 | | | | | | | |
| A.2.11 | Program Obat dan Perbekalan Kesehatan | Ketersediaan Obat dan Vaksin indikator (%) | 96 | 24,108.00 | 88 | 230.6 | 90 | 148.63 | | 1.34 | 0.00% | 0.90% | 88 | 231.94 | 91.67% | 0.96% | Dinas Kesehatan Dan Dalduk dan RSUD | |
| A.2.12 | Program Upaya Kesehatan Masyarakat | Keluarga Sehat (%) | 37 | 14,962.34 | 29 | 18,152.93 | 31 | 4,016.07 | | 122.80 | 0.00% | 3.06% | 29 | 18,275.73 | 78.38% | 122.14 % | Dinas Kesehatan Dan Dalduk | |
| A.2.13 | Program Pengawasan Obat dan Makanan | Persentase sarana obat, makanan dan alkes yang sesuai standar (%) | 81 | 462.88 | 77 | 33.08 | 78 | 8.65 | | 0 | 0.00% | 0.00% | 77 | 33.08 | 95.06% | 7.15% | Dinas Kesehatan Dan Dalduk | |
| A.2.14 | Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita | Persentase balita yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar | 80 | 1,328.86 | 74 | 167.17 | 76 | 86.00 | | 0 | 0.00% | 0.00% | 74 | 167.17 | 92.50% | 12.58% | Dinas Kesehatan Dan Dalduk | |
| A.2.15 | Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia | Persentase lansia yang mendapatkan pelayanan kesehatan (%) | 80 | 128.32 | 70 | 16.22 | 75 | 20.11 | | 0 | 0.00% | 0.00% | 70 | 16.22 | 87.50% | 12.64% | Dinas Kesehatan Dan Dalduk | |



| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output) | Target Capaian Kinerja Program RPJMD Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2019) | | Target Kinerja RKPD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (Tahun 2020) | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD Yang Dievaluasi (s/d TW I Tahun 2020) | | Tingkat Capaian Kinerja RKPD Pada TW I Tahun 2020 | | Realisasi Kinerja RKPD s/d TW I Tahun 2020 | | Tingkat Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun 2020 | | OPD Penanggung Jawab | Ket |
|--------|---|---|---|------------|--|------------|---|------------|--|------------|---|------------|--|----------------------------|--|----------------------------|----------------------|-----|
| | | | K | Rp. (Juta) | K | Rp. (Juta) | K | Rp. (Juta) | K | Rp. (Juta) | K | Rp. (Juta) | K | Rp. (Juta) | K | Rp. (Juta) | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 = 7/6 x 100 % | | 9 = 5 + 7 | | 10 = 9/4 x 100 % | | 11 | 12 |
| A.2.16 | Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan | Persentase tempat pengolahan makanan yang memenuhi syarat kesehatan | 80 | 126.08 | 90 | 7.46 | 91 | 12.50 | 0.66 | 0.00% | 5.24% | 90 | 8.12 | 112.50 % | 6.44% | Dinas Kesehatan Dan Dalduk | | |
| A.2.17 | Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak | Angka kematian balita per 1000 | 2.35 | 766.80 | 2.35 | 65.05 | 228.92 | 2.34 | 1.02% | 2.35 | 67.39 | 100.00 % | 8.79% | Dinas Kesehatan Dan Dalduk | | | | |
| | | Jumlah kematian ibu | | | | | | | | | | | | | | #DIV/0! | | |
| A.2.18 | Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/ Rumah Sakit Jiwa/ Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata | Persentase sarana dan prasarana rumah sakit yang dilakukan pemeliharaan (%) | 87.5 | 12,806.00 | 0 | 0 | 80 | 1,267.39 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | RSUD | | |
| A.2.19 | Pelaksanaan Kegiatan Operasional Rutin Sarana Pelayanan Kesehatan | Tersedianya peralatan dan sarana pendukung pelayanan yang berkualitas | 100 | 5,455.70 | 100 | 585.65 | 100 | 736.78 | 87.43 | 0.00% | 11.87% | 100 | 673.08 | 100.00 % | 12.34% | Dinas Kesehatan Dan Dalduk | | |
| A.2.20 | Program Upaya Kesehatan Kerja | Persentase terbentuknya Pos UKK di Puskesmas | 4 | 15.00 | 4 | 10.13 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 4 | 10.13 | 100.00 % | 67.53% | Dinas Kesehatan Dan Dalduk | | |
| A.2.21 | Program Upaya Kesehatan Olahraga | Persentase terbentuknya pos kesehatan olah raga di puskesmas | 4 | 6.5 | 1 | 4.32 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 1 | 4.32 | 25.00% | 66.46% | Dinas Kesehatan Dan Dalduk | | |
| A.2.22 | Program Peningkatan Kualitas Air | Sarana Air Minum dilakukan pengawasan (%) | 80 | 1,409.12 | 72 | 119.69 | 74 | 132.36 | 6.95 | 0.00% | 5.25% | 72 | 126.64 | 90.00% | 8.99% | Dinas Kesehatan Dan Dalduk | | |
| A.2.23 | Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan (BLUD) | Terlaksananya Operasional Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit (Bulan) | 60 | 179,827.00 | 12 | 27,981.96 | 12 | 29,000.00 | 8,793.46 | 0.00% | 30.32% | 12 | 36,775.42 | 20.00% | 20.45% | RSUD | | |



| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output) | Target Capaian Kinerja Program RPJMD Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2019) | | Target Kinerja RKPD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (Tahun 2020) | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD Yang Dievaluasi (s/d TW I Tahun 2020) | | Tingkat Capaian Kinerja RKPD Pada TW I Tahun 2020 | | Realisasi Kinerja RKPD s/d TW I Tahun 2020 | | Tingkat Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun 2020 | | OPD Penanggung Jawab | Ket |
|-------|--|--|---|------------|--|------------|---|------------|--|------------|---|------------|--|------------|--|--------------------------------|----------------------|-----|
| | | | K | Rp. (Juta) | K | Rp. (Juta) | K | Rp. (Juta) | K | Rp. (Juta) | K | Rp. (Juta) | K | Rp. (Juta) | K | Rp. (Juta) | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 = 7/6 x 100 % | | 9 = 5 + 7 | | 10 = 9/4 x 100 % | | 11 | 12 |
| A.3 | Urusan Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang | | | 437,241.39 | | 53,506.43 | | 32,981.15 | | 242.03 | | 0.73% | | 53,748.46 | | 12.29% | | |
| A.3.1 | Program Pemeliharaan /rehabilitasi jalan dan jembatan (PD) | Persentase Jalan dalam kondisi mantap | 71 | 82,094.01 | 59 | 9,533.42 | 68 | 11,098.60 | 89.41 | 0.00% | 0.81% | 59 | 9,622.83 | 83.10% | 11.72% | DPU PR | | |
| | | Persentase Jembatan dalam kondisi mantap | 90 | | 80 | | 82 | | | 0.00% | | 80 | | 88.89% | | DPU PR | | |
| A.3.2 | Program Pembangunan dan Pemeliharaan saluran drainase/Gorong-gorong (PD) | Persentase Drainase dalam Kondisi Baik | 77.55 | 18,262.47 | 71.19 | 3,223.54 | 72.78 | 1,294.19 | 0 | 0.00% | 0.00% | 71.19 | 3,223.54 | 91.80% | 17.65% | DPU PR | | |
| A.3.3 | Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, dan Jaringan Pengairan Lainnya (PD) | Persentase Saluran Irigasi dalam Kondisi baik | 90 | 99,325.01 | 80 | 11,334.23 | 82 | 4,106.38 | 0 | 0.00% | 0.00% | 80 | 11,334.23 | 88.89% | 11.41% | DKP3/DPUP R | | |
| A.3.4 | Program Pembangunan dan Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur Sosial (PD) | Persentase gedung pemerintah dalam kondisi baik | 72.56 | 109,070.34 | 65.12 | 4,689.26 | 66.98 | 6,435.56 | 0 | 0.00% | 0.00% | 65.12 | 4,689.26 | 89.75% | 4.30% | Bag Kesra/DPUP R | | |
| A.3.5 | Proram Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) (PD) | Persentase RTH terhadap Luas Wilayah Kota | 20 | 4,198.89 | 17 | 244.71 | 18 | 497.33 | 72.93 | 0.00% | 14.66% | 17 | 317.64 | 85.00% | 7.56% | Barenlitbang da, PUPR, DPKP2LH | | |
| A.3.6 | Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang (PD) | Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang | 66 | 1,653.99 | 62 | 251.97 | 63 | 215.10 | 8.68 | 0.00% | 4.03% | 62 | 260.65 | 93.94% | 15.76% | Barenlitbang da, PUPR, DPKP2LH | | |
| A.3.7 | Program perencanaan Tata Ruang | Persentase ketersediaan dokumen dan informasi tata ruang | 100 | 2,363.35 | 80 | 105.9 | 5 | 493.31 | 0 | 0.00% | 0.00% | 80 | 105.90 | 80.00% | 4.48% | DPUPR, Barenlitbang da | | |
| A.3.8 | Program pemanfaatan ruang | Persentase bangunan ber IMB | 66 | 1,011.58 | 62 | 197.19 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 62 | 197.19 | 93.94% | 19.49% | DPUPR | |
| A.3.9 | Program Pembangunan/ peningkatan jalan dan jembatan | Panjang jalan yang dtingkatkan (km) | 9,318 | 102,722.46 | 11,987 | 22,113.39 | 9,318 | 7,832.50 | 0 | 0.00% | 0.00% | 11987 | 22,113.39 | 128.64 % | 21.53% | DPUPR | | |



| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output) | Target Capaian Kinerja Program RPJMD Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RKKPD s/d Tahun Lalu (2019) | | Target Kinerja RKKPD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (Tahun 2020) | | Realisasi Capaian Kinerja RKKPD Yang Dievaluasi (s/d TW I Tahun 2020) | | Tingkat Capaian Kinerja RKKPD Pada TW I Tahun 2020 | | Realisasi Kinerja RKKPD s/d TW I Tahun 2020 | | Tingkat Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun 2020 | | OPD Penanggung Jawab | Ket |
|------------|---|--|---|------------------|---|------------------|--|------------------|---|------------|--|------------|---|------------|--|---|----------------------|-----|
| | | | K | Rp. (Juta) | K | Rp. (Juta) | K | Rp. (Juta) | K | Rp. (Juta) | K | Rp. (Juta) | K | Rp. (Juta) | K | Rp. (Juta) | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 = 7/6 x 100 % | | 9 = 5 + 7 | | 10 = 9/4 x 100 % | | 11 | 12 |
| A.3.10 | Program Pengelolaan Penerangan Jalan Umum (PJU) | Jumlah lampu PJU yang terpelihara (titik) | 700 | 12,242.69 | 600 | 1,370.64 | 650 | 524.71 | 13.17 | 0.00% | 2.51% | 600 | 1,383.81 | 85.71% | 11.30% | DPUPR | | |
| | | Jumlah lampu PJU yang terpasang (titik) | 3,461 | | 2.861 | | 3,011 | | | 0.00% | | 2.861 | | 0.08% | | | | |
| A.3.11 | Program sarana dan prasarana kebinamargaan | Jumlah alat berat dan alat labor yang tersedia dalam kondisi baik (unit) | 81 | 4,297 | 0 | 442.18 | 69 | 483.48 | 57.85 | 0.00% | 11.97% | 0 | 500.03 | 0.00% | 11.64% | DPUPR | | |
| A.4 | Urusan Perumahan Dan Kawasan Permukiman | | | 54,268.88 | | 21,088.39 | | 19,992.28 | | | 0.56% | | 21,200.78 | | 39.07% | | | |
| A.4.1 | Program Pengembangan Perumahan (PD) | persentase luas permukiman yang tertata | 85 | 37,401.98 | 65 | 18,140.63 | 70 | 14,872.40 | 2.73 | 0.00% | 0.02% | 65 | 18,143.36 | 76.47% | 48.51% | Dinas Pertakim LH | | |
| A.4.2 | Program Lingkungan Sehat Perumahan (PD) | Persentase RT yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak (%) (SDGs) | 91 | 8,567.27 | 86 | 2,390.80 | 87 | 4,402.13 | 13.30 | 0.00% | 0.30% | 86 | 2,404.10 | 94.51% | 28.06% | Dinas Pertakim LH, Dinas Kesehatan dan Dalduk | | |
| | | Persentase RT yang memiliki akses terhadap sanitasi layak dan berkelanjutan (%) (SDGs) | 100 | | 78 | | 81 | | | 0.00% | | 78 | | 78.00% | | | | |
| A.4.3 | Program Pemeliharaan Rumah Susun Meliputi Kegiatan Operasional dan Pemeliharaan Bagian Bersama, Benda Bersama dan Tanah Bersama | Persentase Tingkat Keterhunian Rumah Susun (%) | 98 | 7,110.79 | 96 | 556.96 | 97 | 717.75 | 96.37 | 0.00% | 13.43% | 96 | 653.33 | 97.96% | 9.19% | Dinas Pertakim LH | | |
| A.4.4 | Program Perbaikan Perumahan akibat bencana alam/ sosial | Persentase Rumah Yang Direhabilitasi (%) | 100 | 1,188.84 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 100 | 0.00 | 100.00 % | 0.00% | Dinas Pertakim LH, Kesbangpol dan PBD | | |



| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output) | Target Capaian Kinerja Program RPJMD Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RKKPD s/d Tahun Lalu (2019) | | Target Kinerja RKKPD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (Tahun 2020) | | Realisasi Capaian Kinerja RKKPD Yang Dievaluasi (s/d TW I Tahun 2020) | | Tingkat Capaian Kinerja RKKPD Pada TW I Tahun 2020 | | Realisasi Kinerja RKKPD s/d TW I Tahun 2020 | | Tingkat Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun 2020 | | OPD Penanggung Jawab | Ket |
|-------|--|---|---|------------|---|------------|--|------------|---|------------|--|------------|---|------------|--|------------|--------------------------------|-----|
| | | | K | Rp. (Juta) | K | Rp. (Juta) | K | Rp. (Juta) | K | Rp. (Juta) | K | Rp. (Juta) | K | Rp. (Juta) | K | Rp. (Juta) | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 = 7/6 x 100 % | | 9 = 5 + 7 | | 10 = 9/4 x 100 % | | 11 | 12 |
| A.5 | Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat | | | 16,665.16 | | 3,150 | | 2,476 | | 333 | | 13.47% | | 3,483.94 | | 20.91% | | |
| A.5.1 | Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan lingkungan (PD) | Persentase Gangguan Keamanan yang ditangani secara terpadu | 100 | 3,686.97 | 100 | 766.47 | 100 | 671.95 | | 79.37 | 0.00% | 11.81% | 100 | 845.84 | 100.00 % | 22.94% | Badan Kesbangpol dan PBD | |
| | | | | 727.20 | | 28.69 | | 64.71 | | 10.02 | | 15.49% | | 38.71 | | 5.32% | Satpol PP Damkar dan Kecamatan | |
| | | | | 58.19 | | 0 | | 12.5 | | 1.47 | | 11.80% | | 1.47 | | 2.53% | Barangin | |
| | | | 100 | 91.38 | 70 | 17.73 | 100 | 0 | | 0 | 0.00% | 0.00% | 70 | 17.73 | 70.00% | 19.40% | L. Segar | |
| | | | | 96.19 | | 13.27 | | 18.57 | | 0 | | 0.00% | | 13.27 | | 13.80% | Talawi | |
| A.5.2 | Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan tindak Kriminal (PD) | Persentase penegakan perda (%) | 100 | 1,118.07 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | Badan Kesbangpol dan PBD | |
| | | | 100 | 800.67 | 100 | 123.63 | 100 | 111.64 | | 44.50 | 0.00% | 39.86% | 100 | 168.13 | 100.00 % | 21.00% | Satpol PP Damkar | |
| A.5.3 | Program Peningkatan Mitigasi Bencana (PD) | Jumlah Dokumen mitigasi, SOP, Informasi Pra Bencana yang tersusun | 3 | 493.03 | 3 | 1,569.87 | 3 | 45.00 | | 44.22 | 0.00% | 98.27% | 3 | 1,614.09 | 100.00 % | 327.38 % | Badan Kesbangpol dan PBD | |
| A.5.4 | Program Peningkatan Kesiapsiagaan Bencana (PD) | Persentase bencana yang tertangani sesuai standar | 85 | 3,905.79 | 0 | 0 | 70 | 593.71 | | 60.44 | 0.00% | 10.18% | 0 | 60.44 | 0.00% | 1.55% | Badan Kesbangpol dan PBD | |
| A.5.5 | Program Peningkatan sarana dan prasarana Kebencanaan (PD) | Persentase Ketersediaan Sarana Prasarana Kebencanaan sesuai standar | 70 | 1,388.18 | 0 | 0 | 50 | 60.00 | | 58.22 | 0.00% | 97.04% | 0 | 58.22 | 0.00% | 4.19% | Badan Kesbangpol dan PBD | |
| A.5.6 | Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur PB | Persentase ketersediaan aparaturnya kesiapsiagaan Bencana | 100% | 7.19 | 0% | 0 | 48% | 0 | | 0 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | Badan Kesbangpol dan PBD | |



| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output) | Target Capaian Kinerja Program RPJMD Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RKKPD s/d Tahun Lalu (2019) | | Target Kinerja RKKPD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (Tahun 2020) | | Realisasi Capaian Kinerja RKKPD Yang Dievaluasi (s/d TW I Tahun 2020) | | Tingkat Capaian Kinerja RKKPD Pada TW I Tahun 2020 | | Realisasi Kinerja RKKPD s/d TW I Tahun 2020 | | Tingkat Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun 2020 | | OPD Penanggung Jawab | Ket | |
|--------|--|---|---|------------|---|------------|--|------------|---|------------|--|------------|---|------------|--|------------|-----------------------------------|--------------------------|--|
| | | | K | Rp. (Juta) | K | Rp. (Juta) | K | Rp. (Juta) | K | Rp. (Juta) | K | Rp. (Juta) | K | Rp. (Juta) | K | Rp. (Juta) | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 = 7/6 x 100 % | | 9 = 5 + 7 | | 10 = 9/4 x 100 % | | 11 | 12 | |
| | | Persentase Petugas Kesiapsiagaan Bencana yang meningkat kompetensinya | 70% | | 0% | | 12% | | | | | 0.00% | | 0 | | 0.00% | | | |
| A.5.7 | Program Penanganan tanggap Darurat | Persentase kejadian Tanggap Darurat Tertangani | | 52.87 | | 0 | | 39.99 | | 0 | | 0.00% | 0.00% | 0 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | Badan Kesbangpol dan PBD | |
| A.5.8 | Program Perencanaan Rehabilitasi Pasca Bencana | Persentase perencanaan rehabilitasi yang terlaksana | 50% | 681.21 | 0% | 0 | 35% | 50 | | 4.78 | | 0.00% | 9.56% | 0 | 4.78 | 0.00% | 0.70% | Badan Kesbangpol dan PBD | |
| A.5.9 | Program Rekonstruksi Pasca Bencana | Persentase Infrastruktur, Faskes, Fasos dan Fasum Pasca Bencana yang tertangani | | 1,035.17 | | 122.34 | | 170 | | 0 | 24.43 | 0.00% | 14.37% | 0 | 146.77 | 0.00% | 14.18% | Badan Kesbangpol& PBD | |
| A.5.10 | Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan | Jumlah Masyarakat yang mengikuti kegiatan Sosialisasi Wasbang | 3050 | 836.92 | 610 | 279.61 | 610 | 378.82 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 610 | 279.61 | 20.00% | 33.41% | Badan Kesbangpol& PBD dan Setdako | | |
| | | Jumlah peringatan hari-hari besar yang difasilitasi (keg) | 15 | | 4 | | 4 | | 0 | | 0.00% | | 4 | | 26.67% | | | | |
| | | Jumlah Forum-forum strategis daerah | 11 | | 3 | | 4 | | 0 | | 0.00% | | 3 | | 27.27% | | | | |
| A.5.11 | Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat | Jumlah Masyarakat yang mengikuti Sosialisasi Pekat | 1250 | 222.15 | 250 | 26.12 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 250 | 26.12 | 20.00% | 11.76% | Badan Kesbangpol dan PBD | | |
| | | Persentase Penurunan Penyakit Masyarakat (%) | 35 | 191.68 | 0 | 0 | 75 | 29.12 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | Satpol PP Damkar | | |
| A.5.12 | Program Dukungan Kelancaran Penyelenggaraan Pemilihan Umum | Jumlah Gangguan terhadap kegiatan PEMILU (Kasus) | | 170.75 | | 0 | | 86.2 | | 0 | | 0.00% | 0.00% | 0 | 86.20 | #DIV/0! | 50.48% | Badan Kesbangpol dan PBD | |



| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output) | Target Capaian Kinerja Program RPJMD Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RKKPD s/d Tahun Lalu (2019) | | Target Kinerja RKKPD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (Tahun 2020) | | Realisasi Capaian Kinerja RKKPD Yang Dievaluasi (s/d TW I Tahun 2020) | | Tingkat Capaian Kinerja RKKPD Pada TW I Tahun 2020 | | Realisasi Kinerja RKKPD s/d TW I Tahun 2020 | | Tingkat Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun 2020 | | OPD Penanggung Jawab | Ket |
|------------|--|--|---|---------------|---|-----------------|--|-----------------|---|---------------|--|---------------|---|-----------------|--|--------------------------|----------------------|-----|
| | | | K | Rp. (Juta) | K | Rp. (Juta) | K | Rp. (Juta) | K | Rp. (Juta) | K | Rp. (Juta) | K | Rp. (Juta) | K | Rp. (Juta) | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 = 7/6 x 100 % | | 9 = 5 + 7 | | 10 = 9/4 x 100 % | | 11 | 12 |
| A.5.13 | Program Pendidikan Politik Masyarakat | Persentase pemahaman masyarakat tentang etika dan Budaya politik Persentase Anggota Parpol yang mengikuti Bimtek pertanggungjawaban Keuangan Parpol | 900 | 93.38 | 900 | 58.5 | 70 | 80 | 0 | 0.00% | 0.00% | 900 | 58.50 | 100.00 % | 62.65% | Badan Kesbangpol dan PBD | | |
| A.5.14 | Program Pencegahan dan Penanggulangan Bencana Kebakaran | Jumlah kasus kebakaran yang ditangani secara terpadu/Total Jumlah kebakaran x 100 % | 100 | 479.96 | 100 | 14.19 | 100 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 100 | 14.19 | 100.00 % | 2.96% | Satpol PP Damkar | | |
| A.5.15 | Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran | Persentase kerjasama penanganan pencegahan (%) | 100 | 773.99 | 100 | 43.83 | 100 | 79.72 | 15 | 6.03 | 15.00% | 7.57% | 115 | 49.86 | 115.00 % | 6.44% | Satpol PP Damkar | |
| A.6 | Urusan Sosial | | | 6735.1 | | 1,360.14 | | 1,127.11 | | 143.15 | | 12.70% | | 1,503.29 | | 22.32% | | |
| A.6.1 | Program Pemberdayaan Fakir miskin, komunitas adat terpencil dan penyandang masalah kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya (TKPK) (PD) | Persentase Masyarakat Miskin yang terfasilitasi | 86 | 3,753.00 | 69 | 416.67 | 74 | 190.85 | 5.74 | 0.00% | 3.01% | 69 | 422.41 | 80.23% | 11.26% | Dinsos PMD | | |
| A.6.2 | Program pembinaan dan fasilitasi para penyandang cacat dan trauma (PD) | Persentase para penyandang cacat, disabilitas, dan PMKS lainnya yang terfasilitasi | 100 | 1,388.06 | 59.76 | 563.76 | 84.89 | 505.48 | 67 | 76.06 | 78.93% | 15.05% | 67 | 639.82 | 67.00% | 46.09% | Dinsos PMD | |
| A.6.3 | Program Pembinaan dan fasilitasi Panti Asuhan/Panti Jompo (PD) | Persentase panti asuhan/ jompo yang terfasilitasi | 100 | 640.49 | 100 | 144.5 | 100 | 214.84 | 75 | 48.76 | 23% | 22.70% | 75 | 193.26 | 75.00% | 30.17% | Dinsos PMD | |
| A.6.4 | Program Pelayanan dan Rehabilitas Kesejahteraan Sosial | Persentase penyandang sosial yang terfasilitasi (%) | 28% | 246.83 | 25% | 33.77 | 25% | 24.09 | 0% | 0.09 | 0.00% | 0.37% | 0.25 | 33.86 | 89.29% | 13.72% | Dinsos PMD | |



| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output) | Target Capaian Kinerja Program RPJMD Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (2019) | | Target Kinerja RKPd Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (Tahun 2020) | | Realisasi Capaian Kinerja RKPd Yang Dievaluasi (s/d TW I Tahun 2020) | | Tingkat Capaian Kinerja RKPd Pada TW I Tahun 2020 | | Realisasi Kinerja RKPd s/d TW I Tahun 2020 | | Tingkat Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun 2020 | | OPD Penanggung Jawab | Ket |
|------------|--|--|---|-------------------|--|------------------|---|------------------|--|---------------|---|---------------|--|------------------|--|---------------|-------------------------|-----|
| | | | K | Rp. (Juta) | K | Rp. (Juta) | K | Rp. (Juta) | K | Rp. (Juta) | K | Rp. (Juta) | K | Rp. (Juta) | K | Rp. (Juta) | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 = 7/6 x 100 % | | 9 = 5 + 7 | | 10 = 9/4 x 100 % | | 11 | 12 |
| A.6.5 | Program Pembinaan Anak Terlantar | Presentase anak terlantar yang di bina (%) | 100% | 84.35 | N/A | 0 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.00% | N/A | 0.00 | N/A | 0.00% | Dinsos PMD | |
| A.6.6 | Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial | Persentase Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Aktif. | 100% | 622.37 | 85% | 201.44 | 87% | 191.85 | 31% | 12.50 | 35.63% | 6.52% | 1.16 | 213.94 | 116.00 % | 34.38% | Dinsos PMD | |
| B | URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR | | | 169,149.97 | | 21,214.69 | | 22,515.46 | | 738.66 | | 3.28% | | 21,953.34 | | 12.98% | | |
| B.1 | Urusan Ketenagakerjaan | | | 11,950.12 | | 655.92 | | 1,704.54 | | 66.36 | | 3.89% | | 722.28 | | 6.04% | | |
| B.1.1 | Program Peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja (PD) | Persentase angkatan kerja yang berkualitas (%) | 90 | 10,448.90 | | 440.63 | 60 | 1,365.28 | | 23.44 | 0.00% | 1.72% | 0 | 464.07 | 0.00% | 4.44% | PTSP Naker | |
| B.1.2 | Program Peningkatan Kesempatan Kerja (PD) | Tingkat partisipasi angkatan kerja | 75.35 | 937.30 | 72.04 | 153.28 | 72.86 | 266.33 | | 25.59 | 10% | 9.61% | 72.04 | 178.87 | 95.61% | 19.08% | PTSP Naker | |
| B.1.3 | Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan | Jumlah Perusahaan yang memiliki bipartid | 24 | 563.92 | 5 | 62.01 | 5 | 72.94 | | 17.33 | 0.00% | 23.77% | 5 | 79.34 | 20.83% | 14.07% | PTSP Naker | |
| B.2 | Urusan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak | | | 2,511.67 | | 1,093.06 | | 783.29 | | 158.70 | | 20.26% | | 1,251.77 | | 49.84% | | |
| B.2.1 | Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak (PD) | Anugerah Parahita Ekapraya (APE) | utama | 1,146.61 | 0 | 0.00 | Pratama | 325.82 | | 23.13 | 7% | 7.10% | 0 | 23.13 | 0.00% | 2.02% | Dinsos PMD | |
| B.2.2 | Program Peningkatan peran Serta dan kesetaraan Gender dalam pembangunan (PD) | Indek Pemberdayaan Gender (IDG) | 65.65 | 458.56 | 65.61 | 0.00 | 65.62 | 457.47 | 0 | 135.57 | 0.00% | 29.63% | 65.61 | 135.57 | 99.94% | 29.56% | Dinsos PM dan Kecamatan | |
| | | | | 163.45 | | 29.57 | 0.00 | 0.00 | | 0.00% | | 29.57 | | 18.09% | | Kec. Barangin | | |
| | | | | 31.83 | | 29.24 | 0.00 | 0.00 | | 0.00% | | 29.24 | | 91.86% | | Silungkang | | |



| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output) | Target Capaian Kinerja Program RPJMD Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2019) | | Target Kinerja RKPD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (Tahun 2020) | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD Yang Dievaluasi (s/d TW I Tahun 2020) | | Tingkat Capaian Kinerja RKPD Pada TW I Tahun 2020 | | Realisasi Kinerja RKPD s/d TW I Tahun 2020 | | Tingkat Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun 2020 | | OPD Penanggung Jawab | Ket | | | | | | | | |
|------------|--|---|---|-----------------|--|---------------|---|---------------|--|-------------|---|--------------|--|---------------|--|-------------------|----------------------|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | K | Rp. (Juta) | K | Rp. (Juta) | K | Rp. (Juta) | K | Rp. (Juta) | K | Rp. (Juta) | K | Rp. (Juta) | K | Rp. (Juta) | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 = 7/6 x 100 % | | 9 = 5 + 7 | | 10 = 9/4 x 100 % | | 11 | 12 | | | | | | | | |
| B.2.3 | Program Peningkatan Perlindungan dan Kualitas Hidup Perempuan | Persentase terhadap kasus perempuan yang tertangani | 100 | 481.87 | 100 | 801.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.00% | 100 | 801.57 | 100.00 % | 166.35 % | Dinsos PM | | | | | | | | | |
| B.2.4 | Program Peningkatan Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Anak | Tingkat capaian kata layak anak | nindya | 424.63 | nindya | 232.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.00% | 0 | 232.69 | 0.00% | 54.80% | Dinsos PM | | | | | | | | | |
| B.3 | Urusan Pangan | | | 2,700.33 | | 310.65 | | 353.74 | | 5.30 | | 1.50% | | 315.95 | | 11.70% | | | | | | | | | | |
| B.3.1 | Program Peningkatan Ketahanan Pangan (PD) | Tingkat Keamanan Produk Pangan Segar dan Produk pangan olahan yang terdeteksi dari cemaran mikroba, bahan kimia/bebahaya dan residu pestisida (%) | 97.5 | 2,700.33 | 95.5 | 310.65 | 96 | 353.74 | 0 | 5.30 | 0.00% | 1.50% | 95.5 | 315.95 | 97.95% | 11.70% | DKP3 | | | | | | | | | |
| | | tingkat keamanan bahan pangan dari cemaran pestisida, mikroba dan bahan kimia (%) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Konsumsi Bahan pangan pokok perkapita per tahun (Kg) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B.4 | Urusan Pertanahan | | | 4,183.22 | | 191.10 | | 665.04 | | 0.90 | | 0.14% | | 192.00 | | 4.59% | | | | | | | | | | |
| B.4.1 | Program Penataan Penguasaan Pemilikan Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah | Persentase tanah budidaya yang memiliki aspek Hukum (%) | 10 | 1,805.45 | 2 | 190.40 | 2 | 508.46 | 0 | 0% | 0.00% | 2 | 190.40 | 20.00% | 10.55% | Dinas Pertakim LH | | | | | | | | | | |
| B.4.2 | Program Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan | Persentase Kasus Pertanahan yang terfasilitasi (%) | 80 | 1,209.62 | 80 | 0 | 80 | 36.53 | 0.18 | 0% | 0.49% | 80 | 0.18 | 100.00 % | 0.01% | Dinas Pertakim LH | | | | | | | | | | |
| B.4.3 | Program Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan | Persentase Pelayanan Informasi Pertanahan yang | 80 | 1,168.15 | 80 | 0.70 | 80 | 120.06 | 0.72 | 0.00% | 0.60% | 80 | 1.42 | 100.00 % | 0.12% | Dinas Pertakim LH | | | | | | | | | | |



| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output) | Target Capaian Kinerja Program RPJMD Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2019) | | Target Kinerja RKPD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (Tahun 2020) | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD Yang Dievaluasi (s/d TW I Tahun 2020) | | Tingkat Capaian Kinerja RKPD Pada TW I Tahun 2020 | | Realisasi Kinerja RKPD s/d TW I Tahun 2020 | | Tingkat Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun 2020 | | OPD Penanggung Jawab | Ket | |
|------------|--|--|---|------------------|--|-----------------|---|-----------------|--|--------------|---|--------------|--|-----------------|--|--------------|----------------------|-------------------|--|
| | | | K | Rp. (Juta) | K | Rp. (Juta) | K | Rp. (Juta) | K | Rp. (Juta) | K | Rp. (Juta) | K | Rp. (Juta) | K | Rp. (Juta) | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 = 7/6 x 100 % | | 9 = 5 + 7 | | 10 = 9/4 x 100 % | | 11 | 12 | |
| | | dilakukan (%) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B.5 | Urusan Lingkungan Hidup | | | 18,845.89 | | 1,622.63 | | 1,975.03 | | 38.10 | | 1.93% | | 1,660.73 | | 8.81% | | | |
| B.5.1 | Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam (PD) | Persentase Wilayah yang dilaksanakan konservasi SDA (%) | 45 | 1,690.77 | 35 | 0.00 | 37 | 0.00 | 0 | 0% | 0.00% | 35 | 0.00 | 77.78% | 0.00% | | Dinas Pertakim LH | | |
| B.5.2 | Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan (PD) | Persentase sampah tertangani dengan timbulan sampah (%) | 72 | 9,414.92 | 80 | 1,031.66 | 75 | 1,388.36 | 0 | 0.00% | 0.00% | 80 | 1,031.66 | 111.11 % | 10.96% | | Dinas Pertakim LH | | |
| | | Persentase Sampah berkurang dengan timbulan sampah (%) | 27 | | 20 | | 22 | | | | | 0% | | 20 | | | 74.07% | Dinas Pertakim LH | |
| B.5.3 | Program Pengendalian, pencemaran dan perusakan lingkungan hidup. (PD) | Persentase Ketaatan Pengelolaan dan Pemantauan lingkungan | 90 | 3,729.49 | 72 | 312.41 | 75 | 290.47 | 28.998 | 0.00% | 9.98% | 72 | 341.40 | 80.00% | 9.15% | | Dinas Pertakim LH | | |
| B.5.4 | Program Peningkatan kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup | persentase masyarakat yang mendapat akses informasi tentang lingkungan hidup | 65 | 1,634.80 | 60 | 0.00 | 62 | 296.21 | 9.11 | 3% | 3.07% | 60 | 9.11 | 92.31% | 0.56% | | Dinas Pertakim LH | | |
| B.5.5 | Program Peningkatan pengendalian polusi | Indeks Kualitas Air | 56.55 | 391.36 | 56.25 | 0 | 56.4 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 56.25 | 0.00 | 99.47% | 0.00% | | Dinas Pertakim LH | | |
| | | Indeks Kualitas Udara | 84.56 | | 84.56 | | 84.56 | | 0.00% | | | 84.56 | | 100.00 % | | | | | |
| | | Indeks Kualitas Tutupan Lahan | 37.20 | | 36.85 | | 36.95 | | 0% | | | 36.85 | | 99.06% | | | Dinas Pertakim LH | | |
| B.5.6 | Perbaikan Kapasitas SDM dan Kelembagaan Pengelolaan SDA | Persentase masyarakat yang peduli terhadap lingkungan | 35 | 1,984.55 | 28 | 278.56 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 28 | 278.56 | 80.00% | 14.04% | | Dinas Pertakim LH | |
| B.6 | Urusan Administrasi Kependudukan Dan Catatan Sipil | | | 1,469.91 | | 976.02 | | 837.46 | | 8.43 | | 1.01% | | 984.45 | | 66.97% | | | |



| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output) | Target Capaian Kinerja Program RPJMD Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (2019) | | Target Kinerja RKPd Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (Tahun 2020) | | Realisasi Capaian Kinerja RKPd Yang Dievaluasi (s/d TW I Tahun 2020) | | Tingkat Capaian Kinerja RKPd Pada TW I Tahun 2020 | | Realisasi Kinerja RKPd s/d TW I Tahun 2020 | | Tingkat Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun 2020 | | OPD Penanggung Jawab | Ket | | | | | | | |
|------------|---|---|---|-----------------|--|-----------------|---|-----------------|--|--------------|---|--------------|--|-----------------|--|---------------|----------------------|----------|---------------|----------|------------|--|--|--|--|
| | | | K | Rp. (Juta) | K | Rp. (Juta) | K | Rp. (Juta) | K | Rp. (Juta) | K | Rp. (Juta) | K | Rp. (Juta) | K | Rp. (Juta) | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 = 7/6 x 100 % | | 9 = 5 + 7 | | 10 = 9/4 x 100 % | | 11 | 12 | | | | | | | |
| B.6.1 | Program Penataan Administrasi Kependudukan (PD) | Persentase Penduduk yang Memiliki Dokumen Kependudukan (%) | 100 | 1,032.72 | 99 | 874.02 | 100 | 777.46 | 8.43 | 0.00% | 1.08% | 99 | 882.45 | 99.00% | 85.45% | Disdukcapil | | | | | | | | | |
| | | Persentase Penduduk yang Memiliki Dokumen Pencatatan Sipil (%) | 100 | | 100 | | 97.5 | | | | | 100 | | 100.00 % | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B.6.2 | Program Penguatan Kelembagaan | Dokumen SOP yang sesuai standar dan sertifikat ISO 9001-2015 | 1 | 185.26 | 0 | 0.49 | 1 | 60 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0.49 | 0.00% | 0.26% | Disdukcapil | | | | | | | | |
| B.6.3 | Program Pelayanan Pencatatan Sipil | Persentase kepemilikan akte kelahiran 0-18 dan penerbitan akte kematian (%) | | 251.93 | 96 | 101.51 | | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 96 | 101.51 | #DIV/0! | 40.29% | Disdukcapil | | | | | | | | |
| B.7 | Urusan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa | | | 10757.79 | | 2,753.45 | | 1,084.59 | | 47.88 | | 4.41% | | 2,801.33 | | 26.04% | | | | | | | | | |
| B.7.1 | Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Desa/Kel | Presentase Lembaga Kemasyarakatan yang aktif (%) | 823.23 | 100% | 85% | 157.64 | 87% | 70.94 | 3% | 3.56% | 0.881 | 3.06% | 159.81 | 19.41% | 88.10% | Dinsos PMD | | | | | | | | | |
| | | | 2,254.66 | | 822.1 | 16.00 | | 5.99 | | | | 37.42% | | 828.09 | | | | 36.73% | Kec. Barangin | | | | | | |
| | | | 86.89 | | 579.98 | 16.00 | | 7.06 | | | | 44.13% | | 587.04 | | | | 675.61 % | | L. Segar | | | | | |
| | | | 64.43 | | 0.00 | 16.14 | | 5.99 | | | | 37.09% | | 5.99 | | | | 9.29% | | | Silungkang | | | | |
| | | | 66.34 | | 0.00 | 16.00 | | 5.97 | | | | 37.31% | | 5.97 | | | | 9.00% | | Talawi | | | | | |
| B.7.2 | Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa/Kel | Presentase masyarakat yang terlibat berpartisipasi aktif dalam membangun desa/kel (%) | 100% | 3,668.43 | 90% | 652.25 | 87% | 147.16 | 0% | 2.42 | 2% | 1.64% | 0.9 | 654.67 | 90.00% | 17.85% | Dinsos PMD | | | | | | | | |



| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output) | Target Capaian Kinerja Program RPJMD Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2019) | | Target Kinerja RKPD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (Tahun 2020) | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD Yang Dievaluasi (s/d TW I Tahun 2020) | | Tingkat Capaian Kinerja RKPD Pada TW I Tahun 2020 | | Realisasi Kinerja RKPD s/d TW I Tahun 2020 | | Tingkat Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun 2020 | | OPD Penanggung Jawab | Ket |
|------------|--|---|---|-----------------|--|-----------------|---|-----------------|--|--------------|---|--------------|--|-----------------|--|---------------|----------------------------|-----|
| | | | K | Rp. (Juta) | K | Rp. (Juta) | K | Rp. (Juta) | K | Rp. (Juta) | K | Rp. (Juta) | K | Rp. (Juta) | K | Rp. (Juta) | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 = 7/6 x 100 % | | 9 = 5 + 7 | | 10 = 9/4 x 100 % | | 11 | 12 |
| B.7.3 | Program Peningkatan Peran Perempuan di Desa/ Kel | Presentase PKK yang aktif (%) | 100% | 1,414.96 | 100% | 31.43 | 100% | 655.01 | 3% | 13.93 | 3.00% | 2.13% | 103% | 45.37 | 103.00 % | 3.21% | Dinsos PMD dan Kecamatan | |
| | | | | 145.43 | | 14.69 | | 40.00 | | 3.60 | | 8.99% | | 18.29 | | 12.57% | L. Segar | |
| | | | | 121.28 | | 0.00 | | 32.00 | | 0 | | 0.00% | | 0.00 | | 0.00% | Silungkang | |
| B.7.4 | Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan | Presentase Lembaga Ekonomi Desa yang aktif (%) | 100% | 25.56 | 85% | 0.00 | 90% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.00% | 0.85 | 0.00 | 85.00% | 0.00% | Dinsos PMD | |
| B.7.5 | program peningkatan kapasitas pemerintahan terdepan | indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan pemerintahan terdepan (%) | 95% | 847.97 | | 495.36 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.00% | 0.00% | 0 | 495.36 | 0.00% | 58.42% | Dinsos PMD | |
| B.7.6 | program peningkatan SDM Aparatur terdepan | indeks kepuasan layanan (%) | 80% | 33,522.00 | 80% | 0.00 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.00% | 0.8 | 0.00 | 100.00 % | 0.00% | Dinsos PMD | |
| B.7.7 | Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa | Presentase aparatur desa yang meningkat kapasitas nya (%) | 100% | 2,572.15 | 0% | 0.00 | 92% | 75.34 | 27% | 0.76 | 29.35% | 1.00% | 0.27 | 0.76 | 27.00% | 0.03% | Dinsos PMD | |
| B.7.8 | program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial | persentase lembaga kesejahteraan sosial yang aktif | 100% | 899.00 | 0% | 0.00 | 0% | 0.00 | 0% | 0.00 | 0% | 0.00% | 0 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | Dinsos PMD | |
| B.7.9 | program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial | persentase penyandang masalah sosial yang direhabilitasi | 28 | 171.27 | 25 | 0.00 | 0% | 0.00 | 0% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 25 | 0.00 | 89.29% | 0.00% | Dinsos PMD | |
| B.8 | Urusan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana | | | 7,116.75 | | 1,381.62 | | 1,487.86 | | 17.14 | | 1.15% | | 1,398.76 | | 19.65% | | |
| B.8.1 | Program peningkatan pengetahuan remaja tentang kesehatan reproduksi remaja | Jumlah Kelompok Kegiatan bina keluarga Aktif | 30.4 | 267.10 | 30.4 | 145.31 | 30.4 | 56.66 | | 17.14 | 0.00% | 30.25% | 30.4 | 162.45 | 100.00 % | 60.82% | Dinas Kesehatan dan Dalduk | |
| B.8.2 | Program kesehatan reproduksi remaja | Persentase perempuan yang melahirkan berusia 15-19 tahun | 28.15 | 540.33 | 0 | 0.00 | 29.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% | 0.00% | 0 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | Dinas Kesehatan dan Dalduk | |



| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output) | Target Capaian Kinerja Program RPJMD Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2019) | | Target Kinerja RKPD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (Tahun 2020) | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD Yang Dievaluasi (s/d TW I Tahun 2020) | | Tingkat Capaian Kinerja RKPD Pada TW I Tahun 2020 | | Realisasi Kinerja RKPD s/d TW I Tahun 2020 | | Tingkat Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun 2020 | | OPD Penanggung Jawab | Ket |
|------------|---|--|---|-----------------|--|---------------|---|-----------------|--|---------------|---|--------------|--|---------------|--|--------------|----------------------------|-----|
| | | | K | Rp. (Juta) | K | Rp. (Juta) | K | Rp. (Juta) | K | Rp. (Juta) | K | Rp. (Juta) | K | Rp. (Juta) | K | Rp. (Juta) | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 = 7/6 x 100 % | | 9 = 5 + 7 | | 10 = 9/4 x 100 % | | 11 | 12 |
| B.8.3 | Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri | Pasangan Usia Subur yang terputus/terhenti menggunakan kontrasepsi | 70 | 1,677.23 | 65 | 336.56 | 67 | 93.67 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 65 | 336.56 | 92.86% | 20.07% | Dinas Kesehatan dan Dalduk | |
| B.8.4 | Program pengembangan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak | Jumlah Kelompok Kegiatan bina keluarga Aktif | 70 | 819.98 | 64 | 86.58 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0% | 0.00% | 64 | 86.58 | 91.43% | 10.56% | Dinas Kesehatan dan Dalduk | |
| B.8.5 | Program pengembangan model operasional BKB-Posyandu-PAUD | Persentase Balita yang terpantau tumbuh kembangnya (%) | 85 | 526.54 | | 0.00 | 83 | 76.57 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | Dinas Kesehatan dan Dalduk | |
| B.8.6 | Program peningkatan pelayanan KB | Pasangan Usia Subur yang terputus/terhenti menggunakan kontrasepsi | 65 | 1,138.40 | | 813.17 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% | 0.00% | 0 | 813.17 | 0.00% | 71.43% | Dinas Kesehatan dan Dalduk | |
| B.8.7 | Program Pelayanan Kontrasepsi | Persentase Pasangan Usia Subur yang menggunakan alat kontrasepsi (%) | 69 | 2,147.17 | | 0.00 | 66 | 1,260.97 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | Dinas Kesehatan dan Dalduk | |
| B.9 | Urusan Perhubungan | | | 9,477.62 | | 576.26 | | 3,860.94 | | 105.61 | | 2.74% | | 681.87 | | 7.19% | | |
| B.9.1 | Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan | Persentase sarana dan fasilitas perhubungan yang tersedia (dokumen) | 100 | 182.69 | 0 | 0.00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | Dinas Perhubungan | |
| B.9.2 | Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ | Persentase sarana prasarana perhubungan dalam kondisi baik (%) | 90 | 639.62 | 90 | 124.62 | 80 | 275 | 0 | 0 | 0% | 0.00% | 90 | 124.62 | 100.00 % | 19.48% | Dinas Perhubungan | |
| B.9.3 | Program peningkatan dan pengamanan lalu lintas | Persentase angka kecelakaan lalu lintas per 1000 kendaraan (%) | 1 | 3,269.79 | | 73.23 | 1 | 162.54 | 0 | 2.59 | 0.00% | 1.59% | 0 | 75.82 | 0.00% | 2.32% | Dinas Perhubungan | |
| B.9.4 | Program peningkatan pelayanan angkutan | Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan | 50 | 288.57 | 30 | 31.71 | 35 | 21.65 | | 0 | 0.00% | 0.00% | 30 | 31.71 | 60.00% | 10.99% | Dinas Perhubungan | |



| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output) | Target Capaian Kinerja Program RPJMD Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (2019) | | Target Kinerja RKPd Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (Tahun 2020) | | Realisasi Capaian Kinerja RKPd Yang Dievaluasi (s/d TW I Tahun 2020) | | Tingkat Capaian Kinerja RKPd Pada TW I Tahun 2020 | | Realisasi Kinerja RKPd s/d TW I Tahun 2020 | | Tingkat Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun 2020 | | OPD Penanggung Jawab | Ket |
|-------------|---|---|---|------------------|--|-----------------|---|-----------------|--|------------|---|------------|--|------------|--|------------|--|--------|
| | | | K | Rp. (Juta) | K | Rp. (Juta) | K | Rp. (Juta) | K | Rp. (Juta) | K | Rp. (Juta) | K | Rp. (Juta) | K | Rp. (Juta) | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 = 7/6 x 100 % | | 9 = 5 + 7 | | 10 = 9/4 x 100 % | | 11 | 12 |
| | | angkutan umum (%) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Persentase tingkat pelayanan angkutan umum (%) | 30 | | 18.92 | | 30 | | | | 0% | | 18.92 | | 63.06% | | | |
| B.9.5 | Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor | Persentase kendaraan yang melakukan uji kelaikan kendaraan bermotor | 90% | 5,096.95 | 1861 kendaraan | 346.7 | 80% | 3,401.76 | 103.02 | 0.00% | 3.03% | | 449.72 | 0.00% | 8.82% | | Dinas Perhubungan | |
| B.10 | Urusan Komunikasi dan Informatika | | | 11,219.45 | | 2,466.30 | | 2,704.63 | | | 2.77% | | 2,541.12 | | 22.65% | | | |
| B.10.1 | Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa (PD) | Persentase OPD yang menggunakan Sistem informasi Pemerintahan yang berbasis TIK | 95% | 9,850.00 | 30% | 1,131.64 | 50% | 1,074.13 | 46.81 | 0.00% | 4.36% | 0.3 | 1,178.45 | 31.58% | 11.96% | | Dinas Perhubungan dan Bagian Humas dan Kominfo | |
| | | Persentase Aplikasi Layanan Publik yang terintegrasi dalam jaringan Kota | 95% | | 30% | | 60% | | | 0.00% | | | | 0.3 | | | | 31.58% |
| B.10.2 | Program Kerjasama Informasi dengan Mass Media | Jumlah media massa yang bekerjasama | 20 | 616.31 | 11 | 642.86 | 11 | 348.00 | 20.62 | 0.00% | 5.93% | 11 | 663.48 | 55.00% | 107.65 % | | Bagian Humas dan Kominfo, dan Seluruh OPD | |
| B.10.3 | Program Peningkatan Konektivitas Intra dan Antar SKPD | Persentase jaringan informasi dan komunikasi yang terkoneksi satu sama lain | 26 | 753.14 | 13 | 691.8 | 26 | 1,282.50 | 7.39 | 0.00% | 0.58% | 13 | 699.19 | 50.00% | 92.84% | | Bagian Humas dan Kominfo, dan Seluruh OPD | |
| B.11 | Urusan Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah | | | 12,060.74 | | 620.22 | | 925.26 | | | 3.71% | | 654.57 | | 5.43% | | | |



| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output) | Target Capaian Kinerja Program RPJMD Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2019) | | Target Kinerja RKPD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (Tahun 2020) | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD Yang Dievaluasi (s/d TW I Tahun 2020) | | Tingkat Capaian Kinerja RKPD Pada TW I Tahun 2020 | | Realisasi Kinerja RKPD s/d TW I Tahun 2020 | | Tingkat Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun 2020 | | OPD Penanggung Jawab | Ket |
|-------------|---|---|---|------------------|--|-----------------|---|-----------------|--|--------------|---|--------------|--|-----------------|--|------------------|----------------------|--------|
| | | | K | Rp. (Juta) | K | Rp. (Juta) | K | Rp. (Juta) | K | Rp. (Juta) | K | Rp. (Juta) | K | Rp. (Juta) | K | Rp. (Juta) | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 = 7/6 x 100 % | | 9 = 5 + 7 | | 10 = 9/4 x 100 % | | 11 | 12 |
| B.11.1 | Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi UMKM (PD) | Jumlah UMKM yang meningkat skala usahanya (unit) | 375 | 6,780.35 | 35 | 174.46 | 50 | 275.91 | 25.02 | 0.00% | 9.07% | 35 | 199.48 | 9.33% | 2.94% | Dinas Koperindag | | |
| | | Jumlah Koperasi yang meningkat skala usahanya (unit) | 45 | | 3 | | 5 | | | 3 | | 60.00% | | 6 | | | | 13.33% |
| B.11.2 | Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif usaha kecil menengah | Persentase koperasi yang melaksanakan RAT tepat waktu (%) | 80 | 2,827.91 | 91 | 364.36 | 71 | 493.60 | 2.11 | 0.00% | 0.43% | 91 | 366.47 | 113.75 % | 12.96% | Dinas Koperindag | | |
| | | Persentase UKM yang memiliki ijin Usaha (%) | 53 | | 39 | | 44 | | | 0.00% | | 39 | | 73.58% | | | | |
| B.11.3 | Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi | Persentase Koperasi sehat (%) | 85 | 2,452.48 | | 81.4 | 77 | 155.75 | 7.22 | 0.00% | 4.64% | 0 | 88.62 | 0.00% | 3.61% | Dinas Koperindag | | |
| B.12 | Usuran Penanaman Modal | | | 8,165.22 | | 495.55 | | 677.45 | | 21.91 | | 3.23% | | 517.46 | | 6.34% | | |
| B.12.1 | Program peningkatan Promosi dan kerjasama investasi (PD) | jumlah investor yang berinvestasi (Perusahaan) | 80 | 1,553.25 | | 291.24 | 12 | 205.67 | 1.448 | 0.00% | 0.70% | 0 | 292.69 | 0.00% | 18.84% | PM PTSP Naker | | |
| B.12.2 | Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi investasi (PD) | Nilai Investasi Lokal (Milyar Rupiah) | 215 | 1,120.00 | 20 | 31.78 | 20 | 137.61 | 0.2 | 0.00% | 0.15% | 20 | 31.98 | 9.30% | 2.86% | PM PTSP Naker | | |
| | | Nilai Investasi Nasional (Milyar Rupiah) | 40 | | 5 | | 5 | | | 0.00% | | 5 | | 12.50% | | PM PTSP Naker | | |
| | | Nilai Investasi Asing (Milyar Rupiah) | 5 | | 1 | | 1 | | | 0.00% | | 1 | | 20.00% | | PM PTSP Naker | | |
| B.12.3 | Program Pembinaan dan pelayanan perizinan (PD) | Jumlah Perizinan yang diterbitkan (Dokumen) | 3,109 | 2,236.86 | 1553 | 172.52 | 560 | 334.162 | 20.27 | 0.00% | 6.06% | 1,553 | 192.79 | 49.95% | 8.62% | PM PTSP Naker | | |
| | | Jumlah Non Perizinan yang diterbitkan (Dokumen) | 2,861 | 3,255.11 | 0 | | 540 | | | 0.00% | | 0 | | 0.00% | | | | |
| B.13 | Usuran Kepemudaan Dan Olahraga | | | 24,974.82 | | 1,639.36 | | 1,703.47 | | 3.28 | | 0.19% | | 1,642.64 | | 6.58% | | |



| No | Usuran/Bidang Usuran Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output) | Target Capaian Kinerja Program RPJMD Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2019) | | Target Kinerja RKPD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (Tahun 2020) | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD Yang Dievaluasi (s/d TW I Tahun 2020) | | Tingkat Capaian Kinerja RKPD Pada TW I Tahun 2020 | | Realisasi Kinerja RKPD s/d TW I Tahun 2020 | | Tingkat Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun 2020 | | OPD Penanggung Jawab | Ket |
|-------------|--|---|---|------------------|--|-----------------|---|-----------------|--|--------------|---|--------------|--|-----------------|--|--|----------------------|-----|
| | | | K | Rp. (Juta) | K | Rp. (Juta) | K | Rp. (Juta) | K | Rp. (Juta) | K | Rp. (Juta) | K | Rp. (Juta) | K | Rp. (Juta) | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 = 7/6 x 100 % | | 9 = 5 + 7 | | 10 = 9/4 x 100 % | | 11 | 12 |
| B.13.1 | Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan | Jumlah organisasi kepemudaan yang aktif (organisasi) | 19 | 8,694.02 | 220 | 582.72 | 15 | 594.25 | 0 | 0.00% | 0.00% | 220 | 582.72 | 1157.89 % | 6.70% | Dinas Pariwisata, Pemuda dan OR | | |
| B.13.2 | Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga | Jumlah organisasi olahraga yang aktif (organisasi) | 39 | 1,052.10 | 0 | 0.00 | 15 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | Dinas Pariwisata, Pemuda dan OR | | |
| B.13.3 | Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga | Jumlah atlet berprestasi (atlet) | 160 | 10,142.70 | 135 | 1,056.64 | 143 | 414.22 | 3.28 | 0.00% | 0.79% | 135 | 1,059.92 | 84.38% | 10.45% | Dinas Pariwisata, Pemuda dan OR | | |
| B.13.4 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga | jumlah sarana dan prasarana olahraga yang sesuai standar (jumlah) | 6 | 5,086.00 | 0 | 0.00 | 3 | 695 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | Dinas Pariwisata, Pemuda dan OR | | |
| B.14 | Usuran Kebudayaan | | | 36,529.69 | | 4,612.45 | | 3,037.82 | | 75.43 | | 2.48% | | 4,687.88 | | 12.83% | | |
| B.14.1 | Program Pengembangan Nilai Budaya (PD) | Persentase Kelompok Seni yang mandiri (%) | 13.3 | 3,028.09 | 8.9 | 250.28 | 13.3 | 597.42 | 19.33 | 0.00% | 3.24% | 8.9 | 269.61 | 66.92% | 8.90% | Dinas Permuseuman dan Peninggalan Bersejarah | | |
| | | Persentase Kelompok budaya yang mandiri (%) | 84 | | 56 | | 64 | | | 0.00% | | 56 | | 66.67% | | | | |
| B.14.2 | Program Pengelolaan Kekayaan Budaya (PD) | Persentase budaya benda yang lestari | 68.06 | 16,298.49 | 61.34 | 2,316.89 | 63.02 | 2,333.00 | 45.80 | 0.00% | 1.96% | 61.34 | 2,362.69 | 90.13% | 14.50% | Dinas Permuseuman dan Peninggalan Bersejarah | | |
| B.14.3 | Program Pengelolaan Keragaman Budaya (PD) | Persentase budaya tak benda yang lestari | 31.1 | 16,511.94 | 13.3 | 1,268.04 | 17.8 | 107.4 | 10.30 | 0.00% | 9.59% | 13.3 | 1,278.35 | 42.77% | 7.74% | Dinas Permuseuman dan Peninggalan Bersejarah | | |
| B.14.4 | Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya | Jumlah Kerjasama kebudayaan yang aktif | 10 | 514.90 | 10 | 777.24 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 10 | 777.24 | 100.00 % | 150.95 % | Dinas Permuseuman dan Peninggalan Bersejarah | | |
| B.15 | Usuran Statistik | | | 3,856.75 | | 386.27 | | 175.94 | | 6.85 | | 3.89% | | 393.12 | | 10.19% | | |



| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output) | Target Capaian Kinerja Program RPJMD Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RKKPD s/d Tahun Lalu (2019) | | Target Kinerja RKKPD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (Tahun 2020) | | Realisasi Capaian Kinerja RKKPD Yang Dievaluasi (s/d TW I Tahun 2020) | | Tingkat Capaian Kinerja RKKPD Pada TW I Tahun 2020 | | Realisasi Kinerja RKKPD s/d TW I Tahun 2020 | | Tingkat Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun 2020 | | OPD Penanggung Jawab | Ket | | | | | | | |
|-------------|---|--|---|------------|---|------------|--|------------|---|------------|--|------------|---|------------|--|--|----------------------|-------|-----|----------|-------------------|--|--|--|------------|
| | | | K | Rp. (Juta) | K | Rp. (Juta) | K | Rp. (Juta) | K | Rp. (Juta) | K | Rp. (Juta) | K | Rp. (Juta) | K | Rp. (Juta) | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 = 7/6 x 100 % | | 9 = 5 + 7 | | 10 = 9/4 x 100 % | | 11 | 12 | | | | | | | |
| B.15.1 | Program Pengembangan data/informasi/statistik daerah | Ketersediaan data statistik daerah dan OPD daerah (%) | 90 | 897.89 | 86 | 193.42 | 87 | 162.40 | 3.40 | 0.00% | 2.10% | 86 | 196.82 | 95.56% | 21.92% | Barenlitbang da, Bag. Perekonomian dan seluruh OPD | | | | | | | | | |
| | | Persentase Data PNS yang Diperbarui dan diverifikasi (%) | 100 | | 100 | | 100 | | | | | | | | | | | 0.00% | 100 | 100.00 % | Kesbang Pol & PBD | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Koperindag |
| B.15.2 | Program Pengembangan Data dan Informasi | Persentase Ketersediaan informasi data Profil daerah (%) | 100 | 3,210.00 | 28 | 192.85 | 28 | 13.54 | 3.45 | 0.00% | 25.46% | 28 | 196.30 | 28.00% | 6.12% | Barenlitbang da, Bag. Perekonomian dan seluruh OPD | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | L. Segar |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B.16 | Urusan Persandian | | 205.34 | | 21.42 | | 23.47 | | 0.00 | | 0.00% | | 21.42 | | 10.43% | | | | | | | | | | |
| B.16.1 | Program Penyelenggaraan Persandian dalam Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah | Terwujudnya pengamanan informasi pemda | 60 | 205.34 | 12 | 21.42 | 12 | 23.47 | 0 | 0.00% | 0.00% | 12 | 21.42 | 20.00% | 10.43% | Bagian Humas dan Kominfo | | | | | | | | | |
| B.17 | Urusan Perpustakaan | | 1,023.16 | | 1,284.33 | | 233.97 | | 69.60 | | 29.75% | | 1,353.93 | | 132.33 % | | | | | | | | | | |
| B.17.1 | Program pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan | Angka kunjungan (orang) | 135,500 | 1,023.16 | 63,000 | 1,284.33 | 65,000 | 233.97 | 69.60 | 0.00% | 29.75% | 63000 | 1,353.93 | 46.49% | 132.33 % | Dinas kearsipan dan Pustaka | | | | | | | | | |
| B.18 | Urusan Kearsipan | | 2,101.50 | | 128.07 | | 280.96 | | 4.00 | | 1.42% | 0 | 132.07 | | 6.28% | | | | | | | | | | |
| B.18.1 | Program perbaikan sistem administrasi kearsipan | Persentase OPD yang mengelola arsip secara baku (%) | 75 | 325.61 | 40 | 13.06 | 45 | 33.97 | 0 | 0.00% | 0.00% | 40 | 13.06 | 53.33% | 4.01% | Dinas kearsipan dan Pustaka | | | | | | | | | |
| B.18.2 | Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah | Jumlah arsip Statis yang terselamatkan (Lembar) | 7,000 | 977.47 | 2,500 | 46.03 | 4,000 | 144.5 | 0 | 0.00% | 0.00% | 2500 | 46.03 | 35.71% | 4.71% | Dinas kearsipan dan Pustaka | | | | | | | | | |



| No | Usuran/Bidang Usuran Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output) | Target Capaian Kinerja Program RPJMD Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (2019) | | Target Kinerja RKPd Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (Tahun 2020) | | Realisasi Capaian Kinerja RKPd Yang Dievaluasi (s/d TW I Tahun 2020) | | Tingkat Capaian Kinerja RKPd Pada TW I Tahun 2020 | | Realisasi Kinerja RKPd s/d TW I Tahun 2020 | | Tingkat Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun 2020 | | OPD Penanggung Jawab | Ket |
|------------|--|--|---|-------------------|--|------------------|---|------------------|--|---------------|---|--------------|--|------------------|--|---------------|-------------------------------------|-----|
| | | | K | Rp. (Juta) | K | Rp. (Juta) | K | Rp. (Juta) | K | Rp. (Juta) | K | Rp. (Juta) | K | Rp. (Juta) | K | Rp. (Juta) | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 = 7/6 x 100 % | | 9 = 5 + 7 | | 10 = 9/4 x 100 % | | 11 | 12 |
| B.18.3 | Program peningkatan kualitas pelayanan informasi | Persentase pengelola kearsipan dan perpustakaan yang berkompoten (%) | 75 | 498.42 | 45 | 68.98 | 50 | 85.992 | 0 | 4 | 0.00% | 4.65% | 45 | 72.98 | 60.00% | 14.64% | Dinas kearsipan dan Pustaka | |
| B.18.4 | Program pemeliharaan rutin atau berkala sarana dan prasarana kearsipan | Persentase sarana prasarana kearsipan sesuai standar (%) | 50 | 300 | 0 | 0.00 | 30 | 16.5 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | Dinas kearsipan dan Pustaka | |
| C | URUSAN PILIHAN | | | 142,746.79 | | 15,966.80 | | 19,272.98 | | 718.62 | | 3.73% | | 16,685.43 | | 11.69% | | |
| C.1 | Usuran Kelautan Dan Perikanan | | | 4,341.68 | | 126.28 | | 361.88 | | 0.00 | | 0.00% | | 126.28 | | 2.91% | | |
| C.1.1 | Program Peningkatan Produksi Perikanan (PD) | Jumlah Produksi ikan (Ton) | 869 | 3,758.62 | 216 | 0 | 216.5 | 361.88 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 216 | 0.00 | 24.86% | 0.00% | DKP3 | |
| C.1.2 | Program Pengembangan Budidaya Perikanan | Jumlah Produksi ikan (Ton) | 432.05 | 583.06 | 166 | 126.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 166 | 126.28 | 38.42% | 21.66% | DKP3 | |
| C.2 | Usuran Pariwisata | | | 49,568.80 | | 6,306.97 | | 8,544.95 | | 325.19 | | 3.81% | | 6,632.16 | | 13.38% | | |
| C.2.1 | Program Pengembangan Destinasi Pariwisata (PD) | Persentase Objek Wisata Unggulan (%) | 55.88 | 32,088.59 | 32.35 | 3,211.82 | 38.24 | 6,436.38 | | 305.24 | 0.00% | 4.74% | 32.35 | 3,517.06 | 57.89% | 10.96% | Dinas Pariwisata, Pemuda dan OR | |
| C.2.2 | Program Pengembangan Ekonomi Kreatif (PD) | Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif Profesional (%) | 20 | 1,665.21 | 15 | 170.56 | 17 | 131.88 | | 0.77 | 0.00% | 0.59% | 15 | 171.33 | 75.00% | 10.29% | Dinas Pariwisata, Pemuda dan OR | |
| C.2.3 | Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata (PD) | Jumlah Wisatawan (orang) | 1,300,000 | 12,501.66 | 379,351 | 2,060.72 | 405,817 | 1,311.44 | | 9.58 | 0.00% | 0.73% | 379351 | 2,070.30 | 29.18% | 16.56% | Dinas Pariwisata dan OR dan Setdako | |
| C.2.4 | Program Pengembangan Kemitraan Pariwisata (PD) | Persentase MoU Kemitraan Aktif (%) | 90 | 3,270.45 | 50 | 863.87 | 70 | 665.25 | | 9.6 | 0.00% | 1.44% | 50 | 873.47 | 55.56% | 26.71% | Dinas Pariwisata, Pemuda dan OR | |
| C.3 | Usuran Pertanian | | | 47,224.24 | | 6,100.66 | | 6,786.34 | | 104.05 | | 1.53% | | 6,204.71 | | 13.14% | | |
| C.3.1 | Program Peningkatan Produksi tanaman pangan (PD) | Jumlah Produksi padi (ton GKG) | 14,900 | 5,402.01 | 0.00 | 0.00 | 14,600 | 1,164.60 | | 35.81 | 0.00% | 3.07% | 0 | 35.81 | 0.00% | 0.66% | DKP3 | |



| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output) | Target Capaian Kinerja Program RPJMD Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (2019) | | Target Kinerja RKPd Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (Tahun 2020) | | Realisasi Capaian Kinerja RKPd Yang Dievaluasi (s/d TW I Tahun 2020) | | Tingkat Capaian Kinerja RKPd Pada TW I Tahun 2020 | | Realisasi Kinerja RKPd s/d TW I Tahun 2020 | | Tingkat Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun 2020 | | OPD Penanggung Jawab | Ket |
|-------|---|--|---|------------|--|------------|---|------------|--|------------|---|------------|--|------------|--|------------|----------------------|-----|
| | | | K | Rp. (Juta) | K | Rp. (Juta) | K | Rp. (Juta) | K | Rp. (Juta) | K | Rp. (Juta) | K | Rp. (Juta) | K | Rp. (Juta) | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 = 7/6 x 100 % | | 9 = 5 + 7 | | 10 = 9/4 x 100 % | | 11 | 12 |
| C.3.2 | Program Peningkatan Produksi Perkebunan (PD) | Jumlah Produksi karet (ton) | 1,270 | 4,054.15 | 0.00 | 0.00 | 1,255 | 644.46 | | 2.24 | 0.00% | 0.35% | 0 | 2.24 | 0.00% | 0.06% | DKP3 | |
| | | Jumlah Produksi kakao(ton) | 550 | | 0.00 | | 535 | | | | 0.00% | | 0 | | 0.00% | | DKP3 | |
| C.3.3 | Program Peningkatan Produksi Peternakan (PD) | Jumlah Produksi Daging Sapi (Ton) | 1,768.40 | 6,610.63 | 283 | 957.23 | 352.68 | 1,586.23 | | 0.28 | 0.00% | 0.02% | 283 | 957.51 | 16.00% | 14.48% | DKP3 | |
| | | Jumlah Produksi Telur (Ton) | 674.3 | | 97 | | 134.36 | | | | 0.00% | | 97 | | 14.39% | | DKP3 | |
| | | Jumlah Produksi Daging Ayam (Ton) | 4,493.30 | | 675 | | 897.86 | | | | 0.00% | | 675 | | 15.02% | | DKP3 | |
| C.3.4 | Program Peningkatan penerapan teknologi terhadap lahan pertanian dan perikanan (PD) | Rasio ketersediaan handtraktor terhadap lahan pertanian | 1:10 | 3,801.63 | 1 : 16 | 336.83 | 1:16 | 624.23 | 0:00 | 39.83 | 0.00% | 6.38% | 1:16 | 376.66 | 63.00% | 9.91% | DKP3 | |
| C.3.5 | Program Peningkatan Kesejahteraan Petani | Jumlah kelompok tani yang naik skor sesuai Permentan (Kelompok/Wilayah Binaan) | 5 | 2,747.33 | 5 | 155.95 | 5 | 301.40 | 0 | 5.40 | 0.00% | 1.79% | 5 | 161.35 | 100.00 % | 5.87% | DKP3 | |
| | | Jumlah Petani yang mengikuti sosialisasi magang, studi banding (Orang /tahun) | 362 | 115.18 | 0 | 0.00 | 362 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | DKP3 | |
| C.3.6 | Program Penyediaan Sarana dan Prasarana Pertanian | Prosentase penambahan sawah beririgasi (%) | 30 | 13,363.18 | 0 | 0.00 | 15 | 2,157.17 | 3 | 4.63 | 20.00% | 0.21% | 3 | 4.63 | 10.00% | 0.03% | DKP3 | |
| C.3.7 | Program Peningkatan Produksi Pertanian/ Perkebunan | Jumlah Produksi Padi (GKG) (Ton/Luas Panen) | 30,608 | 6,912.65 | 0.00 | 3,609.06 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0 | 3,609.06 | 0.00% | 52.21% | DKP3 | |
| | | Jumlah Produksi karet (ton) | 1,250 | | 1,859.00 | | 0 | | 0 | | 0.00% | | 1859 | | 148.72 % | | DKP3 | |
| | | Jumlah Produksi kakao (Ton) (ton) | 530 | | 697.00 | | 0 | | 0 | | 0.00% | | 697 | | 131.51 % | | DKP3 | |



| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output) | Target Capaian Kinerja Program RPJMD Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2019) | | Target Kinerja RKPD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (Tahun 2020) | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD Yang Dievaluasi (s/d TW I Tahun 2020) | | Tingkat Capaian Kinerja RKPD Pada TW I Tahun 2020 | | Realisasi Kinerja RKPD s/d TW I Tahun 2020 | | Tingkat Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun 2020 | | OPD Penanggung Jawab | Ket |
|------------|--|--|---|------------------|--|-----------------|---|-----------------|--|---------------|---|---------------|--|-----------------|--|---------------|----------------------|-----|
| | | | K | Rp. (Juta) | K | Rp. (Juta) | K | Rp. (Juta) | K | Rp. (Juta) | K | Rp. (Juta) | K | Rp. (Juta) | K | Rp. (Juta) | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 = 7/6 x 100 % | | 9 = 5 + 7 | | 10 = 9/4 x 100 % | | 11 | 12 |
| C.3.8 | Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/ Perkebunan Lapangan | Prosentase Penyuluh yang naik Jenjang jabatan (%) | 27.75 | 888.18 | 5.55 | 165.46 | 5.55 | 118.55 | | 3.05 | 0.00% | 2.58% | 5.55 | 168.51 | 20.00% | 18.97% | DKP3 | |
| C.3.9 | Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak | Ternak yang aman dari Penyakit PHMS dan zoonosis (%) | 94 | 2,522.04 | 90 | 876.13 | 91 | 189.71 | | 12.81 | 0.00% | 6.75% | 90 | 888.94 | 95.74% | 35.25% | DKP3 | |
| C.3.10 | Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/ Perkebunan | Dipromosikannya produk pertanian Sawahlunto ditingkat kota provinsi dan nasional (Kali/Tahun) | 5 | 130.21 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | DKP3 | |
| C.3.11 | Program Pemanfaatan Lahan Bekas Tambang | Tersedianya kawasan Agrowisata (Lokasi) | 1 | 341.83 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | DKP3 | |
| C.4 | Urusan Perdagangan | | | 22043.88 | | 2,528.77 | | 1,410.33 | | 274.45 | | 19.46% | | 2,803.22 | | 12.72% | | |
| C.4.1 | Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri (PD) | Jumlah omset di Pasar-pasar tradisional di Sawahlunto (juta) | 27,015.91 | 15,863.35 | 23,946.52 | 544.80 | 25,106.79 | 1,094.10 | | 274.15 | 0.00% | 25.06% | 23946.52 | 818.95 | 88.64% | 5.16% | Dinas Koperindag | |
| C.4.2 | Program Pembinaan Pedagang kaki Lima dan Asongan (PD) | Jumlah pedagang Kaki Lima dan Asongan yang Meningkatkan Skala Usahanya dari Mikro menjadi kecil (Pedagang) | 2,532 | 468.89 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | Dinas Koperindag | |
| C.4.3 | Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan | Jumlah pasar tradisional tertib ukur (pasar) | 3 | 5,711.64 | 1 | 1,983.97 | 2 | 316.226 | 6 | 0.3 | 300.00% | 0.09% | 7 | 1,984.27 | 233.33% | 34.74% | Dinas Koperindag | |
| C.5 | Urusan Perindustrian | | | 19,568.19 | | 904.13 | | 2,169.48 | | 14.93 | | 0.69% | | 919.05 | | 4.70% | | |



| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output) | Target Capaian Kinerja Program RPJMD Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2019) | | Target Kinerja RKPD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (Tahun 2020) | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD Yang Dievaluasi (s/d TW I Tahun 2020) | | Tingkat Capaian Kinerja RKPD Pada TW I Tahun 2020 | | Realisasi Kinerja RKPD s/d TW I Tahun 2020 | | Tingkat Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun 2020 | | OPD Penanggung Jawab | Ket |
|------------|--|--|---|-------------------|--|-------------------|---|-------------------|--|------------------|---|---------------|--|-------------------|--|------------------|---------------------------------|-----|
| | | | K | Rp. (Juta) | K | Rp. (Juta) | K | Rp. (Juta) | K | Rp. (Juta) | K | Rp. (Juta) | K | Rp. (Juta) | K | Rp. (Juta) | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 = 7/6 x 100 % | | 9 = 5 + 7 | | 10 = 9/4 x 100 % | | 11 | 12 |
| C.5.1 | Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah (PD) | Jumlah IKM yang meningkat klasifikasinya ke kecil (unit) | 1,554.00 | 14,668.23 | 56 | 836.56 | 50 | 1,624.96 | 7.575 | 0.00% | 0.47% | 56 | 844.14 | 3.60% | 5.75% | Dinas Koperindag | | |
| | | Jumlah IKM yang meningkat klasifikasinya dari kecil ke menengah (unit) | 7.00 | | 1.00 | | 0.00 | | | 1.00 | | 0.14 | | Dinas Koperindag | | | | |
| C.5.2 | Program Pengembangan Sentra-sentra Industri Potensial (PD) | Jumlah sentra industri yang berkembang dengan jumlah perajin sejenis minimal 5 Pengrajin (sentra industri) | 7 | 2,471.96 | 0 | 0.00 | 2 | 120 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | Dinas Koperindag | |
| C.5.3 | Program Penataan Struktur Industri (PD) | jumlah produk hasil industri yang berkualitas (IKM) | 48 | 85 | 38 | 67.57 | 42 | 5 | 3 | 4.99 | 7.14% | 99.70% | 41 | 72.55 | 85.42% | 85.35% | Dinas Koperindag | |
| C.5.4 | Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi | Jumlah IKM yang sudah menerapkan IPTEK (IKM) | 190 | 2,343 | 0 | 0.00 | 45 | 419.52 | | 2.37 | 0.00% | 0.56% | 0 | 2.37 | 0.00% | 0.10% | Dinas Koperindag | |
| D | URUSAN PENUNJANG | | | 473,007.92 | | 105,325.99 | | 107,636.22 | | 12,567.59 | | 11.68% | | 117,893.58 | | 24.92% | | |
| D.1 | URUSAN PERENCANAAN | | | 24,513.03 | | 1,991.46 | | 960.85 | | 52.59 | | 5.47% | | 2,044.06 | | 8.34% | | |
| D.1.1 | Program Perencanaan Pembangunan Daerah (PD) | Persentase konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD | 100 | 9,821.14 | 100 | 974.72 | 100 | 655.81 | 0.00 | 44.93 | 0.00% | 6.85% | 100 | 1,019.65 | 100.00 % | 10.38% | Barenlitbang da dan seluruh OPD | |
| | | Persentase ketersediaan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah tahunan dan lima tahunan (dokumen) | 9.14 | 2.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 2.40 | 26.26% | Dinsos | | | | | | | | |
| | | | 53.31 | 11.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 11.53 | 21.63% | Pariwisata | | | | | | | | |
| | | | 57.88 | 7.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 7.98 | 13.79% | Pertanian | | | | | | | | |
| | | | 89.35 | 14.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 14.20 | 15.89% | L. Segar | | | | | | | | |
| | | | 73.45 | 9.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 9.30 | 12.66% | Kebudayaan | | | | | | | | |
| | | | 72.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | Talawi | | | | | | | | |
| 39.82 | 3.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 3.61 | 9.06% | Koperindag | | | | | | | | | | | |



| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output) | Target Capaian Kinerja Program RPJMD Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RKKPD s/d Tahun Lalu (2019) | | Target Kinerja RKKPD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (Tahun 2020) | | Realisasi Capaian Kinerja RKKPD Yang Dievaluasi (s/d TW I Tahun 2020) | | Tingkat Capaian Kinerja RKKPD Pada TW I Tahun 2020 | | Realisasi Kinerja RKKPD s/d TW I Tahun 2020 | | Tingkat Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun 2020 | | OPD Penanggung Jawab | Ket |
|------------|---|---|---|-----------------|---|-----------------|--|-----------------|---|---------------|--|---------------|---|-----------------|--|---------------|----------------------|-----|
| | | | K | Rp. (Juta) | K | Rp. (Juta) | K | Rp. (Juta) | K | Rp. (Juta) | K | Rp. (Juta) | K | Rp. (Juta) | K | Rp. (Juta) | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 = 7/6 x 100 % | | 9 = 5 + 7 | | 10 = 9/4 x 100 % | | 11 | 12 |
| D.1.2 | Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi (PD) | Persentase konsistensi Program RPJMD bidang Ekonomi kedalam RKKPD | 100 | 2,602.99 | 100 | 201.13 | 100 | 24.17 | 0.00 | 3.01 | 0.00% | 12.44% | 100 | 204.14 | 100.00 % | 7.84% | Barenlitbang da | |
| D.1.3 | Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya (PD) | Persentase konsistensi Program RPJMD bidang Sosial Budaya kedalam RKKPD | 100 | 790.73 | 100 | 75.7 | 100 | 39.61 | 0.00 | 1.40 | 0.00% | 3.53% | 100 | 77.10 | 100.00 % | 9.75% | Barenlitbang da | |
| D.1.4 | Program Perencanaan Pembangunan Prasarana Wilayah dan SDA (PD) | Persentase konsistensi Program RPJMD bidang Fisik kedalam RKKPD | 100 | 3,000 | 100 | 9.31 | 100 | 27.17 | | 3.26 | 0.00% | 11.99% | 100 | 12.57 | 100.00 % | 0.42% | Barenlitbang da | |
| | | Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW | 100 | | 100 | | 100 | | | | | | | | | | | |
| D.1.5 | Program Perencanaan Pembangunan Bidang Litbang | Jumlah Dokumen yang disusun (Dok) | 1 | 860 | 1 | 88.81 | 1 | 198.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1 | 88.81 | 100.00 % | 10.33% | Barenlitbang da | |
| D.1.6 | Program Penelitian, Pengembangan dan Kajian Daerah | Jumlah Kegiatan yang difasilitasi (Kegiatan) | 80 | 4,675 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | Barenlitbang da | |
| D.1.7 | Program Perencanaan Pengembangan wilayah | Jumlah Dokumen Perencanaan Pengembangan Wilayah (Dok) | 23 | 2,368.08 | 3 | 592.78 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3 | 592.78 | 13.04% | 25.03% | Barenlitbang da | |
| D.2 | Urusan Keuangan | | | 9,271.74 | | 2,899.96 | | 2,356.48 | | 297.63 | | 12.63% | | 3,197.59 | | 34.49% | | |
| D.2.1 | Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan keuangan daerah (PD) | Opini BPK terhadap laporan keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) | WTP | 1,133.52 | WTP | 1,426.44 | WTP | 927.32 | | 66.93 | 0.00% | 7.22% | WTP | 1,493.37 | 100.00 % | 131.75 % | BPKAD, Setdako | |
| D.2.2 | Program Pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/kota (PD) | Penetapan APBD | Tepat Waktu | 7,407.91 | Tepat Waktu | 1,466.31 | Tepat Waktu | 1,427.70 | | 230.70 | 0.00% | 16.16% | Tepat waktu | 1,697.01 | 100.00 % | 22.91% | BPKAD, Setdako | |



| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output) | Target Capaian Kinerja Program RPJMD Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2019) | | Target Kinerja RKPD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (Tahun 2020) | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD Yang Dievaluasi (s/d TW I Tahun 2020) | | Tingkat Capaian Kinerja RKPD Pada TW I Tahun 2020 | | Realisasi Kinerja RKPD s/d TW I Tahun 2020 | | Tingkat Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun 2020 | | OPD Penanggung Jawab | Ket |
|------------|--|--|---|-------------------|--|------------------|---|------------------|--|------------------|---|---------------|--|------------------|--|-------------------|---------------------------------|-----|
| | | | K | Rp. (Juta) | K | Rp. (Juta) | K | Rp. (Juta) | K | Rp. (Juta) | K | Rp. (Juta) | K | Rp. (Juta) | K | Rp. (Juta) | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 = 7/6 x 100 % | | 9 = 5 + 7 | | 10 = 9/4 x 100 % | | 11 | 12 |
| D.2.3 | Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa | Persentase Desa dengan Pengelolaan Keuangan berpredikat baik (%) | 96 | 57.84 | 20 | 7.21 | 40 | 1.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 20 | 7.21 | 20.83% | 12.47% | BPKAD, Setdako, dan Dinsos PMDA | |
| D.2.4 | Program Pengelolaan Pajak bumi dan Bangunan | Penerimaan PBB (Rupiah Juta) | 937.39 | 269.15 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | BPKAD, Setdako | |
| D.2.5 | Program Peningkatan Pendapatan Asli Daerah | Penerimaan PAD (Rupiah Milyar) | 19.8 | 403.32 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | BPKAD, Setdako | |
| D.3 | Urusan Pengawasan | | | 18,935.20 | | 3,744.76 | | 9,789.35 | | 318.62 | | 3.25% | | 4,063.38 | | 21.46% | | |
| D.3.1 | Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH (PD) | Persentase tindak lanjut temuan | 100 | 3,000.00 | 100 | 585.62 | 100 | 797.55 | 0 | 105.94 | 0.00% | 13.28% | 100 | 691.56 | 100.00 % | 23.05% | Inspektorat dan Kecamatan | |
| | | | | 5,143.69 | | 1,193.30 | | 3,463.44 | | 55.14 | | 1.59% | | 1,248.43 | | 24.27% | Kec. Barangin | |
| | | | | 6,988.44 | | 1,719.78 | | 5,195.16 | | 142.17 | | 2.74% | | 1,861.95 | | 26.64% | L. Segar | |
| D.3.2 | Program Peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan (PD) | Nilai APIP | level 4 | 3,000.00 | Level 3 | 210.77 | Level 3 | 333.20 | 0 | 15.38 | 0.00% | 4.61% | Level 3 | 226.15 | 50.00% | 7.54% | Inspektorat | |
| D.3.3 | Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan sistem dan prosedur pengawasan | Nilai SAKIP | BB | 803.07 | B | 35.3 | B | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | B | 35.30 | 50.00% | 4.40% | Inspektorat | | |
| | | Nilai Evaluasi SAKIP OPD yang minimal B (OPD) | 21 | | 12 | | 16 | | | 0 | | 0.00% | | 12 | | | 57.14% | |
| D.4 | Urusan Sekretariat Dewan | | | 50,584.98 | | 11,543.31 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00% | | 11,543.31 | | 22.82% | | |
| D.4.1 | Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah (PD) | persentase jumlah perda yang ditetapkan tepat waktu | 87 | 50,584.98 | 75 | 11,543.31 | 80 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 75 | 11,543.31 | 86.21% | 22.82% | Sekretariat Dewan | | |
| D.5 | Urusan Sekretariat Daerah | | | 369,702.97 | | 85,146.49 | | 94,529.54 | | 11,898.75 | | 12.59% | | 97,045.24 | | 26.25% | | |



| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output) | Target Capaian Kinerja Program RPJMD Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2019) | | Target Kinerja RKPD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (Tahun 2020) | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD Yang Dievaluasi (s/d TW I Tahun 2020) | | Tingkat Capaian Kinerja RKPD Pada TW I Tahun 2020 | | Realisasi Kinerja RKPD s/d TW I Tahun 2020 | | Tingkat Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun 2020 | | OPD Penanggung Jawab | Ket | |
|-----------|--|--|---|------------|--|------------|---|------------|--|------------|---|------------|--|------------|--|------------|----------------------|------------------------------------|--|
| | | | K | Rp. (Juta) | K | Rp. (Juta) | K | Rp. (Juta) | K | Rp. (Juta) | K | Rp. (Juta) | K | Rp. (Juta) | K | Rp. (Juta) | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 = 7/6 x 100 % | | 9 = 5 + 7 | | 10 = 9/4 x 100 % | | 11 | 12 | |
| D.5.1 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Tersedianya sarana pelayanan administrasi perkantoran | 60 | 13,957.76 | 12 | 25,334.48 | 12 | 30,282.23 | 3 | 4,477.26 | 25.00% | 15 | 14.79% | 25.00% | 29,811.74 | 25.00% | 213.59 % | Sekretariat Daerah dan seluruh OPD | |
| | | | | 22,160.68 | | 7,093.35 | | 8,959.91 | | 1,217.27 | | | 13.59% | | 8,310.62 | | 37.50% | Dinas Pendidikan | |
| | | | | 17,244.00 | | 707.1 | | 2,056.65 | | 271.97 | | | 13.22% | | 979.07 | | 5.68% | RSUD | |
| | | | | 3,612.51 | | 1,108.46 | | 1,577.70 | | 209.60 | | | 13.29% | | 1,318.06 | | 36.49% | Dinsos | |
| | | | | 7,622.10 | | 1,428.95 | | 2,055.63 | | 248.71 | | | 12.10% | | 1,677.66 | | 22.01% | Pariwisata | |
| | | | | 9,035.77 | | 1,417.07 | | 2,323.28 | | 278.32 | | | 11.98% | | 1,695.39 | | 18.76% | Pertanian | |
| | | | | 1,609.23 | | 614.87 | | 770.36 | | 169.34 | | | 21.98% | | 784.21 | | 48.73% | Capil | |
| | | | | 17,207.23 | | 4,592.07 | | 1,382.51 | | 711.67 | | | 51.48% | | 5,303.74 | | 30.82% | Dinas Pertakim LH | |
| | | | | 7,238.10 | | 1,352.33 | | 1,324.16 | | 217.80 | | | 16.45% | | 1,570.13 | | 21.69% | Kesbangpol & PBD | |
| | | | | 14,889.32 | | 2,470.42 | | 2,803.12 | | 461.51 | | | 16.46% | | 2,931.93 | | 19.69% | Satpol PP | |
| | | | | 2,880.13 | | 494.46 | | 555.30 | | 90.95 | | | 16.38% | | 585.41 | | 20.33% | Kec. Barangin | |
| | | | | 2,415.50 | | 329.66 | | 417.27 | | 60.44 | | | 14.48% | | 390.10 | | 16.15% | L. Segar | |
| | | | | 2,412.40 | | 412.36 | | 426.41 | | 65.06 | | | 15.26% | | 477.42 | | 19.79% | Silungkang | |
| | | | | 2,432.24 | | 452.02 | | 488.71 | | 72.31 | | | 14.80% | | 524.33 | | 21.56% | Talawi | |
| 14,197.78 | 1,744.04 | 2,208.50 | 289.38 | 13.10% | 2,033.42 | 14.32% | Koperindag | | | | | | | | | | | | |
| 8,487.31 | 1,389.78 | 2,190.16 | 269.59 | 12.31% | 1,659.37 | 19.55% | Kebudayaan | | | | | | | | | | | | |
| 8,520.80 | 1,557.46 | 1,989.55 | 285.01 | 14.33% | 1,842.47 | 21.62% | BPKAD | | | | | | | | | | | | |
| D.5.2 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | 60 | 15,169.00 | 12 | 8,645.08 | 12 | 9,509.57 | 3 | 1,093.16 | 25.00% | 15 | 11.50% | 25.00% | 9,738.24 | 25.00% | 64.20% | Sekretariat Daerah dan seluruh OPD | |
| | | | | 3,996.00 | | 0.00 | | 175.50 | | 59.40 | | | 33.85% | | 59.40 | | 1.49% | RSUD | |
| | | | | 2,435.91 | | 204.42 | | 139.65 | | 26.40 | | | 18.90% | | 230.82 | | 9.48% | Dinsos | |
| | | | | 1,100.50 | | 169.39 | | 115.63 | | 14.36 | | | 12.42% | | 183.75 | | 16.70% | Pariwisata | |
| | | | | 5,062.10 | | 458.02 | | 240.32 | | 41.71 | | | 17.36% | | 499.73 | | 9.87% | Pertanian | |
| 2,587.47 | 147.89 | 246.77 | 11.17 | 4.53% | 159.06 | 6.15% | Capil | | | | | | | | | | | | |



| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output) | Target Capaian Kinerja Program RPJMD Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (2019) | | Target Kinerja RKPd Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (Tahun 2020) | | Realisasi Capaian Kinerja RKPd Yang Dievaluasi (s/d TW I Tahun 2020) | | Tingkat Capaian Kinerja RKPd Pada TW I Tahun 2020 | | Realisasi Kinerja RKPd s/d TW I Tahun 2020 | | Tingkat Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun 2020 | | OPD Penanggung Jawab | Ket |
|-------|---|--|---|------------|--|------------|---|------------|--|------------|---|------------|--|------------|--|------------|------------------------------------|-----|
| | | | K | Rp. (Juta) | K | Rp. (Juta) | K | Rp. (Juta) | K | Rp. (Juta) | K | Rp. (Juta) | K | Rp. (Juta) | K | Rp. (Juta) | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 = 7/6 x 100 % | | 9 = 5 + 7 | | 10 = 9/4 x 100 % | | 11 | 12 |
| | | | | 3,742.30 | | 734.37 | | 850.10 | | 160.69 | | 18.90% | | 895.06 | | 23.92% | Dinas Pertakim LH | |
| | | | | 4,361.40 | | 1,223.24 | | 796.22 | | 24.99 | | 3.14% | | 1,248.23 | | 28.62% | Dinas Pendidikan | |
| | | | | 1,613.93 | | 337.07 | | 259.72 | | 90.39 | | 34.80% | | 427.46 | | 26.49% | Kesbangpol & PBD | |
| | | | | 4,337.82 | | 796.7 | | 631.76 | | 65.58 | | 10.38% | | 862.28 | | 19.88% | Satpol PP | |
| | | | | 821.83 | | 139.52 | | 155.18 | | 7.14 | | 4.60% | | 146.66 | | 17.85% | Kec. Barangin | |
| | | | | 790.52 | | 89.35 | | 7.00 | | 0.00 | | 0.00% | | 89.35 | | 11.30% | L. Segar | |
| | | | | 619.86 | | 62.92 | | 36.67 | | 6.85 | | 18.67% | | 69.77 | | 11.26% | Silungkang | |
| | | | | 559.42 | | 52.51 | | 44.19 | | 8.43 | | 19.07% | | 60.94 | | 10.89% | Talawi | |
| | | | | 3,146.77 | | 231.37 | | 121.04 | | 32.61 | | 26.95% | | 263.98 | | 8.39% | Kebudayaan | |
| | | | | 7,120.24 | | 477.19 | | 648.89 | | 185.01 | | 28.51% | | 662.20 | | 9.30% | BPKAD | |
| | | | | 2,824.75 | | 142.87 | | 317.77 | | 144.62 | | 45.51% | | 287.49 | | 10.18% | Koperindag | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| D.5.3 | Program Peningkatan kapasitas sumber Daya Manusia Aparatur (PD) | Persentase Aparatur yang meningkat SDM nya | 44 | 25,504.66 | 30 | 3,271.32 | 34 | 3,165.07 | | 167.54 | 0.00% | 5.29% | 30 | 3,438.86 | 68.18% | 13.48% | Sekretariat Daerah dan seluruh OPD | |
| | | | | 3,260.00 | | | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00% | | 0.00 | | 0.00% | RSUD | |
| | | | | 302.59 | | 28.67 | | 0 | | 0 | | 0.00% | | 28.67 | | 9.47% | Dinsos | |
| | | | | 576.84 | | 86.85 | | 85.50 | | 0 | | 0.00% | | 86.85 | | 15.06% | Pariwisata | |
| | | | | 721.80 | | 123.51 | | 100 | | 0 | | 0.00% | | 123.51 | | 17.11% | Pertanian | |
| | | | | 2247.43 | | 21.12 | | 50 | | 0 | | 0.00% | | 21.12 | | 0.94% | Capil | |
| | | | | 1263.32 | | 319.96 | | 229.37 | | 0 | | 0.00% | | 319.96 | | 25.33% | Dinas Pendidikan | |
| | | | | 300.00 | | 61.65 | | 67.14 | | 12.17 | | 18.13% | | 73.82 | | 24.61% | Dinas Pertakim LH | |
| | | | | 441.63 | | 119.54 | | 60 | | 20.87 | | 34.79% | | 140.41 | | 31.79% | Kesbangpol & PBD | |
| | | | | 1,115.91 | | 90.74 | | 155.72 | | 0 | | 0.00% | | 90.74 | | 8.13% | Satpol PP | |



| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output) | Target Capaian Kinerja Program RPJMD Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (2019) | | Target Kinerja RKPd Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (Tahun 2020) | | Realisasi Capaian Kinerja RKPd Yang Dievaluasi (s/d TW I Tahun 2020) | | Tingkat Capaian Kinerja RKPd Pada TW I Tahun 2020 | | Realisasi Kinerja RKPd s/d TW I Tahun 2020 | | Tingkat Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun 2020 | | OPD Penanggung Jawab | Ket |
|-------|--|---|---|------------|--|------------|---|------------|--|------------|---|------------|--|------------|--|------------|------------------------------------|-----|
| | | | K | Rp. (Juta) | K | Rp. (Juta) | K | Rp. (Juta) | K | Rp. (Juta) | K | Rp. (Juta) | K | Rp. (Juta) | K | Rp. (Juta) | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 = 7/6 x 100 % | | 9 = 5 + 7 | | 10 = 9/4 x 100 % | | 11 | 12 |
| | | | | | | 53.96 | | 36 | | 0 | | 0.00% | | 53.96 | | #DIV/0! | Kec Barangin | |
| | | | | 268.58 | | 44.01 | | 36 | | 0 | | 0.00% | | 44.01 | | 16.39% | L. Segar | |
| | | | | 206.43 | | 33.28 | | 30 | | 0 | | 0.00% | | 33.28 | | 16.12% | Silungkang | |
| | | | | 200.57 | | 7.5 | | 30 | | 0 | | 0.00% | | 7.50 | | 3.74% | Talawi | |
| | | | | 662.90 | | 138.36 | | 62.50 | | 20.64 | | 33.02% | | 159.00 | | 23.99% | Kebudayaan | |
| | | | | 1,910.97 | | 167.15 | | 150.00 | | 27.00 | | 18.00% | | 194.15 | | 10.16% | BPKAD | |
| | | | | 1,405.00 | | 198.65 | | 100.00 | | 56.56 | | 56.56% | | 255.21 | | 18.16% | Koperindag | |
| D.5.4 | Program Peningkatan Disiplin Aparatur | Persentase ASN berpakaian dinas dengan atribut lengkap | 100 | 2,212.71 | 100 | 767.37 | 100 | 422.50 | 0 | 4.22 | 0.00% | 1.00% | 100 | 771.59 | 100.00 % | 34.87% | Sekretariat Daerah dan seluruh OPD | |
| | | | | 403.72 | | 0.00 | | 0 | | 0 | | 0.00% | | 0.00 | | 0.00% | Dinas Pendidikan | |
| | | | | 704.00 | | 0.00 | | 0 | | 0 | | 0.00% | | 0.00 | | 0.00% | RSUD | |
| | | | | 32.93 | | 9.9 | | 10 | | 0 | | 0.00% | | 9.90 | | 30.06% | Dinsos | |
| | | | | 146.83 | | 0.00 | | 5 | | 0 | | 0.00% | | 0.00 | | 0.00% | Capil | |
| | | | | 396.38 | | 120.46 | | 120.76 | | 0 | | 0.00% | | 120.46 | | 30.39% | Dinas Pertakim LH | |
| | | | | 48.80 | | 9.84 | | 10 | | 0 | | 0.00% | | 9.84 | | 20.16% | Kesbangpol & PBD | |
| | | | | 1,125.64 | | 185.56 | | 10 | | 0 | | 0.00% | | 185.56 | | 16.48% | Satpol PP | |
| | | | | 16.83 | | 0.00 | | 3.5 | | 0 | | 0.00% | | 0.00 | | 0.00% | Kec. Barangin | |
| | | | | 15.83 | | 2.46 | | 3.5 | | 0 | | 0.00% | | 2.46 | | 15.51% | L. Segar | |
| | | | | 13.33 | | 0.00 | | 0 | | 0 | | 0.00% | | 0.00 | | 0.00% | Silungkang | |
| | | | | 15.73 | | 2.39 | | 3.5 | | 0 | | 0.00% | | 2.39 | | 15.19% | Talawi | |
| D.5.5 | Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur | Terwujudnya pembinaan dan pengembangan aparatur | 2,100 | | 2,000 .00 | | 2020 | | 0.00% | | 2000 | 95.24% | | | | | Sekretariat Daerah dan seluruh OPD | |
| | | Persentase ASN yang difasilitasi Tugas Belajar dan Izin Belajar | 5.8 | 14,088.93 | 5.60 | 1,710.73 | 6 | 937.40 | 0 | 56.60 | 6.04% | 12.54% | 1,767.33 | 96.55% | | | BKPSDM | |



| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output) | Target Capaian Kinerja Program RPJMD Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2019) | | Target Kinerja RKPD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (Tahun 2020) | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD Yang Dievaluasi (s/d TW I Tahun 2020) | | Tingkat Capaian Kinerja RKPD Pada TW I Tahun 2020 | | Realisasi Kinerja RKPD s/d TW I Tahun 2020 | | Tingkat Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun 2020 | | OPD Penanggung Jawab | Ket |
|--------|--|---|---|------------|--|------------|---|------------|--|------------|---|------------|--|------------|--|------------|------------------------------------|-----|
| | | | K | Rp. (Juta) | K | Rp. (Juta) | K | Rp. (Juta) | K | Rp. (Juta) | K | Rp. (Juta) | K | Rp. (Juta) | K | Rp. (Juta) | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 = 7/6 x 100 % | | 9 = 5 + 7 | | 10 = 9/4 x 100 % | | 11 | 12 |
| | | Persentase ASN yang mendapatkan kenaikan pangkat | 23 | | 20.40 | | 20.7 | | 0 | | 0.00% | | 20.4 | | 88.70% | | BKPSDM | |
| D.5.6 | Program Penanganan Pengaduan Kasus ASN | Persentase Aparatur yang melakukan pelanggaran Disiplin | 0.41 | 380.15 | 0.45 | 24 | 0.44 | | 0 | | 0.00% | 0.00% | 0.45 | 24.00 | 109.76 % | 6.31% | BKPSDM | |
| D.5.7 | Program Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan | Tersedianya Laporan Kepala Daerah | 3 | 4,043.88 | 3 | 140.66 | 3 | 134.42 | 3 | 37.28 | 100.00 % | 27.73% | 3 | 177.94 | 100.00 % | 4.40% | Sekretariat Daerah dan seluruh OPD | |
| D.5.8 | Program Peningkatan Kerjasama antar Daerah | Terbinanya kerjasama antar daerah, pihak ketiga dan lembaga lainnya | 3 | 2,065.93 | 11 | 25 | 3 | 29.79 | | 25.00 | 0.00% | 83.93% | 11 | 50.00 | 366.67 % | 2.42% | Sekretariat Daerah | |
| D.5.9 | Program Peningkatan SDM Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) | Meningkatnya Pengetahuan aparat desa/kelurahan dlm mengelola pelayanan administrasi (%) | 41 | 2,765.78 | 41 | 40.74 | 41 | 39.71 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 41 | 40.74 | 100.00 % | 1.47% | Sekretariat Daerah dan Kecamatan | |
| | | | | 200.00 | | 0 | | 0 | | 0.00% | | 0.00% | | Barangin | | | | |
| | | | | 133.34 | | 0 | | 0 | | 0.00% | | 0.00% | | L. Segar | | | | |
| | | | | 144.29 | | 0 | | 0 | | 0.00% | | 0.00% | | Silungkang | | | | |
| | | | | 114.29 | | 0 | | 0 | | 0.00% | | 0.00% | | talawi | | | | |
| D.5.10 | Program Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah | Meningkatnya kualitas penyusunan dokumen SAKIP | BB | 391.93 | B | 7.01 | B | 128.33 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | B | 7.01 | 50.00% | 1.79% | Sekretariat Daerah | |
| D.5.11 | Program Pengendalian Pelaksanaan Program dan Kegiatan Pembangunan | Terwujudnya Pengendalian Kegiatan Pembangunan | 400 | 421.88 | 400 | 19.35 | 400 | 25.00 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 400 | 19.35 | 100.00 % | 4.59% | Sekretariat Daerah | |
| D.5.12 | Program Pengembangan SDM Penyelenggara Pengadaan Barang/Jasa | Meningkatnya Keahlian & Keterampilan Pelaku Pengadaan Brg/Jasa | 175 | 9.99 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | | 0.00% | 0.00% | 0 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | Sekretariat Daerah | |



| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output) | Target Capaian Kinerja Program RPJMD Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (2019) | | Target Kinerja RKPd Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (Tahun 2020) | | Realisasi Capaian Kinerja RKPd Yang Dievaluasi (s/d TW I Tahun 2020) | | Tingkat Capaian Kinerja RKPd Pada TW I Tahun 2020 | | Realisasi Kinerja RKPd s/d TW I Tahun 2020 | | Tingkat Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun 2020 | | OPD Penanggung Jawab | Ket | |
|--------|---|---|---|------------|--|------------|---|------------|--|------------|---|------------|--|------------|--|------------|-----------------------|--------------------|---|
| | | | K | Rp. (Juta) | K | Rp. (Juta) | K | Rp. (Juta) | K | Rp. (Juta) | K | Rp. (Juta) | K | Rp. (Juta) | K | Rp. (Juta) | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 = 7/6 x 100 % | | 9 = 5 + 7 | | 10 = 9/4 x 100 % | | 11 | 12 | |
| D.5.13 | Program Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa | Meningkatnya pengelolaan pemilihan penyedia barang/jasa | 250 | 380.56 | 250 | 68.62 | 250 | 39.10 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 250 | 68.62 | 100.00% | 18.03% | | Sekretariat Daerah | | |
| D.5.14 | Program Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik | Meningkatnya layanan pengadaan secara elektronik | 350 | 844.66 | 350 | 181.8 | 350 | 141.40 | 0 | 5.51 | 0.00% | 3.90% | 350 | 187.31 | 100.00% | 22.18% | | Sekretariat Daerah | |
| D.5.15 | Program Pembinaan Sumber Daya Manusia, Kelembagaan, pendampingan dan Konsultasi Pengadaan Barang/Jasa | Meningkatnya keahlian dan keterampilan pelaku pengadaan barang/jasa | 175 | 1,141.69 | 0 | 0.00 | 175 | 144.47 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | | Sekretariat Daerah | |
| D.5.16 | Program Penataan Kelembagaan dan Organisasi Daerah | Jumlah kelembagaan perangkat daerah yang tepat fungsi dan tepat ukuran | 26 | 305.18 | 5 | 6.79 | 5 | 37.63 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 5 | 6.79 | 19.23% | 2.22% | | Sekretariat Daerah | |
| D.5.17 | Program Penataan Ketatalaksanaan dan Reformasi Birokrasi Daerah | Jumlah OPD yang melaksanakan pelayanan berdasarkan SPP | 26 | 481.85 | 5 | 21.56 | 5 | 112.30 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 5 | 21.56 | 19.23% | 4.47% | | Sekretariat Daerah | |
| D.5.18 | Program Penataan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Produk hukum yang ditetapkan (Perda) | 76 | 1,292.13 | 14 | 121.25 | 15 | 115.81 | 5.91 | 0.00% | 5.10% | 14 | 127.16 | 18.42% | 9.84% | | Sekretariat Daerah | | |
| D.5.19 | Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat | Jumlah Konsultasi Jasa Hukum (Kali) | 100 | 801.58 | 20 | 89.49 | 20 | 109.83 | 11.37 | 0.00% | 10.35% | 20 | 100.86 | 20.00% | 12.58% | | Sekretariat Daerah | | |
| | | Jumlah Penanganan Perkara/Kasus (Perkara/Kasus) | 10 | | 2 | | 2 | | | | | 0.00% | | | | | | | 2 |
| D.5.20 | Program Pembinaan Keagamaan (PD) | Persentase santri Rumah/Pondok Tahfidz yang hafidz minimal 1 juz dalam se tahun | 50 | 3,970.79 | 0 | 0 | 28 | 5,963.09 | 8.08 | 0.00% | 0.14% | 0 | 8.08 | 0.00% | 0.20% | | Bagian Kesra, Setdako | | |
| | | Persentase Imam Masjid yang berkualitas | 30 | | 0 | | 10 | | | | | 0.00% | | | | | | | 0 |



| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output) | Target Capaian Kinerja Program RPJMD Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2019) | | Target Kinerja RKPD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (Tahun 2020) | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD Yang Dievaluasi (s/d TW I Tahun 2020) | | Tingkat Capaian Kinerja RKPD Pada TW I Tahun 2020 | | Realisasi Kinerja RKPD s/d TW I Tahun 2020 | | Tingkat Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun 2020 | | OPD Penanggung Jawab | Ket |
|--------|--|--|---|------------|--|------------|---|------------|--|------------|---|------------|--|------------|--|-----------------------|-----------------------|-----|
| | | | K | Rp. (Juta) | K | Rp. (Juta) | K | Rp. (Juta) | K | Rp. (Juta) | K | Rp. (Juta) | K | Rp. (Juta) | K | Rp. (Juta) | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 = 7/6 x 100 % | | 9 = 5 + 7 | | 10 = 9/4 x 100 % | | 11 | 12 |
| | | Persentase Pembinaan Agama yang terselenggara (%) | | 1,123.21 | 0 | 0 | | 237.67 | | 0 | | 0.00% | 0 | 0.00 | | 0.00% | Kec. Barangin | |
| | | | | 1,066.69 | 0 | 0 | | 245.98 | | 8.03 | | 3.26% | | 8.03 | | 0.75% | L. Segar | |
| | | | | 970.99 | 0 | 0 | | 203.65 | | 0 | | 0.00% | | 0.00 | | 0.00% | Silungkang | |
| | | | | 1,332.54 | 0 | 0 | | 650 | | 0 | | 0.00% | | 0.00 | | 0.00% | Talawi | |
| D.5.21 | Program Peningkatan Kualitas Sarana peribadatan (PD) | Persentase sarana peribadatan yang memadai | 97 | 3,055.00 | 0 | 0 | 85 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | Bagian Kesra, Setdako | |
| | | Persentase sarana Pendidikan Agama yang memadai | 40 | | 25 | | 0 | | 0.00% | | | 0 | | 0.00% | | | | |
| D.5.22 | Program Pembinaan Agama dan Adat | Jumlah masjid dan mushola yang aktif melaksanakan sholat lima waktu | 172 | 3,443.67 | 172 | 6,536.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 172 | 6,536.52 | 100.00 % | 189.81 % | Bagian Kesra, Setdako | |
| | | Persentase Pembinaan Agama yang terselenggara (%) | | 285.55 | | 234.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0 | 234.39 | 0.00% | 82.08% | Kec. Barangin | |
| | | | | 204.35 | | 180.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0 | 180.48 | 0.00% | 88.32% | L. Segar | |
| | | | | 177.50 | | 137.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0 | 137.03 | 0.00% | 77.20% | Silungkang | |
| | | | | 148.81 | | 99.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0 | 99.48 | 0.00% | 66.85% | Talawi | |
| D.5.23 | Program pembangunan infrastruktur Kelurahan | Jumlah kawasan kegiatan infrastruktur lingkungan kelurahan yang dipelihara (kawasan) | 10 | 7,450.00 | 10 | 0.00 | 10 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 10 | 0.00 | 100.00 % | 0.00% | Setdako dan Kecamatan | | |
| | | | | 7,019.94 | | 1,141.99 | | 1,464.00 | | 0 | | 0.00% | 1,141.99 | | 16.27% | Barangin | | |
| | | | | 10,383.46 | | 1,490.75 | | 2,196.00 | | 0 | | 0.00% | 1,490.75 | | 14.36% | L. Segar | | |
| D.5.24 | Program Operasional Kecamatan | Persentase Kegiatan Operasional Kecamatan yang dilaksanakan (%) | 100 | 1,183.46 | 100 | 151.43 | 100 | 129.52 | | 24.03 | | 18.55% | | 175.46 | | 14.83% | Barangin | |
| | | | | 1,232.49 | | 184.96 | | 113.45 | | 0 | | 0.00% | | 184.96 | | 15.01% | L. Segar | |
| | | | | 936.20 | | 98.92 | | 132.65 | | 17.64 | | 13.30% | | 116.56 | | 12.45% | Silungkang | |
| | | | | 1,036.59 | | 96.66 | | 95.54 | | 20.63 | | 21.59% | | 117.29 | | 11.31% | Talawi | |
| D.5.25 | Program Penyiapan potensi | Persentase pelayanan | 100 | 169.55 | 100 | 42.41 | 100 | 15.00 | 0 | 0.98 | 0.00% | 6.56% | 100 | 43.39 | 100.00 % | 25.59% | Barangin | |



| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output) | Target Capaian Kinerja Program RPJMD Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2019) | | Target Kinerja RKPD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (Tahun 2020) | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD Yang Dievaluasi (s/d TW I Tahun 2020) | | Tingkat Capaian Kinerja RKPD Pada TW I Tahun 2020 | | Realisasi Kinerja RKPD s/d TW I Tahun 2020 | | Tingkat Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun 2020 | | OPD Penanggung Jawab | Ket |
|-------------------------------|--|---|---|---------------------|--|-------------------|---|-------------------|--|------------------|---|--------------|--|-------------------|--|---------------|----------------------|-----|
| | | | K | Rp. (Juta) | K | Rp. (Juta) | K | Rp. (Juta) | K | Rp. (Juta) | K | Rp. (Juta) | K | Rp. (Juta) | K | Rp. (Juta) | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 = 7/6 x 100 % | | 9 = 5 + 7 | | 10 = 9/4 x 100 % | | 11 | 12 |
| | sumberdaya, sarana dan prasarana daerah | administrasi terpadu kecamatan yang dilaksanakan (%) | | 124.85 | | 0.00 | | 19.31 | | 0 | | 0.00% | | 0.00 | | 0.00% | L. Segar | |
| | | | | 80.00 | | 0.00 | | 15.00 | | 0 | | 0.00% | | 0.00 | | 0.00% | Silungkang | |
| | | | | 124.85 | | 0.00 | | 0 | | 0 | | 0.00% | | 0.00 | | 0.00% | Talawi | |
| D.5.26 | Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi | Persentase jaringan informasi publik di kecamatan yang dioptimalisasi (%) | 90 | 52.39 | 50 | 19.46 | 60 | 0 | 0% | 0 | 0.00% | 50 | 19.46 | 55.56% | 37.14% | Barangin | | |
| | | | | 54.00 | | 0.00 | | 0 | | 0 | 0.00% | | 0.00 | | 0.00% | L. Segar | | |
| | | | | 50.00 | | 0.00 | | 0 | | 0 | 0.00% | | 0.00 | | 0.00% | Silungkang | | |
| | | | | 50.00 | | 0.00 | | 0 | | 0 | 0.00% | | 0.00 | | 0.00% | Talawi | | |
| D.5.27 | Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan | Jumlah laporan kinerja rumah sakit yang tersedia (dokumen) | 8 | 234.00 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | RSUD | | |
| TOTAL BELANJA LANGSUNG | | | | 1,769,174.44 | | 308,872.16 | | 357,837.14 | | 25,162.13 | | 7.03% | | 334,034.29 | | 18.88% | | |

Sumber : Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2020



2.6 PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH

Didalam proses perencanaan, perumusan masalah merupakan salah satu tahapan awal yang harus dilakukan. Pemahaman akan permasalahan yang terjadi didalam proses pembangunan daerah menjadi hal yang sangatlah vital karena melalui rumusan masalah ini kita dapat mengidentifikasi isu strategis yang akan menjadi titik tolak perencanaan pembangunan.

a. Pengamalan Nilai-nilai Agama dan Adat

Kesiapan akhlak, mental dan keagamaan masyarakat perlu diberikan perhatian lebih untuk mengantisipasi dampak negatif dari teknologi informasi dan aktivitas pariwisata. Terjadinya degradasi moral ditengah masyarakat akan menjadi hambatan utama dalam membangun daerah. Kasus-kasus yang meningkat signifikan adalah penipuan, curanmor, perkosaan/ pencabulan dan anirat. Karakter dari kasus tersebut, berimplikasi langsung dengan sikap moral dan akhlak masyarakat. Untuk mengantisipasi hal tersebut, dilakukan upaya mengintegrasikan nilai-nilai agama, akhlak mulia dan adat istiadat kedalam proses pembelajaran formal dan informal, baik di rumah tangga maupun di sekolah.

Integrasi muatan pembelajaran agama dan budaya sudah sangat mendesak. Selain itu, dimintakan peran serta keluarga dan masyarakat dalam penerapan dan aplikasi nilai agama, akhlak mulia dan adat dalam kehidupan.

b. Pertumbuhan Ekonomi dan PDRB per kapita

Perekonomian Kota Sawahlunto menunjukkan pertumbuhan yang cukup positif jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi nasional pada tahun 2019 yaitu sebesar 5,02%, sedangkan pertumbuhan ekonomi Kota Sawahlunto sebesar 5,34%. Potensi pada masing-masing sektor bila dikembangkan secara optimal dan terkoordinasi jelas akan mampu mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi daerah sekaligus akan membuka lapangan kerja.

c. Tingkat Kemiskinan dan Pengangguran

Kemiskinan dan pengangguran merupakan persoalan ekonomi makro yang berpengaruh terhadap mutu manusia baik dari sisi kesehatan maupun pendidikan persoalan ini mempengaruhi kehidupan ekonomi berupa menurunnya daya beli masyarakat dan semakin sulitnya alokasi rumah tangga. Kondisi ini telah berakibat terhadap anggaran pembangunan yang tersedia agar mengarah kepada pembenahan persoalan kemiskinan dan pengangguran.

Penanggulangan kemiskinan tetap dijadikan isu strategis dalam pembangunan kota Sawahlunto. Jika dibandingkan dengan tingkat kemiskinan nasional pada kisaran 10-11%, maka tingkat kemiskinan Kota Sawahlunto sangat rendah dengan kisaran 2-3%. Pada tahun 2019 tingkat kemiskinan Kota Sawahlunto sebesar 2,17%, yang merupakan tingkat kemiskinan terendah dibandingkan dengan kab./kota lain di Sumatera Barat dan dengan tingkat kemiskinan Propinsi Sumatera Barat. Peningkatan kesejahteraan tidak hanya mengangkat perekonomian penduduk miskin juga meningkatkan pendapatan seluruh masyarakat sehingga potensi kemiskinan masa depan dapat dikurangi.

Upayanya dilakukan melalui pengutamaan penanganan penduduk miskin dalam pembangunan sosial dan ekonomi seperti penyediaan beasiswa untuk kelompok keluarga miskin, menjamin keluarga miskin tetap bersekolah dan terampil,

d. Pendidikan Karakter, Keterampilan dan Berwawasan Global

Pembangunan manusia harus seimbang antara intelektual (kognisi), keterampilan, dan karakter. Untuk menyeimbangkan pembangunan pendidikan di Kota Sawahlunto, harus diintegrasikan agama, nilai-nilai moral, akhlak mulia, budi pekerti ke dalam setiap proses pembelajaran yang mendukung. Perspektif pendidikan karakter adalah melahirkan karakter peserta didik yang berbudi pekerti, kritis dan percaya diri. Pendidikan karakter adalah upaya penyiapan kekayaan batin peserta didik yang berdimensi agama, sosial, budaya, yang mampu diwujudkan dalam bentuk budi pekerti, baik dalam perbuatan, perkataan, pikiran, sikap, perasaan, maupun



kepribadian. Pendidikan karakter yang juga melahirkan rasa bernegara yang tinggi yang digali dari budaya Alam Minangkabau dan Agama. Wawasan global menjadi tuntutan agar peserta didik memiliki percaya diri yang tinggi, dan memiliki kemampuan dan inovasi dalam kehidupan global. Dalam pendidikan berkarakter dijadikan salah satu isu strategis yang perlu diperhatikan. Dengan lahirnya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, ada pergeseran urusan pemerintahan, dimana urusan pendidikan mejadi urusan pemerintahan konkruen yaitu urusan pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Urusan Pendidikan Menengah yang selama ini menjadi kewenangan Pemerintah Kota dengan dikeluarkannya Undang-undang ini beralih menjadi kewenangan Provinsi, sehingga seluruh pembiayaan, personil dan sarana prasarana menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi, hal ni tentu akan berdampak juga terhadap pengalokasian dana pendidikan pada Pemerintah Kota Sawahlunto.

Melahirkan tenaga terampil menjadikan masa depan anak muda lebih terarah, sekaligus dapat mengurangi pengangguran. Upaya untuk membangun pusat inovasi menjadi suatu keperluan yang mendesak, selain menghasilkan tenaga terampil, namun juga menghasilkan produk-produk daerah yang berkualitas.

e. Pelayanan Kesehatan yang bermutu dan terjangkau

Dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia Kota Sawahlunto, kualitas kesehatan tidak dapat dikesampingkan. Angka harapan hidup masyarakat Kota Sawahlunto yang tertinggi di Sumatera Barat harus selalu dipertahankan dan lebih ditingkatkan. Pelayanan kesehatan akan diprioritaskan pada peningkatan kualitas pelayanan mulai dari perencanaan keluarga “pre natal care”, melahirkan dan paska melahirkan. Pelayanan kesehatan dasar memegang prinsip pelayanan kuratif, preventif dan promotif. Pelayanan rumah sakit juga menjamin kenyamanan, kecepatan, dan keramahan yang menyebabkan terasanya pelayanan kepada pasien dengan sempurna. Upaya peningkatan pelayanan ini dimulai dari penyiapan tenaga kesehatan, sarana kesehatan dan jaminan pemeliharaan kesehatan yang dapat dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat.

f. Pelestarian Seni dan Budaya Daerah

Upaya pelestarian kesenian dan budaya daerah akan mendapatkan perhatian khusus Pelestarian mulai dengan identifikasi sejarah, pengumpulan bukti-bukti, pengembangan naskah akademik, dan menjadikan semua itu berharga untuk dikembangkan ke dalam sistem kemuseuman yang paling lengkap. Karena hal ini akan berimplikasi langsung dengan pencapaian target visi kota menjadi kota wisata tambang yang berbudaya. Keberadaan budaya asli Minangkabau akan tetap dilestarikan dengan memberikan ruang khusus dalam pengembangan budaya lain. Perlombaan kuliner, pidato adat, pidato pasambahan, randai, dan paket manikah akan digiatkan untuk merangsang pelestarian adat dan budaya daerah. Selain itu, kesenian wayang golek, wayang orang, Reok dankuda Lumping juga akan diperhatikan untuk menampilkan keberagaman etnis yang hidup harmonis di Kota Sawahlunto.

g. Peran serta Pemuda dalam pembangunan

Salah satu faktor yang mempengaruhi tercapainya pembangunan yang berkelanjutan adalah kesiapan generasi muda untuk menerima tongkat estafet pembangunan. Keberadaan pemuda yang kreatif dan inovatif akan mempermudah pelaksanaan pembangunan di tingkat Desa dan Kelurahan. Pembinaan kelompok pemuda yang diarahkan menjadi lebih produktif dan proaktif dalam pembangunan. Pemerintah perlu mengarahkan semangat dan pikiran inovatif dari generasi muda dalam membangun daerahnya. Dapat berupa perintisan pusat inovasi daerah. Selain dari itu juga diupayakan meminimumkan peredaran narkoba, mengurangi efek negatif pembangunan berupa kejahatan dengan berbagai dimensi. Diharapkan, dengan adanya generasi muda yang baik, keberlanjutan pembangunan di Kota Sawahlunto tidak akan terputus antar periodenya.

**h. Penyediaan infrastruktur dasar yang bermutu dan berwawasan lingkungan**

Dalam mewujudkan visi Kota menjadi Kota Wisata pada tahun 2020, infrastruktur menjadi modal utama pencapaiannya. Infrastruktur yang berkualitas akan menjadi jaminan kenyamanan beraktivitas masyarakat utamanya pengunjung Kota Sawahlunto. Peningkatan kualitas jalan dan jembatan, drainase. Penyediaan fasilitas yang menjadikan kota Wisata Sejarah serta pendukungnya menjadi sangat berarti untuk mewujudkan visi kota, termasuk penyediaan bangunan untuk museum sejarah, pengisian dokumen sejarah, eksepsi, fasilitas parkir, toilet dan pusat perbelanjaan yang baik. Selain itu, pembukaan akses baru ke daerah tetangga juga akan dijadikan isu strategis yang perlu menjadi perhatian pemerintah daerah selain infrastruktur dasar yang merupakan kewajiban utama pemerintah daerah.

i. Kualitas Lingkungan Hidup

Peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat tidak hanya meliputi aspek pendapatan, pendidikan dan kesehatan saja, tetapi juga termasuk mempertahankan kualitas lingkungan hidup. Tanpa penjagaan kualitas lingkungan hidup yang baik, kemajuan ekonomi dan sosial menjadi kurang berartibagi kesejahteraan masyarakat. Karena peningkatan kualitas lingkungan hidup merupakan isu strategis yang juga sangat penting dalam proses pembangunan Kota Sawahlunto. Termasuk dalam pengawasan eksploitasi sumberdaya alam, pengawasan pencemaran udara, sungai dan lainnya.

j. Pembangunan Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pembangunan sumber daya manusia tidak terlepas dari isi kesetaraan gender, pembangunan perempuan dan perlindungan anak. Dalam rangka peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak masih ditemukannya kesenjangan terhadap akses, partisipasi, kontrol serta manfaat dalam bidang pembangunan. Upaya perlindungan bagi perempuan dan anak dari berbagai tindakan eksploitasi, diskriminasi dan kekerasan masih belum optimal, untuk itu penguatan kelembagaan P2TP2A sangat penting dalam rangka promotif (sosialisasi, kampanye, penyuluhan) preventif (pencegahan), kuratif (penanganan), rehabilitatif (pemulihan/pemberdayaan bagi perempuan dan anak korban kekerasan).

k. Iklim Investasi yang Kondusif

Dalam menghadapi tantangan pembangunan daerah, salah satu usaha Pemerintah Kota Sawahlunto dengan meningkatkan pengembangan dan membangun potensi ekonomi di bidang investasi atau penanaman modal yang dikelola oleh beberapa Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah menurut aspek permasalahan dan tantangan yang dihadapi. Hal ini dibutuhkan kebersamaan dari pihak swasta untuk pengembangan usaha dan perekonomian di Kota Sawahlunto, kerjasama tidak terbatas dalam skala besar akan tetapi pemberdayaan jiwa entrepreneur masyarakat untuk berusaha akan selalu diupayakan untuk mewujudkan hal ini kemudahan perizinan dan fasilitasi investor dalam berusaha akan terus diutamakan. Iklim usaha yang kondusif menjadi strategi untuk menarik perhatian investor di Kota Sawahlunto, selain mendirikan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), pemerintah juga melakukan penyertaan modal pada beberapa lembaga keuangan daerah lainnya.

l. Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan

Isu strategis lainnya yang juga menentukan keberlanjutan pembangunan di Kota Sawahlunto adalah penatalaksanaan pemerintahan yang baik. Menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah harus disikapi dengan memberikan pelayanan yang optimal, pengelolaan pemerintah yang bersih, inovatif dan profesional. Karena itu, konsep *Good Governance and Clean Government*. Penggunaan teknologi informasi dan telekomunikasi untuk mendukung administrasi pemerintahan juga harus dilaksanakan untuk memberikan pelayanan yang lebih efisien, efektif, transparan dan memuaskan kepada masyarakat. Teknologi informasi dapat dipahami



sebagai teknologi yang berhubungan dengan pengumpulan, penyimpanan, pengolahan dan penyebaran informasi. Teknologi informasi terdiri dari hardware dan software. Hardware dapat berupa komputer, laptop/notebook dilengkapi dengan perangkat pendukungnya seperti printer, jaringan, infokus, modem, LAN dan lain-lain. Sementara software adalah aplikasi-aplikasi dan sistem yang digunakan.

Sesuai Instruksi Presiden RI Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pembangunan mengenai Elektronik Government (E-Government) merupakan proses transformasi dimana pemerintah mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi untuk mengeliminasi sekat-sekat birokrasi organisasi serta membentuk jaringan sistem manajemen dan proses kerja yang memungkinkan instansi pemerintah bekerja secara terpadu untuk menyederhanakan akses dan transparansi ke semua informasi dan layanan publik yang harus disediakan oleh pemerintah. Untuk itu, kesiapan beberapa faktor pendukung penerapan teknologi informasi berupa sumber daya manusia, sarana dan prasarana teknologi informasi serta persiapan stakeholder lainnya.

Selain merealisasikan pelayanan publik yang terintegrasi, Pemerintah Kota Sawahlunto juga perlu memperhatikan mengenai penyelenggaraan pemerintahan yang berintegritas seperti yang diamanatkan Prepres Nomor 55 Tahun 2012 tentang Stranas Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025, sehingga dapat memberikan pelayanan yang bebas korupsi, kolusi dan nepotisme, optimalisasi penyelenggaraan pemerintah yang bersih, transparan dan akuntabilitas, keterbukaan informasi kepada publik dan menjaga strategi pelaksanaan pembangunan antara pusat, provinsi dan kabupaten/kota.

m. Kearsipan dan Perpustakaan

Pusat dan kearsipan yang berbasis web menjadi isu strategis yang penting dalam lima tahun kedepan. Keberadaan arsip yang menumpuk akan mengganggu aktifitas pegawai dalam bekerja. Perkembangan Teknologi informasi yang demikian cepat juga akan mempengaruhi minat pengunjung ke pustaka, sehingga menjamin tersedianya bahan bacaan pada perpustakaan adalah salah satu aspek yang membuat kemajuan kognitif dan masyarakat Untuk mengatasi permasalahan tersebut, akan diprioritaskan pembangunan Pustaka dan Arsip daerah yang berbasis internet dan Web. Diharapkan kebutuhan masyarakat akan buku dan budaya membaca akan tetap terjaga karena dengan budaya ditengah masyarakat akan melahirkan generasi muda yang berintelektualitas tinggi.

n. Perencanaan Kepariwisata yang Terintegrasi dengan Perencanaan Kota

Sektor kepariwisataan akan tetap dijadikan isu strategis. Ditengah persaingan dunia pariwisata dengan daerah lain di Sumatera Barat dan Nasional dibutuhkan konsep dan perencanaan yang matang dalam pembangunan sektor pariwisata Kota Sawahlunto. Pariwisata harus dijadikan prioritas dalam setiap perencanaan pembangunan di Kota Sawahlunto secara fisik dan non fisik. Keunggulan pariwisata dengan konsep budaya tambang batubara yang identik pada Kota Sawahlunto harus dimaksimalkan dengan kombinasi objek wisata rekreasi.

o. Produk industri kecil dan menengah yang bermutu dan berdaya saing

Dalam membangun ekonomi kerakyatan yang tangguh, peran industri kecil dan menengah harus diutamakan. Pada daerah berkembang Kota Sawahlunto, sektor industri yang berkembang didominasi oleh Industri kecil dan Menengah yang berbasis rumah tangga. Keberadaan Songket Silungkang, Kerupuk Kubang dan Minyak Sereh wangi perlu mendapat perhatian lebih mengingat keterpaduannya dengan sektor pariwisata dan dapat menyentuh langsung ekonomi masyarakat Kota Sawahlunto. Produk kerajinan rumah tangga perlu diidentifikasi lagi, dikembangkan inovasinya, dan dapat menjadi salah satu sumber pembaharuan dari produk UMKM lokal yang ada.

p. Pengalihan Kewenangan Urusan

Dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah terjadi beberapa perubahan mendasar terkait dengan



penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah, terdapat beberapa urusan yang dialihkan kewenangannya dari kewenangan daerah menjadi kewenangan Provinsi/Pusat (urusan konkruen). Adapun urusan pemerintah konkruen tersebut meliputi penyelenggaraan sub urusan:

- a. Pengelolaan pendidikan menengah;
- b. Pengelolaan terminal penumpang tipe A dan tipe B;
- c. Pelaksanaan rehabilitasi di luar kawasan hutan negara;
- d. Pelaksanaan perlindungan hutan di hutan lindung dan hutan produksi;
- e. Pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan;
- f. Pelaksanaan penyuluhan kehutanan Provinsi;
- g. Pelaksanaan metrologi legal berupa tera, tera ulang dan pengawasan;
- h. Pengelolaan tenaga penyuluh KB/petugas lapangan KB (PKB/PLKB);
- i. Pengelolaan tenaga pengawas ketenagakerjaan;
- j. Penyelenggaraan penyuluhan perikanan nasional; dan
- k. Penyediaan dana untuk kelompok masyarakat tidak mampu, pembangunan sarana penyediaan tenaga listrik belum berkembang, daerah terpencil dan perdesaan.

Pengalihan urusan dimaksud berimplikasi pada pengalihan personel, pendanaan, sarana dan prasarana serta dokumen (P3D). Untuk menghindari stagnasi penyelenggaraan pemerintah daerah yang berakibat terhentinya pelayanan kepada masyarakat, maka penyelenggaraan urusan pemerintahan konkruen yang berifat pelayanan kepada masyarakat luas dan masif, yang pelaksanaannya tidak dapat ditunda dan tidak dapat dilaksanakan tanpa dukungan P3D, tetap dilaksanakan oleh tingkat/susunan pemerintahan yang saat ini menyelenggarakan urusan pemerintahan konkruen tersebut sampai dengan diserahkannya P3D.



BAB III

KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

Kondisi perekonomian Kota Sawahlunto Tahun 2019-2020 berikut karakteristiknya serta proyeksi perekonomian Tahun 2021 - 2022 dapat digambarkan melalui Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah yang juga merupakan penjelasan atas analisis statistik perekonomian daerah. Bab ini juga membahas kinerja perekonomian daerah Kota Sawahlunto berikut dinamika faktor eksternal dan internalnya.

Berdasarkan gambaran kerangka ekonomi daerah tersebut, maka disusun prioritas pembangunan, dan pengambilan kebijakan untuk menghadapi tantangan dan penyelesaian masalah pembangunan agar arah pembangunan daerah Tahun 2021 dapat dicapai sesuai dengan sasaran program dan kegiatan yang ditetapkan. Pada sisi yang lain, perkiraan sumber-sumber pendapatan dan besaran pendapatan dari sektor-sektor potensial merupakan dasar kebijakan anggaran untuk mengalokasikan perencanaan anggaran berbasis kinerja secara efektif dan efisien.

3.1 ARAH KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH

Pertumbuhan ekonomi Indonesia diprediksikan akan tumbuh sebesar 5,3 % pada 2021 hingga 2022 dengan didukung oleh pemulihan industri, pariwisata dan investasi, reformasi sistem kesehatan nasional, reformasi sistem jaring pengaman sosial dan reformasi sistem ketahanan bencana. Pertumbuhan ekonomi nasional akan tercapai dengan asumsi : (1) defisit anggaran hanya 3,4% dari Produk Domestik Bruto (PDB), (2) jika stimulus fiskal sekitar 3,1 % dari PDB, (3) program restrukturisasi kredit, (4) penundaan ekspansi moneter Bank Indonesia. Sedangkan laju inflasi diproyeksikan akan terkendali pada sasaran 3% ± 1% pada tahun 2021 disebabkan ekspektasi kenaikan harga masih sesuai kisaran dan membaiknya pasokan barang seiring normalnya perdagangan dunia (Bank Indonesia). Sementara itu di akhir masa tahun 2020 ekonomi Indonesia hanya akan tumbuh di level 2,3% (Bappenas) sebagai dampak dari munculnya pandemi Covid-19. Covid-19 berdampak pada rendahnya pertumbuhan konsumsi swasta dan investasi, dan membuat ekspor impor terkontraksi. Namun stimulus fiskal dapat mendorong konsumsi pemerintah tumbuh lebih tinggi dari tahun 2019 (Bank Indonesia).

Sejalan dengan target pertumbuhan ekonomi nasional tersebut dan arah kebijakan ekonomi dalam RPJMD Kota Sawahlunto Tahun 2018-2023, maka pembangunan ekonomi Kota Sawahlunto pada tahun 2021 ditujukan untuk mewujudkan Sawahlunto sebagai Kota Wisata yang kreatif, inovatif, unggul, bermartabat, berkeadilan dan yang sejahtera. Dan untuk menjamin keberlanjutan pembangunan, maka tema pembangunan Kota Sawahlunto tahun 2021 adalah “Melanjutkan Pembangunan Infrastruktur yang Adil dan Merata Dalam Mewujudkan Wisata Tambang yang Berbudaya dan Pengembangan Ekonomi Lokal”. Pengembangan ekonomi lokal dalam arti fokus pada ekonomi kerakyatan yang senantiasa menyelaraskan antara kondisi dan potensi wilayah bertujuan untuk menggerakkan perekonomian yang mampu memperluas lapangan kerja dan mengurangi angka pengangguran yang cukup tinggi di Kota Sawahlunto.

3.1.1. Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2019 dan 2020

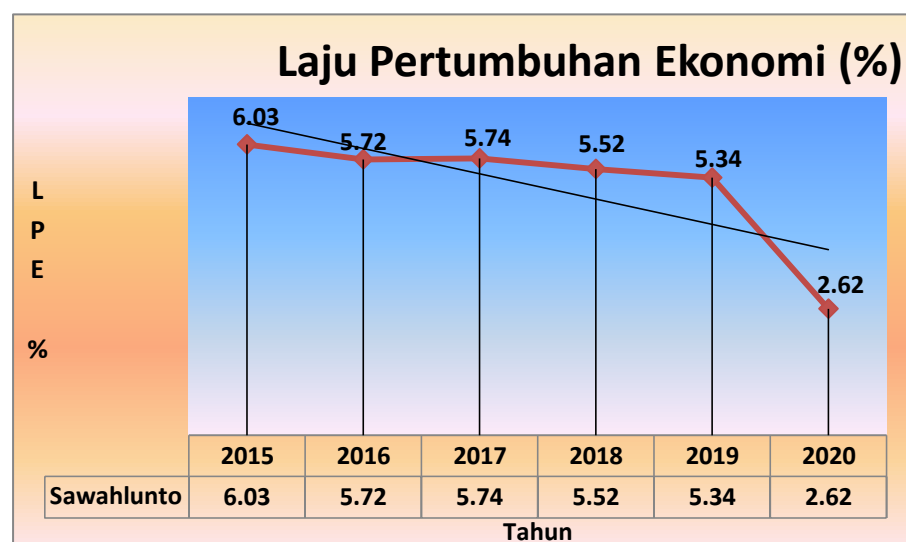
a. Pertumbuhan Ekonomi

Selama beberapa tahun terakhir pertumbuhan ekonomi Kota Sawahlunto menunjukkan tren yang cenderung melambat. Melambat pertumbuhan ekonomi Kota Sawahlunto, sejalan dengan melambatnya Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sumatera Barat dan Nasional karena menurunnya pertumbuhan industri pengolahan. Namun dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Barat dan pertumbuhan ekonomi Nasional, pertumbuhan ekonomi Kota Sawahlunto relatif lebih tinggi. Secara grafis, tren pertumbuhan ekonomi Kota Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat dan Nasional ditunjukkan pada Grafik 3.1. Secara garis besar, ketiganya menunjukkan tren pertumbuhan yang cenderung melambat, dengan pertumbuhan ekonomi Kota Sawahlunto berada di atas pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Barat dan ekonomi Nasional. Selama periode 2015 hingga 2019, pertumbuhan ekonomi Kota Sawahlunto melambat sebesar 0,17 % per tahun. Sementara pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Barat pada periode yang sama melambat sebesar 0,12% per tahun. Sedangkan pertumbuhan ekonomi Nasional melambat 0,15 % dari tahun sebelumnya.

Pertumbuhan ekonomi Kota Sawahlunto pada tahun 2019 mencapai 5,34%. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Barat mencapai 5,05% dan pertumbuhan ekonomi Nasional tahun 2019 mencapai 5,02%. Pertumbuhan ekonomi Kota Sawahlunto pada tahun 2019 cenderung lebih rendah 0,18% dibandingkan dengan pertumbuhan pada tahun sebelumnya.

Grafik 3.1

Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Sawahlunto Tahun 2015-2020



Sumber : Kota Sawahlunto Dalam Angka 2020, Hasil Olahan 2020

Selama tahun 2015 - 2019, pertumbuhan ekonomi per sektor menunjukkan bahwa semua sektor memiliki pertumbuhan yang positif. Tiga belas sektor mengalami pertumbuhan di atas 5 persen, yaitu pada sektor: (a) Pertambangan dan Pengalihan sebesar 11,16 persen; (b) Pengadaan Listrik dan Gas sebesar 6,07 persen; (c) Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan



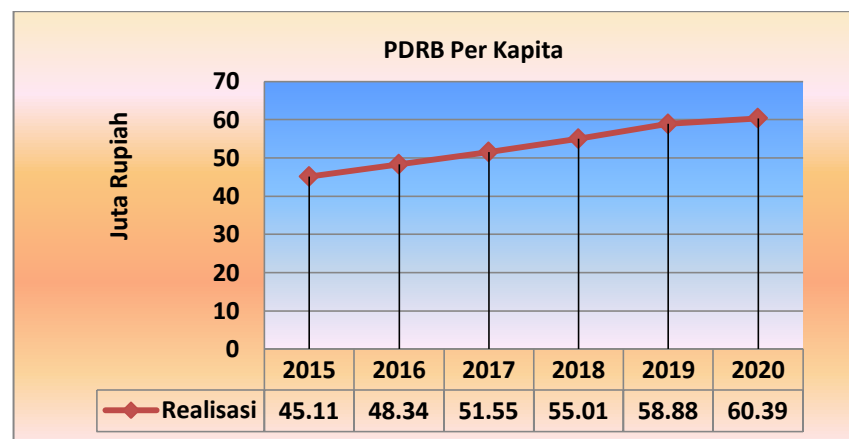
Daur Ulang sebesar 7,14 persen; (d) Konstruksi sebesar 6,68 persen; (e) Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 5,49 persen; (f) Transportasi dan Pergudangan sebesar 8,62 persen; (g) Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 7,95 persen; (h) Informasi dan Komunikasi 8,32 persen; (i) Real Estat sebesar 5,87 persen; (j) Jasa Perusahaan sebesar 6,10 Persen, (k) Jasa Pendidikan sebesar 9,03 persen; (l) Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 5,62 persen; (m) Jasa Lainnya sebesar 8,97 persen.

Sedangkan pada **tahun 2020**, adanya wabah pandemi Covid-19 menyebabkan beberapa bulan aktivitas perekonomian terganggu bahkan cenderung berhenti, akibat adanya kebijakan *social distancing* sehingga mobilitas manusia berkurang yang berdampak pada lumpuhnya perusahaan-perusahaan, perdagangan dan jasa, serta sektor-sektor ekonomi lainnya, yang menyebabkan **pertumbuhan ekonomi** Kota Sawahlunto diperkitakan turun mencapai **2,62 persen**.

b. PDRB Per Kapita

PDRB ADHB per kapita Kota Sawahlunto tahun 2015 – 2019 cenderung meningkat. Pada tahun 2015, nilai PDRB ADHB sebesar 2.715.005 juta rupiah dan jumlah penduduk sebanyak 60.186 jiwa, maka PDRB ADHB per kapita sebesar 45,11 juta rupiah/jiwa. Nilai ini meningkat menjadi 48,34 juta rupiah/jiwa pada tahun 2016, dan terus meningkat hingga sebesar 58,88 juta rupiah/jiwa pada tahun 2019.

Grafik 3.2
Perkembangan PDRB per Kapita Kota Sawahlunto Tahun 2015-2020



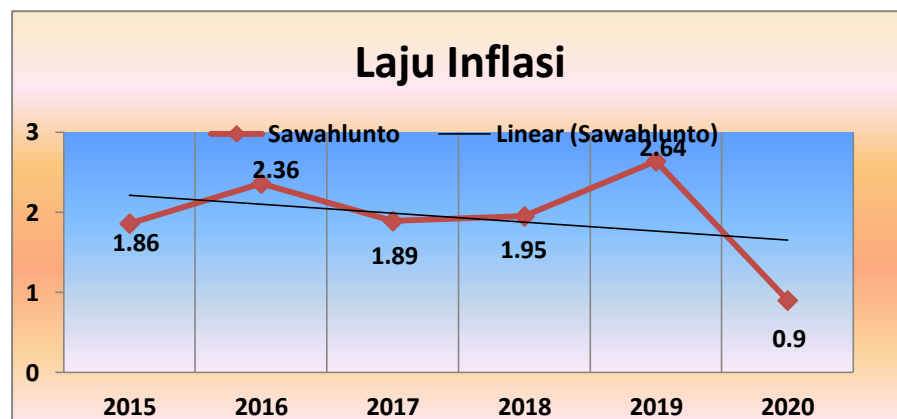
Sumber : BPS, Kota Sawahlunto Dalam Angka Tahun 2020, Hasil Olahan 2020

Berdasarkan hasil *forecast*, nilai **PDRB ADHB per Kapita** Kota Sawahlunto meningkat menjadi **60,39 juta rupiah/jiwa** pada tahun 2020. Meskipun terdampak pandemi Covid-19, ekonomi Kota Sawahlunto diperkirakan masih dapat tumbuh dan mencapai PDRB ADHB sebesar 3.811.930 juta rupiah pada tahun 2020. Hal ini didorong oleh pembelian paket sembako dari berbagai kalangan untuk diserahkan kepada masyarakat yang terdampak Covid-19 di Kota Sawahlunto. Di samping itu kebijakan *School From Home* dan *Work From Home* diperkirakan mampu mendongkrak pertumbuhan lapangan usaha Informasi dan Komunikasi.

c. Inflasi

Inflasi Kota Sawahlunto tahun 2015 – 2019 bersifat fluktuatif dengan kecenderungan meningkat. Pada tahun 2015, tingkat inflasi Kota Sawahlunto mencapai 1,86%. Angka ini merupakan yang terendah selama lima tahun terakhir. Pencapaian tersebut tidak lepas dari kemampuan masyarakat Sawahlunto dalam merespon kondisi perekonomian terbaru serta peran Tim Pengendali Inflasi Daerah dalam menjaga kestabilan harga. Inflasi tertinggi terjadi pada tahun 2019 yang mencapai 2,64 %. Pada umumnya, peningkatan inflasi didorong adanya perubahan harga dalam kelompok bahan makanan serta kelompok perumahan, gas, air, listrik, dan bahan bakar.

Grafik 3.3
Tingkat Inflasi Kota Sawahlunto Tahun 2015-2020



Sumber : BPS, Kota Sawahlunto dalam Angka 2019-2020,
Data Diolah tahun 2020

Berdasarkan hasil *forecast*, tingkat **inflasi** Kota Sawahlunto turun menjadi **0,90 persen** pada tahun 2020. Hal ini disebabkan dampak pandemi Covid-19, sehingga ada kebijakan *social distancing* sehingga mobilitas manusia berkurang yang berdampak pada lumpuhnya perusahaan-perusahaan, perdagangan dan jasa, serta sektor-sektor ekonomi lainnya, yang menyebabkan turunnya pendapatan masyarakat dan turunnya daya beli masyarakat sehingga harga-harga cenderung turun secara umum. Di samping itu terjadinya panen serempak produk pertanian, sehingga supply berlimpah yang menyebabkan harga produk pertanian menjadi turun.

d. Pengangguran Terbuka

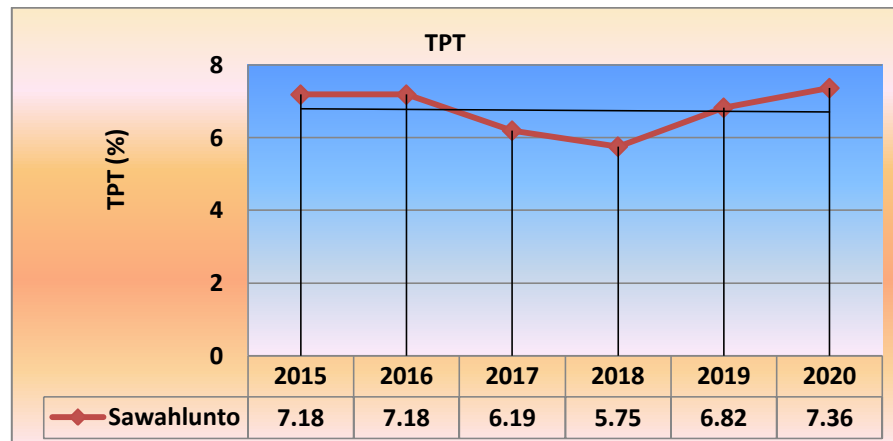
Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Sawahlunto cenderung mengalami penurunan selama kurun waktu 2015 – 2018 meskipun pada tahun 2019 terjadi peningkatan yang cukup signifikan. Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Sawahlunto pada tahun 2019 tertinggi ketiga setelah Kota Padang dan Kota Solok, bila dibandingkan dengan Tingkat Pengangguran Terbuka kabupaten/kota lain yang ada di Provinsi Sumatera Barat, bahkan jauh lebih tinggi bila dibandingkan dengan Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Sumatera Barat dan Nasional. Pada tahun 2015 dan 2016, Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Sawahlunto mencapai 7,18 persen dan menurun menjadi 6,19 persen pada tahun 2017. Tingkat Pengangguran Terbuka



terendah Kota Sawahlunto dicapai pada tahun 2018, dengan Tingkat Pengangguran Terbuka 5,75 persen.

Namun dengan adanya wabah pandemi Covid-19 di awal tahun 2020 ini, maka Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Sawahlunto pada **tahun 2020 diproyeksi sebesar 7,36 persen**, dikarenakan kebijakan *social distancing* menyebabkan masyarakat dibatasi untuk keluar rumah. Akibatnya masyarakat tidak bisa beaktivitas dan bekerja secara normal, para pekerja di sektor informal terutama, kehilangan pekerjaannya. Akibatnya pengangguran semakin meningkat.

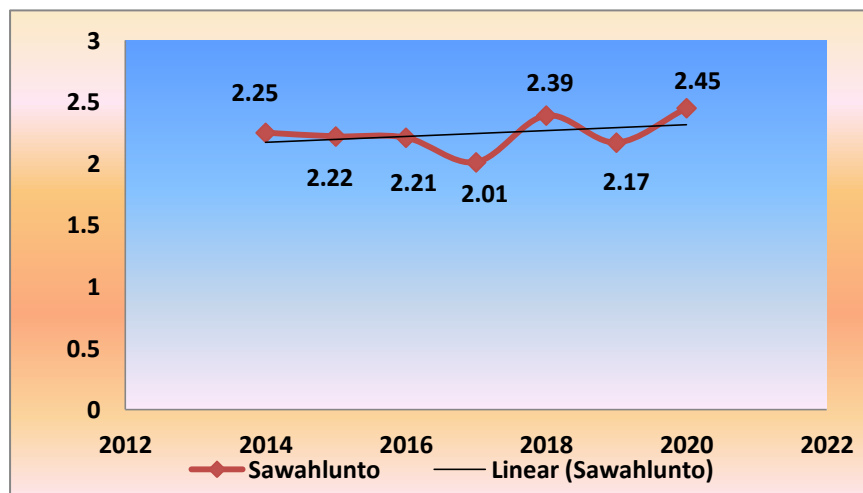
Grafik 3.4
Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Sawahlunto Tahun 2015-2020



Sumber : BPS, Kota Sawahlunto Dalam Angka Tahun 2020

e. Tingkat Kemiskinan

Grafik 3.5
Tingkat Kemiskinan Kota Sawahlunto Tahun 2015-2020



Sumber : BPS, Tingkat Kemiskinan Tahun 2014-2019, Hasil Olahan 2020

Tingkat kemiskinan Kota Sawahlunto cenderung mengalami penurunan selama kurun waktu 2014 – 2019 walaupun pada tahun 2018 terdapat sedikit peningkatan. Bahkan tingkat kemiskinan Kota Sawahlunto terendah bila



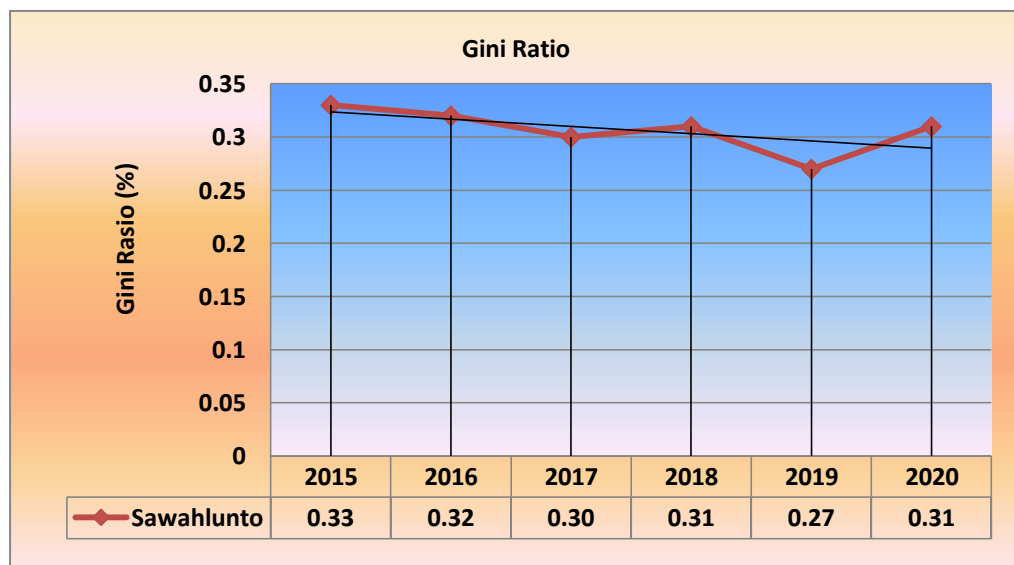
dibandingkan dengan tingkat kemiskinan kabupaten/kota lain yang ada di Provinsi Sumatera Barat, bahkan relatif lebih rendah juga bila dibandingkan dengan tingkat kemiskinan Provinsi Sumatera Barat dan Nasional. Pada tahun 2014, tingkat kemiskinan Kota Sawahlunto mencapai 2,25 persen dan menurun menjadi 2,22 persen pada tahun 2015. Tingkat kemiskinan terendah dicapai pada tahun 2017, dengan tingkat kemiskinan 2,01 persen.

Namun dengan adanya wabah pandemi Covid-19 di awal tahun 2020 ini, maka **tingkat kemiskinan** Kota Sawahlunto pada **tahun 2020 diproyeksi sebesar 2,45 persen**, dikarenakan kebijakan *social distancing* menyebabkan masyarakat dibatasi untuk keluar rumah, sehingga masyarakat yang bekerja di sektor informal tidak bisa bekerja secara normal, akibatnya pendapatan mereka menurun dan tidak dapat mencukupi kebutuhan hidup mereka sehari-hari (menjadi miskin).

f. Gini Rasio

Tingkat kesejahteraan masyarakat Kota Sawahlunto tergolong relatif baik. Secara umum, Gini Rasio Kota Sawahlunto selama rentang waktu 2015 – 2019 cenderung menurun. Penurunan Gini Rasio Kota Sawahlunto menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan penduduk semakin kecil. Gambar di bawah ini menunjukkan Perkembangan Indeks Gini di Kota Sawahlunto Tahun 2015– 2019.

Grafik 3.5
Gini Rasio Kota Sawahlunto Tahun 2015-2020



Sumber : BPS, Berita Resmi Statistik, Gini Rasio Penduduk Sumatera Barat September 2019, 7 Februari 2020, Data Diolah tahun 2020

Berdasarkan kriteria ketimpangan versi Bank Dunia, kelompok yang menjadi fokus penggolongan ketimpangan adalah kelompok penduduk dengan pendapatan 40% terendah. Semakin besar persentase pendapatan yang dinikmati oleh kelompok tersebut menunjukkan bahwa distribusi pendapatan semakin merata. Sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Bank Dunia,

predikat ketimpangan rendah dapat dicapai jika 40% penduduk berpendapatan terendah menikmati $\geq 17\%$ dari total pendapatan yang ada.

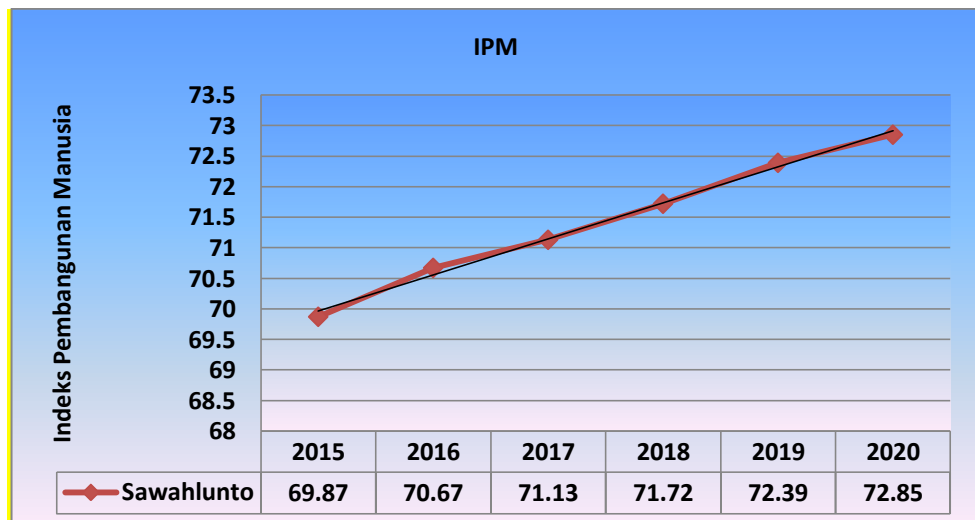
Gini Rasio terendah terjadi pada tahun 2019, dengan indeks yang mencapai 0,27 dengan prediket sangat rendah. Indeks ini menunjukkan bahwa 40% penduduk berpendapatan terendah menikmati $\geq 17\%$ dari total pendapatan yang ada. Namun dengan adanya wabah pandemi ini pada triwulan I dan II tahun 2020, yang menyebabkan banyak penduduk bekerja di sektor informal tidak dapat bekerja, maka diperkirakan 40% penduduk berpendapatan terendah Kota Sawahlunto menikmati $< 17\%$ dari total pendapatan yang ada, tentu saja ini menyebabkan Gini Rasio Kota Sawahlunto akan meningkat. Diperkirakan Gini Rasio Kota Sawahlunto menjadi 0,31 pada tahun 2020.

g. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

IPM Kota Sawahlunto selama kurun waktu 2015-2019 cenderung lebih tinggi dari IPM Nasional, namun lebih rendah dibandingkan dengan nilai IPM Provinsi Sumatera Barat, kecuali tahun 2019, IPM Kota Sawahlunto sudah dapat menyamai nilai IPM Provinsi Sumatera Barat dengan nilai 72,39. Berdasarkan kategori yang dikeluarkan BPS, nilai IPM di Kota Sawahlunto ini masuk kategori tinggi ($70 \leq \text{IPM} < 80$). Apabila dilihat lebih detil pada unsur yang menyusun IPM, setiap indikator juga terus mengalami peningkatan bila dilihat dari tahun 2015-2019. Hal ini tentunya merupakan buah dari berbagai upaya yang sudah dilakukan oleh Pemerintah Kota Sawahlunto dalam upayanya untuk meningkatkan kualitas hidup manusia masyarakatnya.

Grafik 3.6

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Sawahlunto Tahun 2015-2020



Sumber : BPS, Provinsi Sumatera Barat Dalam Angka 2020, Hasil Olahan 2020

Indeks Pembangunan Kota Sawahlunto pada kurun waktu 2015 – 2019 **sudah mengikuti trenline**, dan diperkirakan pada tahun 2020 masih berada pada trenline dengan angka 72,85. Pandemi Covid -19 diperkirakan tidak terlalu mempengaruhi indikator-indikator pembentuk IPM, kecuali indikator Pengeluaran per Kapita Disesuaikan yang akan sedikit berkurang dari tahun sebelumnya. Sedangkan tiga indikator lainnya, UHH, HLS, RLS diperkirakan tidak akan terpengaruh oleh wabah Covid-19, karena ketiga



indikator tersebut di Kota Sawahlunto sudah terlayani dengan baik oleh Organisasi Perangkat Daerah yaitu Dinas Pendidikan dan Kesehatan. Kondisi ini didukung oleh instruksi pemerintah pusat untuk menambah alokasi anggaran kepada Perangkat Daerah pada masa pandemi Covid-19 ini.

3.1.2. Tantangan Dan Prospek Perekonomian Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2021 Dan 2022

Tantangan dan prospek perekonomian Kota Sawahlunto akan banyak dipengaruhi oleh tantangan dan prospek pada tataran lokal, nasional dan global. Sesuai dengan Tema RKP Tahun 2021 : “Mempercepat Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Sosial”, maka sasaran dan target yang harus dicapai pada akhir tahun 2021, antara lain:

1. Pertumbuhan ekonomi nasional ditargetkan berkisar 4,5% – 5,5%;
2. Tingkat Pengangguran Terbuka ditargetkan menjadi 7,4% – 7,7%.
3. Tingkat Kemiskinan ditargetkan pada kisaran 8,7% – 9,2%;
4. Gini rasio ditargetkan berada pada kisaran 0,375 – 0,382;
5. IPM ditarget menjadi 73,19 - 73,26 .

Untuk mencapai sasaran dan target Tahun 2021, terdapat empat prioritas pembangunan nasional yang memperoleh penekanan dengan rincian sebagai berikut :

1. Ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan;
2. Sumber Daya Manusia berkualitas dan berdaya saing;
3. Infrastruktur untuk ekonomi dan pelayanan dasar;
4. Lingkungan hidup, ketahanan bencana dan perubahan iklim.

Sedangkan Tema RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 : “Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Didukung Oleh Pertumbuhan Berkualitas Melalui Hilirisasi Pertanian, Pariwisata, Investasi dan Infrastruktur di Berbagai Wilayah, maka sasaran dan target yang harus dicapai pada akhir tahun 2021, antara lain:

1. Pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Barat ditargetkan berkisar 5,92%;
2. Tingkat Pengangguran Terbuka ditargetkan menjadi 5,60 %.
3. Tingkat Kemiskinan ditargetkan menjadi 5,50 %;
4. Gini rasio ditargetkan menjadi 0,327;
5. IPM ditarget menjadi 72,59 ;
6. Tingkat Inflasi ditargetka berada pada kisaran 5% - 6 %:
7. PDRB per Kapita ditarget menjadi 50,99 juta/jiwa;
8. IPG ditarget menjadi 95,08;
9. IDG ditarget menjadi 62,42.

Dengan memperhatikan kondisi dan dinamika perekonomian daerah maupun nasional beberapa tahun sebelumnya serta proyeksi perkembangan ekonomi daerah dan nasional, secara makro pada tahun 2021, prospek pertumbuhan ekonomi Kota Sawahlunto diprediksikan masih dalam kondisi positif meskipun dihadapkan pada tantangan kondisi pemulihan pandemi Covid-19 yang penuh dengan ketidakpastian. Dengan memperhatikan kondisi tersebut, indikator makro ekonomi Kota Sawahlunto tahun 2021-2022 diproyeksikan sebagai berikut.



Tabel 3.1
Prediksi Indikator Makro Ekonomi Kota Sawahlunto Tahun 2021 – 2022

| No | Indikator Makro Ekonomi | Prediksi | |
|----|------------------------------------|----------|-------|
| | | 2021 | 2022 |
| 1 | Pertumbuhan ekonomi (%) | 5,00 | 5,17 |
| 2 | Tingkat Pengangguran Terbuka (%) | 6,88 | 6,40 |
| 3 | Tingkat Kemiskinan (%) | 2,40 | 2,35 |
| 4 | Gini rasio | 0,3 | 0,29 |
| 5 | IPM | 73,31 | 73,77 |
| 6 | Tingkat Inflasi (%) | 2,23 | 2,29 |
| 7 | PDRB per Kapita (juta rupiah/Jiwa) | 63,39 | 66,73 |

Perekonomian Kota Sawahlunto tahun 2019 tumbuh sebesar 5,34 persen. Selama rentang waktu 5 tahun, pertumbuhan ekonomi Kota Sawahlunto berfluktuasi secara positif dari 6,03% tahun 2015 menjadi 5,34% pada tahun 2019. Struktur perekonomian daerah Kota Sawahlunto tahun 2019 masih didominasi tiga lapangan usaha utama, yaitu Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (15,05%), Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib, (12,07%), Konstruksi (11,29%). Bila dilihat dari sumber pertumbuhan ekonomi Kota Sawahlunto tahun 2019, lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian menjadi penyumbang pertumbuhan tertinggi yakni sebesar 0,35 persen, diikuti Transportasi dan Pergudangan sebesar 0,29 persen, serta Informasi dan Komunikasi sebesar 0,24 persen.

Perekonomian Kota Sawahlunto tahun 2021-2022 diperkirakan mengalami perbaikan kisaran 5,00 – 5,17 persen dibandingkan tahun 2020, dengan inflasi pada kisaran 2,23 – 2,29 persen. Hal ini didukung dengan perbaikan ekonomi Nasional tahun 2021 dengan fokus pada pemulihan industri, pariwisata dan investasi, reformasi sistem kesehatan nasional, reformasi sistem jaring pengaman sosial dan reformasi sistem ketahanan bencana yang diperkirakan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional mencapai 5,3 persen. Selanjutnya, komitmen pemerintah yang tinggi dalam menghadapi dampak pandemi Covid-19 dengan melakukan stimulus fiskal, program restrukturisasi kredit, penundaan ekspansi moneter Bank Indonesia akan memperbaiki pertumbuhan ekonomi pada 2020.

Mempertimbangkan berbagai hal tersebut, maka perekonomian Kota Sawahlunto tahun 2021-2022 diproyeksikan tumbuh pada kisaran 5,00 – 5,17 persen. Kondisi ini akan tercapai dengan asumsi dan strategi sebagai berikut :

Asumsi

1. Investasi yang terus meningkat sejalan dengan perbaikan kebijakan kemudahan berusaha.
2. Stabilitasnya pertumbuhan lapangan usaha utama Kota Sawahlunto yaitu perdagangan besar-eceran, reparasi mobil, dan sepeda motor; Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib; dan Konstruksi.
3. Pulihnya mobilitas manusia dan barang antar wilayah.
4. Terealisasi stimulus fiskal, program restrukturisasi kredit, penundaan ekspansi moneter Bank Indonesia.

**Strategi**

1. Meningkatkan pemerataan, pembangunan, peningkatan kapasitas dan kualitas infrastruktur wilayah sebagai pendukung pembangunan perekonomian daerah.
2. Mengembangkan ekonomi kreatif masyarakat melalui peningkatan kualitas dan sertifikasi produk bekerjasama dengan pemerintah dan swasta;
3. Mengembangkan produk unggulan Kota Sawahlunto melalui ketersediaan bahan baku, peningkatan kualitas produksi, pengembangan promosi dan jejaring pemasaran;
4. Pengembangan berbagai peluang investasi melalui upaya kemudahan berusaha, kredit sektor komersial dengan bunga rendah, kepastian hukum, serta pendorongan pada investasi yang bersifat padat karya;
5. Meningkatkan dan memperkuat kapasitas dan kemandirian fiskal sebagai pendukung pembangunan daerah;
6. Meningkatkan pengendalian pada konsumsi masyarakat untuk menjaga kemampuan daya beli serta mengendalikan inflasi dengan menjaga distribusi, ketersediaan dan pasokan bahan kebutuhan pokok masyarakat;
7. Pengembangan berbagai profil investasi daerah berbasis keunggulan dan potensi lokal yang mampu meningkatkan perekonomian wilayah, menyerap tenaga kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat;
8. Meningkatkan kualitas pendidikan dan pelatihan pendukung ketersediaan tenaga kerja yang kompetitif secara formal dan non formal;
9. Meningkatkan proses hilirisasi industri manufaktur berbasis produk pertanian sebagai sektor unggulan Kota Sawahlunto;

Sementara itu, inflasi Kota Sawahlunto tahun 2021-2022 diperkirakan berada pada kisaran 2,23-2,29 persen dengan asumsi terjaganya ketersediaan, distribusi dan pasokan bahan kebutuhan pokok masyarakat; optimalnya kinerja Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID); serta terjaganya ekspektasi positif masyarakat. Turunnya inflasi Kota Sawahlunto ini sebagai dampak dari pandemi Covid-19 yang terjadi pada Triwulan I dan II Tahun 2020 yang menyebabkan menurunnya daya beli masyarakat.



3.2. ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

Kemampuan dan kemandirian pemerintah daerah dapat diukur dari pendapatan daerah. Kemampuan fiskal daerah yang baik akan mampu melaksanakan dan merealisasikan program-program pemerintah daerah. Oleh sebab itu Kebijakan keuangan daerah merupakan kebijakan yang strategis dalam pembangunan daerah. Sehingga diperlukan kebijakan yang memperhatikan kondisi dan kemampuan keuangan daerah. Pada tahun 2021 kebijakan keuangan daerah difokuskan pada kebijakan yang memperhatikan kapasitas fiskal yang utamanya memfokuskan pada pendapatan asli daerah, pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Kebijakan belanja daerah juga diarahkan untuk pemenuhan kebijakan belanja wajib, mengikat dan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Selain itu difokuskan juga pada belanja yang meningkatkan kunjungan wisata ke Kota Sawahlunto sehingga mempercepat capaian visi kota.

Selanjutnya pembiayaan pembangunan daerah yang terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan diarahkan untuk tetap menjaga stabilitas fiskal daerah sehingga pembangunan daerah dapat berjalan berkesinambungan dan tetap. Selain itu pembiayaan pembangunan mengedepankan prinsip akuntabilitas.

3.2.1. Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan

Proyeksi dan kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas riil keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program-program pembangunan kedepan. Sebuah daerah dapat dikatakan mandiri dalam melaksanakan program pembangunan adalah apabila mampu melakukan pembangunan daerah dengan menggunakan sumber daya yang dimiliki oleh daerah itu sendiri, di mana salah satunya adalah sumber daya keuangan. Namun Kota Sawahlunto merupakan salah satu daerah yang belum dapat dikatakan mandiri terutama dari sisi keuangan dimana hal tersebut nampak pada tingginya ketergantungan fiskal daerah dan ketergantungan pada kebijakan pemerintah pusat.

Sampai dengan tahun 2020, pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah daerah di Kota Sawahlunto masih bertumpu pada sumber daya keuangan yang bersumber dari dana perimbangan, Pendapatan asli daerah (PAD) Kota Sawahlunto yang terdiri dari Pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. belum mampu untuk menyelenggarakan pemerintah daerah. Ketergantungan fiskal yang tinggi tersebut sangat mempengaruhi proses perencanaan pembangunan daerah sampai dengan pelaksanaannya.

Komposisi APBD Kota Sawahlunto Tahun Anggaran 2020 : Pendapatan sebesar Rp. 631.859.255.114,00 terdiri dari Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp. 61.765.678.778,00 Dana Perimbangan sebesar Rp. 508.874.543.000,00 dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar Rp. 61.219.033.336,00. Belanja Daerah sebesar Rp. 682.764.180.858,17. terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 324.927.043.138,17 dan Belanja Langsung sebesar Rp.



357.837.137.720,00 Sehingga mengakibatkan Defisit sebesar Rp. 50.904.925.744,17

Untuk menutupi defisit diusahakan dari Pembiayaan Daerah yang terdiri dari (1) Panerimaan sebesar Rp. 52.821.592.410,83, (2) Pengeluaran Pembiayaan Daerah sebesar Rp.1.916.666.666,66. Sehingga Sisa lebih Pembiayaan Anggaran Tahun berkenaan (SILPA) menjadi Rp. 0.

Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada point 1 diatas (penerimaan) terdiri dari jenis pembiayaan Penggunaan SILPA sebesar Rp. 40.125.703.375,48 dan penerimaan kembali pemberian pinjaman sebesar Rp. 12.695.889.035,35. Sedankan pengeluaran sebagaimana dimaksud pada point 2 diatas terdiri dari pembiayaan Penyertaan Modal (Investasi) penerimaan daerah sebesar Rp. 750.000.000,00 dan Pembayaran Pokok Utang sebesar Rp. 1.166.666.666,66

Dari komposisi diatas terlihat pendapatan daerah tidak mampu membiayai belanja daerah yang setiap tahunnya menunjukkan tren meningkat. Untuk menutupi defisit belanja tersebut diperlukan usaha-usaha untuk meningkatkan pendapatan antara lain mengajukan berbagai program-program yang sesuai dengan kebutuhan Kota Sawahlunto kepada Kementerian yang didanai dari APBN.

Berdasarkan kebutuhan pendanaan dan proyeksi pendapatan daerah dengan mempertimbangkan arah kebijakan pendapatan daerah tahun 2018, maka realisasi anggaran dan proyeksi pendapatan daerah tahun 2018-2022 adalah sebagaimana dalam tabel 3.2. dibawah ini.



Tabel 3.2
Realisasi dan Proyeksi Pendapatan Daerah Kota Sawahlunto
Tahun 2018 s.d 2022

| NOMOR | URAIAN | REALISASI | | PROYEKSI | | | | |
|-------|-------------------------------|---------------------------|---|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------|--------------------|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | | |
| | | | | APBD AWAL | PAGU INDIKATIF | RPJMD | | |
| 1 | PENDAPATAN DAERAH | | | | | | | |
| 1 | Pendapatan Asli Daerah | 47.227.132.335,45 | 57.170.993.865,09 | 61.765.678.778,00 | 61.765.678.778,00 | 66.521.034.195,73 | | |
| 1 | 1 | 2 | Pajak Daerah | 5.546.092.124,00 | 5.502.589.718,00 | 6.685.187.400,00 | 6.685.187.400,00 | 5.832.334.465,58 |
| 1 | 1 | 3 | Retribusi Daerah | 3.533.959.570,00 | 3.624.747.865,00 | 5.881.977.838,00 | 5.881.977.838,00 | 4.206.621.237,29 |
| 1 | 1 | 4 | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan | 9.983.800.455,00 | 10.832.616.199,00 | 11.720.000.000,00 | 11.720.000.000,00 | 12.816.248.760,22 |
| 1 | 1 | | lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah | 28.150.599.186,45 | 37.211.040.083,09 | 37.478.513.540,00 | 37.478.513.540,00 | 43.665.829.723,40 |
| 1 | Pendapatan Transfer | 532.012.325.683,00 | 495.141.841.033,00 | 510.897.092.320,00 | 508.874.543.000,00 | 555.465.286.793,75 | | |
| 1 | 2 | 1 | Transfer – Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan | 458.504.259.105,00 | | 510.897.092.320,00 | | |
| 1 | 2 | 1 | Dana bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak | 19.143.752.466,00 | 25.713.090.626,00 | 16.875.807.000,00 | 16.875.807.000,00 | 18.557.063.293,13 |
| 1 | 2 | 1 | Dana Alokasi Umum | 374.920.211.899,00 | 390.050.861.000,00 | 391.545.423.000,00 | 391.545.423.000,00 | 380.512.374.685,52 |
| 1 | 2 | 1 | Dana Alokasi Khusus | 64.440.294.740,00 | 79.377.889.407,00 | 100.453.313.000,00 | 100.453.313.000,00 | 83.217.877.115,46 |
| 1 | 2 | 1 | Dana Alokasi Desa | | | | | 23.814.580.341,34 |
| 1 | 2 | 2 | Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya | 50.966.994.000,00 | 50.969.694.000,00 | | | |



| NOMOR | | | | URAIAN | REALISASI | | PROYEKSI | | |
|-------|---|---|---|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|
| | | | | | 2018 | 2019 | 2020 APBD AWAL | 2021 PAGU INDIKATIF | 2022 RPJMD |
| 1 | 2 | 2 | 1 | Dana Otonomi Khusus | - | | | | |
| 1 | 2 | 2 | 2 | Dana Penyesuaian | 50.969.694.000,00 | 22.193.148.000,00 | | | 27.894.486.814,89 |
| 1 | 2 | 3 | | Transfer Pemerintah Propinsi | 22.538.372.578,00 | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 1 | Pendapatan Bagi Hasil Pajak | 22.538.372.578,00 | | | | 21.468.904.543,41 |
| 1 | 2 | 3 | 2 | Pendapatan Bagi Hasil Lainnya | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 3 | Bantuan Keuangan | | | | | |
| 1 | 3 | | | Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah | 7.224.320.000,00 | 87.198.628.590,00 | 61.219.033.336,00 | 68.427.244.336,00 | 9.034.487.729,15 |
| 1 | 3 | 1 | | Hibah | - | 10.343.200.000,00 | 7.131.000.000,00 | 7.131.000.000,00 | 9.000.000.000,00 |
| 1 | 3 | 2 | | Dana darurat | - | | | | |
| 1 | 3 | 3 | | Dana bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya | - | 26.451.058.590,00 | 25.165.008.336,00 | 25.165.008.336,00 | |
| 1 | 3 | 4 | | Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus | - | 22.193.148.000,00 | 28.923.025.000,00 | 7.500.000.000,00 | |
| 1 | 3 | 5 | | Bantuan Keuangan dari Propinsi atau pemerintah daerah lainnya | - | | | | |
| 1 | 3 | 6 | | Dana Penguatan dan Percepatan Pembangunan | - | | | | |
| 1 | 3 | 7 | | Pendapatan Lain-Lain | 7.224.320.000,00 | | | | 34.487.729,15 |



| NOMOR | | | | URAIAN | REALISASI | | PROYEKSI | | |
|-------|---|---|--|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 3 | 8 | | | | APBD AWAL | PAGU INDIKATIF | RPJMD | |
| 1 | 3 | 8 | | Dana Alokasi Desa | - | 28.211.222.000,00 | | 28.631.236.000,00 | |
| | | | | JUMLAH PENDAPATAN | 586.463.778.018,45 | 639.511.463.488,09 | 631.859.255.114,00 | 639.067.466.114,00 | 631.020.808.718,63 |
| | | | | | | | | | |

Sumber Data : BPKAD Kota Sawahlunto



3.2.2. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Dalam membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah, Pendapatan daerah dan besarnya sangat menentukan kemampuan daerah dalam melaksanakan program-program pembangunannya. Pendapatan daerah dirumuskan sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintah dan kemampuan pendapatan daerah dalam rangka mewujudkan pelayanan kepada masyarakat. Pendapatan daerah diupayakan selalu meningkat seiring pertumbuhan indikator kondisi perekonomian daerah dan pemenuhan kebutuhan masyarakat. Peningkatan pendapatan daerah dilakukan baik dengan intensifikasi maupun ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan baik dari potensi daerah sendiri maupun dari pemerintah pusat maupun pemerintah propinsi. Kebijakan pendapatan daerah adalah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Dengan demikian RKPD tahun 2021, untuk kebijakan pendapatan daerah adalah terkait dengan rencana pendapatan daerah yang akan dituangkan dalam RAPBD Tahun 2021 dengan menggunakan perkiraan terukur, rasional, dan memiliki kepastian dasar hukum penerimaannya.

Untuk Pendapatan daerah tahun 2021 diarahkan dalam rangka optimalisasi dan peningkatan kapasitas fiskal daerah untuk memaksimalkan penyelenggaraan pemerintah daerah. Arah kebijakan pendapatan daerah untuk tahun 2021 ditargetkan sebagai berikut :

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagaimana terdapat di dalam RPJMD Kota Sawahlunto Tahun 2019 - 2023 Sebesar Rp. 66.282.417.492,76

Dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah diupayakan melalui Peningkatan dan penggalan potensi sumber –sumber pendapatan, Optimalisasi pengelolaan aset dan perusahaan milik daerah, Akurasi data terkait dasar penghitungan pembagian dana perimbangan, Intensifikasi dan Ekstensifikasi yaitu dengan mencari sumber penerimaan baru maupun meningkatkan penerimaan yang potensinya telah ada selama ini antara lain melalui peningkatan tarif dan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Dalam upaya peningkatan PAD, Pemerintah Pusat telah mengeluarkan Undang-Undang tentang Pajak dan Retribusi Daerah yaitu Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009. Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp. 66.282.417.492,76 terdiri dari Pajak Daerah sebesar Rp. 5.811.413.377,42, Retribusi Daerah sebesar Rp. 4.191.531.723,09, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar Rp. 12.770.275.767,46, dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebesar Rp 43.509.196.624,79.

2. Dana Perimbangan yang terdapat didalam RPJMD Kota Sawahlunto Tahun 2019 – 2023 sebesar Rp. 553.472.784.768,58

Dalam rangka penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari Dana Perimbangan pada RAPBD 2021 memperhatikan hal-hal sebagai berikut :



a. Dana bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak

Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak telah diupayakan melalui peningkatan koordinasi dengan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Solok untuk menggali potensi penerimaan negara yang berasal dari pajak/bukan pajak yang potensinya berada di Kota Sawahlunto antara lain Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Pertambangan, royalty, dan land rent pertambangan batubara, pajak penghasilan dan lain-lain. Sehingga Dana bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak tahun 2021 diperkirakan sebesar Rp. 18.490.497.502,12 .

b. Dana Alokasi Umum

Tahun anggaran 2021 Pemerintah Kota Sawahlunto diperkirakan menerima DAU dari pemerintah pusat sebesar Rp. 379.147.443.887,52 dengan memperhatikan kemampuan keuangan pemerintah pusat. Naik Rp. 1.343.527.192,25 dari tahun 2020.

c. Dana Alokasi Khusus

Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari APBN dan dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. tahun anggaran 2020 Pemerintah Kota Sawahlunto diperkirakan menerima dana DAK sebesar Rp. 82.919.367.392,84 naik Rp. 293.828.764,12 dari tahun 2020.

d. Dana Penyesuaian

Dana penyesuaian adalah dana yang dialokasikan untuk membantu daerah dalam rangka melaksanakan kebijakan tertentu Pemerintah dan DPR. Tahun Anggaran 2020 Pemerintah Kota Sawahlunto menganggarkan Dana Penyesuaian sebesar Rp. 27.794.426.878,13.

3.2.3. Arah Kebijakan Belanja Daerah

Arah kebijakan pengelolaan belanja daerah ditujukan untuk kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan daerah melalui komponen belanja langsung yang efisien, transparan dan akuntabel serta terjaminnya kelancaran penyelenggaraan pemerintahan seperti gaji dan pengembangan aparatur, pemeliharaan dan peningkatan sarana dan prasarana kerja aparatur, disamping pembinaan kemasyarakatan yaitu dengan pemberian subsidi untuk lembaga yang berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemerintah yang mendasar seperti pendidikan, kesehatan dan lain sebagainya. Bantuan keuangan dan Bagi Hasil untuk penyelenggaraan pemerintahan desa serta penyediaan anggaran untuk penanggulangan dampak akibat bencana alam, sosial dan kewenangan daerah lainnya yang belum dianggarkan.

Dengan terbatasnya kemampuan pendanaan daerah, perlu diupayakan terjadinya pemerataan antar sektor, efisiensi penggunaan sumber daya, penyusunan standar biaya dan satuan harga, rasionalisasi berbagai program dan kegiatan yang lebih difokuskan tercapainya sasaran-sasaran prioritas.



Kebijakan perencanaan belanja daerah yang akan dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut :

1. Belanja Tidak Langsung

a. Belanja Pegawai

- 1) Besarnya penyediaan gaji pokok Pegawai Negeri Sipil Daerah mempedomani ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor : 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil.
- 2) Untuk tunjangan-tunjangan yang melekat dalam gaji PNSD seperti tunjangan struktural, fungsional, fungsional umum, beras dan PPh dibayarkan sesuai peraturan perundang-undangan.
- 3) Dalam merencanakan belanja pegawai diperhitungkan "acres" gaji paling tinggi 2,5 % yang disesuaikan dengan kebutuhan untuk mengantisipasi kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan penambahan jumlah pegawai akibat mutasi.
- 4) Tunjangan Kinerja dibayarkan sesuai dengan aturan dari Kemenpan.

b. Belanja Bunga

Belanja bunga dianggarkan dalam APBD 2021 untuk membayar bunga hutang pinjaman kepada pemerintah pusat atau pemerintah propinsi.

c. Belanja Hibah

Kebijakan Pemerintah Kota Sawahlunto dalam menentukan dana hibah disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan disesuaikan dengan kebutuhan dan permohonan dari penerima hibah.

d. Belanja Bantuan Sosial

- 1) Kebijakan Pemerintah Kota Sawahlunto dalam menentukan dana hibah disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan disesuaikan dengan kebutuhan dan permohonan dari penerima hibah.
- 2) Untuk optimalisasi fungsi APBD sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan pasal 16 ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 pengalokasian bantuan sosial tahun demi tahun diupayakan semakin berkurang agar APBD berfungsi sebagai instrument pemerataan dan keadilan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.

e. Belanja Bantuan Keuangan

- 1) Digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum dan khusus dari Pemerintah Propinsi Sumatera Barat kepada Kota Sawahlunto, Pemerintah Desa dan Kelurahan serta Pemerintah Daerah lainnya atau Pemerintah Kota Sawahlunto kepada Pemerintah Desa dan Kelurahan dalam rangka pemerataan dan atau peningkatan kemampuan keuangan bagi daera dan atau desa penerima bantuan.



- 2) Bantuan keuangan yang bersifat umum peruntukan dan penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada Pemerintah Daerah/Pemerintah Desa penerima bantuan, sedangkan bantuan keuangan yang bersifat khusus peruntukan dan pengelolaannya diarahkan/ditetapkan oleh Pemerintah/Pemerintah Daerah pemberi bantuan. Untuk pemberi bantuan bersifat khusus serta mensyaratkan penyediaan dana pendamping dalam APBD atau anggaran pendapatan dan belanja desa penerima bantuan.
- 3) Dalam rangka menghindari duplikasi penganggaran dalam APBD kota, urusan pemerintahan daerah yang bukan kewenangan kota tidak dapat dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada OPD kota, namun dapat dianggarkan pada Belanja Bantuan Keuangan, baik yang bersifat umum maupun khusus.

f. Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terduga merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa/tanggap darurat dalam rangka pencegahan dan gangguan terhadap stabilitas penyelenggaraan pemerintahan demi terciptanya keamanan dan ketertiban di daerah dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun sebelumnya yang didukung bukti-bukti yang sah.

2. Belanja Langsung

Pengalokasian Belanja Langsung oleh Pemerintah Kota Sawahlunto untuk Tahun Anggaran 2021 disesuaikan dengan asumsi dasar ekonomi makro, kebutuhan penyelenggaraan daerah, kebutuhan pembangunan, dan mengikuti ketentuan perundangan yang berlaku. Kebijakan terkait Belanja Langsung untuk Tahun Anggaran 2020 yaitu :

1. Melaksanakan Program Unggulan dan Program Prioritas dalam rangka pencapaian Visi dan Misi RPJMD Kepala Daerah yang terpilih.
2. Melaksanakan program-program yang bersifat mengikat seperti halnya dukungan pencapaian 9 prioritas pembangunan nasional (Nawa Cita) sebagaimana diamanatkan pada RPJMN 2015 - 2019 serta pemenuhan ketentuan perundang-undangan.
3. Mengakomodir seluruh program pembangunan yang dijangkau melalui Aspirasi Masyarakat dalam Musrenbang.
4. Mengakomodir Hasil telaahan pokok-pokok pikiran DPRD, yang merupakan hasil kajian permasalahan pembangunan daerah yang dari DPRD berdasarkan risalah rapat dengar pendapat dan/atau rapat hasil penyerapan aspirasi melalui reses yang diparipurnakan kemudian dituangkan dalam daftar permasalahan pembangunan yang ditandatangani oleh Pimpinan DPRD.

Selain itu juga harus memperhitungkan kebutuhan Organisasi Perangkat Daerah untuk menunjang tupoksinya masing-masing seperti biaya alat tulis kantor, listrik, air, telepon, biaya rapat, koordinasi, honorarium non



PNS, pemeliharaan peralatan, pemeliharaan kendaraan dinas dan lain-lain sejenisnya yang dalam penganggarannya harus mempertimbangkan tingkat efisiensi.

Pada tahun 2020 ini terjadi pandemi global diseluruh dunia dengan adanya virus corona. Dampak Virus corona berpengaruh terhadap sendi sendi kehidupan. Dengan adanya pandemi corona ini mempengaruhi perencanaan keuangan daerah. Sesuai dengan RKP Nasional yang mengarahkan kebijakan anggaran untuk pemulihan ekonomi baik nasional maupun daerah.

Belanja Tidak Langsung tahun 2021 yang tercantum didalam RPJMD Kota Sawahlunto Tahun 2019 - 2023 sebesar Rp. 315.768.398.849,17 terdiri dari Belanja Pegawai Rp. 239.086.236.224,25 Belanja Bunga Rp. 1.547.194.396,37 Belanja Hibah Rp. 8.000.000.000,00 Belanja Bagi Hasil kepada Propinsi / Kabupaten / Kota dan Pemerintah Desa Rp. 1.020.845.051,51 dan Belanja Bantuan Keuangan Propinsi / Kabupaten / Kota dan Pemerintah Desa Rp. 65.340.525.978,85 dan Belanja Tidak Terduga Rp. 773.597.198,19. Belanja Langsung tahun 2021 diperkirakan sebesar Rp.315.521.167.430,86 pengeluaran pembiayaan 7.60.801.354,85. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 3.3 dibawah ini.



Tabel 3.3
Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2018 s/d 2022

| NOMOR | URAIAN | REALISASI | | PROYEKSI | | | | |
|-------|--------|-----------|---|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | | |
| | | | | APBD AWAL | PAGU INDIKATIF | RPJMD | | |
| 2 | 1 | | 201.787.358.377,19 | 313.600.660.136,51 | 324.927.043.138,17 | 334.927.043.124,00 | 318.969.190.197,20 | |
| 2 | 1 | 1 | Belanja Pegawai | 192.528.893.245,00 | 232.810.851.029,00 | 234.609.314.014,17 | 253.609.314.000,00 | 241.572.733.080,98 |
| 2 | 1 | 2 | Belanja Bunga | 1.460.185.072,19 | 1.251.297.942,51 | 1.500.000.000,00 | 1.500.000.000,00 | 1.563.285.218,10 |
| 2 | 1 | 3 | Belanja Subsidi | - | - | - | - | - |
| 2 | 1 | 4 | Belanja Hibah | 7.271.241.900,00 | 5.185.275.249,00 | 4.294.200.000,00 | 4.294.200.000,00 | 8.000.000.000,00 |
| 2 | 1 | 5 | Belanja Bantuan Sosial | - | 3.557.137.500 | 3.167.000.000,00 | 3.167.000.000,00 | |
| 2 | 1 | 6 | Belanja Bagi Hasil kepada Propinsi / Kabupaten / Kota dan Pemerintah Desa | - | 1.006.666.600,00 | 1.256.1.000,00 | 1.256.717.000,00 | 1.031.461.840,04 |
| 2 | 1 | 7 | Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten / Kota dan Pemerintah Desa | 527.038.160,00 | 69.722.276.835.00 | 70.349.812.124,00 | 70.349.812.124,00 | 66.020.067.449,03 |
| 2 | 1 | 8 | Belanja Tidak Terduga | - | 67.154.981,00 | 750.000.000,00 | 750.000.000,00 | 781.642.609,05 |
| | | | | | | | | |



| NOMOR | URAIAN | REALISASI | | PROYEKSI | | | | |
|-------|--------|-----------|--|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | | |
| | | | | APBD AWAL | PAGU INDIKATIF | RPJMD | | |
| 2 | 2 | | 312.994.979.570,00 | 308.872.162.985,50 | 357.837.137.720,00 | 311.031.097.651,14 | 319.051.618.521,43 | |
| 2 | 2 | 1 | Belanja Pegawai | - | - | 62.409.282.250,00 | | |
| 2 | 2 | 2 | Belanja Barang dan Jasa | 190.588.371.347,67 | 214.487.904.967,00 | 163.949.738.878,00 | | |
| 2 | 2 | 3 | Belanja Modal | 122.406.608.222,33 | 94.384.258.018,50 | 131.478.116.592,00 | | |
| | | | | | | | | |
| 2 | 3 | | Belanja Tidak Terduga | 412.951.268,00 | - | - | - | - |
| 2 | 3 | 1 | Belanja Tidak Terduga | 412.951.268,00 | - | - | - | - |
| | | | | | | | - | - |
| 2 | 4 | | Belanja Transfer | 64.081.187.000,00 | - | - | - | - |
| 2 | 4 | 1 | Bagi Hasil Pajak | 863.196.000,00 | - | - | - | - |
| 2 | 4 | 2 | Bantuan Keuangan Kepada Propinsi / Kota / desa | 63.217.991.000,00 | - | - | - | - |
| | | | JUMLAH BELANJA | 579.276.476.215,19 | 622.472.823.122,01 | 682.764.180.858,17 | 645.958.140.775,14 | 638.020.808.718,63 |

Sumber Data : BPKAD Kota Sawahlunto



3.2.4. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah (Penerimaan dan Pengeluaran)

Arah kebijakan pengelolaan penerimaan pembiayaan daerah adalah tertutupnya defisit belanja daerah agar cukup tersedia dana untuk melaksanakan berbagai program dan kegiatan yang telah direncanakan. Berbagai upaya menutupi defisit belanja adalah memanfaatkan sisa lebih anggaran tahun sebelumnya, kalau perlu dilakukan penjualan aset daerah dan mencari pinjaman daerah maupun menarik kembali dana pinjaman dan piutang daerah yang beredar dimasyarakat maupun dunia usaha lainnya serta penerimaan kembali penyertaan modal (investasi) daerah.

Sedangkan arah kebijakan pengelolaan pengeluaran pembiayaan Daerah diarahkan pada penyertaan modal daerah pada berbagai Badan Usaha melalui kajian yang berorientasi pada keuntungan dengan memisahkan pengelolaan keuangan daerah. Hasil yang diharapkan adalah mendorong iklim usaha yang diharapkan memberi dampak tumbuhnya lapangan kerja dan kegiatan usaha masyarakat baik di hulu maupun hilir disamping keuntungan daerah berupa deviden apabila telah melampaui masa break event point.

Realisasi dan prediksi Pembiayaan Daerah disajikan dalam tabel 3.4. berikut ini.



Tabel 3.4
Realisasi dan Proyeksi Pembiayaan Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2018 s.d 2022

| NOMOR | URAIAN | REALISASI | | PROYEKSI | | | | |
|-------|--------|-----------|---|-------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | | |
| | | | | APBD AWAL | PAGU INDIKATIF | RPJMD | | |
| 3 | 1 | | | | | | | |
| 3 | 1 | 1 | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SILPA) | 6.814.084.391,87 | 4.848.420.336,05 | 40.125.703.375,48 | 8.807.341.327,80 | 7.618.652.488,94 |
| 3 | 1 | 2 | Pencairan Dana Cadangan / Deposito | | | | | |
| 3 | 1 | 3 | Hasil Penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan | | | | | |
| 3 | 1 | 4 | Penerimaan Kembali pemberian Pinjaman | 131.925.200 | 80.560.500,00 | 12.695.889.035,35 | 500.000.000 | 131.925.200,00 |
| 3 | 1 | 5 | Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman | | 8.008.445.961,06 | | | |
| 3 | 1 | 6 | Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen Lainnya | | | | | |
| | | | Jumlah Penerimaan Pembiayaan | 6.946.009.591,87 | 12.937.426.797,11 | 52.821.592.410,83 | 8.807.341.327,80 | 7.750.577.688,94 |
| 3 | 2 | | Pengeluaran Pembiayaan | | | | | |



| NOMOR | URAIAN | REALISASI | | PROYEKSI | | | | |
|-------|--------|-----------|--------------------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | | |
| | | | | APBD AWAL | PAGU INDIKATIF | RPJMD | | |
| 3 | 2 | 1 | Pembentukan dana cadangan / Deposito | | | | | |
| 3 | 2 | 2 | Penyertaan Modal (Investasi) Daerah | 5.000.000.000 | 7.431.902.000.00 | 750.000.000,00 | 750.000.000 | 6.583.911.022,28 |
| 3 | 2 | 3 | Pembayaran Pokok Hutang | 1.166.666.666,66 | 9.175.112.627.72 | 1.166.666.666,66 | 1.166.666.666,66 | 1.166.666.666,66 |
| 3 | 2 | 4 | Pemberian Pinjaman Daerah | | | | | |
| 4 | 2 | 5 | Pembayaran Bunga Pinjaman | | | | | |
| | | | Jumlah Pengeluaran Pembiayaan | 6.166.666.666,66 | 16.607.014.627.72 | 1.916.666.666,66 | 1.916.666.666,66 | 7.750.577.688,94 |
| | | | Pembiayaan netto | | 3.669.587.830.61 | 50.904.925.744,17 | 6.890.674.661,14 | - |
| 3 | 3 | | SILPA | 4.848.420.336,05 | 13.369.052.535.47 | - | - | - |

Sumber Data : BPKAD Kota Sawahlunto

**3.2.5. Rekapitulasi Realisasi dan Proyeksi (pagu indikatif) Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah.**

Dari analisa arah dan kebijakan pengelolaan keuangan daerah terdiri dari Pendapatan Daerah, Belanja Daerah serta Pembiayaan Daerah dengan memperhatikan realisasi yang telah dicapai dan berbagai kendala yang akan dihadapi tahun 2021, disusun ringkasan kerangka pendanaan pembangunan Kota Sawahlunto sebagaimana tabel berikut ini.

Tabel 3.5.
Rekapitulasi Realisasi dan Proyeksi (Pagu Indikatif) Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah
Kota Sawahlunto Tahun 2018 s.d 2022

| NOMOR | URAIAN | REALISASI | | PROYEKSI | | | | |
|-------|-------------------------------|--------------------------|---|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | | |
| | | | | APBD AWAL | PAGU INDIKATIF | RPJMD | | |
| 1 | PENDAPATAN DAERAH | | | | | | | |
| 1 | Pendapatan Asli Daerah | 47.227.132.335,45 | 57.170.993.865,09 | 61.765.678.778,00 | 61.765.678.778,00 | 66.521.034.195,73 | | |
| 1 | 1 | 2 | Pajak Daerah | 5.546.092.124,00 | 5.502.589.718,00 | 6.685.187.400,00 | 6.685.187.400,00 | 5.832.334.465,58 |
| 1 | 1 | 3 | Retribusi Daerah | 3.533.959.570,00 | 3.624.747.865,00 | 5.881.977.838,00 | 5.881.977.838,00 | 4.206.621.237,29 |
| 1 | 1 | 4 | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan | 9.983.800.455,00 | 10.832.616.199,00 | 11.720.000.000,00 | 11.720.000.000,00 | 12.816.248.760,22 |
| 1 | 1 | | lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah | 28.150.599.186,45 | 37.211.040.083,09 | 37.478.513.540,00 | 37.478.513.540,00 | 43.665.829.723,40 |
| 1 | 2 | | Pendapatan Transfer | 532.012.325.683,00 | 495.141.841.033,00 | 510.897.092.320,00 | 508.874.543.000,00 | 555.465.286.793,75 |
| 1 | 2 | 1 | Transfer – Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan | 458.504.259.105,00 | | 510.897.092.320,00 | | |



| NOMOR | | | | URAIAN | REALISASI | | PROYEKSI | | |
|-------|---|---|---|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|
| | | | | | 2018 | 2019 | 2020 APBD AWAL | 2021 PAGU INDIKATIF | 2022 RPJMD |
| 1 | 2 | 1 | 1 | Dana bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak | 19.143.752.466,00 | 25.713.090.626,00 | 16.875.807.000,00 | 16.875.807.000,00 | 18.557.063.293,13 |
| 1 | 2 | 1 | 3 | Dana Alokasi Umum | 374.920.211.899,00 | 390.050.861.000,00 | 391.545.423.000,00 | 391.545.423.000,00 | 380.512.374.685,52 |
| 1 | 2 | 1 | 4 | Dana Alokasi Khusus | 64.440.294.740,00 | 79.377.889.407,00 | 100.453.313.000,00 | 100.453.313.000,00 | 83.217.877.115,46 |
| 1 | 2 | 1 | 5 | Dana Alokasi Desa | | | | | 23.814.580.341,34 |
| 1 | 2 | 2 | | Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya | 50.966.994.000,00 | 50.969.694.000,00 | | | |
| | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 2 | 1 | Dana Otonomi Khusus | - | | | | |
| 1 | 2 | 2 | 2 | Dana Penyesuaian | 50.969.694.000,00 | 22.193.148.000,00 | | | 27.894.486.814,89 |
| 1 | 2 | 3 | | Transfer Pemerintah Propinsi | 22.538.372.578,00 | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 1 | Pendapatan Bagi Hasil Pajak | 22.538.372.578,00 | | | | 21.468.904.543,41 |
| 1 | 2 | 3 | 2 | Pendapatan Bagi Hasil Lainnya | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 3 | Bantuan Keuangan | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 1 | 3 | | | Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah | 7.224.320.000,00 | 87.198.628.590,00 | 61.219.033.336,00 | 68.427.244.336,00 | 9.034.487.729,15 |
| 1 | 3 | 1 | | Hibah | - | 10.343.200.000,00 | 7.131.000.000,00 | 7.131.000.000,00 | 9.000.000.000,00 |
| 1 | 3 | 2 | | Dana darurat | - | | | | |
| 1 | 3 | 3 | | Dana bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya | - | 26.451.058.590,00 | 25.165.008.336,00 | 25.165.008.336,00 | |



| NOMOR | URAIAN | REALISASI | | PROYEKSI | | |
|-------|---|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | | | APBD AWAL | PAGU INDIKATIF | RPJMD |
| 1 3 4 | Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus | - | 22.193.148.000,00 | 28.923.025.000,00 | 7.500.000.000,00 | |
| 1 3 5 | Bantuan Keuangan dari Propinsi atau pemerintah daerah lainnya | - | | | | |
| 1 3 6 | Dana Penguatan dan Percepatan Pembangunan | - | | | | |
| 1 3 7 | Pendapatan Lain-Lain | 7.224.320.000,00 | | | | 34.487.729,15 |
| 1 3 8 | Dana Alokasi Desa | - | 28.211.222.000,00 | | 28.631.236.000,00 | |
| | JUMLAH PENDAPATAN | 586.463.778.018,45 | 639.511.463.488,09 | 631.859.255.114,00 | 639.067.466.114,00 | 631.020.808.718,63 |
| 2 | BELANJA DAERAH | | | | | |
| 2 1 | Belanja Tidak Langsung | 309.818.169.600,61 | 313.600.660.136,51 | 324.927.043.138,17 | 334.927.043.124,00 | 318.969.190.197,20 |
| 2 1 1 | Belanja Pegawai | 226.004.496.283,00 | 232.810.851.029,00 | 243.609.314.014,17 | 253.609.314.000,00 | 241.572.733.080,98 |
| 2 1 2 | Belanja Bunga | 1.438.215.088,61 | 1.251.297.942,51 | 1.500.000.000,00 | 1.500.000.000,00 | 1.563.285.218,10 |
| 2 1 3 | Belanja Subsidi | - | | | | |
| 2 1 4 | Belanja Hibah | 17.718.305.554,00 | 5.185.275.249,00 | 4.294.200.000,00 | 4.294.200.000,00 | 8.000.000.000,00 |
| 2 1 5 | Belanja Bantuan Sosial | - | | 3.167.000.000,00 | 3.167.000.000,00 | |
| 2 1 6 | Belanja Bagi Hasil kepada Propinsi / Kabupaten / Kota dan Pemerintah Desa | 941.735.998,00 | 1.006.666.600,00 | 1.256.717.000,00 | 1.256.717.000,00 | 1.031.461.840,04 |



| NOMOR | URAIAN | REALISASI | | PROYEKSI | | | | |
|-------|--------|-----------|--|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | | |
| | | | | APBD AWAL | PAGU INDIKATIF | RPJMD | | |
| 2 | 1 | 7 | Belanja Bantuan Keuangan Propinsi / Kabupaten / Kota dan Pemerintah Desa | 63.383.033.077,00 | 69.722.276.835,00 | 70.349.812.124,00 | 70.349.812.124,00 | 66.020.067.499,03 |
| 2 | 1 | 8 | Belanja Tidak Terduga | 332.383.600,00 | 67.154.981,00 | 750.000.000,00 | 750.000.000,00 | 781.642.609,05 |
| 2 | 2 | | Belanja Langsung | 272.576.531.007,00 | 308.872.162.985,50 | 357.837.137.720,00 | 311.031.097.651,14 | 319.051.618.521,43 |
| 2 | 2 | 1 | Belanja Pegawai | 195.048.782.209,00 | | 62.409.282.250,00 | | |
| 2 | 2 | 2 | Belanja Barang dan Jasa | 77.527.748.798,00 | 214.487.904.967,00 | 163.949.738.878,00 | | |
| 2 | 2 | 3 | Belanja Modal | | 94.384.258.018,50 | 131.478.116.592,00 | | |
| 2 | 3 | | Belanja Tidak Terduga | | | | | |
| 2 | 3 | 1 | Belanja Tidak Terduga | | | | | |
| 2 | 4 | | Belanja Tranfer | | | | | |
| 2 | 4 | 1 | Bagi Hasil Pajak | | | | | |
| 2 | 4 | 2 | Bantuan Keuangan Kepada Propinsi / Kota / Desa | | | | | |
| | | | JUMLAH BELANJA | 582.394.700.607,61 | 622.472.823.122,01 | 682.764.180.858,17 | 645.958.140.775,14 | 638.020.808.718,63 |
| 3 | | | PEMBIAYAAN DAERAH | | | | | |
| 3 | 1 | | Penerimaan Pembiayaan | | | | | |



| NOMOR | URAIAN | REALISASI | | PROYEKSI | | | | |
|-------|--------|-----------|---|-------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | | |
| | | | | APBD AWAL | PAGU INDIKATIF | RPJMD | | |
| 3 | 1 | 1 | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SILPA) | 6.814.084.391,87 | 4.848.420.336,05 | 40.125.703.375,48 | 8.307.341.327,00 | 7.618.652.488,94 |
| 3 | 1 | 2 | Pencairan Dana Cadangan / Deposito | - | | | | |
| 3 | 1 | 3 | Hasil Penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan | - | | | | |
| 3 | 1 | 4 | Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah | 131.925.200,00 | 8.008.445.961,06 | 12.695.889.035,35 | 500.000.000,00 | 131.925.200,00 |
| 3 | 1 | 5 | Penerimaan Piutang Daerah | - | 80.560.500,00 | | | |
| 3 | 1 | 6 | Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen Lainnya | - | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Penerimaan Pembiayaan | 6.946.009.591,87 | 12.937.426.797,11 | 52.821.592.410,83 | 8.807.341.327,00 | 7.750.577.688,94 |
| | | | | | | | | |
| 3 | 2 | | Pengeluaran Pembiayaan | | | | | |
| 3 | 2 | 1 | Pembentukan dana cadangan / Deposito | - | | | | |
| 3 | 2 | 2 | Penyertaan Modal (Investasi) Daerah | 5.000.000.000,00 | 7.431.902.000,00 | 750.000.000,00 | 750.000.000,00 | 6.583.911.022,28 |
| 3 | 2 | 3 | Pembayaran Pokok Hutang | 1.166.666.666,66 | 9.175.112.627,72 | 1.166.666.666,66 | 1.166.666.666,66 | 1.166.666.666,66 |



| NOMOR | | | | URAIAN | REALISASI | | PROYEKSI | | |
|-------|---|---|--|--------------------------------------|-------------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | | | | | | APBD AWAL | PAGU INDIKATIF | RPJMD |
| 3 | 2 | 4 | | Pemberian Pinjaman Daerah | - | | | | |
| 3 | 2 | 5 | | Pembayaran Bunga Pinjaman | - | | | | |
| | | | | Jumlah Pengeluaran Pembiayaan | 6.166.666.666,66 | 16.607.014.627,72 | 191.666.659.200,00 | 1.916.666.666,66 | 7.750.577.688,94 |
| | | | | Pembiayaan netto | | 3.669.587.830,61 | | - | - |
| | | | | | | | | | |
| 3 | 3 | | | SILPA | 4.848.420.336,05 | 13.369.052.535,47 | - | - | - |

Sumber Data : BPKAD Kota Sawahlunto



BAB IV

PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

Prioritas pembangunan daerah merupakan agenda pembangunan daerah tahunan yang menjadi tonggak capaian antara menuju sasaran 5 (lima) tahun RPJMD. Prioritas pembangunan juga dapat dikategorikan sebagai operasional dari tujuan strategis daerah berdasarkan pada urgensi daya ungkit pada kesejahteraan dan cakupan pembangunannya. Tidak semua program prioritas dapat menjadi prioritas pembangunan daerah. Hal tersebut disebabkan oleh keterbatasan anggaran dan hasil identifikasi permasalahan yang dihadapi.

Prioritas pembangunan daerah juga merupakan sekumpulan program prioritas yang secara khusus berhubungan dengan capaian sasaran pembangunan daerah, tingkat kemendesakan dan daya ungkit bagi peningkatan kinerja pembangunan daerah. Perumusan prioritas pembangunan dilakukan dengan cara mengevaluasi permasalahan pembangunan daerah, dihubungkan dengan program pembangunan daerah sebagaimana termuat pada RPJMD tahun rencana 2021.

Dengan adanya masalah global pandemi Covid-19 yang berdampak terhadap perekonomian secara nasional maka prioritas dan sasaran pembangunan daerah 2021 akan terjadi perubahan dari RPJMD 2018-2023 untuk tahun rencana 2021 yang telah disusun, sehingga RKPD 2021 yang disusun tergantung pada perkembangan pandemi Covid-19.

4.1 TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN TAHUN 2021

4.1.1 Tema dan Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2021

Tema pembangunan RKP 2021 sebelumnya sudah disusun dengan mempertimbangkan sasaran pembangunan jangka menengah RPJMN 2020-2024, hasil evaluasi kinerja pembangunan dan anggaran tahun 2019 serta kebijakan pembangunan tahun 2020. Namun, dengan terjadinya pandemi global Covid-19 yang berdampak terhadap ketidakpastian perekonomian dunia dan pertumbuhan ekonomi nasional tahun 2020, maka Pemerintah Pusat mengambil kebijakan sehingga tema pembangunan RKP 2021 diarahkan kepada proses pemulihan pembangunan nasional yang terdampak pandemic Covid-19, sehingga tema pembangunan RKP 2021 yang diangkat dan disampaikan saat Musrenbang Nasional adalah **“Mempercepat Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Sosial”**, dengan fokus pembangunan pada pemulihan industri, pariwisata, dan investasi; reformasi sistem kesehatan nasional; reformasi sistem perlindungan sosial; dan reformasi sistem ketahanan bencana.

Sasaran pembangunan nasional tahun 2021 diambil berdasarkan visi presiden 2020-2024 “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong” dan tema RKP 2021 “Mempercepat Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Sosial”. Sasaran pembangunan nasional tahun 2021 diarahkan untuk mencapai sasaran utama yang mencakup sasaran makro ekonomi khususnya perekonomian nasional yang terdampak pandemi Covid-19, pembangunan manusia dan masyarakat, dimensi pemerataan, kualitas



lingkungan hidup, pertumbuhan industri, dan pembangunan pariwisata dengan indikator pembangunan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 4.1
Indikator Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2021

| No | Indikator Pembangunan | Target 2021 |
|----|--|---------------|
| 1 | Pertumbuhan Ekonomi (%) | 4,5 – 5,5 |
| 2 | Tingkat Pengangguran Terbuka (%) | 7,5 – 8,2 |
| 3 | Tingkat Kemiskinan (%) | 9,2 – 9,7 |
| 4 | Rasio Gini (Indeks) | 0,377 – 0,379 |
| 5 | Indeks Pembangunan Manusia (IPM) | 72,78 – 72,90 |
| 6 | Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (%) | 23,55 – 24,14 |
| 7 | Pertumbuhan PDB Industri Pengolahan (%) | 3,14 – 4,26 |
| 8 | Pertumbuhan PDB Industri Pengolahan Nonmigas (%) | 3,35 – 4,21 |
| 9 | Kontribusi PDB Pariwisata (%) | 4,20 |

Sumber : Rancangan Awal RKP 2021

4.1.2 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2021

Tujuan pembangunan daerah Kota Sawahlunto sejalan dengan Visi Pemerintah Kota Sawahlunto Tahun 2018-2023 adalah : **“Dengan Kebersamaan Kita Wujudkan Sawahlunto Sebagai Kota Wisata Yang Kreatif, Inovatif, Unggul, Bermartabat, Berkeadilan Dan Sejahtera”**

Dalam upaya mewujudkan visi tersebut di atas diperlukan **Misi** Pembangunan Daerah yang telah kami susun untuk periode 2018 – 2023 adalah sebagai berikut :

1. Menciptakan Kehidupan Beragama dan Budaya Yang Semakin Baik.
2. Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat dan Pengembangan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Ekonomi Kreatif serta Mengadakan Pelatihan melalui BLK.
3. Mewujudkan Pendidikan yang Berkualitas untuk Menghasilkan Sumber Daya Manusia yang Beriman, Kreatif dan Berdaya Saing (Dengan Memberikan Beasiswa atau Kartu Sawahlunto Pintar).
4. Menghadirkan Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Inovatif.
5. Meningkatkan Pelayanan Kesehatan yang Bermutu dengan Memberikan Jaminan Kesehatan untuk Seluruh Masyarakat.
6. Mengembangkan Potensi Wisata secara Serius dan Berkelanjutan.
7. Tersedianya Infrastruktur Publik yang Merata dan Memadai.
8. Penanganan Khusus terhadap Kelompok Marginal seperti Lansia, Penyandang Disabilitas, Gangguan Jiwa dan Kelompok Marginal Lainnya.
9. Mewujudkan Kota Berbasis Smart City dalam Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Daya Tarik Investor.

Visi dan misi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Sawahlunto tersebut sepenuhnya mendukung tercapainya target Visi dan Misi Pemerintah Provinsi dan Nasional. Secara lebih terfokus, berikut disajikan tabel persandingan



Visi dan Misi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Sawahlunto dengan Visi dan Misi Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Sumatera Barat dan Nasional.

Tabel 4.2
Persandingan Visi Dan Misi RPJMD Kota Sawahlunto
Dengan Visi Dan Misi Provinsi Sumatera Barat Dan Nasional

| No | RPJMN 2020-2024 | No | RPJMD 2016-2021 PROVINSI SUMATERA BARAT | No | RPJMD 2018-2023 KOTA SAWAHLUNTO |
|----|---|----|---|----|---|
| | VISI | | VISI | | VISI |
| | Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong | | Terwujudnya Sumatera Barat Madani dan Sejahtera | | Dengan Kebersamaan Kita Wujudkan Sawahlunto Sebagai Kota Wisata Yang Kreatif, Inovatif, Unggul, Bermartabat, Berkeadilan dan Sejahtera |
| | MISI | | MISI | | MISI |
| 1 | Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia | 1 | Meningkatkan Tata Kehidupan yang Harmonis, Agamais, Beradat & Berbudaya Berdasarkan Falsafah Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah | 1 | Menciptakan Kehidupan Beragama dan Budaya yang Semakin Baik. |
| 2 | Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing | 2 | Meningkatkan Tata Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Profesional | 2 | Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat dan Pengembangan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Ekonomi Kreatif serta Mengadakan Pelatihan melalui BLK. |
| 3 | Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan | 3 | Meningkatkan Sumberdaya Manuasia yang Cerdas, Sehat, Beriman, Berkarakter dan Berkualitas Tinggi | 3 | Mewujudkan Pendidikan yang Berkualitas untuk Menghasilkan Sumber Daya Manusia yang Beriman, Kreatif dan Berdaya Saing |
| 4 | Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan | 4 | Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Kerakyatan yang Tangguh, Produktif dan Berdaya Saing Regional dan Global, menjadikan Sumbar sebagai Destinasi Pariwisata Unggulan serta Meningkatkan Pemanfaatan SDA dan Potensi Daerah untuk Kesejahteraan Rakyat | 4 | Menghadirkan Pemerintahan yang Baik, Bersih Dan Inovatif |



| No | RPJMN 2020-2024 | No | RPJMD 2016-2021 PROVINSI SUMATERA BARAT | No | RPJMD 2018-2023 KOTA SAWAHLUNTO |
|----|--|----|---|----|--|
| 5 | Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa | 5 | Meningkatkan Infrastruktur dan Pembangunan yang Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan | 5 | Meningkatkan Pelayanan Kesehatan yang Bermutu dengan Memberikan Jaminan Kesehatan Untuk Seluruh Masyarakat. |
| 6 | Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya | | | 6 | Mengembangkan Potensi Wisata Secara Serius dan Berkelanjutan |
| 7 | Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga | | | 7 | Tersedianya Infrastruktur Publik yang Merata dan Memadai. |
| 8 | Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya | | | 8 | Penanganan Khusus terhadap Kelompok Marginal seperti Lansia, Penyandang Disabilitas, Gangguan Jiwa dan Kelompok Marginal Lainnya |
| 9 | Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan | | | 9 | Mewujudkan Kota Berbasis Smart City dalam Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Daya Tarik Investor |

Untuk mewujudkan Visi melalui pelaksanaan Misi yang telah ditetapkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Sawahlunto Tahun 2018-2023 maka dirumuskan tujuan dan sasaran yang diuraikan pada masing-masing misi sebagaimana terlihat pada tabel berikut :

Tabel 4.3
Hubungan antara Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan

| VISI : DENGAN KEBERSAMAAN KITA WUJUDKAN SAWAHLUNTO SEBAGAI KOTA WISATA YANG KREATIF, INOVATIF, UNGGUL, BERMARTABAT, BERKEADILAN DAN SEJAHTERA | | | | | |
|--|---|----|--|----|--|
| NO | MISI | NO | TUJUAN | NO | SASARAN |
| 1 | Menciptakan Kehidupan beragama dan budaya yang semakin baik | 1 | Mewujudkan kehidupan masyarakat yang agamis | 1 | Terwujudnya aktivitas kehidupan masyarakat yang religius |
| | | | | 2 | Tersedianya sarana peribadatan dan pendidikan agama yang berkualitas |
| | | 2 | Melestarikan budaya dan tradisi yang menjadi karakter kota | 1 | Meningkatnya profesionalisme, aktivitas dan ekspresi seni dan budaya Kota Sawahlunto |
| | | | | 2 | Meningkatnya budaya asli sawahlunto yang lestari |



| VISI : DENGAN KEBERSAMAAN KITA WUJUDKAN SAWAHLUNTO SEBAGAI KOTA WISATA YANG KREATIF, INOVATIF, UNGGUL, BERMARTABAT, BERKEADILAN DAN SEJAHTERA | | | | | |
|--|---|-----------|---|-----------|--|
| NO | MISI | NO | TUJUAN | NO | SASARAN |
| 2 | Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat dan Pengembangan Ekonomi Kerakyatan berbasis ekonomi kreatif serta mengadakan Pelatihan melalui BLK | 1 | Meningkatkan kualitas perekonomian masyarakat berbasis ekonomi kerakyatan | 1 | Tersedianya tenaga kerja yang terampil dan produktif |
| | | | | 2 | Terwujudnya Daya Saing Produk unggulan masyarakat berbasis industri kreatif yang menunjang kepariwisataan |
| | | | | 3 | Meningkatnya Aktivitas Perekonomian Masyarakat |
| | | | | 4 | Meningkatnya produksi sektor pertanian dan perikanan |
| 3 | Mewujudkan Pendidikan Yang Berkualitas Untuk Menghasilkan Sumber Daya Manusia Yang Beriman, Kreatif Dan Berdaya Saing (Dengan Memberikan Beasiswa Atau Kartu Sawahlunto Pintar) | 1 | Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia di Kota Sawahlunto | 1 | Tersedianya Pelayanan Pendidikan yang berkualitas |
| | | | | 2 | Meningkatnya kualitas pendidikan yang berlandaskan nilai-nilai agama, etika, moral dan karakter diseluruh jenjang pendidikan |
| 4 | Menghadirkan Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Inovatif | 1 | Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan inovatif | 1 | Tersedianya Perencanaan Pembangunan yang berkualitas |
| | | | | 2 | Terwujudnya pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel |
| | | | | 3 | Terwujudnya Tata Kelola Penyelenggaraan dan Pengawasan Pemerintahan yang baik |
| | | | | 4 | Terwujudnya hubungan yang harmonis antara DPRD dengan pemerintah daerah |
| | | | | 5 | Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat |
| | | 2 | Meningkatkan nilai wawasan kebangsaan, ketentraman dan ketertiban umum masyarakat Kota Sawahlunto | 6 | Menurunnya tingkat gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat di Kota Sawahlunto |
| 5 | Meningkatkan Pelayanan Kesehatan Yang Bermutu Dengan Memberikan Jaminan Kesehatan Untuk Seluruh Masyarakat | 1 | Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia di Kota Sawahlunto | 1 | Meningkatnya kualitas Kesehatan Masyarakat |
| | | | | 2 | Meningkatnya kualitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat |
| 6 | Mengembangkan Potensi Wisata Secara Serius Dan Berkelanjutan | 1 | Meningkatkan kunjungan wisatawan ke Kota Sawahlunto | 1 | Tersedianya destinasi wisata yang nyaman untuk dikunjungi |
| | | | | 2 | Berkembangnya industri pariwisata yang berdaya saing |
| | | | | 3 | Tersedianya informasi kepariwisataan yang berkualitas |
| | | | | 4 | Tersedianya kelembagaan kepariwisataan yang profesional |



| VISI : DENGAN KEBERSAMAAN KITA WUJUDKAN SAWAHLUNTO SEBAGAI KOTA WISATA YANG KREATIF, INOVATIF, UNGGUL, BERMARTABAT, BERKEADILAN DAN SEJAHTERA | | | | | |
|--|--|-----------|--|-----------|---|
| NO | MISI | NO | TUJUAN | NO | SASARAN |
| 7 | Tersedianya Infrastruktur Publik Yang Merata Dan Memadai | 1 | Menyediakan infrastruktur kota berkualitas dan berwawasan lingkungan | 1 | Tersedianya Sarana dan Prasarana Kota yang merata dan memadai |
| | | | | 2 | Meningkatnya kesiagaan kota dalam antisipasi dan penanggulangan bencana |
| | | | | 3 | Meningkatnya kualitas lingkungan hidup |
| | | | | 4 | Meningkatnya kualitas perumahan dan permukiman |
| 8 | Penanganan Khusus Terhadap Kelompok Marginal Seperti Lansia, Penyandang Disabilitas, Gangguan Jiwa Dan Kelompok Marginal Lainnya | 1 | Mewujudkan keadilan sosial bagi disabilitas, lansia, gangguan jiwa dan kelompok marginal lainnya | 1 | Terwujudnya keadilan pembangunan bagi lansia, penyandang disabilitas, gangguan jiwa dan penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya |
| | | | | 2 | Terwujudnya keadilan dan kesetaraan gender dalam pembangunan |
| 9 | Mewujudkan Kota berbasis Smart City dalam peningkatan kualitas Pelayanan Publik dan Daya Tarik Investor | 1 | tersedianya iklim investasi yang kondusif | 1 | meningkatnya kualitas smartcity dalam menarik investor |



4.2 PRIORITAS PEMBANGUNAN TAHUN 2021

Dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2021, prioritas pembangunan daerah lebih disinergikan dengan Prioritas Pembangunan Nasional yang ditetapkan dalam RPJMN 2020-2024 dan Perkembangan Pasca Pandemi Covid-19.

4.2.1 Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2021

Dalam RPJMN 2020-2024 dan RKP 2021 sudah ditetapkan tujuh agenda pembangunan nasional yang juga sekaligus Prioritas Nasional sebagai berikut:

1. PN 1: Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan;
2. PN 2: Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan;
3. PN 3: Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing;
4. PN 4: Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;
5. PN 5: Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar;
6. PN 6: Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim;
7. PN 7: Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik.

Dari 7 (tujuh) prioritas pembangunan nasional tersebut di atas, pemerintah melakukan penekanan lebih terhadap PN 1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan, PN 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing, PN 5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan elayanan Dasar, PN 6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim.

Pemerintah juga telah menentukan arah kebijakan untuk masing-masing prioritas pembangunan nasional tahun 2021 secara rinci sebagai berikut:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan.

Kebijakan pembangunan ekonomi diarahkan untuk memperkuat ketahanan ekonomi di tengah kondisi ekonomi global yang berjalan lambat akibat pandemi COVID-19. Pelaksanaannya diantaranya melalui: menjalankan Program Ketersediaan Akses dan Kualitas Pangan; penguatan penyediaan energi yang terjangkau; penguatan daya saing industri melalui peningkatan akses ke pasar ekspor; pemulihan pariwisata nasional dengan meningkatkan konektivitas, perluasan pemasaran, serta diversifikasi destinasi pariwisata; dan, penguatan dukungan kepastian usaha, perluasan investasi, serta efisiensi distribusi dan perdagangan.

2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan.

Kebijakan pengembangan wilayah untuk mengurangi kesenjangan tahun 2021 diarahkan untuk mempercepat pemulihan dampak pandemi Covid-19, melanjutkan transformasi sosial ekonomi, mengoptimalkan keunggulan kompetitif wilayah, dan meningkatkan pemerataan kualitas hidup antarwilayah. Prioritas pengembangan wilayah difokuskan pada perwujudan kerja sama



investasi, perdagangan dan investasi sektor-sektor industri dan pariwisata wilayah timur, dengan tetap menjaga daya saing sektor perkebunan, perikanan, pertanian, serta potensi pertumbuhan wilayah barat.

3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing.

Kebijakan peningkatan SDM berkualitas dan berdaya saing tahun 2021 diarahkan pada pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan; penguatan pelaksanaan perlindungan sosial melalui integrasi program bantuan sosial; peningkatan pelayanan kesehatan dan penguatan health security; peningkatan pemerataan layanan berkualitas; penyediaan dan pengembangan teknologi digital untuk mendukung pembelajaran virtual; peningkatan kualitas anak, perempuan dan pemuda; perluasan akses dan ketahanan ekonomi penduduk miskin, rentan, dan terdampak Covid-19 terhadap aset produktif; serta peningkatan produktivitas dan daya saing angkatan kerja, dengan mengutamakan perlindungan bagi pekerja dan pencari kerja yang terdampak pandemi Covid-19.

4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan.

Kebijakan revolusi mental dan pembangunan kebudayaan tahun 2021 diarahkan untuk mempercepat pemulihan pembangunan pascapandemi Covid-19 melalui perluasan pusat-pusat gerakan revolusi mental untuk mewujudkan Indonesia melayani, bersih, tertib, mandiri, dan bersatu; pembangunan ekosistem kebudayaan yang berkelanjutan; peningkatan pemahaman dan pengamalan nilai ajaran agama yang dapat saling menghormati agama/keyakinan yang lain, inklusif, dan toleran; serta pengembangan layanan literasi berbasis inklusi sosial untuk meningkatkan kemampuan literasi masyarakat.

5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar.

Kebijakan pembangunan infrastruktur untuk ekonomi dan pelayanan dasar tahun 2021 diarahkan untuk pemulihan pascapandemi Covid-19 yaitu pemulihan akses masyarakat terhadap perumahan dan permukiman layak dan aman; peningkatan layanan pengelolaan air tanah dan air baku berkelanjutan; peningkatan layanan keselamatan dan keamanan transportasi; peningkatan ketahanan infrastruktur; optimalisasi waduk multiguna dan modernisasi irigasi; peningkatan konektivitas wilayah; pengembangan angkutan umum massal di enam kota metropolitan; peningkatan akses dan pasokan energi dan tenaga listrik; pembangunan dan pemanfaatan infrastruktur TIK dan kontribusi sektor informasi dan komunikasi dalam pertumbuhan ekonomi; serta optimalisasi strategi investasi badan usaha dan pengembangan metode-metode peningkatan kualitas perencanaan, penyiapan, pelaksanaan dan pemeliharaan proyek infrastruktur.

6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim.

Kebijakan untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan terhadap dampak bencana nonalam seperti pandemi Covid-19, serta perubahan iklim tahun 2021, diarahkan untuk: penguatan upaya pencegahan, penanggulangan, pemulihan terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup; penguatan sistem dan respon peringatan dini bencana alam (fokus pada bencana geologi tektonik dan vulkanik, bencana hidrometeorologi, dan bencana lingkungan) dan bencana nonalam (fokus pada kesiapsiagaan dalam pencegahan penyebaran pandemi penyakit); serta peningkatan capaian penurunan emisi dan



intensitas emisi GRK, dengan fokus penurunan emisi GRK pada sektor lahan, industri, dan energi.

7. Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik.

Kebijakan stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik tahun 2021 diarahkan untuk mendukung pemulihan pembangunan pascapandemi Covid-19 dalam upaya mewujudkan situasi kondusif melalui penegakan hukum dan penciptaan keamanan (law and order). Kebijakan ini diantaranya dilaksanakan melalui: penguatan perlindungan WNI di luar negeri; intensifikasi kerjasama pembangunan internasional; penguatan sinergitas, sinkronisasi, dan pemerataan informasi berkeadilan; pemulihan kinerja pelayanan publik; serta peningkatan Operasi Militer Selain Perang (OMSP) penanggulangan bencana serta kontingensi dalam rangka pemulihan pascapandemi Covid-19.

4.2.2 Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021

Dalam RPJMD Provinsi Sumatera Barat 2016-2021 dan RKPD Provinsi Sumatera Barat 2021 sudah ditetapkan 10 (sepuluh) Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat sebagai berikut:

1. Prioritas 1: Pembangunan mental dan pengamalan agama dan Adat Basandi Syarak-Syarak Basandi Kitabullah dalam Kehidupan Masyarakat. Prioritas ini memiliki Gerakan Terpagu Pengamalan Nilai-nilai Agama dan Pelestarian serta Aplikasi Adat Basandi Syarak-Syarak Basandi Kitabullah;
2. Prioritas 2: Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan. Prioritas ini memiliki Gerakan Terpadu Reformasi Birokrasi Pemerintah;
3. Prioritas 3: Peningkatan Pemerataan dan Kualitas Pendidikan. Prioritas ini memiliki Gerakan Terpadu Peningkatan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
4. Prioritas 4: Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat. Prioritas ini memiliki Gerakan Terpadu yang sama dengan Prioritas 4 yaitu Gerakan Terpadu Peningkatan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
5. Prioritas 5: Peningkatan Produksi untuk Mendukung Kedaulatan Pangan Nasional dan Pengembangan Agribisnis. Prioritas ini memiliki Gerakan Terpadu Pensejahteraan Petani;
6. Prioritas 6: Pengembangan Pariwisata Industri, Perdagangan, Koperasi dan Investasi. Prioritas ini ada 2 Gerakan Terpadu yaitu Gerakan Terpadu Pengembangan Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil dan Gerakan Terpadu Pengembangan Kepariwisata;
7. Prioritas 7: Peningkatan Pemanfaatan Potensi Kemaritiman dan Kelautan. Prioritas ini memiliki Gerakan Terpadu Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (GPEMP);
8. Prioritas 8: Penurunan Tingkat Kemiskinan, Pengangguran, Daerah Tertinggal. Prioritas ini memiliki Gerakan Terpadu Pemberdayaan Fakir Miskin;
9. Prioritas 9: Pengembangan Sumber Energi Baru dan Terbarukan serta Pembangunan Infrastruktur. Prioritas ini memiliki Gerakan Terpadu Sumbar Bersih dan Pembangunan Berkelanjutan;
10. Prioritas 10: Pelestarian Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana Alam. Prioritas ini memiliki Gerakan Terpadu yang sama dengan Prioritas 9 yaitu Gerakan Terpadu Sumbar Bersih dan Pembangunan Berkelanjutan.



4.2.3 Prioritas Pembangunan Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2021

Penentuan prioritas pembangunan daerah Kota Sawahlunto tahun 2021 dilakukan dengan mempertimbangkan dan didasari beberapa hal sebagai berikut :

1. Hasil evaluasi kinerja pembangunan daerah Kota Sawahlunto tahun 2019;
2. Prioritas Pembangunan Nasional yang dijabarkan dalam tujuh agenda pembangunan nasional tahun 2021 beserta arah kebijakannya;
3. Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2021;
4. Sasaran dan Arah Kebijakan Periode Ketiga Pembangunan yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2018-2023.

Pada Musrenbang RKPD 2021 Kota Sawahlunto sudah disampaikan oleh Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Barenlitbangda) Kota Sawahlunto ada 8 (delapan) Prioritas Pembangunan Daerah Kota Sawahlunto tahun 2021, sebagai berikut:

1. Prioritas 1 : Optimalisasi Status **WTBOS** sebagai Warisan Dunia dan Geopark Nasional Sawahlunto untuk Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat;
2. Prioritas 2 : Peningkatan Kesadaran dan Peranserta Masyarakat dalam Penanganan Kesehatan Keluarga, Gizi Masyarakat, Penyakit Menular, dan Kesehatan Lingkungan secara Bertahap dan Berkesinambungan serta Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan;
3. Prioritas 3 : Peningkatan Kualitas Produk dan Komoditi Unggulan Daerah serta Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja;
4. Prioritas 4 : Penyediaan Pelayanan, Sarana dan Prasarana Pendidikan, serta Tenaga Pendidik yang Berkualitas, Terjangkau dan Merata;
5. Prioritas 5 : Peningkatan Kualitas Perencanaan, Penyelenggaraan, Pengawasan dan Pelaporan Pembangunan di Tingkat Kota, Perangkat Daerah dan Pemerintah Terdepan;
6. Prioritas 6 : Peningkatan Kualitas dan Daya Tarik Destinasi serta Promosi Wisata;
7. Prioritas 7 : Penyediaan Infrastruktur yang Menjamin Pembangunan Berkelanjutan;
8. Prioritas 8 : Penerapan Sistem Pengelolaan Pemerintah Berbasis Teknologi Informasi dan Industrialisasi 4.0.

Untuk melaksanakan Prioritas Pembangunan Daerah Kota Sawahlunto tahun 2021 Pemerintah Kota juga telah menetapkan arah kebijakan untuk masing-masing prioritas pembangunan daerah tahun 2021 yang disandingkan dengan Misi RPJMD Kota Sawahlunto 2018-2023 secara rinci pada tabel berikut:



Tabel 4.4
Persandingan Misi, Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Daerah
Kota Sawahlunto Tahun 2021

| NO | MISI | ARAH KEBIJAKAN | PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH | KET |
|-----------|---|--|---|--------------------|
| 1 | Menciptakan Kehidupan Beragama Dan Budaya Yang Semakin Baik | <ol style="list-style-type: none">1. Optimalisasi Status Warisan Tambang Batubara Ombilin Sawahlunto untuk peningkatan kesejahteraan dan ekonomi masyarakat;2. Melengkapi seluruh catatan rekomendasi penetapan Warisan Tambang Batubara Ombilin Sawahlunto;3. Meningkatkan SDM pelaku seni dan budaya daerah;4. Menyediakan sarana dan prasarana yang memadai bagi pengembangan, pendalaman dan pagelaran seni dan karya budaya;5. Memfasilitasi para pelaku seni dalam pengembangan kualitas karya budaya, kreativitas, dan produktivitas;6. Melakukan pelestarian dan revitalisasi cagar budaya dan penataan museum;7. Pemandirian kelembagaan pengelola cagar budaya;8. Meningkatkan dukungan terhadap pengelolaan dan pemugaran cagar budaya dan revitalisasi Rumah Adat;9. Mendorong peningkatan kunjungan wisata religi;10. Memperkuat citra dan komitmen daerah menjadi kota pusaka dan kota warisan dunia melalui perpaduan dan promosi di Objek wisata rekreasi dan hiburan;11. Meningkatkan kerjasama tingkat regional, nasional dan internasional dalam rangka penguatan status kota pusaka;12. Mengintegrasikan pendidikan budaya daerah kedalam kurikulum Muatan Lokal dalam pendidikan;13. Meningkatkan kuantitas dan kualitas serta kesejahteraan pengelola rumah ibadah, penyuluh agama, tokoh agama, lembaga sosial keagamaan, dan media massa dalam melakukan bimbingan keagamaan;14. Meningkatkan Aktivitas-aktivitas keagamaan disetiap Desa/Kelurahan bagi masyarakat;15. Meningkatkan kualitas dan kuantitas guru-guru mengaji dan pembina rumah tahfidz; | Optimalisasi Status WTBOS sebagai Warisan Dunia dan Geopark Nasional Sawahlunto untuk Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat | Prioritas 1 |



| NO | MISI | ARAH KEBIJAKAN | PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH | KET |
|----|---|---|--|--------------------|
| | | 16.Mendirikan pondok-pondok dan rumah tahfidz setiap Kecamatan; 17.Menyediakan sarana dan prasarana peribadatan dan pendidikan keagamaan yang berkualitas; 18.Menyediakan dan meningkatkan kualitas imam di masjid-masjid yang berkualitas setara Lc. | | |
| 2 | Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat dan Pengembangan Ekonomi Kerakyatan Berbasis ekonomi Kreatif serta Mengadakan Pelatihan melalui BLK | 1. Melengkapi sarana dan prasarana Balai Latihan Kerja yang berkualitas dan sesuai standar; 2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelatihan keterampilan calon tenaga kerja dengan instruktur yang handal dan profesional; 3. Mengembangkan kemitraan antara pemerintah dengan dunia usaha/industri untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja melalui pengembangan standar kompetensi dan sertifikasi/uji kompetensi oleh pihak pengguna (asosiasi industri/profesi) bersama lembaga sertifikasi profesi berlisensi; 4. Melakukan monitoring dan pendampingan terhadap calon tenaga kerja yang sudah terlatih dalam membuka peluang usaha sendiri; 5. Meningkatkan akses, kualitas, dan relevansi pendidikan dan pelatihan keterampilan kerja; 6. Melakukan kerjasama magang ke daerah lain dan luar negeri dengan konsep saling menguntungkan; 7. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelatihan keterampilan pelaku industri dengan instruktur yang handal dan profesional; 8. Menyediakan sarana dan prasarana teknologi industri; 9. Memfasilitasi bantuan permodalan dan bantuan pendampingan management usaha mulai dari hilir sampai hulu (pemasaran) bagi pelaku industri; 10.Memfasilitasi pembiayaan UMK di berbagai sektor potensial bekerjasama dengan berbagai lembaga badan usaha seperti BUMD maupun BUMDes di Kota Sawahlunto; 11.Mengoptimalkan dan memantapkan Penataan pasar tradisional yang | Peningkatan Kualitas Produk dan Komoditi Unggulan Daerah serta Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja | Prioritas 3 |



| NO | MISI | ARAH KEBIJAKAN | PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH | KET |
|----|---|---|--|--------------------|
| | | <p>tertib, teratur, aman, bersih dan sehat sehingga dapat menjadi penggerak roda perekonomian daerah;</p> <p>12. Menciptakan ruang-ruang ekonomi yang memfasilitasi ekonomi tradisional dan penataan Pedagang Kaki Lima (PKL);</p> <p>13. Pembentukan dan pengembangan BLUD dana bergulir;</p> <p>14. Meningkatkan pengetahuan, pembinaan dan motivasi bagi masyarakat pelaku usaha dan kegiatan jasa perdagangan, UMKM dan Industri kreatif terkait penggunaan teknologi, kemudahan akses pemasaran dan permodalan;</p> <p>15. Melakukan Revitalisasi tanaman coklat dan peningkatan jumlah, dan kapasitas penyuluh serta meningkatkan sumberdaya petani dan peternak;</p> <p>16. Melakukan Revitalisasi tanaman pertanian dan peningkatan jumlah, dan kapasitas penyuluh serta meningkatkan sumberdaya petani dan peternak;</p> <p>17. Memfasilitasi bantuan bibit tanaman, bibit ternak dan bibit ikan kepada masyarakat;</p> <p>18. Meningkatkan kualitas dan ketersediaan sarana prasarana dan teknologi pertanian dan perikanan serta meningkatkan kualitas sistem pengairan dan irigasi;</p> <p>19. Meningkatkan aksesibilitas petani terhadap sumber-sumber pembiayaan melalui penyediaan skim kredit yang mudah diakses oleh petani dan pelaku usaha pertanian dan perikanan;</p> <p>20. Mengembangkan dan meningkatkan agroindustri dan agrowisata didaerah-daerah potensial;</p> <p>21. Meningkatkan Ketersediaan dan keamanan pangan;</p> <p>22. Memperkuat kemitraan antara petani dengan pelaku/pengusaha pengolahan dan pemasaran.</p> | | |
| 3 | Mewujudkan Pendidikan yang Berkualitas untuk Menghasilkan | <p>1. Menyediakan jaminan pendidikan gratis 9 tahun melalui Kartu Sawahlunto Pintar atau sejenis;</p> <p>2. Meningkatkan kualitas pendidikan luar sekolah dan mengoptimalkan</p> | Penyediaan Pelayanan, Sarana dan Prasarana Pendidikan, serta | Prioritas 4 |



| NO | MISI | ARAH KEBIJAKAN | PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH | KET |
|----|---|---|--|--------------------|
| | Sumber Daya Manusia yang Beriman, Kreatif dan Berdaya Saing (Dengan memberikan Beasiswa atau Kartu Sawahlunto Pintar) | fungsi SKB; 3. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana penunjang pendidikan dengan konsep millennial, nyaman dan menyenangkan secara merata (Pendidikan Digital); 4. Meningkatkan kerjasama dengan Perguruan Tinggi/Universitas favorit untuk mempermudah akses lulusan untuk melanjutkan pendidikan termasuk pendirian kampus di Kota Sawahlunto; 5. menyediakan beasiswa dan reward bagi siswa dan mahasiswa tidak mampu serta siswa dan mahasiswa berprestasi. | Tenaga Pendidik yang Berkualitas, Terjangkau dan Merata | |
| 4 | Menghadirkan Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Inovatif | 1. Memperkuat kelembagaan dan manajemen pelayanan yang terintegrasi dengan pemanfaatan teknologi informasi 2. Meningkatkan kualitas ASN yang bersih dan inovatif 3. Mengembangkan sistem perencanaan, penganggaran, monitoring dan evaluasi berbasis teknologi informasi yang terintegrasi 4. Membangun mengembangkan sistem pengukuran kinerja aparatur yang dapat dinilai dan diawasi secara mudah dan aktual berbasis teknologi informasi 5. Menempatkan pegawai sesuai dengan kompetensi dan keahliannya 6. Meningkatkan kualitas pelayanan pada pemerintahan terdepan (Pemerintahan Desa dan Kelurahan) 7. Mendorong peningkatan kapasitas pengelolaan BUMD. | Peningkatan Kualitas Perencanaan, Penyelenggaraan, Pengawasan dan Pelaporan Pembangunan di Tingkat Kota, Perangkat Daerah dan Pemerintah Terdepan | Prioritas 5 |
| 5 | Meningkatkan Pelayanan Kesehatan yang Bermutu dengan Memberikan Jaminan Kesehatan untuk Seluruh Masyarakat | 1. memberikan fasilitas dan insentif khusus bagi dokter spesialis untuk menjamin kenyamanannya dalam bekerja di Sawahlunto; 2. Menyusun, menetapkan dan melaksanakan berbagai standard guideline pelayanan kesehatan yang diikuti dengan pengembangan sistem monitoring dan evaluasinya; 3. Peningkatan pelayanan kesehatan promotif dan preventif di fasilitas pelayanan kesehatan dasar dengan dukungan bantuan operasional | Peningkatan Kesadaran dan Peranserta Masyarakat dalam Penanganan Kesehatan Keluarga, Gizi Masyarakat, Penyakit Menular, dan Kesehatan Lingkungan secara Bertahap | Prioritas 2 |



| NO | MISI | ARAH KEBIJAKAN | PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH | KET |
|----|--|---|--|--------------------|
| | | kesehatan; 4. Penurunan Stunting setiap secara merata dan komprehensif; 5. Menjamin kesehatan masyarakat melalui jaminan kesehatan 100 % dan kerjasama para pihak; 6. Meningkatkan kualitas dan kuantitas promosi perilaku masyarakat tentang kesehatan badan, kesehatan lingkungan, gizi, sanitasi yang baik, hygiene, dan pola asuh anak yang baik. | dan Berkesinambungan serta Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan | |
| 6 | Mengembangkan Potensi Wisata secara Serius dan Berkelanjutan | 1. Menumbuhkembangkan destinasi dan atraksi wisata sesuai potensi daerah; 2. Mengintegrasikan pengelolaan objek wisata rekreasi dan objek wisata tambang dan kota tua, wisata olahraga dan minat khusus; 3. Mengembangkan suatu kawasan sentral objek wisata kota Sawahlunto yang terfokus; 4. Melakukan penataan kawasan Geopark Kota Sawahlunto sebagai destinasi wisata dan mewujudkan UNESCO Global Geopark Sawahlunto; 5. Mengoptimalkan status Geopark nasional Sawahlunto sebagai daya tarik wisatawan; 6. Mewujudkan pengembangan ekonomi kreatif yang profesional; 7. Menyediakan fasilitas wisata dan taman bermain bagi anak berkebutuhan khusus, penyandang disabilitas, dan kelompok marginal lainnya. | Peningkatan Kualitas dan Daya Tarik Destinasi serta Promosi Wisata | Prioritas 6 |
| 7 | Tersedianya Infrastruktur Publik yang Merata dan Memadai | 1. Menyediakan infrastruktur jalan dan Jembatan yang mantap dalam menunjang peningkatan perekonomian daerah; 2. Melakukan pembangunan jalan yang berkualitas dengan Kabupaten tetangga; 3. Menyelesaikan Pembangunan Jalan yang Berkualitas dari Pondok Kapur-Muaro Kalaban; 4. Meningkatkan Kualitas sarana dan prasarana Rest Area Muaro Kalaban agar lebih representatif; 5. Mempercepat proses penyelesaian kepemilikan tanah PT. BA, PT. KAI, Tanah Ulayat, Pemerintah Daerah dan masyarakat untuk memperjelas status | Penyediaan Infrastruktur yang Menjamin Pembangunan Berkelanjutan | Prioritas 7 |



| NO | MISI | ARAH KEBIJAKAN | PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH | KET |
|----|--|---|--|--------------------|
| | | <p>hukum kepemilikan tanah di Kota Sawahlunto;</p> <p>6. Membangun Jalan ke Sentra Produksi pertanian dan ekonomi kerakyatan lainnya;</p> <p>7. Meningkatkan dan memelihara Jaringan Irigasi agar jangkauan Pelayanan yang dapat dilakukan lebih luas;</p> <p>8. Melakukan rehab rumah tidak layak huni bagi masyarakat;</p> <p>9. Memperluas jangkauan, kuantitas, kualitas dan kontinuitas pelayanan air bersih dan sanitasi masyarakat;</p> <p>10. Meningkatkan kesiapsiagaan daerah dalam penanggulangan dan pengurangan resiko bencana;</p> <p>11. Meningkatkan kualitas dan kuantitas ruang terbuka hijau, hutan kota, dan taman kota untuk mendukung pariwisata.</p> | | |
| 8 | Penanganan Khusus terhadap Kelompok Marginal seperti Lansia, Penyandang Disabilitas, Gangguan Jiwa dan Kelompok Marginal Lainnya | <p>1. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan penanggulangan kemiskinan daerah;</p> <p>2. Memberikan bantuan dan fasilitasi permukiman, sandang, pendidikan dan kesehatan terhadap lansia, penyandang disabilitas, gangguan jiwa dan kelompok marginal lainnya;</p> <p>3. Menyediakan sarana dan prasarana infrastruktur yang ramah lansia, penyandang disabilitas, gangguan jiwa dan kelompok marginal lainnya.</p> | Peningkatan Kesadaran dan Peranserta Masyarakat dalam Penanganan Kesehatan Keluarga, Gizi Masyarakat, Penyakit Menular, dan Kesehatan Lingkungan secara Bertahap dan Berkesinambungan serta Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan | Prioritas 2 |
| 9 | Mewujudkan Kota Berbasis Smart City dalam Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Daya Tarik Investor | <p>1. Menyiapkan regulasi tentang tata kelola serta menyediakan dan meningkatkan teknologi informasi dan komunikasi pemerintah yang terintegrasi smart city;</p> <p>2. Menyediakan dan meningkatkan Kompetensi SDM bidang teknologi informasi;</p> <p>3. Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan (Penyediaan Mall Pelayanan</p> | Penerapan Sistem Pengelolaan Pemerintah Berbasis Teknologi Informasi dan Industrialisasi 4.0 | Prioritas 8 |



| NO | MISI | ARAH KEBIJAKAN | PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH | KET |
|----|------|--|------------------------------|-----|
| | | Publik); 4. Meningkatkan Koordinasi sampai kerjasama dengan perantau dalam membangun kota dan peningkatan ekonomi kota. | | |
| | | | | |

4.2.4 Program Prioritas Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2021

Agar prioritas pembangunan daerah dapat tercapai, maka perlu dukungan anggaran sesuai dengan program prioritas daerah, adapun program untuk mendukung prioritas pembangunan daerah sebagaimana tercantum dalam tabel 4.5

Tabel 4.5
Program Prioritas Pembangunan Daerah
Kota Sawahlunto Tahun 2021

| No | Prioritas/Program | Indikator Kinerja Program | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu indikatif | OPD Pelaksana |
|----------|---|--|------------------------|--------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Prioritas 1 : Optimalisasi Status WT BOS sebagai Warisan Dunia dan Geopark Nasional Sawahlunto untuk Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat | | | 4,017,564,250 | |
| 1 | PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN | Persentase Budaya Tak Benda Yang Lestari (%) | 22.2 | 1,274,191,000 | Dinas Kebudayaan, Peninggalan Bersejarah dan Permuseuman |
| 2 | PROGRAM PENGEMBANGAN Kesenian Tradisional | Persentase Kelompok Seni yang mandiri (%) | 13.3 | 411,375,000 | |
| 3 | PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH | Persentase Kelompok Masyarakat yang Mengetahui sejarah lokal (%) | 49 | 140,635,000 | |
| 4 | PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA | Persentase budaya benda yang lestari (%) | 57.18 | 1,457,082,500 | |
| 5 | PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN | Jumlah kunjungan museum (orang) | 31000 | 734,280,750 | |
| 2 | Prioritas 2 : Peningkatan Kesadaran dan Peranserta Masyarakat dalam Penanganan Kesehatan Keluarga, Gizi Masyarakat, Penyakit Menular, dan Kesehatan Lingkungan secara Bertahap dan Berkesinambungan serta Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan | | | 92,719,215,000 | |
| 1 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Persentase upaya kesehatan perorangan yang terpenuhi (%) | 90 | 48,893,639,000 | Rumah Sakit Umum Daerah |
| | | Persentase pelayanan kesehatan yang terlaksana (%) | 100 | 39,155,470,000 | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| 2 | PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN | Persentase ketersediaan tenaga kesehatan dan tenaga medis sesuai standar | 96 | 165,870,000 | |



| No | Prioritas/Program | Indikator Kinerja Program | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu indikatif | OPD Pelaksana | |
|----------|---|--|------------------------|--------------------------------|------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | |
| 3 | PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN | Persentase ketersediaan Farmalkes dan makmin (%) | 76 | 144,000,000 | Dinas Sosial, PMD, PPA | |
| 4 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN | Persentase UKBM yang Aktif (%) | 84 | 585,000,000 | | |
| 5 | PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK | Persentase Keluarga yang di petakan dan di data (%) | 100 | 35,000,000 | | |
| 6 | PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) | Persentase KB aktif (%) | 75 | 1,292,610,000 | | |
| 7 | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) | Jumlah Kelompok ketahanan keluarga yang dibina | 65 | 145,000,000 | | |
| 8 | PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL | Persentase PSM dan TKSK yang diberdayakan (%) | 100 | 291,765,000 | | |
| 9 | PROGRAM REHABILITASI SOSIAL | Persentase penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) yang terfasilitasi (%) | 100 | 950,908,500 | | |
| 10 | PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL | Persentase yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial (%) | 100 | 33,890,000 | | |
| 11 | PROGRAM PENGARUS UTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN | persentase pelaksanaan PUG dan PP (%) | 100 | 378,735,000 | | |
| 12 | PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN | | | | | |
| 13 | PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA | Persentase kualitas keluarga yang ditingkatkan (%) | 100 | 449,790,000 | | |
| 14 | PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK | Persentase sistem data gender dan anak yang dikelola (%) | 97 | 6,165,000 | | |
| 15 | PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) | Persentase pemenuhan hak anak (%) | 100 | 112,217,500 | | |
| 16 | PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK | Persentase perlindungan khusus bagi anak (%) | 100 | 79,155,000 | | |
| 3 | Prioritas 3 : Peningkatan Kualitas Produk dan Komoditi Unggulan Daerah serta Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja | | | 15,652,393,133 | | |
| 1 | PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA | PERSENTASE KEBUTUHAN DOKUMEN PERENCANAAN TENAGA KERJA YANG TERSEDIA (%) | 100 | 46,175,000 | | Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja |
| 2 | PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA | PERSENTASE ANGKATAN KERJA YANG BERKUALITAS (%) | 10 | 1,069,100,000 | | |



| No | Prioritas/Program | Indikator Kinerja Program | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu indikatif | OPD Pelaksana |
|----|---|---|------------------------|--------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 |
| 3 | PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA | TINGKAT PARTISIPASI ANGKATAN KERJA (%) | 73.68 | 266,325,000 | Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan |
| 4 | PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL | JUMLAH PERUSAHAAN YANG MEMILIKI LEMBAGA KERJASAMA BIPARTIT (PERUSAHAAN) | 10 | 47,940,000 | |
| 5 | PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN | Persentase Kecukupan Kebutuhan Pangan Pokok dari Bahan Pangan Pokok Lokal (%) | 70 | 18,725,000 | |
| 6 | PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT | Skor PPH Konsumsi | 86.6 | 496,040,000 | |
| 7 | PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN | Persentase Penurunan Jumlah Penduduk Rawan Pangan | 16 | 10,275,000 | |
| 8 | PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN | Persentase Tingkat Keamanan Produk Pangan Segar dan Produk Pangan Olahahan yang terdeteksi dari Cemarkan Mikroba, Bahan kimia /Berbahaya dan Residu Pestisida (%) | 90.14 | 45,000,000 | |
| 9 | PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA | Jumlah Produksi Ikan (ton) | 217 | 375,000,000 | |
| 10 | PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN | Tingkat Konsumsi Ikan (kg/kap/tahun) | 23.2 | 100,000,000 | |
| 11 | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN | Jumlah Produksi Padi (Ton GKG) | 14,700 | 3,789,500,000 | |
| | | Jumlah Produksi Karet (ton) | 1260 | | |
| | | Jumlah Produksi Kakao (ton) | 540 | | |
| | | Jumlah Produksi Daging Sapi (ton) | 353.68 | | |
| | | Jumlah Produksi Daging Ayam (ton) | 898.66 | | |
| | | Jumlah Produksi Telur (ton) | 134.86 | | |
| 12 | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN | Persentase Penambahan Sawah Beririgasi (%) | 5 | 4,203,000,000 | |
| 13 | PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER | Persentase Bahan Pangan Asal Hewan yang ASUH (%) | 90 | 440,000,000 | |
| 14 | PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN | Rasio Serangan OPT terhadap Luas Tanam (%) | 10 | 215,000,000 | |



| No | Prioritas/Program | Indikator Kinerja Program | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu indikatif | OPD Pelaksana |
|----------|---|--|------------------------|--------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 |
| 15 | PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN | Persentase Penyuluh yang Naik Jenjang | 5.55 | 560,000,000 | |
| | | Jumlah kelompok tani yang Naik Kelas sesuai Permentan | 5 | | |
| 16 | PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI | Persentase koperasi yang kelembagaan dan pengelolaan usahanya sesuai dengan peraturan perkoperasian. | 21 | 44,000,000 | Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan |
| 17 | PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI | Persentase Koperasi sehat (%) | 80 | 122,719,900 | |
| 18 | PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN | Persentase koperasi yang jumlah pengelolanya bersertifikat minimal 60% (%) | 30 | 145,420,000 | |
| 19 | PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) | Persentase UMKM yang memiliki izin usaha (%) | 47 | 89,622,500 | |
| 20 | PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM | Persentase UMKM yang meningkat skala usahanya (%) | 1.7 | 89,798,233 | |
| 21 | PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN | Persentase pasar rakyat dengan minimal tipe C (%) | 14 | 1,151,225,000 | |
| 22 | PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING | Jumlah omset dipasar-pasar tradisional Sawahlunto | 25837.33 | 46,000,000 | |
| 23 | PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR | Persentase produk unggulan yang diekspor (%) | 50 | 310,000,000 | |
| 24 | PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN | persentase pasar tradisional tertib ukur (%) | 30 | 34,700,000 | |
| 25 | PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI | Nilai produk lokal yang terjual (rupiah) | 7500000 0 | 253,700,000 | |
| 26 | PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI | Persentase IKM yang meningkat skala usahanya (%) | 1.8 | 1,458,127,500 | |
| 27 | PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA | persentase industri kecil dan menengah yang mempunyai izin (%) | 5 | 165,000,000 | |
| 28 | PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL | Persentase IKM yang terpublis (%) | 80 | 60,000,000 | |
| 4 | Prioritas 4 : Penyediaan Pelayanan, Sarana dan Prasarana Pendidikan, serta Tenaga Pendidik yang Berkualitas, Terjangkau dan Merata | | | 25,296,788,720 | |
| 1 | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | APK TK (%) | 99,9 | 23,201,629,720 | Dinas Pendidikan |
| | | APK SD (%) | 109,8 | | |



| No | Prioritas/Program | Indikator Kinerja Program | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu indikatif | OPD Pelaksana |
|----------|--|---|------------------------|--------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 |
| | | APK SMP (%) | 104,75 | | |
| | | APM SD (%) | 96,8 | | |
| | | APM SMP (%) | 79,69 | | |
| 2 | PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN | persentase pendidik dan tenaga kependidikan yang mengikuti pelatihan (%) | 100 | 1,175,659,000 | |
| 3 | PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN | Jumlah kunjungan ke Perpustakaan Umum (orang) | 66000 | 568,000,000 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan |
| | | Persentase nilai budaya baca masyarakat (%) | 80 | | |
| 4 | PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO | Jumlah koleksi naskah nasional dan naskah kuno yang dilestarikan | 4 | 10,000,000 | |
| 5 | PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP | Jumlah Arsip yang dikelola (lembar) | 4000 | 217,500,000 | |
| 6 | PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP | Jumlah Arsip yang terselamatkan (lembar) | 4828 | 124,000,000 | |
| 5 | Prioritas 5 : Peningkatan Kualitas Perencanaan, Penyelenggaraan, Pengawasan dan Pelaporan Pembangunan di Tingkat Kota, Perangkat Daerah dan Pemerintah Terdepan | | | 46,806,696,774 | |
| 1 | PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH | PERSENTASE KONSISTENSI PROGRAM RPJMD KEDALAM RKPD (%) | 100 | 1,255,000,000 | Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah |
| 2 | PROGRAM PERENCANAAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA | PERSENTASE KONSISTENSI PROGRAM RPJMD BIDANG PERENCANAAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA KEDALAM RKPD (%) | 100 | 328,850,000 | |
| 3 | PROGRAM PERENCANAAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM | PERSENTASE KONSISTENSI PROGRAM RPJMD BIDANG PERENCANAAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM KEDALAM RKPD (%) | 100 | 322,000,000 | |
| 4 | PROGRAM PERENCANAAN INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN | PERSENTASE KONSISTENSI PROGRAM RPJMD BIDANG PERENCANAAN INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN KEDALAM RKPD (%) | 100 | 505,000,000 | |
| 5 | PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | JUMLAH KAJIAN DAN PROPOSAL INISIATIF INOVASI DAERAH YANG TEREVALUASI DAN DITERAPKAN | 20 | 175,000,000 | |



| No | Prioritas/Program | Indikator Kinerja Program | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu indikatif | OPD Pelaksana |
|----|---|---|------------------------|--------------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 |
| 6 | PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH | PERSENTASE CAPAIAN REALISASI BELANJA (QUALITY OF BUDGET PLANNING (%) | 90 | 1,679,719,500 | BPKAD |
| | | MAKSIMAL DEFISIT APBD (%) | 3 | | |
| 7 | PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH | PERSENTASE OPD DENGAN LAPORAN BMD YANG AKURAT DAN AKUNTABEL (%) | 90 | 476,174,870 | |
| 8 | PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH | PERSENTASE CAPAIAN REALISASI PENDAPATAN (FISKAL SPACE) (%) | 100 | 364,877,000 | |
| 9 | PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH | Persentase jabatan yang diisi ASN sesuai dengan kompetensi jabatan (%) | 96 | 1,455,647,000 | BKPSDM |
| 10 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN | Persentase Tindak Lanjut Temuan (%) | 100 | 849,788,000 | Inspektorat |
| 11 | PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI | Nilai APIP (Level) | Level 3 | 29,585,890 | |
| 12 | PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL | Ketersediaan informasi data statistik daerah (dokumen) | 1 | 75,499,950 | Setdako |
| 13 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI | Terwujudnya pengamanan informasi pemda (Bulan) | 12 | 63,545,000 | |
| 14 | PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | Tersedianya Laporan Kepala Daerah (Laporan) | 3 | 7,431,296,475 | |
| | | Terbinanya kerjasama antar daerah, pihak ketiga dan lembaga lainnya (dok) | | | |
| | | Persentase santri rumah/pondok tahfiz yang hafidz minimal 1 jus dalam setahun (%) | 30 | | |
| | | Persentase imam masjid yang berkualitas (%) | 15 | | |
| | | Jumlah Produk Hukum yang ditetapkan (Perda) | 15 | | |
| | | Jumlah konsultasi jasa hukum (kali) | 20 | | |
| | | Jumlah penanganan perkara/kasus (kasus) | 2 | | |
| 15 | PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN | Tersedia nya laporan monitoring pelaksanaan program dan kegiatan (Lap) | 1 | 720,144,875 | |
| | | Jumlah BUMD yang taat aturan (BUMD) | 2 | | |
| | | Jumlah koordinasi dan pembinaan UKM (UKM) | 106 | | |



| No | Prioritas/Program | Indikator Kinerja Program | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu indikatif | OPD Pelaksana |
|----|---|--|------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 |
| | | Meningkatnya pengelolaan pemilihan penyedia barang/jasa (paket) | 200 | | |
| | | Meningkatnya layanan pengadaan secara elektronik (paket) | 200 | | |
| | | Meningkatnya keahlian dan keterampilan pelaku pengadaan barang/jasa (orang) | 175 | | |
| 16 | PROGRAM ADMINISTRASI UMUM | Jumlah OPD yang melaksanakan pelayanan berdasarkan SPP | 5 | 1,117,816,500 | |
| | | Jumlah kelembagaan perangkat daerah yang tepat fungsi dan tepat ukuran (OPD) | 5 | | |
| | | Meningkatnya kualitas penyusunan dokumen SAKIP (Prediket) | B | | |
| | | Terwujudnya pembinaan dan pengembangan aparatur (orang) | 2020 | | |
| 17 | PROGRAM LAYANAN DAN ADMINISTRASI KEUANGAN | Jumlah Anggota DPRD yang terfasilitasi (orang) | 20 | 593,207,000 | Sekretariat DPRD |
| 18 | PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD | Persentase jumlah Perda ditetapkan tepat waktu (%) | 80 | 11,208,461,400 | |
| 19 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang terlaksana dengan baik (%) | 100 | 6,355,588,275 | Kecamatan |
| 20 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif (%) | 100 | 4,126,805,000 | |
| 21 | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | Persentase wilayah dalam kondisi aman dan tertib (%) | 100 | 55,708,500 | |
| 22 | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | Persentase terselenggaranya urusan pemerintahan umum dengan baik (%) | 100 | 3,626,149,000 | |
| 23 | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | Terselenggaranya pemerintahan desa dengan baik (%) | 100 | 139,629,200 | |
| 24 | PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK | Persentase penduduk yang memiliki dokumen administrasi kependudukan (%) | 97 | 64,000,000 | Dinas Kependudukan dan Capil |
| 25 | PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN | Persentase pengelolaan Informasi administrasi kependudukan (%) | 97 | 320,644,000 | |
| 26 | PROGRAM PENATAAN DESA | Persentase Desa yang ditata (%) | 100 | 155,000,000 | Dinas Sosial, PMD dan PPA |



| No | Prioritas / Program | Indikator Kinerja Program | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu indikatif | OPD Pelaksana |
|----------|--|---|------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 |
| 27 | PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA | Persentase peningkatan kerjasama desa (%) | 100 | 15,000,000 | |
| 28 | PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA | Persentase Administrasi Desa yang dibina (%) | 100 | 1,150,780,000 | |
| 29 | PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT, DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT | persentase lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat yang dibina (%) | 100 | 927,409,000 | |
| 30 | PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | Persentase Gangguan Ketertiban dan Ketentraman yang teratasi (%) | 100 | 399,563,750 | Satpol PP dan Damkar |
| 31 | PROGRAM PENANGGULANGAN KEBAKARAN | Persentase Pencegahan Bencana Kebakaran (%) | 100 | 80,209,000 | |
| 32 | PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN | Persentase Penurunan Angka Kriminalitas di Kota Sawahlunto (%) | 100 | 141,205,790 | Kesbangpol |
| 33 | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA | Persentase Tindak Lanjut Permasalahan (%) | 65 | 597391799 | |
| 6 | Prioritas 6 : Peningkatan Kualitas dan Daya Tarik Destinasi serta Promosi Wisata | | | 15,506,795,288 | |
| 1 | PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA | Persentase Objek Wisata Unggul (%) | 44.12 | 10,010,000,000 | Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga |
| 2 | PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA | Jumlah Kunjungan ke objek wisata (orang) | 434130 | 2,115,860,000 | |
| 3 | PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL | Persentase Produk Ekonomi Kreatif yang bersertifikat HAKI (%) | 0,5 | 144,925,000 | |
| 4 | PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF | Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif Profesional (%) | 18 | 656,191,056 | |
| 5 | PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN | Persentase pemuda berprestasi yang berprestasi di tingkat provinsi dan nasional (%) | 15 | 1,299,819,232 | |
| 6 | PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN | Jumlah atlit yang berprestasi tingkat provinsi/regional/nasional/internasional (atlit) | 148 | 1,190,000,000 | |
| 7 | PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN | Persentase organisasi kepramukaan yang berprestasi di tingkat provinsi dan nasional (%) | 75 | 90,000,000 | |



| No | Prioritas/Program | Indikator Kinerja Program | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu indikatif | OPD Pelaksana |
|----------|--|---|------------------------|--------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 |
| 7 | Prioritas 7 : Penyediaan Infrastruktur yang Menjamin Pembangunan Berkelanjutan | | | 88,642,941,775 | |
| 1 | PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) | Persentase ketersediaan sumber daya air dalam kondisi baik (%) | 48,35 | 7,775,000,000 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 2 | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE | Persentase Drainase dalam kondisi baik (%) | 74,37 | 1,565,000,000 | |
| 3 | PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN | Persentase luas permukiman yang tertata (%) | 67,34 | 3,510,000,000 | |
| 4 | PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG | Persentase luas permukiman yang tertata (%) | 63 | 1,658,960,000 | |
| | | Persentase gedung pemerintah dalam kondisi baik | 68,84 | | |
| 5 | PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN | Panjang Jalan yang ditingkatkan (Km) | 102,31 | 43,949,000,000 | |
| 6 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG | Persentase ketersediaan dokumen dan informasi tata ruang | 7 | 1,037,100,000 | |
| 7 | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM | Persentase Rumah Tangga yang terfasilitasi air bersih (%) | 92 | 7,331,277,500 | DPKP2LH |
| 8 | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH | Persentase air limbah yang ditangani (%) | 100 | 70,000,000 | DPKP2LH |
| 9 | PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN | Persentase Luas Permukiman yang tertata (%) | 75 | 1,105,600,000 | |
| 10 | PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERMUKIMAN KUMUH | Persentase Penanganan Kawasan Kumuh (%) | 62,85 | 908,589,000 | |
| 11 | PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) | Persentase PSU yang tertangani (%) | 100 | 6,035,000,000 | |
| 12 | PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN | Persentase kasus pertanahan yang terfasilitasi (%) | 80 | 21,000,000 | |
| 13 | PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, SERTA GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE | Jumlah kegiatan redistribusi tanah dan ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee yang dilaksanakan | 2 | 65,000,000 | |
| 14 | PROGRAM PENETAPAN TANAH ULAYAT | Jumlah kegiatan penetapan tanah ulayat (dokumen) | 5 | 65,000,000 | |
| 15 | PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH | Persentase penerbitan izin dikeluarkan (%) | 100 | 232,000,000 | |
| 16 | PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH | Persentase pengelolaan tanah sesuai dengan peruntukan (%) | 3 | 125,000,000 | |



| No | Prioritas / Program | Indikator Kinerja Program | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu indikatif | OPD Pelaksana |
|----------|---|--|------------------------|--------------------------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 |
| 17 | PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP | Persentase ketaatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan (%) | 75 | 542,551,000 | |
| 18 | PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) | Persentase RTH terhadap luas wilayah kota (%) | 19 | 501,800,000 | |
| 19 | PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3) | Persentase kegiatan/usaha yang memiliki izin PLB3 (%) | 100 | 16,000,000 | |
| 20 | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) | Persentase ketaatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan | 80 | 98,378,000 | |
| 21 | PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT | Persentase masyarakat yang mendapat akses diklat/penyuluhan tentang lingkungan hidup (%) | 80 | 204,348,483 | |
| 22 | PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT | Jumlah penghargaan bidang LH yang diperoleh | 3 | 167,000,000 | |
| 23 | PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN | Persentase sampah tertangani dengan timbulan sampah (%) | 75 | 2,325,819,200 | |
| | | Persentase sampah berkurang dengan timbulan sampah (%) | 22 | | |
| 24 | PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN | Persentase tingkat terpenuhi kebutuhan tanah untuk pembangunan (%) | 100 | 2,000,000,000 | Dinas PUPR |
| 25 | PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA | Persentase Bencana yang Tertangani (%) | 60 | 2,622,841,202 | Badan Kesbangpol dan PBD |
| 26 | PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) | Jumlah lampu PJU yang terpelihara (titik) | 745 | 524,713,000 | Dinas PUPR |
| | | Persentase ruas jalan yang memenuhi standar keselamatan lalu lintas (%) | 35 | 2,435,964,390 | Dinas Perhubungan |
| 27 | PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN | Persentase panjang jalur rel kereta api yang digunakan (%) | 52.5 | 1,750,000,000 | |
| 8 | Prioritas 8: Penerapan Sistem Pengelolaan Pemerintah Berbasis Teknologi Informasi dan Industrialisasi 4.0 | | | 3,082,090,500 | |
| 1 | PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK | Jumlah media massa yang bekerjasama (media massa) | 20 | 518,919,500 | Setdako |



| No | Prioritas/Program | Indikator Kinerja Program | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | OPD Pelaksana |
|----|--|---|------------------------|--------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 |
| | | Persentase OPD yang menggunakan Sistem Informasi Pemerintahan yang Berbasis TIK (%) | 50 | | |
| 2 | PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA | Jumlah jaringan konektivitas jaringan informasi dan komunikasi (koneksi) | 26 | 1,951,230,000 | |
| 3 | PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL | PERSENTASE PENINGKATAN NILAI INVESTASI (%) | 20 | 110,622,000 | Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja |
| 4 | PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL | NILAI INVESTASI LOKAL (MILYAR RUPIAH) | 25 | 167,157,000 | |
| | | NILAI INVESTASI NASIONAL (MILYAR RUPIAH) | 10 | | |
| | | NILAI INVESTASI ASING (MILYAR RUPIAH) | 1 | | |
| 5 | PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL | INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN DPMPPTSPNAKER | B | 334,162,000 | |
| | | | | | |

Rekapitulasi Pagu Indikatif Menurut Prioritas Pembangunan Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.6
Rekapitulasi Pagu Indikatif Menurut Prioritas Pembangunan Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2021

| No | Prioritas Daerah | Pagu Indikatif |
|----|--|----------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Optimalisasi Status WTBOS sebagai Warisan Dunia dan Geopark Nasional Sawahlunto untuk Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat | 4,017,564,250 |
| 2 | Peningkatan Kesadaran dan Peranserta Masyarakat dalam Penanganan Kesehatan Keluarga, Gizi Masyarakat, Penyakit Menular, dan Kesehatan Lingkungan secara Bertahap dan Berkesinambungan serta Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan | 92,719,215,000 |
| 3 | Peningkatan Kualitas Produk dan Komoditi Unggulan Daerah serta Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja | 15,652,393,133 |
| 4 | Penyediaan Pelayanan, Sarana dan Prasarana Pendidikan, serta Tenaga Pendidik yang Berkualitas, Terjangkau dan Merata | 25,296,788,720 |
| 5 | Peningkatan Kualitas Perencanaan, Penyelenggaraan, Pengawasan dan Pelaporan Pembangunan di Tingkat Kota, Perangkat Daerah dan Pemerintah Terdepan | 46,806,696,774 |
| 6 | Peningkatan Kualitas dan Daya Tarik Destinasi serta Promosi Wisata | 15,506,795,288 |



| No | Prioritas Daerah | Pagu Indikatif |
|--------------|--|------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 7 | Penyediaan Infrastruktur yang Menjamin Pembangunan Berkelanjutan | 88,642,941,775 |
| 8 | Penerapan Sistem Pengelolaan Pemerintah Berbasis Teknologi Informasi dan Industrialisasi 4.0 | 3,082,090,500 |
| TOTAL | | 291,724,485,440 |

4.3. INOVASI DAERAH

Inovasi Daerah pada hakikatnya ditujukan untuk mendukung peningkatan kinerja Pemerintah Daerah dan Pelayanan Publik secara optimal dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Sasaran Inovasi Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, dan peningkatan daya saing Daerah. Inovasi Daerah merupakan sebuah jembatan penghubung antara perencanaan, aktualisasi dan evaluasi. Suatu ide atau gagasan untuk dapat menjadi Inovasi Daerah harus melalui tahapan yang secara rinci diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah.

Inovasi Daerah merupakan ruangan khusus bagi Kepala Daerah. Melalui ruang Inovasi Daerah ini Kepala Daerah bisa mengambil tindakan cepat atas persoalan yang terjadi saat itu dan selanjutnya dilakukan pengkajian tingkat pertama, terutama untuk melakukan supervisi untuk setiap kompleksitas yang terjadi untuk mewujudkan visi dan misi yang tertuang dalam RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah) 2018-2023. Hasil dari pengkajian itulah yang akan menjadi cikal bakal sebuah Inovasi Daerah. Pentingnya pemahaman semua pihak tentang ruang lingkup dari sebuah konsep Inovasi Daerah akan membuka ruang publik yang lebih baik dalam mengatasi setiap permasalahan yang terjadi di Kota Sawahlunto.

4.3.1 Alur dan Proses Inovasi Daerah Kota Sawahlunto



Dalam pelaksanaan Inovasi Daerah ini, peran yang tidak dapat disubstitusi dengan perangkat Daerah (OPD) lain adalah peranan dalam melakukan *Evaluasi Kelayakan* dari sebuah Inisiatif Inovasi Daerah. Peranan ini hanya dapat dibantu oleh tim independen yang dibentuk secara insidental. Tim independen tersebut



beranggotakan unsur perguruan tinggi, pakar, dan/atau praktisi sesuai dengan kebutuhan. Berdasarkan kalimat diatas, maka kebutuhan akan sumber daya manusia yang memahami akan konsep dasar Inovasi Daerah secara komprehensif sangat menentukan.

4.3.2 Fokus Inovasi Daerah Kota Sawahlunto

Adapun fokus dari Inovasi Daerah Kota Sawahlunto antara lain :

1. Penciptaan manajemen administrasi Inovasi Daerah yang berkelanjutan di Kota Sawahlunto.
2. Pembangunan kerangka dasar kebijakan Inovasi Daerah Kota Sawahlunto.
3. Penguatan Kelembagaan dan daya dukung Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKININ) atau penelitian, pengembangan dan perekayasaan (litbangyasa) serta kemampuan absorpsi industri, khususnya usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).
4. Penciptaan budaya inovasi di Kota Sawahlunto.
5. Penciptaan keselarasan dengan perkembangan global dan wadah untuk mengatasi setiap permasalahan yang muncul secara efektif dan efisien.

4.3.3 Kegiatan Inovasi Daerah Kota Sawahlunto

4.3.3.1 Top Six Innovations

Inovasi Daerah yang masuk pada kategori ini adalah 6 (Enam) Inovasi Daerah Kota Sawahlunto yang mendapat apresiasi oleh Kemendagri pada tahun 2017 dalam penghargaan Innovative Government Award (IGA) sebagai terbaik 7 (Tujuh) Tingkat Kota se Indonesia. Adapun kelima Inovasi daerah tersebut adalah sebagai berikut ;

| No | Nama INOVASI | Penjelasan/Keterangan Inovasi | OPD Pelaksana |
|----|--|---|----------------------|
| 1 | Tak Kepung Ke | "Tak kepung Ke" adalah salah satu program unggulan di Pemerintahan Kota Sawahlunto. Program tersebut adalah program peningkatan kesejahteraan masyarakat berbasis kawasan. Program ini bertujuan untuk mengatasi ketimpangan pendapatan dan mendorong percepatan pembangunan kawasan tertinggal dengan mengedepankan konsep pemanfaatan potensi dan kearifan lokal untuk mendorong terwujudnya masyarakat yang produktif dan mandiri di Kota Sawahlunto. Kegiatan ini diresmikan pada tanggal 07 Desember 2014 oleh Dodi Iswandi (asisten Deputi Kementerian Pemuda dan Olahrag Republik Indonesia Republik Indonesia) dan sukses melaunching 7 (tujuh) Kampung Produktif di Kota Sawahlunto. | Barenlitbangda |
| 2 | ULAT SUTRA (Upaya LAYanan Terpadu Satu pintU Ramah Anak) | Dilatarbelakangi dengan masih adanya Angka Kematian Bayi (AKB), ruang laktasi yang belum tersedia, dan belum semua anak terpenuhi hak atas kesehatannya maka dibuatlah Inovasi ULAT SUTRA ini. Inovasi ini dilaksanakan oleh Puskesmas Silungkang. | Puskesmas Silungkang |



| | | | |
|---|---|--|---|
| | | <p>Puskesmas ini ingin memberikan pelayanan terbaik kepada anak karena Kota Sawahlunto telah menjadi Kota Layak Anak Tingkat Madya. Dengan adanya inovasi ini semakin meningkatnya jumlah ibu hamil resiko tinggi yang terdeteksi, membaiknya indikator status kesehatan ibu dan anak di Kecamatan Silungkang dan terbangunnya komunikasi yang baik antar puskesmas Silungkang dengan lintas sektor masyarakat. Dengan Inovasi Ini Puskesmas Silungkang mendapatkan prestasi menjadi Puskesmas Ramah Anak terbaik Tingkat Nasional dari Menteri PPA yaitu ibu Yohana Yambise pada tahun 2017 di Pekanbaru, Prov Riau.</p> | |
| 3 | JUST not GREEN | <p>Maksud dari inovasi ini adalah memanfaatkan lahan bekas tambang didaerah Kandi yang tidak produktif menjadi kawasan wisata yang nyaman untuk dikunjungi. Tujuannya adalah meningkatkan dan menciptakan konsep perekonomian baru bagi Kota Sawahlunto pasca tambang. Tidak hanya sekedar hijau, dengan lahan seluas 363,4 Ha, lahan bekas tambang tersebut dirancang menjadi beberapa objek pariwisata yang saat ini menjadi ikonik kepariwisataan di Kota sawahlunto, antara lain : Taman Satwa Kandi, Taman Hutan Kota, Arena Road Race Permanen, Arena Pacuan Kuda, Area Camping Ground dan Taman Buah Kandi</p> | Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga |
| 4 | SISCa (Sawahlunto International Songket Carnival) | <p>Inovasi Kota Sawahlunto yang satu ini, sudah dimulai pelaksanaannya sejak tahun 2015. Kegiatan yang pada awalnya untuk memasarkan produk yang telah dibuat oleh pengrajin songket. Kegiatan ini mendapat rekor MURI pada tahun 2015 yaitu pemakaian songket terbanyak pada saat bersamaan. Dengan adanya SISCa, memotivasi masyarakat untuk belajar menenun songket. Hal ini ditandai dengan adanya penambahan jumlah pengrajin. Pada Tahun 2014 jumlah pengrajin songket sebanyak 738 orang dan bertambah pada tahun 2017 menjadi 837 orang. Pada tahun 2017, SISCa mendapat apresiasi dari Anugerah Pesona Indonesia yaitu juara 2 pada kategori Festival Pariwisata Terpopuler di Indonesia.</p> | Dinas koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan |
| 5 | DAFA AKU OK (Data dan Fakta Akta Kelahiran Aku Oke) | <p>Inovasi lainnya dalam tata kelola pemerintahan terutama pada pelayanan publik yaitu DAFA AKU OK. Inovasi ini dilatarbelakangi oleh belum terintegrasinya data akte kelahiran anak ini dalam SIAK Online. Selain itu masih belum konsistennya antara satu data dengan data lainnya. Dengan adanya pelayanan keliling langsung</p> | Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil |



| | | | |
|---|---------------------------|---|--|
| | | kepada masyarakat, maka semakin memudahkan masyarakat dalam memiliki akte kelahiran. Selain itu inovasi yang dilaksanakan adalah YANJEBOL "Layanan Jemput Bola" melakukan pelayanan jemput bola kepada masyarakat yang baru melahirkan dengan bekerjasama dengan bidan mandiri, maka orang tua tidak perlu datang legi kedinas Dukcapil tapi bisa mengambil di tempat bidan mandiri, tempat ibu tersebut melahirkan. | |
| 6 | SIMEGA YANG ELEGANT | Merupakan Inovasi pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk melaksanakan pemerintahan yang efisien dan murah, juga menyediakan sarana publik kepada masyarakat untuk meningkatkan pelayanan publik sehingga menciptakan pemerintahan yang baik dan mudah mendapatkan informasi. Aplikasi SIMPEG ini mulai dibangun sejak 2015 dan terus dilakukan upgrade dan penambahan fitur untuk menyesuaikan kebutuhan kepegawaian serta terus dilakukan penambahan data yang dilakukan setiap bulan. SIMPEG bukanlah program sekali jalan tetapi sebuah program dengan keberlanjutan yang terus-menerus, artinya data yang terdapat didalam database SIMPEG akan dapat terus digunakan karena administrasi data kepegawaian akan terus diperlukan sampai dengan pegawai tersebut pensiun dan data histori dari database akan dapat digunakan sampai dengan batas waktu yang tidak terbatas. Program SIMPEG merupakan kerangka pondasi pertama dari pelaksanaan Sistem Manajemen Kepegawaian yang berbasis Electronic Government Sawahlunto (ELEGANT) | Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |

4.3.3.2 Kegiatan Inovasi yang telah dilaksanakan sebelum tahun 2020, tetapi tidak masuk kepada kategori 7.6.1 (Top Six Innovations)

| No | Nama INOVASI | Penjelasan/Keterangan Inovasi | OPD Pelaksana |
|----|---|---|--|
| 1 | Revitalisasi dan Konservasi Lubang Transportasi Batubara Lunto II | Seiring dengan peningkatan pemahaman tentang cagar budaya, pelestarian tidak hanya difokuskan pada tindakan fisik untuk mempertahankan keberadaan benda semata namun lebih diarahkan kepada paradigma yang lebih luas yaitu tindakan perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan cagar budaya. Maka, berbagai peninggalan pertambangan yang menjadi potensi dan kekayaan perlu dimanfaatkan secara maksimal untuk dijadikan objek wisata. Lubang | Dinas Kebudayaan Peninggalan Bersejarah dan Permuseuman Kota Sawahlunto |



| | | | |
|---|---|--|---|
| | | Transportasi Lunto II akan dijadikan sebagai salah satu objek wisata tambang dengan memanfaatkan lori sebagai alat transportasi pengunjung | |
| 2 | BRIGADE ALSINTAN | Pertanian merupakan sektor yang sangat banyak menyerap tenaga kerja di Kota Sawahlunto dengan segala kompleksitas permasalahannya. Untuk mengatasi permasalahan yang terjadi diperlukan terobosan/upaya untuk meningkatkan produksi dan produktivitas dan diharapkan pada saat yang bersamaan terjadi peningkatan pendapatan menuju kesejahteraan petani. salah satunya adalah pengembangan dan pengelolaan alat mesin pertanian yang memiliki kapasitas kerja lebih baik untuk mendapatkan efisiensi biaya produksi dan efisiensi waktu beberapa tahapan budidaya | Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan kota Sawahlunto |
| 3 | REKAM BERMULA (Rekam Bersama (WKTP) Pemula) | Admnistrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan dan penertiban dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan admnistrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik den pembangunan sektor lainnya. Wajib KTP adalah penduduk Indonesia usia 17 tahun keatas atau belum berumur 17 tahun tetapi telah menikah. Siswa SLTA merupakan wajib KTP pemula, yang menjadi salah satu sasaran untuk kegiatan rekam KTP disamping wajib KTP lain yang ada di masyarakat. Dalam rangka pencapaian target rekam KTP elektronik, layanan keliling ke SLTA se Kota Sawahlunto menjadi kegiatan andalan untuk mempermudah para siswa-siswi SLTA melakukan perekaman KTP elektronik. Kegiatan perekaman ke SLTA ini telah dimulai pada tahun 2014, dilanjutkan pada tahun 2016 dan 2018 dengan jumlah 7 SLTA. | Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. |
| 4 | Front Office | Front office merupakan cermin dari kuaalitas pelayanan kantor untuk pertama kali bagi tamu saat memasuki kantor. Program ini dilaksanakan pada tahun 2016. Program yang diterapkan ini dipandang mampu memberikan kepuasan tersendiri dan memberikan rasa aman kepada tamu yang dilayani sehingga menciptakan suasana yang kondusif dalam hal pelayanan. Untuk menunjang program ini bagian umum sekretariat Daerah Kota | Setdako |



| | | | |
|---|--------------------|--|---|
| | | Sawahlunto memberikan pelatihan berupa bimbingan teknis terhadap petugas yang terdapat dalam program front office ini. | |
| 5 | Sekretariat Proyek | Gagasan pendirian dimulai pada tanggal 05 Mei 2014. Keanggotaannya berisi 7 orang dan telah melalui Bimtek Pengetahuan Barang dan Jasa. Hasil inovasi daerah ini adalah mempermudah dan memperpendek waktu pengurusan pembayaran bagi penyedia barang/jasa dan mempermudah pengawasan serta pengendalian dalam proses pembayaran kepada penyedia barang/jasa. | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 6 | SP2D Online | <p>Latar belakang dari program ini adalah</p> <ol style="list-style-type: none">1. Salah satu action plan pencegahan tindak pidana korupsi dan reformasi birokrasi.2. Pihak bank dan pemerintah Daerah menggunakan sistem yang berbeda dalam memproses SP2D untuk memenuhi kebutuhan masing-masing.3. Proses input data SP2D dilakukan oleh pemda namun pihak bank kemudian melakukan input data kembali menggunakan sistem dari bank, sehingga kurang efisien untuk pencairan dana.4. penyampaian informasi tentang kekurangan administrasi atas SPM yang diajukan OPD kurang cepat ditanggapi.5. banyak OPD atau pihak ketiga/rekanan yang mengkonfirmasi secara langsung apakah SP2D sudah cair atau belum. <p>Kegiatan ini dimulai tahun 2019, dan penayangan informasi SP2D online di website DPPKAD tentang ; tanggal SPM masuk, SPM dalam proses verifikasi, kekurangan administrasi SPM, SPM dalam proses SP2D, SP2D sudah di bank, SP2D sudah direkening penerima. Pada tahun 2019, belum semua Pemerintah daerah di Provinsi Sumatera Barat yang menerapkan SP2D online.</p> | DPPKAD |



Berdasarkan tabulasi data 4.3.3.1 dan 4.3.3.2 diatas dapat kita sajikan sebaran data Inovasi Daerah Kota Sawahlunto sebelum tahun 2020 sebagai berikut :

a. Berdasarkan asal usulan inisiatif Inovasi Daerah

| No | Asal Usulan Inisiatif Inovasi Daerah | Jumlah | Persentase (%) |
|-------|--------------------------------------|--------|----------------|
| 1 | Kepala Daerah | 0 | 0 |
| 2 | Anggota DPRD | 0 | 0 |
| 3 | ASN | 0 | 0 |
| 4 | Perangkat Daerah | 12 | 100 |
| 5 | Anggota Masyarakat | 0 | 0 |
| Total | | 12 | 100 |

b. Sebaran data usulan Inovasi Daerah dari Perangkat Daerah di Kota Sawahlunto

| No | Organisai Perangkat Daerah (OPD) | Jumlah | Persentase (%) |
|-------|---|--------|----------------|
| 1 | Barenlitbangda | 1 | 8,333 |
| 2 | Puskesmas Silungkang | 1 | 8,333 |
| 3 | Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga | 1 | 8,333 |
| 4 | Dinas koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan | 1 | 8,333 |
| 5 | Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil | 1 | 8,333 |
| 6 | Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia | 1 | 8,333 |
| 7 | Dinas Kebudayaan Peninggalan Bersejarah dan Permuseuman Kota Sawahlunto | 1 | 8,333 |
| 8 | Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan kota Sawahlunto | 1 | 8,333 |
| 9 | Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. | 1 | 8,333 |
| 10 | Setdako | 1 | 8,333 |
| 11 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 1 | 8,333 |
| 12 | DPPKAD | 1 | 8,333 |
| Total | | 12 | 100 |

Semua kegiatan inovasi diatas sampai tahun 2020 ini masih tetap dilaksanakan dan untuk memberikan dampak yang lebih baik selalu dilakukan evaluasi dan atau didukung kebijakan-kebijakan khusus.

4.3.3.3 Kegiatan Inovasi Tahun Berjalan (2020)

Tabel dibawah ini merupakan kumpulan kegiatan Inovasi Daerah Kota Sawahlunto di Tahun 2020 yang telah terbukukan pada RKPD Kota Sawahlunto tahun 2020.

| No | Nama INOVASI | Penjelasan/Keterangan Inovasi | OPD Pelaksana |
|----|-------------------------------------|--|------------------|
| 1 | Pendidikan Digital untuk SD dan SMP | Pendidikan Digital bertujuan menggabungkan dua kemampuan (Blended learning) yaitu kemampuan dengan menggunakan otak secara keseluruhan antara otak kiri dan kanan secara seimbang sekaligus menggunakan alat bantu berupa teknologi komputer dan multimedia antara lain : Audio, Visual, Text elektronik dan logica. | Dinas Pendidikan |



| No | Nama INOVASI | Penjelasan/Keterangan Inovasi | OPD Pelaksana |
|----|--|--|------------------|
| 2 | Pengadaan sarana belajar siswa baru untuk kurang mampu | Membantu siswa baru yang kurang mampu pada tingkat SD dan SMP di Kota Sawahlunto | Dinas Pendidikan |
| 3 | Taman Bacaan Masyarakat (TBM) Kota Sawahlunto | Menumbuhkan minat baca di kalangan masyarakat melalui suatu kegiatan menyediakan sarana dan prasarana yang memungkinkan masyarakat khususnya anak dan perempuan melakukan aktivitas belajar mengenal, mendekatkan dan mencintai membaca sehingga terbentuk budaya gemar membaca yang akhirnya terjadi pecerahan, tranformasi dan perubahan ke arah perbaikan karakter sehingga masyarakat mampu berbuat produktif | Dinas Pendidikan |
| 4 | Poliklinik Geriatri | Pelayanan khusus yang diberikan kepada pasien kategori Lansia (umur \geq 60 tahun) dengan multiple diagnosa/ multi penyakit, atau gangguan akibat penurunan fungsi organ, psikologi, sosial, ekonomi dan lingkungan yang membutuhkan pelayanan kesehatan secara terpadu dengan pendekatan multidisiplin yang bekerja secara interdisiplin. Pelayanan poliklinik geriatri dapat dilayani oleh lebih dari satu orang dokter spesialis. | RSUD |
| 5 | Bisa RSUD Sawahlunto | BISA RSUD Sawahlunto (<i>Bed Information System App.</i>) adalah aplikasi untuk menampilkan display kamar/ tempat tidur RSUD Sawahlunto terkini secara <i>realtime</i> . Aplikasi ini memanfaatkan pengolahan database SIM-RS yang terintegrasi di setiap ruangan perawatan. Aplikasi ini terdiri dari 2 (dua) output laporan diantaranya : <ol style="list-style-type: none">1. Bed Display untuk informasi pasien2. Bed Display dan daftar pasien rawat inap RSUD Sawahlunto bagi petugas pusat informasi | RSUD |
| 6 | REMEDI RSUD Sawahlunto | REMEDI (REkam MEDis Digital) RSUD Sawahlunto memungkinkan penulisan rekam medis (diagnosa, tindakan intervensi, dan obat-obatan) pasien dapat diinputkan melalui sistem informasi berbasis teknologi. Sehingga pembacaan rekam medis dapat dilakukan melalui aplikasi yang bisa di akses dengan cepat oleh dokter, perawat dan tenaga medis lainnya di RSUD Sawahlunto dengan tidak harus menunggu lagi kurir Rekam Medis membawa berkas ke ruangan pemeriksaan | RSUD |
| 7 | BOR RSUD Sawahlunto | BOR (Booking Online Rawat jalan) RSUD Sawahlunto merupakan sistem pendaftaran pasien rawat jalan/poliklinik spesialis RSUD Sawahlunto secara online melalui aplikasi WA (What's up Appointment dan website RSUD Sawahlunto). Aplikasi ini dapat dimanfaatkan | RSUD |



| No | Nama INOVASI | Penjelasan/Keterangan Inovasi | OPD Pelaksana |
|----|---|--|---|
| | | bagi pasien Rawat Jalan/ poliklinik yang akan mendaftar minimal satu hari sebelum hari kunjungan/ pemeriksaan | |
| 8 | HEBAT RSUD Sawahlunto | HEBAT (Hitung kinErja Berbasis Aplikasi yang Terintegrasi) RSUD Sawahlunto merupakan aplikasi untuk menghitung kinerja pegawai RSUD perencanaan kegiatan harian, target, capaian Sawahlunto. Aplikasi ini mencakup kegiatan, hasil dari pekerjaan/ kegiatan yang dilaksanakan setiap hari terintegrasi ke SIM-RS RSUD Sawahlunto | RSUD |
| 9 | Bridging SISRUITE dan SIRANAP Kemenkes RI | Aplikasi ini memungkinkan terintegrasinya SIMRS RSUD Sawahlunto dengan SISRUITE (Sistem Informasi Rujukan Terpadu) dan SIRANAP (Sistem Informasi Rawat Inap) milik Kementerian Kesehatan RI. Aplikasi ini mengurangi double entri data yang dapat memungkinkan kesalahan input dan update data rawat inap secara manual. Cukup satu kali entri dan memanfaatkan link dengan Database SIMRS, data SISRUITE dan SIRANAP dapat terupdate secara <i>realtime</i> | RSUD |
| 10 | Si GUNTU | Si GUNTU singkatan dari Sistem Informasi Guna Tanggap Umum dan istilah Si GUNTU merupakan inovasi bidang pelayanan yang diberikan oleh Desa Lunto Barat kepada Masyarakat. Melalui Si GUNTU ini masyarakat bisa langsung melakukan pengurusan surat-surat yang terkait di Desa dari mana saja. Tanpa terikat tempat dan waktu. Asalkan bisa mengakses computer atau gedget berupa android atau iphone yang terkoneksi dengan jaringan internet | Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| 11 | BANK DESA | kebutuhan masyarakat tentang unit simpan pinjam/ perkreditan BUMDes , BANK desa sebagai alternative bagi masyarakat dalam unit simpan pinjam dengan pola syariah bagi hasil | Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| 12 | BANK RAB | Pada Penyusunan APBDes 2019, Bukik Gadang merupakan desa yang mengumpulkan paling awal se Kota Sawahlunto . Hal ini bisa dilakukan karena Desa bukik Gadang menerapkan Sistem BANK RAB yang berisi kumpulan dari RAB kegiatan yang akan dilaksanakan di Desa | Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| 13 | BUMDES EKSPOR KOMODITI PINANG | Tidak hanya berinovasi dengan pendirian BANK DESA, BUMDes Kumbayau juga melakukan Ekspor Pinang ke Mancanegara seperti India, Nepal dan Turki . Dalam Hal | Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat, Desa, |



| No | Nama INOVASI | Penjelasan/Keterangan Inovasi | OPD Pelaksana |
|----|---|---|---|
| | | Pengiriman dan administrasi BUMDes KMB bekerjasama dengan PT POS Indonesia Region Sumatera Barat , Riau dan Jambi | Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| 14 | COFFEE MORNING | Coffee Morning Merupakan nama keren dari kegiatan wirid subuh yang dilakukan setiap hari Minggu di Desa Lunto Timur Kegiatan ini dilakukan untuk mengisi waktu luang jamaah setelah sholat Subuh, menambah wawasan keagamaan dan adat juga untuk menanamkan kembali falsafah “Adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah” | Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| 15 | Menuju KPM PKH Mandiri | Merubah pola pikir masyarakat miskin melalui kegiatan pertemuan peningkatan kemampuan keluarga (P2K2) | Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| 16 | Sistem Informasi Pengujian Kendaraan Bermotor (SIMPKB) | Tujuan dari Pengadaan Sistem Informasi Manajemen Pengujian Kendaraan Bermotor ini adalah: <ol style="list-style-type: none">1. Memudahkan dalam Pengadaan Laporan Hasil Pemeriksaan Kendaraan Bermotor dan data pendukung lainnya.2. Memudahkan dalam pencarian data laporan yang diperlukan setiap saat, baik itu perhari, perbulan ataupun per periode.3. Meningkatkan akurasi proses analisis yang cermat dan cepat untuk dapat merumuskan kebijakan terkait peningkatan efektivitas dan efisiensi dalam melakukan Pemeriksaan Kendaraan Bermotor.4. Kedepannya dapat menjadi alat bantu pelayanan bagi pemilik kendaraan wajib uji dalam memberikan informasi yang dibutuhkan.5. Memudahkan dalam penyimpanan data sehingga suatu saat terjadi force majeure data akan aman karena data dapat di backup di media storage yang lain | Dinas Perhubungan |
| 17 | Pemetaan Lokasi Sarana dan Prasarana Lalu Lintas se Kota sawahlunto | Pemetaan lokasi yang digunakan untuk dapat mempermudah pendataan sarana prasarana yang tersedia maupun yang belum tersedia. Dan juga dapat memudahkan dalam penempatan dan pemasangan titik lokasi sarana prasarana tiap tahunnya. Saat ini pemasangan sarana prasarana lalu lintas tersebut hanya berdasarkan survei lapangan oleh petugas Dinas Perhubungan Kota | Dinas Perhubungan |



| No | Nama INOVASI | Penjelasan/Keterangan Inovasi | OPD Pelaksana |
|----|--|---|---------------------------------------|
| | | Sawahlunto | |
| 18 | Workshop Desain Komunikasi Visual Bahan Promosi Sawahlunto | Melaksanakan pelatihan "Digital Marketing" untuk para pelaku ekonomi kreatif Kota Sawahlunto para pelaku ekonomi kreatif Kota Sawahlunto melalui pemanfaatan teknologi digital dan aplikasi E-Commerce | Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga |
| 19 | Aktivasi Pelaku Ekonomi Kreatif Dalam dan Luar Negeri | Kegiatan ini merupakan usaha untuk mengaktifkan para pelaku ekonomi kreatif yang terdiri dari 16 Sub Sektor. Bentuk kegiatan berupa pengiriman kelompok2 kreatif ke berbagai iven-iven Ekonomi Kreatif dalam rangka pengembangan dan peningkatan pemasaran produk lokal | Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga |
| 20 | Monitoring Evaluasi Usaha Ekonomi | Kegiatan monitoring dan evaluasi adalah lanjutan tahapan kegiatan untuk melihat dampak dari hasil Workshop pelaku ekonomi kreatif yang telah dilaksanakan | Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga |
| 21 | Pengembangan Jaringan Kerja Sama Promosi Pariwisata | Perlunya komitmen yang tajam dari pelaku pariwisata Sawahlunto terutama pelaku industri pariwisata untuk dipromosikan dan dituangkan dalam bentuk kerja sama yang saling menguntungkan dengan para pelaku promosi pariwisata di Sumatera Barat (biro perjalanan) | Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga |
| 22 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Promosi Pariwisata | Pengadaan sarana dan prasarana promosi pariwisata yang bersifat inovatif perlu dilaksanakan, diantaranya membranding sarana mobilitas milik Pemko Sawahlunto dan bahan promosi lainnya, baik bersifat cetakan, media luar ruang dan bentuk lainnya yang tepat sasaran untuk meningkatkan awareness kepariwisataan Kota Sawahlunto | Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga |
| 23 | Penyusunan Site Plan Destinasi Wisata | Perencanaan dalam bentuk desain maupun anggaran untuk pembuatan kawasan destinasi baru | Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga |
| 24 | Festival Sawahlunto Kreatif | Perlunya mengangkat potensi kreatif dari pelaku Ekraf di Kota Sawahlunto dengan mengundang Academic, Business, Community, Government. Kolaborasi ABCG dalam bentuk festival akan meningkatkan pertumbuhan Ekonomi Kreatif di Kota Sawahlunto | Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga |
| 25 | Penyusunan Profil Pelaku Usaha Ekonomi Kreatif | Penyusunan Profil Pelaku Ekonomi Kreatif akan membantu mempermudah mempublikasi potensi Produk dan Pelaku Ekonomi Kreatif yang terdiri dari 16 Subsektor Ekonomi Kreatif. | Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga |
| 26 | Penyusunan data base kepariwisataan | Perlunya data dasar kepariwisataan yang akan menjadi bahan analisa dan rekomendasi untuk strategi pariwisata selanjutnya | Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga |
| 27 | Evaluasi keberhasilan | Pelunya evaluasi kegiatan pemasaran pariwisata berdasarkan indikator yang telah | Dinas Pariwisata, |



| No | Nama INOVASI | Penjelasan/Keterangan Inovasi | OPD Pelaksana |
|----|---|---|---------------------------------------|
| | pemasaran pariwisata | disepakati agar menghasilkan strategi pemasaran yang tepat dan dapat dituangkan dalam bentuk kegiatan pemasaran pariwisata efektif | Pemuda dan Olahraga |
| 28 | Fasilitasi Hari jadi Kota Sawahlunto | Pelaksanaan HJK merupakan salah satu agenda rutin dan event unggulan Kota Sawahlunto. Perlu persiapan yang lebih matang untuk peningkatan kualitas pelaksanaan HJK Sawahlunto | Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga |
| 29 | Festival Prof M.Yamin | Perlunya mengangkat ketokohan M.Yamin sebagai salah satu tokoh nasional yang berasal dari Sawahlunto melalui berbagai kegiatan berskala nasional dan lokal sehingga semangat nasionalisme M. Yamin tetap mengalir di tengah masyarakat Sawahlunto dan Nasional | Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga |
| 30 | Bimtek Pengembangan SDM Pemasaran Pariwisata | Perlunya peningkatan kapasitas pelaku promosi pariwisata dari berbagai kalangan untuk menghasilkan pelaku promosi pariwisata yang profesional dan bersertifikasi | Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga |
| 31 | Pembangunan Historikal Park | Agar kawasan kandi semakin berkembang, dengan bertambahnya destinasi baru untuk menjawab dari kebutuhan wisata untuk menjadikan kawasan kandi menjadi kawasan wisata, maka perlu pengembangan Historikal Park untuk dijadikan salah satu kawasan baru dengan memunculkan kota Sawahlunto zaman dulunya. | Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga |
| 32 | Fasilitasi Pengembangan Geopark Nasional sawahlunto | Untuk melengkapi sapsras dari Geopark, dengan pembuatan sign/tanda/petunjuk yang mencirikhaskan Geopark Sawahlunto serta kegiatan penunjang untuk menjadikan Geopark Nasional menjadi UNESCO GLOBAL GEOPARK (UGG) Taman Bumi Warisan Dunia. | Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga |
| 33 | IJAZAH (INSENTIF BAGI PENYELENGGARA JENAZAH) | Saat ini petugas keagamaan yang memiliki peran yang sangat penting adalah penyelenggara jenazah. Di mana jumlahnya semakin berkurang dari waktu ke waktu sementara keberadaannya sangat diperlukan. Di kota Sawahlunto petugas penyelenggara jenazah diprioritaskan untuk dua kecamatan yaitu kecamatan Lembah Segar dan Barangin. Hal ini disebabkan karena dua kecamatan lainnya yaitu Kecamatan Talawi dan Silungkang memiliki nagari dimana untuk urusan keagamaan diserahkan sepenuhnya kepada pengurus nagari yang dalam istilah adat disebut dengan Malin. Selama ini penyelenggara jenazah melaksanakan tugasnya secara sosial penuh dengan keikhlasan dan dedikasi. Hal inilah yang mendorong Pemerintah Kota Sawahlunto merasa perlu untuk memberikan apresiasi dan | Setdako |



| No | Nama INOVASI | Penjelasan/Keterangan Inovasi | OPD Pelaksana |
|----|---|---|---------------|
| | | motivasi berupa pemberian insentif atas jasa yang dilakukannya sehingga dapat memicu kinerja petugas tersebut. Di samping itu juga keberadaan petugas ini sangat mendukung pencapaian salah satu misi kota Sawahlunto yaitu menciptakan kehidupan beragama dan budaya yang semakin baik. | |
| 34 | IMMAGARI (INS ENTIFF BAGI IMAM DAN MUADZIN MASJID NAGARI) | Sawahlunto merupakan salah satu kota di provinsi Sumatera Barat yang terdiri dari 4 kecamatan, 10 kelurahan dan 27 desa. Di samping itu Sawahlunto juga memiliki wilayah administratif berupa nagari. Jumlah nagari di Sawahlunto sebanyak 10 nagari yaitu Talawi, Sijantang, Salak, Kolok, Talago Gunung, Balai Batu Sandaran, Lumindai, Lunto, Kubang dan Kajai. Saat ini petugas keagamaan yang memiliki peran yang sangat penting adalah imam dan muadzin masjid nagari. Di kota Sawahlunto masing-masing nagari memiliki masjid yang petugas keagamaannya ditetapkan oleh Kerapatan Adat Nagari (KAN). Setiap masjid nagari memiliki petugas berupa imam dan muadzin. Di mana keduanya bertugas membantu kelancaran dan menciptakan kenyamanan pelaksanaan ibadah sehingga menambah kekhusyukan beribadah. Selama ini kedua petugas keagamaan tersebut melaksanakan tugasnya secara sosial penuh dengan keikhlasan dan dedikasi. Hal inilah yang mendorong Pemerintah Kota Sawahlunto merasa perlu untuk memberikan apresiasi dan motivasi berupa pemberian insentif atas jasa yang dilakukannya sehingga dapat memicu kinerja petugas tersebut. Di samping itu juga keberadaan petugas ini sangat mendukung pencapaian salah satu misi Kota Sawahlunto yaitu menciptakan kehidupan beragama dan budaya yang semakin baik. | Setdako |
| 35 | GERAKAN SAWAHLUNTO MENGHAFAL AL- QUR'AN | Mengingat Sawahlunto saat ini sedang gencar mempersiapkan diri menjadi salah satu kota tujuan wisata di Sumatera Barat, salah satu cara untuk membentengi generasi muda dari dampak modernisasi dan westernisasi yang mendukung kepariwisataan adalah melalui pendidikan hafalan Al-Qur'an. Di samping itu tidak kalah pentingnya pendidikan hafalan Al-Qur'an ini mampu meningkatkan kecerdasan generasi muda. Begitu pentingnya pendidikan di bidang hafalan Al- Qur'an, alangkah baiknya Pemerintah Kota Sawahlunto menciptakan suatu terobosan yaitu melalui "Gerakan Sawahlunto Menghafal Al-Qur'an" dengan target hafalan minimal 1 juz/orang/tahun. | Setdako |
| 36 | Pembangunan Command | Ruangan pusat visualisasi dan integrasi data, baik yang diperoleh melalui online, offline, | Setdako |



| No | Nama INOVASI | Penjelasan/Keterangan Inovasi | OPD Pelaksana |
|----|--|--|---------------|
| | Center | internal maupun eksternal disajikan secara bersamaan di sebuah layar lebar video wall. Salah satu fungsi command center yang terkenal adalah sebagai monitoring room. Tetapi tidak hanya itu, command center sangat membantu dalam mempermudah jalannya meeting dan koordinasi antar bidang. Command center juga dapat membantu memastikan setiap keputusan penting, respon dan aksi yang diambil adalah seakurat mungkin sesuai data yang ada. Command center sangat penting bagi kantor instansi pemerintahan dan perusahaan-perusahaan yang memerlukan manajemen krisis. Beberapa kantor pusat daerah di Indonesia telah memiliki command center sebagai pusat integrasi data mereka, untuk koordinasi dengan SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) yang lebih efisien | |
| 37 | Kliping Digital | Sebuah aktifitas / kegiatan menggunting atau memotong bagian-bagian tertentu dari sebuah koran yang memuat berita tentang kota Sawahlunto dan kemudian dilanjutkan dengan proses menempelkan guntingan-guntingan tersebut pada sebuah media kemudian di scan dan di upload ke website pemerintah kota | Setdako |
| 38 | Jaringan antar OPD/Jaringan Terintegrasi | Suatu sistem di mana semua OPD di pemerintah kota sawahlunto diintegrasikan ke dalam suatu jaringan, yang menyediakan konektivitas digital untuk menunjang suatu ruang lingkup pelayanan yang luas yang keuntungannya berupa fleksibilitas dan penghematan biaya, karena biaya untuk sistem yang terintegrasi ini akan jauh lebih murah apabila menggunakan sistem yang terpisah | Setdako |

Berdasarkan data dari tabulasi diatas dapat kita sajikan sebaran data Inovasi Daerah Kota Sawahlunto tahun 2020 sebagai berikut :

a. Berdasarkan asal usulan inisiatif Inovasi Daerah

| No | Asal Usulan Inisiatif Inovasi Daerah | Jumlah | Persentase (%) |
|-------|--------------------------------------|--------|----------------|
| 1 | Kepala Daerah | 0 | 0 |
| 2 | Anggota DPRD | 0 | 0 |
| 3 | ASN | 0 | 0 |
| 4 | Perangkat Daerah | 38 | 100 |
| 5 | Anggota Masyarakat | 0 | 0 |
| Total | | 38 | 100 |

b. Sebaran data usulan Inovasi Daerah dari Perangkat Daerah di Kota Sawahlunto

| No | Organisai Perangkat Daerah (OPD) | Jumlah | Persentase (%) |
|----|----------------------------------|--------|----------------|
| 1 | Dinas Pendidikan | 3 | 7.89 |



| | | | |
|-------|---|----|-------|
| 2 | RSUD | 6 | 15.79 |
| 3 | Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | 6 | 15.79 |
| 4 | Dinas Perhubungan | 2 | 5.26 |
| 5 | Dinas Pariwisata | 15 | 39.47 |
| 6 | Setdako | 6 | 15.79 |
| Total | | 38 | 100 |

4.3.4. Kegiatan Inovasi Tahun 2021

Adapun untuk kegiatan Inovasi Daerah Tahun 2021, Program Inovasi Daerah Kota Sawahlunto mencanangkan Konsep "**Inovasi Daerah yang sistematis dan komprehensif**" dan menitikberatkan kegiatannya kepada 7 sektor pengembangan utama :

1. Pengembangan Program pendidikan Dasar dan Menengah.
2. Peningkatan kesejahteraan masyarakat Kota Sawahlunto dengan penekanan kepada konsep ekonomi kreatif.
3. Optimalisasi kepariwisataan Kota Sawahlunto.
4. Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Pemerintah.
5. Perbaikan tata kelola pemerintah dan Inovasi Pelayanan Publik.
6. Strategi pemulihan sektor-sektor yang instabilitas disebabkan oleh pandemik Covid-19.
7. Kolaborasi atas semua stakeholder dalam menggerakkan program Inovasi Daerah di Kota Sawahlunto.

Melalui Tim Evaluasi Inisiatif Inovasi daerah (TEI2D) Kota Sawahlunto maka diharapkan setiap tahunnya program Inovasi Daerah di Kota Sawahlunto dapat dijaga keberlanjutannya dan memberikan dampak yang signifikan terhadap semua sektor kehidupan di Pemerintahan Kota Sawahlunto. Untuk tahun 2021 Program Inovasi Daerah juga dicanangkan sebuah program "**Top Ten Innovation**". Diharapkan melalui program ini penggiat Inovasi Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Sawahlunto berkompetisi dan berkolaborasi lebih optimal untuk menghasilkan Inovasi Daerah yang berkualitas dan sepuluh (10) terbaiknya akan mendapatkan reward dari Pemerintah Kota Sawahlunto.



BAB V

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Rencana program dan kegiatan prioritas merupakan rinci yang menjelaskan kode rekening, nama program/kegiatan, indikator kinerja program/kegiatan, tahun rencana yang meliputi lokasi, target pencapaian kinerja dan kebutuhan dana/pagu indikatif, yang meliputi target pencapaian kerja dan kebutuhan dana/pagu indikatifnya. Klasifikasi program dan kegiatan dituangkan secara lengkap dalam matrik rencana program dan kegiatan prioritas seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Sawahlunto.

RKPD Kota Sawahlunto merupakan gambaran rencana prioritas pembangunan Pemerintah Kota Sawahlunto yang akan dilaksanakan tahun 2021 berdasarkan evaluasi capaian hasil pembangunan Tahun 2019. Evaluasi dilakukan untuk mengidentifikasi permasalahan pembangunan yang telah dilaksanakan, untuk dibuat analisisnya sebagai bahan perencanaan pembangunan untuk dapat memecahkan permasalahan di tahun-tahun sebelumnya, agar perencanaan menjadi lebih efektif dan dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat Kota Sawahlunto.

Rencana kerja pembangunan pada semua bidang yang akan dilaksanakan pada Tahun 2021 oleh seluruh OPD disusun setelah dilakukan sinkronisasi melalui Verifikasi Renja OPD dan Forum Gabungan OPD yang dilaksanakan pada tanggal 10 Maret s/d 20 Maret 2020, dan guna mendapatkan masukan dari stake holder kota dan respon masyarakat rencana kerja ini dibahas melalui Musrenbang Kota yang dilaksanakan pada 14 April 2020.

Perencanaan pembangunan yang telah disusun bersama tidak mungkin seluruhnya menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di Kota Sawahlunto. Namun demikian, melalui program/kegiatan yang telah direncanakan diharapkan dapat mengurangi permasalahan pembangunan secara bertahap, terutama permasalahan pembangunan yang menyangkut kebutuhan mendasar masyarakat.

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2021 disusun berdasarkan hasil analisa yang merupakan penjabaran dari arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah dalam rangka mendukung pencapaian Visi dan Misi pembangunan Daerah Kota Sawahlunto.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Sawahlunto ini selanjutnya dibiayai dari APBD Kota Sawahlunto serta sebagian diajukan kepada Pemerintah Propinsi dan Pusat untuk dibiayai melalui APBD Propinsi dan APBN.

5.1 Rencana Program dan Kegiatan menurut OPD dan Urusan Pemerintahan

Rencana Program dan Kegiatan menurut OPD dan Urusan Pemerintahan dapat dilihat pada tabel berikut ini:



Tabel 5.1
RUMUSAN RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN OPD TAHUN 2021 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2022
KOTA SAWAHLUNTO

OPD: DINAS PENDIDIKAN

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan | Lokasi | Indikator | Target | Pagu Indikatif (Rp.) | Prakiraan Maju (Rp.) |
|-------------------|--|-----------------------------------|---|-----------|-----------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | |
| 1 1 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN | | | | 35,443,013,720 | 40,854,515,778 |
| 1 1 1 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | | | | 9,649,900,000 | 11,192,435,000 |
| 1 1 1 2.01 | Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | 24,000,000 | 27,600,000 |
| 1 1 1 2.01 2 | Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan | Kota Sawahlunto, Barangin, Santua | jumlah dokumen dihasilkan | 3 dokumen | 4,500,000 | 5,175,000 |
| 1 1 1 2.01 3 | Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah | Kota Sawahlunto, Barangin, Santua | Jumlah bendera/ umbul-umbul papan data/ spanduk yang diadakan | 12 bulan | 15,000,000 | 17,250,000 |
| 1 1 1 2.01 4 | Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah | Kota Sawahlunto, Barangin, Santua | Jumlah dokumen renja yang dihasilkan | 1 dokumen | 4,500,000 | 5,175,000 |
| 1 1 1 2.02 | Administrasi Keuangan | | | | 6,734,500,000 | 7,744,675,000 |
| 1 1 1 2.02 1 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Kota Sawahlunto, Barangin, Santua | Jumlah Tenaga Non PNS yang difasilitasi | 326 Orang | 6,734,500,000 | 7,744,675,000 |
| 1 1 1 2.03 | Administrasi Umum | | | | 2,641,400,000 | 3,090,160,000 |
| 1 1 1 2.03 1 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Kota Sawahlunto, Barangin, Santua | Jumlah jasa surat menyurat yang diadakan | 12 bulan | 6,000,000 | 6,900,000 |
| 1 1 1 2.03 2 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Kota Sawahlunto, Barangin, Santua | Jumlah rekening listrik, air dan telepon yang dibayarkan | 12 bulan | 69,400,000 | 79,810,000 |
| 1 1 1 2.03 7 | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | Kota Sawahlunto, Barangin, Santua | Jumlah penatausaha keuangan dan barang yang dibayarkan | 12 bulan | 894,000,000 | 1,028,100,000 |
| 1 1 1 2.03 8 | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | Kota Sawahlunto, Barangin, Santua | Jumlah alat dan bahan kebersihan yang diadakan | 12 bulan | 16,000,000 | 18,400,000 |
| 1 1 1 2.03 10 | Penyediaan Alat Tulis Kantor | Kota Sawahlunto, Barangin, Santua | Jumlah ATK yang Diadakan | 12 Bulan | 100,000,000 | 140,000,000 |



| Kode | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan | Lokasi | Indikator | Target | Pagu Indikatif (Rp.) | Prakiraan Maju (Rp.) |
|-------------------|--|---|---|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 1 1 2.03 11 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Kota Sawahlunto, Barangin, Santua | Jumlah barang cetak dan penggandaan yang diadakan | 12 bulan | 250,000,000 | 300,000,000 |
| 1 1 1 2.03 12 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Kota Sawahlunto, Barangin, Santua | Jumlah komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang diadakan | 12 bulan | 10,000,000 | 11,500,000 |
| 1 1 1 2.03 17 | Penyediaan Makanan dan Minuman | Kota Sawahlunto, Barangin, Santua | Jumlah makanan dan minuman yang diadakan | 12 bulan | 258,000,000 | 300,000,000 |
| 1 1 1 2.03 18 | Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah | Kota Sawahlunto, Barangin, Santua | Jumlah rakorkon yang diikuti | 12 bulan | 673,000,000 | 773,950,000 |
| 1 1 1 2.03 24 | Pengadaan Peralatan Gedung Kantor | Kota Sawahlunto, Barangin, Santua | Jumlah perlengkapan kantor yang diadakan | 4 Unit | 55,000,000 | 63,250,000 |
| 1 1 1 2.03 28 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | Kota Sawahlunto, Barangin, Santua | Jumlah bulan untuk pemeliharaan gedung kantor | 12 bulan | 75,000,000 | 98,000,000 |
| 1 1 1 2.03 30 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | Kota Sawahlunto, Barangin, Santua | Jumlah kendaraan Dinas Operasional yang dipelihara | 12 bulan | 200,000,000 | 230,000,000 |
| 1 1 1 2.03 34 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor | Kota Sawahlunto, Barangin, Santua | Jumlah bulan untuk pemeliharaan peralatan gedung kantor | 12 bulan | 35,000,000 | 40,250,000 |
| 1 1 1 2.04 | Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | | | | 250,000,000 | 330,000,000 |
| 1 1 1 2.04 9 | Pendidikan dan Pelatihan Formal | Kota Sawahlunto, Barangin, Santua | Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal Jumlah kegiatan yang dilaksanakan | 75 orang 1 kegiatan | 250,000,000 | 330,000,000 |
| 1 1 2 | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | | | | 24,898,713,720 | 28,633,520,778 |
| 1 1 2 2.01 | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | | | | 16,578,299,111 | 19,069,543,978 |
| 1 1 2 2.01 6 | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Luas mushollah SDN 01 Talawi Mudik | 1 Unit | 120,000,000 | 138,000,000 |
| 1 1 2 2.01 7 | Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Luas rumah dinas SDN 05 Kusiba | 1 Unit | 50,000,000 | 57,500,000 |
| 1 1 2 2.01 12 | Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, | Kota Sawahlunto, | Jumlah DAM SDN 29 Lumindai | 1 Paket | 1,885,000,000 | 2,172,250,000 |



| Kode | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan | Lokasi | Indikator | Target | Pagu Indikatif (Rp.) | Prakiraan Maju (Rp.) |
|---------------|---|-----------------------------------|---|---|----------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | Prasarana dan Utilitas Sekolah | Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | jumlah folding gate dan tralis di SDN 01 Talawi Mudik Jumlah pagar, gerbang dan cor halaman SDN 14 Kumbayau Luas dam SDN 08 Kumbayau Luas Dam SDN 16 Sikalang Luas pagar dan gerbang SDN 07 Talawi Hilir luas pagar dan gerbang SDN 12 Talawi Mudik Luas pagar SDN 03 Tumpuk Luas Pavling block SDN 06 Lumindai Luas Pavling block SDN 08 Silungkang Duo Luas Pavling block SDN 15 Kumanie Ateh Panjang dam dan pagar SDN 05 Kolok Mudik Panjang dam dan pagar SDN 17 Air Dingin Panjang pagar belakang SDN 09 Talawi Hilir Panjang pagar dan gerbang SDN 11 Kampung Surian Panjang pagar SDN 09 Muaro Kalaban Panjang pagar SDN 13 Silungkang Oso | 1 unit 1 Paket 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit | | |
| 1 1 2 2.01 14 | Pengadaan Mebeluer Sekolah | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, | Jumlah kursi meja SD Jumlah kursi meja SMP | 580 Unit 190 Unit | 1,001,000,000 | 1,151,150,000 |



| Kode | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan | Lokasi | Indikator | Target | Pagu Indikatif (Rp.) | Prakiraan Maju (Rp.) |
|---------------|---|---|---|--|----------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Semua Kelurahan | | | | |
| 1 1 2 2.01 15 | Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah lemari kelas SD | 50 Buah | 100,000,000 | 115,000,000 |
| 1 1 2 2.01 16 | Pengadaan Perlengkapan Sekolah | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah drumband SDN 19 Santur | 1 Paket | 50,000,000 | 57,500,000 |
| 1 1 2 2.01 17 | Pengadaan Perlengkapan Siswa | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah sarana prasarana yang dibantu Jumlah SD yang sarana dan prasarananya sesuai standar | 500 Orang 12 Sekolah | 4,199,000,000 | 4,828,850,000 |
| 1 1 2 2.01 18 | Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruangan | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah bulan untuk pemeliharaan peralatan gedung kantor | 12 bulan | 100,000,000 | 115,000,000 |
| 1 1 2 2.01 21 | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | BOS SD Jumlah SD Negeri se Kota Sawahlunto yang diberi bantuan BOSDA | 62 sekolah 55 Sekolah | 5,696,249,111 | 6,550,686,478 |
| 1 1 2 2.01 23 | Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah sekolah yang akan dimonitoring Jumlah sekolah yang mengikuti ujian standar kota | 73 Sekolah 71 Sekolah | 174,000,000 | 200,100,000 |
| 1 1 2 2.01 25 | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah cabang olahraga KOSN yang diikuti Jumlah cabang yang dilombakan Jumlah club olimpiade yang difasilitasi Jumlah sekolah yang mengikuti lomba Jumlah siswa dan mahasiswa yang diberi bantuan jumlah siswa yang difasilitasi | 11 Cabang 17 Cabang 5 Club 71 Sekolah 450 Orang 100 Orang | 2,699,300,000 | 3,104,195,000 |



| Kode | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan | Lokasi | Indikator | Target | Pagu Indikatif (Rp.) | Prakiraan Maju (Rp.) |
|-------------------|--|---|--|-------------|----------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | Jumlah siswa yang mengikuti center MIPA | 40 Orang | | |
| | | | jumlah siswa yang mengikuti lomba | 500 Orang | | |
| 1 1 2 2.01 27 | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah forum guru SD dan SMP yang difasilitasi | 1 Forum | 483,750,000 | 556,312,500 |
| | | | Jumlah guru SD yang mengikuti olimpiade | 40 orang | | |
| | | | Jumlah guru tahfidz berkarakter yang dilatih | 148 orang | | |
| | | | Jumlah KKG dan MGMP yang difasilitasi | 23 Kelompok | | |
| | | | Jumlah peserta yang mengikuti bimbingan dan pelatihan pembelajaran berbasis STEM | 50 Orang | | |
| | | | jumlah peserta yang mengikuti daurah tafizh | 40 orang | | |
| | | | Jumlah peserta yang mengikuti magang | 20 orang | | |
| | | | jumlah sekolah yang mengikuti bimbingan dan pelatihan | 75 Sekolah | | |
| 1 1 2 2.01 28 | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah sekolah yang dimonitoring | 85 Sekolah | 20,000,000 | 23,000,000 |
| 1 1 2 2.02 | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | | | | 6,846,260,609 | 7,873,199,700 |
| 1 1 2 2.02 2 | Penambahan Ruang Kelas Baru | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Luas ruang kelas SMPN 9 Sawahlunto | 1 Unit | 150,000,000 | 172,500,000 |
| 1 1 2 2.02 8 | Pembangunan Asrama Sekolah | Kota Sawahlunto, Barangin, Semua Kelurahan | Luas asrama putri SMPN 2 Sawahlunto | 1 Unit | 750,000,000 | 862,500,000 |
| 1 1 2 2.02 12 | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, | Jumlah cctv SMPN 2 Sawahlunto | 1 Paket | 960,000,000 | 1,104,000,000 |



| Kode | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan | Lokasi | Indikator | Target | Pagu Indikatif (Rp.) | Prakiraan Maju (Rp.) |
|-------------------|---|---|--|---|----------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Semua Kelurahan | jumlah DAM dan pengecoran SMPN 1 Sawahlunto Jumlah lampu penerangan lingkungan asrama/ sekolah SMPN 2 Sawahlunto Luas bak penampungan air bersih panjang dam ,pagar samping dan belakang SMPN 7 Sawahlunto panjang pagar SMPN 1 pembatas ruang kelas SMPN 8 | 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 paket 1 Unit 1 Unit | | |
| 1 1 2 2.02 27 | Pengadaan Perlengkapan Sekolah | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah SMP yang sarana dan prasarannya sesuai standar | 11 Sekolah | 1,700,000,000 | 1,955,000,000 |
| 1 1 2 2.02 32 | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | BOS SMP Jumlah sekolah yang mengikuti sosialisasi Jumlah SMP Negeri se Kota Sawahlunto yang diberi bantuan | 12 bulan 70 Sekolah 9 Sekolah | 3,165,060,609 | 3,639,819,700 |
| 1 1 2 2.02 36 | Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah sekolah yang mengikuti UN dan UAS | 71 Sekolah | 90,000,000 | 103,500,000 |
| 1 1 2 2.02 39 | Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah kelompok yang difasilitasi | 13 Kelompok | 19,500,000 | 22,425,000 |
| 1 1 2 2.02 41 | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah operator yang dapat mengolah dapodik | 71 Orang | 11,700,000 | 13,455,000 |
| 1 1 2 2.03 | Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) | | | | 557,500,000 | 636,625,000 |
| 1 1 2 2.03 1 | Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Luas PAUD harapan kita desa BBS Luas PAUD melati desa guguk balang | 2 Unit 1 Unit | 40,000,000 | 46,000,000 |



| Kode | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan | Lokasi | Indikator | Target | Pagu Indikatif (Rp.) | Prakiraan Maju (Rp.) |
|-------------------|---|---|---|---|----------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 1 2 2.03 2 | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Luas PP permata bunda Kamp.teleng Kel.pasar Luas TK an Nur Kayu gadang Luas TK tunas Bangsa Taratak Bancah | 1 Unit 1 Unit 1 Unit | 175,000,000 | 196,750,000 |
| 1 1 2 2.03 3 | Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD | Kota Sawahlunto, Silungkang, Semua Kelurahan | Luas TK Aisyiah Silungkang | 1 Unit | 50,000,000 | 57,500,000 |
| 1 1 2 2.03 7 | Pengadaan Mebeluer PAUD | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah mobiler PAUD yang diadakan | 10 buah | 64,000,000 | 73,600,000 |
| 1 1 2 2.03 12 | Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Persentase APE PAUD yang tersedia | 33 Paket | 70,000,000 | 80,500,000 |
| 1 1 2 2.03 16 | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah operator yang mampu mengolah dapodik | 123 lembaga | 19,000,000 | 21,850,000 |
| 1 1 2 2.03 17 | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah kelompok kerja guru TK yang difasilitasi jumlah lembaga yang mengikuti sosialisasi dan monitoring jumlah paud dan dikmas yang diakreditasi | 4 Kelompok 123 lembaga 50 lembaga | 139,500,000 | 160,425,000 |
| 1 1 2 2.04 | Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | | | | 916,654,000 | 1,054,152,100 |
| 1 1 2 2.04 1 | Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Luas Aula yang di rehab Panjang Dam yang dibangun | 1 Unit 1 Unit | 350,000,000 | 402,500,000 |
| 1 1 2 2.04 9 | Pengadaan Perlengkapan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah peralatan/ media pendidikan dan sound system yang diadakan | 1 paket | 25,000,000 | 28,750,000 |
| 1 1 2 2.04 12 | Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, | Jumlah kelompok yang difasilitasi | 9 Kelompok | 419,654,000 | 482,602,100 |



| Kode | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan | Lokasi | Indikator | Target | Pagu Indikatif (Rp.) | Prakiraan Maju (Rp.) |
|-------------------|---|---|--|---|----------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Semua Kelurahan | Jumlah operasional SPNF SKB difasilitasi | 12 bulan | | |
| 1 1 2 2.04 13 | Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah kelompok yang melaksanakan ujian paket | 1 Kelompok | 6,000,000 | 6,900,000 |
| 1 1 2 2.04 14 | Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah kelompok bermain yang difasilitasi | 2 Kelompok | 75,000,000 | 86,250,000 |
| 1 1 2 2.04 15 | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan keterampilan pembuatan kue kering yang memperoleh sertifikat | 1 Kegiatan | 25,000,000 | 28,750,000 |
| 1 1 2 2.04 16 | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah kelompok keaksaran fungsional yang difasilitasi | 2 Kelompok | 16,000,000 | 18,400,000 |
| | | | Jumlah lembaga yang dibiayai | 2 lembaga | | |
| 1 1 4 | PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN | | | | 894,400,000 | 1,028,560,000 |
| 1 1 4 2.01 | Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | | | | 894,400,000 | 1,028,560,000 |
| 1 1 4 2.01 1 | Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | jumlah berkas yang dinilai angka kredit jumlah guru dan murid jumlah guru ,kepsek dan pengawas yang lomba jumlah guru membuat alat peraga jumlah ikatan guru Jumlah kegiatan tk kota dan provinsi HAN jumlah kepsek paud yang dilatih jumlah kepsek yang dilatih jadi cawas | 75 berkas 200 orang 12 orang 40 orang 1 kelompok 2 tingkat 33 orang 15 orang | 693,400,000 | 797,410,000 |



| Kode | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan | Lokasi | Indikator | Target | Pagu Indikatif (Rp.) | Prakiraan Maju (Rp.) |
|--------------|---|---|--|---|-----------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | jumlah peserta jambora jumlah sekolah yang di monitoring jumlah TPK yang dilatih dalam 2 kegiatan jumlah ulp dan pengawas yang difasilitasi | 60 orang 73 sekolah 200 orang 12 bulan | | |
| 1 1 4 2.01 2 | Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah lembaga yang difasilitasi DAK BOP Jumlah pendidik PAUD yang difasilitasi | 2 lembaga 2 pokja | 201,000,000 | 231,150,000 |
| TOTAL | | | | | 35,443,013,720 | 40,854,515,778 |



OPD: DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan | Lokasi | Indikator | Target | Pagu Indikatif (Rp.) | Prakiraan Maju (Rp.) |
|-------------------|--|---|--|------------|-----------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | |
| 1 2 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN | | | | 51,881,800,000 | 62,420,781,000 |
| 1 2 1 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | | | | 6,922,660,000 | 7,961,059,000 |
| 1 2 1 2.02 | Administrasi Keuangan | | | | 4,241,560,000 | 4,877,794,000 |
| 1 2 1 2.02 1 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dibayarkannya honor pegawai kontrak dan honorer (bulan) | 12 bulan | 3,923,870,000 | 4,512,450,500 |
| 1 2 1 2.02 7 | Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dibayarkannya honor penatausahaan keuangan dan barang (bulan) | 12 bulan | 317,690,000 | 365,343,500 |
| 1 2 1 2.03 | Administrasi Umum | | | | 2,670,860,000 | 3,071,489,000 |
| 1 2 1 2.03 1 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | pengiriman yang terfasilitasi | 12 bulan | 1,590,000 | 1,828,500 |
| | | | Tersedianya meterai (lembar) | 350 lembar | | |
| 1 2 1 2.03 2 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Terlaksananya pembayaran jasa komunikasi sumber daya air dan listrik (bulan) | 12 bulan | 189,850,000 | 218,327,500 |
| 1 2 1 2.03 8 | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | iuran redistribusi kebersihan | 4 triwulan | 26,600,000 | 30,590,000 |
| | | | sedot WC | 10 buah | | |
| | | | Tersedianya alat kebersihan kantor (bulan) | 12 bulan | | |
| 1 2 1 2.03 10 | Penyediaan Alat Tulis Kantor | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Tersedianya ATK (bulan) | 12 bulan | 31,640,000 | 36,386,000 |
| 1 2 1 2.03 11 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Tersedianya biaya fotocopy, barang cetakan dan penjilidan (bulan) | 12 bulan | 21,000,000 | 24,150,000 |
| 1 2 1 2.03 12 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Tersedianya komponen kelistrikan (bulan) | 12 bulan | 10,550,000 | 12,132,500 |
| 1 2 1 2.03 15 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Tersedianya surat kabar (jenis) | 2 jenis | 5,270,000 | 6,060,500 |
| 1 2 1 2.03 16 | Penyediaan Bahan Logistik | Kota Sawahlunto, | Tersedianya gas elpigi (bulan) | 12 bulan | 3,830,000 | 4,404,500 |



| Kode | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan | Lokasi | Indikator | Target | Pagu Indikatif (Rp.) | Prakiraan Maju (Rp.) |
|-------------------|--|---|--|----------------|-----------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | Kantor | Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Tersedianya oksigen (bulan) | 12 bulan | | |
| 1 2 1 2.03 17 | Penyediaan Makanan dan Minuman | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Ketersediaan makanan dan minuman rapat/pertemuan (bulan) | 12 bulan | 33,620,000 | 38,663,000 |
| 1 2 1 2.03 18 | Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Tersedianya biaya perjalanan dinas luar kota dan luar propinsi (bulan) | 12 bulan | 153,470,000 | 176,490,500 |
| 1 2 1 2.03 22 | Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah barang yang diadakan (paket) | 100 persentase | 216,210,000 | 248,641,500 |
| 1 2 1 2.03 24 | Pengadaan Peralatan Gedung Kantor | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah barang yang diadakan (paket) | 1 paket | 150,530,000 | 173,109,500 |
| 1 2 1 2.03 27 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Terpeliharanya rumah dinas (unit) | 1 paket | 10,550,000 | 12,132,500 |
| 1 2 1 2.03 28 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Terpeliharanya gedung kantor (paket) | 1 paket | 36,920,000 | 42,458,000 |
| 1 2 1 2.03 30 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Terpeliharanya kendaraan dinas (unit) | 181 unit | 950,000,000 | 1,092,500,000 |
| 1 2 1 2.03 32 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah perlengkapan kantor yang dipelihara (bulan) | 12 bulan | 52,860,000 | 60,789,000 |
| 1 2 1 2.03 34 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Terpeliharanya peralatan kantor (unit) | 93 unit | 26,370,000 | 30,325,500 |
| 1 2 1 2.03 38 | Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah Pustu yang dibangun | 1 paket | 750,000,000 | 862,500,000 |
| | | | Jumlah sarana kesehatan direhab | 1 pustu | | |
| 1 2 1 2.04 | Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | | | | 10,240,000 | 11,776,000 |
| 1 2 1 2.04 5 | Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah pakaian khusus yang diadakan (stel) | 0 stel | 10,240,000 | 11,776,000 |
| 1 2 2 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | | | | 44,073,770,000 | 53,441,546,500 |
| 1 2 2 2.01 | Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota | | | | 21,398,800,000 | 24,608,620,000 |



| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan | Lokasi | Indikator | Target | Pagu Indikatif (Rp.) | Prakiraan Maju (Rp.) |
|----------|----------|----------|-------------|---|--|---|---|-----------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1 | | | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 2 | 2 | 2.01 | 6 | Pengembangan Puskesmas | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah Puskesmas yang dikembangkan | 1 puskesmas | 17,313,800,000 | 19,910,870,000 |
| 1 | 2 | 2 | 2.01 | 13 | Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah prasarana dan pendukung Fasilitas pelayanan kesehatan yang dibiayai dana fikiran | 1 fasyankes | 1,550,000,000 | 1,782,500,000 |
| | | | | | | | Jumlah prasarana dan pendukung Fasilitas pelayanan kesehatan yang disediakan | 2 fasyankes | | |
| 1 | 2 | 2 | 2.01 | 14 | Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah Ketersediaan Alat Kedokteran/Kesehatan (paket) | 72 paket | 1,750,000,000 | 2,012,500,000 |
| 1 | 2 | 2 | 2.01 | 16 | Pengadaan Obat, Vaksin | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah Ketersediaan obat dan vaksin (paket) | 1 paket | 225,000,000 | 258,750,000 |
| | | | | | | | Persentase Ketersediaan Obat dan Vaksin indikator di puskesmas | 91 persen | | |
| 1 | 2 | 2 | 2.01 | 17 | Pengadaan Bahan Habis Pakai | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah Ketersediaan BMHP (paket) | 1 paket | 410,000,000 | 471,500,000 |
| | | | | | | | Persentase Ketersediaan Obat dan Vaksin indikator di puskesmas | 91 persen | | |
| 1 | 2 | 2 | 2.01 | 20 | Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah Alat Kedokteran Kesehatan yang dipelihara | 24 puskesmas dan buku | 150,000,000 | 172,500,000 |
| 1 | 2 | 2 | 2.02 | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | 22,525,970,000 | 28,661,576,500 |
| 1 | 2 | 2 | 2.02 | 1 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Persentase ibu hamil yang terlayani | 100 persen | 22,350,000 | 25,702,500 |
| 1 | 2 | 2 | 2.02 | 2 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Ibu hamil yang tidak mempunyai jaminan kesehatan mendapat jampersal (%) | 92 persen | 179,770,000 | 206,735,500 |



| Kode | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan | Lokasi | Indikator | Target | Pagu Indikatif (Rp.) | Prakiraan Maju (Rp.) |
|---------------|--|---|--|------------|----------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | Komplikasi kebidanan yang ditangani (%) | 100 persen | | |
| 1 2 2 2.02 3 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | bayi yang dilaksanakan Skrining Hipotiroid Kongenital (%) | 87 persen | 60,000,000 | 69,000,000 |
| 1 2 2 2.02 4 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Persentase anak usia 0 sampai 11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap (IDL) | 95 persen | 90,000,000 | 103,500,000 |
| 1 2 2 2.02 5 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Persentase anak sekolah yang mendapatkan pelayanan imunisasi | 95 persen | 50,000,000 | 57,500,000 |
| | | | Persentase murid yang diperiksa kesehatannya (%) | 100 persen | | |
| 1 2 2 2.02 6 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar melakukan deteksi dini faktor resiko PTM populasi usia lebih dari 15 tahun | 50 persen | 75,000,000 | 86,250,000 |
| 1 2 2 2.02 7 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Persentase lansia yang berkunjung ke fasilitas kesehatan | 75 persen | 21,160,000 | 24,334,000 |
| 1 2 2 2.02 8 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Persentase Penderita hipertensi yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai Standar | 100 persen | 12,250,000 | 14,087,500 |
| 1 2 2 2.02 9 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Persentase Penderita Diabetes yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai Standar | 100 persen | 10,500,000 | 12,075,000 |
| 1 2 2 2.02 10 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Persentase pasien gangguan jiwa (ODGJ) berat yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai Standar | 100 persen | 18,500,000 | 21,275,000 |
| 1 2 2 2.02 11 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Case Detection Rate (CDR) TB | 70 persen | 85,000,000 | 97,750,000 |



| Kode | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan | Lokasi | Indikator | Target | Pagu Indikatif (Rp.) | Prakiraan Maju (Rp.) |
|---------------|---|---|--|---------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 2 2 2.02 12 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | persentase Kasus HIV/AIDS yang mendapatkan ARV | 100 persen | 65,000,000 | 74,750,000 |
| 1 2 2 2.02 14 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | persentase penanggulangan bencana yang teratasi | 100 persen | 10,000,000 | 11,500,000 |
| 1 2 2 2.02 15 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Persentase pelayanan kesehatan gizi masyarakat (%) | 85 persen | 54,510,000 | 62,686,500 |
| 1 2 2 2.02 16 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah kegiatan kesehatan kerja pada kelompok kerja informal di masyarakat yang terfasilitasi (kegiatan) | 3 kegiatan | 38,500,000 | 44,275,000 |
| 1 2 2 2.02 17 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Persentase Lingkungan sehat (%) | 79 persen | 81,500,000 | 93,725,000 |
| 1 2 2 2.02 19 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah puskesmas yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan tradisional (Puskesmas) | 6 puskesmas | 30,000,000 | 34,500,000 |
| 1 2 2 2.02 22 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Gangguan jiwa dan NAPZA yang ditanggulangi (%) | 100 persen | 25,000,000 | 28,750,000 |
| 1 2 2 2.02 23 | Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Persentase upaya kesehatan khusus yang dilaksanakan | 78 persen | 136,000,000 | 156,400,000 |
| 1 2 2 2.02 25 | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Persentase penyakit menular dan tidak menular yang tertangani | 92 persen | 185,000,000 | 212,750,000 |
| 1 2 2 2.02 26 | Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah peserta jaminan kesehatan Kota sawahlunto | 21000 orang | 14,955,260,000 | 19,955,260,000 |
| | | | Jumlah peserta jaminan kesehatan nasional yang terlayani (orang) (Puskesmas Kampung Teleng) | 7868 orang | | |



| Kode | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan | Lokasi | Indikator | Target | Pagu Indikatif (Rp.) | Prakiraan Maju (Rp.) |
|---------------|---|---|---|-------------|----------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | Jumlah peserta jaminan kesehatan nasional yang terlayani (orang) (Puskesmas Kolok) | 5958 orang | | |
| | | | Jumlah peserta jaminan kesehatan nasional yang terlayani (orang) (Puskesmas Lunto) | 5821 orang | | |
| | | | Jumlah peserta jaminan kesehatan nasional yang terlayani (orang) (Puskesmas Silungkang) | 9172 orang | | |
| | | | Jumlah peserta jaminan kesehatan nasional yang terlayani (orang) (Puskesmas Sungai Durian) | 10152 orang | | |
| | | | Jumlah peserta jaminan kesehatan nasional yang terlayani (orang) (Puskesmas Talawi) | 16674 orang | | |
| | | | Jumlah peserta jaminan kesehatan sumbar sakato | 13003 orang | | |
| | | | persentase cakupan pelayanan kesehatan peserta JKN | 16 persen | | |
| 1 2 2 2.02 29 | Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Status sehat Kota Sawahlunto | 3 level | 185,000,000 | 201,500,000 |
| 1 2 2 2.02 33 | Operasional Pelayanan Puskesmas | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Terlaksananya kegiatan operasional puskesmas dengan baik (bulan) (Puskesmas Kampung Teleng) | 12 bulan | 679,443,700 | 781,360,255 |
| | | | Terlaksananya kegiatan operasional puskesmas dengan baik (bulan) (Puskesmas Kolok) | 12 bulan | | |
| | | | Terlaksananya kegiatan operasional puskesmas dengan baik (bulan) (Puskesmas Lunto) | 12 bulan | | |



| Kode | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan | Lokasi | Indikator | Target | Pagu Indikatif (Rp.) | Prakiraan Maju (Rp.) |
|-------------------|---|---|--|------------------------|----------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | Terlaksananya kegiatan operasional puskesmas dengan baik (bulan) (Puskesmas Silungkang) | 12 bulan | | |
| | | | Terlaksananya kegiatan operasional puskesmas dengan baik (bulan) (Puskesmas Sungai Durian) | 12 bulan | | |
| | | | Terlaksananya kegiatan operasional puskesmas dengan baik (bulan) (Puskesmas Talawi) | 12 bulan | | |
| 1 2 2 2.02 34 | Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah Distribusi Obat dan E-logistic (Bulan) | 12 bulan | 4,821,226,300 | 5,544,410,245 |
| | | | Jumlah puskesmas dan dinas yang menyelenggara kan Bantuan operasional kesehatan | 7 Puskesmas dan Dinkes | | |
| | | | Jumlah Puskesmas mengelola limbah medis/b3 sesuai standar | 6 Puskesmas | | |
| | | | Jumlah Unit Penanggulangan gawat darurat Terpadu (unit) | 1 unit | | |
| | | | Laporan Kegiatan lembur P3K dan Dokter Jaga IGD 24 Jam (Bulan) | 12 bulan | | |
| | | | Terlaksananya kegiatan operasional instalasi farmasi dengan baik (bulan) | 12 bulan | | |
| 1 2 2 2.02 35 | Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Persentase Puskesmas yang terakreditasi | 100 persen | 550,000,000 | 643,750,000 |
| 1 2 2 2.02 37 | Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Persentase tertanggulangnya KLB/Wabah penyakit menular | 100 persen | 85,000,000 | 97,750,000 |
| 1 2 2 2.03 | Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi | | | | 79,000,000 | 90,850,000 |
| 1 2 2 2.03 1 | Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, | Jumlah Dokumen yang disusun | 1 dokumen | 64,000,000 | 73,600,000 |



| Kode | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan | Lokasi | Indikator | Target | Pagu Indikatif (Rp.) | Prakiraan Maju (Rp.) |
|-------------------|---|---|---|-------------|----------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Semua Kelurahan | | | | |
| 1 2 2 2.03 2 | Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Persentase Keluarga Sehat | 31 persen | 15,000,000 | 17,250,000 |
| 1 2 2 2.04 | Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaen/Kota | | | | 70,000,000 | 80,500,000 |
| 1 2 2 2.04 3 | Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah Puskesmas yang berprestasi | 1 fasyankes | 20,000,000 | 23,000,000 |
| | | | Jumlah tenaga kesehatan teladan | 9 tenaga | | |
| 1 2 2 2.04 4 | Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah pasien rujukan yang dilayani | 100 persen | 50,000,000 | 57,500,000 |
| 1 2 3 | PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN | | | | 165,870,000 | 190,750,500 |
| 1 2 3 2.02 | Pembinaan Teknis, Pengawasan Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota | | | | 165,870,000 | 190,750,500 |
| 1 2 3 2.02 1 | Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Persentase sumber daya manusia kesehatan yang dilatih dalam penggunaan obat yang rasional | 71 persen | 15,750,000 | 18,112,500 |
| 1 2 3 2.02 2 | Pelatihan dan Uji Kompetensi Tenaga Kesehatan | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah kegiatan pertemuan tenaga fungsional tertentu kesehatan yang dilaksanakan (kali) | 2 kali | 12,650,000 | 14,547,500 |
| 1 2 3 2.02 3 | Penyelenggaraan Pelatihan untuk Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah dokter dan bidan terlatih APN sesuai standar | 10 orang | 137,470,000 | 158,090,500 |
| | | | Jumlah Petugas yang memiliki sertifikat | 13 orang | | |
| | | | Terfasilitasinya kegiatan kursus-kursus singkat, on the job training, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis (bulan) | 12 bulan | | |
| 1 2 4 | PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN | | | | 185,250,000 | 213,037,500 |
| 1 2 4 2.01 | Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) | | | | 37,000,000 | 42,550,000 |



| Kode | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan | Lokasi | Indikator | Target | Pagu Indikatif (Rp.) | Prakiraan Maju (Rp.) |
|--------------|---|---|---|-----------|----------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 2 4 2.01 1 | Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Persentase Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro | 93 persen | 37,000,000 | 42,550,000 |
| 1 2 4 2.02 | Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 tertentu Perusahaan Rumah Tangga | | | | 22,000,000 | 25,300,000 |
| 1 2 4 2.02 1 | Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Persentase pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat | 62 persen | 22,000,000 | 25,300,000 |
| 1 2 4 2.03 | Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga | | | | 15,750,000 | 18,112,500 |
| 1 2 4 2.03 1 | Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT Sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Persentase Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT Sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga yang dilakukan pengawasan | 78 persen | 15,750,000 | 18,112,500 |
| 1 2 4 2.04 | Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) Antara Lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) | | | | 85,000,000 | 97,750,000 |



| Kode | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan | Lokasi | Indikator | Target | Pagu Indikatif (Rp.) | Prakiraan Maju (Rp.) |
|---|---|---|---|----------------|----------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 2 4 2.04 1 | Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain jasa boga, rumah makan/restoran dan Depot Air Minum (DAM) | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Persentase kualitas air minum masyarakat yang memenuhi syarat | 27 TPM dan DAM | 85,000,000 | 97,750,000 |
| 1 2 4 2.05 | Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan | | | | 10,500,000 | 12,075,000 |
| 1 2 4 2.05 1 | Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Persentase tindak lanjut dalam pengawasan penerbitan stiker pada makanan jajanan dan sentra makanan jajanan | 91 persen | 10,500,000 | 12,075,000 |
| 1 2 4 2.06 | Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga | | | | 15,000,000 | 17,250,000 |
| 1 2 4 2.06 1 | Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Persentase Post Market pada Produk Makanan- Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan yang diawasi | 91 persen | 15,000,000 | 17,250,000 |
| 1 2 5 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN | | | | 534,250,000 | 614,387,500 |
| 1 2 5 2.01 | Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota | | | | 215,000,000 | 247,250,000 |
| 1 2 5 2.01 1 | Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah anggota Pramuka SBH yang mendapatkan informasi kesehatan (orang) | 120 orang | 215,000,000 | 247,250,000 |
| Jumlah kebijakan yang mendukung PHBS (buah) | | | 2 buah | | | |
| Jumlah kegiatan perkemahan yang dilaksanakan (kali) | | | 4 kali | | | |



| Kode | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan | Lokasi | Indikator | Target | Pagu Indikatif (Rp.) | Prakiraan Maju (Rp.) |
|---|--|---|--|------------|----------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | Jumlah ormas dan dunia usaha yang bermitra (buah) | 3 buah | | |
| | | | Laporan Per Tahun Komisi Penanggulangan HIV/Aids (KPA) | 1 laporan | | |
| 1 2 5 2.02 | Pelaksanaan Sehat dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota | | | | 149,250,000 | 171,637,500 |
| 1 2 5 2.02 1 | Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah kegiatan GERMAS yang dilaksanakan (kali) | 4 kali | 149,250,000 | 171,637,500 |
| Jumlah kegiatan yang dilaksanakan (kali) | | | 1 kali | | | |
| Jumlah media promosi yang dicetak (item) | | | 10 item | | | |
| 1 2 5 2.03 | Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | 170,000,000 | 195,500,000 |
| 1 2 5 2.03 1 | Bimbingan Teknis Dan Supervisi Pengembangan Dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah desa/kelurahan siaga aktif dengan strata mandiri (desa/kel) | 1 desa/kel | 170,000,000 | 195,500,000 |
| Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan KKG PKK KB Kes (desa/kel) | | | 4 desa/kel | | | |
| Jumlah dokter kecil dan KKR yang terlatih (orang) | | | 995 orang | | | |
| Jumlah kategori posyandu yang dinilai (kategori) | | | 6 kategori | | | |
| 2 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | |
| 2 14 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | | | | 2,063,810,000 | 2,373,381,500 |
| 2 14 2 | PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK | | | | 60,000,000 | 69,000,000 |
| 2 14 2 2.01 | Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk | | | | 25,000,000 | 28,750,000 |



| Kode | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan | Lokasi | Indikator | Target | Pagu Indikatif (Rp.) | Prakiraan Maju (Rp.) |
|--------------------|--|---|---|--------------------|----------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2 14 2 2.01 5 | Penguatan Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Persentase Sekolah Menengah Atas dengan Status Sekolah Siaga Kependudukan (SSK) | 4 sekolah | 25,000,000 | 28,750,000 |
| 2 14 2 2.02 | Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota | | | | 35,000,000 | 40,250,000 |
| 2 14 2 2.02 12 | Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah KK yang diverifikasi dan didata baru | 19000 KK | 35,000,000 | 40,250,000 |
| 2 14 3 | PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) | | | | 1,888,810,000 | 2,172,131,500 |
| 2 14 3 2.01 | Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal | | | | 1,758,810,000 | 2,022,631,500 |
| 2 14 3 2.01 1 | Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah Peserta yang Mengikuti Kegiatan | 30 orang | 35,000,000 | 40,250,000 |
| 2 14 3 2.01 2 | Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK Sesuai Kearifan Budaya Lokal | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah Desa/Kelurahan Yang Mendapat KIE | 37 desa/kel | 25,000,000 | 28,750,000 |
| 2 14 3 2.01 5 | Pelaksanaan Hari Keluarga Nasional (Harganas) | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah Peserta/ Duta GenRe yang ikut dalam kompetisi Pemilihan Duta GenRe | 60 orang | 165,500,000 | 190,325,000 |
| | | | Jumlah Peserta /Keluarga yang berpartisipasi dalam peringatan Hari Keluarga Nasional (Harganas) | 1000 orang | | |
| | | | Jumlah Peserta Saka Kencana yang menjadi Anggota dan diBina | 60 orang | | |
| 2 14 3 2.01 8 | Pengelolaan operasional dan sarana di balai penyuluhan KKBPK | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah Balai Penyuluhan dan gudang Alkon yang difasilitasi | 5 balai dan gudang | 1,533,310,000 | 1,763,306,500 |
| | | | jumlah Paket yang dilaksanakan | 5 paket | | |
| 2 14 3 2.02 | Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/ Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) | | | | 70,000,000 | 80,500,000 |



| Kode | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan | Lokasi | Indikator | Target | Pagu Indikatif (Rp.) | Prakiraan Maju (Rp.) |
|--------------------|--|---|--|---------------|----------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2 14 3 2.02 3 | Penguatan pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB) | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah Kader KB yang difasilitasi | 235 orang | 70,000,000 | 80,500,000 |
| 2 14 3 2.03 | Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB Di Daerah Kabupaten/Kota | | | | 60,000,000 | 69,000,000 |
| 2 14 3 2.03 8 | Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah Pasangan Usia Subur yang dilayani sebagai Peserta KB baru | 857 PUS | 60,000,000 | 69,000,000 |
| 2 14 3 2.04 | Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB | | | | 0 | 0 |
| 2 14 3 2.04 1 | Penguatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah Kampung KB yang terbentuk dan dibina | 12 kampung KB | 0 | 0 |
| 2 14 4 | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) | | | | 115,000,000 | 132,250,000 |
| 2 14 4 2.01 | Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga | | | | 115,000,000 | 132,250,000 |
| 2 14 4 2.01 1 | Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Koseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah Kelompok BKR dan BKL yang Terbina | 37 kelompok | 60,000,000 | 69,000,000 |
| | | | Jumlah PIK-R yang Terbina | 23 kelompok | | |



| Kode | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan | Lokasi | Indikator | Target | Pagu Indikatif (Rp.) | Prakiraan Maju (Rp.) |
|---------------|---|---|--|----------|-----------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2 14 4 2.01 4 | Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah Kader KB yang dibina dan Terampil | 85 orang | 55,000,000 | 63,250,000 |
| TOTAL | | | | | 53,945,610,000 | 64,794,162,500 |



OPD: RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan | Lokasi | Indikator | Target | Pagu Indikatif (Rp.) | Prakiraan Maju (Rp.) |
|-------------------|--|---|--|-----------|-----------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | |
| 1 2 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN | | | | 47,510,289,000 | 54,636,832,350 |
| 1 2 1 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | | | | 2,856,650,000 | 3,285,147,500 |
| 1 2 1 2.02 | Administrasi Keuangan | | | | 1,516,650,000 | 1,744,147,500 |
| 1 2 1 2.02 1 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jasa pelayanan pegawai Non PNS yang difasilitasi (bulan) | 12 bulan | 1,516,650,000 | 1,744,147,500 |
| 1 2 1 2.03 | Administrasi Umum | | | | 1,090,000,000 | 1,253,500,000 |
| 1 2 1 2.03 2 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan (bulan) | 12 bulan | 500,000,000 | 575,000,000 |
| 1 2 1 2.03 22 | Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah perlengkapan kantor yang diadakan (jenis) | 2 jenis | 20,000,000 | 23,000,000 |
| 1 2 1 2.03 24 | Pengadaan Peralatan Gedung Kantor | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Peralatan gedung kantor yang diadakan (jenis) | 1 jenis | 20,000,000 | 23,000,000 |
| 1 2 1 2.03 25 | Pengadaan Mebeleur | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah mobiler rumah sakit yang diadakan (jenis) | 2 jenis | 20,000,000 | 23,000,000 |
| 1 2 1 2.03 30 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Pemeliharaan kendaraan roda empat dan roda dua yang dilaksanakan (bulan) | 12 bulan | 530,000,000 | 609,500,000 |
| 1 2 1 2.04 | Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | | | | 250,000,000 | 287,500,000 |
| 1 2 1 2.04 9 | Pendidikan dan Pelatihan Formal | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan pelatihan formal (orang) | 240 orang | 250,000,000 | 287,500,000 |
| 1 2 2 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | | | | 44,653,639,000 | 51,351,684,850 |
| 1 2 2 2.01 | Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota | | | | 15,173,639,000 | 17,449,684,850 |
| 1 2 2 2.01 8 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah bangunan rumah sakit yang dilakukan rehabilitasi (unit) | 1 Unit | 200,000,000 | 230,000,000 |
| 1 2 2 2.01 13 | Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, | Jumlah perlengkapan rumah tangga rumah sakit yang | 1 jenis | 14,133,639,000 | 16,253,684,850 |



| Kode | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan | Lokasi | Indikator | Target | Pagu Indikatif (Rp.) | Prakiraan Maju (Rp.) |
|-------------------|---|---|---|-----------|-----------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | Kesehatan | Semua Kelurahan | diadakan (jenis) | | | |
| | | | Jumlah sarana prasarana yang diadakan (jenis) | 1 jenis | | |
| 1 2 2 2.01 18 | Pemeliharaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah bangunan poliklinik rumah sakit yang dipelihara (unit) | 1 unit | 500,000,000 | 575,000,000 |
| | | | Jumlah bangunan rawat inap rumah sakit yang dipelihara (unit) | 1 unit | | |
| | | | Jumlah sarana rumah sakit yang dipelihara (unit) | 1 unit | | |
| 1 2 2 2.01 19 | Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Instalasi/jaringan rumah sakit yang terpelihara (bulan) | 12 bulan | 100,000,000 | 115,000,000 |
| | | | Instalasi pengolahan limbah rumah sakit yang terpelihara (bulan) | 12 bulan | | |
| 1 2 2 2.01 20 | Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Alat kesehatan di unit-unit layanan rumah sakit yang dilakukan pemeliharaan/kalibrasi (jenis) | 1 jenis | 240,000,000 | 276,000,000 |
| 1 2 2 2.02 | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | 29,280,000,000 | 33,672,000,000 |
| 1 2 2 2.02 32 | Operasional Pelayanan Rumah Sakit | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Ketersediaan barang/jasa sesuai kebutuhan operasional rumah sakit (bulan) | 12 bulan | 29,000,000,000 | 33,350,000,000 |
| 1 2 2 2.02 35 | Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Survey ulang akreditasi yang terlaksana | 1 null | 280,000,000 | 322,000,000 |
| 1 2 2 2.04 | Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaen/Kota | | | | 200,000,000 | 230,000,000 |
| 1 2 2 2.04 4 | Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah pasien yang mendapatkan pelayanan kesehatan lanjutan (orang) | 423 orang | 200,000,000 | 230,000,000 |
| TOTAL | | | | | 47,510,289,000 | 54,636,832,350 |



OPD: DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan | Lokasi | Indikator | Target | Pagu Indikatif (Rp.) | Prakiraan Maju (Rp.) |
|---------------|--|---|---|----------|-----------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | |
| 1 3 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | | | | 54,723,112,375 | 62,931,579,231 |
| 1 3 1 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | | | | 9,171,999,375 | 10,547,799,281 |
| 1 3 1 2.02 | Administrasi Keuangan | | | | 2,637,425,000 | 3,033,038,750 |
| 1 3 1 2.02 1 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah Pegawai Non PNS yang difasilitasi | 80 Orang | 2,637,425,000 | 3,033,038,750 |
| 1 3 1 2.03 | Administrasi Umum | | | | 6,384,574,375 | 7,342,260,531 |
| 1 3 1 2.03 1 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jasa surat menyurat yang disediakan | 12 bulan | 9,625,000 | 11,068,750 |
| 1 3 1 2.03 2 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan | 12 Bulan | 4,324,000,000 | 4,972,600,000 |
| 1 3 1 2.03 3 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jasa Peralatan dan Perlengkapanyang disediakan | 12 Bulan | 33,000,000 | 37,950,000 |
| 1 3 1 2.03 7 | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Penatausahaan keuangan dan barang yang dilaksanakan | 12 Bulan | 244,800,000 | 281,520,000 |
| 1 3 1 2.03 8 | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jasa kebersihan kantor yang disediakan | 12 Bulan | 55,975,000 | 64,371,250 |
| 1 3 1 2.03 10 | Penyediaan Alat Tulis Kantor | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Alat Tulis Kantor yang disediakan | 12 Bulan | 50,905,000 | 58,540,750 |
| 1 3 1 2.03 11 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Barang cetak dan penggandaan yang disediakan | 12 Bulan | 51,129,375 | 58,798,781 |
| 1 3 1 2.03 12 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan | 12 Bulan | 20,350,000 | 23,402,500 |



| Kode | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan | Lokasi | Indikator | Target | Pagu Indikatif (Rp.) | Prakiraan Maju (Rp.) |
|-------------------|---|---|---|-----------|----------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 3 1 2.03 15 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Bahan bacaan dan perundang-undangan yang disediakan | 12 Jenis | 4,800,000 | 5,520,000 |
| 1 3 1 2.03 17 | Penyediaan Makanan dan Minuman | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Makan dan minum yang disediakan | 12 Bulan | 36,600,000 | 42,090,000 |
| 1 3 1 2.03 18 | Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Luar Daerah yang difasilitasi | 12 Bulan | 422,500,000 | 485,875,000 |
| 1 3 1 2.03 20 | Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah kendaraan dinas, oprasional dan alat berat yang diadakan | 1 unit | 43,500,000 | 50,025,000 |
| 1 3 1 2.03 24 | Pengadaan Peralatan Gedung Kantor | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah peralatan gedung kantor dan labor yang diadakan | 25 unit | 100,000,000 | 115,000,000 |
| 1 3 1 2.03 28 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Gedung Kantor yang dipelihara | 12 Bulan | 100,475,000 | 115,546,250 |
| 1 3 1 2.03 30 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Kendaraan roda empat ,roda dua dan alat berat yang dipelihara | 12 Bulan | 738,185,000 | 848,912,750 |
| 1 3 1 2.03 32 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Perlengkapan gedung kantor dan labor yang dipelihara | 12 Bulan | 100,000,000 | 115,000,000 |
| 1 3 1 2.03 34 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Peralatan gedung kantor yang dipelihara | 12 Bulan | 48,730,000 | 56,039,500 |
| 1 3 1 2.04 | Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | | | | 150,000,000 | 172,500,000 |
| 1 3 1 2.04 9 | Pendidikan dan Pelatihan Formal | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal | 12 Bulan | 150,000,000 | 172,500,000 |
| 1 3 2 | PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) | | | | 7,775,000,000 | 8,941,250,000 |
| 1 3 2 2.01 | Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | | 3,975,000,000 | 4,571,250,000 |
| 1 3 2 2.01 2 | Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | jumlah dokumen perencanaan lingkungan hidup untuk konstruksi air tanah dan air baku | 1 Dokumen | 250,000,000 | 287,500,000 |



| Kode | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan | Lokasi | Indikator | Target | Pagu Indikatif (Rp.) | Prakiraan Maju (Rp.) |
|-------------------|--|---|---|------------|----------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 3 2 2.01 3 | Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup Untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah dokumen perencanaan lingkungan hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai | 1 Dokumen | 300,000,000 | 345,000,000 |
| 1 3 2 2.01 8 | Pembangunan Unit Air Baku | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah Bangunan air bersih/air baku yang dibangun | 1 Unit | 300,000,000 | 345,000,000 |
| 1 3 2 2.01 46 | Normalisasi/Restorasi/Pemeliharaan Sungai | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Panjang sungai yang terpelihara | 175000 m | 3,125,000,000 | 3,593,750,000 |
| 1 3 2 2.02 | Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | | 3,800,000,000 | 4,370,000,000 |
| 1 3 2 2.02 2 | Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Luas sawah yang beririgasi | 40 ha | 1,700,000,000 | 1,955,000,000 |
| 1 3 2 2.02 14 | Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Panjang saluran irigasi yang terpelihara | 4000 m | 2,100,000,000 | 2,415,000,000 |
| 1 3 6 | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE | | | | 1,565,000,000 | 1,799,750,000 |
| 1 3 6 2.01 | Pengelolaan dan pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota | | | | 1,565,000,000 | 1,799,750,000 |
| 1 3 6 2.01 1 | Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dokumen Perencanaan Teknis drainase perkotaan yang disusun | 10 Dokumen | 100,000,000 | 115,000,000 |
| 1 3 6 2.01 5 | Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan dan Lingkungan | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | panjang saluran drainase perkotaan yang dibangun | 1.59 Km | 715,000,000 | 822,250,000 |
| 1 3 6 2.01 9 | Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Panjang drainase yang dipelihara | 0.25 Km | 750,000,000 | 862,500,000 |
| 1 3 7 | PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN | | | | 3,260,000,000 | 3,749,000,000 |
| 1 3 7 2.01 | Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Daerah Kabupaten/Kota | | | | 3,260,000,000 | 3,749,000,000 |



| Kode | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan | Lokasi | Indikator | Target | Pagu Indikatif (Rp.) | Prakiraan Maju (Rp.) |
|--------------------|--|---|---|-------------|-----------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 3 7 2.01 1 | Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Daerah Kab/Kota | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah sarana prasarana perkotaan dan permukiman yang terbangun dan terpelihara | 73 Kawasan | 3,260,000,000 | 3,749,000,000 |
| 1 3 8 | PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG | | | | 3,908,960,000 | 4,495,304,000 |
| 1 3 8 2.01 | Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung | | | | 3,908,960,000 | 4,495,304,000 |
| 1 3 8 2.01 1 | Penyelenggaraan Penerbitan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah Bangunan yang ber IMB dan memiliki Sertifikat Laik Fungsi | 100 Dokumen | 310,960,000 | 357,604,000 |
| 1 3 8 2.01 2 | Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan, Rehabilitasi, Renovasi, Ubahsuai, serta Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah bangunan gedung daerah yang dibangun dan dipelihara | 11 Unit | 3,598,000,000 | 4,137,700,000 |
| 1 3 10 | PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN | | | | 28,305,053,000 | 32,550,810,950 |
| 1 3 10 2.01 | Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota | | | | 28,305,053,000 | 32,550,810,950 |
| 1 3 10 2.01 5 | Pembangunan Jalan | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Panjang Jalan yang dibangun | 11.18 Km | 1,065,000,000 | 1,224,750,000 |
| 1 3 10 2.01 8 | Rekonstruksi Jalan | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Panjang Jalan yang direkonstruksi | 43.722 Km | 5,965,000,000 | 6,859,750,000 |
| 1 3 10 2.01 9 | Rehabilitasi Jalan | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Panjang Jalan yang direhab dan dipelihara | 6.45 Km | 7,678,000,000 | 8,829,700,000 |
| 1 3 10 2.01 10 | Pemeliharaan Berkala Jalan | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Panjang Jalan yang dipelihara secara berkala | 30.842 Km | 3,507,053,000 | 4,033,110,950 |



| Kode | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan | Lokasi | Indikator | Target | Pagu Indikatif (Rp.) | Prakiraan Maju (Rp.) |
|--------------------|--|---|---|----------------|----------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 3 10 2.01 11 | Pemeliharaan Rutin Jalan | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Panjang jalan yang dipelihara | 10 Km | 3,650,000,000 | 4,197,500,000 |
| 1 3 10 2.01 12 | Pembangunan Jembatan | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Panjang Jembatan yang dibangun | 84.8 m | 5,940,000,000 | 6,831,000,000 |
| 1 3 10 2.01 19 | Pemeliharaan Rutin Jembatan | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Panjang jembatan yang dipelihara | 30 m | 500,000,000 | 575,000,000 |
| 1 3 12 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG | | | | 737,100,000 | 847,665,000 |
| 1 3 12 2.01 | Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kab/Kota | | | | 545,100,000 | 626,865,000 |
| 1 3 12 2.01 1 | Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah dokumen RDTR yang disusun | 1 Dokumen | 400,000,000 | 460,000,000 |
| 1 3 12 2.01 2 | Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah dokumen RRTR yang di Perdakan | 1 Dokumen | 100,000,000 | 115,000,000 |
| 1 3 12 2.01 3 | Penetapan Kebijakan dalam Rangka Pelaksanaan Penataan Ruang | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah dokumen Peta Zonasi yang disusun | 1 Dokumen | 0 | 0 |
| 1 3 12 2.01 4 | Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah pelaksanaan sosialisasi tentang peraturan tata ruang | 4 kali | 45,100,000 | 51,865,000 |
| 1 3 12 2.02 | Koordinasi dan sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota | | | | 30,000,000 | 34,500,000 |
| 1 3 12 2.02 1 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah pemanfaatan ruang yang direkomendasikan | 30 Rekomendasi | 30,000,000 | 34,500,000 |
| 1 3 12 2.03 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota | | | | 90,000,000 | 103,500,000 |
| 1 3 12 2.03 2 | Sistem Informasi Penataan Ruang | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah sarana informasi pemanfaatan ruang yang disediakan | 3 Buah | 90,000,000 | 103,500,000 |
| 1 3 12 2.04 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota | | | | 72,000,000 | 82,800,000 |



| Kode | Usuran/ Bidang Usuran Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan | Lokasi | Indikator | Target | Pagu Indikatif (Rp.) | Prakiraan Maju (Rp.) | |
|--------------------|--|---|--|-----------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 1 3 12 2.04 4 | Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah pengawasan yang dilakukan | 100 Kali | 72,000,000 | 82,800,000 | |
| 2 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | |
| 2 10 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN | | | | | 2,000,000,000 | 2,300,000,000 |
| 2 10 5 | PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN | | | | | 2,000,000,000 | 2,300,000,000 |
| 2 10 5 2.01 | Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | | | | | 2,000,000,000 | 2,300,000,000 |
| 2 10 5 2.01 2 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Tersedianya dokumen ganti rugi tanaman, bangunan dan penggantian lainnya | 3 Dokumen | 2,000,000,000 | 2,300,000,000 | |
| 2 15 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN | | | | | 524,713,000 | 603,419,950 |
| 2 15 2 | PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) | | | | | 524,713,000 | 603,419,950 |
| 2 15 2 2.02 | Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota | | | | | 524,713,000 | 603,419,950 |
| 2 15 2 2.02 2 | Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah PJU yang Diadakan dan dipasang | 3161 Unit | 0 | 0 | |
| 2 15 2 2.02 4 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah lampu PJU yang di pelihara | 745 Unit | 524,713,000 | 603,419,950 | |
| TOTAL | | | | | 56,723,112,375 | 65,231,579,231 | |



OPD: DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan | Lokasi | Indikator | Target | Pagu Indikatif (Rp.) | Prakiraan Maju (Rp.) | |
|-------------------|---|---|--|----------------|-----------------------|-----------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 1 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | |
| 1 3 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | | | | 5,903,191,500 | 6,788,670,225 | |
| 1 3 3 | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM | | | | 4,376,757,500 | 5,033,271,125 | |
| 1 3 3 2.01 | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota | | | | 4,376,757,500 | 5,033,271,125 | |
| 1 3 3 2.01 2 | Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Perluasan/Perbaikan SPAM | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Persentase pendampingan NUWSP | 100 persentase | 3,000,000,000 | 3,450,000,000 | |
| 1 3 3 2.01 5 | Peningkatan SPAM di Kawasan Perkotaan | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah Jaringan perpipaan | 100 SR | 880,730,000 | 1,012,839,500 | |
| 1 3 3 2.01 6 | Peningkatan SPAM di Kawasan Perdesaan | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah Sarana dan Prasarana Pamsimas yang terehabilitasi | 7 lokasi | 496,027,500 | 570,431,625 | |
| 1 3 5 | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH | | | | 1,526,434,000 | 1,755,399,100 | |
| 1 3 5 2.01 | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota | | | | 1,526,434,000 | 1,755,399,100 | |
| 1 3 5 2.01 3 | Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah Rumah Tangga Terlayani IPAL Komunal | 216 KK | 1,526,434,000 | 1,755,399,100 | |
| 1 4 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN | | | | 15,301,585,322 | 17,616,608,120 | |
| 1 4 1 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | | | | 6,585,985,322 | 7,573,883,120 | |
| 1 4 1 2.02 | Administrasi Keuangan | | | | 4,576,890,000 | 5,263,423,500 | |
| 1 4 1 2.02 1 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah Pegawai Non PNS yang dibayarkan | 12 bulan | 4,038,890,000 | 4,644,723,500 | |
| 1 4 1 2.02 2 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Terlaksananya penyediaan jasa jaminan Pemeliharaan Kesehatan Non PNS | 12 bulan | 538,000,000 | 618,700,000 | |
| 1 4 1 2.03 | Administrasi Umum | | | | 1,782,095,322 | 2,049,409,620 | |



| Kode | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan | Lokasi | Indikator | Target | Pagu Indikatif (Rp.) | Prakiraan Maju (Rp.) |
|---------------|--|---|---|----------|----------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 4 1 2.03 1 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Terlaksananya penyediaan surat menyurat | 12 bulan | 8,500,000 | 9,775,000 |
| 1 4 1 2.03 2 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Ketersediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya, air dan Listrik | 12 bulan | 242,000,000 | 278,300,000 |
| 1 4 1 2.03 3 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah dokumentasi dan dekorasi yang disediakan | 12 bulan | 14,500,000 | 16,675,000 |
| 1 4 1 2.03 7 | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Tersedianya jasa administrasi Keuangan | 12 bulan | 199,200,000 | 229,080,000 |
| 1 4 1 2.03 8 | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Tersedianya alat dan bahan kebersihan kantor | 12 bulan | 13,875,000 | 15,956,250 |
| 1 4 1 2.03 10 | Penyediaan Alat Tulis Kantor | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Tersedianya alat tulis kantor | 12 bulan | 46,065,000 | 52,974,750 |
| 1 4 1 2.03 11 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Tersedianya barang cetakan dan penggandaan | 12 bulan | 21,886,682 | 25,169,684 |
| 1 4 1 2.03 12 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | 12 bulan | 4,732,640 | 5,442,536 |
| 1 4 1 2.03 15 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | 12 bulan | 5,390,000 | 6,198,500 |
| 1 4 1 2.03 17 | Penyediaan Makanan dan Minuman | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Makanan dan minuman yang disediakan | 12 bulan | 19,646,000 | 22,592,900 |
| 1 4 1 2.03 18 | Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang diikuti | 12 bulan | 350,000,000 | 402,500,000 |
| 1 4 1 2.03 22 | Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | jumlah ruang rapat yang diadakan | 1 unit | 25,000,000 | 28,750,000 |
| 1 4 1 2.03 25 | Pengadaan Mebeleur | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | mebeleur ruang rapat yang disediakan | 1 paket | 25,000,000 | 28,750,000 |



| Kode | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan | Lokasi | Indikator | Target | Pagu Indikatif (Rp.) | Prakiraan Maju (Rp.) |
|-------------------|---|---|--|-----------|----------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 4 1 2.03 28 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Tersedianya pemeliharaan Gedung kantor | 12 bulan | 22,000,000 | 25,300,000 |
| 1 4 1 2.03 30 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah alat berat yang dipelihara | 3 unit | 771,100,000 | 886,765,000 |
| | | | Kendaraan Dinas yang dipelihara | 12 bulan | | |
| 1 4 1 2.03 34 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Peralatan gedung kantor yang dipelihara | 12 bulan | 13,200,000 | 15,180,000 |
| 1 4 1 2.04 | Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | | | | 227,000,000 | 261,050,000 |
| 1 4 1 2.04 3 | Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Pakaian kerja lapangan yang diadakan | 200 orang | 152,000,000 | 174,800,000 |
| 1 4 1 2.04 9 | Pendidikan dan Pelatihan Formal | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Pendidikan dan pelatihan formal yang diikuti | 12 bulan | 75,000,000 | 86,250,000 |
| 1 4 2 | PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN | | | | 1,140,600,000 | 1,331,475,000 |
| 1 4 2 2.03 | Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota | | | | 272,500,000 | 313,375,000 |
| 1 4 2 2.03 1 | Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah Rumah yang direhab | 10 unit | 272,500,000 | 313,375,000 |
| 1 4 2 2.05 | Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus | | | | 868,100,000 | 1,018,100,000 |
| 1 4 2 2.05 1 | Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah kamar Rusunawa yang terkelola | 194 kamar | 528,100,000 | 628,100,000 |
| 1 4 2 2.05 2 | Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah sarana dan prasarana yang diadakan | 6 jenis | 340,000,000 | 390,000,000 |
| | | | Terpeliharanya sarana dan prasarana Rusunawa | 12 bulan | | |
| 1 4 3 | PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERMUKIMAN KUMUH | | | | 2,340,000,000 | 2,691,000,000 |
| 1 4 3 2.02 | Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha | | | | 40,000,000 | 46,000,000 |



| Kode | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan | Lokasi | Indikator | Target | Pagu Indikatif (Rp.) | Prakiraan Maju (Rp.) |
|--------------------|--|---|---|-----------|----------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 4 3 2.02 2 | Penyusunan Rencana dan Rekomendasi Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah Desa / Kelurahan Kawasan kumuh | 17 Lokasi | 40,000,000 | 46,000,000 |
| 1 4 3 2.03 | Peningkatan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha | | | | 2,300,000,000 | 2,645,000,000 |
| 1 4 3 2.03 2 | Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah RTLH yang di perbaiki | 100 unit | 1,837,500,000 | 2,113,125,000 |
| 1 4 3 2.03 3 | Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah RTLH yang di perbaiki | 20 unit | 462,500,000 | 531,875,000 |
| 1 4 4 | PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) | | | | 5,235,000,000 | 6,020,250,000 |
| 1 4 4 2.01 | Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan | | | | 5,235,000,000 | 6,020,250,000 |
| 1 4 4 2.01 2 | Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | meningkatnya jumlah prasarana dan utilitas umum di perumahan yang tertata | 39 paket | 5,235,000,000 | 6,020,250,000 |
| 2 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | |
| 2 10 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN | | | | 411,000,000 | 512,650,000 |
| 2 10 4 | PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN | | | | 21,000,000 | 24,150,000 |
| 2 10 4 2.01 | Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota. | | | | 21,000,000 | 24,150,000 |
| 2 10 4 2.01 2 | Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota. | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah mediasi penyelesaian sengketa tanah yang diproses | 3 kasus | 21,000,000 | 24,150,000 |
| 2 10 6 | PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE | | | | 50,000,000 | 65,000,000 |
| 2 10 6 2.01 | Penetapan Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | | 50,000,000 | 65,000,000 |



| Kode | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan | Lokasi | Indikator | Target | Pagu Indikatif (Rp.) | Prakiraan Maju (Rp.) |
|---------------------|---|---|---|---------------|----------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2 10 6 2.01 1 | Inventarisasi Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah subjek dan objek data pertanahan yg tersedia | 5 dokumen | 50,000,000 | 65,000,000 |
| | | | jumlah subjek dan objek data tanah pemda yang tersedia | 5 dokumen | | |
| 2 10 7 | PROGRAM PENETAPAN TANAH ULAYAT | | | | 50,000,000 | 65,000,000 |
| 2 10 7 2.01 | Penetapan Tanah Ulayat yang Lokasinya dalam Daerah Kabupaten/Kota | | | | 50,000,000 | 65,000,000 |
| 2 10 7 2.01 1 | Koordinasi dan Sinkronisasi Survei dan Pemetaan Batas Tanah Ulayat dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah koordinasi dan sinkronisasi survey dan pemetaan batas tanah ulayat dalam satu daerah | 5 dokumen | 50,000,000 | 65,000,000 |
| 2 10 9 | PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH | | | | 200,000,000 | 232,000,000 |
| 2 10 9 2.01 | Penerbitan Izin Membuka Tanah | | | | 200,000,000 | 232,000,000 |
| 2 10 9 2.01 2 | Pengendalian Pemanfaatan Tanah Negara | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | jumlah bidang tanah yang difasilitasi melalui PTSL | 1350 patok | 200,000,000 | 232,000,000 |
| | | | jumlah proses pendaftaran hak tanah | 10 sertifikat | | |
| | | | Jumlah tunjuk batas tanah | 5 dokumen | | |
| 2 10 10 | PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH | | | | 90,000,000 | 126,500,000 |
| 2 10 10 2.01 | Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota | | | | 90,000,000 | 126,500,000 |
| 2 10 10 2.01 1 | Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah aplikasi sistem informasi pertanahan yang diselesaikan | 1 kegiatan | 80,000,000 | 115,000,000 |
| | | | Jumlah koordinasi dan sinkronisasi perencanaan penggunaan tanah | 5 rekomendasi | | |
| | | | Jumlah pendampingan dan pengadaan tanah untuk kepentingan umum | 3 rekomendasi | | |
| 2 10 10 2.01 3 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah koordinasi, sinkronisasi dan konsolidasi tanah | 1 kegiatan | 10,000,000 | 11,500,000 |



| Kode | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan | Lokasi | Indikator | Target | Pagu Indikatif (Rp.) | Prakiraan Maju (Rp.) |
|--------------------|--|---|---|----------------|----------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2 11 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP | | | | 3,528,018,683 | 4,187,547,213 |
| 2 11 3 | PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP | | | | 472,551,000 | 545,933,650 |
| 2 11 3 2.01 | Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota | | | | 422,551,000 | 475,933,650 |
| 2 11 3 2.01 1 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | jumlah UPTD laboratorium lingkungan yang dikelola | 1 unit | 400,000,000 | 450,000,000 |
| 2 11 3 2.01 2 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan | 50 orang | 22,551,000 | 25,933,650 |
| 2 11 3 2.03 | Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota | | | | 50,000,000 | 70,000,000 |
| 2 11 3 2.03 4 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | luas lahan tambang yang direklamasi | 10 hektar | 50,000,000 | 70,000,000 |
| 2 11 4 | PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) | | | | 501,800,000 | 577,070,000 |
| 2 11 4 2.01 | Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota | | | | 501,800,000 | 577,070,000 |
| 2 11 4 2.01 2 | Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Luas hutan kota yang dipelihara | 5 Ha | 30,000,000 | 34,500,000 |
| 2 11 4 2.01 4 | Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | jumlah lampu hias taman yang dipelihara | 327 titik | 346,800,000 | 398,820,000 |
| | | | Jumlah taman kota yang dipelihara | 69 lokasi | | |
| 2 11 4 2.01 7 | Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah tanaman hias yang dibibitkan | 125000 polibag | 125,000,000 | 143,750,000 |
| 2 11 5 | PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3) | | | | 16,000,000 | 18,400,000 |
| 2 11 5 2.02 | Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | | 16,000,000 | 18,400,000 |



| Kode | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan | Lokasi | Indikator | Target | Pagu Indikatif (Rp.) | Prakiraan Maju (Rp.) |
|--------------------|---|---|---|------------|----------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2 11 5 2.02 2 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam Rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah laporan pengawasan LB3 yang dibuat | 4 dokumen | 16,000,000 | 18,400,000 |
| 2 11 6 | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) | | | | 61,500,000 | 100,103,000 |
| 2 11 6 2.01 | Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | | | | 61,500,000 | 100,103,000 |
| 2 11 6 2.01 1 | Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | jumlah dokumen lingkungan hidup yang dinilai | 2 dokumen | 11,500,000 | 13,225,000 |
| 2 11 6 2.01 3 | Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | jumlah usaha yang diawasi dan dipantau dampak lingkungannya | 30 usaha | 50,000,000 | 86,878,000 |
| 2 11 8 | PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT | | | | 100,348,483 | 174,348,483 |
| 2 11 8 2.01 | Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | 100,348,483 | 174,348,483 |
| 2 11 8 2.01 1 | Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah lokasi kampung iklim yang dibentuk | 2 lokasi | 25,000,000 | 50,000,000 |
| 2 11 8 2.01 2 | Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | jumlah sekolah yang mengikuti program Adiwiyata | 26 sekolah | 75,348,483 | 124,348,483 |
| | | | Jumlah siswa-i anggota saka kalpataru yg menjadi pelapor lingkungan | 40 orang | | |
| 2 11 9 | PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT | | | | 100,000,000 | 137,000,000 |



| Kode | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan | Lokasi | Indikator | Target | Pagu Indikatif (Rp.) | Prakiraan Maju (Rp.) |
|---------------------|---|---|--|------------|-----------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2 11 9 2.01 | Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | 100,000,000 | 137,000,000 |
| 2 11 9 2.01 1 | Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah kegiatan yg dilaksanakan dalam peringatan Hari-hari Lingkungan Hidup Tingkat Kota | 4 kegiatan | 100,000,000 | 137,000,000 |
| | | | Jumlah lokasi Adipura yang dipantau dan dibenahi | 38 lokasi | | |
| 2 11 11 | PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN | | | | 2,275,819,200 | 2,634,692,080 |
| 2 11 11 2.01 | Pengelolaan Sampah | | | | 2,275,819,200 | 2,634,692,080 |
| 2 11 11 2.01 2 | Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah peralatan daur ulang yang diadakan | 1 unit | 50,000,000 | 75,000,000 |
| 2 11 11 2.01 3 | Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah penanganan sampah yang dilakukan | 1 kegiatan | 1,090,113,200 | 1,253,630,180 |
| 2 11 11 2.01 5 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah sarana dan prasarana sampah yang diadakan | 1 paket | 1,135,706,000 | 1,306,061,900 |
| TOTAL | | | | | 25,143,795,505 | 29,105,475,558 |



OPD: SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan | Lokasi | Indikator | Target | Pagu Indikatif (Rp.) | Prakiraan Maju (Rp.) |
|-------------------|--|---|--|----------|----------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | |
| 1 5 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT | | | | 3,997,550,250 | 4,597,182,788 |
| 1 5 1 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | | | | 3,517,777,500 | 4,045,444,125 |
| 1 5 1 2.02 | Administrasi Keuangan | | | | 2,213,000,000 | 2,544,950,000 |
| 1 5 1 2.02 1 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah pegawai Non PNS yang difasilitasi | 85 orang | 2,093,000,000 | 2,406,950,000 |
| 1 5 1 2.02 2 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah pegawai Non PNS yang difasilitasi kesehatannya | 85 Orang | 120,000,000 | 138,000,000 |
| 1 5 1 2.03 | Administrasi Umum | | | | 1,026,777,500 | 1,180,794,125 |
| 1 5 1 2.03 1 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah materai yang disediakan | 12 Bulan | 7,200,000 | 8,280,000 |
| 1 5 1 2.03 2 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang dibayarkan | 12 Bulan | 62,400,000 | 71,760,000 |
| 1 5 1 2.03 7 | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jasa administrasi keuangan yang dibayarkan | 12 Bulan | 120,600,000 | 138,690,000 |
| 1 5 1 2.03 8 | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah alat kebersihan yang disediakan | 12 Bulan | 11,122,500 | 12,790,875 |
| 1 5 1 2.03 10 | Penyediaan Alat Tulis Kantor | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah alat tulis kantor yang disediakan | 12 Bulan | 43,937,500 | 50,528,125 |
| 1 5 1 2.03 11 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah barang cetak dan penggandaan yang disediakan | 12 Bulan | 32,200,000 | 37,030,000 |
| 1 5 1 2.03 12 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan | 12 Bulan | 4,625,000 | 5,318,750 |



| Kode | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan | Lokasi | Indikator | Target | Pagu Indikatif (Rp.) | Prakiraan Maju (Rp.) |
|-------------------|--|---|--|------------------|----------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 5 1 2.03 13 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah dokumentasi dan dekorasi yang disediakan | 12 Bulan | 13,000,000 | 14,950,000 |
| 1 5 1 2.03 16 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah logistik kantor yang disediakan | 12 Bulan | 18,000,000 | 20,700,000 |
| 1 5 1 2.03 17 | Penyediaan Makanan dan Minuman | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah makanan dan minuman yang disediakan | 12 Bulan | 52,832,500 | 60,757,375 |
| 1 5 1 2.03 18 | Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang diikuti | 12 Bulan | 150,000,000 | 172,500,000 |
| 1 5 1 2.03 24 | Pengadaan Peralatan Gedung Kantor | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah peralatan gedung kantor yang terpenuhi | 43 Unit | 225,500,000 | 259,325,000 |
| 1 5 1 2.03 30 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah kendaraan dinas operasional roda 4 dan roda 2 yang dipelihara | 12 Bulan | 240,360,000 | 276,414,000 |
| 1 5 1 2.03 34 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara | 40 Unit | 40,000,000 | 46,000,000 |
| 1 5 1 2.03 35 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah meubiler yang dipelihara | 1 Paket | 5,000,000 | 5,750,000 |
| 1 5 1 2.04 | Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | | | | 278,000,000 | 319,700,000 |
| 1 5 1 2.04 2 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah pakaian dinas Satpol PP dan Damkar yang diadakan | 135 Stel lengkap | 197,500,000 | 227,125,000 |
| 1 5 1 2.04 9 | Pendidikan dan Pelatihan Formal | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah pendidikan dan pelatihan formal yang diikuti | 14 Kali | 80,500,000 | 92,575,000 |
| 1 5 2 | PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | | | | 399,563,750 | 459,498,313 |
| 1 5 2 2.01 | Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | | 305,788,750 | 351,657,063 |
| 1 5 2 2.01 1 | Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah kegiatan ketenteraman dan ketertiban yang dilaksanakan | 65 Kegiatan | 134,076,250 | 154,187,688 |



| Kode | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan | Lokasi | Indikator | Target | Pagu Indikatif (Rp.) | Prakiraan Maju (Rp.) |
|-------------------|--|---|---|------------|----------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 5 2 2.01 2 | Penindakan atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah kasus yang di selesaikan | 8 Kasus | 29,122,000 | 33,490,300 |
| 1 5 2 2.01 5 | Peningkatan Kapasitas SDM Satpol Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah aparat satpol PP dan Linmas yang meningkat kapasitas SDM nya | 539 Orang | 142,590,500 | 163,979,075 |
| 1 5 2 2.02 | Penegakan Perda Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota | | | | 68,275,000 | 78,516,250 |
| 1 5 2 2.02 1 | Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah Peserta yang mengikuti Sosialisasi perda | 1050 Orang | 53,375,000 | 61,381,250 |
| 1 5 2 2.02 3 | Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Peraturan Bupati/Walikota | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah kasus yang terselesaikan | 220 Berkas | 14,900,000 | 17,135,000 |
| 1 5 2 2.03 | Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota | | | | 25,500,000 | 29,325,000 |
| 1 5 2 2.03 1 | Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah aparatur yang meningkat SDM nya | 1 Orang | 25,500,000 | 29,325,000 |
| 1 5 4 | PROGRAM PENANGGULANGAN KEBAKARAN | | | | 80,209,000 | 92,240,350 |
| 1 5 4 2.01 | Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota | | | | 55,700,000 | 64,055,000 |
| 1 5 4 2.01 1 | Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah Kasus Bencana yang ditangani | 50 Kasus | 27,300,000 | 31,395,000 |
| 1 5 4 2.01 2 | Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah kasus kebakaran yang terselesaikan | 50 Kasus | 28,400,000 | 32,660,000 |
| 1 5 4 2.04 | Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran | | | | 24,509,000 | 28,185,350 |



| Kode | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan | Lokasi | Indikator | Target | Pagu Indikatif (Rp.) | Prakiraan Maju (Rp.) |
|--------------|---|---|---|---------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 5 4 2.04 1 | Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran, melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi dan edukasi | 80 Orang | 24,509,000 | 28,185,350 |
| TOTAL | | | | | 3,997,550,250 | 4,597,182,788 |



OPD: DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan | Lokasi | Indikator | Target | Pagu Indikatif (Rp.) | Prakiraan Maju (Rp.) | |
|-------------------|--|--|---|----------|----------------------|----------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 1 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | |
| 1 6 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL | | | | 2,930,493,500 | 3,370,067,525 | |
| 1 6 1 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | | | | 1,359,920,000 | 1,563,908,000 | |
| 1 6 1 2.01 | Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | 63,375,000 | 72,881,250 | |
| 1 6 1 2.01 5 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | jumlah pegawai yang mengevaluasi kinerja perangkat daerah | 3 orang | 63,375,000 | 72,881,250 | |
| 1 6 1 2.02 | Administrasi Keuangan | | | | 197,525,000 | 227,153,750 | |
| 1 6 1 2.02 4 | Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan | Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | jumlah pegawai yang menyusun dokumen laporan akuntansi dan keuangan | 2 orang | 44,525,000 | 51,203,750 | |
| 1 6 1 2.02 7 | Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran | Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | jumlah dokumen laporan | 12 bulan | 153,000,000 | 175,950,000 | |
| 1 6 1 2.03 | Administrasi Umum | | | | 1,014,020,000 | 1,166,123,000 | |
| 1 6 1 2.03 1 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah pegawai yang mengevaluasi kinerja perangkat daerah (orang) | 12 bulan | 5,000,000 | 5,750,000 | |
| 1 6 1 2.03 2 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | jumlah rekening telpon, air dan listrik yang dibayarkan | 12 bulan | 60,000,000 | 69,000,000 | |
| 1 6 1 2.03 7 | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | jumlah jasa administrasi keuangan yang dibayarkan | 5 keg | 135,045,000 | 155,301,750 | |
| 1 6 1 2.03 8 | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | jumlah bahan kebersihan yang disediakan | 12 bulan | 44,650,000 | 51,347,500 | |
| 1 6 1 2.03 10 | Penyediaan Alat Tulis Kantor | Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | jumlah atk yang disediakan | 12 bulan | 45,325,000 | 52,123,750 | |



| Kode | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan | Lokasi | Indikator | Target | Pagu Indikatif (Rp.) | Prakiraan Maju (Rp.) |
|---------------|--|--|--|----------|----------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 6 1 2.03 11 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | jumlah barang cetakan dan penggandaan serta jilid yang disediakan | 12 bulan | 70,000,000 | 80,500,000 |
| 1 6 1 2.03 12 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | jumlah komponen alat listrik yang disediakan | 12 bulan | 4,000,000 | 4,600,000 |
| 1 6 1 2.03 15 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | jumlah bahan bacaan dan buku UU dan peraturan lainnya yang diadkan | 12 bulan | 4,000,000 | 4,600,000 |
| 1 6 1 2.03 16 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | tersedianya kebutuhan logistik kantor | 12 bulan | 4,000,000 | 4,600,000 |
| 1 6 1 2.03 17 | Penyediaan Makanan dan Minuman | Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | jumlah makanan dan minuman yang diadakan | 12 bulan | 100,000,000 | 115,000,000 |
| 1 6 1 2.03 18 | Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah | Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | jumlah rapat2 yang diikuti | 12 bulan | 350,000,000 | 402,500,000 |
| 1 6 1 2.03 24 | Pengadaan Peralatan Gedung Kantor | Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | jumlah peralatan geduang kantor yang diadakan | 5 unit | 27,000,000 | 31,050,000 |
| 1 6 1 2.03 28 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | jumlah geduang kantor yg dipelihara | 4 unit | 25,000,000 | 28,750,000 |
| 1 6 1 2.03 30 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | jumlah kendaraan dinas yg dipelihara | 17 unit | 125,000,000 | 143,750,000 |
| 1 6 1 2.03 34 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor | Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah peralatan gedung kantor yang diperlihara | 30 unit | 15,000,000 | 17,250,000 |



| Kode | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan | Lokasi | Indikator | Target | Pagu Indikatif (Rp.) | Prakiraan Maju (Rp.) |
|-------------------|---|--|---|------------------|----------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 6 1 2.04 | Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | | | | 85,000,000 | 97,750,000 |
| 1 6 1 2.04 5 | Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu | Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | jumlah pegawai yang disiplin berpakaian | 32 orang | 10,000,000 | 11,500,000 |
| 1 6 1 2.04 9 | Pendidikan dan Pelatihan Formal | Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan/bimtek | 17 orang | 75,000,000 | 86,250,000 |
| 1 6 2 | PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL | | | | 232,125,000 | 259,443,750 |
| 1 6 2 2.03 | Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota | | | | 232,125,000 | 259,443,750 |
| 1 6 2 2.03 1 | Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota | Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah PSM dan TKSK yang dibina | 41 org | 6,125,000 | 7,043,750 |
| 1 6 2 2.03 2 | Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota | Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | jumlah TKSK yang mendapat bantuan tali asih | 4 org | 36,000,000 | 41,400,000 |
| 1 6 2 2.03 5 | Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) | Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah anggota tagana yang terfasilitasi | 29 org | 190,000,000 | 211,000,000 |
| | | | Jumlah karang taruna yang terbina | 38 karang taruna | | |
| | | | Jumlah lembaga kesejahteraan sosial yang terfasilitasi | 12 bulan | | |
| | | | petugas pengelola logistik bencana | 1 orang | | |
| 1 6 4 | PROGRAM REHABILITASI SOSIAL | | | | 1,220,698,500 | 1,411,303,275 |
| 1 6 4 2.01 | Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial | | | | 928,208,000 | 1,067,439,200 |
| 1 6 4 2.01 1 | Penyediaan Permakanan | Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah anak terlantar dan penyandang cacat yang diberi permakanan | 35 org | 67,000,000 | 77,050,000 |



| Kode | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan | Lokasi | Indikator | Target | Pagu Indikatif (Rp.) | Prakiraan Maju (Rp.) |
|-------------------|---|--|--|--------------|----------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 6 4 2.01 2 | Penyediaan Sandang | Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah anak terlantar dan penyandang cacat yang diberi sandang | 35 org | 22,500,000 | 25,875,000 |
| 1 6 4 2.01 3 | Penyediaan Alat Bantu | Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah anak terlantar yang diberi alat bantu | 18 org | 139,490,000 | 160,413,500 |
| | | | Jumlah penyandang cacat yang diberi alat bantu | 17 null | | |
| 1 6 4 2.01 6 | Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat | Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah penyandang cacat yang diberi bimbingan sosial | 4 org | 36,475,000 | 41,946,250 |
| 1 6 4 2.01 8 | Pemberian Akses Ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar | Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah anak berkebutuhan khusus yang diberi bantuan transportasi | 77 org | 447,743,000 | 514,904,450 |
| | | | Jumlah laporan KPM yang mendapatkan bantuan PKH | 12 bulan | | |
| | | | Jumlah Penyandang cacat berat yang diberi kebutuhan dasar | 20 kebutuhan | | |
| 1 6 4 2.01 9 | Pemberian Layanan Data dan Pengaduan | Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | jumlah penderita gangguan jiwa | 5 org | 15,000,000 | 17,250,000 |
| 1 6 4 2.01 10 | Pemberian Layanan Kedaruratan | Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | bantuan uang tunai untuk lansia | 82 Orang | 200,000,000 | 230,000,000 |
| 1 6 4 2.02 | Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial | | | | 292,490,500 | 343,864,075 |
| 1 6 4 2.02 2 | Pemberian Layanan Kedaruratan | Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | bantuan untuk korban bencana dan penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya | 40 orang | 150,000,000 | 180,000,000 |



| Kode | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan | Lokasi | Indikator | Target | Pagu Indikatif (Rp.) | Prakiraan Maju (Rp.) |
|-------------------|---|--|--|---------|----------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 6 4 2.02 3 | Penyediaan Permakanan | Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | jumlah lansia miskin non produktif yang tersantuni | 160 org | 142,490,500 | 163,864,075 |
| | | | jumlah laporan keluarga fakir miskin yang mendapatkan KUBE | 12 lap | | |
| | | | jumlah laporan kpm yang mendapatkan BNPT | 12 lap | | |
| 1 6 5 | PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL | | | | 33,890,000 | 38,973,500 |
| 1 6 5 2.02 | Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | | | | 33,890,000 | 38,973,500 |
| 1 6 5 2.02 1 | Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | laporan hasil pemutakhiran data fakir miskin dan PMKS | 2 lap | 33,890,000 | 38,973,500 |
| | | | petugas pengelola pemutakhiran data | 1 org | | |
| 1 6 7 | PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN | | | | 83,860,000 | 96,439,000 |
| 1 6 7 2.01 | Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota | | | | 83,860,000 | 96,439,000 |
| 1 6 7 2.01 1 | Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota | Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah makam yang terpelihara | 4 makam | 83,860,000 | 96,439,000 |
| 2 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | |
| 2 8 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | | | | 1,147,754,200 | 1,319,917,330 |
| 2 8 2 | PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN | | | | 377,055,000 | 433,613,250 |
| 2 8 2 2.01 | Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | 36,155,000 | 41,578,250 |
| 2 8 2 2.01 3 | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG | Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah OPD yang telah melaksanakan PPRG | 26 OPD | 36,155,000 | 41,578,250 |
| 2 8 2 2.02 | Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | 27,120,000 | 31,188,000 |
| 2 8 2 2.02 1 | Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi | Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah perempuan keluarga yang dilatih | 50 org | 0 | 0 |



| Kode | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan | Lokasi | Indikator | Target | Pagu Indikatif (Rp.) | Prakiraan Maju (Rp.) |
|-------------------|---|--|--|----------|----------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2 8 2 2.02 2 | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi | Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah peserta yang terfasilitasi dalam peningkatan SDM perempuan dibidang politik | 60 org | 27,120,000 | 31,188,000 |
| 2 8 2 2.03 | Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | 313,780,000 | 360,847,000 |
| 2 8 2 2.03 3 | Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota | Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah KIE PP yang dilaksanakan | 12 bulan | 313,780,000 | 360,847,000 |
| 2 8 4 | PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA | | | | 546,931,700 | 628,971,455 |
| 2 8 4 2.01 | Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | 331,956,700 | 381,750,205 |
| 2 8 4 2.01 1 | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota | Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah kegiatan yang dilaksanakan dalam mewujudkan KG dan Perlindungan Anak | 12 bulan | 25,456,700 | 29,275,205 |
| 2 8 4 2.01 2 | Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota | Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah KIE yang dilaksanakan bagi keluarga | 12 bulan | 200,000,000 | 230,000,000 |
| 2 8 4 2.01 3 | Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota | Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah kegiatan masyarakat dalam meningkatkan kualitas keluarga | 12 bulan | 106,500,000 | 122,475,000 |
| 2 8 4 2.02 | Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota | | | | 103,500,000 | 119,025,000 |
| 2 8 4 2.02 1 | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah kegiatan yang dilaksanakan dalam peningkatan kualitas keluarga | 12 bulan | 78,500,000 | 90,275,000 |



| Kode | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan | Lokasi | Indikator | Target | Pagu Indikatif (Rp.) | Prakiraan Maju (Rp.) |
|-------------------|---|--|---|------------|----------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2 8 4 2.02 2 | Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah kegiatan yang dilaksanakan dalam peningkatan kapasitas sumber daya lembaga | 12 bulan | 25,000,000 | 28,750,000 |
| 2 8 4 2.03 | Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota | | | | 111,475,000 | 128,196,250 |
| 2 8 4 2.03 1 | Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota | Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah kegiatan layanan komprehensif bagi keluarga | 12 bulan | 111,475,000 | 128,196,250 |
| 2 8 5 | PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK | | | | 0 | 0 |
| 2 8 5 2.01 | Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/kota | | | | 0 | 0 |
| 2 8 5 2.01 1 | Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota | Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah buku profil gender yang disusun | 25 buku | 0 | 0 |
| | | | jumlah dokumen profil data dasar keluarga | 1 dokumen | | |
| 2 8 6 | PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) | | | | 101,557,500 | 116,791,125 |
| 2 8 6 2.01 | Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | 78,707,500 | 90,513,625 |
| 2 8 6 2.01 1 | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota | Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah lembaga desa/kel yang dibina PHA | 37 lembaga | 23,532,500 | 27,062,375 |
| 2 8 6 2.01 2 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota | Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah lembaga pemenuhan Hak anak | 1 lembaga | 55,175,000 | 63,451,250 |
| 2 8 6 2.02 | Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | 22,850,000 | 26,277,500 |



| Kode | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan | Lokasi | Indikator | Target | Pagu Indikatif (Rp.) | Prakiraan Maju (Rp.) |
|--------------------|---|--|--|---------|----------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2 8 6 2.02 3 | Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah peserta yang mendptkan KIE pemenuhan hak anak | 60 org | 22,850,000 | 26,277,500 |
| 2 8 7 | PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK | | | | 122,210,000 | 140,541,500 |
| 2 8 7 2.02 | Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | 22,210,000 | 25,541,500 |
| 2 8 7 2.02 4 | Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota | Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah peserta konvensi hak anak yang mengikuti kegiatan penguatan jejaring antar keluarga | 60 org | 22,210,000 | 25,541,500 |
| 2 8 7 2.03 | Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | 100,000,000 | 115,000,000 |
| 2 8 7 2.03 2 | Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah peserta peningkatan sumberdaya lembaga penyedia layanan ABK | 100 org | 100,000,000 | 115,000,000 |
| 2 13 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | | | | 1,944,325,103 | 2,235,973,868 |
| 2 13 2 | PROGRAM PENATAAN DESA | | | | 329,785,603 | 379,253,443 |
| 2 13 2 2.01 | Penyelenggaraan Penataan Desa | | | | 329,785,603 | 379,253,443 |
| 2 13 2 2.01 2 | Fasilitasi Tata Wilayah Desa | Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah penataan wilayah desa yang terfasilitasi | 27 desa | 0 | 0 |
| 2 13 2 2.01 3 | Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa | Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah penataan kewenangan desa yang terfasilitasi | 27 desa | 0 | 0 |
| 2 13 2 2.01 4 | Fasilitasi Penamaan dan Kode Desa | Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, | Jumlah desa yang diberi nama dan kode | 27 org | 0 | 0 |



| Kode | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan | Lokasi | Indikator | Target | Pagu Indikatif (Rp.) | Prakiraan Maju (Rp.) |
|--------------------|--|--|--|--------------|----------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Semua Kelurahan | | | | |
| 2 13 2 2.01 7 | Penyediaan dana Operasional, Penghasilan Tetap, dan Tunjangan Lainnya bagi Perangkat Pemerintahan Desa | Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah kepala desa dan perangkat desa yang dijamin kesehatannya | 324 orang | 329,785,603 | 379,253,443 |
| 2 13 3 | PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA | | | | 0 | 0 |
| 2 13 3 2.01 | Fasilitasi Kerja sama antar Desa | | | | 0 | 0 |
| 2 13 3 2.01 1 | Fasilitasi Kerja sama Antar Desa | Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah kawasan perdesaan yang terbentuk | 2 kawasan | 0 | 0 |
| | | | Jumlah kerja sama desa yang difasilitasi | 2 desa | | |
| 2 13 3 2.01 2 | Fasilitasi Kerja sama Desa dengan Pihak Ketiga | Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah kerjasama desa dengan pihak ketiga yang difasilitasi | 2 kerja sama | 0 | 0 |
| 2 13 4 | PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA | | | | 978,220,500 | 1,124,953,575 |
| 2 13 4 2.01 | Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa | | | | 978,220,500 | 1,124,953,575 |
| 2 13 4 2.01 1 | Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa | Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah administrasi Pemerintahan Desa yang terfasilitasi | 27 laporan | 62,380,000 | 71,737,000 |
| 2 13 4 2.01 2 | Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa | Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah produk hukum desa yang terfasilitasi | 27 dokumen | 31,133,000 | 35,802,950 |
| 2 13 4 2.01 4 | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa | Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah perangkat desa yang mendapat pelatihan BIMTEK tentang SISKUEDES dan SIPADES | 160 ORG | 227,140,000 | 261,211,000 |
| 2 13 4 2.01 5 | Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa dan BPD | Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah aparatur pemerintahan desa dan BPD yang mendapatkan pelatihan Bimtek | 244 ORG | 0 | 0 |



| Kode | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan | Lokasi | Indikator | Target | Pagu Indikatif (Rp.) | Prakiraan Maju (Rp.) |
|--------------------|---|--|--|------------|----------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2 13 4 2.01 6 | Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa | Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah penyelenggaraan desa yang terfasilitasi | 27 laporan | 0 | 0 |
| 2 13 4 2.01 7 | Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa | Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah peraturan desa yang dievaluasi (Dok) | 27 dokumen | 0 | 0 |
| 2 13 4 2.01 8 | Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa | Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah bumdes yang terbina | 27 bumdes | 0 | 0 |
| 2 13 4 2.01 9 | Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa | Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah kepala desa terpilih dan dilantik | 8 desa | 382,000,000 | 439,300,000 |
| 2 13 4 2.01 10 | Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa | Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa yang terfasilitasi (org) | 20 org | 0 | 0 |
| 2 13 4 2.01 11 | Fasilitasi Penyusunan Profil Desa dan Evaluasi Perkembangan Desa | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | jumlah buku profil desa yang dicetak (buku) | 37 buku | 269,780,000 | 310,247,000 |
| | | | jumlah laporan hasil evaluasi perkembangan desa (lap) | 37 lap | | |
| 2 13 4 2.01 12 | Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa | Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah laporan penyelenggaraan ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat desa (laporan) | 27 laporan | 5,787,500 | 6,655,625 |
| 2 13 5 | PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT | | | | 636,319,000 | 731,766,850 |
| 2 13 5 2.01 | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota | | | | 636,319,000 | 731,766,850 |
| 2 13 5 2.01 3 | Peningkatan Kapasitas Kelembagaan | Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, | Jumlah kapasitas kelembagaan yang terfasilitasi (lembaga) | 6 lembaga | 617,774,000 | 710,440,100 |



| Kode | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan | Lokasi | Indikator | Target | Pagu Indikatif (Rp.) | Prakiraan Maju (Rp.) |
|---------------|--|--|--|---------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Semua Kelurahan | | | | |
| 2 13 5 2.01 6 | Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna | Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah kegiatan TTG yang terfasilitasi dan ter Petakan | 2 org | 18,545,000 | 21,326,750 |
| TOTAL | | | | | 6,022,572,803 | 6,925,958,723 |



OPD: DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan | Lokasi | Indikator | Target | Pagu Indikatif (Rp.) | Prakiraan Maju (Rp.) | |
|-------------------|--|---|---|-----------|----------------------|----------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 2 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | |
| 2 9 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN | | | | 4,277,240,000 | 4,948,826,000 | |
| 2 9 1 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | | | | 3,877,200,000 | 4,473,780,000 | |
| 2 9 1 2.01 | Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | 10,000,000 | 11,500,000 | |
| 2 9 1 2.01 4 | Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | laporan forum OPD | 1 laporan | 10,000,000 | 11,500,000 | |
| 2 9 1 2.02 | Administrasi Keuangan | | | | 879,000,000 | 1,010,850,000 | |
| 2 9 1 2.02 1 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah tenaga pegawai non PNS yang difasilitasi | 12 bulan | 879,000,000 | 1,010,850,000 | |
| 2 9 1 2.03 | Administrasi Umum | | | | 2,888,200,000 | 3,321,430,000 | |
| 2 9 1 2.03 1 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jasa surat menyurat yang disediakan | 12 bulan | 6,850,000 | 7,877,500 | |
| 2 9 1 2.03 2 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan | 12 bulan | 130,000,000 | 149,500,000 | |
| 2 9 1 2.03 7 | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Penatausahaan Keuangan dan Barang | 12 bulan | 379,000,000 | 435,850,000 | |
| 2 9 1 2.03 8 | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jasa kebersihan kantor yang disediakan | 12 bulan | 25,600,000 | 29,440,000 | |
| 2 9 1 2.03 10 | Penyediaan Alat Tulis Kantor | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Alat tulis kantor yang disediakan | 12 bulan | 94,250,000 | 108,387,500 | |
| 2 9 1 2.03 11 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Barang cetak dan penggandaan yang disediakan | 12 bulan | 52,500,000 | 60,375,000 | |
| 2 9 1 2.03 12 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan | 12 bulan | 18,000,000 | 20,700,000 | |



| Kode | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan | Lokasi | Indikator | Target | Pagu Indikatif (Rp.) | Prakiraan Maju (Rp.) |
|-------------------|--|---|--|-----------|----------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2 9 1 2.03 17 | Penyediaan Makanan dan Minuman | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Makan dan minum yang disediakan | 12 bulan | 84,000,000 | 96,600,000 |
| 2 9 1 2.03 18 | Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang difasilitasi | 12 bulan | 650,000,000 | 747,500,000 |
| 2 9 1 2.03 20 | Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah kendaraan roda 4 yang diadakan | 1 unit | 400,000,000 | 460,000,000 |
| 2 9 1 2.03 24 | Pengadaan Peralatan Gedung Kantor | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah Barang yang diadakan | 4 jenis | 50,000,000 | 57,500,000 |
| 2 9 1 2.03 30 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Kendaraan Roda 4 dan Roda 2 yang dipelihara | 12 bulan | 514,000,000 | 591,100,000 |
| 2 9 1 2.03 34 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Ketersediaan biaya pemeliharaan gedung kantor | 12 bulan | 104,000,000 | 119,600,000 |
| 2 9 1 2.03 35 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Ketersediaan biaya pemeliharaan dan perawatan mobile | 12 bulan | 30,000,000 | 34,500,000 |
| 2 9 1 2.03 38 | Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah gedung yang direhap | 1 unit | 350,000,000 | 402,500,000 |
| 2 9 1 2.04 | Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | | | | 100,000,000 | 130,000,000 |
| 2 9 1 2.04 9 | Pendidikan dan Pelatihan Formal | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Fasilitasi pegawai yang mengikuti diklat | 12 bulan | 100,000,000 | 130,000,000 |
| 2 9 2 | PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN | | | | 18,725,000 | 21,533,750 |
| 2 9 2 2.01 | Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan Sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | | | | 18,725,000 | 21,533,750 |
| 2 9 2 2.01 1 | Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | jumlah laporan fasilitasi pendampingan penyediaan sarana lumbung padi | 1 laporan | 5,000,000 | 5,750,000 |
| 2 9 2 2.01 3 | Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya | Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Lunto Timur | Jumlah desa menuju mandiri pangan yang dikembangkan | 4 desa | 13,725,000 | 15,783,750 |



| Kode | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan | Lokasi | Indikator | Target | Pagu Indikatif (Rp.) | Prakiraan Maju (Rp.) |
|-------------------|---|--|---|--------------|----------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Kubang Tengah | jumlah sarana pendukung lainnya | 4 paket | | |
| | | Kota Sawahlunto, Barangin, Kolok Nan Tuo | Kelompok tani pelaksana desa mandiri pangan | 2 desa | | |
| | | Kota Sawahlunto, Silungkang, Muaro Kalaban | | | | |
| | | Kota Sawahlunto, Talawi, Tumpuk Tengah | | | | |
| 2 9 3 | PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT | | | | 326,040,000 | 389,946,000 |
| 2 9 3 2.01 | Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan | | | | 106,000,000 | 121,900,000 |
| 2 9 3 2.01 5 | Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan | Kota Sawahlunto, Talawi, Talawi Mudiak | jumlah lembaga yang dibentuk dan dibina | 1 unit usaha | 6,000,000 | 6,900,000 |
| 2 9 3 2.01 6 | Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia | Kota Sawahlunto, Barangin, Santua Kota Sawahlunto, Barangin, Kolok Mudiak Kota Sawahlunto, Barangin, Kolok Nan Tuo | jumlah RUPM dan TTI yang dibina | 3 unit | 100,000,000 | 115,000,000 |
| 2 9 3 2.02 | Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota | | | | 42,900,000 | 49,335,000 |
| 2 9 3 2.02 1 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/Kota | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah Laporan Kegiatan Koordinasi dan sinkronisasi | 4 laporan | 7,900,000 | 9,085,000 |
| 2 9 3 2.02 3 | Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Daerah | 2 ton | 35,000,000 | 40,250,000 |
| 2 9 3 2.04 | Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi | | | | 177,140,000 | 218,711,000 |
| 2 9 3 2.04 2 | Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, | jumlah kegiatan yang diikuti /Dilaksanakan | 5 event | 161,500,000 | 200,725,000 |



| Kode | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan | Lokasi | Indikator | Target | Pagu Indikatif (Rp.) | Prakiraan Maju (Rp.) |
|--------------------|--|---|--|-------------|----------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal | Semua Kelurahan | Jumlah kelompok yang difasilitasi | 8 kelompok | | |
| | | | Prestasi LCM B2SA tingkat Provinsi Sumbar | 4 peringkat | | |
| 2 9 3 2.04 3 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah Laporan Koordinasi Pemantauan dan Evaluasi Pola Konsumsi Masyarakat | 1 laporan | 15,640,000 | 17,986,000 |
| | | | Jumlah Peserta sosialisasi | 100 orang | | |
| 2 9 4 | PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN | | | | 10,275,000 | 11,816,250 |
| 2 9 4 2.01 | Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan | | | | 4,000,000 | 4,600,000 |
| 2 9 4 2.01 1 | Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah Laporan Data Statistik Ketahanan Pangan | 12 bulan | 4,000,000 | 4,600,000 |
| 2 9 4 2.02 | Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | 6,275,000 | 7,216,250 |
| 2 9 4 2.02 1 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah laporan koordinasi dan sinkronisasi | 12 bulan | 6,275,000 | 7,216,250 |
| 2 9 5 | PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN | | | | 45,000,000 | 51,750,000 |
| 2 9 5 2.01 | Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota | | | | 45,000,000 | 51,750,000 |
| 2 9 5 2.01 4 | Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah Laporan Pengawasan Keamanan Pangan Segar | 4 laporan | 15,000,000 | 17,250,000 |
| 2 9 5 2.01 5 | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah Sarana dan Prasarana Pengukuran Mutu dan Keamanan Segar yang disediakan | 3 unit | 30,000,000 | 34,500,000 |
| 3 | URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN | | | | | |
| 3 25 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN | | | | 385,000,000 | 450,250,000 |
| 3 25 3 | PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA | | | | 335,000,000 | 385,250,000 |
| 3 25 3 2.04 | Pengelolaan Pembudidayaan Ikan | | | | 335,000,000 | 385,250,000 |



| Kode | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan | Lokasi | Indikator | Target | Pagu Indikatif (Rp.) | Prakiraan Maju (Rp.) |
|--------------------|--|---|---|-------------|----------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3 25 3 2.04 2 | Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah prasarana yang diadakan | 2 paket | 175,000,000 | 201,250,000 |
| 3 25 3 2.04 3 | Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah sarana yang disediakan | 3 paket | 150,000,000 | 172,500,000 |
| 3 25 3 2.04 4 | Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah sarana yang disediakan | 1 paket | 5,000,000 | 5,750,000 |
| 3 25 3 2.04 5 | Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah Pokdakan yang dibina | 10 kelompok | 5,000,000 | 5,750,000 |
| 3 25 5 | PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN | | | | 50,000,000 | 65,000,000 |
| 3 25 5 2.02 | Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil | | | | 50,000,000 | 65,000,000 |
| 3 25 5 2.02 1 | Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan Atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Lomba yang Diikuti | 2 lomba | 50,000,000 | 65,000,000 |
| 3 27 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN | | | | 7,357,500,000 | 8,504,600,000 |
| 3 27 2 | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN | | | | 2,539,500,000 | 2,963,900,000 |
| 3 27 2 2.01 | Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian | | | | 515,000,000 | 615,725,000 |
| 3 27 2 2.01 1 | Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai Dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | persentase penyaluran pupuk bersubsidi | 80% | 15,000,000 | 17,250,000 |
| 3 27 2 2.01 2 | Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah Kelompok yang Didampingi | 25 kelompok | 500,000,000 | 598,475,000 |
| | | | Jumlah Laporan data Tanaman Pangan dan Hortikultura | 12 laporan | | |
| | | | Jumlah sarana yang difasilitasi | 2 unit | | |
| 3 27 2 2.02 | Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan | | | | 891,500,000 | 1,025,225,000 |



| Kode | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan | Lokasi | Indikator | Target | Pagu Indikatif (Rp.) | Prakiraan Maju (Rp.) |
|--------------------|---|---|--|--------------|----------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | Kabupaten/ Kota | | | | | |
| 3 27 2 2.02 1 | Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | jumlah komoditi yang dimurnikan/dilestarikan | 2 komoditi | 150,000,000 | 172,500,000 |
| | | | jumlah produksi benih padi | 2500 kg | | |
| 3 27 2 2.02 2 | Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah Luas Tanaman Perkebunan Yang dipelihara | 20 ha | 450,000,000 | 517,500,000 |
| | | | Jumlah Populasi Tanaman Buah-buahan | 11719 batang | | |
| | | | Luas Lahan yang Direvitalisasi | 15 ha | | |
| | | | Luas Lahan yang Tingkatkan Kualitasnya | 30 ha | | |
| 3 27 2 2.02 3 | Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah Bibit yang Dihasilkan | 7000 batang | 291,500,000 | 335,225,000 |
| | | | Operasional Pemeliharaan | 12 bulan | | |
| 3 27 2 2.03 | Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak Serta Pakan Dalam Daerah Kabupaten/ Kota | | | | 100,000,000 | 115,000,000 |
| 3 27 2 2.03 1 | Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah Kategori Lomba yang Diikuti | 4 kategori | 100,000,000 | 115,000,000 |
| 3 27 2 2.05 | Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak Dalam Daerah Kabupaten/ Kota | | | | 233,000,000 | 267,950,000 |
| 3 27 2 2.05 1 | Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan, Pakan | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah Akseptor IB | 1200 unit | 233,000,000 | 267,950,000 |
| 3 27 2 2.06 | Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Lain | | | | 800,000,000 | 940,000,000 |
| 3 27 2 2.06 1 | Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah Populasi Ternak | 3150 ekor | 800,000,000 | 940,000,000 |



| Kode | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan | Lokasi | Indikator | Target | Pagu Indikatif (Rp.) | Prakiraan Maju (Rp.) |
|--------------------|--|---|--|-------------|----------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3 27 3 | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN | | | | 3,653,000,000 | 4,200,950,000 |
| 3 27 3 2.01 | Pengembangan Prasarana Pertanian | | | | 108,000,000 | 124,200,000 |
| 3 27 3 2.01 3 | Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah Dokumen Perencanaan | 10 dokumen | 108,000,000 | 124,200,000 |
| 3 27 3 2.02 | Pembangunan Prasarana Pertanian | | | | 3,545,000,000 | 4,076,750,000 |
| 3 27 3 2.02 1 | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah Pembangunan Jaringan Irigasi | 38 ha | 1,110,000,000 | 1,276,500,000 |
| | | | Jumlah Perbaikan Jaringan Irigasi | 150 ha | | |
| 3 27 3 2.02 3 | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah Pembangunan Jalan Pertanian | 800 meter | 900,000,000 | 1,035,000,000 |
| | | | Jumlah Perbaikan Jalan Pertanian | 800 meter | | |
| 3 27 3 2.02 7 | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah RPH/TPH yang dikelola | 2 unit | 1,300,000,000 | 1,495,000,000 |
| 3 27 3 2.02 9 | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah bibit yang dihasilkan | 7000 batang | 235,000,000 | 270,250,000 |
| | | | Pembangunan Rehab dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian | 12 bulan | | |
| 3 27 4 | PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER | | | | 440,000,000 | 506,000,000 |
| 3 27 4 2.01 | Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota | | | | 140,000,000 | 161,000,000 |
| 3 27 4 2.01 1 | Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah pelaksanaan | 6 kali | 140,000,000 | 161,000,000 |
| 3 27 4 2.03 | Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota | | | | 220,000,000 | 253,000,000 |
| 3 27 4 2.03 1 | Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah sample yang di periksa | 400 sampel | 20,000,000 | 23,000,000 |



| Kode | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan | Lokasi | Indikator | Target | Pagu Indikatif (Rp.) | Prakiraan Maju (Rp.) |
|--------------------|---|---|---|--------------|-----------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3 27 4 2.03 2 | Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah dosis Obat dan vaksin yang digunakan | 6000 dosis | 200,000,000 | 230,000,000 |
| 3 27 4 2.04 | Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner | | | | 80,000,000 | 92,000,000 |
| 3 27 4 2.04 1 | Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah Unit Usaha Hewan dan UPH yang dibina | 4 unit | 45,000,000 | 51,750,000 |
| 3 27 4 2.04 2 | Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah sample yang di periksa | 30 sampel | 35,000,000 | 40,250,000 |
| 3 27 5 | PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN | | | | 165,000,000 | 189,750,000 |
| 3 27 5 2.01 | Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota | | | | 165,000,000 | 189,750,000 |
| 3 27 5 2.01 1 | Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah tupai yang terbunuh | 2000 ekor | 165,000,000 | 189,750,000 |
| | | | Luas Lahan yang difasilitasi | 100 ha | | |
| | | | Luas Lahan yang Difasilitasi | 30 ha | | |
| 3 27 7 | PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN | | | | 560,000,000 | 644,000,000 |
| 3 27 7 2.01 | Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian | | | | 560,000,000 | 644,000,000 |
| 3 27 7 2.01 1 | Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah kelembagaan penyuluhan yg difasilitasi | 5 lembaga | 100,000,000 | 115,000,000 |
| 3 27 7 2.01 2 | Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah kelompok yang naik scor | 180 kelompok | 70,000,000 | 80,500,000 |
| 3 27 7 2.01 3 | Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah BPP yg difasilitasi | 4 BPP | 370,000,000 | 425,500,000 |
| | | | Jumlah penyuluh yang terfasilitasi | 30 orang | | |
| 3 27 7 2.01 4 | Pembentukan Badan Usaha Milik Petani | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah badan usaha yg dibentuk | 1 unit | 20,000,000 | 23,000,000 |
| TOTAL | | | | | 12,019,740,000 | 13,903,676,000 |



OPD: DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan | Lokasi | Indikator | Target | Pagu Indikatif (Rp.) | Prakiraan Maju (Rp.) | |
|--------------------|--|---|---|----------|----------------------|----------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 2 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | |
| 2 12 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | | | | 1,869,889,500 | 2,150,372,925 | |
| 2 12 1 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | | | | 1,371,872,500 | 1,577,653,375 | |
| 2 12 1 2.02 | Administrasi Keuangan | | | | 503,347,000 | 578,849,050 | |
| 2 12 1 2.02 1 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Tersedianya jasa pelayanan pegawai Non PNS (bulan) | 13 bulan | 389,947,000 | 448,439,050 | |
| 2 12 1 2.02 2 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Tersedianya honorarium penatausahaan (bulan) | 12 bulan | 113,400,000 | 130,410,000 | |
| 2 12 1 2.03 | Administrasi Umum | | | | 848,525,500 | 975,804,325 | |
| 2 12 1 2.03 1 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jml pemakaian jasa pos (bulan) | 12 bulan | 4,335,000 | 4,985,250 | |
| | | | Jumlah materai 3000 yang disediakan (bulan) | 12 bulan | | | |
| | | | Jumlah materai 6000 yang disediakan (bulan) | 12 bulan | | | |
| 2 12 1 2.03 2 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah tagihan listrik, air, dan telepon yang dibayar (bulan) | 12 bulan | 89,364,000 | 102,768,600 | |
| 2 12 1 2.03 8 | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | bahan dan alat kebersihan yang disediakan (bulan) | 12 bulan | 6,105,000 | 7,020,750 | |
| 2 12 1 2.03 10 | Penyediaan Alat Tulis Kantor | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah atk yang dibeli (bulan) | 12 bulan | 65,000,000 | 74,750,000 | |
| 2 12 1 2.03 11 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah barang cetak, jilid dan fotocopy yang disediakan (bulan) | 12 bulan | 50,502,000 | 58,077,300 | |
| 2 12 1 2.03 12 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah komponen instalasi listrik yang dibeli (bulan) | 12 bulan | 3,564,000 | 4,098,600 | |
| 2 12 1 2.03 15 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | jenis bahan bacaan dan peraturan Per UU yang disediakan (jenis) | 3 Jenis | 500 | 575 | |



| Kode | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan | Lokasi | Indikator | Target | Pagu Indikatif (Rp.) | Prakiraan Maju (Rp.) |
|--------------------|---|---|---|----------|----------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2 12 1 2.03 17 | Penyediaan Makanan dan Minuman | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah makan dan minum yang tersedia (bulan) | 12 bulan | 32,628,000 | 37,522,200 |
| 2 12 1 2.03 18 | Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi yang diikuti (bulan) | 12 bulan | 91,057,500 | 104,716,125 |
| 2 12 1 2.03 24 | Pengadaan Peralatan Gedung Kantor | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah peralatan gedung kantor yang tersedia (paket) | 1 Paket | 218,000,000 | 250,700,000 |
| 2 12 1 2.03 28 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah frekwensi pemeliharaan Aset Tetap lainnya (bulan) | 12 bulan | 6,500,000 | 7,475,000 |
| | | | Jumlah frekwensi pemeliharaan taman (bulan) | 12 bulan | | |
| 2 12 1 2.03 30 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah kendaraan dinas roda dua yang dipelihara (unit) | 10 unit | 99,070,000 | 113,930,500 |
| | | | Jumlah kendaraan dinas roda empat yang dipelihara (unit) | 6 unit | | |
| 2 12 1 2.03 34 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara (jenis) | 10 Jenis | 20,900,000 | 24,035,000 |
| 2 12 1 2.03 35 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah meubilair yang dipelihara (jenis) | 5 Jenis | 3,500,000 | 4,025,000 |
| 2 12 1 2.03 38 | Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Rehab bangunan dan pagar | 1 paket | 157,500,000 | 181,125,000 |
| 2 12 1 2.04 | Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | | | | 20,000,000 | 23,000,000 |
| 2 12 1 2.04 5 | Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah petugas pelayanan yang disediakan pakaiannya (orang) | 45 Orang | 20,000,000 | 23,000,000 |
| 2 12 2 | PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK | | | | 64,000,000 | 73,600,000 |
| 2 12 2 2.01 | Pelayanan Pendaftaran Penduduk | | | | 64,000,000 | 73,600,000 |



| Kode | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan | Lokasi | Indikator | Target | Pagu Indikatif (Rp.) | Prakiraan Maju (Rp.) |
|--------------------|--|---|--|--------------|----------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2 12 2 2.01 4 | Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah Dokumen akta kelahiran, Akta Kematian, Jumlah Pelayanan KTP, KK dan Jumlah Surat Pindah yang di terbitkan | 5466 Dokumen | 64,000,000 | 73,600,000 |
| | | | Jumlah laporan Pelaksanaan pelayanan keliling (kali) | 15 kali | | |
| 2 12 4 | PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN | | | | 434,017,000 | 499,119,550 |
| 2 12 4 2.01 | Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan | | | | 52,960,000 | 60,904,000 |
| 2 12 4 2.01 4 | Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah Data Yang Di sajikan | 5 Data | 52,960,000 | 60,904,000 |
| 2 12 4 2.02 | Penataan Administrasi Kependudukan | | | | 60,413,000 | 69,474,950 |
| 2 12 4 2.02 2 | Pengadaan Blangko Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku untuk Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil sesuai dengan Kebutuhan | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jenis blanko /formulir yang disediakan (paket) | 12 paket | 60,413,000 | 69,474,950 |
| 2 12 4 2.03 | Penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan | | | | 320,644,000 | 368,740,600 |
| 2 12 4 2.03 1 | Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah Pasangan Suami Istri yang belum tercatat pernikahannya di Pemerintah terfasilitasi sidang isbatnya | 80 pasangan | 30,000,000 | 34,500,000 |
| 2 12 4 2.03 3 | Koordinasi Antarlembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Administrasi Kependudukan | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah laporan koordinasi dan konsultasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (laporan) | 12 laporan | 164,789,000 | 189,507,350 |



| Kode | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan | Lokasi | Indikator | Target | Pagu Indikatif (Rp.) | Prakiraan Maju (Rp.) | |
|-------------------|---|---|---|---------------------|----------------------|----------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 2 12 4 2.03 8 | Sosialisasi Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi (orang) | 300 orang | 66,000,000 | 75,900,000 | |
| 2 12 4 2.03 11 | Penyajian Data Kependudukan Yang Akurat Dan Dapat Dipertanggungjawabkan | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah KK yang di Data | 3000 Kartu Keluarga | 59,855,000 | 68,833,250 | |
| 5 | UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN | | | | | | |
| 5 4 | PENDIDIKAN DAN PELATIHAN | | | | 110,000,000 | 126,500,000 | |
| 5 4 1 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | | | | 50,000,000 | 57,500,000 | |
| 5 4 1 2.04 | Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | | | | 50,000,000 | 57,500,000 | |
| 5 4 1 2.04 9 | Pendidikan dan Pelatihan Formal | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jml aparatur yang mengikuti diklat formal/umum dan teknis (orang) | 15 orang | 50,000,000 | 57,500,000 | |
| 5 4 2 | PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | | | | 60,000,000 | 69,000,000 | |
| 5 4 2 2.02 | Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional | | | | 60,000,000 | 69,000,000 | |
| 5 4 2 2.02 3 | Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Keluarnya standarisasi pelayanan (ISO 9001:2015) (Paket) | 1 Paket | 60,000,000 | 69,000,000 | |
| TOTAL | | | | | 1,979,889,500 | 2,276,872,925 | |



OPD: DINAS PERHUBUNGAN

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan | Lokasi | Indikator | Target | Pagu Indikatif (Rp.) | Prakiraan Maju (Rp.) | |
|--------------------|--|--|--|------------|----------------------|----------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 2 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | |
| 2 15 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN | | | | 4,737,239,094 | 5,447,824,959 | |
| 2 15 1 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | | | | 1,719,879,704 | 1,977,861,660 | |
| 2 15 1 2.01 | Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | 5,000,000 | 5,750,000 | |
| 2 15 1 2.01 2 | Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Penyediaan buku profil | 1 buku | 2,500,000 | 2,875,000 | |
| 2 15 1 2.01 4 | Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Forum OPD yang dilaksanakan | 1 kegiatan | 2,500,000 | 2,875,000 | |
| 2 15 1 2.02 | Administrasi Keuangan | | | | 889,019,704 | 1,022,372,660 | |
| 2 15 1 2.02 1 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah pegawai non PNS yang difasilitasi | 34 orang | 889,019,704 | 1,022,372,660 | |
| 2 15 1 2.03 | Administrasi Umum | | | | 647,860,000 | 745,039,000 | |
| 2 15 1 2.03 1 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah penyediaan materai dan benda pos lainnya | 12 bulan | 2,500,000 | 2,875,000 | |
| 2 15 1 2.03 2 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik yang dibayarkan | 12 bulan | 50,000,000 | 57,500,000 | |
| 2 15 1 2.03 7 | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah administrasi keuangan yang dibayarkan | 12 bulan | 140,400,000 | 161,460,000 | |
| 2 15 1 2.03 8 | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah alat kebersihan dan bahan pembersih yang disediakan | 12 bulan | 17,500,000 | 20,125,000 | |
| 2 15 1 2.03 10 | Penyediaan Alat Tulis Kantor | Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah Alat tulis kantor yang disediakan | 12 bulan | 30,000,000 | 34,500,000 | |
| 2 15 1 2.03 11 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan | 12 bulan | 15,000,000 | 17,250,000 | |



| Kode | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan | Lokasi | Indikator | Target | Pagu Indikatif (Rp.) | Prakiraan Maju (Rp.) |
|--------------------|--|---|--|------------|----------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2 15 1 2.03 12 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor yang disediakan | 12 bulan | 5,000,000 | 5,750,000 |
| 2 15 1 2.03 13 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah Ketersediaan Dokumentasi dan Dekorasi | 12 bulan | 10,000,000 | 11,500,000 |
| 2 15 1 2.03 15 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan | 1 tahun | 1,500,000 | 1,725,000 |
| 2 15 1 2.03 17 | Penyediaan Makanan dan Minuman | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah makanan dan minuman tamu dan rapat yang disediakan | 12 bulan | 20,960,000 | 24,104,000 |
| 2 15 1 2.03 18 | Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah rapat koordinasi ke dalam dan luar daerah | 12 bulan | 150,000,000 | 172,500,000 |
| 2 15 1 2.03 28 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah gedung yang dipelihara | 2 unit | 20,000,000 | 23,000,000 |
| 2 15 1 2.03 30 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara | 10 unit | 170,000,000 | 195,500,000 |
| 2 15 1 2.03 34 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara | 12 bulan | 15,000,000 | 17,250,000 |
| 2 15 1 2.04 | Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | | | | 178,000,000 | 204,700,000 |
| 2 15 1 2.04 2 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah pakaian dinas yang diadakan | 48 stel | 118,000,000 | 135,700,000 |
| 2 15 1 2.04 9 | Pendidikan dan Pelatihan Formal | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah personil yang mengikuti diklat dan uji kompetensi | 23 orang | 60,000,000 | 69,000,000 |
| 2 15 2 | PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) | | | | 2,817,359,390 | 3,239,963,299 |
| 2 15 2 2.01 | Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota | | | | 5,825,000 | 6,698,750 |
| 2 15 2 2.01 1 | Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah pelaksanaan Wahana Tata Nugraha yang dilaksanakan | 1 kegiatan | 5,825,000 | 6,698,750 |
| 2 15 2 2.02 | Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota | | | | 50,000,000 | 57,500,000 |



| Kode | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan | Lokasi | Indikator | Target | Pagu Indikatif (Rp.) | Prakiraan Maju (Rp.) |
|--------------------|---|---|--|--------------|----------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2 15 2 2.02 4 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perengkapan Jalan | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah perlengkapan jalan yang direhab | 5 jenis | 50,000,000 | 57,500,000 |
| 2 15 2 2.05 | Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | | | | 2,655,895,000 | 3,054,279,250 |
| 2 15 2 2.05 1 | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah peralatan pengujian kendaraan bermotor yang diadakan | 6 unit | 2,425,895,000 | 2,789,779,250 |
| 2 15 2 2.05 3 | Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah kendaraan yang melakukan uji kelaikan | 1100 unit | 80,000,000 | 92,000,000 |
| 2 15 2 2.05 7 | Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah sarana prasarana Pengujian kendaraan Bermotor yang dipelihara | 1 gedung | 150,000,000 | 172,500,000 |
| 2 15 2 2.06 | Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota | | | | 87,763,250 | 100,927,738 |
| 2 15 2 2.06 3 | Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen Dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah Uji coba dan sosialisasi pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan propinsi | 4 kegiatan | 37,763,250 | 43,427,738 |
| 2 15 2 2.06 4 | Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Untuk Jalan Provinsi | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah kegiatan Pengamanan lalu lintas di jalan raya | 160 kegiatan | 50,000,000 | 57,500,000 |
| 2 15 2 2.08 | Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan | | | | 7,480,000 | 8,602,000 |
| 2 15 2 2.08 4 | Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah sopir/awak kendaraan angkutan Umum teladan | 10 orang | 7,480,000 | 8,602,000 |
| 2 15 2 2.09 | Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | | 10,396,140 | 11,955,561 |



| Kode | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan | Lokasi | Indikator | Target | Pagu Indikatif (Rp.) | Prakiraan Maju (Rp.) |
|--------------------|--|---|--|---------|----------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2 15 2 2.09 2 | Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah kendaraan bermotor yang diperiksa | 30 unit | 10,396,140 | 11,955,561 |
| 2 15 5 | PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN | | | | 200,000,000 | 230,000,000 |
| 2 15 5 2.02 | Penerbitan Izin Usaha, Izin Pembangunan dan Izin Operasi Prasarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | | 200,000,000 | 230,000,000 |
| 2 15 5 2.02 2 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha, Izin Pembangunan dan Izin Operasi Prasarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Sarana prasarana perkeretaapian yang diaktifkan dan dipelihara | 1 tahun | 200,000,000 | 230,000,000 |
| TOTAL | | | | | 4,737,239,094 | 5,447,824,959 |



OPD: DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan | Lokasi | Indikator | Target | Pagu Indikatif (Rp.) | Prakiraan Maju (Rp.) | |
|--------------------|--|---|---|----------|----------------------|----------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 2 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | |
| 2 17 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH | | | | 3,691,123,633 | 4,244,792,178 | |
| 2 17 1 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | | | | 3,149,563,000 | 3,621,997,450 | |
| 2 17 1 2.02 | Administrasi Keuangan | | | | 1,641,250,000 | 1,887,437,500 | |
| 2 17 1 2.02 1 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah tenaga pegawai non PNS yang difasilitasi | 86 Orang | 1,641,250,000 | 1,887,437,500 | |
| 2 17 1 2.03 | Administrasi Umum | | | | 1,384,313,000 | 1,591,959,950 | |
| 2 17 1 2.03 1 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jasa Surat Menyurat yang disediakan | 12 Bulan | 4,431,000 | 5,095,650 | |
| 2 17 1 2.03 2 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan | 12 Bulan | 258,800,000 | 297,620,000 | |
| 2 17 1 2.03 7 | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Penatausahaan Keuangan dan Barang yang dilaksanakan | 12 Bulan | 117,000,000 | 134,550,000 | |
| 2 17 1 2.03 8 | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jasa Kebersihan Kantor yang disediakan | 12 Bulan | 37,600,500 | 43,240,575 | |
| 2 17 1 2.03 10 | Penyediaan Alat Tulis Kantor | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Alat Tulis Kantor yang disediakan | 12 Bulan | 57,165,000 | 65,739,750 | |
| 2 17 1 2.03 11 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan | 12 Bulan | 31,185,500 | 35,863,325 | |
| 2 17 1 2.03 12 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Komponen Instalasi listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan | 12 Bulan | 14,087,000 | 16,200,050 | |
| 2 17 1 2.03 17 | Penyediaan Makanan dan Minuman | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Makan dan Minum yang disediakan | 12 Bulan | 45,333,000 | 52,132,950 | |



| Kode | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan | Lokasi | Indikator | Target | Pagu Indikatif (Rp.) | Prakiraan Maju (Rp.) |
|--------------------|---|---|---|------------|----------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2 17 1 2.03 18 | Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar Daerah yang difasilitasi | 12 Bulan | 241,100,000 | 277,265,000 |
| 2 17 1 2.03 24 | Pengadaan Peralatan Gedung Kantor | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Peralatan Gedung Kantor yang diadakan | 12 Bulan | 208,725,000 | 240,033,750 |
| 2 17 1 2.03 28 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Tersedianya biaya pemeliharaan gedung kantor | 12 Bulan | 190,000,000 | 218,500,000 |
| 2 17 1 2.03 30 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Kendaraan Roda Empat dan Roda dua yang dipelihara | 16 Unit | 134,786,000 | 155,003,900 |
| 2 17 1 2.03 34 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Peralatan gedung kantor yang dipelihara | 12 Bulan | 34,100,000 | 39,215,000 |
| 2 17 1 2.03 35 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Mobiler kantor yang dipelihara | 12 Bulan | 10,000,000 | 11,500,000 |
| 2 17 1 2.04 | Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | | | | 124,000,000 | 142,600,000 |
| 2 17 1 2.04 9 | Pendidikan dan Pelatihan Formal | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal | 38% | 124,000,000 | 142,600,000 |
| 2 17 3 | PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI | | | | 94,000,000 | 108,100,000 |
| 2 17 3 2.01 | Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota | | | | 94,000,000 | 108,100,000 |
| 2 17 3 2.01 1 | Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah Laporan monitoring dan evaluasi | 4 Laporan | 94,000,000 | 108,100,000 |
| | | | Jumlah sistem informasi yang dikelola | 1 Aplikasi | | |
| 2 17 4 | PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI | | | | 122,719,900 | 141,127,885 |
| 2 17 4 2.01 | Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | | 122,719,900 | 141,127,885 |



| Kode | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan | Lokasi | Indikator | Target | Pagu Indikatif (Rp.) | Prakiraan Maju (Rp.) |
|--------------------|---|---|---|------------|----------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2 17 4 2.01 1 | Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah unit usaha simpan pinjam koperasi yang sehat | 50 Unit | 16,350,000 | 18,802,500 |
| 2 17 4 2.01 2 | Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah koperasi berprestasi tingkat provinsi | 1 Koperasi | 106,369,900 | 122,325,385 |
| 2 17 5 | PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN | | | | 145,420,000 | 167,233,000 |
| 2 17 5 2.01 | Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/ Kota | | | | 145,420,000 | 167,233,000 |
| 2 17 5 2.01 1 | Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian Serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah pengelola koperasi yang bersertifikasi | 120 Orang | 145,420,000 | 167,233,000 |
| 2 17 7 | PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) | | | | 89,622,500 | 103,065,875 |
| 2 17 7 2.01 | Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan | | | | 89,622,500 | 103,065,875 |
| 2 17 7 2.01 4 | Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Persentase UMKM yang difasilitasi | 4% | 40,764,500 | 46,879,175 |
| 2 17 7 2.01 5 | Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah UMKM yang difasilitasi | 200 UMKM | 48,858,000 | 56,186,700 |
| 2 17 8 | PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM | | | | 89,798,233 | 103,267,968 |
| 2 17 8 2.01 | Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil | | | | 89,798,233 | 103,267,968 |
| 2 17 8 2.01 1 | Fasilitasi Usaha mikro Menjadi Usaha kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah UMKM yang bersertifikasi kewirausahaan | 105 Orang | 89,798,233 | 103,267,968 |
| 3 | URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN | | | | | |
| 3 30 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN | | | | 1,095,625,000 | 1,259,968,750 |



| Kode | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan | Lokasi | Indikator | Target | Pagu Indikatif (Rp.) | Prakiraan Maju (Rp.) |
|--|---|---|---|-----------|----------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3 30 3 | PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN | | | | 451,225,000 | 518,908,750 |
| 3 30 3 2.01 | Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan | | | | 451,225,000 | 518,908,750 |
| 3 30 3 2.01 1 | Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | jumlah dokumen grand desain | 1 Dokumen | 100,000,000 | 115,000,000 |
| 3 30 3 2.01 2 | Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | jumlah pasar yang terpelihara | 7 pasar | 351,225,000 | 403,908,750 |
| 3 30 4 | PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING | | | | 46,000,000 | 52,900,000 |
| 3 30 4 2.02 | Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota | | | | 46,000,000 | 52,900,000 |
| 3 30 4 2.02 1 | Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | laporan monitoring dan evaluasi makanan dalam kemasan | 4 laporan | 46,000,000 | 52,900,000 |
| laporan monitoring dan evaluasi pendistribusian gas bersubsidi | | | 12 laporan | | | |
| laporan monitoring sembako | | | 52 laporan | | | |
| 3 30 5 | PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR | | | | 310,000,000 | 356,500,000 |
| 3 30 5 2.01 | Penyelenggaraan Promosi dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat Pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | | 310,000,000 | 356,500,000 |
| 3 30 5 2.01 3 | Pameran Dagang Lokal | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | jumlah event pameran/promosi yang dilaksanakan | 20 event | 310,000,000 | 356,500,000 |
| 3 30 6 | PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN | | | | 34,700,000 | 39,905,000 |
| 3 30 6 2.01 | Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan | | | | 34,700,000 | 39,905,000 |
| 3 30 6 2.01 1 | Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | laporan pelaksanaan tera dan tera ulang | 2 laporan | 34,700,000 | 39,905,000 |
| 3 30 7 | PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI | | | | 253,700,000 | 291,755,000 |
| 3 30 7 2.01 | Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri | | | | 253,700,000 | 291,755,000 |



| Kode | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan | Lokasi | Indikator | Target | Pagu Indikatif (Rp.) | Prakiraan Maju (Rp.) |
|--------------------|--|---|--|-------------------|----------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3 30 7 2.01 1 | Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri Di Tingkat Kabupaten/Kota | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | jumlah UMKMyang mengikuti pameran hari jadi kota | 30 UMKM | 253,700,000 | 291,755,000 |
| 3 31 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN | | | | 1,683,127,500 | 1,935,596,625 |
| 3 31 2 | PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI | | | | 1,458,127,500 | 1,676,846,625 |
| 3 31 2 2.01 | Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota | | | | 1,458,127,500 | 1,676,846,625 |
| 3 31 2 2.01 1 | Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | jumlah dokumen yang dihasilkan | 1 dokumen | 150,000,000 | 172,500,000 |
| 3 31 2 2.01 3 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Sumber Daya Industri | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | jumlah IKM tekstil yang menggunakan pewarna alami (IKM) | 2 IKM | 160,000,000 | 184,000,000 |
| | | | jumlah orang yang terampil menghani | 2 orang | | |
| 3 31 2 2.01 4 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | jumlah IKM yang terfasilitasi | 4 IKM | 714,520,000 | 821,698,000 |
| | | | Jumlah outlet yang berkembang | 1 outlet | | |
| | | | Jumlah produk IKM yang mempunyai kemasan sesuai standar | 10 produk | | |
| | | | jumlah sentra industri yang berkembang dengan jumlah pengrajin sejenis 5 pengrajin | 1 sentra industri | | |
| | | | jumlah teknologi industri yang dikembangkan | 20 unit | | |
| 3 31 2 2.01 5 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | dekranasda yang dikelola | 12 bulan | 433,607,500 | 498,648,625 |
| 3 31 3 | PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI | | | | 165,000,000 | 189,750,000 |
| 3 31 3 2.01 | Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan IUI Menengah | | | | 165,000,000 | 189,750,000 |



| Kode | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan | Lokasi | Indikator | Target | Pagu Indikatif (Rp.) | Prakiraan Maju (Rp.) |
|--------------------|--|---|--|------------|----------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3 31 3 2.01 2 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan (IUI) Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Memenuhi Ketentuan Perizinan | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | jumlah laporan koordinasi dan sinkronisasi pengawas | 12 laporan | 30,000,000 | 34,500,000 |
| 3 31 3 2.01 3 | Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Pengamanan dan Penyelamatan Industri | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | jumlah IKM yang diawasi dan dievaluasi | 100 IKM | 135,000,000 | 155,250,000 |
| | | | jumlah produk IKM yang bersertifikasi AKG | 10 produk | | |
| | | | jumlah produk IKM yang bersertifikasi halal | 10 produk | | |
| | | | jumlah produk IKM yang mempunyai HKI, SNI, dan Izin edar | 5 produk | | |
| 3 31 4 | PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL | | | | 60,000,000 | 69,000,000 |
| 3 31 4 2.01 | Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | 60,000,000 | 69,000,000 |
| 3 31 4 2.01 2 | Diseminasi dan Publikasi Data Informasi Industri Kabupaten/Kota | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | jumlah aplikasi data informasi industri yang dikelola | 1 aplikasi | 60,000,000 | 69,000,000 |
| TOTAL | | | | | 6,469,876,133 | 7,440,357,553 |



OPD: DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan | Lokasi | Indikator | Target | Pagu Indikatif (Rp.) | Prakiraan Maju (Rp.) | |
|-------------------|--|---|---|-----------|----------------------|----------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 2 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | |
| 2 7 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA | | | | 5,072,371,370 | 5,979,215,825 | |
| 2 7 1 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | | | | 3,642,831,370 | 4,335,244,825 | |
| 2 7 1 2.01 | Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | 5,000,000 | 5,750,000 | |
| 2 7 1 2.01 4 | Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Berita Acara Forum OPD | 1 Dokumen | 5,000,000 | 5,750,000 | |
| 2 7 1 2.02 | Administrasi Keuangan | | | | 334,425,000 | 384,588,750 | |
| 2 7 1 2.02 1 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah tenaga pegawai non PNS yang difasilitasi | 12 Orang | 334,425,000 | 384,588,750 | |
| 2 7 1 2.03 | Administrasi Umum | | | | 3,143,406,370 | 3,760,906,075 | |
| 2 7 1 2.03 1 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jasa surat menyurat yang disediakan | 12 Bulan | 4,000,000 | 4,600,000 | |
| 2 7 1 2.03 2 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan | 12 Bulan | 55,980,000 | 64,377,000 | |
| 2 7 1 2.03 7 | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Penatausahaan Keuangan dan Barang yang dilaksanakan | 12 Bulan | 158,400,000 | 182,160,000 | |
| 2 7 1 2.03 8 | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jasa kebersihan yang tersedia | 12 Bulan | 9,248,500 | 10,635,775 | |
| 2 7 1 2.03 10 | Penyediaan Alat Tulis Kantor | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Alat tulis kantor yang disediakan | 12 Bulan | 41,827,550 | 48,101,682 | |
| 2 7 1 2.03 11 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Barang cetak dan penggandaan yang disediakan | 12 Bulan | 59,954,500 | 68,947,675 | |
| 2 7 1 2.03 12 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan | 12 Bulan | 9,250,000 | 10,637,500 | |



| Kode | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan | Lokasi | Indikator | Target | Pagu Indikatif (Rp.) | Prakiraan Maju (Rp.) |
|-------------------|---|---|--|------------|----------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2 7 1 2.03 17 | Penyediaan Makanan dan Minuman | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Makan dan minum yang disediakan | 12 Bulan | 39,796,000 | 45,765,400 |
| | | | Pelaksanaan Bulan K3 | 1 Kegiatan | | |
| 2 7 1 2.03 18 | Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang difasilitasi | 12 Bulan | 269,944,820 | 310,436,543 |
| 2 7 1 2.03 20 | Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah kendaraan dinas/operasional yang diadakan | 4 Unit | 250,000,000 | 310,000,000 |
| 2 7 1 2.03 24 | Pengadaan Peralatan Gedung Kantor | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dokumentasi dan dekorasi yang disediakan | 12 Bulan | 100,000,000 | 120,000,000 |
| | | | Peralatan gedung kantor yang disediakan | 12 Jenis | | |
| 2 7 1 2.03 25 | Pengadaan Mebeleur | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah mobiler yang diadakan | 1 paket | 500,000,000 | 575,000,000 |
| 2 7 1 2.03 28 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Gedung kantor yang dipelihara | 12 Bulan | 1,500,000,000 | 1,843,488,750 |
| | | | Jumlah sarana dan prasarana BLK yang direhab | 1 Unit | | |
| | | | Tersedianya Mall Pelayanan Publik | 1 Unit | | |
| 2 7 1 2.03 30 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Kendaraan dinas roda 4 dan roda 2 yang dipelihara | 12 Bulan | 105,080,000 | 120,842,000 |
| 2 7 1 2.03 34 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Peralatan gedung kantor yang dipelihara | 12 Bulan | 39,925,000 | 45,913,750 |
| 2 7 1 2.04 | Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | | | | 160,000,000 | 184,000,000 |
| 2 7 1 2.04 9 | Pendidikan dan Pelatihan Formal | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal | 12 Orang | 160,000,000 | 184,000,000 |
| 2 7 2 | PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA | | | | 46,175,000 | 53,101,250 |
| 2 7 2 2.01 | Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK) | | | | 46,175,000 | 53,101,250 |



| Kode | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan | Lokasi | Indikator | Target | Pagu Indikatif (Rp.) | Prakiraan Maju (Rp.) |
|-------------------|--|---|--|---------------|----------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2 7 2 2.01 2 | Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dokumen Data Base Tenaga Kerja Daerah | 1 Dokumen | 46,175,000 | 53,101,250 |
| 2 7 3 | PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA | | | | 1,069,100,000 | 1,229,465,000 |
| 2 7 3 2.01 | Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi | | | | 1,069,100,000 | 1,229,465,000 |
| 2 7 3 2.01 1 | Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah peserta pelatihan Auto CAD yang bersertifikat | 16 Orang | 979,500,000 | 1,126,425,000 |
| | | | Jumlah peserta pelatihan menjahit yang bersertifikat | 32 Orang | | |
| | | | Jumlah peserta pelatihan otomotif yang bersertifikat | 16 Orang | | |
| | | | Jumlah peserta pelatihan tata boga yang bersertifikat | 16 Orang | | |
| | | | Jumlah peserta pelatihan teknisi AC Split yang bersertifikat | 16 Orang | | |
| | | | Terselenggaranya Operasional UPTD BLK | 12 Bulan | | |
| 2 7 3 2.01 2 | Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah Instruktur BLK yang bersertifikasi | 3 Orang | 89,600,000 | 103,040,000 |
| 2 7 4 | PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA | | | | 266,325,000 | 306,273,750 |
| 2 7 4 2.01 | Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota | | | | 22,175,000 | 25,501,250 |
| 2 7 4 2.01 3 | Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah siswa peserta bimbingan jabatan | 200 Orang | 22,175,000 | 25,501,250 |
| 2 7 4 2.03 | Pengelolaan Informasi Pasar Kerja | | | | 130,400,000 | 149,960,000 |
| 2 7 4 2.03 2 | Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | BKOL yang dikelola | 1 Unit | 70,400,000 | 80,960,000 |
| 2 7 4 2.03 3 | Job Fair/Bursa Kerja | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, | Jumlah lowongan kerja yang tersedia | 1600 Lowongan | 60,000,000 | 69,000,000 |



| Kode | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan | Lokasi | Indikator | Target | Pagu Indikatif (Rp.) | Prakiraan Maju (Rp.) |
|-------------------|--|---|--|-----------|----------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Semua Kelurahan | | Kerja | | |
| 2 7 4 2.04 | Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota | | | | 113,750,000 | 130,812,500 |
| 2 7 4 2.04 1 | Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI) | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah peserta sosialisasi penempatan tenaga kerja ke luar negeri | 100 Orang | 113,750,000 | 130,812,500 |
| | | | Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan di luar negeri | 10 Orang | | |
| 2 7 5 | PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL | | | | 47,940,000 | 55,131,000 |
| 2 7 5 2.01 | Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | | 31,000,000 | 35,650,000 |
| 2 7 5 2.01 1 | Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi pembuatan peraturan perusahaan | 100 Orang | 15,000,000 | 17,250,000 |
| 2 7 5 2.01 3 | Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah Peserta Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan ketenagakerjaan | 100 Orang | 16,000,000 | 18,400,000 |
| 2 7 5 2.02 | Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota | | | | 16,940,000 | 19,481,000 |
| 2 7 5 2.02 1 | Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah laporan monitoring kelayakan peralatan operasional perusahaan | 1 Laporan | 13,740,000 | 15,801,000 |



| Kode | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan | Lokasi | Indikator | Target | Pagu Indikatif (Rp.) | Prakiraan Maju (Rp.) |
|--|--|---|--|--------------|----------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2 7 5 2.02 2 | Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Penyelesaian Permasalahan Tentang Ketenagakerjaan | 6 Kasus | 3,200,000 | 3,680,000 |
| 2 18 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL | | | | 611,941,000 | 703,732,150 |
| 2 18 2 | PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL | | | | 110,622,000 | 127,215,300 |
| 2 18 2 2.02 | Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota | | | | 110,622,000 | 127,215,300 |
| 2 18 2 2.02 2 | Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dokumen Feasibility Study | 2 Dokumen | 110,622,000 | 127,215,300 |
| 2 18 3 | PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL | | | | 142,157,000 | 163,480,550 |
| 2 18 3 2.01 | Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota | | | | 142,157,000 | 163,480,550 |
| 2 18 3 2.01 2 | Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah MOU bidang penanaman modal yang dilaksanakan | 2 Kali | 142,157,000 | 163,480,550 |
| Jumlah promosi investasi yang diikuti | | | 4 Kali | | | |
| Jumlah promosi investasi yang dilaksanakan | | | 3 Kali | | | |
| Jumlah sistem informasi Penanaman Modal yang disusun | | | 1 Unit | | | |
| 2 18 4 | PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL | | | | 334,162,000 | 384,286,300 |
| 2 18 4 2.01 | Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota | | | | 334,162,000 | 384,286,300 |
| 2 18 4 2.01 1 | Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah izin yang dikelola melalui sistem pelayanan perizinan dan non perizinan | 1500 Dokumen | 223,000,000 | 256,450,000 |



| Kode | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan | Lokasi | Indikator | Target | Pagu Indikatif (Rp.) | Prakiraan Maju (Rp.) |
|--------------------|--|---|---|--------------|----------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | secara Elektronik | | Jumlah non perizinan yang diterbitkan | 550 Dokumen | | |
| | | | Jumlah perizinan yang diterbitkan | 620 Dokumen | | |
| | | | Jumlah peserta sosialisasi perizinan dan non perizinan | 200 Orang | | |
| 2 18 4 2.01 2 | Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Laporan monitoring dan evaluasi penertiban perizinan | 4 Laporan | 27,000,000 | 31,050,000 |
| 2 18 4 2.01 3 | Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Penyelesaian permasalahan tentang perizinan dan non perizinan | 4 Kasus | 10,000,000 | 11,500,000 |
| 2 18 4 2.01 4 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Sertifikat ISO 9001:2015 | 1 Sertifikat | 74,162,000 | 85,286,300 |
| 2 18 5 | PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL | | | | 25,000,000 | 28,750,000 |
| 2 18 5 2.01 | Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | | | | 25,000,000 | 28,750,000 |
| 2 18 5 2.01 1 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Laporan kelengkapan adm perusahaan penanaman modal | 1 Laporan | 25,000,000 | 28,750,000 |
| | | | Laporan LKPM Perusahaan | 6 Laporan | | |
| TOTAL | | | | | 5,684,312,370 | 6,682,947,975 |



OPD: DINAS KEBUDAYAAN, PENINGGALAN BERSEJARAH DAN PERMUSEUMAN

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan | Lokasi | Indikator | Target | Pagu Indikatif (Rp.) | Prakiraan Maju (Rp.) | |
|--------------------|--|---|--|----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 2 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | |
| 2 22 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN | | | | | 7,546,681,550 | 8,922,453,858 |
| 2 22 1 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | | | | | 3,178,192,800 | 3,654,921,720 |
| 2 22 1 2.01 | Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | 10,000,000 | 11,500,000 |
| 2 22 1 2.01 1 | Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Ketersediaan Dokumen perencanaan tahunan | 1 Dokumen | 5,000,000 | 5,750,000 | |
| 2 22 1 2.01 4 | Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Berita acara forum OPD | 1 Berita Acara | 5,000,000 | 5,750,000 | |
| 2 22 1 2.02 | Administrasi Keuangan | | | | | 1,150,792,500 | 1,323,411,375 |
| 2 22 1 2.02 1 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah tenaga pegawai non PNS yang difasilitasi | 12 Bulan | 1,150,792,500 | 1,323,411,375 | |
| 2 22 1 2.03 | Administrasi Umum | | | | | 1,887,400,300 | 2,170,510,345 |
| 2 22 1 2.03 1 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Pengadaan surat menyurat | 12 Bulan | 6,225,000 | 7,158,750 | |
| 2 22 1 2.03 2 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan | 12 Bulan | 227,600,000 | 261,740,000 | |
| 2 22 1 2.03 7 | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah penatausahaan keuangan dan barang yang dilaksanakan | 12 Bulan | 154,800,000 | 178,020,000 | |
| 2 22 1 2.03 8 | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Pengadaan alat kebersihan dan bahan pembersih | 12 Bulan | 155,115,000 | 178,382,250 | |
| 2 22 1 2.03 10 | Penyediaan Alat Tulis Kantor | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jenis ATK yang tersedia | 12 Bulan | 47,152,300 | 54,225,145 | |
| 2 22 1 2.03 11 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah barang Cetak yang tersedia | 12 Bulan | 50,900,000 | 58,535,000 | |



| Kode | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan | Lokasi | Indikator | Target | Pagu Indikatif (Rp.) | Prakiraan Maju (Rp.) |
|--------------------|--|---|---|----------|----------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2 22 1 2.03 12 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jenis Komponen listrik yang tersedia | 12 Bulan | 40,000,000 | 46,000,000 |
| 2 22 1 2.03 15 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Bahan Bacaan dan Perundang-undangan yang disediakan | 12 Bulan | 5,100,000 | 5,865,000 |
| 2 22 1 2.03 17 | Penyediaan Makanan dan Minuman | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Makan dan Minum yang disediakan | 12 Bulan | 60,000,000 | 69,000,000 |
| 2 22 1 2.03 18 | Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Terlaksananya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar Daerah | 12 Bulan | 400,000,000 | 460,000,000 |
| 2 22 1 2.03 20 | Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang diadakan | 1 Unit | 202,378,000 | 232,734,700 |
| 2 22 1 2.03 22 | Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Perlengkapan Kantor yang diadakan | 12 Bulan | 125,000,000 | 143,750,000 |
| 2 22 1 2.03 24 | Pengadaan Peralatan Gedung Kantor | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Peralatan Gedung Kantor yang diadakan | 12 Bulan | 85,000,000 | 97,750,000 |
| 2 22 1 2.03 28 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Gedung Kantor yang dipelihara | 12 Bulan | 130,000,000 | 149,500,000 |
| 2 22 1 2.03 30 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Terlaksananya pemeliharaan Kendaraan dinas dan operasional | 12 Bulan | 143,130,000 | 164,599,500 |
| 2 22 1 2.03 34 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Peralatan gedung kantor yang dipelihara | 12 Bulan | 50,000,000 | 57,500,000 |
| 2 22 1 2.03 35 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | pemeliharaan mobiler kantor yang disediakan | 12 Bulan | 5,000,000 | 5,750,000 |
| 2 22 1 2.04 | Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | | | | 130,000,000 | 149,500,000 |
| 2 22 1 2.04 9 | Pendidikan dan Pelatihan Formal | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan pelatihan formal | 12 Bulan | 130,000,000 | 149,500,000 |
| 2 22 2 | PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN | | | | 705,116,000 | 949,652,900 |



| Kode | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan | Lokasi | Indikator | Target | Pagu Indikatif (Rp.) | Prakiraan Maju (Rp.) |
|--------------------|---|---|--|---------------|----------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2 22 2 2.01 | Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota | | | | 500,000,000 | 700,000,000 |
| 2 22 2 2.01 1 | Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah balai/rumah adat yang terfasilitasi | 2 Unit | 500,000,000 | 700,000,000 |
| | | | Jumlah Event Pekan Budaya Sawahlunto Yang dilaksanakan | 1 Event | | |
| | | | Jumlah kelompok budaya yang tampil | 18 Kelompok | | |
| | | | Jumlah komunitas Kenagarian yang Dilestarikan | 21 Kelompok | | |
| | | | Jumlah MoU kebudayaan yang aktif | 3 MoU | | |
| | | | Jumlah peserta yang mengikuti Sissca | 80 Peserta | | |
| 2 22 2 2.02 | Pelestarian Kesenian tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota | | | | 205,116,000 | 249,652,900 |
| 2 22 2 2.02 1 | Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah group randai yang mengikuti festival | 52 Group | 100,000,000 | 128,769,500 |
| 2 22 2 2.02 2 | Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah peserta workshop | 70 Orang | 105,116,000 | 120,883,400 |
| 2 22 3 | PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL | | | | 461,375,000 | 590,581,250 |
| 2 22 3 2.01 | Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota | | | | 461,375,000 | 590,581,250 |
| 2 22 3 2.01 1 | Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah kelompok seni dan budaya yang difasilitasi | 10 Kelompok | 461,375,000 | 590,581,250 |
| | | | Jumlah pembuatan film yang terfasilitasi | 1 film | | |
| | | | Jumlah pentas seni yang difasilitasi | 51 Penampilan | | |
| 2 22 4 | PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH | | | | 140,635,000 | 161,730,250 |
| 2 22 4 2.01 | Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | | 140,635,000 | 161,730,250 |
| 2 22 4 2.01 3 | Peningkatan Akses Masyarakat | Kota Sawahlunto, | Jumlah dokumen hasil kajian | 2 Dokumen | 140,635,000 | 161,730,250 |



| Kode | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan | Lokasi | Indikator | Target | Pagu Indikatif (Rp.) | Prakiraan Maju (Rp.) |
|--------------------|--|---|---|------------|----------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | Terhadap Data dan Informasi Sejarah | Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah siswa yang mengikuti lomba | 250 Orang | | |
| 2 22 5 | PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA | | | | 1,457,082,500 | 1,675,644,875 |
| 2 22 5 2.01 | Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota | | | | 19,837,000 | 22,812,550 |
| 2 22 5 2.01 1 | Register Cagar Budaya | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah cagar budaya yang diregistrasi | 10 Unit | 19,837,000 | 22,812,550 |
| 2 22 5 2.02 | Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota | | | | 1,437,245,500 | 1,652,832,325 |
| 2 22 5 2.02 1 | Register Cagar Budaya | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah Laporan monitoring dan evaluasi | 4 Laporan | 1,800,000 | 2,070,000 |
| 2 22 5 2.02 2 | Pencegahan dan Penanggulangan dari Kerusakan, Kehancuran, atau Kemusnahan Cagar Budaya | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah bangunan/kawasan bersejarah direvitalisasi | 2 Unit | 1,036,537,500 | 1,192,018,125 |
| | | | Jumlah dokumen Kajian | 1 Dokumen | | |
| 2 22 5 2.02 3 | Peningkatan Potensi Nilai, Informasi, dan Promosi Cagar Budaya Serta Pemanfaatannya | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah peserta sosialisasi | 50 Orang | 398,908,000 | 458,744,200 |
| | | | Persentase kelengkapan dokumen pengusulan | 1% | | |
| 2 22 6 | PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN | | | | 1,604,280,250 | 1,889,922,863 |
| 2 22 6 2.01 | Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota | | | | 1,604,280,250 | 1,889,922,863 |
| 2 22 6 2.01 1 | Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah koleksi museum yang diadakan | 25 Koleksi | 155,865,000 | 179,244,750 |
| | | | Jumlah koleksi yang dipelihara | 50 Koleksi | | |
| | | | Jumlah paket media informasi yang disusun | 10 Paket | | |
| 2 22 6 2.01 2 | Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah Pengelola Museum yang Meningkatkan Kompetensinya | 35 Orang | 70,261,250 | 80,800,438 |
| 2 22 6 2.01 3 | Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Museum | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah pameran yang dilaksanakan dan diikuti | 5 Event | 42,600,000 | 48,990,000 |
| 2 22 6 2.01 4 | Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, | Terpeliharanya infobox dan lobang mbah soero | 12 Bulan | 1,335,554,000 | 1,580,887,675 |



| Kode | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan | Lokasi | Indikator | Target | Pagu Indikatif (Rp.) | Prakiraan Maju (Rp.) |
|--------------|--|-----------------|---|---------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Semua Kelurahan | Terpeliharanya iptek center dan alat peraga | 12 Bulan | | |
| | | | Terpeliharanya museum budaya | 12 Bulan | | |
| | | | Terpeliharanya Museum Goedang Ransoem | 12 Bulan | | |
| | | | Terpeliharanya museum kereta api | 12 Bulan | | |
| TOTAL | | | | | 7,546,681,550 | 8,922,453,858 |



OPD: DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan | Lokasi | Indikator | Target | Pagu Indikatif (Rp.) | Prakiraan Maju (Rp.) | |
|--------------------|--|---|--|----------|----------------------|----------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 2 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | |
| 2 23 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN | | | | 1,357,234,000 | 1,595,319,100 | |
| 2 23 1 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | | | | 1,009,234,000 | 1,171,369,100 | |
| 2 23 1 2.02 | Administrasi Keuangan | | | | 363,000,000 | 424,950,000 | |
| 2 23 1 2.02 1 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Tersedianya jasa pelayanan pegawai Non PNS (bulan) | 13 bulan | 240,000,000 | 283,500,000 | |
| 2 23 1 2.02 2 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Tersedianya honorarium penatausahaan (bulan) | 12 bulan | 123,000,000 | 141,450,000 | |
| 2 23 1 2.03 | Administrasi Umum | | | | 591,234,000 | 683,669,100 | |
| 2 23 1 2.03 1 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Tersedianya pelayanan jasa surat menyurat (bulan) | 12 bulan | 1,500,000 | 1,725,000 | |
| 2 23 1 2.03 2 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Tersedianya jasa komunikasi listrik, air (bulan) | 12 bulan | 80,600,000 | 92,690,000 | |
| 2 23 1 2.03 8 | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Tersedianya jasa kebersihan kantor (bulan) | 12 bulan | 15,000,000 | 17,250,000 | |
| 2 23 1 2.03 10 | Penyediaan Alat Tulis Kantor | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Tersedianya alat tulis kantor (bulan) | 12 bulan | 20,000,000 | 24,500,000 | |
| 2 23 1 2.03 11 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Tersedianya barang cetakan dan penggandaan (bulan) | 12 bulan | 22,000,000 | 25,300,000 | |
| 2 23 1 2.03 12 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan (bulan) | 12 bulan | 10,000,000 | 11,500,000 | |
| 2 23 1 2.03 15 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan (bulan) | 12 bulan | 26,500,000 | 30,475,000 | |



| Kode | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan | Lokasi | Indikator | Target | Pagu Indikatif (Rp.) | Prakiraan Maju (Rp.) |
|--------------------|---|---|--|-------------|----------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2 23 1 2.03 16 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Tersedianya kebutuhan logistik kantor (bulan) | 12 bulan | 10,000,000 | 12,250,000 |
| 2 23 1 2.03 17 | Penyediaan Makanan dan Minuman | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Tersedianya makanan dan minuman (bulan) | 12 bulan | 13,000,000 | 14,950,000 |
| 2 23 1 2.03 18 | Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah (Bulan) | 12 bulan | 100,000,000 | 116,500,000 |
| 2 23 1 2.03 22 | Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah perlengkapan gedung kantor yang tersedia (unit) | 3 unit | 0 | 0 |
| 2 23 1 2.03 24 | Pengadaan Peralatan Gedung Kantor | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah peralatan gedung kantor yang tersedia (unit) | 3 unit | 3,000,000 | 3,450,000 |
| 2 23 1 2.03 28 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah gedung kantor yang terpelihara (unit) | 3 unit | 25,000,000 | 28,750,000 |
| 2 23 1 2.03 30 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Terpeliharanya kendaraan dinas (Bulan) | 12 bulan | 58,134,000 | 66,854,100 |
| 2 23 1 2.03 34 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara (bulan) | 12 bulan | 31,500,000 | 36,225,000 |
| 2 23 1 2.03 38 | Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Terehabilitasinya gedung perpustakaan umum (paket) | 1 paket | 175,000,000 | 201,250,000 |
| 2 23 1 2.04 | Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | | | | 55,000,000 | 62,750,000 |
| 2 23 1 2.04 9 | Pendidikan dan Pelatihan Formal | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah pendidikan dan pelatihan yang diikuti (bulan) | 12 bulan | 55,000,000 | 62,750,000 |
| 2 23 2 | PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN | | | | 338,000,000 | 412,450,000 |
| 2 23 2 2.01 | Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | 163,000,000 | 197,450,000 |
| 2 23 2 2.01 1 | Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Terpeliharanya jaringan aplikasi Perpustakaan (paket) | 1 paket | 10,000,000 | 11,500,000 |
| 2 23 2 2.01 2 | Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, | Jumlah Pemustaka yang terfasilitasi (orang) | 61000 orang | 12,000,000 | 13,800,000 |



| Kode | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan | Lokasi | Indikator | Target | Pagu Indikatif (Rp.) | Prakiraan Maju (Rp.) |
|--------------------|---|---|---|-------------|----------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Semua Kelurahan | | | | |
| 2 23 2 2.01 4 | Pembinaan Perpustakaan Pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah Perpustakaan yang dibina (unit) | 50 unit | 13,000,000 | 14,950,000 |
| 2 23 2 2.01 6 | Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah tenaga perpustakaan yang mengikuti bimtek (orang) | 70 orang | 13,000,000 | 14,950,000 |
| 2 23 2 2.01 8 | Pengembangan Bahan Pustaka | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah koleksi bahan bacaan yang diadakan (paket) | 2 paket | 100,000,000 | 125,000,000 |
| 2 23 2 2.01 9 | Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah buku yang diolah dan dilestarikan (buku) | 4000 buku | 15,000,000 | 17,250,000 |
| 2 23 2 2.02 | Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | 175,000,000 | 215,000,000 |
| 2 23 2 2.02 1 | Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi Pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus Serta Masyarakat | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah masyarakat yang berkunjung ke perpustakaan (orang) | 66000 orang | 50,000,000 | 65,000,000 |
| 2 23 2 2.02 3 | Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah lomba yang diberikan penghargaan (lomba) | 10 lomba | 100,000,000 | 120,000,000 |
| 2 23 2 2.02 4 | Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah layanan khusus yang terfasilitasi (jenis) | 4 jenis | 25,000,000 | 30,000,000 |
| 2 23 3 | PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO | | | | 10,000,000 | 11,500,000 |
| 2 23 3 2.01 | Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota | | | | 10,000,000 | 11,500,000 |
| 2 23 3 2.01 1 | Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah masyarakat yang mengikuti sosialisasi (orang) | 100 orang | 10,000,000 | 11,500,000 |
| 2 24 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN | | | | 165,000,000 | 226,750,000 |



| Kode | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan | Lokasi | Indikator | Target | Pagu Indikatif (Rp.) | Prakiraan Maju (Rp.) |
|--------------------|---|---|---|----------------------------|----------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2 24 2 | PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP | | | | 95,000,000 | 144,500,000 |
| 2 24 2 2.01 | Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota | | | | 65,000,000 | 107,250,000 |
| 2 24 2 2.01 1 | Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah peserta bimtek dan sosialisasi (orang) Tersusunnya tata naskah dinas daerah (paket) | 170 orang 1 paket | 50,000,000 | 90,000,000 |
| 2 24 2 2.01 2 | Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Terpeliharanya arsip Kota Sawahlunto yang disimpan dilembaga kearsipan daerah (kali/tahun) | 2 kali/tahun | 15,000,000 | 17,250,000 |
| 2 24 2 2.02 | Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota | | | | 15,000,000 | 17,250,000 |
| 2 24 2 2.02 2 | Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah Arsip OPD yang diakuisisi (OPD) | 3 OPD | 15,000,000 | 17,250,000 |
| 2 24 2 2.03 | Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota | | | | 15,000,000 | 20,000,000 |
| 2 24 2 2.03 2 | Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kab/Kota | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah OPD/unit kerja yang dibina (unit kerja) Jumlah OPD/unit kerja yang mengelola arsip sesuai dengan standar (persen) | 63 unit kerja 45 persen | 15,000,000 | 20,000,000 |
| 2 24 3 | PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP | | | | 70,000,000 | 82,250,000 |
| 2 24 3 2.02 | Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/Kota | | | | 15,000,000 | 17,250,000 |
| 2 24 3 2.02 1 | Evakuasi dan Identifikasi Arsip Akibat Bencana | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah kegiatan simulasi yang diadakan (kegiatan) | 1 kegiatan | 15,000,000 | 17,250,000 |
| 2 24 3 2.04 | Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota | | | | 25,000,000 | 30,000,000 |
| 2 24 3 2.04 1 | penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah arsip statis yang dialih bahasakan (lembar) | 120 lembar | 25,000,000 | 30,000,000 |
| 2 24 3 2.05 | Pencarian Arsip Statis Kabupaten/Kota yang Dinyatakan Hilang | | | | 30,000,000 | 35,000,000 |



| Kode | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan | Lokasi | Indikator | Target | Pagu Indikatif (Rp.) | Prakiraan Maju (Rp.) |
|---------------|--|---|---|---------------|----------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2 24 3 2.05 1 | Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis yang dinyatakan Hilang | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah arsip yang digandakan (paket) | 1 paket | 30,000,000 | 35,000,000 |
| | | | Jumlah desa dan kelurahan yang dinilai (unit kerja) | 37 unit kerja | | |
| TOTAL | | | | | 1,522,234,000 | 1,822,069,100 |



OPD: DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan | Lokasi | Indikator | Target | Pagu Indikatif (Rp.) | Prakiraan Maju (Rp.) | |
|--------------------|--|---|--|----------------|----------------------|----------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 2 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | |
| 2 19 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | | | | 4,830,700,924 | 5,577,806,062 | |
| 2 19 1 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | | | | 2,500,881,692 | 2,891,013,945 | |
| 2 19 1 2.01 | Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | 12,867,400 | 14,797,510 | |
| 2 19 1 2.01 1 | Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Ketersediaan Dokumen perencanaan tahunan | 1 Dokumen | 4,976,000 | 5,722,400 | |
| 2 19 1 2.01 4 | Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Berita acara forum OPD | 1 Berita Acara | 7,891,400 | 9,075,110 | |
| 2 19 1 2.02 | Administrasi Keuangan | | | | 1,082,489,000 | 1,244,862,350 | |
| 2 19 1 2.02 1 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah gaji Non PNS yang dibayarkan | 12 Bulan | 1,082,489,000 | 1,244,862,350 | |
| 2 19 1 2.03 | Administrasi Umum | | | | 1,305,525,292 | 1,501,354,085 | |
| 2 19 1 2.03 1 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Pengadaan surat menyurat | 12 Bulan | 6,450,000 | 7,417,500 | |
| 2 19 1 2.03 2 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan | 12 Bulan | 58,800,000 | 67,620,000 | |
| 2 19 1 2.03 7 | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah penatausahaan keuangan dan barang yang dilaksanakan | 12 Bulan | 188,400,000 | 216,660,000 | |
| 2 19 1 2.03 8 | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Pengadaan alat kebersihan dan bahan pembersih | 12 Bulan | 38,200,000 | 43,930,000 | |
| 2 19 1 2.03 10 | Penyediaan Alat Tulis Kantor | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jenis ATK yang tersedia | 12 Bulan | 22,472,562 | 25,843,446 | |
| 2 19 1 2.03 11 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah barang Cetak yang tersedia | 12 Bulan | 39,712,400 | 45,669,260 | |



| Kode | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan | Lokasi | Indikator | Target | Pagu Indikatif (Rp.) | Prakiraan Maju (Rp.) |
|--------------------|--|---|---|----------|----------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2 19 1 2.03 12 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jenis Komponen listrik yang tersedia | 12 Bulan | 5,677,700 | 6,529,355 |
| 2 19 1 2.03 15 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Tersedianya Bahan Bacaan dan Perundang-undangan | 12 Bulan | 3,760,000 | 4,324,000 |
| 2 19 1 2.03 17 | Penyediaan Makanan dan Minuman | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Makan dan Minum yang disediakan | 12 Bulan | 27,567,000 | 31,702,050 |
| 2 19 1 2.03 18 | Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Terlaksananya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar Daerah | 12 Bulan | 422,100,000 | 485,415,000 |
| 2 19 1 2.03 20 | Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Terlaksananya pemeliharaan Kendaraan dinas dan operasional | 1 Unit | 250,000,000 | 287,500,000 |
| 2 19 1 2.03 24 | Pengadaan Peralatan Gedung Kantor | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Peralatan Gedung Kantor yang diadakan | 12 Bulan | 38,722,000 | 44,530,300 |
| 2 19 1 2.03 28 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Gedung Kantor yang dipelihara | 12 Bulan | 21,200,000 | 24,380,000 |
| 2 19 1 2.03 30 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Terlaksananya pemeliharaan Kendaraan dinas dan operasional | 12 Bulan | 143,455,630 | 164,973,974 |
| 2 19 1 2.03 34 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dilaksananya pemeliharaan Peralatan gedung kantor | 12 Bulan | 33,708,000 | 38,764,200 |
| 2 19 1 2.03 35 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | pemeliharaan mobiler kantor yang disediakan | 12 Bulan | 5,300,000 | 6,095,000 |
| 2 19 1 2.04 | Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | | | | 100,000,000 | 130,000,000 |
| 2 19 1 2.04 9 | Pendidikan dan Pelatihan Formal | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Diikutinya pendidikan pelatihan formal | 12 Bulan | 100,000,000 | 130,000,000 |
| 2 19 2 | PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN | | | | 1,299,819,232 | 1,479,792,117 |
| 2 19 2 2.01 | Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota | | | | 1,267,100,000 | 1,442,165,000 |



| Kode | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan | Lokasi | Indikator | Target | Pagu Indikatif (Rp.) | Prakiraan Maju (Rp.) |
|--------------------|--|---|--|--------------------|----------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2 19 2 2.01 1 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | jumlah siswa yang terpilih dan dilatih menjadi Paskibraka | 67 Orang | 500,000,000 | 575,000,000 |
| 2 19 2 2.01 3 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/kota | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah peserta yang Memperingati HAORNAS | 400 Orang | 167,100,000 | 177,165,000 |
| | | | Lomba Drumband dan Pelatihan untuk pelatih drumband | 1 Paket | | |
| | | | Terlaksananya upacara bendera memperingati sumpah pemuda | 1 Kegiatan | | |
| 2 19 2 2.01 6 | Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Kab/Kota | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah Kanopi & penerangan lapangan yang dibuat | 1 Paket | 600,000,000 | 690,000,000 |
| | | | Jumlah lapangan basket yang direhab | 1 Paket | | |
| | | | Jumlah lapangan bola kaki desa lunto timur yang direhab | 1 Paket | | |
| | | | Jumlah Pagar kawat lapangan volly gunung timbago kelurahan saringan yang terpasang | 1 Paket | | |
| | | | Jumlah peralatan panahan pengcab panahan kota sawahlunto yang diadakan | 1 Paket | | |
| 2 19 2 2.02 | Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | 32,719,232 | 37,627,117 | |
| 2 19 2 2.02 1 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Pemuda atau Organisasi Kepemudaan Melalui Kemitraan dengan Dunia Usaha | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah peserta yang mengikuti Bimbingan teknis bagi pemuda yang potensial | 30 Orang | 32,719,232 | 37,627,117 |
| 2 19 3 | PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN | | | 940,000,000 | 1,103,500,000 | |
| 2 19 3 2.01 | Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan Pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | | | 150,000,000 | 172,500,000 | |



| Kode | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan | Lokasi | Indikator | Target | Pagu Indikatif (Rp.) | Prakiraan Maju (Rp.) |
|--------------------|--|---|--|-----------|----------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2 19 3 2.01 1 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah cabang olahraga yang mengikuti paralimpik | 5 Cabang | 50,000,000 | 57,500,000 |
| 2 19 3 2.01 3 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah peralatan tenis meja yang diadakan | 1 Paket | 100,000,000 | 115,000,000 |
| 2 19 3 2.02 | Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | 240,000,000 | 276,000,000 |
| 2 19 3 2.02 1 | Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah atlit pelajar yang berprestasi tingkat Sumbar | 65 Orang | 160,000,000 | 184,000,000 |
| | | | Jumlah atlit yang berprestasi tingkat Sumbar | 150 Orang | | |
| 2 19 3 2.02 3 | Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah atlit pelajar yang berprestasi tingkat Sumbar | 2 Orang | 80,000,000 | 92,000,000 |
| | | | Jumlah atlit yang berprestasi tingkat Sumbar | 3 Orang | | |
| 2 19 3 2.03 | Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi | | | | 300,000,000 | 345,000,000 |
| 2 19 3 2.03 4 | Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah atlet dan pelatih yang difasilitasi | 148 Orang | 300,000,000 | 345,000,000 |
| 2 19 3 2.04 | Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga | | | | 250,000,000 | 310,000,000 |
| 2 19 3 2.04 2 | Pengembangan Organisasi Keolahragaan | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah event keolahragaan yang difasilitasi | 5 Event | 250,000,000 | 310,000,000 |
| | | | terfasilitasinya SSB Masyarakat | 12 Bulan | | |
| 2 19 4 | PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN | | | | 90,000,000 | 103,500,000 |
| 2 19 4 2.01 | Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan | | | | 90,000,000 | 103,500,000 |



| Kode | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan | Lokasi | Indikator | Target | Pagu Indikatif (Rp.) | Prakiraan Maju (Rp.) |
|--------------------|---|---|--|------------|-----------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2 19 4 2.01 8 | Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Kegiatan Kepramukaan | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | jumlah fasilitasi kegiatan kepemudaan yang difasilitasi | 6 Kegiatan | 90,000,000 | 103,500,000 |
| | | | Jumlah saka kepramukaan yang di fasilitasi | 50 Saka | | |
| 3 | URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN | | | | | |
| 3 26 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA | | | | 10,676,976,056 | 12,538,522,464 |
| 3 26 2 | PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA | | | | 8,860,000,000 | 10,284,000,000 |
| 3 26 2 2.01 | Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota | | | | 1,000,000,000 | 1,210,000,000 |
| 3 26 2 2.01 2 | Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah Dokumen master plan/site plan dan study kelayakan destinasi wisata | 7 dokumen | 1,000,000,000 | 1,210,000,000 |
| | | | Jumlah Dokumen revisi Riparda yang tersusun | 1 dokumen | | |
| 3 26 2 2.02 | Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota | | | | 210,000,000 | 256,500,000 |
| 3 26 2 2.02 2 | Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Persentase kelengkapan dokumen pengusulan UGG | 75% | 200,000,000 | 245,000,000 |
| 3 26 2 2.02 5 | Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah laporan monev industri kepariwisataan | 4 Laporan | 10,000,000 | 11,500,000 |
| 3 26 2 2.03 | Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota | | | | 7,650,000,000 | 8,817,500,000 |
| 3 26 2 2.03 3 | Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah destinasi Kawasan Geopark Batu Runcing yang dikembangkan | 1 Objek | 5,600,000,000 | 6,410,000,000 |
| | | | Jumlah destinasi Taman Satwa Kandih yang dikembangkan | 1 Objek | | |
| | | | jumlah paket pekerjaan Pengembangan Kawasan Wisata Puncak Cemara yang dilaksanakan | 1 Objek | | |



| Kode | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan | Lokasi | Indikator | Target | Pagu Indikatif (Rp.) | Prakiraan Maju (Rp.) |
|--------------------|---|--|---|-----------|----------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | Jumlah wahana air yang dibangun (paket) | 1 Paket | | |
| 3 26 2 2.03 4 | Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah objek wisata Taman Satwa Kandih yang dikelola dan dipelihara | 1 Objek | 2,000,000,000 | 2,350,000,000 |
| | | | Terpeliharanya objek wisata yang dikelola dan dipelihara | 5 Objek | | |
| 3 26 2 2.03 5 | Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | jumlah dokumen tingkat kepuasan pengunjung terhadap objek wisata | 2 Dokumen | 50,000,000 | 57,500,000 |
| | | | jumlah laporan monitoring | 4 Laporan | | |
| 3 26 3 | PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA | | | | 1,265,860,000 | 1,583,239,000 |
| 3 26 3 2.01 | Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota | | | | 1,265,860,000 | 1,583,239,000 |
| 3 26 3 2.01 1 | Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik dalam dan Luar Negeri | Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jenis Media Promosi | 3 Jenis | 205,500,000 | 251,325,000 |
| | | | Jumlah teknologi informasi yang dikelola | 3 Jenis | | |
| 3 26 3 2.01 2 | Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik dalam dan Luar Negeri Bagi Industri Pariwisata Kabupaten/Kota | Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah Event hari jadi Kota Sawahlunto yang dilaksanakan | 1 Event | 1,007,360,000 | 1,270,964,000 |
| | | | Jumlah Event Lomba Fotografi dan videografi yang dilaksanakan | 4 Event | | |
| | | | jumlah event promosi pariwisata yang diikuti | 6 Event | | |
| | | | Jumlah Event Sport Tourism yang dilaksanakan | 10 Event | | |
| | | | Jumlah Festival Prof M.Yamin yang diselenggarakan | 1 Event | | |
| | | | Jumlah group peserta SIMFes yang tampil | 7 Group | | |



| Kode | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan | Lokasi | Indikator | Target | Pagu Indikatif (Rp.) | Prakiraan Maju (Rp.) |
|--------------------|--|---|---|--------------|----------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | Jumlah Kunjungan Event Sport Tourism | 10 Orang | | |
| | | | Jumlah Peserta Event Fotografi dan videografi | 4 Orang | | |
| | | | Jumlah Peserta Famtrip yang difasilitasi | 15 Orang | | |
| 3 26 3 2.01 4 | Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata dalam dan Luar Negeri | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah MoU aktif yang dihasilkan | 15 MoU | 53,000,000 | 60,950,000 |
| 3 26 4 | PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL | | | | 144,925,000 | 166,663,750 |
| 3 26 4 2.01 | Penyediaan Prasarana (Zona kreatif/Ruang Kreatif/Kota Kreatif) Sebagai Ruang Berekspresi, Berpromosi dan Berinteraksi Bagi Insan Kreatif di Daerah Kabupaten/Kota | | | | 144,925,000 | 166,663,750 |
| 3 26 4 2.01 1 | Pengembangan dan Revitalisasi Prasarana Kota Kreatif | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah Bantuan Prasarana Perbaikan Fasilitas kamar dan toilet kepada Asosiasi Homestay Sawahlunto | 1 Paket | 144,925,000 | 166,663,750 |
| | | | Jumlah peserta workshop ekonomi kreatif yang terfasilitasi | 30 Orang | | |
| 3 26 5 | PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF | | | | 406,191,056 | 504,619,714 |
| 3 26 5 2.01 | Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar | | | | 406,191,056 | 504,619,714 |
| 3 26 5 2.01 3 | Pelatihan Dasar SDM Kepariwisata Bagi Masyarakat, Guru dan Pelajar (Mahasiswa dan/atau Siswa) | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah anggota asosiasi yang meningkat SDM nya | 1 Orang | 100,000,000 | 145,000,000 |
| | | | Jumlah pelaku pariwisata yang bersertifikat | 50 Orang | | |
| 3 26 5 2.01 4 | Sertifikasi Kompetensi Bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, | Jumlah Industri pariwisata yang bersertifikasi | 5 Sertifikat | 75,000,000 | 86,250,000 |



| Kode | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan | Lokasi | Indikator | Target | Pagu Indikatif (Rp.) | Prakiraan Maju (Rp.) |
|---------------|---|---|---|--------------|-----------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Semua Kelurahan | Jumlah Pelaku Industri pariwisata yang bersertifikasi | 5 Sertifikat | | |
| 3 26 5 2.01 5 | Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konsevasi Ekonomi Kreatif | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah Event Festival Sawahlunto Kreatif yang dilaksanakan | 2 Event | 231,191,056 | 273,369,714 |
| | | | Jumlah laporan monev | 4 Laporan | | |
| | | | Jumlah pelaku ekonomi kreatif | 30 O | | |
| | | | Jumlah peserta workshop ekonomi kreatif yang mengikuti workshop | 30 Orang | | |
| TOTAL | | | | | 15,507,676,980 | 18,116,328,526 |



OPD: SEKRETARIAT DAERAH

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan | Lokasi | Indikator | Target | Pagu Indikatif (Rp.) | Prakiraan Maju (Rp.) | |
|--------------------|--|--|--|------------|----------------------|----------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 2 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | |
| 2 16 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | | | | 2,470,149,500 | 2,840,671,925 | |
| 2 16 2 | PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK | | | | 518,919,500 | 596,757,425 | |
| 2 16 2 2.01 | Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | | | | 518,919,500 | 596,757,425 | |
| 2 16 2 2.01 5 | Pengelolaan Media Komunikasi Publik | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Terkelolanya siaran radio sawahlunto FM | 12 bulan | 323,124,500 | 371,593,175 | |
| 2 16 2 2.01 6 | Pelayanan Informasi Publik | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah informasi yang disebarluaskan | 12 Dokumen | 195,795,000 | 225,164,250 | |
| | | | Jumlah kegiatan PPID yang difasilitasi (keg) | 3 Kegiatan | | | |
| 2 16 3 | PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA | | | | 1,951,230,000 | 2,243,914,500 | |
| 2 16 3 2.02 | Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | | | | 1,951,230,000 | 2,243,914,500 | |
| 2 16 3 2.02 4 | Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah | Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah hot spot yang dikelola | 15 titik | 101,230,000 | 116,414,500 | |
| | | | Terkelolanya website pemko | 12 Bulan | | | |
| 2 16 3 2.02 8 | Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah | Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Terkelolanya e-government | 12 Bulan | 1,850,000,000 | 2,127,500,000 | |
| 2 20 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK | | | | 75,499,950 | 86,824,942 | |
| 2 20 2 | PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL | | | | 75,499,950 | 86,824,942 | |
| 2 20 2 2.01 | Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota | | | | 75,499,950 | 86,824,942 | |
| 2 20 2 2.01 1 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan diseminasi Data Statistik Sektoral | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Tersusunnya Data Statistik Sektoral | 7 Dokumen | 75,499,950 | 86,824,942 | |
| 2 21 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN | | | | 63,545,000 | 73,076,750 | |
| 2 21 2 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI | | | | 63,545,000 | 73,076,750 | |
| 2 21 2 2.01 | Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | | | | 63,545,000 | 73,076,750 | |



| Kode | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan | Lokasi | Indikator | Target | Pagu Indikatif (Rp.) | Prakiraan Maju (Rp.) | |
|-------------------|---|--|---|-------------|-----------------------|-----------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 2 21 2 2.01 1 | Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah regulasi tentang persandian | 1 Dokumen | 3,465,000 | 3,984,750 | |
| 2 21 2 2.01 2 | Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah perangkat keras persandian | 84 Unit | 20,000,000 | 23,000,000 | |
| 2 21 2 2.01 3 | Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik | Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah kegiatan pengamanan informasi | 12 Kegiatan | 40,080,000 | 46,092,000 | |
| 4 | UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN | | | | | | |
| 4 1 | SEKRETARIAT DAERAH | | | | 21,560,490,550 | 24,794,564,132 | |
| 4 1 1 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | | | | 11,913,947,700 | 13,701,039,855 | |
| 4 1 1 2.02 | Administrasi Keuangan | | | | 2,011,853,975 | 2,313,632,071 | |
| 4 1 1 2.02 1 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jasa pelayanan pegawai non PNS yang disediakan | 12 bulan | 2,006,104,000 | 2,307,019,600 | |
| 4 1 1 2.02 7 | Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah Laporan Keuangan bulanan dan tahunan yang tersusun | 13 Laporan | 5,749,975 | 6,612,471 | |
| 4 1 1 2.03 | Administrasi Umum | | | | 9,287,768,725 | 10,680,934,034 | |
| 4 1 1 2.03 1 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jasa surat menyurat yang disediakan | 12 bulan | 26,600,000 | 30,590,000 | |
| 4 1 1 2.03 2 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jasa komunikasi sumber daya air dan listrik yang disediakan | 12 bulan | 995,443,500 | 1,144,760,025 | |
| 4 1 1 2.03 7 | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Penatausahaan keuangan dan barang yang dilaksanakan | 12 Bulan | 267,650,000 | 307,797,500 | |
| 4 1 1 2.03 8 | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, | Jasa kebersihan kantor yang disediakan | 12 bulan | 73,150,388 | 84,122,946 | |



| Kode | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan | Lokasi | Indikator | Target | Pagu Indikatif (Rp.) | Prakiraan Maju (Rp.) |
|---------------|--|--|--|----------|----------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Semua Kelurahan | | | | |
| 4 1 1 2.03 10 | Penyediaan Alat Tulis Kantor | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Alat tulis kantor yang disediakan | 12 bulan | 73,936,000 | 85,026,400 |
| 4 1 1 2.03 11 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Barang cetak dan penggandaan yang disediakan | 12 bulan | 152,500,000 | 175,375,000 |
| 4 1 1 2.03 12 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | 12 bulan | 36,538,000 | 42,018,700 |
| 4 1 1 2.03 14 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Peralatan rumah tangga yang disediakan | 12 bulan | 277,000,000 | 318,550,000 |
| 4 1 1 2.03 15 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah kerjasama media massa | 20 Media | 451,280,000 | 518,972,000 |
| 4 1 1 2.03 16 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Bahan logistik kantor yang disediakan | 12 bulan | 18,810,000 | 21,631,500 |
| 4 1 1 2.03 17 | Penyediaan Makanan dan Minuman | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Makan dan minum rapat, dan makan pegawai tertentu yang disediakan | 12 Bulan | 1,358,565,000 | 1,562,349,750 |
| | | | Tamu-tamu daerah dan tamu kepala daerah yang difasilitasi | 12 Bulan | | |
| 4 1 1 2.03 18 | Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah dan keluar daerah yang disediakan | 12 bulan | 1,925,000,000 | 2,213,750,000 |
| 4 1 1 2.03 20 | Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah kendaraan dinas yang diadakan | 2 unit | 1,500,000,000 | 1,725,000,000 |
| 4 1 1 2.03 23 | Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | jumlah peralatan rumah dinas, wisma dan mess yang diadakan | 25 unit | 185,261,837 | 213,051,113 |
| 4 1 1 2.03 24 | Pengadaan Peralatan Gedung Kantor | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, | Jumlah cenderamata yang diadakan | 187 buah | 370,954,000 | 426,597,100 |



| Kode | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan | Lokasi | Indikator | Target | Pagu Indikatif (Rp.) | Prakiraan Maju (Rp.) |
|-------------------|---|--|---|-----------|----------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Semua Kelurahan | jumlah peralatan gedung kantor yang disediakan | 13 jenis | | |
| 4 1 1 2.03 26 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Terpeliharanya rumah jabatan, wisma, mess dan barang inventaris | 12 bulan | 261,600,000 | 300,840,000 |
| 4 1 1 2.03 28 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Terpeliharanya gedung kantor | 12 bulan | 250,000,000 | 287,500,000 |
| 4 1 1 2.03 30 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional | 12 bulan | 1,003,480,000 | 1,154,002,000 |
| 4 1 1 2.03 34 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Terpeliharanya peralatan gedung kantor | 12 bulan | 60,000,000 | 69,000,000 |
| 4 1 1 2.04 | Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | | | | 614,325,000 | 706,473,750 |
| 4 1 1 2.04 2 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Pakaian dinas untuk wako, Wawako yang diadakan | 1 tahun | 252,500,000 | 290,375,000 |
| 4 1 1 2.04 9 | Pendidikan dan Pelatihan Formal | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan | 30 orang | 361,825,000 | 416,098,750 |
| 4 1 2 | PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | | | | 7,461,081,475 | 8,580,243,696 |
| 4 1 2 2.01 | Administrasi Tata Pemerintahan | | | | 257,575,000 | 296,211,250 |
| 4 1 2 2.01 1 | Penataan Administrasi Pemerintahan | Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah Dokumen Buku Pengabdian Kepala Daerah yang disusun | 2 Dokumen | 165,824,000 | 190,697,600 |
| | | | Jumlah Dokumen LKPJ yang disusun | 2 Dokumen | | |
| | | | Jumlah Dokumen LPPD yang disusun | 1 Dokumen | | |
| 4 1 2 2.01 2 | Pengelolaan Administrasi Kewilayahan | Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah camat yang dinilai | 4 Orang | 91,751,000 | 105,513,650 |
| | | | Jumlah peserta bimbingan dan pelatihan aparat kelurahan | 41 orang | | |
| | | | Jumlah rapat pemerintahan terdapan yang dilaksanakan | 12 Kali | | |



| Kode | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan | Lokasi | Indikator | Target | Pagu Indikatif (Rp.) | Prakiraan Maju (Rp.) |
|-------------------|--|--|--|-------------|----------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | Jumlah unsur rupa bumi yang dibakukan | 100 jenis | | |
| 4 1 2 2.02 | Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat | | | | 6,934,559,975 | 7,974,743,971 |
| 4 1 2 2.02 1 | Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual | Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah guru TPQ/TPSQ, Imam dan Muazin Masjid Nagari, Gharim Masjid dan mushalla, dan Penyelenggara Jenazah | 606 Orang | 6,563,910,975 | 7,548,497,621 |
| | | | Jumlah hari besar islam yang diperingati | 6 Kegiatan | | |
| | | | Jumlah imam masjid yang disertifikasi setara LC | 20 Orang | | |
| | | | Jumlah jama | 80 Orang | | |
| | | | Jumlah kafilah MTQ Kota Sawahlunto | 110 Orang | | |
| | | | Jumlah kegiatan yang dilaksanakan | 3 Kegiatan | | |
| | | | Jumlah kelompok didikan subuh yang mengikuti lomba | 5 Kelompok | | |
| | | | Jumlah pelajar yang mengikuti pesantren ramadhan | 4000 Oorang | | |
| 4 1 2 2.02 3 | Evaluasi, Pelaksanaan Kebijakan dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat | Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah Hari besar nasional yang diperingati | 1 Kegiatan | 370,649,000 | 426,246,350 |
| | | | Jumlah pertemuan silaturahmi tim safari ramadhan dengan masyarakat | 75 Kali | | |
| | | | Jumlah pertemuan tokoh adat, agama dan bundo kandung | 12 Kali | | |
| 4 1 2 2.03 | Koordinasi Penyusunan Kebijakan Daerah | | | | 239,161,500 | 275,035,725 |
| 4 1 2 2.03 1 | Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah | Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah desa/kel yang diikuti dalam kegiatan penilaian desa/kel Sadar Hukum | 37 desa/kel | 72,325,000 | 83,173,750 |



| Kode | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan | Lokasi | Indikator | Target | Pagu Indikatif (Rp.) | Prakiraan Maju (Rp.) |
|-------------------|---|--|--|-------------|----------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | Jumlah perda yang disusun | 12 Dokumen | | |
| | | | Jumlah peserta publik hearing ranperda dan sosialisasi perda | 100 Dokumen | | |
| | | | Jumlah produk hukum daerah yang dibuat OPD sesuai dengan aturan yang diterbitkan | 600 Dokumen | | |
| 4 1 2 2.03 2 | Fasilitasi Bantuan Hukum | Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah penanganan perkara | 12 Kasus | 109,825,000 | 126,298,750 |
| 4 1 2 2.03 3 | Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum | Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah dokumentasi produk hukum daerah yang disusun | 2 Dokumen | 57,011,500 | 65,563,225 |
| | | | Jumlah peserta penyuluhan hukum terpadu | 100 Orang | | |
| | | | Jumlah peserta sosialisasi | 100 Orang | | |
| | | | Jumlah produk hukum yang diupload di jaringan dokumentasi hukum | 400 JDH | | |
| 4 1 2 2.04 | Fasilitasi Kerjasama Daerah | | | | 29,785,000 | 34,252,750 |
| 4 1 2 2.04 1 | Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri | Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah Kerjasama kegiatan yang dilaksanakan | 3 Dokumen | 29,785,000 | 34,252,750 |
| 4 1 3 | PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN | | | | 720,144,875 | 828,166,606 |
| 4 1 3 2.01 | Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian | | | | 130,144,875 | 149,666,606 |
| 4 1 3 2.01 1 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD | Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah BUMD dan lembaga keuangan yang dimonitor | 7 | 74,189,000 | 85,317,350 |
| | | | Tersedianya data pemanfaatan dana CSR | 1 Dokumen | | |
| 4 1 3 2.01 2 | Pengendalian dan Distribusi Perekonomian | Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Laporan pelaksanaan pengendalian penyaluran pupuk bersubsidi | 4 Lapoaran | 15,466,000 | 17,785,900 |



| Kode | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan | Lokasi | Indikator | Target | Pagu Indikatif (Rp.) | Prakiraan Maju (Rp.) |
|-------------------|---|--|---|--------------|----------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 4 1 3 2.01 3 | Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil | Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah laporan pelaksanaan monev perkembangan ekonomi masyarakat dan produk unggulan | 2 Lapoaran | 40,489,875 | 46,563,356 |
| 4 1 3 2.02 | Administrasi Pembangunan | | | | 25,000,000 | 28,750,000 |
| 4 1 3 2.02 2 | Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan | Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah monitoring yang dilaksanakan | 12 Bulan | 25,000,000 | 28,750,000 |
| 4 1 3 2.03 | Pengadaan Barang dan Jasa | | | | 565,000,000 | 649,750,000 |
| 4 1 3 2.03 1 | Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa | Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah kegiatan pengaadaan brg/jasa yang diproses melalui ULP | 200 Kegiatan | 109,600,000 | 126,040,000 |
| | | | Jumlah laporan pengelolaan sistem | 4 Dokumen | | |
| 4 1 3 2.03 2 | Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik | Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah laporan pengelolaan media informasi | 1 Dokumen | 153,400,000 | 176,410,000 |
| | | | Jumlah pengadaan brg/jasa yang dikelola secara elektronik melalui LPSE | 200 Kegiatan | | |
| | | | Jumlah standar pengelolaan LPSE ter-update | 17 Dokumen | | |
| 4 1 3 2.03 3 | Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa | Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jmlah peserta bimbingan teknis | 175 Orang | 302,000,000 | 347,300,000 |
| | | | Jumlah bahan bacaan pustaka dan hukum | 20 Buah | | |
| | | | Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan Koordinasi dan konsultasi | 12 Dokumen | | |
| | | | Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan pemantapan struktur organisasi pengadaan brg/jasa | 4 Dokumen | | |
| | | | Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan pendampingan | 4 Dokumen | | |



| Kode | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan | Lokasi | Indikator | Target | Pagu Indikatif (Rp.) | Prakiraan Maju (Rp.) |
|-------------------|---|--|---|-------------|----------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 4 1 4 | PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI UMUM | | | | 1,465,316,500 | 1,685,113,975 |
| 4 1 4 2.01 | Pelaksanaan Administrasi Umum | | | | 779,500,000 | 896,425,000 |
| 4 1 4 2.01 2 | Pengelolaan Perlengkapan | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah kegiatan penunjang hari jadi kota yang terfasilitasi | 1 kegiatan | 323,500,000 | 372,025,000 |
| 4 1 4 2.01 3 | Pengelolaan Rumah Tangga | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Tersedianya biaya rumah tangga wako/wawako | 12 bulan | 456,000,000 | 524,400,000 |
| 4 1 4 2.02 | Penataan Organisasi | | | | 335,116,500 | 385,383,975 |
| 4 1 4 2.02 1 | Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan | Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah dokumen evaluasi jabatan dan kelas jabatan | 1 Dokumen | 69,399,000 | 79,808,850 |
| | | | Jumlah kelembagaan dan permasalahan yang dianalisa | 26 Kegiatan | | |
| | | | Jumlah peserta forum komunikasi keorganisasian | 20 Orang | | |
| | | | Jumlah produk hukum daerah SOTK yang sesuai peraturan baru | 5 Dokumen | | |
| 4 1 4 2.02 2 | Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana | Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah OPD yang dilakukan pengukuran IKM | 5 OPD | 102,588,000 | 117,976,200 |
| | | | Jumlah OPD yang melakukan SPM | 6 OPD | | |
| | | | Jumlah OPD yang mendapatkan pendampingan inovasi pelayanan publik | 26 OPD | | |
| | | | Jumlah OPD yang mengikuti penyusunan SOP dan SPP | 26 OPD | | |
| 4 1 4 2.02 3 | Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi | Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah Dokumen Perjanjian Kota yang tersusun | 1 Dokumen | 163,129,500 | 187,598,925 |
| | | | Jumlah LKJiP Kota yang tersusun | 1 Dokumen | | |



| Kode | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan | Lokasi | Indikator | Target | Pagu Indikatif (Rp.) | Prakiraan Maju (Rp.) |
|-------------------|---|--|---|--------------|-----------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | Jumlah Peserta bintek Penggunaan road map Granddesign reformasi birokrasi | 65 Orang | | |
| 4 1 4 2.03 | Protokol dan Komunikasi Pimpinan | | | | 350,700,000 | 403,305,000 |
| 4 1 4 2.03 2 | Fasilitasi Komunikasi Pimpinan | Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah kegiatan jumpa pers | 12 Kegiatan | 201,000,000 | 231,150,000 |
| 4 1 4 2.03 3 | Pendokumentasian Tugas Pimpinan | Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah kegiatan yang didokumentasikan | 300 Kegiatan | 149,700,000 | 172,155,000 |
| | | | Jumlah media penyampaian informasi | 6 Media | | |
| TOTAL | | | | | 24,169,685,000 | 27,795,137,749 |



OPD: SEKRETARIAT DPRD

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan | Lokasi | Indikator | Target | Pagu Indikatif (Rp.) | Prakiraan Maju (Rp.) | |
|--------------------|---|--|---|----------|-----------------------|-----------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 2 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | |
| 2 16 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | | | | 377,940,000 | 434,631,000 | |
| 2 16 2 | PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK | | | | 377,940,000 | 434,631,000 | |
| 2 16 2 2.01 | Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | | | | 377,940,000 | 434,631,000 | |
| 2 16 2 2.01 4 | Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah media penyampaian informasi | 3 paket | 245,940,000 | 282,831,000 | |
| 2 16 2 2.01 5 | Pengelolaan Media Komunikasi Publik | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah media massa yang bekerjasama | 1 paket | 66,000,000 | 75,900,000 | |
| 2 16 2 2.01 6 | Pelayanan Informasi Publik | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah kegiatan jumpa pers | 1 paket | 66,000,000 | 75,900,000 | |
| 4 | UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN | | | | | | |
| 4 2 | SEKRETARIAT DPRD | | | | 17,585,504,600 | 20,223,330,290 | |
| 4 2 1 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | | | | 5,783,836,200 | 6,651,411,630 | |
| 4 2 1 2.02 | Administrasi Keuangan | | | | 895,152,000 | 1,029,424,800 | |
| 4 2 1 2.02 1 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jasa pelayanan pegawai non PNS yang disediakan | 13 Bulan | 895,152,000 | 1,029,424,800 | |
| 4 2 1 2.03 | Administrasi Umum | | | | 4,188,684,200 | 4,816,986,830 | |
| 4 2 1 2.03 1 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Tersedianya jasa surat menyurat | 12 Bulan | 13,827,000 | 15,901,050 | |
| 4 2 1 2.03 2 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Tagihan listrik dan telepon kantor yang harus dibayar | 12 bulan | 172,000,000 | 197,800,000 | |
| 4 2 1 2.03 7 | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Terpenuhinya penatausahaan keuangan dan barang | 12 bulan | 188,100,000 | 216,315,000 | |



| Kode | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan | Lokasi | Indikator | Target | Pagu Indikatif (Rp.) | Prakiraan Maju (Rp.) |
|---------------|--|---|---|----------|----------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 4 2 1 2.03 8 | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Tersedianya alat kebersihan kantor dan cleaning service ayar | 12 bulan | 120,000,000 | 138,000,000 |
| 4 2 1 2.03 10 | Penyediaan Alat Tulis Kantor | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Tersedianya alat tulis kantor | 12 bulan | 56,512,000 | 64,988,800 |
| 4 2 1 2.03 11 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Tersedianya kebutuhan fotocopy barang cetak dan penjiwaan | 12 bulan | 313,572,000 | 360,607,800 |
| 4 2 1 2.03 12 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Tersedianya kebutuhan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan kantor dan penjiwaan | 12 bulan | 17,256,200 | 19,844,630 |
| 4 2 1 2.03 15 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Tersedianya bahan bacaan | 12 bulan | 120,000,000 | 138,000,000 |
| 4 2 1 2.03 16 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Tersedianya kebutuhan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan kantor dan penjiwaan | 12 bulan | 1,320,000 | 1,518,000 |
| 4 2 1 2.03 17 | Penyediaan Makanan dan Minuman | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Tersedianya makan dan minum rapat dan tamu Pimpinan DPRD | 12 Bulan | 286,627,000 | 329,621,050 |
| 4 2 1 2.03 18 | Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Tersedianya biaya perjalanan dinas luar kota dan luar provinsi | 12 bulan | 225,000,000 | 258,750,000 |
| 4 2 1 2.03 20 | Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah kendaraan yang diadakan | 2 bulan | 1,000,000,000 | 1,150,000,000 |
| 4 2 1 2.03 24 | Pengadaan Peralatan Gedung Kantor | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah peralatan yang dibeli | 12 bulan | 563,000,000 | 647,450,000 |
| 4 2 1 2.03 28 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Terpeliharanya gedung kantor dan rumah dinas | 12 bulan | 597,000,000 | 686,550,000 |
| 4 2 1 2.03 30 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Terpeliharanya kendaraan dinas operasional | 12 bulan | 445,500,000 | 512,325,000 |



| Kode | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan | Lokasi | Indikator | Target | Pagu Indikatif (Rp.) | Prakiraan Maju (Rp.) |
|-------------------|--|---|---|-----------|-----------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 4 2 1 2.03 34 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Terpeliharanya peralatan gedung kantor | 12 bulan | 56,773,200 | 65,289,180 |
| 4 2 1 2.03 35 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Tersedianya Mebeleur Kantor | 12 bulan | 12,196,800 | 14,026,320 |
| 4 2 1 2.04 | Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | | | | 700,000,000 | 805,000,000 |
| 4 2 1 2.04 2 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah pakaian dinas yang disediakan | 12 bulan | 120,000,000 | 138,000,000 |
| 4 2 1 2.04 5 | Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah pakaian khusus yang disediakan | 12 bulan | 30,000,000 | 34,500,000 |
| 4 2 1 2.04 9 | Pendidikan dan Pelatihan Formal | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah aparatur yang mengikuti diklat | 12 Bulan | 550,000,000 | 632,500,000 |
| | | | Jumlah study banding yang dilaksanakan | 6 Bulan | | |
| 4 2 2 | PROGRAM LAYANAN DAN ADMINISTRASI KEUANGAN | | | | 593,207,000 | 682,188,050 |
| 4 2 2 2.01 | Layanan Administrasi DPRD | | | | 593,207,000 | 682,188,050 |
| 4 2 2 2.01 1 | Penyelenggaraan Administrasi, Ketatausahaan Dan Kepegawaian DPRD | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Ketersediaan jaminan kesehatan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD | 20 bulan | 41,382,000 | 47,589,300 |
| 4 2 2 2.01 3 | Penyediaan Fasilitas Fraksi DPRD | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Tersedianya Cenderamata | 120 paket | 263,825,000 | 303,398,750 |
| | | | Tersedianya Pelantikan Antar Waktu Anggota DPRD | 3 kali | | |
| 4 2 2 2.01 4 | Pengadaan dan Pemeliharaan Kebutuhan Rumah Tangga Pimpinan DPRD | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Tersedianya biaya rumah tangga | 12 bulan | 288,000,000 | 331,200,000 |
| 4 2 3 | PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD | | | | 11,208,461,400 | 12,889,730,610 |
| 4 2 3 2.01 | Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD | | | | 414,760,000 | 476,974,000 |



| Kode | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan | Lokasi | Indikator | Target | Pagu Indikatif (Rp.) | Prakiraan Maju (Rp.) |
|-------------------|---|---|--|----------|----------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 4 2 3 2.01 1 | Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah Ranperda Inisiatif DPRD | 2 buah | 100,000,000 | 115,000,000 |
| 4 2 3 2.01 2 | Pembahasan Rancangan Perda | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah Perda yang dibahas dan tersedianya kebutuhan rapat pembahasan | 13 buah | 147,160,000 | 169,234,000 |
| 4 2 3 2.01 4 | Fasilitasi penyusunan Naskah Akademik | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah rapat-rapat yang dilaksanakan | 150 kali | 167,600,000 | 192,740,000 |
| 4 2 3 2.02 | Pembahasan Kebijakan Anggaran | | | | 2,412,685,400 | 2,774,588,210 |
| 4 2 3 2.02 3 | Pembahasan APBD | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah dokumen yang dibahas | 5 buah | 2,007,424,000 | 2,308,537,600 |
| 4 2 3 2.02 6 | Pembahasan Pertanggungjawaban APBD | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah kegiatan yang dibahas | 1 tahun | 405,261,400 | 466,050,610 |
| 4 2 3 2.04 | Peningkatan Kapasitas DPRD | | | | 2,437,542,000 | 2,803,173,300 |
| 4 2 3 2.04 2 | Bimbingan Teknis DPRD | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Meningkatnya SDM pimpinan dan Anggota DPRD | 6 kali | 1,400,000,000 | 1,610,000,000 |
| 4 2 3 2.04 3 | Publikasi dan Dokumentasi Dewan | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah dokumentasi Anggota DPRD yang dihimpun/paket pembelian buku | 20 kali | 66,000,000 | 75,900,000 |
| 4 2 3 2.04 6 | Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah dialog yang dilaksanakan | 5 kali | 958,042,000 | 1,101,748,300 |
| 4 2 3 2.04 7 | Penyusunan Program Kerja DPRD | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Terhimpunnya agenda kegiatan DPRD | 12 bulan | 13,500,000 | 15,525,000 |
| 4 2 3 2.05 | Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat | | | | 5,943,474,000 | 6,834,995,100 |
| 4 2 3 2.05 1 | Kunjungan Kerja dalam Daerah | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah kunjungan kerja dan konsultasi Pimpinan/Anggota DPRD | 150 kali | 5,700,000,000 | 6,555,000,000 |



| Kode | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan | Lokasi | Indikator | Target | Pagu Indikatif (Rp.) | Prakiraan Maju (Rp.) |
|--------------|--|---|---|---------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 4 2 3 2.05 3 | Pelaksanaan Reses | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Terlaksananya Reses DPRD ke daerah Pemilihan/Anggota DPRD | 3 kali | 243,474,000 | 279,995,100 |
| TOTAL | | | | | 17,963,444,600 | 20,657,961,290 |



OPD: BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan | Lokasi | Indikator | Target | Pagu Indikatif (Rp.) | Prakiraan Maju (Rp.) |
|-------------------|--|---|---|----------|----------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 5 | UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN | | | | | |
| 5 1 | PERENCANAAN | | | | 4,389,950,038 | 5,048,442,543 |
| 5 1 1 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | | | | 2,079,100,038 | 2,390,965,043 |
| 5 1 1 2.02 | Administrasi Keuangan | | | | 222,625,000 | 256,018,750 |
| 5 1 1 2.02 1 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Kota Sawahlunto, Barangin, Lubang Panjang | Jumlah tenaga PNS yang difasilitasi | 6 orang | 222,625,000 | 256,018,750 |
| 5 1 1 2.03 | Administrasi Umum | | | | 1,706,475,038 | 1,962,446,293 |
| 5 1 1 2.03 1 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Kota Sawahlunto, Barangin, Lubang Panjang | Jasa surat menyurat yang disediakan | 12 bulan | 9,735,000 | 11,195,250 |
| 5 1 1 2.03 2 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Kota Sawahlunto, Barangin, Lubang Panjang | Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan | 12 bulan | 40,920,000 | 47,058,000 |
| 5 1 1 2.03 7 | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | Kota Sawahlunto, Barangin, Lubang Panjang | Penatausahaan keuangan dan barang yang dilaksanakan | 12 bulan | 110,600,000 | 127,190,000 |
| 5 1 1 2.03 8 | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | Kota Sawahlunto, Barangin, Lubang Panjang | Jasa kebersihan kantor yang disediakan | 12 bulan | 11,713,275 | 13,470,266 |
| 5 1 1 2.03 10 | Penyediaan Alat Tulis Kantor | Kota Sawahlunto, Barangin, Lubang Panjang | Alat tulis kantor yang disediakan | 12 bulan | 30,562,388 | 35,146,746 |
| 5 1 1 2.03 11 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Kota Sawahlunto, Barangin, Lubang Panjang | Barang cetak dan penggandaan yang disediakan | 12 bulan | 47,343,875 | 54,445,456 |
| 5 1 1 2.03 12 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Kota Sawahlunto, Barangin, Lubang Panjang | Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan | 12 bulan | 2,035,000 | 2,340,250 |
| 5 1 1 2.03 17 | Penyediaan Makanan dan Minuman | Kota Sawahlunto, Barangin, Lubang Panjang | Makanan dan minuman yang disediakan | 12 bulan | 31,065,500 | 35,725,325 |
| 5 1 1 2.03 18 | Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah | Kota Sawahlunto, Barangin, Lubang Panjang | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah yang difasilitasi | 12 bulan | 807,500,000 | 928,625,000 |



| Kode | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan | Lokasi | Indikator | Target | Pagu Indikatif (Rp.) | Prakiraan Maju (Rp.) |
|-------------------|---|---|--|-----------|----------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 5 1 1 2.03 20 | Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah kendaraan dinas/operasional roda empat dan roda dua yang diadakan | 6 Unit | 350,000,000 | 402,500,000 |
| 5 1 1 2.03 24 | Pengadaan Peralatan Gedung Kantor | Kota Sawahlunto, Barangin, Lubang Panjang | Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan | 1 unit | 60,000,000 | 69,000,000 |
| 5 1 1 2.03 28 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | Kota Sawahlunto, Barangin, Lubang Panjang | Gedung kantor yang dipelihara | 12 bulan | 30,000,000 | 34,500,000 |
| 5 1 1 2.03 30 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | Kota Sawahlunto, Barangin, Lubang Panjang | Jumlah kendaraan roda empat dan roda dua yang dipelihara | 16 unit | 120,000,000 | 138,000,000 |
| 5 1 1 2.03 34 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor | Kota Sawahlunto, Barangin, Lubang Panjang | Peralatan gedung kantor yang dipelihara | 12 bulan | 55,000,000 | 63,250,000 |
| 5 1 1 2.04 | Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | | | | 150,000,000 | 172,500,000 |
| 5 1 1 2.04 9 | Pendidikan dan Pelatihan Formal | Kota Sawahlunto, Barangin, Lubang Panjang | Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal | 15 orang | 150,000,000 | 172,500,000 |
| | | | Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal bagi fungsional tertentu | 15 orang | | |
| 5 1 2 | PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH | | | | 1,155,000,000 | 1,328,250,000 |
| 5 1 2 2.01 | Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah | | | | 1,025,000,000 | 1,178,750,000 |
| 5 1 2 2.01 1 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Kabupaten/Kota | Kota Sawahlunto, Barangin, Lubang Panjang | Jumlah Aplikasi yang dikelola | 1 Dokumen | 705,000,000 | 810,750,000 |
| | | | Jumlah Berita Acara Forum Konsultasi Publik | 1 Dokumen | | |
| | | | Jumlah Dokumen Revisi RPJMD Sawahlunto yang disusun | 1 Dokumen | | |
| | | | Jumlah Dokumen RKPD Perubahhan yang disusun | 1 Dokumen | | |
| | | | Jumlah dokumen RKPD yang disusun | 1 Dokumen | | |



| Kode | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan | Lokasi | Indikator | Target | Pagu Indikatif (Rp.) | Prakiraan Maju (Rp.) |
|-------------------|--|--|---|-----------------|----------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 5 1 2 2.01 3 | Koordinasi Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota | Kota Sawahlunto, Barangin, Lubang Panjang | Jumlah Berita Acara Pembahasan Musrenbang RKPD (Laporan) | 1 Laporan | 60,000,000 | 69,000,000 |
| 5 1 2 2.01 5 | Pengintegrasian Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Rencana Perangkat Daerah dan Rencana Pembangunan Lainnya | Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah Berita Acara Pembahasan Renja | 26 Berita Acara | 100,000,000 | 115,000,000 |
| | | | Jumlah Koordinasi yang dilaksanakan | 12 Bulan | | |
| 5 1 2 2.01 6 | Identifikasi Permasalahan Pembangunan Daerah | Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Tenaga Ahli | 1 Laporan | 75,000,000 | 86,250,000 |
| 5 1 2 2.01 7 | Pengelolaan Data dan Informasi Pembangunan Daerah | Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah Data Perencanaan Yang Tersedia | 4275 Data | 85,000,000 | 97,750,000 |
| 5 1 2 2.03 | Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Daerah | | | | 130,000,000 | 149,500,000 |
| 5 1 2 2.03 1 | Monitoring Program dan Kegiatan Perangkat Daerah | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah Laporan Monitoring yang dilaksanakan | 4 Laporan | 80,000,000 | 92,000,000 |
| 5 1 2 2.03 3 | Evaluasi Capaian Program/Kegiatan Perangkat Daerah | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah Laporan Evaluasi yang dilaksanakan | 1 Laporan | 25,000,000 | 28,750,000 |
| 5 1 2 2.03 4 | Penyusunan Pelaporan Capaian Pembangunan Daerah | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah laporan pencapaian SDG"s | 1 Laporan | 25,000,000 | 28,750,000 |
| 5 1 3 | PROGRAM PERENCANAAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA | | | | 328,850,000 | 378,177,500 |
| 5 1 3 2.01 | Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Pemerintahan | | | | 80,000,000 | 92,000,000 |
| 5 1 3 2.01 1 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Pemerintahan | Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah Laporan Koordinasi Perencanaan Pemerintahan | 4 Laporan | 25,000,000 | 28,750,000 |
| 5 1 3 2.01 2 | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Pemerintahan | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah Laporan Asistensi Perencanaan Pembangunan Pemerintahan (Laporan) | 1 laporan | 20,000,000 | 23,000,000 |



| Kode | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan | Lokasi | Indikator | Target | Pagu Indikatif (Rp.) | Prakiraan Maju (Rp.) |
|-------------------|--|---|---|-----------|----------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 5 1 3 2.01 3 | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Pemerintahan | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah Laporan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Pemerintahan (Laporan) | 4 laporan | 35,000,000 | 40,250,000 |
| 5 1 3 2.02 | Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Pembangunan Manusia | | | | 80,000,000 | 92,000,000 |
| 5 1 3 2.02 1 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Pembangunan Manusia | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah Laporan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Manusia (Laporan) | 4 Laporan | 25,000,000 | 28,750,000 |
| 5 1 3 2.02 2 | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Pembangunan Manusia | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah Laporan Asistensi Perencanaan Pembangunan Manusia (Laporan) | 1 Laporan | 20,000,000 | 23,000,000 |
| 5 1 3 2.02 3 | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Pembangunan Manusia | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah Laporan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Manusia (Laporan) | 4 laporan | 35,000,000 | 40,250,000 |
| 5 1 3 2.03 | Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Kesejahteraan Masyarakat | | | | 168,850,000 | 194,177,500 |
| 5 1 3 2.03 1 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Kesejahteraan Masyarakat | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah Laporan Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah/Kesejahteraan Masyarakat (Laporan) | 4 laporan | 58,850,000 | 67,677,500 |
| | | | Jumlah Laporan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Kesejahteraan Masyarakat (Laporan) | 4 laporan | | |
| 5 1 3 2.03 2 | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Kesejahteraan Masyarakat | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah Laporan Asistensi Penanggulangan Kemiskinan Daerah/Kesejahteraan Masyarakat (Laporan) | 1 laporan | 45,000,000 | 51,750,000 |



| Kode | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan | Lokasi | Indikator | Target | Pagu Indikatif (Rp.) | Prakiraan Maju (Rp.) |
|-------------------|---|---|---|-----------|----------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | Jumlah Laporan Asistensi Perencanaan Pembangunan Kesejahteraan Masyarakat (Laporan) | 1 Laporan | | |
| 5 1 3 2.03 3 | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPd) Bidang Kesejahteraan Masyarakat | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah Laporan Pelaksanaan Monev Penanggulangan Kemiskinan Daerah/ Kesejahteraan Masyarakat (Laporan) | 4 laporan | 65,000,000 | 74,750,000 |
| | | | Jumlah Laporan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Kesejahteraan Masyarakat (Laporan) | 4 laporan | | |
| 5 1 4 | PROGRAM PERENCANAAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM | | | | 322,000,000 | 370,300,000 |
| 5 1 4 2.01 | Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Perekonomian | | | | 162,000,000 | 186,300,000 |
| 5 1 4 2.01 1 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPd) Bidang Perekonomian | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah Laporan Koordinasi Forum Pengembangan Ekonomi Daerah (Laporan) | 4 laporan | 57,000,000 | 65,550,000 |
| | | | Jumlah Laporan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Ekonomi (Laporan) | 4 laporan | | |
| 5 1 4 2.01 2 | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPd) Bidang Perekonomian | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah Laporan Asistensi Forum Pengembangan Ekonomi Daerah (Laporan) | 1 laporan | 70,000,000 | 80,500,000 |
| | | | Jumlah Laporan Asistensi Perencanaan Pembangunan Ekonomi (Laporan) | 1 laporan | | |
| 5 1 4 2.01 3 | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPd) Bidang Perekonomian | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah Laporan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Ekonomi | 4 laporan | 35,000,000 | 40,250,000 |



| Kode | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan | Lokasi | Indikator | Target | Pagu Indikatif (Rp.) | Prakiraan Maju (Rp.) |
|-------------------|---|--|---|-----------|----------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 5 1 4 2.02 | Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Ekonomi Kreatif | | | | 80,000,000 | 92,000,000 |
| 5 1 4 2.02 1 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Ekonomi Kreatif | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah Laporan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Ekonomi Kreatif | 4 laporan | 25,000,000 | 28,750,000 |
| 5 1 4 2.02 2 | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Ekonomi Kreatif | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah Laporan Asistensi Perencanaan Pembangunan Ekonomi Kreatif | 1 Laporan | 20,000,000 | 23,000,000 |
| 5 1 4 2.02 3 | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Ekonomi Kreatif | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah Laporan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Ekonomi Kreatif | 4 laporan | 35,000,000 | 40,250,000 |
| 5 1 4 2.03 | Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Sumber Daya Alam | | | | 80,000,000 | 92,000,000 |
| 5 1 4 2.03 1 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Sumber Daya Alam | Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah Laporan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Sumber Daya Alam | 4 laporan | 25,000,000 | 28,750,000 |
| 5 1 4 2.03 2 | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Sumber Daya Alam | Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah Laporan Asistensi Perencanaan Pembangunan Sumber Daya Alam | 1 laporan | 20,000,000 | 23,000,000 |
| 5 1 4 2.03 3 | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Sumber Daya Alam | Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah Laporan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Sumber Daya Alam | 4 laporan | 35,000,000 | 40,250,000 |
| 5 1 5 | PROGRAM PERENCANAAN INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN | | | | 505,000,000 | 580,750,000 |
| 5 1 5 2.01 | Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan | | | | 80,000,000 | 92,000,000 |



| Kode | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan | Lokasi | Indikator | Target | Pagu Indikatif (Rp.) | Prakiraan Maju (Rp.) |
|-------------------|---|--|---|-----------|----------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | Hidup | | | | | |
| 5 1 5 2.01 1 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup | Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah Laporan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup | 1 laporan | 25,000,000 | 28,750,000 |
| 5 1 5 2.01 2 | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup | Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah Laporan Asistensi Perencanaan Pembangunan Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup | 1 laporan | 20,000,000 | 23,000,000 |
| 5 1 5 2.01 3 | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup | Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah Laporan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup | 4 Laporan | 35,000,000 | 40,250,000 |
| 5 1 5 2.02 | Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Kebinamargaan dan Perhubungan | | | | 80,000,000 | 92,000,000 |
| 5 1 5 2.02 1 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Kebinamargaan dan Perhubungan | Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah Laporan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Kebinamargaan dan Perhubungan | 4 Laporan | 25,000,000 | 28,750,000 |
| 5 1 5 2.02 2 | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Kebinamargaan dan Perhubungan | Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah Laporan Asistensi Perencanaan Pembangunan Kebinamargaan dan Perhubungan | 1 Laporan | 20,000,000 | 23,000,000 |
| 5 1 5 2.02 3 | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Kebinamargaan dan Perhubungan | Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah Laporan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Kebinamargaan dan Perhubungan | 4 Laporan | 35,000,000 | 40,250,000 |



| Kode | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan | Lokasi | Indikator | Target | Pagu Indikatif (Rp.) | Prakiraan Maju (Rp.) |
|-------------------|---|--|---|------------|----------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 5 1 5 2.03 | Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Keciaptakaryaan dan Kewilayahan | | | | 345,000,000 | 396,750,000 |
| 5 1 5 2.03 1 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPd) Bidang Keciaptakaryaan dan Kewilayahan | Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah Laporan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Keciaptakaryaan dan Kewilayahan, Jumlah Kegiatan Nasional yang difasilitasi, Jumlah Website Geografi Informasi Spasial yang dikelola, Jumlah Perda RTRW yang ditetapkan | 10 Laporan | 290,000,000 | 333,500,000 |
| 5 1 5 2.03 2 | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPd) Bidang Keciaptakaryaan dan Kewilayahan | Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah Laporan Asistensi Perencanaan Pembangunan Keciaptakaryaan dan Kewilayahan | 1 Laporan | 20,000,000 | 23,000,000 |
| 5 1 5 2.03 3 | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPd) Keciaptakaryaan dan Kewilayahan | Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah Laporan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Keciaptakaryaan dan Kewilayahan | 4 Laporan | 35,000,000 | 40,250,000 |
| 5 5 | PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN | | | | 175,000,000 | 201,250,000 |
| 5 5 2 | PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | | | | 175,000,000 | 201,250,000 |
| 5 5 2 2.04 | Pengembangan Inovasi dan Teknologi | | | | 175,000,000 | 201,250,000 |
| 5 5 2 2.04 1 | Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah dokumen pengkajian yang disusun | 1 Dokumen | 100,000,000 | 115,000,000 |
| 5 5 2 2.04 3 | Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif | Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah Dokumen Inovasi yang disusun | 1 Dokumen | 75,000,000 | 86,250,000 |
| TOTAL | | | | | 4,564,950,038 | 5,249,692,543 |



OPD: BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan | Lokasi | Indikator | Target | Pagu Indikatif (Rp.) | Prakiraan Maju (Rp.) | |
|-------------------|--|---|---|----------|----------------------|----------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 5 | UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN | | | | | | |
| 5 2 | KEUANGAN | | | | 5,025,214,319 | 5,778,996,466 | |
| 5 2 1 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | | | | 2,504,442,949 | 2,880,109,391 | |
| 5 2 1 2.02 | Administrasi Keuangan | | | | 686,000,000 | 788,900,000 | |
| 5 2 1 2.02 1 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah tenaga pegawai Non PNS yang difasilitasi | 12 Bulan | 686,000,000 | 788,900,000 | |
| 5 2 1 2.03 | Administrasi Umum | | | | 1,668,442,949 | 1,918,709,391 | |
| 5 2 1 2.03 1 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jasa Surat menyurat yang disediakan | 12 Bulan | 3,500,000 | 4,025,000 | |
| 5 2 1 2.03 2 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan | 12 Bulan | 69,850,000 | 80,327,500 | |
| 5 2 1 2.03 7 | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Penatausahaan Keuangan dan Barang yang dilaksanakan | 12 Bulan | 255,000,000 | 293,250,000 | |
| 5 2 1 2.03 8 | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jasa Kebersihan Kantor yang disediakan | 12 Bulan | 27,236,949 | 31,322,491 | |
| 5 2 1 2.03 10 | Penyediaan Alat Tulis Kantor | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Alat Tulis Kantor yang disediakan | 12 Bulan | 45,325,000 | 52,123,750 | |
| 5 2 1 2.03 11 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan | 12 Bulan | 115,162,500 | 132,436,875 | |
| 5 2 1 2.03 12 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Komponen Instalasi listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan | 12 Bulan | 16,187,500 | 18,615,625 | |
| 5 2 1 2.03 17 | Penyediaan Makanan dan Minuman | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Makan dan Minum yang disediakan | 12 Bulan | 59,655,500 | 68,603,825 | |



| Kode | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan | Lokasi | Indikator | Target | Pagu Indikatif (Rp.) | Prakiraan Maju (Rp.) |
|-------------------|---|---|---|------------|----------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 5 2 1 2.03 18 | Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar Daerah yang difasilitasi | 12 Bulan | 400,000,000 | 460,000,000 |
| 5 2 1 2.03 20 | Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah kendaraan dinas/operasional roda empat yang diadakan | 1 Unit | 255,000,000 | 293,250,000 |
| 5 2 1 2.03 24 | Pengadaan Peralatan Gedung Kantor | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dokumentasi dan dekorasi yang disediakan | 12 bulan | 44,654,500 | 51,352,675 |
| | | | Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan | 6 Unit | | |
| 5 2 1 2.03 28 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Gedung Kantor yang dipelihara | 12 Bulan | 45,000,000 | 51,750,000 |
| 5 2 1 2.03 30 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah Kendaraan dan Roda empat dan roda Dua yang dipelihara | 12 Unit | 144,071,000 | 165,681,650 |
| 5 2 1 2.03 34 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dokumentasi dan dekorasi yang disediakan | 12 bulan | 187,800,000 | 215,970,000 |
| | | | Jumlah sistem aplikasi keuangan daerah yang dikelola | 1 aplikasi | | |
| | | | Peralatan gedung kantor yang dipelihara | 12 bulan | | |
| 5 2 1 2.04 | Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | | | | 150,000,000 | 172,500,000 |
| 5 2 1 2.04 9 | Pendidikan dan Pelatihan Formal | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal | 34 orang | 150,000,000 | 172,500,000 |
| 5 2 2 | PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH | | | | 1,679,719,500 | 1,931,677,425 |
| 5 2 2 2.01 | Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah | | | | 1,405,726,000 | 1,616,584,900 |
| 5 2 2 2.01 1 | Penyusunan KUA dan PPAS | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah dokumen KUA dan PPAS yang disusun | 2 dokumen | 300,000,000 | 345,000,000 |
| 5 2 2 2.01 2 | Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah dokumen KUA Perubahan dan PPAS Perubahan yang disusun | 2 dokumen | 300,000,000 | 345,000,000 |



| Kode | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan | Lokasi | Indikator | Target | Pagu Indikatif (Rp.) | Prakiraan Maju (Rp.) |
|-------------------|---|---|---|------------|----------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 5 2 2 2.01 3 | Penyusunan dan Review RKA SKPD/Perubahan RKA SKPD | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah SKPD yang di review | 29 SKPD | 200,000,000 | 230,000,000 |
| 5 2 2 2.01 5 | Penyusunan peraturan daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah dokumen APBD | 6 dokumen | 277,500,000 | 319,125,000 |
| | | | Jumlah Perda dan Perwako APBD | 2 dokumen | | |
| 5 2 2 2.01 6 | Penyusunan peraturan daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran Perubahan APBD | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah dokumen perubahan APBD | 6 dokumen | 279,510,000 | 321,436,500 |
| | | | Jumlah Perda dan Perwako Perubahan APBD | 2 dokumen | | |
| 5 2 2 2.01 7 | Penyusunan Peraturan Kepala Daerah tentang Teknis Penyusunan Anggaran SKPD | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jmlah Dokumen Standar Satuan Harga dan Petunjuk Teknis Penyusunan RKA | 2 dokumen | 48,716,000 | 56,023,400 |
| | | | Jumlah peserta Sosialisasi Penganggaran Daerah dan Penyerahan DPA | 700 orang | | |
| 5 2 2 2.02 | Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah | | | | 167,993,500 | 193,192,525 |
| 5 2 2 2.02 1 | Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah laporan BUD terhadap Kasda | 12 bulan | 2,300,000 | 2,645,000 |
| 5 2 2 2.02 3 | Koordinasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah laporan dana transfer | 28 laporan | 15,348,500 | 17,650,775 |
| 5 2 2 2.02 4 | Pemrosesan, Penerbitan dan Pendistribusian Lembar SP2D | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah SP2D yang diproses | 6750 buah | 22,019,000 | 25,321,850 |
| 5 2 2 2.02 5 | Koordinasi Pelaksanaan dan Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP dan SPM, Pemberian Pembebanan Rincian Penggunaan Atas Pengesahan SPJ Gaji dan Non Gaji, Serta Penerbitan SKPP | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Laporan gaji dan rekapitulasi SKPP | 12 bulan | 5,000,000 | 5,750,000 |



| Kode | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan | Lokasi | Indikator | Target | Pagu Indikatif (Rp.) | Prakiraan Maju (Rp.) |
|-------------------|--|---|---|-------------|----------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 5 2 2 2.02 6 | Koordinasi Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Laporan hasil tindak lanjut TPKD | 4 laporan | 97,076,000 | 111,637,400 |
| | | | Laporan kasda, aliran kas, PFK | 12 bulan | | |
| 5 2 2 2.02 8 | Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D Dengan Instansi Terkait | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah laporan rekon keuangan dengan OPD | 26 OPD | 5,000,000 | 5,750,000 |
| 5 2 2 2.02 9 | Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan Dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban (SPJ) | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah Dokumen Juknis Adm Keuangan yang diterbitkan | 10 dokumen | 17,250,000 | 19,837,500 |
| | | | Jumlah SPM GU OPD yang diverifikasi | 800 dokumen | | |
| 5 2 2 2.02 10 | Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah SPD yang diterbitkan | 87 berkas | 4,000,000 | 4,600,000 |
| 5 2 2 2.03 | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah | | | | 106,000,000 | 121,900,000 |
| 5 2 2 2.03 1 | Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah laporan SAKD | 3 laporan | 13,000,000 | 14,950,000 |
| 5 2 2 2.03 2 | Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah dokumen pertanggungjawaban keuangan daerah | 6 dokumen | 62,000,000 | 71,300,000 |
| 5 2 2 2.03 5 | Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan PEMDA | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah laporan hasil rekonsiliasi | 12 laporan | 20,000,000 | 23,000,000 |
| 5 2 2 2.03 12 | Pelaksanaan Pembinaan dan Sosialisasi Tentang Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Sesuai Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah peserta sosialisasi | 150 orang | 11,000,000 | 12,650,000 |



| Kode | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan | Lokasi | Indikator | Target | Pagu Indikatif (Rp.) | Prakiraan Maju (Rp.) |
|-------------------|--|--|--|---------------------|----------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 5 2 3 | PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH | | | | 476,174,870 | 547,601,100 |
| 5 2 3 2.01 | Pengelolaan Barang Milik Daerah | | | | 476,174,870 | 547,601,100 |
| 5 2 3 2.01 1 | Koordinasi dan Penyusunan Standar Harga Berdasarkan Jenis dan Tipe Barang | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah dokumen standar harga berdasarkan jenis dan tipe barang | 1 Dokumen | 5,800,000 | 6,670,000 |
| 5 2 3 2.01 3 | Koordinasi dan Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah dokumen RKBMD yang tersusun | 1 Dokumen | 4,500,000 | 5,175,000 |
| 5 2 3 2.01 4 | Koordinasi dan Penyusunan Rencana Pemeliharaan/Perawatan Barang Milik Daerah | Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah dokumen rencana pemeliharaan/perawatan BMD | 1 Dokumen | 4,500,000 | 5,175,000 |
| | | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | | | | |
| 5 2 3 2.01 5 | Penatausahaan Barang Milik Daerah | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah laporan monitoring dan evaluasi BMD | 16 Laporan | 15,608,000 | 17,949,200 |
| 5 2 3 2.01 7 | Koordinasi Pelaksanaan Pengamanan Fisik, Administrasi dan Hukum Barang Milik Daerah | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah Asset yang diregristasi | 25 Unit | 25,508,000 | 29,334,200 |
| 5 2 3 2.01 9 | Koordinasi, pengawasan dan pengendalian atas Penggunaan, Pemanfaatan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah kendaraan dinas/operasional yang direhab | 2 Unit | 420,258,870 | 483,297,700 |
| | | | Jumlah PAD dari hasil pelelangan | 50 Juta Rupiah | | |
| | | | Jumlah rumah dinas dan gedung lainnya yang direhab | 3 Unit | | |
| | | | Jumlah sewa tanah dan bangunan | 27 Objek Perjanjian | | |
| 5 2 4 | PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH | | | | 364,877,000 | 419,608,550 |
| 5 2 4 2.02 | Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah | | | | 364,877,000 | 419,608,550 |
| 5 2 4 2.02 1 | Penyusunan Kebijakan Teknis Perencanaan dan Pengembangan | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, | Jumlah dokumen data kebijakan, data objek dan | 38 dokumen | 41,705,000 | 47,960,750 |



| Kode | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan | Lokasi | Indikator | Target | Pagu Indikatif (Rp.) | Prakiraan Maju (Rp.) |
|--------------|--|---|---|-------------|----------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | Pendapatan Daerah | Semua Kelurahan | subjek PBB-P2 dan DHKP | | | |
| | | | Jumlah kebijakan | 1 dokumen | | |
| | | | Jumlah laporan potensi pajak dan retribusi | 12 laporan | | |
| 5 2 4 2.02 2 | Penyusunan Kebijakan Tentang Intensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah laporan penerimaan negara bukan pajak SDA Minerba | 4 laporan | 5,000,000 | 5,750,000 |
| 5 2 4 2.02 4 | Penyusunan dan Evaluasi Kebijakan Tentang Sistem Administrasi Pelayanan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah pelayanan | 12 Bulan | 10,000,000 | 11,500,000 |
| 5 2 4 2.02 5 | Perumusan Kebijakan Strategi Penyuluhan dan Penyebarluasan Informasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Masyarakat | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah dokumen data kebijakan, data objek dan subjek PBB-P2 dan DHKP | 38 dokumen | 40,500,000 | 46,575,000 |
| | | | Jumlah media penyebarluasan informasi | 4 media | | |
| 5 2 4 2.02 6 | Perumusan Kebijakan Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Yang Berbasis Teknologi Informasi | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah kebijakan pelayanan pajak dan retribusi yang disusun | 2 dokumen | 7,300,000 | 8,395,000 |
| 5 2 4 2.02 7 | Konsultasi dan Pendampingan Wajib Pajak dan Retribusi | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah Penerimaan BPHTB | 250 juta | 25,000,000 | 28,750,000 |
| | | | Jumlah Penerimaan PBB | 1052 milyar | | |
| 5 2 4 2.02 8 | Penyelenggaraan Sistem Informasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah sistem aplikasi PBB Online yang dikelola | 1 aplikasi | 41,876,000 | 48,157,400 |
| | | | Jumlah sistem aplikasi pendapatan yang dikelola | 1 aplikasi | | |
| 5 2 4 2.02 9 | Pemeliharaan dan Pemutakhiran Basis Data Pajak Daerah dan Retribusi Daerah | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah data objek pajak dan subjek PBB-P2 dan BPHTB yang dipelihara dan dimutakhirkan | 27200 op | 103,714,000 | 119,271,100 |



| Kode | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan | Lokasi | Indikator | Target | Pagu Indikatif (Rp.) | Prakiraan Maju (Rp.) |
|---------------|--|---|--|-----------|----------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | Jumlah dokumen database wajib pajak dan retribusi daerah | 1 dokumen | | |
| 5 2 4 2.02 10 | Pemeriksaan Pajak Daerah | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah data objek pajak dan subjek PBB-P2 dan BPHTB yang diperiksa Objek pajak | 27200 op | 13,076,000 | 15,037,400 |
| 5 2 4 2.02 11 | Monitoring dan Evaluasi Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah monev yang dilaksanakan | 72 kali | 76,706,000 | 88,211,900 |
| | | | Jumlah penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah | 57 milyar | | |
| TOTAL | | | | | 5,025,214,319 | 5,778,996,466 |



OPD: BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan | Lokasi | Indikator | Target | Pagu Indikatif (Rp.) | Prakiraan Maju (Rp.) | |
|-------------------|---|--|--|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 5 | UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN | | | | | | |
| 5 3 | KEPEGAWAIAN | | | | | 4,390,547,000 | 5,049,129,050 |
| 5 3 1 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | | | | | 2,934,900,000 | 3,375,135,000 |
| 5 3 1 2.02 | Administrasi Keuangan | | | | | 1,886,900,000 | 2,169,935,000 |
| 5 3 1 2.02 1 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah pegawai non PNS yang dibayarkan | 14 bulan | 1,744,700,000 | 2,006,405,000 | |
| 5 3 1 2.02 7 | Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran | Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | jumlah pegawai yang dibayarkan jasanya | 12 bulan | 142,200,000 | 163,530,000 | |
| 5 3 1 2.03 | Administrasi Umum | | | | | 1,048,000,000 | 1,205,200,000 |
| 5 3 1 2.03 1 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Tersedianya meterai (lembar), pengiriman yang terfasilitasi | 1440 Lembar | 6,027,000 | 6,931,050 | |
| 5 3 1 2.03 2 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Terlaksananya pembayaran jasa komunikasi sumber daya air dan listrik | 12 Bulan | 30,650,000 | 35,247,500 | |
| 5 3 1 2.03 8 | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Tersedianya alat kebersihan kantor (bulan) dan iuran restribusi kebersihan/sedot WC (triwulan) | 12 bulan, triwulan | 21,000,000 | 24,150,000 | |
| 5 3 1 2.03 10 | Penyediaan Alat Tulis Kantor | Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Tersedianya ATK | 12 bulan | 48,980,000 | 56,327,000 | |
| 5 3 1 2.03 11 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Tersedianya biaya fotocopy, barang cetakan dan penjilidan | 12 bulan | 68,750,000 | 79,062,500 | |



| Kode | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan | Lokasi | Indikator | Target | Pagu Indikatif (Rp.) | Prakiraan Maju (Rp.) |
|-------------------|--|--|--|----------|----------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 5 3 1 2.03 12 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Tersedianya komponen kelistrikan | 12 bulan | 8,400,000 | 9,660,000 |
| 5 3 1 2.03 16 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah dekorasi dan Spanduk | 12 Bulan | 8,000,000 | 9,200,000 |
| 5 3 1 2.03 17 | Penyediaan Makanan dan Minuman | Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Ketersediaan makanan dan minuman rapat/pertemuan | 12 Bulan | 34,440,000 | 39,606,000 |
| 5 3 1 2.03 18 | Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah | Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Tersedianya biaya perjalanan dinas luar kota dan luar propinsi | 12 bulan | 315,000,000 | 362,250,000 |
| 5 3 1 2.03 20 | Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional | Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah Kendaraan Dinas | 1 Unit | 350,000,000 | 402,500,000 |
| 5 3 1 2.03 24 | Pengadaan Peralatan Gedung Kantor | Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah barang yang diadakan | 1 Paket | 33,173,000 | 38,148,950 |
| 5 3 1 2.03 28 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Terpeliharanya gedung kantor | 12 Paket | 15,000,000 | 17,250,000 |
| 5 3 1 2.03 30 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Terpeliharanya kendaraan dinas roda dua | 6 Unit | 90,930,000 | 104,569,500 |
| | | | Terpeliharanya kendaraan dinas roda empat | 4 Unit | | |
| 5 3 1 2.03 34 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor | Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Terpeliharanya peralatan kantor | 12 Bulan | 17,650,000 | 20,297,500 |
| 5 3 2 | PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH | | | | 1,455,647,000 | 1,673,994,050 |
| 5 3 2 2.01 | Pengelolaan Data dan Informasi ASN | | | | 48,254,000 | 55,492,100 |



| Kode | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan | Lokasi | Indikator | Target | Pagu Indikatif (Rp.) | Prakiraan Maju (Rp.) |
|-------------------|---|--|---|-----------|----------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 5 3 2 2.01 3 | Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian | Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah Data ASN yang diperbaharui dan diverifikasi | 12 bulan | 48,254,000 | 55,492,100 |
| 5 3 2 2.02 | Administrasi Kepegawaian | | | | 394,230,000 | 453,364,500 |
| 5 3 2 2.02 1 | Penyusunan Analisis Kebutuhan, Formasi, dan Pelaksanaan Pengadaan ASN | Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah formasi pegawai yang dibutuhkan | 130 Orang | 196,230,000 | 225,664,500 |
| 5 3 2 2.02 3 | Penyelesaian Penempatan, Pengangkatan, Mutasi, dan Kepangkatan | Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah Pejabat ASN yang mutasi, promosi, rotasi dan pensiun, kenaikan pangkat serta diberhentikan | 400 Orang | 188,000,000 | 216,200,000 |
| 5 3 2 2.02 4 | Penyelesaian Pemberhentian dan Pemberian Pensiun | Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah Pejabat ASN yang mutasi, promosi, rotasi dan pensiun, kenaikan pangkat serta diberhentikan | 60 Orang | 10,000,000 | 11,500,000 |
| 5 3 2 2.03 | Peningkatan Kapasitas ASN | | | | 716,958,000 | 824,501,700 |
| 5 3 2 2.03 1 | Peningkatan Kapasitas ASN | Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah aparatur yang akan mengikuti pendidikan dan pelatihan formal | 38 Orang | 191,037,000 | 219,692,550 |
| | | | Jumlah ASN yang meningkat pengetahuan | 135 Orang | | |
| 5 3 2 2.03 2 | Pengembangan Penilaian Kinerja ASN | Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah CASN yang ikut diklat prajabatan | 30 Orang | 338,880,000 | 389,712,000 |
| | | | Jumlah OPD yang Dinilai | 26 OPD | | |
| 5 3 2 2.03 4 | Fasilitasi Kelembagaan Profesi ASN (KORPRI dan lembaga profesi ASN lainnya) | Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah Aparatur yang diberikan bantuan tugas belajar dan izin belajar | 1 Orang | 40,000,000 | 46,000,000 |
| 5 3 2 2.03 7 | Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN | Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah ASN yang mengikuti Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Ijazah yang lulus | 40 Orang | 10,000,000 | 11,500,000 |
| 5 3 2 2.03 9 | Pengelolaan Karir dalam Jabatan Fungsional | Semua Kabupaten/Kota, | Jumlah jabatan fungsional yang dikelola | 10 Orang | 137,041,000 | 157,597,150 |



| Kode | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan | Lokasi | Indikator | Target | Pagu Indikatif (Rp.) | Prakiraan Maju (Rp.) |
|-------------------|---|--|---|-----------|----------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah Pejabat Struktural yang di kirim mengikuti diklat pim II dan III | 3 Orang | | |
| 5 3 2 2.04 | Pengembangan Karir ASN | | | | 22,205,000 | 25,535,750 |
| 5 3 2 2.04 1 | Pengembangan Karir dan Promosi ASN | Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah ASN Dalam rangka meningkatkan kreatifif dan silaturahmi | 1 Kali | 22,205,000 | 25,535,750 |
| | | | Jumlah ASN yang mengikuti Penyegaran dan siraman rohani | 8 Kali | | |
| | | | Jumlah CASN yang diangkat menjadi PNS dan disumpah | 115 Orang | | |
| 5 3 2 2.05 | Pembinaan ASN | | | | 274,000,000 | 315,100,000 |
| 5 3 2 2.05 1 | Pembinaan Disiplin ASN | Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah OPD yang diberi lembur | 25 OPD | 250,000,000 | 287,500,000 |
| 5 3 2 2.05 2 | Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN | Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Lembaga Bantuan Hukum Untuk ASN (Dokumen) | 12 Bulan | 24,000,000 | 27,600,000 |
| TOTAL | | | | | 4,390,547,000 | 5,049,129,050 |



OPD: INSPEKTORAT

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan | Lokasi | Indikator | Target | Pagu Indikatif (Rp.) | Prakiraan Maju (Rp.) | |
|-------------------|--|---|---|----------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 6 | UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN | | | | | | |
| 6 1 | INSPEKTORAT DAERAH | | | | | 2,345,484,382 | 2,697,307,039 |
| 6 1 1 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | | | | | 1,390,084,492 | 1,598,597,166 |
| 6 1 1 2.02 | Administrasi Keuangan | | | | | 141,375,000 | 162,581,250 |
| 6 1 1 2.02 1 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah tenaga pegawai Non PNS yang di fasilitasi | 9 Orang | 141,375,000 | 162,581,250 | |
| 6 1 1 2.03 | Administrasi Umum | | | | | 715,509,492 | 822,835,916 |
| 6 1 1 2.03 1 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jasa surat menyurat yang disediakan | 12 Bulan | 4,950,000 | 5,692,500 | |
| 6 1 1 2.03 2 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jasa komunikasi, SDA dan Listrik yang disediakan | 12 Bulan | 33,199,992 | 38,179,991 | |
| 6 1 1 2.03 7 | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Penatausahaan Keuangan dan Barang yang dilaksanakan | 12 Bulan | 94,200,000 | 108,330,000 | |
| 6 1 1 2.03 8 | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jasa Kebersihan Kantor yang disediakan | 12 Bulan | 3,052,500 | 3,510,375 | |
| 6 1 1 2.03 10 | Penyediaan Alat Tulis Kantor | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Alat Tulis Kantor yang disediakan | 12 Bulan | 27,000,000 | 31,050,000 | |
| 6 1 1 2.03 11 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan | 12 Bulan | 24,000,000 | 27,600,000 | |
| 6 1 1 2.03 12 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan | 12 Bulan | 3,052,500 | 3,510,375 | |
| 6 1 1 2.03 15 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Bahan bacaan dan Perundang-undangan yang disediakan | 12 Bulan | 3,500,000 | 4,025,000 | |



| Kode | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan | Lokasi | Indikator | Target | Pagu Indikatif (Rp.) | Prakiraan Maju (Rp.) |
|---|---|---|---|------------|----------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 6 1 1 2.03 16 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dokumentasi dan dekorasi yang disediakan | 12 Bulan | 16,500,000 | 18,975,000 |
| 6 1 1 2.03 17 | Penyediaan Makanan dan Minuman | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Makan dan Minum yang disediakan | 12 Bulan | 13,000,000 | 14,950,000 |
| 6 1 1 2.03 18 | Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Rapat -rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang difasilitasi | 12 Bulan | 142,500,000 | 163,875,000 |
| 6 1 1 2.03 24 | Pengadaan Peralatan Gedung Kantor | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Peralatan gedung kantor yang diadakan | 6 Unit | 155,000,000 | 178,250,000 |
| 6 1 1 2.03 28 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Gedung Kantor yang di pelihara | 12 Bulan | 16,500,000 | 18,975,000 |
| 6 1 1 2.03 30 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Kendaraan dinas roda 4 dan 2 yang dipelihara | 12 Bulan | 162,554,500 | 186,937,675 |
| 6 1 1 2.03 34 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Peralatan gedung kantor yang dipelihara | 12 Bulan | 16,500,000 | 18,975,000 |
| 6 1 1 2.04 | Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | | | | 533,200,000 | 613,180,000 |
| 6 1 1 2.04 9 | Pendidikan dan Pelatihan Formal | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah aparatur fungsional yang mempunyai sertifikat | 18 Dokumen | 533,200,000 | 613,180,000 |
| Jumlah aparatur yang meningkat kompetensi | | | 17 Orang | | | |
| Jumlah PAK JFA yang ditetapkan | | | 22 Dokumen | | | |
| Jumlah PAK P2UPD yang ditetapkan | | | 14 Dokumen | | | |
| 6 1 2 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN | | | | 854,938,000 | 983,178,700 |
| 6 1 2 2.01 | Penyelenggaraan Pengawasan Internal | | | | 854,938,000 | 983,178,700 |
| 6 1 2 2.01 1 | Audit Kinerja dan Keuangan | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah objek/laporan pemeriksaan | 156 OK | 500,000,000 | 575,000,000 |
| 6 1 2 2.01 2 | Review Kinerja dan Keuangan | Kota Sawahlunto, | Jumlah LHKPN | 1 Laporan | 48,438,000 | 55,703,700 |



| Kode | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan | Lokasi | Indikator | Target | Pagu Indikatif (Rp.) | Prakiraan Maju (Rp.) |
|-------------------|--|---|---|-----------|----------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah Pemeriksaan kasus | 4 Objek | | |
| | | | Jumlah Pemeriksaan Khusus | 20 Objek | | |
| 6 1 2 2.01 3 | Pemantauan Kinerja dan Keuangan | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Pungutan Liar | 12 Bulan | 125,000,000 | 143,750,000 |
| 6 1 2 2.01 4 | Evaluasi Kinerja dan Keuangan | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Meningkatkan Kesadaran Risiko Korupsi dan Perbaikan Sistem Anti Korupsi | 1 Laporan | 181,500,000 | 208,725,000 |
| | | | Meningkatnya Implementasi Maturitas SPIP | 12 Bulan | | |
| 6 1 3 | PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI | | | | 100,461,890 | 115,531,173 |
| 6 1 3 2.01 | Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan Dan Fasilitasi Pengawasan | | | | 6,285,890 | 7,228,773 |
| 6 1 3 2.01 2 | Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah Rakor pengawasan yang diikuti | 4 Kali | 6,285,890 | 7,228,773 |
| 6 1 3 2.02 | Asistensi dan Pendampingan | | | | 94,176,000 | 108,302,400 |
| 6 1 3 2.02 1 | Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Meningkatnya pembinaan dan pengawasan oleh APIP | 12 Bulan | 55,176,000 | 63,452,400 |
| 6 1 3 2.02 2 | Asistensi dan Pendampingan | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Meningkatnya Kapabilitas APIP Inspektorat Kota Sawahlunto | 12 Bulan | 39,000,000 | 44,850,000 |
| TOTAL | | | | | 2,345,484,382 | 2,697,307,039 |



OPD: KECAMATAN BARANGIN

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan | Lokasi | Indikator | Target | Pagu Indikatif (Rp.) | Prakiraan Maju (Rp.) |
|-------------------|--|--|--|----------|----------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 7 | UNSUR KEWILAYAHAN | | | | | |
| 7 1 | KECAMATAN | | | | 6,083,474,569 | 6,995,995,754 |
| 7 1 1 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | | | | 659,454,569 | 758,372,754 |
| 7 1 1 2.02 | Administrasi Keuangan | | | | 263,900,000 | 303,485,000 |
| 7 1 1 2.02 1 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Kota Sawahlunto, Barangin, Semua Kelurahan | Jumlah pegawai non PNS yang difasilitasi | 13 orang | 263,900,000 | 303,485,000 |
| 7 1 1 2.03 | Administrasi Umum | | | | 359,800,000 | 413,770,000 |
| 7 1 1 2.03 1 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Kota Sawahlunto, Barangin, Semua Kelurahan | Jumlah materai yang disediakan | 12 Bulan | 3,000,000 | 3,450,000 |
| 7 1 1 2.03 2 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Kota Sawahlunto, Barangin, Semua Kelurahan | Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik yang dibayarkan | 12 Bulan | 39,000,000 | 44,850,000 |
| 7 1 1 2.03 7 | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | Kota Sawahlunto, Barangin, Semua Kelurahan | Jasa administrasi keuangan yang dibayarkan | 12 Bulan | 103,000,000 | 118,450,000 |
| 7 1 1 2.03 8 | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | Kota Sawahlunto, Barangin, Semua Kelurahan | Jumlah alat kebersihan kantor yang disediakan | 12 Bulan | 9,000,000 | 10,350,000 |
| 7 1 1 2.03 10 | Penyediaan Alat Tulis Kantor | Kota Sawahlunto, Barangin, Semua Kelurahan | Jumlah alat tulis kantor yang disediakan | 12 Bulan | 18,000,000 | 20,700,000 |
| 7 1 1 2.03 11 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Kota Sawahlunto, Barangin, Semua Kelurahan | Jumlah barang cetak dan penggandaan yang disediakan | 12 Bulan | 8,000,000 | 9,200,000 |
| 7 1 1 2.03 12 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Kota Sawahlunto, Barangin, Semua Kelurahan | Jumlah alat kebersihan kantor yang disediakan | 12 Bulan | 3,700,000 | 4,255,000 |
| 7 1 1 2.03 13 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Kota Sawahlunto, Barangin, Semua Kelurahan | Jumlah dokumentasi dan dekorasi yang disediakan | 12 Bulan | 20,000,000 | 23,000,000 |
| 7 1 1 2.03 15 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | Kota Sawahlunto, Barangin, Semua Kelurahan | Jumlah bahan bacaan dan per UU disediakan | 2 Jenis | 1,200,000 | 1,380,000 |



| Kode | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan | Lokasi | Indikator | Target | Pagu Indikatif (Rp.) | Prakiraan Maju (Rp.) |
|-------------------|--|--|---|------------|----------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 7 1 1 2.03 17 | Penyediaan Makanan dan Minuman | Kota Sawahlunto, Barangin, Semua Kelurahan | Jumlah makanan dan minuman yang disedia | 12 Bulan | 22,000,000 | 25,300,000 |
| 7 1 1 2.03 18 | Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah | Kota Sawahlunto, Barangin, Semua Kelurahan | Jumlah kunjungan studi banding, rapat dan konsultasi (sosialisasi) yang diikuti | 12 Bulan | 55,000,000 | 63,250,000 |
| 7 1 1 2.03 24 | Pengadaan Peralatan Gedung Kantor | Kota Sawahlunto, Barangin, Semua Kelurahan | Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan | 12 Unit | 15,000,000 | 17,250,000 |
| 7 1 1 2.03 28 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | Kota Sawahlunto, Barangin, Semua Kelurahan | Jumlah gedung kantor yang dipelihara | 12 Unit | 8,500,000 | 9,775,000 |
| 7 1 1 2.03 30 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | Kota Sawahlunto, Barangin, Semua Kelurahan | Jumlah kendaraan dinas roda 4 dan roda 2 yang dipelihara | 12 Bulan | 45,400,000 | 52,210,000 |
| 7 1 1 2.03 34 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor | Kota Sawahlunto, Barangin, Semua Kelurahan | Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara | 12 Bulan | 9,000,000 | 10,350,000 |
| 7 1 1 2.04 | Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | | | | 35,754,569 | 41,117,754 |
| 7 1 1 2.04 2 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya | Kota Sawahlunto, Barangin, Semua Kelurahan | Jumlah pakaian dinas yang diadakan | 1 Paket | 3,500,000 | 4,025,000 |
| 7 1 1 2.04 9 | Pendidikan dan Pelatihan Formal | Kota Sawahlunto, Barangin, Semua Kelurahan | Jumlah pendidikan dan pelatihan formal yang diikuti | 6 Kali | 32,254,569 | 37,092,754 |
| 7 1 2 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | | | | 3,794,440,000 | 4,363,606,000 |
| 7 1 2 2.01 | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | | 317,500,000 | 365,125,000 |
| 7 1 2 2.01 1 | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | Kota Sawahlunto, Barangin, Semua Kelurahan | Jumlah kegiatan Musrenbang Kec. yang dilaksanakan | 3 Kegiatan | 43,500,000 | 50,025,000 |
| | | | Jumlah rapat koordinasi yang dilaksanakan | 6 Kali | | |
| 7 1 2 2.01 2 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Kota Sawahlunto, Barangin, Semua Kelurahan | Jumlah cabang yang dilaksanakan dalam MTQ Tingkat Kecamatan | 10 Cabang | 274,000,000 | 315,100,000 |



| Kode | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan | Lokasi | Indikator | Target | Pagu Indikatif (Rp.) | Prakiraan Maju (Rp.) |
|-------------------|--|--|--|-------------|----------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | Jumlah kegiatan keagamaan yang difasilitasi di Tk. Kecamatan | 2 Kegiatan | | |
| | | | Jumlah kegiatan pondok Al-Qur'an yang diselenggarakan | 7 Kali | | |
| 7 1 2 2.04 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | | | | 3,476,940,000 | 3,998,481,000 |
| 7 1 2 2.04 1 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Pelayanan Perizinan | Kota Sawahlunto, Barangin, Semua Kelurahan | Jumlah Pelayanan perizinan yang difasilitasi | 12 Bulan | 13,500,000 | 15,525,000 |
| 7 1 2 2.04 3 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | Kota Sawahlunto, Barangin, Semua Kelurahan | Operasional penunjang kegiatan | 4 Kelurahan | 3,463,440,000 | 3,982,956,000 |
| 7 1 3 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | | | | 1,571,000,000 | 1,806,650,000 |
| 7 1 3 2.01 | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | | | | 107,000,000 | 123,050,000 |
| 7 1 3 2.01 3 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Kota Sawahlunto, Barangin, Semua Kelurahan | Jumlah Aparatur DPC LPM Kecamatan yang di fasilitasi | 1 Orang | 107,000,000 | 123,050,000 |
| | | | Jumlah Kegiatan Pembangunan Kota yang difasilitasi | 4 Kegiatan | | |
| | | | Jumlah operasional DPC LPM yang difasilitasi | 12 Bulan | | |
| | | | Jumlah Program Pokok PKK yang difasilitasi | 10 Program | | |
| 7 1 3 2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | | | | 1,464,000,000 | 1,683,600,000 |
| 7 1 3 2.02 2 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | Kota Sawahlunto, Barangin, Semua Kelurahan | Pembangunan dan Peningkatan infrastruktur yang dilaksanakan | 4 Kelurahan | 1,464,000,000 | 1,683,600,000 |
| 7 1 4 | PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | | | | 11,000,000 | 12,650,000 |
| 7 1 4 2.01 | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | | | | 11,000,000 | 12,650,000 |



| Kode | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan | Lokasi | Indikator | Target | Pagu Indikatif (Rp.) | Prakiraan Maju (Rp.) |
|-------------------|---|--|--|------------|----------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 7 1 4 2.01 1 | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan | Kota Sawahlunto, Barangin, Semua Kelurahan | Jumlah Linmas yang dibina | 100 orang | 11,000,000 | 12,650,000 |
| 7 1 5 | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | | | | 29,080,000 | 33,442,000 |
| 7 1 5 2.01 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah | | | | 29,080,000 | 33,442,000 |
| 7 1 5 2.01 1 | Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | Kota Sawahlunto, Barangin, Semua Kelurahan | Jumlah hari-hari besar Nasional yang dilaksanakan | 1 Kegiatan | 24,200,000 | 27,830,000 |
| 7 1 5 2.01 3 | Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa | Kota Sawahlunto, Barangin, Semua Kelurahan | Jumlah cabang olah raga yang difasilitasi | 2 Cabang | 4,880,000 | 5,612,000 |
| 7 1 6 | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | | | | 18,500,000 | 21,275,000 |
| 7 1 6 2.01 | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | | | | 18,500,000 | 21,275,000 |
| 7 1 6 2.01 3 | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa | Kota Sawahlunto, Barangin, Semua Kelurahan | Jumlah desa yang dievaluasi | 6 Desa | 14,000,000 | 16,100,000 |
| 7 1 6 2.01 6 | Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa | Kota Sawahlunto, Barangin, Semua Kelurahan | Jumlah desa yang dimonitoring pelaksanaan pilkades | 2 Desa | 4,500,000 | 5,175,000 |
| TOTAL | | | | | 6,083,474,569 | 6,995,995,754 |



OPD: KECAMATAN LEMBAH SEGAR

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan | Lokasi | Indikator | Target | Pagu Indikatif (Rp.) | Prakiraan Maju (Rp.) | |
|-------------------|--|--|--|----------------|----------------------|----------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 7 | UNSUR KEWILAYAHAN | | | | | | |
| 7 1 | KECAMATAN | | | | 8,393,095,000 | 9,652,059,250 | |
| 7 1 1 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | | | | 540,055,000 | 621,063,250 | |
| 7 1 1 2.02 | Administrasi Keuangan | | | | 127,725,000 | 146,883,750 | |
| 7 1 1 2.02 1 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Semua Kelurahan | Jumlah pegawai non PNS yang difasilitasi (orang) | 14 orang/bulan | 127,725,000 | 146,883,750 | |
| 7 1 1 2.03 | Administrasi Umum | | | | 382,830,000 | 440,254,500 | |
| 7 1 1 2.03 1 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Semua Kelurahan | Jumlah materai yang disediakan (bulan) | 12 bulan | 3,000,000 | 3,450,000 | |
| 7 1 1 2.03 2 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Semua Kelurahan | Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik yang dibayarkan (bulan) | 12 bulan | 45,000,000 | 51,750,000 | |
| 7 1 1 2.03 7 | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Semua Kelurahan | Jasa administrasi keuangan yang dibayarkan (bulan) | 12 bulan | 100,800,000 | 115,920,000 | |
| 7 1 1 2.03 8 | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Semua Kelurahan | Jumlah alat kebersihan kantor yang disediakan (bulan) | 12 bulan | 11,100,000 | 12,765,000 | |
| 7 1 1 2.03 10 | Penyediaan Alat Tulis Kantor | Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Semua Kelurahan | Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (bulan) | 12 bulan | 19,750,000 | 22,712,500 | |
| 7 1 1 2.03 11 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Semua Kelurahan | Jumlah barang cetak dan penggandaan yang disediakan (bulan) | 12 bulan | 9,075,000 | 10,436,250 | |
| 7 1 1 2.03 12 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Semua Kelurahan | Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yg disediakan (bulan) | 12 bulan | 3,700,000 | 4,255,000 | |
| 7 1 1 2.03 13 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Semua Kelurahan | Jumlah dokumentasi dan dekorasi yang disediakan (bulan) | 12 bulan | 20,000,000 | 23,000,000 | |



| Kode | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan | Lokasi | Indikator | Target | Pagu Indikatif (Rp.) | Prakiraan Maju (Rp.) |
|-------------------|--|--|--|-----------|----------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 7 1 1 2.03 15 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Semua Kelurahan | Jumlah bahan bacaan dan per UU disediakan (jenis) | 3 jenis | 1,500,000 | 1,725,000 |
| 7 1 1 2.03 17 | Penyediaan Makanan dan Minuman | Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Semua Kelurahan | Jumlah makan dan minum yang disediakan (bulan) | 12 bulan | 25,000,000 | 28,750,000 |
| 7 1 1 2.03 18 | Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah | Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Semua Kelurahan | Jumlah rapat koordinasi & konsultasi yang diikuti (bulan) | 12 bulan | 60,600,000 | 69,690,000 |
| 7 1 1 2.03 28 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Semua Kelurahan | Jumlah gedung kantor yang dipelihara (unit) | 1 unit | 10,000,000 | 11,500,000 |
| 7 1 1 2.03 30 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Semua Kelurahan | Jumlah kendaraan dinas roda 4 dan roda 2 yang dipelihara (bulan)Jumlah kendaraan dinas roda 4 dan roda 2 yang dipelihara (bulan) | 12 bulan | 63,305,000 | 72,800,750 |
| 7 1 1 2.03 34 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor | Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Semua Kelurahan | Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara (bulan) | 12 bulan | 10,000,000 | 11,500,000 |
| 7 1 1 2.04 | Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | | | | 29,500,000 | 33,925,000 |
| 7 1 1 2.04 2 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya | Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Semua Kelurahan | Jumlah pakaian dinas yang diadakan (paket) | 1 paket | 3,500,000 | 4,025,000 |
| 7 1 1 2.04 9 | Pendidikan dan Pelatihan Formal | Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Semua Kelurahan | Jumlah pendidikan dan pelatihan formal yang diikuti (kali) | 10 kali | 26,000,000 | 29,900,000 |
| 7 1 2 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | | | | 5,487,330,000 | 6,310,429,500 |
| 7 1 2 2.01 | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | | 272,860,000 | 313,789,000 |
| 7 1 2 2.01 1 | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Semua Kelurahan | Jumlah kegiatan Musrenbang Kec. yang dilaksanakan (keg) | 1 keg | 45,860,000 | 52,739,000 |
| | | | Jumlah rapat koordinasi yang dilaksanakan (kali) | 4 kali | | |
| 7 1 2 2.01 2 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Semua Kelurahan | Jumlah cabang yang diikuti dalam MTQ Tingkat Kota (cabang) | 10 cabang | 227,000,000 | 261,050,000 |



| Kode | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan | Lokasi | Indikator | Target | Pagu Indikatif (Rp.) | Prakiraan Maju (Rp.) |
|-------------------|--|--|---|-------------|----------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | Jumlah kegiatan keagamaan yang difasilitasi di Tk. Kecamatan (Kegiatan) | 1 keg | | |
| | | | Jumlah kegiatan pondok Al-Qur'an yang diselenggarakan (kali) | 6 kali | | |
| 7 1 2 2.04 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | | | | 5,214,470,000 | 5,996,640,500 |
| 7 1 2 2.04 1 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Pelayanan Perizinan | Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Semua Kelurahan | Jumlah Pelayanan perizinan yang difasilitasi (bulan) | 12 bulan | 19,310,000 | 22,206,500 |
| 7 1 2 2.04 3 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Semua Kelurahan | Operasional penunjang kegiatan (kelurahan) | 12 bulan | 5,195,160,000 | 5,974,434,000 |
| 7 1 3 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | | | | 2,294,000,000 | 2,638,100,000 |
| 7 1 3 2.01 | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | | | | 98,000,000 | 112,700,000 |
| 7 1 3 2.01 3 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Semua Kelurahan | Jumlah Kegiatan Pembangunan Kota yang difasilitasi (keg) | 6 kegiatan | | |
| | | | Jumlah operasional DPC LPM yang difasilitasi (bulan) | 12 bulan | 98,000,000 | 112,700,000 |
| | | | Jumlah Program Pokok PKK yang difasilitasi (program) | 10 program | | |
| 7 1 3 2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | | | | 2,196,000,000 | 2,525,400,000 |
| 7 1 3 2.02 2 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Semua Kelurahan | Pembangunan dan Peningkatan infrastruktur yang dilaksanakan (kelurahan) | 6 kelurahan | 1,537,200,000 | 1,767,780,000 |
| 7 1 3 2.02 3 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Semua Kelurahan | Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilaksanakan (kelurahan) | 6 Kelurahan | 658,800,000 | 757,620,000 |
| 7 1 4 | PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | | | | 16,710,000 | 19,216,500 |
| 7 1 4 2.01 | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | | | | 16,710,000 | 19,216,500 |



| Kode | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan | Lokasi | Indikator | Target | Pagu Indikatif (Rp.) | Prakiraan Maju (Rp.) |
|-------------------|---|--|--|-------------------|----------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 7 1 4 2.01 1 | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan | Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Semua Kelurahan | Jumlah Linmas yang dibina (orang) | 110 orang | 16,710,000 | 19,216,500 |
| 7 1 5 | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | | | | 30,000,000 | 34,500,000 |
| 7 1 5 2.01 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah | | | | 30,000,000 | 34,500,000 |
| 7 1 5 2.01 1 | Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Semua Kelurahan | Jumlah hari-hari besar Nasional yang dilaksanakan (kegiatan) | 1 kegiatan | 20,000,000 | 23,000,000 |
| 7 1 5 2.01 3 | Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa | Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Semua Kelurahan | Jumlah cabang olah raga yang difasilitasi (Cabang) | 1 cabang | 10,000,000 | 11,500,000 |
| 7 1 6 | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | | | | 25,000,000 | 28,750,000 |
| 7 1 6 2.01 | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | | | | 25,000,000 | 28,750,000 |
| 7 1 6 2.01 2 | Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa | Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Semua Kelurahan | Jumlah desa/kelurahan yang dinilai(desa/kelurahan) | 11 desa/kelurahan | 25,000,000 | 28,750,000 |
| | | | Jumlah desa yang dievaluasi (desa) | 12 bulan | | |
| TOTAL | | | | | 8,393,095,000 | 9,652,059,250 |



OPD: KECAMATAN SILUNGKANG

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan | Lokasi | Indikator | Target | Pagu Indikatif (Rp.) | Prakiraan Maju (Rp.) | |
|-------------------|--|--|--|----------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 7 | UNSUR KEWILAYAHAN | | | | | | |
| 7 1 | KECAMATAN | | | | | 955,780,000 | 1,099,147,000 |
| 7 1 1 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | | | | | 554,750,000 | 637,962,500 |
| 7 1 1 2.02 | Administrasi Keuangan | | | | | 190,000,000 | 218,500,000 |
| 7 1 1 2.02 1 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Kota Sawahlunto, Silungkang, Semua Kelurahan | Jumlah pelayanan pegawai non PNS yang difasilitasi | 9 orang | 190,000,000 | 218,500,000 | |
| 7 1 1 2.03 | Administrasi Umum | | | | | 334,750,000 | 384,962,500 |
| 7 1 1 2.03 1 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Kota Sawahlunto, Silungkang, Semua Kelurahan | Jumlah materai yang disediakan | 12 bulan | 3,000,000 | 3,450,000 | |
| 7 1 1 2.03 2 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Kota Sawahlunto, Silungkang, Semua Kelurahan | Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan (Telepon, Air, Listrik, TV Berlangganan) | 12 bulan | 40,000,000 | 46,000,000 | |
| 7 1 1 2.03 7 | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | Kota Sawahlunto, Silungkang, Semua Kelurahan | Jumlah jasa administrasi keuangan yang disediakan | 12 bulan | 72,000,000 | 82,800,000 | |
| 7 1 1 2.03 8 | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | Kota Sawahlunto, Silungkang, Semua Kelurahan | Jumlah Alat Kebersihan Kantor yang disediakan | 12 bulan | 9,250,000 | 10,637,500 | |
| 7 1 1 2.03 10 | Penyediaan Alat Tulis Kantor | Kota Sawahlunto, Silungkang, Semua Kelurahan | Jumlah Alat tulis kantor yang disediakan | 12 bulan | 18,500,000 | 21,275,000 | |
| 7 1 1 2.03 11 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Kota Sawahlunto, Silungkang, Semua Kelurahan | Jumlah Barang cetak dan penggandaan yang disediakan | 12 bulan | 8,000,000 | 9,200,000 | |
| 7 1 1 2.03 12 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Kota Sawahlunto, Silungkang, Semua Kelurahan | Jumlah Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yg disediakan | 12 bulan | 3,000,000 | 3,450,000 | |
| 7 1 1 2.03 13 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Kota Sawahlunto, Silungkang, Semua Kelurahan | Jumlah Dokumentasi dan Dekorasi yang disediakan | 12 bulan | 18,000,000 | 20,700,000 | |



| Kode | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan | Lokasi | Indikator | Target | Pagu Indikatif (Rp.) | Prakiraan Maju (Rp.) |
|-------------------|--|--|---|------------|----------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 7 1 1 2.03 17 | Penyediaan Makanan dan Minuman | Kota Sawahlunto, Silungkang, Semua Kelurahan | Jumlah Makanan dan Minuman yang disediakan | 12 bulan | 18,000,000 | 20,700,000 |
| 7 1 1 2.03 18 | Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah | Kota Sawahlunto, Silungkang, Semua Kelurahan | Jumlah Rapat koordinasi & konsultasi keluar daerah yang diikuti | 12 bulan | 55,000,000 | 63,250,000 |
| 7 1 1 2.03 24 | Pengadaan Peralatan Gedung Kantor | Kota Sawahlunto, Silungkang, Semua Kelurahan | Jumlah Peralatan gedung kantor yg diadakan | 3 jenis | 30,000,000 | 34,500,000 |
| 7 1 1 2.03 30 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | Kota Sawahlunto, Silungkang, Semua Kelurahan | Jumlah kendaraan dinas roda 4 dan roda 2 yg dipelihara | 12 bulan | 50,000,000 | 57,500,000 |
| 7 1 1 2.03 34 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor | Kota Sawahlunto, Silungkang, Semua Kelurahan | Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang dipelihara | 12 bulan | 10,000,000 | 11,500,000 |
| 7 1 1 2.04 | Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | | | | 30,000,000 | 34,500,000 |
| 7 1 1 2.04 9 | Pendidikan dan Pelatihan Formal | Kota Sawahlunto, Silungkang, Semua Kelurahan | Jumlah pendidikan dan latihan formal yang diikuti | 9 kali | 30,000,000 | 34,500,000 |
| 7 1 2 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | | | | 224,880,000 | 258,612,000 |
| 7 1 2 2.01 | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | | 211,880,000 | 243,662,000 |
| 7 1 2 2.01 1 | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | Kota Sawahlunto, Silungkang, Semua Kelurahan | Jumlah dokumen yang disusun | 1 dokumen | 37,880,000 | 43,562,000 |
| | | | Jumlah peserta yang mengikuti Musrenbang Kecamatan | 1 keg | | |
| | | | Jumlah rapat koordinasi yang dilaksanakan | 4 kali | | |
| 7 1 2 2.01 2 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Kota Sawahlunto, Silungkang, Semua Kelurahan | Jumlah Cabang Lomba yang diadakan | 10 cabang | 174,000,000 | 200,100,000 |
| | | | Jumlah kegiatan keagamaan yang difasilitasi | 3 kegiatan | | |
| 7 1 2 2.04 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | | | | 13,000,000 | 14,950,000 |



| Kode | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan | Lokasi | Indikator | Target | Pagu Indikatif (Rp.) | Prakiraan Maju (Rp.) |
|-------------------|---|--|---|------------|----------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 7 1 2 2.04 1 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Pelayanan Perizinan | Kota Sawahlunto, Silungkang, Semua Kelurahan | Jumlah Pelayanan perizinan yang difasilitasi | 12 bulan | 13,000,000 | 14,950,000 |
| 7 1 3 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | | | | 110,150,000 | 126,672,500 |
| 7 1 3 2.01 | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | | | | 110,150,000 | 126,672,500 |
| 7 1 3 2.01 3 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Kota Sawahlunto, Silungkang, Semua Kelurahan | Jumlah kegiatan Kota di Kecamatan yang difasilitasi | 4 kegiatan | 110,150,000 | 126,672,500 |
| | | | Jumlah operasional DPC LPM yang difasilitasi | 12 bulan | | |
| | | | Jumlah Program Pokok PKK yang difasilitasi | 10 program | | |
| 7 1 4 | PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | | | | 8,500,000 | 9,775,000 |
| 7 1 4 2.01 | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | | | | 8,500,000 | 9,775,000 |
| 7 1 4 2.01 1 | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan | Kota Sawahlunto, Silungkang, Semua Kelurahan | Jumlah Linmas yang dibina | 50 orang | 8,500,000 | 9,775,000 |
| 7 1 5 | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | | | | 35,000,000 | 40,250,000 |
| 7 1 5 2.01 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah | | | | 35,000,000 | 40,250,000 |
| 7 1 5 2.01 1 | Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | Kota Sawahlunto, Silungkang, Semua Kelurahan | Jumlah Hari-Hari Besar Yang Diperingati | 1 jenis | 25,000,000 | 28,750,000 |



| Kode | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan | Lokasi | Indikator | Target | Pagu Indikatif (Rp.) | Prakiraan Maju (Rp.) |
|-------------------|--|--|---|----------|----------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 7 1 5 2.01 3 | Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa | Kota Sawahlunto, Silungkang, Semua Kelurahan | Jumlah Cabang Olah raga yang di Fasilitas | 1 cabang | 10,000,000 | 11,500,000 |
| 7 1 6 | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | | | | 22,500,000 | 25,875,000 |
| 7 1 6 2.01 | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | | | | 22,500,000 | 25,875,000 |
| 7 1 6 2.01 2 | Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa | Kota Sawahlunto, Silungkang, Semua Kelurahan | Jumlah Desa yang dinilai | 5 desa | 10,000,000 | 11,500,000 |
| 7 1 6 2.01 3 | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa | Kota Sawahlunto, Silungkang, Semua Kelurahan | Jumlah desa yang dievaluasi | 5 desa | 10,000,000 | 11,500,000 |
| 7 1 6 2.01 6 | Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa | Kota Sawahlunto, Silungkang, Semua Kelurahan | Jumlah desa yang melakukan pemilihan | 1 desa | 2,500,000 | 2,875,000 |
| TOTAL | | | | | 955,780,000 | 1,099,147,000 |



OPD: KECAMATAN TALAWI

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan | Lokasi | Indikator | Target | Pagu Indikatif (Rp.) | Prakiraan Maju (Rp.) | |
|------|---|---|------|---|---|--|--|----------|-------------------------|-------------------------|----------------------|
| 1 | | | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 7 | | | | | UNSUR KEWILAYAHAN | | | | | | |
| 7 | 1 | | | | KECAMATAN | | | | | 1,357,084,975 | 1,560,647,721 |
| 7 | 1 | 1 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | | | | | 672,425,000 | 773,288,750 |
| 7 | 1 | 1 | 2.02 | | Administrasi Keuangan | | | | | 271,425,000 | 312,138,750 |
| 7 | 1 | 1 | 2.02 | 1 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Kota Sawahlunto, Talawi, Semua Kelurahan | Jumlah tenaga pegawai non PNS yang difasilitasi | 14 orang | 271,425,000 | 312,138,750 | |
| 7 | 1 | 1 | 2.03 | | Administrasi Umum | | | | | 367,500,000 | 422,625,000 |
| 7 | 1 | 1 | 2.03 | 1 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Kota Sawahlunto, Talawi, Semua Kelurahan | Jumlah materai yang disediakan | 12 bulan | 3,000,000 | 3,450,000 | |
| 7 | 1 | 1 | 2.03 | 2 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Kota Sawahlunto, Talawi, Semua Kelurahan | Air | 12 bulan | 38,000,000 | 43,700,000 | |
| | | | | Ketersediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik | | | 12 bulan | | | | |
| | | | | Listrik | | | 12 bulan | | | | |
| | | | | Telpon | | | 12 bulan | | | | |
| 7 | 1 | 1 | 2.03 | 7 | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | Kota Sawahlunto, Talawi, Semua Kelurahan | Jumlah Jasa Administrasi keuangan yang disediakan | 12 bulan | 78,000,000 | 89,700,000 | |
| 7 | 1 | 1 | 2.03 | 8 | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | Kota Sawahlunto, Talawi, Semua Kelurahan | Jumlah alat kebersihan kantor yang disediakan | 12 bulan | 6,000,000 | 6,900,000 | |
| 7 | 1 | 1 | 2.03 | 10 | Penyediaan Alat Tulis Kantor | Kota Sawahlunto, Talawi, Semua Kelurahan | Jumlah alat kebersihan kantor yang disediakan | 12 bulan | 24,000,000 | 27,600,000 | |
| 7 | 1 | 1 | 2.03 | 11 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Kota Sawahlunto, Talawi, Semua Kelurahan | Jumlah barang cetak dan penggandaan yang disediakan | 12 bulan | 13,000,000 | 14,950,000 | |
| 7 | 1 | 1 | 2.03 | 12 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Kota Sawahlunto, Talawi, Semua Kelurahan | Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yg disediakan | 12 bulan | 2,000,000 | 2,300,000 | |



| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan | Lokasi | Indikator | Target | Pagu Indikatif (Rp.) | Prakiraan Maju (Rp.) |
|----------|----------|----------|------|----|--|--|--|----------|----------------------|----------------------|
| 1 | | | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 7 | 1 | 1 | 2.03 | 13 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Kota Sawahlunto, Talawi, Semua Kelurahan | Jumlah dokumentasi dan dekorasi yang disediakan | 12 bulan | 20,000,000 | 23,000,000 |
| 7 | 1 | 1 | 2.03 | 15 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | Kota Sawahlunto, Talawi, Semua Kelurahan | Jumlah bahan bacaan dan per UU disediakan | 3 jenis | 500 | 575 |
| 7 | 1 | 1 | 2.03 | 17 | Penyediaan Makanan dan Minuman | Kota Sawahlunto, Talawi, Semua Kelurahan | Jumlah makan dan minum yang disediakan | 12 bulan | 25,000,000 | 28,750,000 |
| 7 | 1 | 1 | 2.03 | 18 | Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah | Kota Sawahlunto, Talawi, Semua Kelurahan | Jumlah rapat koordinasi & konsultasi yang diikuti | 12 bulan | 65,000,000 | 74,750,000 |
| 7 | 1 | 1 | 2.03 | 24 | Pengadaan Peralatan Gedung Kantor | Kota Sawahlunto, Talawi, Semua Kelurahan | Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan | 4 unit | 20,000,000 | 23,000,000 |
| 7 | 1 | 1 | 2.03 | 28 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | Kota Sawahlunto, Talawi, Semua Kelurahan | Jumlah gedung yang dipelihara | 1 unit | 15,000,000 | 17,250,000 |
| 7 | 1 | 1 | 2.03 | 30 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | Kota Sawahlunto, Talawi, Semua Kelurahan | Jumlah kendaraan dinas roda 4 dan roda 2 yang dipelihara | 12 bulan | 50,000,000 | 57,500,000 |
| 7 | 1 | 1 | 2.03 | 34 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor | Kota Sawahlunto, Talawi, Semua Kelurahan | Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara | 12 bulan | 5,000,000 | 5,750,000 |
| 7 | 1 | 1 | 2.03 | 35 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur | Kota Sawahlunto, Talawi, Semua Kelurahan | Jumlah mebeleur yg dipelihara | 12 bulan | 3,000,000 | 3,450,000 |
| 7 | 1 | 1 | 2.04 | | Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | | | | 33,500,000 | 38,525,000 |
| 7 | 1 | 1 | 2.04 | 2 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya | Kota Sawahlunto, Talawi, Semua Kelurahan | Jumlah PDUB Camat yang diadakan | 1 paket | 3,500,000 | 4,025,000 |
| 7 | 1 | 1 | 2.04 | 9 | Pendidikan dan Pelatihan Formal | Kota Sawahlunto, Talawi, Semua Kelurahan | Jumlah pendidikan dan pelatihan formal yang diikuti | 10 kali | 30,000,000 | 34,500,000 |
| 7 | 1 | 2 | | | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | | | | 499,037,500 | 573,893,125 |
| 7 | 1 | 2 | 2.01 | | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | | 464,037,500 | 533,643,125 |
| 7 | 1 | 2 | 2.01 | 1 | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan | Kota Sawahlunto, Talawi, Semua | Jumlah dokumen profile kecamatan | 1 buku | 24,037,500 | 27,643,125 |



| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan | Lokasi | Indikator | Target | Pagu Indikatif (Rp.) | Prakiraan Maju (Rp.) |
|----------|----------|----------|------|---|--|--|---|-------------|----------------------|----------------------|
| 1 | | | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | Kelurahan | Jumlah kegiatan Musrenbang Kec. yang dilaksanakan | 1 keg | | |
| | | | | | | | Jumlah rapat koordinasi yang difasilitasi kecamatan | 4 kali | | |
| 7 | 1 | 2 | 2.01 | 2 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Kota Sawahlunto, Talawi, Semua Kelurahan | Jumlah cabang yang diikuti dalam MTQ Tingkat Kota | 100 cabang | 440,000,000 | 506,000,000 |
| | | | | | | | Jumlah kegiatan keagamaan yang difasilitasi di Tk. Kecamatan | 10 kegiatan | | |
| | | | | | | | Jumlah kegiatan pondok Al-Qur'an yang diselenggarakan | 3 kali | | |
| 7 | 1 | 2 | 2.03 | | Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum | | | | 20,000,000 | 23,000,000 |
| 7 | 1 | 2 | 2.03 | 2 | Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta | Kota Sawahlunto, Talawi, Semua Kelurahan | Jumlah jaringan sistem informasi publik kecamatan yang dibuat/website kecamatan | 1 buah | 20,000,000 | 23,000,000 |
| 7 | 1 | 2 | 2.04 | | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | | | | 15,000,000 | 17,250,000 |
| 7 | 1 | 2 | 2.04 | 1 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Pelayanan Perizinan | Kota Sawahlunto, Talawi, Semua Kelurahan | Jumlah Pelayanan perizinan dan Non Perizinan | 12 bulan | 15,000,000 | 17,250,000 |
| 7 | 1 | 3 | | | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | | | | 78,000,000 | 89,700,000 |
| 7 | 1 | 3 | 2.01 | | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | | | | 78,000,000 | 89,700,000 |
| 7 | 1 | 3 | 2.01 | 3 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Kota Sawahlunto, Talawi, Semua Kelurahan | Jumlah Kegiatan Pembangunan Kota yang difasilitasi | 7 keg | 78,000,000 | 89,700,000 |
| | | | | | | | Jumlah operasional DPC LPM yang difasilitasi | 12 bulan | | |
| | | | | | | | Jumlah Program Pokok PKK yang difasilitasi | 10 program | | |
| 7 | 1 | 4 | | | PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | | | | 19,498,500 | 22,423,275 |
| 7 | 1 | 4 | 2.01 | | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | | | | 19,498,500 | 22,423,275 |



| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan | Lokasi | Indikator | Target | Pagu Indikatif (Rp.) | Prakiraan Maju (Rp.) |
|--------------|----------|----------|------|---|---|--|---|------------------|----------------------|----------------------|
| 1 | | | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 7 | 1 | 4 | 2.01 | 1 | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan | Kota Sawahlunto, Talawi, Semua Kelurahan | Jumlah Linmas yang dibina | 110 orang | 19,498,500 | 22,423,275 |
| 7 | 1 | 5 | | | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | | | | 25,000,000 | 28,750,000 |
| 7 | 1 | 5 | 2.01 | | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah | | | | 25,000,000 | 28,750,000 |
| 7 | 1 | 5 | 2.01 | 1 | Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | Kota Sawahlunto, Talawi, Semua Kelurahan | Jumlah hari-hari besar Nasional yang dilaksanakan | 1 kegiatan | 20,000,000 | 23,000,000 |
| 7 | 1 | 5 | 2.01 | 3 | Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa | Kota Sawahlunto, Talawi, Semua Kelurahan | Jumlah cabang olah raga yang difasilitasi | 1 cabang | 5,000,000 | 5,750,000 |
| 7 | 1 | 6 | | | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | | | | 63,123,975 | 72,592,571 |
| 7 | 1 | 6 | 2.01 | | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | | | | 63,123,975 | 72,592,571 |
| 7 | 1 | 6 | 2.01 | 2 | Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa | Kota Sawahlunto, Talawi, Semua Kelurahan | Jumlah desa/kelurahan yang dinilai | 6 desa/kelurahan | 25,000,000 | 28,750,000 |
| 7 | 1 | 6 | 2.01 | 3 | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa | Kota Sawahlunto, Talawi, Semua Kelurahan | Jumlah Aparatur Desa yang dinilai | 6 desa | 25,000,000 | 28,750,000 |
| | | | | | | | Jumlah desa yang dievaluasi | 11 desa | | |
| 7 | 1 | 6 | 2.01 | 6 | Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa | Kota Sawahlunto, Talawi, Semua Kelurahan | Jumlah Kepala Desa yang dipilih | 5 desa | 13,123,975 | 15,092,571 |
| TOTAL | | | | | | | | | 1,357,084,975 | 1,560,647,721 |



OPD: BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan | Lokasi | Indikator | Target | Pagu Indikatif (Rp.) | Prakiraan Maju (Rp.) |
|-------------------|--|---|--|-----------|----------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | |
| 1 5 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT | | | | 4,138,535,702 | 4,759,316,057 |
| 1 5 1 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | | | | 1,795,303,500 | 2,064,599,025 |
| 1 5 1 2.01 | Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | 5,650,000 | 6,497,500 |
| 1 5 1 2.01 3 | Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah Dokumen Data (Dokumen) | 1 Dokumen | 5,650,000 | 6,497,500 |
| 1 5 1 2.02 | Administrasi Keuangan | | | | 830,738,600 | 955,349,390 |
| 1 5 1 2.02 1 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah pegawai non PNS yang difasilitasi (orang/Bulan) | 12 Bulan | 830,738,600 | 955,349,390 |
| 1 5 1 2.03 | Administrasi Umum | | | | 888,914,900 | 1,022,252,135 |
| 1 5 1 2.03 1 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah materai yang disediakan (bulan) | 12 Bulan | 19,160,000 | 22,034,000 |
| 1 5 1 2.03 2 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik yang dibayarkan (bulan) | 12 Bulan | 74,804,000 | 86,024,600 |
| 1 5 1 2.03 7 | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jasa administrasi keuangan yang dibayarkan (bulan) | 12 Bulan | 166,800,000 | 191,820,000 |
| 1 5 1 2.03 8 | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah alat kebersihan kantor yang disediakan (bulan) | 12 Bulan | 7,365,025 | 8,469,779 |
| 1 5 1 2.03 10 | Penyediaan Alat Tulis Kantor | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (bulan) | 12 Bulan | 45,787,500 | 52,655,625 |
| 1 5 1 2.03 11 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah barang cetak dan penggandaan yang disediakan (bulan) | 12 Bulan | 38,604,625 | 44,395,319 |
| 1 5 1 2.03 12 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yg disediakan (bulan) | 12 Bulan | 5,402,000 | 6,212,300 |



| Kode | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan | Lokasi | Indikator | Target | Pagu Indikatif (Rp.) | Prakiraan Maju (Rp.) |
|-------------------|---|---|--|-----------|----------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 5 1 2.03 15 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah bahan bacaan dan per UU disediakan (jenis) | 12 Bulan | 5,000,000 | 5,750,000 |
| 1 5 1 2.03 16 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Bahan logistik yang disediakan (bulan) | 12 Bulan | 2,300,000 | 2,645,000 |
| 1 5 1 2.03 17 | Penyediaan Makanan dan Minuman | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah makan dan minum yang disediakan (bulan) | 12 Bulan | 41,624,000 | 47,867,600 |
| 1 5 1 2.03 18 | Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah rapat koordinasi & konsultasi yang diikuti (bulan) | 12 Bulan | 190,000,000 | 218,500,000 |
| 1 5 1 2.03 24 | Pengadaan Peralatan Gedung Kantor | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah Peralatan Gedung Kantor dan Dokumentasi yang diadakan (jenis) | 8 Jenis | 99,550,000 | 114,482,500 |
| 1 5 1 2.03 28 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah gedung kantor yang dipelihara (unit) | 1 Unit | 18,852,750 | 21,680,662 |
| 1 5 1 2.03 30 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah kendaraan dinas roda 4 dan roda 2 yang dipelihara (bulan) | 12 Bulan | 143,665,000 | 165,214,750 |
| 1 5 1 2.03 34 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara (bulan) | 12 Bulan | 30,000,000 | 34,500,000 |
| 1 5 1 2.04 | Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | | | | 70,000,000 | 80,500,000 |
| 1 5 1 2.04 5 | Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah pakaian dinas yang diadakan (paket) | 1 Paket | 10,000,000 | 11,500,000 |
| 1 5 1 2.04 9 | Pendidikan dan Pelatihan Formal | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah pendidikan dan pelatihan formal yang diikuti (kali) | 8 kali | 60,000,000 | 69,000,000 |
| 1 5 3 | PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA | | | | 2,343,232,202 | 2,694,717,032 |
| 1 5 3 2.01 | Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota | | | | 166,211,313 | 191,143,010 |
| 1 5 3 2.01 2 | Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah Peserta yang mengikuti Sosialisasi (orang) | 290 Orang | 166,211,313 | 191,143,010 |
| 1 5 3 2.02 | Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana | | | | 1,299,200,000 | 1,494,080,000 |



| Kode | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan | Lokasi | Indikator | Target | Pagu Indikatif (Rp.) | Prakiraan Maju (Rp.) |
|-------------------|--|---|---|------------|----------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 5 3 2.02 1 | Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah dokumen RPB yang disusun (Dokumen) | 1 Dokumen | 150,000,000 | 172,500,000 |
| 1 5 3 2.02 2 | Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah Pelatihan yang terlaksana (Kegiatan) | 6 Kegiatan | 199,650,000 | 229,597,500 |
| 1 5 3 2.02 3 | Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah alat penanggulangan bencana yang dipelihara (Bulan) | 12 Bulan | 195,000,000 | 224,250,000 |
| 1 5 3 2.02 4 | Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah peralatan penanggulangan bencana yang disediakan (Jenis) | 7 Jenis | 295,000,000 | 339,250,000 |
| 1 5 3 2.02 6 | Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah peserta Pelatihan KSB (Orang) | 85 Orang | 209,550,000 | 240,982,500 |
| 1 5 3 2.02 7 | Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah Kasus Pasca Bencana yang Ditangani (Kasus) | 30 kasus | 240,000,000 | 276,000,000 |
| 1 5 3 2.02 8 | Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah personil TRC yang mengikuti diklat PB (orang) | 4 Orang | 10,000,000 | 11,500,000 |
| 1 5 3 2.03 | Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana | | | | 872,820,889 | 1,003,744,022 |
| 1 5 3 2.03 2 | Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah penanganan Darurat bencana yang dilakukan (Bulan) | 12 Bulan | 450,000,000 | 517,500,000 |
| 1 5 3 2.03 3 | Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah Kejadian Bencana yang tertangani (Bulan) | 12 Bulan | 281,282,261 | 323,474,600 |
| 1 5 3 2.03 4 | Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah logistik yang tersedia (Jenis) | 8 Jenis | 141,538,628 | 162,769,422 |
| 1 5 3 2.04 | Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana | | | | 5,000,000 | 5,750,000 |



| Kode | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan | Lokasi | Indikator | Target | Pagu Indikatif (Rp.) | Prakiraan Maju (Rp.) | |
|-------------------|--|---|--|------------|----------------------|----------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 1 5 3 2.04 1 | Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah dokumen Protap Tanggap Darurat yang disusun (Dokumen) | 1 Dokumen | 5,000,000 | 5,750,000 | |
| 8 | UNSUR PEMERINTAHAN UMUM | | | | | | |
| 8 1 | KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | | | | | 835,732,289 | 961,092,132 |
| 8 1 2 | PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN | | | | | 188,340,490 | 216,591,563 |
| 8 1 2 2.01 | Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan | | | | | 188,340,490 | 216,591,563 |
| 8 1 2 2.01 1 | Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah Kegiatan Bidang Ideologi wasbang dan Bela Negara (Kegiatan) | 2 Kegiatan | 188,340,490 | 216,591,563 | |
| 8 1 5 | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA | | | | | 647,391,799 | 744,500,569 |
| 8 1 5 2.01 | Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya | | | | | 647,391,799 | 744,500,569 |
| 8 1 5 2.01 4 | Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah Rapat Koordinasi yang Dilaksanakan (Bulan) | 12 Bulan | 647,391,799 | 744,500,569 | |
| TOTAL | | | | | 4,974,267,991 | 5,720,408,189 | |



Rekapitulasi Pagu Indikatif Menurut OPD Kota Sawahlunto Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.2
Rekapitulasi Pagu Indikatif Menurut OPD
Kota Sawahlunto Tahun 2021

| No | OPD | Pagu Indikatif |
|----|---|------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Dinas Pendidikan | 35,443,013,720 |
| 2 | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | 53,945,610,000 |
| 3 | Rumah Sakit Umum Daerah | 47,510,289,000 |
| 4 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 56,723,112,375 |
| 5 | Dinas Perumahan, Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup | 25,143,795,505 |
| 6 | Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran | 3,997,550,250 |
| 7 | Dinas Sosial, Pemberdayaan masyarakat, Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | 6,022,572,803 |
| 8 | Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan | 12,019,740,000 |
| 9 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 1,979,889,500 |
| 10 | Dinas Perhubungan | 4,737,239,094 |
| 11 | Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan | 6,469,876,133 |
| 12 | Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja | 5,684,312,370 |
| 13 | Dinas Kebudayaan, Peninggalan Bersejarah dan Permuseuman | 7,546,681,550 |
| 14 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | 1,522,234,000 |
| 15 | Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga | 15,507,676,980 |
| 16 | Sekretariat Daerah | 24,169,685,000 |
| 17 | Sekretariat DPRD | 17,963,444,600 |
| 18 | Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah | 4,564,950,038 |
| 19 | Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah | 5,025,214,319 |
| 20 | Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia | 4,390,547,000 |
| 21 | Inspektorat | 2,345,484,382 |
| 22 | Kecamatan Barangin | 6,083,474,569 |
| 23 | Kecamatan Lembah Segar | 8,393,095,000 |
| 24 | Kecamatan Silungkang | 955,780,000 |
| 25 | Kecamatan Talawi | 1,357,084,975 |
| 26 | Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Penanggulangan Bencana Daerah | 4,974,267,991 |
| | TOTAL | 364,476,621,154 |



BAB VI

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja pemerintah daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Daerah (IKD). Indikator kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan pencapaian sasaran strategis dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah pada akhir periode masa jabatan. Sedangkan Indikator Kinerja Daerah (IKD) merupakan indikator kinerja yang mengacu pada Standar Pelayanan Minimal (SPM), indikator kinerja yang tertuang dalam dokumen perencanaan provinsi, nasional serta Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga terkait.

6.1. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Pengukuran Keberhasilan rencana pembangunan jangka menengah daerah dalam pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah periode 2018-2023 tercermin dari capaian indikator kinerja Utama yang ditetapkan. Untuk mengukur keberhasilan program pembangunan yang telah ditentukan maka dipilih indikator Kinerja Utama (IKU) dan Target capaian selama lima tahun ke depan menurut tujuan dan sasaran pada setiap misi.

Target capaian indikator Kinerja Utama untuk Tahun 2021 disajikan dalam Tabel di bawah ini :

Tabel 6.1
Indikator Kinerja Utama Kota Sawahlunto Tahun 2021

| No | Indikator | Target 2021 | |
|---|--|-------------|-------|
| | | RPJMD | RKPD |
| Misi 1 : Menciptakan Kehidupan Beragama Dan Budaya Yang Semakin Baik | | | |
| 1 | Persentase Masjid Dan Mushola Yang Aktif (%) | 88 | 88 |
| 2 | Persentase Komunitas Budaya Yang Aktif | 76 | 76 |
| Misi 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Dan Pengembangan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Ekonomi Kreatif Serta Mengadakan Pelatihan Melalui BLK | | | |
| 1 | Laju Pertumbuhan Ekonomi | 5,85 | 5,00 |
| 2 | PDRB Perkapita | 64,17 | 63,39 |
| 3 | Tingkat Kemiskinan | 2,15 | 2,40 |
| Misi 3 : Mewujudkan Pendidikan Yang Berkualitas Untuk Menghasilkan Sumber Daya Manusia Yang Beriman, Kreatif Dan Berdaya Saing (Dengan Memberikan Beasiswa Atau Kartu Sawahlunto Pintar) | | | |
| 1 | Indeks Pembangunan Manusia (IPM) | 76,99 | 73,31 |
| Misi 4 : Menghadirkan Pemerintahan Yang Baik, Bersih Dan Inovatif | | | |



| No | Indikator | Target 2021 | |
|--|---|-------------|-----------|
| | | RPJMD | RKPD |
| 1 | Indeks Reformasi Birokrasi | 74,95 | 74,95 |
| 2 | Persentase Penegakan Perda | 100 | 100 |
| Misi 5 : Meningkatkan Pelayanan Kesehatan Yang Bermutu Dengan Memberikan Jaminan Kesehatan Untuk Seluruh Masyarakat | | | |
| 1 | Indeks Pembangunan Manusia (IPM) | 76,99 | 73,31 |
| Misi 6 : Mengembangkan Potensi Wisata Secara Serius Dan Berkelanjutan | | | |
| 1 | PDRB Sektor Pariwisata | 89,881.16 | 89,881.16 |
| 2 | Persentase PAD Sektor Pariwisata | 3,38 | 3,38 |
| Misi 7 : Tersedianya Infrastruktur Publik Yang Merata Dan Memadai | | | |
| 1 | Indeks Pembangunan Infrastruktur Wilayah | 81 | 81 |
| Misi 8 : Penanganan Khusus Terhadap Kelompok Marginal Seperti Lansia, Penyandang Disabilitas, Gangguan Jiwa Dan Kelompok Marginal Lainnya | | | |
| 1 | Persentase Lansia, Penyandang Disabilitas, Gangguan Jiwa Dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Lainnya Yang Terfasilitasi | 89,84 | 89,84 |
| Misi 9 : Mewujudkan Kota Berbasis Smart City Dalam Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dan Daya Tarik Investor | | | |
| 1 | Nilai Total Investasi (Milyar Rupiah) | 36 | 36 |



6.2. INDIKATOR KINERJA DAERAH

Indikator kinerja daerah secara teknis pada dasarnya dirumuskan dengan mengambil indikator dari program prioritas yang telah ditetapkan (outcome) atau kompositnya (impact). Suatu indikator kinerja daerah dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (outcome) terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah berkenaan setelah program dan kegiatan prioritas ditetapkan.

Selanjutnya, indikator kinerja daerah dibagi menjadi 3 (tiga) aspek yaitu aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, serta aspek daya saing daerah. Aspek kesejahteraan masyarakat diukur melalui indikator makro yang merupakan indikator gabungan dari berbagai kegiatan pembangunan ekonomi sosial. Aspek Pelayanan Umum merupakan segala bentuk pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan atau urusan sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat seperti infrastruktur dasar baik secara fisik maupun sosial. Aspek Daya Saing Daerah merupakan indikator yang mengukur kemampuan perekonomian daerah dalam mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan.

Tabel 6.2
Penetapan Indikator Kinerja Daerah
Kota Sawahlunto Tahun 2021

| No | Aspek/Fokus/Bidang/Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Target 2021 | |
|----------|--|-------------|--------|
| | | RPJMD | RKPD |
| A | ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT | | |
| 1 | Pertumbuhan Ekonomi (%) | 5,85 | 5,00 |
| 2 | Inflasi (%) | n/a | 2,23 |
| 3 | PDRB ADHB Perkapita (Rp. Juta) | 64,17 | 63,39 |
| 4 | Indek Gini (Ratio) | n/a | 0,3 |
| 5 | Tingkat Kemiskinan (%) | 2,15 | 2,40 |
| 6 | Tingkat Pengangguran Terbuka (%) | 5,02 | 6,88 |
| 7 | Indeks Pembangunan Manusia (IPM) | 76,99 | 73,31 |
| | a. Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun) | 10,75 | 10,00 |
| | b. Harapan Lama Sekolah (Tahun) | 14,22 | 13,17 |
| | c. Angka Harapan Hidup (Tahun) | 71,11 | 70,07 |
| | d. Pengeluaran Perkapita (Ribu/Kapita/Tahun) | 10.300 | 10.300 |
| 8 | Indek Pemberdayaan Gender (IDG) | 65,63 | 65,33 |
| 9 | Indeks Pembangunan Gender (IPG) | 95,56 | 95,55 |
| | | | |
| B | ASPEK PELAYANAN UMUM | | |
| I | Layanan Urusan Wajib Pelayanan Dasar | | |
| 1 | Urusan Pendidikan | | |
| | a. APK TK (%) | 99.90 | 99.90 |
| | b. APK SD (%) | 109.80 | 106,50 |
| | c. APK SMP (%) | 104.75 | 94.75 |
| | d. APM SD (%) | 96.80 | 96.80 |
| | e. APM SMP (%) | 79.69 | 79.69 |
| | f. Rata-Rata Nilai UN SMP (skala 0-100) | 55.2 | 55.2 |
| | g. Rata-Rata Nilai UN SD (skala 0-100) | 78.9 | 78.9 |
| | h. Lulusan SD Hafidz Al-Qur'an minimal Juz 30 (%) | 30 | 30 |



| No | Aspek/Fokus/Bidang/Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Target 2021 | |
|-----------|---|-------------|--------|
| | | RPJMD | RKPD |
| | i. Kasus Kenakalan Remaja Menurun | 5 | 5 |
| 2 | Urusan Kesehatan | | |
| | a. Persentase Keluarga Sehat (%) | 33 | 33 |
| | b. Penduduk Yang Memiliki Jaminan Kesehatan (%) | 97 | 97 |
| | c. Tingkat Kepuasan Pasien/ Pengunjung (%) | 95,06 | 95,06 |
| | d. Rujukan yang Dikeluarkan RSUD (%) | ≤ 2,30 | ≤ 2,30 |
| 3 | Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | | |
| | a. Infrastruktur Dasar dalam Kondisi Baik (%) | 76,44 | 76,44 |
| 4 | Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman | | |
| | a. RTLH (%) | 3,4 | 2,47 |
| | b. Luas Kawasan Permukiman Kumuh (Hektar) | 8 | 260,11 |
| | c. Rumah Tangga yang Memiliki Akses terhadap Layanan Sumber Air Minum Layak (%) | 89 | 90 |
| 5 | Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat | | |
| | a. Penegakan Perda (%) | 100 | 100 |
| | b. Indek Ketahanan Daerah | 0,53 | 0,53 |
| 6 | Urusan Sosial | | |
| | a. Lansia yang Terfasilitasi (%) | 100 | 100 |
| | b. ABK yang Terfasilitasi | 100 | 100 |
| | c. Penyandang Disabilitas yang Terfasilitasi | 59,35 | 59,35 |
| | d. Penderita Gangguan Jiwa yang Terfasilitasi | 100 | 100 |
| II | Layanan Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar | | |
| 1 | Urusan Ketenagakerjaan | | |
| | a. Produktivitas Tenaga Kerja (Juta/Jiwa/Tahun) | 93,05 | 93,05 |
| 2 | Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | | |
| | a. Predikat Kota Layak Anak (Prediket) | Utama | Nindya |
| 3 | Urusan Lingkungan Hidup | | |
| | a. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (%) | 64 | 64 |
| | b. Ketaatan terhadap Tata Ruang | 89 | 85 |
| 4 | Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil | | |
| | a. Keluarga yang Tertib Administrasi Kependudukan (%) | 25 | 25 |
| 5 | Urusan Komunikasi dan Informatika | | |
| | a. Indeks Pembangunan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) | 3,3 | 3,3 |
| 6 | Urusan Kebudayaan | | |



| No | Aspek/Fokus/Bidang/Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Target 2021 | |
|------------|---|-------------|------------|
| | | RPJMD | RKPD |
| | a. Komunitas Budaya yang Aktif (%) | 76 | 76 |
| | b. Budaya Benda yang Lestari | 64,7 | 64,7 |
| | c. Budaya Tak Benda yang Lestari | 22,2 | 22,2 |
| | | | |
| III | Layanan Urusan Pilihan | | |
| 1 | Urusan Pariwisata | | |
| | a. Pengunjung yang Mengantakan Puas dan Sangat Puas terhadap Objek Wisata (%) | 75 | 75 |
| | b. Objek Wisata Unggulan (%) | 50 | 50 |
| | c. Industri Pariwisata yang Berdaya Saing (%) | 64,26 | 64,26 |
| | d. Jumlah Wisatawan (Orang) | 434,128 | 434,128 |
| | e. Kelembagaan Kepariwisataaan yang Profesional (%) | 15.30 | 15.30 |
| | | | |
| 2 | Urusan Pertanian | | |
| | a. PDRB ADHB Sektor Pertanian dan Perikanan (Rp. Juta) | 368.411,32 | 344.153,57 |
| | b. Luas Sawah Yang Terairi dengan Irigasi (%) | 48,35 | 48,35 |
| | | | |
| 3 | Urusan Perdagangan | | |
| | a. Jumlah Omset di Pasar-Pasar Tradisional Sawahlunto (Juta) | 24.837,33 | 24.837,33 |
| | | | |
| 4 | Urusan Perindustrian | | |
| | a. PDRB Sektor Industri Pengolahan (Rp. Juta) | 622.279,65 | 384.664,63 |
| | | | |
| IV | Unsur Pendukung | | |
| 1 | Sekretariat Daerah | | |
| | a. Masjid dan Mushola yang Aktif (%) | 88 | 88 |
| | b. Rumah Ibadah Agama lain yang Aktif (%) | 100 | 100 |
| | c. Sarana Peribadatan yang Memadai (%) | 90 | 90 |
| | d. Sarana Pendidikan Agama yang Memadai (%) | 30 | 30 |
| | e. Nilai SAKIP | B | B |
| | f. Indek Kepuasan Masyarakat | A | A |
| | | | |
| 2 | Sekretariat DPRD | | |
| | a. Jumlah Perda yang Ditetapkan Tepat Waktu (%) | 90 | 90 |
| | | | |
| V | Unsur Penunjang | | |
| 1 | Perencanaan | | |
| | a. Peringkat Nilai LPPD Tingkat Provinsi (Peringkat) | 1 | 1 |
| | | | |
| 2 | Keuangan | | |
| | a. Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Opini) | WTP | WTP |
| | | | |
| VI | Unsur Pengawasan | | |
| 1 | Inspektorat | | |
| | a. Nilai Maturitas SPIP | Level 3 | Level 3 |
| | | | |



BAB VII PENUTUP

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Sawahlunto Tahun 2021 merupakan penjabaran dari tahun kedua dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Sawahlunto Tahun 2018-2023. RKPD ini memuat berbagai prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi daerah serta rencana kerja dan pendanaan pembangunan yang bersifat indikatif dengan memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Sawahlunto Tahun 2012-2032 dan RPJPD Kota Sawahlunto Tahun 2005-2025.

Melalui RKPD Kota Sawahlunto Tahun 2021 ini, berbagai prioritas pembangunan sebagai penjabaran dari Visi dan Misi Kota sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kota Sawahlunto diharapkan akan menjadi faktor akselerasi dalam pencapaian tujuan pembangunan yang bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan secara bersama antara OPD dan Stakeholder kota terjadi koordinasi, integrasi dan sinergitas pembangunan dalam mencapai sasaran yang telah ditentukan.

Selanjutnya diharapkan bagi OPD Kota Sawahlunto, serta seluruh pelaku pembangunan agar mendukung dan melaksanakan program-program dan kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan dalam RKPD Kota Sawahlunto tahun 2021 ini. RKPD Kota Sawahlunto Tahun 2021 ini juga menjadi pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Penetapan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun 2021. RKPD Tahun 2021 ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

WALIKOTA SAWAHLUNTO,

13 JUL 2020

ttd

Salinan sesuai dengan telpon
PJ. KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HATI

DERI ASTA

INDRA MULYONO SH
NIP. 19820411 201001 1 014



LAMPIRAN

DINAS PENDIDIKAN

| PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA | | | | | PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 | | | | | | | | | | |
|---|---|---------------------------------------|---|--|---------------------------|----|----|------|----|---------------------------------------|--|-------------------|--|--|--|
| NO | URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM/KEGIATAN | Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output) | KODE | | | | | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| I | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Terlaksananya program pelayanan administrasi perkantoran | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | Penyediaan jasa surat menyurat | Jumlah jasa surat menyurat yang diadakan (bulan) | 1 | 01 | 01 | 2.03 | 01 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Administrasi Umum | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah jasa surat menyurat yang diadakan (bulan) | |
| 2 | | | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | jumlah rekening listrik, air dan telepon yang dibayarkan (bulan) | 1 | 01 | 01 | 2.03 | 02 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Administrasi Umum | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | jumlah rekening listrik, air dan telepon yang dibayarkan (bulan) | |
| 3 | | | Penyediaan jasa kebersihan kantor | jumlah alat dan bahan kebersihan yang diadakan (bulan) | 1 | 01 | 01 | 2.03 | 08 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Administrasi Umum | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | jumlah alat dan bahan kebersihan yang diadakan (bulan) | |
| | | | Penyediaan alat tulis kantor | jumlah ATK yang diadakan (bulan) | 1 | 01 | 01 | 2.03 | 10 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Administrasi Umum | Penyediaan Alat Tulis Kantor | jumlah ATK yang diadakan (bulan) | |
| 4 | | | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | jumlah barang cetakan dan penggandaan yang diadakan (bulan) | 1 | 01 | 01 | 2.03 | 11 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Administrasi Umum | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | jumlah barang cetakan dan penggandaan yang diadakan (bulan) | |

| PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA | | | | | PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 | | | | | | | | | |
|---|--------|---------------|--|--|---------------------------|----|----|------|----|--|--|--|---|--|
| NO | URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM/KEGIATAN | Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output) | KODE | | | | | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 5 | | | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | jumlah komponen Instalasi listrik/Penerangan bangunan kantor yang diadakan (bulan) | 1 | 01 | 01 | 2.03 | 12 | URUSAN PEMERINTAH AN BIDANG PENDIDIKAN | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Administrasi Umum | Penyediaan Komponen Instalasi listrik/Penerangan Bangunan Kantor | jumlah komponen Instalasi listrik/Penerangan bangunan kantor yang diadakan (bulan) |
| 6 | | | Penyediaan makanan dan minuman | jumlah makanan dan minuman yang diadakan (bulan) | 1 | 01 | 01 | 2.03 | 17 | URUSAN PEMERINTAH AN BIDANG PENDIDIKAN | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Administrasi Umum | Penyediaan Makanan dan Minuman | jumlah makanan dan minuman yang diadakan (bulan) |
| 7 | | | Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah | jumlah Rakorkon yang diikuti (bulan) | 1 | 01 | 01 | 2.03 | 18 | URUSAN PEMERINTAH AN BIDANG PENDIDIKAN | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Administrasi Umum | Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah | jumlah Rakorkon yang diikuti (bulan) |
| 8 | | | Penyediaan Jasa Pelayanan Pegawai Non PNS | jumlah tenaga Non PNS yang difasilitasi (orang) | 1 | 01 | 01 | 2.02 | 18 | URUSAN PEMERINTAH AN BIDANG PENDIDIKAN | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Administrasi Keuangan | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | jumlah tenaga Non PNS yang difasilitasi (orang) |
| 9 | | | Penatausahaan Keuangan dan Barang | jumlah penatausahaan keuangan dan barang yang dibayarkan (bulan) | 1 | 01 | 01 | 2.02 | 04 | URUSAN PEMERINTAH AN BIDANG PENDIDIKAN | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Administrasi Keuangan | Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan | jumlah penatausahaan keuangan dan barang yang dibayarkan (bulan) |
| 10 | | | Penyediaan Dokumentasi dan Dekorasi | Jumlah bendera/umbul-umbul papan data/spanduk yang diadakan (bulan) | 1 | 01 | 01 | 2.01 | 01 | URUSAN PEMERINTAH AN BIDANG PENDIDIKAN | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah bendera/umbul-umbul papan data/spanduk yang diadakan (bulan) |

| PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA | | | | | PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 | | | | | | | | | | |
|---|--------|---------------|---|--|---------------------------|----|----|------|----|--|--|-------------------|--|---|--|
| NO | URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM/KEGIATAN | Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output) | KODE | | | | | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 11 | | | Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur | Persentase kondisi sarana dan prasarana perkantoran dalam keadaan baik | | | | | | | | | | | |
| | | | Pengadaan peralatan gedung kantor | Jumlah perlengkapan kantor yang diadakan (unit) | 1 | 01 | 01 | 2.03 | 24 | URUSAN PEMERINTAH AN BIDANG PENDIDIKAN | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Administrasi Umum | Pengadaan Peralatan Gedung Kantor | Jumlah perlengkapan kantor yang diadakan (unit) | |
| II | | | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | Jumlah bulan untuk pemeliharaan gedung kantor (bulan) | 1 | 01 | 01 | 2.03 | 22 | URUSAN PEMERINTAH AN BIDANG PENDIDIKAN | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Administrasi Umum | Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor | Jumlah bulan untuk pemeliharaan gedung kantor (bulan) | |
| 1 | | | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/Pelaksanaan | Jumlah kendaraan Dinas Operasional yang di pemeliharaan (unit) | 1 | 01 | 01 | 2.03 | 30 | URUSAN PEMERINTAH AN BIDANG PENDIDIKAN | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Administrasi Umum | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | Jumlah kendaraan Dinas Operasional yang di pemeliharaan (unit) | |
| 2 | | | Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor | Jumlah bulan untuk pemeliharaan peralatan gedung kantor (bulan) | 1 | 01 | 01 | 2.03 | 32 | URUSAN PEMERINTAH AN BIDANG PENDIDIKAN | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Administrasi Umum | Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor | Jumlah bulan untuk pemeliharaan peralatan gedung kantor (bulan) | |
| 3 | | | Pelaksanaan Kegiatan Penunjang Unit Layanan Pendidikan 4 Kecamatan se Kota Sawahlunto | Jumlah peserta yang difasilitasi (orang) | | | | | | | | | | | |

| PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA | | | | | PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 | | | | | | | | | |
|---|--------|---------------|---|---|---------------------------|----|----|------|----|--|--|---|---|---|
| NO | URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM/KEGIATAN | Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output) | KODE | | | | | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 4 | | | Pembuatan pavling blok Dan kanopi dinas pendidikan kota sawahlnto | Luas pavling blok Dan kanopi dinas pendidikan yang dibuat (m2) | 1 | 01 | 01 | 2.03 | 32 | URUSAN PEMERINTAH AN BIDANG PENDIDIKAN | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Administrasi Umum | Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor | Luas pavling blok Dan kanopi dinas pendidikan yang dibuat (m2) |
| 5 | | | Pembangunan pagar pembatas di lingkungan dinas pendidikan | Panjang pagar yang dibangun (m2) | 1 | 01 | 01 | 2.03 | 32 | URUSAN PEMERINTAH AN BIDANG PENDIDIKAN | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Administrasi Umum | Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor | Panjang pagar yang dibangun (m2) |
| III | | | Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur | Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal (orang) | | | | | | | | | | |
| 1 | | | Pendidikan dan pelatihan formal | Jumlah Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal (orang) | 1 | 01 | 01 | 2.04 | 09 | URUSAN PEMERINTAH AN BIDANG PENDIDIKAN | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya | Pendidikan dan Pelatihan Formal | Jumlah Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal (orang) |
| 2 | | | Pelaksanaan Peringatan Hari Pendidikan Nasional | Jumlah kegiatan yang dilaksanakan (kegiatan) | | | | | | | | | | |
| IV | | | Program Pendidikan Anak Usia Dini | APK TK (%) | | | | | | | | | | |
| | | | Gebyar dan Lomba Hari Anak Nasional (HAN) | jumlah peserta yang mengikuti GEBYAR serta memeriahkan HAN Tk. Kota (orang) | 1 | 01 | 02 | 2.02 | 38 | URUSAN PEMERINTAH AN BIDANG PENDIDIKAN | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa | jumlah peserta yang mengikuti GEBYAR serta memeriahkan HAN Tk. Kota (orang) |

| PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA | | | | | PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 | | | | | | | | | |
|---|--------|---------------|---|---|---------------------------|----|----|------|----|--|--------------------------------|---|---|---|
| NO | URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM/KEGIATAN | Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output) | KODE | | | | | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | | jumlah cabang lomba yang diadakan (cabang) | 1 | 01 | 02 | 2.02 | 38 | URUSAN PEMERINTAH AN BIDANG PENDIDIKAN | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa | jumlah cabang lomba yang diadakan (cabang) |
| | | | Operasional Pokja Forum FAUD dan HIMPAUDI | Jumlah Pendidik yang difasilitasi | | | 02 | 2.03 | 16 | URUSAN PEMERINTAH AN BIDANG PENDIDIKAN | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD | Jumlah Pendidik yang difasilitasi |
| | | | Belanja DAK BOP PAUD | Jumlah lembaga yang difasilitasi DAK BOP (lembaga) | 1 | 01 | | | | | | | | |
| | | | Pengadaan Alat Peraga Edukatif (APE) PAUD | Persentase APE PAUD Yang Tersedia | 1 | 01 | 01 | 2.04 | 11 | URUSAN PEMERINTAH AN BIDANG PENDIDIKAN | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal/Kesetaraan | Persentase APE PAUD Yang Tersedia |
| | | | Rehab Gedung TK Aisyiyah Silungkang | Luas TK Aisyiyah Silungkang yang dibenah (m2) | 1 | 01 | 02 | 2.03 | 04 | URUSAN PEMERINTAH AN BIDANG PENDIDIKAN | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) | Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana,Prasarana dan Utilitas PAUD | Luas TK Aisyiyah Silungkang yang dibenah (m2) |
| | | | Pembangunan Pagar dan Daam TK Tunas Bangsa Desa Taratak Bancah | Luas TK Tunas Bangsa Desa Taratak Bancah yang dibenah (m2) | 1 | 01 | 02 | 2.03 | 04 | URUSAN PEMERINTAH AN BIDANG PENDIDIKAN | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) | Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana,Prasarana dan Utilitas PAUD | Luas TK Tunas Bangsa Desa Taratak Bancah yang dibenah (m2) |
| | | | Pembangunan Ruang Kelas Baru PAUD Harapan Kita Desa Balai Batu Sandaran | Luas PAUD Harapan Kita Desa Balai Batu Sandaran yang dibenah (m2) | 1 | 01 | 02 | 2.03 | 01 | URUSAN PEMERINTAH AN BIDANG PENDIDIKAN | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) | Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD | Luas PAUD Harapan Kita Desa Balai Batu Sandaran yang dibenah (m2) |

| PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA | | | | | PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 | | | | | | | | | |
|---|--------|---------------|--|---|---------------------------|----|----|------|----|---------------------------------------|--------------------------------|--|---|---|
| NO | URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM/KEGIATAN | Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output) | KODE | | | | | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | Pembangunan Ruang Bermain PAUD Melati Guguak Balang | Luas PAUD Melati Desa Guguak Balang yang dibenah (m2) | 1 | 01 | 02 | 2.03 | 02 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD | Luas PAUD Melati Desa Guguak Balang yang dibenah (m2) |
| | | | Pembangunan Sarana Air Bersih dan Sanitasi PP Permata Bunda Kampung Teleng Kel.Pasar | Luas PPP Permata Bunda Kampung Teleng Kel.Pasar yang dibenah (m2) | 1 | 01 | 02 | 2.03 | 02 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD | Luas PPP Permata Bunda Kampung Teleng Kel.Pasar yang dibenah (m2) |
| | | | Pembangunan WC dan Jamban TK AN NUR Kayu Gadang | Luas TK AN NUR Kayu Gadang yang dibenah (m2) | 1 | 01 | 02 | 2.03 | 02 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD | Luas TK AN NUR Kayu Gadang yang dibenah (m2) |
| | | | Pembangunan PAUD Ananda Taratak Capo Talawi Hilir | Luas PAUD Ananda Taratak Capo Talawi Hilir yang dibangun/direhab (m2) | 1 | 01 | 02 | 2.03 | 01 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) | Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD | Luas PAUD Ananda Taratak Capo Talawi Hilir yang dibangun/direhab (m2) |
| | | | Pengadaan Karpet PAUD Non Formal | Jumlah Karpet yang diadakan | 1 | 01 | 02 | 2.04 | 01 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan | Jumlah Karpet yang diadakan |
| | | | Pengadaan mobiler PAUD Formal | Jumlah Mobiler PAUD yang diadakan | 1 | 01 | 02 | 2.03 | 07 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) | Pengadaan Mebeluer PAUD | Jumlah Mobiler PAUD yang diadakan |
| | | | Program Pendidikan | Angka Partisipasi Kasar SD (%) | | | | | | | | | | |

| PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA | | | | | PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 | | | | | | | | | |
|---|--------|---------------|--|---|---------------------------|----|----|------|----|---------------------------------------|--------------------------------|---|---|---|
| NO | URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM/KEGIATAN | Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output) | KODE | | | | | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | Wajib Belajar Dasar Sembilan tahun | Angka Partisipasi Kasar SMP (%) | | | | | | | | | | |
| | | | BOSDA SD Negeri se Kota Sawahlunto | Jumlah SD Negeri se Kota Sawahlunto yang diberi bantuan BOSDA (sekolah) | 1 | 01 | 02 | 2.01 | 21 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar | Jumlah SD Negeri se Kota Sawahlunto yang diberi bantuan BOSDA (sekolah) |
| | | | BOSDA SMP Negeri se Kota Sawahlunto | Jumlah SMP Negeri se Kota Sawahlunto yang diberi bantuan (sekolah) | 1 | 01 | 02 | 2.02 | 32 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama | Jumlah SMP Negeri se Kota Sawahlunto yang diberi bantuan (sekolah) |
| | | | Pembinaan dan Monitoring Pelaksanaan Bantuan Pelaksanaan Sekolah (BOS) | jumlah sekolah yang mengikuti sosialisasi (sekolah) | 1 | 01 | 02 | 2.02 | 32 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama | jumlah sekolah yang mengikuti sosialisasi (sekolah) |
| | | | Program Pendidikan Non Formal | Persentase Anak Putus Sekolah yang melanjutkan pendidikan di sekolah non formal | 1 | 01 | 02 | 2.04 | 12 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan | Persentase Anak Putus Sekolah yang melanjutkan pendidikan di sekolah non formal |
| | | | Pelaksanaan UNBK dan Ujian Semester Paket A, B dan C | Jumlah Kelompok yang Melaksanakan Ujian Paket (Kelompok) | 1 | 01 | 02 | 2.04 | 13 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | Jumlah Kelompok yang Melaksanakan Ujian Paket (Kelompok) |

| PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA | | | | | PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 | | | | | | | | | |
|---|--------|---------------|---|--|---------------------------|----|----|------|---------------|---------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|--|--|
| NO | URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM/KEGIATAN | Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output) | KODE | | | | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| | | | Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan | Persentase Guru yang bersertifikat Pendidik | | | | | | | | | | |
| | | | | Persentase Guru yang berkualifikasi S1 Kependidikan | | | | | | | | | | |
| | | | Apresiasi PTK PAUDNI Berprestasi | Jumlah lomba yang dilaksanakan di tingkat kota (cabang) | 1 | 01 | 02 | 2.01 | 25 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa | Jumlah lomba yang dilaksanakan di tingkat kota (cabang) |
| | | | Fasilitasi TPK TK | jumlah TPK yang difasilitasi (orang) | 1 | 01 | 02 | 2.01 | 25 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa | Jumlah TPK yang difasilitasi (orang) |
| | | | Porseni guru dan murid TK | Jumlah Guru Dan Murid TK Yang Mengikuti Lomba (Orang) | 1 | 01 | 02 | 2.01 | 25 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa | Jumlah Guru Dan Murid TK Yang Mengikuti Lomba (Orang) |
| | | | Jambore PAUD | Jumlah peserta yang mengikuti jambore tingkat kota (orang) | 1 | 01 | 02 | 2.01 | 25 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa | Jumlah peserta yang mengikuti jambore tingkat kota (orang) |
| | | | Pelatihan Manajemen Kepala Sekolah | Jumlah kepala sekolah yang memperoleh sertifikat (orang) | 1 | 01 | 02 | 2.01 | 27 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendid Dasar | Jumlah kepala sekolah yang memperoleh sertifikat (orang) |

| PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA | | | | | PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 | | | | | | | | | |
|---|--------|---------------|--|--|---------------------------|----|----|------|----|---------------------------------------|--------------------------------|---|---|---|
| NO | URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM/KEGIATAN | Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output) | KODE | | | | | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | | | 1 | 01 | 02 | 2.02 | 40 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | |
| | | | Fasilitasi Pelaksanaan UKG dan PKG bagi Guru TK | Jumlah guru TK yang dilatih (orang) | 1 | 01 | 02 | 2.01 | 27 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendid Dasar | Jumlah guru TK yang dilatih (orang) |
| | | | Operasional Penilaian Angka Kredit | Jumlah Guruyang Dinilai Angka Kredit (Orang) | 1 | 01 | 02 | 2.01 | 27 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendid Dasar | Jumlah guru TK yang dilatih (orang) |
| | | | | | 1 | 01 | 02 | 2.02 | 40 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | |
| | | | Olimpiade guru | jumlah guru SD yang mengikuti olimpiade (orang) | 1 | 01 | 02 | 2.01 | 27 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendid Dasar | jumlah guru SD yang mengikuti olimpiade (orang) |
| | | | Fasilitasi Pelaksanaan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) Guru SLTP | Jumlah Kelompok Yang Difasilitasi (Kelompok) | 1 | 01 | 02 | 2.02 | 40 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | Jumlah Kelompok Yang Difasilitasi (Kelompok) |

| PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA | | | | | PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 | | | | | | | | | |
|---|--------|---------------|---|--|---------------------------|----|----|------|----|--|--------------------------------|---|---|--|
| NO | URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM/KEGIATAN | Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output) | KODE | | | | | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | Operasional Forum Ilmiah Guru (FIG) | Jumlah Forum Guru SD Dan SMP yang Difasilitasi (Forum) | 1 | 01 | 02 | 2.01 | 27 | URUSAN PEMERINTAH AN BIDANG PENDIDIKAN | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | Jumlah Forum Guru SD Dan SMP yang Difasilitasi (Forum) |
| | | | Bimtek dan Pelatihan Pembelajaran Berbasis STEM | Jumlah Peserta yang mengikuti bimbingan dan pelatihan Pembelajaran Berbasis STEM (orang) | 1 | 01 | 02 | 2.02 | 40 | URUSAN PEMERINTAH AN BIDANG PENDIDIKAN | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | Jumlah Peserta yang mengikuti bimbingan dan pelatihan Pembelajaran Berbasis STEM (orang) |
| | | | Monitoring dan Evaluasi Sertifikasi Guru | jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi (orang) | 1 | 01 | 02 | 2.02 | 40 | URUSAN PEMERINTAH AN BIDANG PENDIDIKAN | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi (orang) |
| | | | Pemilihan guru, kepala sekolah Dan pengawas berprestasi | Jumlah pemenang pemilihan guru Guru, Kepala Sekolah, Pengawas Berprestasi (orang) | 1 | 01 | 02 | 2.01 | 27 | URUSAN PEMERINTAH AN BIDANG PENDIDIKAN | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendid Dasar | Jumlah pemenang pemilihan guru Guru, Kepala Sekolah, Pengawas Berprestasi (orang) |
| | | | Operasional Ikatan Guru TK | Jumlah ikatan guru TK yang difasilitasi (kelompok) | 1 | 01 | 02 | 2.03 | 16 | URUSAN PEMERINTAH AN BIDANG PENDIDIKAN | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD | |

| PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA | | | | | PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 | | | | | | | | | |
|---|--------|---------------|---|--|---------------------------|----|----|------|----|--|--------------------------------|---|---|--|
| NO | URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM/KEGIATAN | Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output) | KODE | | | | | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | Workshop Pengembangan PTK PAUD | Jumlah guru PAUD yang memperoleh sertifikat pengembangan PTK (orang) | 1 | 01 | 02 | 2.01 | 27 | URUSAN PEMERINTAH AN BIDANG PENDIDIKAN | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendid Dasar | Jumlah guru PAUD yang memperoleh sertifikat pengembangan PTK (orang) |
| | | | Workshop Pembuatan Perangkat Pembelajaran di PAUD | Jumlah peserta (guru PAUD) yang mendapatkan sertifikat workshop pembuatan perangkat pembelajaran (orang) | 1 | 01 | 03 | 2.01 | 04 | URUSAN PEMERINTAH AN BIDANG PENDIDIKAN | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar | Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar | Jumlah guru PAUD yang memperoleh sertifikat pengembangan PTK (orang) |
| | | | Workshop Pembuatan Alat Peraga PAUD | Jumlah guru yang mampu membuat alat peraga PAUD (orang) | 1 | 01 | 02 | 2.03 | 12 | URUSAN PEMERINTAH AN BIDANG PENDIDIKAN | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) | Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD | Jumlah peserta (guru PAUD) yang mendapatkan sertifikat workshop pembuatan perangkat pembelajaran (orang) |
| | | | Magang Guru | Jumlah peserta yang mengikuti magang (orang) | 1 | 01 | 02 | 2.02 | 40 | URUSAN PEMERINTAH AN BIDANG PENDIDIKAN | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | Jumlah peserta yang mengikuti magang (orang) |
| | | | Operasional KKKS | Jumlah KKS yang difasilitasi (kelompok) | 1 | 01 | 02 | 2.02 | 40 | URUSAN PEMERINTAH AN BIDANG PENDIDIKAN | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | Jumlah KKS yang difasilitasi (kelompok) |

| PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA | | | | | PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 | | | | | | | | | |
|---|--------|---------------|---|---|---------------------------|----|----|------|----|--|--------------------------------|---|---|---|
| NO | URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM/KEGIATAN | Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output) | KODE | | | | | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | Fasilitasi Musyawarah Kerja Kepala Sekolah SMP | Jumlah Kepala Sekolah yang mengikuti musyawarah kerja | 1 | 01 | 02 | 2.02 | 40 | URUSAN PEMERINTAH AN BIDANG PENDIDIKAN | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | Jumlah Kepala Sekolah yang mengikuti musyawarah kerja |
| | | | Bimtek dan Pelatihan Strategi Pemenuhan SNP | Jumlah Sekolah yang mengikuti bimbingan dan pelatihan (sekolah) | 1 | 01 | 02 | 2.02 | 40 | URUSAN PEMERINTAH AN BIDANG PENDIDIKAN | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | Jumlah Sekolah yang mengikuti bimbingan dan pelatihan (sekolah) |
| | | | Monitoring assesment Guru SD dan Guru SMP | Jumlah sekolah yang dimonitoring (sekolah) | 1 | 01 | 02 | 2.02 | 40 | URUSAN PEMERINTAH AN BIDANG PENDIDIKAN | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | Jumlah sekolah yang dimonitoring (sekolah) |
| | | | Reward Pembimbing dan Siswa Pemenang Lomba Akademik dan Non Akademik Tingkat Provinsi | Jumlah siswa yang memperoleh Reward (orang) | 1 | 01 | 02 | 2.02 | 38 | URUSAN PEMERINTAH AN BIDANG PENDIDIKAN | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa | Jumlah siswa yang memperoleh Reward (orang) |
| | | | Program Peningkatan Mutu Pendidikan Dasar | Angka rata-rata nilai USBN SD (skala 0 -100) | | | | | | | | | | |
| | | | | Angka rata-rata nilai UN SMP (skala 0 - 100) | | | | | | | | | | |

| PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA | | | | | PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 | | | | | | | | | | |
|---|--------|---------------|--|--|---------------------------|----|----|------|----|---------------------------------------|--|---|---|--|--|
| NO | URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM/KEGIATAN | Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output) | KODE | | | | | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| | | | Ujian Nasional SMP dan USBN SD | jumlah sekolah yang mengikuti UN SMP dan USBN SD (sekolah) | 1 | 01 | 02 | 201 | 23 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik | jumlah sekolah yang mengikuti UN SMP dan USBN SD (sekolah) | |
| | | | Ujian Standar Kota SD dan SMP | jumlah sekolah yang mengikuti ujian standar kota (sekolah) | 1 | 01 | 02 | 201 | 23 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik | jumlah sekolah yang mengikuti ujian standar kota (sekolah) | |
| | | | Monitoring Assesment Siswa SD dan SMP | jumlah sekolah yang di monitoring (sekolah) | 1 | 01 | 02 | 201 | 23 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik | jumlah sekolah yang di monitoring (sekolah) | |
| | | | Program Manajemen Pelayanan Pendidikan | Persentase sekolah SD yang memperoleh akreditasi A | | | | | | | | | | | |
| | | | | Persentase sekolah SMP yang memperoleh akreditasi A | | | | | | | | | | | |
| | | | | Nilai hasil evaluasi kinerja bidang pendidikan (skala 0-100) | | | | | | | | | | | |
| | | | Forum OPD Dinas Pendidikan | jumlah dokumen renja yang dihasilkan (dokumen) | 1 | 01 | 01 | 2.01 | 01 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah | jumlah dokumen renja yang dihasilkan (dokumen) | |

| PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA | | | | | PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 | | | | | | | | | |
|---|--------|---------------|---|--|---------------------------|----|----|------|----|---------------------------------------|--|--|--|---|
| NO | URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM/KEGIATAN | Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output) | KODE | | | | | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | Pemutakhiran Direktori Guru, Penyusunan Profil dan Buku Saku Dinas Pendidikan | Jumlah Dokumen dihasilkan (dokumen) | 1 | 01 | 04 | 201 | 01 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN | PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN | Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | Jumlah Dokumen dihasilkan (dokumen) |
| | | | | | 1 | 01 | 04 | 201 | 02 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN | PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN | | Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | Jumlah Dokumen dihasilkan (dokumen) |
| | | | Pemeriksaan Ujian Standar Kota SD/MI/SMP/MTs | jumlah mapel yang diperiksa | 1 | 01 | 02 | 201 | 23 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik | jumlah mapel yang diperiksa |
| | | | Fasilitasi Pelatihan Operator Dapodik SD dan SMP | Jumlah Operator yang diberikan Pelatihan (orang) | 1 | 01 | 04 | 2.02 | 01 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN | PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN | Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | |

| PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA | | | | | PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 | | | | | | | | | |
|---|--------|---------------|---|---|---------------------------|----|----|------|----|---------------------------------------|--|--|--|---|
| NO | URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM/KEGIATAN | Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output) | KODE | | | | | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | Operasional KKG TK/Gugus PAUD Non Formal | Jumlah kelompok kerja guru TK yang difasilitasi (kelompok) | 1 | 01 | 04 | 2.01 | 01 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN | PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN | Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | Jumlah kelompok kerja guru TK yang difasilitasi (kelompok) |
| | | | Pelatihan Dapodik PAUD | Jumlah Operator yang dapat mengolah dapodik (lembaga) | 1 | 01 | 04 | 2.01 | 01 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN | PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN | Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | Jumlah Operator yang dapat mengolah dapodik (lembaga) |
| | | | Operasional TBM | Jumlah Lembaga yang dibiayai (lembaga) | 1 | 01 | 02 | 2-04 | 16 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan | |
| | | | Bimbingan Persiapan Akreditasi PAUD & Dikmas | Jumlah PAUD & Dikmas Yang Diakreditasi | 1 | 01 | 02 | 2.03 | 17 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD | Jumlah PAUD & Dikmas Yang Diakreditasi |
| | | | Operasional Kelompok Kerja Guru (KKG) Sekolah Dasar | jumlah kelompok yang mengikuti pendidikan digital (sekolah) | 1 | 01 | 02 | 2.02 | 41 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah | jumlah kelompok yang mengikuti pendidikan digital (sekolah) |

| PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA | | | | | PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 | | | | | | | | | | |
|---|--------|---------------|--|---|---------------------------|----|----|------|----|--|--------------------------------|---|---|---|--|
| NO | URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM/KEGIATAN | Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output) | KODE | | | | | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| | | | Penyusunan Juknis dan Pembuatan Aplikasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Sistem Zonasi Online | Jumlah dokumen aplikasi Juknis PPDB Online yang dibuat (dokumen) | 1 | 01 | 02 | 2.02 | 41 | URUSAN PEMERINTAH AN BIDANG PENDIDIKAN | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah | Jumlah dokumen aplikasi Juknis PPDB Online yang dibuat (dokumen) | |
| | | | Sosialisasi dan Monitoring Pelaksanaan DAK BOP PAUD | Jumlah lembaga PAUD yang mengikuti sosialisasi dan dimonitoring (lembaga) | 1 | 01 | 02 | 2.02 | 41 | URUSAN PEMERINTAH AN BIDANG PENDIDIKAN | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah | Jumlah lembaga PAUD yang mengikuti sosialisasi dan dimonitoring (lembaga) | |
| | | | Pendidikan Digital untuk Sekolah dasar dan Menengah | Jumlah sekolah yang difasilitasi | 1 | 01 | 02 | 2.02 | 41 | URUSAN PEMERINTAH AN BIDANG PENDIDIKAN | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah | Jumlah sekolah yang difasilitasi | |
| | | | Program Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Pendidikan | Persentase SD yang memiliki sarana prasarana sesuai standar | | | | | | | | | | | |
| | | | | Persentase SMP yang memiliki sarana prasarana sesuai standar | | | | | | | | | | | |
| | | | | APM SD | | | | | | | | | | | |
| | | | | APM SMP | | | | | | | | | | | |
| | | | | Jumlah siswa baru dari keluarga kurang mampu yang diberikan sarana pendidikan | | | | | | | | | | | |

| PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA | | | | | PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 | | | | | | | | | |
|---|--------|---------------|---|---|---------------------------|----|----|------|----|--|--------------------------------|---|--|--|
| NO | URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM/KEGIATAN | Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output) | KODE | | | | | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | Belanja DAK Fisik Subbidang SD | Jumlah SD yang mendapat Sarana dan Prasarana melalui DAK Fisik (sekolah) | | | | | | | | | | |
| | | | Belanja DAK Fisik Subbidang SMP | Jumlah SMP yang mendapat Sarana dan Prasarana melalui DAK Fisik (sekolah) | | | | | | | | | | |
| | | | Bantuan Sarana Belajar untuk Siswa Baru | Jumlah siswa Baru yang dibantu sarana belajarnya (orang) | 1 | 01 | 02 | 2.01 | 21 | URUSAN PEMERINTAH AN BIDANG PENDIDIKAN | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar | Jumlah siswa Baru yang dibantu sarana belajarnya (orang) |
| | | | | | 1 | 01 | 02 | 2.02 | 32 | URUSAN PEMERINTAH AN BIDANG PENDIDIKAN | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama | |
| | | | Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) sekolah (SD/SMP) | Luas Ruang Kelas SMPN 9 Sawahlunto yang dibangun (m ²) | 1 | 01 | 02 | 2.02 | 02 | URUSAN PEMERINTAH AN BIDANG PENDIDIKAN | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | Penambahan Ruang Kelas Baru | Luas Ruang Kelas SMPN 9 Sawahlunto yang dibangun (m ²) |
| | | | | Luas RKB SDN 25 Balai Batu Sandaran yang dibangun (paket) | 1 | 01 | 02 | 2.01 | 02 | URUSAN PEMERINTAH AN BIDANG PENDIDIKAN | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | Penambahan Ruang Kelas Baru | Luas RKB SDN 25 Balai Batu Sandaran yang dibangun (paket) |
| | | | Pengadaan Meubiler Guru SD dan SMP | Jumlah meja dan kursi Guru SD yang diadakan (buah) | 1 | 01 | 02 | 2.01 | 14 | URUSAN PEMERINTAH AN BIDANG PENDIDIKAN | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | Pengadaan Mebeluer Sekolah | Jumlah meja dan kursi Guru SD yang diadakan (buah) |

| PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA | | | | | PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 | | | | | | | | | |
|---|--------|---------------|---|---|---------------------------|----|----|------|----|--|--------------------------------|---|--|---|
| NO | URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM/KEGIATAN | Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output) | KODE | | | | | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | | Jumlah lemari kelas SD yang diadakan (buah) | 1 | 01 | 02 | 2.01 | 14 | URUSAN PEMERINTAH AN BIDANG PENDIDIKAN | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | Pengadaan Mebeluer Sekolah | Jumlah lemari kelas SD yang diadakan (buah) |
| | | | Pengadaan Meja dan Kursi Siswa | Jumlah meja dan kursi siswa SD yang diadakan (set) | 1 | 01 | 02 | 2.01 | 14 | URUSAN PEMERINTAH AN BIDANG PENDIDIKAN | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | Pengadaan Mebeluer Sekolah | Jumlah meja dan kursi siswa SD yang diadakan (set) |
| | | | | Jumlah meja dan kursi siswa SMP yang diadakan (set) | 1 | 01 | 02 | 2.02 | 25 | URUSAN PEMERINTAH AN BIDANG PENDIDIKAN | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | Pengadaan Mebeluer Sekolah | Jumlah meja dan kursi siswa SMP yang diadakan (set) |
| | | | Pengadaan Drumband untuk Sekolah se Kota Sawahlunto | Jumlah drumband SDIT Islahul Ummah yang diadakan (paket) | 1 | 01 | 02 | 2.01 | 25 | URUSAN PEMERINTAH AN BIDANG PENDIDIKAN | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa | Jumlah drumband SDIT Islahul Ummah yang diadakan (paket) |
| | | | | Jumlah Drumband SDN 19 Santur yang diadakan (paket) | 1 | 01 | 02 | 2.01 | 25 | URUSAN PEMERINTAH AN BIDANG PENDIDIKAN | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa | Jumlah Drumband SDN 19 Santur yang diadakan (paket) |
| | | | Pemasangan Pavling Block halaman Sekolah | Luas Paving Block SDN 06 Lumindai yang dipasang (m ²) | 1 | 01 | 02 | 2.02 | 22 | URUSAN PEMERINTAH AN BIDANG PENDIDIKAN | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | Rehabilitasi Sedang/Berat Fasilitas Parkir | Luas Paving Block SDN 06 Lumindai yang dipasang (m ²) |
| | | | | Luas Paving Block SDN 08 Silungkang Duo yang dipasang (m ²) | 1 | 01 | 02 | 2.02 | 22 | URUSAN PEMERINTAH AN BIDANG PENDIDIKAN | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | Rehabilitasi Sedang/Berat Fasilitas Parkir | Luas Paving Block SDN 08 Silungkang Duo yang dipasang (m ²) |
| | | | | Luas Paving Block SDN 11 Muaro Kalaban yang dibangun (m ²) | 1 | 01 | 02 | 2.02 | 22 | URUSAN PEMERINTAH AN BIDANG PENDIDIKAN | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | Rehabilitasi Sedang/Berat Fasilitas Parkir | Luas Paving Block SDN 11 Muaro Kalaban yang dibangun (m ²) |

| PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA | | | | | PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 | | | | | | | | | |
|---|--------|---------------|--|--|---------------------------|----|----|------|----|--|--------------------------------|---|--|--|
| NO | URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM/KEGIATAN | Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output) | KODE | | | | | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | | Luas pagar dan Paving Block SDN 11 Pondok Batu yang dibangun (m ²) | 1 | 01 | 02 | 2.02 | 22 | URUSAN PEMERINTAH AN BIDANG PENDIDIKAN | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | Rehabilitasi Sedang/Berat Fasilitas Parkir | Luas pagar dan Paving Block SDN 11 Pondok Batu yang dibangun (m ²) |
| | | | | Luas Paving Block SDN 12 Sapan yang dipasang (m ²) | 1 | 01 | 02 | 2.02 | 22 | URUSAN PEMERINTAH AN BIDANG PENDIDIKAN | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | Rehabilitasi Sedang/Berat Fasilitas Parkir | Luas Paving Block SDN 12 Sapan yang dipasang (m ²) |
| | | | | Luas paving Block SDN 15 Kumanih Ateh yang dipasang (m ²) | 1 | 01 | | | | URUSAN PEMERINTAH AN BIDANG PENDIDIKAN | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | Rehabilitasi Sedang/Berat Fasilitas Parkir | Luas paving Block SDN 15 Kumanih Ateh yang dipasang (m ²) |
| | | | | Luas Paving Block SDN 13 Salak yang dipasang (m ²) | 1 | 01 | 02 | 2.02 | 22 | URUSAN PEMERINTAH AN BIDANG PENDIDIKAN | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | Rehabilitasi Sedang/Berat Fasilitas Parkir | Luas Paving Block SDN 13 Salak yang dipasang (m ²) |
| | | | Pembangunan Dam, Pagar, Gerbang SD dan SMP Kota Sawahlunto | Jumlah Pagar, Gerbang dan Cor Halaman SDN 14 Kumbayau yang dibangun (paket) | 1 | 01 | 02 | 201 | 12 | URUSAN PEMERINTAH AN BIDANG PENDIDIKAN | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | Jumlah Pagar, Gerbang dan Cor Halaman SDN 14 Kumbayau yang dibangun (paket) |
| | | | | Jumlah DAM SDN 29 Lumindai yang dibangun (paket) | 1 | 01 | 02 | 201 | 12 | URUSAN PEMERINTAH AN BIDANG PENDIDIKAN | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | Jumlah DAM SDN 29 Lumindai yang dibangun (paket) |
| | | | | Luas Pagar dan Gerbang SMPN 5 Sawahlunto yang dibangun (m ²) | 1 | 01 | 02 | 2.02 | 24 | URUSAN PEMERINTAH AN BIDANG PENDIDIKAN | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | Luas Pagar dan Gerbang SMPN 5 Sawahlunto yang dibangun (m ²) |

| PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA | | | | | PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 | | | | | | | | | |
|---|--------|---------------|------------------|---|---------------------------|----|----|------|----|--|--------------------------------|---|--|---|
| NO | URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM/KEGIATAN | Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output) | KODE | | | | | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | | Panjang DAM, Pagar Samping dan Belakang SMPN 7 Sawahlunto yang dibangun (m) | 1 | 01 | 02 | 2.02 | 24 | URUSAN PEMERINTAH AN BIDANG PENDIDIKAN | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | Panjang DAM, Pagar Samping dan Belakang SMPN 7 Sawahlunto yang dibangun (m) |
| | | | | Panjang DAM SMPN 1 Sawahlunto yang dibangun (m) | 1 | 01 | 02 | 2.02 | 24 | URUSAN PEMERINTAH AN BIDANG PENDIDIKAN | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | Panjang DAM SMPN 1 Sawahlunto yang dibangun (m) |
| | | | | Panjang Pagar SDN 03 Tumpuk Tengah yang dibangun(m) | 1 | 01 | 02 | 201 | 12 | URUSAN PEMERINTAH AN BIDANG PENDIDIKAN | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | Panjang Pagar SDN 03 Tumpuk Tengah yang dibangun(m) |
| | | | | Luas DAM SDN 08 Kumbayau yang diperluas (m ²) | 1 | 01 | 02 | 201 | 12 | URUSAN PEMERINTAH AN BIDANG PENDIDIKAN | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | Luas DAM SDN 08 Kumbayau yang diperluas (m ²) |
| | | | | Panjang Pagar samping dan belakang SDN 18 Batu Kualii yang dibangun (m) | 1 | 01 | 02 | 201 | 12 | URUSAN PEMERINTAH AN BIDANG PENDIDIKAN | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | Panjang Pagar samping dan belakang SDN 18 Batu Kualii yang dibangun (m) |
| | | | | Panjang Pagar dan Gerbang SD 12 Talawi Mudik yang dibangun (m) | 1 | 01 | 02 | 201 | 12 | URUSAN PEMERINTAH AN BIDANG PENDIDIKAN | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | Panjang Pagar dan Gerbang SD 12 Talawi Mudik yang dibangun (m) |
| | | | | Panjang Pagar dan Gerbang SD 07 Talawi Hilir yang dibangun(m) | 1 | 01 | 02 | 201 | 12 | URUSAN PEMERINTAH AN BIDANG PENDIDIKAN | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | Panjang Pagar dan Gerbang SD 07 Talawi Hilir yang dibangun(m) |
| | | | | Luas DAM dan Pagar SDN 05 Kolok Mudik yang dibangun (m ²) | 1 | 01 | 02 | 201 | 12 | URUSAN PEMERINTAH AN BIDANG PENDIDIKAN | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | Luas DAM dan Pagar SDN 05 Kolok Mudik yang dibangun (m ²) |

| PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA | | | | | PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 | | | | | | | | | |
|---|--------|---------------|------------------|---|---------------------------|----|----|-----|----|--|--------------------------------|--------------------------------------|--|---|
| NO | URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM/KEGIATAN | Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output) | KODE | | | | | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | | Luas Pagar SDN 07 Talago Gunung yang dibangun (m ²) | 1 | 01 | 02 | 201 | 12 | URUSAN PEMERINTAH AN BIDANG PENDIDIKAN | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | Luas Pagar SDN 07 Talago Gunung yang dibangun (m ²) |
| | | | | Luas DAM dan Pagar SDN 17 Air Dingin yang dibangun (m ²) | 1 | 01 | 02 | 201 | 12 | URUSAN PEMERINTAH AN BIDANG PENDIDIKAN | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | Luas DAM dan Pagar SDN 17 Air Dingin yang dibangun (m ²) |
| | | | | Panjang Pagar SDN 09 Muaro Kalaban yang dibangun (m) | 1 | 01 | 02 | 201 | 12 | URUSAN PEMERINTAH AN BIDANG PENDIDIKAN | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | Panjang Pagar SDN 09 Muaro Kalaban yang dibangun (m) |
| | | | | Luas DAM SDN 15 Lumindai yang dibangun (m ²) | 1 | 01 | 02 | 201 | 12 | URUSAN PEMERINTAH AN BIDANG PENDIDIKAN | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | Luas DAM SDN 15 Lumindai yang dibangun (m ²) |
| | | | | Luas Pagar SDN 04 Rantih yang dibangun (m ²) | 1 | 01 | 02 | 201 | 12 | URUSAN PEMERINTAH AN BIDANG PENDIDIKAN | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | Luas Pagar SDN 04 Rantih yang dibangun (m ²) |
| | | | | Panjang Pagar SDN 13 Silungkang Oso yang dibangun (m) | 1 | 01 | 02 | 201 | 12 | URUSAN PEMERINTAH AN BIDANG PENDIDIKAN | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | Panjang Pagar SDN 13 Silungkang Oso yang dibangun (m) |
| | | | | Luas Pagar dan DAM SDN 15 Lunto Timur yang dibangun (m ²) | 1 | 01 | 02 | 201 | 12 | URUSAN PEMERINTAH AN BIDANG PENDIDIKAN | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | Luas Pagar dan DAM SDN 15 Lunto Timur yang dibangun (m ²) |
| | | | | Panjang Pagar dan gerbang SDN 03 Lubang Panjang yang dibangun(m) | 1 | 01 | 02 | 201 | 12 | URUSAN PEMERINTAH AN BIDANG PENDIDIKAN | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | Panjang Pagar dan gerbang SDN 03 Lubang Panjang yang dibangun(m) |
| | | | | Luas Musholla SDN 03 Aur Tajungkang yang dibangun (m ²) | 1 | 01 | 02 | 201 | 12 | URUSAN PEMERINTAH AN BIDANG PENDIDIKAN | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | Luas Musholla SDN 03 Aur Tajungkang yang dibangun (m ²) |

| PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA | | | | | PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 | | | | | | | | | |
|---|--------|---------------|------------------|--|---------------------------|----|----|-----|----|--|--------------------------------|--------------------------------------|--|--|
| NO | URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM/KEGIATAN | Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output) | KODE | | | | | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | | Panjang Pagar dan Gerbang SDN 12 Sapan yang dibangun (m) | 1 | 01 | 02 | 201 | 12 | URUSAN PEMERINTAH AN BIDANG PENDIDIKAN | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | Panjang Pagar dan Gerbang SDN 12 Sapan yang dibangun (m) |
| | | | | Panjang Pagar dan gerbang SDN 28 Santur yang dibangun (m) | 1 | 01 | 02 | 201 | 12 | URUSAN PEMERINTAH AN BIDANG PENDIDIKAN | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | Panjang Pagar dan gerbang SDN 28 Santur yang dibangun (m) |
| | | | | Luas Pagar dan DAM SDN 11 Kampung Surian yang dibangun (m ²) | 1 | 01 | 02 | 201 | 12 | URUSAN PEMERINTAH AN BIDANG PENDIDIKAN | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | Luas Pagar dan DAM SDN 11 Kampung Surian yang dibangun (m ²) |
| | | | | Panjang Pagar Belakang SDN 09 Talawi Hilir yang dibangun (m) | 1 | 01 | 02 | 201 | 12 | URUSAN PEMERINTAH AN BIDANG PENDIDIKAN | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | Panjang Pagar Belakang SDN 09 Talawi Hilir yang dibangun (m) |
| | | | | Luas Pagar dan Gapura SDN 04 Silungkang Tigo yang dibangun (m ²) | 1 | 01 | 02 | 201 | 12 | URUSAN PEMERINTAH AN BIDANG PENDIDIKAN | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | Luas Pagar dan Gapura SDN 04 Silungkang Tigo yang dibangun (m ²) |
| | | | | Luas agar dan Gerbang SDN 11 Kampung Surian yang dibuat (m ²) | 1 | 01 | 02 | 201 | 12 | URUSAN PEMERINTAH AN BIDANG PENDIDIKAN | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | Luas agar dan Gerbang SDN 11 Kampung Surian yang dibuat (m ²) |
| | | | | Panjang Pagar belakang SDN 27 Talago Gunung yang dibuat (m) | 1 | 01 | 02 | 201 | 12 | URUSAN PEMERINTAH AN BIDANG PENDIDIKAN | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | Panjang Pagar belakang SDN 27 Talago Gunung yang dibuat (m) |
| | | | | Luas DAM SDN 16 Sikalang yang dibangun (m ²) | 1 | 01 | 02 | 201 | 12 | URUSAN PEMERINTAH AN BIDANG PENDIDIKAN | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | Luas DAM SDN 16 Sikalang yang dibangun (m ²) |

| PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA | | | | | PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 | | | | | | | | | |
|---|--------|---------------|---|---|---------------------------|----|----|-----|----|--|--------------------------------|--------------------------------------|--|---|
| NO | URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM/KEGIATAN | Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output) | KODE | | | | | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | Pembangunan dan atau Rehabilitasi Musholla SD dan SMP Kota Sawahlunto | Luas Musholla SDN 18 Batu Kualiyang dibangun (m ²) | 1 | 01 | 02 | 201 | 12 | URUSAN PEMERINTAH AN BIDANG PENDIDIKAN | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | Luas Musholla SDN 18 Batu Kualiyang dibangun (m ²) |
| | | | | Luas Musholla SDN 01 Talawi Mudik yang rehab (m ²) | 1 | 01 | 02 | 201 | 12 | URUSAN PEMERINTAH AN BIDANG PENDIDIKAN | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | Luas Musholla SDN 01 Talawi Mudik yang rehab (m ²) |
| | | | | Luas Musholla SDN 08 Silungkang Duo yang dibangun (m ²) | 1 | 01 | 02 | 201 | 12 | URUSAN PEMERINTAH AN BIDANG PENDIDIKAN | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | Luas Musholla SDN 08 Silungkang Duo yang dibangun (m ²) |
| | | | | Luas Musholla SDN 17 Air Dingin yang dibangun (m ²) | 1 | 01 | 02 | 201 | 12 | URUSAN PEMERINTAH AN BIDANG PENDIDIKAN | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | Luas Musholla SDN 17 Air Dingin yang dibangun (m ²) |
| | | | | Luas Musholla SDN 05 Kolok Mudik yang dibangun (m ²) | 1 | 01 | 02 | 201 | 12 | URUSAN PEMERINTAH AN BIDANG PENDIDIKAN | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | Luas Musholla SDN 05 Kolok Mudik yang dibangun (m ²) |
| | | | | Luas Musholla SDN 07 Talago Gunung yang dibangun (m ²) | 1 | 01 | 02 | 201 | 12 | URUSAN PEMERINTAH AN BIDANG PENDIDIKAN | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | Luas Musholla SDN 07 Talago Gunung yang dibangun (m ²) |
| | | | | Luas Musholla SDN 11 Kampung Surian yang dibangun (m ²) | 1 | 01 | 02 | 201 | 12 | URUSAN PEMERINTAH AN BIDANG PENDIDIKAN | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | Luas Musholla SDN 11 Kampung Surian yang dibangun (m ²) |

| PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA | | | | | PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 | | | | | | | | | |
|---|--------|---------------|--|--|---------------------------|----|----|------|----|--|--------------------------------|---|---|--|
| NO | URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM/KEGIATAN | Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output) | KODE | | | | | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | Pembuatan dan atau Rehab Dinas Rumah Pegawai Sekolah | Luas Rumah Dinas SDN 05 Kubang Sirakuk Bawah yang direhab (m ²) | 1 | 01 | 02 | 201 | 13 | URUSAN PEMERINTAH AN BIDANG PENDIDIKAN | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah | Luas Rumah Dinas SDN 05 Kubang Sirakuk Bawah yang direhab (m ²) |
| | | | | Luas Rumah Dinas SDN 06 Lumindai yang dibangun (m ²) | 1 | 01 | 02 | 201 | 13 | URUSAN PEMERINTAH AN BIDANG PENDIDIKAN | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah | Luas Rumah Dinas SDN 06 Lumindai yang dibangun (m ²) |
| | | | Pembangunan dan atau rehab Kantin Sehat Sekolah | Luas Kantin Sehat SDN 02 Talawi Hilir yang dibangun (m ²) | 1 | 01 | 02 | 2.02 | 23 | URUSAN PEMERINTAH AN BIDANG PENDIDIKAN | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | Rehabilitasi Sedang/Berat Kantin Sekolah | Luas Kantin Sehat SDN 02 Talawi Hilir yang dibangun (m ²) |
| | | | Pembangunan Asrama Sekolah | Luas Asrama Putri SMPN 2 Sawahlunto tahap II yang dibangun (m ²) | 1 | 01 | 02 | 2.02 | 08 | URUSAN PEMERINTAH AN BIDANG PENDIDIKAN | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | Pembangunan Asrama Sekolah | Luas Asrama Putri SMPN 2 Sawahlunto tahap II yang dibangun (m ²) |
| | | | | Luas Asrama Putra SMPN 2 Sawahlunto tahap I yang dibangun (m ²) | 1 | 01 | 02 | 2.02 | 08 | URUSAN PEMERINTAH AN BIDANG PENDIDIKAN | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | Pembangunan Asrama Sekolah | Luas Asrama Putra SMPN 2 Sawahlunto tahap I yang dibangun (m ²) |
| | | | Pemasangan Lampu Penerangan Lingkungan Asrama / Sekolah SMP 2 Sawahlunto | Jumlah Lampu Penerangan Lingkungan Asrama / Sekolah SMP 2 Sawahlunto yang dipasang (paket) | 1 | 01 | 02 | 2.02 | 12 | URUSAN PEMERINTAH AN BIDANG PENDIDIKAN | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | Jumlah Lampu Penerangan Lingkungan Asrama / Sekolah SMP 2 Sawahlunto yang dipasang (paket) |

| PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA | | | | | PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 | | | | | | | | | |
|---|--------|---------------|--|---|---------------------------|----|----|------|----|--|--------------------------------|---|--|---|
| NO | URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM/KEGIATAN | Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output) | KODE | | | | | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | Pemasangan CCTV | Jumlah CCTV SMPN 2 Sawahlunto yang dibangun (paket) | 1 | 01 | 02 | 2.02 | 12 | URUSAN PEMERINTAH AN BIDANG PENDIDIKAN | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | Jumlah CCTV SMPN 2 Sawahlunto yang dibangun (paket) |
| | | | Pemasangan Tralis Kantor dan Ruang Kelas | Jumlah Tralis Kantor dan Ruang Kelas yang dipasang (paket) | 1 | 01 | 02 | 2.02 | 12 | URUSAN PEMERINTAH AN BIDANG PENDIDIKAN | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | Jumlah Tralis Kantor dan Ruang Kelas yang dipasang (paket) |
| | | | Pembangunan Bak Penampungan air bersih | Luas Bak Penampungan air bersih yang dibangun (m ²) | 1 | 01 | 02 | 2.02 | 12 | URUSAN PEMERINTAH AN BIDANG PENDIDIKAN | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | Luas Bak Penampungan air bersih yang dibangun (m ²) |
| | | | Pemasangan Folding gate dan Tralis di Sekolah | Jumlah Folding gate dan Tralis di SDN 01 Talawi Mudik yang dipasang (paket) | 1 | 01 | 02 | 201 | 12 | URUSAN PEMERINTAH AN BIDANG PENDIDIKAN | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | Jumlah Folding gate dan Tralis di SDN 01 Talawi Mudik yang dipasang (paket) |
| | | | Program Peningkatan Kompetensi dan Kreativitas Siswa | Jumlah siswa yang menerima penghargaan | | | | | | | | | | |
| | | | | Jumlah mahasiswa yang menerima penghargaan | | | | | | | | | | |
| | | | Melaksanakan Center MIPA | jumlah siswa yang mengikuti center MIPA (orang) | 1 | 01 | 02 | 2.02 | 38 | URUSAN PEMERINTAH AN BIDANG PENDIDIKAN | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa | jumlah siswa yang mengikuti center MIPA (orang) |
| | | | Lomba Kreativitas Seni Siswa (FLS2SN) SD dan SMP | jumlah sekolah yang mengikuti lomba Tk. Kota | 1 | 01 | 02 | 2.02 | 38 | URUSAN PEMERINTAH AN BIDANG PENDIDIKAN | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa | jumlah sekolah yang mengikuti lomba Tk. Kota |

| PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA | | | | | PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 | | | | | | | | | |
|---|--------|---------------|---|--|---------------------------|----|----|------|----|--|--------------------------------|---|--|--|
| NO | URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM/KEGIATAN | Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output) | KODE | | | | | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | | | 1 | 01 | 02 | 2.01 | 25 | URUSAN PEMERINTAH AN BIDANG PENDIDIKAN | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | | | |
| | | | Peningkatan Kompetensi Siswa dan Mahasiswa Berprestasi | Jumlah siswa dan mahasiswa yang diberi bantuan (orang) | 1 | 01 | 02 | 2.02 | 32 | URUSAN PEMERINTAH AN BIDANG PENDIDIKAN | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama | Jumlah siswa dan mahasiswa yang diberi bantuan (orang) |
| | | | Kompetisi Olahraga Siswa Nasional (KOSN) SD dan SMP | jumlah cabang olahraga KOSN yang diikuti (cabang) | 1 | 01 | 02 | 2.02 | 38 | URUSAN PEMERINTAH AN BIDANG PENDIDIKAN | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa | jumlah cabang olahraga KOSN yang diikuti (cabang) |
| | | | | | 1 | 01 | 02 | 2.01 | 25 | URUSAN PEMERINTAH AN BIDANG PENDIDIKAN | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa | |
| | | | Pelaksanaan Gala Siswa Indonesia | jumlah sekolah yang mengikuti gala siswa (sekolah) | 1 | 01 | 02 | 2.02 | 38 | URUSAN PEMERINTAH AN BIDANG PENDIDIKAN | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa | jumlah sekolah yang mengikuti gala siswa (sekolah) |
| | | | | | 1 | 01 | 02 | 2.01 | 25 | URUSAN PEMERINTAH AN BIDANG PENDIDIKAN | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa | |
| | | | Melaksanakan Fasilitasi club olimpiade dan lomba Kompetisi Sains Nasional (KSN) siswa SD dan SMP. | jumlah club olimpiade yang difasilitasi | 1 | 01 | 02 | 2.02 | 38 | URUSAN PEMERINTAH AN BIDANG PENDIDIKAN | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa | jumlah club olimpiade yang difasilitasi |

| PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA | | | | | PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 | | | | | | | | | |
|---|--------|---------------|--|---|---------------------------|----|----|------|----|--|--------------------------------|---|---|---|
| NO | URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM/KEGIATAN | Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output) | KODE | | | | | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | | | 1 | 01 | 02 | 2.01 | 25 | URUSAN PEMERINTAH AN BIDANG PENDIDIKAN | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa | |
| | | | Program Pendidikan Berkarakter | Persentase lulusan SD Hafizh Al-qur'an Juz 30 | | | | | | | | | | |
| | | | | Persentase satuan Pendidikan yang melaksanakan pendidikan berkarakter (%) | | | | | | | | | | |
| | | | | Kasus kenakalan remaja | | | | | | | | | | |
| | | | Fasilitasi pendidikan berkarakter untuk Siswa SD/SMP | Jumlah siswa yang difasilitasi (orang) | | | | | | | | | | |
| | | | Pelatih Guru Tahfidz Al-Qur'an SD/SMP | Jumlah Guru Tahfidz yang dilatih (orang) | 1 | 01 | 02 | 2.01 | 26 | URUSAN PEMERINTAH AN BIDANG PENDIDIKAN | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar | Jumlah Guru Tahfidz yang dilatih (orang) |
| | | | | | 1 | 01 | 02 | 2.02 | 39 | URUSAN PEMERINTAH AN BIDANG PENDIDIKAN | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | |

| PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA | | | | | PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 | | | | | | | | | |
|---|--------|---------------|---|--|---------------------------|----|----|------|----|---------------------------------------|--------------------------------|---|---|--|
| NO | URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM/KEGIATAN | Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output) | KODE | | | | | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | Daurah Tahfidz Al-Quran SD/SMP | Jumlah peserta yang mengikuti daurah tahfidz Al-quran (orang) | 1 | 01 | 02 | 2.02 | 38 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa | Jumlah peserta yang mengikuti daurah tahfidz Al-quran (orang) |
| | | | Pengujian Tahfidz Al-Quran SD/SMP | Jumlah peserta yang mengikuti pengujian tahfidz Al-quran (orang) | 1 | 01 | 02 | 2.02 | 38 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa | Jumlah peserta yang mengikuti pengujian tahfidz Al-quran (orang) |
| | | | Pelatihan pendidikan berkarakter untuk Guru SD/SLTP | Jumlah peserta yang mengikuti pendidikan karakter (orang) | 1 | 01 | 02 | 2.01 | 26 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar | Jumlah peserta yang mengikuti pendidikan karakter (orang) |
| | | | | | 1 | 01 | 02 | 2.02 | 39 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | |

DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

| PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA | | | | | PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 | | | | | | | | | |
|---|--------|--------------------------------------|--|--|---------------------------|----|----|------|----|--------------------------------------|--|-------------------|--|--|
| NO | URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM/KEGIATAN | Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output) | KODE | | | | | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | Wajib | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output) | | | | | | | | | | |
| | Wajib | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN | Penyediaan jasa surat menyurat | Tersedianya meterai (lembar), pengiriman yang terfasilitasi | 1 | 02 | 01 | 2,03 | 01 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Administrasi Umum | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Tersedianya meterai (lembar), pengiriman yang terfasilitasi |
| | | | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | Terlaksananya pembayaran jasa komunikasi sumber daya air dan listrik (bulan) | 1 | 02 | 01 | 2,03 | 02 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Administrasi Umum | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Terlaksananya pembayaran jasa komunikasi sumber daya air dan listrik (bulan) |
| | | | Penyediaan jasa kebersihan kantor | Tersedianya alat kebersihan kantor (bulan) dan iuran restribusi kebersihan/sedot WC (triwulan) | 1 | 02 | 01 | 2,03 | 08 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Administrasi Umum | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | Tersedianya alat kebersihan kantor (bulan) dan iuran restribusi kebersihan/sedot WC (triwulan) |
| | | | Penyediaan alat tulis kantor | Tersedianya ATK (bulan) | 1 | 02 | 01 | 2,03 | 10 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Administrasi Umum | Penyediaan Alat Tulis Kantor | Tersedianya ATK (bulan) |
| | | | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Tersedianya biaya fotocopy, barang cetakan dan penjilidan (bulan) | 1 | 02 | 01 | 2,03 | 11 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Administrasi Umum | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Tersedianya biaya fotocopy, barang cetakan dan penjilidan (bulan) |
| | | | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | Tersedianya komponen kelistrikan (bulan) | 1 | 02 | 01 | 2,03 | 12 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Administrasi Umum | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Tersedianya komponen kelistrikan (bulan) |

| PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA | | | | | PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 | | | | | | | | | |
|---|--------|---------------|---|--|---------------------------|----|----|------|----|--------------------------------------|--|-----------------------|--|--|
| NO | URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM/KEGIATAN | Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output) | KODE | | | | | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | Penyediaan bahan bacaan dan perundang-undangan | Tersedianya surat kabar (jenis) | 1 | 02 | 01 | 2,03 | 15 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Administrasi Umum | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | Tersedianya surat kabar (jenis) |
| | | | | Buku per UU-an yang diadakan (buku) | 1 | 02 | 01 | 2,03 | 15 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Administrasi Umum | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | Buku per UU-an yang diadakan (buku) |
| | | | Penyediaan bahan logistik kantor | Tersedianya gas elpigi (bulan) | 1 | 02 | 01 | 2,03 | 14 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Administrasi Umum | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Tersedianya gas elpigi (bulan) |
| | | | | Tersedianya oksigen (bulan) | 1 | 02 | 01 | 2,03 | 16 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Administrasi Umum | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Tersedianya oksigen (bulan) |
| | | | Penyediaan makan minum | Ketersediaan makanan dan minuman rapat/pertemuan (bulan) | 1 | 02 | 01 | 2,03 | 17 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Administrasi Umum | Penyediaan Makanan dan Minuman | Ketersediaan makanan dan minuman rapat/pertemuan (bulan) |
| | | | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah | Tersedianya biaya perjalanan dinas luar kota dan luar propinsi (bulan) | 1 | 02 | 01 | 2,03 | 18 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Administrasi Umum | Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah | Tersedianya biaya perjalanan dinas luar kota dan luar propinsi (bulan) |
| | | | Penyediaan jasa pelayanan pegawai non PNS | Dibayarkannya honor pegawai kontrak dan honorer (bulan) | 1 | 02 | 01 | 2,02 | 01 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Administrasi Keuangan | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Dibayarkannya honor pegawai kontrak dan honorer (bulan) |

| PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA | | | | | PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 | | | | | | | | | |
|---|--------|---------------|---|--|---------------------------|----|----|------|----|--------------------------------------|--|-----------------------|--|---|
| NO | URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM/KEGIATAN | Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output) | KODE | | | | | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | Penatausahaan keuangan dan barang | Dibayarkannya honor penatausahaan keuangan dan barang (bulan) | 1 | 02 | 01 | 2,02 | 01 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Administrasi Keuangan | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Dibayarkannya honor penatausahaan keuangan dan barang (bulan) |
| | | | Penyediaan dokumentasi dan dekorasi | Terlaksananya pembuatan dokumentasi dan dekorasi kegiatan (bulan) | | | | | | | | | | |
| | | | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Tersedianya sarana prasarana yang memadai untuk menunjang pelaksanaan kegiatan | | | | | | | | | | |
| | | | Pengadaan perlengkapan gedung kantor | Jumlah barang yang diadakan (paket) | 1 | 02 | 01 | 2,03 | 22 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Administrasi Umum | Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor | Jumlah barang yang diadakan (paket) |
| | | | Pengadaan peralatan gedung kantor | Jumlah barang yang diadakan (paket) | 1 | 02 | 01 | 2,03 | 24 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Administrasi Umum | Pengadaan Peralatan Gedung Kantor | Jumlah barang yang diadakan (paket) |
| | | | Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas | Terpeliharanya rumah dinas (unit) | 1 | 02 | 01 | 2,03 | 27 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Administrasi Umum | Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas | Terpeliharanya rumah dinas (unit) |
| | | | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | Terpeliharanya gedung kantor (paket) | 1 | 02 | 01 | 2,03 | 28 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Administrasi Umum | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | Terpeliharanya gedung kantor (paket) |

| PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA | | | | | PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 | | | | | | | | | |
|---|--------|---------------|---|--|---------------------------|----|----|------|-----|--------------------------------------|--|--|--|--|
| NO | URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM/KEGIATAN | Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output) | KODE | | | | | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 2 | | | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional | Terpeliharanya kendaraan dinas (unit) | 1 | 02 | 01 | 2,03 | 30 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Administrasi Umum | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | Terpeliharanya kendaraan dinas (unit) |
| | | | Pemeliharaan rutin berkala perlengkapan gedung kantor | Jumlah perlengkapan kantor yang dipelihara (bulan) | 1 | 02 | 01 | 2,03 | 32 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Administrasi Umum | Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor | Jumlah perlengkapan kantor yang dipelihara (bulan) |
| 3 | | | Pemeliharaan rutin berkala peralatan gedung kantor | Terpeliharanya peralatan kantor (unit) | 1 | 02 | 01 | 2,03 | 34 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Administrasi Umum | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor | Terpeliharanya peralatan kantor (unit) |
| | | | Pembangunan/rehabilitasi sarana kesehatan/gedung kantor dan rumah dinas | Tersedianya sarana kesehatan yang mudah dijangkau, aman dan nyaman (3) | 1 | 02 | 01 | 2,03 | 27 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Administrasi Umum | Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas | Tersedianya sarana kesehatan yang mudah dijangkau, aman dan nyaman (3) |
| | | | | Jumlah sarana kesehatan direhab | | | | | | | | | | |
| | | | Program Peningkatan Disiplin Aparatur | Meningkatnya kinerja aparatur | | | | | | | | | | |
| | | | Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu | Jumlah pakaian khusus yang diadakan (stel) | 1 | 02 | 01 | 2,04 | 0,5 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumberdaya Aparatur | Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu | Jumlah pakaian khusus yang diadakan (stel) |
| | | | Pelaksanaan Kegiatan Operasional Rutin Puskesmas | Tersedianya peralatan dan sarana pendukung pelayanan yang berkualitas | | | | | | | | | | |

| PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA | | | | | PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 | | | | | | | | | |
|---|--------|---------------|---|--|---------------------------|----|----|------|----|--------------------------------------|---|--|---------------------------------|--|
| NO | URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM/KEGIATAN | Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output) | KODE | | | | | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | Biaya operasional rutin Pusk.Talawi (rawatan) | Terlaksananya kegiatan operasional puskesmas dengan baik (bulan) | 1 | 02 | 02 | 2,02 | 33 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Operasional Pelayanan Puskesmas | Terlaksananya kegiatan operasional puskesmas dengan baik (bulan) |
| | | | Biaya operasional rutin Pusk.Kolok | Terlaksananya kegiatan operasional puskesmas dengan baik (bulan) | 1 | 02 | 02 | 2,02 | 33 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Operasional Pelayanan Puskesmas | Terlaksananya kegiatan operasional puskesmas dengan baik (bulan) |
| | | | Biaya operasional rutin Pusk.Sei Durian | Terlaksananya kegiatan operasional puskesmas dengan baik (bulan) | 1 | 02 | 02 | 2,02 | 33 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Operasional Pelayanan Puskesmas | Terlaksananya kegiatan operasional puskesmas dengan baik (bulan) |
| | | | Biaya operasional rutin Pusk.Kp.Teleng | Terlaksananya kegiatan operasional puskesmas dengan baik (bulan) | 1 | 02 | 02 | 2,02 | 33 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Operasional Pelayanan Puskesmas | Terlaksananya kegiatan operasional puskesmas dengan baik (bulan) |

| PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA | | | | | PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 | | | | | | | | | |
|---|--------|---------------|---|--|---------------------------|----|----|------|----|--------------------------------------|---|--|---|--|
| NO | URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM/KEGIATAN | Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output) | KODE | | | | | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | Biaya operasional rutin Pusk.Lunto | Terlaksananya kegiatan operasional puskesmas dengan baik (bulan) | 1 | 02 | 02 | 2,02 | 33 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Operasional Pelayanan Puskesmas | Terlaksananya kegiatan operasional puskesmas dengan baik (bulan) |
| | | | Biaya operasional rutin Pusk.Silungkang (rawatan) | Terlaksananya kegiatan operasional puskesmas dengan baik (bulan) | 1 | 02 | 02 | 2,02 | 33 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Operasional Pelayanan Puskesmas | Terlaksananya kegiatan operasional puskesmas dengan baik (bulan) |
| | | | Biaya operasional rutin Instalasi farmasi kota | Terlaksananya kegiatan operasional instalasi farmasi dengan baik (bulan) | | | | | | | | | | |
| | | | Program Perbaikan Gizi Masyarakat | Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan | | | | | | | | | | |
| | | | Penatalaksanaan ibu hamil KEK dan Balita KEP | Persentase ibu hamil KEK dan Balita KEP yang dimonitoring | 1 | 02 | 02 | 2,02 | 01 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | Persentase ibu hamil KEK dan Balita KEP yang dimonitoring |

| PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA | | | | | PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 | | | | | | | | | |
|---|--------|---------------|--|--|---------------------------|----|----|------|----|--------------------------------------|---|--|--|---|
| NO | URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM/KEGIATAN | Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output) | KODE | | | | | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | Pembentukan Pos Gizi | Jumlah Pos Gizi yang dibentuk | 1 | 02 | 02 | 2,02 | 15 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | Jumlah Pos Gizi yang dibentuk |
| | | | Orientasi dan Evaluasi e-PPGBM | Persentase hasil entry penimbangan massal melalui e-PPGBM | | | | | | | | | | |
| | | | Pelaksanaan Hari Gizi Nasional (HGN) | Jumlah kegiatan yang dilaksanakan (kali) | | | | | | | | | | |
| | | | Program Peningkatan pelayanan kesehatan anak balita | Persentase balita yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar | | | | | | | | | | |
| | | | Rehabilitasi Medik Berbasis Masyarakat untuk anak CP dan ABK | Anak CP dan ABK yang mendapat pelayanan kesehatan (%) | 1 | 02 | 05 | 2,03 | 01 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN | Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM) | Bimbingan Teknis Dan Supervisi PengembanganDan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber | Anak CP dan ABK yang mendapat pelayanan kesehatan (%) |
| | | | Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia | Persentase lansia yang mendapatkan pelayanan kesehatan (%) | | | | | | | | | | |

| PERMENDAGRI 13/RPJM/RENSTRA/RKPD/RENJA | | | | | PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 | | | | | | | | | |
|--|--------|---------------|--|--|---------------------------|----|----|------|----|--------------------------------------|---|--|--|--|
| NO | URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM/KEGIATAN | Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output) | KODE | | | | | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | Pembinaan dan pelayanan kesehatan lansia | Persentase lansia yang berkunjung ke fasilitas kesehatan | 1 | 02 | 05 | 2,02 | 07 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut | Persentase lansia yang berkunjung ke fasilitas kesehatan |
| | | | Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak | Angka kematian balita per 1000 | | | | | | | | | | |
| | | | Penatalaksanaan dan penanggulangan kejadian luar biasa pada ibu dan bayi | Komplikasi kebidanan yang ditangani (%) | 1 | 02 | 05 | 2,02 | 01 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | Komplikasi kebidanan yang ditangani (%) |
| | | | | | 1 | 02 | 05 | 2,02 | 02 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin | Komplikasi kebidanan yang ditangani (%) |

| PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA | | | | | PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 | | | | | | | | | |
|---|--------|---------------|--|---|---------------------------|----|----|------|----|--------------------------------------|---|---|--|---|
| NO | URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM/KEGIATAN | Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output) | KODE | | | | | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | | | 1 | 02 | 05 | 2,02 | 03 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir | Komplikasi kebidanan yang ditangani (%) |
| | | | Review Maternal Perinatal | Terlaksananya kegiatan review maternal dan perinatal (kali) | | | | | | | | | | |
| | | | Skrining Hipotiroid Kongenital | bayi yang dilaksanakan Skrining Hipotiroid Kongenital (%) | | | | | | | | | | |
| | | | Fasilitasi Pelatihan APN bagi Dokter dan Bidan | Jumlah dokter dan bidan terlatih APN sesuai standar | 1 | 02 | 05 | 203 | 2 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN | PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN | Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM Manusia di Wilayah Kabupaten/Kota | Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar | Jumlah dokter dan bidan terlatih APN sesuai standar |
| | | | Pertemuan Koordinasi program kesga gizi | Terlaksananya kegiatan pertemuan koordinasi program kesga gizi (kali) | | | | | | | | | | |
| | | | Bantuan Jaminan Persalinan (DAK NON FISIK) | Ibu hamil yang tidak mempunyai jaminan kesehatan mendapat jampersal (%) | | | | | | | | | | |

| PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA | | | | | PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 | | | | | | | | | |
|---|--------|---------------|---|---|---------------------------|----|----|------|----|--------------------------------------|---|--|--|---|
| NO | URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM/KEGIATAN | Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output) | KODE | | | | | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular | Persentase Penderita TBC yang mendapat pelayanan TBC sesuai standar | | | | | | | | | | |
| | | | Pengendalian Penyakit TB | Case Detection Rate (CDR) TB | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 11 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | Case Detection Rate (CDR) TB |
| | | | Pengendalian Faktor Resiko dan peanggulangan Penyakit HIV/AIDS | persentase Kasus HIV/AIDS yang mendapatkan ARV | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 12 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV | persentase Kasus HIV/AIDS yang mendapatkan ARV |
| | | | Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Disebabkan Vektor dan Zoonosis | Persentase kasus-kasus penyakit tular vektor dan zoonosis yang tertanggulangi | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 25 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | Tertanggulangnya kasus-kasus penyakit tular vektor dan zoonosis |
| | | | | Cakupan POPM Kecacingan (%) | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 36 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) | Cakupan POPM Kecacingan |

| PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA | | | | | PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 | | | | | | | | | |
|---|--------|---------------|------------------|---|---------------------------|----|----|------|----|--------------------------------------|---|--|--|---|
| NO | URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM/KEGIATAN | Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output) | KODE | | | | | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | | Nilai Tolerir Positif Filariasis pada saat Transmission Assessment Survey (TAS) Filariasis ke 3 (Final TAS) | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 36 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) | Nilai Tolerir Positif Filariasis pada saat Transmission Assessment Survey (TAS) Filariasis ke 3 (Final TAS) |
| | | | | Persentase kasus gigitan HPR yang dilakukan pencucian luka sesuai protap | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 36 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) | Persentase kasus gigitan HPR yang dilakukan pencucian luka sesuai protap |
| | | | | API malaria | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 37 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah | API malaria |
| | | | | Insiden Rate penyakit DBD per 100.000 penduduk | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 37 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah | Insiden Rate penyakit DBD per 100.000 penduduk |

| PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA | | | | | PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 | | | | | | | | | |
|---|--------|---------------|---|--|---------------------------|----|----|------|----|--------------------------------------|---|--|---|--|
| NO | URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM/KEGIATAN | Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output) | KODE | | | | | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | Pengendalian Penyakit Kusta dan frambusia | kasus baru kusta dan Frambusia yang menyelesaikan pengobatan tepat waktu | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 37 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah | kasus baru kusta dan Frambusia yang menyelesaikan pengobatan tepat waktu |
| | | | Kegiatan pelayanan vaksinasir bagi balita dan anak sekolah melalui | Persentase anak usia 0 sampai 11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap (IDL) | | | | | | | | | | |
| | | | Peningkatan Surveilans Epidemiologi dan Penanggulangan Wabah/KLB | Persentase tertanggulangnya KLB/Wabah penyakit menular | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 37 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah | Persentase tertanggulangnya KLB/Wabah penyakit menular |
| | | | Fasilitasi Komisi Penanggulangan HIV/AIDS (KPA) | Laporan Per Tahun | | | | | | | | | | |
| | | | Sosialisasi Peningkatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit | Jumlah peserta yang mendapatkan pelatihan (Orang) | | | | | | | | | | |

| PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA | | | | | PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 | | | | | | | | | |
|---|--------|---------------|--|---|---------------------------|----|----|------|----|--------------------------------------|---|--|--|---|
| NO | URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM/KEGIATAN | Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output) | KODE | | | | | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular (PTM) | Persentase Penderita Diabetes yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai Standar | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 09 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus | Persentase Penderita Diabetes yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai Standar |
| | | | | Persentase Penderita hipertensi yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai Standar | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 08 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi | Persentase Penderita hipertensi yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai Standar |
| | | | | Persentase pasien gangguan jiwa (ODGJ) berat yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai Standar | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 21 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) | Persentase pasien gangguan jiwa (ODGJ) berat yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai Standar |
| | | | | Persentase Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar melakukan deteksi dini faktor resiko PTM populasi usia lebih dari 15 tahun | | | | | | | | | | |

| PERMENDAGRI 13/RPJM/RENSTRA/RKPD/RENJA | | | | | PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 | | | | | | | | | |
|--|--------|---------------|--|--|---------------------------|----|----|------|----|--------------------------------------|---|--|--|--|
| NO | URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM/KEGIATAN | Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output) | KODE | | | | | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | Kegiatan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular (PTM) | Pemeriksaan payudara klinis dan pemeriksaan IVA khusus untuk wanita usia 30-59 tahun (%) | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 25 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | persentase wanita usia 30-50 tahun yang melakukan IVA Test dan SADANIS |
| | | | | Jumlah POSBINDU PTM di Desa/ kelurahan | | | | | | | | | | |
| | | | Kegiatan Deteksi dini dan penanggulangan kesehatan jiwa dan Napza | Gangguan jiwa dan NAPZA yang ditanggulangi (%) | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 22 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA | Gangguan jiwa dan NAPZA yang ditanggulangi (%) |
| | | | Kegiatan deteksi dini dan penanggulangan Kesehatan indra (penglihatan dan pendengaran) | Kasus indra dan pendengaran yang ditanggulangi (%) | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 23 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus | Kasus indra dan pendengaran yang ditanggulangi (%) |
| | | | Program Lingkungan Sehat Perumahan | Persentase RT yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak (%) (SDGs) | | | | | | | | | | |

| PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA | | | | | PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 | | | | | | | | | |
|---|--------|---------------|---------------------------------------|--|---------------------------|----|----|------|----|--------------------------------------|---|--|--|--|
| NO | URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM/KEGIATAN | Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output) | KODE | | | | | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | | Persentase RT yang memiliki akses terhadap sanitasi layak dan berkelanjutan (%) (SDGs) | | | | | | | | | | |
| | | | Pemeriksaan Rumah dan sarana sanitasi | Rumah Sehat (%) | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 17 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | Rumah Sehat (%) |
| | | | Penyelenggaraan Kegiatan STBM | Jumlah desa yang ODF (desa/kel) | | | | | | | | | | |
| | | | | Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan STBM | | | | | | | | | | |
| | | | | Jumlah desa/kelurahan STBM (Desa/kel) | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 29 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat | Terfasilitasinya kegiatan penyelenggaraan kota sehat (bulan) |

| PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA | | | | | PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 | | | | | | | | | |
|---|--------|---------------|--|--|---------------------------|----|----|------|----|--------------------------------------|---|--|--|---|
| NO | URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM/KEGIATAN | Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output) | KODE | | | | | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | Penyehatan TTU | Tempat-tempat Umum Memenuhi syarat kesehatan (%) | 1 | 02 | 04 | 2.04 | 01 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN | PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN | Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) Antara Lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) | Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan(TPM) antara lain jasa boga, makan/restoran dan Depot Air Minum (DAM) | Pemeriksaan Kualitas Air Minum |
| | | | Fasilitasi Forum Kota Sehat dan Bersih | Status sehat Kota Sawahlunto | 1 | 02 | 04 | 2.04 | 01 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN | PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN | Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) Antara Lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) | Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan(TPM) antara lain jasa boga, makan/restoran dan Depot Air Minum (DAM) | Pemeriksaan Kualitas Air Minum |

| PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA | | | | | PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 | | | | | | | | | | |
|---|--------|---------------|--|---|---------------------------|----|----|------|----|--------------------------------------|---|--|--|--|--|
| NO | URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM/KEGIATAN | Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output) | KODE | | | | | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| | | | Pembinaan BPSPAMS | Jumlah BPSPAMS yang mandiri | 1 | 02 | 04 | 2.04 | 01 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN | PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN | Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) Antara Lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) | Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan(TPM) antara lain jasa boga, makan/restoran dan Depot Air Minum (DAM) | Pemeriksaan Kualitas Air Minum | |
| | | | Pengelolaan Limbah Medis /B3 | Jumlah Puskesmas mengelola limbah medis/b3 sesuai standard | 1 | 02 | 02 | 2,02 | 34 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya | Jumlah Puskesmas mengelola limbah medis/b3 sesuai standard | |
| | | | Program Pengawasan Obat dan Makanan | Persentase sarana obat, makanan dan alkes yang sesuai standar (%) | | | | | | | | | | | |
| | | | Peningkatan Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan berbahaya | Sarana distribusi obat yang memenuhi syarat (%) | 1 | 02 | 04 | 2.06 | 01 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN | PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN | Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga | Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan | Persentase sarana distribusi obat yang diawasi, Persentase sarana makanan dan minuman yang diawasi | |
| | | | Penggunaan obat yang rasional | Persentase penggunaan obat yang rasional | | | | | | | | | | | |

| PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA | | | | | PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 | | | | | | | | | |
|---|--------|---------------|--|--|---------------------------|----|----|------|----|--------------------------------------|---|---|---|--|
| NO | URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM/KEGIATAN | Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output) | KODE | | | | | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | Pengawasan Alkes dan PKRT | Persentase sarana distribusi alkes dan PKRT yang Memenuhi syarat | 1 | 02 | 04 | 2,02 | 01 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN | PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN | Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 tertentu Perusahaan Rumah Tangga | Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 | Persentase sarana distribusi alkes dan PKRT yang Memenuhi syarat |
| | | | Pemeriksaan Tempat Pengelolaan makan/Minuman | Tempat Pengelolaan Makanan/Minumany ang diperiksa (%) | 1 | 02 | 04 | 2,04 | 01 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN | PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN | Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) Antara Lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) | Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain jasa boga, rumah makan/restoran dan Depot Air Minum (DAM) | Tempat Pengelolaan Makanan/Minumany ang diperiksa (%) |
| | | | Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan | Persentase tempat pengolahan makanan yang memenuhi syarat kesehatan | | | | | | | | | | |
| | | | Pengawasan dan Pengendalian Keamanan dan Kesehatan Makanan Hasil Produksi Rumah tangga | Persentase sarana Industri Rumah Tangga yang memenuhi syarat kesehatan | 1 | 02 | 04 | 2.03 | 01 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN | PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN | Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga | | |
| | | | Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat | Persentase UKBM yang Aktif | | | | | | | | | | |

| PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA | | | | | PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 | | | | | | | | | |
|---|--------|---------------|---|---|---------------------------|----|----|------|----|--------------------------------------|--|--|--|---|
| NO | URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM/KEGIATAN | Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output) | KODE | | | | | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | Pelaksanaan Perkemahan Saka Bakti Husada Tingkat Provinsi Sumbar dan Nasional | Jumlah anggota SBH yang mengikuti kegiatan (orang) | | | | | | | | | | |
| | | | Pengadaan Sarana dan Prasarana dan Media Promosi Hidup Sehat | Jumlah media promosi yang dicetak (item) | 1 | 02 | 05 | 2.01 | 01 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN | Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota | Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat | Jumlah media cetak yang tersedia (paket) |
| | | | Orientasi Krida dan Perkemahan Bakti Saka Bakti Husada | Jumlah anggota Pramuka SBH yang diberikan orientasi krida dan pelaksanaan Peticab SBH (orang) | | | | | | | | | | |
| | | | Pemantapan Pelaksanaan Teknis Program Desa/Kelurahan Siaga Aktif | Jumlah desa/kelurahan siaga aktif dengan strata mandiri (desa/kel) | 1 | 02 | 05 | 2.03 | 01 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN | Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Bimbingan Teknis Dan Supervisi Pengembangan Dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | Jumlah desa/kelurahan yang dibina menjadi desa/kelurahan siaga yang berstrata purnama |
| | | | Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) | Jumlah Desa/Kelurahan Yang Mendapat KIE | 1 | 02 | 05 | 2.03 | 01 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN | Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Bimbingan Teknis Dan Supervisi Pengembangan Dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | Jumlah desa/kelurahan yang dibina menjadi desa/kelurahan siaga yang berstrata purnama |

| PERMENDAGRI 13/RPJM/RENSTRA/RKPD/RENJA | | | | | PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 | | | | | | | | | |
|--|--------|---------------|--|---|---------------------------|----|----|------|----|--------------------------------------|---|---|--|---|
| NO | URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM/KEGIATAN | Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output) | KODE | | | | | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | Fasilitasi Posyandu Award dan Posyandu Remaja | Jumlah kategori yang dinilai (kategori) | 1 | 02 | 05 | 2.03 | 01 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN | Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Bimbingan Teknis Dan Supervisi Pengembangan Dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | Jumlah desa/kelurahan yang dibina menjadi desa/kelurahan siaga yang berstrata purnama |
| | | | Fasilitasi Indikator Kesehatan pada KKG PKK KB Kesehatan | Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan KKG PKK KB Kes (desa/kel) | 1 | 02 | 05 | 2.03 | 01 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN | Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Bimbingan Teknis Dan Supervisi Pengembangan Dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | Jumlah desa/kelurahan yang dibina menjadi desa/kelurahan siaga yang berstrata purnama |
| | | | Penjaringan Kesehatan Murid pada SD/MI, SLTP/MTs dan SLTA/MA | Persentase murid yang diperiksa kesehatannya (%) | | | | | | | | | | |
| | | | Pelaksanaan Kegiatan Hari Kesehatan Nasional | Pelaksanaan kegiatan HKN yang terfasilitasi (paket) | | | | | | | | | | |
| | | | Peningkatan Kapasitas Petugas Promosi Kesehatan | Jumlah tenaga Promkes yang dilatih dan mengikuti kegiatan | 1 | 02 | 03 | 2.02 | 01 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN | PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN | Pembinaan Teknis, Pengawasan Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota | Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan | Jumlah tenaga Promkes yang dilatih dan mengikuti kegiatan |
| | | | Pelatihan Tenaga Husada Rescue | Jumlah KKR dan Pramuka SBH yang mengikuti kegiatan | 1 | 02 | 03 | 2.02 | 02 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN | PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN | Pembinaan Teknis, Pengawasan Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota | Pelatihan dan Uji Kompetensi Tenaga Kesehatan | Jumlah KKR dan Pramuka SBH yang mengikuti kegiatan |

| PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA | | | | | PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 | | | | | | | | | |
|---|--------|---------------|--|--|---------------------------|----|----|------|----|--------------------------------------|---|---|--|---|
| NO | URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM/KEGIATAN | Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output) | KODE | | | | | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | Fasilitasi Kegiatan Germas dan Kampanye Hidup Sehat | Jumlah kegiatan GERMAS yang dilaksanakan (kali) | 1 | 02 | 03 | 2.02 | 03 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN | PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN | Pembinaan Teknis, Pengawasan Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota | Penyelenggaraan Pelatihan untuk Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan | Jumlah kegiatan GERMAS yang dilaksanakan |
| | | | Pelaksanaan Kegiatan-Kegiatan Bulan Promosi | Jumlah kegiatan promosi dilakukan (kali) | 1 | 02 | 05 | 2.02 | 01 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN | Pelaksadan Sehat dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota | Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat | Jumlah kegiatan promosi dilakukan (kali) |
| | | | Program Upaya Kesehatan Masyarakat | Keluarga Sehat (%) | | | | | | | | | | |
| | | | Peningkatan kapasitas Program Indonesia sehat Melalui Pendekatan keluarga (PIS-PK) | Persentase keluarga sehat | 1 | 02 | 05 | 2,03 | 01 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN | Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Bimbingan Teknis Dan Supervisi Pengembangan Dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | Jumlah keluarga yang dikunjungi dengan PIS- PK |
| | | | Pelayanan Kesehatan hari Libur Lebaran | Laporan Kegiatan | | | | | | | | | | |
| | | | Pelayanan Kesehatan even daerah/Nasional (P3K) | Laporan Kegiatan | | | | | | | | | | |

| PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA | | | | | PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 | | | | | | | | | |
|---|--------|---------------|---|--|---------------------------|----|----|------|----|--------------------------------------|---|--|---|--|
| NO | URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM/KEGIATAN | Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output) | KODE | | | | | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | Penyelenggaraan pelayanan kesehatan tradisional | Jumlah puskesmas yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan tradisional (Puskesmas) | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 19 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya | Jumlah puskesmas yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan tradisional |
| | | | Manajemen Penanggulangan Krisis kesehatan | Laporan pelaksanaan kegiatan | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 14 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana | Laporan pelaksanaan kegiatan |
| | | | Penyelenggaraan Sistem Penanggulangan gawat darurat terpadu | Jumlah Unit Penanggulangan gawat darurat Terpadu (unit) | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 34 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya | Persentase kasus kegawatdaruratan yang tertangani |
| | | | Penyelenggaraan Bantuan operasional kesehatan | Jumlah puskesmas dan dinas yang menyelenggarakan Bantuan operasional kesehatan | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 34 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya | Jumlah puskesmas yang menyelenggarakan Bantuan operasional kesehatan |

| PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA | | | | | PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 | | | | | | | | | | |
|---|--------|---------------|--|--|---------------------------|----|----|------|----|--------------------------------------|---|--|--|--|--|
| NO | URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM/KEGIATAN | Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output) | KODE | | | | | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| | | | Pelayanan lembur P3k dan dokter jaga IDG 24 jam | Laporan Kegiatan | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 34 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya | Laporan Kegiatan | |
| | | | Pelatihan Dokter Kecil dan KKR | Jumlah Dokter Kecil dan KKR yang terlatih (orang) | | | | | | | | | | | |
| | | | | Jumlah dokter kecil yang mengikuti kegiatan dokter kecil award (orang) | | | | | | | | | | | |
| | | | | Jumlah KKR yang mengikuti kegiatan Duta Kesehatan (orang) | | | | | | | | | | | |
| | | | Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Kerja | Jumlah kegiatan kesehatan kerja pada kelompok kerja informal di masyarakat yang terfasilitasi (kegiatan) | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 16 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN | PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | Terfasilitasinya kegiatan kesehatan kerja pada kelompok kerja informal di masyarakat | |
| | | | Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Olah Raga | Jumlah kegiatan kesehatan olahraga pada kelompok di masyarakat yang terfasilitasi | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 16 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN | PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | Terfasilitasinya kegiatan kesehatan olahraga pada kelompok masyarakat | |
| | | | Program Peningkatan Kualitas SDM pelayanan kesehatan | Persentase ketersediaan tenaga kesehatan dan tenaga medis sesuai standar | | | | | | | | | | | |

| PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA | | | | | PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 | | | | | | | | | |
|---|--------|---------------|---|---|---------------------------|----|----|------|----|--------------------------------------|---|--|---|---|
| NO | URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM/KEGIATAN | Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output) | KODE | | | | | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | Pendidikan dan pelatihan formal | Terfasilitasinya kegiatan kursus-kursus singkat, on the job training, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis (bulan) | 1 | 02 | 03 | 2.02 | 01 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN | PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN | Pembinaan Teknis, Pengawasan Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota | Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan | Terfasilitasinya kegiatan kursus-kursus singkat, on the job training, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis (bulan) |
| | | | Pertemuan tim penilai kredit point dan tenaga fungsional tertentu | Jumlah kegiatan pertemuan tenaga fungsional tertentu kesehatan yang dilaksanakan (kali) | 1 | 02 | 03 | 2.02 | 02 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN | PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN | Pembinaan Teknis, Pengawasan Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota | Pelatihan dan Uji Kompetensi Tenaga Kesehatan | Jumlah kegiatan pertemuan tenaga fungsional tertentu kesehatan yang dilaksanakan (kali) |
| | | | | | 1 | 02 | 03 | 2.02 | 03 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN | PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN | Pembinaan Teknis, Pengawasan Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota | Penyelenggaraan Pelatihan untuk Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan | |
| | | | Program Obat dan Perbekalan Kesehatan | Ketersediaan Obat dan Vaksin indikator (%) | | | | | | | | | | |
| | | | Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan | Persentase Ketersediaan Obat dan Vaksin indikator di puskesmas | 1 | 02 | 02 | 2,01 | 16 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota | Pengadaan Obat, Vaksin | Persentase Ketersediaan Obat dan Vaksin indikator di puskesmas |

| PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA | | | | | PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 | | | | | | | | | |
|---|--------|---------------|---|---|---------------------------|----|----|------|----|--------------------------------------|---|--|--|---|
| NO | URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM/KEGIATAN | Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output) | KODE | | | | | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | Distribusi obat dan e-logistic | Jumlah distribusi obat dan e-logistic (bulan) | 1 | 02 | 02 | 2,01 | 16 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota | Pengadaan Obat, Vaksin | Jumlah distribusi obat dan e-logistic (bulan) |
| | | | Program Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas pembantu dan jaringannya | Sarana Prasarana Puskesmas, Puskesmas Pembantu sesuai Standar | | | | | | | | | | |
| | | | Pengadaan alat kedokteran/kesehatan | Persentase Ketersediaan Alat Kedokteran/Kesehatan | 1 | 02 | 02 | 2.01 | 14 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota | Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan | Persentase Ketersediaan Alat Kedokteran/Kesehatan |
| | | | Pemeliharaan Rutin/berkala alat kedokteran/kesehatan | Jumlah Alat Kedokteran Kesehatan yang dipelihara | 1 | 02 | 02 | 2.01 | 20 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota | Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan | Jumlah Alat Kedokteran Kesehatan yang dipelihara |
| | | | Pengadaan Sarana dan Prasarana Penunjang Keluarga Berencana (DAK Bidang Pengendalian Penduduk dan KB) | Tersedianya Sarana Prasarana Pendukung Program Bangga Kencana | | | | | | | | | | |

| PERMENDAGRI 13/RPJM/RENSTRA/RKPD/RENJA | | | | | PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 | | | | | | | | | |
|--|--------|---------------|--|---|---------------------------|----|----|------|----|--------------------------------------|---|--|--|---|
| NO | URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM/KEGIATAN | Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output) | KODE | | | | | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | DAK Murni pendamping dan pelaksanaan | Jumlah Paket yang dilaksanakan (paket) | | | | | | | | | | |
| | | | Pembuatan pagar Puskesmas kolok | | | | | | | | | | | |
| | | | Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan | Persentase Puskesmas yang terakreditasi | | | | | | | | | | |
| | | | Akreditasi Puskesmas | Persentase Puskesmas yang terakreditasi | 1 | 02 | 02 | 2,02 | 35 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota | Persentase Puskesmas yang di Survey Akreditasi |
| | | | Pemilihan Puskesmas Berprestasi dan Tenaga Kesehatan Teladan | Jumlah Puskesmas yang ber prestasi dan tenaga kesehatan teladan | 1 | 02 | 02 | 2,02 | 35 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota | Persentase Puskesmas yang di Survey Akreditasi |
| | | | Pelatihan Penanggulangan kegawat daruratan bagi tenaga kesehatan | Jumlah Petugas yang memiliki sertifikat | 1 | 02 | 02 | 2,02 | 35 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota | Persentase Puskesmas yang di Survey Akreditasi |

| PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA | | | | | PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 | | | | | | | | | |
|---|--------|---------------|---|--|---------------------------|----|----|------|----|--------------------------------------|---|--|--|---|
| NO | URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM/KEGIATAN | Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output) | KODE | | | | | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | Penilaian Inovasi Pelayanan Publik Bidang Kesehatan | Jumlah sarana pelayanan publik yang melakukan inovasi | 1 | 02 | 02 | 2,02 | 35 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota | Persentase Puskesmas yang di Survey Akreditasi |
| | | | Surveilans Penanggulangan bencana | persentase penanggulangan bencana yang teratasi | 1 | 02 | 02 | 2.03 | 01 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi | Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan | persentase penanggulangan bencana yang teratasi |
| | | | Penyusunan buku profil kesehatan | Jumlah Dokumen yang disusun | 1 | 02 | 02 | 2.03 | 01 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi | Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan | Jumlah Dokumen yang disusun |
| | | | | | 1 | 02 | 02 | 2.03 | 02 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi | Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan | |

| PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA | | | | | PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 | | | | | | | | | |
|---|--------|---------------|---|--|---------------------------|----|----|------|----|--------------------------------------|---|--|---|---|
| NO | URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM/KEGIATAN | Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output) | KODE | | | | | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | | | 1 | 02 | 02 | 2.03 | 03 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi | Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet | |
| | | | Pendataan Keluarga | Jumlah KK yang Diverifikasi dan didata Baru | | | | | | | | | | |
| | | | Program Kemitraan peningkatan pelayanan Kesehatan | Penduduk yang memiliki jaminan kesehatan (%) | | | | | | | | | | |
| | | | Kemitraan pengobatan lanjutan bagi pasien rujukan | Jumlah pasien rujukan yang di layani | 1 | 02 | 02 | 2.04 | 04 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaen/Kota | Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan | Jumlah pasien rujukan yang di layani |
| | | | Pelayanan Kesehatan Peserta jaminan Kesehatan Sumbar Sakato | Jumlah peserta jaminan kesehatan sumbar sakato | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 26 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat | Jumlah peserta jaminan kesehatan sumbar sakato |

| PERMENDAGRI 13/RPJM/RENSTRA/RKPD/RENJA | | | | | PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 | | | | | | | | | |
|--|--------|---------------|---|--|---------------------------|----|----|------|----|--------------------------------------|---|--|--|--|
| NO | URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM/KEGIATAN | Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output) | KODE | | | | | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | Penyelenggaraan jaminan kesehatan nasional FKTP Puskesmas Talawi | Jumlah peserta jaminan kesehatan nasional yang terlayani (orang) | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 26 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat | Jumlah peserta jaminan kesehatan nasional yang terlayani (orang) |
| | | | Penyelenggaraan jaminan kesehatan nasional FKTP Puskesmas Silungkang | Jumlah peserta jaminan kesehatan nasional yang terlayani (orang) | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 26 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat | Jumlah peserta jaminan kesehatan nasional yang terlayani (orang) |
| | | | Penyelenggaraan jaminan kesehatan nasional FKTP Puskesmas Kolok | Jumlah peserta jaminan kesehatan nasional yang terlayani (orang) | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 26 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat | Jumlah peserta jaminan kesehatan nasional yang terlayani (orang) |
| | | | Penyelenggaraan jaminan kesehatan nasional FKTP Puskesmas Sungai Durian | Jumlah peserta jaminan kesehatan nasional yang terlayani (orang) | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 26 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat | Jumlah peserta jaminan kesehatan nasional yang terlayani (orang) |

| PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA | | | | | PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 | | | | | | | | | |
|---|--------|---------------|---|--|---------------------------|----|----|------|----|--------------------------------------|---|--|--|--|
| NO | URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM/KEGIATAN | Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output) | KODE | | | | | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | Penyelenggaraan jaminan kesehatan nasional FKTP PuskesmasKampung Teleng | Jumlah peserta jaminan kesehatan nasional yang terlayani (orang) | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 26 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat | Jumlah peserta jaminan kesehatan nasional yang terlayani (orang) |
| | | | Penyelenggaraan jaminan kesehatan nasional FKTP Puskesmas Lunto | Jumlah peserta jaminan kesehatan nasional yang terlayani (orang) | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 26 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat | Jumlah peserta jaminan kesehatan nasional yang terlayani (orang) |
| | | | Pelayanan Kesehatan Peserta Jaminan Kesehatan Kota sawahlunto | Jumlah peserta jaminan kesehatan Kota sawahlunto | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 26 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat | Jumlah peserta jaminan yang mendapatkan pelayanan kesehatan |
| | | | Program pengembangan model operasional BKB-Posyandu-PAUD | Balita yang terpantau tumbuh kembangnya (%) | | | | | | | | | | |

| PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA | | | | | PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 | | | | | | | | | |
|---|--------|---------------|---|--|---------------------------|----|----|------|----|---|---|---|--|--|
| NO | URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM/KEGIATAN | Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output) | KODE | | | | | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | Fasilitasi Integrasi BKB dengan Posyandu dan PAUD | Jumlah Kader KB yang dibina dan Terampil | 2 | 14 | 03 | 2.02 | 01 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) | Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/ Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) | Penguatan pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga | Jumlah Kader KB yang dibina dan Terampil |
| | | | Program kesehatan reproduksi remaja | Persentase perempuan yang melahirkan berusia 15-19 tahun | | | | | | | | | | |
| | | | | Persentase Perempuan yang melahirkan berusia 15-19 tahun | 2 | 14 | 04 | 2.01 | 01 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) | Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga | Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Koseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) | Persentase Perempuan yang melahirkan berusia 15-19 tahun |

| PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA | | | | | PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 | | | | | | | | | |
|---|--------|---------------|---|--|---------------------------|----|----|------|----|---|---|---|--|--|
| NO | URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM/KEGIATAN | Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output) | KODE | | | | | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | Program Bina Keluarga Lansia (BKL) | kelompok Bina Keluarga lansia (BKL) yang dibina | 2 | 14 | 04 | 2.01 | 01 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) | Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga | Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Koseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) | Persentase Perempuan yang melahirkan berusia 15-19 tahun |
| | | | Pembinaan dan Temu Pusat Informasi Konseling Remaja (PIK-R) | Jumlah PIK-R yang Terbina | 2 | 14 | 04 | 2.01 | 01 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) | Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga | Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Koseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) | Persentase Perempuan yang melahirkan berusia 15-19 tahun |

| PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA | | | | | PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 | | | | | | | | | |
|---|--------|---------------|---|---|---------------------------|----|----|------|----|---|---|--|--|---|
| NO | URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM/KEGIATAN | Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output) | KODE | | | | | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | Fasilitasi pembentukan Sekolah Siaga Kependudukan (SSK) | Persentase Sekolah Menengah Atas dengan Status Sekolah Siaga Kependudukan (SSK) | 2 | 14 | 02 | 2.01 | 05 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK | Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pengendalian Kuantitas Penduduk | Penguatan Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Forma | Persentase Sekolah Menengah Atas dengan Status Sekolah Siaga Kependudukan (SSK) |
| | | | Pembinaan dan Jambore Saka Kencana | Jumlah Peserta Saka Kencana yang menjadi Anggota dan diBina | 2 | 14 | 03 | 2.01 | 05 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) | Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal | Pelaksanaan Hari Keluarga Nasional (Harganas) | Jumlah Peserta Saka Kencana yang menjadi Anggota dan diBina |
| | | | Pemilihan Duta GenRe Tingkat Kota Sawahlunto | Jumlah Peserta/ Duta GenRe yang ikut dalam kompetisi Pemilihan Duta GenRe | 2 | 14 | 03 | 2.01 | 05 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) | Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal | Pelaksanaan Hari Keluarga Nasional (Harganas) | Jumlah Peserta/ Duta GenRe yang ikut dalam kompetisi Pemilihan Duta GenRe |

| PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA | | | | | PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 | | | | | | | | | |
|---|--------|---------------|---|---|---------------------------|----|----|------|----|---|---|---|---|---|
| NO | URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM/KEGIATAN | Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output) | KODE | | | | | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri | Pasangan Usia Subur yang terputus/terhenti menggunakan kontrasepsi | | | | | | | | | | |
| | | | Fasilitasi Forum Kader KB | Jumlah Kader KB yang difasilitasi | 2 | 14 | 03 | 2.02 | 03 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) | Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/ Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) | Penguatan pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB) | Jumlah Kader KB yang difasilitasi |
| | | | Pelaksanaan Kegiatan Hari Keluarga Nasional (Harganas) | Jumlah Peserta /Keluarga yang berpartisipasi dalam peringatan Hari Keluarga Nasional (Harganas) | 2 | 14 | 03 | 2.01 | 05 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) | Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal | Pelaksanaan Hari Keluarga Nasional (Harganas) | Jumlah Peserta /Keluarga yang berpartisipasi dalam peringatan Hari Keluarga Nasional (Harganas) |

| PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA | | | | | PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 | | | | | | | | | |
|---|--------|---------------|--------------------------------------|--|---------------------------|----|----|------|----|--|---|---|--|---|
| NO | URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM/KEGIATAN | Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output) | KODE | | | | | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | Pembentukan/Pembi naan Kampung KB | Jumlah Kampung KB yang terbentuk dan dibina | 2 | 14 | 03 | 2.04 | 01 | URUSAN PEMERINTA HAN BIDANG PENGENDA LIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCAN A | PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) | Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB | Penguatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan PembinaanKesertaan Ber-KB | Jumlah Kampung KB yang terbentuk dan dibina |
| | | | | | 2 | 14 | 03 | 2.04 | 02 | URUSAN PEMERINTA HAN BIDANG PENGENDA LIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCAN A | PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) | Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB | Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB | |
| | | | | | 2 | 14 | 03 | 2.04 | 03 | URUSAN PEMERINTA HAN BIDANG PENGENDA LIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCAN A | PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) | Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB | Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB | |

| PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA | | | | | PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 | | | | | | | | | |
|---|--------|---------------|-------------------|--|---------------------------|----|----|------|----|---|---|---|---|---|
| NO | URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM/KEGIATAN | Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output) | KODE | | | | | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | | | 2 | 14 | 03 | 2.04 | 04 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) | Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB | Pembinaan Terpadu Kampung KB | |
| | | | Pembinaan BKR,BKL | Jumlah Kelompok BKR dan BKL yang Terbina | 2 | 14 | 04 | 2.01 | 01 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS | Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga | Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Koseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga | Jumlah Kelompok BKR dan BKL yang Terbina |
| | | | | | 2 | 14 | 04 | 2.01 | 02 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS | Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga | Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB,BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) | |

| PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA | | | | | PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 | | | | | | | | | |
|---|--------|---------------|-------------------------------|--|---------------------------|----|----|------|----|---|---|---|--|---|
| NO | URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM/KEGIATAN | Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output) | KODE | | | | | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | | | 2 | 14 | 04 | 2.01 | 03 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS | Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga | Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB,BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS | |
| | | | | | 2 | 14 | 04 | 2.01 | 04 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS | Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga | Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/KaderKetahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) | |
| | | | Program Pelayanan Kontrasepsi | Pasangan Usia Subur yang menggunakan alat kontrasepsi (%) | | | | | | | | | | |

| PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA | | | | | PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 | | | | | | | | | |
|---|--------|---------------|--|--|---------------------------|----|----|------|----|---|---|---|--|--|
| NO | URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM/KEGIATAN | Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output) | KODE | | | | | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | Pelayanan KB | Jumlah Pasangan Usia Subur yang dilayani sebagai Peserta KB baru | 2 | 14 | 03 | 2.03 | 08 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) | Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB Di Daerah Kabupaten/Kota | Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya | Jumlah Pasangan Usia Subur yang dilayani sebagai Peserta KB baru |
| | | | Jambore/Temu Kreatifitas Program KKBPK | Jumlah Peserta yang Mengikuti Kegiatan | 2 | 14 | 03 | 2.01 | 05 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) | Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal | Pelaksanaan Hari Keluarga Nasional (Harganas) | Jumlah Peserta yang Mengikuti Kegiatan |
| | | | operasional balai penyuluhan KB dan alat kontrasepsi | Jumlah Balai Penyuluhan dan gudang Alkon yang difasilitasi | | | | | | | | | | |

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

| PERMENDAGRI 13/RPJM/RENSTRA/RKPD/RENJA | | | | | PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 | | | | | | | | | |
|--|--------|--------------------------------------|---|--|---------------------------|----|----|------|----|--------------------------------------|---|---|---|--|
| NO | URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM/KEGIATAN | Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output) | KODE | | | | | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | WAJIB | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN | Program Pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru/ rumah sakit mata | Persentase Sarana dan Prasarana RS sesuai Standar (%) | | | | | | | | | | |
| | WAJIB | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN | Rehabilitasi bangunan rumah sakit | Jumlah bangunan rumah sakit yang dilakukan rehabilitasi (Unit) | 1 | 02 | 02 | 2,01 | 08 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit | Jumlah bangunan rumah sakit yang dilakukan rehabilitasi (unit) |
| | | | Pembangunan gedung rumah sakit | Jumlah gedung rumah sakit yang dibangun (Unit) | 1 | 02 | 02 | 2,01 | 05 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota | Pengembangan Rumah Sakit | Jumlah gedung rumah sakit yang dibangun (Unit) |
| | | | Kegiatan Pembangunan Gedung Instalasi Pengolah Limbah | Jumlah gedung instalasi pengolah limbah yang dibangun (unit) | 1 | 02 | 02 | 2,01 | 01 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota | Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya | Jumlah gedung instalasi pengolah limbah yang dibangun (unit) |

| PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA | | | | | PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 | | | | | | | | | |
|---|--------|---------------|--|--|---------------------------|----|----|------|----|--------------------------------------|---|---|---|--|
| NO | URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM/KEGIATAN | Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output) | KODE | | | | | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | Kegiatan Pengembangan Ruang Operasi | Jumlah ruang operasi yang dilakukan pengembangan (unit) | 1 | 02 | 02 | 2,01 | 03 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota | Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya | Jumlah ruang operasi yang dilakukan pengembangan (unit) |
| | | | Kegiatan Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit | Jumlah alat kesehatan yang diadakan (jenis) | 1 | 02 | 02 | 2,01 | 14 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota | Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan | Jumlah alat kesehatan yang diadakan (jenis) |
| | | | Pengadaan mobiler rumah sakit | Jumlah mobiler rumah sakit yang diadakan (Jenis) | 1 | 02 | 02 | 2,01 | 12 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota | Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan | Jumlah mobiler rumah sakit yang diadakan (jenis) |
| | | | Pengadaan perlengkapan rumah tangga rumah sakit (dapur, ruang pasien, laundry, ruang tunggu dan lain-lain) | Jumlah perlengkapan rumah tangga rumah sakit yang diadakan (Jenis) | | | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota | | Jumlah perlengkapan rumah tangga rumah sakit yang diadakan (jenis) |

| PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA | | | | | PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 | | | | | | | | | |
|---|--------|---------------|--|--|---------------------------|----|----|------|----|--------------------------------------|---|---|---|--|
| NO | URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM/KEGIATAN | Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output) | KODE | | | | | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | Kegiatan Pembangunan Rehabilitasi serta Pengadaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit (DAK Fisik) | Jumlah sarana prasarana yang diadakan (jenis) | 1 | 02 | 02 | 2,01 | 12 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota | Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan | Jumlah sarana prasarana yang diadakan (jenis) |
| | | | Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit (DBH CHT) | Jumlah alat kesehatan yang diadakan (Jenis) | 1 | 02 | 02 | 2,01 | 14 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota | Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan | Jumlah alat-alat kesehatan yang diadakan (jenis) |
| | | | Kegiatan Pengadaan Instalasi Pengolahan Limbah Rumah Sakit | Jumlah sarana pengolahan limbah yang diadakan (unit) | 1 | 02 | 02 | 2,02 | 17 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | Jumlah sarana pengolahan limbah yang diadakan (unit) |
| | | | Kegiatan Pembangunan Kamar Jenazah | Jumlah bangunan pemulasaran jenazah yang disediakan (unit) | 1 | 02 | 02 | 2,01 | 07 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota | Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya | Jumlah bangunan pemulasaran jenazah yang disediakan (unit) |

| PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA | | | | | PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 | | | | | | | | | |
|---|--------|---------------|---|---|---------------------------|----|----|------|----|--------------------------------------|---|---|--|---|
| NO | URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM/KEGIATAN | Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output) | KODE | | | | | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/ Rumah Sakit Jiwa/ Rumah Sakit Paru/ Rumah Sakit Mata | Persentase sarana dan prasarana rumah sakit yang dilakukan pemeliharaan (%) | | | | | | | | | | |
| | | | Pemeliharaan rutin/ berkala rumah sakit | Jumlah sarana rumah sakit yang dipelihara (Unit) | 1 | 02 | 02 | 2,01 | 18 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota | Pemeliharaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan | Jumlah sarana rumah sakit yang dipelihara (unit) |
| | | | | | 1 | 02 | 02 | 2,01 | 19 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota | Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan | |
| | | | Pemeliharaan rutin/ berkala ruang poliklinik rumah sakit | Jumlah bangunan poliklinik rumah sakit yang dipelihara (Unit) | 1 | 02 | 02 | 2,01 | 18 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | | Pemeliharaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan | Jumlah bangunan poliklinik rumah sakit yang dipelihara (unit) |

| PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA | | | | | PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 | | | | | | | | | |
|---|--------|---------------|---|--|---------------------------|----|----|------|----|--------------------------------------|---|----------|--|--|
| NO | URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM/KEGIATAN | Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output) | KODE | | | | | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | | | 1 | 02 | 02 | 2,01 | 19 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | | Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan | |
| | | | Pemeliharaan rutin/ berkala ruang rawat inap rumah sakit | Jumlah bangunan rawat inap rumah sakit yang dipelihara (Unit) | 1 | 02 | 02 | 2,01 | 18 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | | Pemeliharaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan | Jumlah bangunan rawat inap rumah sakit yang dipelihara (unit) |
| | | | | | 1 | 02 | 02 | 2,01 | 19 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | | Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan | |
| | | | Pemeliharaan rutin/ berkala alat-alat kesehatan rumah sakit | Alat kesehatan di unit-unit layanan rumah sakit yang dipelihara/ kalibrasi (Paket) | 1 | 02 | 02 | 2,01 | 20 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | | Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat | Alat kesehatan di unit-unit layanan rumah sakit yang dilakukan pemeliharaan/ kalibrasi (jenis) |

| PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA | | | | | PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 | | | | | | | | | |
|---|--------|---------------|---|--|---------------------------|----|----|------|----|--------------------------------------|---|----------|--|--|
| NO | URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM/KEGIATAN | Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output) | KODE | | | | | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 2 | | | Pemeliharaan rutin/ berkala instalasi pengolahan limbah rumah sakit | Instalasi pengolah limbah rumah sakit yang terpelihara (Bulan) | 1 | 02 | 02 | 2,01 | 18 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | | Pemeliharaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan | Instalasi pengolah limbah rumah sakit yang terpelihara (bulan) |
| | | | | | 1 | 02 | 02 | 2,01 | 19 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | | Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan | |
| 3 | | | Pemeliharaan rutin/ berkala instalasi jaringan | Instalasi jaringan rumah sakit yang terpelihara (Bulan) | 1 | 02 | 02 | 2,01 | 18 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | | Pemeliharaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan | Instalasi/jaringan rumah sakit yang terpelihara (bulan) |
| | | | | | 1 | 02 | 02 | 2,01 | 19 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | | Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan | |
| | | | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Jumlah aparatur yang meningkat kompetensinya (orang) | | | | | | | | | | |

| PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA | | | | | PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 | | | | | | | | | |
|---|--------|---------------|--|--|---------------------------|----|----|------|----|--------------------------------------|---|---|--|--|
| NO | URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM/KEGIATAN | Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output) | KODE | | | | | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal | Jumlah Aparatur yang mengikuti pendidikan pelatihan formal (orang) | 1 | 02 | 01 | 2,04 | 9 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Pendidikan dan Pelatihan Formal | Jumlah Aparatur yang mengikuti pendidikan pelatihan formal (orang) |
| | | | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Tersedianya sarana pelayanan administrasi perkantoran | | | | | | | | | | |
| | | | Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Pegawai Non PNS | Jasa pelayanan pegawai Non PNS yang difasilitasi (Bulan) | 1 | 02 | 01 | 2,02 | 1 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Administrasi Keuangan | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jasa pelayanan pegawai Non PNS yang difasilitasi (Bulan) |
| | | | Program standarisasi pelayanan kesehatan | Akreditasi Rumah Sakit | | | | | | | | | | |
| | | | Kegiatan Verifikasi Akreditasi Rumah Sakit | survey verifikasi akreditasi yang terlaksana | 1 | 02 | 02 | 2,02 | 35 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota | Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota | |
| | | | Kegiatan Survey Ulang Akreditasi Rumah Sakit | survey ulang akreditasi yang terlaksana | 1 | 02 | 02 | 2,02 | 35 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota | | |

| PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA | | | | | PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 | | | | | | | | | |
|---|--------|---------------|---|---|---------------------------|----|----|------|----|--------------------------------------|---|---|---|---|
| NO | URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM/KEGIATAN | Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output) | KODE | | | | | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan (BLUD) | Terlaksananya operasional pelayanan kesehatan rumah sakit (bulan) | | | | | | | | | | |
| | | | Kegiatan Pelayanan Kesehatan (BLUD) | Ketersediaan barang/jasa sesuai kebutuhan operasional rumah sakit (bulan) | 1 | 02 | 02 | 2,02 | 32 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota | Operasional Pelayanan Rumah Sakit | Ketersediaan barang/jasa sesuai kebutuhan operasional rumah sakit (bulan) |
| | | | Program Obat dan Perbekalan Kesehatan | Ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan (%) | | | | | | | | | | |
| | | | Kegiatan Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan | Jumlah obat dan perbekalan kesehatan yang diadakan (paket) | 1 | 02 | 02 | 2,02 | 16 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota | Pengadaan Obat, Vaksin | Jumlah obat dan perbekalan kesehatan yang diadakan (paket) |
| | | | Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan | Persentase rujukan pasien yang terlaksana (%) | | | | | | | | | | |
| | | | Kemitraan pengobatan lanjutan bagi pasien rujukan | Jumlah pasien yang mendapatkan pelayanan kesehatan lanjutan (Orang) | 1 | 02 | 02 | 2.04 | 04 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan | Jumlah pasien yang mendapatkan pelayanan kesehatan lanjutan (orang) |

| PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA | | | | | PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 | | | | | | | | | |
|---|--------|---------------|---|--|---------------------------|----|----|------|----|--------------------------------------|--|-----------------------|---|--|
| NO | URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM/KEGIATAN | Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output) | KODE | | | | | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Tersedianya sarana pelayanan administrasi perkantoran | | | | | | | | | | |
| | | | Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik | Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan (bulan) | 1 | 02 | 01 | 2,03 | 2 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Administrasi Umum | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan (bulan) |
| | | | Kegiatan Penatausahaan Keuangan dan Barang | Penatausahaan keuangan dan barang yang dilaksanakan (bulan) | 1 | 02 | 01 | 2,02 | 1 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Administrasi Keuangan | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Penatausahaan keuangan dan barang yang dilaksanakan (bulan) |
| | | | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Peningkatan sarana dan prasarana aparatur (bulan) | | | | | | | | | | |
| | | | Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Kantor | Jumlah perlengkapan kantor yang diadakan (jenis) | 1 | 02 | 01 | 2,03 | 22 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Administrasi Umum | Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor | Jumlah perlengkapan kantor yang diadakan (jenis) |
| | | | Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor | Peralatan gedung kantor yang diadakan (jenis) | 1 | 02 | 01 | 2,03 | 24 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Administrasi Umum | Pengadaan Peralatan Gedung Kantor | Peralatan gedung kantor yang diadakan (jenis) |
| | | | Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional | Pemeliharaan kendaraan roda empat dan roda dua yang dilaksanakan (bulan) | 1 | 02 | 01 | 2,03 | 30 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Administrasi Umum | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | Pemeliharaan kendaraan roda empat dan roda dua yang dilaksanakan (bulan) |

| PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA | | | | | PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 | | | | | | | | | |
|---|--------|---------------|--|--|---------------------------|----|----|------|----|--------------------------------------|--|--|--|--|
| NO | URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM/KEGIATAN | Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output) | KODE | | | | | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | Program Peningkatan Disiplin Aparatur | Tersedianya pakaian dinas untuk pegawai (orang) | | | | | | | | | | |
| | | | Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya | Jumlah pakaian dinas yang diadakan (helai) | 1 | 02 | 01 | 2.04 | 02 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya | Jumlah pakaian dinas yang diadakan (helai) |
| | | | Kegiatan Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan | Jumlah pakaian kerja lapangan yang diadakan (helai) | 1 | 02 | 01 | 2.04 | 03 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya | Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan | Jumlah pakaian kerja lapangan yang diadakan (helai) |
| | | | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Jumlah laporan kinerja rumah sakit yang tersedia (dokumen) | | | | | | | | | | |
| | | | Kegiatan Penyusunan Laporan dan Evaluasi Kinerja | Jumlah laporan evaluasi dan kinerja rumah sakit yang disusun (jenis) | 1 | 02 | 01 | 2.02 | 06 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Administrasi Keuangan | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah laporan evaluasi dan kinerja rumah sakit yang disusun (jenis) |

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

| PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA | | | | | PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 | | | | | | | | | |
|---|-----------|---------------------|--|--|---------------------------|----|----|------|---------------|----------------------------|--|-----------------------|---|--|
| NO | URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM/KEGIATAN | Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output) | KODE | | | | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| | PENUNJANG | URUSAN PEMERINTAHAN | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Administrasi perkantoran lancar dan tertib (bulan) | | | | | | URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH | | | Tersedianya sarana pelayanan Administrasi Perkantoran (%) |
| | | | | | | | | | | | | | | Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur |
| | | | | | | | | | | | | | | Persentase Aparatur yang meningkat SDMya |
| | | | | | | | | | | | | | | Persentase ASN Berpakaian Dinas dengan Atribut Lengkap |
| | | | | | | | | | | | | | | Terwujudnya Pembinaan dan Pengembangan Aparatur |
| | | | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Pegawai Non PNS yang difasilitasi (orang) | 1 | 03 | 01 | 2,02 | | URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | | Administrasi Keuangan | | Terfasilitasinya pelayanan administrasi keuangan (orang/bulan) |
| | | | | | 1 | 03 | 01 | 2,02 | 01 | URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | | | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Pegawai Non PNS yang difasilitasi (orang) |
| | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jasa surat menyurat yang disediakan (bulan) | 1 | 03 | 01 | 2,03 | | URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | | Administrasi Umum | | Terfasilitasinya pelayanan administrasi umum (bulan) |

| PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA | | | | | PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 | | | | | | | | | |
|---|--------|---------------|--|---|---------------------------|----|----|------|----|----------------------------|---------|----------|--|---|
| NO | URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM/KEGIATAN | Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output) | KODE | | | | | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | | | 1 | 03 | 01 | 2,03 | 01 | URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jasa surat menyurat yang disediakan (bulan) |
| | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik | Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan (bulan) | 1 | 03 | 01 | 2,03 | 02 | URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik | Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan (bulan) |
| | | | Penyediaan Dokumentasi dan Dekorasi | Dokumentasi dan dekorasi yang disediakan (bulan) | 1 | 03 | 01 | 2,03 | 03 | URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | | | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan | Jasa Peralatan dan Perlengkapan yang disediakan (bulan) |
| | | | Penatausahaan Keuangan dan Barang | Penatausahaan keuangan dan barang yang dilaksanakan (bulan) | 1 | 03 | 01 | 2,03 | 07 | URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | | | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | Penatausahaan keuangan dan barang yang dilaksanakan (bulan) |
| | | | Penyediaan Jasa Kebersihan | Jasa kebersihan kantor yang disediakan (bulan) | 1 | 03 | 01 | 2,03 | 08 | URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | | | Penyediaan Jasa Kebersihan | Jasa kebersihan kantor yang disediakan (bulan) |
| | | | Penyediaan Alat Tulis Kantor | Alat Tulis Kantor yang disediakan (bulan) | 1 | 03 | 01 | 2,03 | 10 | URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | | | Penyediaan Alat Tulis Kantor | Alat Tulis Kantor yang disediakan (bulan) |
| | | | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Barang cetak dan penggandaan yang disediakan (bulan) | 1 | 03 | 01 | 2,03 | 11 | URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | | | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Barang cetak dan penggandaan yang disediakan (bulan) |
| | | | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan (bulan) | 1 | 03 | 01 | 2,03 | 12 | URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | | | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan (bulan) |

| PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA | | | | | PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 | | | | | | | | | |
|---|-----------|---------------------|--|--|---------------------------|----|----|------|----|----------------------------|---------|----------|--|--|
| NO | URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM/KEGIATAN | Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output) | KODE | | | | | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang – undangan | Bahan bacaan dan perundang-undangan yang disediakan (jenis) | 1 | 03 | 01 | 2,03 | 15 | URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang – undangan | Bahan bacaan dan perundang-undangan yang disediakan (jenis) |
| | | | Penyediaan Makan dan Minum | Makan dan minum yang disediakan (bulan) | 1 | 03 | 01 | 2,03 | 17 | URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | | | Penyediaan Makan dan Minum | Makan dan minum yang disediakan (bulan) |
| | | | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Luar Daerah | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Luar Daerah yang difasilitasi (bulan) | 1 | 03 | 01 | 2,03 | 18 | URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | | | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Luar Daerah | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Luar Daerah yang difasilitasi (bulan) |
| | | | Pengadaan Alat Berat | Jumlah Alat Berat yang diadakan (unit) | 1 | 03 | 01 | 2,03 | 21 | URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | | | Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional | Jumlah kendaraan dinas, oprasional dan alat berat yang diadakan |
| | | | Pengadaan alat labor | Jumlah alat labor yg diadakan (unit) | 1 | 03 | 01 | 2,03 | 25 | URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | | | Pengadaan Peralatan Gedung Kantor | Jumlah peralatan gedung kantor dan labor yang diadakan (unit) |
| | PENUNJANG | URUSAN PEMERINTAHAN | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Sarana dan Prasarana Aparatur yang disediakan (bulan) | | | | | | | | | | |
| | | | Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor | Gedung Kantor yang dipelihara (bulan) | 1 | 03 | 01 | 2,03 | 28 | URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | | | Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor | Gedung Kantor yang dipelihara (bulan) |

| PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA | | | | | PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 | | | | | | | | | |
|---|--------|---------------------|--|---|---------------------------|----|----|------|----|--|---------|---|--|---|
| NO | URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM/KEGIATAN | Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output) | KODE | | | | | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | Pemeliharaan alat berat | Jumlah alat berat yang dipelihara (Unit) | 1 | 03 | 01 | 2,03 | 30 | URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | | | Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan dinas/operasional | Kendaraan roda empat dan roda dua yang dipelihara (bulan) |
| | | | Pemeliharaan Alat Labor | Jumlah alat labor yg dipelihara (unit) | 1 | 03 | 01 | 2,03 | 32 | URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | | | Pemeliharaan rutin/berkala Perlengkapan Gedung Kantor | Perlengkapan gedung kantor yang dipelihara (bulan) |
| | | | Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor | Peralatan gedung kantor yang dipelihara (bulan) | 1 | 03 | 01 | 2,03 | 34 | URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | | | Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor | Peralatan gedung kantor yang dipelihara (bulan) |
| | WAJIB | URUSAN PEMERINTAHAN | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Jumlah aparatur yang meningkat kompetensinya (orang) | 1 | 03 | 01 | 2,04 | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENTAAAN RUANG | | Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | | Jumlah aparatur yang meningkat kompetensinya (orang) |
| | | | Pendidikan dan Pelatihan Formal | aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal (bulan) | 1 | 03 | 01 | 2,04 | 09 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENTAAAN RUANG | | | Pendidikan dan Pelatihan Formal | aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal (bulan) |

| PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA | | | | | PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 | | | | | | | | | |
|---|--------|---------------------|--|--|---------------------------|----|----|------|---------------|--|---|--|--|---|
| NO | URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM/KEGIATAN | Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output) | KODE | | | | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| | WAJIB | URUSAN PEMERINTAHAN | Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, dan Jaringan Pengairan Lainnya (PD) | Persentase saluran irigasi dalam kondisi baik (%) | 1 | 03 | 02 | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENTAAAN RUANG | Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) | | | Persentase Saluran Irigasi dalam Kondisi baik |
| | | | | | 1 | 03 | 02 | 2,01 | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENTAAAN RUANG | Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) | Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | | Jumlah Sumber Daya Air yang dikelola (unit) |
| | | | | | 1 | 03 | 02 | 2,01 | 02 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENTAAAN RUANG | | | Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku | jumlah dokumen perencanaan lingkungan hidup untuk konstruksi air tanah dan air baku |
| | | | | | 1 | 03 | 02 | 2,01 | 03 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENTAAAN RUANG | | | Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai | Jumlah dokumen perencanaan lingkungan hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai |

| PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA | | | | | PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 | | | | | | | | | |
|---|--------|---------------|--|--|---------------------------|----|----|------|----|--|---------|---|--|---|
| NO | URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM/KEGIATAN | Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output) | KODE | | | | | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | | | 1 | 03 | 02 | 2,01 | 08 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENTAAAN RUANG | | | Pengadaan Bangunan Air Bersih / Air Baku | Jumlah Bangunan air bersih/air baku yang dibangun |
| | | | Rehabilitasi / Pemeliharaan Normalisasi Sungai | Panjang sungai yang terpelihara (m) | 1 | 03 | 02 | 2,01 | 46 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENTAAAN RUANG | | | Normalisasi/Restorasi/Peeliharaan sungai | Panjang sungai yang terpelihara (m) |
| | | | | | 1 | 03 | 02 | 2,02 | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENTAAAN RUANG | | Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Panjang saluran irigasi dalam kondisi baik (m) | |
| | | | Pembangunan/ Peningkatan Jaringan Irigasi | Luas sawah yang beririgasi (ha) | 1 | 03 | 02 | 2,02 | 02 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENTAAAN RUANG | | | Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan | Luas sawah yang beririgasi (ha) |

| PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA | | | | | PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 | | | | | | | | | |
|---|--------|---------------|--|--|---------------------------|----|----|------|---------------|--|--|--|--|--|
| NO | URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM/KEGIATAN | Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output) | KODE | | | | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| | | | Rehabilitas/ Pemeliharaan Jaringan Irigasi | Panjang saluran irigasi yang terpelihara (m) | 1 | 03 | 02 | 2,02 | 14 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENTAAAN RUANG | | | Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan | Panjang saluran irigasi yang terpelihara (m) |
| | | | Pembangunan Saluran Drainase Perkotaan | panjang saluran drainase perkotaan yang dibangun (Km) | 1 | 03 | 06 | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENTAAAN RUANG | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE | | | Persentase Drainase dalam kondisi baik (%) |
| | | | | | 1 | 03 | 06 | 2,01 | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENTAAAN RUANG | | Pengelolaan dan pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota | | Panjang saluran drainase perkotaan yang dibangun dan dipelihara (km) |
| | | | | | 1 | 03 | 06 | 2,01 | 01 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENTAAAN RUANG | | | Penyusunan rencana, kebijakan, strategi dan teknis sistem drainase perkotaan | Dokumen Perencanaan Teknis drainase perkotaan yang disusun (dok) |
| | | | | | 1 | 03 | 06 | 2,01 | 05 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENTAAAN RUANG | | | Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan dan Lingkungan | panjang saluran drainase perkotaan yang dibangun (Km) |

| PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA | | | | | PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 | | | | | | | | | |
|---|--------|---------------------|--|---|---------------------------|----|----|------|----|--|---------------------------------|--|--|---|
| NO | URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM/KEGIATAN | Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output) | KODE | | | | | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | | | 1 | 03 | 06 | 2,01 | 09 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENTAAAN RUANG | | | Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase | Panjang drainase yang dipelihara (Km) |
| | | | Program Pengembangan Perumahan | Persentase luas permukiman yang tertata (%) | | | | | | | | | | |
| | WAJIB | URUSAN PEMERINTAHAN | Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Prioritas | Jumlah sarana prasarana perkotaan dan permukiman yang terbangun dan terpelihara (kawasan) | 1 | 03 | 07 | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENTAAAN RUANG | Program Pengembangan Permukiman | | | Persentase luas permukiman yang tertata (%) |
| | | | | | 1 | 03 | 07 | 2,01 | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENTAAAN RUANG | | Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah infrastruktur permukiman yang terbangun dan terpelihara | |
| | | | | | 1 | 03 | 07 | 2,01 | 01 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENTAAAN RUANG | | | Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Daerah Kab/Kota | Jumlah sarana prasarana perkotaan dan permukiman yang terbangun dan terpelihara (kawasan) |

| PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA | | | | | PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 | | | | | | | | | |
|---|--------|---------------------|---------------------------|--|---------------------------|----|----|------|---------------|--|----------------------------------|--|--|--|
| NO | URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM/KEGIATAN | Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output) | KODE | | | | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| | WAJIB | URUSAN PEMERINTAHAN | Penunjang operasional IMB | Jumlah IMB yang direkomendasikan | 1 | 03 | 08 | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENTAAAN RUANG | Program Penataan Bangunan Gedung | | | Persentase gedung pemerintah dalam kondisi baik |
| | | | | | | | | | | | | | | Persentase bangunan ber IMB |
| | | | | | 1 | 03 | 08 | 2.01 | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENTAAAN RUANG | | Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/kota , Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung | | Jumlah Bangunan Gedung yang Laik Fungsi |
| | | | | | 1 | 03 | 08 | 2.01 | 01 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENTAAAN RUANG | | | Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat LAIK Fungsi (SLF), Peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TAGB), Pendataan Bangunan Gedung, Serta Implementasi SIMBG | Jumlah Bangunan yang ber IMB dan memiliki Sertifikat Laik Fungsi |

| PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA | | | | | PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 | | | | | | | | | |
|---|--------|---------------------|--|--|---------------------------|----|----|------|----|--|-------------------------------|--------------------------------------|---|---|
| NO | URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM/KEGIATAN | Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output) | KODE | | | | | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | | | 1 | 03 | 08 | 2.01 | 02 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENTAAAN RUANG | | | Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan, Rehabilitasi, Renovasi, Ubah suai, serta Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah bangunan gedung daerah yang dibangun dan dipelihara (unit) |
| | WAJIB | URUSAN PEMERINTAHAN | Pembangunan/peningkatan jalan dan jembatan | Pembangunan/peningkatan jalan dan jembatan | 1 | 03 | 10 | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENTAAAN RUANG | PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN | | | Persentase Jalan dalam kondisi mantap |
| | | | | | | | | | | | | | | Panjang Jalan yang ditingkatkan (Km) |
| | | | | | 1 | 03 | 10 | 2,01 | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENTAAAN RUANG | | Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota | | Panjang Jalan yang dibangun dan dipelihara (Km) |
| | | | Pembangunan Jalan | Panjang Jalan yang dibangun (Km) | 1 | 03 | 10 | 2,01 | 05 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENTAAAN RUANG | | | Pembangunan Jalan | Panjang Jalan yang dibangun (Km) |

| PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA | | | | | PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 | | | | | | | | | |
|---|--------|---------------|----------------------------|--|---------------------------|----|----|------|---------------|--|----------|--------------|---|---|
| NO | URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM/KEGIATAN | Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output) | KODE | | | | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| | | | Peningkatan Jalan | Panjang Jalan yang ditingkatkan (Km) | 1 | 03 | 10 | 2,01 | 08 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENTAAAN RUANG | | | Rekonstruksi Jalan | Panjang Jalan yang direkonstruksi (Km) |
| | | | Rehabilitasi Jalan | Panjang Jalan yang direhab dan dipelihara (km) | 1 | 03 | 10 | 2,01 | 09 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENTAAAN RUANG | | | Rehabilitasi Jalan | Panjang Jalan yang direhab dan dipelihara (km) |
| | | | Pemeliharaan Berkala Jalan | Panjang Jalan yang dipelihara secara berkala (km) | 1 | 03 | 10 | 2,01 | 10 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENTAAAN RUANG | | | Pemeliharaan Berkala Jalan | Panjang Jalan yang dipelihara secara berkala (km) |
| | | | Pemeliharaan Rutin Jalan | Panjang jalan yang dipelihara (km) | 1 | 03 | 10 | 2,01 | 11 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENTAAAN RUANG | | | Pemeliharaan Rutin Jalan | Panjang jalan yang dipelihara (km) |
| | | | Pembangunan Jembatan | Panjang Jembatan yang dibangun (m) | 1 | 03 | 10 | 2,01 | 12 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENTAAAN RUANG | | | Pembangunan Jembatan | Panjang Jembatan yang dibangun (m) |

| PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA | | | | | PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 | | | | | | | | | |
|---|--------|---------------------|---------------------------------------|---|---------------------------|----|----|------|---------------|--|--|--|---|--|
| NO | URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM/KEGIATAN | Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output) | KODE | | | | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| | | | Pemeliharaan Rutin Jembatan | Panjang jembatan yang dipelihara (m) | 1 | 03 | 10 | 2,01 | 19 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENTAAAN RUANG | | | Pemeliharaan Rutin Jembatan | Panjang jembatan yang dipelihara (m) |
| | WAJIB | URUSAN PEMERINTAHAN | Program Perencanaan Tata Ruang | Persentase ketersediaan dokumen dan informasi tata ruang | 1 | 03 | 12 | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENTAAAN RUANG | Program Penyelenggaraan Penataan Ruang | | | Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang |
| | | | | | | | | | | | | | | Persentase RTH terhadap Luas Wilayah Kota |
| | | | Fasilitasi penetapan peraturan daerah | Jumlah dokumen peraturan daerah penyelenggaraan bangunan gedung | 1 | 03 | 12 | 2,01 | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENTAAAN RUANG | | Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RTRR) Kab/Kota | | Jumlah dokumen tata ruang yang disusun (dok) |
| | | | | | 1 | 03 | 12 | 2,01 | 01 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENTAAAN RUANG | | | Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/ Kota | Jumlah dokumen RDTR yang disusun |

| PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA | | | | | PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 | | | | | | | | | |
|---|--------|---------------|---|--|---------------------------|----|----|------|----|--|---------|--|---|--|
| NO | URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM/KEGIATAN | Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output) | KODE | | | | | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | | | 1 | 03 | 12 | 2,01 | 02 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENTAAAN RUANG | | | Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRR Kabupaten/ Kota | Jumlah dokumen RRTR yang di Perdakan |
| | | | | | 1 | 03 | 12 | 2,01 | 03 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENTAAAN RUANG | | | Penetapan Kebijakan dalam Rangka Pelaksanaan Penataan Ruang (Penyusunan Peta Zonasi) | Jumlah dokumen Peta Zonasi yang disusun |
| | | | Program pemanfaatan ruang | Persentase bangunan ber IMB | | | | | | | | | | |
| | | | Sosialisasi Peraturan rencana tata ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang | Jumlah pelaksanaan sosialisasi tentang peraturan tata ruang (kali) | 1 | 03 | 12 | 2,01 | 04 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENTAAAN RUANG | | | Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan di Bidang Penataan Ruang | Jumlah pelaksanaan sosialisasi tentang peraturan tata ruang (kali) |
| | | | Koordinasi penunjang kegiatan TKPRD | Jumlah pemanfaatan ruang yang direkomendasikan | 1 | 03 | 12 | 2,02 | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENTAAAN RUANG | | Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota | Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi perencanaan tata ruang daerah (kali) | |

| PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA | | | | | PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 | | | | | | | | | |
|---|--------|---------------|---|--|---------------------------|----|----|------|----|--|---------|--|--|--|
| NO | URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM/KEGIATAN | Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output) | KODE | | | | | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | | | 1 | 03 | 12 | 2,02 | 01 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENTAAAN RUANG | | | Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/kota | Jumlah pemanfaatan ruang yang direkomendasikan |
| | | | Penyediaan sarana informasi pemanfaatan ruang | Jumlah sarana informasi pemanfaatan ruang yang disediakan | 1 | 03 | 12 | 2,03 | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENTAAAN RUANG | | Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota | | Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi pemanfaatan ruang |
| | | | | | 1 | 03 | 12 | 2,03 | 02 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENTAAAN RUANG | | | Sistem Informasi Penataan Ruang | Jumlah sarana informasi pemanfaatan ruang yang disediakan |
| | | | Pengawasan dan pengendalian pemanfaatan | Jumlah pengawasan yang dilakukan | 1 | 03 | 12 | 2,04 | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENTAAAN RUANG | | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah kabuoaten/kota | | Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi pengendalian pemanfaatan ruang pemanfaatan ruang |
| | | | | | 1 | 03 | 12 | 2,04 | 04 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENTAAAN RUANG | | | Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang | Jumlah pengawasan yang dilakukan |

| PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA | | | | | PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 | | | | | | | | | |
|---|--------|---------------------|--|--|---------------------------|----|----|----|---------------|--|--|---|---|--|
| NO | URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM/KEGIATAN | Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output) | KODE | | | | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| | WAJIB | URUSAN PEMERINTAHAN | Program pengelolaan Penerangan Jalan Umum | Jumlah lampu PJU yang terpelihara (titik) | 2 | 15 | 02 | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN | Program penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ) | | | Jumlah lampu PJU yang terpelihara (titik) |
| | | | | | | | | | | | | | | Jumlah lampu PJU yang terpasang (titik) |
| | | | Pengadaan dan Pemasangan Penerangan Jalan Umum | Jumlah PJU yang dipasang (titik lampu) | 2 | 15 | 02 | 02 | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN | | Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota | | Jumlah Perlengkapan jalan (PJU) yang dipasang dan dipelihara |
| | | | | | 2 | 15 | 02 | 02 | 02 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN | | Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota | | Jumlah PJU yang Diadakan dan dipasang (unit) |
| | | | Pemeliharaan PJU | Jumlah lampu PJU yang di pelihara (unit) | 2 | 15 | 02 | 02 | 04 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN | | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan | | Jumlah lampu PJU yang di pelihara (unit) |
| | WAJIB | URUSAN PEMERINTAHAN | Program Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Pertanahan | Tersedianya Dokumen ganti rugi tanaman, bangunan dan penggantian lainnya | 2 | 10 | 05 | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENTAAAN RUANG | PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN | | | Persentase Kasus Pertanahan yang terfasilitasi (%) |

| PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA | | | | | PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 | | | | | | | | | |
|---|--------|---------------|--|--|---------------------------|----|----|------|----|--|---------|--|--|--|
| NO | URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM/KEGIATAN | Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output) | KODE | | | | | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | Pengadaan Ganti Rugi Tanah Silih Jariah, Tanaman, Bangunan dan Penggantian Lainnya | Tersedianya dokumen ganti rugi tanaman, bangunan dan penggantian lainnya (dok) | 2 | 10 | 05 | 2,01 | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENTAAAN RUANG | | Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | | Jumlah dokumen ganti rugi yang tersedia (dok) |
| | | | | | 2 | 10 | 05 | 2,01 | 02 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENTAAAN RUANG | | | Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Tersedianya dokumen ganti rugi tanaman, bangunan dan penggantian lainnya (dok) |

DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

| PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA | | | | | PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 | | | | | | | | | | |
|---|-----------|---------------------|--|--|---------------------------|----|----|------|----|---------------|----------------------------|--|-----------------------|---|--|
| NO | URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM/KEGIATAN | Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output) | KODE | | | | | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| | PENUNJANG | URUSAN PEMERINTAHAN | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran | 1 | 03 | 01 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | Terpenuhinya Sarana Prasarana Administrasi Perkantoran (%) |
| | | | | | 1 | 03 | 01 | 2,02 | | | URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | | Administrasi Keuangan | | Terfasilitasinya pelayanan administrasi keuangan (orang/bulan) |
| | | | Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Non PNS | Terlaksananya penyediaan jasa jaminan Pemeliharaan Kesehatan Non PNS (bln) | 1 | 03 | 01 | 2,02 | 01 | | URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | | | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Pegawai Non PNS yang dibayarkan(org/ Bln) |
| | | | Penyediaan jasa pelayanan pegawai Non PNS | Jumlah Pegawai Non PNS (orang) | 1 | 03 | 01 | 2,02 | 02 | | URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | | | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Terlaksananya penyediaan jasa jaminan Pemeliharaan Kesehatan Non PNS (bln) |
| | | | | | 1 | 03 | 01 | 2,03 | | | URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | | Administrasi Umum | | Terfasilitasinya pelayanan administrasi umum (bulan) |
| | | | Penyediaan jasa surat menyurat | Terlaksananya penyediaan surat menyurat (bulan) | 1 | 03 | 01 | 2,03 | 01 | | URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Terlaksananya penyediaan jasa jaminan Pemeliharaan Kesehatan Non PNS (bln) |

| PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA | | | | | PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 | | | | | | | | | |
|---|--------|---------------|--|---|---------------------------|----|----|------|----|----------------------------|---------|----------|--|---|
| NO | URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM/KEGIATAN | Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output) | KODE | | | | | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik | Ketersediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya, air dan Listrik (bulan) | 1 | 03 | 01 | 2.03 | 02 | URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | | | Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik | Ketersediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya, air dan Listrik (bln) |
| | | | Penatausahaan keuangan dan barang | Terselenggaranya penatausahaan keuangan dan barang (bulan) | 1 | 03 | 01 | 2.03 | 07 | URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | | | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | Tersedianya jasa administrasi Keuangan (bulan) |
| | | | Penyediaan jasa kebersihan kantor | Tersedianya alat dan bahan kebersihan kantor (bln) | 1 | 03 | 01 | 2.03 | 08 | URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | | | Penyediaan jasa kebersihan kantor | Tersedianya alat dan bahan kebersihan kantor (bln) |
| | | | Penyediaan alat tulis kantor | Tersedianya alat tulis kantor (bulan) | 1 | 03 | 01 | 2.03 | 10 | URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | | | Penyediaan alat tulis kantor | Tersedianya alat tulis kantor (bulan) |
| | | | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Tersedianya barang cetakan dan penggandaan (bulan) | 1 | 03 | 01 | 2.03 | 11 | URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | | | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Tersedianya barang cetakan dan penggandaan (bulan) |
| | | | Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor | Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor (bulan) | 1 | 03 | 01 | 2.03 | 12 | URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | | | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor (bulan) |
| | | | Penyediaan Dokumentasi & Dekorasi | Jumlah dokumentasi dan dekorasi yang disediakan (bulan) | 1 | 03 | 01 | 2.03 | 13 | URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | | | Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor | Jumlah dokumen dekorasi yang disediakan (bulan) |

| PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA | | | | | PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 | | | | | | | | | |
|---|-----------|---------------------|--|---|---------------------------|----|----|------|----|----------------------------|---------|----------|--|---|
| NO | URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM/KEGIATAN | Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output) | KODE | | | | | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan (bulan) | 1 | 03 | 01 | 2.03 | 15 | URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | | | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan (bulan) |
| | | | Penyediaan makanan dan minuman | Makanan dan minuman yang disediakan (bulan) | 1 | 03 | 01 | 2.03 | 17 | URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | | | Penyediaan makanan dan minuman | Makanan dan minuman yang disediakan (bulan) |
| | | | Rapat Koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang diikuti (bln) | 1 | 03 | 01 | 2.03 | 18 | URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | | | Rapat Koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang diikuti (bln) |
| | PENUNJANG | URUSAN PEMERINTAHAN | Pragam Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Ketersediaan fasilitas kendaraan dinas operasional (%) | 1 | 03 | 01 | | | URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | | | | |
| | | | Pengadaan Ruang Rapat beserta mobileir (paket) | Tersedianya ruang rapat beserta mobileir (paket) | 1 | 03 | 01 | 2.03 | 23 | URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | | | Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor | Jumlah ruang rapat yang diadakan (unit) |
| | | | Pengadaan Peralatan Gedung Kantor | Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan (paket) | 1 | 03 | 01 | 2.03 | 25 | URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | | | Pengadaan Peralatan Gedung Kantor | Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan (paket) |
| | | | | | 1 | 03 | 01 | 2.03 | 26 | URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | | | Pengadaan Mebeleur ruang rapat | Mebeleur ruang rapat yang disediakan (paket) |
| | | | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | Tersedianya pemeliharaan Gedung kantor (bulan) | 1 | 03 | 01 | 2.03 | 29 | URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | | | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | Tersedianya pemeliharaan Gedung kantor (bulan) |

| PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA | | | | | PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 | | | | | | | | | |
|---|--------|---------------------|--|--|---------------------------|----|----|-------|----|--|--------------------------------|---|--|--|
| NO | URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM/KEGIATAN | Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output) | KODE | | | | | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | Kendaraan Dinas yang dipelihara (bulan) | 1 | 03 | 01 | 2.03 | 31 | URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | | | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | Kendaraan Dinas yang dipelihara (bulan) |
| | | | Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor | Peralatan gedung kantor yang dipelihara (bulan) | 1 | 03 | 01 | 2.03 | 35 | URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | | | Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor | Peralatan gedung kantor yang dipelihara (bulan) |
| | | | Program Peningkatan Disiplin Aparatur | Persentase tingkat kedisiplinan pegawai (%) | 1 | 04 | 01 | 1.04 | | URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | | Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | | Persentase aparatur yang meningkat SDM nya (%) |
| | | | Pengadaan pakaian kerja lapangan | Pakaian kerja lapangan yang diadakan (orang) | 1 | 04 | 01 | 1.04 | 03 | URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | | | Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan | Pakaian kerja lapangan yang diadakan (orang) |
| | | | Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur | | | | | | | | | | | Terpenuhinya Sarana Prasarana Administrasi Perkantoran (%) |
| | | | Pendidikan dan pelatihan formal | Pendidikan dan pelatihan formal yang diikuti (bulan) | 1 | 04 | 01 | ### # | 09 | URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | | | Pendidikan dan Pelatihan Formal | Pendidikan dan pelatihan formal yang diikuti (bulan) |
| | WAJIB | URUSAN PEMERINTAHAN | Program Perbaikan Perumahan akibat bencana alam/sosial | | 1 | 04 | 02 | | | URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN | Program Pengembangan Perumahan | | | Persentase Luas Permukiman yang tertata (%) |

| PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA | | | | | PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 | | | | | | | | |
|---|--------|---------------|---|---|---------------------------|----|----|------|---------------|--|----------|--|---|
| NO | URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM/KEGIATAN | Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output) | KODE | | | | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | | | 1 | 04 | 02 | 2.03 | | URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN | | Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kab/Kota | |
| | | | Fasilitasi dan Stimulasi Rehabilitasi Rumah Akibat Bencana Alam | Persentase rumah yang rusak akibat bencana alam yang direhabilitasi (%) | 1 | 04 | 02 | 2.03 | 01 | URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN | | Rehabilitasi Rumah Bagi Korban Bencan | Jumlah Rumah yang direhab (unit) |
| | | | Operasional dan Pengelolaan Rusunawa | Jumlah kamar Rusunawa yang terkelola (kamar) | 1 | 04 | 02 | 2.05 | | URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN | | Pembinaan dan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan / atau Rumah Khusus | Persentase tingkat ketrhunian rumah susun (%) |
| | | | Pengadaan Sarana dan Prasarana Rusunawa | Jumlah sarana prasarana dan yang diadakan (jenis) | 1 | 04 | 02 | 2.05 | 01 | URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN | | Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun | Jumlah kamar Rusunawa yang terkelola (kamar) |
| | | | Pemeliharaan Rutin Sarana dan Prasarana Rusunawa | Terpeliharanya sarana dan prasarana Rusunawa (bulan) | 1 | 04 | 02 | 2.05 | 02 | URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN | | Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan / Rumah Khusus | Terpeliharanya sarana dan prasarana Rusunawa (bulan) |

| PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA | | | | | PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 | | | | | | | | | |
|---|--------|---------------------|--|--|---------------------------|----|----|------|----|--|---|---|---|---|
| NO | URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM/KEGIATAN | Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output) | KODE | | | | | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | | | | | | | | | | | | Jumlah saran dan prasarana yang diadakan (jenis) |
| | WAJIB | URUSAN PEMERINTAHAN | Program Pengembangan Perumahan (PD) | | 1 | 04 | 03 | | | URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN | Program kawasan permukiman serta Permukiman Kumuh | | | Persentase Penanganan Kawasan Kumuh (%) |
| | | | Fasilitasi dan pendampingan pencegahan kawasan kumuh | Jumlah Desa/Kel. yang didampingi pencegahan kawasan kumuh (Desa/Kel) | 1 | 04 | 03 | 2.02 | 01 | URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN | | Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 Ha | | Luas kawasan kumuh yang ditata(Ha) |
| | | | | | | | | | | URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN | | | Survei dan Penetapan Lokasi Penetapan Kawasan Kumuh | Jumlah lokasi survei (lokasi) |
| | | | | | 1 | 04 | 03 | 2.03 | | URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN | | Peningkatan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 Ha | | Luas rumah dikawasan kumuh yang ditingkatkan (unit) |

| PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA | | | | | PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 | | | | | | | | | |
|---|--------|---------------------|---|--|---------------------------|----|----|------|----|--|--|--|---|---|
| NO | URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM/KEGIATAN | Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output) | KODE | | | | | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | Pendamping Program BSPTS | Jumlah RTLH yang didampingi program BSPTS | 1 | 04 | 03 | 2.03 | 02 | URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN | | | Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh | Jumlah RTLH yang di perbaiki (unit) |
| | | | Pengadaan Sarana dan Prasarana Perumahan Masyarakat (DAK) | Jumlah RTLH yang tertangani (unit) | 1 | 04 | 03 | 2.03 | 03 | URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN | | | Kerja sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh | Jumlah RTLH yang tertangani (unit) |
| | WAJIB | URUSAN PEMERINTAHAN | Program Lingkungan Sehat Perumahan (PD) | | 1 | 03 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN | Program Pengelolaan dan Pengembangan sistem penyediaan air Minum | | | Persentase air limbah yang ditangani (%) |
| | | | Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Prioritas | Jumlah Sarana Prasarana perumahan dan permukiman yang tertata (lokasi) | 1 | 03 | 03 | 2.01 | | URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN | | Pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum (SPAM) di daerah kabupaten/kota | | Persentase Ipal yang dikelola (%) |
| | | | Dana Pendamping NUWSP | Terpenuhinya kebutuhan air minum masyarakat | 1 | 03 | 03 | 2.01 | 02 | URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN | | | Supervisi pembangunan/peningkatan/perluasan/perbaikan SPAM | Persentase pendampingan NUWSP (%) |

| PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA | | | | | PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 | | | | | | | | | |
|---|--------|---------------------|--|--|---------------------------|----|----|------|----|--|--|---|--|---|
| NO | URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM/KEGIATAN | Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output) | KODE | | | | | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | Pengadaan Jaringan Air Minum Sambungan ke Rumah (DAK) | Jumlah Jaringan perpipaan (SR) | 1 | 03 | 03 | 2.01 | 05 | URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN | | | Peningkatan SPAM dikawasan Perkotaan | Jumlah Jaringan perpipaan (SR) |
| | | | Hibab air Minum Perdesaan | Jumlah Jaringan perpipaan (SR) | 1 | 03 | 03 | 2.01 | 06 | URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN | | | Peningkatan SPAM dikawasan pedesaan | Jumlah Sarana dan Prasarana Pamsimas yang terehabilitasi (lokasi) |
| | WAJIB | URUSAN PEMERINTAHAN | Fasilitasi dan pendampingan program sanitasi berbasis masyarakat | Jumlah Rumah Tangga Terlayani IPAL Komunal (KK) | 1 | 03 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN | Program Pengelolaan dan Pengembangan sistem penyediaan air Minum | | | Persentase air limbah yang ditangani (%) |
| | | | | | 1 | 03 | 03 | 2.01 | | URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN | | Pengelolaan dan pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam daerah Kabupaten/Kota | | Persentase ipal yang dikelola (%) |
| | | | | | 1 | 03 | 03 | 2.01 | 03 | URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN | | | Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik | Jumlah Rumah Tangga Terlayani IPAL Komunal (KK) |

| PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA | | | | | PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 | | | | | | | | |
|---|--------|---------------------|---|---|---------------------------|----|----|------|---------------|--|--|---|---|
| NO | URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM/KEGIATAN | Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output) | KODE | | | | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | WAJIB | URUSAN PEMERINTAHAN | Pelaksanaan penyelesaian konflik-konflik pertanahan | Jumlah kasus pertanahan yang diselesaikan (kasus) | 02 | 10 | 04 | | | URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH BIDANG PERTANAHAN | Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan | | Persentase kasus pertanahan yang terfasilitasi (%) |
| | | | | | 02 | 10 | 04 | 2.01 | | URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH BIDANG PERTANAHAN | Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota | | Jumlah kegiatan penyelesaian sengketa tanah (Keg) |
| | | | | | 02 | 10 | 04 | 2.01 | 02 | URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH BIDANG PERTANAHAN | | Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1(satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah mediasi penyelesaian sengketa tanah yang diproses |
| | WAJIB | URUSAN PEMERINTAHAN | Program Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan | Persentase Pelayanan Informasi Pertanahan yang dilaksanakan (%) | 02 | 10 | 06 | | | URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH BIDANG PERTANAHAN | Program Redistribusi Tanah, serta Ganti kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee | | Jumlah kegiatan redistribusi tanah dan ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee yang dilaksanakan |

| PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA | | | | | PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 | | | | | | | | | |
|---|--------|---------------------|--|---|---------------------------|----|----|------|---------------|--|--------------------------------|---|---|--|
| NO | URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM/KEGIATAN | Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output) | KODE | | | | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| | | | | | 02 | 10 | 06 | 2.01 | | URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH BIDANG PERTANAHAN | | Penetapan subjek dan objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | | Jumlah subjek dan objek redistribusi tanah serta ganti kerugian tanah, kelebihan maksimum dan tanah absentee yang ditetapkan (dok) |
| | | | Inventarisasi dan pengolahan Data Pertanahan | Jumlah Subjek dan objek data pertanahan yang tersedia (dokumen) | 02 | 10 | 06 | 2.01 | 01 | URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH BIDANG PERTANAHAN | | | Iventarisasi subjek dan Objek Redistribusi Tanah | Jumlah subjek dan objek data pertanahan yg tersedia (dok) |
| | | | | | 02 | 10 | 06 | 2.01 | 02 | URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH BIDANG PERTANAHAN | | | Jumlah peta subjek dan objek tanah yang tersedia | Jumlah peta subjek dan objek tanah yang tersedia |
| | | | | | | | | | | URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH BIDANG PERTANAHAN | | | | |
| | WAJIB | URUSAN PEMERINTAHAN | Program Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan | Persentase Pelayanan Informasi Pertanahan yang dilaksanakan (%) | 02 | 10 | 07 | | | URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH BIDANG PERTANAHAN | Program Penetapan Tanah Ulayat | | | Jumlah kegiatan penetapan tanah ulayat (dokumen) |

| PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA | | | | | PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 | | | | | | | | |
|---|--------|---------------------|--|---|---------------------------|----|----|------|---------------|--|--|---|---|
| NO | URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM/KEGIATAN | Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output) | KODE | | | | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | | | 02 | 10 | 07 | 2.01 | | URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH BIDANG PERTANAHAN | | Penetapan Tanah Ulayat yang Lokasinya dalam Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah penetapan tanah ulayat yang lokasinya dalam kab/kota (dokumen) |
| | | | Pemetaan/Geospasial | Jumlah Subjek dan Objek peta yang tersedia (Dokumen) | 02 | 10 | 07 | 2.01 | 01 | URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH BIDANG PERTANAHAN | | Koordinasi dan Sinkronisasi Survei dan Pemetaan Batas Tanah Ulayat dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah koordinasi dan sinkronisasi survey dan pemetaan batas tanah ulayat dalam satu daerah (dok) |
| | WAJIB | URUSAN PEMERINTAHAN | Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah | Persentase tanah budidaya yang memiliki aspek hukum (%) | 02 | 10 | 09 | | | URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH BIDANG PERTANAHAN | Program Pengelolaan Izin Membuka Tanah | | Persentase penerbitan izin dikeluarkan (%) |
| | | | | | 02 | 10 | 09 | 2.01 | | URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH BIDANG PERTANAHAN | | Penerbitan Izin Membuka Tanah | Jumlah kegiatan pengelolaan izin membuka tanah |
| | | | | | | | | | | URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH BIDANG PERTANAHAN | | | Jumlah proses pendaftaran hak tanah |
| | | | Pengukuran, Tunjuk Batas dan Pendaftaran Hak Atas Tanah Pemerintah Kota Sawahlunto | Jumlah Bidang Tanah yang di ukur dan ditunjuk batas (Dokumen) | 02 | 10 | 09 | 2.01 | 02 | URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH BIDANG PERTANAHAN | | Pengendalian Pemanfaatan Tanah | Jumlah tunjuk batas tanah |

| PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA | | | | | PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 | | | | | | | | |
|---|--------|---------------------|--|---|---------------------------|----|----|------|---------------|--|--|---|--|
| NO | URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM/KEGIATAN | Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output) | KODE | | | | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | | | | | | | | URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH BIDANG PERTANAHAN | | | Jumlah bidang tanah yang difasilitasi melalui PTSL |
| | WAJIB | URUSAN PEMERINTAHAN | Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah | Persentase tanah budidaya yang memiliki aspek hukum (%) | 02 | 10 | 10 | | | URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH BIDANG PERTANAHAN | Program Penatagunaan Tanah | | Persentase pengelolaan tanah sesuai dengan peruntukan (%) |
| | | | | | 02 | 10 | 10 | 2.01 | | URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH BIDANG PERTANAHAN | Penggunaan Tanah yang hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota | | Jumlah kegiatan penatagunaan tanah yang dilaksanakan (kegiatan) |
| | | | Penataan Administrasi dan penatagunaan tanah | Jumlah pendampingan proses perizinan yang dilaksanakan | 02 | 10 | 10 | 2.01 | 01 | URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH BIDANG PERTANAHAN | | Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah | Jumlah koorinasi dan singkronisasi perencanaan penggunaan tanah (kegiatan) |
| | | | Faslitasi Program PTSL | Jumlah Bidang tanah yang di fasilitasi untuk pendaftaran tanah (Bidang) | 02 | 10 | 10 | 2.01 | 03 | URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH BIDANG PERTANAHAN | | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsultasi Tanah Kabupaten/Kota | Jumlah pelaksanaan koordinasi, singkronisasi dan konsultasi tanah |
| | | | | Jumlah kegiatan sistem aplikasi pertanahan yang dipelihara (kegiatan) | | | | | | | | Operasional/Pemeliharaan sistem aplikasi pertanahan | |

| PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA | | | | | PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 | | | | | | | | |
|---|--------|---------------------|---|--|---------------------------|----|----|------|---------------|--|--|--|---|
| NO | URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM/KEGIATAN | Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output) | KODE | | | | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | | Jumlah pendampingan proses pengadaan tanah yang dilakukan (Bidang) | | | | | | | | Pendampingan Proses Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum | |
| | WAJIB | URUSAN PEMERINTAHAN | URUSAN WAJIB LINGKUNGAN HIDUP | IKLH (Indeks Kualitas Lingkungan Hidup) | 2 | 11 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH BIDANG LINGKUNGAN HIDUP | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP | | IKLH (Indeks Kualitas Lingkungan Hidup) |
| | | | Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup (PD) | Persentase ketaatan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan | 02 | 11 | 03 | | | URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH BIDANG LINGKUNGAN HIDUP | Program Pengendalian Pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup | | Persentase ketaatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan (%) |
| | | | | | 02 | 11 | 03 | 2.01 | | URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH BIDANG LINGKUNGAN HIDUP | Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota | | Jumlah Kegiatan PPKL yang dilaksanakan |
| | | | Pengelolaan UPTD Laboratorium Lingkungan | Jumlah UPTD Laboratorium lingkungan yang dikelola (unit) | 02 | 11 | 03 | 2.01 | 01 | URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH BIDANG LINGKUNGAN HIDUP | Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota | Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pencegahan pencemaran lingkungan hidup dilaksanakan terhadap media tanah, air, udara dan laut | Jumlah UPTD Laboratorium lingkungan yang dikelola (unit) |

| PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA | | | | | PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 | | | | | | | | | |
|---|--------|---------------------|--|--|---------------------------|----|----|------|----|--|--|--|---|---|
| NO | URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM/KEGIATAN | Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output) | KODE | | | | | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | Sosialisasi pengelolaan lingkungan dan pengendalian pencemaran terhadap masyarakat | Jumlah peserta yang mengikuti acara sosialisasi (orang) | 02 | 11 | 03 | 2.01 | 02 | URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH BIDANG LINGKUNGAN HIDUP | | Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota | Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pengendalian emisi gas rumah kaca, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim | Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan (orang) |
| | | | | | 02 | 11 | 03 | 2.01 | 03 | URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH BIDANG LINGKUNGAN HIDUP | | | Pemulihan Pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kab/kota | Luas lahan tambang yang direklamasi (Ha) |
| | WAJIB | URUSAN PEMERINTAHAN | Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) (PD) | Persentase RTH terhadap luas wilayah kota % | 02 | 11 | 04 | | | URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH BIDANG LINGKUNGAN HIDUP | Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI) | | | Persentase RTH terhadap luas wilayah kota (%) |
| | | | | | 02 | 11 | 04 | 2.01 | | URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH BIDANG LINGKUNGAN HIDUP | | Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kab/Kota | | Luas RTH yang terpelihara (M ²) |
| | | | Pemeliharaan Hutan Kota | Luas Hutan Kota yg dipelihara (Ha) | 02 | 11 | 04 | 2.01 | 02 | URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH BIDANG LINGKUNGAN HIDUP | | | Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan | Luas hutan kota yang dipelihara (Ha) |
| | | | Pemeliharaan Rutin Taman Kota | Jumlah taman kota yang dipelihara (lokasi) | 02 | 11 | 04 | 2.01 | 04 | URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH BIDANG LINGKUNGAN HIDUP | | | Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau | Jumlah taman kota yang dipelihara (lokasi) |

| PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA | | | | | PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 | | | | | | | | | |
|---|--------|---------------------|---|--|---------------------------|----|----|------|----|--|--|--|--|---|
| NO | URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM/KEGIATAN | Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output) | KODE | | | | | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | Pembibitan Tanaman Hias | Jumlah tanaman hias yang dibibitkan (polybag) | 0 2 | 11 | 04 | 2.01 | 07 | URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH BIDANG LINGKUNGAN HIDUP | | | Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati | Jumlah tanaman hias yang dibibitkan (polybag) |
| | WAJIB | URUSAN PEMERINTAHAN | Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup (PD) | Persentase ketaatan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan | 0 2 | 11 | 05 | | | URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH BIDANG LINGKUNGAN HIDUP | Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun / B3 dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) | | | Persentase kegiatan/usaha yang memiliki izin PLB3 (%) |
| | | | | | 0 2 | 11 | 05 | 2.02 | | URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH BIDANG LINGKUNGAN HIDUP | | Pengumpulan Limbah B3 dalam satu Daerah Kab/Kota | | Jumlah kegiatan pengumpulan LB3 yang dilaksanakan |
| | | | Pengelolaan B3 dan limbah B3 (DAK) | jumlah kegiatan penghasil LB3 yang berizin (kegiatan) | 0 2 | 11 | 05 | 2.02 | 02 | URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH BIDANG LINGKUNGAN HIDUP | | | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam Rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan dan/ atau Penimbunan | Jumlah laporan pengawasan LB3 yang dibuat (dok) |

| PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA | | | | | PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 | | | | | | | | |
|---|--------|---------------------|---|---|---------------------------|----|----|------|---------------|--|--|--|---|
| NO | URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM/KEGIATAN | Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output) | KODE | | | | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | WAJIB | URUSAN PEMERINTAHAN | | | 2 | 11 | 06 | | | URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH BIDANG LINGKUNGAN HIDUP | Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) | | Persentase ketaatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan |
| | | | | | 2 | 11 | 06 | 2.01 | | URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH BIDANG LINGKUNGAN HIDUP | Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan / atau Kegiatan Yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota | | Jumlah kegiatan/usaha yang dilaksanakan pembinaan |
| | | | Pengkajian Dampak Lingkungan | jumlah dokumen lingkungan hidup yang dinilai (dok) | 2 | 11 | 06 | 2.01 | 01 | URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH BIDANG LINGKUNGAN HIDUP | | Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dsan / atau Izin PPLH | jumlah dokumen lingkungan hidup yang dinilai (dok) |
| | | | Pengawasan dan Pengendalian Pencemaran Lingkungan | jumlah usaha yang diawasi dan dipantau dampak lingkungannya (usaha) | 2 | 11 | 06 | 2.01 | 03 | URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH BIDANG LINGKUNGAN HIDUP | | Pengawasan Usaha dan/ atau kegiatan Yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH Yang Diterbitkan Oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota | jumlah usaha yang diawasi dan dipantau dampak lingkungannya (usaha) |

| PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA | | | | | PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 | | | | | | | | | |
|---|--------|---------------------|--|--|---------------------------|----|----|------|----|--|---|----------|--|--|
| NO | URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM/KEGIATAN | Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output) | KODE | | | | | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | Peningkatan Kinerja Lingkungan | | 2 | 11 | 06 | 2.01 | 04 | URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH BIDANG LINGKUNGAN HIDUP | | | Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan dan penerapan sanksi upaya dan rencana PPLH | |
| | | | Program Peningkatan Kualitas dan akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup | Persentase masyarakat yang mendapat akses informasi tentang lingkungan hidup | | | | | | | | | | |
| | WAJIB | URUSAN PEMERINTAHAN | Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam (PD) | Persentase Wilayah yang dilaksanakan konservasi SDA (%) | 02 | 11 | 08 | | | URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH BIDANG LINGKUNGAN HIDUP | Program peningkatan pendidikan pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat | | | Persentase masyarakat yang mendapat akses diklat/penyuluhan tentang lingkungan hidup (%) |
| | | | | | 02 | 11 | 08 | 2.01 | | URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH BIDANG LINGKUNGAN HIDUP | Penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan tingkat daerah kabupaten kota | | | Jumlah kegiatan diklat/penyuluhan yang dilaksanakan (kegiatan) |

| PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA | | | | | PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 | | | | | | | | | |
|---|--------|---------------------|---|---|---------------------------|----|----|------|----|--|--|----------|---|--|
| NO | URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM/KEGIATAN | Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output) | KODE | | | | | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | Pengendalian dampak perubahan iklim | jumlah kampung iklim yang dibentuk (kaw) | 02 | 11 | 08 | 2.01 | 01 | URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH BIDANG LINGKUNGAN HIDUP | | | Peningkatan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia bidang lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan | Jumlah lokasi kampung iklim yang dibentuk (lokasi) |
| | | | Pembinaan Pramuka Saka Kalpataru | jumlah siswa-i anggota saka kalpataru dan menjadi pelopor lingkungan di sekolah (siswa-i) | 02 | 11 | 08 | 2.01 | 02 | URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH BIDANG LINGKUNGAN HIDUP | | | Pendampingan gerakan peduli lingkungan hidup | Jumlah siswa-i anggota saka kalpataru yg menjadi pelapor lingkungan |
| | WAJIB | URUSAN PEMERINTAHAN | Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam (PD) | Persentase Wilayah yang dilaksanakan konservasi SDA (%) | 02 | 11 | 09 | | | URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH BIDANG LINGKUNGAN HIDUP | Program penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat | | | Jumlah penghargaan bidang LH yang diperoleh |
| | | | | | 02 | 11 | 09 | 2.01 | | URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH BIDANG LINGKUNGAN HIDUP | Pemberian penghargaan lingkungan hidup tingkat daerah kabupaten/kota | | | Jumlah penghargaan lingkungan hidup yang diselenggarakan |
| | | | Peringatan Hari-hari Lingkungan Hidup Tingkat Kota | jumlah kegiatan yang dilaksanakan (kegiatan) | 02 | 11 | 09 | 2.01 | 01 | URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH BIDANG LINGKUNGAN HIDUP | | | Penilaian kinerja masyarakat/lembaga masyarakat / dunia usaha / dunia pendidikan / filantropi dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup | Jumlah kegiatan yg dilaksanakan dalam peringatan Hari-hari Lingkungan Hidup Tingkat Kota |

| PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA | | | | | PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 | | | | | | | | | |
|---|--------|---------------------|---|--|---------------------------|----|----|------|---------------|--|---------------------------------|--------------------|--|--|
| NO | URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM/KEGIATAN | Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output) | KODE | | | | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| | | | | | | | | | | URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH BIDANG LINGKUNGAN HIDUP | | | Jumlah lokasi Adipura yang dipantau dan dibenahi | |
| | WAJIB | URUSAN PEMERINTAHAN | Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan (PD) | Persentase sampah tertangani dengan timbulan sampah (%) | 02 | 11 | 11 | | | URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH BIDANG LINGKUNGAN HIDUP | Program Pengelolaan Persampahan | | Persentase sampah tertangani dengan timbulan sampah (%) | |
| | | | | Persentase sampah berkurang dengan timbulan sampah (%) | | | | | | URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH BIDANG LINGKUNGAN HIDUP | | | Persentase sampah berkurang dengan timbulan sampah (%) | |
| | | | | | 02 | 11 | 11 | 2.01 | | URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH BIDANG LINGKUNGAN HIDUP | | Pengelolaan Sampah | Persentase Desa/Kelurahan yang terlayani (%) | |
| | | | Pengembangan teknologi pengolahan persampahan | Jumlah mesin pengolahan sampah yang diadakan (unit) | 02 | 11 | 11 | 2.01 | 02 | URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH BIDANG LINGKUNGAN HIDUP | | | Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali | Jumlah peralatan daur ulang yang diadakan (unit) |

| PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA | | | | | PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 | | | | | | | | | |
|---|--------|---------------|---|---|---------------------------|----|----|------|----|--|---------|----------|--|--|
| NO | URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM/KEGIATAN | Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output) | KODE | | | | | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | Peningkatan pelaksanaan dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan | Jumlah sarana dan prasarana persampahan yang dibayarkan operasionalnya (unit) | 02 | 11 | 11 | 2.01 | 03 | URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH BIDANG LINGKUNGAN HIDUP | | | Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kab/Kota | Jumlah penanganan sampah yang dilakukan (keg) |
| | | | Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan | Jumlah dan jenis sarana dan prasarana persampahan yang diadakan (jenis) | 02 | 11 | 11 | 2.01 | 05 | URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH BIDANG LINGKUNGAN HIDUP | | | Koordinasi dan Singkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan | Jumlah sarana dan prasarana sampah yang diadakan (jenis) |

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

| PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA | | | | | PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 | | | | | | | | | |
|---|--------------|---------------|--|--|---------------------------|----|----|------|---------------|--------------|--|-------------------|--|--|
| NO | URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM/KEGIATAN | Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output) | KODE | | | | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 1 | Urusan Wajib | Kanrantibmas | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Persentase pelayanan administrasi perkantoran yang terlaksana (%) | 1 | 05 | 01 | | | Kanrantibmas | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | Tersedianya sarana pelayanan Administrasi Perkantoran (%) |
| | | | | | | | | | | | | | | Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur |
| | | | | | | | | | | | | | | Persentase Aparatur yang meningkat SDM nya |
| | | | | | | | | | | | | | | Persentase ASN Berpakaian Dinas dengan Atribut Lengkap |
| | | | | | | | | | | | | | | Terwujudnya Pembinaan dan Pengembangan Aparatur |
| 2 | Urusan Wajib | Kanrantibmas | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Persentase pelayanan administrasi perkantoran yang terlaksana (%) | 1 | 05 | 01 | 2,03 | | Kanrantibmas | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Administrasi Umum | | Terfasilitasinya pelayanan administrasi umum (orang/bulan) |
| 3 | Urusan Wajib | Kanrantibmas | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Tersedianya jasa surat menyurat (bulan) | 1 | 05 | 01 | 2,03 | 01 | Kanrantibmas | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Administrasi Umum | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah materai yang disediakan (bulan) |
| 4 | Urusan Wajib | Kanrantibmas | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya, air dan Listrik | Ketersediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya, air dan Listrik (bulan) | 1 | 05 | 01 | 2,03 | 02 | Kanrantibmas | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Administrasi Umum | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya, air dan Listrik | Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik yang dibayarkan (bulan) |

| PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA | | | | | PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 | | | | | | | | | |
|---|--------------|---------------|---|---|---------------------------|----|----|------|----|---------------|--|-------------------|--|---|
| NO | URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM/KEGIATAN | Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output) | KODE | | | | | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 5 | Urusan Wajib | Kanrantibmas | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | Jumlah jasa administrasi keuangan yang disediakan (bulan) | 1 | 05 | 01 | 2,03 | 07 | Kanrantibmas | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Administrasi Umum | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan dan Barang | Jasa administrasi keuangan yang dibayarkan (bulan) |
| 6 | Urusan Wajib | Kanrantibmas | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | Jumlah alat kebersihan kantor yang disediakan(bulan) | 1 | 05 | 01 | 2,03 | 08 | Kanrantibmas | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Administrasi Umum | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | Jumlah alat kebersihan kantor yang disediakan (bulan) |
| 7 | Urusan Wajib | Kanrantibmas | Penyediaan Alat Tulis Kantor | Jumlah ATK yang disediakan (bulan) | 1 | 05 | 01 | 2.03 | 10 | Kanrantibmas | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Administrasi Umum | Penyediaan Alat Tulis Kantor | Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (bulan) |
| 8 | Urusan Wajib | Kanrantibmas | Penyediaan Barang cetakan dan Penggandaan | Jumlah Barang cetakan yang disediakan (bulan) | 1 | 05 | 01 | 2.03 | 11 | Kanrantibmas | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Administrasi Umum | Penyediaan Barang cetakan dan Penggandaan | Jumlah barang cetak dan penggandaan yang disediakan (bulan) |
| 9 | Urusan Wajib | Kanrantibmas | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik dan penerangan Kantor | Jumlah Komponen Listrik yang disediakan (bulan) | 1 | 05 | 01 | 2.03 | 12 | Kanrantibmas | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Administrasi Umum | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yg disediakan (bulan) |
| 10 | Urusan Wajib | Kanrantibmas | Penyediaan makanan dan minuman | Jumlah makanan dan minuman yang tersedia (bulan) | 1 | 05 | 01 | 2.03 | 17 | Kanrantibmas | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Administrasi Umum | Penyediaan makanan dan minuman | Jumlah makanan dan minuman yang tersedia (bulan) |
| 11 | Urusan Wajib | Kanrantibmas | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | jumlah kunjungan studi banding, rapat dan konsultasi (sosialisasi) yang diikuti (bulan) | 1 | 05 | 01 | 2.03 | 18 | Kanrantibmas | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Administrasi Umum | Rapat-rapat koordinasi ke luar daerah | Jumlah kunjungan studi banding, rapat dan konsultasi (sosialisasi) yang diikuti (bulan) |

| PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA | | | | | PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 | | | | | | | | | |
|---|--------------|---------------|--|--|---------------------------|--|----|---------------|---------|--------------|--|---|--|---|
| NO | URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM/KEGIATAN | Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output) | KODE | | | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | |
| 13 | Urusan Wajib | Kanrantibmas | Penyediaan Jasa Pelayanan pegawai Non PNS | Jumlah ketersediaan jasa Pegawai Non PNS (Orang) | | | 01 | | | Kanrantibmas | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | Tersedianya sarana pelayanan administrasi perkantoran (%) | |
| 14 | Urusan Wajib | Kanrantibmas | Penyediaan Jasa Pelayanan pegawai Non PNS | Jumlah ketersediaan jasa Pegawai Non PNS (Orang) | | | 01 | 2,02 | | Kanrantibmas | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Administrasi Keuangan | Terfasilitasinya pelayanan administrasi keuangan (orang/bulan) | |
| 15 | Urusan Wajib | Kanrantibmas | Penyediaan Jasa Pelayanan pegawai Non PNS | Jumlah ketersediaan jasa Pegawai Non PNS (Orang) | | | 01 | 2,02 | 01 | Kanrantibmas | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Administrasi Keuangan | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah pegawai non PNS yang difasilitasi (orang) |
| 16 | Urusan Wajib | Kanrantibmas | Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Non PNS | Jumlah Tenaga Non PNS yang dipelihara kesehatannya (73 orang) | | | 01 | 2,02 | 02 | Kanrantibmas | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Administrasi Keuangan | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah pegawai Non PNS yang difasilitasi kesehatannya (orang) |
| 17 | Urusan Wajib | Kanrantibmas | Penyediaan Dokumentasi dan Dekorasi | Jumlah dokumentasi dan dekorasi yang disediakan (jenis) | | | 01 | 2.03 | 03 | Kanrantibmas | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Administrasi Umum | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah dokumentasi dan dekorasi yang disediakan (bulan) |
| 18 | Urusan Wajib | Kanrantibmas | Penyediaan Logistik kantor | Jumlah logistik kantor yang disediakan (bulan) | | | 01 | 2.03 | 16 | Kanrantibmas | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Administrasi Umum | Penyediaan Logistik kantor | Jumlah logistik kantor yang disediakan (bulan) |
| 19 | Urusan Wajib | Kanrantibmas | Pengadaan Peralatan gedung kantor | Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan (unit) | | | 01 | 2.03 | 24 | Kanrantibmas | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Administrasi Umum | Pengadaan Peralatan gedung kantor | Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan (unit) |

| PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA | | | | | PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 | | | | | | | |
|---|--------------|---------------|--|---|---------------------------|--|------------|---------------|--|---|--|--|
| NO | URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM/KEGIATAN | Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output) | KODE | | | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 20 | Urusan Wajib | Kanrantibmas | Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional | Jumlah Kendaraan Dinas yang dipelihara (Bulan) | | | 01 2.03 30 | Kanrantibmas | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Administrasi Umum | Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional | Jumlah kendaraan dinas roda 4 dan roda 2 yang dipelihara (bulan) |
| 21 | Urusan Wajib | Kanrantibmas | Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor | Jumlah Peralatan gedung kantor yang dipelihara (bulan) | | | 01 2.03 34 | Kanrantibmas | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Administrasi Umum | Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor | Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara (bulan) |
| 22 | Urusan Wajib | Kanrantibmas | Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubeleur | Jumlah meubiler yang dipelihara (paket) | | | 01 2.03 36 | Kanrantibmas | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Administrasi Umum | Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubeleur | Jumlah meubiler yang dipelihara (paket) |
| 23 | Urusan Wajib | Kanrantibmas | Program Peningkatan Disiplin Aparatur | Persentase peningkatan disiplin aparatur (%) | | | 01 2.04 | Kanrantibmas | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | | - Persentase aparatur yang meningkat SDM nya (%) - Persentase ASN berpakaian dinas dengan atribut lengkap (%) |
| 24 | Urusan Wajib | Kanrantibmas | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta kelengkapannya | Jumlah pakaian dinas Satpol PP dan Damkar yang diadakan (stel lengkap) | | | 01 2.04 02 | Kanrantibmas | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta kelengkapannya | Jumlah pakaian dinas yang diadakan (paket) |
| 25 | Urusan Wajib | Kanrantibmas | Pendidikan dan Pelatihan Formal | Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal (org) | | | 01 2.04 09 | Kanrantibmas | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Pendidikan dan Pelatihan Formal | Jumlah pendidikan dan pelatihan formal yang diikuti (kali) |
| 26 | Urusan Wajib | Kanrantibmas | Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan | Persentase gangguan keamanan dan ketertiban yang tertangani secara terpadu /total jumlah gangguan x 100 % | | | 02 | Kanrantibmas | Peningkatan Ketertarikan dan Ketertiban Umum | | | Persentase Gangguan Keamanan yang ditangani secara terpadu |

| PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA | | | | | PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 | | | | | | | | |
|---|--------------|---------------|--|---|---------------------------|--|----|------|---------------|--------------|---|--|---|
| NO | URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM/KEGIATAN | Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output) | KODE | | | | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | | | | | | | | | | | Persentase penegakan perda (%) |
| | | | | | | | | | | | | | Persentase Penurunan Penyakit Masyarakat (%) |
| 27 | Urusan Wajib | Kanrantibmas | Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan | Persentase gangguan keamanan dan ketertiban yang tertangani secara terpadu /total jumlah gangguan x 100 % | | | 02 | 2,01 | | Kanrantibmas | Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum | Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Dalam Satu Daerah Kab/Kota | Terpenuhinya patroli daerah di tiap-tiap kecamatan yang ada di Kota Sawahlunto (4 Kec x 4 KP x 100 %) |
| 28 | Urusan Wajib | Kanrantibmas | Pengendalian Keamanan Lingkungan | Jumlah penertiban dan pengamanan yang dilakukan (kali) | | | 02 | 2,01 | 01 | Kanrantibmas | Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum | Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Dalam Satu Daerah Kab/Kota | Jumlah kegiatan ketentraman dan ketertiban yang dilaksanakan (kegiatan) |
| 29 | Urusan Wajib | Kanrantibmas | Kegiatan Operasional TIM SK4 | Jumlah kasus yang tertangani (berkas) | | | 02 | 2,01 | 02 | Kanrantibmas | Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum | Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Dalam Satu Daerah Kab/Kota | Jumlah kasus yang di selesaikan (kasus) |
| 30 | Urusan Wajib | Kanrantibmas | Pelatihan Mental dan Fisik bagi anggota Linmas | Jumlah anggota linmas yang mengikuti pelatihan (orang) | | | 02 | 2,01 | 05 | Kanrantibmas | Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum | Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Dalam Satu Daerah Kab/Kota | Jumlah aparat satpol PP dan Linmas yang meningkat kapasitas SDM nya (orang) |
| 31 | Urusan Wajib | Kanrantibmas | Program Pemeliharaan Kanrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal | Persentase Penegakan Perda (%) | | | 02 | | | Kanrantibmas | Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum | | Persentase Gangguan Ketertiban dan Ketentraman yang teratasi (%) |

| PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA | | | | | PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 | | | | | | | | | |
|---|--------------|---------------|---|--|---------------------------|--|----|---------------|---------|--------------|---|---|--|---|
| NO | URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM/KEGIATAN | Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output) | KODE | | | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | |
| 32 | Urusan Wajib | Kanrantibmas | Program Pemeliharaan Kanrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal | Persentase Penegakan Perda (%) | | | 02 | 2.02 | | Kanrantibmas | Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum | Penegakan Perda Kab/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota | Jumlah Perda dan Perkada yang ditegakkan (perda) | |
| 33 | Urusan Wajib | Kanrantibmas | Pembinaan Ketaatan terhadap PERDA bagi Generasi Muda dan Masyarakat | Jumlah peserta yang mengikuti pembinaan Perda (orang) | | | 02 | 2.02 | 01 | Kanrantibmas | Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum | Penegakan Perda Kab/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota | Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | Jumlah Peserta yang mengikuti Sosialisasi perda (orang) |
| 34 | Urusan Wajib | Kanrantibmas | Penunjang Operasional PPNS | Jumlah kasus yang tertangani (berkas) | | | 02 | 2.02 | 03 | Kanrantibmas | Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum | Penegakan Perda Kab/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota | Penanganan atas pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | Jumlah kasus yang terselesaikan (berkas) |
| 35 | Urusan Wajib | Kanrantibmas | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Persentase aparatur yang meningkat SDM nya (%) | | | 02 | 2.03 | | Kanrantibmas | Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum | Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kab/Kota | | Terpenuhinya aparatur yang mengikuti Pembinaan PPNS (orang) |
| 36 | Urusan Wajib | Kanrantibmas | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Persentase aparatur yang meningkat SDM nya (%) | | | 02 | 2.03 | 01 | Kanrantibmas | Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum | Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kab/Kota | Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS | Jumlah aparatur yang meningkat SDM nya (orang) |
| 37 | Urusan Wajib | Kanrantibmas | Program Pencegahan dan Penanggulangan Bencana Kebakaran | Jumlah kasus kebakaran yang tertangani secara terpadu/total jumlah kebakaran x 100 % | | | 04 | | | Kanrantibmas | Penanggulangan Kebakaran | | | Jumlah kasus kebakaran yang ditangani secara terpadu/Total Jumlah kebakaran x 100 % |
| | | | | | | | | | | | | | Persentase kerjasama penanganan pencegahan (%) | |

| PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA | | | | | PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 | | | | | | | | |
|---|--------------|---------------|---|--|---------------------------|--|----|---------------|---------|--------------|--------------------------|--|---|
| NO | URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM/KEGIATAN | Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output) | KODE | | | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 38 | Urusan Wajib | Kanrantibmas | Program Pencegahan dan Penanggulangan Bencana Kebakaran | Jumlah kasus kebakaran yang tertangani secara terpadu/total jumlah kebakaran x 100 % | | | 04 | 2,01 | | Kanrantibmas | Penanggulangan Kebakaran | Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kab/Kota | Tersedianya SOP penanganan bahaya kebakaran (laporan) |
| 39 | Urusan Wajib | Kanrantibmas | Operasional Lapangan Pemadam Kebakaran | Jumlah Kasus Bencana yang ditangani (Kasus) | | | 04 | 2,01 | 01 | Kanrantibmas | Penanggulangan Kebakaran | Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kab/Kota | Jumlah Kasus Bencana yang ditangani (Kasus) |
| 40 | Urusan Wajib | Kanrantibmas | Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran | Jumlah kasus kebakaran (kasus) | | | 04 | 2,01 | 02 | Kanrantibmas | Penanggulangan Kebakaran | Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kab/Kota | Jumlah kasus kebakaran yang terselesaikan (kasus) |
| 41 | Urusan Wajib | Kanrantibmas | Program Peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran | Jumlah kasus kebakaran yang tertangani secara terpadu/total jumlah kebakaran x 100 % | | | 04 | 2,04 | | Kanrantibmas | Penanggulangan Kebakaran | Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran | Sosialisasi yang diadakan (Kegiatan) |

| PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA | | | | | PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 | | | | | | | | | |
|---|--------------|---------------|--|--|---------------------------|--|----|---------------|---------|--------------|--------------------------|---|--|---|
| NO | URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM/KEGIATAN | Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output) | KODE | | | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | |
| 42 | Urusan Wajib | Kanrantibmas | Penyuluhan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran | Jumlah peserta yang mengikuti penyuluhan (orang) | | | 04 | 2,04 | 01 | Kanrantibmas | Penanggulangan Kebakaran | Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran | Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan penanggulangan kebakaran melalui sosialisasi dan edukasi masyarakat | Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi dan edukasi (orang) |

DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

| PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA | | | | | PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 | | | | | | | | | |
|---|--------|---------------------------------|--|--|---------------------------|----|----|------|----|---------------------------------|--|-------------------|--|--|
| NO | URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM/KEGIATAN | Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output) | KODE | | | | | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | WAJIB | URUSAN PEMERINTAH BIDANG SOSIAL | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Tersedianya sarana pelayanan administrasi perkantoran | | | | | | | | | | |
| | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Surat masuk dan surat keluar (bulan) | 1 | 06 | 01 | 2,03 | 01 | URUSAN PEMERINTAH BIDANG SOSIAL | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Administrasi Umum | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Surat masuk dan surat keluar (bulan) |
| | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah rekening Telepon, Air dan Listrik yang dibayarkan (bulan) | 1 | 06 | 01 | 2,03 | 02 | URUSAN PEMERINTAH BIDANG SOSIAL | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Administrasi Umum | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah rekening Telepon, Air dan Listrik yang dibayarkan (bulan) |
| | | | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | jumlah bahan kebersihan yang disediakan (bulan) | 1 | 06 | 01 | 2,03 | 08 | URUSAN PEMERINTAH BIDANG SOSIAL | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Administrasi Umum | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | jumlah bahan kebersihan yang disediakan (bulan) |
| | | | Penyediaan Alat Tulis Kantor | Jumlah ATK yang disediakan (bulan) | 1 | 06 | 01 | 2,03 | 10 | URUSAN PEMERINTAH BIDANG SOSIAL | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Administrasi Umum | Penyediaan Alat Tulis Kantor | Jumlah ATK yang disediakan (bulan) |
| | | | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah barang cetakan dan penggandaan serta jiid yang diadakan (bulan) | 1 | 06 | 01 | 2,03 | 11 | URUSAN PEMERINTAH BIDANG SOSIAL | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Administrasi Umum | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah barang cetakan dan penggandaan serta jiid yang diadakan (bulan) |
| | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah komponen alat listrik yang diadakan (bulan) | 1 | 06 | 01 | 2,03 | 12 | URUSAN PEMERINTAH BIDANG SOSIAL | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Administrasi Umum | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah komponen alat listrik yang diadakan (bulan) |

| PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA | | | | | PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 | | | | | | | | | |
|---|--------|---------------|--|---|---------------------------|----|----|------|----|---------------------------------|--|-----------------------|--|---|
| NO | URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM/KEGIATAN | Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output) | KODE | | | | | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan perundang-undangan | Jumlah bahan bacaan dan Buku UU dan peraturan lainnya yang diadakan (bulan) | 1 | 06 | 01 | 2,03 | 15 | URUSAN PEMERINTAH BIDANG SOSIAL | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Administrasi Umum | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah bahan bacaan dan Buku UU dan peraturan lainnya yang diadakan (bulan) |
| | | | Penyediaan Makanan dan Minuman | jumlah makanan dan minuman yang diadakan(bulan) | 1 | 06 | 01 | 2,03 | 17 | URUSAN PEMERINTAH BIDANG SOSIAL | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Administrasi Umum | Penyediaan Makanan dan Minuman | jumlah makanan dan minuman yang diadakan(bulan) |
| | | | Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah | jumlah rapat-rapat dan konsultasi yang diikuti (bulan) | 1 | 06 | 01 | 2,03 | 18 | URUSAN PEMERINTAH BIDANG SOSIAL | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Administrasi Umum | Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah | jumlah rapat-rapat dan konsultasi yang diikuti (bulan) |
| | | | Penyediaan Jasa Pelayanan Non-PNS | jumlah pegawai non PNS yang dibayarkan (orang) | 1 | 06 | 01 | 2,02 | 01 | URUSAN PEMERINTAH BIDANG SOSIAL | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Administrasi Keuangan | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | jumlah pegawai non PNS yang dibayarkan (orang) |
| | | | Penatausahaan Keuangan dan Barang | Jumlah pegawai yang dibayarkan jasanya (bulan) | 1 | 06 | 01 | 2,02 | 07 | URUSAN PEMERINTAH BIDANG SOSIAL | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Administrasi Keuangan | Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran | Jumlah pegawai yang dibayarkan jasanya (bulan) |
| | | | Penyediaan Dokumentasi dan Dekorasi | Jumlah dokumentasi dan dekorasi yang disediakan (bulan) | | | | | | | | | | |
| | | | Pengadaan Peralatan Gedung kantor | Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan (unit) | 1 | 06 | 01 | 2,03 | 24 | URUSAN PEMERINTAH BIDANG SOSIAL | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Administrasi Umum | Pengadaan Peralatan Gedung Kantor | Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan (unit) |

| PERMENDAGRI 13/RPJM/RENSTRA/RKPD/RENJA | | | | | PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 | | | | | | | | | |
|--|--------|---------------|--|--|---------------------------|----|----|------|----|---------------------------------|--|---|--|---|
| NO | URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM/KEGIATAN | Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output) | KODE | | | | | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | Jumlah gedung Kantor yang dipelihara (unit) | 1 | 06 | 01 | 2,03 | 28 | URUSAN PEMERINTAH BIDANG SOSIAL | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Administrasi Umum | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | Jumlah gedung Kantor yang dipelihara (unit) |
| | | | Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor | Jumlah peralatan gedung kantor yg dipelihara (unit) | 1 | 06 | 01 | 2,03 | 28 | URUSAN PEMERINTAH BIDANG SOSIAL | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Administrasi Umum | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | Jumlah peralatan gedung kantor yg dipelihara (unit) |
| | | | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | Jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara (unit) | 1 | 06 | 01 | 2,03 | 30 | URUSAN PEMERINTAH BIDANG SOSIAL | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Administrasi Umum | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | Jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara (unit) |
| | | | Program Peningkatan Disiplin Aparatur | Tersedianya pakaian dinas untuk Aparatur Sipil | | | | | | | | | | |
| | | | Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari tertentu | Jumlah pegawai yang disiplin berpakaian (orang) | 1 | 06 | 01 | 2,04 | 05 | URUSAN PEMERINTAH BIDANG SOSIAL | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu | Jumlah pegawai yang disiplin berpakaian (orang) |
| | | | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Aparatur | Persentase Aparatur yang meningkat SDM nya | | | | | | | | | | |
| | | | Pendidikan dan Pelatihan Formal | Jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan/ bimtek (orang) | 1 | 06 | 01 | 2,04 | 09 | URUSAN PEMERINTAH BIDANG SOSIAL | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Pendidikan dan Pelatihan Formal | |

| PERMENDAGRI 13/RPJM/RENSTRA/RKPD/RENJA | | | | | PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 | | | | | | | | | |
|--|--------|---------------|---|---|---------------------------|----|----|------|----|---------------------------------|---|--|---|---|
| NO | URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM/KEGIATAN | Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output) | KODE | | | | | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | Program Pemberdayaan Fakir Miskin komunitas adat terpencil dan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya | Persentase masyarakat miskin yang terfasilitasi | | | | | | | | | | |
| | | | Fasilitasi Permakanan untuk Lansia Miskin/Kurang Mampu Non Produktif | Jumlah Lansia miskin non produktif yang tersantuni (orang) | 1 | 06 | 04 | 2,01 | 01 | URUSAN PEMERINTAH BIDANG SOSIAL | PROGRAM REHABILITASI SOSIAL | Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial | Penyediaan Permakanan | Jumlah Lansia miskin non produktif yang tersantuni (orang) |
| | | | Dana Sharing Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) | Jumlah KPM yang mendapatkan BPNT (KK) | | | | | | | | | | |
| | | | Dana Sharing Kelompok Usaha Bersama (KUBE) bagi Fakir Miskin | Jumlah keluarga fakir miskin yang mendapatkan KUBE (KK) | | | | | | | | | | |
| | | | Pemutakhiran Data Fakir Miskin dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Lainnya (PMKS) | Laporan hasil pemutakhiran data Fakir Miskin dan PMKS (Lap) | 1 | 06 | 05 | 2.02 | 01 | URUSAN PEMERINTAH BIDANG SOSIAL | PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL | Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | Laporan hasil pemutakhiran data Fakir Miskin dan PMKS (Lap) |
| | | | | | 1 | 06 | 05 | 2.02 | 02 | URUSAN PEMERINTAH BIDANG SOSIAL | PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL | Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | Laporan hasil pemutakhiran data Fakir Miskin dan PMKS (Lap) |

| PERMENDAGRI 13/RPJM/RENSTRA/RKPD/RENJA | | | | | PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 | | | | | | | | |
|--|--------|---------------|--|---|---------------------------|----|----|------|---------------|---------------------------------|-----------------------------|---|---|
| NO | URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM/KEGIATAN | Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output) | KODE | | | | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | Dana Sharing Program Keluarga Harapan (PKH) | Jumlah keluarga yang mendapatkan bantuan PKH (Keluarga) | | | | | | | | | |
| | | | Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial | Persentase penyandang sosial yang terfasilitasi (%) | | | | | | | | | |
| | | | Pelayanan dan rehabilitasi penderita gangguan jiwa dan Napza dan eks penderita gangguan jiwa dan napza serta masalah kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya | - Jumlah penderita gangguan jiwa /Napza dan HIV /AIDS yang tertangani (orang) | 1 | 06 | 04 | 2.02 | 01 | URUSAN PEMERINTAH BIDANG SOSIAL | PROGRAM REHABILITASI SOSIAL | Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial | Pemberian Layanan Data dan Pengaduan |
| | | | | | 1 | 06 | 04 | 2.02 | 02 | URUSAN PEMERINTAH BIDANG SOSIAL | PROGRAM REHABILITASI SOSIAL | Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial | Pemberian Layanan Kedaruratan |
| | | | | | 1 | 06 | 04 | 2.02 | 03 | URUSAN PEMERINTAH BIDANG SOSIAL | PROGRAM REHABILITASI SOSIAL | Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial | Penyediaan Permakanan |

| PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA | | | | | PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 | | | | | | | | | |
|---|--------|---------------|------------------|--|---------------------------|----|----|------|----|---------------------------------|-----------------------------|---|--|---|
| NO | URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM/KEGIATAN | Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output) | KODE | | | | | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | | | 1 | 06 | 04 | 2.02 | 04 | URUSAN PEMERINTAH BIDANG SOSIAL | PROGRAM REHABILITASI SOSIAL | Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial | Penyediaan Sandang | |
| | | | | | 1 | 06 | 04 | 2.02 | 05 | URUSAN PEMERINTAH BIDANG SOSIAL | PROGRAM REHABILITASI SOSIAL | Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial | Penyediaan Alat Bantu | |
| | | | | | 1 | 06 | 04 | 2.02 | 06 | URUSAN PEMERINTAH BIDANG SOSIAL | PROGRAM REHABILITASI SOSIAL | Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial | Penyediaan Perbekalan Kesehatan Di Luar Panti | |
| | | | | | 1 | 06 | 04 | 2.02 | 07 | URUSAN PEMERINTAH BIDANG SOSIAL | PROGRAM REHABILITASI SOSIAL | Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial | Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial | |

| PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA | | | | | PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 | | | | | | | | | |
|---|--------|---------------|------------------|--|---------------------------|----|----|------|----|---------------------------------|-----------------------------|---|---|---|
| NO | URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM/KEGIATAN | Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output) | KODE | | | | | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | | | 1 | 06 | 04 | 2.02 | 08 | URUSAN PEMERINTAH BIDANG SOSIAL | PROGRAM REHABILITASI SOSIAL | Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial | Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat | |
| | | | | | 1 | 06 | 04 | 2.02 | 09 | URUSAN PEMERINTAH BIDANG SOSIAL | PROGRAM REHABILITASI SOSIAL | Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial | Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak | |
| | | | | | 1 | 06 | 04 | 2.02 | 10 | URUSAN PEMERINTAH BIDANG SOSIAL | PROGRAM REHABILITASI SOSIAL | Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial | Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar | |

| PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA | | | | | PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 | | | | | | | | | |
|---|--------|---------------|---|--|---------------------------|----|----|------|----|---------------------------------|-----------------------------|---|--|---|
| NO | URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM/KEGIATAN | Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output) | KODE | | | | | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | | | 1 | 06 | 04 | 2.02 | 11 | URUSAN PEMERINTAH BIDANG SOSIAL | PROGRAM REHABILITASI SOSIAL | Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial | Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga | |
| | | | | | 1 | 06 | 04 | 2.02 | 12 | URUSAN PEMERINTAH BIDANG SOSIAL | PROGRAM REHABILITASI SOSIAL | Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial | Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga | |
| | | | | | 1 | 06 | 04 | 2.02 | 13 | URUSAN PEMERINTAH BIDANG SOSIAL | PROGRAM REHABILITASI SOSIAL | Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial | Pemberian Layanan Rujukan | |
| | | | | | 1 | 06 | 04 | 2.02 | 14 | URUSAN PEMERINTAH BIDANG SOSIAL | PROGRAM REHABILITASI SOSIAL | Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial | Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota Pengemis dan Masyarakat | |
| | | | Program Pembinaan dan Fasilitasi Para Penyandang Cacat dan Trauma | Persentase para penyandang cacat, disabilitas, dan PMKS lainnya yang terfasilitasi (%) | | | | | | | | | | |

| PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA | | | | | PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 | | | | | | | | | |
|---|--------|---------------|---|--|---------------------------|----|----|------|----|---------------------------------|-----------------------------|--|---|---|
| NO | URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM/KEGIATAN | Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output) | KODE | | | | | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | Fasilitasi alat Bantu, Bantuan usaha dan Kebutuhan dasar bagi Penyandang Cacat dan Transportasi bagi ABK ke Sekolah | Jumlah Penyandang Cacat yang diberi bantuan modal usaha (orang) | 1 | 06 | 04 | 2.01 | 06 | URUSAN PEMERINTAH BIDANG SOSIAL | PROGRAM REHABILITASI SOSIAL | Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial | Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan | |
| | | | | Jumlah penyandang cacat yang diberi alat bantu (orang) | 1 | 06 | 04 | 2.01 | 03 | URUSAN PEMERINTAH BIDANG SOSIAL | PROGRAM REHABILITASI SOSIAL | Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial | Penyediaan Alat Bantu | |
| | | | | Jumlah Anak Berkebutuhan Khusus yang diberi bantuan transportasi | 1 | 06 | 04 | 2.01 | 08 | URUSAN PEMERINTAH BIDANG SOSIAL | PROGRAM REHABILITASI SOSIAL | Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial | Pemberian Akses Ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar | |

| PERMENDAGRI 13/RPJM/RENSTRA/RKPD/RENJA | | | | | PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 | | | | | | | | | |
|--|--------|---------------|---|--|---------------------------|----|----|------|----|---------------------------------|-----------------------------|--|---|---|
| NO | URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM/KEGIATAN | Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output) | KODE | | | | | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | | Jumlah Penyandang cacat berat yang diberi kebutuhan dasar (orang) | 1 | 06 | 04 | 2.01 | 08 | URUSAN PEMERINTAH BIDANG SOSIAL | PROGRAM REHABILITASI SOSIAL | Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial | Pemberian Akses Ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar | |
| | | | Peringatan Hari Disabilitas Internasional (HDI) | Terlaksananya peringatan Hari Disabilitas Internasional (Kali) | | | | | | | | | | |
| | | | Program Pembinaan dan Fasilitasi Panti Asuhan/ Panti Jompo | Persentase panti asuhan / jompo yang terfasilitasi (%) | | | | | | | | | | |
| | | | Fasilitasi Permakanan dan Operasional Panti Asuhan dan Panti Anak Cacat | Jumlah Panti yang terfasilitasi (panti) | | | | | | | | | | |
| | | | Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial | persentase lembaga kesejahteraan sosial yang aktif (Lembaga) | | | | | | | | | | |
| | | | Operasional Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3), Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial (LKKS), Komisi Daerah Lanjut Usia (Komda Lansia) | Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang mendapatkan bantuan operasional (bulan) | | | | | | | | | | |
| | | | | Persentase kasus / klien yang tertangani oleh LK3 | | | | | | | | | | |

| PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA | | | | | PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 | | | | | | | | | |
|---|--------|---------------|---|--|---------------------------|----|----|------|----|---------------------------------|--|--|---|---|
| NO | URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM/KEGIATAN | Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output) | KODE | | | | | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | Pembinaan dan Pemberdayaan PSM dan TKSK serta peringatan HKS | Jumlah PSM dan TKSK yang dibina (orang) | 1 | 06 | 02 | 2.03 | 01 | URUSAN PEMERINTAH BIDANG SOSIAL | PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL | Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota | Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah PSM dan TKSK yang dibina (orang) |
| | | | | Jumlah PSM dan TKSK mendapatkan bantuan tali asih (orang) | 1 | 06 | 02 | 2.03 | 02 | URUSAN PEMERINTAH BIDANG SOSIAL | PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL | Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota | Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah PSM dan TKSK mendapatkan bantuan tali asih (orang) |
| | | | Operasional Tagana dan bantuan tanggap darurat bagi korban bencana | Jumlah anggota Tagana yang terfasilitasi (orang) | 1 | 06 | 02 | 2.03 | 05 | URUSAN PEMERINTAH BIDANG SOSIAL | PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL | Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota | Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) | Jumlah anggota Tagana yang terfasilitasi (orang) |
| | | | | Persentase masyarakat korban bencana yang mendapat bantuan (%) | | | | | | | | | | |
| | | | Pembinaan dan Pemberdayaan Karang taruna | Jumlah karang taruna yang terbina (karang taruna) | | | | | | | | | | |
| | | | Pemeliharaan dan Rehab MPN, TMP, dan Makam Pejuang 45 Kota Sawahlunto | Jumlah makam yang terpelihara (makam) | 1 | 06 | 07 | 2.01 | 01 | URUSAN PEMERINTAH BIDANG SOSIAL | PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN | Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota | Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional | Jumlah makam yang terpelihara (makam) |

| PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA | | | | | PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 | | | | | | | | | |
|---|--------|---------------|---|--|---------------------------|----|----|------|----|---|--|---|---|---|
| NO | URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM/KEGIATAN | Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output) | KODE | | | | | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | | | | | | | | | | | Kabupaten/Kota | |
| | | | Peringatan hari pahlawan | Terlaksananya hari pahlawan (keg) | | | | | | | | | | |
| | | | Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat desa/kel | Persentase Lembaga Masyarakat yang aktif (%) | | | | | | | | | | |
| | | | Pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) | Jumlah peserta yang mengikuti BBGRM (orang) | | | | | | | | | | |
| | | | Monitoring Evaluasi dan Pembinaan BPSMAM | Jumlah laporan hasil monitoring BPSMAM (laporan) | | | | | | | | | | |
| | | | Monitoring Evaluasi dan Pembinaan Program KOTAKU | Jumlah laporan hasil pelaksanaan monitoring KOTAKU (laporan) | | | | | | | | | | |
| | | | Monitoring Evaluasi dan Pembinaan Posyandu | Jumlah laporan hasil monitoring Posyandu (laporan) | | | | | | | | | | |
| | | | Operasional Monitoring dan Evaluasi Kinerja LPM | Terfasilitasinya kegiatan LPM (bulan) | 2 | 13 | 04 | 2.01 | 05 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA | Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa | Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa dan BPD | Terfasilitasinya kegiatan LPM (bulan) |
| | | | | Jumlah Laporanann hasil monitoring LPM (laporan) | 2 | 13 | 04 | 2.01 | 05 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA | Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa | Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa dan BPD | Jumlah Laporanann hasil monitoring LPM (laporan) |

| PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA | | | | | PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 | | | | | | | | | |
|---|--------|---------------|---|--|---------------------------|----|----|------|----|---|--|--|---|---|
| NO | URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM/KEGIATAN | Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output) | KODE | | | | | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | Pemberdayaan Teknologi Tepat Guna (TTG) | Jumlah kegiatan TTG yang terfasilitasi (keg) | 2 | 13 | 04 | 2.01 | 06 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT, DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota | Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna | Jumlah kegiatan TTG yang terfasilitasi (keg) |
| | | | Pembinaan POS Pelayanan Teknologi (POSYANTEK) | Jumlah Posyantek di Sawahlunto yang terbina (Posyantek) | 2 | 13 | 04 | 2.01 | 06 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT, DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota | Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna | Jumlah kegiatan TTG yang terfasilitasi (keg) |

| PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA | | | | | PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 | | | | | | | | | |
|---|--------|---------------|--|---|---------------------------|----|----|------|---------------|---|--|---|--|---|
| NO | URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM/KEGIATAN | Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output) | KODE | | | | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| | | | Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam membangun Desa/Kel | Persentase Masyarakat yang terlibat berpartisipasi aktif dalam membangun desa/kel (%) | | | | | | | | | | |
| | | | Fasilitasi Jambore Tingkat Propinsi | Jumlah peserta jambore Tk. Propinsi yang terfasilitasi (Orang) | | | | | | | | | | |
| | | | Pelaksanaan Jambore Tingkat Kota | Jumlah peserta jambore Tk. Kota yang terfasilitasi (Orang) | | | | | | | | | | |
| | | | Montoring dan Evaluasi kegiatan Tenaga Ahli (TA) dan Pendamping Desa (PD/PLD) Program P3MD | Jumlah Laporan Hasil Monev (Lap) | | | | | | | | | | |
| | | | Evaluasi Perkembangan Desa/Kel | Jumlah laporan hasil evaluasi perkembangan desa/kel (Lap) | 2 | 13 | 04 | 2.01 | 11 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA | Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa | Fasilitasi Penyusunan Profil Desa dan Evaluasi Perkembangan Desa | Jumlah laporan hasil evaluasi perkembangan desa/kel (Lap) |
| | | | Program Peningkatan Peran Perempuan di Desa/kel | Persentase PKK yang Aktif | | | | | | | | | | |
| | | | Operasional sekretariat PKK Kota Sawahlunto | Jumlah kegiatan Sekretariat PKK yang difasilitasi (bulan) | | | | | | | | | | |
| | | | Penilaian Gerakan PKK | Jumlah PKK yang dinilai (desa/kel) | | | | | | | | | | |

| PERMENDAGRI 13/RPJM/RENSTRA/RKPD/RENJA | | | | | PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 | | | | | | | | |
|--|--------|---------------|--|---|---------------------------|--|--|--|---------------|---------|----------|--------------|---|
| NO | URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM/KEGIATAN | Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output) | KODE | | | | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | Pembinaan dan Penilaian Kelompok Dasawisma | Jumlah kelompok dasawisma yang dinilai/dibina dalam perlombaan (kelompok) | | | | | | | | | |
| | | | Pelaksanaan KKG PKK KB Kesehatan | Jumlah Indikator yang dinilai | | | | | | | | | |
| | | | Gebyar bulan bakti/kreativitas kelompok Dasawisma | Jumlah Kelompok mengikuti acara gebyar (kelompok) | | | | | | | | | |
| | | | Pembinaan dan Penilaian Sekretariat TP.PKK Kec, Desa/Kel | Jumlah Sekretariat TP.PKK Kec, Desa/Kel yang dinilai/dibina | | | | | | | | | |
| | | | Seleksi Penghargaan Kader Berprestasi | Jumlah kader PKK Kec, Desa/Kel yang diseleksi (orang) | | | | | | | | | |
| | | | Sosialisasi dan Penilaian Rumah Percontohan | Jumlah rumah percontohan yang dinilai | | | | | | | | | |
| | | | Pencanangan Kampung Anti Narkoba | Terlaksananya kegiatan kampung anti narkoba (kec) | | | | | | | | | |
| | | | Pembinaan Kelompok Simulasi Pola Asuh Anak dan Remaja (PAAR) | Jumlah anak yang dibina (orang) | | | | | | | | | |
| | | | Pembinaan pada Rumah Tahfiz | Jumlah Penghuni Rumah Tahfiz yang dibina (orang) | | | | | | | | | |

| PERMENDAGRI 13/RPJM/RENSTRA/RKPD/RENJA | | | | | PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 | | | | | | | | | |
|--|--------|---------------|--|--|---------------------------|--|--|--|---------------|---------|----------|--------------|---|--|
| NO | URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM/KEGIATAN | Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output) | KODE | | | | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| | | | Pesantren Ramadhan bagi PKK dan Organisasi Wanita | Jumlah Peserta yang mengikuti pesantren Ramadhan (orang) | | | | | | | | | | |
| | | | Pesantren Remaja Tingkat SLTP/SLTA | Jumlah pelajar yang mengikuti pesantren Ramadhan (orang) | | | | | | | | | | |
| | | | Pembinaan Pembukuan UP2K se Kota Sawahlunto | Jumlah kelompok UP2K yang terbina (kelompok) | | | | | | | | | | |
| | | | Penilaian UP2K Kota Sawahlunto | Jumlah Produk khusus UP2K yang dinilai (desa/kel) | | | | | | | | | | |
| | | | Pembinaan kemasan produk | Jumlah produk khusus UP2K yang dibina (desa/kel) | | | | | | | | | | |
| | | | Pembinaan dan Pendataan Kelompok BKB terintegrasi | Jumlah kelompok BKB yang dibina (kelompok) | | | | | | | | | | |
| | | | Pembinaan dan Monitoring Paud dan sejenisnya | Jumlah kelompok PAUD yang dibina (kelompok) | | | | | | | | | | |
| | | | Lomba Penyuluhan Kader BKB Integrasi Posyandu dan PAUD | Jumlah kelompok BKB yang dilombakan (orang) | | | | | | | | | | |
| | | | Penilaian HATINYA PKK | Jumlah PKK yang dinilai (desa/kel) | | | | | | | | | | |
| | | | Pembinaan dan Pendataan Pokja III | Jumlah desa/kel yang dibina | | | | | | | | | | |

| PERMENDAGRI 13/RPJM/RENSTRA/RKPD/RENJA | | | | | PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 | | | | | | | | |
|--|--------|---------------|--|--|---------------------------|--|--|--|---------------|---------|----------|--------------|---|
| NO | URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM/KEGIATAN | Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output) | KODE | | | | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | Lomba Masakan Khas Tradisional | Jumlah peserta yang mengikuti lomba masakan (orang) | | | | | | | | | |
| | | | PKK Peduli Lansia | Jumlah Lansia yang difasilitasi (desa/kel) | | | | | | | | | |
| | | | Lomba Penyuluhan Kader | Jumlah kelompok yang mengikuti lomba' (desa/kel) | | | | | | | | | |
| | | | Pembinaan Kader Posyandu Berprestasi | Jumlah kader posyandu yang terbina (desa/kel) | | | | | | | | | |
| | | | Pembinaan program pengembangan Pokja IV | Jumlah Desa/Kel yang dibina (desa/kel) | | | | | | | | | |
| | | | Implementasi Gemas | Jumlah Desa/kel yang melaksanakan gemas | | | | | | | | | |
| | | | Penilaian Kinerja Pokja IV | Jumlah Kinerja Pokja IV yang dinilai | | | | | | | | | |
| | | | Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan | Persentase Lembaga Ekonomi desa yang aktif (%) | | | | | | | | | |

| PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA | | | | | PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 | | | | | | | | | |
|---|--------|---------------|---|--|---------------------------|----|----|------|----|---|--|--|---|---|
| NO | URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM/KEGIATAN | Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output) | KODE | | | | | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | Pembinaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) | Jumlah Bumdes yang terbina (BUMDes) | 2 | 13 | 05 | 2.01 | 05 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT, DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang dalam Daerah Kabupaten/Kota | Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat | Jumlah Bumdes yang terbina (BUMDes) |
| | | | Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa | Persentase Aparatur Desa yang meningkat kapasitasnya (%) | | | | | | | | | | |
| | | | Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa serentak se-Kota Sawahlunto | Jumlah Kepala Desa terpilih dan dilantik (orang) | 2 | 13 | 04 | 2.01 | 09 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA | Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa | Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa | Jumlah Kepala Desa terpilih dan dilantik (orang) |
| | | | Pembinaan dan pengawasan pemerintahan Desa | Jumlah Desa yang dibina (desa) | 2 | 13 | 04 | 2.01 | 11 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA | Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa | Fasilitasi Penyusunan Profil Desa dan Evaluasi Perkembangan Desa | Jumlah Desa yang dibina (desa) |
| | | | Penataan pemerintah administrasi desa | Jumlah desa yang tertib administrasi (desa) | 2 | 13 | 04 | 2.01 | 01 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA | Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa | Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa | Jumlah desa yang tertib administrasi (desa) |

| PERMENDAGRI 13/RPJM/RENSTRA/RKPD/RENJA | | | | | PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 | | | | | | | | | |
|--|--------|---------------|--|---|---------------------------|----|----|------|----|---|--|---|--|---|
| NO | URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM/KEGIATAN | Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output) | KODE | | | | | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | Bimbingan Teknis aparatur Desa se Kota Sawahlunto | Jumlah aparatur desa yang mendapatkan sertifikat Bimtek (orang) | 2 | 13 | 04 | 2.01 | 05 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA | Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa | Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa dan BPD | Jumlah aparatur desa yang mendapatkan sertifikat Bimtek (orang) |
| | | | Pendampingan Konsultasi dan Koordinasi Pemerintahan Desa | Jumlah laporan Konsultasi, Koordinasi Pemerintahan Desa (laporan) | 2 | 13 | 04 | 2.01 | 05 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA | Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa | Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa dan BPD | Jumlah laporan Konsultasi, Koordinasi Pemerintahan Desa (laporan) |
| | | | Pelatihan Pembina Teknis Pembangunan Desa (PTPD) | Jumlah anggota PTPD yang meningkat pengetahuannya (orang) | 2 | 13 | 04 | 2.01 | 05 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA | Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa | Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa dan BPD | |
| | | | Pelatihan pengadaan barang dan jasa bagi Tim pelaksana Kegiatan (TPK) Desa | Jumlah TPK yang meningkat pengetahuannya (orang) | 2 | 13 | 04 | 2.01 | 05 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA | Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa | Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa dan BPD | |
| | | | Peningkatan kapasitas anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) | Jumlah anggota BPD yang meningkat pengetahuannya (orang) | 2 | 13 | 04 | 2.01 | 05 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA | Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa | Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa dan BPD | |
| | | | Pendampingan dan Evaluasi Laporan Desa | Jumlah laporan desa yang dievaluasi (laporan) | 2 | 13 | 04 | 2.01 | 11 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA | Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa | Fasilitasi Penyusunan Profil Desa dan Evaluasi Perkembangan Desa | Jumlah laporan desa yang dievaluasi (laporan) |

| PERMENDAGRI 13/RPJM/RENSTRA/RKPD/RENJA | | | | | PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 | | | | | | | | | |
|--|--------|---------------|--|--|---------------------------|----|----|------|----|---|--|---|--|--|
| NO | URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM/KEGIATAN | Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output) | KODE | | | | | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | Penyelarasan RPJMdes RKPdes dan RAPBdes | Persentase keselarasan RKPDes dengan RPJMDes | 2 | 13 | 04 | 2.01 | 03 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA | Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa | Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa | Persentase keselarasan RKPDes dengan RPJMDes |
| | | | | Persentase keselarasan APBDes dengan RKPDes | 2 | 13 | 04 | 2.01 | 04 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA | Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa | Persentase keselarasan APBDes dengan RKPDes |
| | | | Bimbingan Teknis Penataan Kewenangan Desa | Jumlah aparatur desa yang mendapatkan sertifikat Bimtek (orang) | 2 | 13 | 04 | 2.01 | 05 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA | Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa | Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa dan BPD | Jumlah aparatur desa yang mendapatkan sertifikat Bimtek (orang) |
| | | | Penilaian transparansi penggunaan dana desa | Jumlah desa yang dinilai (desa) | | | | | | | | | | |
| | | | Pelatihan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) | Jumlah perangkat desa yang meningkatkan pengetahuannya tentang SISKEUDES (orang) | 2 | 13 | 04 | 2.01 | 04 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA | Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa | Jumlah perangkat desa yang meningkatkan pengetahuannya tentang SISKEUDES (orang) |
| | | | Pelatihan Sistem Pengelolaan Aset Desa (Sipades) | Jumlah aparatur desa yang meningkatkan pengetahuannya tentang SIPADES | 2 | 13 | 04 | 2.01 | 04 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA | Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa | Jumlah aparatur desa yang meningkatkan pengetahuannya tentang SIPADES |

| PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA | | | | | PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 | | | | | | | | | |
|---|--------|---------------|---|---|---------------------------|----|----|------|---------------|--|--|---|--|--|
| NO | URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM/KEGIATAN | Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output) | KODE | | | | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| | | | Program Peningkatan Peran serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan | Indek Pemberdayaan Gender (IDG) | | | | | | | | | | |
| | | | Pelatihan peningkatan Ekonomi Perempuan (PPEP) bagi perempuan kepala keluarga (PEKA) dan industri rumahan yang dikelola perempuan | Jumlah perempuan kepala keluarga yang dilatih, (orang) | 2 | 08 | 02 | 2.02 | 01 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DANPERLINDUNGAN ANAK | PROGRAM PENGARUS UTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN | Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik,Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota | Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi | Jumlah perempuan kepala keluarga yang dilatih, (orang) |
| | | | | Jumlah perempuan pengelola industri rumahan yang dilatih (orang) | 2 | 08 | 02 | 2.02 | 01 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DANPERLINDUNGAN ANAK | PROGRAM PENGARUS UTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN | Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik,Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota | Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi | Jumlah perempuan kepala keluarga yang dilatih, (orang) |
| | | | Peringatan Hari Ibu | Jumlah kegiatan Peringatan Hari Ibu (keg) | | | | | | | | | | |
| | | | Peringatan Hari Kartini | Jumlah kegiatan yang difasilitasi (keg) | | | | | | | | | | |
| | | | Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik | Jumlah kegiatan pemberdayaan bidang politik yang dilaksanakan (Keg) | 2 | 08 | 02 | 2.02 | 01 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DANPERLINDUNGAN ANAK | PROGRAM PENGARUS UTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN | Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik,Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota | Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi | Jumlah perempuan kepala keluarga yang dilatih, (orang) |

| PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA | | | | | PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 | | | | | | | | | |
|---|--------|---------------|---|--|---------------------------|----|----|------|----|--|--|--|---|--|
| NO | URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM/KEGIATAN | Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output) | KODE | | | | | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | Operasional organisasi perempuan se Kota Sawahlunto yang aktif | Jumlah organisasi perempuan yang difasilitasi (organisasi) | 2 | 08 | 02 | 2.02 | 01 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DANPERLINDUNGAN ANAK | PROGRAM PENGARUS UTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN | Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik,Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota | Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi | Jumlah perempuan kepala keluarga yang dilatih, (orang) |
| | | | Pembinaan pengembangan desa/kel layak anak | Persentase desa/kelurahan yang dibina (%) | | | | | | | | | | |
| | | | Operasional kegiatan Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) | Terfasilitasinya kegiatan Pusat Pembelajaran Keluarga (bulan) | 2 | 08 | 04 | 2.02 | 01 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DANPERLINDUNGAN ANAK | PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA | Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Terfasilitasinya kegiatan Pusat Pembelajaran Keluarga (bulan) |
| | | | Penguatan Kelembagaan dan Perlindungan Anak Berkebutuhan Khusus | Terfasilitasinya kegiatan perlindungan terhadap anak berkebutuhan khusus (bulan) | 2 | 08 | 04 | 2.02 | 01 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DANPERLINDUNGAN ANAK | PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA | Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Terfasilitasinya kegiatan perlindungan terhadap anak berkebutuhan khusus (bulan) |

| PERMENDAGRI 13/RPJM/RENSTRA/RKPD/RENJA | | | | | PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 | | | | | | | | | |
|--|--------|---------------|--|--|---------------------------|----|----|------|----|--|---------------------------------------|--|---|---|
| NO | URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM/KEGIATAN | Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output) | KODE | | | | | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | Pelaksanaan Sarasehan Calon (salon) Pengantin | Terfasilitasinya kegiatan saresahan terhadap calon pengantin (bulan) | | | | | | | | | | |
| | | | Program Penguatan Kelembagaan Pengarustamaan Gender dan Anak | Anugrah Parahita Ekapraya (APE) | | | | | | | | | | |
| | | | Operasional kegiatan Forum Anak | Terfasilitasinya kegiatan forum anak (bulan) | 2 | 08 | 04 | 2.02 | 01 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DANPERLINDUNGAN ANAK | PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA | Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Operasional kegiatan Forum Anak |
| | | | Pelatihan partisipasi anak dalam pembangunan | Persentase forum anak yang dilatih (%) | 2 | 08 | 04 | 2.02 | 01 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DANPERLINDUNGAN ANAK | PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA | Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Persentase forum anak yang dilatih (%) |

| PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA | | | | | PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 | | | | | | | | | |
|---|--------|---------------|--|--|---------------------------|----|----|------|----|--|----------------------------------|--|---|--|
| NO | URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM/KEGIATAN | Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output) | KODE | | | | | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | Peringatan Hari Anak Nasional | Terfasilitasinya Hari Anak Nasional (kegiatan) | | | | | | | | | | |
| | | | Pelatihan Konveksi Hak Anak | Jumlah peserta konveksi hak anak (orang) | 2 | 08 | 06 | 2.01 | 01 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DANPERLINDUNGAN ANAK | PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) | Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah peserta konveksi hak anak (orang) |
| | | | Penunjang pelaksanaan PPRG | Jumlah OPD yang telah melaksanakan PPRG (OPD) | | | | | | | | | | |
| | | | Operasional Lembaga Layanan Perempuan dan Anak | Terfasilitasinya kegiatan lembaga layanan perempuan dan anak (bulan) | 2 | 08 | 03 | 2.03 | 04 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DANPERLINDUNGAN ANAK | PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN | Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota | Terfasilitasinya kegiatan lembaga layanan perempuan dan anak (bulan) |

| PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA | | | | | PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 | | | | | | | | | |
|---|--------|---------------|---|--|---------------------------|----|----|------|----|--|---------------------------------------|--|---|---|
| NO | URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM/KEGIATAN | Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output) | KODE | | | | | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | Operasional FORKOMDAPUSPA | Terlaksananya Terfasilitasinya kegiatan PERKOMDAPUSPA (bulan) | 2 | 08 | 04 | 2.02 | 01 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DANPERLINDUNGAN ANAK | PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA | Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Terlaksananya Terfasilitasinya kegiatan PERKOMDAPUSPA (bulan) |
| | | | Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas SDM Satgas PPA | Terfasilitasinya kegiatan pembinaan terhadap satgas PPA (bulan) | | | | | | | | | | |
| | | | Pelaksanaan Program Sekolah Istri Teladan Sawahlunto (SILO) | Terfasilitasinya kegiatan sekolah istri teladan sawahlunto (bulan) | | | | | | | | | | |
| | | | Program Pengembangan data/informasi/statistik daerah | Ketersedian data statistik daerah dan OPD daerah (%) | | | | | | | | | | |
| | | | Penyusunan buku profil gender | Jumlah buku profil gender yang disusun (buku) | 2 | 08 | 05 | 201 | 01 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DANPERLINDUNGAN ANAK | PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA | Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/kota | Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah buku profil gender yang disusun (buku) |

| PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA | | | | | PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 | | | | | | | | | |
|---|--------|---------------|---|--|---------------------------|----|----|-----|----|---|---------------------------------|---|--|---|
| NO | URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM/KEGIATAN | Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output) | KODE | | | | | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | Profil Data Dasar Keluarga Desa/Kelurahan | Jumlah dokumen profil data dasar keluarga (Dok) | 2 | 08 | 05 | 201 | 01 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA | Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/kota | Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah dokumen profil data dasar keluarga (Dok) |

DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN

| PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA | | | | | PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 | | | | | | | | | |
|---|--------|---------------|--|---|---------------------------|----|----|------|---------------|---------|--|-------------------|--|---|
| NO | URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM/KEGIATAN | Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output) | KODE | | | | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| | | | PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN | Administrasi Perkantoran Berjalan lancar dan tertib (bulan) | X | XX | 01 | 2.03 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Administrasi Umum | | |
| | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jasa surat menyurat yang disediakan (bulan) | X | XX | 01 | 2.03 | 01 | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Administrasi Umum | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jasa surat menyurat yang disediakan (bulan) |
| | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik | Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan (bulan) | X | XX | 01 | 2.03 | 02 | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Administrasi Umum | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik | Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan (bulan) |
| | | | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | Jasa kebersihan kantor yang disediakan (bulan) | X | XX | 01 | 2.03 | 08 | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Administrasi Umum | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | Jasa kebersihan kantor yang disediakan (bulan) |
| | | | Penyediaan Alat Tulis Kantor | Alat tulis kantor yang disediakan (bulan) | X | XX | 01 | 2.03 | 10 | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Administrasi Umum | Penyediaan Alat Tulis Kantor | Alat tulis kantor yang disediakan (bulan) |
| | | | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Barang cetak dan penggandaan yang disediakan (bulan) | X | XX | 01 | 2.03 | 11 | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Administrasi Umum | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Barang cetak dan penggandaan yang disediakan (bulan) |
| | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan (bulan) | X | XX | 01 | 2.03 | 12 | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Administrasi Umum | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan (bulan) |

| PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA | | | | | PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 | | | | | | | | | | |
|---|--------|---------------|--|--|---------------------------|----|----|------|----|---------------|--|-----------------------|--|--|--|
| NO | URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM/KEGIATAN | Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output) | KODE | | | | | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| | | | Penyediaan Makanan dan Minuman | Makan dan minum yang disediakan (bulan) | X | XX | 01 | 2.03 | 17 | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Administrasi Umum | Penyediaan Makanan dan Minuman | Makan dan minum yang disediakan (bulan) | |
| | | | Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang difasilitasi (bulan) | X | XX | 01 | 2.03 | 18 | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Administrasi Umum | Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang difasilitasi (bulan) | |
| | | | Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS | Jumlah tenaga pegawai non PNS yang difasilitasi (bulan) | X | XX | 01 | 2.02 | 01 | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Administrasi Keuangan | Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN | Jumlah tenaga pegawai non PNS yang difasilitasi (bulan) | |
| | | | Penatausahaan Keuangan dan Barang | Penatausahaan Keuangan dan Barang (bulan) | X | XX | 01 | 2.03 | 07 | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Administrasi Umum | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | Penatausahaan Keuangan dan Barang (bulan) | |
| | | | PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR | Tersedianya sarana & prasarana aparatur yang cukup & kondisi layak pakai | | | | | | | | | | | |
| | | | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | Kendaraan Roda 4 dan Roda 2 yang dipelihara (bulan) | X | XX | 01 | 2.03 | 30 | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Administrasi Umum | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | Kendaraan Roda 4 dan Roda 2 yang dipelihara (bulan) | |
| | | | Pengadaan Peralatan Gedung Kantor | Jumlah Barang yang diadakan (jenis) | X | XX | 01 | 2.03 | 22 | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Administrasi Umum | Pengadaan Peralatan Gedung Kantor | Jumlah Barang yang diadakan (jenis) | |
| | | | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | Ketersediaan biaya pemeliharaan gedung kantor (bulan) | X | XX | 01 | 2.03 | 32 | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Administrasi Umum | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor | Ketersediaan biaya pemeliharaan gedung kantor (bulan) | |

| PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA | | | | | PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 | | | | | | | | | |
|---|--------|---------------|--|--|---------------------------|----|----|------|----|--------------------------------------|--|---|---|---|
| NO | URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM/KEGIATAN | Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output) | KODE | | | | | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur | Ketersediaan biaya pemeliharaan dan perawatan mobiler (bulan) | X | XX | 01 | 2.03 | 35 | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Administrasi Umum | Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur | Ketersediaan biaya pemeliharaan dan perawatan mobiler (bulan) |
| | | | Pembangunan Gedung Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan | Jumlah gedung yang dibangun (unit) | X | XX | 01 | 2.03 | 38 | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Administrasi Umum | Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor | jumlah gedung yang direhab (unit) |
| | | | Pengadaan Kendaraan Operasional Dinas | Jumlah kendaraan roda 4 yang diadakan (unit) | X | XX | 01 | 2.03 | 20 | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Administrasi Umum | Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional | Jumlah kendaraan roda 4 yang diadakan (unit) |
| | | | | Jumlah kendaraan roda 2 yang diadakan (unit) | | | | | | | | | | |
| | | | PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR | Persentase Aparatur yang meningkat SDM-nya (%) | 3 | 27 | 01 | 2.04 | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | | |
| | | | Pendidikan dan Pelatihan Formal | Fasilitasi pegawai yang mengikuti diklat (bulan) | 3 | 27 | 01 | 2.04 | 09 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Pendidikan dan Pelatihan Formal | Fasilitasi pegawai yang mengikuti diklat (bulan) |
| | | | PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | Persentase Konsistensi program/ Kegiatan RPJMD ke dalam RKPD (%) | 3 | 27 | 01 | 2.01 | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | |

| PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA | | | | | PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 | | | | | | | | | |
|---|--------|---------------|---|---|---------------------------|----|----|------|----|--------------------------------------|--|--|---|---|
| NO | URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM/KEGIATAN | Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output) | KODE | | | | | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | Pelaksanaan Forum OPD | Laporan Forum OPD (laporan) | 3 | 27 | 01 | 2.01 | 04 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Laporan Forum OPD (laporan) |
| | | | Penyusunan Renstra 2018 - 2023 | Jumlah Dokumen Renstra (dokumen) | | | | | | | | | | |
| | | | PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI TANAMAN PANGAN | Jumlah Produksi Padi (GKG) (Ton) | | | | | | | | | | |
| | | | Peningkatan Produksi Padi | Jumlah produksi padi GKG (ton) | 3 | 27 | 02 | 2.01 | 02 | Pertanian | Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian | Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian | Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian (sub sektor TPH) | Jumlah kelompok yang didampingi (kelompok) |
| | | | | | | | | | | | | | | jumlah produksi padi (ton) |
| | | | Penyusunan dan Pengumpulan Data Tanaman Pangan dan Hortikultura | Jumlah Laporan data Tanaman Pangan dan Hortikultura (laporan) | 3 | 27 | 02 | 2.01 | 02 | Pertanian | Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian | Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian | Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian (sub sektor TPH) | Jumlah Laporan data Tanaman Pangan dan Hortikultura (laporan) |
| | | | Pengembangan Tanaman Buah-buahan | Jumlah Populasi Tanaman Buah-buahan (batang) | 3 | 27 | 02 | 2.02 | 02 | Pertanian | Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian | Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan dan Mikroorganisme Kewenangan Kab/Kota | Peningkatan kualitas SDG Hewan/Tumbuhan (sub sektor TPH) | Jumlah populasi tanaman buah-buahan (batang) |

| PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA | | | | | PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 | | | | | | | | | | |
|---|--------|---------------|--|--|---------------------------|----|----|------|----|---------------|---|---|---|---|--|
| NO | URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM/KEGIATAN | Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output) | KODE | | | | | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| | | | Penyediaan Benih Tanaman Pangan | Jumlah Produksi benih padi (kg) | 3 | 27 | 02 | 2.02 | 01 | Pertanian | Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian | Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan dan Mikroorganisme Kewenangan Kab/Kota | Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman (sub sektor TPH) | Jumlah Produksi benih padi (kg) | |
| | | | Sertifikasi Bibit Unggul TPH | Jumlah Varietas yang difasilitasi (komoditi) | 3 | 27 | 02 | 2.02 | 01 | Pertanian | Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian | Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikroorganisme Kewenangan Kab/Kota | Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan / Tanaman | Jumlah varietas | |
| | | | | Jumlah Komoditi yang dilepas (komoditi) | | | | | | | | | | Jumlah varietas | |
| | | | | | | | | | | | | | | Jumlah komoditi yang dimurnikan/dilestarikan | |
| | | | Penanggulangan Hama dan Penyakit Tanaman Pangan dan Hortikultura | Luas Lahan yang difasilitasi (Ha) | 3 | 27 | 05 | 2.05 | 01 | Pertanian | Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian | Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/ Kota | Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan (sub sektor TPH) | Luas Lahan yang difasilitasi (Ha) | |
| | | | Pengembangan Tanaman Sayuran | Jumlah Luas Penanaman Sayuran (Ha) | 3 | 27 | 02 | 2.01 | 02 | Pertanian | Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian | Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian | Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian (sub sektor TPH) | Jumlah luas penanaman sayuran (ha) | |

| PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA | | | | | PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 | | | | | | | | | |
|---|--------|---------------|---|--|---------------------------|----|----|------|----|--------------------------------------|---|---|--|--|
| NO | URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM/KEGIATAN | Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output) | KODE | | | | | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | Pengembangan dan Pembibitan Tanaman Pertanian (UPTD Pembibitan) | Jumlah bibit yang dihasilkan (batang) | 3 | 27 | 03 | 2.02 | 09 | Pertanian | Program Penyediaan dan Pengembangan PraSarana Pertanian | Pembangunan Prasarana Pertanian | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya | Jumlah bibit yang dihasilkan (batang) |
| | | | | | | | | | | | | | | Pembangunan rehab dan pemeliharaan Prasarana pertanian (bulan) |
| | | | PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI TANAMAN PERKEBUNAN | Jumlah Produksi Karet (ton) | 3 | 27 | 03 | 2.01 | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN | PROGRAM PENYEDIAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN | Pengembangan Prasarana Pertanian | | |
| | | | | Jumlah Produksi Kakao (ton) | | | | | | | | | | |
| | | | Penyusunan dan Updating Data Perkebunan | Jumlah Laporan Data Komoditi Perkebunan (Laporan) | 3 | 27 | 02 | 2.01 | 02 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN | Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian | Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian | Pendampingan penggunaan sarana pendukung Pertanian (sub sektor Perkebunan) | Jumlah Laporan Data Komoditi Perkebunan (Laporan) |
| | | | Pengembangan Usaha Tani Desa Penghasil Tembakau | Jumlah sarana yang difasilitasi (Unit) | 3 | 27 | 03 | 2.01 | 02 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN | Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian | Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian | Pendampingan penggunaan sarana pendukung Pertanian (sub sektor Perkebunan) | Jumlah sarana yang difasilitasi (Unit) |
| | | | Revitalisasi Tanaman Perkebunan | Luas Lahan yang Direvitalisasi (Ha) | 3 | 27 | 02 | 2.02 | 02 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN | PROGRAM PENYEDIAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN | Pengelolaan Sumber daya genetik(SDG) Hewan,Tumbuhan dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota | Peningkatan kualitas SDG Hewan/Tanaman | Luas Lahan yang Direvitalisasi (Ha) |

| PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA | | | | | PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 | | | | | | | | | |
|---|--------|---------------|---|--|---------------------------|----|----|------|----|--------------------------------------|--|--|---|---|
| NO | URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM/KEGIATAN | Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output) | KODE | | | | | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | Optimalisasi Pemeliharaan Tanaman Perkebunan | Jumlah Luas Tanaman Perkebunan Yang dipelihara (Ha) | 3 | 27 | 02 | 2.02 | 02 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN | Penyediaan dan pengembangan sarana pertanian | Pengelolaan Sumber daya genetik(SDG) Hewan,Tumbuhan dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota | Peningkatan kualitas SDG Hewan/Tanaman (sub sektor perkebunan) | Luas lahan yang ditingkatkan kualitasnya (ha) |
| | | | Penanggulangan Hama dan Penyakit Tanaman Perkebunan | Luas Lahan yang Difasilitasi (Ha) | 3 | 27 | 05 | 2.01 | 01 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN | Pengendalian dan penanggulangan Bencana Pertanian | Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota | Pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT) Tan. Pangan, Hortikultura dan Perkebunan | Jumlah ekor tupai yang terbunuh (ekor) |
| | | | | Jumlah tupai yang terbunuh (ekor) | | | | | | | | | | luas lahan yang difasilitasi (ha) |
| | | | PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI PETERNAKAN | Jumlah Produksi : | | | | | | | | | | |
| | | | | Daging Sapi (ton) | | | | | | | | | | |
| | | | | Daging Ayam (ton) | | | | | | | | | | |
| | | | | Telur (ton) | | | | | | | | | | |
| | | | Pengembangan Insensinasi Buatan (IB) | Jumlah Kelahiran Sapi yang di IB (ekor) | 3 | 27 | 02 | 2.05 | 01 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN | Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak Dalam Daerah Kabupaten/ Kota | Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan | Jumlah Kelahiran Sapi yang di IB (ekor) |

| PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA | | | | | PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 | | | | | | | | | |
|---|--------|---------------|---|--|---------------------------|----|----|------|----|--------------------------------------|--|--|--|---|
| NO | URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM/KEGIATAN | Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output) | KODE | | | | | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | Fasilitasi Pengadaan ternak ke Masyarakat | Jumlah Ternak yang difasilitasi (ekor) | 3 | 27 | 02 | 2.06 | 01 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN | Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Lain | Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain | Jumlah Ternak yang difasilitasi (ekor) |
| | | | * Ternak Kambing | | | | | | | | | | | Ternak Kambing |
| | | | * Ternak Ayam Kampung | | | | | | | | | | | Ternak Ayam Kampung |
| | | | * Ternak Itik | | | | | | | | | | | Ternak Itik |
| | | | Live Stock Expo dan Kontes Ternak (Koordinasikan dengan provinsi) | Jumlah Kategori Lomba yang Diikuti (kategori) | 3 | 27 | 02 | 2.03 | 01 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN | Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak Serta Pakan Dalam Daerah Kabupaten/Kota | Pengawasan Mutu benih/bibit Ternak /bahan pakan /pakan/tanaman skala kecil | Jumlah Kategori Lomba yang Diikuti (kategori) |
| | | | Pengolahan Data Peternakan (Diakomodir pada kegiatan IB) | Jumlah Laporan data Peternakan (laporan) | 3 | 27 | 02 | 2.05 | 01 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN | Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak Dalam Daerah Kabupaten/ Kota | Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan | Jumlah Laporan data Peternakan (laporan) |

| PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA | | | | | PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 | | | | | | | | | |
|---|--------|---------------|---|--|---------------------------|----|----|------|----|--------------------------------------|---|---|---|---|
| NO | URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM/KEGIATAN | Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output) | KODE | | | | | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT TERNAK | Ternak yang Aman dari Penyakit PHMS dan Zoonosis (%) | | | | | | | | | | |
| | | | Pengendalian dan Penanggulangan penyakit menular ternak | Jumlah dosis Obat dan vaksin yang digunakan (dosis) | 3 | 27 | 04 | 2.03 | 01 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN | PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER | Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota | Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium | Jumlah sample yang di periksa |
| | | | | | 3 | 27 | 04 | 2.03 | 02 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN | PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER | Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota | Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner | Jumlah dosis Obat dan vaksin yang digunakan (dosis) |
| | | | | | 3 | 27 | 04 | 2.04 | 02 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN | PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER | Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner | Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan | Jumlah sample yang di periksa |
| | | | Pemusnahan Ternak yang Terjangkit Penyakit Endemik (Rabies) | Jumlah pelaksanaan (kali) | 3 | 27 | 04 | 2.01 | 01 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN | PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER | Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota | Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis | Jumlah pelaksanaan (kali) |

| PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA | | | | | PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 | | | | | | | | | |
|---|--------|---------------|--|--|---------------------------|----|----|------|----|---|---|---|--|---|
| NO | URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM/KEGIATAN | Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output) | KODE | | | | | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | Pengelolaan RPH dan TPH | Jumlah RPH/TPH yang dikelola (unit) | 3 | 27 | 04 | 2.04 | 01 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN | PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER | Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner | Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan | Jumlah Unit Usaha Hewan dan UPH yang dibina |
| | | | | | 3 | 27 | 03 | 2.02 | 07 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN | Pembangunan Prasarana Pertanian | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan | Jumlah RPH/TPH yang dikelola (unit) |
| | | | Pembelian dan Pendistribusian vaksin dan pakan | Jumlah vaksin dan obat-obatan yang diadakan (paket) | 3 | 27 | 04 | 2.01 | 01 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN | PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER | Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota | Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis | Jumlah vaksin dan obat-obatan yang diadakan (paket) |
| | | | PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI PERIKANAN | Produksi ikan (Ton) | | | | | | | | | | |
| | | | Pembinaan dan Pengembangan Budidaya Perikanan | Jumlah Pokdakan yang dibina (kelompok) | 3 | 25 | 03 | 2.04 | 01 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN | PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA | Pengelolaan Pembudidayaan Ikan | Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Bidang PKHP) | Jumlah Pokdakan yang dibina (kelompok) |

| PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA | | | | | PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 | | | | | | | | | |
|---|--------|---------------|--|--|---------------------------|----|----|------|----|---|---|----------------------------------|--|---|
| NO | URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM/KEGIATAN | Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output) | KODE | | | | | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | | Jumlah petani budidaya perikanan yang dibina (orang) | | | | | | | | | | Jumlah prasarana yang diadakan (paket) |
| | | | | | 3 | 25 | 03 | 2.04 | 02 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN | PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA | Pengelolaan Pembudidayaan Ikan | Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (bidang PKHP) | Jumlah Pokdakan yang dibina (kelompok) |
| | | | | | | | | | | | | | | Jumlah prasarana yang diadakan (paket) |
| | | | | | 3 | 25 | 03 | 2.04 | 03 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN | PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA | Pengelolaan Pembudidayaan Ikan | Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Pokdakan yang dibina (kelompok) |
| | | | | | | | | | | | | | | Jumlah sarana yang disediakan (paket) |
| | | | Penyusunan dan Pengolahan Data Perikanan (Statistik Perikanan) | Jumlah Laporan Data Perikanan (laporan) | 3 | 27 | 03 | 2.01 | 03 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN | Pengembangan Prasarana Pertanian | Koordinasidan Sinkronisasi Prasarana Pendukung pertanian lainnya | Jumlah Laporan Data Perikanan (laporan) |
| | | | Operasional Balai Benih Ikan (UPTD BBI) | Jumlah produksi benih ikan (ekor) | 3 | 25 | 03 | 2.04 | 02 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN | PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA | Pengelolaan Pembudidayaan Ikan | Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah produksi benih ikan (ekor) |

| PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA | | | | | PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 | | | | | | | | | |
|---|--------|---------------|--|--|---------------------------|----|----|------|----|---|--|----------------------------------|--|---|
| NO | URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM/KEGIATAN | Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output) | KODE | | | | | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | | | | | | | | | | | | Jumlah sarana yang disediakan (paket) |
| | | | | | 3 | 25 | 03 | 2.04 | 03 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN | PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA | Pengelolaan Pembudidayaan Ikan | Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah produksi benih ikan (ekor) |
| | | | | | | | | | | | | | | Jumlah sarana yang disediakan (paket) |
| | | | | | 3 | 25 | 03 | 2.04 | 05 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN | PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA | Pengelolaan Pembudidayaan Ikan | Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat | Jumlah Pokdakan yang dibina (kelompok) |
| | | | PROGRAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PETANI | Jumlah kelompok tani yang Naik Skor sesuai Permentan (Kelompok/Wilayah Binaan) | | | | | | | | | | |
| | | | Pelatihan Petani dan Pelaku Agribisnis | Jumlah petani yang mengikuti pelatihan (orang) | 3 | 27 | 07 | 2.01 | 01 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN | PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN | pelaksanaan penyuluhan pertanian | Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa | Jumlah kelembagaan penyuluhan yg difasilitasi |
| | | | | | | | | | | | | | | Jumlah kelompok yang naik scor |

| PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA | | | | | PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 | | | | | | | | | |
|---|--------|---------------|--|--|---------------------------|----|----|------|----|--------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|--|---|
| NO | URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM/KEGIATAN | Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output) | KODE | | | | | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | Peningkatan Kemampuan Kelembagaan Petani | Jumlah pengurus kelompok yang dilatih (orang) | 3 | 27 | 07 | 2.01 | 03 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN | PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN | pelaksanaan penyuluhan pertanian | Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian (Bidang PSP) | Jumlah penyuluh yang terfasilitasi |
| | | | | | | | | | | | | | | Jumlah kelompok yang naik skor |
| | | | | | | | | | | | | | Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian (UPTD dan BPPP) | Jumlah BPP yg difasilitasi |
| | | | Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Kelembagaan Kelompok Tani | Jumlah kelompok yang dibina (kelompok) | 3 | 27 | 07 | 2.01 | 02 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN | PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN | pelaksanaan penyuluhan pertanian | pengembangan kapasitas kelembagaan petani di kecamatan dan desa | Jumlah kelompok yang dibina (kelompok) |
| | | | | | | | | | | | | | | Jumlah kelompok yang naik skor |
| | | | | | 3 | 27 | 07 | 2.01 | 04 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN | PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN | pelaksanaan penyuluhan pertanian | Pembentukan Badan Usaha Milik Petani | Jumlah badan usaha yg dibentuk |
| | | | PROGRAM PEMBERDAYAAN PENYULUH PERTANIAN/ PERKEBUNAN LAPANGAN | Persentase Penyuluh yang Naik Jenjang Jabatan (%) | | | | | | | | | | |

| PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA | | | | | PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 | | | | | | | | | |
|---|--------|---------------|--|--|---------------------------|----|----|------|----|--------------------------------------|--|---|---|---|
| NO | URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM/KEGIATAN | Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output) | KODE | | | | | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | Peningkatan Kapasitas Aparatur dan Tenaga Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan | Jumlah tenaga penyuluh yang difasilitasi (orang) | 3 | 27 | 01 | 2.04 | 09 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Pendidikan dan Pelatihan Formal | Jumlah tenaga penyuluh yang difasilitasi (orang) |
| | | | PROGRAM PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA PERTANIAN | Persentase Penambahan Sawah Beririgasi (%) | | | | | | | | | | |
| | | | Fasilitasi Pupuk dan Pestisida | Jumlah layanan penyaluran pupuk bersubsidi (dokumen) | 3 | 27 | 02 | 2.01 | 01 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN | Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian | Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai Dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi | Jumlah Layanan Penyaluran Pupuk Bersubsidi |
| | | | | | | | | | | | | | | Persentase penyaluran pupuk bersubsidi (%) |
| | | | Pengelolaan Air Irigasi untuk Pertanian | Jumlah pembangunan jaringan irigasi (ha) | 3 | 27 | 03 | 2.02 | 01 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN | PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN | Pembangunan Prasarana Pertanian | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Iriogasi Usaha Tani | Jumlah Pembangunan Jaringan Irigasi (Ha) |
| | | | | Jumlah perbaikan jaringan irigasi (ha) | | | | | | | | | | Jumlah Perbaikan Jaringan Irigasi (Ha) |
| | | | Pendampingan Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian | Jumlah dokumen perencanaan (dokumen) | 3 | 27 | 03 | 2.01 | 03 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN | PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN | Pengembangan Prasarana Pertanian | Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya | Jumlah Dokumen Perencanaan (Dokumen) |

| PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA | | | | | PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 | | | | | | | | | |
|---|--------|---------------|---|---|---------------------------|----|----|------|----|--------------------------------------|--|---|---|---|
| NO | URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM/KEGIATAN | Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output) | KODE | | | | | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | Pembangunan /Rehabilitasi Jalan Pertanian | Jalan Pembangunan Jalan Pertanian (meter) | 3 | 27 | 03 | 2.02 | 03 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN | PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN | Pembangunan Prasarana Pertanian | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani | Jumlah Pembangunan Jalan Pertanian (Meter) |
| | | | | Jumlah Perbaikan jalan pertanian (meter) | | | | | | | | | | Jumlah Perbaikan Jalan Pertanian (Meter) |
| | | | PROGRAM PENINGKATAN PENERAPAN TEKNOLOGI PERTANIAN DAN PERIKANAN | Rasio Ketersediaan handtractor terhadap lahan pertanian | | | | | | | | | | |
| | | | Pemeliharaan Kebun Buah Kandi (UPTD Pembibitan) | Operasional Pemeliharaan (bulan) | 3 | 27 | 02 | 2.02 | 03 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN | Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikroorganisme Kewenangan Kab/Kota | Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman | Operasional Pemeliharaan (bulan) |
| | | | PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN | Tingkat Keamanan Produk Pangan Segar dan Produk Pangan Olahan yang terdeteksi dari Cemaran Mikroba, Bahan kimia /Berbahaya dan Residu Pestisida (%) | | | | | | | | | | |

| PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA | | | | | PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 | | | | | | | | | | |
|---|--------|---------------|---|--|---------------------------|----|----|------|-----|---------------|---|--|--|---|--|
| NO | URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM/KEGIATAN | Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output) | KODE | | | | | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| | | | Pengawasan Produk Pertanian | Jumlah Laporan Pengawasan (laporan) | 2 | 09 | 05 | 2.01 | 04 | Pangan | PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN | Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota | Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan Pengawasan Keamanan Pangan Segar (laporan) | |
| | | | | | 2 | 09 | 05 | 2.01 | 05 | Pangan | PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN | Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Sarana dan Prasarana Pengukuran Mutu dan Keamanan Segar yang disediakan (unit) | |
| | | | Pemanfaatan Perkarangan untuk Pengembangan Pangan | Jumlah kelompok yang difasilitasi (Kelompok) | 2 | 09 | 3 | 2.04 | 02 | Pangan | PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT | Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi | Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Komsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal | Jumlah kelompok yang difasilitasi (Kelompok) | |
| | | | Promosi Ketahanan Pangan | Jumlah kegiatan yang diikuti /Dilaksanakan (event) | 2 | 09 | 3 | 2.04 | 02 | Pangan | PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT | Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi | Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Komsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal | Jumlah Kegiatan yang Diikuti/ Dilaksanakan (ivent) | |
| | | | Fasilitas Lomba LCM B2SA dan Pengolahan Pangan | Prestasi LCM B2SA tingkat Provinsi Sumbar (Peringkat) | 2 | 09 | 3 | 2.04 | 0,2 | Pangan | PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT | Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi | Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Komsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal | Prestasi LCM B2SA tingkat Propinsi Sumatera Barat | |

| PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA | | | | | PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 | | | | | | | | | |
|---|--------|---------------|--|--|---------------------------|----|----|------|----|----------------------|---|--|---|--|
| NO | URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM/KEGIATAN | Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output) | KODE | | | | | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | Sosialisasi Pola Pangan Harapan | Jumlah Peserta sosialisasi (orang) | 2 | 09 | 3 | 2.04 | 03 | BIDANG URUSAN PANGAN | PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT | Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi | Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Komsumsi per Kapita per Tahun | Jumlah Peserta sosialisasi (orang) |
| | | | Pengelolaan Data Ketahanan Pangan | Jumlah Laporan Data Statistik Ketahanan Pangan (Laporan) | 2 | 09 | 04 | 2.01 | 01 | BIDANG URUSAN PANGAN | PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN | Penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan | Penyusunan, Permutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan | Jumlah Laporan Data Statistik Ketahanan Pangan (Laporan) |
| | | | | | 2 | 09 | 04 | 2.02 | 01 | BIDANG URUSAN PANGAN | PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN | Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota | Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan kabupaten/Kota | Jumlah laporan koordinasi dan sinkronisasi (laporan) |
| | | | Pembinaan Lembaga Usaha Pangan Masyarakat (LUPM) dan Toko Tani Indonesia (TTI) | Jumlah RUPM dan TTI yang dibina (unit) | 2 | 09 | 03 | 2.01 | 05 | BIDANG URUSAN PANGAN | PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT | Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan daerah Kabupaten/Kota dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan | Pengembangan kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan | Jumlah lembaga yang dibentuk dan dibina (unit usaha) |

| PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA | | | | | PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 | | | | | | | | | |
|---|--------|---------------|--|--|---------------------------|----|----|------|----|---|---|--|--|---|
| NO | URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM/KEGIATAN | Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output) | KODE | | | | | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | | | 2 | 09 | 03 | 2.01 | 06 | BIDANG URUSAN PANGAN | PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT | Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan kebutuhan daerah Kabupaten/Kota dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan | Pengembangan kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia | Jumlah UPM dan TTI yang dibina (unit) |
| | | | Gerakan Gemar Makan Ikan (Dikoordinasikan dengan provinsi) | Tingkat Konsumsi Ikan (kg/kap/tahun) | 3 | 25 | 05 | 2.02 | 01 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN | PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN | Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil | Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Lomba yang Diikuti (Gemar Makan Ikan) |
| | | | Penguatan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah | Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (ton) | 2 | 09 | 03 | 2.02 | 01 | BIDANG URUSAN PANGAN | PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT | Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi (Laporan) |
| | | | | | 2 | 09 | 03 | 2.02 | 03 | BIDANG URUSAN PANGAN | PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT | Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota | Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota | Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (Ton) |

| PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA | | | | | PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 | | | | | | | | | |
|---|--------|---------------|---------------------------|--|---------------------------|----|----|------|----|----------------------|---|--|---|--|
| NO | URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM/KEGIATAN | Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output) | KODE | | | | | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | Pengembangan Desa Mandiri | Kelompok Tani Pelaksana Desa Mandiri Pangan (Desa) | 2 | 09 | 02 | 2.01 | 01 | BIDANG URUSAN PANGAN | PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN | Penyediaan Infrastruktur dan seluruh pendudkung kemandirian pangan sesuai kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan | Jumlah Laporan Fasilitas Pendampingan Penyediaan Sarana Lumbung Padi (laporan) |
| | | | | Jumlah desa menuju mandiri pangan yang dikembangkan (desa) | 2 | 09 | 02 | 2.01 | 03 | BIDANG URUSAN PANGAN | PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN | Penyediaan Infrastruktur dan seluruh pendudkung kemandirian pangan sesuai kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya | Jumlah desa menuju mandiri pangan yang dikembangkan (desa) |
| | | | | | | | | | | | | | | Jumlah Sarana pendukung lainnya (paket) |
| | | | | | | | | | | | | | | Kelompok Tani Pelaksana Desa Mandiri Pangan (Desa) |

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

| PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA | | | | | PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 | | | | | | | | | |
|---|---|--|---|---|---------------------------|----|----|------|----|---------------|--|-------------------|---|---|
| NO | URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM/KEGIATAN | Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output) | KODE | | | | | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPENDUDUKAN | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Terlaksananya program pelayanan administrasi perkantoran | | | | | | | | | | |
| | | | Penyediaan jasa surat menyurat | jumlah materai 6000 yang disediakan (buah) | 2 | 12 | 01 | 2.03 | 01 | | Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Administrasi Umum | Penyediaan jasa surat menyurat | jumlah materai 6000 yang disediakan (buah) |
| | | | | jumlah materai 3000 yang disediakan (buah) | | | | | | | | | | jumlah materai 3000 yang disediakan (buah) |
| | | | | jml pemakaian jasa pos (bulan) | | | | | | | | | | jml pemakaian jasa pos (bulan) |
| | | | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air & listrik | jumlah tagihan listrik, air, dan telepon yang dibayar (bulan) | 2 | 12 | 01 | 2.03 | 02 | | Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Administrasi Umum | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air & listrik | jumlah tagihan listrik, air, dan telepon yang dibayar (bulan) |
| | | | Penyediaan jasa kebersihan kantor | bahan dan alat kebersihan yang disediakan (bulan) | 2 | 12 | 01 | 2.03 | 08 | | Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Administrasi Umum | Penyediaan jasa kebersihan kantor | bahan dan alat kebersihan yang disediakan (bulan) |
| | | | Penyediaan alat tulis kantor | jumlah atk yang dibeli (bulan) | 2 | 12 | 01 | 2.03 | 10 | | Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Administrasi Umum | Penyediaan alat tulis kantor | jumlah atk yang dibeli (bulan) |
| | | | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | jumlah barang cetakan, jilid dan fotocopy yang disediakan (bulan) | 2 | 12 | 01 | 2.03 | 11 | | Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Administrasi Umum | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | jumlah barang cetakan, jilid dan fotocopy yang disediakan (bulan) |

| PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA | | | | | PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 | | | | | | | | | |
|---|--------|---------------|--|---|---------------------------|----|----|------|---------------|---------|--|-----------------------|--|---|
| NO | URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM/KEGIATAN | Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output) | KODE | | | | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor | jumlah komponen instalasi listrik yang dibeli (bulan) | 2 | 12 | 01 | 2.03 | 12 | | Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Administrasi Umum | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor | jumlah komponen instalasi listrik yang dibeli (bulan) |
| | | | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan per UU | jenis bahan bacaan dan peraturan Per UU yang disediakan (jenis) | 2 | 12 | 01 | 2.03 | 15 | | Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Administrasi Umum | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan per UU | jenis bahan bacaan dan peraturan Per UU yang disediakan (jenis) |
| | | | Penyediaan Makanan dan Minuman | jumlah makan dan minum yang tersedia (bulan) | 2 | 12 | 01 | 2.03 | 17 | | Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Administrasi Umum | Penyediaan Makanan dan Minuman | jumlah makan dan minum yang tersedia (bulan) |
| | | | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi yang diikuti (bulan) | 2 | 12 | 01 | 2.03 | 18 | | Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Administrasi Umum | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi yang diikuti (bulan) |
| | | | Penyediaan jasa pelayanan pegawai Non PNS | jumlah pegawai non pns yang dibayarkan jasanya (orang) | 2 | 12 | 01 | 2.02 | 01 | | Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Administrasi Keuangan | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Tersedianya jasa pelayanan pegawai non pns (bulan) |
| | | | Penatausahaan Keuangan dan Barang | jumlah pegawai yang dibayarkan jasanya (orang) | 2 | 12 | 01 | 2.02 | 02 | | Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Administrasi Keuangan | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Tersedianya Honorarium penatausahaan (bulan) |
| | | | Penyediaan Dokumentasi dan Dekorasi | jumlah spanduk yang disediakan (buah) | 2 | 12 | 01 | 2.03 | 24 | | Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Administrasi Umum | | jumlah spanduk yang disediakan (buah) |
| | | | | jumlah bendera yang disediakan ((buah) | | | | | | | | | | jumlah bendera yang disediakan ((buah) |

| PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA | | | | | PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 | | | | | | | | |
|---|--------|---------------|------------------|--|---------------------------|--|--|--|---------------|---------|----------|--------------|---|
| NO | URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM/KEGIATAN | Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output) | KODE | | | | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | | Pakaian Batik Tradisional (paket) | | | | | | | | | Pakaian Batik Tradisional (paket) |
| | | | | marawa | | | | | | | | | marawa |
| | | | | umbul2 | | | | | | | | | umbul2 |
| | | | | baliho (m) | | | | | | | | | baliho (m) |
| | | | | standing banner | | | | | | | | | standing banner |
| | | | | DUK/Bezetting | | | | | | | | | DUK/Bezetting |
| 2 | | | | papan struktur | | | | | | | | | papan struktur |
| | | | | Jumlah iklan radio yang disiarkan (kali) | | | | | | | | | Jumlah iklan radio yang disiarkan (kali) |
| 3 | | | | Papan Informasi (aclyryc) | | | | | | | | | Papan Informasi (aclyryc) |
| | | | | bingkai foto | | | | | | | | | bingkai foto |
| | | | | | | | | | | | | | Jumlah printer yang dibeli (unit) |
| | | | | | | | | | | | | | jumlah printer KTP el yang dibeli (unit) |
| | | | | | | | | | | | | | jumlah printer KIA yang dibeli (unit) |
| | | | | | | | | | | | | | Mesin Sidik Jari |
| | | | | | | | | | | | | | jumlah Mesin IKM yang dibeli (unit) |
| | | | | | | | | | | | | | Jumlah AC yang dibeli (unit) |
| | | | | | | | | | | | | | Lemari Loker 4 D |
| | | | | | | | | | | | | | Filing Cabinet |
| | | | | | | | | | | | | | UPS |

| PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA | | | | | PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 | | | | | | | | |
|---|--------|---------------|------------------|--|---------------------------|--|--|--|---------------|---------|----------|--------------|---|
| NO | URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM/KEGIATAN | Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output) | KODE | | | | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | | | | | | | | | | | Jumlah laptop yang dibeli (unit) |
| | | | | | | | | | | | | | Lemari Arsip Dinamis |
| | | | | | | | | | | | | | Lemari arsip Kayu |
| | | | | | | | | | | | | | Jumlah kursi staf yg dibeli (bh) |
| | | | | | | | | | | | | | Jumlah komputer pc yg dibeli (bh) |
| | | | | | | | | | | | | | Jumlah meja staf yg dibeli (bh) |
| | | | | | | | | | | | | | Jumlah mesin tik yg dibeli (bh) |
| | | | | | | | | | | | | | Jumlah Meja Pelayanan FO (set) |
| | | | | | | | | | | | | | Jumlah meja bundar yang dibeli (set) |
| | | | | | | | | | | | | | Jumlah kursi eselon |
| | | | | | | | | | | | | | Jumlah kursi rapat |
| | | | | | | | | | | | | | Mesin Potong Rumput |
| | | | | | | | | | | | | | Jumlah Kursi Ruang tunggu (Set) |
| | | | | | | | | | | | | | Server (Unit) |
| | | | | | | | | | | | | | Abaka |
| | | | | | | | | | | | | | Iris Scanner |

| PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA | | | | | PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 | | | | | | | | |
|---|--------|---------------|---|--|---------------------------|--|--|--|---------------|---------|----------|--------------|--|
| NO | URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM/KEGIATAN | Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output) | KODE | | | | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | | | | | | | | | | | Scanner |
| | | | | | | | | | | | | | AC |
| | | | | | | | | | | | | | TV |
| | | | | | | | | | | | | | Tempat Tidur Ruang Laktasi |
| | | | | | | | | | | | | | Android (unit) |
| | | | | | | | | | | | | | Finger Print |
| | | | | | | | | | | | | | Lemari Es |
| | | | | | | | | | | | | | Mesin penghancur kertas |
| | | | | | | | | | | | | | Jumlah peralatan penunjang SIAK yang di sediakan (Paket) |
| | | | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Sarana dan Prasarana aparatur tersedia dengan baik (bulan) | | | | | | | | | |
| | | | Pengadaan Peralatan gedung kantor | Jumlah printer yang dibeli (unit) | | | | | | | | | |
| | | | | jumlah printer KTP el yang dibeli (unit) | | | | | | | | | |
| | | | | jumlah printer KIA yang dibeli (unit) | | | | | | | | | |
| | | | | Mesin Sidik Jari | | | | | | | | | |
| | | | | jumlah Mesin IKM yang dibeli (unit) | | | | | | | | | |

| PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA | | | | | PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 | | | | | | | | | |
|---|--------|---------------|------------------|--|---------------------------|--|--|--|---------------|---------|----------|--------------|---|--|
| NO | URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM/KEGIATAN | Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output) | KODE | | | | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| | | | | Jumlah AC yang dibeli (unit) | | | | | | | | | | |
| | | | | Lemari Loker 4 D | | | | | | | | | | |
| | | | | Filing Cabinet | | | | | | | | | | |
| | | | | UPS | | | | | | | | | | |
| | | | | Jumlah laptop yang dibeli (unit) | | | | | | | | | | |
| | | | | Lemari Arsip Dinamis | | | | | | | | | | |
| | | | | Lemari arsip Kayu | | | | | | | | | | |
| | | | | Jumlah kursi staf yg dibeli (bh) | | | | | | | | | | |
| | | | | Jumlah komputer pc yg dibeli (bh) | | | | | | | | | | |
| | | | | Jumlah meja staf yg dibeli (bh) | | | | | | | | | | |
| | | | | Jumlah mesin tik yg dibeli (bh) | | | | | | | | | | |
| | | | | Jumlah Meja Pelayanan FO (set) | | | | | | | | | | |
| | | | | Jumlah meja bundar yang dibeli (set) | | | | | | | | | | |
| | | | | Jumlah kursi eselon | | | | | | | | | | |
| | | | | Jumlah kursi rapat | | | | | | | | | | |
| | | | | Mesin Potong Rumput | | | | | | | | | | |

| PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA | | | | | PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 | | | | | | | | | |
|---|--------|---------------|--|--|---------------------------|----|----|------|----|---------------|--|-------------------|--|--|
| NO | URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM/KEGIATAN | Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output) | KODE | | | | | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | | Jumlah Kursi Ruang tunggu (Set) | | | | | | | | | | |
| | | | | Server (Unit) | | | | | | | | | | |
| | | | | Abaka | | | | | | | | | | |
| | | | | Iris Scanner | | | | | | | | | | |
| | | | | Scanner | | | | | | | | | | |
| | | | | AC | | | | | | | | | | |
| | | | | TV | | | | | | | | | | |
| | | | | Tempat Tidur Ruang Laktasi | | | | | | | | | | |
| | | | | Android (unit) | | | | | | | | | | |
| | | | | Finger Print | | | | | | | | | | |
| | | | | Lemari Es | | | | | | | | | | |
| | | | | Mesin penghancur kertas | | | | | | | | | | |
| | | | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | Jumlah frekwensi pemeliharaan Aset Tetap lainnya (bulan) | 2 | 12 | 01 | 2.03 | 28 | | Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Administrasi Umum | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | Jumlah frekwensi pemeliharaan Aset Tetap lainnya (bulan) |
| | | | | Jumlah frekwensi pemeliharaan taman (bulan) | | | | | | | | | | Jumlah frekwensi pemeliharaan taman (bulan) |
| | | | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | Jumlah kendaraan dinas roda empat yang dipelihara (unit) | 2 | 12 | 01 | 2.03 | 30 | | Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Administrasi Umum | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | Jumlah kendaraan dinas roda empat yang dipelihara (unit) |

| PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA | | | | | PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 | | | | | | | | | | |
|---|--------|---------------|--|--|---------------------------|----|----|------|----|---------------|--|-------------------|--|--|--|
| NO | URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM/KEGIATAN | Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output) | KODE | | | | | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| | | | | Jumlah kendaraan dinas roda dua yang dipelihara (unit) | | | | | | | | | | Jumlah kendaraan dinas roda dua yang dipelihara (unit) | |
| | | | Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor | Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara (jenis) | 2 | 12 | 01 | 2.03 | 34 | | Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Administrasi Umum | Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor | Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara (jenis) | |
| | | | Pemeliharaan rutin/berkala meubillair | Jumlah meubilair yang dipelihara (jenis) | 2 | 12 | 01 | 2.03 | 35 | | Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Administrasi Umum | Pemeliharaan rutin/berkala meubilair | Jumlah meubilair yang dipelihara (jenis) | |
| | | | Pengadaan alat angkut darat bermotor | Jumlah mobil untuk pelayanan keliling yang disediakan (unit) | | | | | | | - | - | - | | |
| | | | | Jumlah Mobil Operasional Sekdis | | | | | | | | | | | |
| | | | | Jumlah Mobil Operasional Kabid | | | | | | | | | | | |
| | | | Pengadaan alat angkut darat bermotor | Jumlah motor pelayanan keliling yang beli (unit) | | | | | | | - | - | - | - | |
| | | | Rehab sedang/Berat Gedung Kantor | Rehab bangunan dan pagar | 2 | 12 | 01 | 2.03 | 38 | | Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Administrasi Umum | Rehab sedang/Berat Gedung Kantor | Rehab bangunan dan pagar | |

| PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA | | | | | PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 | | | | | | | | | |
|---|--------|---------------|--|---|---------------------------|----|----|------|----|---------------|--|---|---|---|
| NO | URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM/KEGIATAN | Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output) | KODE | | | | | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | Program Peningkatan Disiplin Aparatur | Persentase aparatur yang meningkat kedisiplinan dalam berpakaian (%) | | | | | | | | | | |
| | | | Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu | Jumlah Petugas Pelayanan yang di sediakan pakaiannya (org) | 2 | 12 | 01 | 2.04 | 05 | | Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu | Jumlah Petugas Pelayanan yang di sediakan pakaiannya (org) |
| | | | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Persentase aparatur yang telah mengikuti peningkatan kapasitas sumber daya aparatur pelayanan adm. Kependudukan dan capil (%) | | | | | | | | | | |
| | | | Pendidikan dan latihan formal | Jml aparatur yang mengikuti diklat formal/umum dan teknis (orang) | 2 | 12 | 01 | 2.04 | 09 | | Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Pendidikan dan latihan formal | Jml aparatur yang mengikuti diklat formal/umum dan teknis (orang) |
| | | | Capacity Building Petugas Pelayanan Dukcapil | Jml aparatur yang mengikuti Capacity Building (orang) | | | | | | | - | - | - | - |
| | | | Program Penataan Administrasi Kependudukan | Persentase Penduduk yang Memiliki Dokumen Kependudukan | | | | | | | | | | |
| | | | | Persentase Penduduk yang memiliki Dokumen Pencatatan Sipil | | | | | | | | | | |

| PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA | | | | | PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 | | | | | | | | | | |
|---|--------|---------------|---|--|---------------------------|----|----|------|----|---------------|---|--|---|--|--|
| NO | URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM/KEGIATAN | Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output) | KODE | | | | | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| | | | Koordinasi dan Konsultasi Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan | Jumlah laporan koordinasi dan konsultasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (laporan) | 2 | 12 | 04 | 2.03 | 03 | | Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | Penyelenggaraan urusan administrasi kependudukan | Koordinasi dan Konsultasi Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan | Jumlah laporan koordinasi dan konsultasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (laporan) | |
| | | | Pelayanan dokumen kependudukan | Jumlah laporan Pelaksanaan pelayanan keliling | | | | | | | Program Pendaftaran Penduduk | Pelayanan Pendaftaran Penduduk | Peningkatan Pelayanan Pendaftaran kependudukan | Jumlah laporan Pelaksanaan pelayanan keliling | |
| | | | Sosialisasi Pelayanan Akta Kematian Melalui Desa/Kel | Jumlah Sosialisasi yang di adakan | | | | | | | - | - | - | - | |
| | | | Pengembangan Sistem Pelayanan Dokumen Kependudukan secara on line | Jumlah sistem yang dibangun (aplikasi) | | | | | | | - | - | - | - | |
| | | | Optimalisasi Informasi Website | Terlaksananya penyajian data kependudukan secara digitalisasi | | | | | | | - | - | - | - | |
| | | | Pembuatan Galeri Informasi | Jumlah Galeri informasi yang tersedia | | | | | | | - | - | - | - | |
| | | | Pelayanan administrasi kependudukan dan Pencatatan sipil | Jumlah Dokumen akta kelahiran, Akta Kematian, Jumlah Pelayanan KTP, KK dan Jumlah Surat Pindah yang di terbitkan | 2 | 12 | 02 | 2.01 | 04 | | Program Pendaftaran Penduduk | Pelayanan Pendaftaran Penduduk | Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk | Jumlah Dokumen akta kelahiran, Akta Kematian, Jumlah Pelayanan KTP, KK dan Jumlah Surat Pindah yang di terbitkan | |

| PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA | | | | | PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 | | | | | | | | | | |
|---|--------|---------------|--|---|---------------------------|----|----|------|----|---------------|---|---|---|---|--|
| NO | URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM/KEGIATAN | Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output) | KODE | | | | | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| | | | Sosialisasi Kebijakan Administrasi Kependudukan dan Capil | Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi (orang) | 2 | 12 | 04 | 2,03 | 08 | | Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | Penyelenggaraan urusan administrasi kependudukan | Sosialisasi Kebijakan Administrasi Kependudukan dan Capil | Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi (orang) | |
| | | | Fasilitasi Petugas Registrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Desa/Kelurahan | Jumlah petugas yang difasilitasi (orang) | 2 | 12 | 04 | 2.03 | 06 | | Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | Penyelenggaraan urusan administrasi kependudukan | Fasilitasi Penyelenggara urusan Administrasi Kependudukan | Jumlah petugas yang difasilitasi (orang) | |
| | | | Pendataan dan Penataan Dokumen Kependudukan | Jumlah Dokumen Yang Tergitalisasi | 2 | 12 | 04 | 2.01 | | | Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan | Pendataan dan Penataan Dokumen Kependudukan | Jumlah Dokumen Yang Tergitalisasi | |
| | | | Pelayanan Terpadu | Jumlah Pasangan Suami Istri yang belum tercatat pernikahannya di Pemerintah terfasilitasi sidang isbatnya | 2 | 12 | 04 | 2.03 | 01 | | Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | Penyelenggaraan urusan administrasi kependudukan | Koordinasi dengan kantor Kementerian yang menyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang agama Kab / kota dan pengadilan agama yang berkaitan dengan nikah, talak, cerai dan rujuk bagi penduduk yang beragama islam | Jumlah Pasangan Suami Istri yang belum tercatat pernikahannya di Pemerintah terfasilitasi sidang isbatnya | |

| PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA | | | | | PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 | | | | | | | | | |
|---|--------|---------------|--|--|---------------------------|----|----|------|----|---------------|---|---|---|---|
| NO | URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM/KEGIATAN | Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output) | KODE | | | | | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | Pengelolaan SIAK | Jumlah Data Yang Di sajikan | 2 | 12 | 04 | 2,01 | 04 | | Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan | Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan | Jumlah Data Yang Di sajikan |
| | | | Pengadaan Peralatan Penunjang Operasional SIAK | Jumlah sarana/prasarana yang di sediakan (Paket) | | | | | | | - | - | Pengadaan Peralatan Penunjang Operasional SIAK | Jumlah sarana/prasarana yang di sediakan (Paket) |
| | | | Penerbitan Dokumen Kependudukan | Jenis blanko /formulir yang disediakan (paket) | 2 | 12 | 04 | 2,02 | 02 | | Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | Penataan administrasi kependudukan | Pengadaan Blangko Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP el, Formulir dan Buku Untuk Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil sesuai dengan kebutuhan | Jenis blanko /formulir yang disediakan (paket) |
| | | | Optimalisasi Pelaksanaan Pemanfaatan Data | Jumlah OPD yang memanfaatkan Data | 2 | 12 | 04 | 2.01 | 04 | | Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan | Pengolahan dan penyajian data kependudukan | Jumlah OPD yang memanfaatkan Data |
| | | | Pemutakhiran Data Penduduk di Desa/Kelurahan | Jumlah KK yang di Data | 2 | 12 | 04 | 2,03 | 11 | | Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | Penyelenggaraan urusan administrasi kependudukan | Penyajian Data Kependudukan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan | Jumlah KK yang di Data |

| PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA | | | | | PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 | | | | | | | | | |
|---|--------|---------------|---|--|---------------------------|----|----|------|----|---------------|---|---|---|---|
| NO | URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM/KEGIATAN | Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output) | KODE | | | | | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | Penerbitan Dokumen Kartu Identitas Anak | Jumlah Penerbitan KIA (Dokumen) | 2 | 12 | 04 | 2.02 | 02 | | Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | Penataan administrasi kependudukan | Pengadaan Blangko Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP el, Formulir dan Buku Untuk Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil sesuai dengan kebutuhan | Jumlah Penerbitan KIA (Dokumen) |
| | | | Peningkatan Pelayanan Publik dalam bidang Kependudukan | Indeks Kepuasan Masyarakat | | | | | | | - | - | - | - |
| | | | Program Penguatan Kelembagaan | Terpenuhinya pelayanan sesuai standar ISO 9001 : 2015 | | | | | | | | | | |
| | | | Sertifikasi Pelayanan Administrasi Kependudukan berstandar Internasional (ISO 9001:2015) | terbitnya sertifikat pelayanan (ISO 9001 : 2015)(Paket) | | | | | | | - | - | - | - |
| | | | Standarisasi Pelayanan Administrasi Kependudukan berstandar Internasional (ISO 9001:2015) | Keluarnya standarisasi pelayanan (ISO 9001 : 2015)(Paket) | 5 | 04 | 02 | 2,01 | 03 | | Program Pengembangan SDM | Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan fungsional | Pelaksanaan sertifikasi kompetensi di lingkungan pemerintahan propinsi dan kabupaten / kota | Keluarnya standarisasi pelayanan (ISO 9001 : 2015)(Paket) |

DINAS PERHUBUNGAN

| PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA | | | | | PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 | | | | | | | | | | |
|---|------------------|---------------------------|--|---|---------------------------|----|----|------|----|---------------|---------------------------|--|---|--|--|
| NO | URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM/ KEGIATAN | Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output) | KODE | | | | | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| | Urusan Penunjang | Bidang Urusan Perhubungan | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Terpenuhinya sarana prasarana administrasi perkantoran (persentase) | 2 | 15 | 01 | | | | Bidang Urusan Perhubungan | Program Penunjang urusan Pemerintahan daerah | | | Tersedianya sarana pelayanan administrasi Perkantoran (%) |
| | | | | | | | | | | | | | | | Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur |
| | | | | | | | | | | | | | | | Persentase Aparatur yang meningkat SDM nya |
| | | | | | | | | | | | | | | | Persentase ASN Berpakaian Dinas dengan Atribut Lengkap |
| | | | | | | | | | | | | | | | Terwujudnya Pembinaan dan Pengembangan Aparatur |
| | | | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Terpenuhinya sarana prasarana administrasi perkantoran (persentase) | 2 | 15 | 01 | 1.01 | | | | Program Penunjang urusan Pemerintahan daerah | Perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah | | Terlaksanannya Perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah (%) |
| | | | Penyediaan Buku Profil | Jumlah Buku Profil Dishub yang di cetak (dokumen) | 2 | 15 | 01 | 1.01 | 02 | | | Program Penunjang urusan Pemerintahan daerah | Perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah | Penyusunan program dan kegiatan perangkat daerah dalam dokumen perencanaan | Penyediaan buku profil (dokumen) |

| PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA | | | | | PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 | | | | | | | | | | |
|---|--------|---------------|---|---|---------------------------|----|----|------|----|---------------|--|---|--|--|--|
| NO | URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM/ KEGIATAN | Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output) | KODE | | | | | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| | | | Forum OPD | Jumlah Forum OPD yang diadakan (keg) | 2 | 15 | 01 | 1.01 | 04 | | Program Penunjang urusan Pemerintahan daerah | Perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah | Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan perangkat daerah | Forum OPD yang dilaksanakan (kegiatan) | |
| | | | | | 2 | 15 | 01 | 2.02 | | | Program Penunjang urusan Pemerintahan daerah | Administrasi Keuangan | | Terfasilitasinya pelayanan administrasi keuangan (orang/bulan) | |
| | | | Peyediaan Jasa Pelayanan Pegawai Non PNS | Jumlah ketersediaan Pegawai Pegawai Non PNS (orang) | 2 | 15 | 01 | 2.02 | 01 | | Program Penunjang urusan Pemerintahan daerah | Administrasi Keuangan | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah pegawai non PNS yang difasilitasi (orang) | |
| | | | | | 2 | 15 | 01 | #### | | | Program Penunjang urusan Pemerintahan daerah | Administrasi Umum | | Tersedianya sarana pelayanan Administrasi Perkantoran (%) | |
| | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah penyediaan materai dan benda pos lainnya (bulan) | 2 | 15 | 01 | #### | 01 | | Program Penunjang urusan Pemerintahan daerah | Administrasi Umum | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah penyediaan materai dan benda pos lainnya yang disediakan(bulan) | |
| | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik | Pembayaran tagihan telpon, air dan listrik (bulan) | 2 | 15 | 01 | #### | 02 | | Program Penunjang urusan Pemerintahan daerah | Administrasi Umum | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik | Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik yang dibayarkan (bulan) | |
| | | | Penatausahaan Keuangan & Barang | Jumlah honorarium penatausahaan keuangan dan barang (bulan) | 2 | 15 | 01 | #### | 07 | | Program Penunjang urusan Pemerintahan daerah | Administrasi Umum | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan dan Barang | Jumlah administrasi keuangan yang dibayarkan (bulan) | |

| PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA | | | | | PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 | | | | | | | | | |
|---|--------|---------------|--|--|---------------------------|----|----|------|----|---------------|--|-------------------|--|---|
| NO | URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM/ KEGIATAN | Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output) | KODE | | | | | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | Peyediaan Alat Kebersihan Kantor | Jenis peralatan kebersihan dan bahan pembersih (bulan) | 2 | 15 | 01 | #### | 08 | | Program Penunjang urusan Pemerintahan daerah | Administrasi Umum | Peyediaan Alat Kebersihan Kantor | Jumlah alat kebersihan dan bahan pembersih yang disediakan(bulan) |
| | | | Penyediaan alat tulis kantor | Jumlah Alat tulis kantor (bulan) | 2 | 15 | 01 | #### | 10 | | Program Penunjang urusan Pemerintahan daerah | Administrasi Umum | Penyediaan alat tulis kantor | Jumlah Alat tulis kantor yang disediakan(bulan) |
| | | | Penyediaan barang cetak dan penggandaan | Jumlah barang cetakan dan penggandaan (bulan) | 2 | 15 | 01 | #### | 11 | | Program Penunjang urusan Pemerintahan daerah | Administrasi Umum | Penyediaan barang cetak dan penggandaan | Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan (bulan) |
| | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah jenis Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor (bulan) | 2 | 15 | 01 | #### | 12 | | Program Penunjang urusan Pemerintahan daerah | Administrasi Umum | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan | Jumlah komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor yang disediakan(bulan) |
| | | | Penyediaan Dokumentasi dan dekorasi | Jumlah Ketersediaan Dokumentasi dan Dekorasi (bulan) | 2 | 15 | 01 | #### | 13 | | Program Penunjang urusan Pemerintahan daerah | Administrasi Umum | Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor | Jumlah Ketersediaan Dokumentasi dan Dekorasi (bulan) |
| | | | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | Jumlah bahan bacaan (tahun) | 2 | 15 | 01 | #### | 15 | | Program Penunjang urusan Pemerintahan daerah | Administrasi Umum | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan (tahun) |

| PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA | | | | | PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 | | | | | | | | | |
|---|--------|---------------|--|--|---------------------------|----|----|------|----|---------------|--|---|--|---|
| NO | URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM/ KEGIATAN | Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output) | KODE | | | | | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | Penyediaan makanan dan minuman | Jumlah makanan dan minuman tamu dan rapat (bulan) | 2 | 15 | 01 | #### | 17 | | Program Penunjang urusan Pemerintahan daerah | Administrasi Umum | Penyediaan makanan dan minuman | Jumlah makanan dan minuman tamu dan rapat (bulan) |
| | | | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | Jumlah rapat koordinasi ke dalam dan luar daerah (org/bulan) | 2 | 15 | 01 | #### | 18 | | Program Penunjang urusan Pemerintahan daerah | Administrasi Umum | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | Jumlah rapat koordinasi ke dalam dan luar daerah (org/bulan) |
| | | | Pengadaan peralatan gedung kantor | jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan (jenis) | 2 | 15 | 01 | #### | 25 | | Program Penunjang urusan Pemerintahan daerah | Administrasi Umum | Pengadaan peralatan gedung kantor | jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan (bulan) |
| | | | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | Jumlah gedung yang dipelihara (unit) | 2 | 15 | 01 | #### | 29 | | Program Penunjang urusan Pemerintahan daerah | Administrasi Umum | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | Jumlah gedung yang dipelihara (unit) |
| | | | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional | Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara (unit) | 2 | 15 | 01 | #### | 31 | | Program Penunjang urusan Pemerintahan daerah | Administrasi Umum | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional | Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara (unit) |
| | | | Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor | Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara (bulan) | 2 | 15 | 01 | #### | 35 | | Program Penunjang urusan Pemerintahan daerah | Administrasi Umum | Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor | Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara (bulan) |
| | | | Program Peningkatan Disiplin Aparatur | Presentase Peningkatan disiplin Aparatur (%) | 2 | 15 | 01 | 2.04 | | | Program Penunjang urusan Pemerintahan daerah | Peningkatan disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | | Persentase Aparatur yang meningkat SDM nya (%) , Persentase ASN berpakaian dinas dengan Atribut lengkap (%) |

| PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA | | | | | PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 | | | | | | | | | |
|---|--------|---------------|--|--|---------------------------|----|----|------|----|---------------|---|---|--|--|
| NO | URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM/ KEGIATAN | Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output) | KODE | | | | | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya | Jumlah pakaian dinas yang diadakan (stel lengkap) | 2 | 15 | 01 | 2.04 | 02 | | Program Penunjang urusan Pemerintahan daerah | Peningkatan disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya | Jumlah pakaian dinas yang diadakan (stel lengkap) |
| | | | Pendidikan dan pelatihan formal | Jumlah personil yang mengikuti diklat dan uji kompetensi (org) | 2 | 15 | 01 | 2.04 | 09 | | Program Penunjang urusan Pemerintahan daerah | Peningkatan disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Pendidikan dan pelatihan formal | Jumlah personil yang mengikuti diklat dan uji kompetensi (orang) |
| | | | Program peningkatan dan pengamanan lalu lintas | Persentase angka kecelakaan lalu lintas per 1000 kendaraan (%) | 2 | 15 | 02 | | | | Program Penyelenggaraan lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) | | | Persentase sarana dan fasilitas Perhubungan yang tersedia (Dokumen) |
| | | | | | | | | | | | | | | Persentase sarana dan Prasarana Perhubungan dalam kondisi baik (%) |
| | | | | | | | | | | | | | | Persentase Angka Kecelakaan Lalu lintas per 1000 kendaraan (%) |
| | | | | | | | | | | | | | | Tingkat kepuasan masyarakat terhadap Pelayanan Angkutan Umum (%) |

| PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA | | | | | PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 | | | | | | | | | |
|---|--------|---------------|--|--|---------------------------|----|----|------|---------------|---------|---|--|--|---|
| NO | URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM/ KEGIATAN | Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output) | KODE | | | | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| | | | | | | | | | | | | | Persentase Tingkat Pelayanan Angkutan Umum (%) | |
| | | | | | | | | | | | | | Persentase Kendaraan yang melakukan kelaikan Kendaraan Bermotor(%) | |
| | | | Program peningkatan dan pengamanan lalu lintas | Persentase angka kecelakaan lalu lintas per 1000 kendaraan (%) | 2 | 15 | 02 | 2.01 | | | Program Penyelenggaraan lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) | Penetapan rencana induk jaringan LLAJ Kabupaten/Kota | Persentase perlengkapan jalan dalam kondisi baik (%) | |
| | | | Penilaian Wahana Tata Nugraha (WTN) | Jumlah penilaian tertib lalu lintas yg dinilai (keg) | 2 | 15 | 02 | 2.01 | 01 | | Program Penyelenggaraan lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) | Penetapan rencana induk jaringan LLAJ Kabupaten/Kota | Pelaksanaan penyusunan rencana induk jaringan LLAJ Kabupaten/Kota | Jumlah pelaksanaan Wahana Tata Nugraha yang dilaksanakan (Kegiatan) |
| | | | Program peningkatan dan pengamanan lalu lintas | Persentase angka kecelakaan lalu lintas per 1000 kendaraan (%) | 2 | 15 | 02 | 2.02 | | | Program Penyelenggaraan lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) | Penyediaan Perlengkapan jalan di jalan Kab/Kota | Persentase perlengkapan jalan dalam kondisi baik (%) | |
| | | | Pengadaan Rambu-rambu lalu lintas | Jumlah rambu-rambu lalu lintas yang diadakan (unit) | 2 | 15 | 02 | 2.02 | 02 | | Program Penyelenggaraan lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) | Penyediaan Perlengkapan jalan di jalan Kab/Kota | Penyediaan Perlengkapan jalan di jalan Kabupaten/Kota | Jumlah perlengkapan jalan yang diadakan (paket) |
| | | | Pengadaan Marka jalan | Jumlah marka jalan yang diadakan (m1) | 2 | 15 | 02 | 2.02 | 02 | | Program Penyelenggaraan lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) | Penyediaan Perlengkapan jalan di jalan Kab/Kota | Penyediaan Perlengkapan jalan di jalan Kabupaten/Kota | Jumlah perlengkapan jalan yang diadakan (paket) |

| PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA | | | | | PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 | | | | | | | | | |
|---|--------|---------------|---|---|---------------------------|----|----|------|----|---------------|---|---|---|---|
| NO | URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM/ KEGIATAN | Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output) | KODE | | | | | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | pengadaan Zona Selamat sekolah | Jumlah Zona Selamat Sekolah yang diadakan (m1) | 2 | 15 | 02 | 2.02 | 02 | | Program Penyelenggaraan lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) | Penyediaan Perlengkapan jalan di jalan Kab/Kota | Penyediaan Perlengkapan jalan di jalan Kabupaten/Kota | Jumlah perlengkapan jalan yang diadakan (paket) |
| | | | Pengadaan Alat Penunjang Keselamatan | Jumlah road barrier dan traffic cone yang diadakan (unit) | 2 | 15 | 02 | 2.02 | 02 | | Program Penyelenggaraan lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) | Penyediaan Perlengkapan jalan di jalan Kab/Kota | Penyediaan Perlengkapan jalan di jalan Kabupaten/Kota | Jumlah perlengkapan jalan yang diadakan (paket) |
| | | | Pengadaan Audio Visual | Jumlah CCTV yang diadakan (paket) | 2 | 15 | 02 | 2.02 | 02 | | Program Penyelenggaraan lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) | Penyediaan Perlengkapan jalan di jalan Kab/Kota | Penyediaan Perlengkapan jalan di jalan Kabupaten/Kota | Jumlah perlengkapan jalan yang diadakan (paket) |
| | | | Pembangunan trotoar | panjang trotoar yang di adakan (km) | | | | | | | Program Penyelenggaraan lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) | Penyediaan Perlengkapan jalan di jalan Kab/Kota | Penyediaan Perlengkapan jalan di jalan Kabupaten/Kota | Jumlah perlengkapan jalan yang diadakan (paket) |
| | | | Rehabilitasi /pemeliharaan prasarana perlengkapan jalan | Jumlah prasarana perlengkapan jalan yang direhabilitasi / yang dilakukan pemeliharaan (Jenis) | 2 | 15 | 02 | 2.02 | 04 | | Program Penyelenggaraan lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) | Penyediaan Perlengkapan Jalan di jalan Kab/Kota | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan | Jumlah perlengkapan jalan yang direhab (jenis) |
| | | | Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir kewenangan Kab/Kota dalam sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik | Jumlah Area Parkir yang dipelihara (paket) | | | | | | | | | | |

| PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA | | | | | PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 | | | | | | | | | |
|---|--------|---------------|--|---|---------------------------|----|----|------|---------------|---------|---|--------------------------------------|---|--|
| NO | URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM/ KEGIATAN | Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output) | KODE | | | | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| | | | - Pemeliharaan Area parkir di RSUD | | | | | | | | | | | |
| | | | Program Peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor | Persentase kendaraan yang melakukan uji kelaikan kendaraan bermotor (%) | 2 | 15 | 02 | 2.05 | | | Program Penyelenggaraan lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) | Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | | Persentase kendaraan yang laik uji (%) |
| | | | Pengadaan sarana dan prasarana pengujian kendaraan bermotor rana Perhubungan prasarana lalu lintas(unit) | Jumlah alat uji yang diadakan (Unit) | 2 | 15 | 02 | 2.05 | 01 | | Program Penyelenggaraan lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) | Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | Penyediaan sarana dan prasarana pengujian berkala kendaraan bermotor | Jumlah peralatan pengujian kendaraan bermotor yang diadakan (unit) |
| | | | Pengujian kendaraan bermotor (unit) | Jumlah kendaraan yang melakukan uji kelaikan (Unit) | 2 | 15 | 02 | 2.05 | 03 | | Program Penyelenggaraan lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) | Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor Pengujian kendaraan bermotor (unit) | Jumlah kendaraan yang melakukan uji kelaikan (Unit) |
| | | | Kelanjutan pembangunan gedung uji kendaraan (unit) | Jumlah Gedung uji yang diadakan (Unit) | 2 | 15 | 02 | 2.05 | 07 | | Program Penyelenggaraan lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) | Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | Pemeliharaan sarana dan prasarana pengujian berkala kendaraan bermotor | Jumlah sarana prasarana Pengujian kendaraan Bermotor yang dipelihara (gedung/kantor) |
| | | | - Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Pengujian Kendaraan Bermotor (Aplikasi/unit) | | 2 | 15 | 02 | 2.05 | 07 | | | | | |

| PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA | | | | | PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 | | | | | | | | | |
|---|--------|---------------|--|---|---------------------------|----|----|------|---------------|---------|---|--|---|---|
| NO | URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM/ KEGIATAN | Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output) | KODE | | | | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| | | | Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kab/Kota | | 2 | 15 | 02 | 2.06 | | | Program Penyelenggaraan lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) | Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kab/Kota | | Terlaksananya Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan kab/Kota (bulan) |
| | | | pemilihan pelajar pelopor keselamatan lalulintas | Jumlah pelajar yang terpilih (Orang) | 2 | 15 | 02 | 2.06 | 03 | | Program Penyelenggaraan lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) | Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kab/Kota | Uji coba dan sosialisasi pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan propinsi | Jumlah Uji coba dan sosialisasi pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan propinsi kegiatan |
| | | | forum LLAJ | Jumlah Forum LLAJ yang diadakan (kali) | 2 | 15 | 02 | 2.06 | 03 | | Program Penyelenggaraan lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) | Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kab/Kota | Uji coba dan sosialisasi pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan propinsi | Jumlah Uji coba dan sosialisasi pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan propinsi kegiatan |
| | | | Pelatihan Polisi Cilik | Jumlah polisi cilik yang dilatih (orang) | 2 | 15 | 02 | 2.06 | 03 | | Program Penyelenggaraan lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) | Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kab/Kota | Uji coba dan sosialisasi pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan propinsi | Jumlah Uji coba dan sosialisasi pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan propinsi kegiatan |
| | | | Sosialisasi/penyuluhan ketertiban lalu lintas (orang) | Jumlah pelajar teladan yang memahami aturan lalu lintas untuk diseleksi (org) | 2 | 15 | 02 | 2.06 | 03 | | Program Penyelenggaraan lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) | Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kab/Kota | Uji coba dan sosialisasi pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan propinsi | Jumlah pelajar teladan yang memahami aturan lalu lintas untuk diseleksi (org) |

| PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA | | | | | PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 | | | | | | | | | |
|---|--------|---------------|--|--|---------------------------|----|----|------|----|---------------|---|--|---|---|
| NO | URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM/ KEGIATAN | Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output) | KODE | | | | | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | pengendalian operasional kendaraan di jalan raya | Jumlah kegiatan Pengamanan lalu lintas di jalan raya (Keg) | 2 | 15 | 02 | 2.06 | 04 | | Program Penyelenggaraan lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) | Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kab/Kota | Pengawasan dan Pengendalian Efektifitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Propinsi | Jumlah kegiatan Pengamanan lalu lintas di jalan raya (Keg) |
| | | | Program Peningkatan Pelayanan Angkutan | Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan angkutan umum (%) | 2 | 15 | 02 | 2.08 | | | Program Penyelenggaraan lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) | Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di jalan | | Terselenggaranya Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di jalan (bulan) |
| | | | Pemilihan/pemberian penghargaan sopir/ | Jumlah sopir/awak kendaraan angkutan Umum teladan (orang) | 2 | 15 | 02 | 2.08 | 04 | | Program Penyelenggaraan lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) | Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di jalan | Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kab/Kota | Jumlah sopir/awak kendaraan angkutan Umum teladan (orang) |
| | | | Program Peningkatan Pelayanan Angkutan | Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan angkutan umum (%) | 2 | 15 | 02 | 2'09 | | | Program Penyelenggaraan lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) | Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan / atau barang antar kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | | Terselenggaranya pemeriksaan kendaraan di terminal dan jalan raya (bulan) |

| PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA | | | | | PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 | | | | | | | | | |
|---|--------|---------------|--|--|---------------------------|----|----|------|----|---------------|---|--|---|--|
| NO | URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM/ KEGIATAN | Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output) | KODE | | | | | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | Pemeriksaan surat-surat kendaraan di terminal dan di jalann Kota sawahlunto (Unit) | Jumlah kendaraan bermotor yang diperiksa (unit) | 2 | 15 | 02 | 2'09 | 02 | | Program Penyelenggaraan lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) | Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan / atau barang antar kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | Pengendalian dan Pengawasan ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan / atau barang antar kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota | Jumlah kendaraan bermotor yang diperiksa (unit) |
| | | | Program Pengelolaan Perkeretaapian | | 2 | 15 | 05 | | | | Program Pengelolaan Perkeretaapian | | | Persentase Sarana prasarana perkeretaapian yang diaktifkan (%) |
| | | | | | 2 | 15 | 05 | 2.02 | | | Program Pengelolaan Perkeretaapian | Penerbitan Izin Usaha, Izin Pembangunan dan Izin Operasi Prasarana Perkeretaapian Umum yang jaringan jalurnya dalam 1 (satu) daerah Kab/Kota | | Persentase Sarana prasarana perkeretaapian yang diaktifkan (%) |

| PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA | | | | | PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 | | | | | | | | | |
|---|--------|---------------|---|--|---------------------------|----|----|------|----|---------------|------------------------------------|--|--|--|
| NO | URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM/ KEGIATAN | Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output) | KODE | | | | | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | Reaktivasi Jalur Kereta Api Jalur Sawahlunto - Batu Taba (Lanjutan Jalur Padang (Bandara- Pelabuhan) - Batu Taba) | Panjang jalur kereta api yang diaktifkan (km) | 2 | 15 | 05 | 2.02 | 02 | | Program Pengelolaan Perkeretaapian | Penerbitan Izin Usaha, Izin Pembangunan dan Izin Operasi Prasarana Perkeretaapian Umum yang jaringan jalurnya dalam 1 (satu) daerah Kab/Kota | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha, Izin Pembangunan dan Izin Operasi Prasarana Perkeretaapian Umum yang jaringan jalurnya dalam satu daerah Kab/Kota | Sarana prasarana perkeretaapian yang diaktifkan dan dipelihara (tahun) |
| | | | - Operasional Mak Itam | Jumlah Kereta Api Mak Itam yang dipelihara (unit) | | | | | | | | | | |
| | | | - Diorama Perkereta Apian | Jumlah diorama yang diadakan (paket) | | | | | | | | | | |

DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

| PERMENDAGRI 13/RPJM/RENSTRA/RKPD/RENJA | | | | | PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 | | | | | | | | | |
|--|--------|---------------|--|---|---------------------------|----|----|------|---------------|---------|--|-------------------|--|---|
| NO | URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM/KEGIATAN | Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output) | KODE | | | | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 1 | | | Program Pelayanan Administarsi Perkantoran | Tersedianya sarana Administrasi Perkantoran (Bulan) | X | XX | 01 | | | xxxx | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | | | |
| 1 | | | Peyediaan Jasa surat menyurat | Jasa Surat menyurat yang disediakan (bulan) | X | XX | 01 | 2.03 | 01 | xxxx | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Administrasi Umum | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jasa Surat Menyurat yang disediakan (bulan) |
| 2 | | | Penyedia jasa komunikasi sumber daya air dan listrik | Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan (Bulan) | X | XX | 01 | 2.03 | 02 | xxxx | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Administrasi Umum | Penyedia jasa komunikasi sumber daya air dan listrik | Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan (Bulan) |
| 3 | | | Penyediaan jasa kebersihan kantor | Jasa Kebersihan yang disediakan (bulan) | X | XX | 01 | 2.03 | 08 | xxxx | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Administrasi Umum | Penyediaan jasa kebersihan kantor | Jasa Kebersihan Kantor yang disediakan (Bulan) |
| 4 | | | Penyediaan alat tulis kantor | Alat Tulis Kantor yang disediakan (Bulan) | X | XX | 01 | 2.03 | 10 | xxxx | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Administrasi Umum | Penyediaan alat tulis kantor | Alat Tulis Kantor yang disediakan (Bulan) |
| 5 | | | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan (Bulan) | X | XX | 01 | 2.03 | 11 | xxxx | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Administrasi Umum | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan (Bulan) |
| 6 | | | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | Komponen Instalasi listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan (Bulan) | X | XX | 01 | 2.03 | 12 | xxxx | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Administrasi Umum | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | Komponen Instalasi listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan (Bulan) |
| 8 | | | Penyediaan makanan dan minuman | Makan dan Minum yang disediakan (bulan) | X | XX | 01 | 2.03 | 17 | xxxx | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Administrasi Umum | Penyediaan makanan dan minuman | Makan dan Minum yang disediakan (bulan) |

| PERMENDAGRI 13/RPJM/RENSTRA/RKPD/RENJA | | | | | PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 | | | | | | | | | |
|--|--------|---------------|--|---|---------------------------|----|----|------|----|---------------|--|-----------------------|--|---|
| NO | URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM/KEGIATAN | Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output) | KODE | | | | | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 9 | | | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar Daerah yang difasilitasi (bulan) | X | XX | 01 | 2.03 | 18 | xxxx | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Administrasi Umum | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar Daerah yang difasilitasi (bulan) |
| 10 | | | Penyedia jasa pelayanan pegawai Non PNS | Jumlah tenaga pegawai Non PNS yang difasilitasi (orang) | X | XX | 01 | 2.02 | 01 | xxxx | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Administrasi Keuangan | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah tenaga pegawai Non PNS yang difasilitasi (orang) |
| 11 | | | Penatausahaan Keuangan dan Barang | Penatausahaan Keuangan dan Barang yang dilaksanakan (bulan) | X | XX | 01 | 2.03 | 07 | xxxx | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Administrasi Umum | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | Penatausahaan Keuangan dan Barang yang dilaksanakan (bulan) |
| 12 | | | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Peningkatan sarana dan prasarana aparatur (bulan) | | | | | | xxxx | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | |
| | | | Pengadaan peralatan gedung kantor | Peralatan Gedung Kantor yang diadakan (jenis) | X | XX | 01 | 2.03 | 24 | xxxx | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Administrasi Umum | Pengadaan Peralatan Gedung Kantor | Peralatan Gedung Kantor yang diadakan (jenis) |
| | | | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | Tersedianya biaya pemeliharaan gedung kantor (bulan) | X | XX | 01 | 2.03 | 28 | xxxx | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Administrasi Umum | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | Tersedianya biaya pemeliharaan gedung kantor (bulan) |
| | | | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | Kendaraan Roda Empat dan Roda dua yang dipelihara (unit) | X | XX | 01 | 2.03 | 30 | xxxx | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Administrasi Umum | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas / Operasional | Kendaraan Roda Empat dan Roda dua yang dipelihara (unit) |
| | | | Pemeliharaan Rutin/berkala peralatan gedung kantor | Peralatan gedung kantor yang dipelihara (bulan) | X | XX | 01 | 2.03 | 34 | xxxx | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Administrasi Umum | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor | Peralatan gedung kantor yang dipelihara (bulan) |

| PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA | | | | | PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 | | | | | | | | | |
|---|--------|---------------|---|--|---------------------------|------|----|------|----|--|--|---|--|---|
| NO | URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM/KEGIATAN | Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output) | KODE | | | | | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur | Mobiler kantor yang dipelihara (bulan) | X | XX | 01 | 2.03 | 35 | xxxx | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Administrasi Umum | Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur | Mobiler kantor yang dipelihara (bulan) |
| | | | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Persentase aparatur yang meningkat SDMnya (%) | X | XX | 01 | 2.04 | | xxxx | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya | | |
| | | | Pendidikan dan pelatihan formal | Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal | X | XX | 01 | 2.04 | 09 | xxxx | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya | Pendidikan dan Pelatihan Formal | Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal |
| | | | Program Perencanaan Pembangunan Daerah | Persentase konsistensi program RPJMD kedalam RKPD (%) | X | XX | 01 | 2.01 | | xxxx | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | |
| | | | Forum OPD | Berita acara forum OPD (Berita acara) | X | XX | 01 | 2.01 | 04 | xxxx | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah | Berita acara forum OPD (Berita acara) |
| | | | Penyusunan RENSTRA OPD | Jumlah Dokumen Renstra (Dokumen) | X | XX | 01 | 2.01 | 01 | xxxx | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Renstra (Dokumen) |
| | | | Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif usaha kecil menengah | Persentase koperasi yang melaksanakan RAT tepat waktu (%) | 2 | #### | 08 | 2.01 | 01 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH | | | | |
| | | | | Persentase UMKM yang memiliki izin usaha (%) | | | | | | | | | | |

| PERMENDAGRI 13/RPJM/RENSTRA/RKPD/RENJA | | | | | PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 | | | | | | | | | |
|--|--------|---------------|--|--|---------------------------|----|----|------|---------------|--|---|--|---|---|
| NO | URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM/KEGIATAN | Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output) | KODE | | | | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| | | | Pelatihan kewirausahaan bagi UMKM | Jumlah UMKM yang bersertifikasi kewirausahaan (orang) | 2 | 17 | 08 | 2.01 | 01 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH | PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM | Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil | Fasilitasi Usaha mikro Menjadi Usaha kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi | Jumlah UMKM yang bersertifikasi kewirausahaan (orang) |
| | | | Monitoring dan evaluasi UMKM | Jumlah laporan monitoring dan evaluasi (laporan) | 2 | 17 | 07 | 2.01 | 04 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH | PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL DAN USAHA MIKRO (UMKM) | Pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan | Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro | Persentase UMKM yang difasilitasi (%) |
| | | | Pengembangan sistem informasi teknologi koperasi | Jumlah sistem informasi yang dikelola (Aplikasi) | 2 | 17 | 03 | 2.01 | 01 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH | PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI | Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota | Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah sistem informasi yang dikelola (Aplikasi) |

| PERMENDAGRI 13/RPJM/RENSTRA/RKPD/RENJA | | | | | PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 | | | | | | | | | |
|--|--------|---------------|--|--|---------------------------|----|----|------|---------------|--|--|--|---|--|
| NO | URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM/KEGIATAN | Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output) | KODE | | | | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| | | | Pelatihan Manajemen Koperasi bagi pengelola koperasi | jumlah pengelola koperasi yang bersertifikat (orang) | 2 | 74 | 05 | 2.01 | 01 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH | PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN | Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/ Kota | Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian Serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi | Jumlah pengelola koperasi yang bersertifikasi (orang) |
| | | | Program Peningkatan KualitasKelembagaan koperasi | Persentase Koperasi sehat (%) | | | | | | | | | | |
| | | | Penilaian kesehatan usaha simpan pinjam | Jumlah unit usaha simpan pinjam koperasi yang sehat (unit) | 2 | 17 | 04 | 2.01 | 01 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH | PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI | Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah unit usaha simpan pinjam koperasi yang sehat (unit) |
| | | | Monitoring dan evaluasi Koperasi | Jumlah laporan monitoring dan evaluasi (laporan) | 2 | 17 | 03 | 2.01 | 01 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH | PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI | Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota | Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah laporan monitoring dan evaluasi (laporan) |

| PERMENDAGRI 13/RPJM/RENSTRA/RKPD/RENJA | | | | | PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 | | | | | | | | | |
|--|--------|---------------|--|--|---------------------------|----|----|------|----|--|---|--|---|---|
| NO | URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM/KEGIATAN | Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output) | KODE | | | | | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | Penilaian Koperasi Berprestasi | Jumlah Koperasi Berprestasi tingkat Propinsi (koperasi) | 2 | 17 | 04 | 2.01 | 02 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH | PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI | Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Koperasi Berprestasi tingkat Propinsi (koperasi) |
| | | | Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi UMKM (PD) | Jumlah UMKM yang meningkat skala usahanya (unit) | | | | | | | | | | |
| | | | | Jumlah Koperasi yang meningkat skala usahanya (unit) | | | | | | | | | | |
| | | | Fasilitasi Perluasan Akses Permodalan bagi UMKM | Jumlah UMKM yang difasilitasi (UMKM) | 2 | 17 | 07 | 2.01 | 05 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH | PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL DAN USAHA MIKRO (UMKM) | Pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan melalui pendataan, Kemitraan, Kemudahan, Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Pemangku Kepentingan | Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam pemberdayaan Usaha Mikro | Jumlah UMKM yang difasilitasi (UMKM) |
| | | | Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah (PD) | Jumlah IKM yang meningkat klasifikasinya ke kecil (unit) | | | | | | | | | | |

| PERMENDAGRI 13/RPJM/RENSTRA/RKPD/RENJA | | | | | PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 | | | | | | | | | |
|--|--------|---------------|--|--|---------------------------|----|----|------|----|--|--|---|--|---|
| NO | URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM/KEGIATAN | Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output) | KODE | | | | | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | | Jumlah IKM yang meningkat klasifikasinya dari kecil ke menengah (unit) | | | | | | | | | | |
| | | | Pengembangan pencelupan menggunakan pewarna alami sebagai bahan baku tekstil | Jumlah IKM tekstil yang menggunakan pewarna alami (IKM) | 3 | 31 | 02 | 2.01 | 03 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN | PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI | Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Sumber Daya Industri | Jumlah IKM tekstil yang menggunakan pewarna alami (IKM) |
| | | | Fasilitasi Dekranasda Kota Sawahlunto | Dekranasda yang dikelola (bulan) | 3 | 31 | 02 | 2.01 | 05 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN | PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI | Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat | Dekranasda yang dikelola (bulan) |
| | | | Pengembangan kualitas dan teknik Menghani | Jumlah orang yang terampil menghani (orang) | 3 | 31 | 02 | 2.01 | 03 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN | PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI | Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Sumber Daya Industri | Jumlah orang yang terampil menghani (orang) |
| | | | Penyusunan Dokumen RPIK Lanjutan | Jumlah Dokumen Yang dihasilkan (dokumen) | 3 | 31 | 02 | 2.01 | 01 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN | PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI | Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota | Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi | Jumlah Dokumen Yang dihasilkan (dokumen) |

| PERMENDAGRI 13/RPJM/RENSTRA/RKPD/RENJA | | | | | PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 | | | | | | | | | |
|--|--------|---------------|--|--|---------------------------|----|----|------|----|--|---|---|---|--|
| NO | URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM/KEGIATAN | Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output) | KODE | | | | | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | Rekomendasi dan Pengawasan Penerbitan IUI | Jumlah rekomendasi yang dikeluarkan (rekomendasi) | 3 | 31 | 03 | 2.01 | 01 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN | PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA | Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan IUI Menengah | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan (IUI) Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Memenuhi Ketentuan Perizinan | Jumlah laporan koordinasi dan sinkronisasi pengawasan (laporan) |
| | | | Pengawasan dan evaluasi usaha industri Kota Sawahlunto | Jumlah IKM yang diawasi dan dievaluasi (IKM) | 3 | 31 | 03 | 2.01 | 03 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN | PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA | Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan IUI Menengah | Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Pengamanan dan Penyelamatan Industri | Jumlah IKM yang diawasi dan dievaluasi (IKM) |
| | | | Penyajian Data base Industri Kota Sawahlunto | Data base Industri Kota Sawahlunto (dokumen) | 3 | 31 | 04 | 2.01 | 02 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN | PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL | Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota | Diseminasi dan Publikasi Data Informasi Industri Kabupaten/Kota | Jumlah aplikasi data informasi industri yang dikelola (aplikasi) |
| | | | Program Pengembangan Sentra-sentra Industri Potensial (PD) | Jumlah sentra industri yang berkembang dengan jumlah pengrajin minimal 5 pengrajin (sentra industri) | | | | | | | | | | |

| PERMENDAGRI 13/RPJM/RENSTRA/RKPD/RENJA | | | | | PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 | | | | | | | | | | |
|--|--------|---------------|--|--|---------------------------|----|----|------|----|--|---|---|---|--|--|
| NO | URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM/KEGIATAN | Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output) | KODE | | | | | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| | | | Pengembangan kawasan sentra industri | Jumlah sentra yang dikembangkan (Sentra) | 3 | 31 | 02 | 2.01 | 04 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN | PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI | Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri | Jumlah sentra industri yang berkembang dengan jumlah pengrajin sejenis 5 pengrajin (sentra industri) | |
| | | | Pengembangan outlet dalam sentra | Jumlah Outlet yang dikembangkan (Outlet) | 3 | 31 | 02 | 2.01 | 04 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN | PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI | Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri | Jumlah Outlet yang dikembangkan (Outlet) | |
| | | | Program Penataan Struktur Industri | Jumlah Produk hasil industri yang berkualitas (IKM) | | | | | | | | | | | |
| | | | Fasilitasi bahan baku industri | Jumlah IKM yang terfasilitasi (IKM) | 3 | 31 | 02 | 2.01 | 04 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN | PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI | Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri | Jumlah IKM yang terfasilitasi (IKM) | |
| | | | Program Peningkatan Kapasitas IPTEK Sistem Produksi | Jumlah IKM yang sudah menerapkan IPTEK (IKM) | | | | | | | | | | | |
| | | | Fasilitasi Halal, AKG, Indikasi Geografis (IG), Hak Cipta dan Merk Produk Industri Kota Sawahlunto | Jumlah produk IKM yang bersertifikasi Halal (produk) | 3 | 31 | 03 | 2.01 | 03 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN | PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA | Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan IUI Menengah | Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Pengamanan dan Penyelamatan Industri | Jumlah produk IKM yang bersertifikasi Halal (produk) | |

| PERMENDAGRI 13/RPJM/RENSTRA/RKPD/RENJA | | | | | PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 | | | | | | | | | |
|--|--------|---------------|---|--|---------------------------|----|----|------|----|--|--|---|---|--|
| NO | URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM/KEGIATAN | Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output) | KODE | | | | | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | | Jumlah produk IKM yang bersertifikasi AKG (produk) | | | | | | | | | | Jumlah produk IKM yang bersertifikasi AKG (produk) |
| | | | | Jumlah produk IKM yang mempunyai hak cipta (HKI), Merk dan IG (produk) | | | | | | | | | | Jumlah produk IKM yang mempunyai hak cipta (HKI), Merk dan IG (produk) |
| | | | Peningkatan kemasan produk hasil hasil industri Kota Sawahlunto | Jumlah produk IKM yang mempunyai kemasan sesuai standar (produk) | 3 | 31 | 02 | 2.01 | 04 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN | PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI | Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri | Jumlah produk IKM yang mempunyai kemasan sesuai standar (produk) |
| | | | Pengembangan dan pelayanan teknologi industri | Jumlah teknologi industri yang dikembangkan (unit) | 3 | 31 | 02 | 2.01 | 04 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN | PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI | Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri | Jumlah teknologi industri yang dikembangkan (unit) |
| | | | Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan | Jumlah pasar tradisional tertib ukur (pasar) | | | | | | | | | | |

| PERMENDAGRI 13/RPJM/RENSTRA/RKPD/RENJA | | | | | PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 | | | | | | | | | |
|--|--------|---------------|---|--|---------------------------|----|----|------|----|--|---|--|---|---|
| NO | URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM/KEGIATAN | Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output) | KODE | | | | | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | Monitoring dan Evaluasi Sembako | Laporan monitoring sembako (Laporan) | 3 | 30 | 04 | 2.02 | 01 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN | PROGRAM STABILITASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING | Pengendalian Harga, dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat pasar Kabupaten/Kota | Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota | Laporan monitoring sembako (Laporan) |
| | | | Operasional unit layanan kemetrolagian (untuk operasional di gabung di sekretariat) | persentase timbangan yang ditera (%) | 3 | 30 | 06 | 2.01 | 01 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN | PROGRAM STANDARISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN | Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan | Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang | laporan pelaksanaan tera dan tera ulang (laporan) |
| | | | Monitoring dan Evaluasi pendistribusian Gas Bersubsidi | Laporan Monitoring dan Evaluasi (Laporan) | 3 | 30 | 04 | 2.02 | 01 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN | PROGRAM STABILITASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING | Pengendalian Harga, dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat pasar Kabupaten/Kota | Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota | Laporan Monitoring dan Evaluasi pendistribusian gas bersubsidi(Laporan) |
| | | | Monitoring dan Evaluasi makanan dalam kemasan | Laporan Monitoring dan Evaluasi (Laporan) | 3 | 30 | 04 | 2.02 | 01 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN | PROGRAM STABILITASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING | Pengendalian Harga, dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat pasar Kabupaten/Kota | Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota | Laporan Monitoring dan Evaluasi makanan dalam kemasan (Laporan) |

| PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA | | | | | PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 | | | | | | | | | |
|---|--------|---------------|--|---|---------------------------|----|----|------|---------------|--|---|---|---|--|
| NO | URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM/KEGIATAN | Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output) | KODE | | | | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| | | | Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri | Jumlah omset di pasar - pasar tradisional sawahlunto (juta) | | | | | | | | | | |
| | | | Pendataan omset pedagang | Jumlah laporan pendataan omset (dokumen) | 3 | 30 | 04 | 2.02 | 01 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN | PROGRAM STABILITASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING | Pengendalian Harga, dan stok barang Kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat pasar Kabupaten/Kota | Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota | Jumlah laporan pendataan omset (dokumen) |
| | | | Pameran dan Promosi produk lokal | Jumlah event pameran/Promosi yang dilaksanakan (even) | 3 | 30 | 05 | 2.01 | 03 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN | PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR | Penyelenggaraan Promosi dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat Pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Pameran Dagang Lokal | Jumlah event pameran/Promosi yang dilaksanakan (even) |
| | | | Pameran Hari Jadi Kota | Jumlah UMKM yang mengikuti pameran (UMKM) | 3 | 30 | 07 | 2.01 | 01 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN | PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI | Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri | Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri Di Tingkat Kabupaten/Kota | Jumlah UMKM yang mengikuti pameran hari jadi kota (UMKM) |
| | | | Pemeliharaan Pasar | Jumlah Pasar yang terpelihara (pasar) | 3 | 30 | 03 | 2.01 | 01 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN | PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN | Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan | Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan | Jumlah Pasar yang terpelihara (pasar) |

| PERMENDAGRI 13/RPJM/RENSTRA/RKPD/RENJA | | | | | PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 | | | | | | | | | |
|--|--------|---------------|--|--|---------------------------|----|----|------|----|--|---|---|--|---|
| NO | URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM/KEGIATAN | Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output) | KODE | | | | | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | Lanjutan Pembangunan Canopy Pasar Sawahlunto | Jumlah kawasan yang dibangun (unit) | 3 | 30 | 03 | 2.01 | 01 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN | PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN | Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan | Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan | Jumlah kawasan yang dibangun (unit) |
| | | | Grand desain pasar grosir silungkang | Jumlah dokumen grand desain (dokumen) | 3 | 30 | 03 | 2.01 | 01 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN | PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN | Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan | Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan | Jumlah dokumen grand desain (dokumen) |
| | | | Program Pembinaan Pedagang kaki Lima dan Asongan | Jumlah pedagang Kaki Lima dan Asongan yang Meningkatkan Skala Usahanya dari mikro menjadi kecil (Pedagang) | | | | | | | | | | |
| | | | Kegiatan pembinaan organisasi dan manajemen pedagang kaki lima dan asongan | Jumlah pedagang yang Dibina (Pedagang) | 3 | 30 | 03 | 2.02 | 01 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN | PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN | Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat Di Wilayah Kerjanya | Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan | Jumlah pedagang yang Dibina (Pedagang) |

PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA

| PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA | | | | | PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 | | | | | | | | | |
|---|--------|---------------|--|--|---------------------------|---|----|------|---------------|---------|--|-----------------------|---|--|
| NO | URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM/KEGIATAN | Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output) | KODE | | | | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| | | | PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN | TERSEDINYA SARANA PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN (BULAN) | 2 | X | 01 | | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | | | URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH BERJALAN LANCAR DAN TERTIB (BULAN) |
| | | | | | 2 | x | 01 | 2.02 | 01 | | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Administrasi Keuangan | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Gaji dan tunjangan PNS Lainnya (Bulan) |
| | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jasa surat menyurat yang disediakan (bulan) | 2 | x | 01 | 2.03 | 01 | | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Administrasi Umum | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jasa surat menyurat yang disediakan (bulan) |
| | | | | | | | | | | | | | | Jasa surat menyurat UPTD BLK yang disediakan (bulan) |
| | | | | | | | | | | | | | | Honorarium Non PNS untuk Staf Adm Umum pada Subag Keu Proglap & Subag Adm Umum dan Kepeg serta Caraka sebanyak 4 Org (Bulan) |

| PERMENDAGRI 13/RPJM/RENSTRA/RKPD/RENJA | | | | | PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 | | | | | | | | | |
|--|--------|---------------|---|--|---------------------------|---|----|---------------|---------|----------|--|---|---|--|
| NO | URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM/KEGIATAN | Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output) | KODE | | | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | |
| | | | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | Jumlah komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan (bulan) | 2 | x | 01 | 2.03 | 02 | | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Administrasi Umum | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan (bulan) |
| | | | | | | | | | | | | | Jumlah komunikasi, sumber daya air dan listrik UPTD BLK yang disediakan (bulan) | |
| | | | Penyediaan jasa kebersihan kantor | Jasa kebersihan yang tersedia (bulan) | 2 | x | 01 | 2.03 | 08 | | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Administrasi Umum | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | Jasa kebersihan yang tersedia (bulan) |
| | | | | | | | | | | | | | Jasa kebersihan UPTD BLK yang tersedia (bulan) | |
| | | | | | | | | | | | | | Honorarium Non PNS untuk CS Kantor sebanyak 1 Org (Bulan) | |
| | | | Penyediaan alat tulis kantor | Alat tulis kantor yang disediakan (bulan) | 2 | x | 01 | 2.03 | 10 | | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Administrasi Umum | Penyediaan Alat Tulis Kantor | Alat tulis kantor yang disediakan (bulan) |
| | | | | | | | | | | | | | Alat tulis kantor UPTD BLK yang disediakan (bulan) | |
| | | | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Barang cetakan dan penggandaan yang disediakan (bulan) | 2 | x | 01 | 2.03 | 11 | | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Administrasi Umum | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Barang cetakan dan penggandaan yang disediakan (bulan) |
| | | | | | | | | | | | | | Barang cetakan dan penggandaan UPTD BLK yang disediakan (bulan) | |

| PERMENDAGRI 13/RPJM/RENSTRA/RKPD/RENJA | | | | | PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 | | | | | | | | | |
|--|--------|---------------|--|--|---------------------------|---|----|------|----|---------------|--|-------------------|--|---|
| NO | URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM/KEGIATAN | Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output) | KODE | | | | | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan (bulan) | 2 | x | 01 | 2.03 | 12 | | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Administrasi Umum | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan (bulan) |
| | | | | | | | | | | | | | | Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor UPTD BLK yang disediakan (bulan) |
| | | | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | Bahan bacaan dan perundang undangan yang disediakan (bulan) | 2 | x | 01 | 2.03 | 15 | | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Administrasi Umum | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | Bahan bacaan dan perundang undangan yang disediakan (bulan) |
| | | | Penyediaan makanan dan minuman | Makan dan minum yang disediakan (bulan) | 2 | x | 01 | 2.03 | 17 | | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Administrasi Umum | Penyediaan Makanan dan Minuman | Makan dan minum yang disediakan (bulan) |
| | | | | | | | | | | | | | | Makan dan minum UPTD BLK yang disediakan (bulan) |
| | | | Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang difasilitasi (bulan) | 2 | x | 01 | 2.03 | 18 | | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Administrasi Umum | Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang difasilitasi (bulan) |
| | | | | | | | | | | | | | | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah UPTD BLK yang difasilitasi (bulan) |

| PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA | | | | | PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 | | | | | | | | | |
|---|--------|---------------|---|---|---------------------------|---|----|---------------|---------|----------|--|---|---------------------------------------|---|
| NO | URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM/KEGIATAN | Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output) | KODE | | | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | |
| | | | Penyediaan Jasa Pelayanan Pegawai Non PNS (diakomodir/disebar di beberapa kegiatan) | Jumlah tenaga pegawai non PNS yang difasilitasi (orang) | 2 | x | 01 | 2.02 | 01 | | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Administrasi Keuangan | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah tenaga pegawai non PNS yang difasilitasi (orang) |
| | | | Penatausahaan Keuangan dan Barang | Penatausahaan Keuangan dan Barang yang dilaksanakan (bulan) | 2 | x | 01 | 2.03 | 07 | | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Administrasi Umum | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | Penatausahaan Keuangan dan Barang yang dilaksanakan (bulan) |
| | | | | | | | | | | | | | | Honorarium Non PNS untuk Staf Adm Umum, CS dan Satpam UPTD BLK sebanyak 6 Org (Bulan) |
| | | | Penyediaan Dokumentasi dan Dekorasi (tidak ada dipermendagri Nomor 90 dan anggarannya ditumpangkan pada kegiatan pengadaan peralatan gedung kantor) | Dokumentasi dan dekorasi yang disediakan (bulan) | | | | | | | | | | |
| | | | PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR | PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR (BULAN) | 2 | X | 01 | | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | | | |
| | | | Pengadaan peralatan gedung kantor | Peralatan gedung kantor yang disediakan (Jenis) | 2 | x | 01 | 2.03 | 24 | | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Administrasi Umum | Pengadaan Peralatan Gedung Kantor | Peralatan gedung kantor yang disediakan (Jenis) |
| | | | | | | | | | | | | | | Peralatan gedung kantor UPTD BLK yang disediakan (Jenis) |

| PERMENDAGRI 13/RP/JMD/RENSTRA/RKPD/RENJA | | | | | PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 | | | | | | | | | |
|--|--------|---------------|--|---|---------------------------|---|----|------|---------------|---------|--|-------------------|--|---|
| NO | URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM/KEGIATAN | Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output) | KODE | | | | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| | | | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung kantor | Gedung kantor yang dipelihara (Bulan) | 2 | x | 01 | 2.03 | 28 | | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Administrasi Umum | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | Gedung kantor yang dipelihara (Bulan) |
| | | | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas /Operasional | Kendaraan roda 4 dan roda 2 yang dipelihara (Bulan) | 2 | x | 01 | 2.03 | 30 | | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Administrasi Umum | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | Kendaraan roda 4 dan roda 2 yang dipelihara (Bulan) |
| | | | | | | | | | | | | | | BBM Kendaraan Dinas/Operasional UPTD BLK (Bulan) |
| | | | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung kantor | Peralatan gedung kantor yang dipelihara (Bulan) | 2 | x | 01 | 2.03 | 34 | | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Administrasi Umum | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor | Peralatan gedung kantor yang dipelihara (Bulan) |
| | | | Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional | Jumlah kendaraan dinas/operasional yang diadakan (unit) - Roda empat = 1 unit - Roda dua = 3 unit | 2 | x | 01 | 2.03 | 20 | | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Administrasi Umum | Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional | Jumlah kendaraan dinas/operasional roda empat dan roda dua yang diadakan (unit) |
| | | | Pengadaan Mebeleur | Jumlah mobiler yang diadakan (paket) | 2 | x | 01 | 2.03 | 25 | | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Administrasi Umum | Pengadaan Mebeleur | Jumlah mobiler yang diadakan (paket) |
| | | | PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR | PERSENTASE APARATUR YANG MENINGKAT SDM NYA (%) | 2 | X | 01 | | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | | | |

| PERMENDAGRI 13/RP/JMD/RENSTRA/RKPD/RENJA | | | | | PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 | | | | | | | | | |
|--|--------|---------------|--|---|---------------------------|----|----|------|---------------|---|--|---|--|---|
| NO | URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM/KEGIATAN | Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output) | KODE | | | | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| | | | Pendidikan dan Pelatihan Formal | Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal (Orang) | 2 | X | 01 | 2.04 | 09 | | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Pendidikan dan Pelatihan Formal | Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal (Orang) |
| | | | PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN PRODUKTIFITAS TENAGA KERJA | PERSENTASE ANGKATAN KERJA YANG BERKUALITAS (%) | 2 | 07 | 03 | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA | PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA | | | PERSENTASE ANGKATAN KERJA YANG BERKUALITAS (%) |
| | | | Operasional UPTD BLK (untuk belanja penunjang diakomodir oleh Sekretariat) | Terselenggaranya operasional UPTD BLK (bulan) | 2 | 07 | 03 | 2.01 | 01 | Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja | Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja | Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi | Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi | Terselenggaranya operasional UPTD BLK (bulan) |
| | | | Pelatihan Otomotif | Jumlah peserta pelatihan otomotif yang bersertifikat (Orang) | 2 | 07 | 03 | 2.01 | 01 | Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja | Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja | Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi | Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi | Jumlah peserta pelatihan otomotif yang bersertifikat (Orang) |
| | | | Pelatihan Menjahit | Jumlah peserta pelatihan menjahit yang bersertifikat (Orang) | 2 | 07 | 03 | 2.01 | 01 | Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja | Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja | Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi | Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi | Jumlah peserta pelatihan menjahit yang bersertifikat (Orang) |

| PERMENDAGRI 13/RPJM/RENSTRA/RKPD/RENJA | | | | | PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 | | | | | | | | | |
|--|--------|---------------|--|--|---------------------------|----|----|------|---------------|---|--|---|--|--|
| NO | URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM/KEGIATAN | Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output) | KODE | | | | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| | | | Pelatihan Tata Boga | Jumlah peserta pelatihan tata boga yang bersertifikat (Orang) | 2 | 07 | 03 | 2.01 | 01 | Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja | Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja | Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi | Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi | Jumlah peserta pelatihan tata boga yang bersertifikat (Orang) |
| | | | Pelatihan Teknisi AC Split | Jumlah peserta pelatihan teknisi AC Split yang bersertifikat (Orang) | 2 | 07 | 03 | 2.01 | 01 | Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja | Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja | Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi | Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi | Jumlah peserta pelatihan teknisi AC Split yang bersertifikat (Orang) |
| | | | Pelatihan Peningkatan Motivasi Achievement Motivation Training (AMT) (Disarankan untuk pindah ke Dinas Koperindag) | Jumlah peserta pelatihan yang bersertifikat (Orang) | | | | | | | | | | |
| | | | Pelatihan Auto CAD | Jumlah peserta pelatihan auto CAD yang bersertifikat (Orang) | 2 | 07 | 03 | 2.01 | 01 | Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja | Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja | Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi | Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi | Jumlah peserta pelatihan auto CAD yang bersertifikat (Orang) |
| | | | Pembangunan Balai Latihan Kerja (Disarankan untuk dilaksanakan oleh DPUPR) | Jumlah Balai Latihan Kerja yang dibangun (Unit) | | | | | | | | | | |

| PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA | | | | | PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 | | | | | | | | | |
|---|--------|---------------|---|--|---------------------------|----|----|------|---------------|---|--|---|--|---|
| NO | URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM/KEGIATAN | Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output) | KODE | | | | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| | | | Peningkatan profesionalisme tenaga kepalatihan dan instruktur BLK | Jumlah instruktur BLK yang bersertifikasi (orang) | 2 | 07 | 03 | 2.01 | 02 | Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja | Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja | Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi | Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja | Jumlah Instruktur BLK yang bersertifikasi (Orang) |
| | | | Rehabilitasi sarana dan prasarana BLK (tidak diakomodir dalam Permendagri 90 dan anggarannya ditumpangkan pada kegiatan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor) | Jumlah sarana dan prasarana BLK yang direhab | | | | | | | | | | |
| | | | Penyusunan Data Base Tenaga Kerja Daerah | Dokumen Data Base Tenaga Kerja Daerah (Dokumen) | 2 | 07 | 02 | 2.01 | 02 | Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja | Program Perencanaan Tenaga Kerja | Penyusunan Rencana Kerja (RTK) | Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro | Dokumen Data Base Tenaga Kerja Daerah (Dokumen) |
| | | | PROGRAM PENINGKATAN KESEMPATAN KERJA | TINGKAT PARTISIPASI ANGKATAN KERJA (%) | 2 | 07 | 04 | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA | PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA | | | TINGKAT PARTISIPASI ANGKATAN KERJA (%) |
| | | | Pelayanan Informasi Pasar Kerja | BKOL Yang terkelola (Unit) | 2 | 07 | 04 | 2.01 | 02 | Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja | Program Penempatan Tenaga Kerja | Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota | Pelayanan antar Kerja | Terfasilitasinya pelayanan antar kerja (bulan) |
| | | | | | 2 | 07 | 04 | 2.03 | 02 | Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja | Program Penempatan Tenaga Kerja | Pengelolaan Informasi Pasar Kerja | Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online | BKOL Yang terkelola (Unit) |

| PERMENDAGRI 13/RPJM/RENSTRA/RKPD/RENJA | | | | | PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 | | | | | | | | | |
|--|--------|---------------|--|---|---------------------------|----|----|------|----|---|---------------------------------|---|--|--|
| NO | URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM/KEGIATAN | Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output) | KODE | | | | | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | | | | | | | | | | | | Honorarium Non PNS untuk Staf Petugas BKOL & Adm Umum Bidang PM Naker sebanyak 2 Orang (Bulan) |
| | | | | | 2 | 07 | 04 | 2.03 | 03 | Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja | Program Penempatan Tenaga Kerja | Pengelolaan Informasi Pasar Kerja | Job Fair/Bursa Kerja | Jumlah lowongan kerja yang tersedia (lowongan kerja) |
| | | | Sosialisasi dan persiapan Penempatan Tenaga Kerja ke Luar Negeri | Jumlah peserta sosialisasi penempatan tenaga kerja ke luar negeri (Orang) | 2 | 07 | 04 | 2.04 | 01 | Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja | Program Penempatan Tenaga Kerja | Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota | Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI) | Jumlah peserta sosialisasi penempatan tenaga kerja ke luar negeri (Orang) |
| | | | | Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan di luar negeri (orang) | | | | | | | | | | Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan di luar negeri (orang) |
| | | | Penyuluhan Bimbingan Jabatan bagi Siswa SLTA/SMK | Jumlah siswa peserta bimbingan jabatan (Orang) | 2 | 07 | 04 | 2.01 | 03 | Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja | Program Penempatan Tenaga Kerja | Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota | Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja | Jumlah siswa peserta bimbingan jabatan (Orang) |
| | | | PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENGEMBANGAN LEMBAGA KETENAGAKERJAAN | JUMLAH PERUSAHAAN YANG MEMILIKI LEMBAGA KERJASAMA BIPARTIT (PERUSAHAAN) | 2 | 07 | 05 | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA | PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL | | | JUMLAH PERUSAHAAN YANG MEMILIKI BIPARTIT (PERUSAHAAN) |

| PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA | | | | | PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 | | | | | | | | | |
|---|--------|---------------|--|--|---------------------------|----|----|------|----|---|-----------------------------|--|--|--|
| NO | URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM/KEGIATAN | Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output) | KODE | | | | | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | Pembinaan Hubungan Syarat Kerja dan Pengupahan (Sosialisasi dan Koesioner) | Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi pembuatan peraturan perusahaan (orang) | 2 | 07 | 05 | 2.01 | 01 | Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja | Program Hubungan Industrial | Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan | Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi pembuatan peraturan perusahaan (orang) |
| | | | | | 2 | 07 | 05 | 2.01 | 02 | Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja | Program Hubungan Industrial | Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Pendaftaran Perjanjian Kerjasama bagi Perusahaan | Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi pembuatan peraturan perusahaan (orang) |
| | | | | | 2 | 07 | 05 | 2.01 | 03 | Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja | Program Hubungan Industrial | Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja | Terlaksananya Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (bulan) |

| PERMENDAGRI 13/RP/JMD/RENSTRA/RKPD/RENJA | | | | | PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 | | | | | | | | | |
|--|--------|---------------|--|---|---------------------------|----|----|------|----|---|-----------------------------|--|--|--|
| NO | URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM/KEGIATAN | Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output) | KODE | | | | | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan ketenagakerjaan | Jumlah Peserta Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan ketenagakerjaan (Orang) | 2 | 07 | 05 | 2.01 | 03 | Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja | Program Hubungan Industrial | Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja | Jumlah Peserta Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan ketenagakerjaan(Orang) |
| | | | Monitoring Kelayakan Peralatan Operasional Perusahaan | Jumlah laporan monitoring kelayakan peralatan operasional perusahaan (laporan) | 5 | 07 | 05 | 2.02 | 01 | Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja | Program Hubungan Industrial | Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota | Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah laporan monitoring kelayakan peralatan operasional perusahaan (laporan) |
| | | | Gema Daya K3 (Tidak terakomodir di dalam Permendagri Nomor 90 tahun 2019 dan anggarannya ditumpangkan pada kegiatan penyediaan makanan dan minuman di Sekretariat) | Pelaksanaan Bulan K3 (Kegiatan) | | | | | | | | | | |

| PERMENDAGRI 13/RP/JMD/RENSTRA/RKPD/RENJA | | | | | PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 | | | | | | | | | |
|--|--------|---------------|--|---|---------------------------|----|----|------|---------------|--|--|---|--|---|
| NO | URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM/KEGIATAN | Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output) | KODE | | | | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| | | | Penyelesaian Penanganan Pengaduan Ketenagakerjaan | Penyelesaian Permasalahan Tentang Ketenagakerjaan (Kasus) | 5 | 07 | 05 | 2.02 | 02 | Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja | Program Hubungan Industrial | Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota | Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Penyelesaian Permasalahan Tentang Ketenagakerjaan (Kasus) |
| | | | PROGRAM PENINGKATAN IKLIM INVESTASI DAN REALISASI INVESTASI | Nilai investasi Lokal (Milyar Rupiah) | 2 | 18 | 02 | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL | PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL | | | PERSENTASE PENINGKATAN NILAI INVESTASI (%) |
| | | | | Nilai investasi Nasional (Milyar Rupiah) | | | | | | | | | | |
| | | | | Nilai investasi Asing (Milyar Rupiah) | | | | | | | | | | |
| | | | Penyusunan Studi Kelayakan Potensi Investasi | Dokumen Feasibility Study (Dokumen) | 2 | 18 | 02 | 2.02 | 02 | Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal | Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal | Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota | Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota | Dokumen Feasibility Study (Dokumen) |
| | | | Penyusunan Sistem Informasi Penanaman Modal (tidak terakomodir di dalam Permendagri 90 dan anggarannya ditumpangkan pada kegiatan promosi investasi) | Jumlah sistem informasi penanaman modal yang disusun (unit) | | | | | | | | | | |
| | | | PROGRAM PEMBINAAN DAN PELAYANAN PERIZINAN | Jumlah Perizinan yang diterbitkan (Dokumen) | 2 | 18 | 04 | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL | PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL | | | INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN DPMPPTSPNAKER |

| PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA | | | | | PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 | | | | | | | | | |
|---|--------|---------------|---|---|---------------------------|----|----|------|----|--|-----------------------------------|---|--|---|
| NO | URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM/KEGIATAN | Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output) | KODE | | | | | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | | Jumlah Non Perizinan yang diterbitkan (Dokumen) | | | | | | | | | | |
| | | | Penyelesaian Penanganan Pengaduan Masyarakat Bidang Perizinan dan Non Perizinan | Penyelesaian Permasalahan Tentang Perizinan dan Non Perizinan (Kasus) | 2 | 18 | 04 | 2.01 | 03 | Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal | Program Pelayanan Penanaman Modal | Pelayanan Perizinan dan Non perizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota | Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan | Penyelesaian Permasalahan Tentang Perizinan dan Non Perizinan (Kasus) |
| | | | Monitoring dan Evaluasi serta Penertiban Perizinan | Laporan Monitoring dan Evaluasi Penertiban Perizinan (Laporan) | 2 | 18 | 04 | 2.01 | 02 | Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal | Program Pelayanan Penanaman Modal | Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota | Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal | Laporan Monitoring dan Evaluasi Penertiban Perizinan (Laporan) |

| PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA | | | | | PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 | | | | | | | | | |
|---|--------|---------------|--|--|---------------------------|----|----|------|----|--|-----------------------------------|--|---|---|
| NO | URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM/KEGIATAN | Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output) | KODE | | | | | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | Pelayanan Perizinan | Jumlah perizinan yang diterbitkan (Izin) | 2 | 18 | 04 | 2.01 | 01 | Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal | Program Pelayanan Penanaman Modal | Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota | Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik | Jumlah perizinan yang diterbitkan (Dokumen) |
| | | | | Jumlah non perizinan yang diterbitkan (Izin) | | | | | | | | | | Jumlah non perizinan yang diterbitkan (Dokumen) |
| | | | | | | | | | | | | | | Honorarium Non PNS untuk Petugas Front Office, Back Office & Programmer Bidang Perizinan sebanyak 8 Orang (Bulan) |
| | | | Pengelolaan sistem pelayanan perizinan dan non perizinan | Jumlah izin yang dikelola melalui sistem pelayanan perizinan dan non perizinan | 2 | 18 | 04 | 2.01 | 01 | Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal | Program Pelayanan Penanaman Modal | Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota | Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik | Jumlah izin yang dikelola melalui sistem pelayanan perizinan dan non perizinan |

| PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA | | | | | PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 | | | | | | | | | |
|---|--------|---------------|--|--|---------------------------|----|----|------|---------------|--|-----------------------------------|--|---|--|
| NO | URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM/KEGIATAN | Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output) | KODE | | | | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| | | | Sosialisasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan | Jumlah Peserta Sosialisasi Perizinan dan Non Perizinan (Orang) | 2 | 18 | 04 | 2.01 | 01 | Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal | Program Pelayanan Penanaman Modal | Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota | Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik | Jumlah Peserta Sosialisasi Perizinan dan Non Perizinan (Orang) |
| | | | Survey indeks kepuasan masyarakat (Disarankan dilaksanakan oleh bagian organisasi Setdako) | Jumlah dokumen indeks kepuasan masyarakat | | | | | | | | | | |
| | | | Fasilitasi usulan ISO | Sertifikat ISO 9001:2015 | 2 | 18 | 04 | 2.01 | 04 | Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal | Program Pelayanan Penanaman Modal | Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota | Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah | sertifikat ISO 9001:2015 |

| PERMENDAGRI 13/RP/JMD/RENSTRA/RKPD/RENJA | | | | | PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 | | | | | | | | | |
|--|--------|---------------|--|--|---------------------------|----|----|------|---------------|--|---------------------------------|--|---|--|
| NO | URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM/KEGIATAN | Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output) | KODE | | | | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| | | | Mall Pelayanan Publik (MPP) (Tidak ada di Permendagri No 90 dan anggarannya ditumpangkan pada kegiatan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor) | Tersedianya Mall Pelayanan Publik (Unit) | | | | | | | | | | |
| | | | PROGRAM PENINGKATAN PROMOSI DAN KERJASAMA INVESTASI | JUMLAH INVESTOR YANG BERINVESTASI (PERUSAHAAN) | 2 | 18 | 03 | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL | PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL | | NILAI INVESTASI LOKAL (MILYAR RUPIAH) | |
| | | | | | | | | | | | | | NILAI INVESTASI NASIONAL (MILYAR RUPIAH) | |
| | | | | | | | | | | | | | NILAI INVESTASI ASING (MILYAR RUPIAH) | |
| | | | Promosi Investasi | Jumlah promosi investasi yang diikuti (kali) | 2 | 18 | 03 | 2.01 | 02 | Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal | Program Promosi Penanaman Modal | Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota | Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah promosi investasi yang diikuti (kali) |
| | | | | Jumlah promosi investasi yang dilaksanakan (kali) | | | | | | | | | Jumlah promosi investasi yang dilaksanakan (kali) | |
| | | | | | | | | | | | | | Honorarium Non PNS untuk Staf Adm Umum Bidang PM Naker sebanyak 1 orang (Bulan) | |

| PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA | | | | | PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 | | | | | | | | | |
|---|--------|---------------|---|--|---------------------------|----|----|------|----|--|--|--|--|--|
| NO | URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM/KEGIATAN | Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output) | KODE | | | | | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | | | | | | | | | | | | Jumlah sistem informasi penanaman modal yang disusun (unit) |
| | | | Peningkatan Koordinasi dan Kerjasama Penanaman Modal dengan Instansi Pemerintah dan Dunia Usaha | Jumlah MOU bidang penanaman modal yang dilaksanakan (kali) | 2 | 18 | 03 | 2.01 | 02 | Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal | Program Promosi Penanaman Modal | Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah MOU bidang penanaman modal yang dilaksanakan (kali) |
| | | | Pemantauan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal | Laporan kelengkapan adm perusahaan penanaman modal (Laporan) | 2 | 18 | 05 | 2.01 | 01 | Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal | Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal | Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal | Laporan kelengkapan adm perusahaan penanaman modal (Laporan) |
| | | | | Laporan LKPM Perusahaan (laporan) | | | | | | | | | | Laporan LKPM Perusahaan (laporan) |
| | | | | | | | | | | | | | | Honorarium Non PNS untuk Staf Adm Umum Bidang Advokasi dan Pengendalian sebanyak 1 orang (Bulan) |
| | | | PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | PERSENTASE KONSISTENSI PROGRAM RPJMD KEDALAM RKPD (%) | 2 | X | 01 | | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | | | |
| | | | Forum OPD | Berita Acara Forum OPD (Dokumen) | 2 | X | 01 | 2.01 | 04 | | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah | Berita Acara Forum OPD (Dokumen) |

DINAS KEBUDAYAAN, PENINGGALAN BERSEJARAH DAN PERMUSEUMAN

| PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA | | | | | PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 | | | | | | | | | |
|---|--------|---------------|---|---|---------------------------|----|----|------|----|---------------|--|---|--|--|
| NO | URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM/KEGIATAN | Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output) | KODE | | | | | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | Dokumen Renstra Dinas Kebudayaan Peninggalan Bersejarah dan Permuseuman Tahun 2023-2028 (dokumen) | X | XX | 01 | 2.01 | | | | | | |
| | | | Penyusunan RENSTRA OPD | Ketersediaan Dokumen perencanaan tahunan (Dokumen) | 2 | 22 | 01 | 2.01 | 01 | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah | Ketersediaan Dokumen perencanaan tahunan (Dokumen) |
| | | | Forum OPD | Berita acara forum OPD (Berita acara) | 2 | 22 | 01 | 2.01 | 04 | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah | Berita acara forum OPD (Berita acara) |
| | | | penyediaan jasa pelayanan non PNS | Jumlah tenaga pegawai non PNS yang difasilitasi (bulan) | 2 | 22 | 01 | 2.02 | 01 | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Administrasi Keuangan | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah tenaga pegawai non PNS yang difasilitasi (bulan) |
| | | | Penatausahaan keuangan dan barang | Jumlah penatausahaan keuangan dan barang yang dilaksanakan (bulan) | 2 | 22 | 01 | 2.03 | 07 | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Administrasi Umum | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | Jumlah penatausahaan keuangan dan barang yang dilaksanakan (bulan) |
| | | | Program pelayanan Adminitrasi Perkantoran | Tersedianya Sarana Pelayanan Administrasi Perkantoran (bulan) | 2 | 22 | | | | | | | | |

| PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA | | | | | PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 | | | | | | | | | |
|---|--------|---------------|--|--|---------------------------|----|----|------|----|---------------|--|---|--|--|
| NO | URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM/KEGIATAN | Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output) | KODE | | | | | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | | 2 | 22 | 01 | 2.04 | | | | | | |
| | | | Pendidikan dan pelatihan formal | Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan pelatihan formal (orang) | 2 | 22 | 01 | 2.04 | 09 | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Pendidikan dan Pelatihan Formal | Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan pelatihan formal (orang) |
| | | | penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor | Jenis Komponen listrik yang tersedia (Bulan) | 2 | 22 | 01 | 2.03 | 12 | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Administrasi Umum | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | Jenis Komponen listrik yang tersedia (Bulan) |
| | | | Penyediaan jasa kebersihan kantor | Pengadaan alat kebersihan dan bahan pembersih (bulan) | 2 | 22 | 01 | 2.03 | 08 | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Administrasi Umum | Penyediaan jasa kebersihan kantor | Pengadaan alat kebersihan dan bahan pembersih (bulan) |
| | | | penyediaan alat tulis kantor | Jenis ATK yang tersedia (Bulan) | 2 | 22 | 01 | 2.03 | 10 | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Administrasi Umum | Penyediaan alat tulis kantor | Jenis ATK yang tersedia (Bulan) |
| | | | Pengadaan perlengkapan gedung Kantor | Perlengkapan Kantor yang diadakan (Jenis) | 2 | 22 | 01 | 2.03 | 22 | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Administrasi Umum | Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor | Perlengkapan Kantor yang diadakan (Jenis) |
| | | | Pengadaan Peralatan Gedung Kantor | Peralatan Gedung Kantor yang diadakan (bulan) | 2 | 22 | 01 | 2.03 | 24 | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Administrasi Umum | Pengadaan Peralatan Gedung Kantor | Peralatan Gedung Kantor yang diadakan (bulan) |

| PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA | | | | | PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 | | | | | | | | | |
|---|--------|---------------|--|---|---------------------------|----|----|------|----|---------------|--|-------------------|--|---|
| NO | URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM/KEGIATAN | Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output) | KODE | | | | | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | penyediaan makan dan minum | Makan dan Minum yang disediakan (bulan) | 2 | 22 | 01 | 2.03 | 17 | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Administrasi Umum | Penyediaan Makanan dan Minuman | Makan dan Minum yang disediakan (bulan) |
| | | | penyediaan barang cetak dan penggandaan | Jumlah barang Cetakan yang tersedia (bulan) | 2 | 22 | 01 | 2.03 | 11 | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Administrasi Umum | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Jumlah barang Cetakan yang tersedia (bulan) |
| | | | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | Bahan Bacaan dan Perundang-undangan yang disediakan (bulan) | 2 | 22 | 01 | 2.03 | 15 | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Administrasi Umum | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | Bahan Bacaan dan Perundang-undangan yang disediakan (bulan) |
| | | | rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah | Terlaksananya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar Daerah (bulan) | 2 | 22 | 01 | 2.03 | 18 | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Administrasi Umum | Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah | Terlaksananya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar Daerah (bulan) |
| | | | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang diadakan (unit) | 2 | 22 | 01 | 2.03 | 20 | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Administrasi Umum | Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang diadakan (unit) |
| | | | Penyediaan jasa surat menyurat | Pengadaan surat menyurat (bulan) | 2 | 22 | 01 | 2.03 | 01 | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Administrasi Umum | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Pengadaan surat menyurat (bulan) |
| | | | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan (Bulan) | 2 | 22 | 01 | 2.03 | 02 | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Administrasi Umum | Penyedia jasa komunikasi sumber daya air dan listrik | Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan (Bulan) |

| PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA | | | | | PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 | | | | | | | | | |
|---|--------|---------------|--|--|---------------------------|----|----|------|----|---------------|--|-------------------|--|--|
| NO | URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM/KEGIATAN | Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output) | KODE | | | | | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur | | | | | | | | | | | |
| | | | pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas operasional | Terlaksananya pemeliharaan Kendaraan dinas dan operasional (bulan) | 2 | 22 | 01 | 2.03 | 30 | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Administrasi Umum | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | Terlaksananya pemeliharaan Kendaraan dinas dan operasional (bulan) |
| | | | pemeliharaan rutin berkala mobiler | pemeliharaan mobiler kantor yang disediakan (bulan) | 2 | 22 | 01 | 2.03 | 35 | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Administrasi Umum | Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur | Pemeliharaan mobiler kantor yang disediakan (bulan) |
| | | | pemeliharaan rutin berkala gedung kantor | Gedung Kantor yang dipelihara (bulan) | 2 | 22 | 01 | 2.03 | 28 | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Administrasi Umum | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | Gedung Kantor yang dipelihara (bulan) |
| | | | pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor | Peralatan gedung kantor yang dipelihara (bulan) | 2 | 22 | 01 | 2.03 | 34 | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Administrasi Umum | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor | Peralatan gedung kantor yang dipelihara (bulan) |
| | | | Penyediaan Dokumentasi dan Dekorasi | Jumlah Dokumen dan dekorasi yang disediakan (bulan) | 2 | 22 | | | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Administrasi Umum | | Jumlah Dokumen dan dekorasi yang disediakan (bulan) |
| | | | PROGRAM PENGEMBANGAN NILAI BUDAYA (PD) | Persentase Kelompok Seni yang mandiri (%) | | | | | | | | | | |
| | | | | Persentase Kelompok budaya yang mandiri (%) | | | | | | | | | | |

| PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA | | | | | PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 | | | | | | | | | |
|---|--------|---------------|---|--|---------------------------|----|----|------|----|---------------------------------------|---------------------------------|--|--|--|
| NO | URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM/KEGIATAN | Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output) | KODE | | | | | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | Pelestarian dan aktualisasi adat dan budaya daerah | Jumlah komunitas Kenagarian yang Dilestarikan (kelompok) | 2 | 22 | 02 | 2.01 | 01 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN | PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN | Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota | Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan | Jumlah komunitas Kenagarian yang Dilestarikan (kelompok) |
| | | | | Jumlah kelompok budaya yang tampil (kelompok) | | | | | | | | | | Jumlah kelompok budaya yang tampil (kelompok) |
| | | | | Jumlah balai/rumah adat yang terfasilitasi (unit) | | | | | | | | | | Jumlah balai/rumah adat yang terfasilitasi (unit) |
| | | | Membangun kemitraan pengelolaan kekayaan budaya antar daerah | Jumlah MoU kebudayaan yang aktif (MoU) | 2 | 22 | 02 | 2.01 | 01 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN | PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN | Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota | Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan | Jumlah MoU kebudayaan yang aktif (MoU) |
| | | | Sawahlunto International Songket Silungkang Carnival (Sissca) | Jumlah peserta yang mengikuti Sissca (peserta) | 2 | 22 | 02 | 2.01 | 01 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN | PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN | Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota | Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan | Jumlah peserta yang mengikuti Sissca (peserta) |
| | | | Pekan Budaya Sawahlunto | Jumlah Event Yang dilaksanakan (event) | 2 | 22 | 02 | 2.01 | 01 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN | PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN | Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota | Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan | Jumlah Event Pekan Budaya Sawahlunto Yang dilaksanakan (event) |

| PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA | | | | | PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 | | | | | | | | | |
|---|--------|---------------|--|--|---------------------------|----|----|------|----|---------------------------------------|---|--|---|--|
| NO | URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM/KEGIATAN | Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output) | KODE | | | | | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | Sawahlunto Randai Festival | Jumlah group randai yang mengikuti festival (group) | 2 | 22 | 02 | 2.02 | 01 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN | PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN | Pelestarian Kesenian tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota | Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya | Jumlah group randai yang mengikuti festival (group) |
| | | | Workshop peningkatan nilai seni dan budaya | Jumlah peserta workshop (orang) | 2 | 22 | 02 | 2.02 | 02 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN | PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN | Pelestarian Kesenian tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota | Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional | Jumlah peserta workshop (orang) |
| | | | Fasilitasi komunitas seni dan budaya | Jumlah kelompok seni dan budaya yang difasilitasi (kelompok) | 2 | 22 | 03 | 2.01 | 01 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN | PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL | Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota | Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional | Jumlah kelompok seni dan budaya yang difasilitasi (kelompok) |
| | | | | Jumlah pembuatan film yang terfasilitasi (film) | | | | | | | | | | Jumlah pembuatan film yang terfasilitasi (film) |
| | | | Fasilitasi Pentas Seni Kebudayaan Daerah | Jumlah pentas seni yang difasilitasi (penampilan) | 2 | 22 | 03 | 2.01 | 01 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN | PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL | Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota | Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional | Jumlah pentas seni yang difasilitasi (penampilan) |
| | | | Penyusunan kajian sejarah dan nilai budaya Kota Sawahlunto | Jumlah dokumen hasil kajian (Dokumen) | 2 | 22 | 04 | 2.01 | 03 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN | PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH | Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah | Jumlah dokumen hasil kajian (Dokumen) |

| PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA | | | | | PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 | | | | | | | | | |
|---|--------|---------------|---|--|---------------------------|----|----|------|----|---------------------------------------|--|--|--|--|
| NO | URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM/KEGIATAN | Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output) | KODE | | | | | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | Lomba sejarah dan budaya, sains dan teknologi | Jumlah siswa yang mengikuti lomba (orang) | 2 | 22 | 04 | 2.01 | 03 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN | PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH | Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah | Jumlah siswa yang mengikuti lomba (orang) |
| | | | PROGRAM PENGELOLAAN KEKAYAAN BUDAYA (PD) | Persentase budaya benda yang lestari | | | | | | | | | | |
| | | | Registrasi cagar budaya | Jumlah cagar budaya yang diregistrasi (unit) | 2 | 22 | 05 | 2.01 | 01 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN | PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA | Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota | Register Cagar Budaya | Jumlah cagar budaya yang diregistrasi (unit) |
| | | | Monitoring dan evaluasi bangunan/kawasan cagar budaya | Jumlah Laporan monitoring dan evaluasi (Laporan) | 2 | 22 | 05 | 2.02 | 01 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN | PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA | Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota | Register Cagar Budaya | Jumlah Laporan monitoring dan evaluasi (Laporan) |
| | | | Penyusunan Kajian revitalisasi dan konservasi bangunan/kawasan bersejarah | Jumlah dokumen Kajian (dokumen) | 2 | 22 | 05 | 2.02 | 02 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN | PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA | Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota | Pencegahan dan Penanggulangan dari Kerusakan, Kehancuran, atau Kemusnahan Cagar Budaya | Jumlah dokumen Kajian (dokumen) |
| | | | Revitalisasi dan Konservasi bangunan/kawasan bersejarah | Jumlah bangunan/kawasan bersejarah direvitalisasi (unit) | 2 | 22 | 05 | 2.02 | 02 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN | PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA | Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota | Pencegahan dan Penanggulangan dari Kerusakan, Kehancuran, atau Kemusnahan Cagar Budaya | Jumlah bangunan/kawasan bersejarah direvitalisasi (unit) |
| | | | Sosialisasi pelestarian warisan budaya | Jumlah peserta sosialisasi (Orang) | 2 | 22 | 05 | 2.02 | 03 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN | PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA | Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota | Peningkatan Potensi Nilai, Informasi, dan Promosi Cagar Budaya Serta Pemanfaatannya | Jumlah peserta sosialisasi (Orang) |

| PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA | | | | | PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 | | | | | | | | | |
|---|--------|---------------|--|---|---------------------------|----|----|------|----|---------------------------------------|--|---|---|---|
| NO | URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM/KEGIATAN | Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output) | KODE | | | | | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | Penyusunan dokumen penunjang kelengkapan warisan dunia | Persentase kelengkapan dokumen pengusulan (%) | 2 | 22 | 05 | 2.01 | 01 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN | PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA | Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota | Peningkatan Potensi Nilai, Informasi, dan Promosi Cagar Budaya Serta Pemanfaatannya | Persentase kelengkapan dokumen pengusulan (%) |
| | | | Konservasi dan Preparasi Koleksi Museum | Jumlah koleksi yang dipelihara (koleksi) | 2 | 22 | 06 | 2.01 | 01 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN | PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN | Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota | Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu | Jumlah koleksi yang dipelihara (koleksi) |
| | | | Pengadaan koleksi museum | Jumlah koleksi museum yang diadakan (koleksi) | 2 | 22 | 06 | 2.01 | 01 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN | PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN | Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota | Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu | Jumlah koleksi museum yang diadakan (koleksi) |
| | | | Pembuatan media informasi dan edukasi | Jumlah paket media informasi yang disusun (Paket) | 2 | 22 | 06 | 2.01 | 01 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN | PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN | Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota | Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu | Jumlah paket media informasi yang disusun (Paket) |
| | | | Pelatihan Peningkatan Kompetensi Pengelola Museum | Jumlah Pengelola Museum yang Meningkatkan Kompetensinya (orang) | 2 | 22 | 06 | 2.01 | 02 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN | PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN | Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota | Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman | Jumlah Pengelola Museum yang Meningkatkan Kompetensinya (orang) |
| | | | Pelaksanaan promosi dan pameran temporer museum | Jumlah pameran yang dilaksanakan dan diikuti (event) | 2 | 22 | 06 | 2.01 | 03 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN | PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN | Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota | Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Museum | Jumlah pameran yang dilaksanakan dan diikuti (event) |
| | | | Operasional dan Pemeliharaan Museum Goedang Ransoem (di akomodir di sekretariat) | Terpeliharanya Museum Goedang Ransoem (bulan) | 2 | 22 | 06 | 2.01 | 04 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN | PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN | Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota | Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum | Terpeliharanya Museum Goedang Ransoem (bulan) |

| PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA | | | | | PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 | | | | | | | | | |
|---|--------|---------------|---|--|---------------------------|----|----|------|----|---------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|---|---|
| NO | URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM/KEGIATAN | Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output) | KODE | | | | | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | Operasional dan pengelolaan Museum Kereta Api (di akomodir di sekretariat) | Terpeliharanya museum kereta api (bulan) | 2 | 22 | 06 | 2.01 | 04 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN | PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN | Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota | Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum | Terpeliharanya museum kereta api (bulan) |
| | | | Operasional dan pengelolaan Infobox (di akomodir di sekretariat) | Terpeliharanya infobox dan lobang mbah soero (bulan) | 2 | 22 | 06 | 2.01 | 04 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN | PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN | Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota | Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum | Terpeliharanya infobox dan lobang mbah soero (bulan) |
| | | | Operasional dan pengelolaan Iptek Centre (di akomodir di sekretariat) | Terpeliharanya iptek center dan alat peraga (bulan) | 2 | 22 | 06 | 2.01 | 04 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN | PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN | Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota | Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum | Terpeliharanya iptek center dan alat peraga (bulan) |
| | | | Operasional dan pengelolaan Museum Budaya (di akomodir di sekretariat) | Terpeliharanya museum budaya (bulan) | 2 | 22 | 06 | 2.01 | 04 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN | PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN | Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota | Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum | Terpeliharanya museum budaya (bulan) |
| | | | Pelaksanaan dan Pemeliharaan Museum Goedang Ransoem (DAK BOP Bidang Museum) | Terpeliharanya museum Kota Sawahlunto (museum) | | | | | | | | | | |
| | | | Pelaksanaan dan Pemeliharaan Museum Situs Lubang Mbah Soero (DAK BOP Bidang Museum) | Terpeliharanya museum Kota Sawahlunto (museum) | | | | | | | | | | |
| | | | PROGRAM PENGELOLAAN KERAGAMAN BUDAYA (PD) | Persentase budaya tak benda yang lestari | | | | | | | | | | |

DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

| PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA | | | | | PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 | | | | | | | | | |
|---|--------------------------------------|--|--|--|---------------------------|----|----|---------------|---------|-----------|--|---|---|--|
| NO | URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM/ KEGIATAN | Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output) | KODE | | | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | |
| | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Terlaksananya program pelayanan administrasi perkantoran | | | | | | | | | | | |
| 1 | wajib | Kearsipan | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | | | | | | | | | | | |
| | | | Penyediaan jasa Surat Menyurat | Tersedianya pelayanan jasa surat menyurat (bulan) | 2 | 24 | 01 | 2,03 | 01 | Kearsipan | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Administrasi Umum | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Tersedianya pelayanan jasa surat menyurat (bulan) |
| | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik | Tersedianya jasa komunikasi listrik, air (bulan) | 2 | 24 | 01 | 2,03 | 02 | Kearsipan | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Administrasi Umum | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Tersedianya jasa komunikasi listrik, air (bulan) |
| | | | Penyediaan jasa kebersihan kantor | Tersedianya jasa kebersihan kantor (bulan) | 2 | 24 | 01 | 2,03 | 08 | Kearsipan | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Administrasi Umum | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | Tersedianya jasa kebersihan kantor (bulan) |
| | | | Penyediaan Alat Tulis Kantor | Tersedianya alat tulis kantor (bulan) | 2 | 24 | 01 | 2,03 | 10 | Kearsipan | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Administrasi Umum | Penyediaan Alat Tulis Kantor | Tersedianya alat tulis kantor (bulan) |
| | | | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Tersedianya barang cetakan dan penggandaan (bulan) | 2 | 24 | 01 | 2,03 | 11 | Kearsipan | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Administrasi Umum | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Tersedianya barang cetakan dan penggandaan (bulan) |

| PERMENDAGRI 13/RPJM/RENSTRA/RKPD/RENJA | | | | | PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 | | | | | | | | | |
|--|--------|---------------|--|--|---------------------------|----|----|---------------|---------|-----------|--|---|--|--|
| NO | URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM/ KEGIATAN | Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output) | KODE | | | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | |
| | | | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan (bulan) | 2 | 24 | 01 | 2,03 | 12 | Kearsipan | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Administrasi Umum | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan (bulan) |
| | | | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan (bulan) | 2 | 24 | 01 | 2,03 | 15 | Kearsipan | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Administrasi Umum | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan (bulan) |
| | | | Penyediaan makanan minuman | Tersedianya makanan dan minuman (bulan) | 2 | 24 | 01 | 2,03 | 17 | Kearsipan | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Administrasi Umum | Penyediaan Makanan dan Minuman | Tersedianya makanan dan minuman (bulan) |
| | | | Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah | Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | 2 | 24 | 01 | 2,03 | 18 | Kearsipan | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Administrasi Umum | Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah | Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah |
| | | | Penyediaan jasa pelayanan Pegawai Non PNS | Tersedianya jasa pelayanan pegawai Non PNS (bulan) | 2 | 24 | 01 | 2,02 | 01 | Kearsipan | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Administrasi Keuangan | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Tersedianya jasa pelayanan pegawai Non PNS (bulan) |
| | | | Penatausahaan keuangan dan Barang | Tersedianya honorarium penatausahaan (bulan) | 2 | 24 | 01 | 2,02 | 01 | Kearsipan | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Administrasi Keuangan | | Tersedianya honorarium penatausahaan (bulan) |
| | | | Penyediaan Dokumentasi dan Dekorasi | Tersedianya dokumentasi dan dekorasi (bulan) | | | | | | Kearsipan | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Administrasi Umum | | Tersedianya dokumentasi dan dekorasi (bulan) |

| PERMENDAGRI 13/RPJM/RENSTRA/RKPD/RENJA | | | | | PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 | | | | | | | | | |
|--|--------|---------------|--|---|---------------------------|----|----|------|---------------|-----------|--|-------------------|--|--|
| NO | URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM/ KEGIATAN | Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output) | KODE | | | | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| | | | Program Peningkatan Sarana dan prasarana Aparatur | Tersedianya kebutuhan sarana dan prasarana aparatur (bulan) | | | | | | | | | | |
| | | | Pengadaan Perlengkapan gedung kantor | Jumlah perlengkapan gedung kantor yang tersedia (unit) | 2 | 24 | 01 | 2.03 | 22 | Kearsipan | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Administrasi Umum | Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor | Jumlah perlengkapan gedung kantor yang tersedia (unit) |
| | | | Pengadaan peralatan gedung kantor | Jumlah peralatan gedung kantor yang tersedia (unit) | 2 | 24 | 01 | 2.03 | 24 | Kearsipan | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Administrasi Umum | Pengadaan Peralatan Gedung Kantor | Jumlah peralatan gedung kantor yang tersedia (unit) |
| | | | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | Jumlah gedung kantor yang terpelihara (unit) | 2 | 24 | 01 | 2.03 | 28 | Kearsipan | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Administrasi Umum | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | Jumlah gedung kantor yang terpelihara (unit) |
| | | | Rehab berat gedung Perpustakaan Adinegoro | Terehabilitasinya gedung perpustakaan umum (paket) | 2 | 24 | 01 | 2.03 | 38 | Kearsipan | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Administrasi Umum | Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor | Terehabilitasinya gedung perpustakaan umum (paket) |
| | | | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | Terpeliharanya kendaraan dinas (unit) | 2 | 24 | 01 | 2.03 | 30 | Kearsipan | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Administrasi Umum | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | Terpeliharanya kendaraan dinas (unit) |
| | | | Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor | Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara (unit) | 2 | 24 | 01 | 2.03 | 34 | Kearsipan | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Administrasi Umum | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor | Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara (unit) |

| PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA | | | | | PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 | | | | | | | | | |
|---|--------|---------------|--|--|---------------------------|----|----|------|---------------|-----------|--|---|--|--|
| NO | URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM/ KEGIATAN | Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output) | KODE | | | | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| | | | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Terfasilitasi kebutuhan peningkatan sumber daya aparatur (bulan) | | | | | | | | | | |
| | | | Pendidikan dan Pelatihan Formal | Jumlah pendidikan dan pelatihan yang diikuti (orang) | 2 | 24 | 01 | 2,04 | 09 | Kearsipan | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Pendidikan dan Pelatihan Formal | #REF! |
| 2 | | | Program Perencanaan Pembangunan Daerah | | | | | | | | | | | |
| | | | Forum OPD | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | Penyusunan Revisi Rencana Strategis SKPD (2013-2018) | | 2 | 24 | 01 | 2,01 | 01 | Kearsipan | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah | Penyusunan Revisi Rencana Strategis SKPD (2013-2018) |
| | | | | | 2 | 24 | 01 | 2,01 | 02 | Kearsipan | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan | |
| | | | | | 2 | 24 | 01 | 2,01 | 03 | Kearsipan | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah | |
| | | | | | 2 | 24 | 01 | 2,01 | 04 | Kearsipan | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah | |

| PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA | | | | | PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 | | | | | | | | | |
|---|--------|---------------|---|--|---------------------------|----|----|---------------|---------|-----------|--|---|---|---|
| NO | URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM/ KEGIATAN | Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output) | KODE | | | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | |
| | | | | | 2 | 24 | 01 | 2,01 | 05 | Kearsipan | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | |
| | | | Program Perbaikan Sistem Adm Kearsipan | Persentase OPD yang mengelola arsip secara baku (%) | | | | | | | | | | |
| | | | Penataan pengolahan Arsip Dinamis | Jumlah arsip yang tertata (lembar) | 2 | 24 | 02 | 2,01 | 01 | Kearsipan | PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP | Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota | Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis | Jumlah arsip yang tertata (lembar) |
| | | | | | 2 | 24 | 02 | 2,01 | 02 | Kearsipan | PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP | | Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis | |
| | | | Penyusunan Tata Naskah Dinas | Tersusunnya tata naskah kedinasan (paket) | | | | | | | | | | |
| | | | Pembinaan penyelenggaraan kearsipan/Pemberkasan kearsipan | jumlah OPD/ Desa dan kelurahan yang dibina | 2 | 24 | 02 | 2.03 | 02 | Kearsipan | PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP | Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota | Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kab/Kota | jumlah OPD/ Desa dan kelurahan yang dibina |
| | | | Pengawasan/audit internal Kearsipan Kota Sawahlunto | Persentase OPD yang mengelola arsip secara baik (%) | 2 | 24 | 02 | 2.03 | 02 | Kearsipan | PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP | Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota | Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kab/Kota | Persentase OPD yang mengelola arsip secara baik (%) |

| PERMENDAGRI 13/RPJM/RENSTRA/RKPD/RENJA | | | | | PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 | | | | | | | | | |
|--|--------|---------------|--|--|---------------------------|----|----|---------------|---------|-----------|---|---|---|---|
| NO | URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM/ KEGIATAN | Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output) | KODE | | | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | |
| | | | Penilaian Pengelolaan Kearsipan Desa dan Kelurahan | jumlah Desa dan Kelurahan yang dinilai | 2 | 24 | 02 | 2.03 | 02 | Kearsipan | PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP | Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota | Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kab/Kota | jumlah Desa dan Kelurahan yang dinilai |
| | | | Program pemeliharaan rutin atau berkala sarana dan prasarana kearsipan | Persentase OPD yang telah memiliki sarana prasarana kearsipan sesuai standar (%) | | | | | | | | | | |
| | | | Fumigasi Dokumen/ Arsip Daerah | Jumlah fumigasi yang terlaksana (kali) | 2 | 23 | 02 | 2.02 | 01 | | | | | |
| | | | Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/ Arsip Daerah | Persentase arsip daerah yang terselamatkan (%) | | | | | | | | | | |
| | | | Simulasi perlindungan dan penyelamatan arsip Bencana | jumlah kegiatan simulasi yang diadakan (kegiatan) | 2 | 24 | 03 | 2.02 | 01 | Kearsipan | PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP | Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/Kota | Evakuasi dan Identifikasi Arsip Akibat Bencana | jumlah kegiatan simulasi yang diadakan (kegiatan) |
| | | | | | 2 | 24 | 03 | 2.02 | 02 | Kearsipan | PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP | | Pemulihan dan Penyimpanan Arsip Akibat Bencana | |
| | | | Penggandaan dan penggantian arsip statis | Jumlah arsip yang digandakan (lembar) | 2 | 24 | 03 | 2.05 | 01 | Kearsipan | PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP | Pencarian Arsip Statis Kabupaten/Kota yang Dinyatakan Hilang | Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis yang dinyatakan Hilang | Jumlah arsip yang digandakan (lembar) |

| PERMENDAGRI 13/RPJM/RKPD/RENJA | | | | | PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 | | | | | | | | | |
|--------------------------------|--------|---------------|-------------------------------------|---|---------------------------|----|----|------|----|---------------|---|--|---|---|
| NO | URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM/ KEGIATAN | Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output) | KODE | | | | | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | Alih Bahasa arsip statis | Jumlah arsip statis yang dialihbahasakan (Lembar) | 2 | 24 | 03 | 2,04 | 01 | Kearsipan | PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP | Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih | penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip | Jumlah arsip statis yang dialihbahasakan (Lembar) |
| | | | | | 2 | 24 | 03 | 2,04 | 02 | Kearsipan | PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP | Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih | penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip | |
| | | | Penelusuran Arsip Statis | Jumlah data dan informasi tentang arsip statis daerah (paket) | 2 | 24 | 03 | 2,05 | 01 | Kearsipan | PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP | Media Kabupaten/Kota | Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis yang dinyatakan Hilang | Jumlah data dan informasi tentang arsip statis daerah (paket) |
| | | | | | 2 | 24 | 03 | 2,05 | 02 | Kearsipan | PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP | Pencarian Arsip Statis Kabupaten/Kota yang Dinyatakan Hilang | Evaluasi dan Penetapan Hasil Alih Media yang dinyatakan Hilang | |
| | | | | | 2 | 24 | 03 | 2,05 | 03 | Kearsipan | PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP | Pencarian Arsip Statis Kabupaten/Kota yang Dinyatakan Hilang | Penetapan dan Pengumuman Daftar Pencarian Arsip (DPA) | |
| | | | Akuisisi arsip dan penyusutan arsip | Jumlah arsip SKPD yang diakuisisi (OPD) | 2 | 24 | 02 | 2,02 | 01 | Kearsipan | PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP | Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota | Pengumpulan dan Penyampaian Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga Kepada ANRI | Jumlah arsip SKPD yang diakuisisi (OPD) |

| PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA | | | | | PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 | | | | | | | | | |
|---|--------|---------------|---|--|---------------------------|----|----|------|----|---|---|--|---|---|
| NO | URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM/ KEGIATAN | Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output) | KODE | | | | | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | | | | | | | | | | | Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis | |
| | | | Alih Media Arsip | Jumlah arsip yang dialih mediakan (paket) | 2 | 24 | 02 | 2,04 | 01 | Kearsipan | PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP | Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota | penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip | Jumlah arsip yang dialih mediakan (paket) |
| | | | | | 2 | 24 | 02 | 2,04 | 02 | Kearsipan | PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP | Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota | penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip | |
| | | | Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi | Ketersediaan pengelola kearsipan dan perpustakaan yang berkompeten (orang) | | | | | | | | | | |
| | | | Bimtek Manajemen Perpustakaan sekolah Profesional | Jumlah peserta bimtek (orang) | 2 | 23 | 02 | 2.01 | 04 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN | PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN | Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Pembinaan Perpustakaan Pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan | Jumlah peserta bimtek (orang) |

| PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA | | | | | PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 | | | | | | | | | |
|---|--------|---------------|---|--|---------------------------|----|----|------|----|---|--------------------------------|---|--|---|
| NO | URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM/ KEGIATAN | Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output) | KODE | | | | | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | Bimtek Pengelola Perpustakaan | Jumlah peserta bimtek (orang) | 2 | 23 | 02 | 2.01 | 06 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN | PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN | Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah peserta bimtek (orang) |
| | | | Rakor dan Sosialisasi Perpustakaan | Jumlah Peserta Rakor (orang) | | | | | | | | | | Jumlah Peserta Rakor (orang) |
| | | | Bimtek kearsipan | Jumlah peserta bimtek | | | | | | | | | | Jumlah peserta bimtek |
| | | | Sosialisasi penyelenggaraan kearsipan | jumlah sosialisasi dilaksanakan (kegiatan) | 2 | 24 | 02 | 2.03 | 01 | Kearsipan | PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP | Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota | Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah kab/kota Melalui JIKN | jumlah sosialisasi dilaksanakan (kegiatan) |
| | | | | | 2 | 24 | 02 | 2.03 | 02 | Kearsipan | PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP | Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota | Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kab/Kota | |
| | | | Promosi perpustakaan dan kearsipan | Jumlah media promosi | 2 | 24 | 02 | 2.03 | 01 | Kearsipan | PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP | Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota | Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah kab/kota Melalui JIKN | Jumlah media promosi |
| | | | Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan | Jumlah Angka kunjungan ke Perpustakaan Umum Meningkat | | | | | | | | | | |

| PERMENDAGRI 13/RPJM/RENSTRA/RKPD/RENJA | | | | | PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 | | | | | | | | | |
|--|--------|---------------|---|---|---------------------------|----|----|------|----|---|--------------------------------|--|--|---|
| NO | URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM/ KEGIATAN | Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output) | KODE | | | | | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | Pengatalogan bahan perpustakaan berbasis INDOMARC | Jumlah buku yang diolah dalam Program INDOMARC | 2 | 23 | 02 | 2.02 | 01 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN | PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN | Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah | Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi Pada Satuan | Jumlah buku yang diolah dalam Program INDOMARC |
| | | | Pengembangan dan pemeliharaan jaringan aplikasi kearsipan | Terpeliharanya jaringan aplikasi kearsipan (paket) | 2 | 23 | 02 | 2.01 | 01 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN | PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN | Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik | Terpeliharanya jaringan aplikasi kearsipan (paket) |
| | | | Pengadaan koleksi buku | Jumlah buku yang diadakan (paket) | 2 | 23 | 02 | 2.01 | 08 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN | PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN | Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Pengembangan Bahan Pustaka | Jumlah buku yang diadakan (paket) |
| | | | Penulisan dan penerbitan buku Profil/Biografi Walikota | Jumlah buku yang ditulis (judul) | 2 | 23 | 02 | 2.02 | 01 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN | PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN | Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah | Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi Pada Satuan | Jumlah buku yang ditulis (judul) |
| | | | Pembinaan Perpustakaan , Sekolah Mesjid dan Fasilitas IPI | Jumlah Perpustakaan Sekolah dan TBM yang dibina | | | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN | PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN | Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah | Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus Serta Masyarakat | Jumlah Perpustakaan Sekolah dan TBM yang dibina |
| | | | Operasional Perpustakaan keliling | Jumlah masyarakat yang berkunjung dan jumlah desa/kel yang disinggahi (orang) | 2 | 23 | 02 | 2.02 | 02 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN | PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN | Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah | Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah masyarakat yang berkunjung dan jumlah desa/kel yang disinggahi (orang) |
| | | | Pelestarian bahan bacaan perpustakaan | Jumlah buku yang terpelihara | 2 | 23 | 02 | 2.02 | 03 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN | PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN | Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah | Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca | Jumlah buku yang terpelihara |

| PERMENDAGRI 13/RPJM/RENSTRA/RKPD/RENJA | | | | | PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 | | | | | | | | | |
|--|--------|---------------|--|---|---------------------------|----|----|------|----|---|--------------------------------|--|---|---|
| NO | URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM/ KEGIATAN | Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output) | KODE | | | | | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | Layanan perpustakaan TK dan PAUD | Jumlah TK/Paud yang berkunjung | 2 | 23 | 02 | 2.02 | 04 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN | PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN | Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah | Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial | Jumlah TK/Paud yang berkunjung |
| | | | Fasilitasi Layanan Pemustaka | Jumlah Pemustaka yang terfasilitasi (orang) | 2 | 23 | 02 | 2.02 | 05 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN | PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN | Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah | Pemilihan Duta Baca Tingkat Daerah Provinsi | Jumlah Pemustaka yang terfasilitasi (orang) |
| | | | Fasilitasi Layanan Khusus | Jumlah Pemustaka Khusus yang terfasilitasi (orang) | 2 | 23 | 02 | 2.01 | 05 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN | PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN | Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota | Jumlah Pemustaka Khusus yang terfasilitasi (orang) |
| | | | Pengolahan dan Pelestarian Bahan Perpustakaan | Jumlah koleksi yang diolah dan dilestarikan (Eksemplar) | 2 | 23 | 02 | 2.01 | 09 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN | PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN | Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka | Jumlah koleksi yang diolah dan dilestarikan (Eksemplar) |
| | | | Pembinaan Perpustakaan Umum dan Khusus | Jumlah Perpustakaan yang dibina (perpustakaan) | 2 | 23 | 02 | 2.01 | 09 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN | PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN | Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Perpustakaan yang dibina (perpustakaan) |
| | | | Lomba-lomba Perpuseru | Jumlah Kegiatan lomba yang dilaksanakan (kegiatan) | 2 | 23 | 02 | 2.02 | 03 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN | PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN | Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah | Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca | Jumlah Kegiatan lomba yang dilaksanakan (kegiatan) |
| | | | Penyusunan Bibliography dan Katalog Induk Daerah | Bibliography dan katalog Induk Daerah yang tersusun (dokumen) | 2 | 23 | 02 | 2.01 | 01 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN | PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN | Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik | Bibliography dan katalog Induk Daerah yang tersusun (dokumen) |

DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA

| PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA | | | | | PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 | | | | | | | | | |
|---|--------|---------------|---|---|---------------------------|----|----|------|---------------|---------|--|---|--|--|
| NO | URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM/ KEGIATAN | Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output) | KODE | | | | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| | | | PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | Dokumen Renstra Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Tahun 2023-2028 (dokumen) | X | XX | 01 | 2.01 | | | | | | |
| | | | Penyusunan RENSTRA OPD | Ketersediaan Dokumen perencanaan tahunan (Dokumen) | X | XX | 01 | 2.01 | 01 | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah | Ketersediaan Dokumen perencanaan tahunan (Dokumen) |
| | | | Forum OPD | Berita acara forum OPD (Berita acara) | X | XX | 01 | 2.01 | 04 | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah | Berita acara forum OPD (Berita acara) |
| | | | penyediaan gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Gaji PNS yang dibayarkan (bulan) | X | XX | 01 | 2.02 | 01 | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Administrasi Keuangan | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Gaji PNS yang dibayarkan (bulan) |
| | | | Program pelayanan Adminitrasi Perkantoran | Tersedianya Sarana Pelayanan Administrasi Perkantoran (bulan) | | | | | | | | | | |
| | | | Penyediaan jasa surat menyurat | Pengadaan surat menyurat (bulan) | X | XX | 01 | 2.03 | 01 | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Administrasi Umum | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Pengadaan surat menyurat (bulan) |
| | | | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan (Bulan) | X | XX | 01 | 2.03 | 02 | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Administrasi Umum | Penyedia jasa komunikasi sumber daya air dan listrik | Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan (Bulan) |
| | | | penatausahaan keuangan dan barang | Jumlah penatausahaan keuangan dan barang yang dilaksanakan (bulan) | X | XX | 01 | 2.03 | 07 | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Administrasi Umum | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | Jumlah penatausahaan keuangan dan barang yang dilaksanakan (bulan) |

| PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA | | | | | PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 | | | | | | | | | |
|---|--------|---------------|--|---|---------------------------|----|----|---------------|---------|----------|--|---|--|---|
| NO | URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM/ KEGIATAN | Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output) | KODE | | | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | |
| | | | Penyediaan jasa kebersihan kantor | Pengadaan alat kebersihan dan bahan pembersih (bulan) | X | XX | 01 | 2.03 | 08 | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Administrasi Umum | Penyediaan jasa kebersihan kantor | Pengadaan alat kebersihan dan bahan pembersih (bulan) |
| | | | penyediaan alat tulis kantor | Jenis ATK yang tersedia (Bulan) | X | XX | 01 | 2.03 | 10 | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Administrasi Umum | Penyediaan alat tulis kantor | Jenis ATK yang tersedia (Bulan) |
| | | | penyediaan barang cetak dan penggandaan | Jumlah barang Cetakan yang tersedia (bulan) | X | XX | 01 | 2.03 | 11 | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Administrasi Umum | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Jumlah barang Cetakan yang tersedia (bulan) |
| | | | penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor | Jenis Komponen listrik yang tersedia (Bulan) | X | XX | 01 | 2.03 | 12 | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Administrasi Umum | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | Jenis Komponen listrik yang tersedia (Bulan) |
| | | | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | Bahan Bacaan dan Perundang-undangan yang disediakan (bulan) | X | XX | 01 | 2.03 | 15 | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Administrasi Umum | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | Bahan Bacaan dan Perundang-undangan yang disediakan (bulan) |
| | | | penyediaan makan dan minum | Makan dan Minum yang disediakan (bulan) | X | XX | 01 | 2.03 | 17 | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Administrasi Umum | Penyediaan Makanan dan Minuman | Makan dan Minum yang disediakan (bulan) |
| | | | rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah | Terlaksananya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar Daerah (bulan) | X | XX | 01 | 2.03 | 18 | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Administrasi Umum | Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah | Terlaksananya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar Daerah (bulan) |
| | | | Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur | | | | | | | | | | | |

| PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA | | | | | PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 | | | | | | | | | |
|---|--------|---------------|--|--|---------------------------|----|----|------|---------------|---------|--|---|---|--|
| NO | URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM/ KEGIATAN | Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output) | KODE | | | | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| | | | Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional | Kendaraan dinas/operasional yang diadakan (unit) | | | | | | | | Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional | Kendaraan dinas/operasional yang diadakan (unit) | |
| | | | Pengadaan Peralatan Gedung Kantor | Peralatan Gedung Kantor yang diadakan (bulan) | X | XX | 01 | 2.03 | 24 | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Administrasi Umum | Pengadaan Peralatan Gedung Kantor | Peralatan Gedung Kantor yang diadakan (bulan) |
| | | | pemeliharaan rutin berkala gedung kantor | Gedung Kantor yang dipelihara (bulan) | X | XX | 01 | 2.03 | 28 | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Administrasi Umum | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | Gedung Kantor yang dipelihara (bulan) |
| | | | pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas operasional | Terlaksananya pemeliharaan Kendaraan dinas dan operasional (bulan) | X | XX | 01 | 2.03 | 30 | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Administrasi Umum | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | Terlaksananya pemeliharaan Kendaraan dinas dan operasional (bulan) |
| | | | pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor | Peralatan gedung kantor yang dipelihara (bulan) | X | XX | 01 | 2.03 | 34 | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Administrasi Umum | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor | Peralatan gedung kantor yang dipelihara (bulan) |
| | | | pemeliharaan rutin berkala mobiler | pemeliharaan mobiler kantor yang disediakan (bulan) | X | XX | 01 | 2.03 | 35 | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Administrasi Umum | Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur | pemeliharaan mobiler kantor yang disediakan (bulan) |
| | | | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | | X | XX | 01 | 2.04 | | | | | Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | |
| | | | Pendidikan dan pelatihan formal | Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan pelatihan formal (orang) | X | XX | 01 | 2.04 | 09 | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Pendidikan dan Pelatihan Formal | Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan pelatihan formal (orang) |

| PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA | | | | | PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 | | | | | | | | | |
|---|--------|---------------|---|--|---------------------------|----|----|------|----|---------------------------------------|--|---|---|---|
| NO | URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM/ KEGIATAN | Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output) | KODE | | | | | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | Program Pengembangan Ekonomi Kreatif | Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif Profesional(persentase) | | | | | | | | | | |
| | | | Workshop Pelaku Ekonomi Kreatif | Jumlah peserta workshop ekonomi kreatif (orang) | 3 | 26 | 04 | 2.01 | 01 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA | PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL | Penyediaan Prasarana (Zona kreatif/Ruang Kreatif/Kota Kreatif) Sebagai Ruang Berekspresi, Berpromosi dan Berinteraksi Bagi Insan Kreatif di Daerah Kabupaten/Kota | Pengembangan dan Revitalisasi Prasarana Kota Kreatif | Jumlah peserta workshop ekonomi kreatif yang terfasilitasi (orang) |
| | | | | | 3 | 26 | 05 | 2.01 | 05 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA | PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF | Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar | Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konsevasi Ekonomi Kreatif | Jumlah peserta workshop ekonomi kreatif yang mengikuti workshop (orang) |
| | | | Monitoring evaluasi usaha ekonomi kreatif | Jumlah pelaku ekonomi kreatif(orang) | 3 | 26 | 05 | 2.01 | 05 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA | PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF | Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar | Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konsevasi Ekonomi Kreatif | Jumlah pelaku ekonomi kreatif(orang) |
| | | | | Jumlah laporan monev (laporan) | | | | | | | | | | Jumlah laporan monev (laporan) |

| PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA | | | | | PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 | | | | | | | | | |
|---|--------|---------------|---|---|---------------------------|----|----|------|----|--|---|---|---|---|
| NO | URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM/ KEGIATAN | Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output) | KODE | | | | | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | Festival Sawahlunto Kreatif | Jumlah Event yang dilaksanakan (event) | 3 | 26 | 05 | 2.01 | 05 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA | PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF | Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasa | Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konsevasi Ekonomi Kreatif | Jumlah Event yang dilaksanakan (event) |
| | | | Program Peran Serta Kepemudaan | Jumlah organisasi kepemudaan yang aktif (organisasi) | | | | | | | | | | |
| | | | Persiapan dan Pelaksanaan Paskibraka | jumlah siswa yang terpilih dan dilatih menjadi Paskibraka (orang) | 3 | 26 | 02 | 2.01 | 01 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA | PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN | Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota | Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/kota | jumlah siswa yang terpilih dan dilatih menjadi Paskibraka (orang) |
| | | | Fasilitasi Kegiatan Kepemudaan (sesuaikan dengan skala prioritas) | jumlah kegiatan yang difasilitasi (kegiatan) | 2 | 19 | 04 | 2.01 | 08 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN | Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan | Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Kegiatan Kepramukaan | jumlah kegiatan kepemudaan yang difasilitasi (kegiatan) |
| | | | | | 3 | 26 | 04 | 2.01 | 08 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA | PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN | Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan | Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Kegiatan Kepramukaan | Jumlah Saka kepramukaan yang di fasilitasi (saka) |

| PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA | | | | | PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 | | | | | | | | | |
|---|--------|---------------|--|---|---------------------------|----|----|------|----|---------------------------------------|--|---|--|---|
| NO | URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM/ KEGIATAN | Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output) | KODE | | | | | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | Peringatan Hari Sumpah Pemuda | Terlaksananya upacara bendera memperingati sumpah pemuda(kegiatan) | 3 | 26 | 02 | 2.01 | 03 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA | PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN | Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/ Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/ Kota | Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/ kota | Terlaksananya upacara bendera memperingati sumpah pemuda(kegiatan) |
| | | | Pelaksanaan perlombaan drumband dan pelatihan drumband | Terlaksananya perlombaan drumband dan pelatihan drumband (paket) | | | | | | | | | Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/ kota | Terlaksananya perlombaan drumband dan pelatihan drumband (paket) |
| | | | Bimbingan teknis bagi Pemuda yang potensial | Jumlah peserta yang mengikuti Bimbingan teknis (orang) | 3 | 26 | 02 | 2.02 | 01 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA | PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN | Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Pemuda atau Organisasi Kepemudaan Melalui Kemitraan dengan Dunia Usaha | Jumlah peserta yang mengikuti Bimbingan teknis (orang) |
| | | | Program Pengembangan Destinasi Pariwisata | Persentase Objek Wisata Unggul (persentase) | | | | | | | | | | |
| | | | Penyusunan master plan/site plan destinasi wisata | Jumlah Dokumen master plan/site plan dan study kelayakan destinasi wisata (dokumen) | 3 | 26 | 02 | 2.01 | 02 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA | PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA | Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/ Kota | Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/ Kot | Jumlah Dokumen master plan/site plan dan study kelayakan destinasi wisata (dokumen) |

| PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA | | | | | PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 | | | | | | | | | |
|---|--------|---------------|--|---|---------------------------|----|----|------|----|---------------------------------------|---|---|---|--|
| NO | URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM/ KEGIATAN | Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output) | KODE | | | | | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | Penyusuna dokumen Riparda | Jumlah dokumen RIPARDA yang tersusun (dokumen) | | | | | | | | | Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kot | Jumlah dokumen RIPARDA yang tersusun (dokumen) |
| | | | Pengelolaan dan pemeliharaan Objek Wisata | jumlah objek wisata yang dikelola dan dipelihara (objek) | 3 | 26 | 02 | 2.03 | 04 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA | PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA | Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota | Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota | jumlah objek wisata yang dikelola dan dipelihara (objek) |
| | | | Monitoring dan evaluasi Objek Wisata (di Akomodir di sekretariat) | jumlah laporan monitoring (laporan) | 3 | 26 | 02 | 2.03 | 05 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA | PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA | Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota | Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota | jumlah laporan monitoring (laporan) |
| | | | | jumlah dokumen tingkat kepuasan pengunjung terhadap objek wisata(dokumen) | | | | | | | | | | jumlah dokumen tingkat kepuasan pengunjung terhadap objek wisata (dokumen) |
| | | | pengembangan kawasan wisata puncak cemara (sesuai dgn skala prioritas) | jumlah paket pekerjaan yang dilaksanakan (objek) | 3 | 26 | 02 | 2.03 | 03 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA | PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA | Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota | Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota | jumlah paket pekerjaan Pengembangan Kawasan Wisata Puncak Cemara yang dilaksanakan (paket) |
| | | | Penataan Kawasan Geopark Batu Runcing (sesuai dgn skala prioritas) | Jumlah destinasi yang dikembangkan(objek) | 3 | 26 | 02 | 2.03 | 03 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA | PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA | Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota | Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota | Jumlah destinasi Kawasan Geopark Baturuncing yang dikembangkan(objek) |

| PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA | | | | | PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 | | | | | | | | | |
|---|--------|---------------|--|--|---------------------------|----|----|------|----|---------------------------------------|---|--|---|--|
| NO | URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM/ KEGIATAN | Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output) | KODE | | | | | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | Pembangunan Wahana Air Sawahlunto | Jumlah paket pekerjaan yang dilaksanakan (paket) | 3 | 26 | 02 | 2.03 | 03 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA | PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA | Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota | Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota | Jumlah wahana air yang dibangun (paket) |
| | | | Fasilitasi Pengembangan Geopark Nasional sawahlunto (sesuai dgn skala prioritas) | Persentase kelengkapan dokumen pengusulan UGG (%) | 3 | 26 | 02 | 2.02 | 02 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA | PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA | Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota | Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota | Persentase kelengkapan dokumen pengusulan UGG (%) |
| | | | Operasional taman satwa kandi | Jumlah pengunjung taman satwa kandi (orang) | 3 | 26 | 02 | 2.03 | 04 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA | PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA | Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota | Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota | Jumlah pengunjung taman satwa kandi (orang) |
| | | | | Terselenggaranya taman satwa kandi dengan baik (bulan) | | | | | | | | | | Terselenggaranya taman satwa kandi dengan baik (bulan) |
| | | | Pengembangan dan pemeliharaan taman satwa kandi | Jumlah paket pekerjaan yang dilaksanakan (paket) | 3 | 26 | 02 | 2.03 | 03 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA | PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA | Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota | Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota | Jumlah paket pekerjaan yang dilaksanakan (paket) |
| | | | Program Pengembangan Kemitraan Pariwisata | persentase MoU kemitraan aktif (persentase) | | | | | | | | | | |
| | | | Pelatihan Peningkatan Kapasitas Pelaku pariwisata | Jumlah pelaku pariwisata yang bersertifikat (orang) | 3 | 26 | 05 | 2.01 | 03 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA | PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF | Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar | Pelatihan Dasar SDM Kepariwisata Bagi Masyarakat, Guru dan Pelajar (Mahasiswa dan/atau Siswa) | Jumlah pelaku pariwisata yang bersertifikat (orang) |

| PERMENDAGRI 13/RPJM/RENSTRA/RKPD/RENJA | | | | | PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 | | | | | | | | | |
|--|--------|---------------|---|--|---------------------------|----|----|------|----|---------------------------------------|--|---|---|--|
| NO | URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM/ KEGIATAN | Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output) | KODE | | | | | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | Fasilitasi Sertifikasi Pelaku dan Industri Pariwisata | Jumlah Industri pariwisata yang bersertifikasi (sertifikat) | 3 | 26 | 05 | 2.01 | 04 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA | PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF | Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar | Sertifikasi Kompetensi Bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata | Jumlah Industri pariwisata yang bersertifikasi (sertifikat) |
| | | | | Jumlah Pelaku Industri pariwisata yang bersertifikasi (sertifikat) | | | | | | | | | | Jumlah Pelaku Industri pariwisata yang bersertifikasi (sertifikat) |
| | | | Monitoring dan evaluasi Industri Kepariwisataan (di akomodir sekretariat) | Jumlah laporan monev industri kepariwisataan (laporan) | 3 | 26 | 02 | 2.02 | 05 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA | PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA | Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota | Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota | Jumlah laporan monev industri kepariwisataan (laporan) |
| | | | Peningkatan SDM Asosiasi Homestay Sawahlunto Kota Sawahlunto | Jumlah anggota asosiasi yang meningkat SDM nya (orang) | 3 | 26 | 05 | 2.01 | 03 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA | PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF | Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar | Pelatihan Dasar SDM Kepariwisataan Bagi Masyarakat, Guru dan Pelajar (Mahasiswa dan/atau Siswa) | Jumlah anggota asosiasi yang meningkat SDM nya (orang) |
| | | | Bantuan Prasarana Perbaikan Fasilitasi kamar dan toilet kepada Asosiasi Homestay Sawahlunto | Jumlah Bantuan Prasarana Perbaikan Fasilitasi kamar dan toilet kepada Asosiasi Homestay Sawahlunto (Paket) | 3 | 26 | 04 | 2.01 | 01 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA | PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL | Penyediaan Prasarana (Zona kreatif/Ruang Kreatif/Kota Kreatif) Sebagai Ruang Berekspresi, Berpromosi dan Berinteraksi Bagi Insan Kreatif di Daerah Kabupaten/Kota | Pengembangan dan Revitalisasi Prasarana Kota Kreatif | Jumlah Bantuan Prasarana Perbaikan Fasilitasi kamar dan toilet kepada Asosiasi Homestay Sawahlunto (Paket) |

| PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA | | | | | PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 | | | | | | | | | |
|---|--------|---------------|--|--|---------------------------|----|----|------|----|---------------------------------------|--|---|--|---|
| NO | URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM/ KEGIATAN | Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output) | KODE | | | | | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga | Jumlah atlit yang berprestasi(atlit) | | | | | | | | | | |
| | | | Fasilitasi kegiatan Pekan Olahraga Pelajar Daerah(POPDA) | Jumlah atlit pelajar yang berprestasi tingkat Sumbar (orang) | 2 | 19 | 03 | 2.02 | 03 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA | PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN | Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan | Jumlah atlit pelajar yang berprestasi tingkat Sumbar (orang) |
| | | | Fasilitasi Sekolah Sepakbola (SSB) Masyarakat | terfasilitasinya SSB Masyarakat(bulan) | 2 | 19 | 03 | 2.04 | 02 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA | PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN | Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga | Pengembangan Organisasi Keolahragaan | terfasilitasinya SSB Masyarakat(bulan) |
| | | | Fasilitasi Atlet Berprestasi dan Pelatih Berprestasi | Jumlah atlet dan pelatih yang difasilitasi (orang) | 2 | 19 | 03 | 2.03 | 04 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA | PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN | Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provins | Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota | Jumlah atlet dan pelatih yang difasilitasi (orang) |
| | | | Fasilitasi Kegiatan Keolahragaan Sawahlunto | Jumlah event keolahragaan yang difasilitasi (event) | 2 | 19 | 03 | 2.04 | 02 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA | PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN | Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga | Pengembangan Organisasi Keolahragaan | Jumlah event keolahragaan yang difasilitasi (event) |
| | | | Turnament Tenis Kelompok Umur Kota Sawahlunto | Jumlah peserta Turnament Tenis Kelompok Umur Kota Sawahlunto (orang) | 2 | 19 | 03 | 2.02 | 01 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA | PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN | Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota | Jumlah peserta Turnament Tenis Kelompok Umur Kota Sawahlunto (orang) |
| | | | Fasilitasi kegiatan Pekan Paralimpic Daerah | Jumlah atlit yang berprestasi tingkat Sumbar (orang) | 2 | 19 | 03 | 2.02 | 03 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA | PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN | Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan | Jumlah atlit Pekan Paralimpic yang berprestasi tingkat Sumbar (orang) |

| PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA | | | | | PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 | | | | | | | | | |
|---|--------|---------------|---|--|---------------------------|----|----|------|---------------|--|--|---|--|---|
| NO | URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM/ KEGIATAN | Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output) | KODE | | | | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| | | | Memperingati HAORNAS di Kota Sawahlunto | Jumlah peserta (orang) | 2 | 19 | 02 | 2.01 | 03 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN | Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota | Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/kota | Jumlah peserta yang memperingati HAORNAS (orang) |
| | | | Event Lomba Lari Sawahlunto | Jumlah kategori event lomba lari yang diadakan (event) | 2 | 19 | 03 | 2.02 | 01 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN | Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota | Jumlah kategori event lomba lari yang diadakan (event) |
| | | | Pembinaan cabang olahraga untuk disabilitas | Jumlah cabang olahraga yang mengikuti paralimpik (cabang) | 2 | 19 | 03 | 2.01 | 01 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN | Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan Pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha | Jumlah cabang olahraga yang mengikuti paralimpik (cabang) |

| PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA | | | | | PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 | | | | | | | | | |
|---|--------|---------------|---|---|---------------------------|----|----|------|----|--|--|---|--|--|
| NO | URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM/ KEGIATAN | Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output) | KODE | | | | | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | Perlengkapan sarana dan prasarana olahraga | Jumlah sarana dan prasarana olahraga (paket) | 2 | 19 | 03 | 2.01 | 03 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN | Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan Pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota | Jumlah sarana dan prasarana olahraga yang diadakan (paket) |
| | | | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga | Jumlah sarana dan prasarana olahraga yang sesuai standar (jumlah) | | | | | | | | | | |
| | | | Rehap Lapangan Basket Tanah Lapang Kec Lembah Segar | Jumlah lapangan basket yang direhab (paket) | 2 | 19 | 02 | 2.01 | 06 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN | Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota | Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Kab/Kota | Jumlah lapangan basket yang direhab (paket) |

| PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA | | | | | PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 | | | | | | | | | |
|---|--------|---------------|--|--|---------------------------|----|----|------|----|--|--|---|--|--|
| NO | URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM/ KEGIATAN | Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output) | KODE | | | | | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | Pagar kawat lapangan volly gunung timbago kelurahan saringan | Jumlah Pagar kawat lapangan volly gunung timbago kelurahan saringan yang terpasang (paket) | 2 | 19 | 02 | 2.01 | 06 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN | Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota | Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Kab/Kota | Jumlah Pagar kawat lapangan volly gunung timbago kelurahan saringan yang terpasang (paket) |
| | | | Bantuan sarana dan prasarana pemuda | Jumlah sarana dan prasarana pemuda yang dibantu(paket) | | | | | | | | | Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Kab/Kota | Jumlah sarana dan prasarana pemuda yang dibantu(paket) |
| | | | Pembuatan kanopi & penerangan lapangan futsal(16x9x6m)mudik air kelurahan kubang sirakuk utara | Jumlah Kanopi & penerangan lapangan yang dibuat (Paket) | 2 | 19 | 02 | 2.01 | 06 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN | Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota | Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Kab/Kota | Jumlah Kanopi & penerangan lapangan yang dibuat (Paket) |

| PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA | | | | | PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 | | | | | | | | | |
|---|--------|---------------|---|--|---------------------------|----|----|------|----|--|--|---|--|--|
| NO | URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM/ KEGIATAN | Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output) | KODE | | | | | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | Bantuan peralatan panahan pengcab panahan kota sawahlunto | Jumlah peralatan panahan pengcab panahan kota sawahlunto yang diadakan (Paket) | 2 | 19 | 02 | 2.01 | 06 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN | Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota | Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Kab/Kota | Jumlah peralatan panahan pengcab panahan kota sawahlunto yang diadakan (Paket) |
| | | | Rehap lapangan bola kaki desa lunto timur | Jumlah lapangan bola kaki desa lunto timur yang direhab (Paket) | 2 | 19 | 02 | 2.01 | 06 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN | Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota | Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Kab/Kota | Jumlah lapangan bola kaki desa lunto timur yang direhab (Paket) |
| | | | Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata | Jumlah Wisatawan (orang) | | | | | | | | | | |
| | | | Pengadaan Sarana dan Prasarana Promosi Pariwisata | Jumlah Jenis Media Promosi (jenis) | 3 | 26 | 03 | 2.01 | 01 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA | PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA | Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota | Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik dalam dan Luar Negeri | Jenis Media Promosi (jenis) |

| PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA | | | | | PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 | | | | | | | | | |
|---|--------|---------------|--|--|---------------------------|----|----|------|---------------|---------------------------------------|------------------------------|--|---|---|
| NO | URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM/ KEGIATAN | Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output) | KODE | | | | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| | | | Mengikuti Event promosi pariwisata | jumlah event promosi pariwisata yang diikuti (event) | 3 | 26 | 03 | 2.01 | 02 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA | PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA | Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota | Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik dalam dan Luar Negeri Bagi Industri Pariwisata Kabupaten/Kota | jumlah event promosi pariwisata yang diikuti (event) |
| | | | Pengembangan Jaringan Kerjasama Promosi Pariwisata | jumlah MoU aktif yang dihasilkan(MoU) | 3 | 26 | 03 | 2.01 | 04 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA | PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA | Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota | Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata dalam dan Luar Negeri | jumlah MoU aktif yang dihasilkan(MoU) |
| | | | Fasilitasi Penyelenggaraan Sport Tourism | Jumlah Event yang dilaksanakan (event) | 3 | 26 | 03 | 2.01 | 02 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA | PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA | Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota | Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik dalam dan Luar Negeri Bagi Industri Pariwisata Kabupaten/Kota | Jumlah Event yang dilaksanakan (event) |
| | | | | | | | | | | | | | | Jumlah Kunjungan Event (orang) |
| | | | Lomba Fotografi dan videografi Event Wisata | Jumlah Event yang dilaksanakan (event) | 3 | 26 | 03 | 2.01 | 02 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA | PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA | Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota | Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik dalam dan Luar Negeri Bagi Industri Pariwisata Kabupaten/Kota | Jumlah Event Fotografi dan videografi yang dilaksanakan (event) |

| PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA | | | | | PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 | | | | | | | | | |
|---|--------|---------------|---|--|---------------------------|----|----|------|----|---------------------------------------|------------------------------|--|---|---|
| NO | URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM/ KEGIATAN | Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output) | KODE | | | | | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | | | | | | | | | | | | Jumlah Peserta Event Fotografi dan videografi (orang) |
| | | | Fasilitasi Famtrip Bagi Pelaku Promosi Pariwisata | Jumlah Pelaku Promosi pariwisata (orang) | 3 | 26 | 03 | 2.01 | 02 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA | PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA | Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota | Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik dalam dan Luar Negeri Bagi Industri Pariwisata Kabupaten/Kota | Jumlah Peserta Famtrip yang difasilitasi (orang) |
| | | | Sawahlunto International Music Festival (SIMFes) | Jumlah group peserta SIMFes yang tampil (group) | 3 | 26 | 03 | 2.01 | 02 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA | PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA | Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota | Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik dalam dan Luar Negeri Bagi Industri Pariwisata Kabupaten/Kota | Jumlah group peserta SIMFes yang tampil (group) |
| | | | Fasilitasi Hari jadi Kota Sawahlunto | Jumlah Event yang dilaksanakan (event) | 3 | 26 | 03 | 2.01 | 02 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA | PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA | Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota | Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik dalam dan Luar Negeri Bagi Industri Pariwisata Kabupaten/Kota | Jumlah Event hari jadi Kota yang dilaksanakan (event) |
| | | | Festival Prof M.Yamin | Jumlah festival yang diselenggarakan (event) | | | | | | | | | | |

| PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA | | | | | PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 | | | | | | | | | |
|---|--------|---------------|--|--|---------------------------|----|----|------|----|---------------------------------------|------------------------------|---|---|---|
| NO | URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM/ KEGIATAN | Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output) | KODE | | | | | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | Pembangunan dan Peningkatan Teknologi Informasi Pemasaran Pariwisata | Jumlah teknologi informasi yang dikelola (jenis) | 3 | 26 | 03 | 2.01 | 01 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA | PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA | Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/ Kota | Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik dalam dan Luar Negeri | Jumlah teknologi informasi yang dikelola (jenis) |

SEKRETARIAT DAERAH

| PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA | | | | | PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 | | | | | | | | | |
|---|--------|---------------|---|---|---------------------------|----|----|------|---------------|---------|--|-------------------|---|---|
| NO | URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM/ KEGIATAN | Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output) | KODE | | | | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| | | | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Tersedianya sarana pelayanan administrasi perkantoran (bulan) | 4 | 01 | 01 | | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | | | Tersedianya sarana pelayanan administrasi perkantoran (bulan) |
| | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jasa surat menyurat yang disediakan (bulan) | 4 | 01 | 01 | 2.03 | 01 | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Administrasi Umum | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jasa surat menyurat yang disediakan (bulan) |
| | | | Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber daya Air dan Listrik | Jasa komunikasi sumber daya air dan listrik yang disediakan (bulan) | 4 | 01 | 01 | 2.03 | 02 | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Administrasi Umum | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jasa komunikasi sumber daya air dan listrik yang disediakan (bulan) |
| | | | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | Jasa kebersihan kantor yang disediakan (bulan) | 4 | 01 | 01 | 2.03 | 08 | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Administrasi Umum | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | Jasa kebersihan kantor yang disediakan (bulan) |
| | | | Penyediaan Alat Tulis Kantor | Alat tulis kantor yang disediakan (bulan) | 4 | 01 | 01 | 2.03 | 10 | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Administrasi Umum | Penyediaan Alat Tulis Kantor | Alat tulis kantor yang disediakan (bulan) |
| | | | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Barang cetakan dan penggandaan yang disediakan (bulan) | 4 | 01 | 01 | 2.03 | 11 | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Administrasi Umum | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Barang cetakan dan penggandaan yang disediakan (bulan) |
| | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Kantor | Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor (bulan) | 4 | 01 | 01 | 2.03 | 12 | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Administrasi Umum | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor | Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor (bulan) |

| PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA | | | | | PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 | | | | | | | | | |
|---|--------|---------------|---|--|---------------------------|----|----|------|---------------|---------|--|-----------------------|---|--|
| NO | URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM/ KEGIATAN | Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output) | KODE | | | | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| | | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Peralatan rumah tangga yang disediakan (bulan) | 4 | 01 | 01 | 2.03 | 14 | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Administrasi Umum | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Peralatan rumah tangga yang disediakan (bulan) |
| | | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Bahan logistik kantor yang disediakan (bulan) | 4 | 01 | 01 | 2.03 | 16 | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Administrasi Umum | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Bahan logistik kantor yang disediakan (bulan) |
| | | | Penyediaan Makan dan Minum | Makan dan minum rapat, dan makan pegawai tertentu yang disediakan (bulan) | 4 | 01 | 01 | 2.03 | 17 | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Administrasi Umum | Penyediaan Makanan dan Minuman | Makan dan minum rapat, dan makan pegawai tertentu yang disediakan (bulan) |
| | | | Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah | Rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah dan keluar daerah yang disediakan | 4 | 01 | 01 | 2.03 | 18 | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Administrasi Umum | Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah | Rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah dan keluar daerah yang disediakan |
| | | | Penyediaan jasa Pelayanan Pegawai Non PNS | Jasa pelayanan pegawai non PNS yang disediakan (bulan) | 4 | 01 | 01 | 2.02 | 01 | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Administrasi Keuangan | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jasa pelayanan pegawai non PNS yang disediakan (bulan) |
| | | | Penatausahaan Keuangan dan Barang | Penatausahaan keuangan dan barang yang dilaksanakan (bulan) | 4 | 01 | 01 | 2.03 | 07 | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Administrasi Umum | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | Penatausahaan keuangan dan barang yang dilaksanakan (bulan) |
| | | | Pengaturan Tamu-tamu Daerah dan Kepala Daerah | Tamu-tamu daerah dan tamu kepala daerah yang difasilitasi (bulan) | | | | | | | | | | Tamu-tamu daerah dan tamu kepala daerah yang difasilitasi (bulan) |
| | | | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (bulan) | 4 | 01 | 01 | | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | | | Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (bulan) |

| PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA | | | | | PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 | | | | | | | | | |
|---|--------|---------------|---|---|---------------------------|----|----|------|----|---------------|--|-------------------------------|--|---|
| NO | URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM/ KEGIATAN | Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output) | KODE | | | | | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional | Jumlah kendaraan dinas yang diadakan (unit) | 4 | 01 | 01 | 2.03 | 20 | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Administrasi Umum | Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional | Jumlah kendaraan dinas yang diadakan (unit) |
| | | | Pengadaan Peralatan Gedung Kantor | jumlah peralatan gedung kantor yang disediakan (jenis) | 4 | 01 | 01 | 2.03 | 24 | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Administrasi Umum | Pengadaan Peralatan Gedung Kantor | jumlah peralatan gedung kantor yang disediakan (jenis) |
| | | | Pengadaan Cenderamata | Jumlah cenderamata yang diadakan (buah) | | | | | | | | | | Jumlah cenderamata yang diadakan (buah) |
| | | | Penyediaan Biaya Rumah Tangga | Tersedianya biaya rumah tangga wako/wawako (bulan) | 4 | 01 | 04 | 2.01 | 03 | | PROGRAM ADMINISTRASI UMUM | Pelaksanaan Administrasi Umum | Pengelolaan Rumah Tangga | Tersedianya biaya rumah tangga wako/wawako (bulan) |
| | | | Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor | Terpeliharanya gedung kantor (bulan) | 4 | 01 | 01 | 2.03 | 28 | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Administrasi Umum | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | Terpeliharanya gedung kantor (bulan) |
| | | | Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional | Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional (bulan) | 4 | 01 | 01 | 2.03 | 30 | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Administrasi Umum | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional (bulan) |
| | | | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor | Terpeliharanya peralatan gedung kantor (bulan) | 4 | 01 | 01 | 2.03 | 34 | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Administrasi Umum | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor | Terpeliharanya peralatan gedung kantor (bulan) |
| | | | Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan, Wisma, Mess dan Barang Inventaris lainnya | Terpeliharanya rumah jabatan, wisma, mess dan barang inventaris lainnya (bulan) | 4 | 01 | 01 | 2.03 | 26 | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Administrasi Umum | Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan | Terpeliharanya rumah jabatan, wisma, mess dan barang inventaris (bulan) |

| PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA | | | | | PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 | | | | | | | | | |
|---|--------|---------------|---|---|---------------------------|----|----|------|----|---------------|---|---|--|---|
| NO | URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM/ KEGIATAN | Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output) | KODE | | | | | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | | | 4 | 01 | 01 | 2.03 | 33 | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Administrasi Umum | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Rumah Jabatan/Dinas | |
| | | | Pengadaan Peralatan Rumah Dinas, Wisma dan Mess | jumlah peralatan rumah dinas, wisma dan mess yang diadakan (unit) | 4 | 01 | 01 | 2.03 | 23 | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Administrasi Umum | Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas | jumlah peralatan rumah dinas, wisma dan mess yang diadakan (unit) |
| | | | Program Peningkatan Disiplin Aparatur | Tersedianya pakaian dinas untuk kepala daerah | 4 | 01 | 01 | | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | | | Tersedianya pakaian dinas untuk kepala daerah |
| | | | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Kelengkapannya | Pakaian dinas untuk wako, Wawako yang diadakan (tahun) | 4 | 01 | 01 | 2.04 | 02 | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya | Pakaian dinas untuk wako, Wawako yang diadakan (tahun) |
| | | | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan (Orang) | 4 | 01 | 01 | | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | | | Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan (Orang) |
| | | | Pendidikan dan Pelatihan Formal | Jumlah Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan (orang) | 4 | 01 | 01 | 2.04 | 09 | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Pendidikan dan Pelatihan Formal | Jumlah Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan (orang) |
| | | | Program Penyelenggaraan Persandian dalam Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah | Terwujudnya pengamanan informasi pemda (Bulan) | 2 | 21 | 02 | | | | PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI | | | Terwujudnya pengamanan informasi pemda (Bulan) |

| PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA | | | | | PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 | | | | | | | | | |
|---|--------|---------------|---|--|---------------------------|----|----|------|----|---------------|---|---|---|--|
| NO | URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM/ KEGIATAN | Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output) | KODE | | | | | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | Perumusan Kebijakan/Regulasi Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi di Pemda | Jumlah regulasi tentang persandian (Dokumen) | 2 | 21 | 02 | 2.01 | 01 | | PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI | Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan | Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah regulasi tentang persandian (Dokumen) |
| | | | Pengelolaan Sumber Daya Persandian di Pemda | Jumlah perangkat keras persandian (unit) | 2 | 21 | 02 | 2.01 | 02 | | PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI | Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan | Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah perangkat keras persandian (unit) |
| | | | Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik | Jumlah kegiatan pengamanan informasi (kegiatan) | 2 | 21 | 02 | 2.01 | 03 | | PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI | Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan | Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik | Jumlah kegiatan pengamanan informasi (kegiatan) |
| | | | Program Pengembangan Data/informasi statistik Daerah | Ketersediaan informasi data statistik daerah (dokumen) | 2 | 20 | 02 | | | | PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL | | | Ketersediaan informasi data statistik daerah (dokumen) |
| | | | Penyusunan Data Statistik Sektoral | Tersusunnya Data Statistik Sektoral (dokumen) | 2 | 20 | 02 | 2.01 | 01 | | PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL | Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan diseminasi Data Statistik Sektoral | Tersusunnya Data Statistik Sektoral (dokumen) |

| PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA | | | | | PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 | | | | | | | | | |
|---|--------|---------------|--|---|---------------------------|----|----|------|---------------|---------|--|--|---|---|
| NO | URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM/ KEGIATAN | Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output) | KODE | | | | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| | | | Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa | Persentase OPD yang menggunakan Sistem Informasi Pemerintahan yang Berbasis TIK (%) | 2 | 16 | 02 | | | | PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK | | | Persentase OPD yang menggunakan Sistem Informasi Pemerintahan yang Berbasis TIK (%) |
| | | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah kerjasama media massa (media) | 4 | 01 | 01 | 2.03 | 15 | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Administrasi Umum | Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah kerjasama media massa (media) |
| | | | Pendokumentasian Kegiatan Kota | Jumlah kegiatan yang didokumentasikan (keg) | 4 | 01 | 04 | 2.03 | 03 | | PROGRAM ADMINISTRASI UMUM | Protokol dan Komunikasi Pimpinan | Pendokumentasian Tugas Pimpinan | Jumlah kegiatan yang didokumentasikan (keg) |
| | | | Penyampaian Informasi melalui Brosur, Leaflet dan Majalah | Jumlah media penyampaian informasi (media) | 4 | 01 | 04 | 2.03 | 03 | | PROGRAM ADMINISTRASI UMUM | Protokol dan Komunikasi Pimpinan | Pendokumentasian Tugas Pimpinan | Jumlah media penyampaian informasi (media) |
| | | | Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi | Jumlah hot spot yang dikelola (titik) | 2 | 16 | 03 | 2.02 | 04 | | PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA | Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah | Jumlah hot spot yang dikelola (titik) |
| | | | Penguatan Peran PPID | Jumlah kegiatan PPID yang difasilitasi (keg) | 2 | 16 | 02 | 2.01 | 06 | | PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK | Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Pelayanan Informasi Publik | Jumlah kegiatan PPID yang difasilitasi (keg) |
| | | | Operasional Radio | Terkelolanya siaran radio sawahlunto FM (bulan) | 2 | 16 | 02 | 2.01 | 05 | | PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK | Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Pengelolaan Media Komunikasi Publik | Terkelolanya siaran radio sawahlunto FM (bulan) |

| PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA | | | | | PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 | | | | | | | | | |
|---|--------|---------------|---|--|---------------------------|----|----|------|---------------|---------|---|--|---|--|
| NO | URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM/ KEGIATAN | Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output) | KODE | | | | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| | | | Pemeliharaan dan Pengelolaan Website | Terkelolanya website pemko (bulan) | 2 | 16 | 03 | 2.02 | 04 | | PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA | Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah | Terkelolanya website pemko (bulan) |
| | | | Program Kerjasama Informasi dengan Mass Media | Jumlah media massa yang bekerjasama (media massa) | 2 | 16 | 02 | | | | PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK | | | Jumlah media massa yang bekerjasama (media massa) |
| | | | Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah | Jumlah informasi yang disebarluaskan (dokumen) | 2 | 16 | 02 | 2.01 | 06 | | PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK | Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Pelayanan Informasi Publik | Jumlah informasi yang disebarluaskan (dokumen) |
| | | | Pertemuan Antar Humas dan Jumpa Pers | Jumlah kegiatan jumpa pers (keg) | 4 | 01 | 04 | 2.03 | 02 | | PROGRAM ADMINISTRASI UMUM | Protokol dan Komunikasi Pimpinan | Fasilitasi Komunikasi Pimpinan | Jumlah kegiatan jumpa pers (keg) |
| | | | Program Peningkatan Konektifitas Intra dan Antar SKPD | Terwujudnya jumlah jaringan konektifitas jaringan informasi dan komunikasi (koneksi) | 2 | 16 | 03 | | | | PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA | | | Terwujudnya jumlah jaringan konektifitas jaringan informasi dan komunikasi (koneksi) |
| | | | Pengembangan dan Implementasi e-Government | Terkelolanya e-government (bulan) | 2 | 16 | 03 | 2.02 | 08 | | PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA | Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah | Terkelolanya e-government (bulan) |
| | | | Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah | Meningkatnya koordinasi dan pembinaan UKM (UKM) | 4 | 01 | 03 | | | | PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN | | | Meningkatnya koordinasi dan pembinaan UKM (UKM) |

| PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA | | | | | PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 | | | | | | | | | |
|---|--------|---------------|---|---|---------------------------|----|----|------|---------------|---------|--------------------------------------|---|---|---|
| NO | URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM/ KEGIATAN | Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output) | KODE | | | | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| | | | Monitoring dan Evaluasi Perkembangan Ekonomi Masyarakat dan Produk Unggulan | Jumlah laporan pelaksanaan money (laporan) | 4 | 01 | 03 | 2.01 | 03 | | PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN | Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian | Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil | Jumlah laporan pelaksanaan money (laporan) |
| | | | Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi | Jumlah BUMD yang taat aturan (BUMD) | 4 | 01 | 03 | | | | PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN | | | Jumlah BUMD yang taat aturan (BUMD) |
| | | | Pembinaan, Monitoring dan Pengawasan BUMD dan Lembaga Keuangan lainnya | Jumlah BUMD dan lembaga keuangan yang dimonitor (BUMD dan lembaga keuangan) | 4 | 01 | 03 | 2.01 | 01 | | PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN | Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian | Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD | Jumlah BUMD dan lembaga keuangan yang dimonitor (BUMD dan lembaga keuangan) |
| | | | Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Dana CSR | Tersedianya data pemanfaatan dana CSR (dok) | 4 | 01 | 03 | 2.01 | 01 | | PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN | Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian | Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD | Tersedianya data pemanfaatan dana CSR (dok) |
| | | | Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan | Persentase ketersediaan pupuk bersubsidi (%) | 4 | 01 | 03 | | | | PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN | | | Persentase ketersediaan pupuk bersubsidi (%) |
| | | | Monitoring Kegiatan Pupuk Bersubsidi | Laporan pelaksanaan pengendalian penyaluran pupuk bersubsidi (Laporan) | 4 | 01 | 03 | 2.01 | 02 | | PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN | Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian | Pengendalian dan Distribusi Perekonomian | Laporan pelaksanaan pengendalian penyaluran pupuk bersubsidi (Laporan) |
| | | | Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur (Kota) | Terwujudnya pembinaan dan pengembangan aparatur (orang) | | | | | | | | | | Terwujudnya pembinaan dan pengembangan aparatur (orang) |
| | | | Penyusunan Evaluasi Jabatan dan Kelas Jabatan | Jumlah dokumen evaluasi jabatan dan kelas jabatan (dok) | 4 | 01 | 04 | 2.02 | 01 | | PROGRAM ADMINISTRASI UMUM | Penataan Organisasi | Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan | Jumlah dokumen evaluasi jabatan dan kelas jabatan (dok) |

| PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA | | | | | PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 | | | | | | | | | |
|---|--------|---------------|---|--|---------------------------|----|----|------|---------------|---------|---|---|--|--|
| NO | URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM/ KEGIATAN | Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output) | KODE | | | | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| | | | Program Pembinaan Keagamaan | Persentase santri rumah/pondok tahfidz yang hafidz minimal 1 jus dalam setahun (%) | 4 | 01 | 02 | | | | PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | | | Persentase santri rumah/pondok tahfidz yang hafidz minimal 1 jus dalam setahun (%) |
| | | | | Persentase imam masjid yang berkualitas (%) | | | | | | | | | | Persentase imam masjid yang berkualitas (%) |
| | | | Jasa bagi guru TPQ/TPSQ, Imam dan Muazin Masjid Nagari, Gharim Masjid dan mushalla, dan Penyelenggara Jenazah | Jumlah guru TPQ/TPSQ, Imam dan Muazin Masjid Nagari, Gharim Masjid dan mushalla, dan Penyelenggara Jenazah (orang) | 4 | 01 | 02 | 2.02 | 01 | | PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat | Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual | Jumlah guru TPQ/TPSQ, Imam dan Muazin Masjid Nagari, Gharim Masjid dan mushalla, dan Penyelenggara Jenazah (orang) |
| | | | Pelaksanaan Safari Ramadhan Kota | Jumlah pertemuan silaturahmi tim safari ramadhan dengan masyarakat (kali) | 4 | 01 | 02 | 2.02 | 03 | | PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat | Evaluasi, Pelaksanaan Kebijakan dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat | Jumlah pertemuan silaturahmi tim safari ramadhan dengan masyarakat (kali) |
| | | | Fasilitasi Pertemuan Pemerintah dengan tokoh Adat Tokoh Agama dan Bundo Kandung | Jumlah pertemuan tokoh adat, agama dan bundo kandung (kali) | 4 | 01 | 02 | 2.02 | 03 | | PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat | Evaluasi, Pelaksanaan Kebijakan dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat | Jumlah pertemuan tokoh adat, agama dan bundo kandung (kali) |
| | | | Tabligh Akbar Peringatan Hari Besar Islam | Jumlah hari besar islam yang diperingati (keg) | 4 | 01 | 02 | 2.02 | 01 | | PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat | Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual | Jumlah hari besar islam yang diperingati (keg) |
| | | | Penunjang Jama'ah Haji Kota Sawahlunto | Jumlah jama'ah haji (orang) | 4 | 01 | 02 | 2.02 | 01 | | PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat | Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual | Jumlah jama'ah haji (orang) |

| PERMENDAGRI 13/RPJM/RENSTRA/RKPD/RENJA | | | | | PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 | | | | | | | | | |
|--|--------|---------------|---|---|---------------------------|----|----|------|----|---------------|---|---|--|---|
| NO | URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM/ KEGIATAN | Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output) | KODE | | | | | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | Pesantren Ramadhan bagi pelajar kota sawahlunto | Jumlah pelajar yang mengikuti pesantren ramadhan (orang) | 4 | 01 | 02 | 2.02 | 01 | | PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat | Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual | Jumlah pelajar yang mengikuti pesantren ramadhan (orang) |
| | | | Fasilitasi Pengiriman Kafilah MTQ Kota Sawahlunto ke tingkat Provinsi | Jumlah kafilah MTQ Kota Sawahlunto (orang) | 4 | 01 | 02 | 2.02 | 01 | | PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat | Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual | Jumlah kafilah MTQ Kota Sawahlunto (orang) |
| | | | Lomba Didikan Subuh Tk. Kota dan Provinsi | Jumlah kelompok didikan subuh yang mengikuti lomba (kelompok) | 4 | 01 | 02 | 2.02 | 01 | | PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat | Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual | Jumlah kelompok didikan subuh yang mengikuti lomba (kelompok) |
| | | | Pembinaan dan Pelatihan Remaja Masjid | Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan (orang) | 4 | 01 | 02 | 2.02 | 01 | | PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat | Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual | Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan (orang) |
| | | | Buka Puasa dan Open House pada Bulan Ramadhan dan Hari Raya | Jumlah kegiatan yang dilaksanakan (keg) | 4 | 01 | 02 | 2.02 | 01 | | PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat | Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual | Jumlah kegiatan yang dilaksanakan (keg) |
| | | | Pelatihan Imam Masjid | Jumlah imam masjid yang disertifikasi setara LC (orang) | 4 | 01 | 02 | 2.02 | 01 | | PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat | Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual | Jumlah imam masjid yang disertifikasi setara LC (orang) |
| | | | Program Pemasaran dan Pengembangan Pariwisata | Jumlah kegiatan promosi pariwisata (keg) | | | | | | | | | | Jumlah kegiatan promosi pariwisata (keg) |
| | | | Penunjang Hari Jadi Kota | Jumlah kegiatan yang terfasilitasi (keg) | 4 | 01 | 04 | 2.01 | 02 | | Program Administrasi Umum | Pelaksanaan Administrasi Umum | Pengelolaan Perlengkapan | Jumlah kegiatan yang terfasilitasi (keg) |

| PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA | | | | | PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 | | | | | | | | | |
|---|--------|---------------|--|--|---------------------------|----|----|------|---------------|---------|---|---|--|---|
| NO | URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM/ KEGIATAN | Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output) | KODE | | | | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| | | | Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan | Jumlah rumah yang mengibarkan bendera merah putih pada hari besar nasional (rumah) | | | | | | | | | Jumlah rumah yang mengibarkan bendera merah putih pada hari besar nasional (rumah) | |
| | | | Peringatan Hari Besar Nasional | Jumlah Hari besar nasional yang diperingati (keg) | 4 | 01 | 02 | 2.02 | 03 | | PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat | Evaluasi, Pelaksanaan Kebijakan dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat | Jumlah Hari besar nasional yang diperingati (keg) |
| | | | Program Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan | Tersedianya Laporan Kepala Daerah (Laporan) | 4 | 01 | 02 | | | | PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | | | Tersedianya Laporan Kepala Daerah (Laporan) |
| | | | Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah (LKPJ) Tahunan | Jumlah Dokumen yang disusun (dok) | 4 | 01 | 02 | 2.01 | 01 | | PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | Administrasi Tata Pemerintahan | Penataan Administrasi Pemerintahan | Jumlah Dokumen yang disusun (dok) |
| | | | Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Tahunan | Jumlah Dokumen yang disusun (dok) | 4 | 01 | 02 | 2.01 | 01 | | PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | Administrasi Tata Pemerintahan | Penataan Administrasi Pemerintahan | Jumlah Dokumen yang disusun (dok) |
| | | | Penyusunan Buku Pengabdian Walikota/Wakil Walikota Sawahlunto Masa Jabatan 2018-2023 | Jumlah Dokumen yang disusun (dok) | 4 | 01 | 02 | 2.01 | 01 | | PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | Administrasi Tata Pemerintahan | Penataan Administrasi Pemerintahan | Jumlah Dokumen yang disusun (dok) |
| | | | Program Peningkatan Kerjasama antar Daerah | Terbinanya kerjasama antar daerah, pihak ketiga dan lembaga lainnya (dok) | 4 | 01 | 02 | | | | PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | | | Terbinanya kerjasama antar daerah, pihak ketiga dan lembaga lainnya (dok) |

| PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA | | | | | PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 | | | | | | | | | |
|---|--------|---------------|--|--|---------------------------|----|----|------|----|---------------|---|--------------------------------|--------------------------------------|--|
| NO | URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM/ KEGIATAN | Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output) | KODE | | | | | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | Fasilitasi Kerjasama Antar Daerah, Pihak Ketiga dan Lembaga Lainnya | Jumlah Kerjasama kegiatan yang dilaksanakan (dok) | 4 | 01 | 02 | 2.04 | 01 | | PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | Fasilitasi Kerjasama Daerah | Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri | Jumlah Kerjasama kegiatan yang dilaksanakan (dok) |
| | | | Program Peningkatan SDM Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) | Meningkatnya Pengetahuan aparat desa/kelurahan dlm mengelola pelayanan adm | 4 | 01 | 02 | | | | PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | | | Meningkatnya Pengetahuan aparat desa/kelurahan dlm mengelola pelayanan adm |
| | | | Bimbingan dan Pelatihan Aparat Kelurahan se-Kota Sawahlunto | Jumlah peserta bimbingan dan pelatihan (orang) | 4 | 01 | 02 | 2.01 | 02 | | PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | Administrasi Tata Pemerintahan | Pengelolaan Administrasi Kewilayahan | Jumlah peserta bimbingan dan pelatihan (orang) |
| | | | Penilaian Kompetensi Camat Berprestasi se-Kota Sawahlunto | Jumlah camat yang dinilai (orang) | 4 | 01 | 02 | 2.01 | 02 | | PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | Administrasi Tata Pemerintahan | Pengelolaan Administrasi Kewilayahan | Jumlah camat yang dinilai (orang) |
| | | | Rapat Koordinasi Pemerintahan Terdepan | Jumlah rapat yang dilaksanakan (kali) | 4 | 01 | 02 | 2.01 | 02 | | PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | Administrasi Tata Pemerintahan | Pengelolaan Administrasi Kewilayahan | Jumlah rapat yang dilaksanakan (kali) |
| | | | Program Penataan administrasi Pertanahan dan Geospasial | Terwujudnya Pembakuan Nama Rupa Bumi Buatan (dok) | | | | | | | | | | Terwujudnya Pembakuan Nama Rupa Bumi Buatan (dok) |
| | | | Pembakuan Nama Rupa Bumi Buatan | Jumlah unsur rupa bumi yang dibakukan | | | | | | | | | | Jumlah unsur rupa bumi yang dibakukan |
| | | | Program Pengendalian Pelaksanaan Program dan Kegiatan Pembangunan | Tersedianya laporan monitoring pelaksanaan program dan kegiatan | 4 | 01 | 03 | | | | PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN | | | Tersedianya laporan monitoring pelaksanaan program dan kegiatan |

| PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA | | | | | PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 | | | | | | | | | |
|---|--------|---------------|--|--|---------------------------|----|----|------|----|---------------|--|---------------------------|--|--|
| NO | URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM/ KEGIATAN | Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output) | KODE | | | | | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan | Jumlah monitoring yang dilaksanakan | 4 | 01 | 03 | 2.02 | 02 | | PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN | Administrasi Pembangunan | Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan | Jumlah monitoring yang dilaksanakan |
| | | | Program Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah | Meningkatnya kualitas penyusunan dokumen SAKIP (Prediket) | 4 | 01 | 04 | | | | PROGRAM ADMINISTRASI UMUM | | | Meningkatnya kualitas penyusunan dokumen SAKIP (Prediket) |
| | | | Penyusunan LKJiP | Jumlah LKJiP Kota yang tersusun (dok) | 4 | 01 | 04 | 2.02 | 03 | | PROGRAM ADMINISTRASI UMUM | Penataan Organisasi | Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi | Jumlah LKJiP Kota yang tersusun (dok) |
| | | | Penyusunan perjanjian Kerja | Jumlah Dokumen Perjanjian Kota yang tersusun (dok) | 4 | 01 | 04 | 2.02 | 03 | | PROGRAM ADMINISTRASI UMUM | Penataan Organisasi | Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi | Jumlah Dokumen Perjanjian Kota yang tersusun (dok) |
| | | | Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah | Tersedianya Laporan Keuangan (laporan) | 4 | 01 | 01 | | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | | | Tersedianya Laporan Keuangan (laporan) |
| | | | Laporan Realisasi Bulanan dan Laporan Tahunan | Jumlah Laporan Keuangan yang tersusun (laporan) | 4 | 01 | 01 | 2.02 | 07 | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Administrasi Keuangan | Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran | Jumlah Laporan Keuangan yang tersusun (laporan) |
| | | | Program Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa | Meningkatnya pengelolaan pemilihan penyedia barang/jasa | 4 | 01 | 03 | | | | PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN | | | Meningkatnya pengelolaan pemilihan penyedia barang/jasa |
| | | | Fasilitasi Operasional Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa | Jumlah kegiatan pengadaan brg/jasa yang diproses melalui ULP | 4 | 01 | 03 | 2.03 | 01 | | PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN | Pengadaan Barang dan Jasa | Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa | Jumlah kegiatan pengadaan brg/jasa yang diproses melalui ULP |

| PERMENDAGRI 13/RPJM/RENSTRA/RKPD/RENJA | | | | | PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 | | | | | | | | | |
|--|--------|---------------|---|--|---------------------------|----|----|------|----|---------------|--------------------------------------|---------------------------|--|--|
| NO | URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM/ KEGIATAN | Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output) | KODE | | | | | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | Pengelolaan sistem informasi dan Tata Laksana Pemilihan Penyedia Pengadaan Brg/Jasa | Jumlah laporan pengelolaan sistem | 4 | 01 | 03 | 2.03 | 01 | | PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN | Pengadaan Barang dan Jasa | Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa | Jumlah laporan pengelolaan sistem |
| | | | Program Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik | Meningkatnya layanan pengadaan secara elektronik | 4 | 01 | 03 | | | | PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN | | | Meningkatnya layanan pengadaan secara elektronik |
| | | | Fasilitasi pemanfaatan aplikasi yang dikelola layanan pengadaan secara elektronik (LPSE) | Jumlah pengadaan brg/jasa yang dikelola secara elektronik melalui LPSE | 4 | 01 | 03 | 2.03 | 02 | | PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN | Pengadaan Barang dan Jasa | Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik | Jumlah pengadaan brg/jasa yang dikelola secara elektronik melalui LPSE |
| | | | Monitoring dan evaluasi penerapan standar pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik | Jumlah standar pengelolaan LPSE ter-update | 4 | 01 | 03 | 2.03 | 02 | | PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN | Pengadaan Barang dan Jasa | Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik | Jumlah standar pengelolaan LPSE ter-update |
| | | | Pengembangan media informasi dan pengelolaan jaringan telekomunikasi LPSE | Jumlah laporan pengelolaan media informasi | 4 | 01 | 03 | 2.03 | 02 | | PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN | Pengadaan Barang dan Jasa | Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik | Jumlah laporan pengelolaan media informasi |
| | | | Program Pembinaan Sumber Daya Manusia, Kelembagaan, pendampingan dan Konsultasi Pengadaan Barang/Jasa | Meningkatnya keahlian dan keterampilan pelaku pengadaan barang/jasa | 4 | 01 | 03 | | | | PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN | | | Meningkatnya keahlian dan keterampilan pelaku pengadaan barang/jasa |
| | | | Pendampingan dalam permasalahan pengadaan brg/jasa | Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan pendampingan | 4 | 01 | 03 | 2.03 | 03 | | PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN | Pengadaan Barang dan Jasa | Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa | Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan pendampingan |
| | | | Pengembangan kompetensi SDM pengelola pengadaan brg/jasa | Jmlah peserta bimbingan teknis | 4 | 01 | 03 | 2.03 | 03 | | PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN | Pengadaan Barang dan Jasa | Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa | Jmlah peserta bimbingan teknis |

| PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA | | | | | PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 | | | | | | | | | |
|---|--------|---------------|---|--|---------------------------|----|----|------|----|---------------|--------------------------------------|---------------------------|--|--|
| NO | URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM/ KEGIATAN | Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output) | KODE | | | | | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | Pemantapan struktur organisasi pengadaan brg/jasa | Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan | 4 | 01 | 03 | 2.03 | 03 | | PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN | Pengadaan Barang dan Jasa | Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa | Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan |
| | | | Penyediaan literatur pustaka dan peraturan pengadaan brg/jasa | Jumlah bahan bacaan pustaka dan hukum | 4 | 01 | 03 | 2.03 | 03 | | PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN | Pengadaan Barang dan Jasa | Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa | Jumlah bahan bacaan pustaka dan hukum |
| | | | Rapat koordinasi dan konsultasi pengadaan brg/jasa | Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan | 4 | 01 | 03 | 2.03 | 03 | | PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN | Pengadaan Barang dan Jasa | Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa | Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan |
| | | | Program Penataan Kelembagaan dan Organisasi Daerah | Jumlah kelembagaan perangkat daerah yang tepat fungsi dan tepat ukuran | 4 | 01 | 04 | | | | PROGRAM ADMINISTRASI UMUM | | | Jumlah kelembagaan perangkat daerah yang tepat fungsi dan tepat ukuran |
| | | | Analisis Perkembangan dan Permasalahan Kelembagaan | Jumlah kelembagaan yang dianalisa | 4 | 01 | 04 | 2.02 | 01 | | PROGRAM ADMINISTRASI UMUM | Penataan Organisasi | Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan | Jumlah kelembagaan yang dianalisa |
| | | | Fasilitasi Pelaksanaan Forum Komunikasi Keorganisasian Daerah | Jumlah peserta forum komunikasi keorganisasian | 4 | 01 | 04 | 2.02 | 01 | | PROGRAM ADMINISTRASI UMUM | Penataan Organisasi | Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan | Jumlah peserta forum komunikasi keorganisasian |
| | | | Penyusunan SOTK Sesuai Peraturan Baru | Jumlah produk hukum daerah | 4 | 01 | 04 | 2.02 | 01 | | PROGRAM ADMINISTRASI UMUM | Penataan Organisasi | Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan | Jumlah produk hukum daerah |
| | | | Program Penataan Ketatalaksanaan dan Reformasi Birokrasi Daerah | Jumlah OPD yang melaksanakan pelayanan berdasarkan SPP | 4 | 01 | 04 | | | | PROGRAM ADMINISTRASI UMUM | | | Jumlah OPD yang melaksanakan pelayanan berdasarkan SPP |
| | | | Fasilitasi Penyusunan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada OPD | Jumlah OPD yang melakukan SPM | 4 | 01 | 04 | 2.02 | 02 | | PROGRAM ADMINISTRASI UMUM | Penataan Organisasi | Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana | Jumlah OPD yang melakukan SPM |

| PERMENDAGRI 13/RPJM/RENSTRA/RKPD/RENJA | | | | | PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 | | | | | | | | | |
|--|--------|---------------|---|---|---------------------------|----|----|------|----|---------------|---|--|---|---|
| NO | URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM/ KEGIATAN | Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output) | KODE | | | | | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | Bimtek Penggunaan Roadmap Grand Design Reformasi Birokrasi di Kota Sawahlunto | Jumlah Peserta bimtek | 4 | 01 | 04 | 2.02 | 03 | | PROGRAM ADMINISTRASI UMUM | Penataan Organisasi | Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi | Jumlah Peserta bimtek |
| | | | Pendampingan Inovasi Pelayanan Publik | Jumlah OPD yang mendapatkan pendampingan inovasi pelayanan publik | 4 | 01 | 04 | 2.02 | 02 | | PROGRAM ADMINISTRASI UMUM | Penataan Organisasi | Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana | Jumlah OPD yang mendapatkan pendampingan inovasi pelayanan publik |
| | | | Bimtek dan Evaluasi Fasilitasi Penyusunan SOP dan SPP pada OPD | Jumlah OPD yang mengikuti penyusunan SOP dan SPP | 4 | 01 | 04 | 2.02 | 02 | | PROGRAM ADMINISTRASI UMUM | Penataan Organisasi | Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana | Jumlah OPD yang mengikuti penyusunan SOP dan SPP |
| | | | Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | Jumlah OPD yang dilakukan pengukuran IKM | 4 | 01 | 04 | 2.02 | 02 | | PROGRAM ADMINISTRASI UMUM | Penataan Organisasi | Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana | Jumlah OPD yang dilakukan pengukuran IKM |
| | | | Program Penataan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Produk Hukum yang ditetapkan | 4 | 01 | 02 | | | | PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | | | Jumlah Produk Hukum yang ditetapkan |
| | | | Penyusunan produk Hukum Daerah | Jumlah perda yang disusun | 4 | 01 | 02 | 2.03 | 01 | | PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | Koordinasi Penyusunan Kebijakan Daerah | Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah | Jumlah perda yang disusun |
| | | | Publik Hearing dan Sosialisasi Produk Hukum | Jumlah peserta publik hearing ranperda dan sosialisasi perda | 4 | 01 | 02 | 2.03 | 01 | | PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | Koordinasi Penyusunan Kebijakan Daerah | Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah | Jumlah peserta publik hearing ranperda dan sosialisasi perda |
| | | | Penyelenggaraan Jaringan Dokumentasi Hukum | Jumlah produk hukum yang diupload di jaringan dokumentasi hukum (JDH) | 4 | 01 | 02 | 2.03 | 03 | | PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | Koordinasi Penyusunan Kebijakan Daerah | Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum | Jumlah produk hukum yang diupload di jaringan dokumentasi hukum (JDH) |
| | | | Penyusunan Dokumentasi Produk Hukum | Jumlah dokumentasi produk hukum daerah yang disusun | 4 | 01 | 02 | 2.03 | 03 | | PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | Koordinasi Penyusunan Kebijakan Daerah | Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum | Jumlah dokumentasi produk hukum daerah yang disusun |

| PERMENDAGRI 13/RPJM/RENSTRA/RKPD/RENJA | | | | | PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 | | | | | | | | | |
|--|--------|---------------|--|--|---------------------------|----|----|------|----|---------------|---|--|---|--|
| NO | URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM/ KEGIATAN | Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output) | KODE | | | | | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | Penyuluhan Hukum Terpadu | Jumlah peserta penyuluhan hukum terpadu | 4 | 01 | 02 | 2.03 | 03 | | PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | Koordinasi Penyusunan Kebijakan Daerah | Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum | Jumlah peserta penyuluhan hukum terpadu |
| | | | Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan | Jumlah peserta sosialisasi | 4 | 01 | 02 | 2.03 | 03 | | PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | Koordinasi Penyusunan Kebijakan Daerah | Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum | Jumlah peserta sosialisasi |
| | | | Pembinaan dan Evaluasi Produk Hukum Daerah | Jumlah produk hukum daerah yang dibuat OPD sesuai dengan aturan yang diterbitkan | 4 | 01 | 02 | 2.03 | 01 | | PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | Koordinasi Penyusunan Kebijakan Daerah | Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah | Jumlah produk hukum daerah yang dibuat OPD sesuai dengan aturan yang diterbitkan |
| | | | Fasilitasi Penilaian Desa/Kelurahan Sadar Hukum Tk. Kec/Kota/Prop/Nasional | Jumlah desa/kel yang diikuti dalam kegiatan | 4 | 01 | 02 | 2.03 | 01 | | PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | Koordinasi Penyusunan Kebijakan Daerah | Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah | Jumlah desa/kel yang diikuti dalam kegiatan |
| | | | Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat | Jumlah konsultasi jasa hukum (kali) | 4 | 01 | 02 | | | | PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | | | Jumlah konsultasi jasa hukum (kali) |
| | | | | Jumlah penanganan perkara/kasus (kasus) | | | | | | | | | | Jumlah penanganan perkara/kasus (kasus) |
| | | | Fasilitasi Advokasi Bantuan Hukum | Jumlah penanganan perkara (kasus) | 4 | 01 | 02 | 2.03 | 02 | | PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | Koordinasi Penyusunan Kebijakan Daerah | Fasilitasi Bantuan Hukum | Jumlah penanganan perkara (kasus) |

SEKRETARIAT DPRD

| PERMENDAGRI 13/RPJM/RENSTRA/RKPD/RENJA | | | | | PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 | | | | | | | | | | |
|--|--------|---------------|--|---|---------------------------|----|----|------|----|---------------|---------|------------------------------------|-------------------|--|---|
| NO | URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM/KEGIATAN | Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output) | KODE | | | | | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| | | | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran (bulan) | 4 | 02 | 01 | | | | | Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | |
| | | | Penyediaan jasa surat menyurat | Tersedianya jasa surat menyurat (bulan) | 4 | 02 | 01 | 2.03 | | | | | Administrasi Umum | | |
| | | | | | 4 | 02 | 01 | 2.03 | 01 | | | | | Penyediaan jasa surat menyurat | Tersedianya jasa surat menyurat (bulan) |
| | | | Penyediaan makanan dan minuman | Tersedianya makan dan minum rapat dan tamu Pimpinan DPRD (bulan) | 4 | 02 | 01 | 2.03 | 17 | | | | | Penyediaan makanan dan minuman | Tersedianya makan dan minum rapat dan tamu Pimpinan DPRD (bulan) |
| | | | Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air & Listrik | Tagihan listrik dan telepon kantor yang harus dibayar (bulan) | 4 | 02 | 01 | 2.03 | 02 | | | | | Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air & Listrik | Tagihan listrik dan telepon kantor yang harus dibayar (bulan) |
| | | | Penyediaan jasa kebersihan kantor | Tersedianya alat kebersihan kantor dan cleaning service (bulan) | 4 | 02 | 01 | 2.03 | 08 | | | | | Penyediaan jasa kebersihan kantor | Tersedianya alat kebersihan kantor dan cleaning service (bulan) |
| | | | Penyediaan Alat Tulis Kantor | Tersedianya alat tulis kantor (bulan) | 4 | 02 | 01 | 2.03 | 10 | | | | | Penyediaan Alat Tulis Kantor | Tersedianya alat tulis kantor (bulan) |
| | | | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Tersedianya kebutuhan fotocopy barang cetakan dan penjilidan (bulan) | 4 | 02 | 01 | 2.03 | 11 | | | | | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Tersedianya kebutuhan fotocopy barang cetakan dan penjilidan (bulan) |
| | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan kantor | Tersedianya kebutuhan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan kantor (bulan) | 4 | 02 | 01 | 2.03 | 12 | | | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan kantor | Tersedianya kebutuhan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan kantor (bulan) |

| PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA | | | | | PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 | | | | | | | | | |
|---|--------|---------------|--|--|---------------------------|----|----|------|----|---------------|---------|----------|--|--|
| NO | URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM/KEGIATAN | Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output) | KODE | | | | | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | Penyediaan bahan logistik kantor | Tersedianya bahan logistik kantor (bulan) | 4 | 02 | 01 | 2.03 | 16 | | | | Penyediaan bahan logistik kantor | Tersedianya bahan logistik kantor (bulan) |
| | | | Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar Daerah | Tersedianya biaya perjalanan dinas luar kota dan luar provinsi (bulan) | 4 | 02 | 01 | 2.03 | 18 | | | | Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar Daerah | Tersedianya biaya perjalanan dinas luar kota dan luar provinsi (bulan) |
| | | | Pelayanan Non PNS | Tersedianya pegawai non PNS (bulan) | | | | | | | | | | |
| | | | Penatausahaan Keuangan & Barang | Terpenuhi penatausahaan keuangan dan barang (bulan) | 4 | 02 | 01 | 2.03 | 07 | | | | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | Terpenuhi penatausahaan keuangan dan barang (bulan) |
| | | | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | Tersedianya bahan bacaan (bulan) | 4 | 02 | 01 | 2.03 | 15 | | | | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | Tersedianya bahan bacaan (bulan) |
| | | | Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur | Terpenuhi sarana dan prasarana aparatur (bulan) | | | | | | | | | | |
| | | | Pengadaan Peralatan Gedung Kantor | Jumlah peralatan yang dibeli (bulan) | 4 | 02 | 01 | 2.03 | 24 | | | | Pengadaan Peralatan Gedung Kantor | Jumlah peralatan yang dibeli (bulan) |
| | | | Pengadaan Cendera Mata | Tersedianya Cendera Mata (paket) | | | | | | | | | | |
| | | | Pemeliharaan Rutin Berkala gedung kantor | Terpeliharanya gedung kantor dan rumah dinas (bulan) | 4 | 02 | 01 | 2.03 | 28 | | | | Pemeliharaan Rutin Berkala gedung kantor | Terpeliharanya gedung kantor dan rumah dinas (bulan) |
| | | | Pemeliharaan Rutin Berkala kendaraan dinas/operasional | Terpeliharanya kendaraan dinas operasional (bulan) | 4 | 02 | 01 | 2.03 | 30 | | | | Pemeliharaan Rutin Berkala kendaraan dinas/operasional | Terpeliharanya kendaraan dinas operasional (bulan) |
| | | | Pemeliharaan Rutin Berkala peralatan gedung kantor | Terpeliharanya peralatan gedung kantor (bulan) | 4 | 02 | 01 | 2.03 | 34 | | | | Pemeliharaan Rutin Berkala peralatan gedung kantor | Terpeliharanya peralatan gedung kantor (bulan) |

| PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA | | | | | PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 | | | | | | | | | |
|---|--------|---------------|--|--|---------------------------|----|----|------|----|---------------|---------|---|---|---|
| NO | URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM/KEGIATAN | Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output) | KODE | | | | | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | Pemeliharaan Rutin Berkala Mebeleur | Tersedianya Mebeleur Kantor (bulan) | 4 | 02 | 01 | 2.03 | 35 | | | | Pemeliharaan Rutin Berkala Mebeleur | Tersedianya Mebeleur Kantor (bulan) |
| | | | Penyediaan biaya rumah tangga | Tersedianya biaya rumah tangga (bulan) | | | | | | | | | | |
| | | | Program peningkatan disiplin aparatur | Meningkatnya disiplin aparatur (bulan) | 4 | 02 | 01 | 2.04 | | | | Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | | |
| | | | Pengadaan Pakaian Dinas berserta Kelengkapannya | Jumlah pakaian dinas yang disediakan (bulan) | 4 | 02 | 01 | 2.04 | 02 | | | | Pengadaan Pakaian Dinas berserta Kelengkapannya | Jumlah pakaian dinas yang disediakan (bulan) |
| | | | Pengadaan Pakaian khusus hari-hari tertentu | Jumlah pakaian khusus yang disediakan (orang) | 4 | 02 | 01 | 2.04 | 05 | | | | Pengadaan Pakaian khusus hari-hari tertentu | Jumlah pakaian khusus yang disediakan (orang) |
| | | | Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur | Persentase aparatur yang meningkat SDM nya | | | | | | | | | | |
| | | | Pendidikan dan Pelatihan Formal | Jumlah aparatur yang mengikuti diklat (bulan) | 4 | 02 | 01 | 2.04 | 09 | | | | Pendidikan dan Pelatihan Formal | Jumlah aparatur yang mengikuti diklat (bulan) |
| | | | Study Banding | Jumlah study banding yang dilaksanakan (kali) | | | | | | | | | | |
| | | | | | 2 | 16 | | | | | | Urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika | | |
| | | | Program kerjasama informasi dengan media massa | Jumlah media massa yang bekerjasama (media) | 2 | 16 | 02 | | | | | Program Informasi dan komunikasi Publik | | |

| PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA | | | | | PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 | | | | | | | | | |
|---|--------|---------------|--|---|---------------------------|----|----|------|----|---------------|--|--|--|---|
| NO | URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM/KEGIATAN | Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output) | KODE | | | | | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | | | 2 | 16 | 02 | 2.01 | | | | Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kab/kota | | |
| | | | Penyebarluasan informasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah | Jumlah media massa yang bekerjasama | 2 | 16 | 02 | 2.01 | 05 | | | | Pengelolaan Media Komunikasi Publik | Jumlah media massa yang bekerjasama |
| | | | Pertemuan antar humas dan jumpa pers | Jumlah kegiatan jumpa pers | 2 | 16 | 02 | 2.01 | 06 | | | | pelayanan Informasi Publik | Jumlah kegiatan jumpa pers |
| | | | Program pengembangan komunikasi, informasi dengan media massa | Persentase OPD yang menggunakan sistem Informasi Pemerintahan yang berbasis TIK | | | | | | | | | | |
| | | | Penyampaian informasi melalui brosur, leaflet, dan masalah | Jumlah media penyampaian informasi | 2 | 16 | 02 | 2.01 | 04 | | | | Pengelolaan konten dan perencanaan media komunikasi publik | Jumlah media penyampaian informasi |
| | | | Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah | Persentase jumlah Perda ditetapkan tepat waktu | 4 | 02 | 03 | | | | Program dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD | | | |
| | | | Pembahasan Ranperda | Jumlah Perda yang dibahas dan tersedianya kebutuhan rapat pembahasan (buah) | 4 | 02 | 03 | 2.01 | | | Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD | | | |

| PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA | | | | | PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 | | | | | | | | | |
|---|--------|---------------|---|---|---------------------------|----|----|------|----|---------------|---------|---|--|---|
| NO | URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM/KEGIATAN | Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output) | KODE | | | | | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | | | 4 | 02 | 03 | 2.01 | 02 | | | | Pembahasan rancangan perda | Jumlah Perda yang dibahas dan tersedianya kebutuhan rapat pembahasan (buah) |
| | | | Rapat-rapat Penunjang Alat Kelengkapan Dewan dan Fraksi | Jumlah rapat-rapat yang dilaksanakan (kali) | 4 | 02 | 03 | 2.01 | 04 | | | | Fasilitasi penyusunan naskah Akademik | Jumlah rapat-rapat yang dilaksanakan (kali) |
| | | | | | 4 | 02 | 03 | 2.01 | | | | Penyerapan dan penghimpunan Aspirasi Masyarakat | | |
| | | | Penunjang Kegiatan Reses DPRD ke Daerah Pemilihan | Terlaksananya Reses DPRD ke daerah Pemilihan (kali) | 4 | 02 | 03 | 2.01 | 03 | | | | Pelaksanaan Reses | Terlaksananya Reses DPRD ke daerah Pemilihan (kali) |
| | | | | | 4 | 02 | 03 | 2.04 | | | | Peningkatan Kpasitas DPRD | | |
| | | | Peningkatan kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD | Meningkatnya SDM pimpinan dan Anggota DPRD (bulan) | 4 | 02 | 03 | 2.04 | 02 | | | | Bimbingan Teknis DPRD | Meningkatnya SDM pimpinan dan Anggota DPRD (bulan) |
| | | | Pengganti Antar Waktu (PAW) | Terlaksananya Pelantikan antar waktu anggota DPRD (kali) | | | | | | | | | | |
| | | | Penyediaan premi asuransi kesehatan Pimpinan dan Anggota DPRD | Ketersediaan jaminan kesehatan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD (orang) | | | | | | | | | | |
| | | | Penyusunan Ranperda Inisiatif | Jumlah Ranperda Inisiatif DPRD | 4 | 02 | 03 | 2.01 | 01 | | | | penyusunan dan pembahasan program pembentukan Peraturan Daerah | Jumlah Ranperda Inisiatif DPRD |

| PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA | | | | | PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 | | | | | | | | | |
|---|--------|---------------|---|--|---------------------------|----|----|------|----|---------------|---------|---|-------------------------------------|--|
| NO | URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM/KEGIATAN | Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output) | KODE | | | | | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | | | 4 | 02 | 03 | 2.05 | | | | Penyerapan dan penghimpunan Aspirasi Masyarakat | | |
| | | | Kunjungan kerja dan konsultasi Pimpinan dan Anggota DPRD | Jumlah kunjungan kerja dan konsultasi Pimpinan/Anggota DPRD | 4 | 02 | 03 | 2.05 | 01 | | | | Kunjungan Kerja dalam Daerah | Jumlah kunjungan kerja dan konsultasi Pimpinan/Anggota DPRD |
| | | | | | 4 | 02 | 03 | 2.04 | | | | Peningkatan Kpasitas DPRD | | |
| | | | Himpunan Agenda DPRD | Terhimpunnya agenda kegiatan DPRD (bulan) | 4 | 02 | 03 | 2.04 | 07 | | | | Penyusunan Program Kerja DPRD | Terhimpunnya agenda kegiatan DPRD (bulan) |
| | | | MCU Anggota DPRD | Jumlah dokumentasi Anggota DPRD yang dihimpun/paket pembelian buku | 4 | 02 | 03 | 2.04 | 03 | | | | Publikasi dan Dokumentasi Dewan | Jumlah dokumentasi Anggota DPRD yang dihimpun/paket pembelian buku |
| | | | Pembahasan Pertanggungjawaban Kepala Daerah | Jumlah kegiatan yang dibahas (keg) | 4 | 02 | 03 | 2.02 | | | | Pembahasan Kebijakan Anggaran | | Jumlah kegiatan yang dibahas (keg) |
| | | | | | 4 | 02 | 03 | 2.02 | 06 | | | | Pembahasan Pertanggungjawaban APBD | |
| | | | Pembahasan Penyusunan APBD | Jumlah dokumen yang dibahas (dok) | 4 | 02 | 03 | 2.02 | 01 | | | | Pembahasan KUA dan PPAS | Jumlah dokumen yang dibahas (dok) |
| | | | | | 4 | 02 | 03 | 2.02 | 02 | | | | Pembahasan KUPA dan PPAS Perubahan | |
| | | | | | 4 | 02 | 03 | 2.02 | 03 | | | | Pembahasan APBD | |
| | | | | | 4 | 02 | 03 | 2.02 | 04 | | | | Pembahasan APBD Perubahan | |
| | | | Hearing/ Dialog dan Kedinasan Penjabat Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat | Jumlah dialog yang dilaksanakan (kali) | 4 | 02 | 03 | 2.04 | 06 | | | | Penyelenggaraan hubungan masyarakat | Jumlah dialog yang dilaksanakan (kali) |

BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

| PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA | | | | | PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 | | | | | | | | | |
|---|--------|---------------|---|--|---------------------------|----|----|------|---------------|-------------|--|-----------------------|---|--|
| NO | URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM/KEGIATAN | Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output) | KODE | | | | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| | | | PROGRAM PELAYANAN ADM PERKANTORAN | TERSEDINYA SARANA PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN (BULAN) | 5 | 01 | 01 | | | PERENCANAAN | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | | | URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH BERJALAN LANCAR DAN TERTIB (BULAN) |
| | | | | | 2 | x | 01 | 2.02 | 01 | | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Administrasi Keuangan | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Gaji dan tunjangan PNS Lainnya (Bulan) |
| | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jasa surat menyurat yang disediakan (bulan) | 5 | 01 | 01 | 2.03 | 01 | Perencanaan | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Administrasi Umum | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jasa surat menyurat yang disediakan (bulan) |
| | | | | | | | | | | | | | | Honorarium Non PNS untuk Staf Administrasi Umum sebanyak 3 orang (bulan) |
| | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan (bulan) | 5 | 01 | 01 | 2.03 | 02 | Perencanaan | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Administrasi Umum | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan (bulan) |
| | | | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | Jasa kebersihan kantor yang disediakan (bulan) | 5 | 01 | 01 | 2.03 | 08 | Perencanaan | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Administrasi Umum | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | Jasa kebersihan kantor yang disediakan (bulan) |
| | | | | | | | | | | | | | | Honorarium Non PNS untuk Staf Kebersihan Kantor sebanyak 1 orang (bulan) |

| PERMENDAGRI 13/RPJM/RENSTRA/RKPD/RENJA | | | | | PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 | | | | | | | | | | |
|--|--------|---------------|--|---|---------------------------|----|----|------|----|---------------|--|-----------------------|--|---|--|
| NO | URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM/KEGIATAN | Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output) | KODE | | | | | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| | | | Penyediaan Alat Tulis Kantor | Alat Tulis Kantor yang disediakan (bulan) | 5 | 01 | 01 | 2.03 | 10 | Perencanaan | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Administrasi Umum | Penyediaan Alat Tulis Kantor | Alat Tulis Kantor yang disediakan (bulan) | |
| | | | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Barang cetakan dan penggandaan yang disediakan (bulan) | 5 | 01 | 01 | 2.03 | 11 | Perencanaan | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Administrasi Umum | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Barang cetakan dan penggandaan yang disediakan (bulan) | |
| | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan kantor | Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan (bulan) | 5 | 01 | 01 | 2.03 | 12 | Perencanaan | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Administrasi Umum | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan (bulan) | |
| | | | Penyediaan Makanan dan Minuman | Makanan dan minuman yang disediakan (bulan) | 5 | 01 | 01 | 2.03 | 17 | Perencanaan | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Administrasi Umum | Penyediaan Makanan dan Minuman | Makanan dan minuman yang disediakan (bulan) | |
| | | | Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah yang difasilitasi (bulan) | 5 | 01 | 01 | 2.03 | 18 | Perencanaan | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Administrasi Umum | Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah yang difasilitasi (bulan) | |
| | | | Penyediaan Jasa Pelayanan Pegawai Non PNS | Jumlah tenaga Pegawai Non PNS yang difasilitasi (orang) | 5 | 01 | 01 | 2.02 | 01 | Perencanaan | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Administrasi Keuangan | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah tenaga Pegawai Non PNS yang difasilitasi (orang) | |
| | | | Penatausahaan Keuangan dan Barang | Penatausahaan Keuangan dan Barang yang dilaksanakan (bulan) | 5 | 01 | 01 | 2.03 | 07 | Perencanaan | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Administrasi Umum | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | Penatausahaan Keuangan dan Barang yang dilaksanakan (bulan) | |

| PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA | | | | | PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 | | | | | | | | | |
|---|--------|---------------|---|---|---------------------------|----|----|------|---------------|-------------|--|-------------------|--|---|
| NO | URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM/KEGIATAN | Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output) | KODE | | | | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| | | | | | | | | | | | | | Honorarium Non PNS untuk Staf Administrasi Keuangan Penatausahaan Keuangan dan Barang sebanyak 1 orang (bulan) | |
| | | | Penyediaan Dokumentasi dan Dekorasi (tidak ada di Permendagri 90 & Anggarannya ditumpangkan di belanja pengadaan peralatan gedung kantor) | Dokumentasi dan dekorasi yang disediakan (bulan) | | | | | | | | | | |
| | | | PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRARASANA APARATUR | PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR (BULAN) | 5 | 01 | 01 | | | PERENCANAAN | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | | | |
| | | | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | Gedung kantor yang dipelihara (bulan) | 5 | 01 | 01 | 2.03 | 28 | Perencanaan | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Administrasi Umum | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | Gedung kantor yang dipelihara (bulan) |
| | | | Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Dinas / Operasional | Jumlah kendaraan roda empat dan roda dua yang dipelihara (unit) | 5 | 01 | 01 | 2.03 | 30 | Perencanaan | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Administrasi Umum | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | Jumlah kendaraan roda empat dan roda dua yang dipelihara (unit) |
| | | | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor | Peralatan gedung kantor yang dipelihara (bulan) | 5 | 01 | 01 | 2.03 | 34 | Perencanaan | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Administrasi Umum | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor | Peralatan gedung kantor yang dipelihara (bulan) |

| PERMENDAGRI 13/RPJM/RENSTRA/RKPD/RENJA | | | | | PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 | | | | | | | | | | |
|--|--------|---------------|--|---|---------------------------|----|----|------|----|---------------|--|---|---------------------------------------|--|--|
| NO | URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM/KEGIATAN | Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output) | KODE | | | | | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| | | | Pengadaan Peralatan Gedung Kantor | Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan (unit) | 5 | 01 | 01 | 2.03 | 24 | Perencanaan | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Administrasi Umum | Pengadaan Peralatan Gedung Kantor | Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan (unit) | |
| | | | Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional | Jumlah kendaraan dinas/operasional yang diadakan (unit) - Roda empat = 1 unit - Roda dua = 5 unit | 5 | 01 | 01 | 2.03 | 20 | | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Administrasi Umum | Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional | Jumlah kendaraan dinas/operasional roda empat dan roda dua yang diadakan (unit) | |
| | | | PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR | PERSENTASE APARATUR YANG MENINGKAT SDM NYA (%) | 5 | 01 | 01 | | | PERENCANAAN | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | | | | |
| | | | Pendidikan dan Pelatihan Formal | Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal (Orang) | 5 | 01 | 01 | 2.04 | 09 | Perencanaan | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Pendidikan dan Pelatihan Formal | Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal (Orang) | |
| | | | Pendidikan Pelatihan Formal Bagi Fungsional Tertentu | Aparatur yang mengikuti pendidikan pelatihan formal bagi fungsional tertentu (Orang) | 5 | 01 | 01 | 2.04 | 09 | Perencanaan | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Pendidikan dan Pelatihan Formal | Aparatur yang mengikuti pendidikan pelatihan formal bagi fungsional tertentu (Orang) | |
| | | | Program Perencanaan Pembangunan Daerah | Jumlah Laporan pengendalian pembangunan dana DAK, Dekon, TP dan UB Kota Sawahlunto | | | | | | | | | | | |

| PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA | | | | | PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 | | | | | | | | | |
|---|--------|---------------|---|---|---------------------------|----|----|------|---------------|-------------|---|---|---|--|
| NO | URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM/KEGIATAN | Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output) | KODE | | | | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| | | | Koordinasi Pengendalian Pelaporan Pelaksanaan DAK, Dekon dan Tugas Pembantuan | Persentase ketersediaan dokumen perencanaan pembangun daerah tahunan dan lima tahunan (Dokumen) | | | | | | | | | | |
| | | | PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | PERSENTASE KONSISTENSI PROGRAM RPJMD KEDALAM RKPD (%) | 5 | 01 | 02 | | | PERENCANAAN | PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH | | | |
| | | | Penyusunan RKPD Kota Sawahlunto | Jumlah dokumen RKPD yang disusun (dokumen) | 5 | 01 | 02 | 2.01 | 01 | Perencanaan | Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah | Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Kabupaten/Kota | Jumlah dokumen RKPD yang disusun (dokumen) |
| | | | Penyusunan RKPD Perubahan Kota Sawahlunto | Jumlah Dokumen RKPD Perubahan yang disusun (dokumen) | 5 | 01 | 02 | 2.01 | 01 | Perencanaan | Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah | Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Kabupaten/Kota | Jumlah dokumen RKPD Perubahkan yang disusun (dokumen) |
| | | | Penyusunan Revisi RPJMD Kota Sawahlunto 2018-2023 | Jumlah Dokumen Revisi RPJMD Sawahlunto yang disusun (dokumen) | 5 | 01 | 02 | 2.01 | 01 | Perencanaan | Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah | Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Kabupaten/Kota | Jumlah Dokurnen Revisi RPJMD Sawahlunto yang disusun (dokumen) |

| PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA | | | | | PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 | | | | | | | | | |
|---|--------|---------------|--|--|---------------------------|----|----|------|----|---------------|---|---|---|---|
| NO | URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM/KEGIATAN | Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output) | KODE | | | | | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | Pengelolaan E-Planning | Jumlah Aplikasi yang dikelola (Aplikasi) | 5 | 01 | 02 | 2.01 | 01 | Perencanaan | Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah | Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Kabupaten/Kota | Jumlah Aplikasi yang dikelola (Aplikasi) |
| | | | | | | | | | | | | | | Honorarium Non PNS untuk Staf Programmer E-Plannig sebanyak 1 orang (bulan) |
| | | | Koordinasi Pelaksanaan SDG's | Jumlah laporan pencapaian SDG's (Laporan) | 5 | 01 | 02 | 2.03 | 04 | Perencanaan | Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah | Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Daerah | Penyusunan Pelaporan Capaian Pembangunan Daerah | Jumlah laporan pencapaian SDG's (Laporan) |
| | | | Monitoring dan Evaluasi Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah | Jumlah Laporan Monitoring yang dilaksanakan (Laporan) | 5 | 01 | 02 | 2.03 | 01 | Perencanaan | Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah | Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Daerah | Monitoring Program dan Kegiatan Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Monitoring yang dilaksanakan (Laporan) |
| | | | | | | | | | | | | | | Honorarium Non PNS untuk Staf Programmer E-Monev sebanyak 1 orang (bulan) |
| | | | | Jumlah Laporan Evaluasi yang dilaksanakan (Laporan) | 5 | 01 | 02 | 2.03 | 03 | Perencanaan | Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah | Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Daerah | Evaluasi Capaian Program/Kegiatan Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi yang dilaksanakan (Laporan) |

| PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA | | | | | PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 | | | | | | | | | |
|---|--------|---------------|---|--|---------------------------|----|----|------|---------------|-----------------------------|---|--|---|--|
| NO | URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM/KEGIATAN | Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output) | KODE | | | | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| | | | Pelaksanaan Koordinasi Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi (tidak ada dalam permendagri 90) | Jumlah koordinasi yang dilaksanakan (bulan) | | | | | | | | | | |
| | | | PROGRAM PENGEMBANGAN DATA / INFORMASI STATISTIK | PERSENTASE KEGIATAN DATA PROFIL (%) | 5 | 01 | 02 | | | PERENCANAAN | PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH | | | |
| | | | Penyusunan Data Pokok Perencanaan | Jumlah data perencanaan yang tersedia (Data) | 5 | 01 | 02 | 2.01 | 07 | Perencanaan | Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah | Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah | Pengelolaan Data dan Informasi Pembangunan Daerah | Jumlah data perencanaan yang tersedia (Data) |
| | | | Pengembangan Data Base Perencanaan Berbasis SIG | Jumlah Website Geografi Informasi Spasial yang dikelola (Unit) | 5 | 01 | 05 | 2.03 | 01 | Perencanaan | Program Perencanaan Infrastruktur Dan Kewilayahan | Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Keciaptakaryaan dan Kewilayahan | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Keciaptakaryaan dan Kewilayahan | Jumlah Website Geografi Informasi Spasial yang dikelola (Unit) |
| | | | Fasilitasi Tenaga Ahli/Dewan Pakar | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Tenaga Ahli (Laporan) | 5 | 01 | 02 | 2.01 | 06 | Perencanaan | Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah | Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah | Identifikasi Permasalahan Pembangunan Daerah | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Tenaga Ahli (Laoran) |
| | | | PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN BIDANG LITBANG | JUMLAH DOKUMEN YANG DISUSUN (DOK) | 5 | 05 | 02 | | | PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN | PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | | | |

| PERMENDAGRI 13/RPJM/RENSTRA/RKPD/RENJA | | | | | PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 | | | | | | | | | |
|--|--------|---------------|---|--|---------------------------|----|----|------|----|-----------------------------|--|------------------------------------|--|--|
| NO | URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM/KEGIATAN | Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output) | KODE | | | | | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | Penguatan Sistem Inovasi Daerah | Jumlah Dokumen Inovasi yang disusun (Dokumen) | 5 | 05 | 02 | 2.04 | 03 | Penelitian Dan Pengembangan | Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah | Pengembangan Inovasi dan Teknologi | Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif | Jumlah Dokumen Inovasi yang disusun (Dokumen) |
| | | | PROGRAM PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN KAJIAN DAERAH | JUMLAH KEGIATAN YANG DIFASILITASI (KEG) | 5 | 05 | 02 | | | PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN | PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | | | |
| | | | Koordinasi Kegiatan Kelitbangan (tidak direkomendasikan) | Jumlah Kegiatan Kelitbangan | | | | | | | | | | |
| | | | Fasilitasi Kerjasama Kelitbangan (tidak direkomendasikan) | Jumlah Kegiatan Kelitbangan | | | | | | | | | | |
| | | | Fasilitasi Kegiatan Penelitian/Lomba Iptek dan Kelitbangan (tidak direkomendasikan) | Jumlah Kegiatan Kelitbangan | | | | | | | | | | |
| | | | Pengkajian Kebijakan Pembangunan Daerah | Jumlah dokumen pengkajian yang disusun (dokumen) | 5 | 05 | 02 | 2.04 | 01 | Penelitian Dan Pengembangan | Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah | Pengembangan Inovasi dan Teknologi | Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi | Jumlah dokumen pengkajian yang disusun (dokumen) |
| | | | | | | | | | | | | | | Honorarium Non PNS untuk Staf Subbid Pengkajian dan Analisa Pembangunan sebanyak 1 orang (bulan) |

| PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA | | | | | PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 | | | | | | | | | |
|---|--------|---------------|---|---|---------------------------|----|----|------|---------------|-------------|---|---|---|--|
| NO | URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM/KEGIATAN | Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output) | KODE | | | | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| | | | PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI | PERSENTASE KONSISTENSI PROGRAM RPJMD BIDANG EKONOMI KE DALAM RKPD (%) | 5 | 01 | 04 | | | PERENCANAAN | PROGRAM PERENCANAAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM | | | |
| | | | Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi | Jumlah Laporan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Ekonomi (Laporan) | 5 | 01 | 04 | 2.01 | 01 | Perencanaan | Program Perencanaan Perekonomian Dan Sumber Daya Alam | Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Perekonomian | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Perekonomian | Jumlah Laporan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Ekonomi (Laporan) |
| | | | | | 5 | 01 | 04 | 2.01 | 02 | Perencanaan | Program Perencanaan Perekonomian Dan Sumber Daya Alam | Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Perekonomian | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Perekonomian | Jumlah Laporan Asistensi Perencanaan Pembangunan Ekonomi (Laporan) |
| | | | | | 5 | 01 | 04 | 2.01 | 03 | Perencanaan | Program Perencanaan Perekonomian Dan Sumber Daya Alam | Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Perekonomian | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Perekonomian | Jumlah Laporan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Ekonomi (Laporan) |

| PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA | | | | | PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 | | | | | | | | | |
|---|--------|---------------|------------------|--|---------------------------|----|----|------|----|---------------|---|---|--|--|
| NO | URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM/KEGIATAN | Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output) | KODE | | | | | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | | | 5 | 01 | 04 | 2.02 | 01 | Perencanaan | Program Perencanaan Perekonomian Dan Sumber Daya Alam | Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Ekonomi Kreatif | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Ekonomi Kreatif | Jumlah Laporan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Ekonomi Kreatif (Laporan) |
| | | | | | 5 | 01 | 04 | 2.02 | 02 | Perencanaan | Program Perencanaan Perekonomian Dan Sumber Daya Alam | Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Ekonomi Kreatif | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Ekonomi Kreatif | Jumlah Laporan Asistensi Perencanaan Pembangunan Ekonomi Kreatif (Laporan) |
| | | | | | 5 | 01 | 04 | 2.02 | 03 | Perencanaan | Program Perencanaan Perekonomian Dan Sumber Daya Alam | Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Ekonomi Kreatif | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Ekonomi Kreatif | Jumlah Laporan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Ekonomi Kreatif (Laporan) |
| | | | | | 5 | 01 | 04 | 2.03 | 01 | Perencanaan | Program Perencanaan Perekonomian Dan Sumber Daya Alam | Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Sumber Daya Alam | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Sumber Daya Alam | Jumlah Laporan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Sumber Daya Alam (Laporan) |

| PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA | | | | | PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 | | | | | | | | | |
|---|--------|---------------|---|--|---------------------------|----|----|------|----|---------------|--|---|---|---|
| NO | URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM/KEGIATAN | Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output) | KODE | | | | | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | | | 5 | 01 | 04 | 2.03 | 02 | Perencanaan | Program Perencanaan Perekonomian Dan Sumber Daya Alam | Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Sumber Daya Alam | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Sumber Daya Alam | Jumlah Laporan Asistensi Perencanaan Pembangunan Sumber Daya Alam (Laporan) |
| | | | | | 5 | 01 | 04 | 2.03 | 03 | Perencanaan | Program Perencanaan Perekonomian Dan Sumber Daya Alam | Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Sumber Daya Alam | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Sumber Daya Alam | Jumlah Laporan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Sumber Daya Alam (Laporan) |
| | | | Pelaksanaan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah | Jumlah Laporan Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (Laporan) | 5 | 01 | 03 | 2.03 | 01 | Perencanaan | Program Perencanaan Pemerintahan Dan Pembangunan Manusia | Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Kesejahteraan Masyarakat | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Kesejahteraan Masyarakat | Jumlah Laporan Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah/Kesejahteraan Masyarakat (Laporan) |
| | | | | | 5 | 01 | 03 | 2.03 | 02 | Perencanaan | Program Perencanaan Pemerintahan Dan Pembangunan Manusia | Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Kesejahteraan Masyarakat | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Kesejahteraan Masyarakat | Jumlah Laporan Asistensi Penanggulangan Kemiskinan Daerah/Kesejahteraan Masyarakat (Laporan) |

| PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA | | | | | PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 | | | | | | | | | |
|---|--------|---------------|-----------------------------------|---|---------------------------|----|----|------|----|---------------|--|---|---|--|
| NO | URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM/KEGIATAN | Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output) | KODE | | | | | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | | | 5 | 01 | 03 | 2.03 | 03 | Perencanaan | Program Perencanaan Pemerintahan Dan Pembangunan Manusia | Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Kesejahteraan Masyarakat | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Kesejahteraan Masyarakat | Jumlah Laporan Pelaksanaan Monev Penanggulangan Kemiskinan Daerah/Kesejahteraan Masyarakat (Laporan) |
| | | | Forum Pengembangan Ekonomi Daerah | Jumlah Laporan Koordinasi Forum Pengembangan Ekonomi Daerah (Laporan) | 5 | 01 | 04 | 2.01 | 01 | Perencanaan | Program Perencanaan Perekonomian Dan Sumber Daya Alam | Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Perekonomian | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Perekonomian | Jumlah Laporan Koordinasi Forum Pengembangan Ekonomi Daerah (Laporan) |
| | | | | | | | | | | | | | | Honorarium Non PNS untuk Staf Bidang Perencanaan Bidang Ekonomi sebanyak 2 orang (bulan) |
| | | | | | 5 | 01 | 04 | 2.01 | 02 | Perencanaan | Program Perencanaan Perekonomian Dan Sumber Daya Alam | Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Perekonomian | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Perekonomian | Jumlah Laporan Asistensi Forum Pengembangan Ekonomi Daerah (Laporan) |

| PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA | | | | | PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 | | | | | | | | | |
|---|--------|---------------|---|---|---------------------------|----|----|------|---------------|-------------|---|--|---|--|
| NO | URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM/KEGIATAN | Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output) | KODE | | | | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| | | | PROGRAM PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG | PERSENTASE KESESUAIAN PEMANFAATAN RUANG | 5 | 01 | 05 | | | PERENCANAAN | PROGRAM PERENCANAAN INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN | | | |
| | | | Fasilitasi proses Ranperda RTRW 2012-2032 | Jumlah Perda RTRW yang ditetapkan (Perda) | 5 | 01 | 05 | 2.03 | 01 | Perencanaan | Program Perencanaan Infrastruktur Dan Kewilayahan | Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Keciaptakaryaan dan Kewilayahan | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Keciaptakaryaan dan Kewilayahan | Jumlah Perda RTRW yang ditetapkan (Perda) |
| | | | Identifikasi Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang Sesuai dengan Pola dan Struktur Ruang | Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi yang dilakukan (Laporan) | 5 | 01 | 05 | 2.03 | 03 | Perencanaan | Program Perencanaan Infrastruktur Dan Kewilayahan | Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Keciaptakaryaan dan Kewilayahan | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Keciaptakaryaan dan Kewilayahan | Jumlah Laporan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Keciaptakaryaan dan Kewilayahan (Laporan) |
| | | | PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | PERSENTASE KONSISTENSI PROGRAM RPJMD KEDALAM RKPD (%) | 5 | 01 | 05 | | | PERENCANAAN | PROGRAM PERENCANAAN INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN | | | |
| | | | | PERSENTASE KETERSEDIAAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUNAN DAN LIMA TAHUN | | | | | | | | | | |

| PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA | | | | | PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 | | | | | | | | | |
|---|--------|---------------|--|---|---------------------------|----|----|------|----|---------------|---|---|---|---|
| NO | URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM/KEGIATAN | Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output) | KODE | | | | | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Infrastruktur Kota | Jumlah Laporan Koordinasi Bidang Infrastruktur Kota (Laporan) | 5 | 01 | 05 | 2.01 | 01 | Perencanaan | Program Perencanaan Infrastruktur Dan Kewilayahan | Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup | Jumlah Laporan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup (Laporan) |
| | | | | | 5 | 01 | 05 | 2.01 | 02 | Perencanaan | Program Perencanaan Infrastruktur Dan Kewilayahan | Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup | Jumlah Laporan Asistensi Perencanaan Pembangunan Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup (Laporan) |
| | | | | | 5 | 01 | 05 | 2.01 | 03 | Perencanaan | Program Perencanaan Infrastruktur Dan Kewilayahan | Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup | Jumlah Laporan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup (Laporan) |

| PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA | | | | | PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 | | | | | | | | | |
|---|--------|---------------|------------------|--|---------------------------|----|----|------|----|---------------|---|--|--|--|
| NO | URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM/KEGIATAN | Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output) | KODE | | | | | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | | | 5 | 01 | 05 | 2.02 | 01 | Perencanaan | Program Perencanaan Infrastruktur Dan Kewilayahan | Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Kebinamargaan dan Perhubungan | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Kebinamargaan dan Perhubungan | Jumlah Laporan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Kebinamargaan dan Perhubungan (Laporan) |
| | | | | | 5 | 01 | 05 | 2.02 | 02 | Perencanaan | Program Perencanaan Infrastruktur Dan Kewilayahan | Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Kebinamargaan dan Perhubungan | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Kebinamargaan dan Perhubungan | Jumlah Laporan Asistensi Perencanaan Pembangunan Kebinamargaan dan Perhubungan (Laporan) |
| | | | | | 5 | 01 | 05 | 2.02 | 03 | Perencanaan | Program Perencanaan Infrastruktur Dan Kewilayahan | Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Kebinamargaan dan Perhubungan | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Kebinamargaan dan Perhubungan | Jumlah Laporan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Kebinamargaan dan Perhubungan (Laporan) |

| PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA | | | | | PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 | | | | | | | | | |
|---|--------|---------------|------------------|--|---------------------------|----|----|------|----|---------------|---|--|---|--|
| NO | URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM/KEGIATAN | Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output) | KODE | | | | | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | | | 5 | 01 | 05 | 2.03 | 01 | Perencanaan | Program Perencanaan Infrastruktur Dan Kewilayahan | Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Keciaptakaryaan dan Kewilayahan | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Keciaptakaryaan dan Kewilayahan | Jumlah Laporan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Keciaptakaryaan dan Kewilayahan (Laporan) |
| | | | | | | | | | | | | | | Honorarium Non PNS untuk Staf Subbid Penataan Keciaptakaryaan sebanyak 1 orang (bulan) |
| | | | | | 5 | 01 | 05 | 2.03 | 02 | Perencanaan | Program Perencanaan Infrastruktur Dan Kewilayahan | Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Keciaptakaryaan dan Kewilayahan | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Keciaptakaryaan dan Kewilayahan | Jumlah Laporan Asistensi Perencanaan Pembangunan Keciaptakaryaan dan Kewilayahan (Laporan) |
| | | | | | 5 | 01 | 05 | 2.03 | 03 | Perencanaan | Program Perencanaan Infrastruktur Dan Kewilayahan | Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Keciaptakaryaan dan Kewilayahan | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Keciaptakaryaan dan Kewilayahan | Jumlah Laporan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Keciaptakaryaan dan Kewilayahan (Laporan) |

| PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA | | | | | PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 | | | | | | | | | |
|---|--------|---------------|--|--|---------------------------|----|----|------|---------------|-------------|---|--|---|--|
| NO | URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM/KEGIATAN | Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output) | KODE | | | | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| | | | Penyusunan Dokumen Memorandum Program Sanitasi Kota (tidak ada dalam permendagri 90) | Jumlah Dokumen Sanitasi Yang di Susun (Dok) | | | | | | | | | | |
| | | | PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN PRASARANA WILAYAH DAN SUMBER DAYA ALAM | PERSENTASE KONSISTENSI PROGRAM RPJMD BIDANG FISIK KEDALAM RKPD (%) | 5 | 01 | 05 | | | PERENCANAAN | PROGRAM PERENCANAAN INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN | | | |
| | | | | KETERSEDIAAN MASTER PLAN AIR LIMBAH | | | | | | | | | | |
| | | | Penyusunan Dokumen Pengembangan Penerangan Jalan Umum (tidak ada dalam permendagri 90) | Jumlah Dokumen pengembangan penerangan jalan umum Kota Sawahlunto yang disusun (Dok) | | | | | | | | | | |
| | | | Penyusunan Database Bangunan Pemerintah (tidak ada dalam permendagri 90) | Jumlah Database Bangunan Pemerintahan yang disusun (Dok) | | | | | | | | | | |
| | | | Fasilitasi Program Nasional Berbasis Masyarakat | Jumlah Kegiatan Nasional yang di Fasilitasi | 5 | 01 | 05 | 2.03 | 01 | Perencanaan | Program Perencanaan Infrastruktur Dan Kewilayahan | Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Keciaptakaryaan dan Kewilayahan | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Keciaptakaryaan dan Kewilayahan | Jumlah Kegiatan Nasional yang diFasilitasi |

| PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA | | | | | PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 | | | | | | | | | |
|---|--------|---------------|--|--|---------------------------|----|----|------|---------------|-------------|---|---|---|--|
| NO | URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM/KEGIATAN | Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output) | KODE | | | | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| | | | | Jumlah Kegiatan Berbasis Masyarakat yang di Fasilitasi (keg) | | | | | | | | | | |
| | | | PROGRAM PENCAPAIAN DAERAH PERBATASAN | DOKUMEN PENCAPAIAN DAERAH PERBATASAN | | | | | | | | | | |
| | | | Penyusunan Dokumen Perencanaan Kawasan Perbatasan Perdesaan (tidak direkomendasikan) | Jumlah Dokumen Kawasan Perbatasan Perdesaan yang disusun (Dokumen) | | | | | | | | | | |
| | | | PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | PERSENTSE KONSISTENSI PROGRAM RPJMD KEDALAM RKPD (%) | 5 | 01 | 03 | | | PERENCANAAN | PROGRAM PERENCANAAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA | | | |
| | | | Forum Konsultasi Publik | Jumlah Berita Acara Forum Konsultasi Publik (Laporan) | 5 | 01 | 02 | 2.01 | 01 | Perencanaan | Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah | Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Kabupaten/Kota | Jumlah Berita Acara Forum Konsultasi Publik (Laporan) |
| | | | Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Kota Sawahlunto | Jumlah Berita Acara Pembahasan Musrenbang RKPD (Laporan) | 5 | 01 | 02 | 2.01 | 03 | Perencanaan | Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah | Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah | Koordinasi Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota | Jumlah Berita Acara Pembahasan Musrenbang RKPD (Laporan) |

| PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA | | | | | PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 | | | | | | | | | |
|---|--------|---------------|---|---|---------------------------|----|----|------|----|---------------|---|---|--|---|
| NO | URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM/KEGIATAN | Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output) | KODE | | | | | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | Pengendalian perencanaan pembangunan desa (merupakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa) | Jumlah Perencanaan Desa yang dikendalikan (Desa) | | | | | | | | | | |
| | | | PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | PERSENTSE KONSISTENSI PROGRAM RPJMD KEDALAM RKPD (%) | 5 | 01 | 02 | | | PERENCANAAN | PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH | | | |
| | | | Verifikasi Renja OPD | Jumlah Berita Acara Pembahasan Renja (Berita Acara) | 5 | 01 | 02 | 2.01 | 05 | Perencanaan | Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah | Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah | Pengintegrasian Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Rencana Perangkat Daerah dan Rencana Pembangunan Lainnya | Jumlah Berita Acara Pembahasan Renja (Berita Acara) |
| | | | | | | | | | | | | | | Jumlah koordinasi yang dilaksanakan (bulan) |
| | | | PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN SOSIAL BUDAYA | PERSENTSE KONSISTENSI PROGRAM RPJMD BIDANG SOSIAL BUDAYA KEDALAM RKPD (%) | 5 | 01 | 03 | | | PERENCANAAN | PROGRAM PERENCANAAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA | | | |

| PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA | | | | | PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 | | | | | | | | | |
|---|--------|---------------|---|--|---------------------------|----|----|------|----|---------------|--|--|---|---|
| NO | URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM/KEGIATAN | Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output) | KODE | | | | | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi (Laporan) | 5 | 01 | 03 | 2.01 | 01 | Perencanaan | Program Perencanaan Pemerintahan Dan Pembangunan Manusia | Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Pemerintahan | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Pemerintahan | Jumlah Laporan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Pemerintahan (Laporan) |
| | | | | | 5 | 01 | 03 | 2.01 | 02 | Perencanaan | Program Perencanaan Pemerintahan Dan Pembangunan Manusia | Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Pemerintahan | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Pemerintahan | Jumlah Laporan Asistensi Perencanaan Pembangunan Pemerintahan (Laporan) |
| | | | | | 5 | 01 | 03 | 2.01 | 03 | Perencanaan | Program Perencanaan Pemerintahan Dan Pembangunan Manusia | Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Pemerintahan | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Pemerintahan | Jumlah Laporan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Pemerintahan (Laporan) |
| | | | | | 5 | 01 | 03 | 2.02 | 01 | Perencanaan | Program Perencanaan Pemerintahan Dan Pembangunan Manusia | Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Pembangunan Manusia | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Pembangunan Manusia | Jumlah Laporan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Manusia (Laporan) |

| PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA | | | | | PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 | | | | | | | | | |
|---|--------|---------------|------------------|--|---------------------------|----|----|------|----|---------------|--|---|--|--|
| NO | URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM/KEGIATAN | Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output) | KODE | | | | | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | | | | | | | | | | | | Honorarium Non PNS untuk Staf Bidang Perencanaan Pembangunan Sosbud sebanyak 1 orang (bulan) |
| | | | | | 5 | 01 | 03 | 2.02 | 02 | Perencanaan | Program Perencanaan Pemerintahan Dan Pembangunan Manusia | Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Pembangunan Manusia | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Pembangunan Manusia | Jumlah Laporan Asistensi Perencanaan Pembangunan Manusia (Laporan) |
| | | | | | 5 | 01 | 03 | 2.02 | 03 | Perencanaan | Program Perencanaan Pemerintahan Dan Pembangunan Manusia | Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Pembangunan Manusia | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Pembangunan Manusia | Jumlah Laporan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Manusia (Laporan) |
| | | | | | 5 | 01 | 03 | 2.03 | 01 | Perencanaan | Program Perencanaan Pemerintahan Dan Pembangunan Manusia | Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Kesejahteraan Masyarakat | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Kesejahteraan Masyarakat | Jumlah Laporan Koordinasi Perencanaan Kesejahteraan Masyarakat (Laporan) |

| PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA | | | | | PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 | | | | | | | | | |
|---|--------|---------------|--|---|---------------------------|----|----|------|----|---------------|--|---|---|---|
| NO | URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM/KEGIATAN | Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output) | KODE | | | | | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | | | 5 | 01 | 03 | 2.03 | 02 | Perencanaan | Program Perencanaan Pemerintahan Dan Pembangunan Manusia | Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Kesejahteraan Masyarakat | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Kesejahteraan Masyarakat | Jumlah Laporan Asistensi Perencanaan Pembangunan Kesejahteraan Masyarakat (Laporan) |
| | | | | | 5 | 01 | 03 | 2.03 | 03 | Perencanaan | Program Perencanaan Pemerintahan Dan Pembangunan Manusia | Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Kesejahteraan Masyarakat | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Kesejahteraan Masyarakat | Jumlah Laporan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Kesejahteraan Masyarakat (Laporan) |
| | | | Koordinasi Program Pengarusutan Gender (PUG) (urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak) | Jumlah Laporan Koordinasi Pengarusutan Gender (PUG) (Laporan) | | | | | | | | | | |
| | | | Koordinasi Program Kota Sehat (urusan kesehatan) | Jumlah Laporan Koordinasi Program Kota Sehat (Laporan) | | | | | | | | | | |
| | | | Pengendalian perencanaan RKPDES dan RPJMDes (urusan pemerintahan pemberdayaan desa) | Jumlah desa yang disosialisasikan (laporan) | | | | | | | | | | |

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

| PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA | | | | | PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 | | | | | | | | | |
|---|--------|---------------|---|--|---------------------------|----|----|------|---------------|----------|--|-----------------------|---|--|
| NO | URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM/KEGIATAN | Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output) | KODE | | | | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| | | | PROGRAM PELAYANAN ADM PERKANTORAN | TERSEDINYA SARANA PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN (BULAN) | 5 | 02 | 01 | | | KEUANGAN | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | | | URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH BERJALAN LANCAR DAN TERTIB (BULAN) |
| | | | | | 5 | 02 | 01 | 2.02 | 01 | KEUANGAN | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Administrasi Keuangan | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Gaji dan tunjangan PNS Lainnya (Bulan) |
| | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jasa surat menyurat yang disediakan (bulan) | 5 | 02 | 01 | 2.03 | 01 | Keuangan | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Administrasi Umum | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jasa Surat menyurat yang disediakan (bulan) |
| | | | | | | | | | | | | | | Honorarium Non PNS untuk Staf Adm Umum sebanyak 9 orang (bulan) |
| | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan (bulan) | 5 | 02 | 01 | 2.03 | 02 | Keuangan | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Administrasi Umum | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan (Bulan) |
| | | | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | Jasa kebersihan kantor yang disediakan (bulan) | 5 | 02 | 01 | 2.03 | 08 | Keuangan | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Administrasi Umum | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | Jasa Kebersihan Kantor yang disediakan (Bulan) |
| | | | | | | | | | | | | | | Honorarium Non PNS untuk Staf Kebersihan Kantor sebanyak 2 orang (bulan) |

| PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA | | | | | PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 | | | | | | | | | |
|---|--------|---------------|--|---|---------------------------|----|----|------|----|---------------|--|-----------------------|--|---|
| NO | URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM/KEGIATAN | Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output) | KODE | | | | | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | Penyediaan Alat Tulis Kantor | Alat Tulis Kantor yang disediakan (bulan) | 5 | 02 | 01 | 2.03 | 10 | Keuangan | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Administrasi Umum | Penyediaan Alat Tulis Kantor | Alat Tulis Kantor yang disediakan (Bulan) |
| | | | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Barang cetakan dan penggandaan yang disediakan (bulan) | 5 | 02 | 01 | 2.03 | 11 | Keuangan | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Administrasi Umum | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan (Bulan) |
| | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan kantor | Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan (bulan) | 5 | 02 | 01 | 2.03 | 12 | Keuangan | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Administrasi Umum | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Komponen Instalasi listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan (Bulan) |
| | | | Penyediaan Makanan dan Minuman | Makanan dan minuman yang disediakan (bulan) | 5 | 02 | 01 | 2.03 | 17 | Keuangan | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Administrasi Umum | Penyediaan Makanan dan Minuman | Makanan dan Minum yang disediakan (bulan) |
| | | | Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah yang difasilitasi (bulan) | 5 | 02 | 01 | 2.03 | 18 | Keuangan | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Administrasi Umum | Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar Daerah yang difasilitasi (bulan) |
| | | | Penyediaan Jasa Pelayanan Pegawai Non PNS | Jumlah tenaga Pegawai Non PNS yang difasilitasi (orang) | 5 | 02 | 01 | 2.02 | 01 | Keuangan | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Administrasi Keuangan | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah tenaga pegawai Non PNS yang difasilitasi (orang) |
| | | | Penatausahaan Keuangan dan Barang | Penatausahaan Keuangan dan Barang yang dilaksanakan (bulan) | 5 | 02 | 01 | 2.03 | 07 | Keuangan | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Administrasi Umum | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | Penatausahaan Keuangan dan Barang yang dilaksanakan (bulan) |

| PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA | | | | | PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 | | | | | | | | | |
|---|--------|---------------|---|---|---------------------------|----|----|------|---------------|----------|--|-------------------|---|---|
| NO | URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM/KEGIATAN | Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output) | KODE | | | | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| | | | Penyediaan Dokumentasi dan Dekorasi (tidak ada di Permendagri 90 dan anggarannya ditumpangkan pada keg pengadaan peralatan gedung kantor) | Dokumentasi dan dekorasi yang disediakan (bulan) | | | | | | | | | | |
| | | | PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR | PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR (BULAN) | 5 | 02 | 01 | | | KEUANGAN | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | | URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH BERJALAN LANCAR DAN TERTIB (BULAN) | |
| | | | Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional | Jumlah kendaraan dinas/operasional roda 4 yang diadakan (unit) | 5 | 02 | 01 | 2.03 | 20 | Keuangan | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Administrasi Umum | Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional | Jumlah kendaraan dinas/operasional roda 4 yang diadakan (unit) |
| | | | Pengadaan Peralatan Gedung Kantor | Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan (unit) | 5 | 02 | 01 | 2.03 | 24 | Keuangan | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Administrasi Umum | Pengadaan Peralatan Gedung Kantor | Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan (unit) |
| | | | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | Gedung kantor yang dipelihara (bulan) | 5 | 02 | 01 | 2.03 | 28 | Keuangan | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Administrasi Umum | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | Gedung Kantor yang dipelihara (bulan) |
| | | | Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Dinas / Operasional | Jumlah kendaraan roda empat dan roda dua yang dipelihara (unit) | 5 | 02 | 01 | 2.03 | 30 | Keuangan | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Administrasi Umum | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | Jumlah Kendaraan dan Roda empat dan roda Dua yang dipelihara (unit) |
| | | | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor | Peralatan gedung kantor yang dipelihara (bulan) | 5 | 02 | 01 | 2.03 | 34 | Keuangan | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Administrasi Umum | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor | Peralatan gedung kantor yang dipelihara (bulan) |

| PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA | | | | | PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 | | | | | | | | | |
|---|--------|---------------|--|---|---------------------------|----|----|------|----|---------------|--|---|--|---|
| NO | URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM/KEGIATAN | Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output) | KODE | | | | | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas dan Gedung Lainnya | Jumlah rumah dinas yang direhab (unit) | 5 | 02 | 03 | 2.01 | 09 | Keuangan | Program Pengelolaan Barang Milik Daerah | Pengelolaan Barang Milik Daerah | Koordinasi, pengawasan dan pengendalian atas Penggunaan, Pemanfaatan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah | Jumlah rumah dinas dan gedung lainnya yang direhab (unit) |
| | | | Rehabilitasi Sedang/Berat Kendaraan Dinas/Operasional | Jumlah kendaraan dinas/operasional yang direhab (unit) | 5 | 02 | 03 | 2.01 | 09 | Keuangan | Program Pengelolaan Barang Milik Daerah | Pengelolaan Barang Milik Daerah | Koordinasi, pengawasan dan pengendalian atas Penggunaan, Pemanfaatan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah | jumlah kendaraan dinas/operasional yang direhab (unit) |
| | | | Pembayaran Kewajiban Sewa Tanah dan Gedung yang digunakan Oleh Pemko Swl | Jumlah sewa tanah dan bangunan (objek perjanjian) | 5 | 02 | 03 | 2.01 | 09 | Keuangan | Program Pengelolaan Barang Milik Daerah | Pengelolaan Barang Milik Daerah | Koordinasi, pengawasan dan pengendalian atas Penggunaan, Pemanfaatan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah | Jumlah sewa tanah dan bangunan (objek perjanjian) |
| | | | PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR | PERSENTASE APARATUR YANG MENINGKAT SDM NYA (%) | 5 | 02 | 01 | | | KEUANGAN | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | | | URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH BERJALAN LANCAR DAN TERTIB (BULAN) |
| | | | Pendidikan dan Pelatihan Formal | Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal (Orang) | 5 | 02 | 01 | 2.04 | 09 | Keuangan | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Pendidikan dan Pelatihan Formal | Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal (Orang) |
| | | | PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH | OPINI BPK TERHADAP LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (LKPD) | 5 | 02 | 02 | | | KEUANGAN | PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH | | | OPINI BPK TERHADAP LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (LKPD) |

| PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA | | | | | PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 | | | | | | | | | |
|---|--------|---------------|---|---|---------------------------|----|----|------|---------------|----------|---------------------------------------|--|--|---|
| NO | URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM/KEGIATAN | Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output) | KODE | | | | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| | | | | | | | | | | | | | PERSENTASE CAPAIAN REALISASI BELANJA (QUALITY OF BUDGET PLANNING (%)) | |
| | | | | | | | | | | | | | MAKSIMAL DEFISIT APBD (%) | |
| | | | Penyusunan Pedoman/ Petunjuk Teknis Pelaksanaan APBD Penyusunan RKA dan Standar Satuan Harga | Jmlah Dokumen Standar Satuan Harga dan Petunjuk Teknis Penyusunan RKA (dokumen) | 5 | 02 | 02 | 2.01 | 07 | Keuangan | Program Pengelolaan Keuangan Daerah | Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah | Penyusunan Peraturan Kepala Daerah tentang Teknis Penyusunan Anggaran SKPD | Jmlah Dokumen Standar Satuan Harga dan Petunjuk Teknis Penyusunan RKA (dokumen) |
| | | | Intensifikasi dan Ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah | Jumlah laporan potensi pajak dan retribusi (laporan) | 5 | 02 | 04 | 2.02 | 01 | Keuangan | Program Pengelolaan Pendapatan Daerah | Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah | Penyusunan Kebijakan Teknis Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah | Jumlah laporan potensi pajak dan retribusi (laporan) |
| | | | | | 5 | 02 | 04 | 2.02 | 02 | Keuangan | Program Pengelolaan Pendapatan Daerah | Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah | Penyusunan Kebijakan Tentang Intensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah | Jumlah laporan penerimaan negara bukan pajak SDA Minerba (laporan) |
| | | | Pengelolaan Sistem Informasi dan Keuangan Daerah (Pembiayaannya dipindahkan ke keg. pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor) | Jumlah sistem aplikasi keuangan daerah yang dikelola (aplikasi) | 5 | 02 | 02 | 2.01 | 08 | Keuangan | Program Pengelolaan Keuangan Daerah | Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah | Penyusunan Regulasi Bidang Anggaran | Jumlah sistem aplikasi keuangan daerah yang dikelola (aplikasi) |

| PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA | | | | | PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 | | | | | | | | | |
|---|--------|---------------|---|---|---------------------------|----|----|------|----|---------------|---------------------------------------|--|--|---|
| NO | URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM/KEGIATAN | Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output) | KODE | | | | | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | Pengelolaan Sistem Aplikasi PBB online | Jumlah sistem aplikasi PBB Online yang dikelola (aplikasi) | 5 | 02 | 04 | 2.02 | 08 | Keuangan | Program Pengelolaan Pendapatan Daerah | Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah | Penyelenggaraan Sistem Informasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah | Jumlah sistem aplikasi PBB Online yang dikelola (aplikasi) |
| | | | | | 5 | 02 | 4 | 2.02 | 06 | Keuangan | Program Pengelolaan Pendapatan Daerah | Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah | Perumusan kebijakan pelayanan pajak dan retribusi daerah yang berbasis teknologi informasi | Jumlah kebijakan pelayanan pajak dan retribusi yang disusun (dokumen) |
| | | | Pengelolaan Sistem Aplikasi Pendapatan | Jumlah sistem aplikasi pendapatan yang dikelola (aplikasi) | 5 | 02 | 04 | 2.02 | 08 | Keuangan | Program Pengelolaan Pendapatan Daerah | Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah | Penyelenggaraan Sistem Informasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah | Jumlah sistem aplikasi pendapatan yang dikelola (aplikasi) |
| | | | Penyusunan Perubahan APBD | Jumlah dokumen perubahan APBD (dokumen) | 5 | 02 | 02 | 2.01 | 06 | Keuangan | Program Pengelolaan Keuangan Daerah | Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah | Penyusunan peraturan daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran Perubahan APBD | Jumlah dokumen perubahan APBD (dokumen) |
| | | | Penyusunan APBD | Jumlah dokumen APBD (dokumen) | 5 | 02 | 02 | 2.01 | 05 | Keuangan | Program Pengelolaan Keuangan Daerah | Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah | Penyusunan peraturan daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD | Jumlah dokumen APBD (dokumen) |
| | | | Sosialisasi Peraturan Penganggaran Daerah dan Fasilitasi Penyerahan DPA | Jumlah peserta Sosialisasi Penganggaran Daerah dan Penyerahan DPA (orang) | 5 | 02 | 02 | 201 | 07 | Keuangan | Program Pengelolaan Keuangan Daerah | Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah | Penyusunan Peraturan Kepala Daerah tentang Teknis Penyusunan Anggaran SKPD | Jumlah peserta Sosialisasi Penganggaran Daerah dan Penyerahan DPA (orang) |

| PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA | | | | | PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 | | | | | | | | | |
|---|--------|---------------|---|--|---------------------------|----|----|------|----|---------------|---------------------------------------|--|---|---|
| NO | URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM/KEGIATAN | Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output) | KODE | | | | | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | Intensifikasi Pemungutan PBB Serta Pembekalan Kolektor PBB - P2 | Jumlah Penerimaan PBB (milyar) | 5 | 02 | 04 | 2.02 | 07 | Keuangan | Program Pengelolaan Pendapatan Daerah | Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah | Konsultasi dan Pendampingan Wajib Pajak dan Retribusi | Jumlah Penerimaan PBB (milyar) |
| | | | | Jumlah Penerimaan BPHTB (juta) | | | | | | | | | | Jumlah Penerimaan BPHTB (juta) |
| | | | | | 5 | 02 | 04 | 2.02 | 02 | Keuangan | Program Pengelolaan Pendapatan Daerah | Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah | Penyusunan kebijakan teknis perencanaan dan pengembangan pendapatan | Jumlah kebijakan (dokumen) |
| | | | | | 5 | 02 | 04 | 2.02 | 04 | Keuangan | Program Pengelolaan Pendapatan Daerah | Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah | Penyusunan dan evaluasi kebijakan tentang sistem administrasi pelayanan pajak daerah dan retribusi daerah | Jumlah pelayanan (bulan) |
| | | | | | | | | | | | | | | Honorarium Non PNS untuk Staf Adm Umum Bidang Pendapatan sebanyak 4 orang (bulan) |
| | | | | | 5 | 02 | 04 | 2.02 | 11 | Keuangan | Program Pengelolaan Pendapatan Daerah | Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah | Monitoring dan Evaluasi Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah | Jumlah monev yang dilaksanakan (kali) |

| PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA | | | | | PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 | | | | | | | | | |
|---|--------|---------------|--|--|---------------------------|----|----|------|---------------|----------|---------------------------------------|--|--|--|
| NO | URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM/KEGIATAN | Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output) | KODE | | | | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| | | | Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah | Jumlah media penyebarluasan informasi (media) | 5 | 02 | 04 | 2.02 | 05 | Keuangan | Program Pengelolaan Pendapatan Daerah | Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah | Perumusan Kebijakan Strategi Penyuluhan dan Penyebarluasan Informasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Masyarakat | Jumlah media penyebarluasan informasi (media) |
| | | | | Jumlah penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (milyar) | 5 | 02 | 04 | 2.02 | 11 | Keuangan | Program Pengelolaan Pendapatan Daerah | Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah | Monitoring dan Evaluasi Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah | Jumlah penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (milyar) |
| | | | Penyusunan database wajib pajak dan retribusi daerah | Jumlah dokumen database wajib pajak dan retribusi daerah (dokumen) | 5 | 02 | 04 | 2.02 | 09 | Keuangan | Program Pengelolaan Pendapatan Daerah | Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah | Pemeliharaan dan Pemutakhiran Basis Data Pajak Daerah dan Retribusi Daerah | Jumlah dokumen database wajib pajak dan retribusi daerah (dokumen) |
| | | | Penyusunan dokumen data objek dan subjek PBB-P2 dan DHKP | Jumlah dokumen data kebijakan, data objek dan subjek PBB-P2 dan DHKP (dokumen) | 5 | 02 | 04 | 2.02 | 01 | Keuangan | Program Pengelolaan Pendapatan Daerah | Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah | Penyusunan kebijakan teknis perencanaan dan pengembangan pendapatan daerah | Jumlah dokumen data kebijakan, data objek dan subjek PBB-P2 dan DHKP (dokumen) |
| | | | | | 5 | 02 | 04 | 2.02 | 05 | Keuangan | Program Pengelolaan Pendapatan Daerah | Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah | Perumusan Kebijakan Strategi Penyuluhan dan Penyebarluasan Informasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Masyarakat | Jumlah dokumen data kebijakan, data objek dan subjek PBB-P2 dan DHKP (dokumen) |

| PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA | | | | | PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 | | | | | | | | | |
|---|--------|---------------|---|--|---------------------------|----|----|------|----|---------------|---------------------------------------|--|--|--|
| NO | URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM/KEGIATAN | Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output) | KODE | | | | | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | Verifikasi dan pengentrian Data Objek dan Subjek PBB-P2 dan BPHTB | Jumlah data objek pajak dan subjek PBB-P2 dan BPHTB yang dipelihara dan dimutakhirkan (objek pajak/OP) | 5 | 02 | 04 | 2.02 | 09 | Keuangan | Program Pengelolaan Pendapatan Daerah | Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah | Pemeliharaan dan Pemutakhiran Basis Data Pajak Daerah dan Retribusi Daerah | Jumlah data objek pajak dan subjek PBB-P2 dan BPHTB yang dipelihara dan dimutakhirkan (objek pajak/OP) |
| | | | | Jumlah data objek pajak dan subjek PBB-P2 dan BPHTB yang diperiksa Objek pajak (OP) | 5 | 02 | 04 | 2.02 | 10 | Keuangan | Program Pengelolaan Pendapatan Daerah | Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah | Pemeriksaan Pajak Daerah | Jumlah data objek pajak dan subjek PBB-P2 dan BPHTB yang diperiksa Objek pajak (OP) |
| | | | | | | | | | | | | | | Honorarium Non PNS Staf Adm Umum Bidang PBB sebanyak 3 orang (bulan) |
| | | | Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban keuangan daerah | Jumlah dokumen pertanggungjawaban keuangan daerah (dokumen) | 5 | 02 | 02 | 2.03 | 02 | Keuangan | Program Pengelolaan Keuangan Daerah | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah | Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD | Jumlah dokumen pertanggungjawaban keuangan daerah (dokumen) |
| | | | | | | | | | | | | | | Honorarium Non PNS untuk Staf Adm Umum Bidang Perbendaharaan sebanyak 6 orang (bulan) |
| | | | | | 5 | 02 | 02 | 2.03 | 05 | Keuangan | Program Pengelolaan Keuangan Daerah | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah | Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan PEMDA | Jumlah laporan hasil rekonsiliasi (laporan) |

| PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA | | | | | PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 | | | | | | | | | |
|---|--------|---------------|---|--|---------------------------|----|----|------|---------------|----------|-------------------------------------|--|--|---|
| NO | URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM/KEGIATAN | Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output) | KODE | | | | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| | | | Verifikasi Administrasi Keuangan Daerah | Jumlah SPM GU OPD yang diverifikasi (dokumen) | 5 | 02 | 02 | 2.02 | 09 | Keuangan | Program Pengelolaan Keuangan Daerah | Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah | Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan Dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban (SPJ) | Jumlah SPM GU OPD yang diverifikasi (dokumen) |
| | | | | Jumlah Dokumen Juknis Adm Keuangan yang diterbitkan (dokumen) | | | | | | | | | | Jumlah Dokumen Juknis Adm Keuangan yang diterbitkan (dokumen) |
| | | | Pelaksanaan Tuntutan Perbendaharaan Dan Tuntutan Ganti Rugi | Laporan hasil tindak lanjut TPKD (Laporan) | 5 | 02 | 02 | 2.02 | 06 | Keuangan | Program Pengelolaan Keuangan Daerah | Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah | Koordinasi Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan / Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) | Laporan hasil tindak lanjut TPKD (Laporan) |
| | | | Penatausahaan Pengelolaan Administrasi keuangan | Jumlah laporan penatausahaan pengelolaan Adm keuangan OPD dan daerah (laporan) | 5 | 02 | 02 | 2.02 | 01 | Keuangan | Program Pengelolaan Keuangan Daerah | Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah | Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah | Jumlah laporan BUD terhadap Kasda (bulan) |
| | | | | | 5 | 02 | 02 | 2.02 | 04 | Keuangan | Program Pengelolaan Keuangan Daerah | Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah | Pemrosesan, Penerbitan dan Pendistribusian Lembar SP2D | Jumlah SP2D yang diproses (buah) |

| PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA | | | | | PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 | | | | | | | | | |
|---|--------|---------------|------------------|--|---------------------------|----|----|------|----|---------------|-------------------------------------|--|--|---|
| NO | URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM/KEGIATAN | Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output) | KODE | | | | | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | | | 5 | 02 | 02 | 2.02 | 05 | Keuangan | Program Pengelolaan Keuangan Daerah | Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah | Koordinasi Pelaksanaan dan Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP dan SPM, Pemberian Pembebanan Rincian Penggunaan Atas Pengesahan SPJ Gaji dan Non Gaji, Serta Penerbitan SKPP | Laporan Gaji dan Rekapitulasi SKPP (bulan) |
| | | | | | 5 | 02 | 02 | 2.02 | 06 | Keuangan | Program Pengelolaan Keuangan Daerah | Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah | Koordinasi Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan / Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) | Laporan Kasda, aliran kas, PFK (bulan) |
| | | | | | 5 | 02 | 02 | 2.02 | 08 | Keuangan | Program Pengelolaan Keuangan Daerah | Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah | Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D Dengan Instansi Terkait | Jumlah laporan rekon keuangan dengan OPD (OPD) |
| | | | | | 5 | 02 | 02 | 2.02 | 10 | Keuangan | Program Pengelolaan Keuangan Daerah | Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah | Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD | Jumlah SPD yang diterbitkan (berkas) |

| PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA | | | | | PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 | | | | | | | | | |
|---|--------|---------------|--|--|---------------------------|----|----|------|----|---------------|---|--|--|--|
| NO | URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM/KEGIATAN | Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output) | KODE | | | | | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | Pengelolaan Dana Transfer dan Manajemen Kas Daerah | Jumlah laporan dana transfer (laporan) | 5 | 02 | 02 | 2.02 | 03 | Keuangan | Program Pengelolaan Keuangan Daerah | Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah | Koordinasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya | Jumlah laporan dana transfer (laporan) |
| | | | Penyusunan dokumen Barang Milik Daerah (BMD) Kota Sawahlunto | Jumlah dokumen BMD kota Sawahlunto (dokumen) | 5 | 02 | 03 | 2.01 | 01 | Keuangan | Program Pengelolaan Barang Milik Daerah | Pengelolaan Barang Milik Daerah | Koordinasi dan Penyusunan Standar Harga Berdasarkan Jenis dan Tipe Barang | Jumlah dokumen standar harga berdasarkan jenis dan tipe barang (dokumen) |
| | | | | | 5 | 02 | 03 | 2.01 | 03 | Keuangan | Program Pengelolaan Barang Milik Daerah | Pengelolaan Barang Milik Daerah | Koordinasi dan Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah | Jumlah dokumen RKBMD yang tersusun (dokumen) |
| | | | | | 5 | 02 | 03 | 2.01 | 04 | Keuangan | Program Pengelolaan Barang Milik Daerah | Pengelolaan Barang Milik Daerah | Koordinasi dan Penyusunan Rencana Pemeliharaan / Perawatan Barang Milik Daerah | Jumlah dokumen rencana pemeliharaan/perawatan BMD (dokumen) |
| | | | Peningkatan Manajemen Asset/Barang Milik Daerah | Jumlah Asset yang diregistrasi (unit) | 5 | 02 | 03 | 2.01 | 07 | Keuangan | Program Pengelolaan Barang Milik Daerah | Pengelolaan Barang Milik Daerah | Koordinasi Pelaksanaan Pengamanan Fisik, Administrasi dan Hukum Barang Milik Daerah | Jumlah Asset yang diregistrasi (unit) |
| | | | | | | | | | | | | | | Honorarium Non PNS untuk Staf Adm Umum Bidang Asset sebanyak 6 orang (bulan) |
| | | | Pelelangan Barang Milik Daerah | Jumlah PAD dari hasil pelelangan (juta rupiah) | 5 | 02 | 03 | 2.01 | 09 | Keuangan | Program Pengelolaan Barang Milik Daerah | Pengelolaan Barang Milik Daerah | Koordinasi, pengawasan dan pengendalian atas Penggunaan, Pemanfaatan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah | Jumlah PAD dari hasil pelelangan (juta rupiah) |

| PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA | | | | | PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 | | | | | | | | | |
|---|--------|---------------|--|--|---------------------------|----|----|------|---------------|----------|-------------------------------------|---|--|---|
| NO | URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM/KEGIATAN | Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output) | KODE | | | | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| | | | PROGRAM PEMBINAAN DAN FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN / KOTA | Penetapan APBD | 5 | 02 | 02 | | | KEUANGAN | PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH | | | |
| | | | Fasilitasi Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) | Jumlah laporan TAPD (laporan) | 5 | 02 | 02 | 2.01 | 01 | Keuangan | Program Pengelolaan Keuangan Daerah | Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah | Penyusunan KUA dan PPAS | Jumlah dokumen KUA dan PPAS yang disusun (dokumen) |
| | | | | | 5 | 02 | 02 | 2.01 | 02 | Keuangan | Program Pengelolaan Keuangan Daerah | Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah | Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS | Jumlah dokumen KUA Perubahan dan PPAS Perubahan yang disusun (dokumen) |
| | | | | | 5 | 02 | 02 | 2.01 | 03 | Keuangan | Program Pengelolaan Keuangan Daerah | Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah | Penyusunan dan Review RKA SKPD/Perubahan RKA SKPD | Jumlah SKPD yang di review (SKPD) |
| | | | | | | | | | | | | | | Honorarium Non PNS untuk Staf Adm Umum Bidang Anggaran sebanyak 3 orang (bulan) |
| | | | | | 5 | 02 | 02 | 2.01 | 05 | Keuangan | Program Pengelolaan Keuangan Daerah | Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah | Penyusunan peraturan daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD | Jumlah Perda dan Perwako APBD (dokumen) |
| | | | | | 5 | 02 | 02 | 2.01 | 06 | Keuangan | Program Pengelolaan Keuangan Daerah | Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah | Penyusunan peraturan daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran Perubahan APBD | Jumlah Perda dan Perwako Perubahan APBD (dokumen) |

| PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA | | | | | PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 | | | | | | | | | |
|---|--------|---------------|--|--|---------------------------|----|----|------|----|---------------|---|--|---|--|
| NO | URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM/KEGIATAN | Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output) | KODE | | | | | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | Monitoring dan Evaluasi Barang Milik Daerah | Jumlah laporan monitoring dan evaluasi BMD (laporan) | 5 | 02 | 03 | 2.01 | 05 | Keuangan | Program Pengelolaan Barang Milik Daerah | Pengelolaan Barang Milik Daerah | Penatausahaan Barang Milik Daerah | Jumlah laporan monitoring dan evaluasi BMD (laporan) |
| | | | Pelaksanaan Rekonsiliasi Penyusunan SAKD | Jumlah laporan SAKD (laporan) | 5 | 02 | 02 | 2.03 | 01 | Keuangan | Program Pengelolaan Keuangan Daerah | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah | Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah | Jumlah laporan SAKD (laporan) |
| | | | | | 5 | 02 | 02 | 2.03 | 12 | Keuangan | Program Pengelolaan Keuangan Daerah | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah | Pelaksanaan Pembinaan dan Sosialisasi Tentang Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Sesuai Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah | Jumlah peserta sosialisasi (orang) |
| | | | PROGRAM PEMBINAAN DAN FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA | PERSENTASE DESA DENGAN PENGELOLAAN KEUANGAN BERPREDIKAT BAIK (%) | 5 | 02 | 02 | | | KEUANGAN | PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH | | | |
| | | | Sosialisasi Peraturan Kepala Daerah tentang Besaran Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Retribusi Daerah (Disarankan untuk membuat Telaahan Staf ke Bapak Walikota untuk dipindahkan ke Pemdes) | Jumlah peserta sosialisasi Perkada ttg besaran alokasi dana Desa, bagi hasil pajak & bagi hasil retribusi daerah (orang) | 5 | 02 | 02 | 2.04 | 03 | Keuangan | Program Pengelolaan Keuangan Daerah | Kegiatan Penunjang Urusan | Pelaksanaan Alokasi dan Penyaluran Bantuan Keuangan Khusus | Jumlah peserta sosialisasi Perkada ttg besaran alokasi dana Desa, bagi hasil pajak & bagi hasil retribusi daerah (orang) |

BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

| PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA | | | | | PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 | | | | | | | | | |
|---|-----------|--------------------------------------|--|---|---------------------------|----|----|------|----|---------------|--|-------------------|--|--|
| NO | URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM/KEGIATAN | Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output) | KODE | | | | | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | PENUNJANG | KEPEGAWAIAN | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Terpenuhinya kebutuhan adm perkantoran | | | | | | | | | | |
| | WAJIB | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN | Penyediaan jasa surat menyurat | Jumlah materai yang disediakan (buah)Jumlah Surat/paket yang terkirim (surat) | 5 | 03 | 01 | 2,03 | 01 | KEPEGAWAIAN | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Administrasi Umum | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Tersedianya materai (lembar), pengiriman yang terfasilitasi |
| | | | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | Jumlah tagihan air, listrik, dan telepon(bulan) | 5 | 03 | 01 | 2,03 | 02 | KEPEGAWAIAN | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Administrasi Umum | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Terlaksananya pembayaran jasa komunikasi sumber daya air dan listrik (bulan) |
| | | | Penyediaan jasa kebersihan kantor | Jumlah alat/ bahan kebersihan kantor (Paket) | 5 | 03 | 01 | 2,03 | 08 | KEPEGAWAIAN | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Administrasi Umum | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | Tersedianya alat kebersihan kantor (bulan) dan iuran restribusi kebersihan/sedot WC (triwulan) |
| | | | Penyediaan alat tulis kantor | Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (Paket) | 5 | 03 | 01 | 2,03 | 10 | KEPEGAWAIAN | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Administrasi Umum | Penyediaan Alat Tulis Kantor | Tersedianya ATK (bulan) |
| | | | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Jumlah barang cetakan (Dokumen) | 5 | 03 | 01 | 2,03 | 11 | KEPEGAWAIAN | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Administrasi Umum | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Tersedianya biaya fotocopy, barang cetakan dan penjilidan (bulan) |
| | | | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | Jumlah Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan | 5 | 03 | 01 | 2,03 | 12 | KEPEGAWAIAN | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Administrasi Umum | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Tersedianya komponen kelistrikan (bulan) |

| PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA | | | | | PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 | | | | | | | | | |
|---|--------|---------------|---|--|---------------------------|----|----|------|----|---------------|--|-----------------------|--|--|
| NO | URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM/KEGIATAN | Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output) | KODE | | | | | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | Penyediaan bahan bacaan dan perundang-undangan | Jmlah bahan bacaan (Eksemplar) | 5 | 03 | 01 | 2,03 | 15 | KEPEGAWAIAN | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Administrasi Umum | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | Tersedianya surat kabar (jenis) |
| | | | Penyediaan makanan dan minuman | Jumlah Makan dan Minum yang disediakan (Porsi) | 5 | 03 | 01 | 2,03 | 17 | KEPEGAWAIAN | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Administrasi Umum | Penyediaan Makanan dan Minuman | Ketersediaan makanan dan minuman rapat/pertemuan (bulan) |
| | | | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah | Jumlah Rakor dan konsultasi pegawai yang diikuti (Kali) | 5 | 03 | 01 | 2,03 | 18 | KEPEGAWAIAN | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Administrasi Umum | Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah | Tersedianya biaya perjalanan dinas luar kota dan luar propinsi (bulan) |
| | | | Penyediaan jasa pelayanan Pegawai Non PNS | Jumlah pegawai Non PNS yang di fasilitasi (Orang) | 5 | 03 | 01 | 2,02 | 01 | KEPEGAWAIAN | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Administrasi Keuangan | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Dibayarkannya honor pegawai kontrak dan honorer (bulan) |
| | | | | Jumlah cs yang di fasilitasi (Orang) | 5 | 03 | 01 | 2,02 | 01 | KEPEGAWAIAN | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Administrasi Keuangan | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Dibayarkannya honor penatausahaan keuangan dan barang (bulan) |
| | | | | Jumlah Pegawai Non PNS yang diberikan TKP (Orang) | | | | | | | | | | |
| | | | 12. Penyediaan dokumentasi dan dekorasi | Jumlah dekorasi & spanduk (Jumlah) | | | | | | | | | | |
| | | | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur | | | | | | | | | | |
| | | | Pengadaan peralatan gedung kantor | Jumlah Peralatan Kantor (Unit) | 5 | 03 | 01 | 2,03 | 24 | KEPEGAWAIAN | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Administrasi Umum | Pengadaan Peralatan Gedung Kantor | Jumlah barang yang diadakan (paket) |

| PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA | | | | | PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 | | | | | | | | | | |
|---|--------|---------------|--|---|---------------------------|----|----|------|----|---------------|--|---------------------------|--|---|--|
| NO | URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM/KEGIATAN | Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output) | KODE | | | | | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| | | | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | Jumlah Pemeliharaan bangunan gedung kantor (Kali) | 5 | 03 | 01 | 2,03 | 28 | KEPEGAWAIAN | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Administrasi Umum | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | Terpeliharanya gedung kantor (paket) | |
| 2 | | | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | Jumlah Kendaraan Dinas yang dipelihara (Unit) | 5 | 03 | 01 | 2,03 | 30 | KEPEGAWAIAN | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Administrasi Umum | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | Terpeliharanya kendaraan dinas (unit) | |
| 3 | | | Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor | Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang dipelihara (paket) | 5 | 03 | 01 | 2,03 | 34 | KEPEGAWAIAN | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Administrasi Umum | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor | Terpeliharanya peralatan kantor (unit) | |
| | | | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Meningkatnya SDM ASN | | | | | | | | | | | |
| | | | Pendidikan dan pelatihan formal | Jumlah aparatur yang akan mengikuti pendidikan dan pelatihan formal (orang) | 5 | 03 | 01 | 2,03 | 01 | KEPEGAWAIAN | PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH | Peningkatan Kapasitas ASN | Peningkatan Kapasitas ASN | Jumlah aparatur yang akan mengikuti pendidikan dan pelatihan formal (orang) | |
| | | | Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan di bidang kepegawaian | Jumlah ASN yang meningkat pengetahuan (Orang) | 5 | 03 | 01 | 2,03 | 01 | KEPEGAWAIAN | PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH | Peningkatan Kapasitas ASN | Peningkatan Kapasitas ASN | Jumlah ASN yang meningkat pengetahuan (Orang) | |
| | | | Fasilitasi Diklat Teknis /Fungsional | Persentase Aparatur yang mengikuti Diklat teknis fungsional dan lulus | 5 | 03 | 01 | 2,03 | 09 | KEPEGAWAIAN | PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH | Peningkatan Kapasitas ASN | Pengelolaan Karir dalam Jabatan Fungsional | Persentase Aparatur yang mengikuti Diklat teknis fungsional dan lulus | |
| | | | Pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi CASN | Jumlah CASN yang ikut diklat prajabatan (Orang) | 5 | 03 | 01 | 2,03 | 02 | KEPEGAWAIAN | PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH | Peningkatan Kapasitas ASN | Pengembangan Penilaian Kinerja ASN | Jumlah CASN yang ikut diklat prajabatan (Orang) | |

| PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA | | | | | PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 | | | | | | | | | |
|---|--------|---------------|--|---|---------------------------|----|----|------|----|---------------|----------------------------|---------------------------|---|---|
| NO | URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM/KEGIATAN | Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output) | KODE | | | | | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | Pendidikan dan pelatihan struktural bagi ASN Daerah/Diklat Pimp II, III dan IV | Jumlah Pejabat Struktural yang di kirim mengikuti diklat pim II dan III (orang) | 5 | 03 | 01 | 2,04 | 01 | KEPEGAWAIAN | PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH | Pengembangan Karir ASN | Pengembangan Karir dan Promosi ASN | Jumlah Pejabat Struktural yang di kirim mengikuti diklat pim II dan III (orang) |
| | | | | Jumlah Pejabat Struktural yang mengikuti diklat pim dan memperoleh sertifikat (orang) | 5 | 03 | 01 | 2,04 | 01 | KEPEGAWAIAN | PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH | Pengembangan Karir ASN | Pengembangan Karir dan Promosi ASN | Jumlah Pejabat Struktural yang mengikuti diklat pim dan memperoleh sertifikat (orang) |
| | | | Wirid Anggota Korpri | Jumlah ASN yang mengikuti Penyegaran n dan siraman rohani | 5 | 03 | 01 | 2,03 | 01 | KEPEGAWAIAN | PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH | Peningkatan Kapasitas ASN | Peningkatan Kapasitas ASN | Jumlah ASN yang mengikuti Penyegaran dan siraman rohani |
| | | | Peringkatan Hut Korpri | Jumlah ASN Dalam rangka meningkatkan kreatififaf dan silaturahmi | 5 | 03 | 01 | 2,03 | 04 | KEPEGAWAIAN | PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH | Peningkatan Kapasitas ASN | Fasilitasi Kelembagaan Profesi ASN (KORPRI dan lembaga profesi ASN lainnya) | Jumlah ASN Dalam rangka meningkatkan kreatififaf dan silaturahmi |
| | | | Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur | Terwujudnya pembinaan dan pengembangan aparatur | | | | | | | | | | |
| | | | Pemberian bantuan tugas belajar, ikatan dinas dan Monitoring | Jumlah Aparatur yang diberikan bantuan tugas belajar dan izin belajar | 5 | 03 | 01 | 2,03 | 07 | KEPEGAWAIAN | PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH | Peningkatan Kapasitas ASN | Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN | Jumlah Aparatur yang diberikan bantuan tugas belajar dan izin belajar |
| | | | Pelaksanaan Mutasi, Rotasi Pegawai, Pelantikan Pejabat Struktural serta Kenaikan Pangkat dan pensiun | Jumlah Pejabat yang mutasi dan promosi | 5 | 03 | 01 | 2,02 | 02 | KEPEGAWAIAN | PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH | Administrasi Kepegawaian | Penataan dan Mutasi Jabatan | Jumlah Pejabat yang mutasi dan promosi |

| PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA | | | | | PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 | | | | | | | | | |
|---|--------|---------------|--|--|---------------------------|----|----|------|----|---------------|----------------------------|------------------------------------|---|--|
| NO | URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM/KEGIATAN | Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output) | KODE | | | | | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | | | 5 | 03 | 01 | 2,02 | 03 | KEPEGAWAIAN | PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH | Administrasi Kepegawaian | Penyelesaian Penempatan, Pengangkatan, Mutasi, dan Kependidikan | |
| | | | | | 5 | 03 | 01 | 2,02 | 04 | KEPEGAWAIAN | PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH | Administrasi Kepegawaian | Penyelesaian Pemberhentian dan Pemberian Pensiun | |
| | | | | | 5 | 03 | 01 | 2,02 | 07 | KEPEGAWAIAN | PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH | Administrasi Kepegawaian | Pengelolaan Mutasi ASN | |
| | | | | | 5 | 03 | 01 | 2,02 | 08 | KEPEGAWAIAN | PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH | Administrasi Kepegawaian | Pengelolaan Penempatan dalam Jabatan ASN | |
| | | | | | 5 | 03 | 01 | 2,02 | 09 | KEPEGAWAIAN | PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH | Administrasi Kepegawaian | Pembuatan Daftar Penjagaan Kenaikan Pangkat | |
| | | | | | 5 | 03 | 01 | 2,02 | 10 | KEPEGAWAIAN | PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH | Administrasi Kepegawaian | Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN | |
| | | | Sistem Informasi Pelayanan Kepegawaian | Data PNS yang telah diperbaharui dan diverifikasi | 5 | 03 | 01 | 2,01 | 03 | KEPEGAWAIAN | PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH | Pengelolaan Data dan Informasi ASN | Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian | Data PNS yang telah diperbaharui dan diverifikasi |
| | | | Penyusunan kebutuhan pegawai/formasi dan Seleksi ASN | Jumlah formasi pegawai yang dibutuhkan (buah) | 5 | 03 | 01 | 2,02 | 03 | KEPEGAWAIAN | PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH | Administrasi Kepegawaian | Penyusunan Analisis Kebutuhan, Formasi, dan Pelaksanaan Pengadaan ASN | Jumlah formasi pegawai yang dibutuhkan (buah) |
| | | | Pengangkatan CASN menjadi ASN dan Pengambilan Sumpah | Jumlah CASN yang diangkat menjadi PNS dan disumpah (Orang) | 5 | 03 | 01 | 2,04 | 01 | KEPEGAWAIAN | PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH | Pengembangan Karir ASN | Pengembangan Karir dan Promosi ASN | Jumlah CASN yang diangkat menjadi PNS dan disumpah (Orang) |

| PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA | | | | | PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 | | | | | | | | | | |
|---|--------|---------------|--|---|---------------------------|----|----|------|----|---------------|----------------------------|---------------------------|---|---|--|
| NO | URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM/KEGIATAN | Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output) | KODE | | | | | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| | | | Fasilitasi Ujian Dinas dan Penyesuaian Ijazah | Jumlah ASN yang mengikuti Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Ijazah yang lulus | 5 | 03 | 01 | 2,02 | 07 | KEPEGAWAIAN | PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH | Administrasi Kepegawaian | Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN | Jumlah ASN yang mengikuti Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Ijazah yang lulus | |
| | | | Pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional tertentu | Jumlah jabatan fungsional yang dikelola (orang) | 5 | 03 | 01 | 2,03 | 09 | KEPEGAWAIAN | PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH | Peningkatan Kapasitas ASN | Pengelolaan Karir dalam Jabatan Fungsional | Jumlah jabatan fungsional yang dikelola (orang) | |
| | | | Pemilihan ASN Berprestasi | Jumlah ASN Berprestasi Yang Terpilih | | | | | | | | | | | |
| | | | Penyusunan Indeks Profesional ASN | Jumlah OPD yang dinilai | | | | | | | PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH | | | | |
| | | | Penyusunan Rencana Pembinaan Karir PNS | Jumlah Pejabat/ Pelaksana yang mengikuti Assesment dan Uji Kompetensi. | 5 | 03 | 01 | 2,04 | 01 | KEPEGAWAIAN | PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH | Peningkatan Kapasitas ASN | Pengembangan Karir dan Promosi ASN | Jumlah Pejabat/ Pelaksana yang mengikuti Assesment dan Uji Kompetensi. | |
| | | | 10.Fasilitasi /Advokasi Bantuan Hukum (Pembentukan LKBH) | Lembaga Bantuan Hukum Untuk ASN | 5 | 03 | 01 | 2,05 | 02 | KEPEGAWAIAN | PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH | Pembinaan ASN | Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN | Lembaga Bantuan Hukum Untuk ASN | |
| | | | Pemantauan Disiplin dan Uang Lembur | | 5 | 03 | 01 | 2,05 | 01 | KEPEGAWAIAN | PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH | Pembinaan ASN | Pembinaan Disiplin ASN | | |
| | | | Sosialisasi Bantuan Hukum Terhadap ASN | Jumlah Sosialisasi bantuan Hukum Yang Dilaksanakan | 5 | 03 | 01 | 2,05 | 02 | KEPEGAWAIAN | PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH | Pembinaan ASN | Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN | Jumlah Sosialisasi bantuan Hukum Yang Dilaksanakan | |

INSPEKTORAT

| PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA | | | | | PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 | | | | | | | | |
|---|--------|---------------|--|---|---------------------------|----|----|------|---------------|---------|------------------------------------|------------------|---|
| NO | URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM/KEGIATAN | Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output) | KODE | | | | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran (Bulan) | 6 | 01 | 01 | | | | Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | |
| | | | | | 6 | 01 | 01 | 2.03 | | | Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Admnistrasi Umum | Terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran (Bulan) |
| | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jasa surat menyurat yang disediakan | 6 | 01 | 01 | 2.03 | 01 | | Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Admnistrasi Umum | Jasa surat menyurat yang disediakan |
| | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jasa komunikasi, SDA dan Listrik yang disediakan | 6 | 01 | 01 | 2.03 | 02 | | Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Admnistrasi Umum | Jasa komunikasi, SDA dan Listrik yang disediakan |
| | | | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | Jasa Kebersihan Kantor yang disediakan | 6 | 01 | 01 | 2.03 | 08 | | Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Admnistrasi Umum | Jasa Kebersihan Kantor yang disediakan |
| | | | Penyediaan Alat Tulis Kantor | Alat Tulis Kantor yang disediakan | 6 | 01 | 01 | 2.03 | 10 | | Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Admnistrasi Umum | Alat Tulis Kantor yang disediakan |
| | | | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan | 6 | 01 | 01 | 2.03 | 11 | | Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Admnistrasi Umum | Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan |
| | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik dan Penerangan bangunan Kantor | Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan | 6 | 01 | 01 | 2.03 | 12 | | Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Admnistrasi Umum | Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan |
| | | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Bahan bacaan dan Perundang-undangan yang disediakan | 6 | 01 | 01 | 2.03 | 15 | | Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Admnistrasi Umum | Bahan bacaan dan Perundang-undangan yang disediakan |

| PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA | | | | | PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 | | | | | | | | | |
|---|--------|---------------|--|---|---------------------------|----|----|------|----|---------------|------------------------------------|---|--|---|
| NO | URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM/KEGIATAN | Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output) | KODE | | | | | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | Penyediaan Makanan dan Minuman | Makan dan Minum yang disediakan | 6 | 01 | 01 | 2.03 | 17 | | Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Admnistrasi Umum | Penyediaan Makanan dan Minuman | Makan dan Minum yang disediakan |
| | | | Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah | Rapat -rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang difasilitasi | 6 | 01 | 01 | 2.03 | 18 | | Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Admnistrasi Umum | Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah | Rapat -rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang difasilitasi |
| | | | | | 6 | 01 | 02 | | | | Program Penyelenggaraan Pengawasan | | | |
| | | | | | 6 | 01 | 02 | 2,02 | | | Program Penyelenggaraan Pengawasan | Penyelenggaraan Pengawasan dengan tujuan tertentu | | |
| | | | Penyediaan Jasa Pelayanan Pegawai Non PNS | Jumlah tenaga pegawai Non PNS yang di fasilitasi | 6 | 01 | 02 | 2,02 | 4 | | Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Penyelenggaraan Pengawasan dengan tujuan tertentu | Evaluasi Kinerja dan Keuangan | |
| | | | | | 6 | 01 | 01 | | | | Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | |
| | | | | | 6 | 01 | 01 | 2,02 | | | Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Admnistrasi Keuangan | | |
| | | | Penata usahaan Keuangan dan Barang (*****) | Penatausahaan Keuangan dan Barang yang dilaksanakan | 6 | 01 | 01 | 2,02 | 3 | | Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Admnistrasi Keuangan | Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi | Penatausahaan Keuangan dan Barang yang dilaksanakan |
| | | | | | 6 | 01 | 01 | | | | Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | |
| | | | | | 6 | 01 | 01 | 2.03 | | | Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Admnistrasi Umum | | |

| PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA | | | | | PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 | | | | | | | | | |
|---|--------|---------------|--|--|---------------------------|----|----|------|----|---------------|------------------------------------|---|--|--|
| NO | URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM/KEGIATAN | Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output) | KODE | | | | | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | Penyediaan Dokumentasi dan Dekorasi | Dokumentasi dan dekorasi yang disediakan | 6 | 01 | 01 | 2,03 | 16 | | Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Admnistrasi Umum | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Dokumentasi dan dekorasi yang disediakan |
| | | | Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Ketersediaan sarana & prasarana aparatur (bulan) | 6 | 01 | 01 | 2,03 | | | Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Admnistrasi Umum | | Terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran (Bulan) |
| | | | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | Gedung Kantor yang di pelihara | 6 | 01 | 01 | 2,03 | 28 | | Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Admnistrasi Umum | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | Gedung Kantor yang di pelihara |
| | | | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | Kendaraan dinas roda 4 dan 2 yang dipelihara | 6 | 01 | 01 | 2,03 | 30 | | Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Admnistrasi Umum | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | Kendaraan dinas roda 4 dan 2 yang dipelihara |
| | | | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor | Peralatan gedung kantor yang dipelihara | 6 | 01 | 01 | 2,03 | 34 | | Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Admnistrasi Umum | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor | Peralatan gedung kantor yang dipelihara |
| | | | Pengadaan Peralatan Gedung Kantor | Peralatan gedung kantor yang diadakan | 6 | 01 | 01 | 2,03 | 24 | | Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Admnistrasi Umum | Pengadaan Peralatan Gedung Kantor | Peralatan gedung kantor yang diadakan |
| | | | Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Jumlah aparatur yang meningkat kompetensi (orang) | 6 | 01 | 01 | 2,04 | | | Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | | Jumlah aparatur yang meningkat kompetensi (orang) |
| | | | Pendidikan dan Pelatihan Formal | Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal dan memperoleh sertifikat (orang) | 6 | 01 | 01 | 2,04 | 09 | | Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Pendidikan dan Pelatihan Formal | Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal dan memperoleh sertifikat (orang) |
| | | | | | 6 | 01 | 02 | | | | Program Penyelenggaraan Pengawasan | | | |
| | | | Program Peningkatan | Jumlah Temuan (Temuan) | 6 | 01 | 02 | 2,01 | | | | | | Jumlah Temuan (Temuan) |

| PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA | | | | | PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 | | | | | | | | | | |
|---|--------|---------------|---|--|---------------------------|----|----|------|----|---------------|---------|---|---|--|---|
| NO | URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM/KEGIATAN | Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output) | KODE | | | | | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| | | | Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan Kepala Daerah | Persentase tindaklanjut LHP (%) | | | | | | | | Program Penyelenggaraan Pengawasan | Penyelenggaraan Pengawasan Internal | | Persentase tindaklanjut LHP (%) |
| | | | Pemeriksaan Reguler/Rutin | Jumlah objek/laporan pemeriksaan(kali/obrik) | 6 | 01 | 02 | 2,01 | 01 | | | Program Penyelenggaraan Pengawasan | Penyelenggaraan Pengawasan Internal | Audit Kinerja dan Keuangan | Jumlah objek/laporan pemeriksaan(kali/obrik) |
| | | | Pemeriksaan Khusus dan Kasus | Jumlah Pemeriksaan Khusus (objek) | 6 | 01 | 02 | 2,01 | 02 | | | Program Penyelenggaraan Pengawasan | Penyelenggaraan Pengawasan Internal | Review kinerja dan Keuangan | Jumlah Pemeriksaan Khusus (objek) |
| | | | | Jumlah Pemeriksaan kasus (objek) | | | | | | | | | | | Jumlah Pemeriksaan kasus (objek) |
| | | | Rapat Koordinasi Pengawasan | Jumlah Rakor pengawasan yang diikuti (kali) | 6 | 01 | 03 | 2,01 | 02 | | | Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi | Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan | Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan | Jumlah Rakor pengawasan yang diikuti (kali) |
| | | | Pengendalian Tindak Lanjut | Meningkatnya pembinaan dan pengawasan oleh APIP | 6 | 01 | 03 | 2,02 | 01 | | | Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi | Asistensi dan Pendampingan | Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat | Meningkatnya pembinaan dan pengawasan oleh APIP |
| | | | Pengawasan dan Pengelolaan LHKPN | Jumlah LHKPN (laporan) | 6 | 01 | 02 | 2,02 | 02 | | | Program Penyelenggaraan Pengawasan | Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu | Review kinerja dan Keuangan | Jumlah LHKPN (laporan) |
| | | | Peningkatan Level Maturitas SPIP | Meningkatnya Implementasi Maturitas SPIP | 6 | 01 | 02 | 2,02 | 04 | | | Program Penyelenggaraan Pengawasan | Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu | Evaluasi kinerja dan Keuangan | Meningkatnya Implementasi Maturitas SPIP |
| | | | Peningkatan Kapabilitas APIP Inspektorat Kota Sawahlunto | Meningkatnya Kapabilitas APIP Inspektorat Kota Sawahlunto | 6 | 01 | 03 | 2,02 | 02 | | | Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi | Asistensi dan Pendampingan | Asistensi dan Pendampingan | Meningkatnya Kapabilitas APIP Inspektorat Kota Sawahlunto |

| PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA | | | | | PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 | | | | | | | | | |
|---|--------|---------------|--|---|---------------------------|----|----|------|----|---------------|--|---|--|---|
| NO | URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM/KEGIATAN | Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output) | KODE | | | | | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | Sapu Bersih Pungutan Liar Pemerintah Kota Sawahlunto | Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Pungutan Liar | 6 | 01 | 02 | 2,02 | 03 | | Program Penyelenggaraan Pengawasan | Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu | Pemantauan Kinerja dan Keuangan | Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Pungutan Liar |
| | | | Survey Penilaian Integritas | | 6 | 01 | 02 | 2,02 | 04 | | Program Penyelenggaraan Pengawasan | Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu | Evaluasi kinerja dan Keuangan | |
| | | | Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur pengawasan | jumlah tenaga fungsional pemeriksa yang memiliki sertifikasi sesuai jenjang pendidikannya (Orang) | 5 | 04 | 02 | | | | Program Pengembangan Sumber Daya Manusia | | | jumlah tenaga fungsional pemeriksa yang memiliki sertifikasi sesuai jenjang pendidikannya (Orang) |
| | | | Penilaian Angka Kredit JFA | Jumlah PAK JFA yang ditetapkan (dokumen) | 5 | 03 | 02 | 2.03 | 09 | | Program Kepegawaian Daerah | Peningkatan Kapasitas ASN | Pengelolaan Karir dalam Jabatan Fungsional | Jumlah PAK JFA yang ditetapkan (dokumen) |
| | | | Penilaian Angka Kredit P2UPD | Jumlah PAK P2UPD yang ditetapkan (dokumen) | 5 | 03 | 02 | 2.03 | 09 | | Program Kepegawaian Daerah | Peningkatan Kapasitas ASN | Pengelolaan Karir dalam Jabatan Fungsional | Jumlah PAK P2UPD yang ditetapkan (dokumen) |
| | | | Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Fungsional | Jumlah aparatur fungsional yang mempunyai sertifikat (orang) | 5 | 04 | 02 | 2.02 | 01 | | Program Pengembangan Sumber Daya Manusia | Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi manajerial dan Fungsional | Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, sumber belajar, kerjasama, pengembangan kompetensi pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan prajabatan, serta jabatan fungsional | Jumlah aparatur fungsional yang mempunyai sertifikat (orang) |
| | | | Program Peningkatan Disiplin Aparatur | Meningkatnya disiplin aparatur (bulan) | 6 | 01 | 01 | | | | Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | |

| PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA | | | | | PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 | | | | | | | | | |
|---|--------|---------------|---|--|---------------------------|----|----|------|----|---------------|---------|---|---|---|
| NO | URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM/KEGIATAN | Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output) | KODE | | | | | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | | | 6 | 01 | 01 | 2.04 | | | | Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | | Meningkatnya disiplin aparatur (bulan) |
| | | | Pengadaan Pakaian Dinas berserta Kelengkapannya | Jumlah pakaian dinas yang disediakan (bulan) | 6 | 01 | 01 | 2.04 | 02 | | | | Pengadaan Pakaian Dinas berserta Kelengkapannya | Jumlah pakaian dinas yang disediakan (bulan) |

KECAMATAN BARANGIN

| PERMENDAGRI 13/RPJM/RENSTRA/RKPD/RENJA | | | | | PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 | | | | | | | | | | |
|--|------------------|---------------------|--|--|---------------------------|----|----|------|----|---------------|-----------|--|-------------------|--|--|
| NO | URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM/KEGIATAN | Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output) | KODE | | | | | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 1 | Urusan Penunjang | Urusan Pemerintahan | Program Pelayanan Administrasi | Persentase pelayanan administrasi perkantoran yang terlaksana (%) | 7 | 01 | 01 | | | | Kecamatan | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | Tersedianya sarana pelayanan administrasi perkantoran (%) |
| 2 | Urusan Penunjang | Urusan Pemerintahan | Program Pelayanan Administrasi | Persentase pelayanan administrasi perkantoran yang terlaksana (%) | 7 | 01 | 01 | 2.03 | | | Kecamatan | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Administrasi Umum | | Tersedianya sarana pelayanan administrasi perkantoran (%) |
| 3 | Urusan Penunjang | Urusan Pemerintahan | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah tersedianya jasa surat menyurat (bulan) | 7 | 01 | 01 | 2.03 | 01 | | Kecamatan | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Administrasi Umum | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah materai yang disediakan (bulan) |
| 4 | Urusan Penunjang | Urusan Pemerintahan | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya, air dan Listrik | Ketersediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya, air dan Listrik (bulan) | 7 | 01 | 01 | 2.03 | 02 | | Kecamatan | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Administrasi Umum | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya, air dan Listrik | Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik yang dibayarkan (bulan) |
| 5 | Urusan Penunjang | Urusan Pemerintahan | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | Jumlah jasa administrasi keuangan yang disediakan (bulan) | 7 | 01 | 01 | 2.03 | 07 | | Kecamatan | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Administrasi Umum | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan dan Barang | Jasa administrasi keuangan yang dibayarkan (bulan) |
| 6 | Urusan Penunjang | Urusan Pemerintahan | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | Jumlah alat kebersihan kantor yang disediakan(bulan) | 7 | 01 | 01 | 2.03 | 08 | | Kecamatan | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Administrasi Umum | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | Jumlah alat kebersihan kantor yang disediakan (bulan) |
| 7 | Urusan Penunjang | Urusan Pemerintahan | Penyediaan Alat Tulis Kantor | Jumlah ATK yang disediakan (bulan) | 7 | 01 | 01 | 2.03 | 10 | | Kecamatan | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Administrasi Umum | Penyediaan Alat Tulis Kantor | Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (bulan) |
| 8 | Urusan Penunjang | Urusan Pemerintahan | Penyediaan Barang cetakan dan Penggandaan | Jumlah Barang cetakan yang disediakan (bulan) | 7 | 01 | 01 | 2.03 | 11 | | Kecamatan | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Administrasi Umum | Penyediaan Barang cetakan dan Penggandaan | Jumlah barang cetak dan penggandaan yang disediakan (bulan) |

| PERMENDAGRI 13/RPJM/D/RENSTRA/RKPD/RENJA | | | | | PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 | | | | | | | | | | |
|--|------------------|---------------------|---|---|---------------------------|----|----|------|----|---------------|--|-----------------------|--|---|--|
| NO | URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM/KEGIATAN | Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output) | KODE | | | | | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 9 | Urusan Penunjang | Urusan Pemerintahan | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik dan penerangan Kantor | Jumlah Komponen Listrik yang disediakan (bulan) | 7 | 01 | 01 | 2.03 | 12 | Kecamatan | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Administrasi Umum | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yg disediakan (bulan) | |
| 10 | Urusan Penunjang | Urusan Pemerintahan | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Perundang-undangan | Jumlah bahan bacaan dan perundangan undangan yang disediakan (jenis) | 7 | 01 | 01 | 2.03 | 15 | Kecamatan | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Administrasi Umum | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Perundang-undangan | Jumlah bahan bacaan dan per UU disediakan (jenis) | |
| 11 | Urusan Penunjang | Urusan Pemerintahan | Penyediaan makanan dan minuman | Jumlah makanan dan minuman yang tersedia (bulan) | 7 | 01 | 01 | 2.03 | 17 | Kecamatan | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Administrasi Umum | Penyediaan makanan dan minuman | Jumlah makanan dan minuman yang tersedia (bulan) | |
| 12 | Urusan Penunjang | Urusan Pemerintahan | Rapat-rapat koordinasi ke luar daerah | jumlah kunjungan studi banding, rapat dan konsultasi (sosialisasi) yang diikuti (bulan) | 7 | 01 | 01 | 2.03 | 18 | Kecamatan | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Administrasi Umum | Rapat-rapat koordinasi ke luar daerah | Jumlah kunjungan studi banding, rapat dan konsultasi (sosialisasi) yang diikuti (bulan) | |
| 13 | Urusan Penunjang | Urusan Pemerintahan | Penyediaan Jasa Pelayanan pegawai Non PNS | Jumlah ketersediaan jasa Pegawai Non PNS (Orang) | 7 | 01 | 01 | 2.02 | | Kecamatan | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Administrasi Keuangan | | Terfasilitasinya pelayanan administrasi keuangan (orang/bulan) | |
| 14 | Urusan Penunjang | Urusan Pemerintahan | Penyediaan Jasa Pelayanan pegawai Non PNS | Jumlah ketersediaan jasa Pegawai Non PNS (Orang) | 7 | 01 | 01 | 2.02 | 01 | Kecamatan | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Administrasi Keuangan | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah pegawai non PNS yang difasilitasi (orang) | |
| 15 | Urusan Penunjang | Urusan Pemerintahan | Penyediaan Dokumentasi dan Dekorasi | Jumlah dokumentasi dan dekorasi yang disediakan (jenis) | 7 | 01 | 01 | 2.03 | 03 | Kecamatan | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Administrasi Umum | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah dokumentasi dan dekorasi yang disediakan (bulan) | |
| 16 | Urusan Penunjang | Urusan Pemerintahan | Pengadaan Peralatan gedung kantor | Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan (unit) | 7 | 01 | 01 | 2.03 | 24 | Kecamatan | Program Penunjang Urusan | Administrasi Umum | Pengadaan Peralatan gedung kantor | Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan (unit) | |

| PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA | | | | | PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 | | | | | | | | | |
|---|------------------|---------------------|--|--|---------------------------|----|----|------|----|---------------|---|---|--|--|
| NO | URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM/KEGIATAN | Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output) | KODE | | | | | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | | | | | | | | | | Pemerintahan Daerah | | |
| 17 | Urusan Penunjang | Urusan Pemerintahan | Pemeliharaan Rutin/berkala gedung kantor | Jumlah Gedung yang dipelihara (Bulan) | 7 | 01 | 01 | 2.03 | 28 | Kecamatan | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Administrasi Umum | Pemeliharaan Rutin/berkala gedung kantor | Jumlah gedung kantor yang dipelihara (unit) |
| 18 | Urusan Penunjang | Urusan Pemerintahan | Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional | Jumlah Kendaraan Dinas yang dipelihara (Bulan) | 7 | 01 | 01 | 2.03 | 30 | Kecamatan | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Administrasi Umum | Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional | Jumlah kendaraan dinas roda 4 dan roda 2 yang dipelihara (bulan) |
| 19 | Urusan Penunjang | Urusan Pemerintahan | Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor | Jumlah Peralatan gedung kantor yang dipelihara (bulan) | 7 | 01 | 01 | 2.03 | 34 | Kecamatan | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Administrasi Umum | Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor | Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara (bulan) |
| 20 | Urusan Penunjang | Urusan Pemerintahan | Program Peningkatan Disiplin Aparatur | Persentase peningkatan disiplin aparatur (%) | 7 | 01 | 01 | 2.04 | | Kecamatan | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | | - Persentase aparatur yang meningkat SDMya (%) - Persentase ASN berpakaian dinas dengan atribut lengkap (%) |
| 21 | Urusan Penunjang | Urusan Pemerintahan | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta kelengkapannya | Jumlah Pakaian Dinas Upacara Camat yang diadakan (set) | 7 | 01 | 01 | 2.04 | 02 | Kecamatan | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta kelengkapannya | Jumlah pakaian dinas yang diadakan (paket) |
| 22 | Urusan Penunjang | Urusan Pemerintahan | Pendidikan dan Pelatihan Formal | Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal (org) | 7 | 01 | 01 | 2.04 | 09 | Kecamatan | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Pendidikan dan Pelatihan Formal | Jumlah pendidikan dan pelatihan formal yang diikuti (kali) |
| 23 | Urusan Penunjang | Urusan Pemerintahan | Program Operasional Kecamatan | Persentase jumlah koordinasi yang dilakukan (%) | 7 | 01 | 02 | | | Kecamatan | Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik | | | Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik yang terlaksana dengan baik (%) |

| PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA | | | | | PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 | | | | | | | | | |
|---|------------------|---------------------|--|--|---------------------------|----|----|------|----|---------------|---|--|--|---|
| NO | URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM/KEGIATAN | Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output) | KODE | | | | | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 24 | Urusan Penunjang | Urusan Pemerintahan | Program Operasional Kecamatan | Persentase jumlah koordinasi yang dilakukan (%) | 7 | 01 | 02 | 2,01 | | Kecamatan | Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik | Koordinasi Penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di TK Kecamatan | | Terfasilitasinya kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan (bulan) |
| 25 | Urusan Penunjang | Urusan Pemerintahan | Fasilitasi rapat koordinasi bulanan Kecamatan | Jumlah Rakor yang difasilitasi (bulan) | 7 | 01 | 02 | 2,01 | 01 | Kecamatan | Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik | Koordinasi Penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di TK Kecamatan | Koordinasi / Sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi vertikal terkait | Jumlah rapat koordinasi yang dilaksanakan (kali) |
| 26 | Urusan Penunjang | Urusan Pemerintahan | Musrenbang Kecamatan | Jumlah RPTK yang dihasilkan(dokumen) | 7 | 01 | 02 | 2,01 | 01 | Kecamatan | Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik | Koordinasi Penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di TK Kecamatan | Koordinasi / Sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi vertikal terkait | Jumlah kegiatan Musrenbang Kec. yang dilaksanakan (keg) |
| 27 | Urusan Penunjang | Urusan Pemerintahan | Penunjang Operasional Kegiatan Pembangunan Kota di Kecamatan | Jumlah kegiatan Kota di kecamatan yang difasilitasi (kegiatan) :Jumlah UKS, Jambore Kader PKK, Fortasih,Pemantauan SAPRAS Des/Kel, | 7 | 01 | 03 | | | Kecamatan | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa / Kelurahan | | | Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif (%) |

| PERMENDAGRI 13/RPJM/RENSTRA/RKPD/RENJA | | | | | PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 | | | | | | | | | | |
|--|------------------|---------------------|--|--|---------------------------|----|----|------|----|---------------|-----------|--|---|---|--|
| NO | URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM/KEGIATAN | Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output) | KODE | | | | | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 28 | Urusan Penunjang | Urusan Pemerintahan | Penunjang Operasional Kegiatan Pembangunan Kota di Kecamatan | Jumlah kegiatan Kota di kecamatan yang difasilitasi (kegiatan) :Jumlah UKS, Jambore Kader PKK, Fortasih,Pemantauan SAPRAS Des/Kel, | 7 | 01 | 03 | 2.01 | | | Kecamatan | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa / Kelurahan | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | | Jumlah kegiatan pemberdayaan desa yang difasilitasi (kegiatan) |
| 29 | Urusan Penunjang | Urusan Pemerintahan | Penunjang Operasional Kegiatan Pembangunan Kota di Kecamatan | Jumlah kegiatan Kota di kecamatan yang difasilitasi (kegiatan) :Jumlah UKS, Jambore Kader PKK, Fortasih,Pemantauan SAPRAS Des/Kel, | 7 | 01 | 03 | 2.01 | 03 | | Kecamatan | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa / Kelurahan | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | Peningkatan Efektifitas kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Jumlah operasional DPC LPM yang difasilitasi (bulan) |
| 30 | Urusan Penunjang | Urusan Pemerintahan | Fasilitasi Kegiatan Olahraga Kecamatan | Jumlah cabang Olahraga yang difasilitasi (cabang) | 7 | 01 | 05 | | | | Kecamatan | Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | | | Persentase terselenggaranya urusan pemerintahan umum dengan baik (%) |
| 31 | Urusan Penunjang | Urusan Pemerintahan | Fasilitasi Kegiatan Olahraga Kecamatan | Jumlah cabang Olahraga yang difasilitasi (cabang) | 7 | 01 | 05 | 2,01 | | | Kecamatan | Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah | | Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan di Kecamatan (kegiatan) |
| 32 | Urusan Penunjang | Urusan Pemerintahan | Fasilitasi Kegiatan Olahraga Kecamatan | Jumlah cabang Olahraga yang difasilitasi (cabang) | 7 | 01 | 05 | 2,01 | 03 | | Kecamatan | Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah | Pembinaan Persatuan Dan Kesatuan Bangsa | Jumlah cabang Olahraga yang difasilitasi (cabang) |
| 33 | Urusan Penunjang | Urusan Pemerintahan | Evaluasi dan Monitoring Pelaksanaan Dana Desa | Jumlah Desa yang dievaluasi (desa) | 7 | 01 | 06 | | | | Kecamatan | Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | | | Terselenggaranya pemerintahan desa dengan baik (%) |

| PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA | | | | | PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 | | | | | | | | | | |
|---|------------------|---------------------|---|--|---------------------------|----|----|------|----|---------------|-----------|---|---|--|--|
| NO | URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM/KEGIATAN | Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output) | KODE | | | | | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 34 | Urusan Penunjang | Urusan Pemerintahan | Evaluasi dan Monitoring Pelaksanaan Dana Desa | Jumlah Desa yang dievaluasi (desa) | 7 | 01 | 06 | 2,01 | | | Kecamatan | Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | | Pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang dilaksanakan (bulan) |
| 35 | Urusan Penunjang | Urusan Pemerintahan | Evaluasi dan Monitoring Pelaksanaan Dana Desa | Jumlah Desa yang dievaluasi (desa) | 7 | 01 | 06 | 2,01 | 03 | | Kecamatan | Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | Jumlah desa yang dievaluasi (desa) |
| 36 | Urusan Penunjang | Urusan Pemerintahan | Fasilitasi pemilihan kepala desa | Jumlah desa yang dimonitoring pelaksanaan pilkades (desa) | 7 | 01 | 06 | 2,01 | 06 | | Kecamatan | Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa | Jumlah desa yang melaksanakan pemilihan kepala desa (desa) |
| 37 | Urusan Penunjang | Urusan Pemerintahan | Program Pembinaan Keagamaan | Persentase Pembinaan Agama yang Terselenggara (%) | 7 | 01 | 02 | | | | Kecamatan | Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik | | | Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik yang terlaksana dengan baik (%) |
| 38 | Urusan Penunjang | Urusan Pemerintahan | Program Pembinaan Keagamaan | Persentase Pembinaan Agama yang Terselenggara (%) | 7 | 01 | 02 | 2,01 | | | Kecamatan | Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik | Koordinasi Penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan di TK Kecamatan | | Terfasilitasinya kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan (bulan) |
| 39 | Urusan Penunjang | Urusan Pemerintahan | Pelaksanaan MTQ Kecamatan dan Kota | jumlah cabang yang diikuti dalam MTQ tingkat Kota (cabang) | 7 | 01 | 02 | 2,01 | 02 | | Kecamatan | Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik | Koordinasi Penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan di TK Kecamatan | Peningkatan Efektifitas kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Jumlah cabang yang dilaksanakan dalam MTQ Tingkat Kecamatan (cabang) |
| 40 | Urusan Penunjang | Urusan Pemerintahan | Fasilitasi Kegiatan Pondok Al-Qur'an | Jumlah Kegiatan Pondok Al-Qur'an yang | 7 | 01 | 02 | 2,01 | 02 | | Kecamatan | Program Penyelenggaraan Pemerintahan | Koordinasi Penyelenggaraan kegiatan | Peningkatan Efektifitas kegiatan Pemerintahan di | Jumlah kegiatan pondok Al-Qur'an yang |

| PERMENDAGRI 13/RPJM/RENSTRA/RKPD/RENJA | | | | | PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 | | | | | | | | | | |
|--|------------------|---|--|---|---------------------------|----|----|------|----|---------------|---|--|---|---|------------------------|
| NO | URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM/KEGIATAN | Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output) | KODE | | | | | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| | | | | diselenggarakan (kali) | | | | | | | | Dan Pelayanan Publik | Pemerintahan di TK Kecamatan | Tingkat Kecamatan | diselenggarakan (kali) |
| 41 | Urusan Penunjang | Urusan Pemerintahan | Fasilitasi kegiatan keagamaan Tingkat Kecamatan | Jumlah Mesjid/Mushalla yang dikunjungi dalam Tim Ramadhan Kecamatan (Desa/ Kel) | 7 | 01 | 02 | 2,01 | 02 | Kecamatan | Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik | Koordinasi Penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan di TK Kecamatan | Peningkatan Efektifitas kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Jumlah kegiatan keagamaan yang difasilitasi di Tk. Kecamatan (Kegiatan) | |
| 42 | Urusan Penunjang | Urusan Wajib bukan pelayanan dasar pemberdayaan masyarakat desa | Program Peningkatan Peran Serta dan Kesejahteraan Gender dalam Pembangunan | Persentase Jumlah program pokok PKK yang terlaksana (%) | 7 | 01 | 03 | | | Kecamatan | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa / Kelurahan | | | Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif (%) | |
| 43 | Urusan Penunjang | Urusan Wajib bukan pelayanan dasar pemberdayaan masyarakat desa | Program Peningkatan Peran Serta dan Kesejahteraan Gender dalam Pembangunan | Persentase Jumlah program pokok PKK yang terlaksana (%) | 7 | 01 | 03 | 2,01 | | Kecamatan | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa / Kelurahan | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | | Jumlah kegiatan pemberdayaan desa yang difasilitasi (kegiatan) | |
| 44 | Urusan Penunjang | Urusan Wajib bukan pelayanan dasar pemberdayaan masyarakat desa | Pelaksanaan TP.PKK Kecamatan | Jumlah Program Pokok PKK yang difasilitasi (Program) | 7 | 01 | 03 | 2,01 | 03 | Kecamatan | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa / Kelurahan | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | Peningkatan Efektifitas kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Jumlah Program Pokok PKK yang difasilitasi di (Program) | |
| 45 | Urusan Penunjang | Urusan Wajib bukan pelayanan dasar pemberdayaan masyarakat desa | Operasional DPC LPM Kecamatan | Jumlah Operasional DPC LPM yang di fasilitasi (bulan) | 7 | 01 | 03 | 2,01 | 03 | Kecamatan | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa / Kelurahan | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | Peningkatan Efektifitas kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Jumlah Operasional DPC LPM yang di fasilitasi (bulan) | |
| 46 | Urusan Penunjang | Urusan Wajib bukan pelayanan dasar pemberdayaan masyarakat desa | Peningkatan SDM Aparatur DPC LPM Kecamatan | Jumlah Aparatur DPC LPM Kecamatan yang difasilitasi peningkatan SDMnya (orang) | 7 | 01 | 03 | 2,01 | 03 | Kecamatan | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa / Kelurahan | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | Peningkatan Efektifitas kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Jumlah Aparatur DPC LPM Kecamatan yang difasilitasi (orang) | |

| PERMENDAGRI 13/RPJM/RENSTRA/RKPD/RENJA | | | | | PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 | | | | | | | | | | |
|--|------------------|---------------------|--|---|---------------------------|----|----|------|----|---------------|-----------|---|---|--|--|
| NO | URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM/KEGIATAN | Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output) | KODE | | | | | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 47 | Urusan Penunjang | Urusan Pemerintahan | Program Penyiapan potensi Sumberdaya, sarana dan prasarana daerah | Persentase pelayanan administrasi terpadu kecamatan yang dilaksanakan (%) | 7 | 01 | 02 | | | | Kecamatan | Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik | | | Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik yang terlaksana dengan baik (%) |
| 48 | Urusan Penunjang | Urusan Pemerintahan | Program Penyiapan potensi Sumberdaya, sarana dan prasarana daerah | Persentase pelayanan administrasi terpadu kecamatan yang dilaksanakan (%) | 7 | 01 | 02 | 2,04 | | | Kecamatan | Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat | | Pelimpahan urusan pemerintahan yang dilaksanakan di kecamatan (kegiatan) |
| 49 | Urusan Penunjang | Urusan Pemerintahan | Fasilitasi Pelayanan dan perizinan dan non perizinan | Jumlah pelayanan perizinan dan non perizinan yang difasilitasi (bulan) | 7 | 01 | 02 | 2,04 | 01 | | Kecamatan | Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan | Jumlah Pelayanan Perizinan yang dilaksanakan (bulan) |
| 50 | Urusan Penunjang | Urusan Pemerintahan | Fasilitasi Penunjang Operasional Pemerintahan Kelurahan Lubang Panjang | Penunjang operasional kelurahan Lubang Panjang yang difasilitasi (bulan) | 7 | 01 | 02 | 2,04 | 03 | | Kecamatan | Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat | Pelaksanaan Urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan | Operasional penunjang kegiatan (kelurahan) |
| 51 | Urusan Penunjang | Urusan Pemerintahan | Fasilitasi Penunjang Operasional Pemerintahan Kelurahan Durian I | Penunjang operasional kelurahan Durian I yang difasilitasi (bulan) | 7 | 01 | 02 | 2,04 | 03 | | Kecamatan | Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat | Pelaksanaan Urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan | Operasional penunjang kegiatan (kelurahan) |
| 52 | Urusan Penunjang | Urusan Pemerintahan | Fasilitasi Penunjang Operasional Pemerintahan Kelurahan Durian II | Penunjang operasional kelurahan Durian II yang difasilitasi (bulan) | 7 | 01 | 02 | 2,04 | 03 | | Kecamatan | Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat | Pelaksanaan Urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan | Operasional penunjang kegiatan (kelurahan) |

| PERMENDAGRI 13/RPJM/D/RENSTRA/RKPD/RENJA | | | | | PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 | | | | | | | | | |
|--|------------------|---------------------|---|--|---------------------------|----|----|------|----|---------------|---|---|--|--|
| NO | URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM/KEGIATAN | Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output) | KODE | | | | | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 53 | Urusan Penunjang | Urusan Pemerintahan | Fasilitasi Penunjang Operasional Saringan | Penunjang operasional kelurahan Saringan yang difasilitasi (bulan) | 7 | 01 | 02 | 2,04 | 03 | Kecamatan | Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat | Pelaksanaan Urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan | Operasional penunjang kegiatan (kelurahan) |
| 54 | Urusan Penunjang | Urusan Pemerintahan | Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan | Pembangunan Infrastruktur Kelurahan (kegiatan/paket) | 7 | 01 | 03 | | | Kecamatan | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan | | | Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif (%) |
| 55 | Urusan Penunjang | Urusan Pemerintahan | Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan | Pembangunan Infrastruktur Kelurahan (kegiatan/paket) | 7 | 01 | 03 | 2,02 | | Kecamatan | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | | Terfasilitasinya kegiatan pemberdayaan di kelurahan (bulan) |
| 56 | Urusan Penunjang | Urusan Pemerintahan | Pembangunan Infrastruktur Lingkungan Kelurahan Saringan | infrastruktur kelurahan Saringan yang dibangun dan ditingkatkan (kegiatan/paket) | 7 | 01 | 03 | 2,02 | 02 | Kecamatan | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan | iPembangunan dan Peningkatan infrastruktur yang dilaksanakan (kelurahan) |
| 57 | Urusan Penunjang | Urusan Pemerintahan | Pembangunan Infrastruktur Lingkungan Kelurahan Lubang Panjang | infrastruktur kelurahan Lubang Panjang yang dibangun dan ditingkatkan (kegiatan/paket) | 7 | 01 | 03 | 2,02 | 02 | Kecamatan | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan | iPembangunan dan Peningkatan infrastruktur yang dilaksanakan (kelurahan) |
| 58 | Urusan Penunjang | Urusan Pemerintahan | Pembangunan Infrastruktur Lingkungan Kelurahan Durian I | infrastruktur kelurahan Kubang Durian I yang dibangun dan ditingkatkan (kegiatan/paket) | 7 | 01 | 03 | 2,02 | 02 | Kecamatan | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan | iPembangunan dan Peningkatan infrastruktur yang dilaksanakan (kelurahan) |
| 59 | Urusan Penunjang | Urusan Pemerintahan | Pembangunan Infrastruktur Lingkungan Kelurahan Durian II | infrastruktur kelurahan Kubang Durian II yang dibangun dan ditingkatkan (kegiatan/paket) | 7 | 01 | 03 | 2,02 | 02 | Kecamatan | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan | iPembangunan dan Peningkatan infrastruktur yang dilaksanakan (kelurahan) |

| PERMENDAGRI 13/RPJM/RENSTRA/RKPD/RENJA | | | | | PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 | | | | | | | | | |
|--|------------------|---|--|---|---------------------------|----|----|------|---------------|-----------|--|---|---|--|
| NO | URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM/KEGIATAN | Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output) | KODE | | | | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 60 | Urusan Penunjang | Urusan Wajib Pelayanan Dasar Ketentraman dan ketertiban Umum Serta Pelindungan Masyarakat | Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan | Persentase jumlah monitoring, evaluasi dan pelaporan (%) | 7 | 01 | 04 | | | Kecamatan | Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum | | | Persentase wilayah dalam kondisi aman dan tertib (%) |
| 61 | Urusan Penunjang | Urusan Wajib Pelayanan Dasar Ketentraman dan ketertiban Umum Serta Pelindungan Masyarakat | Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan | Persentase jumlah monitoring, evaluasi dan pelaporan (%) | 7 | 01 | 04 | 2,01 | | Kecamatan | Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum | Koordinasi upaya penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum | | Terselenggaranya pembinaan ketentraman dan ketertiban umum bagi aparat satuan perlindungan masyarakat (kegiatan) |
| 62 | Urusan Penunjang | Urusan Wajib Pelayanan Dasar Ketentraman dan ketertiban Umum Serta Pelindungan Masyarakat | Pembinaan dan Monitoring KANTIBMAS | Jumlah pembinaan dan Monitoring Kantibmas yang dilakukan (Desa/Kel) | 7 | 01 | 04 | 2,01 | 01 | Kecamatan | Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum | Koordinasi upaya penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi vertikan di wilayah kecamatan | Jumlah Linmas yang dibina (orang) |
| 63 | Urusan Penunjang | Urusan Wajib Pelayanan Dasar Ketentraman dan ketertiban Umum Serta Pelindungan Masyarakat | Program Pengembangan wawasan Kebangsaan | Persentase desa/kel yang memiliki wawasan kebangsaan (%) | 7 | 01 | 05 | | | Kecamatan | Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | | | Persentase terselenggaranya urusan pemerintahan umum dengan baik (%) |
| 64 | Urusan Penunjang | Urusan Wajib Pelayanan Dasar Ketentraman dan ketertiban Umum Serta Pelindungan Masyarakat | Program Pengembangan wawasan Kebangsaan | Persentase desa/kel yang memiliki wawasan kebangsaan (%) | 7 | 01 | 05 | 2,01 | | Kecamatan | Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah | | Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan di Kecamatan (kegiatan) |
| 65 | Urusan Penunjang | Urusan Wajib Pelayanan Dasar Ketentraman | Peringatan hari-hari Besar Nasional | Jumlah peringatan hari besar Nasional | 7 | 01 | 05 | 2,01 | 01 | Kecamatan | Program Penyelenggaraan Urusan | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan | Pembinaan Wawasan kebangsaan dan | Jumlah hari-hari besar Nasional yang |

| PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA | | | | | PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 | | | | | | | | |
|---|--------|--|------------------|--|---------------------------|--|--|--|---------------|-------------------|-------------------------------------|---|---|
| NO | URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM/KEGIATAN | Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output) | KODE | | | | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | dan ketertiban Umum Serta Pelindungan Masyarakat | | yang dilaksanakan (kegiatan) | | | | | | Pemerintahan Umum | Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah | ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengalaman pancasila pelaksanaan UUD Negara RI Tahun 1945 , kelestarian bhineka tunggal ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan negara kesatuan RI | dilaksanakan (kegiatan) |

KECAMATAN LEMBAH SEGAR

| PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA | | | | | PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 | | | | | | | | |
|---|--------|---------------|---|--|---------------------------|--|----|------|---------------|-----------|--|-------------------|--|
| NO | URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM/KEGIATAN | Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output) | KODE | | | | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Administrasi Perkantoran Berjalan Lancar dan Tertib (Bulan) | | | | | | | | | |
| | | | | | 7 | | 01 | | | Kecamatan | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | Tersedianya sarana pelayanan Administrasi Perkantoran (%) |
| | | | | | | | | | | | | | Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur |
| | | | | | | | | | | | | | Persentase Aparatur yang meningkat SDM nya |
| | | | | | | | | | | | | | Persentase ASN Berpakaian Dinas dengan Atribut Lengkap |
| | | | | | | | | | | | | | Terwujudnya Pembinaan dan Pengembangan Aparatur |
| | | | | | | | | | | | | | Persentase tindak lanjut temuan (%) |
| | | | | | 7 | | 01 | 2.03 | | Kecamatan | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Administrasi Umum | Terfasilitasinya pelayanan administrasi umum (bulan) |
| | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jasa Surat menyurat yang disediakan (bulan) | 7 | | 01 | 2.03 | 01 | Kecamatan | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Administrasi Umum | Penyediaan Jasa Surat Menyurat |
| | | | Penyediaan Jasa Komunikasi , sumberdaya air dan Listrik | Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan (Bulan) | 7 | | 01 | 2.03 | 02 | Kecamatan | Program Penunjang Urusan | Administrasi Umum | Penyediaan Jasa Komunikasi , sumberdaya air dan Listrik |
| | | | | | | | | | | | | | Jumlah materai yang disediakan (bulan) |
| | | | | | | | | | | | | | Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik yang dibayarkan (bulan) |

| PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA | | | | | PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 | | | | | | | |
|---|--------|---------------|---|---|---------------------------|--|------------|---------------|--|-------------------|---|--|
| NO | URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM/KEGIATAN | Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output) | KODE | | | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | | | | | | | Pemerintahan Daerah | | | |
| | | | Penatausahaan Keuangan dan Barang | Jumlah Jasa administrasi Keuangan dan barang yang disediakan (bulan) | | | 01 2.03 07 | Kecamatan | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Administrasi Umum | Penatausahaan Keuangan dan Barang | Jasa administrasi keuangan yang dibayarkan (bulan) |
| | | | Penyediaan Jasa Kebersihan | Jasa Kebersihan Kantor yang disediakan (Bulan) | | | 01 2.03 08 | Kecamatan | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Administrasi Umum | Penyediaan Jasa Kebersihan | Jumlah alat kebersihan kantor yang disediakan (bulan) |
| | | | Penyediaan Alat Tulis kantor | Alat Tulis Kantor yang disediakan (Bulan) | | | 01 2.03 10 | Kecamatan | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Administrasi Umum | Penyediaan Alat Tulis kantor | Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (bulan) |
| | | | Penyediaan barang cetak dan Pengandaan | Barang Cetak dan Pengandaan yang disediakan (Bulan) | | | 01 2.03 11 | Kecamatan | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Administrasi Umum | Penyediaan barang cetak dan Pengandaan | Jumlah barang cetak dan pengandaan yang disediakan (bulan) |
| | | | Penyediaan Komponen instalansi listrik / Penerangan Bangunan kantor | Komponen Instalasi listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan (Bulan) | | | 01 2.03 12 | Kecamatan | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Administrasi Umum | Penyediaan Komponen instalansi listrik / Penerangan Bangunan kantor | Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yg disediakan (bulan) |
| | | | Penyediaan Makan dan Minum | Makan dan Minum yang disediakan (bulan) | | | 01 2.03 15 | Kecamatan | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Administrasi Umum | Penyediaan Makan dan Minum | Jumlah makan dan minum yang disediakan (bulan) |
| | | | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar Daerah | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar Daerah yang difasilitasi (bulan) | | | 01 2.03 18 | Kecamatan | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Administrasi Umum | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar Daerah | Jumlah rapat koordinasi & konsultasi yang diikuti (bulan) |

| PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA | | | | | PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 | | | | | | | | | |
|---|--------|---------------|--|--|---------------------------|--|----|------|---------------|-----------|--|-----------------------|--|--|
| NO | URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM/KEGIATAN | Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output) | KODE | | | | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| | | | | | | | | | | Kecamatan | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | Tersedianya sarana pelayanan administrasi perkatoran (%) | |
| | | | | | | | | | | Kecamatan | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Administrasi Keuangan | Terfasilitasinya pelayanan administrasi keuangan (orang/bulan) | |
| | | | Penyediaan jasa pelayanan Pegawai Non PNS | Jumlah tenaga pegawai Non PNS yang difasilitasi (orang) | | | 01 | 2.02 | 01 | Kecamatan | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Administrasi Keuangan | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah tenaga pegawai Non PNS yang difasilitasi (orang) |
| | | | Penyediaan dokumentasi dan dekorasi | Dokumentasi dan dekorasi yang disediakan (bulan) | | | 01 | 2.03 | 13 | Kecamatan | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Administrasi Umum | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah dokumentasi dan dekorasi yang disediakan (bulan) |
| | | | | | | | | | | Kecamatan | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | Tersedianya sarana pelayanan administrasi perkatoran (%) | |
| | | | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Sarana dan prasarana aparatur yang disediakan (Bulan) | | | | | | Kecamatan | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Administrasi Umum | Terfasilitasinya pelayanan administrasi umum (bulan) | |
| | | | Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor | Gedung Kantor yang dipelihara (bulan) | | | 01 | 2.03 | 28 | Kecamatan | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Administrasi Umum | Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor | Jumlah gedung kantor yang dipelihara (unit) |
| | | | Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Dinas / Operasional | Kendaraan Roda Empat dan Roda Dua yang dipelihara (bulan) | | | 01 | 2.03 | 30 | Kecamatan | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Administrasi Umum | Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Dinas / Operasional | Jumlah kendaraan dinas roda 4 dan roda 2 yang dipelihara (bulan) |

| PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA | | | | | PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 | | | | | | | |
|---|--------|---------------|---|---|---------------------------|----|------------|---------------|---|---|---|--|
| NO | URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM/KEGIATAN | Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output) | KODE | | | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | Pemeliharaan Rutin/Berkhala peralatan gedung kantor | Peralatan gedung kantor yang dipelihara (bulan) | | | 01 2.03 34 | Kecamatan | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Administrasi Umum | Pemeliharaan Rutin/Berkhala peralatan gedung kantor | Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara (bulan) |
| | | | | | | | 01 2.04 | Kecamatan | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | Tersedianya sarana pelayanan administrasi perkatoran (%) |
| | | | Program Peningkatan Disiplin Aparatur | Persentase Peningkatan Disiplin Aparatur (%) | | | 01 2.04 | Kecamatan | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | | Persentase ASN berpakaian dinas dengan atribut lengkap (%) |
| | | | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya | Jumlah Pakaian dinas upacara camat yang diadakan (paket) | | | 01 2.04 02 | Kecamatan | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya | Jumlah Pakaian dinas upacara camat yang diadakan (paket) |
| | | | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Jumlah Aparatur yang meningkat kompetensinya (Orang) | | | | | | | | |
| | | | Pendidikan Pelatihan Formal | Aparatur yang mengikuti pendidikan pelatihan formal (Orang) | | | 01 2.04 09 | Kecamatan | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Pendidikan dan Pelatihan Formal | Jumlah pendidikan dan pelatihan formal yang diikuti (kali) |
| | | | | | 7 | 01 | 02 | Kecamatan | Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik | | | Meningkatnya Pengetahuan aparat desa/keurahan dlm mengelola pelayanan administrasi (%) |

| PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA | | | | | PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 | | | | | | | | | |
|---|--------|---------------|--|--|---------------------------|----|----|------|---------------|-----------|---|--|--|--|
| NO | URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM/KEGIATAN | Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output) | KODE | | | | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| | | | | | | | | | | | | | Persentase pembinaan agama yang terselenggara (%) | |
| | | | | | | | | | | | | | Persentase Kegiatan Operasional Kecamatan yang dilaksanakan (%) | |
| | | | | | | | | | | | | | Persentase pelayanan administrasi terpadu kecamatan yang dilaksanakan (%) | |
| | | | | | | | | | | | | | Persentase jaringan informasi publik di kecamatan yang dioptimalisasi (%) | |
| | | | Program Operasional Kecamatan | Persentase Operasional Kecamatan yang dilaksanakan (%) | 7 | 01 | 02 | 2.01 | | Kecamatan | Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik | Koordinasi Penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di TK Kecamatan | Terfasilitasinya kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan (bulan) | |
| | | | Pelaksanaan Rapat Koordinasi Bulanan Kecamatan | Jumlah Rakor Kecamatan yang dilaksanakan (bulan) | 7 | 01 | 02 | 2.01 | 01 | Kecamatan | Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik | Koordinasi Penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di TK Kecamatan | Koordinasi / Sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi vertikal terkait | Jumlah rapat koordinasi yang dilaksanakan (kali) |
| | | | Program Perencanaan Pembangunan Daerah | Persentase konsistensi Program Renstra kedalam Renja (%) | | | | | | | | | | |

| PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA | | | | | PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 | | | | | | | | | |
|---|--------|---------------|---|--|---------------------------|----|----|------|---------------|-----------|---|--|--|--|
| NO | URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM/KEGIATAN | Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output) | KODE | | | | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| | | | Musrenbang Kecamatan | Jumlah kegiatan Musrenbang Kec. yang dilaksanakan (keg) | 7 | 01 | 02 | 2.01 | 01 | Kecamatan | Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik | Koordinasi Penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan di TK Kecamatan | Koordinasi / Sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi vertikal terkait | Jumlah kegiatan Musrenbang Kec. yang dilaksanakan (keg) |
| | | | Program Peningkatan Peran Perempuan di Desa/Kelurahan | Persentase PKK yang Aktif (%) | | | | | | | | | | |
| | | | | | 7 | 01 | 03 | | | Kecamatan | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa / Kelurahan | | | Presentase Lembaga Masyarakat yang aktif (%) |
| | | | | | | | | | | | | | | Presentase PKK yang aktif (%) |
| | | | | | | | | | | | | | | Jumlah kawasan kegiatan infrastruktur lingkungan kelurahan yang dipelihara (kawasan) |
| | | | | | | | | | | | | | | Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) |
| | | | | | 7 | 01 | 03 | 2.01 | | Kecamatan | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa / Kelurahan | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | | Jumlah kegiatan pemberdayaan desa yang difasilitasi (kegiatan) |
| | | | Pelaksanaan TP.PKK Kecamatan | Jumlah Program Pokok PKK yang difasilitasi di Kecamatan Talawi (program) | 7 | 01 | 03 | 2.01 | 03 | Kecamatan | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa / Kelurahan | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | Peningkatan Efektifitas kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Jumlah Program Pokok PKK yang difasilitasi (program) |

| PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA | | | | | PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 | | | | | | | | |
|---|--------|---------------|-------------------------------------|---|---------------------------|----|----|------|---------------|-----------|---|---|---|
| NO | URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM/KEGIATAN | Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output) | KODE | | | | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | Program Pembinaan Keagamaan | Persentase Santri Rumah/Pondok Tahfidz yang hafidz minimal 5 juz dalam se tahun (%) | | | | | | | | | |
| | | | | | 7 | 01 | 02 | | | Kecamatan | Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik | | Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik yang terlaksana dengan baik (%) |
| | | | | | 7 | 01 | 02 | 2.01 | | Kecamatan | Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik | Koordinasi Penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan di TK Kecamatan | Terfasilitasinya kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan (bulan) |
| | | | Pelaksanaan MTQ Tingkat Kecamatan | Jumlah cabang yang diikuti dalam MTQ Tingkat Kota (cabang) | 7 | 01 | 02 | 2.01 | 02 | Kecamatan | Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik | Koordinasi Penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan di TK Kecamatan | Jumlah cabang yang diikuti dalam MTQ Tingkat Kota (cabang) |
| | | | Fasilitasi Tim Ramadhan Kecamatan | Jumlah kegiatan keagamaan yang difasilitasi di Tk. Kecamatan (Kegiatan) | | | | | | Kecamatan | Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik | Koordinasi Penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan di TK Kecamatan | Jumlah kegiatan keagamaan yang difasilitasi di Tk. Kecamatan (Kegiatan) |
| | | | Pembinaan Pondok Al'Quran Kecamatan | Jumlah kegiatan pondok Al-Qur'an yang diselenggarakan (kali) | | | | | | Kecamatan | Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik | Koordinasi Penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan di TK Kecamatan | Jumlah kegiatan pondok Al-Qur'an yang diselenggarakan (kali) |
| | | | | | 7 | 01 | 02 | 2.02 | | Kecamatan | Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat | Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan |

| PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA | | | | | PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 | | | | | | | | | |
|---|--------|---------------|--|--|---------------------------|----|----|------|---------------|-----------|---|--|---|--|
| NO | URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM/KEGIATAN | Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output) | KODE | | | | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| | | | | | | | | | | | Daerah yang ada di Kecamatan | | | |
| | | | Program Penataan Administrasi Kependudukan | Persentase Pelaksanaan Administrasi Kependudukan yang dilaksanakan (%) | 7 | 01 | 02 | 2.02 | 02 | Kecamatan | Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan | Facilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan | |
| | | | Penunjang Pelaksanaan Administrasi Kependudukan | Jumlah Administrasi Kependudukan yang diselenggarakan (kali) | | | | | | | | | | |
| | | | | | 7 | 01 | 03 | | | Kecamatan | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa / Kelurahan | | | Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif (%) |
| | | | Program Operasional Kecamatan | Persentase Operasional Kecamatan yang dilaksanakan (%) | 7 | 01 | 03 | 2.01 | | Kecamatan | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa / Kelurahan | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | | Jumlah kegiatan pemberdayaan desa yang difasilitasi (kegiatan) |
| | | | Penunjang Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Kota di Kecamatan | Jumlah Kegiatan Pembangunan Kota yang difasilitasi (keg) | 7 | 01 | 03 | 2.01 | 03 | Kecamatan | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa / Kelurahan | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | Peningkatan Efektifitas kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Jumlah Kegiatan Pembangunan Kota yang difasilitasi (keg) |
| | | | | | 7 | 01 | 02 | | | Kecamatan | Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik | | | Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik yang terlaksana dengan baik (%) |

| PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA | | | | | PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 | | | | | | | | | |
|---|--------|---------------|---|---|---------------------------|----|----|------|---------------|-----------|---|---|---|--|
| NO | URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM/KEGIATAN | Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output) | KODE | | | | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| | | | Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana dan Prasarana Daerah | Persentase Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan yang dilaksanakan (%) | 7 | 01 | 02 | 2.04 | | Kecamatan | Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat | | Pelimpahan urusan pemerintahan yang dilaksanakan di kecamatan (kegiatan) |
| | | | Fasilitasi Pelayanan dan Perizinan | Jumlah Pelayanan perizinan (bulan) | 7 | 01 | 02 | 2.04 | 01 | Kecamatan | Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan | Jumlah Pelayanan perizinan yang difasilitasi (bulan) |
| | | | | | 7 | 01 | 03 | | | Kecamatan | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa / Kelurahan | | | Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif (%) |
| | | | Program Peningkatan Keberdayaan Desa/Kelurahan | Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang aktif (%) | 7 | 01 | 03 | 2.01 | | Kecamatan | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa / Kelurahan | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | Peningkatan Efektifitas kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Jumlah kegiatan pemberdayaan desa yang difasilitasi (kegiatan) |
| | | | Pelaksanaan DPC LPM Kecamatan | Jumlah operasional DPC LPM yang difasilitasi (bulan) | 7 | 01 | 03 | 2.01 | 03 | Kecamatan | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa / Kelurahan | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | Peningkatan Efektifitas kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Jumlah operasional DPC LPM yang difasilitasi (bulan) |
| | | | | | 7 | 01 | 03 | 2.02 | | Kecamatan | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | | Terfasilitasinya kegiatan pemberdayaan di kelurahan (bulan) |

| PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA | | | | | PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 | | | | | | | | | |
|---|--------|---------------|---|--|---------------------------|----|----|------|----|---------------|---------------------------------|---------------------------------|--|---|
| NO | URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM/KEGIATAN | Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output) | KODE | | | | | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | Program Pembangunan Infrastruktur dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan | Jumlah kawasan kegiatan infrastruktur lingkungan kelurahan yang dipelihara (kawasan) | 7 | 01 | 03 | 2.02 | 02 | Kecamatan | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | Pembangunan dan Peningkatan infrastruktur yang dilaksanakan (kelurahan) |
| | | | Pembangunan dan Peningkatan Infrastruktur Lingkungan Kelurahan Kubang Sirakuk Utara | Jumlah kawasan kegiatan infrastruktur lingkungan kelurahan yang dipelihara (kawasan) | | | | | | | | | | |
| | | | Pembangunan dan Peningkatan Infrastruktur Lingkungan Kelurahan Kubang Sirakuk Selatan | Jumlah kawasan kegiatan infrastruktur lingkungan kelurahan yang dipelihara (kawasan) | | | | | | | | | | |
| | | | Pembangunan dan Peningkatan Infrastruktur Lingkungan Kelurahan Air Dingin | Jumlah kawasan kegiatan infrastruktur lingkungan kelurahan yang dipelihara (kawasan) | | | | | | | | | | |
| | | | Pembangunan dan Peningkatan Infrastruktur Lingkungan Kelurahan Pasar | Jumlah kawasan kegiatan infrastruktur lingkungan kelurahan yang dipelihara (kawasan) | | | | | | | | | | |
| | | | Pembangunan dan Peningkatan Infrastruktur Lingkungan | Jumlah kawasan kegiatan infrastruktur lingkungan kelurahan yang | | | | | | | | | | |

| PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA | | | | | PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 | | | | | | | | | |
|---|--------|---------------|---|--|---------------------------|----|----|------|---------------|-----------|--|---|---|--|
| NO | URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM/KEGIATAN | Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output) | KODE | | | | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| | | | Kelurahan Aur Mulyo | dipelihara (kawasan) | | | | | | | | | | |
| | | | Pembangunan dan Peningkatan Infrastruktur Lingkungan Kelurahan Tanah Lapang | Jumlah kawasan kegiatan infrastruktur lingkungan kelurahan yang dipelihara (kawasan) | | | | | | | | | | |
| | | | | | 7 | 01 | 03 | 2.02 | 03 | Kecamatan | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | Pemberdayaan Masyarakat di kelurahan | Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilaksanakan (kelurahan) |
| | | | | | 7 | 01 | 05 | | | Kecamatan | Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | | | Persentase terselenggaranya urusan pemerintahan umum dengan baik (%) |
| | | | Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan | Jumlah Peringatan Hari-hari Besar yang difasilitasi (Keg) | 7 | 01 | 05 | 2.01 | | Kecamatan | Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah | | Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah |
| | | | Peringatan hari-hari Besar Nasional | Jumlah hari-hari besar Nasional yang dilaksanakan (kegiatan) | 7 | 01 | 05 | 2.01 | 01 | Kecamatan | Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah | Pembinaan Wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengalaman pancasila pelaksanaan UUD Negara RI Tahun 1945 , kelestarian bhineka tunggal ika serta pemertahanan | Jumlah hari-hari besar Nasional yang dilaksanakan (kegiatan) |

| PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA | | | | | PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 | | | | | | | | | |
|---|--------|---------------|--|--|---------------------------|----|----|------|---------------|-----------|--|--|--|--|
| NO | URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM/KEGIATAN | Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output) | KODE | | | | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| | | | | | | | | | | | | dan pemeliharaan keutuhan negara kesatuan RI | | |
| | | | | | 7 | 01 | 04 | | | Kecamatan | Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum | | Persentase Desa/Kel yang memiliki wawasan kebangsaan (%) | |
| | | | | | | | | | | | | | Persentase Gangguan Keamanan yang ditangani secara terpadu | |
| | | | Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan | Persentase Gangguan Keamanan yang ditangani secara terpadu (%) | 7 | 01 | 04 | 2.01 | | Kecamatan | Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum | Fasilitasi, koordinasi dan pembinaan BIMTEK, Sosialisasi, Konsultasi) wawasan kebangsaan dan ketahanan Nasional | Terselenggaranya pembinaan ketentraman dan ketertiban umum bagi aparat satuan perlindungan masyarakat (kegiatan) |
| | | | Pembinaan dan Monitoring KAMTIBMAS | Jumlah kegiatan yang dilaksanakan (kali) | 7 | 01 | 04 | 2.01 | 01 | Kecamatan | Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatannya | Jumlah Linmas yang dibina (orang) |
| | | | | | 7 | 01 | 05 | | | Kecamatan | Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | | Persentase terselenggaranya urusan pemerintahan umum dengan baik (%) | |

| PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA | | | | | PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 | | | | | | | | | |
|---|--------|---------------|---|--|---------------------------|----|----|------|---------------|-----------|---|---|--|--|
| NO | URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM/KEGIATAN | Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output) | KODE | | | | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| | | | Program Operasional Kecamatan | Persentase Operasional Kecamatan yang dilaksanakan (%) | 7 | 01 | 05 | 2.01 | | Kecamatan | Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah | | Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan di Kecamatan (kegiatan) |
| | | | Pelaksanaan kegiatan keolahragaan Kota dan Kecamatan | Jumlah cabang olah raga yang difasilitasi (Cabang) | 7 | 01 | 05 | 2.01 | 03 | Kecamatan | Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah | Pembinaan Persatuan Dan Kesatuan Bangsa | Jumlah cabang olah raga yang difasilitasi (Cabang) |
| | | | | | 7 | 01 | 02 | | | Kecamatan | Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik | | | Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik yang terlaksana dengan baik (%) |
| | | | | | 7 | 01 | 02 | 2.04 | | Kecamatan | Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat | | Pelimpahan urusan pemerintahan yang dilaksanakan di kecamatan (kegiatan) |
| | | | Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH | Persentase Tindak Lanjut Temuan (%) | 7 | 01 | 02 | 2.04 | 03 | Kecamatan | Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat | Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan | Operasional penunjang kegiatan (kelurahan) |
| | | | Penunjang Pelaksanaan Pemerintahan Kelurahan Aur Mulyo | Jumlah RT/RW Kelurahan Aur Mulyo yang difasilitasi (RT/RW) | | | | | | | | | | |
| | | | Penunjang Pelaksanaan Pemerintahan | Jumlah RT/RW Kelurahan Air Dingin yang | | | | | | | | | | |

| PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA | | | | | PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 | | | | | | | | | |
|---|--------|---------------|---|---|---------------------------|----|----|------|---------------|-----------|--|--|--|--|
| NO | URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM/KEGIATAN | Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output) | KODE | | | | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| | | | Kelurahan Air Dingin | difasilitasi (RT/RW) | | | | | | | | | | |
| | | | Penunjang Pelaksanaan Pemerintahan Kelurahan Kubang Sirakuk Utara | Jumlah RT/RW Kelurahan Kubang sirakuk Utara yang difasilitasi (RT/RW) | | | | | | | | | | |
| | | | Penunjang Pelaksanaan Pemerintahan Kelurahan Kubang Sirakuk Selatan | Jumlah RT/RW Kelurahan Kubang Sirakuk selatan yang difasilitasi (RT/RW) | | | | | | | | | | |
| | | | Penunjang Pelaksanaan Pemerintahan Kelurahan Pasar | Jumlah RT/RW Kelurahan Pasar yang difasilitasi (RT/RW) | | | | | | | | | | |
| | | | Penunjang Pelaksanaan Pemerintahan Kelurahan Tanah Lapang | Jumlah RT/RW Kelurahan Tanah Lapang yang difasilitasi (RT/RW) | | | | | | | | | | |
| | | | | | 7 | 01 | 06 | | | Kecamatan | Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | | Terselenggaranya pemerintahan desa dengan baik (%) | |
| | | | Program Operasional Kecamatan | Persentase Operasional Kecamatan yang dilaksanakan (%) | 7 | 01 | 06 | 2.01 | | Kecamatan | Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Fasilitasi rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan Desa | Pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang dilaksanakan (bulan) | |
| | | | Pembinaan tim Posko P3MD | Jumlah tim Posko P3MD yang dibina (Desa/Kelurahan) | 7 | 01 | 06 | 2.01 | 02 | Kecamatan | Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Fasilitasi rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan Desa | Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa | Jumlah desa/kelurahan yang dinilai(desa/kelurahan) |

| PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA | | | | | PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 | | | | | | | | | |
|---|--------|---------------|-------------------------------|--|---------------------------|----|----|------|----|---------------|--|--|--|---|
| NO | URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM/KEGIATAN | Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output) | KODE | | | | | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | Program Operasional Kecamatan | Persentase Operasional Kecamatan yang dilaksanakan (%) | 7 | 01 | 06 | 2.01 | 03 | Kecamatan | Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Fasilitasi rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan Desa | Fasilitasi pengelolaan keuangan Desa dan pendayagunaan aset Desa | Jumlah desa yang dievaluasi (desa) |

KECAMATAN SILUNGKANG

| PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA | | | | | PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 | | | | | | | | | | |
|---|------------------|---------------------|---|---|---------------------------|----|----|------|----|---------------|-----------|--|-------------------|---|---|
| NO | URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM/KEGIATAN | Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output) | KODE | | | | | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 1 | URUSAN PENUNJANG | Urusan Pemerintahan | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Tersedianya sarana pelayanan administrasi perkantoran (bulan) | 7 | 01 | 01 | | | | KECAMATAN | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | | | Tersedianya sarana pelayanan Administrasi Perkantoran (%) |
| | | | | | | | | | | | | | | | Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur |
| | | | | | | | | | | | | | | | Persentase Aparatur yang meningkat SDM nya |
| | | | | | | | | | | | | | | | Persentase ASN Berpakaian Dinas dengan Atribut Lengkap |
| | | | | | | | | | | | | | | | Terwujudnya Pembinaan dan Pengembangan Aparatur |
| 2 | URUSAN PENUNJANG | Urusan Pemerintahan | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Tersedianya sarana pelayanan administrasi perkantoran (bulan) | 7 | 01 | 01 | 2.03 | | | KECAMATAN | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Administrasi Umum | | Terfasilitasinya pelayanan administrasi umum (bulan) |
| 3 | URUSAN PENUNJANG | Urusan Pemerintahan | Penyediaan jasa surat menyurat | Jumlah Jasa Surat menyurat yang disediakan (bulan) | 7 | 01 | 01 | 2.03 | 01 | | KECAMATAN | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Administrasi Umum | Penyediaan jasa surat menyurat | Jumlah Jasa Surat menyurat yang disediakan (bulan) |
| 4 | URUSAN PENUNJANG | Urusan Pemerintahan | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan (bulan) | 7 | 01 | 01 | 2.03 | 02 | | KECAMATAN | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Administrasi Umum | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan (bulan) |
| 5 | URUSAN PENUNJANG | Urusan Pemerintahan | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | Jumlah jasa administrasi keuangan yang disediakan (bulan) | 7 | 01 | 01 | 2.03 | 07 | | KECAMATAN | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Administrasi Umum | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | Jumlah jasa administrasi keuangan yang disediakan (bulan) |

| PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA | | | | | PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 | | | | | | | | | |
|---|------------------|---------------------|--|--|---------------------------|----|----|------|----|---------------|--|-----------------------|--|--|
| NO | URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM/KEGIATAN | Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output) | KODE | | | | | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 6 | URUSAN PENUNJANG | Urusan Pemerintahan | Penyediaan jasa kebersihan kantor | Jumlah Alat Kebersihan Kantor yang disediakan (bulan) | 7 | 01 | 01 | 2.03 | 08 | KECAMATAN | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Administrasi Umum | Penyediaan jasa kebersihan kantor | Jumlah Alat Kebersihan Kantor yang disediakan (bulan) |
| | URUSAN PENUNJANG | Urusan Pemerintahan | Penyediaan alat tulis kantor | Jumlah Alat tulis kantor yang disediakan (bulan) | 7 | 01 | 01 | 2.03 | 10 | KECAMATAN | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Administrasi Umum | Penyediaan alat tulis kantor | Jumlah Alat tulis kantor yang disediakan (bulan) |
| | URUSAN PENUNJANG | Urusan Pemerintahan | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Jumlah Barang cetak dan penggandaan yang disediakan (bulan) | 7 | 01 | 01 | 2.03 | 11 | KECAMATAN | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Administrasi Umum | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Jumlah Barang cetak dan penggandaan yang disediakan (bulan) |
| | URUSAN PENUNJANG | Urusan Pemerintahan | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | Jumlah Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yg disediakan (bulan) | 7 | 01 | 01 | 2.03 | 12 | KECAMATAN | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Administrasi Umum | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | Jumlah Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yg disediakan (bulan) |
| | URUSAN PENUNJANG | Urusan Pemerintahan | Penyediaan makanan dan minuman | Jumlah Makanan dan Minuman yang disediakan (bulan) | 7 | 01 | 01 | 2.03 | 17 | KECAMATAN | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Administrasi Umum | Penyediaan makanan dan minuman | Jumlah Makanan dan Minuman yang disediakan (bulan) |
| | URUSAN PENUNJANG | Urusan Pemerintahan | Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah | Jumlah Rapat koordinasi & konsultasi keluar daerah yang difasilitasi (bulan) | 7 | 01 | 01 | 2.03 | 18 | KECAMATAN | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Administrasi Umum | Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah | Jumlah Rapat koordinasi & konsultasi keluar daerah yang difasilitasi (bulan) |
| | URUSAN PENUNJANG | Urusan Pemerintahan | Penyediaan Jasa Pelayanan Pegawai Non PNS | Jumlah pelayanan pegawai non PNS yang disediakan (bulan) | 7 | 01 | 01 | 2.02 | | KECAMATAN | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Administrasi Keuangan | | Terfasilitasinya pelayanan administrasi keuangan (orang/bulan) |
| | | | | | 7 | 01 | 01 | 2.02 | 01 | KECAMATAN | PROGRAM PENUNJANG URUSAN | Administrasi Keuangan | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah pelayanan pegawai non PNS yang disediakan (orang) |

| PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA | | | | | PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 | | | | | | | | | |
|---|------------------|---------------------|---|--|---------------------------|----|----|------|----|---------------|--|---|--|--|
| NO | URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM/KEGIATAN | Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output) | KODE | | | | | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | | | | | | | | | PEMERINTAHAN DAERAH | | | |
| | URUSAN PENUNJANG | Urusan Pemerintahan | Penyediaan Dokumentasi dan Dekorasi | Jumlah Dokumentasi dan Dekorasi yang disediakan (bulan) | 7 | 01 | 01 | 2.03 | 13 | KECAMATAN | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Administrasi Umum | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Dokumentasi dan Dekorasi yang disediakan (bulan) |
| | URUSAN PENUNJANG | Urusan Pemerintahan | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (bulan) | | | | | | | | | | |
| | URUSAN PENUNJANG | Urusan Pemerintahan | Pengadaan peralatan gedung kantor | Jumlah Peralatan gedung kantor yg diadakan (jenis) | 7 | 01 | 01 | 2.03 | 24 | KECAMATAN | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Administrasi Umum | Pengadaan peralatan gedung kantor | Jumlah Peralatan gedung kantor yg diadakan (jenis) |
| | URUSAN PENUNJANG | Urusan Pemerintahan | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | Jumlah kendaraan dinas yg dipelihara (bulan) | 7 | 01 | 01 | 2.03 | 30 | KECAMATAN | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Administrasi Umum | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | Jumlah kendaraan dinas yg dipelihara (bulan) |
| | URUSAN PENUNJANG | Urusan Pemerintahan | Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor | Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang dipelihara (bulan) | 7 | 01 | 01 | 2.03 | 34 | KECAMATAN | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Administrasi Umum | Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor | Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang dipelihara (bulan) |
| | URUSAN PENUNJANG | Urusan Pemerintahan | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (PD) | Persentase Aparatur yang meningkat SDMya (%) | 7 | 01 | 01 | 2.04 | | KECAMATAN | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | | - Persentase aparatur yang meningkat SDMya (%) - Persentase ASN berpakaian dinas dengan atribut lengkap (%) |
| | URUSAN PENUNJANG | Urusan Pemerintahan | Pendidikan dan pelatihan formal | Jumlah pendidikan dan latihan formal | 7 | 01 | 01 | 2.04 | 09 | KECAMATAN | PROGRAM PENUNJANG URUSAN | Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Aparatur | Pendidikan dan pelatihan formal | Jumlah pendidikan dan latihan formal yang diikuti (orang) |

| PERMENDAGRI 13/RPJM/RENSTRA/RKPD/RENJA | | | | | PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 | | | | | | | | | |
|--|------------------|---------------------|---|--|---------------------------|----|----|------|---------------|-----------|---|---|---|---|
| NO | URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM/KEGIATAN | Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output) | KODE | | | | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| | | | | yang diikuti (orang) | | | | | | | | | | |
| | URUSAN PENUNJANG | Urusan Pemerintahan | Program Penyiapan potensi sumberdaya, sarana dan prasarana daerah | Persentase Pelayanan Terpadu Kecamatan yang dilaksanakan (%) | 7 | 01 | 02 | | | KECAMATAN | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | | | Meningkatnya Pengetahuan aparat desa/kelurahan dlm mengelola pelayanan administrasi (%) |
| | | | | | | | | | | | | | | Persentase pembinaan agama yang terselenggara (%) |
| | | | | | | | | | | | | | | Persentase Kegiatan Operasional Kecamatan yang dilaksanakan (%) |
| | | | | | | | | | | | | | | Persentase pelayanan administrasi terpadu kecamatan yang dilaksanakan (%) |
| | | | | | | | | | | | | | | Persentase jaringan informasi publik di kecamatan yang dioptimalisasi (%) |
| | URUSAN PENUNJANG | Urusan Pemerintahan | Program Penyiapan potensi sumberdaya, sarana dan prasarana daerah | Persentase Pelayanan Terpadu Kecamatan yang dilaksanakan (%) | 7 | 01 | 02 | 2.04 | | KECAMATAN | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | | Pelimpahan Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan di Kecamatan (kegiatan) |
| | URUSAN PENUNJANG | Urusan Pemerintahan | Fasilitasi Pelayanan dan perizinan dan non perizinan | Jumlah Pelayanan perizinan dan non perizinan yang difasilitasi (bulan) | 7 | 01 | 02 | 2.04 | 01 | KECAMATAN | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan | Jumlah Pelayanan perizinan yang difasilitasi (bulan) |
| | URUSAN PENUNJANG | Urusan Pemerintahan | Program Operasional Kecamatan | Persentase Operasional Kecamatan yang dilaksanakan (%) | 7 | 01 | 02 | 2.01 | | KECAMATAN | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | Terfasilitasinya kegiatan pemerintahan di Tingkat Kecamatan (bulan) |

| PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA | | | | | PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 | | | | | | | | | |
|---|------------------|---------------------|--|--|---------------------------|----|----|------|----|---------------|---|---|---|--|
| NO | URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM/KEGIATAN | Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output) | KODE | | | | | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | URUSAN PENUNJANG | Urusan Pemerintahan | Fasilitasi Rapat Koordinasi Bulanan Kecamatan | Jumlah rapat koordinasi Bulanan yang dilaksanakan | 7 | 01 | 02 | 2.01 | 01 | KECAMATAN | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Koordinasi /Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | Jumlah rapat koordinasi Bulanan yang dilaksanakan |
| | URUSAN PENUNJANG | Urusan Pemerintahan | Penilaian Desa/Kelurahan Berprestasi Tingkat Kecamatan | Jumlah Desa yang dinilai | 7 | 01 | 06 | | | KECAMATAN | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | | | Terselenggaranya pemerintahan desa dengan baik (%) |
| | | | | | 7 | 01 | 06 | 2.01 | | KECAMATAN | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | | Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang dilaksanakan (bulan) |
| | | | | | 7 | 01 | 06 | 2.01 | 02 | KECAMATAN | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa | Jumlah Desa yang dinilai (desa) |
| | URUSAN PENUNJANG | Urusan Pemerintahan | Pembinaan dan Monitoring KANTIBMAS | Jumlah monitoring dan pembinaan yang dilaksanakan (kali) | 7 | 01 | 04 | | | KECAMATAN | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | | | Persentase Desa/Kel yang memiliki wawasan kebangsaan (%) |
| | | | | | | | | | | | | | | Persentase Gangguan Keamanan yang ditangani secara terpadu |

| PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA | | | | | PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 | | | | | | | | | |
|---|------------------|---------------------|--|--|---------------------------|----|----|------|---------------|-----------|--|--|--|--|
| NO | URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM/KEGIATAN | Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output) | KODE | | | | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| | | | | Jumlah anggota Linmas yang dibina (orang) | 7 | 01 | 04 | 2.01 | | KECAMATAN | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum | | Terselenggaranya pembinaan ketentraman dan ketertiban umum bagi aparat satuan perlindungan masyarakat (kegiatan) |
| | | | | | 7 | 01 | 04 | 2.01 | 01 | KECAMATAN | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatannya | Jumlah Linmas yang dibina (orang) |
| | URUSAN PENUNJANG | Urusan Pemerintahan | Penunjang Operasional Kegiatan Pembangunan Kota di Kecamatan | Jumlah kegiatan Kota di Kecamatan yang difasilitasi (kegiatan) | 7 | 01 | 03 | | | KECAMATAN | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | | | Presentase Lembaga Kemasyarakatan yang aktif (%) |
| | | | | | | | | | | | | | | Presentase PKK yang aktif (%) |
| | | | | | | | | | | | | | | Jumlah kawasan kegiatan infrastruktur lingkungan kelurahan yang dipelihara (kawasan) |
| | | | | | | | | | | | | | | Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) |
| | | | | | 7 | 01 | 03 | 2.01 | | KECAMATAN | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | | Jumlah kegiatan pemberdayaan desa yang difasilitasi (kegiatan) |

| PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA | | | | | PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 | | | | | | | | | |
|---|------------------|---------------------|-------------------------------------|--|---------------------------|----|----|------|----|---------------|---|---|---|--|
| NO | URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM/KEGIATAN | Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output) | KODE | | | | | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | | | 7 | 01 | 03 | 2.01 | 03 | KECAMATAN | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Jumlah kegiatan Kota di Kecamatan yang difasilitasi (kegiatan) |
| | URUSAN PENUNJANG | Urusan Pemerintahan | Musrenbang Kecamatan | Jumlah peserta yang mengikuti Musrenbang Kecamatan (orang) | 7 | 01 | 02 | 2.01 | 01 | KECAMATAN | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Koordinasi /Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | Jumlah peserta yang mengikuti Musrenbang Kecamatan (orang) |
| | URUSAN PENUNJANG | Urusan Pemerintahan | Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa | Jumlah desa yang melakukan pemilihan (desa) | 7 | 01 | 06 | 2.01 | 06 | KECAMATAN | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa | Jumlah desa yang melakukan pemilihan (desa) |
| | URUSAN PENUNJANG | Urusan Pemerintahan | Penyusunan Dokumen Profil Kecamatan | Jumlah dokumen yang disusun (dokumen) | 7 | 01 | 02 | 2.01 | 01 | KECAMATAN | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Koordinasi /Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | Jumlah dokumen yang disusun (dokumen) |

| PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA | | | | | PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 | | | | | | | | | |
|---|------------------|---------------------|--|--|---------------------------|----|----|------|----|---------------|---|---|--|---|
| NO | URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM/KEGIATAN | Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output) | KODE | | | | | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | URUSAN PENUNJANG | Urusan Pemerintahan | Evaluasi dan Monitoring Pelaksanaan APBDes | Kegiatan infrastruktur desa yang dimonev (desa) | 7 | 01 | 06 | 2.01 | 03 | KECAMATAN | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa | Kegiatan infrastruktur desa yang dimonev (desa) |
| | URUSAN PENUNJANG | Urusan Pemerintahan | Fasilitasi Olahraga Kecamatan | Jumlah Cabang Olah raga yang di Fasilitasi (Cabang) | 7 | 01 | 05 | | | KECAMATAN | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | | | TERSELENGGARANYA URUSAN PEMERINTAHAN UMUM DENGAN BAIK (%) |
| | | | | | 7 | 01 | 05 | 2.01 | | KECAMATAN | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum | | Terselenggaranya pembinaan ketentraman dan ketertiban umum bagi Aparat Perlindungan Masyarakat (kegiatan) |
| | | | | | 7 | 01 | 05 | 2.01 | 03 | KECAMATAN | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum | Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa | Jumlah Cabang Olah raga yang di Fasilitasi (Cabang) |
| | URUSAN PENUNJANG | Urusan Pemerintahan | Program Pembinaan Keagamaan | Persentase Pembinaan Agama yang terselenggara (%) | | | | | | | | | | |
| | URUSAN PENUNJANG | Urusan Pemerintahan | Pelaksanaan MTQ Kecamatan dan Tingkat Kota | Jumlah Cabang Lomba yang diadakan (cabang) | 7 | 01 | 02 | 2.01 | 02 | KECAMATAN | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Jumlah Cabang Lomba yang diadakan (cabang) |
| | | | | Jumlah Peserta yang mengikuti MTQ Kecamatan (peserta) | | | | | | | | | | Jumlah Kafilah yang mengikuti MTQ Tk. Kota |
| | | | | Jumlah Kafilah yang mengikuti MTQ Tk. Kota | | | | | | | | | | |

| PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA | | | | | PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 | | | | | | | | | |
|---|------------------|---------------------|---|--|---------------------------|----|----|------|----|---------------|---|---|---|--|
| NO | URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM/KEGIATAN | Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output) | KODE | | | | | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | URUSAN PENUNJANG | Urusan Pemerintahan | Fasilitasi kegiatan keagamaan Tingkat Kecamatan | Jumlah kegiatan keagamaan yang difasilitasi (kegiatan) | 7 | 01 | 02 | 2.01 | 02 | KECAMATAN | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Jumlah kegiatan keagamaan yang difasilitasi (kegiatan) |
| | URUSAN PENUNJANG | Urusan Pemerintahan | Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan | Persentase Desa/Kel yang memiliki wawasan kebangsaan (%) | | | | | | | | | | |
| | URUSAN PENUNJANG | Urusan Pemerintahan | Peringatan Hari Besar Nasional | Jumlah Hari-Hari Besar Yang Diperingati (jenis) | 7 | 01 | 05 | 2.01 | 01 | KECAMATAN | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan sesuai Penugasan Kepala Daerah | Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | Jumlah Hari-Hari Besar Yang Diperingati (jenis) |
| | URUSAN PENUNJANG | Urusan Pemerintahan | Program Peningkatan Peran Perempuan di Desa/Kelurahan | Presentase PKK yang aktif (%) | | | | | | | | | | |

| PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA | | | | | PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 | | | | | | | | | |
|---|------------------|---------------------|---|--|---------------------------|----|----|------|----|---------------|--|---------------------------------------|---|---|
| NO | URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM/KEGIATAN | Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output) | KODE | | | | | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | URUSAN PENUNJANG | Urusan Pemerintahan | Fasilitasi Operasional TP. PKK | Jumlah Operasional TP. PKK yang difasilitasi (bulan) | 7 | 01 | 03 | 2.01 | 03 | KECAMATAN | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Jumlah Operasional TP. PKK yang difasilitasi (bulan) |
| | URUSAN PENUNJANG | Urusan Pemerintahan | Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan | Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang aktif (%) | | | | | | | | | | |
| | URUSAN PENUNJANG | Urusan Pemerintahan | Operasional, Monitoring dan Evaluasi Kinerja LPM | Jumlah LPM yang difasilitasi dan dimonev (buah) | 7 | 01 | 03 | 2.01 | 03 | KECAMATAN | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Jumlah LPM yang difasilitasi dan dimonev (buah) |

KECAMATAN TALAWI

| PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA | | | | | PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 | | | | | | | | | |
|---|------------------|---------------------|--|--|---------------------------|----|----|------|---------------|-----------|--|-------------------|--|--|
| NO | URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM/KEGIATAN | Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output) | KODE | | | | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 1 | Urusan Penunjang | Urusan Pemerintahan | Program Pelayanan Administrasi | Persentase pelayanan administrasi perkantoran yang terlaksana (%) | 7 | 01 | 01 | | | Kecamatan | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | Tersedianya sarana pelayanan Administrasi Perkantoran (%) |
| | | | | | | | | | | | | | | Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur |
| | | | | | | | | | | | | | | Persentase Aparatur yang meningkat SDM nya |
| | | | | | | | | | | | | | | Persentase ASN Berpakaian Dinas dengan Atribut Lengkap |
| | | | | | | | | | | | | | | Terwujudnya Pembinaan dan Pengembangan Aparatur |
| 2 | Urusan Penunjang | Urusan Pemerintahan | Program Pelayanan Administrasi | Persentase pelayanan administrasi perkantoran yang terlaksana (%) | 7 | 01 | 01 | 2.03 | | Kecamatan | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Administrasi Umum | | Tersedianya sarana pelayanan administrasi perkantoran (%) |
| 3 | Urusan Penunjang | Urusan Pemerintahan | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah tersedianya jasa surat menyurat (bulan) | 7 | 01 | 01 | 2.03 | 01 | Kecamatan | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Administrasi Umum | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah materai yang disediakan (bulan) |
| 4 | Urusan Penunjang | Urusan Pemerintahan | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya, air dan Listrik | Ketersediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya, air dan Listrik (bulan) | 7 | 01 | 01 | 2.03 | 02 | Kecamatan | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Administrasi Umum | Ketersediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya, air dan Listrik | Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik yang dibayarkan (bulan) |
| 5 | Urusan Penunjang | Urusan Pemerintahan | Penatausahaan keuangan dan barang | Jumlah penatausahaan keuangan yang disediakan (bulan) | 7 | 01 | 01 | 2.03 | 07 | Kecamatan | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Administrasi Umum | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan dan Barang | Jumlah Jasa administrasi keuangan yang disediakan (bulan) |

| PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA | | | | | PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 | | | | | | | | | |
|---|------------------|---------------------|---|--|---------------------------|----|----|------|----|---------------|--|-------------------|--|---|
| NO | URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM/KEGIATAN | Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output) | KODE | | | | | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 6 | Urusan Penunjang | Urusan Pemerintahan | Penyediaan alat Kebersihan Kantor | Jumlah alat kebersihan kantor yang disediakan(bulan) | 7 | 01 | 01 | 2.03 | 08 | Kecamatan | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Administrasi Umum | Penyediaan alat Kebersihan Kantor | Jumlah alat kebersihan kantor yang disediakan (bulan) |
| 7 | Urusan Penunjang | Urusan Pemerintahan | Penyediaan Alat Tulis Kantor | Jumlah ATK yang disediakan (bulan) | 7 | 01 | 01 | 2.03 | 10 | Kecamatan | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Administrasi Umum | Penyediaan Alat Tulis Kantor | Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (bulan) |
| 8 | Urusan Penunjang | Urusan Pemerintahan | Penyediaan Barang cetakan dan Penggandaan | Jumlah Barang cetakan yang disediakan (bulan) | 7 | 01 | 01 | 2.03 | 11 | Kecamatan | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Administrasi Umum | Penyediaan Barang cetakan dan Penggandaan | Jumlah barang cetak dan penggandaan yang disediakan (bulan) |
| 9 | Urusan Penunjang | Urusan Pemerintahan | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik dan penerangan Kantor | Jumlah Komponen instalasi listrik yang disediakan (bulan) | 7 | 01 | 01 | 2.03 | 12 | Kecamatan | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Administrasi Umum | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yg disediakan (bulan) |
| 16 | Urusan Penunjang | Urusan Pemerintahan | Penyediaan Dokumentasi dan Dekorasi | Jumlah dokumentasi dan dekorasi yang disediakan (jenis) | 7 | 01 | 01 | 2.03 | 13 | Kecamatan | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Administrasi Umum | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah dokumentasi dan dekorasi yang disediakan (bulan) |
| 10 | Urusan Penunjang | Urusan Pemerintahan | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Perundang-undangan | Jumlah bahan bacaan dan undangan yang disediakan (jenis) | 7 | 01 | 01 | 2.03 | 15 | Kecamatan | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Administrasi Umum | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Perundang-undangan | Jumlah bahan bacaan dan per UU disediakan (jenis) |
| 11 | Urusan Penunjang | Urusan Pemerintahan | Penyediaan makanan dan minuman | Jumlah makanan dan minuman yang tersedia (bulan) | 7 | 01 | 01 | 2.03 | 17 | Kecamatan | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Administrasi Umum | Penyediaan makanan dan minuman | Jumlah makanan dan minuman yang disedia (bulan) |
| 12 | Urusan Penunjang | Urusan Pemerintahan | Rapat-rapat koordinasi ke luar daerah | jumlahrapat koordinasi dan konsultasi yang diikuti (bulan) | 7 | 01 | 01 | 2.03 | 18 | Kecamatan | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Administrasi Umum | Rapat-rapat koordinasi ke luar daerah | Jumlah kunjungan studi banding, rapat dan konsultasi (sosialisasi) yang diikuti (bulan) |

| PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA | | | | | PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 | | | | | | | | | |
|---|------------------|---------------------|--|---|---------------------------|----|----|------|---------------|-----------|--|-----------------------|--|--|
| NO | URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM/KEGIATAN | Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output) | KODE | | | | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 13 | Urusan Penunjang | Urusan Pemerintahan | Penyediaan Jasa Pelayanan pegawai Non PNS | Jumlah ketersediaan jasa Pegawai Non PNS (Orang) | 7 | 01 | 01 | | | Kecamatan | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | Tersedianya sarana pelayanan administrasi perkantoran (%) |
| 14 | Urusan Penunjang | Urusan Pemerintahan | Penyediaan Jasa Pelayanan pegawai Non PNS | Jumlah ketersediaan jasa Pegawai Non PNS (Orang) | 7 | 01 | 01 | 2,02 | | Kecamatan | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Administrasi Keuangan | | Terfasilitasinya pelayanan administrasi keuangan (orang/ bulan) |
| 15 | Urusan Penunjang | Urusan Pemerintahan | Penyediaan Jasa Pelayanan pegawai Non PNS | Jumlah ketersediaan jasa Pegawai Non PNS (Orang) | 7 | 01 | 01 | 2,02 | 01 | Kecamatan | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Administrasi Keuangan | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah pegawai non PNS yang difasilitasi (orang) |
| 17 | Urusan Penunjang | Urusan Pemerintahan | Pengadaan Peralatan gedung kantor | Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan (unit) | 7 | 01 | 01 | 2.03 | 24 | Kecamatan | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Administrasi Umum | Pengadaan Peralatan gedung kantor | Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan (unit) |
| 18 | Urusan Penunjang | Urusan Pemerintahan | Pemeliharaan Rutin/berkala gedung kantor | Jumlah Gedung yang dipelihara (unit) | 7 | 01 | 01 | 2.03 | 28 | Kecamatan | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Administrasi Umum | Pemeliharaan Rutin/berkala gedung kantor | Jumlah gedung kantor yang dipelihara (unit) |
| 19 | Urusan Penunjang | Urusan Pemerintahan | Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional | Jumlah Kendaraan Dinas roda 4 dan 2 yang dipelihara (Bulan) | 7 | 01 | 01 | 2.03 | 30 | Kecamatan | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Administrasi Umum | Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional | Jumlah kendaraan dinas roda 4 dan roda 2 yang dipelihara (bulan) |
| 20 | Urusan Penunjang | Urusan Pemerintahan | Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor | Jumlah Peralatan gedung kantor yang dipelihara (bulan) | 7 | 01 | 01 | 2.03 | 34 | Kecamatan | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Administrasi Umum | Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor | Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara (bulan) |
| 20 | Urusan Penunjang | Urusan Pemerintahan | Pemeliharaan rutin/berkala mebeulier | Jumlah mebeulier yang dipelihara (bulan) | 7 | 01 | 01 | 2.03 | 35 | Kecamatan | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Administrasi Umum | Pemeliharaan rutin/berkala mebeulier | Jumlah mebeulier yang dipelihara (bulan) |

| PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA | | | | | PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 | | | | | | | | | |
|---|------------------|---------------------|--|--|---------------------------|----|----|------|---------------|-----------|---|--|---|--|
| NO | URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM/KEGIATAN | Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output) | KODE | | | | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 21 | Urusan Penunjang | Urusan Pemerintahan | Program Peningkatan Disiplin Aparatur | Persentase peningkatan disiplin aparatur (%) | 7 | 01 | 01 | 2.04 | | Kecamatan | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | | - Persentase aparatur yang meningkat SDM nya (%) - Persentase ASN berpakaian dinas dengan atribut lengkap (%) |
| 22 | Urusan Penunjang | Urusan Pemerintahan | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta kelengkapannya | Jumlah Pakaian Dinas Upacara Camat yang diadakan (paket) | 7 | 01 | 01 | 2.04 | 02 | Kecamatan | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta kelengkapannya | Jumlah pakaian dinas yang diadakan (paket) |
| 23 | Urusan Penunjang | Urusan Pemerintahan | Pendidikan dan Pelatihan Formal | Jumlah pendidikan dan pelatihan formal yang diikuti (kali) | 7 | 01 | 01 | 2.04 | 09 | Kecamatan | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Pendidikan dan Pelatihan Formal | Jumlah pendidikan dan pelatihan formal yang diikuti (kali) |
| 24 | Urusan Penunjang | Urusan Pemerintahan | Program Operasional Kecamatan | Persentase jumlah koordinasi yang dilakukan (%) | 7 | 01 | 02 | | | Kecamatan | Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik | | | Meningkatnya Pengetahuan aparat desa/keurahan dlm mengelola pelayanan administrasi (%) |
| | | | | | | | | | | | | | | Persentase pembinaan agama yang terselenggara (%) |
| | | | | | | | | | | | | | | Persentase Kegiatan Operasional Kecamatan yang dilaksanakan (%) |
| | | | | | | | | | | | | | | Persentase pelayanan administrasi terpadu kecamatan yang dilaksanakan (%) |
| | | | | | | | | | | | | | | Persentase jaringan informasi publik di kecamatan yang dioptimalisasi (%) |
| 25 | Urusan Penunjang | Urusan Pemerintahan | Program Operasional Kecamatan | Persentase jumlah koordinasi yang dilakukan (%) | 7 | 01 | 02 | 2,01 | | Kecamatan | Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik | Koordinasi Penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan di TK Kecamatan | | Terfasilitasinya kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan (bulan) |

| PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA | | | | | PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 | | | | | | | | | |
|---|------------------|---------------------|--|--|---------------------------|----|----|------|----|---------------|---|--|--|--|
| NO | URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM/KEGIATAN | Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output) | KODE | | | | | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 26 | Urusan Penunjang | Urusan Pemerintahan | Fasilitasi rapat koordinasi bulanan Kecamatan | Jumlah Rakor yang difasilitasi (bulan) | 7 | 01 | 02 | 2,01 | 01 | Kecamatan | Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik | Koordinasi Penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di TK Kecamatan | Koordinasi / Sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi vertikal terkait | Jumlah rapat koordinasi yang dilaksanakan yang difasilitasi kecamatan (kali) |
| 27 | Urusan Penunjang | Urusan Pemerintahan | Musrenbang Kecamatan | Jumlah RPTK yang dihasilkan(dokumen) | 7 | 01 | 02 | 2,01 | 01 | Kecamatan | Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik | Koordinasi Penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di TK Kecamatan | Koordinasi / Sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi vertikal terkait | Jumlah kegiatan Musrenbang Kec. yang dilaksanakan (keg) |
| | Urusan Penunjang | Urusan Pemerintahan | Penyusunan buku profile | Jumlah dokumen profile kecamatan (buku) | 7 | 01 | 02 | 2,01 | 01 | Kecamatan | Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik | Koordinasi Penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di TK Kecamatan | Koordinasi / Sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi vertikal terkait | Jumlah dokumen profile kecamatan (buku) |
| 28 | Urusan Penunjang | Urusan Pemerintahan | Penunjang Operasional Kegiatan Pembangunan Kota di Kecamatan | Jumlah kegiatan Kota di kecamatan yang difasilitasi (kegiatan) :Jumlah UKS, Jambore Kader PKK, Fortasih,Pemantauan SAPRAS Des/Kel, | 7 | 01 | 03 | | | Kecamatan | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa / Kelurahan | | | Presentase Lembaga Kemasyarakatan yang aktif (%) |
| | | | | | | | | | | | | | | Presentase PKK yang aktif (%) |

| PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA | | | | | PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 | | | | | | | | | |
|---|------------------|---------------------|--|--|---------------------------|----|----|------|---------------|-----------|--|---|--|--|
| NO | URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM/KEGIATAN | Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output) | KODE | | | | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| | | | | | | | | | | | | | Jumlah kawasan kegiatan infrastruktur lingkungan kelurahan yang dipelihara (kawasan) | |
| | | | | | | | | | | | | | Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) | |
| 29 | Urusan Penunjang | Urusan Pemerintahan | Penunjang Operasional Kegiatan Pembangunan Kota di Kecamatan | Jumlah kegiatan Kota di kecamatan yang difasilitasi (kegiatan) :Jumlah UKS, Jambore Kader PKK, Fortasih,Pemantauan SAPRAS Des/Kel, | 7 | 01 | 03 | 2.01 | | Kecamatan | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa / Kelurahan | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | | Jumlah kegiatan pemberdayaan desa yang difasilitasi (kegiatan) |
| 30 | Urusan Penunjang | Urusan Pemerintahan | Penunjang Operasional Kegiatan Pembangunan Kota di Kecamatan | Jumlah kegiatan Kota di kecamatan yang difasilitasi (kegiatan) :Jumlah UKS, Jambore Kader PKK, Fortasih,Pemantauan SAPRAS Des/Kel, | 7 | 01 | 03 | 2.01 | 03 | Kecamatan | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa / Kelurahan | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | Peningkatan Efektifitas kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Jumlah operasional DPC LPM yang difasilitasi (bulan) |
| 31 | Urusan Penunjang | Urusan Pemerintahan | Fasilitasi Kegiatan Olahraga Kecamatan | Jumlah cabang Olahraga yang difasilitasi (cabang) | 7 | 01 | 05 | | | Kecamatan | Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | | | Persentase terselenggaranya urusan pemerintahan umum dengan baik (%) |
| 32 | Urusan Penunjang | Urusan Pemerintahan | Fasilitasi Kegiatan Olahraga Kecamatan | Jumlah cabang Olahraga yang difasilitasi (cabang) | 7 | 01 | 05 | 2,01 | | Kecamatan | Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah | | Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan di Kecamatan (kegiatan) |
| 33 | Urusan Penunjang | Urusan Pemerintahan | Fasilitasi Kegiatan Olahraga Kecamatan | Jumlah cabang Olahraga yang difasilitasi (cabang) | 7 | 01 | 05 | 2,01 | 03 | Kecamatan | Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah | Pembinaan Persatuan Dan Kesatuan Bangsa | Jumlah cabang Olahraga yang difasilitasi (cabang) |

| PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA | | | | | PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 | | | | | | | | | |
|---|------------------|---------------------|---|--|---------------------------|----|----|------|---------------|-----------|--|---|--|--|
| NO | URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM/KEGIATAN | Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output) | KODE | | | | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 34 | Urusan Penunjang | Urusan Pemerintahan | Evaluasi dan Monitoring Pelaksanaan Dana Desa | Jumlah Desa yang dievaluasi (desa) | 7 | 01 | 06 | | | Kecamatan | Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | | | Terselenggaranya pemerintahan desa dengan baik (%) |
| 35 | Urusan Penunjang | Urusan Pemerintahan | Evaluasi dan Monitoring Pelaksanaan Dana Desa | Jumlah Desa yang dievaluasi (desa) | 7 | 01 | 06 | 2,01 | | Kecamatan | Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | | Pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang dilaksanakan (bulan) |
| 36 | Urusan Penunjang | Urusan Pemerintahan | Evaluasi dan Monitoring Pelaksanaan Dana Desa | Jumlah Desa yang dievaluasi (desa) | 7 | 01 | 06 | 2,01 | 03 | Kecamatan | Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | Jumlah desa yang dievaluasi (desa) |
| 37 | Urusan Penunjang | Urusan Pemerintahan | Fasilitasi pemilihan kepala desa | Jumlah desa yang dimonitoring pelaksanaan pilkades (desa) | 7 | 01 | 06 | 2,01 | 06 | Kecamatan | Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa | Jumlah desa yang melaksanakan pemilihan kepala desa (desa) |
| | | | | | 7 | 01 | 06 | 2,01 | 06 | Kecamatan | Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | Jumlah Aparatur Desa yang dinilai (Desa) |
| | | | | | 7 | 01 | 06 | 2,01 | 06 | Kecamatan | Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa | Jumlah desa/kelurahan yang dinilai(des/kelurahan) |

| PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA | | | | | PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 | | | | | | | | | |
|---|------------------|---------------------|---|---|---------------------------|----|----|------|---------------|-----------|---|--|--|---|
| NO | URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM/KEGIATAN | Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output) | KODE | | | | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 38 | Urusan Penunjang | Urusan Pemerintahan | Program Pembinaan Keagamaan | Persentase Pembinaan Agama yang Terselenggara (%) | 7 | 01 | 02 | | | Kecamatan | Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik | | | Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik yang terlaksana dengan baik (%) |
| 39 | Urusan Penunjang | Urusan Pemerintahan | Program Pembinaan Keagamaan | Persentase Pembinaan Agama yang Terselenggara (%) | 7 | 01 | 02 | 2,01 | | Kecamatan | Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik | Koordinasi Penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan di TK Kecamatan | | Terfasilitasinya kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan (bulan) |
| 40 | Urusan Penunjang | Urusan Pemerintahan | Pelaksanaan MTQ Kecamatan dan Kota | jumlah cabang yang diikuti dalam MTQ tingkat Kota (cabang) | 7 | 01 | 02 | 2,01 | 02 | Kecamatan | Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik | Koordinasi Penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan di TK Kecamatan | Peningkatan Efektifitas kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Jumlah cabang yang dilaksanakan dalam MTQ Tingkat Kecamatan (cabang) |
| 41 | Urusan Penunjang | Urusan Pemerintahan | Fasilitasi Kegiatan Pondok Al-Qur'an | Jumlah Kegiatan Pondok Al-Qur'an yang diselenggarakan (kali) | 7 | 01 | 02 | 2,01 | 02 | Kecamatan | Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik | Koordinasi Penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan di TK Kecamatan | Peningkatan Efektifitas kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Jumlah kegiatan pondok Al-Qur'an yang diselenggarakan (kali) |
| 42 | Urusan Penunjang | Urusan Pemerintahan | Fasilitasi kegiatan keagamaan Tingkat Kecamatan | Jumlah Mesjid/Mushalla yang dikunjungi dalam Tim Ramadhan Kecamatan (Desa/Kel)) | 7 | 01 | 02 | 2,01 | 02 | Kecamatan | Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik | Koordinasi Penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan di TK Kecamatan | Peningkatan Efektifitas kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Jumlah kegiatan keagamaan yang difasilitasi di Tk. Kecamatan (Kegiatan) |
| | | | | | 7 | 01 | 02 | 2.03 | | Kecamatan | Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik | Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum | Jaringan Website | Terfasilitasinya Jaringan sitem informasi publik pada kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan (buah) |

| PERMENDAGRI 13/RPJM/RENSTRA/RKPD/RENJA | | | | | PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 | | | | | | | | | |
|--|------------------|---|--|--|---------------------------|----|----|------|----|---------------|---|--|---|--|
| NO | URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM/KEGIATAN | Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output) | KODE | | | | | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | | | 7 | 01 | 02 | 2.03 | 02 | Kecamatan | Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik | Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum Yang Melibatkan Pihak Swasta | Jaringan Website | Jumlah jaringan sistem informasi publik kecamatan yang dibuat/website kecamatan (buah) |
| 43 | Urusan Penunjang | Urusan Wajib bukan pelayanan dasar pemberdayaan masyarakat desa | Program Peningkatan Peran Serta dan Kesejahteraan Gender dalam Pembangunan | Persentase Jumlah program pokok PKK yang terlaksana (%) | 7 | 01 | 03 | | | Kecamatan | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa / Kelurahan | | | Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif (%) |
| 44 | Urusan Penunjang | Urusan Wajib bukan pelayanan dasar pemberdayaan masyarakat desa | Program Peningkatan Peran Serta dan Kesejahteraan Gender dalam Pembangunan | Persentase Jumlah program pokok PKK yang terlaksana (%) | 7 | 01 | 03 | 2,01 | | Kecamatan | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa / Kelurahan | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | | Jumlah kegiatan pemberdayaan desa yang difasilitasi (kegiatan) |
| 45 | Urusan Penunjang | Urusan Wajib bukan pelayanan dasar pemberdayaan masyarakat desa | Pelaksanaan TP.PKK Kecamatan | Jumlah Program Pokok PKK yang difasilitasi (Program) | 7 | 01 | 03 | 2,01 | 03 | Kecamatan | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa / Kelurahan | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | Peningkatan Efektifitas kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Jumlah Program Pokok PKK yang difasilitasi di (Program) |
| 46 | Urusan Penunjang | Urusan Wajib bukan pelayanan dasar pemberdayaan masyarakat desa | Operasional DPC LPM Kecamatan | Jumlah Operasional DPC LPM yang di fasilitasi (bulan) | 7 | 01 | 03 | 2,01 | 03 | Kecamatan | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa / Kelurahan | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | Peningkatan Efektifitas kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Jumlah Operasional DPC LPM yang di fasilitasi (bulan) |
| 47 | Urusan Penunjang | Urusan Wajib bukan pelayanan dasar pemberdayaan masyarakat desa | Peningkatan SDM Aparatur DPC LPM Kecamatan | Jumlah Aparatur DPC LPM Kecamatan yang difasilitasi peningkatan SDMnya (orang) | 7 | 01 | 03 | 2,01 | 03 | Kecamatan | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa / Kelurahan | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | Peningkatan Efektifitas kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Jumlah Kegiatan Pembangunan Kota yang difasilitasi (keg) |

| PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA | | | | | PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 | | | | | | | | | |
|---|------------------|---|---|---|---------------------------|----|----|------|---------------|-----------|---|---|---|--|
| NO | URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM/KEGIATAN | Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output) | KODE | | | | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 48 | Urusan Penunjang | Urusan Pemerintahan | Program Penyiapan potensi Sumberdaya, sarana dan prasarana daerah | Persentase pelayanan administrasi terpadu kecamatan yang dilaksanakan (%) | 7 | 01 | 02 | | | Kecamatan | Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik | | | Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik yang terlaksana dengan baik (%) |
| 49 | Urusan Penunjang | Urusan Pemerintahan | Program Penyiapan potensi Sumberdaya, sarana dan prasarana daerah | Persentase pelayanan administrasi terpadu kecamatan yang dilaksanakan (%) | 7 | 01 | 02 | 2,04 | | Kecamatan | Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat | | Pelimpahan urusan pemerintahan yang dilaksanakan di kecamatan (kegiatan) |
| 50 | Urusan Penunjang | Urusan Pemerintahan | Fasilitasi Pelayanan dan perizinan dan non perizinan | Jumlah pelayanan perizinan dan non perizinan yang difasilitasi (bulan) | 7 | 01 | 02 | 2,04 | 01 | Kecamatan | Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan | Jumlah Pelayanan Perizinan yang dilaksanakan (bulan) |
| 61 | Urusan Penunjang | Urusan Wajib Pelayanan Dasar Ketentraman dan ketertiban Umum Serta Pelindungan Masyarakat | Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan | Persentase jumlah monitoring, evaluasi dan pelaporan (%) | 7 | 01 | 04 | | | Kecamatan | Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum | | | Persentase Desa/Kel yang memiliki wawasan kebangsaan (%) |
| | | | | | | | | | | | | | | Persentase Gangguan Keamanan yang ditangani secara terpadu |
| 62 | Urusan Penunjang | Urusan Wajib Pelayanan Dasar Ketentraman dan ketertiban Umum Serta Pelindungan Masyarakat | Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan | Persentase jumlah monitoring, evaluasi dan pelaporan (%) | 7 | 01 | 04 | 2,01 | | Kecamatan | Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum | Koordinasi upaya penyelenggaraan dan Ketertiban Umum | | Terselenggaranya pembinaan ketentraman dan ketertiban umum bagi aparat satuan perlindungan masyarakat (kegiatan) |

| PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA | | | | | PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 | | | | | | | | | |
|---|------------------|---|---|---|---------------------------|----|----|------|----|---------------|--|---|--|--|
| NO | URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM/KEGIATAN | Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output) | KODE | | | | | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 63 | Urusan Penunjang | Urusan Wajib Pelayanan Dasar Ketentraman dan ketertiban Umum Serta Pelindungan Masyarakat | Pembinaan dan Monitoring KANTIBMAS | Jumlah pembinaan dan Monitoring Kantibmas yang dilakukan (Desa/Kel) | 7 | 01 | 04 | 2,01 | 01 | Kecamatan | Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum | Koordinasi upaya penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi vertikan di wilayah kecamatan | Jumlah Linmas yang dibina (orang) |
| 64 | Urusan Penunjang | Urusan Wajib Pelayanan Dasar Ketentraman dan ketertiban Umum Serta Pelindungan Masyarakat | Program Pengembangan wawasan Kebangsaan | Persentase desa/kel yang memiliki wawasan kebangsaan (%) | 7 | 01 | 05 | | | Kecamatan | Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | | | Persentase terselenggaranya urusan pemerintahan umum dengan baik (%) |
| 65 | Urusan Penunjang | Urusan Wajib Pelayanan Dasar Ketentraman dan ketertiban Umum Serta Pelindungan Masyarakat | Program Pengembangan wawasan Kebangsaan | Persentase desa/kel yang memiliki wawasan kebangsaan (%) | 7 | 01 | 05 | 2,01 | | Kecamatan | Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah | | Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan di Kecamatan (kegiatan) |
| 66 | Urusan Penunjang | Urusan Wajib Pelayanan Dasar Ketentraman dan ketertiban Umum Serta Pelindungan Masyarakat | Peringatan hari-hari Besar Nasional | Jumlah peringatan hari besar Nasional yang dilaksanakan (kegiatan) | 7 | 01 | 05 | 2,01 | 01 | Kecamatan | Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah | Pembinaan Wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengalaman pancasila pelaksanaan UUD Negara RI Tahun 1945 , kelestarian bhineka tunggal ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan negara kesatuan RI | Jumlah hari-hari besar Nasional yang dilaksanakan (kegiatan) |

BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

| PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA | | | | | PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 | | | | | | | | | |
|---|-------------------|-----------------------------|--|--|---------------------------|----|----|------|---------------|--|--|-----------------------|---|--|
| NO | URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM/ KEGIATAN | Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output) | KODE | | | | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| I | Pemerintah Daerah | Kesatuan Bangsa dan Politik | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Administrasi Perkantoran berjalan lancar dan tertib | 1 | 05 | 01 | | | Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat | Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | Tersedianya sarana pelayanan administrasi perkantoran (%) |
| 1 | Pemerintah Daerah | Kesatuan Bangsa dan Politik | Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jasa surat menyurat yang disediakan (bulan) | 1 | 05 | 01 | 2.03 | | Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat | Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Administrasi Umum | | Terfasilitasinya pelayanan administrasi umum (bulan) |
| 1 | Pemerintah Daerah | Kesatuan Bangsa dan Politik | Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jasa surat menyurat yang disediakan (bulan) | 1 | 05 | 01 | 2.03 | 01 | Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat | Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Administrasi Umum | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Materai yang disediakan (bulan) |
| 2 | Pemerintah Daerah | Kesatuan Bangsa dan Politik | Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan (bulan) | 1 | 05 | 01 | 2.03 | 02 | Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat | Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Administrasi Umum | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang dibayarkan (bulan) |
| 3 | Pemerintah Daerah | Kesatuan Bangsa dan Politik | Kegiatan Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Non PNS | Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Non PNS yang disediakan (bulan) | 1 | 05 | 01 | 2.02 | | Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat | Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Administrasi Keuangan | | Terfasilitasinya pelayanan administrasi keuangan (orang/bulan) |

| PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA | | | | | PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 | | | | | | | | | |
|---|-------------------|-----------------------------|---|---|---------------------------|----|----|------|----|--|--|-----------------------|---|---|
| NO | URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM/ KEGIATAN | Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output) | KODE | | | | | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 3 | Pemerintah Daerah | Kesatuan Bangsa dan Politik | Kegiatan Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Non PNS | Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Non PNS yang disediakan (bulan) | 1 | 05 | 01 | 2.02 | 01 | Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat | Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Administrasi Keuangan | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Pegawai Non PNS yang difasilitasi (orang/Bulan) |
| 4 | Pemerintah Daerah | Kesatuan Bangsa dan Politik | Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | Jasa kebersihan kantor yang disediakan (bulan) | 1 | 05 | 01 | 2.03 | | Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat | Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Administrasi Umum | | Terfasilitasinya pelayanan administrasi umum (bulan) |
| 4 | Pemerintah Daerah | Kesatuan Bangsa dan Politik | Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | Jasa kebersihan kantor yang disediakan (bulan) | 1 | 05 | 01 | 2.03 | 08 | Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat | Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Administrasi Umum | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | Jumlah alat kebersihan kantor yang disediakan (bulan) |
| 5 | Pemerintah Daerah | Kesatuan Bangsa dan Politik | Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor | Alat Tulis Kantor yang disediakan (bulan) | 1 | 05 | 01 | 2.03 | 10 | Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat | Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Administrasi Umum | Penyediaan Alat Tulis Kantor | Jumlah Alat Tulis Kantor yang disediakan (bulan) |
| 6 | Pemerintah Daerah | Kesatuan Bangsa dan Politik | Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Barang cetakan dan penggandaan yang disediakan (bln) | 1 | 05 | 01 | 2.03 | 11 | Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat | Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Administrasi Umum | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah Barang cetakan dan penggandaan yang disediakan (bulan) |

| PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA | | | | | PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 | | | | | | | | | |
|---|-------------------|-----------------------------|---|---|---------------------------|----|----|------|----|--|--|-------------------|--|--|
| NO | URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM/ KEGIATAN | Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output) | KODE | | | | | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 7 | Pemerintah Daerah | Kesatuan Bangsa dan Politik | Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan (bulan) | 1 | 05 | 01 | 2.03 | 12 | Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat | Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Administrasi Umum | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan (bulan) |
| 8 | Pemerintah Daerah | Kesatuan Bangsa dan Politik | Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Bahan Bacaan dan perundang-undangan yang disediakan (Jenis,pkt, bln) | 1 | 05 | 01 | 2.03 | 15 | Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat | Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Administrasi Umum | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Bahan Bacaan dan Per UU disediakan (jenis) |
| 9 | Pemerintah Daerah | Kesatuan Bangsa dan Politik | Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman | Makanan & minuman yang disediakan (bulan) | 1 | 05 | 01 | 2.03 | 17 | Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat | Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Administrasi Umum | Penyediaan Makanan dan Minuman | Jumlah Makanan & minuman yang disediakan (bulan) |
| 10 | Pemerintah Daerah | Kesatuan Bangsa dan Politik | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Bahan logistik yang disediakan (bulan) | 1 | 05 | 01 | 2.03 | 16 | Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat | Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Administrasi Umum | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Bahan logistik yang disediakan (bulan) |
| 11 | Pemerintah Daerah | Kesatuan Bangsa dan Politik | Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi yang difasilitasi (bulan) | 1 | 05 | 01 | 2.03 | 18 | Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat | Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Administrasi Umum | Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi yang diikuti (bulan) |

| PERMENDAGRI 13/RPJM/RENSTRA/RKPD/RENJA | | | | | PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 | | | | | | | | | |
|--|-------------------|-----------------------------|--|---|---------------------------|----|----|------|---------------|--|--|-----------------------|---|--|
| NO | URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM/ KEGIATAN | Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output) | KODE | | | | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 12 | Pemerintah Daerah | Kesatuan Bangsa dan Politik | Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Pegawai Non PNS | Jumlah tenaga Pegawai Non PNS yang difasilitasi (orang) | 1 | 05 | 01 | 2.02 | | Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat | Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Administrasi Keuangan | | Terfasilitasinya pelayanan administrasi keuangan (orang/bulan) |
| 12 | Pemerintah Daerah | Kesatuan Bangsa dan Politik | Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Pegawai Non PNS | Jumlah tenaga Pegawai Non PNS yang difasilitasi (orang) | 1 | 05 | 01 | 2.02 | 01 | Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat | Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Administrasi Keuangan | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Pegawai Non PNS yang difasilitasi (orang/Bulan) |
| 13 | Pemerintah Daerah | Kesatuan Bangsa dan Politik | Kegiatan Penatausahaan Keuangan dan Barang | Penatausahaan keuangan dan barang yang dilaksanakan (bulan) | 1 | 05 | 01 | 2.03 | 07 | Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat | Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Administrasi Umum | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | Jasa Administrasi Keuangan yang Dibayarkan (Bulan) |
| 14 | Pemerintah Daerah | Kesatuan Bangsa dan Politik | Kegiatan Penyediaan Dokumentasi dan Dekorasi | Dokumentasi dan dekorasi yang disediakan (bln) | 1 | 05 | 01 | 2.03 | 24 | Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat | Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Administrasi Umum | Pengadaan Peralatan Gedung Kantor | Jumlah Peralatan Gedung Kantor dan Dokumentasi yang diadakan (jenis) |
| II | Pemerintah Daerah | Kesatuan Bangsa dan Politik | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Sarana dan prasarana aparatur yang disediakan (bulan) | | | | | | | | | | |

| PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA | | | | | PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 | | | | | | | | | |
|---|-------------------|-----------------------------|---|--|---------------------------|----|----|------|---------------|--|--|--|--|--|
| NO | URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM/ KEGIATAN | Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output) | KODE | | | | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 1 | Pemerintah Daerah | Kesatuan Bangsa dan Politik | Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor | Peralatan Gedung Kantor yang diadakan (jenis) | 1 | 05 | 01 | 2.03 | 24 | Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat | Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Administrasi Umum | Pengadaan Peralatan Gedung Kantor | Jumlah Peralatan Gedung Kantor dan Dokumentasi yang diadakan (jenis) |
| 2 | Pemerintah Daerah | Kesatuan Bangsa dan Politik | Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | Gedung Kantor yang dipelihara (bulan) | 1 | 05 | 01 | 2.03 | 28 | Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat | Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Administrasi Umum | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara (Bulan) |
| 3 | Pemerintah Daerah | Kesatuan Bangsa dan Politik | Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | Kendaraan roda empat dan roda dua yang dipelihara (bulan) | 1 | 05 | 01 | 2.03 | 30 | Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat | Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Administrasi Umum | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | Jumlah Kendaraan Dinas roda 4 dan roda 2 yang dipelihara (bulan) |
| 4 | Pemerintah Daerah | Kesatuan Bangsa dan Politik | Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor | Peralatan gedung kantor yang dipelihara (bulan) | 1 | 05 | 01 | 2.03 | 34 | Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat | Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Administrasi Umum | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor | Jumlah Peralatan gedung kantor yang dipelihara (bulan) |
| III | Pemerintah Daerah | Kesatuan Bangsa dan Politik | Program Peningkatan Disiplin Aparatur | Jumlah aparatur yang meningkat kompetensinya (Orang) | 1 | 05 | 01 | 2.04 | | Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat | Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Penigkatan disiplin dan kapasitas sumber daya Aparatur | | Persentase aparatur yang meningkat SDM nya (%) |

| PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA | | | | | PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 | | | | | | | | | |
|---|-------------------|-----------------------------|---|---|---------------------------|----|----|------|---------------|--|--|---|---|--|
| NO | URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM/ KEGIATAN | Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output) | KODE | | | | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| III | Pemerintah Daerah | Kesatuan Bangsa dan Politik | Program Peningkatan Disiplin Aparatur | Jumlah aparatur yang meningkat kompetensinya (Orang) | 1 | 05 | 01 | 2.04 | 05 | Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat | Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Penigkatan disiplin dan kapasitas sumber daya Aparatur | Pengadaan Pakaian khusus hari-hari tertentu | Jumlah Pakaian Dinas yang diadakan (Paket) |
| IV | Pemerintah Daerah | Kesatuan Bangsa dan Politik | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Jumlah aparatur yang meningkat kompetensinya (Orang) | | | | | | | | | | |
| 1 | Pemerintah Daerah | Kesatuan Bangsa dan Politik | Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal | Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal (bulan) | 1 | 05 | 01 | 2.04 | 09 | Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat | Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Kegiatan Penigkatan disiplin dan kapasitas sumber daya Aparatur | Pendidikan dan Pelatihan Formal | Jumlah Pendidikan dan Pelatihan Formal yang diikuti (kali) |
| V | Pemerintah Daerah | Kesatuan Bangsa dan Politik | Program Pengembangan Data/ Informasi/Statistik Daerah | Ketersediaan data bidang Kesbangpol dan PBD (%) | 1 | 05 | 01 | | | Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat | Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi yang disusun (dokumen) |
| 1 | Pemerintah Daerah | Kesatuan Bangsa dan Politik | Program Pengembangan Data/ Informasi/Statistik Daerah | Ketersediaan data bidang Kesbangpol dan PBD (%) | 1 | 05 | 01 | 2.01 | | Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat | Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Penyusunan dokumen evaluasi perangkat daerah | Jumlah Dokumen Data (Dokumen) |

| PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA | | | | | PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 | | | | | | | | | |
|---|-------------------|-----------------------------|---|--|---------------------------|----|----|------|---------------|---|--|---|--|---|
| NO | URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM/ KEGIATAN | Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output) | KODE | | | | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 2 | Pemerintah Daerah | Kesatuan Bangsa dan Politik | Kegiatan Penyusunan Profil Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Penanggulangan Bencana Daerah | jumlah profil BPBD yang disusun (dokumen) | 1 | 05 | 01 | 2.01 | 03 | Urusan Pemerintahan Bidang Ketertarikan dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat | Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Penyusunan dokumen evaluasi perangkat daerah | Jumlah Dokumen Data (Dokumen) |
| VI | Pemerintah Daerah | Kesatuan Bangsa dan Politik | Program Peningkatan Mitigasi Bencana | Persentase Dokumen Mitigasi, SOP, Informasi Pra Bencana | | | | | | | | | | |
| 1 | Pemerintah Daerah | Kesatuan Bangsa dan Politik | Penyusunan Dokumen RPB | Jumlah Dokumen RPB yang disusun | 1 | 05 | 03 | | | Urusan Pemerintahan Bidang Ketertarikan dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat | Program Penanggulangan Bencana | | | Persentase Bencana yang Tertangani (%) |
| 1 | Pemerintah Daerah | Kesatuan Bangsa dan Politik | Penyusunan Dokumen RPB | Jumlah Dokumen RPB yang disusun | 1 | 05 | 03 | 2.02 | | Urusan Pemerintahan Bidang Ketertarikan dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat | Program Penanggulangan Bencana | Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana | | Jumlah Kegiatan pelayanan Pencegahan Dan Kesiapsiagaan Bencana yang Terlaksana (Kegiatan) |
| 1 | Pemerintah Daerah | Kesatuan Bangsa dan Politik | Penyusunan Dokumen RPB | Jumlah Dokumen RPB yang disusun | 1 | 05 | 03 | 2.02 | 01 | Urusan Pemerintahan Bidang Ketertarikan dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat | Program Penanggulangan Bencana | Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana | Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota | Jumlah dokumen RPB yang disusun (Dokumen) |

| PERMENDAGRI 13/RPJM/RENSTRA/RKPD/RENJA | | | | | PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 | | | | | | | | | |
|--|-------------------|-----------------------------|---|---|---------------------------|----|----|------|---------------|--|--------------------------------|---|---|---|
| NO | URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM/ KEGIATAN | Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output) | KODE | | | | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 3 | Pemerintah Daerah | Kesatuan Bangsa dan Politik | Pembuatan Rambu Bencana, leaflet dan Baliho | Jumlah Rambu Bencana ,Leaflet dan baliho yang disediakan | 1 | 05 | 03 | 2.02 | 04 | Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat | Program Penanggulangan Bencana | Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana | Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana | Jumlah peralatan penanggulangan bencana yang disediakan (Jenis) |
| VII | Pemerintah Daerah | Kesatuan Bangsa dan Politik | Program Peningkatan Kesiapsiagaan Bencana | Persentase Bencana yang tertangani sesuai standar | | | | | | | | - | | |
| 1 | Pemerintah Daerah | Kesatuan Bangsa dan Politik | Sosialisasi kebencanaan kepada masyarakat | Jumlah Peserta Sosialisasi Kebencanaan | 1 | 05 | 03 | 2.01 | | Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat | Program Penanggulangan Bencana | Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota | | Jumlah layanan informasi bencana yang diberikan (Kegiatan) |
| 1 | Pemerintah Daerah | Kesatuan Bangsa dan Politik | Sosialisasi kebencanaan kepada masyarakat | Jumlah Peserta Sosialisasi Kebencanaan | 1 | 05 | 03 | 2.01 | 02 | Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat | Program Penanggulangan Bencana | Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota | Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/ Kota (Per Jenis Bencana) | Jumlah Peserta yang Mengikuti Sosialisasi (Orang) |
| 2 | Pemerintah Daerah | Kesatuan Bangsa dan Politik | Sosialisasi Melalui Media Sosial dan Wahana Multi Media | Persentase Jumlah Penduduk Yang Memperoleh Kebencanaan Melalui Penggunaan Media sosial dan wahana | 1 | 05 | 03 | 2.01 | 02 | Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat | Program Penanggulangan Bencana | Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota | Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/ Kota (Per Jenis Bencana) | Jumlah Peserta yang Mengikuti Sosialisasi (Orang) |

| PERMENDAGRI 13/RPJM/RENSTRA/RKPD/RENJA | | | | | PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 | | | | | | | | | |
|--|-------------------|-----------------------------|--|---|---------------------------|----|----|------|----|---|--------------------------------|---|---|---|
| NO | URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM/ KEGIATAN | Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output) | KODE | | | | | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 3 | Pemerintah Daerah | Kesatuan Bangsa dan Politik | Pelatihan Kesiapsiagaan bencana bagi pelajar | Jumlah pelajar yang mengikuti Pelatihan (orang) | 1 | 05 | 03 | 2.01 | 02 | Urusan Pemerintahan Bidang Ketertarikan dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat | Program Penanggulangan Bencana | Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota | Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/ Kota (Per Jenis Bencana) | Jumlah Peserta yang Mengikuti Sosialisasi (Orang) |
| 4 | Pemerintah Daerah | Kesatuan Bangsa dan Politik | Pembentukan Kelompok Siaga Bencana (KSB) | Jumlah KSB dan Anggota yang bertambah | 1 | 05 | 03 | 2.02 | | Urusan Pemerintahan Bidang Ketertarikan dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat | Program Penanggulangan Bencana | Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana | Jumlah Kegiatan pelayanan Pencegahan Dan Kesiapsiagaan Bencana yang Terlaksana (Kegiatan) | |
| 4 | Pemerintah Daerah | Kesatuan Bangsa dan Politik | Pembentukan Kelompok Siaga Bencana (KSB) | Jumlah KSB dan Anggota yang bertambah | 1 | 05 | 03 | 2.02 | 06 | Urusan Pemerintahan Bidang Ketertarikan dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat | Program Penanggulangan Bencana | Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana | Penguatan Kapasitas Kawasan Untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan | Jumlah Peserta Pelatihan KSB (Orang) |
| 7 | Pemerintah Daerah | Kesatuan Bangsa dan Politik | Pelatihan Gabungan Dalam dan Lintas Daerah | Jumlah Personil PB yang mengikuti Pelatihan Dalam dan Lintas Daerah | 1 | 05 | 03 | 2.02 | 02 | Urusan Pemerintahan Bidang Ketertarikan dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat | Program Penanggulangan Bencana | Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana | Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota | Jumlah Pelatihan yang terlaksana (Kegiatan) |
| 8 | Pemerintah Daerah | Kesatuan Bangsa dan Politik | Operasional Penanggulangan dan Emergency Bencana | Jumlah Emergency Bencana yang dilaksanakan | 1 | 05 | 03 | 2.03 | | Urusan Pemerintahan Bidang Ketertarikan dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat | Program Penanggulangan Bencana | Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana | Jumlah Kegiatan Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana yang terlaksana (Kegiatan) | |

| PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA | | | | | PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 | | | | | | | | | |
|---|-------------------|-----------------------------|--|---|---------------------------|----|----|------|----|--|--------------------------------|--|---|--|
| NO | URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM/ KEGIATAN | Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output) | KODE | | | | | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 8 | Pemerintah Daerah | Kesatuan Bangsa dan Politik | Operasional Penanggulangan dan Emergency Bencana | Jumlah Emergency Bencana yang dilaksanakan | 1 | 05 | 03 | 2.03 | 08 | Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat | Program Penanggulangan Bencana | Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana | Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten Kota | Jumlah Kejadian Bencana yang Tertangani (Bulan) |
| | | | | | 1 | 05 | 03 | 2.03 | 02 | Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat | Program Penanggulangan Bencana | Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana | Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota | Jumlah penanganan darurat bencana yang dilakukan (bulan) |
| | | | | | 1 | 05 | 03 | 2.02 | 01 | Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat | Program Penanggulangan Bencana | Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana | Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit atau Wabah Zoonosis Prioritas | Penanganan Tanggap Darurat Bencana (Kasus) |
| VIII | Pemerintah Daerah | Kesatuan Bangsa dan Politik | PROGRAM PENINGKATAN SUMBER DAYA APARATUR PB | Persentase ketersediaan aparatur Kesiapsiagaan Bencana | | | | | | | - | - | | |
| | | | | Persentase Peningkatan Kompetensi Petugas Kesiapsiagaan Bencana | | | | | | | | | | |

| PERMENDAGRI 13/RPJM/RENSTRA/RKPD/RENJA | | | | | PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 | | | | | | | | | |
|--|-------------------|-----------------------------|--|---|---------------------------|----|----|------|---------------|--|--------------------------------|---|--|--|
| NO | URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM/ KEGIATAN | Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output) | KODE | | | | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 1. | Pemerintah Daerah | Kesatuan Bangsa dan Politik | Diklat Peningkatan Kompetensi bagi Personil PB | Jumlah Personil PB yang mengikuti Diklat Kompetensi | 1 | 05 | 03 | 2.02 | | Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat | Program Penanggulangan Bencana | Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana | | Jumlah Kegiatan pelayanan Pencegahan Dan Kesiapsiagaan Bencana yang Terlaksana (Kegiatan) |
| 1. | Pemerintah Daerah | Kesatuan Bangsa dan Politik | Diklat Peningkatan Kompetensi bagi Personil PB | Jumlah Personil PB yang mengikuti Diklat Kompetensi | 1 | 05 | 03 | 2.02 | 08 | Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat | Program Penanggulangan Bencana | Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana | Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota | Jumlah personil TRC yang mengikuti diklat PB (Orang) |
| IX | Pemerintah Daerah | Kesatuan Bangsa dan Politik | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebencanaan | Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Kebencanaan Sesuai Standar | | | | | | | - | - | | |
| 1 | Pemerintah Daerah | Kesatuan Bangsa dan Politik | Pengadaan Peralatan PB (Peralatan,Alat Elektronik ,Mesin dan Alat Ukur) | Jumlah Peralatan PB yang disediakan | 1 | 05 | 03 | 2.02 | 04 | Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat | Program Penanggulangan Bencana | Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana | Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana | Jumlah peralatan penanggulangan bencana yang disediakan (Jenis) |
| 2 | Pemerintah Daerah | Kesatuan Bangsa dan Politik | Pengadaan Logistik untuk korban bencana Dalam Daerah | Jumlah Logistik yang tersedia (jenis) | 1 | 05 | 03 | 2.03 | | Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat | Program Penanggulangan Bencana | Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana | | Jumlah Kegiatan Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana yang terlaksana (Kegiatan) |

| PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA | | | | | PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 | | | | | | | | | |
|---|-------------------|-----------------------------|---|--|---------------------------|----|----|------|----|--|--------------------------------|---|--|---|
| NO | URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM/ KEGIATAN | Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output) | KODE | | | | | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 2 | Pemerintah Daerah | Kesatuan Bangsa dan Politik | Pengadaan Logistik untuk korban bencana Dalam Daerah | Jumlah Logistik yang tersedia (jenis) | 1 | 05 | 03 | 2.03 | 04 | Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat | Program Penanggulangan Bencana | Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana | Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten / Kota | Jumlah logistik yang tersedia (Jenis) |
| ,3 | Pemerintah Daerah | Kesatuan Bangsa dan Politik | Pengadaan Logistik untuk korban bencana Lintas Daerah | Jumlah Logistik yang tersedia (jenis) | 1 | 05 | 03 | 2.03 | 04 | Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat | Program Penanggulangan Bencana | Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana | Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten / Kota | Jumlah logistik yang tersedia (Jenis) |
| 4. | Pemerintah Daerah | Kesatuan Bangsa dan Politik | Pemeliharaan Peralatan Penanggulangan Bencana | Jumlah Alat PB yang dipelihara | 1 | 05 | 03 | 2.02 | | Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat | Program Penanggulangan Bencana | Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana | | Jumlah Kegiatan pelayanan Pencegahan Dan Kesiapsiagaan Bencana yang Terlaksana (Kegiatan) |
| 4. | Pemerintah Daerah | Kesatuan Bangsa dan Politik | Pemeliharaan Peralatan Penanggulangan Bencana | Jumlah Alat PB yang dipelihara | 1 | 05 | 03 | 2.02 | 03 | Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat | Program Penanggulangan Bencana | Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana | Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota | Jumlah alat penanggulangan bencana yang dipelihara (Bulan) |
| X | Pemerintah Daerah | Kesatuan Bangsa dan Politik | PROGRAM PENANGANAN TANGGAP DARURAT | Persentase Kejadian Tanggap Darurat yang tertangani | | | | | | | | | | |

| PERMENDAGRI 13/RPJM/RENSTRA/RKPD/RENJA | | | | | PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 | | | | | | | | | |
|--|-------------------|-----------------------------|--|--|---------------------------|----|----|------|---------------|--|--------------------------------|---|---|--|
| NO | URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM/ KEGIATAN | Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output) | KODE | | | | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 1 | Pemerintah Daerah | Kesatuan Bangsa dan Politik | Penyusunan ProtapTanggap Darurat Bencananan Protap | Jumlah Protap Tanggap Darurat yang disusun | 1 | 05 | 03 | 2.04 | | Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat | Program Penanggulangan Bencana | Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana | | Jumlah Juknis Penanggulangan Bencana (Dokumen) |
| 1 | Pemerintah Daerah | Kesatuan Bangsa dan Politik | Penyusunan ProtapTanggap Darurat Bencananan Protap | Jumlah Protap Tanggap Darurat yang disusun | 1 | 05 | 03 | 2.04 | 01 | Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat | Program Penanggulangan Bencana | Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana | Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten / Kota | Jumlah Dokumen Protap Tanggap Darurat yang disusun (Dokumen) |
| 2 | Pemerintah Daerah | Kesatuan Bangsa dan Politik | Sosialisasi Protap Tanggap Darurat Bencana | Jumlah Peserta Sosialisasi Tanggap Darurat (orang) | 1 | 05 | 03 | 2.01 | | Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat | Program Penanggulangan Bencana | Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota | | Jumlah layanan informasi bencana yang diberikan (Kegiatan) |
| 2 | Pemerintah Daerah | Kesatuan Bangsa dan Politik | Sosialisasi Protap Tanggap Darurat Bencana | Jumlah Peserta Sosialisasi Tanggap Darurat (orang) | 1 | 05 | 03 | 2.01 | 02 | Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat | Program Penanggulangan Bencana | Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota | Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/ Kota (Per Jenis Bencana) | Jumlah Peserta yang Mengikuti Sosialisasi (Orang) |
| 3 | Pemerintah Daerah | Kesatuan Bangsa dan Politik | Bimtek TRC | Jumlah Anggota TRC yang mengikuti Bimtek (orang) | 1 | 05 | 03 | 2.02 | | Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat | Program Penanggulangan Bencana | Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana | | Jumlah Kegiatan pelayanan Pencegahan Dan Kesiapsagaan Bencana yang Terlaksana (Kegiatan) |

| PERMENDAGRI 13/RPJM/RENSTRA/RKPD/RENJA | | | | | PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 | | | | | | | | | |
|--|-------------------|-----------------------------|--|--|---------------------------|----|----|------|----|--|--------------------------------|---|--|---|
| NO | URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM/ KEGIATAN | Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output) | KODE | | | | | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 3 | Pemerintah Daerah | Kesatuan Bangsa dan Politik | Bimtek TRC | Jumlah Anggota TRC yang mengikuti Bimtek (orang) | 1 | 05 | 03 | 2.02 | 08 | Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat | Program Penanggulangan Bencana | Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana | Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota | Jumlah personil TRC yang mengikuti diklat PB (Orang) |
| XI | Pemerintah Daerah | Kesatuan Bangsa dan Politik | PROGRAM PERENCANAAN REHABILITASI PASCA BENCANA | Jumlah Data Infrastruktur, Faskes, Fasos dan Fasum yang rusak Pasca Bencana | | | | | | | | | | |
| | | | | Persentase perencanaan Rehabilitasi Pasca Bencana | | | | | | | - | - | | |
| ,1 | Pemerintah Daerah | Kesatuan Bangsa dan Politik | Inventarisasi, Identifikasi Kerusakan/Kerugian dan Penetapan Prioritas Rehabilitasi serta mobilisasi Sumber Daya Pasca Bencana | Jumlah Laporan Data Kerusakan dan Kerugian Pasca Bencana yang diinventarisir | 1 | 05 | 03 | 2.02 | 07 | Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat | Program Penanggulangan Bencana | Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana | Penanganan Pasca Bencana Kabupaten / Kota | Jumlah Kasus Pasca Bencana Yang Ditangani (Kasus) |
| ,2 | Pemerintah Daerah | Kesatuan Bangsa dan Politik | Pelaksanaan Rehabilitasi, Monitoring, Evaluasi serta Pelaporan Rehabilitasi Pasca Bencana | -Jumlah Rehabilitasi Infrastruktur / fasum / fasos, - Laporan Rehabilitasi Pasca Bencana | 1 | 05 | 03 | 2.02 | 07 | Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat | Program Penanggulangan Bencana | Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana | Penanganan Pasca Bencana Kabupaten / Kota | Jumlah Kasus Pasca Bencana Yang Ditangani (Kasus) |
| XII | Pemerintah Daerah | Kesatuan Bangsa dan Politik | PROGRAM REKONSTRUKSI PASCA BENCANA | Jumlah Infrastruktur, Faskes, Fasos dan Fasum Pasca Bencana yang tertangani | | | | | | | | | | |

| PERMENDAGRI 13/RPJM/RENSTRA/RKPD/RENJA | | | | | PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 | | | | | | | | | |
|--|-------------------|-----------------------------|---|---|---------------------------|----|----|------|----|--|--------------------------------|---|---|---|
| NO | URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM/ KEGIATAN | Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output) | KODE | | | | | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | | Jumlah Korban Bencana yang tertangani Pasca Bencana | | | | | | | | | | |
| 1 | Pemerintah Daerah | Kesatuan Bangsa dan Politik | Perencanaan, Inventarisir dan Identifikasi Kerusakan/Kerugian serta prioritas Pembangunan Pasca Bencana | Jumlah Dokumen Perencanaan Rekonstruksi Pasca Bencana | 1 | 05 | 03 | 2.02 | 07 | Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat | Program Penanggulangan Bencana | Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana | Penanganan Pasca Bencana Kabupaten / Kota | Jumlah Kasus Pasca Bencana Yang Ditangani (Kasus) |
| 2 | Pemerintah Daerah | Kesatuan Bangsa dan Politik | Pelaksanaan Kegiatan Jitu Pasna | Jumlah Dokumen Jitu Pasna | 1 | 05 | 03 | 2.02 | 07 | Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat | Program Penanggulangan Bencana | Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana | Penanganan Pasca Bencana Kabupaten / Kota | Jumlah Kasus Pasca Bencana Yang Ditangani (Kasus) |
| 3 | Pemerintah Daerah | Kesatuan Bangsa dan Politik | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Rekonstruksi Pasca Bencana | Jumlah Laporan Monev Rekonstruksi Pasca Bencana | 1 | 05 | 03 | 2.02 | 07 | Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat | Program Penanggulangan Bencana | Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana | Penanganan Pasca Bencana Kabupaten / Kota | Jumlah Kasus Pasca Bencana Yang Ditangani (Kasus) |
| XIII | Pemerintah Daerah | Kesatuan Bangsa dan Politik | Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan | Persentase Masyarakat yang mendapatkan Sosialisasi Wasbang | | | | | | | - | - | | |
| | | | | Jumlah Pelaksanaan Upacara Bendera dalam peringatan hari-hari besar yang difasilitasi | | | | | | | - | - | | |

| PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA | | | | | PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 | | | | | | | | |
|---|-------------------|-----------------------------|---|--|---------------------------|----|----|------|---------------|-----------------------------|--|--|---|
| NO | URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM/ KEGIATAN | Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output) | KODE | | | | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | | Jumlah Forum - forum strategis di daerah | | | | | | | - | - | |
| 1 | Pemerintah Daerah | Kesatuan Bangsa dan Politik | Kegiatan Pembinaan Karakter dan Peningkatan Bela Negara | Jumlah peserta yang mengikuti pembauran kebangsaan (org) | 8 | 01 | 02 | | | Kesatuan Bangsa dan Politik | Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan | | Presentase Penurunan Angka Kriminalitas di Kota Sawahlunto (%) |
| 1 | Pemerintah Daerah | Kesatuan Bangsa dan Politik | Kegiatan Pembinaan Karakter dan Peningkatan Bela Negara | Jumlah peserta yang mengikuti pembauran kebangsaan (org) | 8 | 01 | 02 | 2.01 | | Kesatuan Bangsa dan Politik | Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan | Perumusan Kegiatan Teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan | Jumlah Kegiatan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan (Kegiatan) |
| 1 | Pemerintah Daerah | Kesatuan Bangsa dan Politik | Kegiatan Pembinaan Karakter dan Peningkatan Bela Negara | Jumlah peserta yang mengikuti pembauran kebangsaan (org) | 8 | 01 | 02 | 2.01 | 01 | Kesatuan Bangsa dan Politik | Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan | Perumusan Kegiatan Teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan | Jumlah Kegiatan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan (Kegiatan) |
| 2 | Pemerintah Daerah | Kesatuan Bangsa dan Politik | Simulasi Cinta Tanah Air dan Bela Negara | Jumlah peserta yang mengikuti simulasi (org) | 8 | 01 | 02 | 2.01 | 01 | Kesatuan Bangsa dan Politik | Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan | Perumusan Kegiatan Teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan | Jumlah Kegiatan Bidang Ideologi Wasbang dan Bela Negara (Kegiatan) |

| PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA | | | | | PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 | | | | | | | | | |
|---|-------------------|-----------------------------|--|---|---------------------------|----|----|------|----|-----------------------------|--|--|--|--|
| NO | URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM/ KEGIATAN | Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output) | KODE | | | | | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 3 | Pemerintah Daerah | Kesatuan Bangsa dan Politik | Penguatan Forum Pembauran Kebangsaan | Jumlah Forum Kebangsaan yang dibentuk | 8 | 01 | 02 | 2.01 | 01 | | | | | |
| | | | | Jumlah Pembinaan Forum (kali) | | | | | | | | | | |
| 4. | Pemerintah Daerah | Kesatuan Bangsa dan Politik | Peringatan Hari Kebangkitan Nasional Setiap Tanggal 20 Mei | Jumlah Peringatan Harkitnas yang difasilitasi (kegiatan) | 8 | 01 | 02 | 2.01 | 01 | Kesatuan Bangsa dan Politik | Program Penguatan Pancasila dan Karakter Kebangsaan | Perumusan Kegiatan Teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan | Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan Bela Negara Karakter Bangsa Pembauran Kebangsaan Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan | Jumlah Kegiatan Bidang Ideologi Wasbang dan Bela Negara (Kegiatan) |
| 5 | Pemerintah Daerah | Kesatuan Bangsa dan Politik | Peringatan Hari Lahir Pancasila Setiap Tanggal 01 Juni | Jumlah Peringatan Hari lahir PancaSila yang difasilitasi (kegiatan) | 8 | 01 | 02 | 2.01 | 01 | Kesatuan Bangsa dan Politik | Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan | Perumusan Kegiatan Teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan | Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan Bela Negara Karakter Bangsa Pembauran Kebangsaan Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan | Jumlah Kegiatan Bidang Ideologi Wasbang dan Bela Negara (Kegiatan) |
| 6 | Pemerintah Daerah | Kesatuan Bangsa dan Politik | Peringatan Hari Kesaktian Pancasila Tanggal 01 Oktober | Jumlah Peringatan Hari Kesaktian PancaSila yang difasilitasi (kegiatan) | 8 | 01 | 02 | 2.01 | 01 | Kesatuan Bangsa dan Politik | Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan | Perumusan Kegiatan Teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan | Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan Bela Negara Karakter Bangsa Pembauran Kebangsaan Bhineka Tunggal | Jumlah Kegiatan Bidang Ideologi Wasbang dan Bela Negara (Kegiatan) |

| PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA | | | | | PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 | | | | | | | | |
|---|-------------------|-----------------------------|---|--|---------------------------|----|----|------|---------------|-----------------------------|--|--|--|
| NO | URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM/ KEGIATAN | Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output) | KODE | | | | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | | | | | | | | | | Ika dan Sejarah Kebangsaan | |
| XIV | Pemerintah Daerah | Kesatuan Bangsa dan Politik | Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan | Persentase Gangguan Keamanan yang ditangani secara terpadu | | | | | | | - | - | |
| 1 | Pemerintah Daerah | Kesatuan Bangsa dan Politik | Fasilitasi keamanan pada hari-hari Besar Pelaksanaan event Daerah, Nasional dan Internasional dan Pergantian Tahun Baru | Pengamanan Event-event yang difasilitasi (bln) | 8 | 01 | 05 | 2.01 | | Kesatuan Bangsa dan Politik | Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya | Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial dan Budaya | Jumlah Kegiatan Pemantapan Bidang Ketahanan Ekonomi Sosial dan Budaya (Kegiatan) |
| 2 | Pemerintah Daerah | Kesatuan Bangsa dan Politik | Fasilitasi keamanan pada hari-hari Besar Pelaksanaan event Daerah, Nasional dan Internasional dan Pergantian Tahun Baru | Pengamanan Event-event yang difasilitasi (bln) | 8 | 01 | 05 | 2.01 | 04 | Kesatuan Bangsa dan Politik | Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya | Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial dan Budaya | Jumlah Rapat Koordinasi Yang Dilaksanakan (Bulan) |

| PERMENDAGRI 13/RPJM/RENSTRA/RKPD/RENJA | | | | | PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 | | | | | | | | | |
|--|-------------------|-----------------------------|--|---|---------------------------|----|----|------|----|-----------------------------|--|--|--|---|
| NO | URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM/ KEGIATAN | Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output) | KODE | | | | | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 3 | Pemerintah Daerah | Kesatuan Bangsa dan Politik | Penyelenggaraan Kewaspadaan Dini di Daerah | Jumlah Rekomendasi Hasil Rapat yang ditindaklanjuti | 8 | 01 | 05 | 2.01 | 04 | Kesatuan Bangsa dan Politik | Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya | Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial dan Budaya | Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | Jumlah Rapat Koordinasi Yang Dilaksanakan (Bulan) |
| 4 | Pemerintah Daerah | Kesatuan Bangsa dan Politik | Fasilitasi Forum Komunikasi Pimpinan Daerah | Jumlah Forkopimda yang difasilitasi (kali) | 8 | 01 | 05 | 2.01 | 04 | Kesatuan Bangsa dan Politik | Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya | Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial dan Budaya | Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | Jumlah Rapat Koordinasi Yang Dilaksanakan (Bulan) |
| XV | Pemerintah Daerah | Kesatuan Bangsa dan Politik | Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat | Persentase masyarakat Yang Memahami Bahaya dan dampak Narkotika (%) | | | | | | | - | - | | |
| 1 | Pemerintah Daerah | Kesatuan Bangsa dan Politik | Penyuluhan Anti Narkoba dalam rangka peringatan Hari Anti Narkoba Indonesia di Kota Sawahlunto | Peserta yang mengikuti Peringatan Hari Anti Narkoba Indonesia (%) | 8 | 01 | 05 | 2.01 | 04 | Kesatuan Bangsa dan Politik | Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya | Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan | Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi | Jumlah Rapat Koordinasi Yang Dilaksanakan (Bulan) |

| PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA | | | | | PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 | | | | | | | | | |
|---|--------|---------------|-------------------|--|---------------------------|--|--|--|--|---------------|---------|---|--|---|
| NO | URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM/ KEGIATAN | Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output) | KODE | | | | | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | | | | | | | | | | Nasional dan Penanganan Konflik Sosial dan Budaya | Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | |



R K P D

KOTA SAWAHLUNTO

TAHUN 2021

BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KOTA SAWAHLUNTO